

LAPORAN TAHUNAN **2020** ANNUAL REPORT



KANTOR PUSAT

Jl. Perak Timur No. 610
Surabaya 60165 - Indonesia

Telp : +62 31 3298631

Layanan Pelanggan :
info@pelindo.co.id

KANTOR PERWAKILAN

Gedung Tamansari Parama Office Lt. 7
Jl. Wahid Hasyim No.84 - 86
Jakarta Pusat - 10340

Telp. +62 21 22346068

www.pelindo.co.id



REACHING FOR GREATER OUTREACH IN CHALLENGING TIMES

Menjangkau Capaian yang Lebih Unggul di Masa Penuh Tantangan

TENTANG LAPORANINI

About This Report

Selamat datang pada Laporan Tahunan 2020 PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dengan tema "Reaching For Greater Outreach In Challenging Times". Tema tersebut dipilih berdasarkan analisis dan kajian yang mendalam berdasarkan fakta dan perkembangan bisnis Perseroan sepanjang tahun 2020 serta masa depan keberlanjutan bisnis Perseroan.

Laporan Tahunan 2020 PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) menjadi sumber dokumentasi komprehensif yang berisikan informasi kinerja Perseroan dalam setahun. Informasi tersebut memuat dokumentasi lengkap yang menggambarkan profil Perseroan; kinerja operasional, pemasaran, dan keuangan; informasi tentang tugas, peran, serta fungsi struktural organisasi perusahaan yang menerapkan konsep *best practices* dan prinsip-prinsip *corporate governance*.

Tujuan utama penyusunan Laporan Tahunan ini adalah untuk meningkatkan keterbukaan informasi Perseroan kepada otoritas terkait serta menjadi buku tahunan yang turut membangun rasa bangga dan solidaritas di antara karyawan. Selain itu, Laporan Tahunan ini juga bertujuan untuk membangun pemahaman dan kepercayaan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya tentang Perseroan, melalui penyediaan informasi yang tepat, seimbang, dan relevan.

Laporan Tahunan ini disajikan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan dicetak dengan kualitas yang baik. Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh di situs web resmi Perseroan yaitu www.pelindo.co.id.

Welcome to the 2020 Annual Report of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) with the theme "Menjangkau Capaian Yang Lebih Unggul Di Masa Penuh Tantangan". The theme was chosen based on an in-depth analysis and review on the Company's business development and fact over the course of 2020 as well as the Company's business continuity in the future.

The 2020 Annual Report of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) becomes a comprehensive source of documentation containing the information on the Company's performance in a year. This information describes in detail the Company's profile; the operational, marketing, and financial performance; as well as the duties, roles, and structural functions of the Company's organization within the framework of the implementation of corporate governance principles and best practices.

The main purpose of preparation of this Annual Report is to enhance the Company's information disclosure to the related authorities and to become an year book that builds pride and solidarity among the Company's employees. In addition, this Annual Report aims to build understanding and trust of all shareholders and stakeholders on the Company through the provision of accurate, balanced, and relevant information.

This Annual Report is presented bilingually, in Indonesian Language and English, using easy-to-read font type and size, and printed with a good quality. This Annual Report can be read at and downloaded from the Company's official website at www.pelindo.co.id.

SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

Disclaimer

Laporan Tahunan ini berisikan pernyataan-pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Perseroan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pengertian perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis.

Pernyataan-pernyataan tersebut bersifat prospektif yang memiliki risiko dan ketidakpastian serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang tertulis dalam pernyataan-pernyataan tersebut. Pernyataan prospektif dalam laporan tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang dari Perseroan serta lingkungan bisnis di mana Perseroan menjalankan kegiatan usaha. Perseroan tidak menjamin bahwa segala tindakan yang telah diambil untuk memastikan keabsahan dokumen ini akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

Laporan ini juga memuat kata "Perseroan", "Perusahaan" atau "Pelindo III" yang didefinisikan sebagai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

This Annual Report contains financial conditions, operation results, projections, plans, strategies, policies, as well as the Company's objectives, classified as forward-looking statements in the implementation of the prevailing laws and regulations, excluding historical matters.

Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks (prospective), uncertainties, and other factors which can cause actual results to differ materially from expected results. Prospective statements in this Annual Report are prepared based on numerous assumptions concerning current conditions and future events of the Company, and the business environment where the Company conducts business. The Company shall have no obligation to guarantee that all valid documents presented will bring specific results as expected.

This annual report contains the words "Company" and "Pelindo III" which hereinafter shall be referred to as PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).



KESINAMBUNGAN TEMA LAPORAN TAHUNAN

Annual Report Theme Continuity

2020

REACHING FOR GREATER OUTREACH IN CHALLENGING TIMES

MENJANGKAU CAPAIAN YANG LEBIH UNGGUL
DI MASA PENUH TANTANGAN

Tahun 2020 menjadi tahun yang menantang bagi banyak pihak, baik pemerintah, pelaku bisnis, hingga masyarakat luas karena adanya Pandemi Covid-19 yang meluas di seluruh dunia. Pandemi ini memberikan dampak negatif dan menyebabkan timbulnya situasi tidak kondusif yang berpengaruh pada keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Berbagai tantangan yang sebelumnya tidak ada, di tahun 2020 dirasakan oleh banyak lapisan. Tantangan-tantangan tersebut mendorong banyak pihak bekerja sama dan beradaptasi serta berupaya mencari jalan keluar dengan menerapkan banyak kebijakan dan kebiasaan baru untuk menghadapi kondisi tersebut.

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Pelindo III) sebagai salah satu entitas bisnis pun tidak luput dari situasi ini. Pandemi memberikan tantangan pada aktivitas operasional Perseroan dan mempengaruhi kegiatan bisnis yang dijalankan Perseroan di bidang jasa kepelabuhanan. Pelindo III pun melakukan berbagai upaya dan memegang komitmennya untuk memastikan keberlangsungan bisnis dapat terus berjalan dan dapat tetap memberikan kinerja terbaik kepada masyarakat yang menggunakan jasa Perseroan, salah satunya melalui adaptasi berbagai kebiasaan baru dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan situasi. Hal ini dilakukan dalam rangka menunjang Perusahaan menjangkau capaian yang lebih unggul dan lebih baik dari berbagai sisi meski situasi bisnis berada di masa penuh tantangan.

Upaya dan komitmen Perseroan untuk menjaga keberlangsungan bisnis dengan menjangkau capaian yang lebih unggul dan lebih baik di tengah kondisi yang ada di masa penuh tantangan menginspirasi pemilihan tema untuk Laporan Tahunan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) bertajuk "Menjangkau Capaian yang Lebih Unggul di Masa Penuh Tantangan".



2020 was a challenging year for many parties, be it the government, business actors, and the wider community due to the Covid-19 Pandemic that has spread throughout the world. The pandemic brought a negative impact and led to an unfavorable situation that affected the sustainability of people's lives.

The unprecedented challenges in 2020 were experienced by many layers. These challenges encouraged many parties to work together and adapt and try to find a way out by implementing many new policies and habits to deal with such conditions.

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Pelindo III) as a business entity did not escape this situation. The pandemic presented challenges to the Company's operational activities and affected the business activities carried out by the Company in the port services sector. Pelindo III also made various efforts and maintained its commitment to ensure business continuity can survive and can continue to provide the best performance to the people who use the Company's services, one of which was by adapting to various new habits and implementing policies that were adapted to the situation. This was done in order to support the Company to achieve excellent and better results from various segments despite the challenging business situation.

The Company's efforts and commitment to maintain business continuity by achieving excellent and better results in the midst of challenging conditions inspired PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)'s Annual Report to carry "Reaching For Greater Outreach In Challenging Times" as its theme.



2019

Memberdayakan Perubahan Menuju Perkembangan

Fostering Change towards Growth



2018

Meraih Keunggulan Melalui Inovasi, Integrasi, Kontribusi

Achieving Excellence through Innovation, Integration, Contribution

Hidup di era yang akrab dengan teknologi yang semakin maju dari tahun ke tahun, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III diharapkan untuk selalu sadar dengan perkembangan saat ini. Dalam mencapai visinya, Perusahaan telah berhasil meningkatkan nilai Perusahaan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa berkualitas tinggi serta memiliki daya saing yang kuat untuk memperoleh laba melalui penerapan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Selain itu, ruang lingkup layanan laut Perusahaan telah diperluas tidak hanya ke lingkup nasional tetapi juga regional atau global.

Pelindo III merupakan Perusahaan Induk yang mengelola 6 Anak Perusahaan, 4 Perusahaan Afiliasi, dan 13 Cucu Perusahaan yang bergerak dalam beragam sektor terkait jasa kepelabuhanan. Sebagai penyedia jasa kepelabuhanan terkemuka di Indonesia, beragam inovasi dan peningkatan pelayanan terus dilakukan Pelindo III demi menekan biaya logistik nasional. Tidak hanya itu, Perusahaan selalu ingin berkembang dengan cara memperbarui diri dengan mengikuti perkembangan saat ini, yaitu menghadirkan berbagai inovasi layanan berbasis teknologi dan informasi demi terciptanya daya saing nasional dan global.

Existing in an era side by side with an ever-improving technology over the years, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) or Pelindo III is expected to always be mindful to the current development. In achieving its vision, the Company has succeeded in improving its values by optimising the existing human resources to produce high-quality products and services whilst possessing strong competitiveness to earn profit through the implementation of Limited Liability Companies' principles. Furthermore, the Company's marine services scope has been expanded not only in national-scale but also regional and global.

Pelindo III is a Parent Company managing six Subsidiaries, four Affiliate Companies, and thirteen Second-Tier Subsidiaries engaging in various port services sectors. As a prominent provider of port services in Indonesia, various innovation and service improvements have been taken by Pelindo III to suppress national logistics costs. Furthermore, the Company strives to develop by adapting itself with the current developments through the presentation of various technology and information-based services to strengthen the Company's national and global competitiveness.

Masa depan industri jasa kepelabuhanan tampak menjanjikan seiring dengan bertumbuhan industri transportasi laut, meningkatnya permintaan akan kargo peti kemas dan bulk, serta ekspansi pusat-pusat perdagangan di ranah regional. Meski demikian, pergeseran pada tren ekonomi, arus perdagangan, serta pola demografis global menjadi beberapa faktor yang memengaruhi para pelaku bisnis untuk terus beradaptasi dengan perubahan ini. Sebagai salah satu entitas bisnis di sektor ini, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Pelindo III) telah menetapkan program-program kerja untuk meraih keunggulan di tengah kompetisi industri jasa kepelabuhanan.

Pelaksanaan program kerja ini mendukung pencapaian sasaran strategis Perusahaan untuk menjadi "Emerging Industry Leader" dengan melakukan transformasi menjadi "Full-Handling Terminal System & Logistic Integration – Integrated Industrial Port Estate". Upaya-upaya inovasi dan integrasi dalam pelaksanaan program-program kerja di tahun 2018 bukan hanya sebagai dasar pelaksanaan visi dan misi Perusahaan, namun juga upaya untuk meningkatkan kontribusi Pelindo III kepada Negara.

The future of the port services industry looks promising along with the growth in the marine transportation industry, surging growth in demand for containerised and bulk cargo, as well as the expansion of regional trade hubs. That being said, shifts in economic trends, trade flow, and global demographic pattern are some of the factors that influence business actors to continuously adapt to the incoming changes. As one of the entities in the business sector, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (Pelindo III) has set a number of work programs to achieve excellence amidst the competitive port services industry.

Implementation of the work programmes is also supporting the achievement of the Company's strategic goal to be the 'Emerging Industry Leader' by transforming into a 'Full-Handling Terminal System & Logistic Integration–Integrated Industrial Port Estate'. The innovation and integration efforts contained within the work program were not only the basis of implementing the corporate vision and mission but also an effort to increase the contribution of Pelindo III to Indonesia.



2017

Membangun Budaya Positif Melalui Transformasi Budaya Perusahaan

SDM, Proses, dan Teknologi

Seiring dengan perubahan yang berjalan secara dinamis pada aspek sosial, ekonomi, dan pemanfaatan teknologi dewasa ini, menuntut Perusahaan sebagai entitas bisnis di sektor pelayanan jasa kepelabuhanan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan. Proses bisnis dan koneksi yang berlangsung cepat dan tanpa batas sangat diperlukan bagi Perusahaan dalam rangka meningkatkan performa layanan serta menyajikan aktivitas usaha dengan standar layanan yang berlaku secara global dengan tetap mengusung nilai-nilai bisnis yang berlaku secara nasional sebagai diferensiasi.

Perusahaan percaya, dengan adanya perubahan ke arah yang positif, Perusahaan akan bergerak dinamis dalam melakukan inovasi-inovasi yang dibutuhkan dalam menunjang kegiatan usaha yang dijalankan.

Tema "Membangun Perubahan Positif Melalui Transformasi Budaya Perusahaan (SDM, Proses dan Teknologi)" sebagai bagian dari upaya Perusahaan dalam melakukan perubahan dari aspek kecil hingga besar yang membawa dampak positif bagi kelangsungan usaha Perusahaan. Serta menggambarkan tujuan-tujuan progresif dalam menggapai satu tujuan yang lebih baik.

In line with the changes in social and economic aspect, as well as the dynamic use of technology at present, the Company, as a business entity engaging in port service sector, is required to conduct the necessary adjustments. Rapid business process and unlimited connectivity is needed for the Company to leverage its service performance as well as aligning business activities with the globally applicable service standards, by continuously upholding the national business values as a differentiation.

The Company believes that along with changes towards positive directions, the Company will move dynamically in performing the innovations needed to support its business activities in the future.

The theme "Creating Positive Changes by Corporate Culture Transformation (People, Process and Technology)" describes the efforts made by the Company to bring changes, either in small or great form, to bring positive impact on the Company's business, as well as the progressive objectives of the Company to attain its ultimate target.



2016

Towards ICT Based Enterprise

Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pelindo III diselenggarakan secara komprehensif dan mengacu pada prinsip IT Governance sesuai regulasi dan standar Best Practice bidang layanan IT. Hal ini tercermin dari mulai proses perencanaan, pengembangan, operasionalisasi, dan pemeliharaan.

Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Perusahaan diselenggarakan berbasis kapabilitas, yaitu dengan mengembangkan kapabilitas pelayanan bisnis maupun penguatan kapabilitas internal Teknologi Informasi sumber daya manusia maupun infrastruktur.

Pelindo III Information Technology and Communication Service is conducted comprehensively and refers to the principles of IT Governance according to the regulation and standard of Best Practice in IT service area. This is reflected in all processes, starting from the process of planning, development, operation until maintenance.

The development of Company's Information and Communication Technology is based on capability, by developing business service capability as well as strengthening internal capability of Information Technology both human capital and infrastructure.



DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

Tentang Laporan Tahunan

About Annual Report

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Disclaimer

1 Kesinambungan Tema

Laporan Tahunan

Annual Report Theme Continuity



KILAS KINERJA 2020 FLASHBACK PERFORMANCE 2020

10 Ikhtisar Keuangan

Financial Highlight

12 Grafik Ikhtisar Keuangan

Chart of Financial Highlight

14 Ikhtisar Operasional

Operational Highlights

14 Grafik Ikhtisar Operasional

Chart of Operational Highlights

16 Ikhtisar Saham

Share Highlights

17 Ikhtisar Obligasi

Bonds Highlights

18 Ikhtisar Dividen

Dividend Highlights

19 Pemenuhan Aspirasi Pemangku Kepentingan

Fulfillment of Stakeholders' Aspirations

22 Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications

31 Peristiwa Penting 2020

2020 Significant Events



LAPORAN MANAJEMEN MANAGEMENT REPORT

50 Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioner Report

66 Laporan Direksi

Board of Director Report

88 Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahun 2020

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

Statement To The Members of The Board of Commissioners and The Board of Directors, With Regard To Responsibility For The 2020 Annual Report of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)



PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE

92 Informasi Perseroan

Company Information

94 Informasi Perubahan Nama Perusahaan

Information On Name Change

94 Riwayat Singkat Perusahaan

Brief History Of The Company

96 Jejak Langkah Perusahaan

Milestones

98 Makna Logo Perusahaan

Logo Meaning

99 Bidang Usaha

Business Lines

102 Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan

Vision, Mission, and Corporate Culture

106 Profil Dewan Komisaris

Profile of Board of Commissioners

118 Profil Direksi

Profile of Board of Directors

130 Profil Pejabat Eksekutif

Profile of Executive officers

135 Profil General Manager

Profile of General Managers

114 Struktur dan Komposisi Pemegang Saham

Structure and Composition of Shareholders

146 Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Information On Main and Controlling Shareholder

147 Daftar Entitas Anak dan Asosiasi

List of Subsidiaries and Associate Entities

172 Wilayah Operasional Perusahaan

Company Operational Area

174 Kronologi Pencatatan Saham

Share Listing Chronology

174 Kronologi Pencatatan Efek Lainnya

Other Securities Listing Chronology

176 Informasi Lembaga dan Profesi Penunjang

Information On Supporting Institutions and Professions

180 Alamat Kantor Pusat, Perwakilan, dan Cabang Perusahaan

Address of Head office, Representative office, and Branch offices

183 Informasi Pada Situs Web Perusahaan

Information On Website

186 Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan dan Satuan

Pengawasan Intern

Competency Development of Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and

Internal Audit Unit

**TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS**
OVERVIEW OF BUSINESS SUPPORT

- 192 Sumber Daya Manusia
Human Capital
225 Teknologi Informasi dan Komunikasi
Information and Communication Technology

**ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN**
MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

- 242 Tinjauan Umum
General Overview
246 Tinjauan Industri Pelabuhan
Port Industry Overview
248 Tinjauan Kinerja Operasional
Operational Performance Overview
252 Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
Operational Overview Per Business Segment
274 Kinerja Entitas Anak
Performance of Subsidiaries
287 Tinjauan Keuangan
Financial Overview
318 Analisis Kemampuan Membayar Utang, Kolektibilitas Piutang dan Rasio Keuangan Lainnya
Analysis On Solvency, Collectability and Other Financial Ratios
320 Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal
Capital Structure and Management Policy On Capital Structure
321 Informasi Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal
Information On Material Commitment For Capital Goods Investment
322 Informasi Realisasi Investasi Barang Modal Tahun 2020
Information On Realization of Capital Goods Investment In 2020
323 Informasi dan Fakta Material Yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntansi
Information and Material Facts After Balance Sheet Date
324 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2020
Comparison of Targets and Realization In 2020
328 Proyeksi Tahun 2021
Proyeksi Tahun 2021
330 Prospek Usaha
Prospek Usaha
332 Aspek Pemasaran
Aspek Pemasaran

- 334 Kebijakan dan Pembagian Dividen
Kebijakan dan Pembagian Dividen
335 Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan dan/Atau Manajemen (ESOP/MSOP)
Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan dan/Atau Manajemen (ESOP/MSOP)
335 Realisasi dana Hasil Penawaran Umum
Realisasi dana Hasil Penawaran Umum
335 Informasi Transaksi Material Yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/Atau Dengan Pihak Afiliasi/Berelasi
Informasi Transaksi Material Yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/Atau Dengan Pihak Afiliasi/Berelasi
342 Informasi Material Terkait Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi dan Restrukturisasi Utang/Modal
Informasi Material Terkait Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi dan Restrukturisasi Utang/Modal
343 Pembayaran Pajak
Pembayaran Pajak
343 Informasi Keuangan Yang Mengandung Kejadian Yang Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi
Informasi Keuangan Yang Mengandung Kejadian Yang Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi
343 Perubahan Peraturan Yang Signifikan dan Dampaknya Terhadap Perusahaan
Perubahan Peraturan Yang Signifikan dan Dampaknya Terhadap Perusahaan
344 Perubahan Kebijakan Akuntansi
Perubahan Kebijakan Akuntansi
347 Informasi Kelangsungan Usaha
Informasi Kelangsungan Usaha
347 Tingkat Kesehatan Perusahaan
Tingkat Kesehatan Perusahaan
347 Rencana Jangka Panjang Perusahaan
Rencana Jangka Panjang Perusahaan

**TATA KELOLA PERUSAHAAN**
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

- 352 Komitmen Penerapan GCG
Commitment To GCG Implementation
352 Tujuan dan Manfaat Penerapan GCG
Objectives and Benefits of GCG Implementation
354 Dasar Hukum Penerapan GCG
Legal Basis For GCG Implementation
358 Prinsip Penerapan GCG
Principles of GCG Implementation
360 Kerangka GCG
GCG Framework



361	Roadmap GCG	580	Perkara Penting Perseroan dan Grup Tahun 2020
	GCG Roadmap		Legal Issues For The Company and Group In 2020
362	Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Code of Corporate Governance)	581	Key Performance Indikator (KPI)
	Code of Corporate Governance		Key Performance Indikator (KPI)
364	Penilaian Penerapan GCG (GCG Assessment)	587	Pemenuhan Aspek Kepatuhan
	Assessment On GCG Implementation		Fulfilment On Compliance Aspect
379	Sosialisasi, Internalisasi, dan Evaluasi GCG	590	Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa
	Dissemination Ternalization and Evaluation of GCG		Goods and Services Procurement Mechanism
380	Struktur Tata Kelola Perusahaan	595	Kebijakan dan Pengendali Gratifikasi
	Structure of Corporate Governance		Gratification Policy and Control
383	Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali	598	Sistem Pelaporan Pelanggaran
	Information On Key and Controlling Shareholders		Whistleblowing System
383	Rapat Umum Pemegang Saham	605	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (Lhkpn)
	General Meeting of Shareholders		Report of The State official Assets
398	Dewan Komisaris	607	Akses dan Informasi Perusahaan
	Board of Commissioners		Company Access and Information
428	Direksi	607	Praktik Bad Corporate Governance
	Board of Directors		Bad Corporate Governance Practices
470	Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi		
	Joint Meetings of The Board of Commissioners and Board of Directors		
480	Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi	612	Komitmen Pelaksanaan CSR
	Performance Assessment of The Board of Commissioners and Directors		CSR Implementation Commitment
485	Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi	616	Dasar Pelaksanaan CSR Perusahaan
	Remuneration Policy For The Board of Commissioners and Board of Directors		Basis of CSR Implementation
490	Informasi Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi	618	Kebijakan dan Tata Kelola CSR Perusahaan
	Information On Affiliation of The Board of Commissioners and Board of Directors		Policy and Governance of Company CSR
492	Informasi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi	621	Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial Yang Menjadi Kewajiban Perusahaan
	Information On The Share Ownership of The Board of Commissioners and Board of Directors		Scope of Social Responsibility Which Is The Obligation of The Company
493	Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi	622	Kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan Yang Melebihi Kewajiban Perusahaan
	Diversity In The Composition of The Board of Commissioners and Board of Directors		Corporate Responsibility Activities That Exceed Company Obligations
495	Organ-Organ Di Bawah Dewan Komisaris	623	Sumber dan Realisasi Anggaran dana CSR dan PKBL
	Organs Under The Board of Commissioners		Source and Realization of CSR and PKBL Budget
495	Sekretaris Dewan Komisaris	623	Tanggung Jawab Perusahaan Terkait Hak Asasi Manusia
	Board of Commissioners Secretary		Corporate Social Responsibility On Human Rights
500	Komite Audit	626	Tanggung Jawab Perusahaan Terkait Operasi Yang Adil
	Audit Committee		Corporate Social Responsibility On Fair Operations
511	Komite GCG dan Manajemen Risiko	632	Tanggung Jawab Perusahaan Terkait Lingkungan Hidup
	GCG and Risk Management Committee		Corporate Responsibility On Environment
521	Komite Nominasi dan Remunerasi	637	Tanggung Jawab Perusahaan Terkait Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Nomination and Remuneration Committee		Corporate Responsibility On Manpower, Occupational Health and Safety (K3)
528	Sekretaris Perusahaan	656	Tanggung Jawab Perusahaan Terkait Bidang Sosial Kemasyarakatan
	Corporate Secretary		Corporate Responsibility On Social Community
534	Satuan Pengawasan Intern	666	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Pelanggan
	Internal Audit Unit		Corporate Social Responsibility On Customers
540	Auditor Eksternal	674	Tanggung Jawab Perusahaan Kepada Pemasok
	External Auditor		Corporate Responsibility On Suppliers
545	Sistem Pengendalian Internal		
	Internal Control System		
549	Manajemen Risiko		
	Risk Management		
568	Kode Etik		
	Code of Conduct		



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY



BROMMA

40t 大连重工

CRT TERMINAL I



Milestone

Transformasi Strategis

Strategic Transformation Milestone

Sebagai salah satu entitas bisnis di sektor kepelabuhanan, PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola 43 terminal yang tersebar di 7 (tujuh) provinsi di Indonesia. Peningkatan aktivitas ekonomi di era globalisasi membawa tantangan besar dalam pengelolaan pelabuhan di masa depan. Agar daya saing perusahaan tetap kuat, salah satu pengembangan yang dilakukan adalah dengan melakukan inovasi dan sinergi usaha sebagai upaya efisiensi untuk menekan biaya logistik nasional.

Guna mendukung terlaksana dan terwujudnya misi dan visi perusahaan, maka arah pengembangan perusahaan untuk 5 tahun ke depan ditujukan untuk:

1. Mewujudkan daya saing perusahaan yang kuat melalui inovasi dan sinergi usaha dalam rangka efisiensi untuk menekan biaya logistik nasional;
2. Mengedepankan digitalisasi dan otomatisasi dalam mengintegrasikan sistem sebagai standarisasi proses bisnis kepelabuhanan dalam meningkatkan layanan kepada pengguna jasa;
3. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan perusahaan untuk mewujudkan profesionalisme kerja; dan
4. Menerapkan budaya kerja yang sehat, meningkatkan kepedulian dan wawasan terhadap lingkungan hidup dan mengedepankan sosial masyarakat dengan berperan aktif dalam pembinaan kepada koperasi, usaha kecil dan menengah sehingga memantapkan peran dan citra perusahaan sebagai pelaku pembangunan nasional.

As a business entity in the port sector, PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) or Pelindo III bears a great responsibility in managing 43 terminals spread over 7 (seven) provinces in Indonesia. Increasingly intense economic activity in the globalisation era has brought enormous challenges in port management in the future. In order to maintain the Company's competitiveness, the Company carry out innovation and business synergy as an effort to conduct efficiency to reduce national logistics costs.

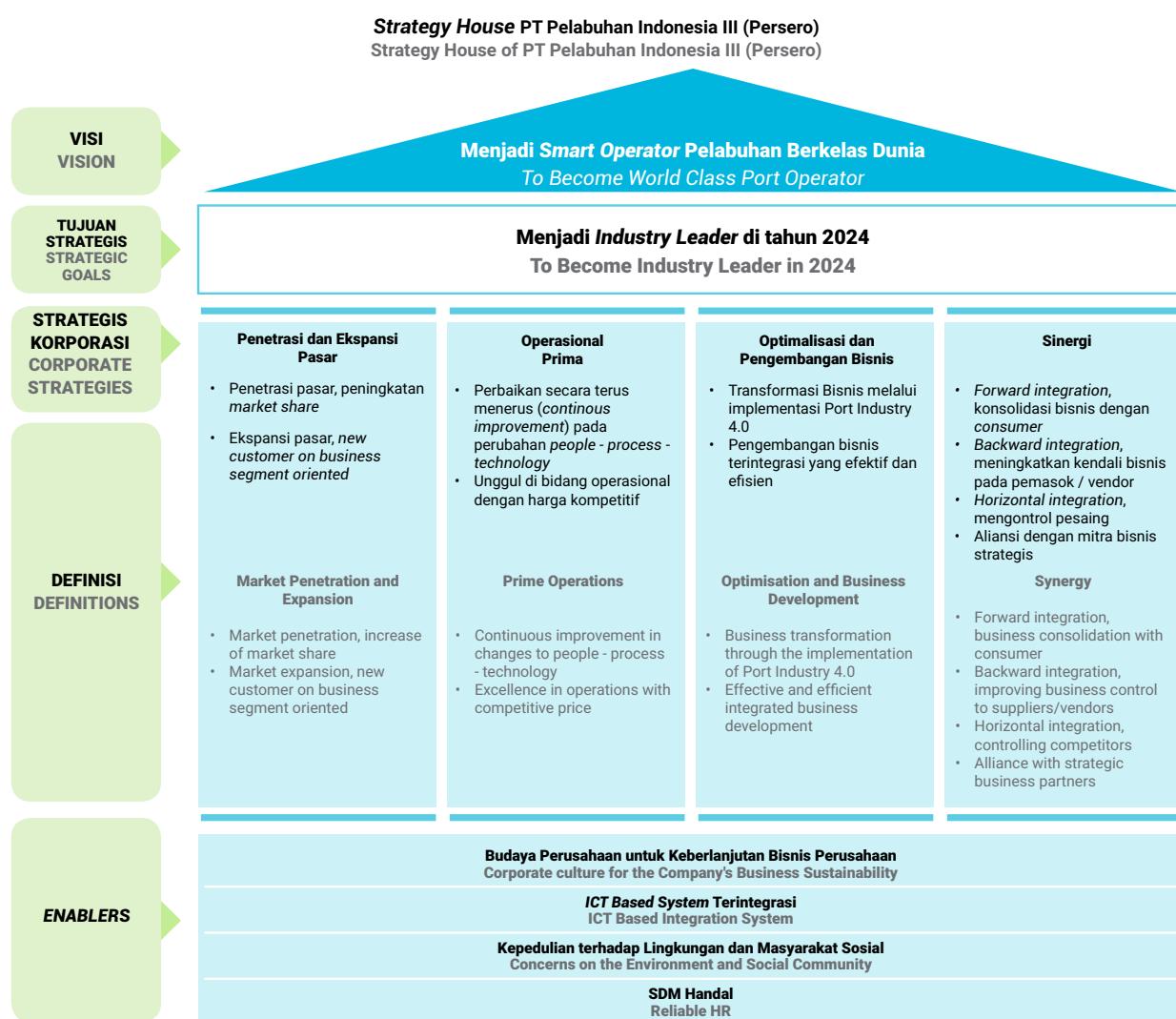
In order to support the implementation and realization of company mission and vision, the Company's development direction for the next 5 years is focused on pursuing the following:

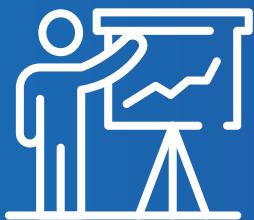
1. Realising strong company competitiveness through innovation and business synergy as part of efficiency effort to reduce national logistics costs;
2. Prioritising digitalization and automation in system integration as port business process standardisation in improving services to service users;
3. Upholding Good Corporate Governance (GCG) principles in company management to realise work professionalism; and
4. Implementing a healthy work culture, improving concern and insight into the environment and prioritising social community by playing an active role in fostering cooperatives, small and medium enterprises so as to strengthen the role and reputation of the company as an actor of national development.



Adapun strategi indikatif yang akan dilakukan Pelindo III pada tahun 2020 – 2024 digambarkan melalui rumah strategi sebagai berikut:

Indicative strategies conducted by Pelindo III in 2020 - 2024 are illustrated through strategy house as follows:





KILAS KINERJA 2020

FLASHBACK PERFORMANCE 2020







RINGKASAN KINERJA 2020

2020 Performance Highlight



PRODUKSI ARUS KAPAL SHIP TRAFFIC PRODUCTION

74.862 UNIT

▼ 3.405 UNIT

300.715.594 GT

▼ 3.539.000 GT

PENDAPATAN PELAYANAN KAPAL SHIP SERVICE REVENUE

Rp964,73 TRIILUN / TRILLION

▼ Rp76,79 JUTA / MILLION



PRODUKSI ARUS PETI KEMAS CONTAINER TRAFFIC PRODUCTION

4.048.422 BOX

▼ 322.371 BOX

5.080.686 TEUs

▼ 346.722 TEUs

PENDAPATAN PELAYANAN PETI KEMAS CONTAINER SERVICE REVENUE

Rp2,46 TRIILUN / TRILLION

▼ Rp171,08 JUTA / MILLION



PRODUKSI NONPETI KEMAS
PRODUCTION OF NON-CONTAINERGENERAL CARGO
GENERAL CARGO**7.940.509** TON

▼ 1.165.225 TON

CURAH KERING
DRY BULK**27.207.134** TON

▼ 5.412.336 TON

CURAH CAIR
LIQUID BULK**30.091.651** TON

▼ 3.305.219 TON

PENDAPATAN NONPETI KEMAS
NON-CONTAINER REVENUE**Rp 909,21** MILIAR / BILLION

▼ RP28,83 JUTA / MILLION

ARUS HEWAN
ANIMAL TRAFFIC**101.683** EKOR / ANIMALS

▼ 26.878 EKOR / ANIMALS

ARUS PENUMPANG
PASSENGER TRAFFIC**1.607.916** ORANG / PEOPLE

▼ 2.062.200 ORANG / PEOPLE

PENDAPATAN
PENGUSAHAAN PROPERTI
CONTAINER SERVICE REVENUE**Rp 424,37**

MILIAR / BILLION

▼ Rp 91,21
JUTA / MILLIONPENDAPATAN
OPERASIONAL
OPERATING REVENUES**Rp 9,32**

TRILIUN / TRILLION

▼ Rp 455,50
MILIAR / BILLIONLABA KOMPREHENSIF
TAHUN BERJALAN
COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR**Rp 417,20**

MILIAR / BILLION

▼ Rp 1,42
TRILIUN / TRILLION



IKHTISAR KEUANGAN

Financial Highlight

LAPORAN LABA RUGI

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS

(dalam miliar Rupiah) / (in billions of Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	2018	2017	2016
Pendapatan Usaha / Operating Revenue	9.320	9.776	10.175	8.849	7.485
Beban Usaha / Operating Expenses	6.857	7.035	6.879	5.883	5.401
Pendapatan (Beban) Lain-lain / Other Income (Expenses)	(10)	633	(616)	130	176
Beban Bunga Pinjaman / Interest Expenses	745	711	808	600	477
Laba Sebelum Pajak / Income Before Tax	1.747	2.660	1.872	2.519	1.783
Beban Pajak / Tax Expense	469	530	487	613	271
Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Income (Loss) for the Year	1.239	2.129	1.385	1.905	1.512
Pendapatan (Beban) Komprehensif / Comprehensive Income (Expenses)	(822)	(292)	740	(409)	1.140
Laba Tahun Berjalan / Income for the Year	1.239	2.129	1.385	1.905	1.512
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan / Total Comprehensive Income for the Year	417	1.837	2.125	1.496	2.652
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada / Income for the Year Attributable to					
Pemilik Entitas Induk / Owners of the Parent Entity	1.206	2.096	760	1.341	1.037
Kepentingan Non Pengendali / Non-Controlling Interests	33	32	626	563	475
Total Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada / Total Comprehensive Income Attributable to					
Pemilik Entitas Induk / Owners of the Parent Entity	383	1.803	1.503	932	2.170
Kepentingan Non Pengendali / Non-Controlling Interests	34	33	622	564	483
Laba per Saham (dalam ribuan) / Earnings per Share (in thousands)	1.183	1.058	745	1.316	1.018

LAPORAN POSISI KEUANGAN

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

(dalam miliar Rupiah) / (in billions of Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	2018	2017	2016
Aset / Assets	32.195	30.756	30.506	25.751	22.440
Aset Lancar / Current Assets	5.533	5.408	6.463	4.194	2.849
Aset Tidak Lancar / Non-Current Assets	26.663	25.348	24.043	21.557	19.591
Investasi pada Entitas Asosiasi / Investments in Associates	1.478	1.157	1.090	1.182	1.088
Liabilitas / Liabilities	21.153	19.709	20.150	16.385	13.925
Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities	3.292	3.265	3.574	3.309	3.044
Liabilitas Jangka Panjang / Non-Current Liabilities	17.861	16.444	16.576	13.077	10.881
Ekuitas / Equity	11.042	11.047	10.355	9.366	8.514



LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS

(dalam miliar Rupiah) / (in billions of Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	2018	2017	2016
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi / Net Cash Flows from Operating Activities	3.674	4.041	4.170	2.696	1.954
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi / Net Cash Flows from Investing Activities	(1.937)	(3.182)	(3.458)	(1.931)	(3.126)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan / Net Cash Flows from Financing Activities	(1.532)	(1.710)	1.078	164	588
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas / Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	205	(851)	1.790	929	(583)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun / Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	3.645	4.612	2.750	1.816	2.618
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun / Cash and Cash Equivalents at End of Year	3.856	3.644	4.612	2.750	1.815

RASIO KEUANGAN

(dalam %) / (in %)

Uraian / Description	2020	2019	2018	2017	2016
Rasio Kas / Cash Ratio	117,13	111,62	129,03	92,04	66,97
Rasio Lancar / Current Ratio	168,05	165,61	180,81	156,07	170,46
Rasio Liabilitas terhadap Aset / Liabilities to Assets Ratio	65,70	64,08	66,05	56,77	56,52
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas / Liabilities to Equity Ratio	191,58	148,86	160,07	667,11	129,97
Return on Assets (ROA)	3,85	8,91	10,82	8,01	6,82
Return on Equity (ROE)	11,22	19,25	13,43	28,52	23,81
Return on Investment (ROI)	12,58	14,16	13,62	17,45	13,98



GRAFIK IKHTISAR KEUANGAN

Chart of Financial Highlight

JUMLAH ASET TOTAL ASSETS

(dalam miliar Rupiah) / (in billions of Rupiah)



JUMLAH LIABILITAS TOTAL LIABILITIES

(dalam miliar Rupiah) / (in billions of Rupiah)



EKUITAS EQUITY

(dalam miliar Rupiah) / (in billions of Rupiah)



INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI INVESTMENTS IN ASSOCIATES

(dalam miliar Rupiah) / (in billions of Rupiah)



**PENDAPATAN USAHA**
OPERATING REVENUE

(dalam miliar Rupiah) / (in billions of Rupiah)

**BEBAN USAHA**
OPERATING EXPENSES

(dalam miliar Rupiah) / (in billions of Rupiah)

**LABA SEBELUM PAJAK**
INCOME BEFORE TAX

(dalam miliar Rupiah) / (in billions of Rupiah)

**LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN**
INCOME (LOSS) FOR THE YEAR

(dalam miliar Rupiah) / (in billions of Rupiah)





IKHTISAR OPERASIONAL

Operational Highlights

Uraian / Description	Satuan / Unit	2020	2019	2018	2017	2016
Arus Kapal / Ship Traffic	unit	74.862	78.267	68.153	66.547	62.091
	GT	300.715.594	304.254.594	274.686.348	248.838.334	206.720.633
Arus Peti Kemas / Container Traffic	box	4.048.422	4.370.693	4.316.897	3.989.126	3.764.398
	TEUs	5.080.686	5.427.408	5.337.673	4.919.719	4.611.262
General Cargo / Cargo Traffic	ton	7.940.509	9.105.734	9.501.934	8.895.451	9.885.861
	M³	2.779.240	3.215.997	3.299.894	2.458.047	2.961.555
Curah Kering / Dry Bulk	ton / tonnes	27.207.134	32.619.470	31.117.746	35.651.269	22.716.823
Curah Cair / Liquid Bulk	ton / tonnes	30.091.651	33.396.870	32.261.714	34.883.646	32.841.254
Trafik Penumpang / Passenger Traffic	orang / people	1.607.916	3.670.116	3.087.954	2.957.358	2.960.636
Arus Hewan / Animal Traffic	ekor / animals	101.683	128.561	142.644	133.163	138.073

GRAFIK IKHTISAR OPERASIONAL

Chart of Operational Highlights

ARUS KAPAL SHIP TRAFFIC

(dalam unit) / (in unit)



ARUS PETI KEMAS CONTAINER TRAFFIC

(dalam box) / (in box)



**GENERAL CARGO
CARGO TRAFFIC**

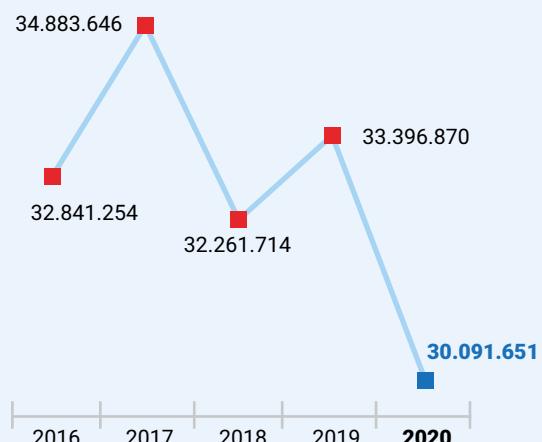
(dalam ton) / (in tonnes)

**CURAH KERING
DRY BULK**

(dalam ton) / (in tonnes)

**CURAH CAIR
LIQUID BULK**

(dalam ton) / (in tonnes)

**TRAFIK PENUMPANG
PASSENGER TRAFFIC**

(dalam orang) / (in people)

**ARUS HEWAN
ANIMAL TRAFFIC**

(dalam ekor) / (in animals)





IKHTISAR SAHAM

Share Highlights

Hingga 31 Desember 2020, kepemilikan saham Perseroan 100% dipegang oleh Pemerintah Republik Indonesia dan tidak diperdagangkan di bursa efek manapun. Dengan demikian, informasi mengenai:

- a. Ikhtisar kinerja perdagangan saham yang terdiri dari jumlah saham beredar, kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat dicatatkan, harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan, serta volume perdagangan;
- b. Informasi aksi korporasi yang meliputi bentuk-bentuk aksi korporasi, rasio pemecahan saham, jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; dan
- c. Sanksi penghentian saham yang berupa penghentian perdagangan saham dan penghapusan pencatatan saham

tidak dapat disajikan karena tidak sesuai dengan status Perseroan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak melaksanakan pencatatan saham di bursa efek.

As of 31 December 2020, 100% shares of the Company are owned by the Government of Republic of Indonesia and are not traded at any stock exchanges. Hence, information on:

- a. Share trading performance, consisting of several outstanding shares, market capitalization based on the price at the Stock Exchange on which the shares are listed, highest price, lowest price and closing price, as well as trading volume;
- b. Corporate action, covering forms of corporate action, date of execution, stock split ratio, number of outstanding shares before and post-corporate action; and
- c. Suspension sanction, such as trading suspension or delisting,

cannot be provided as they are not in line with the Company's status as a State-Owned Enterprise (SOE) that does not list its shares on a stock exchange.



IKHTISAR OBLIGASI

Bonds Highlights

OBLIGASI GLOBAL 2014 / 2014 GLOBAL BONDS

Uraian / Description	Informasi / Information
Jenis Sekuritas / Type of Securities	USD Senior Unsecured Fixed Rate Notes
Mata Uang / Currency	US Dollar
Distribusi / Distribution	Rule 144A/Regulation S
Jumlah yang Beredar / Outstanding Amount	USD 500.000.000
Tenor	10 tahun / 10 years
Tanggal Terbit / Issuance Date	1 Oktober 2014 / October 1, 2014
Tanggal Jatuh Tempo / Due Date	1 Oktober 2024 / October 1, 2024
Tingkat Bunga / Interest Rate	4,875% per annum / 4.875% per annum
Tanggal Pembayaran Bunga / Interest Payment Date	31 Maret dan 30 September / March 31 and September 30
Spread to Benchmark	239,5 bps / 239.5 bps
Oversubscribed	13x melebihi size yang ditawarkan / 13x exceeding the size offered <ul style="list-style-type: none"> • Baa3 (<i>Outlook Stable</i>) oleh Moody's, diterbitkan 10 September 2014. / Baa3 (Stable Outlook) by Moody's, issued on September 10, 2014. • BB+ (<i>Outlook Stable</i>) oleh S&P Global Ratings, diterbitkan pada 8 September 2014. / BB+ (Stable Outlook) by S&P Global Ratings, issued on September 8, 2014. • BBB- (<i>Outlook Stable</i>) oleh Fitch Ratings, diterbitkan pada 8 September 2014. BBB- (Stable Outlook) by Fitch Ratings, issued on September 8, 2014.
Rating Senior Unsecured	

OBLIGASI GLOBAL 2018 / 2018 GLOBAL BONDS

Uraian / Description	Informasi / Information
Jenis Sekuritas / Type of Securities	USD Senior Unsecured Fixed Rate Notes
Mata Uang / Currency	US Dollar
Distribusi / Distribution	Rule 144A/Regulation S
Jumlah yang Beredar / Outstanding Amount	USD 500.000.000
Tenor	5 tahun / 5 years
Tanggal Terbit / Issuance Date	2 Mei 2018 / May 2, 2018
Tanggal Jatuh Tempo / Due Date	2 Mei 2023 / May 2, 2023
Tingkat Bunga / Interest Rate	4,5% per annum / 4.5% per annum
Tanggal Pembayaran Bunga / Interest Payment Date	2 Mei dan 2 November / May 2 and November 2
Spread to Benchmark	239,5 bps / 239.5 bps
Oversubscribed	2x melebihi size yang ditawarkan / 2x exceeding the size offered <ul style="list-style-type: none"> • Baa3 (<i>Outlook Stable</i>) oleh Moody's, diterbitkan pada 6 Februari 2018. / Baa3 (Stable Outlook) by Moody's, issued on February 6, 2018. • BBB- (<i>Outlook Stable</i>) oleh Fitch Ratings, diterbitkan pada 23 April 2018. / BBB- (Stable Outlook) by Fitch Ratings, issued on April 23, 2018.
Rating Senior Unsecured	



IKHTISAR DIVIDEN

Dividend Highlights

Perseroan membagikan dividen kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perkembangan dividen yang disalurkan Perseroan selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

The Company distributes dividend to the Government of Republic Indonesia as the Shareholder based on the resolution of a General Meeting of Shareholders (GMS). The following table describes the dividend paid by the Company in the last five years:

Tahun / Year	Dibayarkan Tahun / Paid in	Dividen (Ribuan Rupiah) / Dividend (Thousands of Rupiah)	Laba Perusahaan (Ribuan Rupiah) / Company's Profit (Thousands of Rupiah)	Risalah RUPS / GMS Minutes	Tanggal Pembayaran / Payment Date
2016	2017	311.198.816	1.037.329.721	Akta Notaris Emi Susilowati, S.H., No. 5 Notarial Deed of Emi Susilowati, S.H. No. 5	8 Mei 2017 May 8, 2017
2017	2017	311.198.816	1.037.329.721	Akta Notaris Emi Susilowati, S.H., No. 2 Notarial Deed of Emi Susilowati, S.H. No. 2	8 November 2017 November 8, 2017
2018	2018	441.147.068	1.470.490.226	Akta Notaris Emi Susilowati, S.H., No. 2 Notarial Deed of Emi Susilowati, S.H. No. 2	3 April 2018 April 3, 2018
2019	2019	227.891.712	759.639.040	Akta Notaris Emi Susilowati, S.H., No. 29 Notarial Deed of Emi Susilowati, S.H. No. 29	29 Mei 2019 May 29, 2019
2020	2020	524.815.826	1.238.990.452	Akta Notaris Fessy Farizqoh Alwi, S.H., M.Kn. No. 6 Notarial Deed of Fessy Farizqoh Alwi, S.H., M.Kn. No. 6	Agustus – Oktober 2020 August - October 2020



PEMENUHAN ASPIRASI PEMANGKU KEPENTINGAN

Fulfillment of Stakeholders' Aspirations

Aspirasi Pemangku Kepentingan merupakan aspirasi atau mandat yang diberikan oleh segenap pihak yang dapat memengaruhi dan memiliki kepentingan terhadap pencapaian tujuan Perusahaan. Pelindo III telah melakukan penjaringan mandat Pemangku Kepentingan untuk melakukan arah Perseroan dalam jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2020-2024, yaitu sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki kompetensi inti di bidang jasa pelayanan kepelabuhanan, Pelindo III senantiasa berkomitmen untuk memberikan dividen kepada Pemegang Saham (Kementerian BUMN) serta berupaya memperlancar integrasi logistik dalam upaya mendukung pembangunan dalam lingkup makroekonomi. Lebih lanjut, Perseroan akan berupaya memenuhi keinginan Pemegang Saham antara lain:

- Mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang terintegrasi sebagai upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas serta optimalisasi kinerja Perseroan;
- Pencapaian sasaran kinerja Perseroan melalui peningkatan produktivitas layanan dan operasional yang unggul berlandaskan kaidah dan norma tata kelola perusahaan yang baik (GCG); dan
- Meningkatkan kesadaran terhadap kontrol dan pengawasan, baik secara internal maupun eksternal Perseroan guna menunjang keberhasilan manajemen.

Stakeholders' Aspirations are the aspiration or mandate given by the parties that may influence and have the interest in the achievement of the Company's objectives. Pelindo III has selected the Stakeholders' mandates to determine the long-term direction of the Company contained in the Company's Long-Term Plan (RJPP) of 2020-2024 as follows:

SHAREHOLDERS

As a State-Owned Enterprise (SOE) with the core competence in port services, Pelindo III strives to be committed to distributing dividends to its Shareholders (Ministry of SOE) as well as seeking to facilitate logistic integration in order to support microeconomic development. Furthermore, the Company will strive to fulfill the Shareholders' expectations, among others:

- To promote the use of integrated information and communication technology as an effort to improve efficiency and effectiveness, as well as optimization, of the Company's performance;
- To achieve the objectives of the Company's performance through improved service productivity and excellent operations based on the principles and norms of good corporate governance (GCG); and
- To increase awareness of control and supervision, both internally and externally to support management success.



PELANGGAN

Bagi Pelindo III, pelanggan bukan hanya sebagai pengguna jasa kepelabuhanan yang menghasilkan nilai bagi Perseroan. Perseroan menyadari bahwa pelanggan merupakan salah satu aset Perseroan yang penting. Untuk itu, upaya perbaikan berkelanjutan dilakukan oleh Perseroan guna mendapatkan *beyond customer expectation*. Kebutuhan dan keinginan pelanggan antara lain:

- a. Kenyamanan dan penyederhanaan proses pelayanan untuk menghasilkan pelayanan terbaik;
- b. Ketepatan waktu pelayanan, sistem informasi yang *real time*, dan tarif jasa pelabuhan yang kompetitif;
- c. Penyediaan layanan jasa yang terintegrasi guna pemenuhan keinginan pelanggan yang heterogen;
- d. Kesiapan dan ketersediaan fasilitas dan peralatan pelabuhan yang andal; dan
- e. Jaminan kelangsungan usaha dalam jangka panjang yang menguntungkan kedua belah pihak.

PEGAWAI

Pegawai merupakan entitas yang sentral dalam suatu perusahaan. Apa pun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia, dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan perusahaan/organisasi. Menyadari hal tersebut, Pelindo III senantiasa memenuhi aspirasi pegawai Perusahaan yang antara lain:

- a. Kejelasan *career path system* sesuai dengan kompetensi, baik *hard skill* maupun *soft skill*, dan minat pegawai;
- b. Peningkatan kompetensi pegawai berwawasan global sesuai dengan perkembangan bisnis dan kebutuhan organisasi;
- c. Penciptaan lingkungan kerja yang kondusif melalui implementasi budaya kerja dan sistem manajemen kinerja yang transparan;
- d. Peningkatan kesejahteraan berdasarkan prestasi kerja pegawai; dan
- e. Kesempatan untuk menyuarakan pendapat dan berperan aktif dalam menentukan arah pengembangan usaha korporasi ke depan.

CUSTOMERS

For Pelindo III, customers are regarded not only as port service users that generate value for the Company. The Company is also aware that customers are one of its key assets. Hence, continuous improvement is carried out to reach beyond customer expectation. The customers' needs and wishes include:

- a. Convenience and simplification of service process to produce the best service;
- b. Timeliness of service, real-time information system, and competitive port service tariff;
- c. Provision of integrated service for the fulfillment of heterogeneous customer needs;
- d. Readiness and availability of reliable port facilities and equipment; and
- e. Guaranteed business continuity in the long term that is mutually beneficial.

EMPLOYEES

Employees are a central entity within the company. Regardless of its form and purpose, an organization is established based on the various visions for the benefit of humans and in the execution of its mission, it is managed and administrated by humans. Hence, humans are a strategic factor in all corporate/organizational activities. In aware of this, Pelindo III strives to fulfill the aspiration of all Company employees, including:

- a. Clarity of career path system according to the employees' competence, both hard and soft skills, as well as their interest;
- b. Improvement of employee competence with global insights in accordance with business development and organizational needs;
- c. Creation of a conducive working environment through the implementation of work culture and transparent performance management system;
- d. Welfare improvement based on the employee's performance; and
- e. The opportunity to voice their opinion and active roles in determining the direction of corporate development in the future.



MASYARAKAT

Perseroan berupaya memperhatikan kehadiran dan keberadaan masyarakat di sekitarnya melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility* – CSR) dengan harapan dapat terbentuk komunitas di lingkungan sekitar Pelabuhan yang menjadi garda terdepan dalam mendukung berbagai upaya pengembangan pelabuhan, khususnya ketika muncul permasalahan pelabuhan, khususnya ketika muncul permasalahan yang bersifat sosial di sekitar pelabuhan tersebut. Keinginan masyarakat yang akan dipenuhi oleh Perseroan antara lain:

- a. Berwawasan lingkungan dalam segala kegiatan pengembangan dan pengoperasian Pelabuhan; dan
- b. Berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan Pelabuhan melalui kegiatan CSR yang terdiri dari program kemitraan dan bina lingkungan.

MITRA KERJA

Peran Pemangku Kepentingan yang tidak kalah pentingnya bagi Pelindo III adalah mitra kerja. Mitra kerja merupakan pihak ketiga yang menyediakan bahan, jasa, maupun produk yang dibutuhkan Perseroan untuk meningkatkan kinerja organisasi sekaligus mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Mengingat pentingnya peranan mitra kerja tersebut, maka Perseroan berupaya untuk memenuhi keinginan dan aspirasi mitra kerja antara lain:

- a. Transparansi dan adil dalam pelaksanaan kerja sama usaha;
- b. Penyederhanaan proses untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pembayaran; dan
- c. Keberlangsungan kerja sama usaha dalam jangka panjang.

COMMUNITY

The Company strives to be continuously aware of the presence of its surrounding communities through various corporate social responsibility (CSR) programs with the expectation to establishing a community around the Port area to be the front guard in supporting various port developments, particularly when social issues arise around the Port area. The community wishes which will be fulfilled by the Company are:

- a. Environmentally - knowledgeable in all Port development and operational activities; and
- b. To participate actively in improving community welfare in the Port area through CSR activities consisting of partnership and community development programs.

WORK PARTNERS

Another Stakeholder that is also important for Pelindo III is the work partners. They are third parties who provide materials, materials, and products required by the Company to improve organizational performance as well as achieving the established goals. Considering the significance of their role, the Company strives to fulfill the needs and aspirations of work partners, namely:

- a. Transparency and fairness in the implementation of business cooperation;
- b. Simplification of processes to ensure payment effectiveness and efficiency; and
- c. Continuity of business cooperation in the long term.



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Awards and Certifications

PENGHARGAAN / AWARDS

No.	Nama Penghargaan / Award Title	Penerima / Recipient	Penyelenggara / Organizer	Tanggal / Date
1	Penghargaan MURI – Sosialisasi secara Daring Etos Kerja Baru BUMN kepada Karyawan Terbanyak / MURI Record – Socialization of New Work Ethos of SOEs with the Greatest Number of Employee's Participation	Pelindo III	Museum Rekor Dunia Indonesia / Indonesia World Records Museum	10 Juli 2020 / 10 July 2020
2	Terbaik II Kategori Strategi Pertumbuhan –9 th Anugerah BUMN 2020 / 2nd Best in the Category of Growth – The 9th Anugerah BUMN Award 2020	Pelindo III	BUMN Track	
3	Kategori Terpopuler di Media Sub Kategori BUMN Non Tbk / Category of Most Popular with the Media, Sub-Category of Non-Listed SOE	Pelindo III	PRIA 2020	20 April 2020 / 20 April 2020
4	Silver Winner Kategori BUMN Sub Kategori Departemen PR / Silver Winner in the Category of SOE, Sub-Category of PR Department	Pelindo III	PRIA 2020	20 April 2020 / 20 April 2020
5	Bronze Winner Kategori BUMN Sub Kategori Annual Report / Bronze Winner in the Category of SOE, Sub-Category of Annual Report	Pelindo III	PRIA 2020	20 April 2020 / 20 April 2020
6	Silver Winner Kategori BUMN Sub Kategori E-Magazine Dermaga November 2019 / Silver Winner in the Category of SOE, Sub-Category of E-Magazine Dermaga of November 2019 Edition	Pelindo III	PRIA 2020	20 April 2020 / 20 April 2020
7	Gold Winner BUMN Sub Kategori Media Cetak Dermaga Maret 2019 / Gold Winner in the Category of SOE, Sub-Category of Printed Media Dermaga of March 2019 Edition	Pelindo III	PRIA 2020	20 April 2020 / 20 April 2020
8	Indonesia Corporate Branding PR Award 2020 Kategori Port Operator / Indonesia Corporate Branding PR Award 2020 for the Category of Port Operator	Pelindo III	Iconomics	14 Mei 2020 / 14 May 2020
9	Penghargaan Zero Accident Bulan K3 Nasional Tahun 2020 oleh Dinas Ketenagakerjaan / Zero Accident Award in National OHS Month of 2020 by the Department of Manpower	Pelindo III	Menteri Tenaga Kerja / Minister of Manpower	8 Oktober 2020 / 8 October 2020
10	TOP CSR Awards 2020: U. Saefudin Noer (Direktur Utama Pelindo III) Top Leader on CSR Commitment 2020 / TOP CSR Awards 2020: U. Saefudin Noer (President Director of Pelindo III) for Top Leader on CSR Commitment 2020	Pelindo III	Majalah Top Business / Top Business Magazine	29 Juli 2020 / 29 July 2020
11	TOP CSR Awards 2020 #Star 4: PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Pelindo III	Majalah Top Business / Top Business Magazine	29 Juli 2020 / 29 July 2020



No.	Nama Penghargaan / Award Title	Penerima / Recipient	Penyelenggara / Organizer	Tanggal / Date
12	Juara I Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Award Tahun 2019 Kategori Perusahaan Besar / 1 st Winner of Manpower Social Security of Paritrana Award 2019	Pelindo III	BPJS Ketenagakerjaan	12 Agustus 2020 / 12 August 2020
13	<i>Gold Winner RRI Economics 2nd BUMN Brand Award 2020 Millenial's Choice kategori Social Economy Contribution / Gold Winner of RRI Economics 2nd BUMN Brand Award 2020 Millenial's Choice in the category of Social Economy Contribution</i>	Pelindo III	RRI Pro3, Economics	28 September 2020 / September 28, 2020
14	<i>Bronze Winner BUMN Marketeers Award 2020 kategori "The Most Promising Company in Entrepreneurial SOEs" / Bronze Winner of BUMN Marketeers Award 2020 in the category of "The Most Promising Company in Entrepreneurial SOEs"</i>	Pelindo III	Markplus Inc	16 September 2020 / September 16, 2020
15	Iconomics CSR Award 2020: Inisiatif Tanggap Darurat Covid-19 Dukungan Kesehatan Medis Pemberdayaan Nelayan dan Pariwisata / Iconomics CSR Award 2020: Covid-19 Emergency Initiatives of Medical Health Support of Fishermen Empowerment an Tourism	Pelindo III	RRI Pro3, Economics	4 Desember 2020 / December 4, 2020
16	<i>Indonesian Best Companies in Creating Leaders from Within 2020</i>	Pelindo III	Majalah SWA dan NBO Indonesia / SWA Magazine and NBO Indonesia	2 Desember 2020 / December 2, 2020
17	Infobank State-Owned Enterprise Award 2020 Predikat Khusus Sangat Bagus Selamat 5 Tahun Berturut-turut / Infobank State-Owned Enterprise Award 2020 on Excellent Special Predicate for 5 Consecutive Years	Pelindo III	Infobank	3 November 2020 / November 3, 2020
18	Infobank State-Owned Enterprise Award 2020 Predikat Sangat Bagus / Infobank State-Owned Enterprise Award 2020 on Excellent Predicate	Pelindo III	Infobank	3 November 2020 / November 3, 2020
19	Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020 Kategori BUMN: PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Sebagai Badan Publik Informatif / Information Disclosure Award for Public Companies 2020 in the SOE Category : PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Pelindo III	Bisnis Indonesia	30 November 2020 / November 30, 2020
20	Penghargaan <i>The Most Resilient BUMN 2020: U. Saefudin Noer, Special Achievement The Best Performing CEO in Technology Leadership / The Most Resilient BUMN 2020: U. Saefudin Noer, Special Achievement The Best Performing CEO in Technology Leadership</i>	Pelindo III	Bisnis Indonesia	30 November 2020 / November 30, 2020



No.	Nama Penghargaan / Award Title	Penerima / Recipient	Penyelenggara / Organizer	Tanggal / Date
21	Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2020 Terpopuler di Media Digital 2020 Kategori Pemimpin BUMN Non Tbk: U. Saefudin Noer / Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2020 for Most Popular in Digital Media Category of Non-Tbk SOE Leader	Pelindo III	Humas Indonesia, AHI	26 November 2020 / November 26, 2020
22	Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2020 Terpopuler di Media Digital / Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2020 for Most Popular in Digital Media	Pelindo III	Humas Indonesia, AHI	26 November 2020 / November 26, 2020
23	TOP GRC Awards 2020: TOP GRC 2020 #4Stars	Pelindo III	Majalah Top Business / Top Business Magazine	7 Oktober 2020 / October 7, 2020
24	TOP GRC Awards 2020: U. Saefudin Noer, <i>The Most Committed GRC Leader 2020</i>	Pelindo III	Majalah Top Business / Top Business Magazine	7 Oktober 2020 / October 7, 2020
25	TOP GRC Awards 2020: <i>The High Performing Board of Commissioner on GRC 2020</i>	Pelindo III	Majalah Top Business / Top Business Magazine	7 Oktober 2020 / October 7, 2020
26	TOP GRC Awards 2020: <i>The High Performing Corporate Secretary on GRC 2020</i>	Pelindo III	Majalah Top Business / Top Business Magazine	7 Oktober 2020 / October 7, 2020
27	Piagam Penghargaan Museum Rekor-Dunia Indonesia atas rekor Pemrakarsa dan Penyelenggara Gowes Secara Virtual Peserta Terbanyak / Award Certificate from Indonesia World Records Museum for Virtual Gowes Organizer and Pioneer with the Largest Number of Participants	Pelindo III	Museum Rekor Dunia Indonesia / Indonesia World Records Museum	11 Desember 2020 / Desember 11, 2020
28	Piagam Penghargaan Museum Rekor-Dunia Indonesia atas rekor Pemrakarsa dan Penyelenggara Lomba Lari secara Virtual Peserta Terbanyak / Award Certificate from Indonesia World Records Museum for Virtual Race Organizer and Pioneer with the Largest Number of Participants	Pelindo III	Museum Rekor Dunia Indonesia / Indonesia World Records Museum	11 Desember 2020 / Desember 11, 2020



SERTIFIKASI

Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu

Pelindo III telah memperoleh sertifikat penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, mengacu pada SNI ISO 9001:2015 dan sesuai Surat Keputusan penetapan dari Badan Standardisasi Nasional No. 308/KEP/BSN/12/2015. Saat ini, ISO 9001:2015 telah diterapkan pada 17 Cabang Pelabuhan dan 1 Kantor Pusat di lingkungan Perseroan:

CERTIFICATIONS

Quality Management System Certification

Pelindo III has obtained a Certificate of ISO 9001:2015 for the implementation of Quality Management System which refers to SNI ISO 9001:2015 and the Decree from the National Standardization Agency No. 308/KEP/BSN/12/2015. ISO 9001:2015 has been implemented on 17 Port Branches and the Head Office as follows:

Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001
Certificate of Quality Management System of ISO 9001

No.	Cabang / Branch	Versi / Version	Nomor Sertifikat / Certificate Number	Badan Sertifikasi / Certifying Body	Masa Berlaku / Validity Period
1	Kantor Pusat / Head Office	2015	01 100 1535 145/01	TUV Rheinland	
2	Tanjung Perak	2015	01 100 1535 145/02	TUV Rheinland	
3	Banjarmasin	2015	01 100 1535 145/03	TUV Rheinland	
4	Tanjung Emas	2015	01 100 1535 145/04	TUV Rheinland	
5	TPKS	2015	01 100 1535 145/05	TUV Rheinland	
6	Tanjung Intan	2015	01 100 1535 145/06	TUV Rheinland	
7	Kotabaru	2015	01 100 1535 145/07	TUV Rheinland	
8	Gresik	2015	01 100 1535 145/08	TUV Rheinland	
9	Benoa	2015	01 100 1535 145/09	TUV Rheinland	
10	Kupang	2015	01 100 1535 145/10	TUV Rheinland	
11	Sampit	2015	01 100 1535 145/11	TUV Rheinland	
12	Tanjung Wangi	2015	01 100 1535 145/12	TUV Rheinland	
13	Kumai	2015	01 100 1535 145/13	TUV Rheinland	
14	Lembar	2015	01 100 1535 145/14	TUV Rheinland	
15	Tanjung Tembaga	2015	01 100 1535 145/15	TUV Rheinland	
16	Bima	2015	01 100 1535 145/16	TUV Rheinland	
17	Maumere	2015	01 100 1535 145/17	TUV Rheinland	
18	Celukan Bawang	2015	01 100 1535 145/18	TUV Rheinland	21 Februari 2019 sampai dengan 9 Februari 2022 / February 21, 2019 to February 9, 2022



Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan

Pelindo III telah memperoleh sertifikat penerapan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 mengacu pada SNI ISO 14001:2015 sesuai dengan Surat Keputusan penetapan dari Badan Standardisasi Nasional No. 282/KEP/BSN/12/2015. Saat ini, ISO 14001:2015 telah diterapkan pada 9 Cabang dan 1 Kantor Pusat yaitu:

Environmental Management System Certification

Pelindo III has obtained a Certificate of ISO 14001:2015 for the implementation of Environmental Management System, which refers to SNI ISO 14001:2015 and the Decree from the National Standardization Agency No. 282/KEP/BSN/12/2015. ISO 14001:2015 has been implemented on nine branches and the Head Office as follows:

Sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001
Certificate of Environmental Management System of ISO 14001

No.	Cabang / Branch	Versi / Version	Nomor Sertifikat / Certificate Number	Badan Sertifikasi / Certifying Body	Masa Berlaku / Validity Period
1	Kantor Pusat / Head Office	2015	01 104 1535 145/01	TUV Rheinland	
2	Tanjung Perak	2015	01 104 1535 145/02	TUV Rheinland	
3	Banjarmasin	2015	01 104 1535 145/03	TUV Rheinland	21 Februari 2019 sampai
4	Tanjung Emas	2015	01 104 1535 145/04	TUV Rheinland	dengan 9 Februari 2022 / February
5	TPKS	2015	01 104 1535 145/05	TUV Rheinland	21, 2019 to February 9, 2022
6	Tanjung Intan	2015	01 104 1535 145/06	TUV Rheinland	
7	Kotabaru	2015	01 104 1535 145/07	TUV Rheinland	
8	Gresik	2015	01 104 1535 145/08	TUV Rheinland	
9	Benoa	2015	01 104 1535 145/09	TUV Rheinland	
10	Kupang	2015	01 104 1535 145/10	TUV Rheinland	

Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3)

Standar yang Dimiliki

Pelindo III berkomitmen melaksanakan secara konsisten pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif dan efisien dengan cara:

- Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Minimalisasi terjadinya penyakit akibat kerja dan nihilnya ancaman keamanan dan kecelakaan kerja;
- Menumbuhkan kesadaran kerja yang mengutamakan kaidah-kaidah K3;
- Melibatkan seluruh komponen Perseroan untuk ikut bertanggung jawab atas terlaksananya program K3 agar tercapainya kinerja usaha yang optimal; dan
- Mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya dalam bidang Jasa Kepalabuhanan, terutama yang berkaitan dengan aspek K3.

Occupational Health and Management System (OHS Management System)

Company's Standards

Pelindo III is committed to consistently implementing effective and efficient management of occupational health and safety aspect by:

- Implementing Occupational Health and Safety Management System (OHS Management System) based on the applicable regulations;
- Minimizing the occurrence of diseases due to work, and promoting zero security threats and occupational accidents;
- Establishing work awareness that prioritizes OHS principles;
- Engaging all components of the Company to be responsible for the implementation of the OHS program to achieve optimum business performance; and
- Complying with the laws and regulations, as well as other requirements in Port Services, especially those relating to OHS aspect.



Dalam rangka pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pelindo III memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan operasional dilaksanakan secara aman dengan menerapkan standar yang tinggi terhadap aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dituangkan dalam Keputusan Direksi Pelindo III No. 37/KPTS. UM.7.03/P.III-1995 tentang Kebijakan K3 di Lingkungan Pelindo III tanggal 28 Agustus 1995.

Perseroan juga telah menerapkan SMK3 di 17 Cabang Pelabuhan dan 1 Kantor Pusat di lingkungan Perseroan. Berikut ini adalah daftar Pelabuhan yang telah menerapkan SMK3 beserta nomor sertifikat dan masa berlakunya:

To comply with the prevailing laws and regulations, Pelindo III ensures that all operational activities are carried out safely by applying high standards to the aspect of Occupational Health and Safety stipulated in the Decree of the BOD of Pelindo III No. 37/KPTS.UM.7.03/P.III-1995 on OHS Policy in Pelindo III dated 28 August 1995.

The Company also implements OHS Management System in 17 Port Branches and the Head Office. The following table lists the Ports that have implemented OHS Management System, along with the certificate number and the validity period:

Sertifikat SMK3
Certificate of OHS Management System

No.	Cabang Pelabuhan / Port Branch	Auditor SMK3 / OHS Management System Auditor	Nomor Sertifikat / Certificate Number	Masa Berlaku / Validity Period	Keterangan / Description
1	Kantor Pusat / Head Office	TUV Rheinland	No. 33 Tahun 2019 / No. 33 of 2019	29 Maret 2019 s.d. 28 Maret 2022 / March 29, 2019 to March 28, 2022	
2	Tanjung Perak				
3	Gresik	TUV Rheinland	No. 161 Tahun 2018 / No. 161 of 2018	30 Juli 2018 s.d. 30 Juli 2021 / July 30, 2018 to July 30, 2021	Dalam Proses Pembaruan / In renewal process
4	Tanjung Tembaga	TUV Rheinland	REG. SMK3.2020.TUV. SK.2307	17 September 2020 s.d.16 September 2023 / September 17 2020 to September 16, 2023	
5	Tanjung Emas				
6	TPKS	TUV Rheinland	No. 33 Tahun 2019 / No. 33 of 2019	29 Maret 2019 s.d. 28 Maret 2022 / March 29, 2019 to March 28, 2022	
7	Tanjung Intan				
8	Banjarmasin	PT Sucofindo Indonesia	REG.SMK3.2020.TUV. SK-2271	17 September 2020 s.d.16 September 2023 / September 17 2020 to September 16, 2023	
9	Sampit	TUV Rheinland	No. 161 Tahun 2018 / No. 161 of 2018	30 Juli 2018 s.d. 19 Juli 2021 / July 30, 2018 to July 19, 2021	
10	Kotabaru	TUV Rheinland	REG.SMK3.2020.TUV. SK-2272	17 September 2020 s.d.16 September 2023 / September 17 2020 to September 16, 2023	
11	Kumai		REG.SMK3.2020.TUB. SK-2326		
12	Benoa	TUV Rheinland	No. 33 Tahun 2019 / No. 33 of 2019	29 Maret 2019 s.d. 29 Maret 2022 / March 29, 2019 to March 29, 2022	



Sertifikat SMK3
Certificate of OHS Management System

No.	Cabang Pelabuhan / Port Branch	Auditor SMK3 / OHS Management System Auditor	Nomor Sertifikat / Certificate Number	Masa Berlaku / Validity Period	Keterangan / Description
13	Tenau Kupang	TUV Rheinland		29 Maret 2019 s.d. 28 Maret 2022 / March 29, 2019 to March 28, 2022	
14	Lembar	TUV Rheinland	No. 33 Tahun 2019 / No. 33 of 2019		
15	Tanjung Wangi	TUV Rheinland			
16	Celukan Bawang	TUV Rheinland	REG.SMK3.2020.TUV.SK-2305	17 September 2020 s.d. 16 September 2023 / September 17 2020 to September 16, 2023	
17	Bima	TUV Rheinland	REG.SMK3.2020.TUV.SK-2308		
18	Maumere	TUV Rheinland	REG.SMK3.2020.TUV.SK-2320		
19	Bagendang	TUV Rheinland	-	-	Sertifikat Belum Keluar / Certificate Not yet available
20	Bumiharjo	TUV Rheinland	-	-	

Sistem Manajemen Pengaman Pelabuhan Internasional

Pelindo III telah menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan Pelabuhan mengacu pada Amandemen Konvensi *International Safety of Life at Sea* (SOLAS) 1974 Bab XI-2 tentang *International Ship and Port Facility Security Code* (ISPS Code) dan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 33 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Amanademen SOLAS 1974 tentang ISPS Code di Wilayah Indonesia. Saat ini ISPS Code telah diterapkan pada 10 Cabang Pelabuhan dan 1 UPP di lingkungan Perseroan, yaitu:

International Port Security Management System

Pelindo III has implemented a Port Security Management System which refers to the Amendment of the International Safety of Life at Sea Convention (SOLAS) 1974 Chapter XI-2 on International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) and Decree of the Minister of Transportation No. KM.33 of 2003 on the Implementation of SOLAS Amendment 1974 regarding ISPS Code within the Territory of Indonesia. Currently, the ISPS Code has been applied to ten Port Branches and one UPP within the Company, namely:

Sertifikat ISPS Code
Certificate of ISPS Code

No.	Cabang Pelabuhan / Port Branch	Auditor SMK3 / OHS Management System Auditor	Nomor Sertifikat / Certificate Number	Masa Berlaku / Validity Period	Keterangan / Description
1	Tanjung Perak	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut / Directorate General of Sea Transportation	002-0096-DN	25 November 2019 s.d. 24 November 2024 / November 25, 2019 to November 24, 2024	
2	Gresik		02-0273-DN	10 Desember 2018 s.d. 3 Februari 2024 / December 10 2018 to February 3, 2024	
3	Tanjung Emas		002-0075-DN	25 November 2019 s.d. 17 Agustus 2024 / November 25, 2019 to August 17, 2024	



Sertifikat ISPS Code
Certificate of ISPS Code

No.	Cabang Pelabuhan / Port Branch	Auditor SMK3 / OHS Management System Auditor	Nomor Sertifikat / Certificate Number	Masa Berlaku / Validity Period	Keterangan / Description
4	Tanjung Intan		002-0163-DN	18 Mei 2016 s.d. 2 Januari 2021 / May 18, 2016 to January 2, 2021	<i>On progress dilaksanakan sementara mendapatkan surat pernyataan Short Term Statement of Compliance of a Port Facility / On progress while obtaining a Short Term Statement of Compliance of a Port Facility</i>
5	TPKS		Surat Pernyataan Nomor: KL.94/ISPS/DN/ST-2021	18 Maret 2021 s.d. 17 Agustus 2021 / March 18, 2021 to August 17, 2021	
6	Banjarmasin		02-0074-DN	25 November 2019 s.d. 17 Agustus 2024 / November 25, 2019 to August 17, 2024	
7	Kotabaru		002-0225-DN	16 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2024 / January 16, 2020 to December 31, 2024	
8	Bagendang	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut / Directorate General of Sea Transportation	02-0467-DV	27 Januari 2021 s.d. 28 Desember 2025 / January 27, 2021 to December 28, 2025	
9	Benoa		002-0176-DN	19 November 2018 s.d. 15 November 2023 / November 19, 2018 to November 15, 2023	
10	Tenau Kupang		02-0345-DN	24 Maret 2020 s.d. 21 Oktober 2024 / March 24, 2020 to October 21, 2024	
11	Lembar		02-0182-DN	7 Oktober 2019 s.d. 22 Agustus 2024 / October 7, 2019 to August 22, 2024	
12	Tanjung Wangi		02-0256-DN	27 Maret 2018 s.d. 27 Maret 2023 / March 27, 2018 to March 27, 2023	
13	Celukan Bawang		02-0438-DV	16 Maret 2018 s.d. 15 November 2023 / March 16, 2018 to November 15, 2023	
14	Gilimas		KL.92/40/ISPS/DN/ST-20	2 Mei 2018 s.d. 25 April 2023 / May 2, 2018 to April 25, 2023	Pernyataan Sementara Pemenuhan Keamanan Fasilitas Pelabuhan menunggu tindak lanjut temua untuk SoPCF / Provisional Statement of Port Facility Security Fulfillment awaiting follow-up findings for SoPCF



Sertifikat ISO 22301:2019 Business Continuity Management Systems
Certificate of ISO 22301:2019 Business Continuity Management Systems

No.	Cabang / Branch	Versi / Version	Nomor Sertifikat / Certificate Number	Badan Sertifikasi / Certifying Body	Masa Berlaku / Validity Period
1	Kantor Pusat / Head Office	2019	ICAD200351	ICA	14 Desember 2020 - 14 Desember 2021 / December 14, 2020 - December 14, 2021
2	Terminal Jamrud	2019			
3	Terminal Nilam	2019			
4	Terminal Mirah	2019			
5	TPKS	2019			
6	Tanjung Emas	2019			
7	TPKB	2019			
8	Pelabuhan Trisakti	2019			
9	Pelabuhan Benoa	2019			

Sertifikat ISO 20000 Sistem Manajemen Layanan IT
Certificate of ISO 20000 IT Service Management System

No.	Cabang / Branch	Versi / Version	Nomor Sertifikat / Certificate Number	Badan Sertifikasi / Certifying Body	Masa Berlaku / Validity Period
1	Kantor Pusat / Head Office	2011	ITMS 705960	BSI	13 Juli 2019 - 29 September 2021 / July 13, 2019 - September 29, 2021



PERISTIWA PENTING 2020

2020 Significant Events

Januari • January



10

Januari • January 2020



13

Januari • January 2020

Terapkan K3 dengan Baik, Pelindo III Sabet 7 Penghargaan

Dalam rangka peringatan Bulan K3 Nasional Tahun 2020, Pelindo III berpartisipasi dalam Apel Pembukaan Bulan K3 Nasional Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur dan berhasil meraih 7 penghargaan sekaligus.

Pelindo III Received 7 Awards for the Proper Implementation of OHS

In commemorating the National OHS Month of 2020 Pelindo III participated in the National OHS Month Opening Ceremony of the Manpower Department of East Java Province and won 7 awards at once.

Pelindo III Bagikan Ribuan Paket Sembako bagi Korban Banjir Gresik

Pelindo III menyalurkan bantuan ribuan paket sembako bagi korban-korban terdampak banjir di wilayah Desa Iker-Iker Geger, Gresik dan turut membantu perbaikan tanggul-tanggul yang Jebol akibat banjir.

Pelindo III Distributed Thousands of Staple Needs Packages for the Flood Victims in Gresik

Pelindo III donated thousands of staple needs packages for the flood victims in Desa Iker-Iker Geger, Gresik, and assisted in the repair of embankments damaged by the flood.



15

Januari • January 2020

Pelindo III Group Gelar Khitan Massal Serentak di 3 Kota

Pelindo III Group menggelar Khitan Massal untuk 300 anak yang digelar serentak di 3 kota, yaitu Surabaya, Semarang, dan Banjarmasin dalam rangka peringatan HUT 3 anak perusahaan Pelindo III, yaitu BJTI Port (18 tahun), Pelindo Marines (8 tahun), dan Terminal Teluk Lamong (6 tahun).

Pelindo III Group Held a Simultaneous Mass Circumcision in Three Cities

Pelindo III Group held a Mass Circumcision for 300 children simultaneously in 3 cities, namely Surabaya, Semarang, and Banjarmasin, in commemoration of the Anniversary of Pelindo III's subsidiaries, namely BJTI Port (18 years), Pelindo Marines (8 years), and Terminal Teluk Lamong (6 years).



17

Januari • January 2020

Gelaran Donor Darah Bersama PMI

Pelindo III menyelenggarakan kegiatan donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) di 4 wilayah yang menjadi area kerja Pelindo III. Kegiatan donor darah dilaksanakan selama dua hari dalam rangka Bulan K3 Nasional 2020.

Blood Donation Event in Cooperation with the Indonesian Red Cross

Pelindo III held a blood donation activity in cooperation with the Indonesian Red Cross (PMI), in 4 work areas of Pelindo III. The activity was held for two days in commemoration of the National OHS Month 2020.



20

Januari • January 2020

Kunjungan Presiden RI pada Proyek Pelabuhan Multipurpose Labuan Bajo

Rencana pembangunan Pelabuhan Multipurpose di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) dikunjungi oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulya, serta Menteri Pariwisata, Menparekraf Wishnutama Kusubandio.

Visit of the President of Republic of Indonesia to Labuan Bajo Multipurpose Port Project

The President of the Republic of Indonesia, Ir. Joko Widodo, visited the area planned for the construction of a Multipurpose Port in Labuan Bajo, East Nusa Tenggara (NTT). The president was accompanied by the Transportation Minister, Budi Karya Sumadi; SOE Minister, Erick Thohir; PUPR Minister, Basuki Hadi Mulya; and Tourism and Creative Economy Minister, Wishnutama Kusubandio.

Gelaran Ajang Adu Inovasi Pelindo III, Inno Reactivation

Pelindo III menginisiasi ajang adu inovasi bernama Inno Reactivation yang menampilkan berbagai inovasi menarik dan inovatif karya pegawai Pelindo III yang dirancang untuk keperluan internal maupun eksternal Perseroan.

Pelindo III Held an Innovation Competition Event, Inno Reactivation

Pelindo III initiated an innovation competition called Inno Reactivation, which featured various interesting and advanced innovations by Pelindo III's employees designed for the Company's internal and external needs.



31

Januari • January 2020



Februari • February

Pelindo III Pelabuhan Tanjung Emas Gelar Apel Bulan K3

Dalam rangka memperingati bulan K3 Nasional tahun 2020, Pelindo III di wilayah kerja Pelabuhan Tanjung Emas Semarang menggelar apel bulan K3 yang diikuti oleh seluruh pegawai Pelindo III Regional Jawa Tengah.

Pelindo III Held OHS Month Commemoration Ceremony at Tanjung Emas Port

In commemorating the National OHS Month 2020, Pelindo III held an OHS month commemoration ceremony at the work area of Tanjung Emas Port, Semarang, which was attended by all Pelindo III's employees of Central Java Region.



10

Februari • February 2020



10

Februari • February 2020

Pelindo III Gelar Inaugurasi I'M Portizen

Bertempat di Kafe KUIKOPIKU, Pelindo III menyelenggarakan kegiatan inaugurasi atau pengukuhan 15 anggota komunitas I'M Portizen, komunitas pecinta dunia maritim di bawah naungan Pelindo III, yang dihadiri langsung oleh Direktur SDM Toto Heli Yanto dan VP Corporate Communication Wilis Aji Wiranata.

Pelindo III Held an Inauguration of I'M Portizen

Pelindo III held an inauguration activity for 15 members of the I'M Portizen community, a maritime lover community under the auspices of Pelindo III. Held at KUIKOPIKU Café, this event was attended directly by the Company's HR Director, Toto Heli Yanto, and VP Corporate Communication, Wilis Aji Wiranata.



14

Februari • February 2020

Pelindo III Jalin Kerja sama dengan 8 BUMN Kembangkan Benoa Maritim Tourism Hub

Pelindo III yang ditunjuk oleh Kementerian BUMN dalam mengembangkan Benoa Maritim Tourism Hub di Benoa, Bali menjalin kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama dengan 8 BUMN dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Benoa Maritim Tourism Hub di Hotel Inaya Putri Bali.

Pelindo III Cooperated with 8 SOEs to Develop Benoa Maritime Tourism Hub

As it was appointed by the Ministry of SOE to develop the Benoa Maritime Tourism Hub in Benoa, Bali, Pelindo III entered into a joint agreement and cooperation agreement with 8 SOEs during the Benoa Maritime Tourism Hub Development Coordination Meeting at Hotel Inaya Putri Bali.



18

Februari • February 2020

Pelindo III Ditunjuk Layani Jasa Pandu dan Tunda di Selat Malaka

Kementerian Perhubungan menunjuk Pelindo III untuk memberikan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di Selat Malaka, Selat Phillip, dan Selat Singapura sebagai wilayah perairan pandu luar biasa alur pelayaran *Traffic Separation Scheme* (TSS) yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura.

Pelindo III was Appointed to Provide Pilot and Tugboat Services in Malacca Strait

The Ministry of Transportation appointed Pelindo III to provide pilot and tugboat services for ships in the Malacca Strait, Phillip Strait, and Singapore Strait as the extraordinary pilot waters of the Traffic Separation Scheme (TSS) shipping route bordering Malaysia and Singapore.



21

Februari • February 2020

Pelindo III Gelar Sosialisasi "Simplifikasi Proses Bisnis Ekspor"

Pelindo III menggelar kegiatan sosialisasi "Simplifikasi Proses Bisnis Ekspor" di Kantor Pusat Pelindo III Surabaya, yang dihadiri oleh Direktur Utama Pelindo III, Doso Agung, perwakilan asosiasi pengguna jasa, pengusaha *shipping line*, dan para eksportir.

Pelindo III Held a Socialization on "Simplification of Export Business Process"

Pelindo III held a socialization activity on "Simplification of the Export Business Process" at the Surabaya Head Office, which was attended by the President Director of Pelindo III, Doso Agung, representatives of service users' associations, shipping line entrepreneurs, and exporters.



23

Februari • February 2020

Pelindo III Resmikan Tempat Upacara Melasti di Kawasan Pelabuhan Benoa

Kontribusi Pelindo III terhadap penguatan adat dan budaya masyarakat setempat diwujudkan melalui pembangunan tempat upacara Melasti bagi umat Hindu di Pedungan Bali. Peresmian dihadiri oleh Direktur Utama Pelindo III, Doso Agung dan Gubernur Bali Wayan Koster serta ribuan masyarakat desa adat Bali.

Pelindo III Inaugurated the Melasti Ceremony Venue in Benoa Port Area

Pelindo III's contribution to strengthening the customs and culture of the local community is manifested through the construction of a Melasti ceremony venue for Hindus in Pedungan Bali. The inauguration was attended by the President Director of Pelindo III, Doso Agung, and the Governor of Bali, Wayan Koster, as well as thousands of Balinese traditional village communities.



29

Februari • February 2020

Pelindo III Tandatangani Nota Kesepakatan untuk Tingkatkan Ekspor di Pelabuhan Benoa

Pelindo III bersama Pemprov Bali, Bea Cukai, DPW ALFI/ILFA Bali, dan PT Meratus Line menandatangani nota kesepakatan tentang Pemberian Insentif Jasa Kepelabuhanan Produk Eskpor dari Bali untuk Peningkatan Aktivitas dan Efisiensi Logistik Angkutan guna menunjang sektor pariwisata dan perdagangan.

Pelindo III Signed a Memorandum of Understanding to Improve Exports at Benoa Port

Pelindo III, together with Bali Provincial Government, Customs, DPW ALFI/ILFA Bali, and PT Meratus Line, signed a memorandum of understanding regarding the Incentives for Port Services for Export Products from Bali to Increase Transportation Logistics Activities and Efficiency to support the tourism and trade sectors.

Maret • March

Pelindo III Gelar Bersih-Bersih Terminal Penumpang

Guna mengantisipasi penyebaran virus Covid-19, seluruh jajaran pegawai Pelindo III beserta unsur kemaritiman yang tersebar di berbagai regional menggelar kegiatan bersih-bersih massal di terminal penumpang di masing-masing pelabuhan hingga seluruh kantor operasional Pelindo III.

- Pelindo III Conducted Passenger Terminal Cleaning-up Activity
- In order to anticipate the spread of the Covid-19 virus, all Pelindo III's employees, together with maritime elements and personnel spread over various regions in Indonesia, held mass cleaning activities at passenger terminals in each port and all operational offices of Pelindo III.



13

Maret • March 2020

April • April



9

April • April 2020

Peduli Kesehatan, Pelindo III Berikan Bantuan Mobil Ambulans Gratis

Sebagai wujud kepedulian kepada sesama, Pelindo III memberikan bantuan satu unit mobil ambulans kepada Pondok Pesantren Mabadi'ul Ihsan yang berlokasi di Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi.

Pelindo III Donated an Ambulance as a Form Health Care

As a form of care to public health, Pelindo III donated an ambulance to Pondok Pesantren Mabadi'ul Ihsan in Karangdoro Village, Tegalsari District, Banyuwangi Regency.



17

April • April 2020

Pelindo III Salurkan Bantuan Sembako bagi Korban Banjir Gresik

Pelindo III memberikan bantuan bagi warga Desa Iker-Iker Geger, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik yang sedang mengalami musibah banjir bandang. Bantuan diterima langsung oleh Kepala Desa Iker-Iker Geger.

Pelindo III Distributed Staple Needs for Gresik Flood Victims

Pelindo III provided assistance for the people of Iker-Iker Geger Village, Cerme District, Gresik Regency who suffered from flood disaster. The donation was received directly by the Chief of Iker-Iker Geger Village.



24

April • April 2020

Pelindo III Bantu APD ke 7 Rumah Sakit di Surabaya dan Bali

Pelindo III menyalurkan bantuan penanganan Covid-19 sebanyak 1.500 baju APD atau hazmat lengkap untuk tujuh rumah sakit rujukan di Surabaya dan Bali.

Pelindo III Provided PPE for Seven Hospitals in Surabaya and Bali

Pelindo III provided assistance on Covid-19 handling in the form of 1,500 PPEs or hazmat suits for seven hospitals in Surabaya and Bali.

Mei • May



14

Mei • May 2020

BJTI Port Berikan Bantuan THR kepada 1000 Tenaga Kerja Bongkar Muat

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJIT Port), anak usaha Pelindo III, memberikan bantuan Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1441 H kepada 1000 Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Terminal Berlian Tanjung Perak, Surabaya.

BJTI Port Provided Religious Allowance (THR) Assistance for 1,000 Workers

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJIT Port), a subsidiary of Pelindo III, provided Religious Allowance (THR) assistance in celebrating Eid-al Fitri 1441 H for 1,000 Loading and Unloading Workers at Berlian Terminal of Tanjung Perak, Surabaya.



Juni • June

Pelindo III Gelar Rapid Test Gratis di Pelabuhan Tanjung Wangi dan Penyeberangan Ketapang Banyuwangi

Pelindo III terus mewujudkan kebijakan Pemerintah dalam upaya memutus penyebaran Covid-19 di Indonesia melalui program *rapid test* gratis di Pelabuhan Tanjung Wangi dan Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Banyuwangi.

• Pelindo III Held a Free Rapid Test at Tanjung Wangi Port and Ketapang Banyuwangi Crossing

Pelindo III continued to actively realize government's policy in order to break the spread of Covid-19 in Indonesia by holding a free rapid test activity at Tanjung Wangi Port and Ketapang Banyuwangi Crossing.



2

Juni • June 2020



6

Juni • June 2020

Pelindo III Gelar Rapid Test Gratis di Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo

Program bantuan *rapid test* gratis Covid-19 digelar Pelindo III di Pelabuhan Tanjung Tambaga Kota Probolinggo yang diikuti nelayan hingga anak buah kapal (ABK) antar pulau dan dibantu oleh pihak KKP, Dinas Kesehatan, dan gugus tugas Covid-19 setempat.

Pelindo III Held a Free Rapid Test at Tanjung Tembaga Probolinggo Port

Pelindo III held a free Covid-19 rapid test activity at Tanjung Tembaga Port of Probolinggo which was joined by the surrounding fishermen and crew, and assisted by the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, local Health Department, and Covid-19 Task Force.



7

Juni • June 2020

Kerja Sama Pelindo III dan BKPM Dukung Investor Korea untuk Berinvestasi di Indonesia

Pelindo III bekerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) secara daring telah melakukan penandatanganan *Non Disclosure Agreement* (NDA) dengan perusahaan asal Korea, SK Engineering and Construction dalam pembangunan fasilitas *cold storage* dengan teknologi pemanfaatan LNG di Terminal Teluk Lamong.

Pelindo III Cooperated with BKPM to Support Korean Investment in Indonesia

Pelindo III, in cooperation with the Investment Coordinating Board (BKPM), held a signing of a Non-Disclosure Agreement (NDA) virtually with a Korean-based company, SK Engineering and Construction, in the framework of developing a cold storage facility with the LNG utilization technology at Teluk Lamong Terminal.



Pelindo III Teken MoU dengan HIPMI Tingkatkan Kerja Sama Bisnis dengan Swasta

Pelindo III dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) bersinergi memperkuat kerja sama BUMN dan swasta melalui investasi pada proyek strategis yaitu Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) di Pelabuhan Benoa Bali dan marina di Pelabuhan Boom Banyuwangi.

Pelindo III signed an MoU with HIPMI to Improve Business Cooperation with Private Sector

Pelindo III and the Indonesian Young Entrepreneurs Association (HIPMI) synergized to strengthen the cooperation between SOEs and private sector through investments in the strategic project of Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) at Benoa Bali Port and marina at Boom Banyuwangi Port.



10

Juni • June 2020

Juli • July



10

Juli • July 2020

Internalisasi Akhlak BUMN, Pelindo III Cetak Rekor MURI

Pelindo III Grup sukses menggelar webinar Internalisasi dan Implementasi core values BUMN yakni AKHLAK melalui aplikasi daring yang diikuti 5.017 karyawan. Acara ini berhasil tercatat di Museum Rekor Dunia - Indonesia (MURI) sebagai rekor dunia sosialisasi secara daring etos kerja baru BUMN kepada karyawan dengan peserta terbanyak.

Internalization of SOE's AKHLAK, Pelindo III Broke MURI's Record

Pelindo III Group succeeded in holding a webinar via online application for internalization and implementation of core values of SOE, namely AKHLAK, which was attended by 5,017 employees. This event managed to break the record of Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI) as a world record for online socialization activities on new work ethos of SOE to employees with the greatest number of participants.

Pelindo III Salurkan Bantuan Bahan Pangan kepada Warga Bali

Pelindo III menyalurkan bantuan bahan pangan 5 ribu paket kepada warga Bali yang terdampak pandemi Covid-19. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Direktur Utama Pelindo III, U. Saefudin Noer kepada Gubernur Bali, Dr. Ir. I Wayan Koster, M.M.

Pelindo III Distributed Staple Food for the People of Bali

Pelindo III distributed staple food amounting to 5,000 packages to the people of Bali suffering from Covid-19 pandemic. The handover was symbolically conducted by the President Director of Pelindo III, U. Saefudin Noer to the Governor of Bali, Dr. Ir. I Wayan Koster, M.M.



12

Juli • July 2020



24

Juli • July 2020

Pelindo III dan Dirjen Pajak Kolaborasi Integrasi Data Perpajakan

Pelindo III bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berkolaborasi melalui penandatanganan nota kesepahaman integrasi data perpajakan melalui sarana berbasis teknologi informasi di kantor Regional Pelindo III Semarang.

Pelindo III and the Directorate General of Taxation Collaborated for Taxation Data Integration

Pelindo III signed a Memorandum of Understanding and collaborated with the Directorate General of Taxation of the Ministry of Finance regarding taxation data integration through information technology-based facility at Pelindo III Semarang Regional Office.

Agustus • August



2

Agustus • August 2020

Pelindo III Salurkan Bantuan Hewan Kurban

Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1441 H, Pelindo III membagikan bantuan hewan kurban berupa 129 ekor sapi dan 223 ekor kambing kepada sejumlah masjid dan masyarakat di wilayah kerjanya.

Pelindo III Distributed Sacrificial Cattle Donation

In celebrating Eid-al Adha 1441 H, Pelindo III distributed sacrificial cattle donation amounting to 129 cows and 223 goats to a number of mosques and the community in its operational areas.

Pelindo III Bantu Perbaikan Rumah dan Sarana Ibadah di Cilacap

Pelindo III Cabang Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap menyalurkan bantuan hibah Bina Lingkungan berupa program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 10 unit dan 1 objek sarana ibadah untuk warga di Kabupaten Cilacap.

Pelindo III Assisted the Renovation of Houses and Religious Facilities in Cilacap

Tanjung Intan Cilacap Port Branch of Pelindo III distributed Community Development grant in the form of House Renovation program for 10 underprivileged houses and 1 religious facility in Cilacap Regency.



3

Agustus • August 2020



12

Agustus • August 2020

Pelindo III Raih Juara 1 Paritrana Award 2019

Komitmen Pelindo III dalam memberikan jaminan sosial bagi para pegawainya ini mendapat apresiasi tinggi berupa penghargaan juara 1 Paritrana Award dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kemanusiaan, yang disampaikan langsung oleh Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia.

Pelindo III Emerged the 1st Winner of Paritrana Award 2019

The commitment of Pelindo III to providing social guarantee for its employees was highly recognized through the conferment of 1st Winner of Paritrana Award from the Coordinating Ministry for Human Development and Cultural Affairs, which was given directly by the Vice President of the Republic of Indonesia, KH. Ma'ruf Amin, and the Minister of Manpower, Ida Fauzia.



14

Agustus • August 2020

Pelindo III Distribusikan Bantuan ke RS Rujukan dan Masyarakat

Pelindo III menyerahkan bantuan 12.000 alat pelindung diri (APD) Hazmat ke tujuh rumah sakit rujukan di Surabaya dan Sidoarjo dalam rangka mendukung penanganan Covid-19.

Pelindo III Distributed Donations to Hospitals and the Community

Pelindo III donated 12,000 PPEs and Hazmat suits to seven hospitals in Surabaya and Sidoarjo to support Covid-19 handling efforts.



17

Agustus • August 2020

Pegawai Pelindo III Ikuti Upacara HUT RI 75 Secara Virtual

Dalam memperingati HUT RI ke-75, seluruh pegawai Pelindo III di berbagai wilayah secara serempak mengikuti upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-75 secara virtual yang diselenggarakan di Istana Negara.

Employees of Pelindo III Held a Virtual Flag Hoisting Ceremony of the 75th Independence Day of the Republic of Indonesia

To commemorate the 75th Independence Day of the Republic of Indonesia, all employees of Pelindo III in various regions attended a virtual flag hoisting ceremony simultaneously with the ceremony at Istana Negara.



September • September

Pelindo III Raih Apresiasi dari Disnakertrans

Provinsi Jawa Timur

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pelindo III atas kontribusi secara ekonomi yang diberikan kepada negara, khususnya Jawa Timur dengan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pegawainya selama pandemi Covid-19 berlangsung.

Pelindo III Received an Appreciation from the Manpower and Transmigration Department of East Java Province

The Manpower and Transmigration Department of East Java Province highly appreciated the economic contribution of Pelindo III to the state, especially to East Java, as the Company did not carry out employment termination process for its employees during the Covid-19 pandemic situation.



4

September • September 2020



11

September • September 2020

Peninjauan Proyek Pembangunan Terminal Multipurpose Labuan Bajo

Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo bersama Direktur Utama Pelindo III, U. Saefudin Noer dan Direktur Teknik Boy Robyanto meninjau proyek pembangunan Terminal Multipurpose Labuan Bajo di daerah Wae Klambu.

Visit to the Construction Project of Multipurpose Terminal of Labuan Bajo

The Deputy Minister of SOE II, Kartika Wirjoatmodjo, with the President Director of Pelindo III, U. Saefudin Noer, and the Director of Engineering, Boy Robyanto, visited the construction project of Abuan bajo multipurpose Terminal in Wee Klambu area.



24

September • September 2020

Kolaborasi Pelindo III dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Hijaukan Pelabuhan

Pelindo III bersama Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak menggelar kegiatan Padat Karya Bersih Lingkungan dan Penghijauan di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional 2020.

Collaboration of Pelindo III and Main Port Authority Office of Tanjung Perak to Clean Port's Environment

Together with the Main Port Authority Office of Tanjung Perak, Pelindo III held an Environmental Cleaning and Greening Activities in Tanjung Perak Port area of Surabaya to commemorate the National Transportation Day of 2020.



Oktober • October

Pelindo III Grup Raih Penghargaan K3 Tahun 2020

Grup Pelindo III memperoleh apresiasi penghargaan pada bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kategori Kecelakaan Nihil dalam tiga tahun berturut-turut dan penghargaan penyusunan program P2 HIV-AIDS di tempat kerja yang disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja, Ibu Ida Fauziah.

Pelindo III Group Received OHS Award of 2020

Pelindo III Group received an award of Occupational Health and Safety for the category of Nil Work Accident for three consecutive years, and an award for the preparation of P2 HIV-AIDS program at workplace, given by the Minister of Manpower, Ms. Ida Fauziah.



9

Oktober • October 2020



16

Oktober • October 2020

Pelindo III Selenggarakan Giat Bersih Pantai di Pelabuhan Benoa

Pelindo III melakukan aksi tanggap atas fenomena kiriman sampah laut di Pelabuhan Benoa Bali melalui kegiatan bersih pantai di area Dumping I bersama sejumlah stakeholders.

Pelindo III Held Beach Cleaning Activity at Benoa Port

Pelindo III responded to the ocean waste occurrence at Benoa Bali Port by holding beach cleaning activity at Dumping I area together with the Company's stakeholders.



16

Oktober • October 2020

Dukung Program Sosial Daerah Tertinggal, Pelindo III Sumbangkan Mobil Rescue

Pelindo III menunjukkan kepeduliannya terhadap daerah tertinggal berupa pemberian bantuan satu buah mobil rescue kepada Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Pelindo III Donated a Rescue Car to Support the Social Program for Underprivileged Area

Pelindo III realized its care for underprivileged area by donating one unit of rescue car to Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) through its Partnership and Community Development Program (PKBL).



19

Oktober • October 2020

Pelindo III Berkolaborasi Bangun Normalisasi Alur Khusus Nelayan

Melalui rangkaian program PKBL yang dijalankan, Pelindo III berkolaborasi dengan masyarakat nelayan sekitar dalam kegiatan normalisasi alur khusus nelayan dan revitalisasi kampung wisata Sotoh Laut di Terminal Teluk Lamong, Surabaya.

Pelindo III Collaborated to Develop Normalization of Special Flow for Fishermen

Through a series of PKBL program carried out, Pelindo III collaborated with the surrounding fisherman community in developing the normalization of special flow for fishermen and revitalization of tourism village of Sotoh Laut at Teluk Lamong Terminal of Surabaya.



27

Oktober • October 2020

Pelindo III Serahkan Mobil Hadiah Paritrana Award pada Serikat Pegawai

Komitmen Pelindo III dalam memenuhi kesejahteraan pegawainya menuai pengakuan eksternal dengan diperolehnya juara 1 Paritrana Award 2019 dan satu unit mobil. Perseroan kemudian menyerahkan hadiah mobil tersebut kepada serikat pegawai Pelindo III guna mempererat hubungan harmonisasi dan membagikan kebahagiaan bersama para pegawainya.

Pelindo III Handed Over the Prize Car of Paritrana Award to Labor Union

The commitment of Pelindo III to fulfilling its employees' welfare received an external recognition in the form of 1st Winner of Paritrana Award 2019 and a prize of one car unit. The Company then handed the prize over to Pelindo III labor union to improve harmony and spread happiness with the employees.

November • November

Port Virtual Run and Ride 2020 Resmi Dimulai

Pelindo III menggelar Port Virtual Run and Ride 2020 dengan tema "Kepemimpinan Teknologi". Kegiatan tersebut diselenggarakan secara virtual, sebagai implementasi *Technology Leadership* di tengah pandemi. Sambutan kegiatan tersebut bertempat di halaman kantor Pelindo III Regional Jawa Timur di Surabaya.

Commencement of Port Virtual Run and Ride 2020

Pelindo III held the Port Virtual Run and Ride 2020 with the theme "Technology Leadership". The activity was held virtually as an implementation of Technology Leadership amid the pandemic. The opening speech was held at the courtyard of East Java Regional Office of Pelindo III in Surabaya



15

November • November 2020



Kolaborasi Pelindo III dan KAI, Optimalkan Aset dan Inovasi Proses Bisnis

Pelindo III dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU tentang Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas Optimalisasi Bisnis dan Aset BUMN serta *Logistic Supply Chain*, bertempat di Sinergi Lounge Kementerian BUMN, Jakarta.

Collaboration of Pelindo III and KAI to Optimize Assets and Business Process Innovation

Pelindo III and PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) signed a Memorandum of Understanding (MoU) on the Collaboration for the Utilization of Business and Asset Optimization Facility of SOE and Logistic Supply Chain, at the Synergy Lounge of Ministry of SOE, Jakarta.



20

November • November 2020

25

November • November 2020

Pelindo III Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik KIP

Pelindo III berhasil mendapatkan penghargaan untuk Badan Publik Kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kualifikasi Informatif pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2020 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia.

Pelindo III Received Public Information Disclosure Award from KIP

Pelindo III succeeded in obtaining an award for a public institution of the category of State-Owned Enterprise (SOE) of informative qualification in the Public Information Disclosure Award 2020 held by the Central Information Commission (KIP) of the Republic of Indonesia.



25

November • November 2020

TPB Gelar Pembekalan Guru di Hari Guru Nasional

Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional, anak usaha Pelindo III, Terminal Petikemas Surabaya (TPS) bekerja sama dengan lembaga pembelajaran menyelenggarakan pelatihan pembuatan video mengajar secara daring bagi 520 guru di tingkat PAUD, TK, hingga SD di Surabaya.

TPB Organized Teacher Coaching Activity on the National Teacher's Day

To commemorate the National Teacher's Day, Terminal Petikemas Surabaya (TPS), a subsidiary of Pelindo III cooperated with an educational institution to hold an online training activity on teaching video-making for 520 teachers of PAUD, kindergartens, and primary schools in Surabaya.



Desember • Desember

Akselerasi Green Port di Terminal Multipurpose Labuan Bajo

Percepatan pembangunan Terminal Multipurpose Labuhan dan Green Port berbasis kolaborasi, *technology leadership* dan kelestarian lingkungan dilakukan Pelindo III melalui penandatanganan Memorandum of Collaboration (MoC) tentang Kerja Sama Penyediaan Layanan Jasa Perbankan dan Pengembangan Terminal Multipurpose Labuan Bajo antara Pelindo III bersama Bank BNI, Bank NRI, dan Bank Mandiri di Jakarta.

Green Port Acceleration at Labuan Bajo Multipurpose Terminal
Pelindo III accelerated the development of Labuan Bajo Multipurpose Terminal and Green Port based on collaboration, technology leadership, and environmental conservation through the signing of Memorandum of Collaboration on the Provision of Banking Service and Development of Labuan Bajo Multipurpose Terminal, between Pelindo III and Bank BNI, Bank NRI, and Bank Mandiri in Jakarta.



1

Desember • Desember 2020



2

Desember • Desember 2020



8

Desember • Desember 2020

Pelindo III Kolaborasi dengan Pertamina Efisienkan Biaya Distribusi Energi

Pelindo III bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) dalam kegiatan pengangkutan material bioenergi ke terminal terpadu bahan bakar minyak Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dalam perjanjian tersebut, Pelindo III akan mendukung transportasi bahan baku energi terbarukan milik Pertamina dari Gresik melalui jalur laut menggunakan kapal ke Surabaya.

Pelindo III Collaborated with Pertamina to Improve the Efficiency of Energy Distribution

Pelindo III collaborated with PT Pertamina (Persero) in the transportation of bioenergy material to the fuel oil integrated terminal of Tanjung Perak Surabaya Port. In the agreement with Pertamina, Pelindo III will support the transportation of renewable energy raw material of Pertamina from Gresik to Surabaya through sea.

Pelindo III Raih Penghargaan Kader Pimpinan Perusahaan

Majalah SWA dan NBO Indonesia memberikan penghargaan kepada Pelindo III atas prestasinya dalam menciptakan kader pimpinan perusahaan. Penghargaan diserahkan secara daring dalam acara *Indonesia Best Companies in Creating Leaders from Within 2020: Digital Leaders and New Ways of Developing Talent*.

Pelindo III Received an Award in Company Leadership Regeneration

SWA Magazine and NBO Indonesia conferred an award to Pelindo III for its achievement in creating company leadership regeneration. The awarding ceremony was held virtually in the event of *Indonesia Best Companies in Creating Leaders from Within 2020: Digital Leaders and New Ways of Developing Talent*.



11

Desember • Desember 2020

Virtual Port Run and Ride Pelindo III 2020 Raih Dua Rekor MURI

Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) memberikan catatan rekor untuk Pelindo III atas prestasinya dalam mengajak masyarakat untuk hidup sehat di tengah wabah Covid-19 melalui gelaran *Port Virtual Run and Ride 2020* yang diikuti oleh sebanyak 15.056 orang.

Virtual Port Run and Ride 2020 of Pelindo III Broke Two MURI's Records

For its achievement in engaging the community to have a healthy lifestyle amid the Covid-19 pandemic, Pelindo III managed to break MURI's record through its *Virtual Port Run and Ride 2020* event which was attended by 15,506 people.



18

Desember • Desember 2020

Pelindo III Raih Apresiasi atas Bantuan Pembangunan Masjid Mardliyyah Islamic Center

Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU, ASEAH Eng. memberikan apresiasi kepada Pelindo III atas dukungannya dalam pembangunan Masjid Mardliyyah Islamic Center. Pemberian bantuan langsung diserahkan oleh Direktur Utama Pelindo III, U. Saefudin Noer.

Pelindo III Received an Appreciation for Its Contribution in the Development of Mardliyyah Mosque Islamic Center

The Rector of Gadjah Mada University, Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU, ASEAH Eng., delivered an appreciation to Pelindo III for its contribution in the development of Mardliyyah Mosque Islamic Center. The contribution was directly given by the President Director of Pelindo III, U. Saefudin Noer.



22

Desember • Desember 2020



23

Desember • Desember 2020

Dukung Penanganan Covid-19, Pelindo III Sumbang Mobil Ambulans

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) menyerahkan satu unit mobil ambulans kepada Rumah Sakit PHC yang ditujukan untuk menangani pasien Covid-19. Bantuan ini diberikan langsung oleh Direktur Utama Pelindo III, U. Saefudin Noer kepada Direktur Utama RS PHC Abdul Rofid Fanany di Kantor Pusat Pelindo III.

Pelindo III Donated an Ambulance to Support Covid-19 Handling

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) donated one unit of ambulance to PHC Hospital to support the treatment for Covid-19 patients. The donation was directly given by the President Director of Pelindo III, U. Saefudin Noer, to the President Director of PHC Hospital, Abdul Rofid Fanany, at the Head Office of Pelindo III.

Pelindo III Gelar Layanan Khitanan Massal kepada 150 Anak

Pelindo III menggelar aksi sosial berupa kegiatan Khitan Massal gratis kepada 150 peserta sebagai bentuk pelayanan kesehatan dan dukungan kepada masyarakat dalam meringankan beban dampak pandemi Covid-19. Acara yang diselenggarakan selama dua hari ini dilaksanakan di Gedung Serba Guna RS PHC Surabaya dan dihadiri oleh Direktur Utama Pelindo III, U. Saefudin Noer.

Pelindo III Held Mass Circumcision for 150 Children

Pelindo III held a social activity of mass circumcision for 150 children as a form of health service and support to public health amid the Covid-19 pandemic. This activity was held for two days at PHC Hospital Surabaya Multipurpose Building and attended by the President Director of Pelindo III, U. Saefudin Noer.



LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORT







MARSETIO

Komisaris Utama
President Commissioner

LAPORAN DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS REPORT



Di tengah situasi dengan sejumlah hambatan pada tahun 2020, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi beserta seluruh jajaran terkait telah berhasil melaksanakan pengelolaan Perseroan secara baik dan optimal. Keberhasilan tersebut dapat dilihat melalui sejumlah capaian pada kinerja keuangan dan operasional Perseroan di tahun 2020, meliputi realisasi pada komponen posisi keuangan dan laporan laba rugi Perseroan, serta realisasi volume produksi pelayanan.

Amid difficult situation in 2020, the Board of Commissioners views that the Board of Directors and all personnel have properly and optimally managed the Company. This is evident in the Company's financial and operational achievements in 2020, which include realization of financial position and statement of profit or loss, as well as volume of service production.



Pemegang Saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Pelindo III mampu melalui berbagai tantangan pada tahun 2020 dengan mencatatkan sejumlah capaian keuangan dan operasional yang positif. Perseroan, melalui Direksi beserta seluruh jajaran terkait, berhasil menjalankan seluruh kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan, serta memenuhi target-target capaian sesuai Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) tahun 2020. Di samping itu, Dewan Komisaris juga telah memastikan bahwa Direksi beserta jajaran terkait menyelenggarakan pengelolaan dengan tetap mengedepankan penerapan GCG sesuai ketentuan pada standar dan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada segenap pemangku kepentingan Perseroan.

Pada kesempatan ini, Kami mewakili Dewan Komisaris akan menyampaikan laporan pengawasan pengelolaan Perseroan untuk tahun buku 2020.

Distinguished shareholders and stakeholders,

All praise to God the Almighty for His blessing that encouraged Pelindo III to pass the challenges in 2020 with positive financial and operational achievements. The Company through the Board of Directors and all personnel successfully implemented the determined policies and strategies as well as fulfilled the targets set in the 2020 Work Plan and Budget (RKAP). The Board of Commissioners also saw that the Board of Directors and their personnel have carried out management by upholding GCG principles in accordance with the applicable standards and laws, as a form of our responsibility to all stakeholders of the Company.

On this occasion, the Board of Commissioners will deliver the supervisory report on the Company's management for 2020 fiscal year.



SITUASI PEREKONOMIAN TAHUN 2020

Dewan Komisaris mengamati, tahun 2020 merupakan tahun dengan situasi khusus berupa pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19) yang kemudian menghadirkan sejumlah hambatan pada situasi perekonomian global. Dampak yang berlangsung atas situasi tersebut, misalnya, dapat diukur melalui kontraksi laju pertumbuhan ekonomi dunia yang mengacu pada laporan Bank Dunia yang dirilis Januari 2021, diestimasikan terjadi sebesar -4,3%. Kontraksi pertumbuhan ekonomi tersebut terjadi secara lebih dalam pada kelompok negara ekonomi maju, dengan estими mencapai -5,4%, dibanding pada kelompok negara ekonomi berkembang yang diestimasikan terjadi sebesar -2,6%. Pada situasi tersebut, Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai dua negara dengan ekonomi yang besar dan berpengaruh, masing-masing merealisasikan pertumbuhan sebesar -3,6% serta 2%, di samping perolehan pada negara-negara lain seperti India yang sebesar -9,6% dan Jepang yang sebesar -5,3%.

Situasi dengan sejumlah tantangan pada tahun 2020 tersebut kemudian memberikan dampak pada tingkat volume perdagangan dunia. Mengacu pada laporan *International Monetary Fund* (IMF) pada April 2021, pertumbuhan volume perdagangan dunia pada tahun 2020 terealisasi sebesar -8,5%, atau jauh berada di bawah perolehan pada tahun sebelumnya yang sebesar 0,9%. Pada realisasi volume perdagangan tersebut, volume impor dunia diketahui terkontraksi mencapai -9,1% pada negara-negara ekonomi maju dan mencapai -8,6% pada kelompok negara ekonomi berkembang, dengan harga komoditas yang turun hingga terealisasi sebesar -31,7% pada harga minyak, meski harga komoditas-komoditas non-migas secara akumulatif tetap tumbuh positif sebesar 6,7%. Volume ekspor dunia juga diketahui mengalami kontraksi secara dalam, yaitu mencapai -9,5% pada negara-negara ekonomi maju dan sebesar -5,7% pada kelompok negara ekonomi berkembang.

Di tengah situasi global tersebut, perekonomian Indonesia pada tahun 2020 diketahui berada pada situasi yang serupa dengan pertumbuhan sebesar -2,07%, mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS). Pembatasan interaksi dan mobilitas manusia secara upaya mengendalikan penyebaran Covid-19 memberikan dampak berupa hambatan pada sejumlah sektor industri. Masih mengacu pada data yang sama,

ECONOMIC CONDITION IN 2020

The year 2020 was marked with a special situation of *Coronavirus Disease* (Covid-19) pandemic which caused numerous obstructions in the global economy. The impact of the pandemic, among others, was evident in the contraction of global economic growth by approximately -4.3% as reported by the World Bank in January 2021. Group of advanced economies saw more severe decline by up to -5.4% compared to group of developing economies at -2.6%. The United States and China, as two major economies with great influence, each recorded a growth of -3.6% and 2%. In comparison, India recorded a growth of -9.6% and Japan -5.3%.

This challenging situation in 2020 ultimately affected the global trade volume. According to report by the International Monetary Fund (IMF) in April 2021, the growth of global trade volume in 2020 was realized at -8.5% or far below the realization of the previous year at 0.9%. Global imports contracted to -9.1% in advanced economies and -8.6% in developing economies, with oil price dropping to -31.7%, although non-oil and gas commodities collectively grew by 6.7%. Global export volume also plummeted to -9.5% in advanced economies and -5.7% in developing economies.

Similar to the decline in global conditions, Indonesia's economic growth in 2020 was recorded at -2.07% according to data by Statistics Indonesia (SI). Restrictions on human interaction and mobility as well as other efforts of Covid-19 mitigation caused hindrances to several industrial sectors. Referring to the same data, industrial sectors that were affected by the pandemic in 2020 include Transportation and Warehousing with growth



sektor-sektor industri terdampak pandemi pada tahun 2020 meliputi sektor Transportasi dan Pergudangan dengan kontraksi pertumbuhan mencapai -15,04% serta sektor Penyedia Akomodasi dan Makan Minum dengan kontraksi pertumbuhan sebesar -10,22%. Lebih lanjut, pada perolehan berdasarkan wilayah, kontraksi pertumbuhan terjadi paling dalam pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera, masing-masing mencapai -58,75% dan -21,36%, meski provinsi-provinsi di wilayah Indonesia Timur seperti pada Pulau Maluku dan Papua tetap bertumbuh secara positif sebesar 1,44%.

Merujuk pada laporan Bank Indonesia pada Januari 2021, terdapat depresiasi nilai tukar rupiah pada kuartal I tahun 2020 sebagai dampak ketidakpastian situasi pasar keuangan global, yang mendorong penyesuaian penempatan portofolio investasi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Pada kondisi tersebut, terjadi pembalikan aliran modal asing dari Indonesia mencapai USD3,1 miliar, yang mengakibatkan nilai tukar rupiah melemah hingga level Rp16.575 per dolar Amerika Serikat. Meski demikian, perkembangan situasi eksternal tersebut kemudian mendapat respons berupa kebijakan oleh Bank Indonesia sebagai regulator, yang kemudian mendorong nilai tukar rupiah pada level yang lebih kuat pada kuartal II dan III tahun 2020. Secara akumatif tahun 2020, nilai tukar rupiah berada pada posisi yang terkendali, yaitu berkisar pada level Rp14.529 per dolar Amerika Serikat, atau sedikit berada di atas nilai rata-rata pada tahun sebelumnya yang tercatat pada level Rp14.141 per dolar Amerika Serikat.

Terdapat penurunan jumlah penumpang dan jumlah barang pada tahun 2020, mengacu pada laporan BPS, terutama pada pelabuhan-pelabuhan utama yang diamati sebagai sampel. Sejumlah pelabuhan tersebut yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Belawan, Makassar, Balikpapan, serta Tanjung Perak, dengan jumlah penurunan berada pada kisaran 57,22% hingga 76,51% pada jumlah arus penumpang serta kisaran 2,56% hingga 18,67% pada jumlah arus barang. Meski demikian, masih mengacu pada laporan yang sama, tetap terdapat peningkatan jumlah arus barang pada pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, yaitu pada pelabuhan di luar pelabuhan-pelabuhan yang diamati. Secara keseluruhan, jumlah penumpang angkutan laut dalam negeri selama tahun 2020 terealisasi mencapai 14,2 juta orang dan

contraction at -15.04% and Accommodation, Food and Beverages at -10.22%. Based on region, the lowest contraction occurred in provinces in Java and Sumatra Islands, each reaching -58.75% and -21.36%, while provinces in eastern Indonesia, such as those in Maluku and Papua Islands grew positively by 1.44%.

According to Bank Indonesia report of January 2021, rupiah exchange rate depreciated in Q1/2020 as an impact of uncertainties in global financial market, which led to adjustment of investment portfolio in developing countries, including Indonesia. Withdrawal of foreign capital flow from Indonesia reached USD3.1 billion, which caused rupiah depreciation to Rp16,575 per USD. In response to this external condition, Bank Indonesia as a regulator established policies that encouraged the growth of rupiah exchange rate in Q2 and Q3 of 2020. Overall, rupiah exchange rate remained under control throughout 2020 at an average of Rp14,529 per USD, or slightly above the average of the previous year at Rp14,141 per USD.

SI reported that there was a decline in the number of passengers and cargo in 2020, particularly in major ports which were observed as samples. These ports include the Ports of Tanjung Priok, Belawan, Makassar, Balikpapan, and Tanjung Perak, with total decline ranging from 57.22% to 76.51% in passenger flow and from 2.56% to 18.67% in cargo flow. Nevertheless, cargo flow remained increasing in several ports in Indonesia, particularly those not observed in the report. In general, total passengers of domestic sea transportation in 2020 reached 14.2 million people, while total cargo transported from January to December 2020 reached 302.6 million tons, which increased by 1.61% from the same period in the previous year.



jumlah barang yang diangkut untuk periode Januari hingga Desember 2020 mencapai 302,6 juta ton, yang secara akumulatif menunjukkan kenaikan sebesar 1,61% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA DIREKSI

Di tengah situasi dengan sejumlah hambatan pada tahun 2020, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi beserta seluruh jajaran terkait telah berhasil melaksanakan pengelolaan Perseroan secara baik dan optimal. Keberhasilan tersebut dapat dilihat melalui sejumlah capaian pada kinerja keuangan dan operasional Perseroan di tahun 2020, meliputi realisasi pada komponen posisi keuangan dan laporan laba rugi Perseroan, serta realisasi volume produksi pelayanan.

Pada posisi keuangan Perseroan, perolehan nilai aset untuk tahun 2020 diketahui mengalami peningkatan sebesar 4,68% dibanding tahun sebelumnya, dengan peningkatan liabilitas sebesar 7,33% dan penurunan ekuitas sebesar 0,05%. Seiring perolehan tersebut Perseroan mampu mencatatkan perolehan laba bersih secara positif untuk tahun 2020, yaitu mencapai Rp2,31 triliun, seiring realisasi penurunan beban operasi mencapai Rp177,94 miliar. Pada kinerja operasional, Perseroan tercatat mampu merealisasikan produksi pelayanan pemanduan dan pelayanan penundaan masing-masing mencapai 95% dan 99% dibanding target pada RKAP 2020. Selain itu, Perseroan juga tercatat mampu merealisasikan produksi pelayanan penambatan, pelayanan alur, serta pelayanan kepil, masing-masing mencapai 101%, 87%, serta 106% dibanding target yang ditetapkan.

Selain itu, Dewan Komisaris juga senantiasa memperhatikan perolehan skor Perseroan pada penilaian dengan *Key Performance Indicators (KPI)* serta penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan, yang merupakan upaya untuk mengukur kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan Perseroan. Untuk tahun 2020, Direksi beserta jajaran terkait mampu menunjukkan peningkatan capaian KPI serta Tingkat Kesehatan Perusahaan, dengan perolehan skor KPI Perseroan mencapai 106,24 dan skor Tingkat Kesehatan Perusahaan mencapai 88,40 dengan kategori "AA" atau "Sehat". Capaian skor KPI tersebut

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

Amid difficult situation in 2020, the Board of Commissioners views that the Board of Directors and all personnel have properly and optimally managed the Company. This is evident in the Company's financial and operational achievements in 2020, which include realization of financial position and statement of profit or loss, as well as volume of service production.

In terms of financial position, the Company's assets in 2020 increased by 4.68% compared to the previous year, while liabilities increased by 7.33% and equity decreased 0.05%. The Company posted a positive net profit in 2020 reaching Rp2.31 trillion, coupled by a decrease in operating expenses by Rp177.94 billion. In terms of operational performance, production of pilotage and tug services each were recorded at 95% and 99% of the 2020 RKAP targets. Moreover, the Company also successfully realized production in berthing, navigation, and mooring services at 101%, 87%, and 106% of the targets, respectively.

The Board of Commissioners also considered the achievement of Key Performance Indicators (KPI) and Company Soundness Level, which are measurements of the quality and effectiveness of the Company management. In 2020, the Board of Directors and all personnel successfully increased the Company's KPI score to 106.24 and the Company Soundness Level to 88.40 under the category "AA" or "Sound". The KPI score in 2020 increased by 4.57 points from the previous year at 101.67, while the Company Soundness Level was realized at 104.15% of the target score of 77.20.



sekaligus memperlihatkan peningkatan sebesar 4,57 poin, dibanding perolehan pada tahun sebelumnya yang sebesar 101,67. Kemudian, capaian Tingkat Kesehatan Perusahaan untuk tahun 2020 menunjukkan perolehan dengan persentase mencapai 104,15%, dibanding sasaran skor yang sebesar 77,20.

Atas perolehan-perolehan skor tersebut, Dewan Komisaris menilai, Direksi beserta jajaran terkait telah berhasil menyelenggarakan pengelolaan Perseroan secara efektif dan berkualitas. Dewan Komisaris optimistis Direksi beserta jajaran terkait mampu mempertahankan hingga meningkatkan capaian yang telah diperoleh, secara konsisten pada tahun-tahun mendatang.

PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan kinerja Perseroan secara efektif dan menyeluruh. Hal tersebut dilaksanakan melalui sejumlah proses *review* secara berkala atas kinerja keuangan dan operasional Perseroan. Seiring hal tersebut, Dewan Komisaris secara konsisten mengikuti perkembangan sejumlah isu penting, mencakup bidang ekonomi, lingkungan, sosial, serta perkembangan perubahan perundang-undangan, yang dinilai dapat memberikan dampak terhadap aktivitas bisnis yang dijalankan Perseroan. Lebih lanjut, hasil dari pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan kinerja Perseroan, serta isu-isu penting yang berpengaruh tersebut, merupakan dasar bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan pemberian nasihat kepada Direksi. Terkait hal tersebut, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris melakukan proses *monitoring* atas tindak lanjut Direksi atas saran, rekomendasi, serta nasihat yang diberikan, untuk kemudian dilakukan proses evaluasi.

Berdasarkan fungsi pengawasan yang telah dijalankan, Dewan Komisaris dapat memastikan bahwa Direksi beserta jajaran terkait telah menjalankan kebijakan serta strategi yang diperlukan secara efektif dan menyeluruh, demi menghadapi sejumlah tantangan selama tahun 2020. Direksi beserta jajaran terkait telah mampu mengimplementasikan sejumlah arah kebijakan serta strategi sesuai Rencana Kerja Manajemen tahun 2020,

With regard to these score achievements, the Board of Commissioners is of the opinion that the Board of Directors and all personnel have delivered an effective and high-quality Company management. We are confident that the Board of Directors and all personnel will be able to maintain and consistently improve these achievements in the upcoming years.

SUPERVISION ON POLICY AND STRATEGY IMPLEMENTATION

In 2020, the Board of Commissioners conducted an effective and comprehensive supervision on the Company's management and performance. This was carried out through periodical reviews of the Company's financial and operational performance. In addition, the Board of Commissioners consistently kept abreast of significant developments in economic, environmental, and social issues, as well as regulatory changes that may influence the Company's business activities. Results of supervision on the Company's management and performance as well as these influential issues served as the basis of consideration for the Board of Commissioners in providing advice to the Board of Directors. As part of the oversight function, the Board of Commissioners then monitored the Board of Directors' follow-up on the advice and recommendations provided to be further evaluated.

Based on our supervision, the Board of Commissioners confirmed that the Board of Directors and all personnel have made the necessary policies and strategies in an effective and comprehensive manner to address challenges throughout 2020. The Board of Directors and their personnel have implemented policies and strategies according to the 2020 Management Work Plan with 100% achievement. Additionally, the Board of



dengan pencapaian realisasi mencapai 100%. Seiring hal tersebut, Direksi telah memulai sejumlah inisiatif pada bidang pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, sesuai *Master Plan* Teknologi Informasi Pelindo III tahun 2020-2024. Dewan Komisaris secara spesifik menyampaikan apresiasi kepada Direksi beserta jajaran terkait atas pelaksanaan kebijakan dan strategi pengendalian biaya (*cost reduction program*) sesuai arahan Pemegang Saham, yang kemudian mampu mendorong efektivitas pengelolaan bisnis dan operasional Perseroan di tengah berbagai hambatan eksternal yang ada di tahun 2020.

Dewan Komisaris meyakini bahwa implementasi kebijakan dan strategi yang telah dijalankan pada tahun 2020 akan menyediakan sejumlah faktor dukungan bagi pelaksanaan pengembangan usaha Perseroan ke depan secara efektif. Selain itu, Dewan Komisaris juga optimistis pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan dapat terus ditingkatkan, seiring pewujudan kerja sama dan sinergitas antara Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh jajaran terkait secara berkelanjutan.

TATA CARA DAN FREKUENSI PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pemberian nasihat kepada Direksi melalui beragam mekanisme, sesuai ketentuan pada Anggaran Dasar Perusahaan serta peraturan/perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan fungsi pemberian nasihat tersebut, Dewan Komisaris didukung oleh keberadaan komite-komite yang secara spesifik mengemban tugas dan tanggung jawab terkait 3 (tiga) aspek utama dalam tata kelola Perseroan, yaitu aspek audit, penerapan GCG dan manajemen risiko, serta nominasi dan remunerasi. Lebih lanjut, mekanisme pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris dijalankan melalui forum pembahasan secara berkala dengan Direksi dan/atau pejabat Perseroan terkait, serta melalui forum pelaksanaan Rapat Gabungan/Koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi yang selama tahun 2020 telah terselenggara sejumlah 12 kali.

Directors also launched several initiatives in Information and Communication Technology development according to the Information Technology Master Plan of Pelindo III for 2020-2024. Particularly, the Board of Commissioners appreciates the Board of Directors and all personnel for the implementation of cost reduction program based on the Shareholder's direction, which was able to improve effectiveness of the Company's business and operational management despite numerous external impediments in 2020.

The Board of Commissioners believes that the implementation of policies and strategies in 2020 will effectively support the Company's business development going forward. Moreover, we are optimistic that the supervision on the Company's management can be improved with continuous cooperation and synergy between the Board of Commissioners, Board of Directors, and all personnel.

PROCEDURE AND FREQUENCY OF ADVICE PROVISION TO THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners performs advisory function for the Board of Directors through several mechanisms as stipulated in the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations. In this function, the Board of Commissioners is assisted by committees that are responsible for specific duties related to 3 (three) main aspects of corporate governance, namely audit, GCG and risk management implementation, as well as nomination and remuneration. Furthermore, advice from the Board of Commissioners can be delivered through regular discussion forum with the Board of Directors and/or relevant Company officials, as well as through Joint/Coordination Meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors, which were held 12 times in 2020.



Selama tahun 2020, pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dijalankan dengan berfokus pada 5 (lima) aspek pengelolaan, yaitu (1) keuangan, (2) penerapan dan pemantauan manajemen risiko, (3) penerapan dan pemantauan implementasi GCG, (4) penerapan dan pemantauan sistem pengendalian intern dan hukum, serta (5) implementasi sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di samping itu, fungsi pengawasan dan pemberian nasihat juga dilaksanakan terhadap penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Secara spesifik, sejumlah nasihat, saran, serta rekomendasi yang telah diberikan Dewan Komisaris kepada Direksi meliputi isu-isu penting terkait kinerja dan pengelolaan operasional Perseroan, sebagai berikut:

1. Perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang berdampak pada usaha dan kinerja perusahaan;
2. Kebijakan terkait pengelolaan risiko Perusahaan;
3. Kebijakan sistem Teknologi Informasi Perusahaan dan pelaksanaannya;
4. Kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karier;
5. Kebijakan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Prosedur dan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK);
6. Kebijakan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaannya;
7. Kebijakan mutu dan pelayanan;
8. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Perjanjian dengan Pihak Ketiga;
9. Transaksi atau Tindakan Direksi dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau Pemegang Saham;
10. Proses Pengusulan dan Penunjukan Auditor Eksternal;
11. Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal dan Internal serta Pelaksanaan telaah keluhan/Pengaduan yang diterima; serta
12. Kebijakan dan Pelaksanaan Pengelolaan Anak Perusahaan.

In 2020, the supervision and advice provision to the Board of Directors focused on 5 (five) management aspects, namely (1) finance, (2) risk management implementation and monitoring, (3) GCG implementation and monitoring, (4) internal control system and legal implementation and monitoring, and (5) Information and Communication Technology system implementation. In addition, the supervisory and advisory function was carried out on the preparation and implementation of Company Work Plan and Budget (RKAP) and Company Long-Term Plan (RJPP). Specifically, the advice and recommendations provided by the Board of Commissioners to the Board of Directors covered important issues related to the Company's performance and operational management, as follows:

1. Changes in business environment and issues that affect the Company's business and performance;
2. Policy on the Company's risk management;
3. Policy on the Company's Information Technology system and its implementation;
4. Policy on career development and its implementation;
5. Policy on accounting and preparation of Financial Statements according to Statements of Financial Accounting Standards (PSAK);
6. Policy on goods and services procurement and its implementation;
7. Policy on quality and service;
8. Compliance with laws and regulations and agreements with third parties;
9. Board of Directors' transactions or actions under the authority of the Board of Commissioners or Shareholders;
10. Process of proposal and appointment of external auditor;
11. Effectiveness of external and internal audit implementation and review of received complaints; and
12. Policy on subsidiaries management and its implementation.



PANDANGAN TERHADAP PROSPEK USAHA PERUSAHAAN

Proyeksi terhadap perkembangan situasi perekonomian pada tahun 2021, baik pada lingkup global maupun nasional, secara umum menunjukkan optimisme serta peluang yang cukup besar bagi terwujudnya sejumlah perbaikan. Pada lingkup global, hal tersebut diketahui melalui proyeksi terhadap sejumlah indikator, meliputi laju pertumbuhan ekonomi serta realisasi volume perdagangan dunia, yang diperkirakan mampu tumbuh secara positif, mengacu pada laporan *International Monetary Fund* pada April 2021. Pada lingkup nasional, optimisme serta peluang bagi perbaikan situasi ekonomi dapat dilihat melalui asumsi pada penyusunan APBN 2021 oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan angka pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2021 mencapai 5,0% seiring fokus anggaran belanja negara pada sektor kesehatan dan perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Seiring proyeksi tersebut, prospek industri kepelabuhan untuk tahun 2021 diyakini akan terbuka seiring kelanjutan kebijakan pemerintah untuk menjalankan program pemerataan ekonomi bagi provinsi-provinsi di wilayah Indonesia Timur. Pemerataan serta pertumbuhan ekonomi tersebut kemudian akan memberikan dorongan bagi peningkatan arus logistik, yang salah satunya tersalur melalui pelabuhan-pelabuhan di area operasional Pelindo III. Hal lain yang berpengaruh terhadap perkembangan industri kepelabuhan untuk tahun 2021 meliputi kebijakan pembangunan 6 trayek baru transportasi oleh Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut, yang melibatkan sejumlah 106 pelabuhan. Pada situasi tersebut, Tanjung Perak merupakan pelabuhan pangkal dengan layanan trayek terbanyak, di samping sejumlah 15 trayek tol laut dengan rute yang berawal dan berakhir di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Atas proyeksi serta prospek industri Perseroan, Dewan Komisaris menilai Direksi beserta seluruh jajaran terkait telah memiliki sumber daya yang diperlukan guna merealisasikan kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2021. Terkait hal tersebut, Dewan Komisaris mendukung secara penuh langkah serta strategi yang akan dilaksanakan untuk tahun 2021, sesuai Rencana

OPINION ON THE COMPANY'S BUSINESS OUTLOOK

At both global and national scope, projections of economic development in 2021 generally show optimism and promising opportunities for improvements. In the global sphere, this is evident in the projections of several indicators that include economic growth rate and realization of global trade volume, which are expected to grow positively according to report of the International Monetary Fund in April 2021. In Indonesia, this optimism for economic improvements is visible in the assumptions for 2021 State Budget preparation by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. Economic growth in 2021 is estimated at 5.0%, in line with the state budget's focus on the health sector and social protection for communities affected by Covid-19 pandemic.

In line with these projections, the port industry has a promising outlook in 2021 with the continuation of the government's economic distribution program for provinces in eastern Indonesia. Economic distribution and growth will increase the flow of logistics transported through ports in the operational area of Pelindo III. Other matters that influence the development of the port industry in 2021 include the policy on development of 6 new transportation routes by the Ministry of Transportation through the Directorate General of Sea Transportation, which will cover 106 ports. Tanjung Perak is designated as a base port with the most service routes, in addition to 15 sea toll routes from and to Surabaya City, East Java.

On the Company's industrial projections and outlook, the Board of Commissioners views that the Board of Directors and all personnel possess the necessary resources to deliver performance according to the targets set in the 2021 Company Work Plan and Budget (2021). Accordingly, the Board of Commissioners fully supports the steps and strategies that will be carried out in 2021 based on the predetermined Management Work Plan. We



Kerja Manajemen yang telah disusun. Dewan Komisaris optimistis Direksi akan mampu memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia secara maksimal, meliputi peluang pengembangan usaha sesuai program-program yang direncanakan, yang diharapkan mampu menghadirkan dukungan bagi pertumbuhan bisnis Perseroan ke depan secara kuat dan berkelanjutan. Seiring hal itu, Dewan Komisaris juga optimistis Direksi akan mampu melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi serta mengelola beragam risiko yang akan dihadapi Perseroan, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan, Dewan Komisaris dibantu oleh keberadaan 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan GCG, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Keberadaan serta pembentukan komite-komite tersebut oleh Dewan Komisaris, telah diselenggarakan secara efektif sesuai ketentuan pada peraturan/perundang-undangan yang berlaku, serta *best practices* penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Secara lebih lanjut, perincian terkait keberadaan serta pelaksanaan tugas komite-komite di bawah Dewan Komisaris untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Komite Audit merupakan organ di bawah Dewan Komisaris yang memiliki tugas dan kewajiban untuk menjalankan peran pengawasan terhadap sejumlah aspek, meliputi terkait penyajian informasi keuangan, Sistem Pengendalian Internal, efektivitas pemeriksaan oleh auditor internal dan eksternal, serta kepatuhan Perseroan terhadap peraturan/perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Komite Audit Perseroan telah memiliki serta berpedoman kepada Piagam Komite Audit, yang secara terperinci mengatur aspek-aspek kedudukan, tugas, tanggung jawab, serta hubungan kelembagaan dengan unit kerja terkait. Keberadaan Komite Audit Perseroan merupakan perwujudan atas pemenuhan terhadap peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

are confident that the Board of Directors will be able to capture opportunities to their maximum extent, including opportunities for business development according to the program plans, which are expected to support strong and continuous business growth of the Company. We also believe that the Board of Directors is capable of taking the necessary steps to anticipate and manage internal and external risks of the Company.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' COMMITTEES

In supervising the Company management, the Board of Commissioners is assisted by 3 (three) committees, namely Audit Committee, Risk Management and GCG Committee, and Nomination and Remuneration Committee. These committees of the Board of Commissioners have run effectively according to prevailing laws and regulations as well as best practices of good corporate governance. The existence and duty implementation of committees under the Board of Commissioners in 2020 are as described as follows.

The Audit Committee is an organ under the Board of Commissioners that is responsible for supervising the aspects of financial information presentation, Internal Control System, effectiveness of audit by internal and external auditors, as well as the Company's compliance with applicable laws and regulations. In carrying out duties, the Audit Committee refers to the Audit Committee Charter, which regulates the position, duties, responsibility, and institutional relationship of the Audit Committee with related work units. The existence of the Company's Audit Committee is a compliance with the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs.



Selanjutnya, Komite Manajemen Risiko dan GCG merupakan organ di bawah Dewan Komisaris yang memiliki tugas dan tanggung jawab terkait pelaksanaan pengawasan serta penilaian atas penerapan GCG serta fungsi manajemen risiko pada sistem tata kelola yang dijalankan Perseroan. Pada aspek pelaksanaannya, Dewan Komisaris telah menyusun dan memberlakukan Piagam Komite sebagai pedoman kerja yang mengatur aspek-aspek kedudukan, tugas, tanggung jawab, serta hubungan kelembagaan dengan unit kerja terkait pada struktur tata kelola Perseroan. Secara lebih lanjut, Komite GCG dan Manajemen Risiko memberikan dukungan bagi Dewan Komisaris melalui pemberian laporan secara berkala serta pelaksanaan rapat kerja atas pembahasan yang dinilai penting terkait pelaksanaan pengelolaan Perseroan.

Sebagai wujud dukungan terhadap efektivitas penerapan GCG khususnya pada aspek kelengkapan suborgan pendukung, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. ... tanggal Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan organ yang secara khusus memberikan dukungan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan. Dewan Komisaris telah menyusun dan memberlakukan Piagam Komite sebagai pedoman kerja bagi Komite Nominasi dan Remunerasi, meliputi ketentuan terkait aspek kedudukan, tugas, tanggung jawab, serta hubungan kelembagaan dengan unit kerja terkait. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi, beserta perangkat aturan pembentukan dan pelaksanaan tugas Komite, telah dilaksanakan Dewan Komisaris sesuai ketentuan pada peraturan/perundang-undangan yang berlaku.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai ketiga komite tersebut telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan baik. Tiap-tiap komite telah memberikan dukungan yang diperlukan bagi terselenggaranya fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, secara efektif dan optimal. Seluruh komite di bawah Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat kerja sesuai ketentuan dalam Piagam Komite, serta mengomunikasikan sejumlah temuan kepada Dewan

Furthermore, the Risk Management and GCG Committee is an organ under the Board of Commissioners that is responsible for supervising and assessing the implementation of GCG and risk management in the Company's governance system. The Board of Commissioners has established a Committee Charter as work guidelines that regulates the position, duties, responsibility, and institutional relationship of the committee with related work units. The GCG and Risk Management Committee assists the Board of Commissioners through regular reports and work meetings that discuss matters relevant to the Company's management.

To support the effectiveness of GCG implementation through supporting sub-organs, the Board of Commissioners established the Nomination and Remuneration Committee through Decree of the Board of Commissioners No. ... dated ... The Nomination and Remuneration Committee is an organ that assists the Board of Commissioners in the nomination and remuneration function of the Company. The Board of Commissioners has prepared and established a Committee Charter as work guidelines that regulates the position, duties, responsibility, and institutional relationship of the Nomination and Remuneration Committee with related work units. The Board of Commissioners established the Nomination and Remuneration Committee, along with its provisions and duties, based on the applicable laws and regulations.

In general, the Board of Commissioners views that these three committees have performed their respective duties and responsibilities properly. Each committee provided the necessary support for an effective and optimal implementation of the Board of Commissioners' supervisory function. All committees under the Board of Commissioners have held work meetings in accordance with the Committee Charter and reported their findings to the Board of Commissioners. Moreover, all committees



Komisaris. Selain itu, seluruh komite di bawah Dewan Komisaris juga telah menjalankan fungsi koordinasi dan hubungan kerja dengan organ-organ terkait sesuai bidang kewenangan masing-masing.

PENGAWASAN TERHADAP PENERAPAN GCG PERUSAHAAN

Dewan Komisaris memahami bahwa penerapan GCG secara efektif dan menyeluruh pada sistem tata kelola Perseroan merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan. Penerapan GCG secara efektif dan menyeluruh tidak hanya akan menjaga pengelolaan Perseroan agar senantiasa terlaksana secara akuntabel, tetapi juga akan mendorong seluruh aktivitas bisnis dan operasional yang dijalankan untuk tetap terselenggara secara bertanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan Perseroan. Pada akhirnya, penerapan GCG secara efektif dan menyeluruh akan memberikan imbal hasil berupa kemampuan Perseroan untuk menjaga hubungan secara harmonis dengan karyawan, masyarakat, mitra bisnis, regulator, pelanggan, serta Pemegang Saham. Dengan demikian, Dewan Komisaris meyakini, penerapan GCG secara efektif dan menyeluruh akan mendorong keberlangsungan serta pengembangan usaha Perseroan secara kuat dan berkelanjutan untuk jangka waktu yang lama.

Secara umum, Dewan Komisaris memastikan Perseroan telah memiliki perangkat serta kelengkapan struktur yang memadai guna dijalankannya penerapan GCG secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat melalui kelengkapan organ pada struktur organisasi Pelindo III, yang secara fundamental telah menyediakan fungsi-fungsi yang memadai guna terselenggaranya pengelolaan bisnis dan operasional sesuai prinsip-prinsip penerapan GCG. Selain itu, Direksi beserta jajaran terkait juga telah menyusun serta menjalankan perangkat kebijakan yang diperlukan, demi memberikan kejelasan serta panduan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bagi organ-organ Perseroan. Perangkat kebijakan tersebut sekaligus merupakan perangkat yang menjamin setiap organ senantiasa menjalankan tata kelola sesuai ketentuan pada standar *best practices* serta peraturan/perundang-undangan yang berlaku.

have also established coordination and work relationship with relevant organs according to their respective authority.

SUPERVISION ON GCG IMPLEMENTATION AT THE COMPANY

The Board of Commissioners is aware of the importance of an effective and comprehensive GCG implementation at the Company. Such implementation will not only maintain the accountability of the Company's management, but also encourages the responsibility of all business and operational activities to all stakeholders of the Company. This will foster a harmonious relationship between the Company and the employees, community, business partners, regulators, customers, and Shareholder, and support a robust and sustainable business continuity and development of the Company in the long term.

The Board of Commissioners ensures that the Company possesses adequate structure for an optimal GCG implementation. This is visible in the organization structure of Pelindo III that is supported by adequate fundamental functions for the implementation of business and operational management according to GCG principles. The Board of Directors and their personnel have also prepared and applied the necessary policies that provide clarity and guidelines of duties and responsibilities of each corporate organ. These policies ensure that each organ conduct governance according to best practices standards and prevailing laws and regulations.



Dewan Komisaris menilai, Direksi beserta jajaran terkait telah melaksanakan upaya-upaya yang diperlukan untuk mengoptimalkan penerapan GCG pada sistem tata kelola Perseroan. Optimalisasi tersebut secara mendasar dilaksanakan dengan mempertimbangkan sejumlah rekomendasi atas hasil *assessment* GCG pada tahun sebelumnya, dengan fokus meliputi penyempurnaan Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*) serta pengembangan terkait pengendalian gratifikasi dan pelaporan Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Selain itu, optimalisasi penerapan GCG yang dilaksanakan Perseroan dilakukan melalui program sosialisasi dan internalisasi secara berkala, yang diharapkan mampu menjaga kualitas penerapan GCG secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Keberhasilan penerapan GCG pada sistem tata kelola Perseroan diukur melalui *assessment* GCG, yang untuk tahun 2020, Pelindo III memperoleh skor 91,770 dengan predikat "Sangat Baik". Perolehan tersebut sekaligus menunjukkan peningkatan capaian dibanding pada tahun sebelumnya, yaitu mencapai 0,670 poin atau 1,00%. Dewan Komisaris optimistis, Perseroan akan tetap mampu menjaga kualitas penerapan GCG serta secara konsisten melaksanakan langkah-langkah penyempurnaan yang dibutuhkan pada tahun-tahun mendatang.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Dewan Komisaris memahami bahwa Sistem Pengaduan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* merupakan bagian penting dalam keseluruhan penerapan GCG pada sistem tata kelola Perseroan. WBS merupakan serangkaian mekanisme yang dijalankan sebagai perangkat deteksi dini atas segala bentuk pelanggaran dan kecurangan yang terjadi pada lingkup internal Perseroan. Penerapan WBS pada tata kelola Perseroan pada akhirnya merupakan perangkat dukungan yang ikut menjamin pelaksanaan pengelolaan Perseroan tetap dijalankan dengan mengedepankan aspek kepatuhan (*compliance*), sesuai ketentuan pada peraturan/perundang-undangan yang berlaku serta standar etika bisnis pada sektor industri yang dijalankan Perseroan. Atas pemahaman tersebut, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris berkomitmen untuk secara proaktif menjalankan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga penerapan WBS agar tetap terlaksana secara efektif dan profesional.

We saw that the Board of Directors and their personnel have taken the necessary steps to optimize GCG implementation of the Company by considering recommendations from GCG assessment results of the previous year, with focus on improving the Whistleblowing System, developing gratuity control, and submitting State Officials Assets Report (LHKPN). In addition, the Company's GCG implementation was optimized through regular dissemination and internalization programs, which are expected to maintain GCG implementation quality in a comprehensive and continuous manner.

The achievement of GCG implementation is measured through GCG assessment. In 2020, Pelindo III obtained the score of 91.770 with the predicate "Excellent", which improved from the previous year by -0.670 points or 1.00%. The Board of Commissioners believes that the Company can maintain its GCG implementation quality and consistently make necessary improvements in the following years.

OPINION ON WHISTLEBLOWING SYSTEM IMPLEMENTATION

The Board of Commissioners understands that the Whistleblowing System (WBS) is an integral part of overall governance system. WBS is a set of mechanism that serves as an early detection tool for any forms of violations and frauds that occur within the Company. WBS implementation in the Company's governance encourages a management that upholds compliance with applicable laws and regulations as well as business ethics in the Company's industry sector. As part of the supervisory function, the Board of Commissioners is committed to proactively maintaining an effective and professional WBS implementation.



Terkait hal tersebut, Dewan Komisaris memandang Perseroan telah memiliki perangkat aturan yang memadai guna terselenggaranya Sistem Pengaduan Pelanggaran secara efektif dan profesional, melalui berlakunya Keputusan Direksi No. PER.78/HK.03/P.III-2017 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*). Atas keberadaan perangkat aturan tersebut, Perseroan telah menyusun pengelola WBS yaitu berupa unit kerja Tim Terpadu Penanganan Pengaduan (TTPP), serta telah menerapkan serangkaian tugas dan tanggung jawab yang diemban secara efektif. Sejumlah pelanggaran serta praktik kecurangan yang menjadi ruang lingkup pengaduan meliputi pelanggaran peraturan dan kode etik Perusahaan, penyalahgunaan kewenangan jabatan, tindakan yang secara material merugikan Perusahaan, serta praktik pelanggaran dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa.

Dewan Komisaris menilai Perseroan melalui unit kerja terkait telah menyelenggarakan Sistem Pengaduan Pelanggaran secara efektif sesuai pedoman kerja yang telah disusun, serta menjamin ketersediaan mekanisme pengaduan yang dapat digunakan oleh seluruh Insan Pelindo III. Perseroan juga telah mengembangkan dan memiliki mekanisme pengaduan mencakup proses verifikasi yang mencukupi sebelum dapat diproses secara lebih lanjut pada tahap investigasi. Melalui tahapan tersebut, Dewan Komisaris menilai Perseroan telah memiliki sistem yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, guna terselenggaranya mekanisme deteksi dini atas dugaan pelanggaran dan kecurangan secara efektif. Sistem Pengaduan Pelanggaran yang dimiliki Perseroan telah dievaluasi secara berkala, yang hasilnya digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi langkah pengembangan dan perbaikan di tahun mendatang.

Lebih lanjut, Dewan Komisaris memastikan bahwa Perseroan telah menyediakan saluran pelaporan secara memadai melalui beragam media yang dapat diakses secara mudah oleh pihak pelapor. Perseroan juga secara konsisten melakukan sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran kepada seluruh karyawan seiring sosialisasi penerapan GCG, dengan memanfaatkan media komunikasi berbasis teknologi informasi. Selain itu, Dewan Komisaris juga memandang Perseroan

The Board of Commissioners regards that the Company owns an adequate set of regulations for an effective and professional implementation of the Whistleblowing System through the Decree of the Board of Directors No. PER.78/HK.03/P.III-2017 concerning the Whistleblowing System. With this provision, the Company established a Report Handling Integrated Team (TTPP) to manage the WBS and determined their duties and responsibilities effectively. Violation and fraud practices that can be reported include breach of the Company's code of conduct, abuse of authority, and irregularities in goods and services procurement mechanism.

We view that the Company through the relevant work unit has applied the Whistleblowing System effectively based on the work guidelines and ensured the availability of a reporting mechanism that can be used by all personnel of Pelindo III. The Company's reporting mechanism includes a sufficient verification process prior to further investigation. These stages provide the Company with a robust, reliable, and effective early detection mechanism for suspected violations and frauds. The Company's Whistleblowing System is evaluated periodically, of which results are used as considerations for developments and improvements in the future.

Furthermore, the Board of Commissioners ensures that the Company provides adequate reporting channels through easily accessible media for whistleblowers and consistently disseminates the Whistleblowing System along with GCG implementation to all employees using IT-based communication media. We regard that the Company has also provided sufficient protection system for the whistleblowers to keep their identity and report confidential. This system protects the whistleblowers



telah menyediakan sistem perlindungan yang memadai bagi pelapor, meliputi perlindungan terhadap identitas dan kerahasiaan laporan. Melalui sistem perlindungan tersebut, pihak pelapor diharapkan dapat terlindung dari segala bentuk ancaman, intimidasi, serta perlakuan yang tidak menyenangkan dari pihak mana pun.

Selama tahun 2020, tidak terdapat laporan pelanggaran yang diterima untuk diproses melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran yang dimiliki Perseroan.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2020, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-107/MBU/04/2020 tanggal 3 April 2020. Perubahan komposisi Dewan Komisaris untuk periode 1 Januari 2020 hingga 3 April 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

from threats, intimidation, and unwanted treatments from any party.

In 2020, there were no violation reports received and processed through the Company's Whistleblowing System.

CHANGES IN COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In 2020, there was a change in the Board of Commissioners' composition as stipulated through Decree of the Minister of SOEs No. SK-107/MBU/04/2020 dated April 3, 2020. The composition of the Board of Commissioners from January 1, 2020 to April 3, 2020 is presented in the following table:

Komposisi Dewan Komisaris Periode 1 Januari 2020 – 3 April 2020
Composition of the Board of Commissioners in January 1, 2020 – April 3, 2020 Period

Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment
Ahmad Bambang	Komisaris Utama / President Commissioner	Surat Keputusan No. SK-206/MBU/09/2019 tanggal 13 September 2019 / Decree No. SK-206/MBU/09/2019 dated September 13, 2019
Dedi Syarif Usman	Komisaris / Commissioner	Keputusan Menteri BUMN No. SK-207/MBU/07/2018 tanggal 12 Juli 2018 / Decree of the Minister of SOEs No. SK-207/MBU/07/2018 dated July 12, 2018
Wahju Satrio Utomo	Komisaris / Commissioner	Keputusan Menteri BUMN No. SK-30/MBU/02/2016 tanggal 9 Februari 2016 / Decree of the Minister of SOEs No. SK-30/MBU/02/2016 dated February 9, 2016
Heddy Lugito	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Keputusan Menteri BUMN No. SK-241/MBU/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016 / Decree of the Minister of SOEs No. SK-241/MBU/10/2016 dated October 19, 2016
Zainal Abidin	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Keputusan Menteri BUMN No. SK-198/MBU/09/2017 tanggal 14 September 2017 / Decree of the Minister of SOEs No. SK-198/MBU/09/2017 dated September 14, 2017

Atas perubahan komposisi Dewan Komisaris, komposisi Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 3 April 2020 hingga 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Change to the composition of the Board of Commissioners from April 3, 2020 until December 31, 2020 is as follows:

**Komposisi Dewan Komisaris Periode 3 April 2020 – 31 Desember 2020**

Composition of the Board of Commissioners in April 3, 2020 – December 31, 2020

Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment
Marsetio	Komisaris Utama / President Commissioner	
Heru Sukanto	Komisaris / Commissioner	
Otto Ardianto	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Keputusan Menteri BUMN No. SK-107/MBU/04/2020 tanggal 3 April 2020 / Decree of the Minister of SOEs No. SK-107/ MBU/04/2020 dated April 3, 2020
Ridwan Djamaluddin	Komisaris / Commissioner	
Ali Mochtar Ngabalin	Komisaris Independen / Independent Commissioner	
Dedi Syarif Usman	Komisaris / Commissioner	Keputusan Menteri BUMN No. SK-207/MBU/07/2018 tanggal 12 Juli 2018 / Decree of the Minister of SOEs No. SK-207/ MBU/07/2018 dated July 12, 2018

*) Pengangkatan Marsetio, Heru Sukanto, Otto Ardianto, Otto Ardianto, Ridwan Djamaluddin dan Ali Mochtar Ngabalin berdasarkan SK No. SK-107/MBU/04/2020 tanggal 3 April 2020 menggantikan Ahmad Bambang, Wahju Satrio Utomo, Hedy Lugito dan Zainal Abidin.

APRESIASI

Dewan Komisaris menyadari bahwa seluruh capaian yang telah diraih oleh Pelindo III tidak akan terwujud tanpa kerja sama dan sinergitas antara Dewan Komisaris, Direksi, serta segenap Insan Perseroan. Untuk itu, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Direksi beserta jajaran terkait atas kerja keras dan inisiatif yang telah diupayakan selama tahun 2020. Dewan Komisaris juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh karyawan atas dedikasi yang telah diberikan kepada Perseroan. Seiring hal tersebut, melalui kesempatan ini, Dewan Komisaris juga menyampaikan terima kasih kepada Pemegang Saham, pelanggan, serta mitra usaha Perseroan, atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan.

Kami optimistis, kerja sama dan sinergitas yang telah terjalin antara Dewan Komisaris, Direksi, serta segenap Insan Perseroan akan senantiasa terjaga untuk tahun-tahun mendatang, guna mendukung Pelindo III mewujudkan visi sebagai ‘Smart Operator Pelabuhan Berskala Dunia’.

APPRECIATION

The Board of Commissioners realizes that the achievements of Pelindo III are inseparable from the cooperation and synergy between the Board of Commissioners, Board of Directors, and all Personnel of the Company. Therefore, the Board of Commissioners highly appreciates the Board of Directors and their personnel for their hard work and initiative throughout 2020. Our appreciation extends to all employees for their dedication to the Company. We also thank the Shareholders, customers, and business partners for their trust and support for the Company.

We believe that the cooperation and synergy between the Board of Commissioners, Board of Directors, and all Personnel of the Company will remain strong in the upcoming years to support Pelindo III in realizing its vision to become a ‘World-Class Smart Port Operator’.

MARSETIO

Komisaris Utama
President Commissioner



OTTO ARDIANTO

Komisaris Independen
Independent Commissioner

DEDI SYARIF USMAN

Komisaris
Commissioner

HERU SUKANTO

Komisaris
Commissioner



MARSETIO

Komisaris Utama
President Commissioner

RIDWAN DJAMALUDDIN

Komisaris
Commissioner

ALI MOCHTAR NGABALIN

Komisaris Independen
Independent Commissioner



U. SAEFUDIN NOER

Direktur Utama
President Director

LAPORAN DIREKSI

BOARD OF DIRECTOR REPORT



Kinerja keuangan dan operasional yang mampu dicapai oleh Perseroan untuk tahun 2020 merupakan hasil dari terlaksananya sejumlah implementasi strategi dan kebijakan. Implementasi strategi dan kebijakan untuk tahun 2020 secara mendasar mengacu pada Rencana Kerja Manajemen tahun 2020, yang meliputi 23 program kerja dengan total realisasi per 31 Desember 2020 mencapai 100%.

The financial and operational performance that had been successfully achieved by the Company for 2020 is the result of implementing a number of strategies and policies. The implementation of strategies and policies for 2020 basically refers to the 2020 Management Work Plan, which includes 23 work programs with a total realization as of December 31, 2020 reaching 100%.



Pemegang Saham dan segenap pemangku kepentingan yang terhormat,

Puji dan syukur Kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Pelindo III berhasil melalui sejumlah tantangan pada tahun 2020 dengan catatan kinerja yang tetap terjaga. Hal tersebut terlihat pada sejumlah capaian keuangan dan operasional yang terpenuhi secara baik sesuai target jangka pendek dan jangka panjang yang telah ditetapkan. Direksi beserta seluruh jajaran terkait juga berhasil menjalankan implementasi strategi dan kebijakan secara optimal sesuai Program Kerja Manajemen tahun 2020. Sejumlah capaian serta implementasi strategi tersebut merupakan langkah penting guna mendukung pertumbuhan usaha Perseroan secara jangka panjang sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Mewakili jajaran Direksi, perkenankan Kami menyampaikan laporan kinerja Pelindo III untuk tahun buku 2020, meliputi paparan kinerja, implementasi strategi dan kebijakan, kendala yang dihadapi dan solusinya, serta prospek usaha Perseroan untuk tahun mendatang.

Dear Shareholders and stakeholders,

All praise and thanks to the Almighty God, for His mercy and grace has allowed Pelindo III to go through a number of challenges in 2020 with a stable performance. This can be seen in the accomplishment of financial and operational targets, both short-term and long-term, that have been set. The Board of Directors and the management have also succeeded in carrying out optimal implementation of strategies and policies according to the 2020 Management Work Program. A number of achievements and implementation of these strategies are important steps to support the Company's business growth in the long term according to the predetermined vision and mission.

On behalf of the Board of Directors, allow us to submit Pelindo III performance report for the 2020 financial year, including exposure to performance, implementation of strategies and policies, obstacles faced and solutions, and business prospects of the Company for the coming year.



TINJAUAN MAKROEKONOMI DAN INDUSTRI

Mengacu pada laporan yang dirilis *International Monetary Fund* (IMF) pada April 2021, terdapat kontraksi laju pertumbuhan perekonomian dunia pada tahun 2020 sebesar 3,3%, yang sekaligus menunjukkan angka penurunan sebesar 6,1% dibanding realisasi pertumbuhan pada tahun 2019. Kontraksi pertumbuhan ekonomi tersebut secara dominan dikontribusikan oleh pertumbuhan akumulatif negara-negara ekonomi maju, yang tercatat sebesar -4,7%, dibanding pertumbuhan akumulatif pada negara-negara ekonomi berkembang yang sebesar -2,2% untuk tahun 2020. Pada kelompok negara ekonomi maju, laju kontraksi diketahui terjadi secara lebih dalam pada Spanyol dan Britania Raya yang masing-masing tercatat sebesar -11% serta -9,9%, di samping kontraksi yang terjadi di negara-negara Eropa lain seperti Perancis dan Italia yang sebesar -8,2% dan 8,9%. Amerika Serikat sebagai bagian dari negara ekonomi maju tercatat mengalami kontraksi sebesar 3,5%, seiring perekonomian negara Jepang yang diketahui mengalami kontraksi sebesar 4,8%, atau menurun sebesar 8,1% dibanding realisasi pada tahun sebelumnya.

Masih mengacu pada laporan yang sama, kontraksi paling dalam pada kelompok negara ekonomi berkembang terjadi di kawasan Amerika Latin dan Kepulauan Karibia, yang tercatat sebesar 7%, di samping kontraksi yang terjadi pada kawasan-kawasan lain seperti Timur Tengah dan Asia Tengah yang sebesar 2,9%, serta negara-negara Asia Timur, India, dan ASEAN yang secara akumulatif tercatat sebesar 1%. Tiongkok sebagai bagian dari negara ekonomi berkembang diketahui tetap mampu merealisasikan laju pertumbuhan secara positif, yaitu sebesar 2,3%, seiring kontraksi yang terjadi pada negara ekonomi berkembang lain seperti India yang tercatat sebesar 8% serta negara-negara ASEAN, meliputi Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam, yang secara akumulatif terkontraksi sebesar 8%. Kontraksi pertumbuhan pada negara-negara ekonomi berkembang tersebut sekaligus memperlihatkan angka penurunan yang cukup besar, yaitu mencapai 5,8% dibanding pada tahun 2019 yang tercatat tumbuh secara positif sebesar 3,8%.

MACROECONOMICS AND INDUSTRY OVERVIEW

Referring to a report released by the International Monetary Fund (IMF) in April 2021, the world economic growth rate in 2020 was contracted to 3.3%, which also showed a decline of 6.1% compared to the realization of growth in 2019. The economic growth contraction was predominantly contributed by the accumulative growth of developed countries, which was recorded at -4.7%, compared to the accumulative growth of developing countries which was -2.2% for 2020. In the developed countries group, the contraction rate is known to be deeper in Spain and the United Kingdom which were recorded at -11% and -9.9% respectively, in addition to contractions that occurred in other European countries such as France and Italy which amounted to -8.2% and 8.9%, respectively. The United States as part of the economically developed countries recorded a contraction of 3.5%, in line with the Japanese economy which is known to have contracted by 4.8%, or decreased by 8.1% compared to the realization in the previous year.

Referring to the same report, the deepest contraction in the developing countries group occurred in Latin America and the Caribbean Islands, which was recorded at 7%, in addition to contractions that occurred in other regions such as the Middle East and Central Asia which amounted to 2, 9%, and East Asian countries, India, and ASEAN which were recorded at 1% cumulatively. China as part of a developing countries is known to remain able to realize a positive growth rate of 2.3%, in line with the contraction that occurred in other developing economic countries such as India which was recorded at 8% and ASEAN countries, including Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand and Vietnam, which contracted cumulatively by 8%. The growth contraction in developing economic countries also showed a fairly large decline, reaching 5.8% compared to 2019 which recorded a positive growth of 3.8%.



Situasi perekonomian yang secara umum terkontraksi tersebut kemudian memberikan pengaruh pada realisasi volume perdagangan dunia, yang pada tahun 2020 tercatat menurun dibanding perolehan pada tahun 2019 sebesar 16,9%. Secara spesifik, terdapat penurunan volume ekspor pada negara-negara ekonomi maju sebesar 17,4% seiring penurunan volume ekspor pada negara-negara ekonomi berkembang sebesar 13,3% dibanding pada tahun sebelumnya. Kondisi serupa juga terjadi pada realisasi volume impor dunia, dengan penurunan sebesar 18,2% pada negara-negara ekonomi maju serta penurunan sebesar 17,6% pada negara-negara ekonomi berkembang. Penurunan volume perdagangan dunia tersebut, seiring terbatasnya aktivitas konsumsi pada situasi pandemi, kemudian memberikan pengaruh pada harga komoditas dunia pada tahun 2020. Hal tersebut, misalnya, terlihat melalui penurunan harga minyak mentah sebesar 84,4% dibanding pada tahun 2019, serta penurunan harga komoditas non-migas sebesar 9,4%.

Di tengah sejumlah hambatan pada situasi perekonomian dunia tersebut, perekonomian Indonesia diketahui mengalami situasi yang serupa. Mengacu pada data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2021, terdapat kontraksi pada laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 sebesar 2,07%. Perolehan tersebut sekaligus menunjukkan penurunan sebesar 7,09% dibanding pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019, yang tercatat terealisasi secara positif sebesar 5,02%. Masih mengacu pada data yang sama, komponen Ekspor Barang dan Jasa tercatat menjadi komponen dengan kontraksi terdalam, yaitu sebesar 7,70%, seiring realisasi komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam Produk Domestik Bruto (PDB) menurut pengeluaran, yang terkontraksi sebesar 14,71%. Beberapa komponen lain yang tercatat mengalami kontraksi secara cukup dalam meliputi sektor lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, yaitu sebesar 15,04%, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang sebesar 10,22%.

The generally contracted economic conditions then had an impact on the realization of world trade volume, which in 2020 recorded a decline compared to the gain in 2019 of 16.9%. Specifically, there was a 17.4% decline in export volume in developed countries, in line with a 13.3% decline in export volume in developing countries compared to the previous year. Similar conditions also occurred in the realization of the world import volume, with a decline of 18.2% in developed countries and a decrease of 17.6% in developing countries. The decline in world trade volume, along with limited consumption activity in the pandemic situation, then had an impact on world commodity prices in 2020. This, for example, was seen through a decline in crude oil prices by 84.4% compared to 2019, and a decline of 9.4% in non-oil and gas commodity prices.

In the midst of a number of obstacles in the world economic conditions, the Indonesian economy is known to experience a similar condition. Referring to data released by Statistics Indonesia (BPS) in February 2021, there was a contraction in Indonesia's economic growth rate in 2020 of 2.07%. This achievement also shows a decrease of 7.09% compared to economic growth in 2019, which was recorded to be positively realized at 5.02%. Still referring to the same data, the Export of Goods and Services was recorded as the component with the deepest contraction of 7.70%, in line with the realization of the Import of Goods and Services component as a deduction in Gross Domestic Product (GDP) by expenditure, which contracted by 14.71%. Several other components that recorded a significant contraction include the Transportation and Warehousing business sector, which amounted to 15.04%, and the Accommodation and Food and Beverage Procurement which amounted to 10.22%.



Lebih lanjut, struktur perekonomian Indonesia secara spasial untuk tahun 2020 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa, dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 58,75%. Pada struktur tersebut, Pulau Sumatera diketahui memberi kontribusi sebesar 21,36%, dan Pulau Kalimantan sebesar 7,94%. Pada kawasan Indonesia Timur, Pulau Sulawesi tercatat memberikan kontribusi sebesar 6,66%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,94%, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,35%. Kelompok dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2020 meliputi Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,01%, Pulau Jawa sebesar 2,51%, Pulau Kalimantan sebesar 2,27%, dan Pulau Sumatera sebesar 1,19%. Situasi berbeda terjadi pada Pulau Sulawesi yang tercatat tetap mampu tumbuh secara positif sebesar 0,23%, serta Pulau Maluku dan Papua yang juga tumbuh secara positif sebesar 1,44%.

Secara umum, pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 memberikan pengaruh secara cukup besar terhadap situasi pada industri nasional, termasuk industri pelabuhan. Sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk memberi gambaran terkait hal tersebut meliputi data aktivitas transportasi laut pada 5 (lima) pelabuhan utama di Indonesia, yaitu Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Balikpapan, dan Pelabuhan Makassar, sesuai laporan yang dirilis BPS. Pada tahun 2020, jumlah penumpang angkutan laut dalam negeri mencapai 14,2 juta manusia, atau mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebesar 40,66%. Secara spesifik, penurunan jumlah penumpang terjadi pada seluruh pelabuhan utama yang diamati, dengan kisaran persentase sebesar 57,22% hingga 76,51%. Seiring hal tersebut, terjadi penurunan jumlah barang yang diangkut pada pelabuhan-pelabuhan yang diamati dengan persentase 2,56% hingga 18,67%, meski secara akumulatif seluruh pelabuhan tetap menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 1,61%.

Furthermore, the spatial structure of the Indonesian economy for 2020 was still dominated by provinces in Java Island, with a contribution to GDP of 58.75%. In this structure, Sumatra Island is known to contribute 21.36%, and Kalimantan Island 7.94%. In Eastern Indonesia, Sulawesi Island contributed 6.66%, Bali and Nusa Tenggara Island 2.94%, and Maluku and Papua Island 2.35%. Groups with a contraction in economic growth for 2020 include Bali and Nusa Tenggara Island by 5.01%, Java by 2.51%, Kalimantan by 2.27%, and Sumatra by 1.19%. A different condition occurred in Sulawesi Island, which recorded a positive growth of 0.23%, and Maluku and Papua Island which also grew positively by 1.44%.

In general, the Covid-19 pandemic that occurred in 2020 considerably had affected the conditions in the national industry, including the port industry. A number of indicators that can be used to provide an overview related to this includes data on sea transportation activities at 5 (five) main ports in Indonesia, namely Belawan Port, Tanjung Priok Port, Tanjung Perak Port, Balikpapan Port, and Makassar Port, according to a report released by BPS. In 2020, the number of domestic sea transport passengers reached 14.2 million people, or decreased compared to the previous year of 40.66%. Specifically, a decrease in the number of passengers occurred in all major ports observed, with a percentage range of 57.22% to 76.51%. Along with this, there was a decrease in the number of goods transported at the observed ports with a percentage of 2.56% to 18.67%, while cumulatively all ports continued to show a positive growth of 1.61%.



KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2020

Pada tahun 2020, di tengah sejumlah hambatan eksternal, Perseroan tetap mampu merealisasikan kinerja keuangan secara positif dibanding perolehan pada tahun sebelumnya. Pada posisi keuangan, aset Perusahaan untuk tahun 2020 tercatat sebesar Rp32,2 triliun atau meningkat sebesar 4,68%, dengan nilai total liabilitas sebesar Rp21,15 atau meningkat sebesar 7,33% serta nilai ekuitas sebesar Rp11,04 atau sedikit menurun sebesar 0,05% dibanding perolehan di tahun 2019. Seiring perolehan tersebut, Perseroan berhasil mencatatkan perolehan pendapatan operasi sebesar Rp9,32 triliun serta pendapatan konstruksi sebesar Rp951 miliar, dengan realisasi beban operasi dan beban konstruksi masing-masing sebesar Rp6,86 triliun dan Rp951,4 miliar. Pada hal tersebut, terdapat penurunan jumlah beban operasi mencapai Rp177,94 miliar dibanding pada tahun sebelumnya, serta peningkatan sebesar Rp80,05 miliar pada beban konstruksi, yang sekaligus memperlihatkan capaian Perseroan dalam mengendalikan besaran beban sebagai tindak lanjut langkah efisiensi yang telah ditetapkan. Atas perolehan-perolehan tersebut, Perseroan mampu membukukan nilai laba usaha secara positif sebesar Rp2,31 triliun, atau turun pada tingkat yang terkendali sebesar Rp3,22 triliun dibanding pada tahun sebelumnya.

COMPANY PERFORMANCE IN 2020

In 2020, in the midst of a number of external obstacles, the Company was still able to realize positive financial performance compared to the results in the previous year. In financial position, the Company's assets for 2020 were recorded at Rp32.2 trillion, an increase of 4.68%, with a total liability of Rp21.15 or an increase of 7.33% and an equity value of Rp11.04 or a slight decrease of 0.05% compared to the results in 2019. Along with these results, the Company managed to record operating revenue of Rp9.32 trillion and construction revenue of Rp951 billion, with the realization of operating expenses and construction expenses of Rp6.86 trillion and Rp951.4 billion respectively. In this case, there was a decrease in total operating expenses which reached Rp177.94 billion compared to the previous year, as well as an increase of Rp80.05 billion in construction expenses, which also showed the Company's achievement in controlling expenses as a follow-up to the efficiency measures that have been determined. Based on these achievements, the Company managed to record a positive operating profit of Rp2.31 trillion, or down at a controlled level of Rp3.22 trillion compared to the previous year.

Aset 2020

Asset in 2020

RP32,2 TRILIUN

Ekuitas 2020

Equity in 2020

RP11,04 TRILIUN

Laba Usaha 2020

Operating Profit in 2020

RP2,31 TRILIUN



Capaian keuangan tersebut secara fundamental didorong oleh realisasi trafik yang baik pada tahun 2020, mencapai 96% hingga 127% dibanding sasaran yang ditetapkan melalui RKAP 2020, yang terbagi atas arus kas, arus barang, arus petikemas, dan arus hewan. Secara spesifik, arus kapal terealisasi mencapai 70.873 unit atau 284.050.723 GT, yang masing-masing mencapai 96% dan 98% dari target, arus barang sebesar 65.239.293 ton atau 2.779.240 m³ atau 11.520.303 MMBTU, yang masing-masing setara 95%, 117%, dan 102% dari target, arus petikemas sebesar 4.048.442 boks atau 5.080.686 TEU's yang masing-masing mencapai 102% dan 103% dari target, serta arus hewan sejumlah 101.683 ekor yang setara dengan 127% dibanding target dalam RKAP 2020.

Pada kinerja operasional, Perseroan tercatat mampu menjaga tingkat produksi pelayanan kapal pada posisi yang terkendali dibanding perolehan pada tahun 2019. Pelayanan pemanduan untuk tahun 2020 terealisasi sebesar 103.989 Kpl.Grk atau 600.074.968 GT.Kpl.Grk, dibanding perolehan pada tahun sebelumnya yang tercatat 116.251 Kpl.Grk atau 638.978.418 GT.Kpl.Grk. Pelayanan penundaan terealisasi sebesar 81.299 Kpl.Jam atau 686.846.387 GT.Kpl.Jam, dibanding perolehan pada tahun sebelumnya yang sebesar 87.718 Kpl.Jam atau 699.132.023 GT.Kpl.Jam. Pelayanan penambatan terealisasi sebesar 331.398.329 GT.Etm, dibanding perolehan pada tahun sebelumnya yang sebesar 329.208.083 GT.Etm. Pelayanan alur tercapai sebesar 22.712.428 ton atau 2.079.846 boks dibanding perolehan sebesar 24.932.281 ton atau 2.160.953 boks pada tahun sebelumnya, serta pelayanan kepil tercapai sebesar 32.654 Grk atau 211.424.146 GT dibanding perolehan sebesar 26.168 Grk atau 17.155.062 GT pada tahun sebelumnya.

Beberapa indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja Perseroan pada tahun 2020, meliputi penilaian menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI) dengan capaian skor sebesar 106,24. Penilaian KPI menggunakan indikator-indikator penilaian meliputi Nilai Ekonomi dan Sosial, Inovasi Model Bisnis, Kepemimpinan Teknologi, Pengembangan Investasi, serta Pengembangan Talenta, dengan masing-masing persentase capaian secara umum berhasil tercapai sesuai target yang ditetapkan. Di samping itu, Perseroan

These financial achievements were fundamentally driven by the realization of good traffic in 2020, reaching 96% to 127% compared to the target set through the 2020 RKAP, which is divided into cash flow, goods flow, container flow, and animal flow. Specifically, the realized ship flow reached 70,873 units or 284,050,723 GT, which respectively reached 96% and 98% of the target, and the cargo flow was 65,239,293 tons or 2,779,240 m³ or 11,520,303 MMBTU, respectively equivalent to 95%, 117%, and 102% of the target, the container flow of 4,048,442 boxes or 5,080,686 TEU's which respectively reached 102% and 103% of the target, and the animal flow of 101,683 which was equivalent to 127% compared to the target in the 2020 RKAP.

In terms of operational performance, the Company was recorded as being able to maintain the production level of ship services in a controlled position compared to the results in 2019. Pilotage for 2020 was realized at 103,989 Kpl.Grk or 600,074,968 GT.Kpl.Grk, compared to the acquisition in the previous year which was recorded at 116,251 Kpl.Grk or 638,978,418 GT.Kpl.Grk. Towage was realized at 81,299 Kpl.Hour or 686,846,387 GT.Kpl.Hour, compared to the previous year's acquisition of 87,718 Kpl.Hour or 699,132,023 GT.Kpl.Hour. Berthing was realized at 331,398,329 GT.Etm, compared to the acquisition in the previous year which was 329,208,083 GT.Etm. Shipping channel reached 22,712,428 tons or 2,079,846 boxes compared to 24,932,281 tons or 2,160,953 boxes in the previous year, and mooring services reached 32,654 Grk or 211,424,146 GT compared to 26,168 Grk or 17,155,062 GT in the previous year.

Several other indicators that can be used to measure the Company's performance in 2020 include an assessment using the Key Performance Indicator (KPI) with a score of 106.24. KPI assessment uses assessment indicators including Economic and Social Values, Business Model Innovation, Technology Leadership, Investment Development, and Talent Development, with each percentage of achievement generally being successfully achieved according to the set targets. In addition, the Company managed to maintain the realization of the



juga mampu menjaga realisasi Tingkat Kesehatan Perusahaan dengan perolehan skor mencapai 80,40, atau setara dengan predikat "AA" atau "SEHAT", yang sekaligus memperlihatkan capaian sebesar 3,2 poin di atas usulan yang ditetapkan untuk tahun 2020.

Implementasi Strategi dan Kebijakan

Kinerja keuangan dan operasional yang mampu dicapai oleh Perseroan untuk tahun 2020 merupakan hasil dari terlaksananya sejumlah implementasi strategi dan kebijakan. Implementasi strategi dan kebijakan untuk tahun 2020 secara mendasar mengacu pada Rencana Kerja Manajemen tahun 2020, yang meliputi 23 program kerja dengan total realisasi per 31 Desember 2020 mencapai 100%. Program-program kerja tersebut terdiri dari pelaksanaan pada sektor Teknologi Informasi, meliputi pengembangan *Smart Equipment and Smart Terminal*, implementasi SMK3L dan ISPS Code, serta implementasi pemanfaatan teknologi *big data*, serta pelaksanaan pada sektor infrastruktur berupa pengembangan pelabuhan baru dan pengembangan fasilitas pendukung operasional. Di samping itu, Perseroan juga telah menjalankan langkah optimalisasi utilisasi aset serta peningkatan kapasitas, fasilitas, dan modernisasi pelabuhan.

Direksi beserta seluruh jajaran terkait juga telah melaksanakan tindak lanjut atas arahan pemegang saham Perseroan, meliputi sejumlah 12 arahan terkait pengelolaan pada sektor keuangan dan operasional. Beberapa arahan Pemegang Saham yang telah berhasil dijalankan meliputi upaya peningkatan pendapatan dan pengendalian biaya (*cost reduction program*) di semua lini usaha, serta langkah evaluasi dan pemetaan terhadap bisnis anak perusahaan dan perusahaan patungan guna mengoptimalkan sinergi dalam grup yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai tambah serta kontribusi bagi pemangku kepentingan. Pihak manajemen Perseroan juga telah melakukan kajian secara komprehensif terkait proyek *Benoa Integrated Maritime Tourism Hub* sesuai arahan Pemegang Saham, guna mendukung efektivitas pelaksanaan langkah investasi Perseroan secara jangka panjang.

Company's Soundness Level with a score of 80.40, or equivalent to the predicate "AA" or "HEALTH", which also showed an achievement of 3.2 points above the proposal set for 2020.

Implementation of Strategies and Policies

The financial and operational performance that had been successfully achieved by the Company for 2020 is the result of implementing a number of strategies and policies. The implementation of strategies and policies for 2020 basically refers to the 2020 Management Work Plan, which includes 23 work programs with a total realization as of December 31, 2020 reaching 100%. These work programs consist of implementation in the Information Technology sector, including the development of Smart Equipment and Smart Terminal, implementation of SMK3L and ISPS Code, and implementation of the utilization of big data technology, as well as implementation in the infrastructure sector in the form of developing new ports and developing operational support facilities. In addition, the Company has also taken steps to optimize asset utilization and increase port capacity, facilities, and modernization.

The Board of Directors and all related ranks have also carried out follow-up actions on directives of the Company's shareholders, including 12 directives related to management in the financial and operational sectors. Some of the directives from the Shareholders that have been successfully implemented include efforts to increase revenue and control costs (*cost reduction program*) in all business lines, as well as evaluation and business mapping to subsidiaries and joint ventures in order to optimize synergies within the group which in turn can increase added value and contribution to stakeholders. The Company's management has also carried out a comprehensive study regarding Benoa Integrated Maritime Tourism Hub project according to the Shareholders' directives, in order to support the effectiveness of implementing the Company's long-term investment measures.



Perbandingan Kinerja dan Target tahun 2020

Pada kinerja keuangan, Perseroan berhasil merealisasikan nilai total aset sebesar Rp32,2 triliun untuk tahun 2020, atau mencapai 99,64% dibanding sasaran pada RKAP 2020. Seiring hal tersebut, liabilitas Perseroan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp21,15 triliun, yaitu 102,54% dari target, serta nilai ekuitas sebesar Rp11,04 atau mencapai 94,52% dari target yang ditetapkan. Pada komponen laporan laba rugi, Perseroan mampu merealisasikan pendapatan operasi sebesar Rp9,32 triliun serta pendapatan konstruksi sebesar Rp951,4 miliar, dengan persentase 108,16% dibanding target pendapatan usaha pada RKAP 2020 yang sebesar Rp9.496,94 miliar. Seiring hal tersebut, Perseroan merealisasikan beban operasi sebesar Rp6,86 triliun serta beban konstruksi sebesar Rp951,4 miliar, dengan persentase pencapaian sebesar 118,93% dari target beban usaha. Kemudian, laba usaha Perseroan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp2,31 miliar yang sekaligus menunjukkan capaian sebesar 82,46% dari target pada RKAP 2020.

Pada kinerja operasional, untuk tahun 2020, Perseroan berhasil merealisasikan produksi pelayanan pemanduan sejumlah 103.989 Kpl.Grk atau mencapai 95% dari target dalam RKAP 2020 atau sebesar 89% dibanding perolehan pada tahun sebelumnya. Produksi pelayanan penundaan berhasil terealisasi sebesar 81.299 Kpl.Jam, mencapai 99% dibanding target yang ditetapkan, produksi pelayanan penambatan terealisasi sebesar 331.398329 GT.Etm, mencapai 100% dibanding target yang ditetapkan serta mencapai 101% dibanding perolehan pada tahun sebelumnya. Kemudian, produksi pelayanan alur terealisasi sebesar 22.712.428 ton, mencapai 87% dibanding target yang ditetapkan, serta produksi pelayanan kepil terealisasi sebesar 32.654 Grk atau mencapai 106% dari target yang ditetapkan pada RKAP 2020.

Melalui realisasi pada kinerja operasional tersebut, Perseroan mampu merealisasikan pendapatan pelayanan kapal sejumlah Rp1.021,81 miliar atau mencapai sebesar 96% dibanding target yang ditetapkan. Secara terperinci, pendapatan pemanduan untuk tahun 2020 adalah

Comparison of Performance and Targets for 2020

In terms of financial performance, the Company managed to realize a total asset value of Rp32.2 trillion for 2020, or 99.64% compared to the 2020 RKAP target. Along with this, the Company's liabilities for 2020 was Rp21.15 trillion, which was 102.54% of the target, and equity value of Rp11.04 or 94.52% of the target set. In the income statement component, the Company was able to realize operating revenue of Rp9.32 trillion and construction revenue of Rp951.4 billion, with a percentage of 108.16% compared to the operating revenue target in the 2020 RKAP which was Rp9,496.94 billion. In line with this, the Company realized operating expenses of Rp6.86 trillion and construction expenses of Rp951.4 billion, with an achievement percentage of 118.93% of the operating expenses target. Then, the Company's operating profit for 2020 was Rp2.31 billion, which also showed an achievement of 82.46% of the 2020 RKAP target.

As for operational performance in 2020, the Company succeeded in realizing the production of pilotage services of 103,989 Kpl.Grk or reaching 95% of the target in the 2020 RKAP or 89% compared to the previous year. Production of towage services was successfully realized at 81,299 Kpl.Hour, reaching 99% compared to the target set. Production of berthing services was realized at 331,398329 GT.Etm, reaching 100% compared to the target set and reaching 101% compared to the previous year's gain. Then, the production of shipping channel services was realized at 22,712,428 tons, reaching 87% compared to the target set, and production for mooring service was realized at 32,654 Grk or reaching 106% of the target set in the 2020 RKAP.

Through the realization of operational performance, the Company managed to realize ship service revenues of Rp1,021.81 billion or 96% compared to the set target. In detail, pilotage revenue for 2020 was Rp148.99 billion, or realized 88%, towage revenue was Rp397.63 billion or 96%



sebesar Rp148,99 miliar, atau terealisasi sebesar 88%, pendapatan penundaan adalah sebesar Rp397,63 miliar atau mencapai 96% dari target, pendapatan penambatan tercatat sebesar Rp211,11 miliar atau mencapai 94% dibanding target, pendapatan jasa alur adalah sebesar Rp259,50 miliar atau sebesar 101%, serta pendapatan jasa kecil untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp4,58 miliar, atau mencapai hingga 103% dari target pada RKAP 2020.

Tantangan yang Dihadapi dan Solusinya

Selama tahun 2020, Perseroan menghadapi sejumlah tantangan baik yang berasal dari faktor eksternal maupun internal. Tantangan-tantangan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. ...
2. ...

Kemudian, sebagai respons atas hal-hal tersebut, Perseroan telah menerapkan sejumlah langkah kebijakan sebagai solusi guna menjaga tingkat kinerja keuangan dan operasional di tahun buku 2020. Langkah-langkah tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. ...
2. ...

Mohon data.

PROSPEK USAHA PERUSAHAAN TAHUN 2021

Analisis terhadap prospek usaha Perseroan untuk tahun 2021 disusun berdasarkan proyeksi atas sejumlah indikator ekonomi, baik yang berlaku secara global maupun nasional, khususnya pada indikator yang memiliki kemungkinan untuk memberikan dampak bagi aktivitas bisnis yang dijalankan Perseroan.

Mengacu pada dokumen *World Economic Outlook* yang disusun oleh IMF, pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2021 diproyeksi akan mampu tumbuh secara positif mencapai level 6%. Pada proyeksi tersebut, kelompok negara ekonomi maju diperkirakan akan mampu tumbuh sebesar 5,1% secara akumulatif, seiring kelompok negara ekonomi berkembang yang diperkirakan dapat tumbuh mencapai 6,7%. Realisasi volume perdagangan dunia juga diproyeksi akan mengalami perbaikan hingga

of the target, berthing revenue was recorded at Rp211.11 billion, or 94% of the target, channel service revenue was Rp259.50 billion or 101%, and mooring service revenue for 2020 was Rp4.58 billion, or up to 103% of the target set in RKAP 2020.

Challenges Faced and the Solutions

During 2020, the Company faced a number of challenges both from external and internal factors. These challenges include as follows:

In response to these matters, the Company has implemented a number of policy measures as a solution to maintain the level of financial and operational performance in the 2020 financial year. These measures include as follows:

COMPANY BUSINESS PROSPECTS FOR 2021

The analysis of the Company's business prospects for 2021 is based on projections of a number of economic indicators, both globally and nationally, especially on indicators that have the possibility to have an impact on the Company's business activities.

Referring to the *World Economic Outlook* document compiled by the IMF, global economic growth for 2021 is projected to be able to grow positively reaching the level of 6%. In this projection, the group of developed countries is estimated to be able to grow by 5.1% accumulatively, in line with the group of developing countries which is estimated to grow at 6.7%. Realization of world trade volume is also projected to improve to be able to grow at 8.4%, with import and export volumes expected to grow



mampu tumbuh pada angka 8,4%, dengan volume impor dan ekspor diperkirakan tumbuh secara positif pada kisaran 7,6% hingga 9,1%. Pada proyeksi tersebut, harga komoditas dunia diperkirakan akan mengalami perbaikan dengan realisasi pertumbuhan harga minyak mencapai 41,7% dan komoditas-komoditas non-migas pada angka 16,1%.

Optimisme yang sama juga terdapat pada proyeksi situasi perekonomian Indonesia untuk 2021. Hal tersebut, misalnya, terlihat melalui data Informasi APBN 2021 yang dirilis Kementerian Keuangan yang memproyeksikan perekonomian Indonesia mampu tumbuh mencapai 5%. Dengan terealisasinya pemulihan ekonomi nasional serta didukung oleh perbaikan ekonomi negara-negara maju, perbaikan likuiditas arus modal diperkirakan dapat mendukung stabilitas nilai tukar rupiah secara lebih kuat pada kisaran Rp14.600 per dolar Amerika Serikat. Proyeksi terkait aktivitas impor dan ekspor pada tahun 2021 dapat diketahui melalui target bea masuk dan keluar oleh Kementerian Keuangan, dengan angka pertumbuhan diperkirakan dapat terealisasi secara positif sebesar 4,2% hingga 8,1%. Hal tersebut dinilai sebagai kelanjutan dari tren kenaikan volume impor dan ekspor yang terjadi pada periode 2016 sampai 2019, yaitu periode sebelum pandemi terjadi, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,9% hingga 5,6% per tahun.

Sejumlah faktor yang ditengarai memberikan pengaruh meliputi perkembangan program vaksinasi pada sejumlah negara, termasuk Indonesia, seiring dukungan kebijakan fiskal dan moneter sebagai stimulus perbaikan situasi ekonomi. Perbaikan situasi ekonomi pada tahun 2021 juga akan dipengaruhi secara signifikan oleh perbaikan pertumbuhan pada sejumlah negara dengan kekuatan ekonomi yang besar, meliputi Tiongkok dan Amerika Serikat. Pada lingkup nasional, dukungan pemerintah terhadap pemulihan ekonomi terlihat melalui struktur anggaran belanja pada APBN 2021, dengan fokus realisasi pada sektor industri terdampak, program perlindungan sosial, serta antisipasi pengadaan vaksin.

positively in the range of 7.6% to 9.1%. In this projection, world commodity prices are expected to improve with the realization of oil price growth reaching 41.7% and non-oil and gas commodities at 16.1%.

The same optimism is also found in the projection of Indonesian economy for 2021. This, for example, can be seen through the 2021 State Budget Information data released by the Ministry of Finance which projects that the Indonesian economy will be able to grow by 5%. With the realization of the national economic recovery and supported by the economic recovery of developed countries, the improvement in liquidity of capital flows is expected to support the stability of the rupiah exchange rate more strongly at around Rp14,600 per US dollar. Meanwhile, projections related to import and export activities in 2021 can be seen through the target of import and export duties by the Ministry of Finance, with a positive growth rate of 4.2% to 8.1% expected to be realized. This is considered a continuation of the trend of increasing import and export volumes that occurred in the period 2016 to 2019, the period before the pandemic occurred, with an average growth of 4.9% to 5.6% per year.

A number of factors that are considered to have an impact include the development of vaccination programs in a number of countries, including Indonesia, along with support from fiscal and monetary policies as a stimulus for improving the economic situation. The economic improvement in 2021 will also be significantly affected by the improvement in growth in a number of countries with large economic powers, including China and the United States. At the national level, the government's support for economic recovery can be seen through the budget structure in the 2021 State Budget, with a focus on realization of the affected industrial sector, social protection program, and anticipation of vaccine procurement.



Atas uraian mengenai proyeksi indikator-indikator ekonomi tersebut, Direksi menyimpulkan bahwa Perseroan memiliki prospek usaha yang baik pada tahun 2021. Perseroan memiliki peluang yang cukup besar untuk dapat memanfaatkan peluang yang tersedia, menyusul perbaikan situasi perekonomian dan industri. Direksi dibantu jajaran terkait telah memastikan bahwa Perseroan memiliki sumber daya yang memadai guna mendukung realisasi seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan melalui RKAP 2021. Di samping itu, Kami juga berkeyakinan Perseroan akan mampu menjaga pemenuhan target jangka pendek dan target jangka panjang, sesuai sasaran strategis tahun 2020-2024 untuk menjadi *Industri Leader* melalui transformasi Perseroan sebagai ‘Smart Operator Pelabuhan Berskala Dunia’.

TATA KELOLA SUMBER DAYA MANUSIA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Perusahaan memahami bahwa pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional merupakan bagian penting dalam keseluruhan upaya mewujudkan pertumbuhan bisnis sebagai *industry leader* pada industri jasa kepelabuhan di Indonesia. Seluruh Insan Pelindo III merupakan aset strategis sekaligus pemangku kepentingan yang memiliki peran signifikan bagi kegiatan bisnis dan operasional yang dijalankan Perseroan. Atas dasar pemahaman tersebut, Perseroan senantiasa melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna mewujudkan tata kelola SDM yang efektif, profesional, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan Perseroan secara konsisten mengacu pada sistem pengembangan SDM Pelindo III, sesuai visi untuk memberdayakan dan menciptakan kualitas SDM yang kompeten, memiliki kinerja yang andal, serta berbudi pekerti luhur.

Per 31 Desember 2020, Perseroan didukung oleh kekuatan SDM yang secara konsolidasi sejumlah 3.995 karyawan. Jumlah keseluruhan tersebut sekaligus menunjukkan realisasi terhadap anggaran tahun 2020 mencapai 97,78%. Dari jumlah tersebut, terdapat realisasi jumlah pegawai organik sebesar 3.114 karyawan, atau

Based on the description of the projections of these economic indicators, the Board of Directors concluded that the Company has good business prospects in 2021. The Company has considerable opportunity to take advantage of the available opportunities, following the improvement in the economic and industrial conditions. The Board of Directors assisted by the relevant ranks have ensured that the Company has adequate resources to support the realization of all work plans that have been set in the 2021 RKAP. Moreover, we also believe that the Company will be able to maintain the fulfillment of both short-term and long-term targets, according to the 2020-2024 strategic target to become an Industry Leader through the Company's transformation as a 'Smart World-Scale Port Operator'.

CORPORATE GOVERNANCE OF HUMAN CAPITAL AND INFORMATION TECHNOLOGY

The Company understands that the management of qualified and professional Human Capital (HC) is an important part in the overall effort to realize business growth as an industry leader in the port service industry in Indonesia. All Pelindo III personnel are strategic assets as well as stakeholders who have a significant role in the business and operational activities of the Company. Based on this understanding, the Company always takes the necessary steps to realize an effective, professional and sustainable HC corporate governance. In its implementation, the management of Human Capital carried out by the Company consistently refers to the Pelindo III HC development system, in accordance with the vision to empower and create Human Capital quality who are competent, have a reliable performance, and have a good character.

As of December 31, 2020, the Company is supported by a consolidated HC of 3,995 employees. This total amount also shows that the realization of the 2020 budget has reached 97.78%. From this amount, there was a realization of the number of organic employees to 3,114 employees, or has reached 93.01% compared to the



mencapai 93,01% dibanding target pada anggaran yang ditetapkan, serta mencapai 79,62% dari jumlah seluruh karyawan Perseroan. Di samping itu, terdapat realisasi pegawai yang diperlukan sejumlah 246 orang serta pegawai PKWT sejumlah 389 orang, yang masing-masing memenuhi sebesar 99,6% dan 102,4% dari target yang ditetapkan.

Fokus penerapan tata kelola SDM Perseroan untuk tahun 2020 mencakup 4 (empat) sasaran utama, yaitu implementasi SMK3L dan ISPS *Code*, pemetaan kompetensi pegawai dan analisis *gap* kompetensi, penerapan sistem Teknologi Informasi penunjang *Human Capital Management System*, serta penerapan desain remuneration pegawai dengan orientasi pada kinerja dan peningkatan motivasi. Atas fokus-fokus sasaran tersebut, Perseroan telah melaksanakan pengelolaan SDM untuk tahun 2020 sesuai program kerja yang telah disusun.

Di samping itu, Perseroan juga menjalankan program pengembangan SDM secara efektif, dengan mengalihkan sejumlah pelaksanaan kegiatannya ke dalam sistem daring. Hal tersebut merupakan wujud adaptasi Perseroan terhadap perkembangan situasi pada tahun 2020, sesuai arah kebijakan Perseroan dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan piranti digital pada proses bisnis serta sistem tata kelola yang dijalankan. Secara keseluruhan, Perseroan telah merealisasikan sebanyak ... pelatihan selama tahun 2020, dengan rata-rata pelatihan pertahun untuk pegawai mencapai ... jam/tahun. Program pendidikan tersebut diikuti oleh sejumlah ... pegawai, dengan persentase rasio pegawai peserta pelatihan mencapai ...% dari total pegawai.

Mohon data.

Seiring hal tersebut, Perseroan memahami bahwa keberadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal dalam struktur pengelolaan kegiatan bisnis dan operasional merupakan unsur dukungan yang mendasar dan penting. Pemanfaatan TIK secara sistematis dan menyeluruh akan mendorong serta mengoptimalkan kinerja elemen-elemen Perseroan, guna tercapainya efektivitas serta efisiensi pada proses bisnis yang dijalankan. Pada akhirnya, ketersediaan struktur dan perangkat TIK yang andal akan memberikan dukungan

target in the stipulated budget, and reached 79.62% of the total number of employees of the Company. In addition, there was a realization of the seconded employees of 246 employees and 389 PKWT employees, each of which has reached 99.6% and 102.4% of the stipulated target.

The focus in implementing the HC Corporate Governance for 2020 includes 4 (four) main targets, namely the implementation of SMK3L and ISPS Code, mapping of employee competencies and competency gap analysis, implementing Information Technology systems supporting the Human Capital Management System, and implementing employee remuneration designs oriented to the performance and increasing motivation. Based on the focus of these targets, the Company has implemented HC management for 2020 according to the work program that has been prepared.

In addition, the Company also performed effective HC development programs, by diverting a number of its activities to the online system. This is a form of the Company's adaptation to the development of 2020 situation, in accordance with the direction of the Company's policy in the utilization of Information Technology and digital tools in the implemented business processes and corporate governance systems. Generally, the Company has realized ... training programs during 2020, with the average of annual training for employee of ... hours/year. The education program was attended by ... employees, with the percentage ratio of employees participating in training was ...% of the total employees.

Furthermore, the Company understands that the existence of reliable Information and Communication Technology (ICT) in the structure of management business and operational activities is a fundamental and important element of support. The systematic and comprehensive use of ICT will encourage and optimize the performance of the Company's elements, in order to achieve effectiveness and efficiency in the ongoing business processes. Eventually, the availability of reliable ICT structures and tools will provide important support



yang penting bagi keseluruhan upaya Perseroan untuk bertransformasi sesuai sasaran bisnis yang telah ditetapkan, yaitu menjadi '*Smart Operator Pelabuhan Berskala Dunia*'.

Pelindo III telah mengembangkan *Master Plan Teknologi Informasi* (MPTI) yang telah menjadi acuan pengembangan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada lingkup operasional Perseroan. Pengembangan serta pemberlakuan MPTI merupakan bagian dari upaya Perseroan untuk memberdayakan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam berbagai aspek operasional yang dijalankan, guna menjaga pemanfaatannya tetap dijalankan secara proaktif dan responsif. MPTI tersusun atas 84 usulan inisiatif, yang terdiri dari 36 inisiatif terkait pengembangan aplikasi, 3 inisiatif tentang pengelolaan data, 31 inisiatif tentang pengembangan teknologi, 11 inisiatif terkait *IT service management and governance*, serta 3 inisiatif terkait *IT operating model*. Secara mendasar, usulan program kerja dikategorikan menjadi 3 tema utama, yaitu (1) digitalisasi, integrasi, dan otomasi, (2) *advanced capability*, dan (3) *continous improvement*.

Untuk tahun 2020, Perseroan telah merealisasikan sejumlah program kerja terkait pemanfaatan TIK yang dijalankan melalui koordinasi dan kewenangan Subdit Teknologi Informasi dan Komunikasi. Program-program kerja yang telah terealisasikan terkait pemanfaatan TIK tersebut meliputi fokus kebijakan implementasi *big data* serta pengembangan *Smart Equipment and Smart Terminal*. Lebih lanjut, Perseroan telah merealisasikan pengadaan infrastruktur guna mendukung penerapan *Big Data Analysis*, melalui pembangunan *dashboard* dan *data analytical*. Terkait pengembangan *Smart Equipment and Smart Terminal*, Perseroan telah menyelesaikan implementasi *Smart Visual Zonning Area* sesuai *System Acceptace Test (SAT) Scenario* untuk fitur *smart zonning*. Di samping itu, pada pengembangan sistem TIK, Perseroan telah merealisasikan implementasi ISO pada Aplikasi Korporat My Pelindo hingga memenuhi sertifikasi ISO:27001.

for the Company's efforts to transform according to the determined business goals, which is to become a 'Smart World-Scale Port Operator'.

Pelindo III has developed an Information Technology Master Plan (MPTI) which has become a reference for the development of Information and Communication Technology utilization in the Company's operational scope. The development and implementation of MPTI is part of the Company's efforts to empower Information and Communication Technology in various operational aspects, in order to maintain its utilization in a proactive and responsive manner. MPTI is composed of 84 proposed initiatives, consisting of 36 initiatives related to application development, 3 initiatives on data management, 31 initiatives on technology development, 11 initiatives related to IT service management and governance, and 3 initiatives related to IT operating models. Basically, the proposed work program is categorized into 3 main themes, namely (1) digitalization, integration, and automation, (2) advanced capability, and (3) continuous improvement.

In 2020, the Company has realized a number of work programs related to the ICT utilization which were carried out through the coordination and authority of the Information and Communication Technology Sub-Directorate. Work programs that have been realized related to the ICT utilization include the focus on big data implementation policies and the development of Smart Equipment and Smart Terminal. Furthermore, the Company has realized the establishment of infrastructure to support the implementation of Big Data Analysis, through the construction of dashboards and data analytics. Regarding the development of Smart Equipment and Smart Terminals, the Company has completed the implementation of the Smart Visual Zoning Area according to the System Acceptance Test (SAT) Scenario for the smart zoning feature. In addition, in the development of the ICT system, the Company has realized the implementation of ISO on the My Pelindo Corporate Application to accomplish ISO: 27001 certification.



Terkait usulan program inisiatif *Master Plan* Teknologi Inforasi periode 2020 – 2024, Perseroan telah mulai mengerjakan sejumlah 12 usulan program pada tahun 2020, meliputi penerapan sistem ERP pada anak dan cucu Perusahaan, penyempurnaan aplikasi layanan non-peti kemas, implementasi DevOps *Engineering*, serta implementasi *Self-Service Dashboard Data Analytics*. Selain itu, terdapat pula langkah penusunan modal operasi CSE dan *data taxonomy* serta penyusunan model operasi *metadata management* sebagai bagian dari upaya Perseroan untuk memulai pengembangan TI sesuai MPTI yang telah disusun. Seluruh usulan yang telah mulai dikerjakan pada tahun 2020 tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan efektivitas serta kualitas layanan Perseroan secara jangka panjang, yang pada akhirnya mampu meningkatkan daya saing Pelindo III di tengah pertumbuhan bisnis serta dinamika industri ke depan.

PRAKTIK TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Bagi Pelindo III, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) merupakan aspek fundamental yang menyediakan dukungan penting bagi penciptaan keberlangsungan usaha secara jangka panjang. Melalui pemahaman tersebut, Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan implementasi GCG pada sistem tata kelola yang dijalankan, meliputi seluruh aktivitas bisnis dan operasional, serta menjalankan mekanisme evaluasi dan perbaikan guna menjaga kualitas penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik secara berkesinambungan. Penerapan GCG secara menyeluruh merupakan wujud upaya Perseroan dalam melindungi kepentingan segenap pemangku kepentingan, melalui praktik pengelolaan sesuai prinsip-prinsip GCG dan standar *best practices*, serta ketentuan pada peraturan/perundang-undangan yang berlaku.

In regard to the proposed Information Technology Master Plan initiative for the 2020 – 2024 period, the Company has started working on a number of 12 proposed programs in 2020, including the implementation of the ERP system for the Company's subsidiary and second-tier subsidiary, the improvement of non-container service applications, the implementation of DevOps Engineering, and the implementation of Self -Service Dashboard Data Analytics. Additionally, there are steps to prepare CSE operating capital and taxonomy data as well as the preparation of the operation model of metadata management as part of the Company's efforts to start IT development according to the proposed MPTI. All of the proposals that have been implemented in 2020 are expected to encourage the effectiveness and quality of the Company's services in the long term, which in turn will be able to increase Pelindo III's competitiveness amid business growth and future industrial dynamics.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES

For Pelindo III, the implementation of Good Corporate Governance (GCG) is a fundamental aspect that provides important support for the establishment of long-term business sustainability. Through this understanding, the Company is committed to implementing GCG in its governance system, including all business and operational activities, as well as to implement the evaluation and improvement mechanisms in order to maintain the quality of good corporate governance practices continuously. The implementation of GCG in general is a manifestation of the Company's efforts to protect the interests of all stakeholders, through management practices in accordance with GCG principles and best practice standards, as well as the provisions of the applicable regulations/laws.



Penerapan GCG pada keseluruhan praktik tata kelola yang dijalankan Perseroan merupakan wujud implementasi tujuan keberadaan Pelindo III sebagai Badan Usaha Miliki Negara, yang sesuai peraturan/perundang-undangan yang berlaku, wajib memberi dorongan bagi pengembangan perekonomian nasional serta menyelenggarakan kemanfaatan umum melalui penyediaan barang dan jasa. Perseroan berkeyakinan bahwa pemenuhan tujuan keberadaan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan pengelolaan berbasis penerapan GCG secara menyeluruh. Terkait hal tersebut, Perseroan juga meyakini bahwa pelaksanaan penerapan GCG pada sistem tata kelola yang dijalankan merupakan bagian dari keseluruhan upaya Perseroan untuk senantiasa mengedepankan aspek kepatuhan (*compliance*), sebagai wujud pelaksanaan pengelolaan bisnis yang bertanggung jawab dan akuntabel.

Komitmen Perseroan atas penerapan GCG terlaksana secara efektif dengan mengacu pada kerangka pelaksanaan mencakup 5 (lima) landasan utama, yaitu *governance principle*, *governance commitment*, *governance structure*, *governance process*, serta *governance outcome*. Perseroan melaksanakan penerapan GCG secara berkesinambungan dengan mengacu pada *Roadmap GCG* dengan sasaran akhir yaitu terwujudnya Pelindo III sebagai *Most Trusted Company*. Guna mendukung pelaksanaan penerapan GCG dapat terlaksana secara optimal, Perseroan memastikan ketersediaan organ serta perangkat aturan, yang salah satunya terwujud melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018 dan No. PER.0050/HK.01/HOFC-2018, sebagai pedoman internal penerapan GCG yang berlaku atas seluruh aktivitas bisnis dan operasional Perseroan.

Dalam pelaksanaannya, Direksi beserta jajaran terkait telah merealisasikan sejumlah pengembangan penerapan GCG Perseroan untuk tahun 2020. Hal tersebut misalnya ditunjukkan melalui langkah penyempurnaan sistem *Whistleblowing System* yang dimiliki Perseroan, meliputi pengesahan Pedoman Sistem Pengaduan Pelanggaran

The implementation of GCG in all corporate governance practices carried out by the Company is the manifestation of Pelindo III's existence as a State-Owned Enterprise, which in accordance with applicable regulations/laws, is obliged to encourage the development of the national economy and to provide public benefits through the provision of goods and services. The Company believes that the fulfillment of the existence purpose can be carried out effectively and sustainably through the implementation of management based on the implementation of GCG. Therefore, the Company also believes that the implementation of GCG in the corporate governance system is part of the Company's efforts to always prioritize the compliance aspect, as a form of responsible and accountable business management.

The Company's commitment in implementing GCG is carried out effectively by referring to the implementation framework covering 5 (five) main foundations, namely governance principle, governance commitment, governance structure, governance process, and governance outcome. The Company implements GCG continuously by referring to the GCG Roadmap with the ultimate goal is to realize Pelindo III as the Most Trusted Company. In order to support the implementation of GCG to be carried out optimally, the Company ensures the availability of organs and regulations, one of which is realized through Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018 and No. PER.0050/HK.01/HOFC-2018, as an internal guideline for the implementation of GCG that applies to all business activities and operations of the Company.

In its implementation, the Board of Directors and related organs have realized a number of developments in the Company's GCG implementation for 2020. For instance, it can be shown through the improvement of the Whistleblowing System of the Company, including the ratification of the Company's Whistleblowing



(WBS) di Lingkungan Pelindo III serta penyusunan program kerja sosialisasi WBS Perseroan kepada seluruh karyawan. Beberapa aspek pengembangan penerapan GCG yang terlaksana pada tahun 2020 meliputi aspek pengendalian gratifikasi serta pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas penerapan GCG Perseroan pada tahun mendatang.

Pada tahun 2020, Perseroan melaksanakan **assessment** terhadap penerapan GCG sesuai parameter Kementerian BUMN. Berdasarkan **assessment** tersebut, Perseroan memperoleh skor mencapai 91,770 atau setara dengan predikat "Sangat Baik". Perolehan skor penerapan GCG untuk tahun 2020 sekaligus memperlihatkan peningkatan kualitas penerapan GCG Perseroan dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,670 poin atau 1,00%.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN MANAJEMEN RISIKO

Perseroan menerapkan Sistem Pengendalian Internal sesuai standar serta ketentuan pada peraturan/perundang-undangan yang berlaku, sebagai serangkaian mekanisme terintegrasi yang diterapkan secara menyeluruh oleh manajemen serta seluruh Insan Pelindo III. Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan Perseroan telah mengacu pada prinsip-prinsip yang ditetapkan *Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission* (COSO), serta diperkuat oleh keberadaan peraturan internal yaitu Peraturan Direksi Pelindo III No. PER.30/HK.03/P.III-2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pelindo III. Secara lebih lanjut, Sistem Pengendalian Internal yang dimiliki dan dijalankan Perseroan diterapkan sebagai dukungan bagi kegiatan bisnis dan operasional guna menjaga agar tetap berjalan secara efektif dan efisien.

Melalui acuan serta kerangka tersebut, Perseroan menerapkan Sistem Pengendalian Internal meliputi 5 (lima) aspek utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta aktivitas pengawasan. Selama tahun 2020, Direksi beserta seluruh jajaran Perseroan telah melaksanakan Sistem Pengendalian Internal secara menyeluruh terhadap kelima aspek tersebut,

System (WBS) within Pelindo III and the arrangement of a socialization work program of the Company's WBS to all employees. Several aspects of the development of GCG implementation that were carried out in 2020 include aspects of gratification control and Report of State Officials Wealth (LHKPN), which is expected to be able to improve the quality of the Company's GCG implementation in the coming year.

In 2020, the Company carried out an assessment of GCG implementation according to the parameters of the Ministry of SOEs. Based on the assessment, the Company obtained a score of 91.770 or equivalent to the predicate of "Excellent". The obtained score of GCG implementation in 2020 also shows improved quality of the Company's GCG implementation compared to the previous year of 0.670 points or 1.00%.

INTERNAL CONTROL SYSTEM AND RISK MANAGEMENT

The Company implements an Internal Control System in accordance with the standards and provisions of the applicable regulations/laws, as a series of integrated mechanisms that are thoroughly implemented by the management and all Pelindo III personnel. The Internal Control System implemented by the Company has referred to the principles established by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), and is reinforced by the existence of internal regulations, namely Pelindo III Board of Directors Regulation No. PER.30/HK.03/P.III-2015 dated May 26, 2015 on the General Guidelines for Internal Control System in Pelindo III. Furthermore, the Internal Control System owned and operated by the Company is implemented as a support to continue business and operational activities effectively and efficiently.

Through these references and frameworks, the Company implements an Internal Control System including 5 (five) main aspects, namely control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and supervisory activities. During 2020, the Board of Directors and all levels of the Company have implemented a comprehensive Internal Control System for these five aspects, with the aim of protecting and



dengan sasaran pada penjagaan dan pengamanan aset, penyediaan informasi keuangan dan manajemen secara wajar, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional Perseroan. Selain itu, pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal juga ditujukan untuk meningkatkan efektivitas budaya risiko pada tata kelola organisasi serta menjamin seluruh pelaksanaan kegiatan bisnis Perseroan senantiasa sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku.

Di samping itu, Kami menyadari bahwa penerapan manajemen risiko secara menyeluruh merupakan sesuatu yang penting untuk dilakukan. Manajemen risiko merupakan bagian dari keseluruhan sistem tata kelola perusahaan yang baik, guna memberikan jaminan secara sistematis dalam pencapaian sasaran keberlangsungan usaha yang ditetapkan. Perseroan menerapkan manajemen risiko dengan mengacu pada kerangka ISO 31000:2018 (*Risk Management Guidelines*), meliputi pendekatan 3 (tiga) lapis pertahanan (*three lines of defence*) yang menjaga akuntabilitas manajemen risiko Perseroan, baik dari sisi kualitas maupun cakupan pengelolaannya. Implementasi serta praktik manajemen risiko oleh Perseroan secara konsisten dilaksanakan melalui proses yang melekat pada setiap bagian organisasi, dengan didasarkan pada kebijakan serta pedoman teknis yang sistematis dan menyeluruh.

Kualitas penerapan manajemen risiko oleh Perseroan untuk tahun 2020 diukur melalui *assessment maturity level* melalui kerjasama dengan Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Perusahaan (BPKP) Provinsi Jawa Timur. Melalui *assessment* tersebut, sistem manajemen risiko Perseroan mendapatkan skor ... dengan tingkat kematangan ..., yang sekaligus memperlihatkan peningkatan tingkat kematangan pengelolaan risiko dibanding pada tahun sebelumnya. Terkait hal tersebut, Perseroan memiliki komitmen yang kuat untuk secara terus-menerus melakukan evaluasi dan perbaikan implementasi manajemen risiko, sebagai upaya memperkuat pengelolaan bisnis dan operasional yang dijalankan dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.

Mohon data.

securing assets, providing fair financial and management information, as well as increasing the efficiency and effectiveness of the Company's operational activities. In addition, the implementation of the Internal Control System is also aimed at increasing the effectiveness of the risk culture in organizational governance and ensuring that the entire implementation of the Company's business activities is always in accordance with applicable regulations/laws.

Additionally, we realize that the implementation of comprehensive risk management is something that is important to carry out. Risk management is part of the overall good corporate governance system, in order to provide a systematic guarantee in achieving the established business continuity targets. The Company implements risk management by referring to the ISO 31000:2018 (*Risk Management Guidelines*) framework, which includes 3 (three) lines of defense approach that maintains accountability of the Company's risk management, both in terms of quality and scope of management. The implementation and practices of risk management by the Company are consistently carried out through processes attached in every part of the organization, based on systematic and comprehensive policies and technical guidelines.

The quality of risk management implementation by the Company for 2020 is measured through a maturity level assessment in collaboration with the Representative Office of Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) East Java Province. Through this assessment, the Company's risk management system obtained a score of ... with a maturity level of ..., which also shows an increase in the maturity level of risk management compared to the previous year. Therefore, the Company has a strong commitment to continuously evaluate and improve the implementation of risk management, as an effort to strengthen business and operational management in facing various challenges ahead.



PELAKSANAAN PKBL DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pelindo III menyadari bahwa pemenuhan tanggung jawab sosial serta pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan sesuatu yang penting, sebagai wujud kontribusi Perseroan kepada pemangku kepentingan meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, Perseroan juga merupakan Badan Usaha Milik Negara yang mengemban tanggung jawab untuk tetap mendorong pengembangan perekonomian nasional serta berperan aktif memberdayakan usaha kecil dan menengah dalam masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan komitmen Perseroan untuk secara konsisten mendorong terciptanya sinergi serta hubungan harmonis, guna mewujudkan keseimbangan antara harapan pemangku kepentingan dan visi Pelindo III untuk menjadi 'Smart Operator Pelabuhan Berskala Dunia'.

Perseroan telah menerapkan pelaksanaan dan pengelolaan program tanggung jawab sosial, sesuai standar mutu ISO 26000 *Social Responsibility* yang memuat 7 (tujuh) aspek pemenuhan. Ketujuh aspek tersebut adalah pemenuhan terhadap hak-hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, lingkungan, operasi yang adil, isu konsumen, serta pelibatan dan pengembangan sosial kemasyarakatan. Penerapan pelaksanaan dan pengelolaan sesuai ISO 26000 *Social Responsibility* merupakan upaya Perseroan untuk mendorong hadirnya kebermanfaatan Perseroan kepada pemangku kepentingan, secara menyeluruh dan tepat sasaran. Secara lebih lanjut, Perseroan menjamin pelaksanaan pemenuhan tanggung jawab sosial senantiasa dijalankan dengan mengacu pada prinsip *triple bottom lines*, yaitu fokus pada pemerolehan manfaat (*profit*), pelestarian lingkungan (*planet*), serta pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*).

Secara spesifik, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dijalankan Perseroan merupakan wujud kepedulian sebagai bagian dari upaya pemenuhan tanggung jawab sosial, khususnya terkait pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada masyarakat di sekitar lokasi operasional. Pada tataran pelaksanaannya, PKBL Perseroan senantiasa mengacu pada sasaran yang termuat dalam *Roadmap PKBL PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)* tahun 2007-2021, yang disusun sebagai hasil pemetaan secara menyeluruh

THE IMPLEMENTATION OF PKBL AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Pelindo III realizes that the fulfillment of social responsibility and the implementation of the Partnership and Community Development (PKBL) Program are important, as a form of the Company's contribution to stakeholders including economic, social and environmental aspects. In addition, the Company is also a State-Owned Enterprise that has the responsibility to continue to encourage the development of the national economy and play an active role in empowering small and medium enterprises in the community. This is in line with the Company's commitment to consistently encouraging the synergies and harmonious relationships, in order to achieve a stability between stakeholder expectations and Pelindo III's vision to become a 'Smart World-Scale Port Operator'.

The Company has implemented and managed social responsibility programs, according to the ISO 26000 Social Responsibility quality standard which contains 7 (seven) fulfillment aspects. These seven aspects are the fulfillment of human rights, employment practices, the environment, fair operations, consumer issues, and social involvement and development. The implementation and management according to ISO 26000 Social Responsibility is the Company's effort to encourage the Company's benefits to stakeholders comprehensively and on target. Furthermore, the Company ensures that the implementation of social responsibility compliance is always carried out by referring to the principle of the triple bottom lines, which are focusing on obtaining benefits (profit), preserving the environment (planet), and fulfilling community welfare (people).

Specifically, the Partnership and Community Development (PKBL) Program carried out by the Company is a form of concern as part of Company's efforts in social responsibility compliance, particularly related to the empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in communities around operational locations. In its implementation level, the Company's PKBL always refers to the targets contained in the PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) PKBL Roadmap for 2007-2021, which was compiled as a result of a thorough mapping



terhadap harapan dan persoalan pemangku kepentingan. Melalui pelaksanaan program tersebut, UMKM penerima program kemitraan diharapkan mampu tumbuh secara kuat dan mandiri, seiring peningkatan omzet (*pro growth*) serta pembukaan lapangan kerja (*pro job*) bagi masyarakat sekitar. Pada jangka panjang, pelaksanaan program kemitraan oleh Perseroan diharapkan mampu ikut mendorong upaya pengentasan kemiskinan (*pro poor*) secara berkelanjutan.

Per 31 Desember 2020, Perseroan telah merealisasikan penyaluran Program Kemitraan dengan total mencapai Rp7,14 miliar, dengan penyaluran terbesar pada sektor perdagangan dengan realisasi mencapai Rp2,8 miliar. Beberapa sektor lain meliputi sektor jasa sebesar Rp1,77 miliar, serta sektor industri sebesar Rp1,37 miliar. Seiring hal tersebut, Perseroan juga telah merealisasikan penyaluran bantuan melalui Program Bina Lingkungan mencapai Rp72,93 miliar, yang sekaligus menunjukkan pemenuhan sebesar 91% dari anggaran tahun 2020. Terkait hal tersebut, sebagai respons terhadap situasi pandemi pada tahun 2020, penyaluran bantuan pada Program Bina Lingkungan berfokus pada kegiatan penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19, yang terbagi menjadi pelaksanaan pada lingkup Perseroan serta masyarakat sekitar.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Pada tahun 2020, terdapat perubahan komposisi Direksi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Surat Keputusan No. SK-107/MBU/04/2020 tanggal 3 April 2020. Perubahan komposisi Direksi untuk periode 1 Januari 2020 hingga April 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment
Doso Agung	Direktur Utama / President Director	Keputusan Menteri BUMN No. SK-244/MBU/09/2018 tanggal 19 September 2018 / Decree of SOE Minister No. SK-244/MBU/09/2018 dated September 19, 2018
Putut Sri Muljanto	Direktur Operasi dan Komersial / Director of Operations and Commercials	Keputusan Menteri BUMN No. SK-289/MBU/11/2018 tanggal 5 November 2018 / Decree of SOE Minister No. SK-289/MBU/11/2018 dated November 5, 2018
Joko Noerhudha	Direktur Teknik / Director of Engineering	Keputusan Menteri BUMN No. SK-244/MBU/09/2018 tanggal 19 September 2018 / Decree of SOE Minister No. SK-244/MBU/09/2018 dated September 19, 2018

of stakeholder expectations and issues. Through the implementation of this program, MSME recipients of the partnership program are expected to be able to develop strongly and independently, along with increasing turnover (*pro growth*) and initiate employment opportunities (*pro job*) for the community. In the long term, the implementation of the partnership program by the Company is expected to be able to sustainably contribute to reduce poverty (*pro poor*).

As of December 31, 2020, the Company has realized the distribution of the Partnership Program with a total of Rp7.14 billion, with the largest distribution in the trade sector reaching Rp2.8 billion. Several other sectors include the service sector with Rp1.77 billion, and the industrial sector with Rp1.37 billion. Accordingly, the Company has also realized the distribution of assistance through the Community Development Program that reached Rp72.93 billion, which at the same time shows the fulfillment of 91% of the 2020 budget. In accordance, in response to the pandemic situation in 2020, the distribution of assistance to the Community Development Program focuses on handling and preventing the spread of Covid-19, which implementation is divided into the scope of the Company and the community.

CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

In 2020, there were changes in the composition of the Board of Directors which was stipulated through the Decree of the Minister of SOEs No. ... dated ... Changes in the composition of the Board of Directors for the period of January 1, 2020 until ... can be seen in the following table:



Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment
Toto Heliyanto	Direktur Sumber Daya Manusia / Director of Human Capital	Keputusan Menteri BUMN No. SK-103/MBU/2014 tanggal 12 Mei 2014 / Decree of SOE Minister No. SK-103/MBU/2014 dated May 12, 2014
Irvandi Gustari	Direktur Keuangan / Director of Finance	Keputusan Menteri BUMN No. SK-219/MBU/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019 / Decree of SOE Minister No. SK-219/MBU/10/2019 dated October 16, 2019
Toto Nugroho Pranatyasto	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis / Director of Business Transformation and Development	Keputusan Menteri BUMN No. SK-289/MBU/11/2018 tanggal 5 November 2018 / Decree of SOE Minister No. SK-289/MBU/11/2018 dated November 5, 2018

Kemudian, melalui Surat Keputusan No. SK-209/MBU/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 untuk periode ... hingga ... dapat dilihat pada tabel berikut:

Moreover, through the Decree of the Minister of SOEs No. ... dated for the period ... to ... can be seen in the following table:

Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment
U. Saefudin Noer	Direktur Utama / President Director	Surat Keputusan No. SK-209/MBU/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 / Decree of SOE Minister No. SK-209/MBU/06/2020 dated June 18, 2020
Putut Sri Muljanto	Direktur Operasi dan Komersial / Director of Operations and Commercials	Surat Keputusan No. SK-289/MBU/11/2018 tanggal 5 November 2018 / Decree of SOE Minister No. SK-289/MBU/11/2018 dated November 5, 2018
Boy Robyanto	Direktur Teknik / Director of Engineering	Surat Keputusan No. SK-209/MBU/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 / Decree of SOE Minister No. SK-209/MBU/06/2020 dated June 18, 2020
Edi Priyanto	Direktur Sumber Daya Manusia / Director of Human Capital	Surat Keputusan No. SK-209/MBU/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 / Decree of SOE Minister No. SK-209/MBU/06/2020 dated June 18, 2020
Endot Endrardono	Direktur Keuangan / Director of Finance	Surat Keputusan No. SK-209/MBU/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 / Decree of SOE Minister No. SK-209/MBU/06/2020 dated June 18, 2020
Kokok Susanto	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis / Director of Business Transformation and Development	Surat Keputusan No. SK-209/MBU/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 / Decree of SOE Minister No. SK-209/MBU/06/2020 dated June 18, 2020

*) Pengangkatan U. Saefudin Noer, Boy Robyanto, Edi Priyanto, Endot Endrardono dan Kokok Susanto berdasarkan SK No. SK-209/MBU/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 menggantikan Doso Agung, Joko Noerhudha, Toto Heliyanto, Irvandi Gustari dan Toto Nugroho.



PENUTUP

Kami meyakini bahwa seluruh pencapaian kinerja Perseroan untuk tahun 2020 tidak mungkin tercapai tanpa adanya kontribusi serta sinergitas segenap Insan Pelindo III. Untuk itu, melalui kesempatan ini, Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dewan Komisaris dan seluruh karyawan atas upaya dan kerja keras yang telah diberikan untuk mendukung Perseroan dalam menghadapi tantangan selama tahun 2020. Seiring hal tersebut, Kami menyadari bahwa keberhasilan Perseroan juga merupakan wujud dukungan dan kepercayaan dari Pemegang Saham beserta segenap pemangku kepentingan. Karenanya, Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pemegang Saham beserta segenap pemangku kepentingan, meliputi mitra bisnis, pelanggan, regulator, serta masyarakat di sekitar area operasional.

Kami optimistis, kepercayaan dan dukungan tersebut akan mampu mendorong Perseroan untuk terus mewujudkan pertumbuhan bisnis secara kuat dan berkelanjutan, serta mewujudkan visi untuk menjadi ‘Smart Operator Pelabuhan Berskala Dunia’.

CLOSING

We believe that all of the Company's performance achievements for 2020 would not be possible without the contribution and synergy of all Pelindo III personnel. Therefore, through this opportunity, we would like to express our appreciation and gratitude to the Board of Commissioners and all employees for the efforts and hard work that have been given to support the Company in facing challenges during 2020. Additionally, we realize that the Company's success is also a form of support and trust from the Shareholders and all stakeholders. Therefore, we express our appreciation and gratitude to the Shareholders and all stakeholders, including business partners, customers, regulators, and communities around the operational area.

We are optimistic that this trust and support will be able to encourage the Company to continue to realize strong and sustainable business growth, as well as to realize the vision to become a ‘Smart World-Scale Port Operator’.

U. SAEFUDIN NOER

Direktur Utama

President Director



KOKOK SUSANTO

Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis
Director of Business Transformation and Development

BOY ROBYANTO

Direktur Teknik
Director of Engineering

PUTUT SRI MULJANTO

Direktur Operasi dan Komersial
Director of Operations and Commercials



U. SAEFUDIN NOER

Direktur Utama
President Director

ENDOT ENDRARDONO

Direktur Keuangan
Director of Finance

EDI PRIYANTO

Direktur Sumber Daya Manusia
Director of Human Capital



SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2020 PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)

Statement to the Members of the Board of Commissioners, with regard to Responsibility for the 2020 Annual Report of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned testify that all information disclosed, in the Annual Report of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) 2020, is presented in its entirety. We are fully responsible for the accuracy of the contents in this Annual Report.

This Statement is hereby made in all truthfulness.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Marsetio
Komisaris Utama
President Commissioner

Heru Sukanto
Komisaris
Commissioner

Otto Ardianto
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Ridwan Djamaruddin
Komisaris
Commissioner

Ali Mochtar Ngabalin
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Dedi Syarif Usman
Komisaris
Commissioner



SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2020 PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)

Statement to the Members of the Board of Directors, with regard to
Responsibility for the 2020 Annual Report of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned testify that all information disclosed, in the Annual Report of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) 2020, is presented in its entirety. We are fully responsible for the accuracy of the contents in this Annual Report.

This Statement is hereby made in all truthfulness.

Direksi
Board of Directors

U. Saefudin Noer
Direktur Utama
President Director

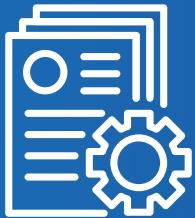
Putut Sri Muljanto
Direktur Operasi dan Komersial
Operations and Commercial Director

Boy Robyanto
Direktur Teknik
Engineering Director

Edi Priyanto
Direktur SDM
Human Capital Director

Endot Endrardono
Direktur Keuangan
Finance Director

Kokok Susanto
Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis
Business Transformation and Development Director



PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE







INFORMASI PERSEROAN

Company Information

	Nama Lengkap Perusahaan Full Company Name	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
	Penyebutan Lain Other Names	Pelindo III
	Bidang Usaha Business Lines	Penyedia Jasa Kepelabuhanan Port Services Provider
	Status Perusahaan Company Status	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) State-Owned Enterprise (SOE)
	Tanggal Pendirian Date of Establishment	1 Desember 1992 December 1, 1992
	Tanggal Beroperasi Initial Operating Date	1 Desember 1992 December 1, 1992
	Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1991 tanggal 19 Oktober 1991 Government Regulation No. 58 of 1991 dated 19 October 1991
	Akta Pendirian Deed of Establishment	Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 5 tanggal 1 Desember 1992 tentang Perubahan Perum menjadi Perseroan Notarial Deed of Imas Fatimah, S.H. No. 5 dated 1 December 1992 on the Amendment of Public Company into Limited Liability Company
	Modal Dasar Authorised Capital	Rp3.200.000.000.000
	Modal Disetor Paid-Up Capital	Rp1.018.953.000.000
	NPWP Tax Identification Number	01.061.000.4-093.000
	TDP Registration Number	503/12131.0/436.6.11/2013
	SIUP Business License	KP 88 tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 KP 88 of 2011 dated 14 February 2011



	Jumlah Kantor Pelayanan Number of Service Office	1 Kantor Pusat, 4 Regional, dan 43 Pelabuhan 1 Head Office, 4 Regional, and 43 Ports
	Jumlah Karyawan Number of Employees	4.573 orang (2020) 4.573 orang (2019) 4.856 orang (2018) 4.467 orang (2017) 4.114 orang (2016)
	Jumlah Aset Total Assets	Rp32,19 triliun Rp32.19 trillion
	Pemegang Saham Shareholder	Republik Indonesia (100%) Republic of Indonesia (100%)
	Alamat Kantor Pusat Head Office Address	Jl. Perak Timur No. 610, Surabaya 60165 Indonesia
	Telepon Telephone	+62 31 329 8631-37 – Kantor Pusat +62 21 2234 6068-69 – Kantor Perwakilan
	Faksimile Facsimile	+62 31 329 5207 – Kantor Pusat
	Situs Web Website	www.pelindo.co.id
	Surel E-Mail	humas@pelindo.co.id ; info@pelindo.co.id



INFORMASI PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN

Information on Name Change

1969

Badan Pengusahaan Pelabuhan
Port Concession Agency

1983

Perum Pelabuhan
Public Port Company

1992

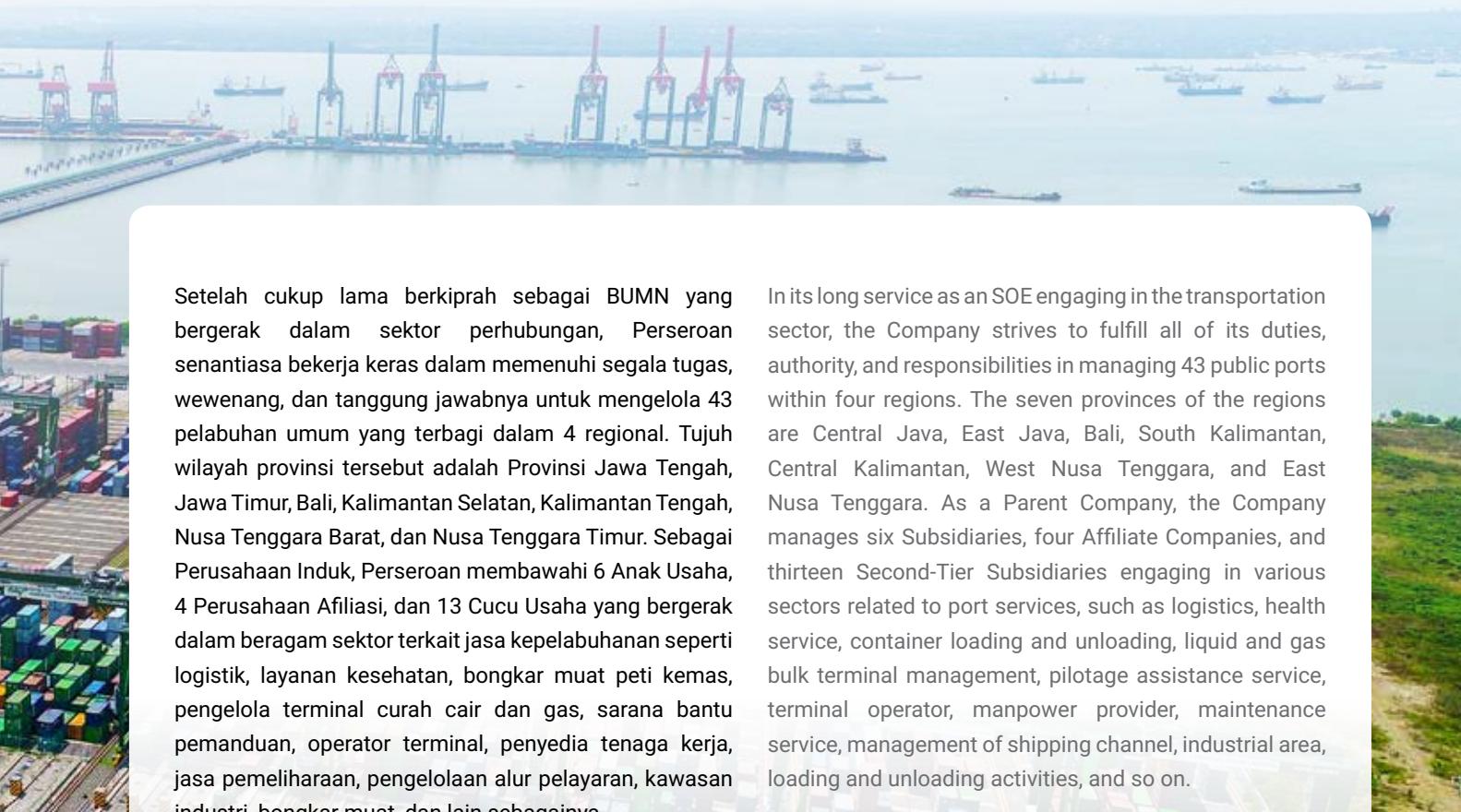
Perseroan

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

Brief History of the Company

Pelindo III merupakan perusahaan yang berperan dalam mengelola dan membawahi 43 pelabuhan umum di 7 wilayah provinsi Indonesia. Didirikan pada 1 Desember 1992, Perseroan terus melakukan pengembangan dan memberikan layanan terintegrasi di segmen penyediaan jasa kepelabuhanan. Hingga saat ini, Perseroan juga berperan sebagai Perusahaan Induk (*holding company*) dari anak usaha yang ada.

Pelindo III is a company that manages 43 public ports in seven provinces in Indonesia. Established on December 1, 1992, the Company continues to develop and provide integrated services in the segment of port services provision. To the present day, the Company is also a Parent Company (holding company) for several subsidiaries.



Setelah cukup lama berkiprah sebagai BUMN yang bergerak dalam sektor perhubungan, Perseroan senantiasa bekerja keras dalam memenuhi segala tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya untuk mengelola 43 pelabuhan umum yang terbagi dalam 4 regional. Tujuh wilayah provinsi tersebut adalah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sebagai Perusahaan Induk, Perseroan membawahi 6 Anak Usaha, 4 Perusahaan Afiliasi, dan 13 Cucu Usaha yang bergerak dalam beragam sektor terkait jasa kepelabuhanan seperti logistik, layanan kesehatan, bongkar muat peti kemas, pengelola terminal curah cair dan gas, sarana bantu pemanduan, operator terminal, penyedia tenaga kerja, jasa pemeliharaan, pengelolaan alur pelayaran, kawasan industri, bongkar muat, dan lain sebagainya.

Sebagai penyedia jasa kepelabuhanan terkemuka di Indonesia, Perseroan memiliki peran kunci untuk menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut. Dengan tersedianya prasarana transportasi laut yang memadai, Perseroan mampu menggerakkan dan menggairahkan kegiatan ekonomi negara dan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Perseroan bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran, penyelenggaraan pelabuhan, angkutan perairan, dan lingkungan maritim. Saat ini, status Perseroan bukan lagi sebagai regulator melainkan operator pelabuhan yang secara otomatis mengubah bisnis Perseroan dari *Port Operator* menjadi *Terminal Operator*. Surat dari Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang diterbitkan bulan Februari 2011 menjelaskan tentang penunjukan Pelindo III sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP), semakin menegaskan peran Perseroan sebagai *Terminal Operator*.

In its long service as an SOE engaging in the transportation sector, the Company strives to fulfill all of its duties, authority, and responsibilities in managing 43 public ports within four regions. The seven provinces of the regions are Central Java, East Java, Bali, South Kalimantan, Central Kalimantan, West Nusa Tenggara, and East Nusa Tenggara. As a Parent Company, the Company manages six Subsidiaries, four Affiliate Companies, and thirteen Second-Tier Subsidiaries engaging in various sectors related to port services, such as logistics, health service, container loading and unloading, liquid and gas bulk terminal management, pilotage assistance service, terminal operator, manpower provider, maintenance service, management of shipping channel, industrial area, loading and unloading activities, and so on.

As a prominent port service provider in Indonesia, the Company has a key role in ensuring the sustainability and continuity of sea freight. Through the availability of adequate sea transportation infrastructure, the Company is able to mobilize and stimulate economic activities in the country.

Pursuant to Law No. 17 of 2008 on Shipping, the Company is responsible for shipping safety, port operation, water transportation, and maritime environment. The Company's current status is no longer as a regulator but an operator of ports; hence, its business automatically transformed from Port Operator to Terminal Operator. A decree issued by the Directorate General of Sea Transportation of the Ministry of Transportation in February 2011 states the appointment of Pelindo III as a Port Enterprise (BUP), further affirming its role as a Terminal Operator.



JEJAK LANGKAH PERUSAHAAN

Milestones



1960

Pelindo III pada awal berdirinya merupakan sebuah Perusahaan Negara yang pendiriannya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1960.

Pelindo III was established as Perusahaan Negara (State Enterprise) according to Government Regulation No. 19 of 1960.

2011

Perubahan Anggaran Dasar Desember 2011 tentang Keputusan Menteri BUMN No. 236 tahun 2011 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan dan/atau Pemberian Kuasa Menteri BUMN selaku Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan, Perseroan Terbatas, serta Pemilik Modal pada Perusahaan Umum kepada Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, dan Pejabat Eselon BUMN.

The Company amended its Articles of Association in December 2011, regarding the Decree of Minister of SOE No. 236 of 2011 on the Delegation of a Portion of Authority and/or Granting of Authority of the Minister of SOE as the Shareholder to Companies, Limited Liability Companies, and Investors of Public Enterprise to the BOD, BOC, Supervisory Board, and Echelon Officers of SOE.

1969

Pada kurun waktu 1969-1983, bentuk Perusahaan Negara diubah menjadi Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1969.

In 1969-1983, the status of State Enterprise was changed into Port Concession Agency (Badan Pengusahaan Pelabuhan- BPP) according to the Government Regulation No. 1 of 1969.

1992

Perubahan status dari Perum menjadi Perseroan seiring pesatnya perkembangan dunia usaha. Perubahan ini ditetapkan dalam Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. No. 5 tanggal 1 Desember 1992.

The Company changed its status from Perum into Perseroan (Company) in line with business development. The change was stipulated in the Notarial Deed of Imas Fatimah, S.H. No. 5 dated 1 December 1992.

1983

Terjadi perubahan nama menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1985. Hal ini dimaksudkan untuk membedakan pengelolaan Pelabuhan Umum yang diusahakan dan yang tidak diusahakan.

The Company changed its name into Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan (Public Port Company) according to the Government Regulation No. 16 of 1983 and the Government Regulation No. 6 of 1985. This was intended to differentiate the management of Public Ports that were operated by Perum and operated by other Government's institutions..



2017

- Di tahun 2017, Perusahaan berhasil membukukan laba sebesar Rp2,03 triliun atau 123% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,65 triliun.
- Investasi pada tahun 2017 terealisasikan sebesar Rp2,45 triliun atau 52% dari RKAP 2017 sebesar Rp4,68 triliun. Realisasi investasi tersebut sebagai bagian dari upaya untuk menjadikan Perusahaan sebagai *Emerging Industry Leader* dengan melakukan transformasi menjadi *Full Handling Terminal System and Logistic Integration – Integrated Industrial Port Estate*.
- In 2017, the Company managed to record a profit of Rp2.03 trillion, 123% of the set target Rp1.65 trillion.
- Investment in 2017 amounted to Rp2.45 trillion, 52% of the set target at Rp4.68 trillion. This investment realisation was part of the efforts to become an Emerging Industry Leader through transformation into a Full Handling Terminal System and Logistic Integration – Integrated Industrial Port Estate.

2020

- Di tahun 2020, Perusahaan berhasil
- In 2020, the Company managed to record

2018

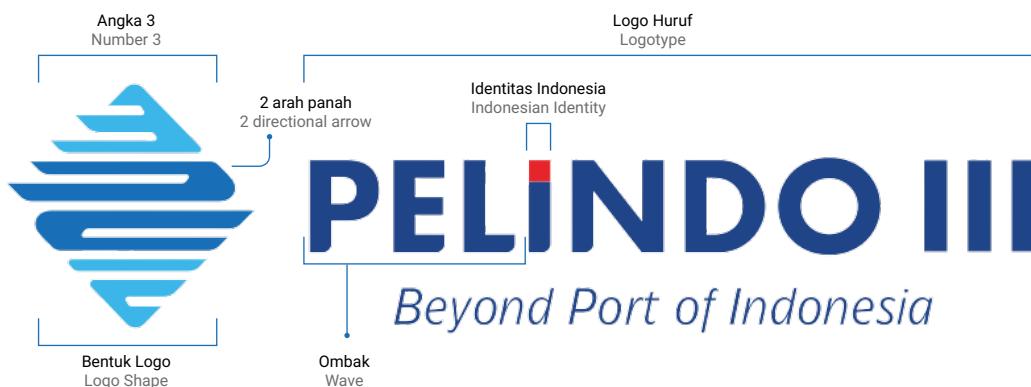
Tahun 2018 menjadi penanda perubahan yang berkesinambungan bagi Pelindo III. Dengan adanya revolusi industri 4.0, Pelindo III menghadirkan aplikasi *Home Terminal Services* (HTS) yang berbasis mobile app guna memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan transaksi kepelabuhanan. Di sisi lain, ekspansi bisnis juga dilakukan Pelindo III, khususnya pada bisnis energi, properti dan pariwisata, serta logistik. Tujuan dari ekspansi bisnis ini adalah untuk memberikan pelayanan terintegrasi bagi pelanggan dengan menyediakan *integrated beyond port services*.

The year of 2018 becomes a marker of sustainable change for Pelindo III. Along with the 4.0 industrial revolution, Pelindo III presents the mobile app-based Home Terminal Services (HTS) app to facilitate the customers in port transactions. On the other hand, business expansion is also carried out by Pelindo III, particularly in the energy, property and tourism, as well as logistics businesses. The purpose of this business expansion is to provide integrated services for customers by providing integrated beyond port services.



MAKNA LOGO PERUSAHAAN

Logo Meaning



BENTUK LOGO

- Pengkinian dan perbaikan terhadap bentuk logo sebelumnya dengan tidak menghilangkan bentuk (*shape*) dasarnya, yaitu dua arah panah bersayap yang merepresentasikan Pelindo III yang selalu bergerak dinamis dan fleksibel, sehingga adaptif terhadap segala perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang dan juga membangun hubungan yang erat dengan lingkungan sekitarnya.
- Bentuk angka 3 yang tersamar dalam desain logo dan melambangkan Pelindo III.

LOGO HURUF

Dipilih tipe *font* yang lebih tegas melambangkan Perseroan yang menjunjung integritas, dinamis, dan selalu menjadi yang terdepan. Dilakukan modifikasi dalam bentuk setengah lengkungan pada bagian kaki tipe *font* tersebut. Modifikasi ini dimaksudnya untuk membuat perbedaan dan menjadikannya unik, di mana lengkungan tersebut juga melambangkan gelombang lautan.

WARNA

Komposisi warna yang digunakan merupakan kombinasi *Bright Cerulean*, *Ocean Blue*, dan *Dark Cerulean* yang menggambarkan laut dan langit biru; di mana laut merupakan tempat dilakukannya kegiatan bisnis utama dari Pelindo III.

Terdapat elemen warna merah dalam logo huruf Pelindo III, yang menunjukkan Perseroan yang berasal dari Indonesia, dan sebagai pemisah dari singkatan Pelabuhan Indonesia.

LOGO SHAPE

- Updating and refining the previous logo shape by retaining its basic shape, namely the two-winged directional arrows, which represents Pelindo III as a company that always moves dynamically and flexibly, adaptive to any changes that will occur in the future while building a close relationship with the surrounding environment.
- The hidden shape of number 3 in logo design symbolizes Pelindo III.

LOGOTYPE

A more assertive font type is chosen to represent the Company that continuously upholds integrity, dynamic, and always be at the forefront. A modification is made in the form of half-arch on the legs of the font type to differentiate and to make it more unique. The half-arch also symbolizes the ocean waves.

COLOR

The color components used in the logo is a combination of Bright Cerulean, Ocean Blue, and Dark Cerulean colors to depict the sea and blue sky; in which the sea is the location where the main business activity of Pelindo III is conducted.

A red color element in the logotype of Pelindo III shows the Company's identity as a business enterprise originating from Indonesia and serves as a separator for the abbreviation of Pelabuhan Indonesia.



BIDANG USAHA

Business Lines

BIDANG USAHA UTAMA

Sesuai dengan Pasal 3 Ayat 2 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan, serta meningkatkan nilai Perusahaan dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- Penyediaan dan/atau pelayanan kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat-tempat berlabuhnya kapal;
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (*pilotage*) dan penundaan kapal;
- Penyediaan dan/atau pelayanan dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat peti kemas, curah cair, curah kering, *multipurpose* (*general cargo*) barang termasuk hewan, dan fasilitas naik turunnya penumpang dan/atau kendaraan;
- Penyediaan pelayanan jasa bongkar muat peti kemas, curah cair, curah kering, *general cargo*, dan kendaraan;
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, *multipurpose*, penumpang, pelayaran rakyat, dan Ro-Ro;
- Penyediaan dan/atau pelayanan gudang-gudang dan lapangan penumpukan dan tangki/tempat penimbunan barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
- Penyediaan dan/atau pelayanan lahan untuk berbagai bangunan dan lapangan, industri, dan gedung-gedung/bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan multimoda;
- Penyediaan dan/atau pelayanan listrik, air minum; dan

MAIN BUSINESS LINES

In accordance with Article 3 Paragraph 2 of the Articles of Association, the purposes and objectives of the Company are to conduct business in the field of port service operations and management, as well as to increase the values of the Company by optimizing the utilization of its resources in order to produce high-quality goods and/or services with strong competitiveness to gain profit and to support the implementation of Limited Liability Company's principles.

To achieve the aforementioned purpose and objectives, the Company may carry out the following main business activities:

- Provision and/or services of water pools and the port basin for ship's traffic and anchoring;
- Provision and/or services related to shipping pilotage and tugging;
- Provision and/or services of the wharf and other facilities for the needs of tethering, loading and unloading of container, liquid and dry bulk, multipurpose goods (*general cargo*) – including animals, and facilities for the flow of passengers;
- Provision of services related to loading and unloading of container, liquid and dry bulk, general cargo, and vehicles;
- Provision and/or services of the container terminal, liquid and dry bulk, multipurpose, passengers, public sea transport, and Ro-Ro;
- Provision and/or services of warehouse and place for hoarding transportation for goods, loading and unloading equipment as well as port equipment;
- Provision and/or services of land for various buildings and grounds, industrial, and buildings associated with streamlined sea freight;
- Provision and/or services electricity and freshwater facilities; and



- Penyediaan dan/atau pelayanan kegiatan konsolidasi dan distribusi muatan.

BIDANG USAHA PENUNJANG

Selain kegiatan usaha utama sesuai yang dimaksud pada Ayat 2 Anggaran Dasar Perusahaan, Pelindo III dapat melakukan kegiatan usaha lain yang dapat menunjang tercapainya tujuan Perusahaan dan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan. Bidang usaha penunjang Perseroan antara lain:

1. Pelayanan Air
2. Pelayanan Listrik
3. Pengusahaan Peralatan
4. Pelayanan Konsolidasi Muatan
5. Pengusahaan Properti
6. Kawasan Industri
7. Pengusahaan *Docking Kapal*
8. Pengusahaan *Forwarding*
9. Pas Pelabuhan
10. Pelayanan Kesehatan

- Provision and/or services of goods consolidation and distribution.

SUPPORTING BUSINESS LINES

Aside from the main business activities as stipulated in Article 2 of the Company's Articles of Association, the Company may carry out other business activities that support the achievement of its objectives and the optimization of the use of Company's resources. Supporting business lines of the Company are:

1. Water services
2. Electrical services
3. Equipment operations
4. Cargo consolidation services
5. Property operations
6. Industrial areas
7. Ship docking operations
8. Forwarding business
9. Port pass
10. Health services

BIDANG USAHA KEPELABUHANAN

Bidang usaha Pelayanan Kapal meliputi:

- a. Pelayanan labuh, yaitu pelayanan penyediaan kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat-tempat berlabuhnya kapal;
- b. Pelayanan Pemanduan, yaitu kegiatan pelayanan membantu Nakhoda kapal agar navigasi dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar;
- c. Pelayanan Penundaan, yaitu kegiatan pelayanan menarik, mendorong, atau mengandeng kapal yang berolah gerak untuk tambat ke/untuk melepas dari dermaga, *jetty*, *trestle*, *pier*, pelampung, *dolphin*, kapal, dan fasilitas tambat lainnya yang menggunakan kapal tunda; dan
- d. Pelayanan Penambatan, yaitu kegiatan pelayanan kapal melakukan ikat tali di tambatan/dermaga untuk melakukan bongkar muat barang atau kegiatan lainnya.

Bidang usaha Pelayanan Barang, yang meliputi:

- a. Pelayanan Bongkar Muat, yaitu pelayanan pembongkaran/pemuatan muatan dari atau ke kapal;
- b. Pelayanan Gedung Penumpukan, yaitu pelayanan penimbunan sementara muatan setelah dibongkar atau dimuat dari atau ke kapal pada ruangan tertutup; dan

PORT BUSINESS

Port service includes:

- a. Anchoring service, i.e. provision of water pools and the port basin for ship's traffic and anchoring;
- b. Pilotage service, i.e. provision of activities to assist ship captains to navigate safely, orderly, and smoothly;
- c. Tugboat service, i.e. provision of tugging, pushing or holding moving ships to tether or to depart from the wharf, jetty, trestle, pier, buoy, dolphin, ship, and other mooring facilities using tugboat; and
- d. Tethering service, i.e. provision of activities to tie vessels to dock/wharf to perform loading or unloading, or other activities.

Cargo service includes:

- a. Loading and Unloading Service, i.e. provision of cargo loading and unloading services to or from vessels;
- b. Warehousing Service, i.e. provision of temporary cargo stacking service after being loaded or unloaded to or from vessels in a closed space; and



- c. Pelayanan Lapangan Penumpukan, yaitu pelayanan penumpukan sementara muatan setelah dibongkar atau akan dimuat dari/ke kapal pada lapangan penumpukan terbuka.

PRODUK DAN LAYANAN

Merujuk pada Anggaran Dasar Perusahaan, bidang usaha Perusahaan adalah menyediakan dan mengusahakan jasa kepelabuhanan untuk menunjang kelancaran angkutan laut dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, yaitu meliputi pengusahaan:

- Kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat berlabuhnya kapal;
- Jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (*pilotage*) dan penundaan kapal;
- Dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat barang maupun hewan, dan fasilitas naik turunnya penumpang;
- Gudang-gudang dan tempat penimbunan barang-barang angkutan bandar, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
- Lahan untuk berbagai bangunan dan lapangan, industri dan gedung-gedung/bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut;
- Penyediaan listrik, bahan bakar minyak, air bersih, dan instalasi limbah pembuangan;
- Jasa terminal, kegiatan konsolidasi dan distribusi barang maupun hewan;
- Pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhanan;
- Jasa pelayanan kesehatan;
- Jasa transportasi laut;
- Jasa penyewaan fasilitas dan peralatan di bidang kepelabuhanan;
- Jasa perbaikan fasilitas dan peralatan pelabuhan;
- Properti di lingkungan pelabuhan;
- Kawasan industri di lingkungan pelabuhan;
- Kawasan wisata di lingkungan pelabuhan;
- Depo peti kemas;
- Jasa konsultan di bidang kepelabuhanan;
- Jasa komunikasi dan informasi di bidang kepelabuhanan;
- Jasa konstruksi di bidang kepelabuhanan.

- c. Stacking Field Service, i.e. provision of temporary cargo stacking service after being loaded or unloaded to or from vessels on an open field.

PRODUCTS AND SERVICES

Referring to the Articles of Association, the Company engages in providing and operating port service to support the flow of sea transportation to encourage national development, covering:

- Water pools and the port basin for ship's traffic and anchoring;
- Services related to pilotage and tugging;
- Wharf and other facilities for the tethering, loading, and unloading of goods as well as animals, and facilities for the flow of passengers;
- Warehouses and hoarding spot for cargo, loading and unloading equipment as well as port equipment;
- Land for various buildings and grounds, industrial and buildings associated with the streamlining of sea freight;
- Supply of electricity, fuel, fresh water, and waste installation;
- Terminal services, bulk terminal activities, and distribution of goods including animals;
- Education and training services related to port business;
- Health care services;
- Sea transportation services;
- Rental for port equipment and facilities;
- Repair services for port facilities and equipment;
- Property services surrounding the port area;
- An Industrial estate in the port area;
- Tourism area in the port area;
- Container depot;
- Port consulting services;
- Port communication and information services; and
- Port construction services.



VISI, MISI, DAN BUDAYA PERUSAHAAN

Vision, Mission, and Corporate Culture

Untuk mewujudkan aspirasi pemangku kepentingan, jajaran Perseroan telah menetapkan Visi dan Misi Perusahaan. Visi Pelindo III yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2020 telah disesuaikan dan sejalan dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, di mana status dan posisi Perseroan selaku Badan Usaha Pelabuhan (BUP) telah mengalami perubahan fungsi dari yang sebelumnya sebagai penyelenggara usaha kepelabuhanan menjadi hanya penyelenggara usaha terminal pelabuhan.

Perusahaan telah melakukan penyesuaian pada Visi dan Misi untuk review RJPP 2020 - 2024. Pada RJPP 2020 - 2024, sebelumnya, Perseroan berkeinginan untuk menjadi pemain global. Maka, ruang lingkup pelayanan jasa kepelabuhanan diperluas tidak hanya dalam lingkup nasional tetapi juga regional/global. Oleh karena itu, ditetapkanlah Visi Perseroan yaitu "Menjadi Pemimpin Bisnis di Pelabuhan". Namun Visi tersebut dianggap sudah tercapai di periode 2015-2017. Oleh karena itu, dalam tinjauan RJPP 2020 - 2024, Perusahaan menetapkan Visi dan Misi baru, Visi Perseroan sampai dengan tahun 2020 yaitu:

To realize the stakeholders' aspiration, the Company has determined the Corporate Vision and Mission that are contained in the 2020 Long-Term Plan (RJPP) and has been adjusted in line with Law No. 17 of 2008 regarding Shipping. The law stipulates the change of the Company's status and position as a Port Enterprise (BUP) as well as its function and role from port business operator to port terminal business operator.

The Company has adjusted its Vision and Mission to review the 2020 - 2024 RJPP. In the previous 2020 - 2024 RJPP, the Company wished to become a global player. Thus, the scope of port services was expanded, not only in national scope but also regional/global scope, and the Corporate Vision was determined as "Being the Leader of Business in Port". However, this Vision was considered to have been achieved from 2015 through 2017. Therefore, in the review of 2020 - 2024 RJPP, the Company establishes a brand new Vision and Mission. The Company's Vision until 2020 is as follows:



VISI
VISION

**“ Menjadi Smart Operator
Pelabuhan Berskala Dunia**

**To Become a Smart Operator
at the Global Level**



MISI

MISSION

Guna merealisasikan Visi Perusahaan tersebut, maka disusunlah Misi Perusahaan sebagai penjabaran dari Visi Perusahaan. Misi yang disusun juga mengakomodasi UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran serta memperhatikan kondisi objektif yang ada. Misi Perusahaan dalam kurun 5 tahun mendatang adalah:

- Menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan untuk peningkatan kepuasan **stakeholder**;
- Memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna jasa layanan bisnis di pelabuhan melalui digitalisasi dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG);
- Menciptakan solusi bisnis yang cerdas melalui integritas dan kerja sama dengan mitra strategis;
- Membangun dan memperluas jaringan bisnis domestik dan internasional.
- Creating sustainable added values to increase Stakeholders' satisfaction;
- Providing comfort and convenience port services users through Good Corporate Governance (GCG) principles;
- Generating smart business solutions through integrity and cooperation with strategic partners;
- Developing and expanding business network domestically and internationally.

To realize the Vision, the Corporate Mission is prepared as an elaboration of the Vision. The Mission also accommodates Law No. 17 of 2008 concerning Shipping and takes the existing objective conditions into account. For the next five years, the Company's Missions are:

PERNYATAAN REVIEW ATAS VISI DAN MISI PERUSAHAAN

Visi dan Misi Perseroan tersebut telah dibahas, dikaji, ditinjau kembali, serta disetujui bersama oleh Dewan Komisaris dan Direksi dalam RJPP 2020 - 2024. Hal ini dibuktikan dengan telah disetujuinya draf RJPP tahun 2020 - 2024, untuk kemudian diserahkan kepada Pemegang Saham (Kementerian BUMN) pada tanggal 20 September 2020.

STATEMENT ON THE REVIEW OF VISION AND MISSION

The Corporate Vision and Mission have been jointly discussed, studied, reviewed, and approved by the Board of Commissioners and Board of Directors in the 2020 - 2024 RJPP. This is proven through the agreed-upon 2020 - 2024 RJPP to be submitted to the Shareholder (Ministry of SOE) on September 20, 2020.



TUJUAN PERUSAHAAN

Keberlangsungan perusahaan dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan internalnya. Oleh karenanya, Perusahaan harus melakukan identifikasi dan evaluasi atas faktor-faktor tersebut secara komprehensif untuk mengetahui posisi perusahaan agar dapat merumuskan dan memutuskan strategi yang tepat bagi masa depan. Maksud dilakukannya analisis ini adalah untuk mengetahui dimana posisi perusahaan jika dikaitkan dengan kondisi faktor internal dan eksternalnya. Di samping itu, tujuan dari analisis ini untuk mendapatkan gambaran apakah target posisi perusahaan yang telah ditentukan di RJPP periode sebelumnya telah tercapai serta langkah-langkah apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam mengantisipasi faktor-faktor tersebut.

BUDAYA PERUSAHAAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi, serta Tujuan Perusahaan yang telah ditetapkan, manajemen Perseroan menyadari perlunya dukungan budaya organisasi yang selaras dengan karakteristik bisnis, lingkungan bisnis, dan strategi Perseroan yang telah dirumuskan. Budaya yang dimaksud perlu dimiliki oleh seluruh insan Pelindo III serta terinternalisasi dengan baik di setiap proses bisnis Perseroan. Nilai inti perusahaan adalah sebagai berikut:

CORPORATE OBJECTIVES

Keberlangsungan perusahaan dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan internalnya. Oleh karenanya, Perusahaan harus melakukan identifikasi dan evaluasi atas faktor-faktor tersebut secara komprehensif untuk mengetahui posisi perusahaan agar dapat merumuskan dan memutuskan strategi yang tepat bagi masa depan. Maksud dilakukannya analisis ini adalah untuk mengetahui dimana posisi perusahaan jika dikaitkan dengan kondisi faktor internal dan eksternalnya. Di samping itu, tujuan dari analisis ini untuk mendapatkan gambaran apakah target posisi perusahaan yang telah ditentukan di RJPP periode sebelumnya telah tercapai serta langkah-langkah apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam mengantisipasi faktor-faktor tersebut.

CORPORATE CULTURE

In order to actualize the determined Vision, Mission, and Objectives; the management of the Company is aware of the support from a corporate culture that is in line with its business characteristics and environment as well as the set corporate strategies. Such culture must be instilled in all personnel and well-internalized in all business processes of the Company. The core values of the Company are as follows:

AKHLAK

AMANAH

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.

ADAPTIF

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.

HARMONIS

Saling peduli dan menghargai perbedaan.

LOYAL

Beredikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.

KOMPETEN

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

KOLABORATIF

Membangun kerja sama yang sinergis.



Evaluasi dan *monitoring* dilaksanakan setiap 3 bulan untuk memastikan implementasi budaya Perusahaan telah berjalan dengan baik. Proses tersebut dilaksanakan melalui pembentukan *agent of change* di setiap Unit Kerja (untuk Kantor Pusat) dan di Pelabuhan Cabang. Penyampaian implementasi Budaya Perusahaan tahun berjalan oleh manajemen Pelabuhan Cabang kepada Direksi dilakukan ketika Rapat Kerja Tahunan di tahun berikutnya.

STRATEGI PERUSAHAAN

Rencana Jangka Panjang Perusahaan tahun 2020 – 2024 dijabarkan melalui Visi dan Misi perusahaan. Guna menjamin agar Visi perusahaan tersebut tercapai, maka visi tersebut dijabarkan melalui 3 (tiga) Misi perusahaan, dan untuk memastikan pencapaian Misi perusahaan, maka disusunlah strategi perusahaan. Strategi merupakan pola tindakan dan rancangan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan.

Strategi perusahaan terbagi menjadi 3 (tiga) level yaitu strategi korporat, strategi bisnis dan strategi fungsional; serta diiringi dengan rangkaian inisiatif strategis.

Strategi Korporat

Strategi korporat mengidentifikasi serangkaian bisnis, pasar atau industri dimana perusahaan bersaing dan distribusi sumber daya diantara bisnis-bisnis tersebut. Berdasarkan analisis strategi formulasi yang telah dijelaskan pada Buku-II, maka terdapat 4 (empat) strategi korporat yang dapat diterapkan dalam bisnis perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Ke-4 strategi korporat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penetrasi dan Ekspansi Pasar

Penetrasi dan ekspansi pasar adalah merupakan strategi perusahaan dalam rangka meningkatkan pangsa pasar baik pada sektor bisnis yang telah dimiliki oleh perusahaan maupun sektor bisnis baru yang dinilai menguntungkan dengan orientasi tidak saja pada wilayah kerja Pelindo III melainkan di luar wilayah Pelindo III bahkan hingga luar negeri.

Evaluation and monitoring are conducted every three months to ensure the proper Corporate Culture implementation. Such process is performed through the establishment of an agent of change in each Work Unit (for Head Office) as well as Regional and Port Branches. The reporting of Corporate Culture implementation in the reporting period by the Management of Regional and Port Branches to the BOD is conducted at the Annual Work Meeting of the next period.

CORPORATE STRATEGIES

Company Long Term Plan 2020 – 2024 is described through the company's Vision and Mission. To ensure that the company's vision is achieved, the vision is then described through 3 (three) company missions, and to ensure the achievement of the company's Mission, the company further devises its corporate strategy. Strategy represents a pattern of action and resource allocation plan to achieve company goals.

The company's strategy is divided into 3 (three) levels, namely: corporate strategy, business strategy and functional strategy; and accompanied by a series of strategic initiatives.

Corporate Strategy

Corporate strategy identifies a set of businesses, the market or industry in which the company competes, and distribution of resources among these businesses. Based on the analysis of the formulation strategy that has been explained in Book-II, there are 4 (four) strategies that can be applied in the company's business to achieve the predetermined company goals. The 4 corporate strategies are as follows:

1. Market Penetration and Expansion

Market penetration and expansion aimed to improve market share in both existing and new business sectors of the company which is considered profitable but not limited to work area of Pelindo III only but also outside of Pelindo III area and even abroad.



2. Operasional Prima

Operasional prima adalah strategi perusahaan dalam melakukan perbaikan secara berkelanjutan (*continuous improvement*) secara konsisten pada inisiatif organisasi yang menekankan pada perubahan *people-process-technology*. Strategi ini juga merupakan strategi korporat pada RJPP periode sebelumnya. Oleh karena strategi ini bersifat berkelanjutan, maka strategi dapat dipertahankan sebagai strategi korporat pada RJPP periode 2020 – 2024.

3. Optimalisasi dan Pengembangan Bisnis

Optimalisasi dan pengembangan bisnis adalah merupakan strategi perusahaan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasionalisasi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya melalui optimalisasi bisnis yang telah ada dan pengembangan bisnis yang terintegrasi serta penerapan transformasi bisnis melalui implementasi *Port Industry 4.0*.

4. Sinergi

Sinergi adalah merupakan strategi perusahaan dalam upaya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan pangsa pasar melalui kerja sama dan hubungan serta koordinasi yang baik antar regional, mitra bisnis dan pemerintah.

Strategi Bisnis

Strategi bisnis perusahaan menentukan tindakan utama dalam mencapai tujuan perusahaan. Strategi bisnis perusahaan dalam 5 (lima) tahun mendatang meliputi:

1. Kewajiban pelayanan publik;
2. Diversifikasi Produk;
3. *Investment Grade Company*;
4. *Lean Organization*;
5. Peningkatan Kapasitas Pelabuhan dan Pembelajaran Berkelanjutan;
6. Inovasi proaktif;
7. Integrasi horisontal dan vertikal; dan
8. *Best-Value Focus*.

2. Prime Operations

Prime operations are the company's strategy in making continuous improvement Consistently in organizational initiatives that emphasize people-process-technology changes. This strategy is also a corporate strategy in RJPP of the previous period. Because this strategy is sustainable, the strategy can be maintained as a corporate strategy in the 2020 – 2024 RJPP period.

3. Business Optimization and Development

Business optimisation and development is the company's strategy to improve effectiveness and efficiency of company operations in running its business through optimisation of existing business and integrated business development and business transformation implementation through the implementation of Port Industry 4.0.

4. Synergy

Synergy is a corporate strategy aimed to improve customer satisfaction which in turn is expected to increase market share through cooperation and partnership as well as good coordination between regions, business partners and government.

Business Strategy

The company's business strategy determines the main actions in achieving company goals. Business strategy of the company in the next 5 (five) years include:

1. Public service obligations;
2. Product Diversification;
3. Investment Grade Company;
4. Lean Organizations;
5. Improvement of Port Capacity and Sustainable Learning;
6. Proactive innovation;
7. Horizontal and vertical integration; and
8. Best-Value Focus.



Strategi Fungsional

Strategi fungsional adalah strategi yang diimplementasikan oleh setiap area fungsional untuk mendukung strategi bisnis perusahaan. Berikut strategi Fungsional masingmasing direktorat dari Pelindo III adalah sebagai berikut:

1. Transformasi dan Pengembangan Bisnis

- a. Restructuring culture and organization;
- b. Integrated Internal Control;
- c. Kerjasama dengan perusahaan pelayaran;
- d. Kerjasama dengan cargo owner;
- e. Kerjasama pemanfaatan fasilitas APBN yang ada di wilayah DLKr dan DLKp;
- f. Kerja sama pemanfaatan fasilitas APBN (Pelabuhan UPP);
- g. Kerja sama pengembangan pelabuhan dengan Pemerintah Daerah;
- h. Penyediaan fasilitas dry port;
- i. Transportasi multimoda;
- j. Kerja sama operasi TUKS;
- k. Kerja sama dengan penyedia logistics center;
- l. Kerja sama pembangunan pelabuhan;
- m. Pelindo Incorporated;
- n. Menjadi operator pelabuhan di luar negeri;
- o. Pengembangan bisnis energi;
- p. Bisnis rantai logistik terintegrasi;
- q. Pengembangan pelabuhan marina dan fasilitas pendukungnya; dan
- r. Pembangunan Business Continuity Management System (BCMS).

2. Operasional dan Komersial

- a. Digitalisasi perencanaan dan pengembangan bisnis;
- b. Penyediaan layanan kepelabuhanan yang terintegrasi;
- c. Peningkatan kinerja pemasaran;
- d. Pengembangan fasilitas intermoda transportasi;
- e. Windows Connectivity System;
- f. Kerjasama operasi TUKS;
- g. Kerjasama dengan penyedia logistics center;
- h. Menjadi operator TUKS (minerba, semen dan migas);
- i. Menjadi operator pelabuhan di luar wilayah Pelindo III;
- j. Menjadi operator pelabuhan di luar negeri;

Functional Strategy

Functional strategy is a strategy implemented by each functional area to support the company's business strategy. The following is the functional strategy of each directorate of Pelindo III:

1. Business Transformation and Development

- a. Restructuring culture and organisation;
- b. Integrated Internal Control;
- c. Cooperation with shipping companies;
- d. Cooperation with cargo owners;
- e. Cooperation in utilizing existing state budget facilities in the DLKr and DLKp areas;
- f. Cooperation in utilising state budget facilities (UPP Port);
- g. Port development cooperation with Local government;
- h. Provision of dry port facilities;
- i. Multimodal transportation;
- j. TUKS operation cooperation;
- k. Cooperation with logistics center providers;
- l. Port development cooperation;
- m. Pelindo Incorporated;
- n. Becoming a port operator abroad;
- o. Energy business development;
- p. Integrated logistics chain business;
- q. Marine port development and its supporting facilities; and
- r. Development of Business Continuity Management System (BCMS).

2. Operational and Commercial

- a. Digitalising business planning and development;
- b. Provision of integrated port services;
- c. Improved marketing performance;
- d. Development of intermodal transportation facilities;
- e. Windows Connectivity System;
- f. TUKS operation cooperation;
- g. Cooperation with logistics center providers;
- h. Becoming a TUKS operator (mineral and coal, cement and oil and gas);
- i. Becoming a port operator outside Pelindo III area;
- j. Becoming a port operator abroad;



- k. Penyediaan layanan internasional towage, pilotage dan shipping agent; dan
- l. Peningkatan pelayanan terminal penumpang.

3. Teknik

- a. Penambahan dan modernisasi fasilitas untuk petikemas (*smart port* dan *smart terminal system*);
- b. Penambahan dan modernisasi fasilitas untuk non-petikemas;
- c. Peningkatan dan pemeliharaan (*Plan Maintenance System*) fasilitas eksisting yang optimal; dan
- d. Peningkatan pelayanan terminal penumpang.

4. Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Restructuring culture and organization;
- b. Maintaining a skilled and productive workforce; and
- c. Optimisasi aset

5. Keuangan

Terkait dengan korporat Pelindo III

- a. Pertukaran saham dengan partner strategis;
- b. Kerja sama pembangunan pelabuhan;
- c. Pemberian CSR yang mendukung program strategis perusahaan; dan
- d. Pendanaan yang optimal.

Terkait dengan pengembangan bisnis Anak Perusahaan

- a. Optimisasi aset;
- b. Penyediaan fasilitas dry port;
- c. Transportasi multimoda;
- d. Kerja sama dengan penyedia logistics center;
- e. Penyediaan layanan internasional towage, pilotage dan shipping agent;
- f. Pengembangan bisnis energi;
- g. Bisnis rantai logistik terintegrasi;
- h. Pengembangan pelabuhan marina dan fasilitas pendukungnya;
- i. Pengembangan bisnis marine service;
- j. Ekspansi pasar bisnis SDM dan rumah sakit; dan
- k. Initial Public Offering (IPO) Anak Perusahaan.

- k. Provision of international towage, pilotage, and shipping agents services; and
- l. Improvement of passenger terminal services.

3. Technical

- a. Addition and modernisation of facilities for containers (*smart ports* and *smart terminal systems*);
- b. Addition and modernisation of facilities for non-containers;
- c. Optimal improvement and maintenance (*Plan Maintenance System*) of existing facilities; and
- d. Improvement of passenger terminal services.

4. Human Resources (HR)

- a. Restructuring culture and organization;
- b. Maintaining a skilled and productive workforce; and
- c. Asset optimisation

5. Finance

Related to Pelindo III corporate matters

- a. Exchange of shares with strategic partners;
- b. Port development cooperation;
- c. Providing CSR that supports corporate strategy programme; and
- d. Optimal funding.

Related to business development of Subsidiaries

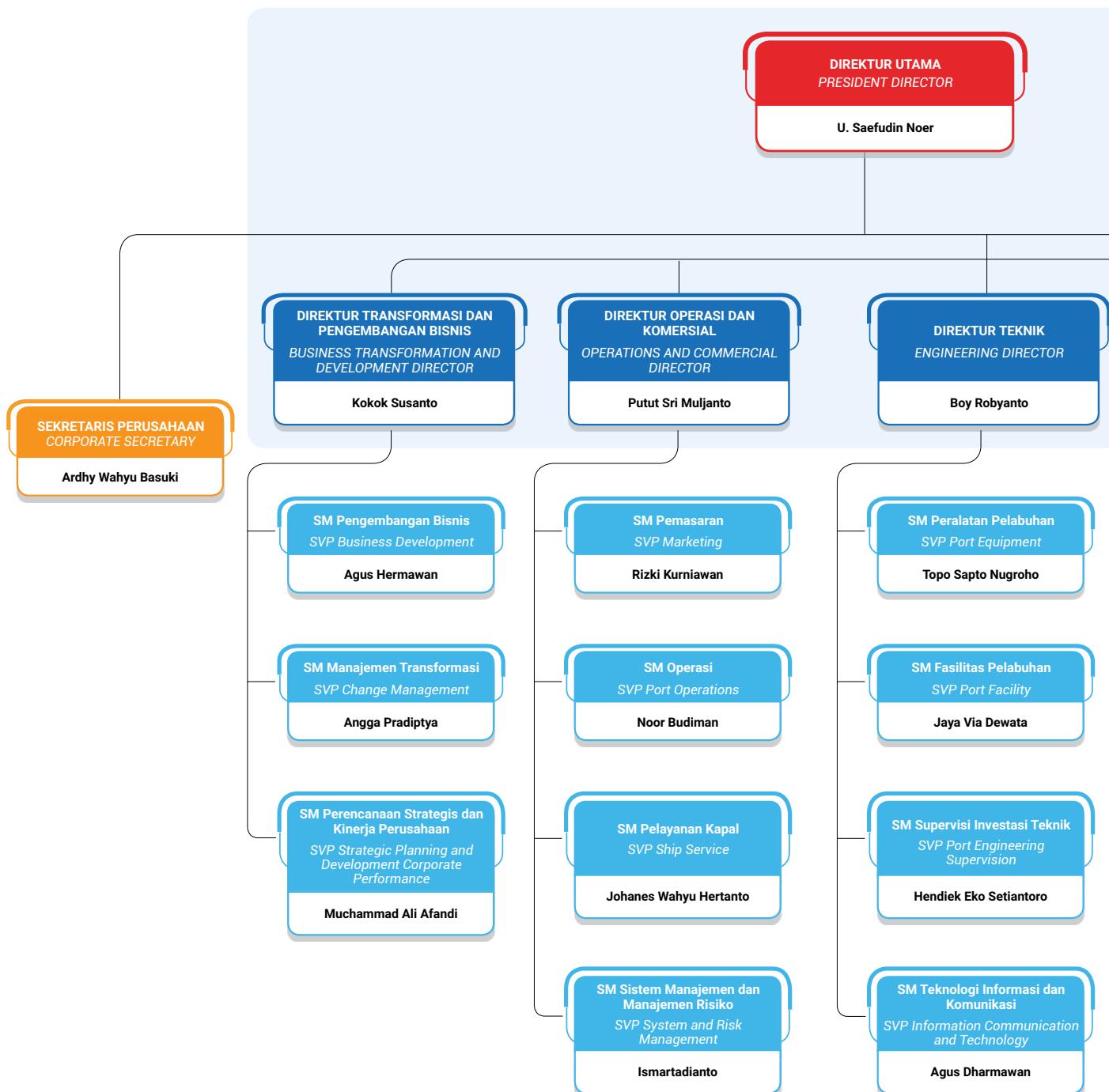
- a. Asset optimisation;
- b. Provision of dry port facilities;
- c. Multimodal transportation;
- d. Cooperation with logistics center providers;
- e. Provision of international towage, pilotage, and shipping agents services;
- f. Energy business development;
- g. Integrated logistics chain business;
- h. Marine port development and its supporting facilities;
- i. Marine service business development;
- j. HR and hospital business market expansion; and
- k. Initial Public Offering (IPO) of Subsidiaries.

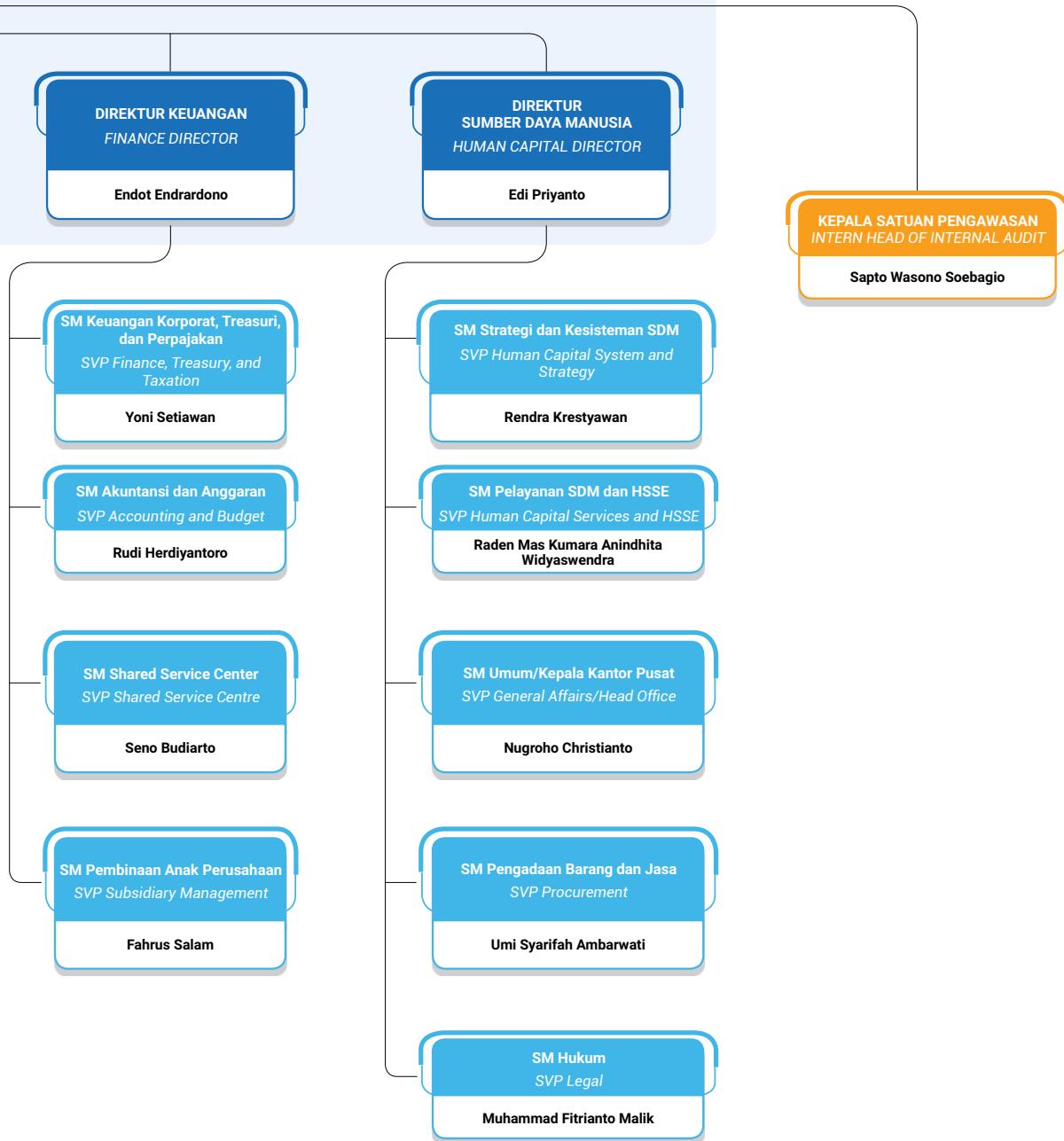




STRUKTUR ORGANISASI

Organization Structure







PROFIL DEWAN KOMISARIS

Profile of Board of Commissioners



MARSETIO

KOMISARIS UTAMA • PRESIDENT COMMISSIONER



Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	Jakarta	Jakarta
Usia Age	64 tahun (per 31 Desember 2020)	64 years old (as of December 31, 2020)
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Keputusan Menteri BUMN No. SK-107/MBU/04/2020 tanggal 3 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Decree of Minister of SOE No. SK-107/MBU/04/2020 dated April 3, 2020, regarding Dismissal and Appointment of Members of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana (S1) Akademi Militer (...) Magister (S2) Manajemen, Universitas Wijaya Putra, Surabaya (...) Doktor (S3) Ilmu Kajian Budaya dan Media, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (...) 	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor's Degree in Military Academy (...) Master's Degree in Management, Universitas Wijaya Putra, Surabaya (...) Doctoral Degree in Cultural and Media Studies, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (...)
Riwayat Pekerjaan dan Jabatan Career History	<ul style="list-style-type: none"> Penasihat Khusus Menko Maritim dan Investasi Bidang Hankam Maritim Utusan Khusus RI pada IMO di London Staf Ahli Menteri Pariwisata Ketua Majelis Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Guru Besar Ilmu Pertahanan Maritim, Universitas Pertahanan Kepala Staf Angkatan Laut 	<ul style="list-style-type: none"> Special Advisor to the Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment in the Field of Maritime Defense and Security The Special Envoy of the Republic of Indonesia to IMO in London Expert Staff of the Minister of Tourism Chairman of the Indonesian Classification Bureau (BKI) Professor of Maritime Defense Science, Universitas Pertahanan The Head of Navy staff
Periode Menjabat Tenure	3 April 2020 – 2 April 2025	April 3, 2020 – April 2, 2025
Jumlah Periode Menjabat Total Service Periods	1 periode	1 period
Informasi Rangkap Jabatan (Internal/ Eksternal) Concurrent Position (Internal/External)	<ul style="list-style-type: none"> Penasihat Khusus Menko Maritim dan Investasi Bidang Hankam Maritim Guru Besar Ilmu Pertahanan Maritim di Universitas Pertahanan Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> Special Adviser to the Coordinating Minister of Maritime and Investment for the Maritime Defense and Security Department Professor of Maritime Defense Science at Universitas Pertahanan Indonesia
Hubungan Afiliasi Affiliate	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham.	Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and shareholders.



HERU SUKANTO

KOMISARIS • COMMISSIONER



Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	Surabaya, 5 September 1957	Surabaya, September 5, 1957
Usia Age	63 tahun (per 31 Desember 2020)	63 years old (as of December 31, 2020)
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Keputusan Menteri BUMN No. SK-107/ MBU/04/2020 tanggal 3 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Decree of Minister of SOE No. SK-107/ MBU/04/2020 dated April 3, 2020, regarding Dismissal and Appointment of Members of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none">Sarjana (S1) Hukum dari Universitas Airlangga, Surabaya (1982)Magister (S2) Bidang Manajemen Pemasaran dari PPM School of Management (2000)	<ul style="list-style-type: none">Bachelor of Law from Universitas Airlangga, Surabaya (1982)Master of Marketing Management from PPM School of Management (2000)
Riwayat Pekerjaan dan Jabatan Career History	<ul style="list-style-type: none">Pemimpin Wilayah BRI Surabaya, Jawa TimurDirektur Utama Bank Agro BRI Tbk, JakartaDirektur Utama Bank Banten TbkKomisaris Bank Agro BRI Tbk, Jakarta	<ul style="list-style-type: none">Manager of the BRI Surabaya Region, East JavaPresident Director of PT Bank Agro BRI Tbk, JakartaPresident Director of PT Bank BantenPresident Commissioner of PT Bank Agro BRI Tbk, Jakarta
Periode Menjabat Tenure	3 April 2020 – 2 April 2025	April 3, 2020 – April 2, 2025
Jumlah Periode Menjabat Total Service Period	1 periode	1 period
Informasi Rangkap Jabatan (Internal/ Eksternal) Concurrent Position (Internal/External)	<ul style="list-style-type: none">......	<ul style="list-style-type: none">......
Hubungan Afiliasi Affiliate	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham.	Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and shareholders.



OTTO ARDIANTO

KOMISARIS • COMMISSIONER



Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	Jakarta, 8 Oktober 1974	Jakarta, October 8, 1974
Usia Age	46 tahun (per 31 Desember 2020)	46 years old (as of Desember 31, 2020)
Domisili Domicile	Bekasi	Bekasi
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Keputusan Menteri BUMN No. SK-107/ MBU/04/2020 tanggal 3 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Decree of Minister of SOE No. SK-107/ MBU/04/2020 dated April 3, 2020, regarding Dismissal and Appointment of Members of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none">Sarjana (S1) Teknik Industri dari Universitas Indonesia (1997)Master of Business Administration (MBA) dari Rotman School of Management University of Toronto, Canada (2008)	<ul style="list-style-type: none">Bachelor of Industrial Engineering from the University of Indonesia (1997)Master of Business Administration from Rotman School of Management of the University of Toronto, Canada (2008)
Riwayat Pekerjaan dan Jabatan Career History	<ul style="list-style-type: none">Staf Khusus Menteri Bidang Pembiayaan dan Keuangan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia<i>Commercial VP and Head of Government Relation of PT Samudra Energi</i><i>President Director of Mulia Multi Mandiri and Financial Director of PT Binang Sidoraya (BSR Group)</i>	<ul style="list-style-type: none">Special Staff to the Minister of Funding and Finance, Ministry of Transportation, Republic of IndonesiaCommercial VP and Head of Government Relations of PT Samudra EnergiPresident Director of Mulia Multi Mandiri and Financial Director of PT Binang Sidoraya (BSR Group)
Periode Menjabat Tenure	3 April 2020 – 2 April 2025	April 3, 2020 – April 2, 2025
Jumlah Periode Menjabat Total Service Period	1 periode	1 period
Informasi Rangkap Jabatan (Internal/ Eksternal) Concurrent Position (Internal/External)	<ul style="list-style-type: none">Staf Khusus Menteri Bidang Pembiayaan dan Keuangan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none">Special Staff to Minister for the Payment and Finance Department of Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia
Hubungan Afiliasi Affiliate	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham.	Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and shareholders.



RIDWAN DJAMALUDDIN

KOMISARIS • COMMISSIONER



Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	Bangka, 24 Maret 1963	Bangka, March 24, 1963
Usia Age	57 tahun (per 31 Desember 2020)	57 years old (as of December 31, 2020)
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Keputusan Menteri BUMN No. SK-107/MBU/04/2020 tanggal 3 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Decree of Minister of SOE No. SK-107/MBU/04/2020 dated April 3, 2020, regarding Dismissal and Appointment of Members of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none">Sarjana (S1) Ilmu Geologi dari Institut Teknologi Bandung (...)Magister (S2) Ilmu Geologi dari University of Twente, Belanda (...)Doktor (S3) Ilmu Geologi dari Texas A&M University (...)	<ul style="list-style-type: none">Bachelor of Geology Science from Bandung Institute of Technology (...)Master of Geology Science from the University of Twente, the Netherlands (...)Doctor of Philosophy in Geology Science from Texas A&M University (...)
Riwayat Pekerjaan dan Jabatan Career History	<ul style="list-style-type: none">Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian ESDMDeputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan InvestasiDeputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam, BPPTKomisaris PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	<ul style="list-style-type: none">Director General of Mineral and Coal, Ministry of Energy and Mineral ResourcesDeputy III for Infrastructure and Transportation Coordination, Coordinating Ministry for Maritime Affairs and InvestmentDeputy Head of BPPT for Natural Resources Development Technology, BPPTCommissioner of PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
Periode Menjabat Tenure	3 April 2020 – 2 April 2025	April 3, 2020 – April 2, 2025
Jumlah Periode Menjabat Total Service Period	1 periode	1 period
Informasi Rangkap Jabatan (Internal/ Eksternal) Concurrent Position (Internal/External)	<ul style="list-style-type: none">Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia.	<ul style="list-style-type: none">Deputy III of the Infrastructure Coordination Department of the Coordinating Ministry of Maritime and Investment of the Republic of Indonesia.
Hubungan Afiliasi Affiliate	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham.	Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and shareholders.



ALI MOCHTAR NGABALIN

KOMISARIS • COMMISSIONER



Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	Fakfak, 25 Desember 1968	Fakfak, December 25, 1968
Usia Age	52 tahun (per 31 Desember 2020)	52 years old (as of December 31, 2020)
Domisili Domicile	Tangerang Selatan	South Tangerang
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Keputusan Menteri BUMN No. SK-107/ MBU/04/2020 tanggal 3 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Decree of Minister of SOE No. SK-107/ MBU/04/2020 dated April 3, 2020, regarding Dismissal and Appointment of Members of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none">• Sekolah Tinggi di IAIN Alauddin, Makassar (...)• Pasca Sarjana Bidang Ilmu Komunikasi dari Universitas Indonesia (...)• Doktor (S3) dari Universitas Negeri Jakarta (2013)	<ul style="list-style-type: none">• Higher education at IAIN Alauddin, Makassar (...)• Postgraduate degree in Communication Science from the University of Indonesia (...)• Doctorate Degree from Univesitas Negeri Jakarta (2013)
Riwayat Pekerjaan dan Jabatan Career History	<ul style="list-style-type: none">• Anggota Komisi I DPR RI• Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi informasi, Kantor Staf Kepresidenan• Komisaris PT Angkasa Pura I• Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV, Kantor Staf Kepresidenan	<ul style="list-style-type: none">• Member of Commission I DPR RI• Principal Expert Deputy IV for Political Communication and Information Dissemination, Presidential Staff Office• Commissioner of PT Angkasa Pura I• Principal Expert to Deputy IV, Presidential Staff Office
Periode Menjabat Tenure	3 April 2020 – 2 April 2025	April 3, 2020 – April 2, 2025
Jumlah Periode Menjabat Total Service Period	1 periode	1 period
Informasi Rangkap Jabatan (Internal/ Eksternal) Concurrent Position (Internal/External)	Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi, Kantor Staf Kepresidenan.	Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi, Kantor Staf Kepresidenan.
Hubungan Afiliasi Affiliate	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham.	Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and shareholders.



DEDI SYARIF USMAN

KOMISARIS • COMMISSIONER



Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	Bandung, 22 April 1965	Bandung, April 22, 1965
Usia Age	55 tahun (per 31 Desember 2020)	55 years old (as of December 31, 2020)
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Keputusan Menteri BUMN No. SK-207/ MBU/07/2018 tanggal 12 Juli 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Penetapan Komisaris Independen Pelindo III	Decree of Minister of SOE No. SK-207/ MBU/07/2018 dated July 12, 2018, regarding Dismissal and Appointment of Members of Board of Commissioners and Determination of Independent Commissioner of Pelindo III
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none">Sarjana (S1) Ekonomi dari Universitas Katolik Parahyangan (1991)Magister (S2) Ekonomi dari University of Colorado (1998)	<ul style="list-style-type: none">Bachelor of Economics from Parahyangan Catholic University (1991)Master of Economics from the University of Colorado (1998)
Riwayat Pekerjaan dan Jabatan Career History	<ul style="list-style-type: none">Sekretaris Direktur Jenderal Kekayaan Negara (2019 – sekarang)Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, DJKN (2013-2019)Direktur Barang Milik Negara, DJKN (2012-2013)Kepala Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal, DJKN (2011-2012)Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, DJKN (2007-2011)Kepala KP2LN Bandung I, DJPLN (2005-2007)Kepala KP2LN Tegal, DJPLN (2001-2005)Kepala Seksi Piutang Negara Perbankan, KP3N JakartaStaf Biro Piutang Negara Perbankan, BUPLN	<ul style="list-style-type: none">Secretary to the Director General of State Assets Management (DJKN) (2019 up to present)Director of Separate State Assets Management of DJKN (2013-2019)Director of State-Owned Assets of DJKN (2012-2013)Head of Organization and Internal Compliance Department of DJKN (2011-2012)Head of Organization and Administration Department of DJKN (2007-2011)Head of KP2LN Bandung I of DJPLN (2005-2007)Head of KP2LN Tegal of DJPLN (2001-2005)Head of Banking State Claim Section of KP3N JakartaStaff of Banking State Claim Bureau of BUPLN
Periode Menjabat Tenure	12 Juli 2018 – 11 Juli 2023	July 12, 2018 to July 11, 2023
Jumlah Periode Menjabat Total Service Period	1 periode	1 period
Informasi Rangkap Jabatan (Internal/ Eksternal) Concurrent Position (Internal/External)	<ul style="list-style-type: none">Sekretaris Direktur Jenderal Kekayaan NegaraDirektur Kekayaan Negara Dipisahkan, DJKN	<ul style="list-style-type: none">Secretary to the Director General of State Assets Management (DJKN)Director of Separate State Assets Management of DJKN
Hubungan Afiliasi Affiliate	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham.	Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and shareholders.



PROFIL DIREKSI

Profile of Board of Directors



U. SAEFUDIN NOER

DIREKTUR UTAMA • PRESIDENT DIRECTOR



Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	Pandeglang, 15 September 1965	Pandeglang, September 15, 1965
Usia Age	55 tahun (per 31 Desember 2020)	55 years old (as of December 31, 2020)
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Keputusan Menteri BUMN No. SK-209/MBU/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III	Decree of the Minister of SOE No. SK-209/MBU/06/2020 dated June 18, 2020 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana (S1) Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia (1991) • Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) (1992) • Magister (S2) Manajemen Komunikasi dari Universitas Indonesia (2006) • Port Management UNESCO-IHE, Delft, Netherlands (2016) • INSEAD Leadership Program Singapore and Fountaine Bleau, Post Master Scholarship Program from CIMB Group, INSEAD Business School CIMB (2013) 	<ul style="list-style-type: none"> • Bachelor of Administration Science from the University of Indonesia (1991) • Indonesian Institute of Sciences (LIPI) (1992) • Master of Communication Management from the University of Indonesia (2006) • Port Management UNESCO-IHE, Delft, the Netherlands (2016) • INSEAD Leadership Program Singapore and Fountaine Bleau, Post-Master Scholarship Program from CIMB Group, INSEAD Business School CIMB (2013)
Riwayat Pekerjaan dan Jabatan Career History	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama Perum Jasa Tirta II (2019-2020) • Direktur Keuangan Pelindo III (2015-2018) • Komisaris Utama PT Portek Indonesia (2017-2018) • Komisaris Utama PT Pelindo Husada Citra (2017-2018) • Komisaris Utama PT Pelindo Properti Indonesia (2015-2017) • SVP of Government Relations PT Bank CIMB Niaga (2014-2015) • SVP of Syariah Banking and Deputy Director GIBD CIMB Group (2009-2014) • Senior Executive Committee CIMB Biaga dan CIMB Group (2009-2014) • Business Director PT Bank Muamalat Indonesia (2005-2009) • Project Director IMPAC Integrated Control System Inc. (1993-1996) 	<ul style="list-style-type: none"> • President Director of Perum Jasa Tirta II (2019-2020) • Finance Director of Pelindo III (2015-2018) • President Commissioner of PT Portek Indonesia (2017-2018) • President Commissioner of PT Pelindo Husada Citra (2017-2018) • President Commissioner of PT Pelindo Properti Indonesia (2015-2017) • SVP of Government Relations PT Bank CIMB Niaga (2014-2015) • SVP of Syariah Banking and Deputy Director GIBD CIMB Group (2009-2014) • Senior Executive Committee CIMB Biaga dan CIMB Group (2009-2014) • Business Director PT Bank Muamalat Indonesia (2005-2009) • Project Director IMPAC Integrated Control System Inc. (1993-1996)
Periode Menjabat Tenure	18 Juni 2020 – 17 Juni 2025	June 18, 2020 – June 17, 2025
Jumlah Periode Menjabat Total Service Period	1 periode	1 period
Informasi Rangkap Jabatan (Internal/ Eksternal) Concurrent Position (Internal/External)	Tidak memiliki jabatan lain di luar Pelindo III	Tidak memiliki jabatan lain di luar Pelindo III
Hubungan Afiliasi Affiliate	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham.	Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and shareholders.



PUTUT SRI MULJANTO

DIREKTUR OPERASI DAN KOMERSIAL
OPERATIONS AND COMMERCIAL DIRECTOR



Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	Magetan, 11 April 1969	Magetan, April 11, 1969
Usia Age	51 tahun (per 31 Desember 2020)	55 years old (per December 31, 2020)
Domisili Domicile	Surabaya	Surabaya
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Keputusan Menteri BUMN No. SK-289/MBU/11/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota Direksi Pelindo III	Decree of the Minister of SOE No. SK-289/MBU/11/2018 dated 5 November 2018 on Changes in Position Nomenclature, Reassignment, and Appointment of the BOD of Pelindo III
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana (S1) Manajemen dari Universitas Airlangga, Surabaya (1993) Magister (S2) Manajemen dari Universitas Airlangga, Surabaya (2012) 	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor's Degree in Management, Universitas Airlangga (1993) Master's Degree in Management, Universitas Airlangga (2012)
Riwayat Pekerjaan dan Jabatan Career History	<ul style="list-style-type: none"> Komisaris Utama PT Terminal Teluk Lamong (2019-sekarang) Direktur Operasi dan Komersial Pelindo III (November 2018-sekarang) Direktur Utama PT Terminal Petikemas Surabaya (Oktober 2018-November 2018) Senior Vice President Marketing Kantor Pusat Pelindo III (Februari 2018-Juni 2018) Direktur Utama PT Pelindo Marine Service (Februari 2018-Juni 2018) Direktur Utama PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (Desember 2013-Februari 2018) Senior Manager Pemasaran Kantor Pusat Pelindo III (2011-2013) Senior Manager Peningkatan Usaha Kantor Pusat Pelindo III (2010-2011) Pjs. Senior Manager Peningkatan Usaha Kantor Pusat Pelindo III (2010-2011) Asisten Senior Manager Perencanaan dan Kerja Sama Usaha Kantor Pusat Pelindo III (2008-2009) Asisten Manager Pemasaran Pelindo III Cabang Tanjung Perak (2007-2008) Asisten Manager Analisa dan Evaluasi Pelindo III Cabang Tanjung Perak (2007) Asisten Manager Operasi Terminal Konvensional Kantor Cabang Pelindo III Banjarmasin (2004-2007) Staf Muda IV Kantor Pusat Pelindo III (2004) Penata Administrasi Kantor Pusat Pelindo III (2002-2004) Pelaksana Administrasi I Unit Kerja Kantor Pusat Pelindo III (1999-2001) 	<ul style="list-style-type: none"> President Commissioner of PT Terminal Teluk Lamong (2019-present) Operations and Commercial Director of Pelindo III (November 2018-present) President Director of PT Terminal Petikemas Surabaya (October 2018-November 2018) Senior Vice President Marketing in Pelindo III Head Office (June 2018-September 2018) President Director of PT Pelindo Marine Service (February 2018-June 2018) President Director of PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (December 2013-February 2018) Senior Manager of Marketing in Pelindo III Head Office (2011-2013) Senior Manager of Business Development in Pelindo III Head Office (2010-2011) Acting Senior Manager of Business Development in Pelindo III Head Office (2009-2010) Assistant Senior Manager of Business Planning and Cooperation in Pelindo III Head Office (2008-2009) Assistant Manager of Marketing on Pelindo III Tanjung Perak Branch (2007-2008) Assistant Manager of Analysis and Evaluation in Pelindo III Tanjung Perak Branch (2007) Assistant Manager of Conventional Terminal Operation in Pelindo III Banjarmasin Branch (2004-2007) Junior Staff IV in Pelindo III Head Office (2004) Administrative Organiser in Pelindo III Head Office (2002-2004) Administrative Executive I Work Unit in Pelindo III Head Office (1999-2001)
Periode Menjabat Tenure	5 November 2018 – 4 November 2023	November 5, 2018 – November 4, 2023
Jumlah Periode Menjabat Total Service Period	1 periode	1 Period
Informasi Rangkap Jabatan (Internal/ Eksternal) Concurrent Position (Internal/External)	Tidak memiliki jabatan lain di luar Pelindo III	Tidak memiliki jabatan lain di luar Pelindo III
Hubungan Afiliasi Affiliate	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham.	Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and shareholders.



BOY ROBYANTO

DIREKTUR TEKNIK • ENGINEERING DIRECTOR



Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	Surabaya, 28 Desember 1973	Surabaya, December 28, 1973
Usia Age	47 tahun (per 31 Desember 2020)	47 years old (per December 31, 2020)
Domisili Domicile	Surabaya	Surabaya
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Keputusan Menteri BUMN No. SK-209/ MBU/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III	Decree of the Minister of SOE No. SK-209/ MBU/06/2020 dated June 18, 2020 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> • Diploma (D3) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) (1994) • Sarjana (S1) Teknik Sipil dari Universitas Lambung Mangkurat (2002) • Magister (S2) Teknik Sipil dari Universitas 17 Agustus 1945 (2019) 	<ul style="list-style-type: none"> • Diploma III from Sepuluh Nopember Institute of Technology (ITS) (1994) • Bachelor of Civil Engineering from Universitas Lampung Mangkurat (2002) • Master of Civil Engineering from Universitas 17 Agustus 1945 (2019)
Riwayat Pekerjaan dan Jabatan Career History	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris PT Berlian Jasa Terminal (2020-sekarang) • CEO Regional Kalimantan Pelindo III (2018-2020) • SVP Port Facility Pelindo III (2017-2018) • GM Pelindo III Cabang Tenau/Kupang (2016-2017) • ASM Perencanaan Teknik Pelindo III (2015-2016) ASM Rancang Bangun Pelindo III (2013-2015) ASM Rancang Bangun Konstruksi Sipil Pelindo III (2012-2013) Asisten Manajer Perencanaan dan Administrasi Teknik (2011-2012) Asisten Manajer Perencanaan dan Sigi (2010-2011) Asisten Manajer Bangunan Pelabuhan dan Lingkungan (2009-2010) Supervisor Bangunan Pantai (2008-2009) Supervisor Bangunan & Lingkungan (2005-2008) Kasubdin Bangunan Pelabuhan (2002-2005) 	<ul style="list-style-type: none"> • Commissioner at PT Berlian Jasa Terminal (2020-present) • CEO Regional Kalimantan of Pelindo III (2018-2020) • SVP of Port Facility of Pelindo III (2017-2018) • GM of Tenau/Kupang Branch of Pelindo III (2016-2017) • ASM of Engineering Planning of Pelindo III (2015-2016) • ASM of Design Planning of Pelindo III (2013-2015) • ASM Civil Construction Design Planning of Pelindo III (2012-2013) • Assistant to Engineering Planning and Administration Manager (2011-2012) • Assistant to Planning Manager (2010-2011) • Assistant to Port Building and Environment Manager (2009-2010) • Supervisor of Coast Building (2008-2009) • Supervisor of Building and Environment (2005-2008) • Head of Coast Building Sub-Department (2002-2005)
Periode Menjabat Tenure	18 Juni 2020 – 17 Juni 2025	June 18, 2020 – June 17, 2025
Jumlah Periode Menjabat Total Service Period	1 periode	1 period
Informasi Rangkap Jabatan (Internal/ Eksternal) Concurrent Position (Internal/External)	Tidak memiliki jabatan lain di luar Pelindo III	Holds no other positions outside Pelindo III
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham.	He has no affiliation with other members of Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholder.



EDI PRIYANTO

DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN CAPITAL DIRECTOR



Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	Klaten, 23 Oktober 1976	Klaten, October 23, 1976
Usia Age	44 tahun (per 31 Desember 2020)	44 years old (per December 31, 2020)
Domisili Domicile	Sidoarjo	Sidoarjo
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Keputusan Menteri BUMN No. SK-209/ MBU/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III	Decree of the Minister of SOE No. SK-209/ MBU/06/2020 dated June 18, 2020 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana (S1) Kesehatan Masyarakat dari Universitas Airlangga, Surabaya (2002) Magister (S2) Manajemen dari STIE BPD Jateng (2006) 	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Public Health from Universitas Airlangga, Surabaya (2002) Master of Management from STIE BPD Jateng (2006)
Riwayat Pekerjaan dan Jabatan Career History	<ul style="list-style-type: none"> Senior Manager Strategi dan Kesiistem SDM (2019-2020) SVP Human Capital Services & HSSE (2018-2019) Anggota Komisaris PT Pelindo Daya Sejahtera (2017-2020) SVP Human Capital System & Strategy (2016-2017) VP Corporate Communications (2011-2016) Asisten Manajer Pemasaran (2010-2011) Analisis Sistem Manajemen (2008-2010) Supervisor Keamanan & K3 (2004-2008) 	<ul style="list-style-type: none"> Senior Manager of Human Capital Strategy and System (2019-2020) SVP of Human Capital Services & HSSE (2018-2019) Commissioner at PT Pelindo Daya Sejahtera (2017-2020) SVP of Human Capital System & Strategy (2016-2017) VP Corporate Communications (2011-2016) Assistant to Marketing Manager (2010-2011) Management System Analyst (2008-2010) Security and OHS Supervisor (2004-2008)
Periode Menjabat Tenure	18 Juni 2020 – 17 Juni 2025	June 18, 2020 – June 17, 2025
Jumlah Periode Menjabat Total Service Period	1 periode	1 period
Informasi Rangkap Jabatan (Internal/ Eksternal) Concurrent Position (Internal/External)	Tidak memiliki jabatan lain di luar Pelindo III	Holds no other positions outside Pelindo III
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham.	He has no affiliation with other members of Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholder.



ENDOT ENDRARDONO

DIREKTUR KEUANGAN • FINANCE DIRECTOR



Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	Surabaya, 15 November 1970	Surabaya, November 15, 1970
Usia Age	50 tahun (per 31 Desember 2020)	50 years old (as of December 31, 2020)
Domisili Domicile	Surabaya	Surabaya
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Keputusan Menteri BUMN No. SK-209/ MBU/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III	Decree of the Minister of SOE No. SK-209/ MBU/06/2020 dated June 18, 2020 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana (S1) Ekonomi – Manajemen dari Universitas Airlangga, Surabaya (1998) Magister (S2) Manajemen dari Universitas Airlangga, Surabaya (2013) 	<ul style="list-style-type: none"> Bachelor of Economics, majoring in Management from Universitas Airlangga, Surabaya (1998) Master of Management from Universitas Airlangga, Surabaya (2006)
Riwayat Pekerjaan dan Jabatan Career History	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Utama PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (2019-2020) Direktur Utama PT Berlian Manyar Stevedore (2019-2020) Komisaris PT Berlian Kawasan Manyar Sejahtera (2018-2019) Direktur Utama PT Terminal Petikemas Surabaya (2018-2019) Direktur Keuangan, SDM dan Umum PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (2018) Komisaris PT Terminal Petikemas Surabaya (2017-2018) Pengawas Dana Pensiun Pelindo – Pengerukan (2016-2017) Komisaris PT Pelindo Husada Citra (2015-2017) SVP Management & Financial Risk (2014-2018) Manajer Keuangan Cabang Tanjung Perak (2014) 	<ul style="list-style-type: none"> President Director of PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (2019-2020) President Director of PT Berlian Manyar Stevedore (2019-2020) Commissioner at PT Berlian Kawasan Manyar Sejahtera (2018-2019) President Director of PT Terminal Petikemas Surabaya (2018-2019) Finance, HR, and General Affairs Director of PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (2018) Commissioner at PT Terminal Petikemas Surabaya (2017-2018) Pension Fund Supervisor of Pelindo – Pengerukan (2016-2017) Commissioner at PT Pelindo Husada Citra (2015-2017) SVP of Management & Financial Risk (2014-2018) Finance Manager at Tanjung Perak Branch (2014)
Periode Menjabat Tenure	18 Juni 2020 – 17 Juni 2025	June 18, 2020 – June 17, 2025
Jumlah Periode Menjabat Total Service Period	1 periode	1 period
Informasi Rangkap Jabatan (Internal/ Eksternal) Concurrent Position (Internal/External)	Tidak memiliki jabatan lain di luar Pelindo III	Holds no other positions outside Pelindo III
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham.	He has no affiliation with other members of Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholder.



KOKOK SUSANTO

DIREKTUR TRANSFORMASI DAN PENGEMBANGAN BISNIS
BUSINESS TRANSFORMATION AND DEVELOPMENT DIRECTOR



Kewarganegaraan Nationality	Indonesia	Indonesian
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	Semarang, 31 Mei 1976	Semarang, May 31, 1976
Usia Age	45 tahun (per 31 Desember 2020)	45 years old (as of December 31, 2020)
Domisili Domicile	Surabaya	Surabaya
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Keputusan Menteri BUMN No. SK-209/ MBU/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III	Decree of the Minister of SOE No. SK-209/ MBU/06/2020 dated June 18, 2020 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
Riwayat Pendidikan Educational Background	<ul style="list-style-type: none">Sarjana (S1) Teknik Arsitektur dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) (1998)Magister (S2) Manajemen dari Universitas Airlangga, Surabaya (2000)	<ul style="list-style-type: none">Bachelor of Architectural Engineering from Sepuluh Nopember Institute of Technology (ITS) (1998)Master of Management from Universitas Airlangga, Surabaya (2000)
Riwayat Pekerjaan dan Jabatan Career History	<ul style="list-style-type: none">Direktur Utama PT Pelindo Energi Logistik (2018-2020)Direktur Utama PT Pelindo Properti Indonesia (2017-2018)Komisaris PT Terminal Nilam Utara (2017)Pimpinan Proyek Pembangunan Sea Water Reserve Osmosis di Benoa (2016-2017)Senior Manager Supervisi Teknik (2016-2017)Pimpinan Proyek Pembangunan Jalur Pipa Gas dari Benoa ke PLTG Pesanggaran Bali (2015-2016)Pimpinan Proyek Pembangunan Super Gudang di Terminal Jamrud Tanjung Perak (2015-2016)Askaro Perencanaan (2013-2016)Pimpinan Proyek Pembangunan Gedung PHC Medical Center (2013-2015)Asisten Manajer Pemeliharaan Bangunan Pelabuhan (2011-2013)Manajer Teknik Pelindo III Cabang Kotabaru (2010-2011)Asisten Manajer Pemeliharaan Bangunan (2007-2010)	<ul style="list-style-type: none">President Director of PT Pelindo Energi Logistik (2018-2020)President Director of PT Pelindo Properti Indonesia (2017-2018)Commissioner at PT Terminal Nilam Utara (2017)Head of Sea Water Reserve Osmosis Development Project in Benoa (2016-2017)Senior Manager of Engineering Supervision (2016-2017)Head of Gas Pipe Line Development Project from Benoa to PLTG Pesanggaran Bali (2015-2016)Head of Super-Warehouse Construction Project at Jamrud Terminal of Tanjung Perak (2015-2016)Askaro Planning (2013-2016)Head of PHC Medical Center Building Construction Project (2013-2015)Asisstant to Port Building Maintenance Manager (2011-2013)Manager of Engineering of Kotabaru Branch of Pelindo III (2010-2011)Asisstant to Building Maintenance Manager (2007-2010)
Periode Menjabat Tenure	18 Juni 2020 – 17 Juni 2025	June 18, 2020 – June 17, 2025
Jumlah Periode Menjabat Total Service Period	1 periode	1 period
Informasi Rangkap Jabatan (Internal/ Eksternal) Concurrent Position (Internal/External)	Tidak memiliki jabatan lain di luar Pelindo III	Holds no other positions outside Pelindo III
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham.	He has no affiliation with other members of Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholder.



PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

Profile of Executive Officers

Sapto Wasono Soebagio

Kepala Satuan Pengawasan Intern / Head of Internal Audit Unit

Warga Negara Indonesia, lahir di Bojonegoro, pada bulan April 1971. Mengawali kariernya di Pelindo III pada tahun ... pada Bidang ... Menjabat sebagai Kepala SPI sejak 2020.

Indonesian citizen, born in ... in Bojonegoro in April 1971. Started his career in Pelindo III in ... in ... Field. Served as Head of Internal Audit Unit since 2020.

Ardhy Wahyu Basuki

Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary

Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Surabaya pada bulan Juni tahun 1968. Mengawali kariernya di Pelindo III pada tahun 2009 pada Bidang Jaminan Mutu dan K3. Pernah menjabat sebagai GM, CEO Regional Jawa Tengah, dan Senior Manager Pemasaran. Diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak Juli 2019.

Indonesian citizen, born in Surabaya in June 1968. Started his career in Pelindo III in 2009 in Quality Assurance and OHS Field. Previously, he served as a GM, CEO of Central Java Region, and SVP of Marketing. He has been serving as the Corporate Secretary since July 2019.

Rizki Kurniawan

Senior Manager Pemasaran / SVP of Marketing

Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Jakarta pada bulan September tahun 1979. Mendapatkan gelar sebagai Sarjana Teknik. Mengawali kariernya di Pelindo III pada tahun 2009 pada Bidang Administrasi Logistik. Pernah menjabat sebagai ASM Pemasaran dan Manajer di TTL. Diangkat sebagai Senior Manager Pemasaran sejak Agustus 2019.

Indonesian citizen, born in Jakarta, in September 1979. Earned his Bachelor's degree in Engineering. Started his career at Pelindo III in 2009 in Logistics Administration Field. Previously, he served as an Assistant to Senior Manager of Marketing and a Manager in TTL. He has been serving as the SVP of Marketing since August 2019.

Agus Dharmawan

Senior Manager Teknologi Informasi dan Komunikasi / SVP of Information and Communication Technology

Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Magetan pada bulan Agustus tahun 1976. Mengawali kariernya di Pelindo III pada tahun 2007 pada Bidang Pengembangan dan Penerapan Aplikasi. Menjabat sebagai Senior Manager Teknologi Informasi dan Komunikasi sejak 2018.

Indonesian citizen, born in Magetan in August 1976. Started his career at Pelindo III in 2007 in the Application Development and Execution Field. He has been serving as the SVP of Information and Communication Technology since 2018.

**Noor Budiwan**

Senior Manager Operasi / SVP of Operations

Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Kotabaru pada bulan Oktober tahun 1970. Mengawali kariernya di Pelindo III pada tahun 1998. Pernah menjabat sebagai Manager di Bidang Operasi pada TPS. Menjabat sebagai Senior Manager Operasi sejak bulan Mei 2019.

Indonesian citizen, born in Kotabaru in October 1970. Started his career at Pelindo III in 1998. Previously, he served as the Manager of Port Operations in TPS. He has been serving as the SVP of Operations since May 2019.

IsmartadiantoSenior Manager Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko /
SVP of Management System and Risk Management

Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Surabaya pada bulan Juni 1968. Mengawali kariernya di Pelindo III pada tahun 1998. Menjabat sebagai Senior Manager Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko sejak Juli ...

Indonesian citizen, born in Surabaya in June 1968. Started his career in Pelindo III in 1998. Served as Senior Vice President of Management System and Risk Management since July ...

Topo Sapto Nugroho

Senior Manager Peralatan Pelabuhan / SVP of Port Equipment

Warga Negara Indonesia, lahir di ... pada bulan ... tahun ... Mengawali kariernya di Pelindo III pada tahun ... pada Bidang ... Menjabat sebagai Senior Manager Peralatan Pelabuhan sejak ...

Indonesian citizen, born in ... in ... Started his career in Pelindo III in ... in ... Field. Served as Senior Vice President of Port Equipment since July ...

Jaya Via Dewata

Senior Manajer Fasilitas Pelabuhan / SVP of Port Facilities

Warga Negara Indonesia, lahir di ... pada bulan ... tahun ... Mengawali kariernya di Pelindo III pada tahun ... pada Bidang ... Menjabat sebagai Senior Manager Fasilitas Pelabuhan sejak ...

Indonesian citizen, born in ... in ... Started his career in Pelindo III in ... in ... Field. Served as Senior Vice President of Port Facilities since ...

Hendiek Eko Setiantoro

Senior Manager Supervisi Investasi Teknik / SVP of Engineering Investment Supervision

Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Semarang pada bulan Juni tahun 1977. Mengawali kariernya di Pelindo III pada tahun 2006 pada Bidang Perpajakan. Menjabat sebagai Senior Manager Supervisi Investasi Teknik sejak ...

Indonesian citizen, born in Semarang in June 1977. Started his career in Pelindo III in 2006 in Taxation Field. Served as Senior Vice President of Engineering Investment Supervision since ...



Rudi Herdiyantoro

Senior Manager Akuntansi dan Anggaran / SVP of Accounting and Budget

Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Surabaya pada bulan Januari tahun 1983. Mengawali kariernya di Pelindo III pada tahun 2009 pada Bidang Keuangan. Menjabat sebagai Senior Manager Akuntansi dan Anggaran sejak ...

Indonesian citizen, born in Surabaya in January 1983. Started his career in Pelindo III in 2009 in Finance Field. Served as Senior Vice President of Accounting and Budget since ...

Yoni Setiawan

Senior Manager Keuangan Korporat, Tresuri, dan Perpajakan /
SVP of Corporate Finance, Treasury, and Taxation

Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Semarang pada bulan Juni tahun 1977. Mengawali kariernya di Pelindo III pada tahun 2006 pada Bidang Perpajakan. Menjabat sebagai Senior Manager Keuangan Korporat, Tresuri, dan Perpajakan sejak 2017.

Indonesian Citizen, born in Semarang in June 1977. Started his career at Pelindo III in 2006 in Taxation Field. He has been serving as the SVP of Corporate Finance, Treasury, and Taxation since 2017.

Seno Budiarto

Senior Manager Shared Service Center / SVP of Shared Service Center

Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Berau Kalimantan Timur pada bulan Juni tahun 1979. Mengawali kariernya di Pelindo III pada tahun 2006 di Bidang Keuangan. Menjabat sebagai Senior Manager Akuntansi dan Anggaran sejak

Indonesian citizen, born in Berau, East Kalimantan, in June 1979. Started his career at Pelindo III in 2006 in the Finance Field. He has been serving as the SVP of Accounting and Budget since

Fahrus Salam

Senior Manager Pembinaan Anak Perusahaan / SVP of Subsidiary Management

Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Pamekasan pada bulan Februari tahun 1983. Mengawali kariernya di Pelindo III pada tahun 2006 pada Bidang Pengelolaan Lingkungan dan K3. Menjabat sebagai Senior Manager Pembinaan Anak Perusahaan sejak 2016.

Indonesian citizen, born in Pamekasan in February 1983. Started his career at Pelindo III in 2006 in Environmental Management and OHS Field. He has been serving as the SVP of Subsidiary Management since 2016.

Raden Mas Kumara Anindhita Widyaswenda

Senior Manager Pelayanan SDM dan HSSE / SVP of Human Capital Service and HSSE

Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Yogyakarta pada bulan Agustus 1984. Mengawali kariernya di Pelindo III pada tahun 2009 pada Bidang Peraturan Perusahaan dan Bantuan Hukum. Menjabat sebagai Senior Manager Pelayanan SDM dan HSSE sejak ...

Indonesian citizen, born in Yogyakarta City in August 1984. Started his career in Pelindo III in 2009 in Company Regulation and Law Assistance Field. Served as Senior Vice President of Human Capital Service and HSSE since ...

**Rendra Krestyawan**

Senior Manager Strategi dan Kesiiteman SDM / SVP of Human Capital Strategy and System

Warga Negara Indonesia, lahir di ... pada bulan ... tahun ... Mengawali kariernya di Pelindo III pada tahun ... pada Bidang ... Menjabat sebagai Senior Manager Strategi dan Kesiiteman SDM sejak ...

Indonesian citizen, born in ... in ... Started his career in Pelindo III in ... in ... Field. Served as Senior Vice President of Human Capital Strategy and System since ...

Nugroho Christianto

Senior Manager Umum/Kepala Kantor Pusat / SVP of General Affairs/Head Office

Warga Negara Indonesia, lahir di ... pada bulan ... tahun ... Mengawali kariernya di Pelindo III pada tahun ... pada Bidang ... Menjabat sebagai Senior Manager Umum/Kepala Kantor Pusat sejak ...

Indonesian citizen, born in ... in ... Started his career in Pelindo III in ... in ... Field. Served as Senior Vice President of General Affairs/Head Office since ...

Umi Syarifah Ambarwati

Senior Manager Pengadaan Barang dan Jasa / SVP of Goods and Services Procurement

Warga Negara Indonesia, lahir di ... pada bulan ... tahun ... Mengawali kariernya di Pelindo III pada tahun ... pada Bidang ... Menjabat sebagai Senior Manager Pengadaan Barang dan Jasa sejak ...

Indonesian citizen, born in ... in ... Started his career in Pelindo III in ... in ... Field. Served as Senior Vice President of Goods and Services Procurement since ...

Muhammad Fitrianto Malik

Senior Manager Hukum / SVP of Legal

Warga Negara Indonesia, lahir di ... pada bulan ... tahun ... Mengawali kariernya di Pelindo III pada tahun ... pada Bidang ... Menjabat sebagai Senior Manager Hukum sejak ...

Indonesian citizen, born in ... in ... Started his career in Pelindo III in ... in ... Field. Served as Senior Vice President of Legal since ...

Agus Hermawan

Senior Manager Pengembangan Bisnis / SVP of Business Development

Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Surabaya pada bulan Oktober 1973. Mengawali kariernya di Pelindo III pada tahun 1998 pada Bidang Biro Hukum, Humas, dan Hubungan Internasional. Menjabat sebagai Senior Manager Pengembangan Bisnis sejak 2018.

Indonesian citizen, born in Surabaya in October 1973. Started his career at Pelindo III in 1998 in the Legal, PR, and International Relations Bureau. He has been serving as the SVP of Business Development since 2018.



Angga Pradiptya

Senior Manager Manajemen Transformasi / SVP of Transformation Management

Warga Negara Indonesia, lahir di Kota Surabaya pada bulan April tahun 1977. Mendapatkan gelar Pascasarjana di Bidang Teknik. Mengawali kariernya di Pelindo III pada tahun 1999. Menjabat sebagai Senior Manager Manajemen Transformasi sejak ...

Indonesian citizen, born in Surabaya City in 1977. Earned his Master's degree in Engineering. Started his career in Pelindo III in 1999. Served as Senior Vice President of Transportation Management since ...

Muchammad Ali Afandi

Senior Manager Perencanaan Strategis dan Kinerja Perusahaan /
SVP of Strategic Planning and Corporate Performance

Warga Negara Indonesia, lahir di ... pada bulan ... tahun ... Mengawali kariernya di Pelindo III pada tahun ... pada Bidang ... Menjabat sebagai Senior Manager Perencanaan Strategis dan Kinerja Perusahaan sejak ...

Indonesian citizen, born in ... in ... Started his career in Pelindo III in ... in ... Field. Served as Senior Vice President of Planning and Corporate Performance since ...

Johanes Wahyu Hertanto

Senior Manager Pelayanan Kapal / SVP of Ship Services

Warga Negara Indonesia, lahir di ... pada bulan ... tahun ... Mengawali kariernya di Pelindo III pada tahun ... pada Bidang ... Menjabat sebagai Senior Manager Pelayanan Kapal sejak ...

Indonesian citizen, born in ... in ... Started his career in Pelindo III in ... in ... Field. Served as Senior Vice President of Ship Services since ...



PROFIL GENERAL MANAGER

PROFILE OF GENERAL MANAGERS

Onny Djayus

CEO Regional Jawa Timur / Regional CEO of East Java

Warga Negara Indonesia, lahir di Ujung Pandang, 12 Desember 1964. Mendapatkan gelar Master Marine tahun 2008. Mengawali kariernya di Pelindo III pada tahun 1999 sebagai pegawai yang diperbantukan pada PT Pelindo Marine Service. Pernah menjadi *General Manager* Cabang Kota Baru pada tahun 2013 dan kini menjabat sebagai CEO Regional Jawa Timur sejak tahun 2018.

Indonesian citizen born in Ujung Pandang on 12 December 1964. Earned a Master of Marine degree in 2008. Started his career at Pelindo III in 1999 as an employee seconded to PMS. He was a General Manager of Kota Baru Branch in 2013 and has been serving as the Regional CEO of East Java since 2018.

M. Amiroel Koesni

General Manager Terminal Nilam Mirah / General Manager of Nilam Mirah Terminal

Warga Negara Indonesia, lahir di Sumenep tanggal 9 Februari 1965. Mendapatkan gelar Magister Manajemen dari STIE Indonesia Malang tahun 2013. Mengawali kariernya di Pelindo III pada tahun 1998 sebagai Pandu Laut di Banjarmasin. Kini menjabat sebagai General Manager Terminal Nilam Mirah mulai tahun 2018.

Indonesian citizen born in Sumenep on 9 February 1965. Earned his Master's Degree in Management from STIE Indonesia Malang in 2013. Started his career at Pelindo III in 1998 as a Sea Pilot in Banjarmasin. Currently serving as the General Manager of Nilam Mirah Terminal since 2018.

Made Rusli Suniajaya

General Manager Terminal Jamrud / General Manager of Jamrud Terminal

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung tanggal 27 September 1967. Mendapatkan gelar Sarjana Pertanian dari Universitas Udayana pada tahun 1991. Memulai karier di Pelindo III pada tahun 1997 pada Subdinas Pemanduan Pelabuhan Benoa Menjabat sebagai General Manager Terminal Jamrud sejak tahun

Indonesian citizen, born in Bandung, September 27, 1967. Earned his Bachelor's degree in Agriculture from Udayana University in 1991. Started his career in Pelindo III in 1997 at the Sub-department of Benoa Port Guide Serving as General Manager of Jamrud . Terminal since

Tri Sugiyatno

General Manager Pelabuhan Kalimas / General Manager of Port of Kalimas

Warga Negara Indonesia, lahir di Sukoharjo tanggal 30 Oktober 1970. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari STIE Nusantara Pangkalan Bun pada bidang Ekonomi Manajemen tahun 2005. Mengawali kariernya di Pelindo III sejak tahun 2000 sebagai Pelaksana Pembantu Administrasi I pada Cabang Kumai. Pada tahun 2007, menjabat sebagai Asisten Manager Kawasan Sukamara; tahun 2016 menjabat sebagai Manager Pelabuhan Batulicin; dan kini menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Kalimas mulai tahun 2018.

Indonesian citizen born in Sukoharjo on 30 October 1970. Earned a Bachelor's Degree in Economics from STIE Nusantara Pangkalan Bun in Economics Management in 2005. Started his career at Pelindo III in 2000 as Administrative Assistant I at the Kumai Branch. In 2007 he served as Assistant Manager of the Sukamara Region; in 2016 served as Manager of the Port of Batulicin, and now serving as the General Manager of Port of Kalimas since 2018.



Sugiono

General Manager Pelabuhan Gresik / General Manager of Port of Gresik

Warga Negara Indonesia, lahir di tanggal Mendapatkan gelar dari Universitas pada tahun Memulai karier di Pelindo III pada tahun pada Menjabat sebagai General Manager Terminal Gresik sejak tahun

Indonesian citizen born in ... on ... Earned ... from University of ... in ... Starter his career at Pelindo III in ... in ... Serving as General Manager of Gresik Terminal since ...

Adji Djoko Wibowo

General Manager Pelabuhan Tanjung Tembaga / General Manager of Port of Tanjung Tembaga

Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang tanggal 16 Februari 1965. Mendapatkan gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Wijaya Putra tahun 2002. Mengawali karier di Pelindo III sejak tahun 1993 sebagai Operator Head Truck (HT) pada bidang Dinas Peralatan Head Truck Forklift di TPS. Menjabat sebagai Asisten Manajer Pengamanan di Pelabuhan Tanjung Perak tahun 2016. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Tanjung Tembaga sejak tahun

Indonesian citizen, born in Semarang on 16 February 1965. Earned his Bachelor's Degree in Mechanical Engineering from Universitas Wijaya Putra in 2002. Started his career at Pelindo III since 1993 as Operator Head Truck (HT) in the field of Equipment Service of Head Truck Forklift at TPS. Served as Assistant Manager of Security at Port of Tanjung Perak in 2016. Has been serving as General Manager of Port of Tanjung Tembaga since

Retno Pujianto

General Manager Pelabuhan Kalianget / General Manager of Port of Kalianget

Warga Negara Indonesia, lahir di tanggal Mendapatkan gelar dari Universitas pada tahun Memulai karier di Pelindo III pada tahun pada Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Kalianget sejak tahun

Indonesian citizen born in ... on ... Earned ... from University of ... in ... Starter his career at Pelindo III in ... in ... Serving as General Manager of Port of Kalianget since ...

I Nyoman Sudiartha

General Manager Terminal P/K Banjarmasin/ General Manager of Banjarmasin P/K Terminal

Warga Negara Indonesia, lahir di Denpasar tanggal 25 Desember 1970. Mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Dwijendra Denpasar tahun 2003. Memulai karier di Pelindo III pada tahun 1998 sebagai Pelaksana Pembantu Administrasi I di Pelabuhan Benoa, tahun 2004 menjabat sebagai Teknisi Peralatan Pelabuhan dan Administrasi Teknik, tahun 2014 menjabat sebagai Asisten Manajer Operasi Peti Kemas di Banjarmasin. Menjabat sebagai General Manager Terminal P/K Banjarmasin sejak tahun 2018.

Indonesian citizen born in Denpasar on 25 December 1970. Earned his Bachelor's Degree in Laws degree from Universitas Dwijendra Denpasar in 2003. Started his career at Pelindo III in 1998 as the Administrative Assistant I at Port of Benoa, in 2004 served as a Port Equipment Technician and Technical Administration, in 2014 served as Assistant Manager of Container Operations in Banjarmasin. Has been serving as General Manager of Banjarmasin P/K Terminal since 2018.

**Imran Rasidi**

General Manager Pelabuhan Trisakti / General Manager of Port of Trisakti

Warga Negara Indonesia, lahir di Denpasar tanggal 26 Mei 1976. Mendapatkan gelar Sarjana dari Universitas Muhammadiyah pada tahun 2004. Mengawali kariernya di Pelindo III sejak tahun 1999 pada Dinas Pelayanan Medis pada PHC. Pada tahun 2000, beralih pada Subdinas Administrasi dan Keuangan pada Cabang Pelabuhan Tenau Kupang. Tahun 2010 menjabat sebagai Manajer Pelabuhan Badas. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Trisakti sejak tahun

Indonesian citizen born in Denpasar on 26 May 1976. Earned a bachelor's degree from Universitas Muhammadiyah in 2004. Started his career at Pelindo III since 1999 at the Medical Services Office at PHC. In 2000 he transferred to the Administration and Finance Sub-Office at Port of Tenau Kupang Branch. In 2010 he served as Manager of Port of Badas. Has been serving as General Manager of Port of Trisakti since ...

Zainal Abidin

General Manager Pelabuhan Kotabaru / General Manager of Port of Kotabaru

Warga Negara Indonesia, lahir di Kotabaru tanggal 27 Juni 1966. Mendapatkan gelar Magister Sains dari Universitas Darul Ulum tahun 2004. Mengawali karier di Pelindo III sejak tahun 1998 pada bidang Keuangan. Tahun 2009 menjadi Manager Keuangan Pelabuhan Tanjung Wangi. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Kotabaru sejak tahun

Indonesian citizen born in Kotabaru on 27 June 1966. Earned his Master's Degree in Science from Universitas Darul Ulum in 2004. Started his career at Pelindo III since 1998 in Finance. In 2009 served as the Financial Manager in Port of Tanjung Wangi. Has been serving as General Manager Port of Kotabaru since

Muh. Junaedhy

Plh. General Manager Pelabuhan Sampit / Daily Acting Officer of General Manager of Port of Sampit

Warga Negara Indonesia, lahir di tanggal Mendapatkan gelar dari Universitas pada tahun Memulai karier di Pelindo III pada tahun pada Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Sampit sejak tahun

Indonesian citizen born in ... on ... Earned ... from University of ... in ... Started his career at Pelindo III in ... in ... Has been serving as General Manager of Port of Sampit since ...

Muh. Junaedhy

General Manager Pelabuhan Bagendang / General Manager of Port of Bagendang

Warga Negara Indonesia, lahir di tanggal Mendapatkan gelar dari Universitas pada tahun Memulai karier di Pelindo III pada tahun pada Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Bagendang sejak tahun

Indonesian citizen born in ... on ... Earned ... from University of ... in ... Started his career at Pelindo III in ... in ... Has been serving as General Manager of Port of Bagendang since ...



Sirin Purnomo

Plh. General Manager Pelabuhan Kumai / Daily Acting Officer of General Manager of Port of Kumai

Warga Negara Indonesia, lahir di tanggal Mendapatkan gelar dari Universitas pada tahun Memulai karier di Pelindo III pada tahun pada Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Kumai sejak tahun

Indonesian citizen born in ... on ... Earned ... from University of ... in ... Started his career at Pelindo III in ... in ... Has been serving as General Manager of Port of Kumai since ...

Sirin Purnomo

General Manager Pelabuhan Bumiharjo / General Manager of Port of Bumiharjo

Warga Negara Indonesia, lahir di tanggal Mendapatkan gelar dari Universitas pada tahun Memulai karier di Pelindo III pada tahun pada Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Bumiharjo sejak tahun

Indonesian citizen born in ... on ... Earned ... from University of ... in ... Started his career at Pelindo III in ... in ... Has been serving as General Manager of Port of Bumiharjo since ...

Ari Sudarsono

General Manager Pelabuhan Batulicin / General Manager of Port of Batulicin

Warga Negara Indonesia, lahir di tanggal Mendapatkan gelar dari Universitas pada tahun Memulai karier di Pelindo III pada tahun pada Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Batulicin sejak tahun

Indonesian citizen born in ... on ... Earned ... from University of ... in ... Started his career at Pelindo III in ... in ... Has been serving as General Manager of Port of Batulicin since ...

Agus Mulyansyah

General Manager Pelabuhan Pulang Pisau / General Manager of Port of Pulang Pisau

Warga Negara Indonesia, lahir di Kotabaru tanggal 1 Agustus 1969. Mendapatkan gelar Sarjana Sosial di Universitas Lambung Mangkurat pada bidang Ilmu Pemerintahan. Mengawali karier di Pelindo III pada Bidang Umum tahun 2000. Menjabat sebagai Supervisor Pemasaran dan Aneka Usaha Cabang Kotabaru tahun 2012. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Pulang Pisau sejak tahun 2018.

Indonesian citizen born in Kotabaru on 1 August 1969. Earned a Bachelor's Degree in Governmental Science from Universitas Lambung Mangkurat. Started his career at Pelindo III in General Affairs in 2000. Served as Marketing and Multivarious Supervisor of Kotabaru Branch in 2012. Has been serving as General Manager Port of Pulang Pisau since 2018.

**Zainal Abidin**

Plh General Manager Pelabuhan Mekarputih / Daily Acting Officer of General Manager of Port of Mekarputih

Warga Negara Indonesia, lahir di Kotabaru tanggal 27 Juni 1966. Mendapatkan gelar Magister Sains dari Universitas Darul Ulum tahun 2004. Mengawali karier di Pelindo III sejak tahun 1998 pada bidang Keuangan. Tahun 2009 menjadi Manager Keuangan Pelabuhan Tanjung Wangi. Menjabat sebagai Plh. General Manager Pelabuhan Mekarputih sejak tahun

Indonesian citizen born in Kotabaru on 27 June 1966. He earned his Master's Degree in Science from Universitas Darul Ulum in 2004. Started his career at Pelindo III since 1998 in Finance. In 2009 served as the Financial Manager in Port of Tanjung Wangi. Has been serving as General Manager of Port of Mekarputih since ...

Ali Sodikin

CEO Regional Jawa Tengah / CEO of Central Java Region

Warga Negara Indonesia, lahir di tanggal Mendapatkan gelar dari Universitas pada tahun Memulai karier di Pelindo III pada tahun pada Menjabat sebagai CEO Regional Jawa Tengah sejak tahun

Indonesian citizen born in ... on ... Earned ... from University of ... in ... Started his career at Pelindo III in ... in ... Has been serving as CEO of Central Java Region since ...

Fariz Hariyoso

General Manager Pelabuhan Tanjung Emas / General Manager of Port of Tanjung Emas

Warga Negara Indonesia, lahir di Banyuwangi tanggal 29 Juli 1973. Mendapatkan gelar Master Marine dari STIP Jakarta tahun 2006. Mengawali karier di Pelindo III pada tahun 2004 pada bidang Pemanduan. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Tanjung Emas sejak tahun 2018.

Indonesian citizen born in Banyuwangi on 29 July 1973. Earned a Master Marine of degree from STIP Jakarta in 2006. Started his career at Pelindo III in 2004 in Pilotage. Has been serving as General Manager of Port of Tanjung Emas since 2018.

Taufiq Rachman

General Manager Terminal P/K Semarang / General Manager of Semarang P/K Terminal

Warga Negara Indonesia, lahir di tanggal Mendapatkan gelar dari Universitas pada tahun Memulai karier di Pelindo III pada tahun pada Menjabat sebagai General Manager Terminal P/K Semarang sejak tahun

Indonesian citizen born in ... on ... Earned ... from University of ... in ... Started his career at Pelindo III in ... in ... Has been serving as General Manager of Semarang P/K Terminal since ...



Sutopo

General Manager Pelabuhan Tanjung Intan / General Manager of Port of Tanjung Intan

Warga Negara Indonesia, lahir di tanggal Mendapatkan gelar dari Universitas pada tahun Memulai karier di Pelindo III pada tahun pada Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Tanjung Intan sejak tahun

Indonesian citizen born in ... on ... Earned ... from University of ... in ... Started his career at Pelindo III in ... in ... Has been serving as General Manager of Port of Tanjung Intan since ...

Yuvensius Andri Kartiko

General Manager Pelabuhan Tegal / General Manager of Port of Tegal

Warga Negara Indonesia, lahir di Ngawi tanggal 1 Juni 1972. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Floses tahun 2012. Mengawali karier di Pelindo III pada bagian Umum tahun 1996. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Tegal sejak tahun

Indonesian citizen born in Ngawi on 1 June 1972. Earned a Bachelor's Degree in Economics Management from Universitas Floses in 2012. Started his career at Pelindo III in General Affairs in 1996. Has been serving as General Manager Port of Tegal since ...

I Wayan Eka Saputra

CEO Regional Bali Nusa / CEO of Bali Nusa Region

Warga Negara Indonesia, lahir di Bangli tanggal 10 Oktober 1974. Mendapatkan gelar Magister Manajemen dari STIE Bank BPD Jawa Tengah tahun 2017. Memulai karier di Pelindo III pada tahun 1998 pada bidang Tata Usaha Keuangan. Tahun 2016 menjabat sebagai Manager Keuangan di Banjarmasin. Menjabat sebagai CEO Regional Bali Nusra sejak tahun 2018.

Indonesian citizen born in Bangli on 10 October 1974. Earned a Master's Degree in Management from STIE Bank BPD Jawa Tengah in 2017. Started his career at Pelindo III in 1998 in Financial Administration. In 2016 he served as Finance Manager in Banjarmasin. Has been serving as Regional CEO of Bali Nusa since 2018.

A. A. Gede Mataram

General Manager Pelabuhan Benoa / General Manager of Port of Benoa

Warga Negara Indonesia, lahir di Denpasar tanggal 25 Juni 1974. Mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari UPN Denpasar tahun 1998. Memulai karier di Pelindo III pada tahun 2000 pada bidang Pengembangan SDM. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Benoa sejak tahun 2018.

Indonesian citizen born in Denpasar on 25 June 1974. Earned a Bachelor's Degree in Law from UPN Denpasar in 1998. Started his career at Pelindo III in 2000 in HR Development. Has been serving as General Manager Port of Benoa since 2018.

**Dody Eko Saputro**

General Manager Pelabuhan Tenau Kupang / General Manager of Port of Tenau Kupang

Warga Negara Indonesia, lahir di Klaten tanggal 14 Desember 1975. Mendapatkan gelar Ahli Nautika Tingkat I (ANT-I) dari STIP Jakarta tahun 2008. Mengawali kariernya di Pelindo III sejak tahun 2010 di bidang Pelayanan Kapal. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Tenau Kupang sejak tahun

Indonesian citizen born in Klaten on 14 December 1975. Earned a degree as a Level I Nautical Expert (ANT-I) from STIP Jakarta in 2008. Started his career at Pelindo III since 2010 in Ship Services. Has been serving as General Manager Port of Tenau Kupang since ...

Baharuddin

General Manager Pelabuhan Lembar / General Manager of Port of Lembar

Warga Negara Indonesia, lahir di Tala tanggal 1 Desember 1966. Mendapatkan gelar Sarjana Sosial dari Universitas Samawa pada bidang Administrasi Negara tahun 2002. Memulai karier di Pelindo III pada tahun 1998 pada bidang Dinas Operasi. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Lembar sejak tahun

Indonesian citizen born in Tala on 1 December 1966. Earned a Bachelor's Degree in State Administration from Universitas Samawa in 2002. Started his career in Pelindo III since 1998 in Operations. Has been serving as General Manager Port of Lembar since ...

Rahmat Sururi

General Manager Pelabuhan Bima / General Manager of Port of Bima

Warga Negara Indonesia, lahir di tanggal Mendapatkan gelar dari Universitas pada tahun Memulai karier di Pelindo III pada tahun pada Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Bima sejak tahun

Indonesian citizen born in ... on ... Earned ... from University of ... in ... Started his career at Pelindo III in ... in ... Has been serving as General Manager of Port of Bima since ...

Rio Dwi Santoso

General Manager Pelabuhan Tanjung Wangi / General Manager of Port of Tanjung Wangi

Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya tanggal 30 Januari 1976. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Yos Sudarso Surabaya tahun 2005. Mengawali karier di Pelindo III pada bidang Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2008. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Tanjung Wangi sejak tahun

Indonesian citizen born in Surabaya on 30 January 1976. He earned a Bachelor's Degree in Economics from Universitas Yos Sudarso Surabaya in 2005. Started his career at Pelindo III in Goods and Services Procurement Planning in 2008. Has been serving as General Manager Port of Tanjung Wangi since ...

Zanuar Eka Wijaya

General Manager Pelabuhan Celukan Bawang / General Manager of Port of Celukan Bawang

Warga Negara Indonesia, lahir di tanggal Mendapatkan gelar dari Universitas pada tahun Memulai karier di Pelindo III pada tahun pada Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Celukan Bawang sejak tahun

Indonesian citizen born in ... on ... Earned ... from University of ... in ... Started his career at Pelindo III in ... in ... Has been serving as General Manager of Port of Celukan Bawang since ...



Erry Ardyanto

General Manager Pelabuhan Maumere / General Manager of Port of Maumere

Warga Negara Indonesia, lahir di tanggal Mendapatkan gelar dari Universitas pada tahun Memulai karier di Pelindo III pada tahun pada Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Maumere sejak tahun

Indonesian citizen born in ... on ... Earned ... from University of ... in ... Started his career at Pelindo III in ... in ... Has been serving as General Manager of Port of Maumere since ...

Hadi Sukamto

General Manager Pelabuhan Ende-Ippi / General Manager of Port of Ende-Ippi

Warga Negara Indonesia, lahir di Jombang tanggal 17 Agustus 1971. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Yos Soedarno tahun 2003. Mengawali karier di Pelindo III sejak tahun 2000 di bagian Aneka Usaha dan Pemasaran. Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Ende-Ippi sejak tahun 2018.

Indonesian citizen born in Jombang on 17 August 1971. Earned a Bachelor's Degree in Management Economics from Universitas Yos Soedarno in 2003. Started his career at Pelindo III since 2000 in the Miscellaneous Business and Marketing section. Has been serving as General Manager Port of Ende-Ippi since 2018.

Abdullah Machrus

General Manager Pelabuhan Waingapu / General Manager of Port of Waingapu

Warga Negara Indonesia, lahir di tanggal Mendapatkan gelar dari Universitas pada tahun Memulai karier di Pelindo III pada tahun pada Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Waingapu sejak tahun

Indonesian citizen born in ... on ... Earned ... from University of ... in ... Started his career at Pelindo III in ... in ... Has been serving as General Manager of Port of Waingapu since ...

Hina Pirandawa

General Manager Pelabuhan Kalabahi / General Manager of Port of Kalabahi

Warga Negara Indonesia, lahir di tanggal Mendapatkan gelar dari Universitas pada tahun Memulai karier di Pelindo III pada tahun pada Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Kalabahi sejak tahun

Indonesian citizen born in ... on ... Earned ... from University of ... in ... Started his career at Pelindo III in ... in ... Has been serving as General Manager of Port of Kalabahi since ...

Dhika Ramadhan Putra

General Manager Pelabuhan Badas / General Manager of Port of Badas

Warga Negara Indonesia, lahir di tanggal Mendapatkan gelar dari Universitas pada tahun Memulai karier di Pelindo III pada tahun pada Menjabat sebagai General Manager Pelabuhan Badas sejak tahun

Indonesian citizen born in ... on ... Earned ... from University of ... in ... Started his career at Pelindo III in ... in ... Has been serving as General Manager of Port of Badas since ...



STRUKTUR DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

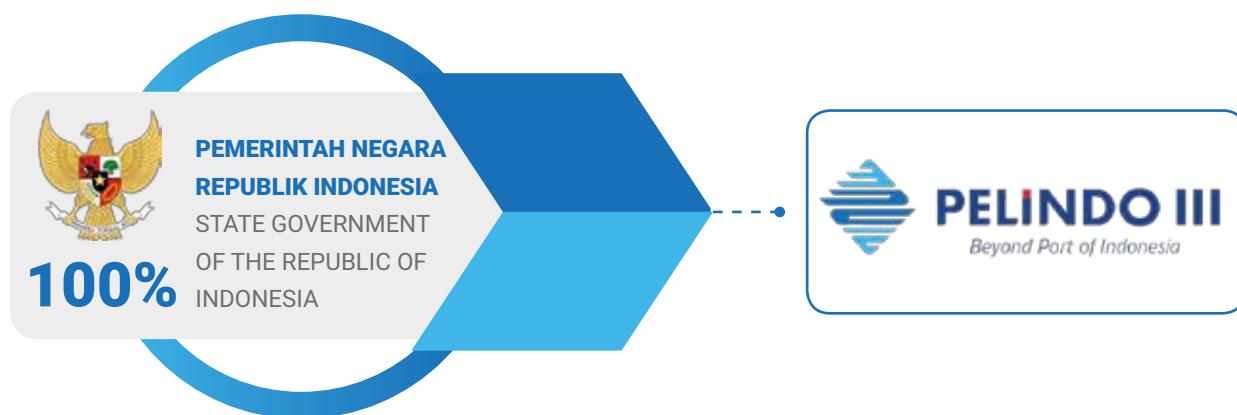
Structure and Composition of Shareholders

STRUKTUR PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham Utama dan Pengendali Pelindo III adalah Negara Republik Indonesia sebesar 100% nilai saham Perseroan. Berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 Pasal 14 Ayat 1 tentang BUMN, Menteri BUMN bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Perseroan dimiliki oleh Negara.

SHAREHOLDER STRUCTURE

The Main and Controlling Shareholder of Pelindo III is the Republic of Indonesia with 100% shares of the Company. Pursuant to Article 14 paragraph 1 of Law No. 19 of 2003 regarding SOEs, the Minister of SOE acts as the GMS in case all shares of the Company are owned by the Country.



PEMEGANG SAHAM 5 PERSEN ATAU LEBIH

Hingga 31 Desember 2020, kepemilikan saham Perseroan dimiliki secara penuh oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan persentase kepemilikan sebesar 100% dengan jenis saham Dwiwarna. Dengan persentase tersebut, dapat diinformasikan bahwa Pemegang Saham dengan kepemilikan 5% atau lebih adalah Pemerintah Republik Indonesia.

SHAREHOLDER OF 5% SHARES OR MORE

As of 31 December 2020, the Company's shares are fully owned by the Government of Republic of Indonesia with 100% shareholding of Dwiwarna shares (golden shares). Hence, it can be stated that the Shareholder of 5% shares or more is the Government of Indonesia.



KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

SHARE OWNERSHIP OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Keterangan Kepemilikan Saham (Ya/Tidak) / Share Ownership (Yes/No)	Jumlah Lembar Saham Yang Dimiliki / Number of Owned Shares	Jumlah Nominal Yang Dimiliki / Nominal Values of Owned Shares	Percentase / Percentage
Dewan Komisaris / Board of Commissioners						
1	Marsetio	Komisaris Utama / President Commissioner	Tidak / No	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
2	Heru Sukanto	Komisaris / Commissioner	Tidak / No	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
3	Otto Ardianto	Komisaris / Commissioner	Tidak / No	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
4	Ridwan Djamaruddin	Komisaris / Commissioner	Tidak / No	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
5	Ali Mochtar Ngabalin	Komisaris / Commissioner	Tidak / No	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
6	Dedi Syarif Usman	Komisaris / Commissioner	Tidak / No	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
Direksi / Board of Directors						
1	U. Saefudin Noer	Direktur Utama / President Director	Tidak / No	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
2	Putut Sri Muljanto	Direktur Operasi dan Komersial / Operations and Commercial Director	Tidak / No	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
3	Boy Robyanto	Direktur Teknik / Engineering Director	Tidak / No	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
4	Edi Priyanto	Direktur Sumber Daya Manusia / Human Capital Director	Tidak / No	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
5	Endot Endradono	Direktur Keuangan / Finance Director	Tidak / No	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None
6	Kokok Susanto	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis / Business Transformation and Development Director	Tidak / No	Nihil / None	Nihil / None	Nihil / None



KEPEMILIKAN SAHAM KURANG DARI 5%

Berdasarkan informasi terkait kepemilikan saham yang telah disampaikan sebelumnya, yang menjelaskan kepemilikan saham mayoritas atau dengan 100% dimiliki oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, maka informasi mengenai kelompok pemegang saham publik atau kelompok pemegang saham yang memiliki kepemilikan saham kurang dari 5% tidak dapat disajikan karena tidak terdapat kondisi atau data tersebut di Perseroan.

KEPEMILIKAN SAHAM BERDASARKAN KLASIFIKASI KEPEMILIKAN

Berdasarkan informasi terkait kepemilikan saham yang telah disampaikan sebelumnya, yang menjelaskan kepemilikan saham mayoritas atau dengan 100% dimiliki oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, maka informasi mengenai jumlah kepemilikan saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun dengan klasifikasi kepemilikan institusi lokal dan asing serta kepemilikan individu dan lokal dan asing tidak dapat disajikan karena tidak terdapat kondisi atau data tersebut di Perseroan.

SHARE OWNERSHIP OF LESS THAN 5%

Based on the previous information related to shareholding which states that the majority shareholder of 100% shares of the Company is the Government of Republic of Indonesia, then, information regarding public shareholders or group of shareholders with less than 5% shares of the Company cannot be presented as there is no such condition and data in the Company.

SHARE OWNERSHIP BASED ON OWNERSHIP CLASSIFICATION

Based on the previous information related to shareholding which states that the majority shareholder of 100% shares of the Company is the Government of Republic of Indonesia, then, information regarding total shareholding and percentage of share ownership at the end of the year, with the classification of local and foreign individual owners as well as local and foreign institutional owners cannot be presented as there is no such condition and data in the Company.

PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

Information on Major and Controlling Shareholder

Berdasarkan informasi yang disebutkan sebelumnya terkait struktur kepemilikan saham di Perusahaan, Pemegang Saham Utama dan Pengendali secara langsung adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan komposisi saham sebesar 100%, baik dalam bentuk saham yang dicatatkan maupun portofolio

Based on the previous information related to shareholding structure of the Company, the Major and Controlling Shareholder of the Company is the Government of the Republic of Indonesia with 100% ownership of issued shares and shares in portfolio.



STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN

Company Group Structure



ANAK PERUSAHAAN SUBSIDIARIES



CUCU PERUSAHAAN SECOND-TIER SUBSIDIARIES



PERUSAHAAN AFILIASI AFFILIATED COMPANIES





DAFTAR ENTITAS ANAK DAN ASOSIASI

List of Subsidiaries and Associate Entities

ENTITAS ANAK SUBSIDIARIES

PT Terminal Peti Kemas Surabaya



**OPERATOR TERMINAL PETI KEMAS UNTUK
KAPAL INTERNASIONAL DAN DOMESTIK**

**CONTAINER TERMINAL OPERATOR FOR
INTERNATIONAL AND DOMESTIC SHIPS**

Status Operasional Operational Status	Telah Beroperasi	Operating
Tahun Pendirian Year of Establishment	1 April 1999	April 1, 1999
Kepemilikan Saham Shareholder	Pelindo III (99,50%) dan Kopelindo III (0,50%)	Pelindo III (99.50%) and Kopelindo III (0.50%)
Jumlah Aset Total Assets	Rp...	
Bidang Usaha Business Sectors	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dan pelaksanaan pengusahaan jasa pelayanan operasi kapal, operasi lapangan dan operasi gudang, serta penyediaan dan pengusahaan jasa tambat, dermaga, penumpukan peti kemas, dan air kapal bagi kapal-kapal peti kemas yang bertambat di terminal peti kemas. b. Perencanaan dan pengembangan, pelaksanaan pengelolaan, pengusahaan dan pemasaran usaha jasa baru, rupa-rupa usaha (penyewaan gedung dan parkir), serta usaha jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan terminal peti kemas. c. Pelaksanaan penyediaan, pengoperasian, serta pemeliharaan fasilitas dan peralatan bongkar muat peti kemas. d. Perencanaan dan pengelolaan keuangan dan logistik untuk terminal peti kemas. e. Pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kegiatan terminal peti kemas. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Provision and services of ship operations, yard and warehouse operations, as well as the provision and services of mooring, docking, container stacking, and freshwater for container ships docking at the container terminal. b. Planning and development, management, enterprise and marketing new services, miscellaneous businesses (building and parking space rental), and other services related to container terminals. c. Provision, operations, and maintenance of facilities and equipment for container loading and unloading. d. Financial and logistics planning and management for container terminals. e. Education and training related to container terminal operations.



PT Pelindo Marine Service



PENYEDIA SARANA BANTU PELAYANAN
PEMANDUAN

PILOTAGE SERVICE FACILITY PROVIDER

Status Operasional Operational Status	Telah Beroperasi	Operating
Tahun Pendirian Year of Establishment	31 Desember 2011	December 31, 2011
Kepemilikan Saham Shareholder	Pelindo III (98,23%), Kopelindo III (1,77%)	Pelindo III (98.23%) and Kopelindo III (1.77%)
Jumlah Aset Total Assets	Rp...	
Bidang Usaha Business Sectors	<ul style="list-style-type: none"> a. Jasa angkutan di perairan. b. Penyediaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa pemanduan dan/atau jasa penundaan kapal. c. Penyediaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa mendorong dan/atau menarik kapal. d. Penyediaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa berbagai jenis kapal dan tongkang untuk kegiatan spesifik. e. Penyediaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa galangan untuk pemeliharaan dan/atau perbaikan kapal. f. Penyediaan fasilitas dan/atau pelayanan pemenuhan kebutuhan logistik kapal dan/atau kru kapal. g. Penyediaan kru kapal. h. Penyediaan fasilitas dan/atau pelayanan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengoperasian kapal. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Water transportation services. b. Facility provision and/or services of ship pilotage and/or tugging. c. Facility provision and/or services of ship tugging and/or towing. d. Facility provision and/or services of various ship types and barge for specific activities. e. Facility provision and/or services of shipyards for ship maintenance and/or repair. f. Facility provision and/or services of ship logistic supplies and/or ship crew. g. Provision or ship crew. h. Other facility provision and/or services related to vessel management and operations.
	<p>Selain kegiatan utama tersebut di atas, perusahaan melakukan kegiatan usaha lain yang menunjang tercapainya tujuan perusahaan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dan pengelolaan jasa konsultasi, surveyor, pendidikan, dan pelatihan yang berkaitan dengan manajemen operasi perkapalan; b. Penyediaan peralatan dan/atau perawatan peralatan di bidang perkapalan; dan c. Jasa penyelamatan dan penyelaman (salvage). 	<p>Besides the main activities stated above, the company carries out other business activities that support the achievement of company objectives, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Provision and management of consulting services, surveyor, education and training related to vessel operation management; b. Provision and/or maintenance of ship-related equipment; and c. Rescue and submersion (salvage) services.



PT Terminal Teluk Lamong

OPERATOR TERMINAL MULTI GUNA UNTUK
KAPAL INTERNASIONAL DAN DOMESTIKMULTIPURPOSE TERMINAL OPERATOR FOR
INTERNATIONAL AND DOMESTIC SHIPS

Status Operasional Operational Status	Telah Beroperasi	Operating
Tahun Pendirian Year of Establishment	30 Desember 2013	December 30, 2013
Kepemilikan Saham Shareholder	Pelindo III (99,50%) dan Kopelindo III (0,50%)	Pelindo III (99.50%) and Kopelindo III (0.50%)
Jumlah Aset Total Assets	Rp...	
Bidang Usaha Business Sectors	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat. b. Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih. c. Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan. d. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas. e. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan. f. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan ro-ro. g. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang. h. Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang. i. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Wharf provision and/or service for docking. b. Provision and/or service for fuel refill and clean water service. c. Provision and/or service for passengers and/or vehicles to get in and get off. d. Provision of wharf facility and/or service for goods and container loading and unloading activities. e. Provision and/or service of warehousing and hoarding, loading and unloading equipment, and port facilities. f. Terminal provision and/or service for containers, liquid bulk, dry bulk, and ro-ro. g. Provision and/or service for goods loading and unloading. h. Provision and/or service for the distribution centre and goods consolidating. i. Tugboat provision and/or service.
Selain kegiatan utama tersebut di atas, perusahaan melakukan kegiatan usaha lain yang menunjang tercapainya tujuan perusahaan, antara lain:	Aside from the above-mentioned main business lines, the Company also conducts supporting business activities, namely:	
<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan fasilitas penampungan limbah; b. Penyediaan depo peti kemas; c. Penyediaan pergudangan; d. Jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor; e. Instalasi air bersih dan listrik; f. Pelayanan pengisian air tawar dan minyak; g. Penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan; h. Penyediaan fasilitas gudang pendingin; i. Perawatan dan perbaikan kapal; j. Pengemasan dan pelabelan; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Provision of waste storage facilities; b. Provision of container depot; c. Provision of warehousing; d. Service for office cleaning and maintenance; e. Freshwater and electrical installation; f. Freshwater and oil filling service; g. Office provision for port customer's purposes; h. Provision of a cooling storage facility; i. Ship maintenance and repair; j. Packaging and labelling; 	



- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> k. Fumigasi dan pembersihan atau perbaikan peti kemas; l. Angkutan umum dari dan ke Pelabuhan; m. Tempat tunggu kendaraan bermotor; n. Kegiatan industri tertentu; o. Kegiatan perdagangan; p. Kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi; q. Jasa periklanan; dan/atau r. Perhotelan, restoran, pariwisata, pos, dan telekomunikasi. | <ul style="list-style-type: none"> k. Container fumigation and cleaning/ repairing; l. Public transportation to and from the port; m. Waiting area for vehicles; n. Specific industrial activities; o. Trading activities; p. Provision of playground and recreation areas; q. Advertising services; and/or r. Hotel, restaurant, tourism, posting, and telecommunication services |
|---|--|

PT PELINDO DAYA SEJAHTERA



PENYEDIA TENAGA KERJA ALIH DAYA

OUTSOURCING WORKFORCE PROVIDER

Status Operasional Operational Status	Telah Beroperasi	Operating
Tahun Pendirian Year of Establishment	10 Maret 2008	March 10, 2008
Kepemilikan Saham Shareholder	Pelindo III (90,00%) dan Kopelindo III (10,00%)	Pelindo III (90.00%) and Kopelindo III (10.00%)
Jumlah Aset Total Assets	Rp...	
Bidang Usaha Business Sectors	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjalankan usaha dalam bidang jasa penerimaan dan penyaluran tenaga kerja (meliputi jasa kebersihan (<i>cleaning service</i>), jasa bongkar muat dan jasa kepelabuhanan, serta jasa pengamanan). b. Menjalankan usaha dalam bidang pemberdayaan sumber daya manusia. c. Menjalankan usaha dalam bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen. d. Menjalankan usaha dalam bidang pemborongan pekerjaan. e. Menjalankan jasa pendidikan dan pelatihan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Carrying out business in workforce admission and distribution (including cleaning service, loading-unloading and port services, as well as security services). b. Carrying out business in human capital employment. c. Carrying out business consulting and management services. d. Carrying out chartering businesses. e. Carrying out education and training.



PT BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA

OPERATOR TERMINAL PETI KEMAS UNTUK
KAPAL DOMESTIK DAN TERMINAL CURAHCONTAINER TERMINAL OPERATOR FOR
DOMESTIC SHIPS AND BULK TERMINAL

Status Operasional Operational Status	Telah Beroperasi	Operating	
Tahun Pendirian Year of Establishment	9 Januari 2002	January 9, 2002	
Kepemilikan Saham Shareholder	Pelindo III (96,84%) dan Kopelindo III (3,16%)	Pelindo III (96.84%) and Kopelindo III (3.16%)	
Jumlah Aset Total Assets	Rp...		
Bidang Usaha Business Sectors	<ul style="list-style-type: none"> a. Jasa terminal bongkar muat barang (curah cair, curah kering, dan <i>general cargo</i>) dan peti kemas. b. Konsolidasi, distribusi dan pengangkutan barang (<i>truckling</i>), serta multimoda <i>transport</i>. c. Jasa terminal kapal <i>roll on-roll off</i> (ro-ro). d. Jasa terminal bahan bakar minyak kapal dan suplai bahan bakar minyak kapal. e. Jasa terminal kapal ikan dan kegiatan pendukung. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Loading-unloading terminal services for cargo (liquid bulk, dry bulk, and general cargo) as well as containers. b. Consolidation, goods distribution and transporting (truckling), and intermodal transport. c. Roll-on-roll-off (ro-ro) ship terminal. d. Ship fuel terminal and supply. e. Fishing ship terminal and supporting services. 	
Selain kegiatan utama tersebut di atas, Perseroan melakukan kegiatan usaha lain yang menunjang tercapainya tujuan perusahaan antara lain:		<p>Selain kegiatan utama tersebut di atas, Perseroan melakukan kegiatan usaha lain yang menunjang tercapainya tujuan perusahaan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dan/atau pelayanan gudang-gudang dan lapangan penumpukan dan tangki/tempat penimbunan barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan; b. Penyediaan dan pengelolaan jasa konsolidasi, pendidikan, dan pelatihan yang berkaitan dengan manajemen operasi terminal dan/atau kepelabuhanan; c. Pengusahaan dan penyelenggaraan depo peti kemas dan perbaikan, <i>cleaning</i>, fumigasi, serta pelayanan logistik; d. Jasa timbangan; e. Jasa kegiatan pemeliharaan dan perbaikan alat bongkar muat peti kemas; dan f. Usaha-usaha penunjang untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan. 	<p>Besides the main activities stated above, the company also carries out other business supporting the achievement of the company's objectives, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Provision and/or services of warehouses, stacking fields, tankers, port transportation, loading-unloading equipment, and port equipment; b. Provision and management of consolidation, education, and training related to terminal and/or port operation management; c. The business and operations of container depots and repair, cleaning, fumigation, and logistics service; d. Weighing services; e. Maintenance and repair for container loading-unloading equipment; and f. Supporting businesses to achieve the company's goals and objectives.



CUCU PERUSAHAAN SECOND-TIER SUBSIDIARIES

PT ALUR PELAYARAN BARAT SURABAYA



PT ALUR PELAYARAN BARAT SURABAYA

PENGELOLAAN ALUR PELAYARAN BARAT

MANAGEMENT OF WEST SHIPPING CHANNEL

Status Operasional Operational Status	Telah Beroperasi	Operating
Tahun Pendirian Year of Establishment	21 April 2014	April 21, 2014
Kepemilikan Saham Shareholder	PT Pelindo Marine Service (90,00%), Van Oord Dredging and Marine Contractor BV (5,00%), PT Gerbang Samudra Utama (5,00%)	PT Pelindo Marine Service (90,00%), Van Oord Dredging and Marine Contractor BV (5,00%), PT Gerbang Samudra Utama (5,00%)
Jumlah Aset Total Assets	Rp...	
Bidang Usaha Business Sectors	<ul style="list-style-type: none"> a. Jasa pengeringan dan jasa pemeliharaan kedalaman alur pelayaran. b. Pengembangan dan pengelolaan alur pelayaran. c. Jasa reklamasi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ship channel dredging and depth maintenance. b. Ship channel development and management. c. Reclamation services.

PT PELINDO ENERGI LOGISTIK



JASA DISTRIBUSI GAS DAN MINYAK

GAS AND FUEL OIL DISTRIBUTION SERVICES

Status Operasional Operational Status	Telah Beroperasi	Operating
Tahun Pendirian Year of Establishment	9 September 2014	September 9, 2014
Kepemilikan Saham Shareholder	PT Pelindo Marine Service (90,00%), PT Pelindo Energi Logistik (buyback saham) (9,00%) PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (1,00%)	PT Pelindo Marine Service (90.00%), PT Pelindo Energi Logistik (shares buyback) (9.00%), PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (1.00%)
Jumlah Aset Total Assets	Rp...	

**Bidang Usaha**
Business Sectors

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">a. Logistik, distribusi, dan terminal energi yang mengedepankan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.b. Penyediaan dan/atau pelaksanaan pengusahaan jasa pelayanan operasi kapal bongkar muat, lapangan penumpukan, dan/ atau jasa penimbunan barang termasuk namun tidak terbatas barang-barang pertambangan, minyak bumi, gas, dan produk-produk turunannya.c. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal penerimaan termasuk namun tidak terbatas barang-barang pertambangan, minyak bumi, gas, dan produk-produk turunannya.d. Penyediaan dan/atau pelayanan lapangan penumpukan dan tangki/tempat penimbunan barang-barang termasuk namun tidak terbatas barang-barang pertambangan, minyak bumi, gas, dan produk-produk turunannya.e. Penyediaan angkutan bandar, alat bongkar muat, peralatan pelabuhan, serta peralatan penunjang lainnya.f. Penyediaan pelayanan dan pengusahaan jasa transportasi dan distribusi termasuk namun tidak terbatas barang-barang pertambangan, minyak bumi, gas, dan produk-produk turunannya.g. Kegiatan perdagangan meliputi kegiatan ekspor dan impor namun tidak terbatas barang-barang pertambangan, minyak bumi, gas, dan produk-produk turunannya; perencanaan dan pengolahan keuangan dan logistik, distribusi untuk terminal energi.h. Penyediaan dan/atau pelayanan kegiatan konsolidasi dan distribusi namun tidak terbatas barang-barang pertambangan, minyak bumi, gas, dan produk-produk turunannya.i. Pengelolaan, pengusahaan, dan pemasaran pembangkit listrik, serta mendistribusikan listrik dan pemasaran pembangkit listrik, serta mendistribusikan listrik dan pemasaran zona dan/atau jasa logistik.j. Pengelolaan, pengusahaan, dan pemasaran usaha jasa baru, rupa-rupa usaha (penyewaan gedung, pas, dan parkir), serta jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan terminal energi. | <ul style="list-style-type: none">a. Energy logistics, distribution, and terminal prioritising Good Corporate Governance principles and implementing limited liability principles.b. Service provision and/or operations of loading-unloading ships, stacking fields, and/or goods stacking services including but not limited to mining goods, petroleum, gas, and their derivative products.c. Provision and/or services of reception terminal including but not limited to mining goods, petroleum, gas, and their derivative products.d. Provision and service of stacking fields and tanker including but not limited to mining goods, petroleum, gas, and their derivative products.e. Provision of port transportation, loading-unloading equipment, port equipment, and other supporting equipment.f. Service and operations of transportation and distribution including but not limited to mining goods, petroleum, gas, and their derivative products.g. Trade activities including export and import, not limited to mining goods, petroleum, gas, and their derivative products as well as planning and management of finance, logistics, and distribution for energy terminals.h. Provision and/or service of consolidation and distribution but not limited to mining goods, petroleum, gas, and their derivative products.i. Management, operations, and marketing of power plants as well as electricity distribution and zone marketing and/or logistics services.j. Management, operations, and marketing of new services, miscellaneous businesses (building, pass, and parking space rent), and other services related to energy terminals. |
|--|---|



Selain kegiatan utama tersebut di atas, perusahaan melakukan kegiatan usaha lain yang menunjang tercapainya tujuan perusahaan, antara lain:

- a. Jasa angkut;
- b. Penyediaan, pengusahaan, dan/atau pelayanan utilitas tetapi tidak terbatas pada telekomunikasi, listrik, pengolahan dan distribusi air minum/air kapal, instalasi limbah, serta pengolahan limbah dan sampah;
- c. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa pengisian BBM untuk kapal dan kendaraan;
- d. Penyediaan dan pengelolaan jasa konsultasi, pendidikan, dan pelatihan yang berkaitan dengan logistik dan jasa energi;
- e. Perencanaan dan pengelolaan keuangan dan logistik untuk terminal energi; dan
- f. Jasa pelayanan alih muat dari kapal ke kapal (*ship-to-ship transfer*) termasuk jasa ikutan lainnya.

Besides the main activities stated above, the company carried out other business activities supporting the achievement of the company's objectives, namely:

- a. Transportation services;
- b. Utility provision, operations, and/or services not limited to telecommunication, electricity, ship freshwater/drinking water distribution management, waste installation, as well as waste and litter management;
- c. Fuel-filling services for ship and vehicles;
- d. Service provision and management of consultation, education, and training related to logistics and energy services;
- e. Financial and logistics planning and management for energy terminals; and
- f. Ship-to-ship transfer services including other follow-up services

PT BERLIAN MANYAR SEJAHTERA



OPERATOR TERMINAL CURAH DAN PETI KEMAS DI MANYAR

THE OPERATOR OF BULK AND CONTAINER AT MANYAR

Status Operasional Operational Status	Telah Beroperasi	Operating
Tahun Pendirian Year of Establishment	12 Juni 2012	June 12, 2012
Kepemilikan Saham Shareholder	PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (60,00%), PT Usaha Era Pratama Nusantara (40,00%)	PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (60.00%), PT Usaha Era Pratama Nusantara (40.00%)
Jumlah Aset Total Assets	Rp...	
Bidang Usaha Business Sectors	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat. b. Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih. c. Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan. d. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas. e. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan. f. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan ro-ro. g. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang. h. Penyediaan dan/atau pelayanan penundaan kapal. i. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya yang terkait dengan jasa kepelabuhanan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Docking wharf provision and/or services. b. Fuel-filling and freshwater provision and/or services. c. Facility provision and/or service for loading and unloading passenger and/or vehicle. d. Wharf provision and/or services for goods and container loading and unloading activities. e. Provision and/or services of warehouse and stacking fields, loading-unloading equipment, and port equipment. f. Provision and/or services of container terminals, liquid and dry bulk, as well as ro-ro. g. Goods loading and unloading provision and/or services. h. Tugging provision and/or services. i. Other provision and/or services related to port services.



PT PELINDO PROPERTI INDONESIA



PENGEMBANG DAN PENGELOLA PROPERTI

PROPERTY DEVELOPERS AND MANAGERS

Status Operasional Operational Status	Telah Beroperasi	Operating
Tahun Pendirian Year of Establishment	5 Desember 2014	December 5, 2014
Kepemilikan Saham Shareholder	PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (99,91%), Kopelindo III (0,09%)	PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (99,91%), Kopelindo III (0,09%)
Jumlah Aset Total Assets	Rp...	
Bidang Usaha Business Sectors	<p>a. Menjalankan usaha di bidang pembangunan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan; 2. Pemborongan pada umumnya (<i>General Contractor</i>) antara lain pembangunan, pengembangan dan pengelolaan termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan bangunan di bidang: <ol style="list-style-type: none"> a) Industri pendukung pelabuhan; b) Kawasan industri (<i>industrial estate</i>); c) Kawasan Marina dan pendukungnya; d) Bangunan komersial, bisnis, dan perdagangan e) Perhotelan dan Resort; f) Gedung-gedung apartemen, kondominium, kondotel; g) Kawasan perumahan dan permukiman termasuk <i>real estate</i>; h) Fasilitas pariwisata dan pusat rekreasi; dan i) Pusat niaga, perkantoran, pertokoan, dan pusat rekreasi. 3. Fasilitas-fasilitas pembangunan termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurukan, pemerataan area; 4. Pembangunan gedung dan konstruksi lapangan, jalan, jembatan, gudang, pertamanan, dermaga, dan usaha sejenis lainnya; dan 5. Pembangunan dan pemasangan instalasi listrik, gas, air minum, telekomunikasi, <i>air conditioner</i>, serta dalam bidang teknik sipil, elektro, mesin mekanika elektrikal, dan lain sebagainya. 	<p>a. Carrying out business in construction including:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acting as developers, undertaking plannings, implementation, and monitoring; 2. General Contractor, including construction, development and management including treatment, maintenance, and repair for buildings in: <ol style="list-style-type: none"> a) Port-supporting industries; b) Industrial estates; c) Marine area and its supporting estates; d) Commercial, business, and trade buildings; e) Hotels and resorts; f) Apartment, condominium, and condo-hotel buildings; g) Residential area and settlements including real estates; h) Tourism accommodations and recreational centres; and i) Trade centres, offices, stores, and recreational centres. 3. Construction facilities including area clearance, opening, backfilling, and levelling; 4. The construction of buildings, fields, roads, bridges, warehouses, parks, wharves, and other similar businesses; and 5. The construction and installation of electricity, gas, drinking water, telecommunication, air conditioner, as well as civil engineering, electrical engineering, electrical machines, and so forth.



- b. Menjalankan perdagangan yang berhubungan dengan usaha *real estate*, yaitu penjualan, pembelian, dan penyewaan bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung pertokoan, gedung komersial dan perdagangan, unit-unit ruangan apartemen, ruangan kondominium, ruangan condotel, ruangan kantor, ruangan pertokoan.
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, yang meliputi jasa kecuali di bidang hukum dan pajak, antara lain:
1. Jasa konsultasi arsitek;
 2. Jasa telekomunikasi;
 3. Jasa teknologi informasi;
 4. Hiburan, promosi, *agency*, manajemen, dan pengelolaan kegiatan hiburan;
 5. Jasa penunjang kegiatan angkutan dan perjalanan wisata; dan
 6. Jasa di bidang makanan dan minuman (*catering*) serta usaha sejenis lainnya.
- b. Carrying out trade related to real estate business, specifically the sales, purchase, and rental of housing, office buildings, store buildings, commercial and trade buildings, apartment units, condominium rooms, condo-hotel rooms, office rooms, and stores.
- c. Carrying out businesses in services other than law and tax, namely:
1. Architecture consultation services;
 2. Telecommunication services;
 3. Information technology services;
 4. Entertainment, promotion, agency, management, and entertainment management;
 5. Supporting services for travel and tourism; and
 6. Catering and other similar services.

PT BERKAH INDUSTRI MESIN ANGKAT



PENYEDIA DAN PEMELIHARAAN ALAT BONGKAR MUAT

PROVIDER OF LOADING AND UNLOADING EQUIPMENT

Status Operasional Operational Status	Telah Beroperasi	Operating
Tahun Pendirian Year of Establishment	11 November 2015	November 11, 2015
Kepemilikan Saham Shareholder	PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (90,00%), Kopelindo III (10,00%)	PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (90.00%), Kopelindo III (10.00%)
Jumlah Aset Total Assets	Rp...	
Bidang Usaha Business Sectors	<p>a. Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan industri pada umumnya, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan industri pembuatan minyak pelumas; 2. Melakukan industri pengemasan pelumas; 3. Melakukan kegiatan produksi <i>spare parts</i> untuk alat angkut, alat angkat, dan alat berat; dan 4. Melakukan kegiatan <i>manufacturing</i> industri alat bongkar muat. 	<p>a. Carrying out general industrial activities, namely:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lubricant - manufacturing industrial activities; 2. Lubricant - packaging industrial activities; 3. Spare-part production for transportation, lifting, and heavy equipment; and 4. Manufacturing activities for loading and unloading equipment.



-
- b. Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan pada umumnya, antara lain:
1. Menjadi agen perdagangan bahan bakar minyak;
 2. Melakukan perdagangan teknologi informasi, jaringan komunikasi, penjualan komputer, dan perangkat pendukungnya;
 3. Melakukan perdagangan *spare parts* untuk alat angkut, alat angkat, dan alat berat lainnya; dan
 4. Melakukan perdagangan eksport pelumas, *grease*, *specialities product*, dan *base oil*.
- c. Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan jasa pada umumnya, antara lain:
1. Melakukan kegiatan pengoperasian alat bongkar muat;
 2. Melakukan kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan alat bongkar muat dan/atau penunjang;
 3. Melakukan kegiatan penunjang jasa fabrikasi alat bongkar muat, alat angkut, alat angkat, dan alat besar;
 4. Melakukan kegiatan penyewaan alat untuk penanganan *assembling* alat (*rent for equipment handling*);
 5. Melakukan kegiatan penanganan kepengurusan kepabeanan (izin impor) alat bongkar muat;
 6. Melakukan kegiatan jasa transportasi;
 7. Melaksanakan kegiatan pengangkutan, penyimpanan, penyaluran, distribusi, dan pemasaran pelumas; dan
 8. Melaksanakan kegiatan jasa produksi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, penyaluran, distribusi, dan pemasaran pelumas, *grease*, *specialities product*, dan *base oil*.
- d. Menyelenggarakan kegiatan usaha secara langsung maupun tidak langsung terkait atau menunjang kegiatan usaha dari yang tersebut di atas.
- b. Carrying out general trading activities, namely:
1. Acting as an agent for fuel trade;
 2. Trading in information technology, communication network, computers, and their supporting devices;
 3. Trading spare parts for transportation, lifting equipment, and other heavy equipment; and
 4. Export trading of lubricants, grease, speciality products, and base oil.
- c. Carrying out general service-related activities, namely:
1. Loading and unloading equipment operations;
 2. Maintenance, treatment, and repair of loading and unloading equipment or supporting equipment;
 3. Supportive activities to assemble loading-unloading, transporting, lifting, and heavy equipment;
 4. Rent for equipment handling;
5. Customs clearance (import license) for loading and unloading equipment;
6. Transporting services;
7. Transporting, storing, transferring, distributing, and marketing lubricants; and
8. Production, processing, transporting, storing, transferring, distributing, and marketing lubricants, grease, speciality products, and base oil.
- d. Direct and indirect businesses related to or supporting the businesses mentioned above.
-



PT TANJUNG EMAS DAYA SEJAHTERA



PENYEDIA JASA OUTSOURCING TENAGA
TALLY DI SEMARANG

TALLY OUTSOURCING PROVIDER IN
SEMARANG

Status Operasional Operational Status	Telah Beroperasi	Operating
Tahun Pendirian Year of Establishment	29 September 2014	September 29, 2014
Kepemilikan Saham Shareholder	PT Pelindo Daya Sejahtera (99,00%), Kopelindo III (1,00%)	PT Pelindo Daya Sejahtera (99.00%), Kopelindo III (1.00%)
Jumlah Aset Total Assets	Rp...	
Bidang Usaha Business Sectors	Bergerak dalam bidang tally pelabuhan dan dermaga yang meliputi kegiatan usaha menghitung, mengukur, menimbang, dan membuat catatan mengenai muatan untuk kepentingan pemilik muatan dan/atau pengangkut.	Engaging in business port and wharf tally including counting, measuring, weighing, and recording loads for load owners and/or transporters.

PT LAMONG ENERGI INDONESIA



PENGELOLAAN PEMBANGKIT ENERGI DAN
PENYEDIA LISTRIK MANAGEMENT OF ENERGY GENERATORS AND
ELECTRIC PROVIDERS

Status Operasional Operational Status	Telah Beroperasi	Operating
Tahun Pendirian Year of Establishment	8 Desember 2014	December 8, 2014
Kepemilikan Saham Shareholder	PT Terminal Teluk Lamong (99,00%); Kopelindo III (1,00%)	PT Terminal Teluk Lamong (99.00%); Kopelindo III (1.00%)
Jumlah Aset Total Assets	Rp...	
Bidang Usaha Business Sectors	<ul style="list-style-type: none"> a. Membangun, mendirikan, mengoperasikan, memelihara, memiliki, dan mengembangkan pembangkit listrik serta usaha sejenis. b. Mengusahakan pengadaan dan/atau tersedianya bahan bakar, barang pendukung, fasilitas, dan kebutuhan terkait lainnya untuk keperluan pembangkit listrik dan usaha sejenis, serta utilitas kawasan. c. Melakukan kegiatan usaha pemasaran, penjualan, dan pengembangan produk listrik dan jasa kelistrikan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Constructing, establishing, operating, maintaining, owning, and developing power plants and similar businesses. b. Providing and/or supplying fuel, supporting goods, facilities, and other related necessities for power plant and similar business as well as the sector's utilities. c. Marketing, trading, and developing electrical products and services.



- | | |
|---|--|
| d. Melakukan pengembangan bisnis pembangkit listrik dan usaha strategis sejenis lainnya. | d. Developing power plant business and other strategic businesses. |
| e. Industri Pembangkit Tenaga Listrik, meliputi kegiatan pembangkitan, transmisi, penjualan, penyaluran, dan usaha-usaha lain yang terkait dalam ketenagalistrikan. | e. Power plant industry activities, including electricity generation, transmission, trade, distribution, and other businesses related to electricity. |
| f. Industri transmisi telekomunikasi meliputi radio telekomunikasi, <i>microwave</i> , dan perangkat sejenisnya. | f. Telecommunication transmission activities, including telecommunication radio, microwave, and other similar devices. |
| g. Industri pengolahan, penjualan, dan distribusi air bersih, air minum, limbah cair, dan limbah padat (sampah). | g. Processing, trade, and distribution of freshwater, drinking water, as well as liquid and dry waste (litter). |
| h. Pendistribusian gas dan BBM pengembangan, pengelolaan dan pengoperasian infrastruktur gas dan BBM meliputi perencanaan, pengadaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan pipa transmisi dan distribusi gas serta kegiatan bisnis penunjang. | h. Gas distribution and fuel development, gas and fuel infrastructure operations and management including planning, procuring, construction, operation, and development of transmission pipes as well as gas distribution and supporting businesses. |
| i. Perdagangan kapasitas pipa transmisi gas dan BBM melakukan kegiatan jual-beli kapasitas penyimpanan serta fasilitas transportasi gas dan BBM lainnya serta kegiatan bisnis penunjang. | i. Trading gas and fuel transmission pipe capacity, trading store capacity and other gas and fuel transporting facilities as well as supporting businesses. |
| j. Angkutan darat (pipa/pipanisasi) dengan saluran pipa ke tujuan penampungan atau penyaluran ke darat/terminal atau laut. | j. Land transfer through pipes (piping) to the storing destination or distribution to land/ sea terminals. |
| k. Jasa penjernihan dan pengelolaan air bersih dan limbah serta usaha terkait. | k. Water and waste purification and management as well as related businesses. |
| l. Jasa pemeliharaan saluran air/pipa serta kegiatan usaha terkait. | l. Water channel/pipe maintenance and related businesses. |
| m. Jasa pemeliharaan peralatan alat angkat dan alat angkut. | m. Lifting and transporting equipment maintenance. |
| n. Penyedia jasa transportasi pengangkutan gas dan BBM. | n. Provider of gas and fuel transportation services. |
| o. Penyediaan jasa transportasi angkutan darat dan alat berat. | o. Provider of land transportation and heavy equipment services. |
| p. Pengelolaan dan penyediaan properti kawasan. | p. Area property provision and management. |
| q. Penyedia jasa logistik kebutuhan kawasan pelabuhan dan angkutan laut (kapal) yang meliputi sembako, <i>money changer</i> , penyedia persewaan mobil, dan keperluan lainnya. | q. Provider of port and ship necessities including basic food packages, money changer, car rent, and other necessities. |
| r. Membangun, mengoperasikan, serta jasa pemeliharaan fasilitas curah cair dan gas, termasuk fasilitas tangki dan pipanisasi. | r. Constructing, operating, and maintaining gas and liquid bulk facilities, including tanks and piping. |



PT BERKAH MULTI CARGO



Status Operasional Operational Status	Telah Beroperasi	Operating
Tahun Pendirian Year of Establishment	16 Desember 2015	December 16, 2015
Kepemilikan Saham Shareholder	PT Pelindo Marine Service (99,74%), Kopelindo III (0,26%)	PT Pelindo Marine Service (99. 74%), Kopelindo III (0.26%)
Jumlah Aset Total Assets	Rp...	
Bidang Usaha Business Sectors	a. Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional dan Internasional (Asing), antara lain akan tetapi tidak terbatas pada pengurusan transportasi, pergudangan, konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, dan/ atau kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri. b. Kegiatan penunjang angkutan multimoda antara lain akan tetapi tidak terbatas pada kegiatan penunjang tersebut di atas dilakukan dengan menggunakan alat angkut moda tranportasi kendaraan bermotor, perkeretaapian, laut, dan/atau udara.	a. National and International (Foreign) Multimodal Transportation Corporation, including but not limited to transportation arrangement, warehousing, load consolidation, storing provision, and/or customs clearance for foreign and domestic multimodal transportation. b. Multimodal transportation supporting activities, including but not limited to the stated supporting activities with motor vehicles, trains, sea transportation, and/or air transportation.



PT PELINDO 3 – TERMINAL PETI KEMAS

MELAKUKAN KEGIATAN BONGKAR MUAT DI
PELABUHAN MANYARLOADING AND UNLOADING AT THE PORT OF
MANYAR

Status Operasional Operational Status	Telah Beroperasi	Operating
Tahun Pendirian Year of Establishment	...	
Kepemilikan Saham Shareholder	PT Terminal Peti Kemas Surabaya (99,00%), Kopelindo III (1,00%)	PT Terminal Petikemas Surabaya (99.00%), Kopelindo III (1.00%)
Jumlah Aset Total Assets	Rp...	
Bidang Usaha Business Sectors	a. <i>Stevedoring</i> , yaitu jasa pelayanan membongkar barang dari dan ke kapal, dermaga, tongkang, truk atau muat dari dan ke dermaga, tongkang, truk ke dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal. b. <i>Cargodoring</i> , yaitu jasa mengeluarkan dari sling dari lambung kapal di atas dermaga, ke dan menyusun di dalam gudang lini atau lapangan penumpukan, atau sebaliknya. c. <i>Receiving/Delivery</i> , jasa pekerjaan mengambil dari timbunan/tempat penumpukan di gudang lini atau lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan rapat di pintu darat lapangan penumpukan, atau pekerjaan sebaliknya. d. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya yang terkait dengan bongkar muat dari dan ke kapal.	a. Stevedoring, or the goods-unloading services from/to the ship, wharf, barges, and trucks or loading from/to the wharf, barges, and trucks into the ship hatch using the ship crane. b. Cargodoring, or removing goods from the sling from the hull at the wharf and stacking inside the line warehouse or stacking fields, or inversely. c. Receiving/Delivery, or picking up from the stacks/stacking yards in the line warehouse or stacking fields and delivering until stacked on a compact vehicle at the land gate of stacking fields, or inversely. d. Other provision and/or services related to loading-unloading from or to the ships.



PT PRIMA CITRA NUTRINDO



JASA BOGA DAN NUTRISI

FOOD AND NUTRITION SERVICES

Status Operasional Operational Status	Telah Beroperasi	Operating
Tahun Pendirian Year of Establishment	11 Januari 2016	January 11, 2016
Kepemilikan Saham Shareholder	PT Pelindo Husada Citra (70,00%), PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (30,00%).	PT Pelindo Husada Citra (70.00%), PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (30.00%).
Jumlah Aset Total Assets	Rp...	
Bidang Usaha Business Sectors	a. Menjalankan usaha penyediaan makanan dan minuman. b. Menjalankan usaha restoran dan penyediaan makanan keliling. c. Melakukan penyajian makanan dan minuman di restoran. d. Melakukan penyajian makanan dan minuman di kedai makanan. e. Jasa boga untuk suatu event tertentu (<i>event catering</i>). f. Penyediaan makanan lainnya.	a. Carrying out food and beverages provision business. b. Carrying out restaurant businesses and mobile food provision. c. Serving food and beverages in restaurants. d. Serving food and beverages in food stores. e. Food services for specific events (<i>event catering</i>). f. Other food provision.



PT TERMINAL CURAH SEMARANG



OPERATOR TERMINAL CURAH CAIR DAN GAS
DI SEMARANG LIQUID AND GAS BULK TERMINAL OPERATOR
IN SEMARANG

Status Operasional Operational Status	Telah Beroperasi	Operating
Tahun Pendirian Year of Establishment	15 Desember 2015	December 15, 2015
Kepemilikan Saham Shareholder	PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (51,00%), PT Andahanesa Abadi (49,00%)	PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (51.00%), PT Andahanesa Abadi (49.00%)
Jumlah Aset Total Assets	Rp...	
Bidang Usaha Business Sectors	<ul style="list-style-type: none">a. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal curah cair dan gas.b. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan/atau tempat penyimpanan (storage tank), tempat penimbunan barang, pendistribusian, dan penjualan curah cair dan gas.c. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang, alat bongkar muat dan pemeliharaannya, serta peralatan kepelabuhanan pada umumnya, akan tetapi tidak terbatas pada jasa pelayanan dari dan/ke kapal, yaitu melakukan <i>stevedoring</i>, <i>cargodoring</i>, dan <i>receiving/delivery</i>.d. Jasa penyimpanan storage tank curah cair dan gas.e. Penyediaan jasa angkutan (<i>Trucking</i>).f. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya yang terkait dengan jasa kepelabuhanan.	<ul style="list-style-type: none">a. Provision and/or services of liquid bulk and gas terminals.b. Provision and/or services of warehouse and/or storage tank, goods stacking, distribution, and liquid bulk and gas trading.c. Wharf provision and/or services for loading and unloading goods, loading-unloading equipment and its maintenance, as well as general port equipment but not limited to transportation from/to ships, namely stevedoring, cargodoring, and receiving/delivery.d. Storage tank for liquid bulk and gas.e. Trucking provision.f. Other provision and/or services related to port services.



PT BERKAH KAWASAN MANYAR SEJAHTERA



PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI DAN PERKANTORAN MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ESTATES AND OFFICES

Status Operasional Operational Status	Telah Beroperasi	Operating
Tahun Pendirian Year of Establishment	18 Mei 2012	May 18, 2012
Kepemilikan Saham Shareholder	PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (40,00%), PT Usaha Era Pratama Nusantara (60,00%)	PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (40.00%), PT Usaha Era Pratama Nusantara (60.00%)
Jumlah Aset Total Assets	Rp...	
Bidang Usaha Business Sectors	<p>a. Bidang Pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan. 2. Bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan pengawasan konstruksi beserta fasilitasnya, pematangan tanah, dll. 3. Pemborongan pada umumnya (<i>general contractor</i>) yaitu pembangunan kawasan perumahan (<i>real estate</i>), rumah susun, kawasan industri, gedung, perkantoran, dll. 4. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan kawasan industri, termasuk membangun kawasan berikat, pembangkit dan distribusi tenaga listrik, air, limbah, dll. 5. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan jembatan, jalan, bandara-dermaga, dan renovasi gedung, lapangan, bendungan, pengairan/irigasi, dll. 6. Pemasangan instalasi-instalasi yang meliputi mesin, listrik, gas, air minum, perangkat telekomunikasi, limbah, dll. 7. Pemborongan di bidang pembangunan dan konstruksi pabrik-pabrik. 	<p>a. Construction</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Carrying out construction businesses. 2. Acting as developer executing the planning, monitoring construction and its facilities, land maturation, etc. 3. General contractor, specifically the construction of real estates, flats, industrial area, buildings, offices, etc. 4. Carrying out businesses in industrial area construction, including bonded zone, power plant, and the distribution of electricity, water, waste, etc. 5. Carrying out businesses in the construction of bridges, roads, port-wharf, and the renovation of buildings, fields, dams, irrigation, etc. 6. Installing machines, electricity, gas, drinking water, telecommunication devices, waste, etc. 7. Chartering in factory constructions.



b. Bidang Jasa	b. Services
1. Jasa pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran, taman hiburan/rekreasi, pengelolaan parkir dan keamanan (satpam), serta bidang terkait.	1. The management and rent of office buildings, recreational parks, parking and security management, and related fields.
2. Jasa agen properti yang meliputi memberikan jasa informasi dan penjualan di bidang property serta kegiatan usaha terkait.	2. Property agency, including providing information and trade of property and other related fields.
3. Pemberian jasa-jasa pengelolaan serta sarana-sarana lainnya untuk kawasan industri, lingkungan, kawasan berikat, dll.	3. Management services and other facilities for industrial areas, the environment, bonded zone, etc.
4. Konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan yang meliputi konsultasi di bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan.	4. Consultation on construction plan and monitoring, including consulting on planning and monitoring constructions.
5. Konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan property real estate.	5. Consultation on managing real estate property operations and maintenance.
6. Konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan industri.	6. Consultation on managing industrial area operations and maintenance.
7. Jasa persewaan dan pengelolaan property.	7. Property rent and management.
8. Jasa yang meliputi pembuatan laporan proyek, pengelolaan, dan gambar-gambar konstruksi.	8. Services of project reporting, managing, and construction drawings.
9. Jasa konsultasi manajemen property.	9. Property management consulting.
10. Jasa konstruksi dalam pembuatan beton siap pakai.	10. Constructing ready-to-use concrete.



PT TERMINAL NILAM UTARA



OPERATOR TERMINAL CURAH CAIR

LIQUID BULK TERMINAL OPERATOR

Status Operasional Operational Status	Telah Beroperasi	Operating
Tahun Pendirian Year of Establishment	23 Agustus 2013	August 23, 2013
Kepemilikan Saham Shareholder	PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (40,00%), PT Andahanesa Abadi (60,00%)	PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (40.00%), PT Andahanesa Abadi (60.00%)
Jumlah Aset Total Assets	Rp...	
Bidang Usaha Business Sectors	a. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat. b. Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih. c. Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan. d. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang. e. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan. f. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal curah cair dan gas. g. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang curah cair dan gas. h. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya yang terkait dengan jasa kepelabuhanan.	a. Wharf docking provision and/or services. b. Fuel and freshwater provision and/or services. c. Provision and/or services for loading and unloading passengers and/or vehicles. d. Wharf provision and/or services for loading and unloading goods. e. Provision and/or services of warehousing and stacking fields, loading-unloading equipment, and port equipment. f. Provision and/or services of liquid bulk and gas terminals. g. Provision and/or services of liquid bulk and gas loading and unloading. h. Other provision and/or services related to port services.



PERUSAHAAN AFILIASI AFFILIATED COMPANIES

PT PELINDO HUSADA CITRA



JASA PELAYANAN KESEHATAN
(RUMAH SAKIT DAN KLINIK)

HEALTHCARE SERVICES (HOSPITAL AND CLINIC)

Status Operasional Operational Status	Telah Beroperasi	Operating
Tahun Pendirian Year of Establishment	1 September 1999	September 1, 1999
Kepemilikan Saham Shareholder	Pelindo III (98,73%), Kopelindo III (1,27%)	Pelindo III (98.73%), Kopelindo III (1.27%)
Jumlah Aset Total Assets	Rp...	
Bidang Usaha Business Sectors	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pelayanan kesehatan. b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kesehatan. c. Melaksanakan jasa konsultan managemen kesehatan. d. Melaksanakan pelayanan farmasi dan peralatan kesehatan. e. Melaksanakan pelayanan gizi masyarakat. f. Melaksanakan pelayanan kebugaran kesehatan. g. Melaksanakan kegiatan di bidang kesehatan lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Carrying out healthcare services. b. Carrying out healthcare education and training. c. Carrying out consulting services for healthcare management. d. Carrying out pharmacy and healthcare equipment services. e. Carrying out community nutrition services. f. Carrying out fitness services. g. Carrying out other activities in the field of healthcare.

PT PORTEK INDONESIA



JASA PEMELIHARAAN DAN PENYEWAAN ALAT-
ALAT FASILITAS PELABUHAN

PORT FACILITY MAINTENANCE AND RENTAL
SERVICES

Status Operasional Operational Status	Telah Beroperasi	Operating
Tahun Pendirian Year of Establishment	21 September 1999	September 21, 1999
Kepemilikan Saham Shareholder	Pelindo III (49,00%), Portek System and Equipment Ltd. (51,00%)	Pelindo III (49.00%), Portek System and Equipment Ltd. (51.00%)
Jumlah Aset Total Assets	Rp...	
Bidang Usaha Business Sectors	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan manajemen bisnis dalam hal pemeliharaan dan penyewaan alat-alat bongkar muat dan alat fasilitas pelabuhan lainnya. b. Penyediaan, pemasangan, dan pengoperasian alat bongkar muat batu bara dan alat bongkar muat barang curah lainnya. c. Menyediakan, menyewakan, dan mengoperasikan kapal tunda dan kapal lainnya. d. Menyediakan informasi teknologi untuk pelayanan terminal. e. Pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan kapal serta penyediaan alat apung. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Business management in maintenance and rental of loading-unloading equipment and other port facilities. b. Provision, installation, and operation of coal loading-unloading equipment and other bulk loading-unloading equipment. c. Providing, renting, and operating tugboats and other ships. d. Providing technology information for terminal service. e. Ship construction, repair, and maintenance and provision of floating devices.



PT AMBANG BARITO NUSAPERSADA



PENGELOLAAN ALUR PELAYARAN BARITO

BARITO SHIPPING CHANNEL MANAGEMENT

Status Operasional Operational Status	Telah Beroperasi	Operating
Tahun Pendirian Year of Establishment	26 Maret 2004	March 26, 2004
Kepemilikan Saham Shareholder	Pelindo III (40,00%), PT Bangun Banua Kalimantan Selatan (60,00%).	Pelindo III (40.00%), PT Bangun Banua Kalimantan Selatan (60.00%).
Jumlah Aset Total Assets	Rp...	
Bidang Usaha Business Sectors	a. Pengerukan alur sungai, muara sungai, dan muara laut. b. Pembuatan bendungan berikut pemeliharaan dan perawatannya. c. Pengelolaan alur pelayaran.	a. Dredging channels on rivers, estuary, and sea estuary. b. Dam construction, maintenance, and treatment. c. Developing ship channels.



PT JASA MARGA BALI TOL



PENGELOLAAN TOL LAUT BALI MANDARA

BALI MANDARA SEA TOLL MANAGEMENT

Status Operasional Operational Status	Telah Beroperasi	Operating
Tahun Pendirian Year of Establishment	22 Agustus 2011	August 22, 2011
Kepemilikan Saham Shareholder	Pelindo III (17,58%), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (55,00%), Pemerintah Provinsi Bali (8,01%), Pemerintah Kabupaten Badung (8,01%), PT Angkasa Pura I (Persero) (8,00%), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (1,00%), PT Hutama Karya (Persero) (1,00%), PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) (1,00%), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (0,40%)	Pelindo III (17.58%), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (55.00%), Bali Provincial Government (8.01%), Badung Regional Government (8.01%), PT Angkasa Pura I (Persero) (8.00%), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (1.00%), PT Hutama Karya (Persero) (1.00%), PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) (1.00%), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (0.40%)
Jumlah Aset Total Assets	Rp...	
Bidang Usaha Business Sectors	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pekerjaan perencanaan. b. Membangun jalan dan jembatan, bangunan pelengkap jalan, dan fasilitas jalan tol. c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, termasuk memungut dan menggunakan uang tol. d. Menggunakan ruang milik jalan tol untuk usaha lain yang berkaitan dengan pengoperasian jalan tol, dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau persetujuan pihak yang berwenang. e. Menyelenggarakan kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, dan d. 	



PT TERMINAL PETI KEMAS INDONESIA



**OPERATOR TERMINAL PETI KEMAS DI MEDAN,
JAKARTA, SURABAYA, DAN MAKASSAR**

**CONTAINER TERMINAL OPERATORS IN MEDAN,
JAKARTA, SURABAYA, AND MAKASSAR**

Status Operasional Operational Status	Telah Beroperasi	Operating
Tahun Pendirian Year of Establishment	10 April 2013	April 10, 2013
Kepemilikan Saham Shareholder	Pelindo I (25,00%), Pelindo II (25,00%), Pelindo III (25,00%), Pelindo IV (25,00%)	Pelindo I (25.00%), Pelindo II (25.00%), Pelindo III (25.00%), Pelindo IV (25.00%)
Jumlah Aset Total Assets	Rp...	
Bidang Usaha Business Sectors	<p>a. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat; 2. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas; 3. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan; 4. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas; 5. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang; dan 6. Penyediaan dan/atau pusat distribusi dan konsolidasi barang. <p>b. Jasa berkaitan dengan kepelabuhanan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan depo peti kemas; 2. Pelayanan dan pengisian air tawar dan minyak; 3. Penyediaan fasilitas gudang pendingin; 4. Pengemasan dan pelabelan; dan 5. Fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer. <p>c. Pengusahaan terminal.</p>	<p>a. Provision and/or services of ships, passenger, and goods, including:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wharf docking provision and/or services; 2. Wharf provision and/or service for loading and unloading goods and containers; 3. Provision and/or service of warehouses and stacking fields, loading-unloading equipment, and port equipment; 4. Container terminal provision and/or services; 5. Loading and unloading provision and/or services; and 6. Provision and/or centres of goods distribution and consolidation. <p>b. Port-related services, including:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Container depot provision; 2. Freshwater and oil services and filling; 3. Refrigerated warehouse facility; 4. Packaging and labelling; and 5. Container fumigation and cleaning/ repair. <p>c. Terminal business.</p>



PT Lamong Nusantara Gas

...
...

Status Operasional Operational Status	Telah Beroperasi	Operating
Tahun Pendirian Year of Establishment	1 Oktober 2019	October 1, 2019
Kepemilikan Saham Shareholder	PT PGN LNG Indonesia (51,00%), PT Pelindo Energi Logistik (49,00%)	Pelindo I (25.00%), Pelindo II (25.00%), Pelindo III (25.00%), Pelindo IV (25.00%)
Jumlah Aset Total Assets	Rp...	
Bidang Usaha Business Sectors	Melaksanakan pembangunan, pengelolaan, dan pengoperasian Terminal LNG Jawa Timur yang terdiri dari fasilitas penyimpanan LNG, fasilitas regasifikasi darat LNG, dan fasilitas LNG Filling Station dengan total kapasitas maksimum sebesar 40 MMSCFD.	Melaksanakan pembangunan, pengelolaan, dan pengoperasian Terminal LNG Jawa Timur yang terdiri dari fasilitas penyimpanan LNG, fasilitas regasifikasi darat LNG, dan fasilitas LNG Filling Station dengan total kapasitas maksimum sebesar 40 MMSCFD.



WILAYAH OPERASIONAL PERUSAHAAN

Company Operational Area



Wilayah kegiatan operasional Perusahaan tersebar di 7 provinsi yang terbagi ke dalam 4 regional, yaitu:
The operational areas of the Company are spread across 7 provinces in Indonesia which are divided into four regions, namely:

01.

REGIONAL JAWA TIMUR EAST JAVA REGION

Tanjung Perak, Gresik, Kaliangket, Tanjung Tembaga, Pasuruan, Panarukan.

02.

REGIONAL BALI NUSA TENGGARA BALI NUSA TENGGARA REGION

Tanjung Wangi, Benoa, Celukan Bawang, Ende & Ippi, Waingapu, Kalabahi, Bima, Badas, Lembar, Maumere, Tenau Kupang.



03.

REGIONAL JAWA TENGAH CENTRAL JAVA REGION

Tanjung Emas, TPKS, Tanjung Intan, Tegal.

04.

REGIONAL KALIMANTAN KALIMANTAN REGION

Banjarmasin, Basirih, Pulang Pisau, Kuala Kapuas, Bahaur, Kotabaru, Batulicin, Stagen, Mekar Putih, Gunung Batu Besar, Satui, Pagatan, Sampit, Bagendang, Kumai, Kuala Pembuang, Pagatan-Mendawai, Bumiharjo, Pangkalan Bun, Sukamara, Samuda.



KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM

Share Listing Chronology

Hingga 31 Desember 2019, saham Perusahaan masih dipegang secara penuh oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan persentase kepemilikan saham 100% baik dalam bentuk saham ditempatkan maupun portofolio. Dengan demikian, saham Perusahaan tidak diperdagangkan di bursa efek mana pun serta informasi terkait kronologi pencatatan saham berupa tanggal penetapan rencana pencatatan saham, korespondensi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka persiapan pencatatan saham, dan hasil penilaian dari pihak pemeringkat; jumlah saham; nilai nominal; harga penawaran di awal pencatatan hingga akhir tahun buku; dan nama bursa tempat saham dicatatkan tidak dapat disajikan karena tidak relevan dengan kondisi yang terjadi di Perusahaan saat ini, di mana statusnya sebagai BUMN yang belum melaksanakan pencatatan saham di Bursa Efek mana pun.

As of December 31, 2019, the Company's shares are fully owned (100%) by the Government of Republic of Indonesia, both in the form of issued shares and shares in portfolio. Hence, the Company's shares are not traded in any stock exchanges and information related to share-listing chronology, including the date of share-listing plan, correspondences with related parties to prepare the share listing, and the rating given by rating agencies; the number of shares; nominal value; offering price in the initial listing period until the end of fiscal year; and name of the stock exchange on which the shares are listed, cannot be provided as they are not relevant to the Company's current condition and its status as an SOE that does not list its shares on the stock exchange.

KRONOLOGI PENCATATAN EFEK LAINNYA

Other Securities Listing Chronology

Pelindo III telah menerbitkan obligasi internasional sebanyak 2 kali dengan total senilai USD 1 Miliar, surat utang tersebut terdiri dari USD 500 Juta dengan jangka waktu 10 tahun dan bunga 4,875% yang diperoleh pada tahun 2014 dan USD 500 Juta dengan jangka waktu 5 tahun dan bunga 4,5% yang diperoleh pada tahun 2018.

Dana obligasi internasional tersebut digunakan untuk pelunasan outstanding utang, keperluan pendanaan ekspansi Perusahaan, dan keperluan umum korporasi lainnya.

Pelindo III has issued international bonds twice with a total value of USD 1 billion, the debt securities of which consists of USD 500 million with a tenor of 10 years and 4.875% interest earned in 2014 and USD 500 Million with a tenor of 5 years and 4.5% interest earned in 2018.

The international bond funds are used for repayment of outstanding debt, the Company's expansion funding needs, and other general corporate purposes. In this corporate action, the Company appointed The Bank of New York Mellon acting as Trustee, and in 2020, the



Dalam aksi korporasi ini Perseroan menunjuk The Bank of New York Mellon yang bertindak sebagai Trustee, dan di tahun 2020, Perseroan masih bekerjasama dengan 3 lembaga pemeringkatan internasional, yaitu Fitch Ratings, S&P Global Ratings, dan Moody's Investors Service yang bertindak untuk memberikan penilaian Rating terhadap Perseroan.

Company continued to cooperate with 3 international rating agency, namely Fitch Ratings, S&P Global Ratings, and Moody's Investors Service which serve to provide Rating assessment of Company.

OBLIGASI GLOBAL 2014

Uraian / Description	Informasi / Information
Jenis Sekuritas / Type of Securities	USD Senior Unsecured Fixed Rate Notes
Mata Uang / Currency	US Dollar
Distribusi / Distribution	Rule 144A/Regulation S
Jumlah yang Beredar / Outstanding Amount	USD 500.000.000
Tenor	10 tahun / 10 years
Tanggal Terbit / Issuance Date	1 Oktober 2014 / October 1, 2014
Tanggal Jatuh Tempo / Due Date	1 Oktober 2024 / October 1, 2024
Tingkat Bunga / Interest Rate	4,875% per annum / 4.875% per annum
Tanggal Pembayaran Bunga / Interest Payment Date	31 Maret dan 30 September / March 31 and September 30
<i>Spread to Benchmark</i>	239,5 bps / 239.5 bps
<i>Oversubscribed</i>	13x melebihi size yang ditawarkan / 13x exceeding the size offered <ul style="list-style-type: none"> • Baa3 (<i>Outlook Stable</i>) oleh Moody's, diterbitkan 10 September 2014. / Baa3 (<i>Stable Outlook</i>) by Moody's, issued on September 10, 2014. • BB+ (<i>Outlook Stable</i>) oleh S&P Global Ratings, diterbitkan pada 8 September 2014. / BB+ (<i>Stable Outlook</i>) by S&P Global Ratings, issued on September 8, 2014. • BBB- (<i>Outlook Stable</i>) oleh Fitch Ratings, diterbitkan pada 8 September 2014. BBB- (<i>Stable Outlook</i>) by Fitch Ratings, issued on September 8, 2014.
<i>Rating Senior Unsecured</i>	

OBLIGASI GLOBAL 2018

Uraian / Description	Informasi / Information
Jenis Sekuritas / Type of Securities	USD Senior Unsecured Fixed Rate Notes
Mata Uang / Currency	US Dollar
Distribusi / Distribution	Rule 144A/Regulation S
Jumlah yang Beredar / Outstanding Amount	USD 500.000.000
Tenor	5 tahun / 5 years
Tanggal Terbit / Issuance Date	2 Mei 2018 / May 2, 2018
Tanggal Jatuh Tempo / Due Date	2 Mei 2023 / May 2, 2023
Tingkat Bunga / Interest Rate	4,5% per annum / 4.5% per annum
Tanggal Pembayaran Bunga / Interest Payment Date	2 Mei dan 2 November / May 2 and November 2
<i>Spread to Benchmark</i>	239,5 bps / 239.5 bps
<i>Oversubscribed</i>	2x melebihi size yang ditawarkan / 2x exceeding the size offered <ul style="list-style-type: none"> • Baa3 (<i>Outlook Stable</i>) oleh Moody's, diterbitkan pada 6 Februari 2018. / Baa3 (<i>Stable Outlook</i>) by Moody's, issued on February 6, 2018. • BBB- (<i>Outlook Stable</i>) oleh Fitch Ratings, diterbitkan pada 23 April 2018. / BBB- (<i>Stable Outlook</i>) by Fitch Ratings, issued on April 23, 2018.
<i>Rating Senior Unsecured</i>	



INFORMASI LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

Information on Supporting Institutions and Professions

LEMBAGA PEMERINGKAT EFEK RATING AGENCY

STANDARD AND POOR'S (S&P)	
Alamat / Address	12 Marina Boulevard Level 22, #22-01 MBFC Tower 3 Singapore 018982
Telepon / Telephone	+65 65 306401/+65 65 306403
Faksimile / Facsimile	-
Surel / E-mail	annabelle.teo@spglobal.com
Jasa yang Diberikan / Service Rendered	Lembaga Pemeringkat Rating Obligasi Internasional Pelindo III / Rating Agency for Global Bonds of Pelindo III
Imbalan / Fee	USD 80.000,00/tahun / USD 80,000.00/year
Surat Penunjukan / Appointment Letter	<i>Mandate Letter</i> dari Direktur Utama Pelindo III terkait Penerbitan Global Bond Pelindo III tanggal 1 Juli 2014 / Mandate Letter from the President Director of Pelindo III related to the Issuance of Global Bonds of Pelindo III dated July 1,2014
Periode Penugasan / Assignment Period	Sampai dengan tahun 2024 / Until 2024

MOODY'S	
Alamat / Address	Moody's Investor Service Singapore Pte. Ltd. 50 Raffles Place #23-06, Singapore Land Tower, Singapore 048623
Telepon / Telephone	+65 6398 8300
Faksimile / Facsimile	-
Surel / E-mail	daryl.soh@moodys.com
Jasa yang Diberikan / Service Rendered	Lembaga Pemeringkat Rating Obligasi Internasional Pelindo III / Rating Agency for Global Bonds of Pelindo III
Imbalan / Fee	USD 72.000,00/tahun / USD 72,000.00/year
Surat Penunjukan / Appointment Letter	<i>Mandate Letter</i> dari Direktur Utama Pelindo III terkait Penerbitan Global Bond Pelindo III tanggal 1 Juli 2014 / Mandate Letter from the President Director of Pelindo III related to the Issuance of Global Bonds of Pelindo III dated July 1,2014
Periode Penugasan / Assignment Period	Sampai dengan tahun 2024 / Until 2024

**FITCH RATINGS**

Alamat / Address	One Raffles Quay, South Tower #22-11, Singapore 048583
Telepon / Telephone	+65 6796 7200
Faksimile / Facsimile	-
Surel / E-mail	louis.pang@fitchratings.com
Jasa yang Diberikan / Service Rendered	Lembaga Pemeringkat Rating Obligasi Internasional Pelindo III / Rating Agency for Global Bonds of Pelindo III
Imbalan / Fee	USD 70.000,00/tahun / USD 70,000.00/year
Surat Penunjukan / Appointment Letter	<i>Mandate Letter</i> dari Direktur Utama Pelindo III terkait Penerbitan Global Bond Pelindo III tanggal 1 Juli 2014 / Mandate Letter from the President Director of Pelindo III related to the Issuance of Global Bonds of Pelindo III dated July 1, 2014
Periode Penugasan / Assignment Period	Sampai dengan tahun 2024 / Until 2024

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
PUBLIC ACCOUNTING FIRM****ERNST & YOUNG (KAP PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA)**

Alamat / Address	Indonesia Stock Exchange Building Tower 2-7 th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, Indonesia 12190
Telepon / Telephone	+62 21 5289 5000
Faksimile / Facsimile	+62 21 5289 4100
Surel / E-mail	dudi.muhammad.kurniawan@id.ey.com
Jasa yang Diberikan / Service Rendered	<p>a. Melaksanakan Pemeriksaan Umum/<i>General Audit</i> (dengan pelaksanaan interim dan akhir tahun) atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) per 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, termasuk dan tidak terbatas pada pengujian efektivitas atas sistem pengendalian internal dan sistem teknologi informasi yang berdampak terhadap laporan keuangan. / Carry out a General Audit (with interim and end-of-year implementation) on the Consolidated Financial Statements of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) as of December 31, 2020, and for the year ended on December 31, 2020 in accordance with the applicable Financial Accounting Standards, including and not limited to testing the effectiveness of internal control systems and information technology systems that affect the financial statements.</p> <p>b. Melaksanakan audit atas Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). / Carry out an audit on the Partnership and Community Development Program (PKBL) Report.</p> <p>c. Melaksanakan prosedur yang disepakati atas Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan dan Laporan Penilaian KPI. / Carry out the agreed procedures of the Company's Performance Evaluation Report and KPI Assessment Report.</p> <p>d. Melaksanakan audit kepatuhan terhadap peraturan-peraturan dan pengendalian intern. / Carry out an audit of compliance with laws and regulations and internal control.</p> <p>e. Melaksanakan penugasan prosedur yang disepakati atas pelaporan kegiatan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri sebagaimana diatur dalam PBI No. 16/22/PBI/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 18/4/PBI/2016. / Carry out the agreed procedure assignment for reporting activities for applying the prudent principle in managing foreign debt as stipulated in PBI No. 16/22/PBI/2014 as amended by the Regulation of Bank Indonesia No. 18/4/PBI/2016</p>
Imbalan / Fee	Rp3.498.000.000
Surat Penunjukan / Appointment Letter	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan / Company's Annual General Meeting of Shareholders
Periode Penugasan / Assignment Period	132 hari kerja kalender / 132 working days



KONSULTAN HUKUM LEGAL CONSULTANTS

PRAMONO & PARTNERS

Alamat / Address	Jl. Daruf Aisyah III No. 9, Gresik, Jawa Timur
Telepon / Telephone	+62 31 295 7678
Faksimile / Facsimile	+62 31 395 7678
Surel / E-mail	kukuhpramono@yahoo.com
Jasa yang Diberikan / Service Rendered
Imbalan / Fee	Rp...
Surat Penunjukan / Appointment Letter
Periode Penugasan / Assignment Period

SIREGAR SETIAWAN MANALU PARTNERSHIP

Alamat / Address	ANZ Tower Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A, Jakarta
Telepon / Telephone	+62 1-5793 2649/+62 1-5793 2653
Faksimile / Facsimile	+62 21 5785 4083
Surel / E-mail	ssmp@ssmp.co
Jasa yang Diberikan / Service Rendered
Imbalan / Fee	Rp...
Surat Penunjukan / Appointment Letter
Periode Penugasan / Assignment Period

SIDABUKKE CLAN & ASSOCIATE

Alamat / Address	Jl. Raya Darmo No. 135 B
Telepon / Telephone	+62 31 567 7511
Faksimile / Facsimile	+62 31 568 6614
Surel / E-mail	lawoffice_sidabukke@yahoo.com
Jasa yang Diberikan / Service Rendered
Imbalan / Fee	Rp...
Surat Penunjukan / Appointment Letter
Periode Penugasan / Assignment Period



NOTARIS NOTARIES

HENI YUNIANTIN, S.H., M.KN.

Alamat / Address	Jl. Melon Tengah No. 16, Jasmine Park, Pondok Candra, Surabaya
Telepon / Telephone	+62 813 3100 0497
Faksimile / Facsimile	-
Surel / E-mail	heni.yuniantin@gmail.com
Jasa yang Diberikan / Service Rendered
Imbalan / Fee	Rp...
Surat Penunjukan / Appointment Letter
Periode Penugasan / Assignment Period

EMI SUSILOWATI, S.H.

Alamat / Address	Graha Mandiri Lt. 3A Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat
Telepon / Telephone	+62 21 3983 2849, +62 811 188 2304
Faksimile / Facsimile	+62 21 3983 2749
Surel / E-mail	emi_susilowati@yahoo.com
Jasa yang Diberikan / Service Rendered
Imbalan / Fee	Rp...
Surat Penunjukan / Appointment Letter
Periode Penugasan / Assignment Period



ALAMAT KANTOR PUSAT, PERWAKILAN, DAN CABANG PERUSAHAAN

Address of Head Office, Representative Office, and Branch Offices

KANTOR PUSAT / HEAD OFFICE

Jl. Perak Timur No. 610
Surabaya, Jawa Timur, Indonesia 60155
Telepon : +62 31 329 8631-37
Faksimile : +62 31 329 5207
Situs Web : www.pelindo.co.id
Surel : humas@pelindo.co.id; info@pelindo.co.id

KANTOR PERWAKILAN / REPRESENTATIVE OFFICE

Tamansari Parama Office Tower, Lantai 7
Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 84-86
Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon : +62 21 2234 6068

KANTOR ENTITAS ANAK / SUBSIDIARY OFFICES

PT TERMINAL PETI KEMAS SURABAYA
Jl. Tanjung Mutiara 1, Surabaya, Jawa Timur 60177
Telepon : +62 31 32833265-70
Faksimile : +62 31 329 1628
Situs Web : www.tps.co.id

PT BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA
Jl. Perak Barat No. 379, Surabaya, Jawa Timur
Telepon : +62 31 3291596-97
Faksimile : +62 31 3291598
Situs Web : www.bjti.co.id
Surel : info@bjti.co.id

PT PELINDO MARINE SERVICE
Jl. Prapat Kurung Utara No. 58, Surabaya, Jawa Timur 60165
Telepon : +62 31 3282321, 3282278
Faksimile : +62 31 3282309
Situs Web : www.pelindomarine.com
Surel : info@pelindomarine.com

PT PELINDO HUSADA CITRA
Jl. Prapat Kurung Selatan No. 1, Surabaya, Jawa Timur
Telepon : +62 31 3294801-3
Faksimile : +62 31 3294804
IGD 24 Jam: +62 31 3294118
Situs Web : www.rspchc.co.id
Surel : marketing@rspchc.co.id

PT TERMINAL TELUK LAMONG

Jl. Raya Tambak Osowilangun KM 12, Surabaya
Telepon : +62 31 99001500
Faksimile : +62 31 99001480, 99001490
Situs Web : www.teluklamong.co.id
Surel : terminal@teluklamong.co.id

PT PELINDO DAYA SEJAHTERA

Gedung Gapura Surya Nusantara, Tanjung Perak, Surabaya
Telepon : +62 31 51166384-5

REGIONAL JAWA TIMUR / EAST JAVA REGION

PELABUHAN TANJUNG PERAK

Jl. Perak Timur No. 620, Surabaya, Jawa Timur 60165
Telepon : +62 31 3291992-6
Faksimile : +62 31 3293994
Surel : tanjungperak@pelindo.co.id

PELABUHAN KALIANGGET

Jl. Raya Pelabuhan No. 6 Kalianget, Sumenep,
Jawa Timur 69471
Telepon : +62 328 66447 – 661926
Surel : tanjungperak@pelindo.co.id

PELABUHAN PASURUAN

Jl. Komodori Yos Sudarso No. 150 Pasuruan,
Jawa Timur 67123
Telepon : +62 343 424725
Surel : tanjungperak@pelindo.co.id

PELABUHAN GRESIK

Jl. Yos Sudarso No. 1 Gresik, Jawa Timur 61114
Telepon : +62 31 3981941, 3974542
Surel : gresik@pelindo.co.id

PELABUHAN TANJUNG TEMBAGA

Jl. Tanjung Tembaga Timur No. 10, Probolinggo,
Jawa Timur 67201
Telepon : +62 335 421363/421385
Faksimile : +62 335 427123
Surel : tanjungtembaga@pelindo.co.id

PELABUHAN PANARUKAN

Jl. Pelabuhan Panarukan No. 10 Panarukan, Situbondo,
Jawa Timur 68351
Telepon : +62 338 672416
Surel : tanjungperak@pelindo.co.id

**REGIONAL BALI NUSA TENGGARA /
BALI NUSA TENGGARA REGION****PELABUHAN TANJUNG WANGI**

Jl. Raya Situbondo, Ketapang, Kabupaten Banyuwangi,
Jawa Timur 68455

Telepon : +62 333 510636

Faksimile : +62 333 510484

Surel : tanjungwangi@pelindo.co.id

PELABUHAN CELUKAN BAWANG

Jl. Pelabuhan Celukan Bawang No. 35, Buleleng, Bali 81155

Telepon : +62 362 92333

Faksimile : +62 362 92893

Surel : celukanbawang@pelindo.co.id

PELABUHAN WAINGAPU

Jl. Nanga Mesi No. 16, Waingapu, Sumba Timur,
Nusa Tenggara Timur 87116

Telepon : +62 381 21150

Surel : waingapu@pelindo.co.id

PELABUHAN BIMA

Jl. RE Martadinata No. 1, Bima, Nusa Tenggara Barat

Telepon : +62 374 43726

Faksimile : +62 374 42353

Surel : bima@pelindo.co.id

PELABUHAN LEMBAR

Jl. Raya Pelabuhan No. 5, Lombok Barat,
Nusa Tenggara Barat 83364

Telepon : +62 370 681260

Faksimile : +62 370 681011

Surel : lembar@pelindo.co.id

PELABUHAN TENAU KUPANG

Jl. Yos Sudarso No. 23, Tenau Kupang, Kupang,
Nusa Tenggara Timur 85351

Telepon : +62 380 890 071/890 072

Faksimile : +62 380 890 072

Surel : tenuakupang@pelindo.co.id

PELABUHAN BENOA

Jl. Raya Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali 80222

Telepon : +62 361 720560

Faksimile : +62 361 723351

Surel : benoa@pelindo.co.id

PELABUHAN ENDE DAN IPPI

Jl. Hatta No. 1, Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur 86361

Telepon : +62 381 21150

Surel : ende@pelindo.co.id

PELABUHAN KALABAH

Jl. RE Martadinata No. 3 Kalabahi, Alor,
Nusa Tenggara Timur 85813

Telepon : +62 386 21023

Surel : ende@pelindo.co.id

PELABUHAN BADAS

Jl. Labuhan Badas No. 11, Sumbawa,

Nusa Tenggara Timur 84351

Telepon : +62 371 2629120

Surel : badas@pelindo.co.id

PELABUHAN MAUMERE

Jl. Kureng No. 2, Maumere, Nusa Tenggara Timur 86111

Telepon : +62 382 21054

Faksimile : +62 382 21618

Surel : maumere@pelindo.co.id

REGIONAL JAWA TENGAH / CENTRAL JAVA REGION**PELABUHAN TANJUNG EMAS**

Jl. Coaster No. 10, Semarang, Jawa Tengah 50116

Telepon : +62 24 3545721-4

Faksimile : +62 24 3542649

Surel : tanjungemas@pelindo.co.id

PELABUHAN TANJUNG INTAN

Jl. Laut Jawa, Cilacap, Jawa Tengah 53213

Telepon : +62 282 534651-2

Faksimile : +62 282 534653

Surel : tanjungintan@pelindo.co.id

TERMINAL PETI KEMAS SEMARANG (TPKS)

Jl. Coaster No. 10A, Semarang, Jawa Tengah 50116

Telepon : +62 24 3586219

Faksimile : +62 24 3581242

Surel : tpks@pelindo.co.id

PELABUHAN TEGAL

Jl. RE Martadinata No. 9 Tegal, Jawa Tengah 52111

Telepon : +62 83 351488

Faksimile : +62 83 353369

Surel : tjms-rtgl@pelindo.co.id



REGIONAL KALIMANTAN / KALIMANTAN REGION

PELABUHAN BANJARMASIN

Jl. Barito Hilir Trisakti No. 6 Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70119

Telepon : +62 511 3365866
Surel : banjarmasin@pelindo.co.id

PELABUHAN PULANG PISAU

Jl. Samudra No. 1 Kahayan Hilir, Pulang Pisau, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 74861

Telepon : +62 513 61128
Surel : banjarmasin@pelindo.co.id

PELABUHAN BAHAU

Desa Tanjung Perawan, Kahayan Kuala, Pulang Pisau,
Kalimantan Tengah 74872

Telepon : +62 513 61128
Surel : banjarmasin@pelindo.co.id

PELABUHAN BATULICIN

Jl. Pelabuhan Samudera No. 124, Tanah Bumbu,
Kalimantan Selatan 72271

Telepon : +62 518 70305
Surel : batulicin@pelindo.co.id

PELABUHAN MEKAR PUTIH

Jl. Pelabuhan Utama Batubara, Mekar Putih, Kotabaru,
Kalimantan Selatan 72153

Telepon : +62 518 38866
Surel : mekarputih@pelindo.co.id

PELABUHAN SATUI

Jl. Pelabuhan Satui No. 06, Satui Barat RT 05 RW 03
Satui, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 72275

Telepon : +62 51870305
Surel : batulicin@pelindo.co.id

PELABUHAN BASIRIH

Jl. Teluk Mendung No. 22, RT 17, RW 1 Mantuil Raya
Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70119

Telepon : +62 511 3365866
Surel : banjarmasin@pelindo.co.id

PELABUHAN KUALA KAPUAS

Jl. Sudirman No. 3 Selat Hilir, Kapuas,
Kalimantan Selatan 73513

Telepon : +62 513 61128
Surel : banjarmasin@pelindo.co.id

PELABUHAN KOTABARU

Jl. Raya Stagen KM. 11 No. 9 Kotabaru, Stagen,
Kalimantan Selatan 72151

Telepon : +62 518 21214
Faksimile : +62 518 22136
Surel : kotabaru@pelindo.co.id

PELABUHAN STAGEN

Jl. Raya Stagen KM. 11 No. 9 Kotabaru, Stagen,
Kalimantan Selatan 72151

Telepon : +62 518 21214
Surel : kotabaru@pelindo.co.id

PELABUHAN GUNUNG BATU BESAR

Desa Pa'paan, Sampanahan, Kotabaru,
Kalimantan Selatan 72166

Telepon : +62 518 21055
Surel : kotabaru@pelindo.co.id

PELABUHAN PAGATAN

Jl. Mangkubimi No. 36, Kelurahan Kota Pagatan
Kec, Kusan Hilir, Kab. Tanah Bambu,
Kalimantan Selatan 72273

Telepon : +62 518 70305
Surel : batulicin@pelindo.co.id

PELABUHAN SAMPIT

Jl. Usman Harun No. 2, Sampit, Kotawaringin Timur,
Kalimantan Tengah 74322

Telepon : +62 531 21055
Surel : sampit@pelindo.co.id

PELABUHAN KUMAI

Jl. Bendahara No. 248, Kumai, Kotawaringin Barat 74181

Telepon : +62 532 61468
Surel : kumai@pelindo.co.id

PELABUHAN PAGATAN MENDAWAI

Jl. Merdeka No. 4, RT 01, RW 1, Katingan Kuala, Katingan,
Kalimantan Tengah 74464

Telepon : +62 518 70305
Surel : sampit@pelindo.co.id

PELABUHAN PANGKALAN BUN

Jl. Pangeran Antasari Gg. Kelapa Sawit, Pangkalan Bun,
Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 74114

Telepon : +62 532 61648
Surel : kumai@pelindo.co.id

PELABUHAN SAMUDA

Jl. Haji Umar Hasyim Samuda, Mentaya Hilir,
Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah 74363

Telepon : +62 518 70305
Surel : sampit@pelindo.co.id

PELABUHAN BAGENDANG

Jl. HM Arsyad KM. 23, Sampit, Bagendang,
Kalimantan Tengah

Telepon : +62 532 61648
Surel : sampit@pelindo.co.id

PELABUHAN KUALA PEMBUANG

Jl. AS Nasution, Kompleks Pelabuhan, Seruan,
Kuala Pembuang, Kalimantan Tengah 74212

Telepon : +62 532 61648
Surel : sampit@pelindo.co.id

PELABUHAN BUMI HARJO

Jl. Pelabuhan CPO RT 18 Tanjung Kalaf, Kumai,
Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 74181

Telepon : +62 532 2074500
Surel : kumai@pelindo.co.id

PELABUHAN SUKAMARA

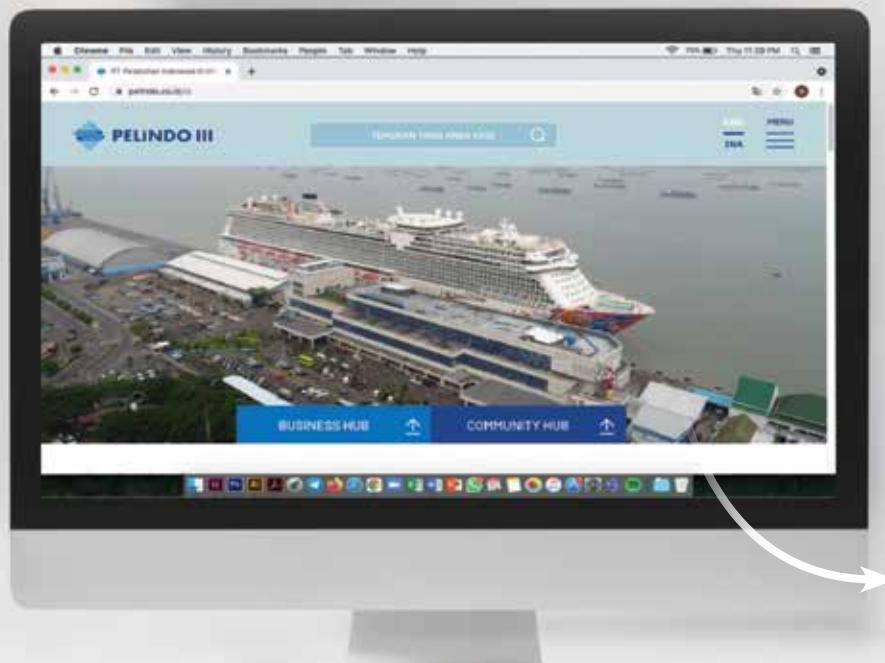
Jl. Pelabuhan No. 124, RT 01 RW 03, Mendawai Sukamara,
Sukamara, Kalimantan Tengah 74172

Telepon : +62 532 26016
Surel : kumai@pelindo.co.id



INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN

Information on Website



SCAN HERE



Pelindo III memiliki website sebagai sumber informasi mengenai kinerja Perusahaan yang disajikan secara transparan bagi investor serta seluruh pemangku kepentingan lainnya. Website Perusahaan dapat diakses melalui www.pelindo.co.id. Pada website tersebut, seluruh pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi mengenai:

Informasi Pemegang Saham sampai dengan Pemilik Akhir Individu

Informasi mengenai Pemegang Saham Perseroan dapat diakses di situs web Perseroan pada kategori "Info Investor" dan subkategori "Pemegang Saham".

Isi Kode Etik

Informasi mengenai Kode Etik Perusahaan dapat diakses di situs web Perseroan pada kategori "Tata Kelola" dan subkategori "Tata Kelola Perusahaan yang Baik".

The Company has established an official website as a source of information on the Company's performance that is transparently provided for investors as well as other stakeholders. The website can be accessed on www.pelindo.co.id. On it, all stakeholders may obtain the following information:

Information on Shareholders up to Individual Final Shareholder

Information on Shareholders of the Company is accessible on the Company's website under the "Investor" category and "Shareholder" sub-category.

Contents of Code of Conduct

Information on Code of Conduct of the Company is accessible on the Company's website under the "Governance" category and "Good Corporate Governance" sub-category.



Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Informasi mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat diakses di situs web Perusahaan pada kategori "Informasi Publik" dengan terlebih dahulu mendaftar untuk mengajukan permohonan data.

Laporan Keuangan Tahunan Terpisah dan Laporan Tahunan

Informasi mengenai Laporan Keuangan Tahunan Terpisah dan Laporan Tahunan dapat diakses di situs web Perseroan pada kategori "Info Investor" dan subkategori "Laporan" dengan terlebih dahulu mendaftar untuk mengajukan permohonan data.

Data yang dilampirkan dalam informasi Laporan Keuangan selalu kami perbarui setiap tiga bulan (triwulan) dengan menyediakan sarana pengunduhan yang dapat memudahkan pemangku kepentingan dalam memperoleh data tersebut.

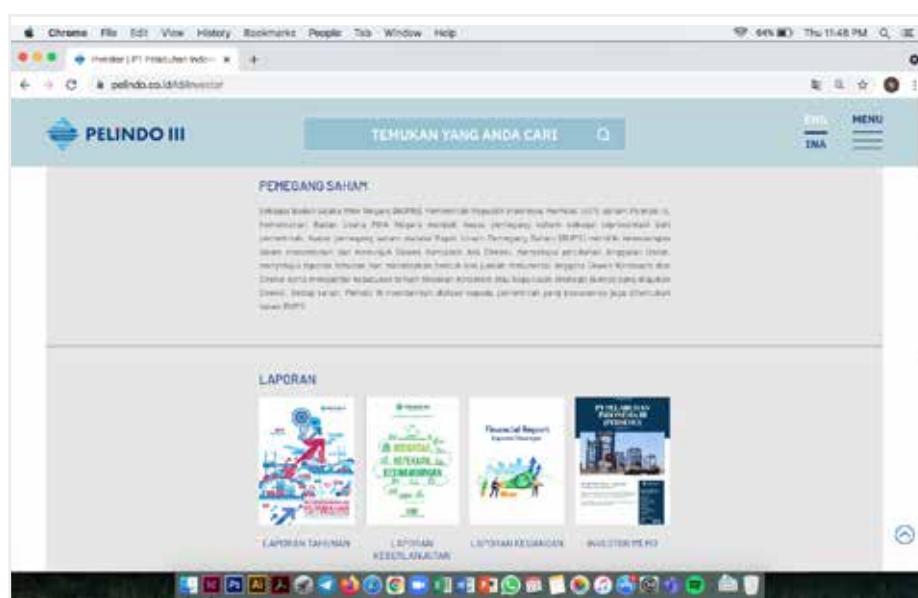
Information on General Meeting of Shareholders (GMS)

Information on General Meeting of Shareholders (GMS) is accessible on the Company's website under the "Public Information" category by registering at the website beforehand in order to request for the data.

Separate Annual Financial Statements and Annual Report

Information on Separate Annual Financial Statements and Annual Reports is accessible on the Company's website under the "Investor" category and "Reporting" sub-category by registering at the website beforehand in order to request for the data.

Data provided in the Financial Statements are renewed every three months (quarterly) and the stakeholders can obtain the data through a download button provided on the webpage.





Profil Dewan Komisaris dan Direksi

Informasi mengenai Profil Dewan Komisaris dan Direksi secara lengkap beserta legalitas pengangkatannya dapat diakses di situs web Perseroan pada kategori "Profil Perusahaan" dan subkategori "Manajemen".

Profiles of Board of Commissioners and Board of Directors

Comprehensive information on Profiles of the Board of Commissioners and Board of Directors, including the legality of their appointment, is accessible on the Company's website under the "Company Profile" category and "Management" sub-category.



Piagam Dewan Komisaris, Direksi, Komite, dan Unit Audit Internal

Informasi mengenai piagam Dewan Komisaris, Direksi, Komite, dan Unit Audit Internal dapat diakses di situs web Perseroan pada kategori "Tata Kelola" dan subkategori "Tata Kelola Perusahaan yang Baik".

Charters of Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit

Information on charters of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit is accessible on the Company's website under the "Governance" category and "Good Corporate Governance" sub-category.



Pengadaan

Sebagai media registrasi bagi seluruh mitra dan calon mitra Perseroan untuk dapat ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Selain sebagai media registrasi juga berperan sebagai media informasi terkait dengan pengadaan-pengadaan yang dibutuhkan baik bagi Perseroan maupun Anak Perusahaan.

Procurement

As a registration media for all Company's partners and potential partners to participate in the goods and services procurement activities. Aside from being a registration media, it also becomes an information media related to the procurement activities required by the Company and Subsidiaries.



Sistem Pelaporan Pelanggaran

Merupakan media yang disediakan Perseroan terkait dengan pengaduan indikasi pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di lingkungan Perseroan. Media ini tidak hanya dikhususkan bagi karyawan, namun juga bagi seluruh masyarakat.

Whistleblowing System

Whistleblowing System is a media facilitated by the Company regarding complaint on violations or fraud activities that occur within the Company. This media is not only specified for all employees but also the public in general.

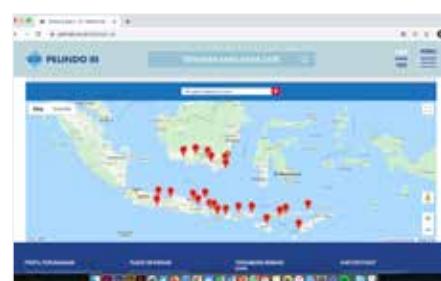


Peta Situs

Merupakan media informasi bagi masyarakat terkait dengan wilayah kerja, kantor jaringan, dan kantor cabang berikut letak koordinatnya.

Sitemap

A sitemap is a public information media containing the work area, network offices, and branch offices, as well as their coordinates.





PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN SATUAN PENGAWASAN INTERN

Competency Development of Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit

Di sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Intern Perseroan telah mengikuti sejumlah kegiatan pendidikan / pelatihan / seminar / lokakarya yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas masing-masing individu demi tercapainya visi, misi, dan tujuan Perseroan, antara lain:

Over the course of 2020, the Board of Commissioners, Board of Directors, Committee's members, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit's members of the Company have participated in various education/training/seminar/workshop activities aimed at elevating the competence and capability of each individual for the achievement of Company's vision, mission, and objects. The activities are described below:

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS TAHUN 2020

COMPETENCY DEVELOPMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS IN 2020

Nama & Jabatan / Name & Position	Nama Pelatihan/ Seminar/ Lokakarya / Title of Training / Seminar/ Workshop	Tempat / Venue	Tanggal / Date	Penyelenggara / Organizer
Marsetio Komisaris Utama / President Commissioner
Heru Sukanto Komisaris / Commissioner
Otto Ardianto Komisaris / Commissioner
Ridwan Djamaruddin Komisaris / Commissioner
Ali Mochtar Ngabalin Komisaris / Commissioner
Dedi Syarif Usman Komisaris / Commissioner



**PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI
TAHUN 2020**

**COMPETENCY DEVELOPMENT OF BOARD OF
DIRECTORS IN 2020**

Nama & Jabatan / Name & Position	Nama Pelatihan/ Seminar/ Lokakarya / Title of Training / Seminar/ Workshop	Tempat / Venue	Tanggal / Date	Penyelenggara / Organizer
U. Saefudin Noer Direktur Utama / President Director
Putut Sri Muljanto Direktur Operasi dan Komersial / Operations and Commercial Director
Boy Robyanto Direktur Teknik / Engineering Director
Edi Priyanto Direktur Sumber Daya Manusia / Human Capital Director
Endot Endrardono Direktur Keuangan / Finance Director
Kokok Susanto Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis / Business Transformation and Development Director

**PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS
DEWAN KOMISARIS TAHUN 2020**

**COMPETENCY DEVELOPMENT OF
SECRETARY OF BOARD OF COMMISSIONERS
IN 2020**

Nama & Jabatan / Name & Position	Nama Pelatihan/ Seminar/ Lokakarya / Title of Training / Seminar/ Workshop	Tempat / Venue	Tanggal / Date	Penyelenggara / Organizer
...
...

**PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE
MANAJEMEN RISIKO DAN GCG TAHUN 2020**

**COMPETENCY DEVELOPMENT OF RISK
MANAGEMENT AND GCG COMMITTEE IN 2020**

Nama & Jabatan / Name & Position	Nama Pelatihan/ Seminar/ Lokakarya / Title of Training / Seminar/ Workshop	Tempat / Venue	Tanggal / Date	Penyelenggara / Organizer
...
...



PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2020

COMPETENCY DEVELOPMENT OF CORPORATE SECRETARY IN 2020

Nama & Jabatan / Name & Position	Nama Pelatihan/ Seminar/ Lokakarya / Title of Training / Seminar/ Workshop	Tempat / Venue	Tanggal / Date	Penyelenggara / Organizer
Ardhy Wahyu Basuki Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN PENGAWASAN INTERN TAHUN 2020

COMPETENCY DEVELOPMENT OF INTERNAL AUDIT UNIT IN 2020

Nama & Jabatan / Name & Position	Nama Pelatihan/ Seminar/ Lokakarya / Title of Training / Seminar/ Workshop	Tempat / Venue	Tanggal / Date	Penyelenggara / Organizer
Sapto Wasono Soebagio Kepala SPI / Head of Internal Audit Unit	Diklat Khusus Kepala SPI / Special Education and Training of Head of Internal Audit Unit	Online	16-20 Juli 2020 / 16-20 July 2020	PPAK Malang
<ul style="list-style-type: none"> • M. Taufik Hardjanto Pengawas bid. Operasi / Auditor of Operations • Heka Pambudi Pengawas bid. Keuangan / Auditor of Finance • Fernandes A. Ginting Pengawas bid. SDM / Auditor of HC • Donny Simon MH Auditor Madya Bid. Opr & P. Bisnis / Middle-Level Auditor of Operations and Business Development • Agus Poernomo Auditor Utama Bidang Teknik / Senior Auditor of Engineering • Dian Irawati Auditor Utama Bidang Teknik / Senior Auditor of Engineering • Triana Usman Auditor Utama Bidang TI / Senior Auditor of IT • Arendra Haryo P Auditor Utama Bidang Teknik / Senior Auditor of Engineering • Firmansyah Novie Q Auditor Madya Bidang SDM / Middle-Level Auditor of HC • Jufrianto Siahaan Auditor Madya Bidang SDM / Middle-Level Auditor of HC • Agustin Nurul M Auditor Pertama Bidang Keuangan / Senior Auditor of Finance • Henny Nur Aini Auditor Madya Bidang SDM / Middle-Level Auditor of HC 	Diklat Sertifikasi PIA / PIA Certification Education and Training (Auditor Utama / Senior Auditor)	Cabang Tanjung Perak dan Kantor Pusat / Tanjung Perak Branch and Head Office	07-21 September 07-21 September 2020	PPAK Malang



Nama & Jabatan / Name & Position	Nama Pelatihan/ Seminar / Lokakarya / Title of Training / Seminar/ Workshop	Tempat / Venue	Tanggal / Date	Penyelenggara / Organizer
<ul style="list-style-type: none"> Saimin Auditor Pertama Bid Opr & P. Bisnis / Senior Auditor of Operations & Business Development Krisnawan Eko Arani Auditor Pertama Bid Opr & P. Bisnis / Senior Auditor of Operations & Business Development Doddy Irawan Auditor Pertama Bidang Keuangan / Senior Auditor of Finance Tri Sakti Ambarwati Auditor Madya Bidang SDM / Middle-Level Auditor of HC Pandita Wisna Patria Auditor Pertama Bidang Keuangan / Senior Auditor of Finance Nugroho Staf Muda III Adm. & Evaluasi SPI / Junior Staff III of Adm. & Evaluation of Internal Audit Unit 	Diklat Sertifikasi PIA / PIA Certification Education and Training (Auditor Madya / Middle-Level Auditor)	Cabang Tanjung Perak dan Kantor Pusat / Tanjung Perak Branch and Head Office	07-21 September 2020 / 07-21 September 2020	PPAK Malang
<ul style="list-style-type: none"> Sapto Wasono Soebagio Kepala SPI / Head of Internal Audit Unit M. Taufik Hardjanto Pengawas bid. Operasi / Auditor of Operations Heka Pambudi Pengawas bid. Keuangan / Auditor of Finance Fernandes A. Ginting Pengawas bid. SDM, Umum, Hukum / Auditor of HC, GA, and Legal Yoki Hendri W Pengawas bid. Teknik / Auditor of Engineering 	Seminar Strategi Peningkatan Kapabilitas SPI dalam mendukung Kinerja Perusahaan / Seminar on Strategy of Capabiity Improvement of Internal Audit Unit in supporting the Company's Performance	Batu	22 - 23 Oktober 2020 / 22 – 23 October 2020	FKSPI
<ul style="list-style-type: none"> Yoki Hendri W Pengawas bid. Teknik / Auditor of Engineering Sigit Poernomo Auditor Utama Bidang Keuangan / Senior Auditor of Finance Jusak Hadi Winarto Auditor Pertama Bidang Teknik / Senior Auditor of Engineering Fatriah Pelaksana Junior Madya II Adm. SPI / Middle-Level II Junior of Internal Audit Unit Adm. 	Diklat Dasar-dasar Audit / Audit Basics Education and Training	Online	11-20 Oktober 2020 / 11-20 October 2020	PPAK Malang
Semua Pegawai SPI / All Internal Audit Unit Employees	Webinar Strategic Management In-Crisis / In-Crisis Strategic Management Webinar	Online	21 Oktober 2020 / 21 October 2020	Universitas Airlangga / Airlangga University
Semua Pegawai SPI / All Internal Audit Unit Employees	Smart Financial Planning in VUCA World	Online	16 Oktober 2020 / 16 October 2020	Bank Mandiri



TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS OVERVIEW OF BUSINESS SUPPORT







SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN CAPITAL

Perseroan meyakini bahwa tujuannya dalam menciptakan SDM unggul dan berdaya saing tinggi harus diimbangi dengan upaya dalam memperbarui dan mengembangkan kompetensi secara berkala sesuai dengan perkembangan industri dan perkembangan bisnis yang dinamis.

The Company believes that its goal of creating excellent and highly competitive human resources must be balanced with efforts to regularly update and develop competencies in accordance with industrial developments and dynamic business developments.



KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDM

Menjelaki fase baru dalam *masterplan* transformasi bisnis, Pelindo III mempertegas langkah untuk menjadi *industry leader*. Bersamaan dengan pencapaian ini, Perseroan memperkuat kapabilitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki sebagai penggerak keseimbangan roda bisnis dan rantai utama yang tidak hanya menjaga kelangsungan usaha Perseroan, tetapi juga mempertahankan keunggulan dan daya saing di tengah pertumbuhan industri yang kian dinamis. Guna memenuhi kebutuhan tersebut, Perseroan menerapkan kebijakan pengelolaan SDM yang komprehensif dan disempurnakan secara berkala dengan menyesuaikan arah pengembangan usaha serta pencapaian visi, misi, dan tujuan Perseroan, meliputi:

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT POLICY

Exploring a new phase in the business transformation master plan, Pelindo III emphasized its steps to become an industry leader. Along with this achievement, the Company strengthens the capabilities and capacities of its Human Resources (HC) as a driving force for the balance of the business and core chains that not only maintain the Company's business continuity, but also maintain excellence and competitiveness amid an increasingly dynamic industrial growth. In order to meet these needs, the Company implements a comprehensive HC management policy and is improved regularly by adjusting the direction of business development and the achievement of the Company's vision, mission, and objectives, including:



1. Struktur organisasi yang kondusif mendorong pemberdayaan;
 2. Mewujudkan budaya organisasi yang mendukung produktivitas pegawai;
 3. Pengelolaan manajemen kinerja yang efektif;
 4. Pelatihan dan pengembangan pegawai;
 5. Pola karier berdasarkan pemenuhan standar kompetensi jabatan;
 6. Pengelolaan pegawai bertahta sebagai strategi *retain*;
 7. Sistem imbal jasa berkeadilan sesuai kinerja;
 8. Integrasi data dan informasi kepegawaian.
1. An organizational structure that is conducive to empowerment;
 2. Creating an organizational culture that supports employee productivity;
 3. Effective performance management;
 4. Employee training and development;
 5. Career path based on the fulfillment of job competency standards;
 6. Management of talented employees as a retention strategy;
 7. A fair service payment system according to performance;
 8. Integration of personnel data and information.



Penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan SDM turut berpedoman pada regulasi dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, ketentuan yang berlaku di internal Perusahaan, serta referensi lainnya. Landasan kebijakan pengelolaan SDM yang berlaku di Perseroan meliputi:

- **Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**

Referensi legal-formal utama dalam perumusan kebijakan pengelolaan SDM di lingkungan Perseroan, yaitu dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Dalam menetapkan kebijakan yang diperlukan, regulasi tersebut telah mengatur banyak aspek yang diperlukan seperti:

- a. Kesetaraan dan pemenuhan hak asasi manusia;
- b. Perencanaan dan informasi tenaga kerja;
- c. Penyelenggaraan pelatihan kerja;
- d. Penempatan tenaga kerja;
- e. Hubungan kerja;
- f. Perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan tenaga kerja;
- g. Hubungan industrial; dan
- h. Pemutusan hubungan kerja.

- **Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Perusahaan**

Dalam tahapan selanjutnya, dasar kebijakan pengelolaan SDM di lingkungan Perseroan juga mengacu pada Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) yang muatannya telah merujuk pada substansi yang terkandung di dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 dan telah dilakukan pengembangan serta penyesuaian kembali dengan kondisi usaha di lingkungan Perseroan.

- **Rencana Kerja Perusahaan**

Guna menyinergikan arah pengembangan usaha Perseroan dengan kebijakan dan strategi pengelolaan SDM di lingkungan Perseroan, melalui Direktorat Sumber Daya Manusia, Pelindo III melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan dengan Rencana Kerja Perusahaan. Penyesuaian terhadap Rencana Kerja Perusahaan diperlukan agar pilar SDM dapat dimaksimalkan untuk mendukung secara penuh atas rencana yang ditetapkan.

The establishment of HC management policies and strategies refers to the prevailing laws and regulations in Indonesia, provisions that apply in the Company, as well as other references. The foundation of HC management policies that apply in the Company includes:

- **Law No. 13 of 2003 on Manpower**

The primary legal-formal reference in formulating human capital management policy in the Company is the provisions stipulated in Law No. 13 of 2013 on Manpower. In determining the required policies, this regulation stipulates various aspects, such as:

- a. Equality and fulfilment of human rights;
- b. Manpower planning and information;
- c. Implementation of work training;
- d. Manpower placement;
- e. Work relationship;
- f. Manpower protection, salary, and welfare;
- g. Industrial relationship; and
- h. Work termination

- **Articles of Association**

In the next stage, policy foundation for human capital management in the Company refers to its Articles of Association and Bylaws, of which the contents have been in line with the substance contained in Law No. 13 of 2003. Such a policy is continuously developed and adjusted according to the recent business conditions in the Company.

- **Corporate Work Plan**

To synergize the Company's business development with its human capital management policies and strategies, Pelindo III conducts various adjustments in line with the set Company Work Plan through its Human Capital Directorate. Such adjustments are necessary to maximize human capital pillars, which shall be able to fully support the plans that have been determined by the Company.



- **Referensi Lainnya**

Selain melakukan pemenuhan dasar kebijakan utama dalam melakukan pengelolaan SDM di lingkungan Perseroan, Pelindo III juga mengadopsi beberapa strategi pengelolaan SDM berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan oleh pihak eksternal seperti Konsultan Human Capital, baik yang bersifat umum maupun kajian yang dikhususkan kepada Perseroan. Hal tersebut dilakukan agar pengambilan keputusan terkait pengelolaan SDM di lingkungan Perseroan menjadi lebih tepat dan sesuai pada kebutuhan. Selain itu, pengelolaan SDM di lingkungan Perseroan juga semakin dekat dengan fenomena-fenomena pengelolaan SDM yang terjadi dewasa ini.

Referensi yang digunakan dalam perumusan kebijakan pengelolaan SDM Perseroan di tahun 2020 meliputi:

- **Other References**

Aside from fulfilling the basic main policies in managing human capital in the Company, Pelindo III also adopts several human capital management strategies based on reviews, either general or specific to the Company, conducted by external parties, such as Human Capital Consultant. This is implemented so policies related to human capital management in the Company are more accurate and following the needs of the Company. Also, human capital management in the Company will be able to keep abreast of the phenomena occurring in terms of Human Capital Management nowadays.

References utilized in formulating human capital management policies in the Company in 2019 include:

Referensi Perumusan Kebijakan Pengelolaan SDM 2020

Reference of Human Capital Management Formulation in 2020

Perumusan Kebijakan / Policy Formulation	Nama Vendor / Vendor Name
Restrukturisasi Organisasi / Organizational Restructuring
<i>Learning Design</i>
<i>Remuneration Management</i>
Asesmen Budaya Perusahaan / Corporate Culture Assessment
Implementasi SMK3L dan ISPS Code / SMK3L and ISPS Code Implementation
....
....



STRUKTUR PENGELOLA SDM

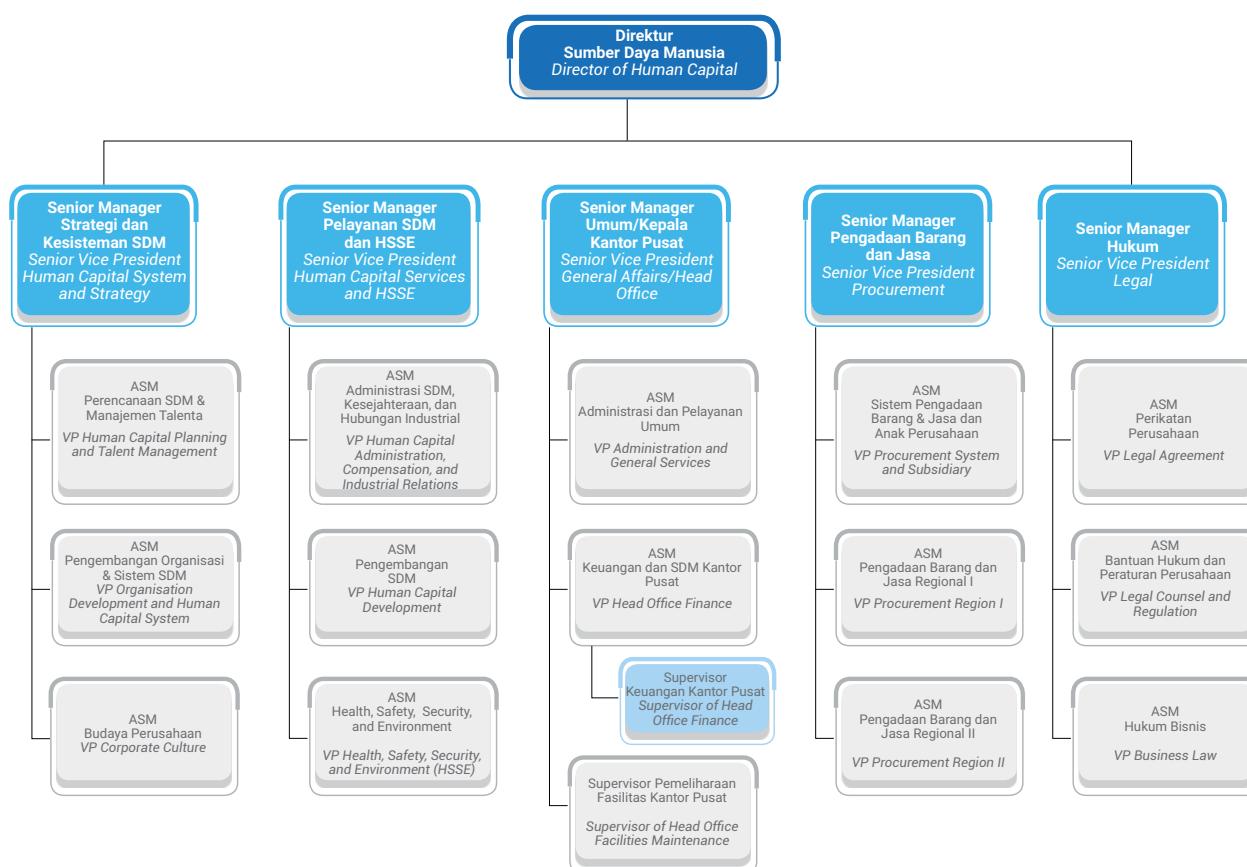
Pengelolaan SDM di lingkungan Perseroan secara komprehensif dilaksanakan oleh unit khusus sebagaimana tercantum dalam struktur organisasi Perseroan yang telah disahkan melalui Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. PER.0097/OS.01/HOFC-2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat Pelindo III.

Dalam menjalankan kegiatan di bidang pengelolaan SDM, Direktorat Sumber Daya Manusia dikepalai oleh Direktur Sumber Daya Manusia dibantu oleh 5 pejabat di bawahnya dengan level jabatan *Senior Manager Strategi dan Kesisteman SDM*, *Senior Manager Pelayanan SDM* dan *HSSE*.

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT STRUCTURE

HC in the Company is comprehensively managed by a special unit as stated in the Company's organization structure that has been validated by virtue of Board of Directors Regulation of PT Pelabuhan Indonesia No. PER.0097/OS.01/HOFC-2020 dated 2 December 2020 regarding the Organizational Structure and Work Procedure of the Pelindo III Head Office.

In carrying out Human Capital management activities, the Human Capital Directorate is assisted by five officers, namely the Human Capital System and Strategy Senior Manager, Human Capital Services Senior Manager, and HSSE.





Sampai dengan 31 Desember 2020, jumlah pegawai di Direktorat SDM adalah sebanyak, dengan rincian nama dan jabatan sebagai berikut:

Total Employees of HC Directorate as of December 31, 2020 were ... with the following details:

Direktur Sumber Daya Manusia / Director of Human Capital	Edi Priyanto
Senior Manager Strategi dan Kesiisteman SDM / Senior Vice President of Human Capital System and Strategy	Rendra Krestyawan
Asisten Senior Manager Perencanaan SDM dan Manajemen Talenta / Vice President of Human Capital Planning and Talent Management	Anjar Sulistyorini
Asisten Senior Manager Pengembangan Organisasi dan Sistem SDM / Vice President of Organization Development and Human Capital System	Adi Setiawan
Asisten Senior Manager Budaya Perusahaan / Vice President of Corporate Culture	Emil Puji Arifan
Senior Manager Pelayanan SDM dan HSSE / Senior Vice President of Human Capital Services and HSSE	Raden Mas Kumara Anindhita Widyaswendra
Asisten Senior Manager Administrasi SDM, Kesejahteraan, dan Hubungan Industrial / Vice President of Human Capital Administration, Compensation, and Industrial Relations	Riza Rosdiana
Asisten Senior Manager Pengembangan SDM / Vice President of Human Capital Development	Oscar Yogi Yustianto
Asisten Senior Manager Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) / Vice President of Health, Safety, Security, and Environment (HSSE)	Bondan Winarno
Senior Manager Umum/Kepala Kantor Pusat / Senior Vice President of General Affairs Head Office	Nugroho Christianto
Asisten Senior Manager Administrasi dan Pelayanan Umum / Vice President of Administration and General Services	Rizki Sutrismianto
Asisten Senior Manager Keuangan dan SDM Kantor Pusat / Vice President of Head Office Finance and Human Capital	Dedy Agus Sugijono
Supervisor Keuangan Kantor Pusat / Supervisor of Head Office Finance	Listoyo Arifianto
Supervisor Pemeliharaan Fasilitas Kantor Pusat / Supervisor Head Office Facilities Maintenance	Dwi Endriawan Priatna
Senior Manager Pengadaan Barang dan Jasa / Senior Vice President of Procurement	Umi Syarifah Ambarwati
Asisten Senior Manager Sistem Pengadaan Barang dan Jasa dan Anak Perusahaan / Vice President of Procurement System and Subsidiaries	Soengeng Prayitno
Asisten Senior Manager Pengadaan Barang dan Jasa Regional I / Vice President of Procurement Region I	Erna Hayu Handayani
Asisten Senior Manager Pengadaan Barang dan Jasa Regional II / Vice President of Procurement Region II	Wahju Widjansyah
Senior Manager Hukum / Senior Vice President of Legal	Muhammad Fitrianto Malik
Asisten Senior Manager Perikatan Perusahaan / Vice President of Legal Agreement	Adi Nurcahya
Asisten Senior Manager Bantuan Hukum dan Peraturan Perusahaan / Vice President of Legal Counsel and Regulation	Theresia Rury Setyawati
Asisten Senior Manager Hukum Bisnis / Vice President of Business Law	Daddy Sumartono



PROFIL SENIOR MANAGER STRATEGI DAN KESISTEMAN SDM

PROFILE OF SENIOR VICE PRESIDENT OF HUMAN CAPITAL SYSTEM AND STRATEGY

Kewarganegaraan / Citizenship : Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir / Place, DOB : Sumenep, 26 Februari / February 1976
Tahun Aktif / Active Year : 2006

Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment
SKEP.388/KP.0102/P.III-2006

Riwayat Pendidikan / Education History

- Sarjana (S1) Psikologi dari Universitas Padjadjaran pada tahun 1999 / Bachelor's Degree in Psychology from Padjajaran University in 1999
- Magister (S2) Manajemen dari STIESIA pada tahun 2006 / Master's Degree in Management from STIESIA in 2006

RENDRA KRESTYAWAN

Senior Manager Strategi dan Kesisteman SDM
Senior Vice President of HC System and Strategy

Riwayat Jabatan / Career History

- ASM Perencanaan SDM (2014-2015) / Assistant to SVP of HC Planning (2014-2015)
- VP HC Planning and Talent Management (2015-2018)
- GM SDM, Keuangan dan IT (2018-2020) / GM of HC, Finance, and IT (2018-2020)
- SM Strategi dan Kesisteman SDM (2021-sekarang) / SM of HC System and Strategy (2021-present)

PROFIL SENIOR MANAGER PELAYANAN SDM DAN HSSE

PROFILE OF SENIOR VICE PRESIDENT OF HUMAN CAPITAL SERVICES AND HSSE

Kewarganegaraan / Citizenship : Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir / Place, DOB : Yogyakarta, 18 Agustus / August 1984
Tahun Aktif / Active Year : 2009

Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment
KEP.153/KP.0604/P.III-2020

Riwayat Pendidikan / Education History

- Sarjana (S1) Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2008 / Bachelor's degree in Law from Gadjah Mada University in 2008
- Sarjana (S1) Teknik Informatika dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 2006 / Bachelor's degree in Informatics Engineering from Indonesian Islamic University in 2006
- Magister (S2) Manajemen dari Universitas Airlangga pada tahun 2020 / Master's degree in Management from Airlangga University in 2020

RADEN MAS KUMARA ANINDHITA WIDYASWENDRA

Senior Manager Pelayanan SDM dan HSSE
Senior Vice President of Human Capital Services and HSSE

Riwayat Jabatan / Career History

- Sekretaris Perusahaan PT BJTI (2014-2015) / Corporate Secretary of PT BJTI (2014-2015)
- VP Human Capital & GA PT BJTI (2015-2017)
- VP Corporate Communication (2017)
- Senior Vice President Legal (2017-2020)
- Senior Manager Pelayanan SDM dan HSSE (2020-sekarang) / Senior Vice President of Human Capital Services and HSSE (2020-present)

VISI DAN MISI SDM

Dalam rangka meningkatkan semangat perubahan positif di lingkungan Perseroan serta meningkatkan standar layanan di bidang jasa kepelabuhanan dan usaha penunjang yang profesional dan berdedikasi oleh setiap Pegawai, Divisi SDM memiliki visi dan misi yaitu:

HUMAN CAPITAL VISION AND MISSION

To maintain the spirit of positive change in the Company as well as standards in professional and devoted port services and supporting businesses, the Human Capital Division has established the following vision and mission:

**Visi SDM**

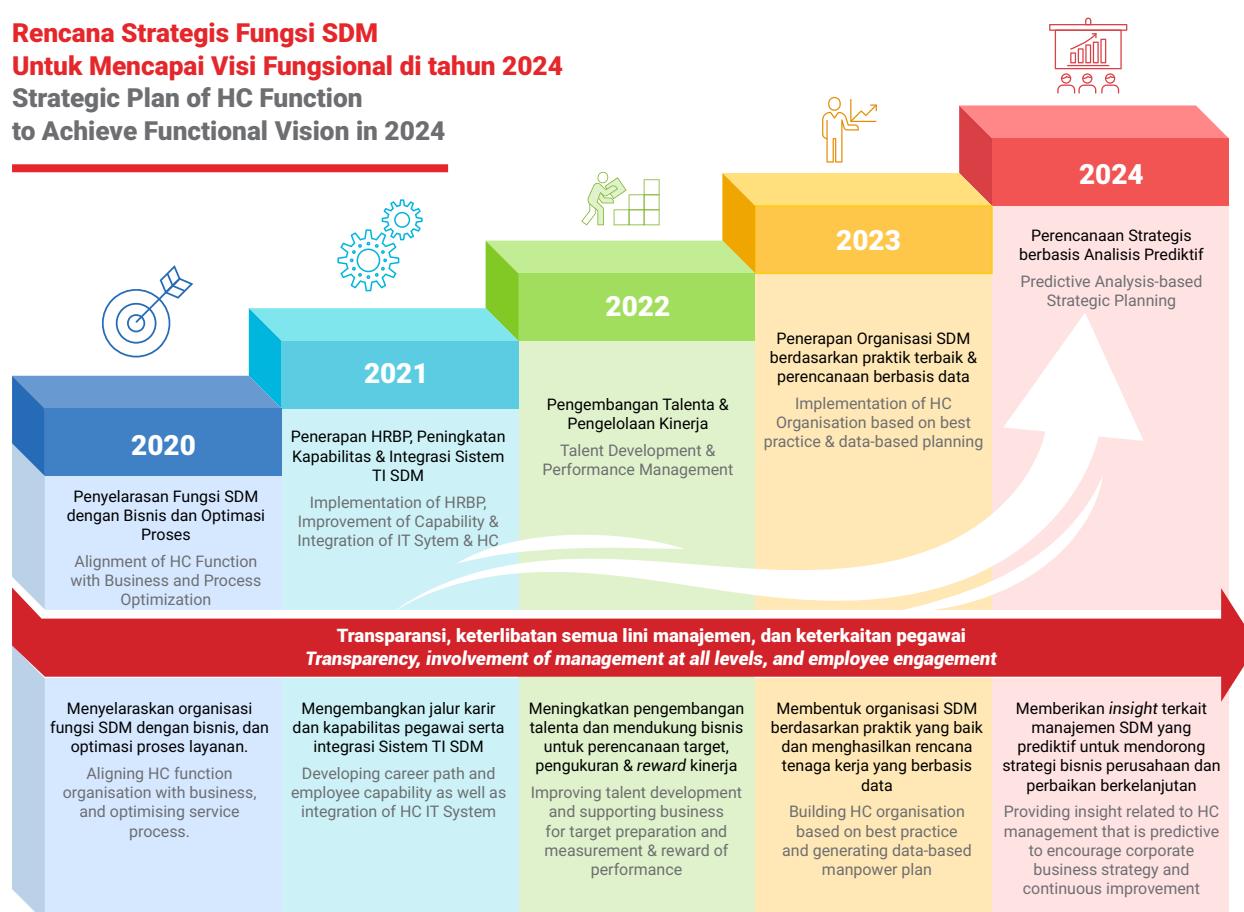
"Menjadi Partner bisnis bagi semua lini manajemen, untuk mendapatkan, mengembangkan, dan mempertahankan talenta terbaik"

Misi SDM

1. Menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan untuk peningkatan kepuasan *stakeholder* fungsi SDM;
2. Memberikan solusi manajemen SDM yang cerdas dan inovatif serta mampu menjawab kebutuhan bisnis yang berkembang cepat;
3. Membangun dan mempertahankan kapabilitas dan kapasitas SDM Pelindo III untuk mencapai visi perusahaan;
4. Memberikan layanan fungsi SDM yang efektif dan efisien melalui digitalisasi dan tata kelola yang baik.

ROADMAP PENGEMBANGAN SDM**Rencana Strategis Fungsi SDM****Untuk Mencapai Visi Fungsional di tahun 2024**

**Strategic Plan of HC Function
to Achieve Functional Vision in 2024**

**HUMAN CAPITAL VISION**

"To become a business partner for the management at all levels, to obtain, develop, and maintain best talent"

HUMAN CAPITAL MISSION

1. Creating sustainable added value to increase satisfaction of HC function among stakeholders;
2. Providing smart and innovative HC management solutions that is able to respond to fast-growing business needs;
3. Building and maintaining capabilities and capacity of Pelindo III human resources to achieve the company's vision;
4. Providing effective and efficient HC function services through digitalization and good governance.

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT ROADMAP



Tahun 2020 merupakan tahun dimulainya *roadmap* baru pengelolaan SDM Pelindo III, di mana pada tahun tersebut difokuskan pada Penyelarasan Fungsi SDM dengan Bisnis dan Optimasi Proses. Dengan senantiasa menerapkan prinsip transparansi, keterlibatan semua lini manajemen, dan keterikatan pegawai, Perseroan bertujuan untuk menyelaraskan organisasi fungsi SDM dengan proses bisnis dan optimasi proses layanan.

2020 is the year when the new roadmap of Pelindo III HC management starts. This years, the focus is on the Alignment of HC Functions with Business and Process Optimization. With continued implementation of principles of transparency, involvement of the management at all levels, and employee engagement, the Company aims to align the organisation of HC functions with business process and service process optimisation.

JEJAK LANGKAH SISTEM PENGEMBANGAN SDM HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT SYSTEM MILESTONE



FOKUS PENGEMBANGAN SDM TAHUN 2020

Mengacu pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2020 – 2024, fokus pengembangan pengelolaan SDM Pelindo III diarahkan pada pencapaian tujuan Perseroan untuk menjadi *industry leader* yang merupakan kelanjutan dari target Pelindo III sebelumnya yaitu *Emerging Industry Leader*. Sejalan dengan upaya pencapaian tujuan tersebut, masing-masing direktorat Perseroan telah memiliki sasaran fungsional dan fokus pengembangan tersendiri, di mana pengembangan pengelolaan SDM membidik sejumlah aspek, antara lain:

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT FOCUS IN 2020

Referring to the 2020-2024 Corporate Long Term Plan (RJPP), the focus of Pelindo III HC management development is directed at achieving the Company's goals to become an industry leader which is a continuation of Pelindo III's previous target, namely Emerging Industry Leader. In line with the efforts to achieve these goals, each directorate of the Company has its own functional goals and development focus, in which the development of HC management targets a number of aspects, including:



1. Menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan untuk peningkatan kepuasan *stakeholder* fungsi SDM;
2. Memberikan solusi manajemen SDM yang cerdas dan inovatif serta mampu menjawab kebutuhan bisnis yang berkembang cepat;
3. Membangun dan mempertahankan kapabilitas dan kapasitas SDM Pelindo III untuk mencapai visi perusahaan;
4. Memberikan layanan fungsi SDM yang efektif dan efisien melalui digitalisasi dan tata kelola yang baik.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan *Board Manual* yang ditetapkan dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tanggal 3 September 2018 tentang Reviu dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual* dan *Code of Corporate Governance*), dinyatakan bahwa ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Direktorat SDM secara umum adalah melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengembangan SDM, sistem kepegawaian dan organisasi, kesejahteraan, administrasi kepegawaian, dan penilaian kinerja pegawai dengan rincian:

- Merencanakan, menetapkan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi kebijakan pengembangan organisasi, serta pengelolaan jabatan dan pekerjaan sesuai dengan struktur organisasi;
- Tersedianya strategi dan kebijakan dalam mengembangkan kesisteman SDM yang terintegrasi;
- Penyelenggaraan dan pembinaan pelaksanaan *Coaching Mentoring Counseling*, manajemen talenta terintegrasi, asesmen, dan manajemen karier;
- Melakukan evaluasi kebutuhan SDM;
- Merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan rekrutmen pegawai;
- Merencanakan, menetapkan, melaksanakan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan terkait dengan kesejahteraan SDM sesuai dengan kebijakan yang berlaku;
- Melaksanakan penilaian kinerja individu dan administrasi data pegawai melalui pengelolaan sistem informasi SDM;
- Menyelenggarakan dan membina kegiatan pembuatan surat keputusan pengangkatan pegawai, kenaikan periodik, penyetaraan jabatan anak perusahaan, serta

1. Creating sustainable added value to increase stakeholder satisfaction of HC function;
2. Providing intelligent smart and innovative HC management solutions that is able to respond to fast-growing business needs;
3. Building and maintaining capability and capacity of Pelindo III human capital to achieve vision of the company;
4. Providing effective and efficient HC function through digitalization and good corporate governance.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF HUMAN CAPITAL DIRECTORATE

Based on the Board Manual stipulated in the Joint Decision of the Board of Commissioners and Board of Directors of Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 dated 3 September 2018 on the Review and Revision of Corporate Governance Guide (*Board Manual* and *Code of Corporate Governance*), it is stated that the scope of duties and responsibilities of the Human Capital Directorate, in general, is to carry out the activities of planning and development of Human Capital, employment and organization system, welfare, employee administration and employee performance appraisal, with the following details:

- Planning, establishing, controlling, fostering, analyzing, and evaluating the organizational development policies, management of positions and works based on the organizational structure;
- Availability of strategies and policies in developing an integrated human capital system;
- Organizing and implementing Coaching Mentoring Counseling, integrated talent management, assessment, and career management;
- Evaluating human capital needs;
- Planning, organizing, evaluating, and reporting employee recruitment activities;
- Planning, establishing, implementing, fostering, analyzing, and evaluating activities related to human capital welfare based on the prevailing policies;
- Assessing individual performance and administration of employee data through the management of human capital information systems;
- Organizing and fostering the preparation of employee appointment decree, periodical rise, equalization of position in the subsidiary, and employees who



pegawai yang menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP), dan pegawai pensiun termasuk pensiun dini;

- Melaksanakan kegiatan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyusun, menetapkan, dan menyelenggarakan program-program pengembangan SDM (mulai dari pembuatan analisa kebutuhan *training*, penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan, terdiri dari kegiatan administrasi, penyediaan fasilitas sampai pengembangan modul, evaluasi dan *review* kegiatan pelatihan, serta tindak lanjut hasil pendidikan dan pelatihan, terpenuhinya kebutuhan cabang atas pengembangan SDM yang sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan); dan
- Pelaporan di bidang kepegawaian secara korporat.

PROGRAM KERJA DIVISI SDM TAHUN 2020

Sepanjang tahun 2020, Divisi SDM telah merealisasikan berbagai program kerja dan inisiatif strategis pengembangan pengelolaan SDM yang disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan Perseroan. Program kerja dan inisiatif strategis tersebut antara lain:

1. Penyempurnaan infrastruktur *Talent Management* dalam rangka Implementasi *Integrated Talent Management System*.
2. Pembangunan aplikasi *Learning Management Sstem* (LMS).
3. Pengembangan *Web-Based* Aplikasi HSSE Korporat.
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...

KOMPOSISI DAN JUMLAH PEGAWAI PERSEROAN TAHUN 2019 – 2020

Sampai dengan 31 Desember 2020, jumlah pegawai Pelindo III Group tercatat sebanyak 3.911 orang. Jumlah tersebut menurun 14,48% dibandingkan jumlah pegawai di tahun 2019 sebanyak 4.573 orang. Penurunan tersebut terjadi dikarenakan ... Informasi demografi pegawai Perseroan berdasarkan rentang usia, pendidikan, jenis kelamin, status kepegawaian, jenis jabatan, jenjang manajemen, dan unit kerja disajikan dalam tabel-tabel sebagai berikut:

undergo pension preparation period and pension employee, including early pension;

- Carrying out industrial relation activities based on the prevailing laws and regulations;
- Compiling, establishing, and organizing the human capital development programs (starting from an analysis of training needs, organizing educational and training activities comprising administration activities, provision of facilities and module development, evaluating and reviewing training activities, following-up education and training results, fulfilling the needs of branches for human capital development that are based on the established strategies); and

- Corporate reporting of personnel affairs.

HUMAN CAPITAL DIVISION WORK PROGRAM IN 2020

HC Division has realized various work programs and strategic initiatives throughout 2020 to develop HC management that are tailored to the vision, mission and objectives of the Company. These work programs and strategic initiatives include:

1. Improving the Talent Management infrastructure for the implementation of the Integrated Talent Management System.
2. Development of a Learning Management System (LMS) application.
3. Web-Based Development of Corporate HSSE Applications.

COMPOSITION AND NUMBER OF COMPANY EMPLOYEES FOR 2019 - 2020

As of December 31, 2020, the total employees of Pelindo III Group were 3,911 people, decreased by 14.48% compared to that of 2019 at 4,573 people. Such decrease occurred due to ... Demographic information of the Company's employees based on age range, education, gender, employment status, type of position, level of management, and work unit are presented in the following tables:

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Rentang Usia****Employee Composition by Age Range**

Uraian / Description	2020	2019	Hasil Perbandingan / Comparison Result	
			Perubahan / Changes	%
< 30 tahun / < 30 years old	823	1.265	(442)	-34,94%
31 – 35 tahun / 31-35 years old	914	1.040	(126)	-12,12%
36 – 40 tahun / 36-40 years old	748	836	(88)	-10,53%
41 – 45 tahun / 41-45 years old	692	708	(16)	-2,26%
46 – 50 tahun / 46-50 years old	457	449	8	1,78%
> 50 tahun / >50 years old	277	275	2	0,73%
Jumlah / Total	3.911	4.573	(662)	-14,48%

Dari segi komposisi pegawai berdasarkan usia, kelompok pegawai berusia produktif yaitu kelompok pegawai usia 31-35 tahun sebanyak 914 orang atau sebesar 23,37% dari jumlah pegawai secara keseluruhan. Sementara itu, terdapat 277 pegawai pada kelompok usia di atas 50 tahun yang akan menjalani masa pensiun dalam beberapa tahun ke depan.

In terms of employee composition by age, the number of prime-age employees, i.e. those aged 31-35 years were 914 people of 23.37% of total employees. Meanwhile, there are 277 employees aged over 50 years that in the next few years will enter pension period.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**Employee Composition by Education**

Uraian / Description	2020	2019	Hasil Perbandingan / Comparison Result	
			Perubahan / Changes	%
SMA/SMK / High School/ Vocational School	834	1.003	(169)	-16,85%
Diploma (D3) / Diploma Degree	638	880	(242)	-27,50%
Sarjana (S1) / Bachelor's Degree	1.988	2.176	(188)	-8,64%
Magister (S2) / Master's Degree	446	504	(58)	-11,51%
Doktor (S3) / Doctoral Degree	3	10	(7)	-70,00%
Jumlah / Total	3.911	4.573	(662)	-14,48%

Guna meningkatkan daya saing, Perseroan memfasilitasi peningkatan jenjang pendidikan bagi pegawai melalui program beasiswa Strata-1 untuk rekrutmen khusus dan beasiswa Strata-2 bagi pegawai yang dinyatakan lulus serangkaian tahapan seleksi. Beasiswa pada jenjang Strata-2 ini dilakukan di dalam dan luar negeri sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

To increase competitiveness, the Company facilitates higher educational levels for employees through a bachelor's degree scholarship program for special recruitment and a master's degree scholarship for employees who pass a series of selection stages. Scholarships at the master's degree level are conducted at home and abroad according to the needs of the Company.

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin****Employee Compositin by Gender**

Uraian / Description	2020	2019	Hasil Perbandingan / Comparison Result	
			Perubahan / Changes	%
Laki-laki / Male	3.335	3.477	(142)	-4,08%
Perempuan / Female	576	1.096	(520)	-47,45%
Jumlah / Total	3.911	4.573	(662)	-14,48%

Berdasarkan demografi pada tabel di atas, komposisi pegawai laki-laki Perseroan di tahun 2020 berjumlah paling banyak sebesar 85,27%, dan diikuti dengan pegawai perempuan sebesar 14,73%. Meski demikian, Perseroan tetap memberikan kesempatan setara dan menjunjung kesetaraan gender bagi calon pegawai laki-laki maupun perempuan dalam proses rekrutmen. Adapun yang menyebabkan perbedaan komposisi ini adalah ketersediaan sumber daya manusia pada saat proses rekrutmen, keberhasilan mengikuti tahapan seleksi, masa pensiun, dan pengunduran diri pegawai.

Based on the demographics in the table above, the composition of the Company's male employees in 2020 amounted to at most 85.27%, followed by female employees at 14.73%. However, the Company still provides equal opportunities and upholds gender equality for male and female prospective employees in the recruitment process. What causes this difference in composition is the availability of human resources during the recruitment process, the success of following the selection stages, retirement, and employee resignation.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian**Employee Composition by Employment Status**

Uraian / Description	2020	2019	Hasil Perbandingan / Comparison Result	
			Perubahan / Changes	%
Organik / Organic	3.360	3.758	(398)	-10,59%
Non Organik (Diperbantukan, PKWT, dan Pemagang) / Non-organic (Outsourced, PKWT, and Internship)	389	784	(395)	-50,38%
Calon Pegawai / Employee Candidate	162	31	131	422,58%
Jumlah / Total	3.911	4.573	(662)	-14,48%

Pada tahun 2020, jumlah pegawai Organik mengalami penurunan sebesar 10,59%. Hal ini disebabkan oleh

In 2020, the number of Organic employees decreased by 10.59%. This was caused by ...

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan**Employee Composition by Position**

Uraian / Description	2020	2019	Hasil Perbandingan / Comparison Result	
			Perubahan / Changes	%
Struktural / Structural	449	415	34	8,19%
Fungsional / Functional	491	466	25	5,36%
Staf / Staff	2.971	3.692	(721)	-19,53%
Jumlah / Total	3.911	4.573	(662)	-14,48%



Jenis jabatan pegawai Perseroan terbagi menjadi tiga jenjang, yaitu jenjang struktural, fungsional, dan staf. Pada tahun 2020, terjadi kenaikan jumlah jabatan struktural sebanyak 34 orang atau 8,19%. Hal ini sejalan dengan perubahan organisasi yang terjadi di Perseroan.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Manajemen

Uraian / Description	Kelas Jabatan / Position Class	2020		Hasil Perbandingan / Comparison Result	
		2020	2019	Perubahan / Changes	%
Manager Utama / Top Manager	1-3	61	67	(6)	-8,96%
Manager Madya / Middle Manager	4-6	129	125	4	3,20%
Manager Muda / Junior Manager	7-9	391	395	(4)	-1,01%
Manager Dasar / Basic Manager	10-11	595	553	42	7,59%
Jumlah / Total		1.176	1.140	36	3,16%

Perubahan organisasi yang terjadi pada tahun 2020 berdampak pada kenaikan jumlah Manager Dasar (Pejabat Struktural Kelas Jabatan 10-11) sebanyak 42 orang.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

Uraian / Description	2020	Hasil Perbandingan / Comparison Result		
		2019	Perubahan / Changes	%
Kantor Pusat / Head Office	485	511	(26)	-5,09%
Regional Jawa Timur / East Java Region	483	502	(19)	-3,78%
Regional Jawa Tengah / Central Java Region	304	315	(11)	-3,49%
Regional Kalimantan / Kalimantan Region	350	348	2	0,57%
Regional Bali Nusra / Bali Nusra Region	189	176	13	7,39%
Anak Perusahaan / Subsidiaries	243	257	(14)	-5,45%
Jumlah / Total	2.054	2.109	(55)	-2,61%

Jumlah formasi yang ada pada masing-masing Cabang dan Anak Perusahaan di lingkungan Perseroan didasarkan pada perencanaan SDM dan disesuaikan dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga beban kerja yang dimiliki oleh masing-masing Cabang dan Anak Perusahaan sesuai dengan yang direncanakan

Type of employee level in the Company is divided into three levels, namely structural, functional, and staff. In 2020, the composition of structural function experienced an increase of 34 people or 8.19%. This was in line with the organizational changes in the Company.

Employee Composition by Management Level

Organizational changes occurred in 2020 affected the number of Basic Manager (Structural Officers of Position Class 10-11) that increased by 42 people.

Employee Composition by Work Unit

The formation available at each Branch and Subsidiary within the Company is based on the Human Capital Planning and adjusted to the established organizational structure. Hence, the workload of each Branch and Subsidiary shall be under the plan set in the RJPP. The appropriate number of employees in each Branch or



dalam RJPP. Jumlah tenaga kerja atau pegawai yang tepat dalam masing-masing Cabang atau Anak Perusahaan membantu Perseroan untuk bekerja lebih efisien dan efektif.

REKRUTMEN DAN SELEKSI

Dalam memenuhi pertumbuhan organisasi yang terus berkembang serta mempersiapkan regenerasi pegawai sesuai dengan perkembangan bisnis serta tujuan Perseroan yang ingin dicapai, Perseroan melaksanakan rekrutmen dan seleksi pegawai dengan memperhatikan rencana serta kebutuhan organisasi SDM. Dalam melakukan proses rekrutmen pegawai, Perseroan senantiasa memastikan proses seleksi sepenuhnya memperhatikan kriteria kompetensi dan kualifikasi posisi atau jabatan yang akan diisi, tanpa membeda-bedakan unsur Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) dan jenis kelamin.

Proses rekrutmen yang berlaku di Perseroan terbagi menjadi 2 (dua) metode, yaitu rekrutmen eksternal dan rekrutmen internal.

- **Rekrutmen Eksternal**

Proses rekrutmen yang menggunakan sumber yang berasal dari luar Perseroan, seperti *open recruitment* bagi Fresh Graduates/Management Trainee (MT) bagi calon pegawai yang akan mengisi jabatan entry-level dan rekrutmen Profesional/Ahli (*professional hire*) bagi calon pegawai yang akan mengisi jabatan yang membutuhkan keahlian atau keterampilan khusus.

- **Rekrutmen Internal**

Proses rekrutmen yang bersumber dari dalam organisasi Perseroan, seperti rotasi/mutasi pegawai, promosi jabatan, dan pengkaryaan kembali pegawai.

Laporan Rekrutmen Tahun 2020

Berdasarkan analisis kebutuhan SDM tahun 2020, beberapa rekrutmen dilakukan dengan memfokuskan pada rekrutmen SDM pada fungsi Adapun sebagian besar pelaksanaan rekrutmen yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah untuk merekrut tenaga Pandu sebanyak ... Pelaksanaan perekrutan tenaga pandu ini mengacu pada perencanaan SDM dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. PER.0002/KP.0102/P.III-2018 tentang Penerimaan Pegawai dan Peraturan Menteri

Subsidiary helps the Company to carry out its business more efficiently and effectively.

RECRUITMENT AND SELECTION

In meeting the growing organizational growth and preparing for employee regeneration in accordance with business developments and the Company's goals to be achieved, the Company carries out recruitment and selection of employees by taking into account the plans and needs of HC organizations. In carrying out the employee recruitment process, the Company always ensures that the selection process fully takes into account the competency criteria and qualifications for the position to be filled, without discriminating between ethnicity, religion, race, and intergroup (SARA) and gender elements.

The recruitment process that applies in the Company is divided into 2 (two) methods, namely external recruitment and internal recruitment.

- **External Recruitment**

A recruitment process that uses sources from outside the Company, such as open recruitment for Fresh Graduates/Management Trainees (MT) for prospective employees who will occupy entry-level positions and Professional hire for prospective employees who will occupy positions that require special skills.

- **Internal Recruitment**

The recruitment process that originates within the Company's organization, such as employee rotation/transfer, promotion and re-employment of employees.

Recruitment Report in 2020

Based on the analysis of HC needs in 2020, several recruitments were carried out by focusing on HC recruitment in ... function. Most of the recruitment implementation in 2020 was to recruit ... Scouts. Implementation of recruitment of scout personnel refers to HR planning and technically refers to the Regulation of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. PER.0002 / KP.0102 / P.III-2018 concerning Employee Admission and Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia No. PM 57



Perhubungan Republik Indonesia No. PM 57 tahun 2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal.

Pelaksanaan rekrutmen tenaga Pandu dan tenaga (sebutkan rekrutmen tenaga lainnya yang dilaksanakan tahun 2020, jika ada) tahun 2020 dilaksanakan di kota Surabaya dengan metode Dari rekrutmen tersebut, diperoleh sekitar ... pelamar yang diseleksi lebih lanjut mengikuti prosedur yang berlaku. Adapun proses rekrutmen tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan konsultan sebagai pihak pelaksana rekrutmen dan seleksi.

of 2015 dated March 11, 2015 concerning Pilotage and Tugboat Services.

Implementation of recruitment of Scouts and staff ... in 2020 carried out in Surabaya using the method From this recruitment, approximately ... applicants who were selected further followed applicable procedures. The recruitment process was carried out in collaboration with a consultant as the recruitment and selection implementer.

Jenis Rekrutmen / Type of Recruitment	2020	2019
Lulusan Baru / Fresh Graduate	16	0
Tenaga Berpengalaman / Professional Hire	5	14
Jumlah / Total	21	14

Dalam mempersiapkan pegawai baru yang telah melewati proses seleksi, Perseroan memberikan pembekalan orientasi dan adaptasi pegawai baru untuk memahami lebih dalam mengenai tugas dan tanggung jawab yang diemban. Program orientasi yang diberikan antara lain terkait sistem, prosedur, dan budaya yang berlaku di Perseroan agar tercipta pemahaman dan etos kerja yang seragam bagi seluruh pegawai.

Selain memberikan orientasi dan adaptasi, Perseroan juga melakukan pemantauan dan *mentoring* guna mengukur sejauh mana pemahaman yang diperoleh serta menjadi mekanisme penilaian kinerja pertama bagi pegawai baru tersebut.

In preparing new employees who have gone through the selection process, the Company provides orientation and adaptation of new employees to have a deeper understanding of their duties and responsibilities. The orientation program provided includes, among other things, the systems, procedures, and culture that prevail in the Company in order to create a common understanding and work ethic for all employees.

In addition to providing orientation and adaptation, the Company also conducts monitoring and mentoring to measure the extent to which the understanding has been gained and is the first performance appraisal mechanism for these new employees.

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

Konsistensi Perseroan dalam mewujudkan SDM unggul diwujudkan melalui mekanisme penilaian kinerja pegawai menggunakan Sistem Manajemen Kinerja Individu (SMKI) sesuai dengan Peraturan Direksi No. PER.16.1 / KP.0302/P.III-2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Sistem Manajemen Kinerja Individu (SMKI). Sejak tahun 2012, penilaian kinerja pegawai dilakukan secara *online* di situs smki.pelindo.co.id. Secara sistematis, penilaian kinerja pegawai dilakukan dengan memperhitungkan capaian indikator evaluasi dan assessment berdasarkan

EMPLOYEE PERFORMANCE ASSESSMENT

The Company's consistency in realizing excellent human capital is manifested through an employee performance assessment mechanism using the Individual Performance Management System (SMKI) in accordance with the Board of Directors Regulation No. PER.16.1 / KP.0302 / P.III-2012 dated February 1, 2012 concerning the Individual Performance Management System (SMKI). Since 2012, employee performance assessment have been carried out online at the smki.pelindo.co.id website. Systematically, employee performance assessment



Key Performance Indicator (KPI) per individu. Adapun tahapan dalam penilaian kinerja pegawai terbagi menjadi 4 tahap, yaitu perencanaan, pemantauan, penilaian, serta penghargaan dan hukuman.

Indikator penilaian kinerja di Perseroan meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. ...
2. ...
3. ...

Penanggung jawab penilaian kinerja pegawai adalah Subdirektorat Pelayanan SDM dan HSSE, di bawah Asisten Senior Manager Administrasi SDM, Kesejahteraan, dan Hubungan Industrial. Nantinya, hasil penilaian kinerja pegawai secara individu akan menjadi salah satu pertimbangan bagi manajemen dalam menentukan pengembangan SDM ke depan, seperti kesempatan pengembangan karier (promosi jabatan), kenaikan gaji periodik, perhitungan bonus pegawai, pengembangan kompetensi, dan manajemen talenta.

Berdasarkan hasil review dan evaluasi RJPP 2015 – 2019, rata-rata pertumbuhan kinerja pegawai yang tercermin dari produktivitas pegawai menunjukkan hasil yang sangat baik di mana seluruh target, baik target RJPP maupun RKAP, terlampaui hingga beberapa kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan positif antara jumlah pegawai dengan hasil pencapaian produktivitas pegawai dari tahun 2015 sampai dengan 2019.

Di tahun 2020, Perseroan telah menerapkan model dan aplikasi baru Penilaian Kinerja Pegawai yaitu *Portizen Performance* untuk menilai kinerja/SKI dan *Portizen Value* (Budaya) untuk menilai pencapaian kinerja/PI menggantikan model dan aplikasi SMKI sebelumnya. Perubahan model Penilaian Kinerja Pegawai ini telah dikukuhkan melalui Peraturan Direksi No.

are carried out by taking into account the achievement of evaluation and assessment indicators based on individual Key Performance Indicators (KPI). The stages in employee performance assessment are divided into 4 stages, namely planning, monitoring, assessing, and reward and punishment.

Performance assessment indicators in the Company include the following aspects:

1. ...
2. ...
3. ...

Personnel in charge for employee performance appraisal is the Subdirectorate of HC Services and HSSE, under the Vice President for HC Administration, Welfare, and Industrial Relations. Later, the results of individual employee performance assessment will be taken into account for management in determining future HC development, such as career development opportunities (job promotions), periodic salary increases, employee bonus calculations, competency development, and talent management.

Based on the results of the 2015-2019 RJPP review and evaluation, the average growth in employee performance as reflected in employee productivity shows excellent results where all targets, both RJPP and RKAP targets, were exceeded several times over. This shows that there is a positive relationship between total employees and the results of employee productivity achievements from 2015 to 2019.

In 2020, the Company implemented a new model and application of Employee Performance Assessment, namely Portizen Performance to assess performance/SKI and Portizen Value (Culture) to assess performance achievement/PI replacing the previous SMKI model and application. This change in the Employee Performance Assessment model has been confirmed by the Board of Directors Regulation No.



PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM

Perseroan meyakini bahwa tujuannya dalam menciptakan SDM unggul dan berdaya saing tinggi harus diimbangi dengan upaya dalam memperbarui dan mengembangkan kompetensi secara berkala sesuai dengan perkembangan industri dan perkembangan bisnis yang dinamis. Pengembangan kompetensi SDM tidak hanya mampu mempertahankan relevansi dan beradaptasi dengan kemajuan kompetensi dan kualifikasi SDM, tetapi juga mendukung inovasi berkelanjutan demi kemajuan Perseroan.

Kebijakan pengembangan kompetensi diberikan bagi seluruh pegawai, baik dari level staf hingga level *top management*, dengan membidik kualitas kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan dikap serta mental pegawai yang dibutuhkan tiap individu dan posisi jabatannya masing-masing. Proses pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM melalui program pendidikan formal, pelatihan, seminar, simposium, *workshop*, dan studi banding, dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. PER.28.1/KP.0301/P.III-2015 tanggal 2 Februari 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.

Jenis Pengembangan SDM

Dalam rangka memberikan program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang sejalan dengan Visi dan Misi Perseroan serta memastikan terlaksananya Diklat secara efektif dan efisien, Perseroan telah menyusun beberapa *tools* yang dirancang untuk membantu mendukung pelaksanaan diklat secara profesional, yaitu:

- **Hard Competency**

Program untuk melakukan identifikasi kemampuan-kemampuan teknis (*hard competency*) untuk seluruh fungsi di Kantor Pusat Pelindo III meliputi fungsi Operasi dan fungsi Penunjang (*Supporting*).

- **Learning Design**

Rancangan proses pembelajaran bagi pegawai dalam organisasi, termasuk di dalamnya perumusan proses dan *content* dari proses belajar yang akan dijalani pegawai. Manfaat *Learning Design* antara lain sebagai berikut:

HC COMPETENCE DEVELOPMENT

The Company believes that its goal of creating excellent and highly competitive human resources must be balanced with efforts to regularly update and develop competencies in accordance with industrial developments and dynamic business developments. HC competency development is not only able to maintain relevance and adapt to advances in HC competencies and qualifications, but also support continuous innovation for the advancement of the Company.

The competency development policy is given to all employees, from staff level to top management level, by targeting the quality of competence, knowledge, skills, and formation of staff and employee mentality required by each individual and their respective positions. The process of implementing HC competency development through formal education programs, training, seminars, symposiums, workshops, and comparative studies is carried out based on the Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. PER.28.1/KP.0301/P.III-2015 dated February 2, 2015 concerning Employee Education and Training.

Type of HC Development

To provide Education and Training (Diklat) programs that are in line with the Company's Vision and Mission and ensure the effective and efficient implementation of Training and Education, the Company has compiled several tools designed to help support the implementation of training in a professional manner, namely:

- **Hard Competency**

A program to identify technical capabilities (hard competency) for all functions at Pelindo III Head Office, including Operations and Supporting functions.

- **Learning Design**

The design of the learning process for employees in the organization, including the formulation of the process and content of the learning process that will be carried out by employees. The benefits of Learning Design include the following:



1. Membantu manajemen mengidentifikasi *skill sets* dari fungsi-fungsi jabatan yang dapat mendukung terbentuknya kompetensi inti organisasi guna mencapai sasaran bisnis Perseroan;
2. Menyediakan program pengembangan SDM yang terencana secara sistematis dan mendukung pencapaian sasaran bisnis Perseroan;
3. Menyediakan *grand design* program pembelajaran yang berjenjang dan implementatif, baik untuk kelompok jabatan struktural (manajerial) maupun fungsional;
4. Menyediakan *Learning Curriculum* dan *Learning Syllabus* yang berorientasi pada peningkatan kompetensi karyawan dan sesuai dengan *grand design*;
5. Menyediakan pedoman bagi karyawan dalam menentukan pelatihan dan pengembangan yang akan diikutinya; dan
6. Menyediakan informasi bagi Manajemen dalam merancang rencana pengembangan pegawai.

• **Knowledge Management**

Program untuk melakukan identifikasi dan menyusun fondasi kerangka untuk implementasi proses manajemen ilmu pengetahuan di dalam Perseroan. Penyusunan *Knowledge Management* dilaksanakan dalam periode waktu (konfirmasi lagi apakah *Knowledge Management* masih dilaksanakan di tahun 2020)

Sejak tahun pertamanya pada tahun 2018, *Knowledge Management* Tahap II, Perseroan telah melaksanakan kegiatan *Workshop Knowledge Capture* serta pembentukan *Knowledge Community* (KONCO) di mana telah ditetapkan tiap dua bulan sekali untuk dilakukan pertemuan berkala. Penerapan *Knowledge Management* selanjutnya akan dilakukan sosialisasi dengan mendatangkan *Subject Matter Expert* (SME).

1. Help management identify skill sets of job functions that can support the formation of core organizational competencies in order to achieve the Company's business goals;
2. Provide human capital development programs that are planned systematically and support the achievement of the Company's business goals;
3. Provide a grand design of learning programs that are tiered and implementative, for both structural (managerial) and functional position groups;
4. Provide a Learning Curriculum and Learning Syllabus that is oriented towards improving employee competencies and in accordance with the grand design;
5. Provide guidelines for employees in determining the training and development that will be participated; and
6. Provide information for management in designing employee development plans.

• **Knowledge Management**

A program to identify and develop a foundation framework for the implementation of the science management process within the Company. Knowledge Management preparation is carried out over a period of time ...

Since its first year in 2018, Knowledge Management Phase II, the Company has carried out Knowledge Capture Workshop activities as well as the establishment of a Knowledge Community (KONCO) which has been set once every two months for regular meetings to be held. The implementation of Knowledge Management will then be socialized by inviting a Subject Matter Expert (SME).



Kegiatan Pelatihan Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, terdapat ... kali program Diklat yang direalisasikan dan diikuti oleh ... pegawai organik dengan persentase rasio pegawai yang telah mengikuti pelatihan sebanyak ...% dari jumlah pegawai secara keseluruhan. Hasil rekapitulasi kegiatan Diklat yang dilaksanakan pada tahun 2020 disajikan dalam tabel-tabel sebagai berikut:

Training Activities in 2020

Throughout 2020, there were ... training programs implemented and attended by ... organic employees with the percentage ratio of employees who have attended training...% of the total number of employees. The results of the recapitulation of the Education and Training activities carried out in 2020 are presented in the following tables:

Rekapitulasi Kegiatan Pelatihan Tahun 2020
Recapitulation of Training in 2020

No.	Keterangan / Description	Jumlah Pegawai / Total Employees	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan / Total Participated Employees	Percentase Pegawai yang Mengikuti Pelatihan / Percentage of Employee Participated in the Training
1	Seluruh Pegawai / All Employees
2	Pegawai Laki-laki / Male
3	Pegawai Perempuan / Female

Pelatihan 2020 Berdasarkan Jumlah Jam Pelatihan dan Jenis Kelamin
Training in 2020 by Total Training Hours and Gender

No.	Keterangan / Description	Jumlah Pegawai / Total Employees	Jumlah Judul Pelatihan / Training	Jumlah Jam Pelatihan / Total Training Hours	Rata-rata jam Pelatihan/Tahun / Average Training Hours/Year
1	Seluruh Pegawai / All Employees
2	Pegawai Laki-laki / Male
3	Pegawai Perempuan / Female

Dengan realisasi ... pelatihan, maka rata-rata jam pelatihan per tahun pegawai Perseroan adalah ... jam/tahun dengan rincian ... jam/tahun untuk pegawai laki-laki dan ... jam/tahun untuk pegawai perempuan.

With the realization of ... training, the average hours of training per year for Company employees are ... hours/year with details ... hours/year for male employees and ... hours/year for female employees.

Jika dirinci berdasarkan jenis pelatihan, Program Diklat yang diselenggarakan terbagi menjadi tiga kategori, yaitu

If broken down by type of training, the Education and Training Program organized is divided into three categories, namely:

1. Pendidikan Formal

Pendidikan formal adalah pendidikan akademik atau pendidikan profesi yang diikuti di lembaga pendidikan. Pada tahun 2020, Manajemen Pelindo III memberikan kesempatan kuliah Pasca Sarjana (S2) kepada pegawai-pegawai terpilih sebanyak ... pegawai, untuk menuntut ilmu di berbagai Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

1. Formal Education

Formal education is academic education or professional education that is participated in educational institutions. In 2020, Pelindo III Management provided Master's Degree (S2) opportunities for ... selected employees to study at the best universities in Indonesia with the following details:



Jumlah Peserta Pendidikan Formal Tahun 2020
Total Formal Education Participants in 2020

No.	Universitas / University	Jurusan / Majors	Jumlah / Total
1
2
3
4
Jumlah / Total			...

2. Diklat Manajerial

Diklat Manajerial adalah diklat yang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan struktural tertentu, yang terdiri atas Diklat Manajerial tingkat Muda, tingkat Madya, dan tingkat Utama. Salah satu pelatihan peningkatan kompetensi pejabat struktural yang telah dilaksanakan di tahun 2020 adalah Pelatihan

Guna mempersiapkan kader-kader pemimpin bidang SDM, telah dilaksanakan pelatihan Rancangan Strategis Program Pembelajaran Bidang SDM yang diikuti ... peserta. Program ini diharapkan mampu memberikan bekal kompetensi bidang pengelolaan SDM dan mempersiapkannya menjadi pemimpin di masa mendatang.

3. Diklat Substansial

Diklat Substansial terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

a. Diklat Dasar

Program pelatihan yang menekankan pada *soft competency*, pembentukan sikap, kepribadian dan etika perusahaan, serta pengenalan bisnis perusahaan. Diklat *Delivering Service Excellence*, Budaya Perusahaan (*Change Champion*), *Speak to Change*, dan lain-lain diberikan untuk meningkatkan *soft competency* pegawai.

b. Diklat Teknik

Program yang menekankan pada pencapaian kompetensi teknis untuk bidang operasional, keuangan, teknik, SDM, hukum, kehumasan, dan lain-lain yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sesuai jabatannya. Diklat *mandatory* meliputi pelatihan-pelatihan teknis yang dipersyaratkan

2. Managerial Training

Managerial training is training that is required to occupy certain structural positions, which consists of Managerial Training at the Junior, Intermediate, and Top levels. One of the training to increase the competency of structural officials that has been carried out in 2020 was....

In order to prepare cadres of HC leaders, training on the Strategic Design of Human Resources Learning Programs has been attended by participants. This program is expected to be able to provide competence in the field of HC management and prepare them to become leaders in the future.

3. Substantial Training

The substantial training is divided into 3 (three) groups, namely:

a. Basic Training

A training program that emphasizes soft competency, shaping attitude, personality and company ethics, as well as introduction to company business. Delivering Service Excellence, Corporate Culture (*Change Champion*), Speak to Change, and others are provided to increase employee soft competency.

b. Engineering Training

A program that emphasize the achievement of technical competencies in the fields of operations, finance, engineering, human resources, law, public relations, and others needed to carry out tasks according to their positions. Mandatory training includes technical training required by national



dalam peraturan baik yang berlaku nasional maupun internasional.

c. Diklat Fungsional

Program yang menekankan pada persyaratan kompetensi yang diperlukan dalam jenjang jabatan fungsional. Jabatan fungsional seperti Tenaga Pandu, bidang *Information and Technology*, dan Auditor diberikan pelatihan yang dibutuhkan untuk peningkatan kompetensi bidangnya.

and international regulations.

c. Functional Training

A program that emphasizes the competency requirements required for functional positions. Functional positions such as Guidance, Information and Technology, and Auditor are given the training needed to increase their field competence.

Realisasi Pelaksanaan Diklat Manajerial dan Substansial Tahun 2020

Realization of Managerial and Substantial Trainings in 2020

No.	Nama Pelatihan / Name of Training	Bidang / Field	Kelas Jabatan / Position Class								Jumlah Peserta / Total Participants
			Manager Utama / Top Manager	Manager Madya / Intermediate Manager	Manager Muda / Junior Manager	Manager Dasar / Basic Manager	Pelaksana Utama / Top Officer	Pelaksana Madya / Intermediate Officer	Pelaksana Muda / Junior Officer	PDS/Anak Perusahaan / PDS/ Subsidiaries	
			(4-6)	(7-9)	(10-11)	(12-13)	(14-15)	(16-18)			
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Biaya Pengembangan Kompetensi SDM

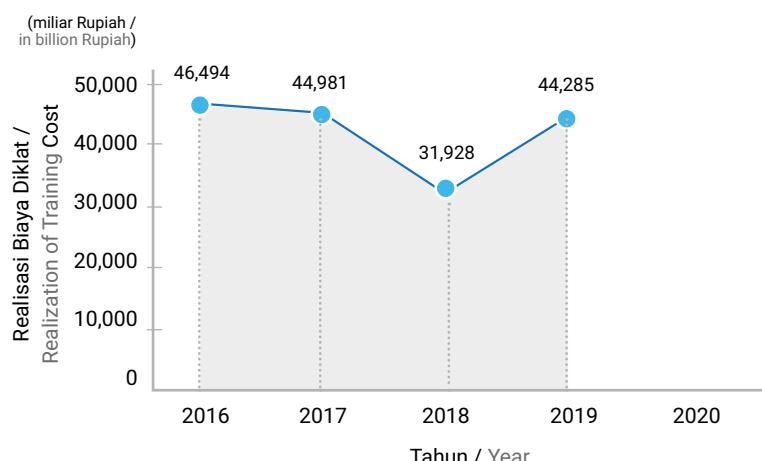
Sampai dengan akhir tahun 2020, Perseroan telah merealisasikan anggaran untuk pelatihan dan pendidikan pengembangan kompetensi SDM sebesar Rp.... Jumlah tersebut lebih besar/kecil dibandingkan realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp44,285 miliar. Hal ini disebabkan karena

HC Competency Development Costs

As of the end of 2020, the Company realized Rp... for training and education, lower/higher than the realization of the 2019 budget at Rp44,285 billion. This was caused by



Realisasi Biaya Diklat / Realization of Training Cost



Rencana Pengembangan Kompetensi SDM Tahun 2021

Guna memastikan bahwa pengembangan kompetensi SDM Perseroan terus berjalan secara berkelanjutan, Perseroan menempatkan rencana dan target pengembangan kompetensi pegawai sebagai salah satu aspek yang diatur dalam penetapan target di tahun mendatang. Adapun rencana program pengembangan kompetensi SDM di tahun 2021 antara lain:

- **Pendidikan dan Pelatihan Formal**

Perseroan berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki dengan memberikan beasiswa pendidikan untuk pegawai berupa beasiswa peningkatan ijazah pegawai dari Diploma III (D-III) menjadi Strata-1 (S1) hingga Program Pascasarjana (S2 dan S3), baik di universitas dan institut dalam maupun luar negeri.

- **Pendidikan dan Pelatihan Substansial**

Perseroan berupaya terus meningkatkan kemampuannya dalam memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan terbaik kepada pelanggan. Untuk itu, Perseroan berfokus untuk memberikan Pendidikan dan Pelatihan yang dibutuhkan pada masing-masing fungsi organisasi, pemenuhan Pendidikan dan Pelatihan yang bersifat *mandatory*, serta memperbanyak pelatihan bersertifikasi.

HC Competency Development Plan for 2021

To ensure that the development of the Company's HC competencies continues on an ongoing basis, the Company has put plans and targets for employee competency development as one of the aspects regulated in setting targets for the coming year. The HC competency development program plans for 2021 include:

- **Formal Education and Training**

The Company seeks to improve the quality of its human capital by providing educational scholarships for employees to upgrade employee diplomas from Diploma III (D-III) to Bachelor's Degree (S1), Master's Degree (S2), and Doctoral Degree (S3), both at local and overseas universities and institutes.

- **Substantial Education and Training**

The Company strives to improve its capabilities in providing the best port services to customers. For this reason, the Company focuses on providing the necessary Education and Training for each organizational function, fulfilling mandatory Education and Training, as well as increasing certified training.



Peningkatan pengetahuan dan kompetensi pada tahun 2021 akan berpedoman pada *Learning Design* yang telah dimiliki, dengan target bahwa pelatihan didasarkan pada standar kompetensi Perseroan di mana setiap pegawai memperoleh minimal masing-masing 1 (satu) kali pelatihan *Soft Competency* dan *Hard Competency*. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada Pegawai sesuai dengan *gap* kompetensi masing-masing. Selain itu, di tahun mendatang akan ditambahkan beberapa kegiatan peningkatan pengetahuan melalui kegiatan *Sharing Session* dan *Ask the Expert* yang juga merupakan bagian dari *Knowledge Management*, serta sertifikasi keahlian di beberapa bidang.

PENGEMBANGAN BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya Perusahaan berperan penting dalam mengintegrasikan semangat, perilaku, sikap, dan etos kerja yang selaras bagi seluruh pegawai Perseroan. Hal ini dilatarbelakangi keyakinan bahwa *mindset*, nilai, dan sikap yang selaras dengan standar dan identitas perusahaan akan memperkuat pencapaian visi, misi, dan tujuan Perseroan. Sebagai entitas BUMN, Perseroan menerapkan praktik terbaik dalam menegakkan budaya Perusahaan, salah satunya dengan pembentukan Subdirektorat Budaya Perusahaan dan sosialisasi budaya Perusahaan secara berkala kepada seluruh insan Perseroan.

Sepanjang tahun 2020, sejumlah program Budaya Perusahaan telah dijalankan, antara lain:

1. ...
2. ...
3. ...

Knowledge and competency improvement for 2021 will refer to the Learning Design, with the target that the training is based on Company competency standards where each Employee obtains at least one training in Soft Competency and Hard Competency. Education and training provided to Employees are under their respective Competency Gap. Moreover, some knowledge enhancement activities will be added next year through Sharing Session and Ask the Expert activities which are also part of Knowledge Management, as well as expertise certification in various fields.

CORPORATE CULTURE DEVELOPMENT

The corporate culture plays an important role in integrating the spirit, behavior, attitudes, and work ethic that are in harmony with all employees of the Company. This is motivated by the belief that the mindset, values, and attitudes that are in line with the standards and identity of the Company will strengthen the achievement of the Company's vision, mission, and objectives. As an SOE, the Company implements the best practices in upholding its corporate culture, one of which is the establishment of the Subdirectorate for Corporate Culture and periodic dissemination of corporate culture to all Company personnel.

Corporate Culture programs that have been implemented throughout 2020 are as follows:

1. ...
2. ...
3. ...



MANAJEMEN TALENTA (TALENT MANAGEMENT)

Perseroan menerapkan Manajemen Talenta (*Talent Management*) sebagai sebuah rangkaian proses, sistem, dan implementasi strategi yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas SDM di lingkungan Perusahaan. Langkah yang diterapkan antara lain akuisisi talenta, pengembangan kompetensi talenta, pengembangan karier talenta untuk sukses pemenuhan posisi kunci atau *key strategic position*, dan mempertahankan individu-individu yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan. Seluruh upaya dan strategi Talent Management telah diatur dalam Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. PER.0009/HK.01/HOFC-2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Manajemen Talenta. Dalam hal ini, pelaksanaan *Talent Management* berada di bawah tanggung jawab Subdirektorat Strategi dan Kesiarian SDM dengan pengawasan dan pengendalian langsung dari Asisten Senior Manager Perencanaan SDM dan Manajemen Talenta.

Sebagai suatu rangkaian proses sistem, pada tahun 2020 telah diterapkan ITMS (*Integrated Talent Management System*) yang merupakan sistem teknologi informasi dengan mengintegrasikan manajemen talenta dengan manajemen karier perusahaan untuk mempersiapkan sukses pengisian jabatan strategis (*key strategic position*). Asesmen kompetensi pada seluruh level jabatan dan penilaian kinerja melalui penilaian *Key Performance Indicator (KPI)* merupakan proses awal yang akan menentukan proses penjaringan talenta (*talent sourcing*) atau proses identifikasi *talent*. ITMS diperkenalkan dengan nama Aplikasi PINTAR (Pelindo III *Talent Resource*). Pemetaan talenta dilakukan menggunakan sistem aplikasi PINTAR dengan memperhitungkan Parameter Rekomendasi Hasil Asesmen Kompetensi dan Penilaian Kinerja untuk dipetakan ke dalam kategori *talent cluster* yang berbeda (9 box) dan disebut sebagai *talent pool*.

TALENT MANAGEMENT

The Company implements Talent Management as a series of processes, systems, and implementation of strategies designed to increase HC productivity in the Company environment. The steps taken include recruiting talents, developing talent competencies, developing talent career development for succession and fulfillment of key positions or key strategic positions, and retaining individuals who have the abilities and skills that match the Company's business needs. All efforts and strategies of Talent Management have been regulated in the Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. PER.0009/HK.01/HOFC-2019 dated 30 January 2019 regarding Talent Management. In this case, the implementation of Talent Management is under the responsibility of the Sub-Directorate for Strategy and HC Systems with direct supervision and control from the Vice President for HC Planning and Talent Management.

As a series of system processes, in 2020 ITMS (*Integrated Talent Management*) has been implemented. ITMS is an information technology system done by integrating talent management with corporate career management to prepare succession of filling strategic positions (*key strategic positions*). Competency assessment at all levels of positions and performance appraisal through *Key Performance assessment Indicator (KPI)* are among the initial processes that will determine talent sourcing or talent identification processes. ITMS is introduced under the name of the PINTAR Application (Pelindo III Talent Resources). Talent mapping is done using SMART application system taking into account Parameter Recommendation Result of Competency Assessment and Performance Assessment will be mapped into different talent cluster categories (9 boxes) and are referred to as talent pool.



Perseroan mengikutsertakan seluruh karyawan dalam program kaderisasi tanpa membedakan gender ataupun faktor-faktor lain seperti suku, agama, maupun golongan. Aspek yang dinilai dalam program pengembangan karier pegawai adalah potensi, pencapaian kinerja, kompetensi, dan keterampilan individual pegawai, dengan mempertimbangkan kesesuaian profil jabatan.

KEBIJAKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Perseroan memberlakukan hubungan industrial yang sehat, harmonis, dan saling bertanggung jawa dengan seluruh pegawai Perseroan, baik dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban, penyediaan mekanisme dan forum diskusi dan aspirasi, maupun keterlibatan kedua belah pihak. Perseroan telah membentuk serikat pekerja bernama Serikat Pegawai Pelabuhan Indonesia III (SPPI III) yang berfungsi untuk menjembatani kepentingan antara Perseroan dengan pegawai serta mendukung terpenuhinya hak dan kewajiban di antara keduanya. Serikat pekerja ini telah terdaftar pada tahun 1999 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. KEP.327/M/BW/1999 tanggal 20 Juli 1999 tentang Pendaftaran Serikat Pegawai Pelindo III (SPPI) tingkat nasional dan tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Surabaya tanggal 28 Desember 2004. Serikat Pegawai Pelabuhan Indonesia III (SPPI III) memiliki kepengurusan pusat (Dewan Pengurus Pusat) di Surabaya dan kepengurusan cabang (Dewan Pengurus Cabang) di seluruh wilayah kerja Perseroan guna menjaring aspirasi pegawai secara merata.

Pemenuhan hak dan kewajiban antara Perseroan dengan pegawai telah diatur dan disepakati bersama dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PKB ini senantiasa dibahas dan di-review ulang bersama setiap dua tahun sekali guna menentukan kesepakatan-kesepakatan baru antara Pegawai dan Manajemen sebagai perwakilan Pengusaha, untuk kemudian diusulkan pada Direksi dan didaftarkan ke Kementerian Ketenagakerjaan. PKB tersebut juga telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota Jakarta sebagaimana ditetapkan dengan No. KEP-251/PHIJSK-PK/PKB/XI/2019.

The Company engages all employees in the regeneration program regardless of gender or other factors such as ethnicity, religion, or class. Aspects assessed in the employee's career development program are the potential, competencies, and skills of individual employees by considering the suitability of the position profile.

INDUSTRIAL RELATIONS POLICY

The Company maintains sound, harmonious, and mutually responsible industrial relations with all employees of the Company, both in fulfilling rights and obligations, providing mechanisms and forums for discussion and aspirations, as well as the involvement of both parties. The Company has established a trade union called the Employee Union of Pelindo III (SPPI III) which functions to mediate the interests of the Company and employees and support the fulfillment of rights and obligations between the two. This trade union was registered in 1999 in accordance with the Decree of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia No. KEP.327/M/BW/1999 dated July 20, 1999 concerning the registration of Employee Union of Pelindo III (SPPI) at the national level and recorded at the Surabaya City Manpower and Mobility Office on December 28, 2004. The Employee Union of Pelindo III (SPPI III) has central management (Central Executive Board) in Surabaya and branch management (Branch Management Board) in all working areas of the Company in order to accomodate the aspirations of employees equally.

The fulfillment of the rights and obligations between the Company and employees has been mutually regulated and agreed upon in the Collective Labor Agreement (PKB). This PKB is always discussed and reviewed every two years in order to determine new agreements between Employees and Management as representatives of Employers, to be proposed to the Board of Directors and registered with the Ministry of Manpower. The PKB has also been registered with the Manpower Office Jakarta City as stipulated in No. KEP-251/PHIJSK-PK/PKB/XI/2019.



KESEJAHTERAAN SDM

Survei Kepuasan Pegawai

Perseroan berupaya memenuhi kesejahteraan pegawai yang melebihi kewajiban sehingga tidak hanya melihat faktor remunerasi dan manfaat semata, tetapi juga memperhitungkan kepuasan pegawai atas kebijakan dan iklim usaha yang dibangun oleh Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan memandang kewajiban Perseroan terhadap pegawai tidak hanya bertumpu pada pemenuhan remunerasi dan kompensasi, tetapi juga upaya dalam membangun iklim dan suasana kerja yang positif yang mampu mendukung produktivitas pegawai. Hal tersebut kemudian akan memotivasi seluruh pegawai untuk mengerahkan kinerja terbaik dan mengembangkan potensi serta talenta yang dimiliki demi kemajuan dan pertumbuhan usaha Perseroan.

Secara berkala, Perseroan melakukan survei kepuasan pegawai atas kebijakan dan langkah strategis yang diambil oleh Perseroan. Survei kepuasan pegawai dilakukan secara *online* untuk mempermudah perhitungan dan akurasi data. Indikator yang dinilai dalam survei kepuasan pegawai meliputi:

1. Strategi dan Organisasi
2. Manajemen Karier
3. Pelatihan dan Pengembangan
4. Manajemen Kinerja
5. Remunerasi dan Kesejahteraan
6. Hubungan Industrial
7. Lingkungan Kerja dan Budaya Perusahaan
8. Disiplin Kerja

Hasil Survei Korporat

**Kepuasan Pegawai /
Employee Satisfaction**



WELFARE OF HUMAN CAPITAL

Employee Satisfaction Survey

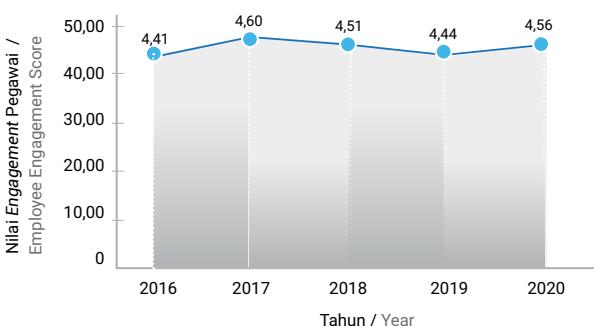
The Company strives to meet employee welfare that exceeds obligations so that it does not only consider the remuneration and benefits factors, but also takes into account employee satisfaction with the policies and business climate built by the Company. Therefore, the Company views that the Company's obligations to employees are not only based on fulfilling remuneration and compensation, but also on efforts to build a positive working climate and atmosphere that is able to support employee productivity. This will then motivate all employees to exert their best performance and develop their potential and talents for the progress and growth of the Company's business.

The Company periodically conducts employee satisfaction surveys on the policies and strategic steps taken by the Company. Employee satisfaction surveys are conducted online to facilitate calculation and data accuracy. The indicators assessed in the employee satisfaction survey include:

1. Strategy and Organization
2. Career Management
3. Training and Development
4. Performance Management
5. Remuneration and Welfare
6. Industrial Relations
7. Work Environment and Corporate Culture
8. Work Discipline

Results of Corporate Surveys

**Engagement Pegawai /
Employee Engagement**



**Hasil Pencapaian per Aspek****Achievement per Aspect**

Aspek / Aspect	Nilai / Score
Keselamatan Kerja / Occupational Health	4.48
Besaran Penghasilan / Income	4.62
Lingkungan Kerja / Work Environment	4.46
Hubungan Kerja / Work Relations	4.55
Kesesuaian Pekerjaan / Conformity of Work	4.57
Bimbingan Atasan / Supervisor's Guidance	4.43
Dedikasi & Komitmen / Dedication & Commitment	4.53
Konsentrasi / Concentration	4.49
Semangat Kerja / Work Spirit	4.65

Hasil dari survei kepuasan dan *engagement* pegawai akan menjadi acuan dasar bagi Perseroan untuk melakukan penyempurnaan dan pemberahan pengelolaan SDM ke depan.

The results of the employee satisfaction and engagement survey will serve as a basic reference for the Company to make improvements and reforms in HC management in the future.

Fasilitas dan Manfaat

Di samping remunerasi dan kompensasi, Perseroan berusaha memberikan fasilitas dan manfaat yang kompetitif bagi pegawai guna mendorong kinerja terbaik serta mempertahankan talenta-talenta terbaik dalam organisasi Perseroan. Adapun fasilitas dan manfaat yang disediakan Perseroan sebagaimana diatur melalui peraturan Direksi meliputi:

- **Asuransi Kesehatan Pegawai**

Selain menggunakan BPJS Kesehatan yang merupakan syarat wajib dari Pemerintah bagi pengusaha untuk melindungi pekerjanya, Perseroan memberikan fasilitas asuransi proteksi kesehatan tambahan bagi pegawai serta keluarganya (mencakup suami/istri serta dua anak) dan pensiunan pegawai (mencakup suami/istri) yang bekerja sama dengan Medsoc sebagai penyedia dan pengendali biaya kesehatan.

Facilities and Benefits

In addition to remuneration and compensation, the Company strives to provide competitive facilities and benefits for employees to encourage the best performance and retain the best talents in the Company's organization. The facilities and benefits provided by the Company as regulated by the Board of Directors regulations include:

- **Employee Health Insurance**

In addition to utilizing BPJS Kesehatan program, which is a government's mandatory requirement for employers to protect their workers, the Company provides additional insurance for its employees and their families (covering husband/wife as well as two children) and retired employees (covering wife/ husband) in cooperation with Medsoc as healthcare provider and cost controller.

- **Bantuan Mudik**

Perseroan memfasilitas tiket perjalanan pegawai dengan menggunakan transportasi darat dan udara untuk dapat mengunjungi keluarga intinya (suami/ istri dan anak apabila berstatus Janda/Duda) apabila tinggal terpisah untuk bertemu sebanyak 4 kali dalam setahun.

- **Homecoming Allowance**

The Company facilitates Employees' travel tickets by land and air transport to visit their nuclear family (husband/ wife and children if they are of widow/ widower status), if they live separately, to meet four times a year.



- **Flexy Time**

Pegawai Perseroan dapat menentukan jadwal pulang kerjanya sesuai dengan kebutuhan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yakni dengan prinsip datang lebih awal dapat pulang lebih cepat.

- **Bantuan Ibadah Keagamaan**

Bantuan ini diberikan bagi pegawai (suami dan istri) terpilih yang memenuhi kriteria (Assessment, Masa Kerja, serta Nilai Prestasi Pegawai) untuk mengikuti perjalanan rohani sesuai dengan masing-masing keyakinannya (Mekkah, India, Thailand, atau Yerusalem).

- **Cuti Kunjungan Keluarga**

Diberikan kepada pegawai yang dimutasi/ditugaskan pada wilayah kerja Perusahaan yang merupakan Pelabuhan terpencil, yang tidak membawa serta keluarga inti pada wilayah penugasannya, dan dapat dilakukan setiap bulan selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) bulan untuk 1 (satu) kali pelaksanaan dan tidak bersifat kumulatif.

- **Cuti Mendampingi Istri Melahirkan**

Pegawai laku-laki mendapat cuti khusus 5 (lima) hari kerja untuk mendampingi istrinya yang melahirkan.

- **Cuti Pegawai**

Perseroan menambahkan cuti tahunan sebanyak 14 hari kerja dengan ketentuan 12 hari kerja penuh dan 2 hari kerja yang diambil masing-masing $\frac{1}{2}$ hari untuk kepentingan mendesak Pegawai.

- **Penghargaan Purnabakti**

Selain pesongan yang diamanatkan dalam ketentuan ketenagakerjaan, Perseroan juga memberikan penghargaan yang besarnya atas masa kerja Pegawai selama bertugas di Perseroan.

- **Pengangkatan Kembali**

Khusus untuk Pegawai yang ditugaskan sebagai Direksi BUMN oleh Kementerian, diberikan kesempatan kembali untuk bergabung di Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- **Usia Pensiun**

Usia pensiun Pegawai yang semula 56 tahun, diperpanjang menjadi 58 tahun.

- **Flexy Time**

Employees can set the schedule of their work according to their respective needs and the stipulated provisions, i.e. the principle of coming to work early to finish earlier.

- **Religious Donations**

Provided for selected employees (husband and wife) who meet the criteria (Assessment, Work Period, and Employee Achievement Value) to have a spiritual journey according to their respective beliefs (Mecca, India, Thailand, or Jerusalem).

- **Family Visit Leave**

Provided to employees transferred to remote Port as part of work area of the Company that do not bring their nuclear family in the work region they are assigned to. The leave can be taken every month for 3 (three) working days in 1 (one) month for 1 (one) leave and is not cumulative.

- **Leave to Accompany Childbirth**

Male employees receive a special leave of five working days to accompany their wife in labor.

- **Employee Leave**

The Company adds annual leave of 14 workdays with the provisions of 12 full work days and two workdays taken a half-day each for urgent matters.

- **Post-Employment Award**

In addition to the severance mandated in the employment provisions, the Company also gives rewards of which the number is based on the term of employment of the concerned Employees in the Company.

- **Reappointment**

Particularly for employees who are assigned as a member of the Board of Directors of an SOE by the Ministry, they are allowed to join the Company again based on applicable regulations.

- **Retirement Age**

The Employees' retirement age is extended to 58 years old from 56 years old, previously



Program Pensiun

Manfaat tambahan berupa kebijakan dan program pensiun diberikan Perseroan kepada pegawai yang akan memasuki masa purna bakti. Persiapan tersebut ditujukan untuk membantu pegawai dalam mempersiapkan mental maupun finansial dalam memasuki masa purna bakti. Ketentuan batas usia aktif yang berlaku di Pelindo III ditetapkan sampai dengan usia 56 tahun, namun pegawai dapat memperpanjang masa kerja hingga usia 58 tahun apabila dibutuhkan Perseroan dan apabila pegawai tersebut bersedia untuk memperpanjang masa kerja aktifnya.

Beberapa fasilitas yang diberikan Perseroan dalam mendukung kesejahteraan pegawai yang memasuki masa pensiun antara lain:

1. Pelatihan Persiapan Masa Pensiun

Salah satu upaya Perseroan dalam membekali kesiapan mental bagi pegawai yang akan memasuki masa purna bakti adalah melalui pelatihan/pembekalan persiapan masa pensiun dengan materi yang diberikan antara lain terkait dengan motivasi pegawai untuk tetap produktif di masa pensiun, pengelolaan keuangan pasca pensiun, dan materi yang relevan lainnya.

2. Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan

Program BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi salah satu kewajiban ketentuan kepegawaian bagi Perseroan meliputi Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm) dan Jaminan Pensiun (JP).

3. Tabungan Pensiun

Program PT Taspen Life yang memberikan Manfaat/Jaminan Keuangan pada waktu pensiun.

KEBIJAKAN REMUNERASI SDM

Perseroan berupaya memberikan skema remunerasi yang kompetitif dan adil serta menyesuaikan dengan ketentuan ketenagakerjaan dan pengupahan yang berlaku, bobot kerja atau jenjang jabatan tiap pegawai, survei penghasilan, kemampuan, dan pencapaian Perseroan. Dalam penerapannya, Perseroan menerapkan prinsip 3P (*Pay for People, Pay for Performance, dan Pay for Position*) dalam pemberian imbal jasa pegawai. Tidak menutup kemungkinan Perseroan juga memberikan

Retirement Program

Additional benefits in the form of pension policies and programs are provided by the Company to employees who are about to enter their retirement period. This preparation is intended to assist employees in preparing mentally and financially for retirement. The provisions for the active age limit that apply at Pelindo III are set up to the age of 56 years old, however employees may extend the working period up to the age of 58 years old if needed by the Company and if the employee is willing to extend his/her active service period.

Some of the facilities provided by the Company to support the welfare of employees who are entering retirement, include:

1. Retirement Preparation Training

One of the Company's efforts to provide mental readiness for employees who are about to enter retirement is through training/debriefing preparation for retirement with the material provided, among others, related to employee motivation to remain productive in retirement, post-retirement financial management, and other relevant materials.

2. BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan program which is one of the obligations of employment provisions for the Company includes Old Age Security (JHT), Work Accident Security (JKK), Death Protection (JKm) and Pension Security (JP).

3. Pension Savings

PT Taspen Life program that provides Benefit/Financial Security during retirement period.

REMUNERATION POLICY

The Company strives to provide a competitive and fair remuneration scheme and adjusts to the prevailing employment and wage provisions, workload or employee position, a survey of the Company's income, abilities, and achievements. The Company applies the 3P principle (Pay for People, Pay for Performance, and Pay for Position) in providing employee fees. It is possible that the Company will also provide additional remuneration in the form of a performance bonus for individuals by considering the



penambahan remunerasi berupa bonus kinerja bagi individu dengan menimbang hasil evaluasi kinerja dan pencapaian KPI individu tersebut.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. PER.0023/KP.0602/HOFC-2018 tanggal 24 Juli 2018, komponen remunerasi pegawai berdasarkan jenis jabatannya diuraikan sebagai berikut:

results of the performance evaluation and achievement of the individual KPIs.

As stipulated in the Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. PER.0023/KP.0602/HOFC-2018 dated July 24, 2018, the components of employee remuneration based on the type of position are described as follows:

Komponen Remunerasi Pegawai / Employee Remuneration Component

Struktural / Structural	Fungsional / Functional	Pelaksana / Implementer
Penghasilan merit / Income merit	Penghasilan merit / Income merit	Penghasilan merit / Income merit
Tunjangan prestasi pegawai / Employee performance allowance	Tunjangan prestasi pegawai / Employee performance allowance	Tunjangan prestasi pegawai / Employee performance allowance
Tunjangan jabatan / Position allowance	Tunjangan jabatan / Position allowance	Bantuan transportasi / Transportation allowance
Tunjangan transportasi / Transportation allowance	Tunjangan transportasi / Transportation allowance	Bantuan hidup minimum / Minimum living allowance
Bantuan hidup minimum / Minimum living allowance	Bantuan hidup minimum / Minimum living allowance	Tunjangan hari raya / Holiday allowance
Tunjangan hari raya / Holiday allowance	Tunjangan hari raya / Holiday allowance	Bonus tahunan / Annual bonus
Tunjangan kinerja individu / Individual performance allowance	Tunjangan kinerja individu / Individual performance allowance	Tunjangan kinerja individu / Individual performance allowance
Bonus tahunan / Annual bonus	Bonus tahunan / Annual bonus	Fasilitas kesehatan / Health facility
Fasilitas kesehatan / Health facility	Fasilitas kesehatan / Health facility	Tunjangan cuti / Leave allowance
Tunjangan cuti / Leave benefit	Tunjangan cuti / Leave benefit	Bantuan pendidikan / Educational allowance
Bantuan pendidikan / Educational allowance	Bantuan pendidikan / Educational allowance	

Sejak tahun 2018, terdapat komponen baru remunerasi pegawai, yaitu Tunjangan Kinerja Individu, yang besarannya ditentukan berdasarkan penilaian langsung dari masing-masing atasan. Selain hal tersebut, secara konsisten Perseroan juga memberikan komponen imbal jasa lainnya seperti Bantuan Hidup Minimum, Bantuan Pulang Kampung, Bantuan Pendidikan, Tunjangan Hari Raya, serta Insentif Kinerja yang besarannya didiskusikan bersama-sama oleh Manajemen dan Serikat Pegawai Pelabuhan Indonesia III (SPPI III) untuk kemudian disepakati dan diusulkan kepada jajaran Direksi.

As of 2018, there is a new component of employee remuneration, namely Individual Performance Allowance of which the amount is determined based on the direct assessment of each supervisor. Moreover, the Company also consistently provides other reward components such as Minimum Life Allowance, Homecoming Allowance, Educational Allowance, Holiday Allowance, as well as Performance Incentives which are discussed jointly by Management and the Pelabuhan Indonesia III Labor Union (SPPI III) to be agreed upon and proposed to the Board of Directors.



PEMBERLAKUAN REWARD DAN PUNISHMENT

Reward

Perseroan memberlakukan kebijakan pemberian *reward* (penghargaan) dan *punishment* (sanksi) sebagai bentuk penegakan kedisiplinan sekaligus pemberian apresiasi bagi pegawai. Pemberian *reward* diberikan apabila pegawai berhasil mencapai kinerja berdasarkan penilaian melalui sistem manajemen kinerja setiap individu pegawai. Keberadaan *reward* bertujuan untuk memotivasi pegawai untuk mengerahkan kinerja terbaik.

Penghargaan yang berikan Perseroan adalah berupa tunjangan pembinaan bagi pegawai yang memberikan usulan inovasi yang berguna bagi kemajuan proses bisnis Perseroan. Tunjangan pembinaan ini diberikan 2 (dua) kali dalam setahun.

Pemberian Reward bagi Pegawai Tahun 2019 – 2020
Rewards for Employees in 2019-2020

Jenis Reward / Type of Reward	2020	2019
Kenaikan Gaji Berkala / Periodic Salary Increase
Penghargaan Masa Kerja / Tenure Awards
Tunjangan Pembinaan / Coaching Allowance
Jumlah / Total

Punishment

Perseroan memberlakukan kebijakan *punishment* yang diberikan bagi pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran atau tindakan indisipliner berupa pemberian sanksi. Bentuk pemberian sanksi mempertimbangkan unsur perbuatan yang dilakukan serta dampak yang ditimbulkan bagi Perseroan. Ketentuan mengenai pemberian *punishment* telah diatur dalam Peraturan Direksi Pelindo III No. PER.50.1/KP.0303/P.III-2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Peraturan Disiplin Pegawai.

Sanksi yang diberikan terbagi menjadi sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.

REWARD AND PUNISHMENT

Reward

The Company enforces a reward and punishment (sanctions) policy as a form of discipline enforcement as well as giving appreciation to employees. Rewards are given when employees succeed in achieving performance based on assessment through the performance management system of each individual employee. The existence of rewards aims to motivate employees to exert their best performance.

The awards given by the Company are in the form of coaching allowances for employees who provide innovative suggestions that are useful for the progress of the Company's business processes. This coaching allowance is given 2 (two) times a year.

Punishment

The Company imposes a punishment policy that is given to employees who are proven to have committed violations or disciplinary actions in the form of imposing sanctions. The form of imposing sanctions takes into account the elements of the actions taken and the impact on the Company. The provisions regarding the giving of punishment have been regulated in Regulation of Board of Directors of Pelindo III No. PER.50.1/KP.0303/P.III-2013 dated December 27, 2013 concerning Employee Discipline Regulations.

The sanctions given are divided into light sanctions, moderate sanctions, and heavy sanctions.



**Pemberian *Punishment* bagi Pegawai Tahun 2019 – 2020 /
Punishment for Employees in 2019-2020**

Jenis <i>Punishment</i> / Type of Punishment	2020	2019
Sanksi Ringan / Light Sanctions	122	75
Sanksi Sedang / Moderate Sanctions	11	9
Sanksi Berat / Heavy Sanctions	9	8
Jumlah / Total	142	92

SISTEM INFORMASI SDM

Dalam mendukung pengelolaan SDM secara terintegrasi serta mewujudkan layanan kepegawaian yang efektif dan efisien, Perseroan memanfaatkan metode digitalisasi dalam sistem informasi SDM, yang termasuk dalam hal administrasi, identifikasi perencanaan, hingga analisa SDM. Melalui pengembangan sistem informasi SDM, Direktorat Sumber Daya Manusia sebagai unit pengelola SDM mampu menjamin akurasi serta memperbarui data pegawai seiring dengan perkembangan jumlah SDM yang dimiliki Perseroan guna mendukung pengembangan jenjang karier dan rekam jejak setiap pegawai.

Sistem informasi SDM senantiasa memperoleh perbaikan dan pengembangan secara berkelanjutan. Adapun pengembangan layanan kepegawaian dan informasi SDM yang dilakukan selama tahun 2020 antara lain:

1. ...
2. ...

RENCANA PENGEMBANGAN PENGELOLAAN SDM TAHUN 2021

Mengacu pada *Roadmap* Pengembangan SDM yang telah ditetapkan, pada tahun 2021 Perseroan akan berfokus pada Penyelarasan Fungsi SDM dengan bisnis dan optimasi Proses. Dalam mencapai *roadmap* yang telah ditetapkan, Perseroan telah merumuskan target dan program kerja pengelolaan SDM di tahun 2021 dalam RKAP 2021. Target yang ditetapkan telah diselaraskan dengan rencana-rencana di tahun buku 2021 serta arah pengembangan usaha Perseroan. Program kerja yang direncanakan akan terealisasi di tahun 2021, antara lain:

HUMAN CAPITAL INFORMATION SYSTEM

In supporting integrated HC management and realizing effective and efficient staffing services, the Company utilizes the digitalization method in the HC information system, which includes administration, planning identification, and HC analysis. Through the development of HC information systems, the Human Capital Directorate as the HC management unit is able to guarantee the accuracy and update of employee data in line with the development of the number of human capital owned by the Company to support the development of career paths and track records of each employee.

HC information systems are constantly being improved and developed on an ongoing basis. The development of staffing services and HC information carried out throughout 2020 includes:

1. ...
2. ...

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT DEVELOPMENT PLAN FOR 2021

Referring to the HC Development Roadmap that has been established, in 2021 the Company focused on Alignment of HC Function with business and Process optimisation. In achieving the established roadmap, the Company has formulated targets and work programs for HC management in 2021 in the 2021 RKAP. The targets set have been aligned with plans for the 2021 fiscal year and the direction of the Company's business development. The work programs planned to be realized in 2021 include:



1. Mengembangkan *Web-Based* Aplikasi HSSE Korporat;
2. Menyusun *Contractor Safety Management System* (CSMS);
3. *Review* Infrastruktur Struktur Organisasi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);
4. Diseminasi strategi kebijakan dan informasi perusahaan;
5. Peningkatan kompetensi SDM yang mendukung bisnis sebagai terminal operator;
6. Pembuatan aplikasi *training* Pelindo III;
7. Integrasi budaya dalam aktivitas pengelolaan SDM;
8.
9.
10.
1. Develop a Web-Based Corporate HSSE Application;
2. Develop a Contractor Safety Management System (CSMS);
3. Review the Infrastructure of the Organizational Structure of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);
4. Disseminate company policy and information strategies;
5. Enhance the competence of human capital that support the business as a terminal operator;
6. Development of Pelindo III training applications;
7. Cultural integration in HC management activities;



TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Faktor kesiapan penyelenggaraan dan pengembangan TIK tidak hanya diukur dari seberapa banyak Perseroan melakukan investasi dari segi perangkat lunak, perangkat keras, maupun besaran biaya pemeliharaan yang direalisasikan, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan SDM, khususnya personil pengelola TIK yang berperan penting dalam merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi program-program kerja pengembangan TIK.

The readiness factor for the implementation and development of ICT is not only measured by the amount of the Company's investment in software, hardware, and realized maintenance costs, but also considers the readiness of human resources, particularly ICT management personnel who play an important role in planning, implementing, and evaluating ICT development work programs.



Perkembangan teknologi informasi yang sejalan dengan pertumbuhan industri memotivasi Pelindo III untuk memanfaatkan aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang ada demi mengoptimalkan elemen-elemen perusahaan yang tidak hanya menjaga relevansi dan adaptasi terhadap perubahan yang ada, tetapi juga mendorong efektivitas serta efisiensi proses bisnis yang dijalankan. Inisiatif pemanfaatan dan pengembangan TIK yang telah digagas sejak tahun 2014 senantiasa berkembang secara berkelanjutan dengan menyesuaikan dengan arah transformasi bisnis yang dituju. Dengan dimulainya *milestone* baru Pelindo III dalam menjajaki transformasi bisnis untuk menjadi *Industry Leader*, Perseroan telah mengintegrasikan aspek IT secara komprehensif dalam pelaksanaan pekerjaan dan aktivitas usaha sehingga keuntungan kompetitif (*competitive advantage*) dapat terjaga dan berkembang secara berkelanjutan.

The development of information technology in line with industrial growth motivates Pelindo III to take advantage of the existing aspects of Information and Communication Technology (ICT) to optimize elements of the Company that not only maintain relevance and adaptation to the existing changes, but also promote the effectiveness and efficiency of business processes. The ICT utilization and development that has been initiated since 2014 has continued to develop in a sustainable manner by adjusting to the direction of the intended business transformation. With the start of Pelindo III's new milestone in exploring business transformation to become an Industry Leader, the Company has integrated the IT aspects comprehensively in the implementation of work and business activities so that the competitive advantage can be maintained and developed in a sustainable manner.



KEBIJAKAN DAN KERANGKA TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI PERSEROAN

Penerapan pengelolaan dan pengembangan TIK di lingkungan Perseroan didukung oleh kesiapan elemen perusahaan yang terlibat, baik dari segi regulasi, anggaran, hingga SDM. Ketersediaan struktur dan perangkat kebijakan yang memadai diperbarui dan dimutakhirkan secara berkala melalui mekanisme review dan perencanaan kebutuhan TIK Perseroan.

Perangkat Kebijakan dan Soft Structure TIK

Dukungan atas penerapan dan pengembangan Tik dalam rangka menunjang kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan direalisasikan oleh manajemen Pelindo III, dalam hal ini Direksi Perseroan, melalui Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. PER.0019/HK.01.06/HOFC-2019 tentang Kebijakan Operasional Teknologi Informasi di Lingkungan Pelindo III serta Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. PER.0046/HK.0501/HOFC-2020 tentang Sinergi Teknologi Informasi dan Komunikasi Pelindo III Group. Dalam regulasi tersebut, Perseroan berupaya memenuhi aspek infrastruktur maupun *soft-structure* yang diperlukan guna memberikan aturan main yang jelas serta kewenangan-kewenangan yang diperlukan terkait pengelolaan aspek TIK di lingkungan Perseroan.

Muatan yang terkandung dalam regulasi tersebut yaitu:

1. Proses Perencanaan TIK
2. Pengelolaan Layanan TIK
3. Pengelolaan Keamanan TIK
4. Pengelolaan Layanan TIK Pihak Ketiga
5. Pengelolaan Operasional TIK
6. Pengelolaan Mutu Layanan TIK
7. *Knowledge Transfer* Layanan TIK
8. Pengelolaan Data pemantauan dan Evaluasi Kinerja TIK
9. Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Internal
10. Pengelolaan Kepatuhan terhadap Kebijakan Eksternal

COMPANY INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY POLICY AND FRAMEWORK

The implementation of ICT management and development in the Company is supported by the preparedness of involved elements of the Company, both in terms of regulations, budget, and human capital. The availability of adequate policy structures and tools is updated periodically through a review and planning mechanism for the Company's ICT needs.

ICT Soft Structure and Policy Tools

Support for the implementation and development of ICT to support the business activities carried out by the Company is realized by the management of Pelindo III, in this case the Board of Directors of the Company, through the Regulation of the Directors of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. PER.0019/HK.01.06/HOFC-2019 concerning Information Technology Operational Policies in Pelindo III Environment and Regulation of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. PER.0046/HK.0501/HOFC-2020 concerning the Synergy of Information and Communication Technology of Pelindo III Group. In this regulation, the Company seeks to fulfill the required infrastructure and soft-structure aspects to provide clear rules and the necessary authorities related to the management of ICT aspects in the Company.

The contents of the regulation are:

1. ICT Planning Process
2. ICT Service Management
3. ICT Security Management
4. Third Party ICT Service Management
5. ICT Operational Management
6. ICT Service Quality Management
7. ICT Service Knowledge Transfer
8. ICT Performance Monitoring and Evaluation Data Management
9. Monitoring and Evaluation of Internal Control
10. Management of Compliance with External Policies



Anggaran Investasi TIK

Guna mendukung daya saing usaha yang tinggi serta kemajuan atas penerapan TIK di lingkungan Perseroan sehingga mampu sejajar dengan perusahaan-perusahaan penyedia jasa kepelabuhanan lainnya di regional Asia bahkan dunia, Perseroan berkomitmen untuk memberikan dukungan secara menyeluruh dari beragam aspek termasuk dalam aspek anggaran.

Dengan melakukan riset yang terukur serta mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran, Perseroan telah melakukan pemetaan dan pengembangan rencana TIK yang dituangkan dalam *Master Plan TI 2019 – 2023*. Dalam Rencana Jangka Panjang tersebut, telah dilakukan penaksiran selama berjalannya program kerja yang ada.

Sebagaimana tertuang dalam RKAP 2020, Perseroan menetapkan basis anggaran investasi di bidang TIK sebesar Rp.... Sampai dengan akhir tahun 2020, Perseroan merealisasikan anggaran sebesar Rp... atau menyerap ...% terhadap anggaran yang ditetapkan dalam RKAP 2020 melalui program-program pengembangan TIK yang dilaksanakan oleh Subdirektorat TIK.

SDM di Bidang TIK

Faktor kesiapan penyelenggaraan dan pengembangan TIK tidak hanya diukur dari seberapa banyak Perseroan melakukan investasi dari segi perangkat lunak, perangkat keras, maupun besaran biaya pemeliharaan yang direalisasikan, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan SDM, khususnya personil pengelola TIK yang berperan penting dalam merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi program-program kerja pengembangan TIK. Dalam memenuhi kebutuhan akan kompetensi TIK yang terus berkembang, Perseroan melakukan penguatan kompetensi dan pengembangan kapasitas dan kapabilitas SDM di bidang TIK melalui program pelatihan, pendidikan, seminar, dan/atau *workshop* secara berkala demi menjaga relevansi kemampuan dan kualifikasi SDM di tengah perkembangan TIK yang semakin maju.

Informasi mengenai pengembangan kompetensi yang diikuti SDM di bidang TIK selama tahun 2020 telah dimuat pada bagian 'Pengembangan SDM di Bidang TIK'.

ICT Investment Budget

To support high business competitiveness and progress on the implementation of ICT in the Company's environment so that it is equal to other port service providers in the Asian region and even in the world, the Company is committed to providing comprehensive support from various aspects including the budget aspect.

By conducting research that is measured and prioritizes the principles of transparency, accountability, and fairness, the Company has carried out mapping and development of an ICT plan as outlined in the 2019-2023 IT Master Plan. In the Long-Term Plan, an assessment has been carried out over the course of the existing work program.

As stated in the 2020 RKAP, the Company sets a budget base for investment in the ICT sector of Rp ... As of the end of 2020, the Company has realized a budget of Rp ... or...% of the budget set in the 2020 RKAP through ICT development program implemented by the ICT Sub-direktorate.

ICT Human Capital

The readiness factor for the implementation and development of ICT is not only measured by the amount of the Company's investment in software, hardware, and realized maintenance costs, but also considers the readiness of human resources, particularly ICT management personnel who play an important role in planning, implementing, and evaluating ICT development work programs. In fulfilling the growing need for ICT competencies, the Company strengthens competencies and develops the capacity and capability of human capital in the field of ICT through training, education, seminars and/or workshops on a regular basis in order to maintain the relevance of HC capabilities and qualifications amid the increasingly growing ICT development.

Competency development participated by ICT HC sector throughout 2020 has been published in the 'HC Development in the ICT Sector' section.



MASTER PLAN PENGEMBANGAN TIK

Penetapan arah pengembangan TIK beserta strategi dan program kerja dituangkan ke dalam *Master Plan* TI 2020 – 2024. Penyusunan *Master Plan* ini merupakan kelanjutan dari *master plan* periode sebelumnya, yang kemudian disesuaikan dengan RJPP 2020 – 2024 dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Prinsip Tata Kelola Teknologi Informasi Kementerian BUMN. Penerapan dan pelaksanaan strategi serta program kerja ditinjau secara berkala oleh tim konsultan independen.

Master Plan TIK menampilkan 84 usulan inisiatif, yang terdiri dari 36 inisiatif terkait pengembangan aplikasi, 3 inisiatif tentang pengelolaan data, 31 inisiatif terkait pengembangan teknologi, 11 inisiatif terkait IT Service Management & Governance, dan 3 inisiatif terkait IT Operating Model. Seluruh inisiatif ini terangkum dalam 15 program kerja dan harus ditindaklanjuti serta dilaksanakan dengan target dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana *roadmap* yang telah diusulkan. Usulan program kerja dikategorikan dalam 3 tema utama:

1. Digitalisasi, Integrasi, dan Otomasi
2. Advanced Capability
3. Continuous Improvement

Hasil penilaian tingkat realisasi program *Master Plan* TI di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Hasil Penilaian Tingkat Realisasi Master Plan TI

(mohon data hasil penilaian tingkat realisasi *Master Plan* TI tahun 2020)

STRUKTUR PENGELOLA TIK

Subdirektorat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) merupakan direktorat yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola, mengembangkan, dan mengevaluasi kebijakan dan program TIK sesuai dengan *master plan* TIK serta arah pengembangan bisnis Perseroan. Subdirektorat TIK dikepalai oleh seorang Senior Manager dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Operasi dan Komersial.

ICT DEVELOPMENT MASTER PLAN

The determination of the direction of ICT development along with the strategy and work program is outlined in the 2020-2024 IT Master Plan. The preparation of this Master Plan is a continuation of the previous master plan, which was then adjusted to RJPP 2020-2024 and Regulation of the Minister of SOEs No. PER-02/MBU/02/2018 dated February 12, 2018 concerning Information Technology Governance Principles of the Ministry of SOE. The implementation of strategies and work programs are reviewed regularly by a team of independent consultants.

The ICT Master Plan features 84 proposed initiatives, consisting of 36 initiatives related to application development, 3 initiatives regarding data management, 31 initiatives related to technology development, 11 initiatives related to IT Service Management & Governance, and 3 initiatives related to the IT Operating Model. All these initiatives are summarized in 15 work programs and must be followed up and implemented with a target within 5 (five) years as in the proposed roadmap. Proposed work programs are categorized into 3 main themes:

1. Digitalization, Integration, and Automation
2. Advanced Capability
3. Continuous Improvement

The results of the assessment on the realization level of the IT Master Plan program in 2020 are as follows:

Results of the Assessment on the Realization Level of the IT Master Plan

ICT MANAGEMENT STRUCTURE

Information and Communication Technology (ICT) sub-directorate is a directorate that is responsible for planning, managing, developing, and evaluating ICT policies and programs in accordance with the ICT master plan and the direction of the Company's business development. The ICT Sub-directorate is led by a Senior Manager and is directly responsible to the Operations and Commercial Directorate.



Struktur Organisasi Subdirektorat TIK

(mohon data struktur organisasi Subdirektorat TIK terbaru di tahun 2020)



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ORGAN PENGELOLAAN TIK

Subdirektorat TIK dipimpin oleh seorang Senior Manager yang membawahi 4 Kepala Bidang, dengan pembagian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. ASM Tata Kelola & Perencanaan Strategis TIK bertanggung jawab untuk:

- Memastikan tersedianya rencana kerja dan portofolio TIK yang sesuai dengan target, strategi, dan kebutuhan bisnis Perseroan.
- Memastikan agar rencana kerja dan portofolio TIK diterjemahkan, dikembangkan, dan dilaksanakan di dalam koridor yang telah disepakati bersama.
- Memastikan adanya pengelolaan dan pemeliharaan arsitektur Perseroan yang sesuai dengan prinsip tata kelola TIK serta sesuai dengan Master Plan TIK Perseroan.
- Memastikan adanya pengelolaan SDM TIK yang meliputi proses perencanaan, pembinaan, dan pengembangan SDM sebagai salah satu aset penting Perseroan.
- Memastikan tersedianya proses pengelolaan risiko TIK dalam pelaksanaan program kerja dan operasional TIK.
- Memastikan adanya kebijakan, standar, dan prosedur TIK yang sesuai dengan kondisi Perseroan dan menjamin adanya evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaannya.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF ICT MANAGEMENT ORGAN

The ICT Sub-Directorate is led by a Senior Vice President who oversees four Division Heads, with duties and responsibilities as follows:

1. VP of ICT Governance and Strategic Planning, who is responsible for:

- Ensuring the availability of ICT work plans and portfolios fitting the Company's targets, strategies, and business needs.
- Ensuring that the ICT work plan and portfolio are translated, developed, and implemented within a commonly agreed term.
- Ensuring that the Company's architecture is managed and maintained based on the principles of ICT governance as well as the Company's ICT Master Plan.
- Ensuring the management of ICT Human Capital, which covers the processes of planning, cultivating, and developing Human Capital as one of the important Company assets.
- Ensuring the availability of ICT risk management process in the implementation of ICT programs and operations.
- Ensuring that the ICT policies, standards, and procedures are available and suitable with the Company's conditions and ensuring periodic evaluations on its implementation.



- Memastikan adanya *Service Level Agreement* (SLA) termasuk proses pengelolaannya yang telah disepakati dengan unit fungsional terkait.
 - Memastikan adanya proses pemantauan SLA, termasuk hasil analisis dan evaluasi kinerja SLA, serta penyusunan laporan konsolidasi mengenai kinerja dan pencapaian layanan secara berkala.
 - Menjamin adanya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek dan memastikan tersedianya dokumentasi proyek sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
 - Memastikan adanya pengelolaan *change management* dalam penyediaan layanan TIK.
 - Memastikan adanya pengelolaan *quality assurance* dalam penyediaan layanan TIK.
 - Memastikan adanya analisis profil vendor, penilaian risiko, dan ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh Perseroan.
 - Memastikan adanya inventarisasi atas aset dan kajian terhadap efektivitas aset dalam memenuhi kebutuhan bisnis.
 - Menjamin adanya tindak lanjut dan perbaikan atas setiap rekomendasi yang telah disepakati bersama dengan auditor internal dan eksternal.
2. ASM Pengembangan dan Solusi Teknologi Informasi dan Komunikasi *Front-End*, bertanggung jawab untuk:
- Memastikan keselarasan dan kesinambungan proses pengembangan baru dan/atau penyempurnaan solusi TIK *front-end* dengan kebutuhan bisnis unit fungsional terkait berdasarkan analisis biaya dan ketercapaian manfaat.
 - Memastikan agar proses perencanaan, akuisisi, dan pengembangan solusi TIK *front-end* sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan.
 - Memastikan dilakukan riset dan pengembangan TIK *front-end* dengan mempertimbangkan tren teknologi di industri kepelabuhanan untuk memberi solusi yang inovatif bagi bisnis.
 - Memastikan bahwa investasi TIK *front-end* seimbang sesuai dengan nilai strategis yang diberikan bagi Perseroan.
 - Memastikan adanya dukungan dan keterlibatan *Business Process Owner* atas penerapan inisiatif inisiatif TIK *front-end*.
- Ensuring the availability of Service Level Agreement (SLA), including its management processes agreed upon with the relevant functional unit.
 - Ensuring the SLA monitoring process, including the results of SLA performance analysis and evaluation, and the preparation of periodic consolidated reports on the performance and achievement of service.
 - Ensuring an oversight on project implementation and the availability of project documentation in accordance with applicable standards and regulations.
 - Ensuring change management in the provision of ICT services.
 - Ensuring quality assurance management in the provision of ICT services.
 - Ensuring the vendor profile analysis, risk assessment, and scope of work by the Company.
 - Ensuring the inventory of assets and review on asset effectiveness in meeting business needs.
 - Ensuring the follow-up and improvement of any recommendations agreed upon with internal and external auditors.
2. VP of Front-End ICT Development and Solutions, who is responsible for:
- Ensuring the alignment and sustainability in the new development and/or improvement process of frontend ICT solutions to the business needs of related functional units based on cost analysis and benefits achievement.
 - Ensuring that the planning, acquisition, and development process of front-end ICT solutions match business needs.
 - Ensuring that the research and development of frontend ICT are considering the technology trends in the port industry to provide innovative solutions for the business.
 - Ensuring that front-end ICT investments are balanced in accordance with the strategic values for the Company.
 - Ensuring Business Process Owner support and involvement in the implementation of front-end ICT initiatives.



- Memastikan terwujudnya transformasi solusi TIK *front-end* ke aktivitas operasional *Business Process Owner* melalui proses manajemen perubahan.

3. ASM Pengembangan dan Solusi Teknologi Informasi dan Komunikasi *Back-End*, bertanggung jawab untuk:

- Memastikan keselarasan dan kesinambungan proses pengembangan baru dan/atau penyempurnaan solusi TIK *back-end* dengan kebutuhan bisnis unit fungsional terkait berdasarkan analisis biaya dan ketercapaian manfaat.
- Memastikan agar proses perencanaan, akuisisi, dan pengembangan solusi TIK *back-end* sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan.
- Memastikan dilakukan riset dan pengembangan TIK *back-end* dengan mempertimbangkan tren teknologi di industri kepelabuhanan untuk memberi solusi yang inovatif bagi bisnis.
- Memastikan bahwa investasi TIK *back-end* seimbang sesuai dengan nilai strategis yang diberikan bagi Perseroan.
- Memastikan adanya dukungan dan keterlibatan *Business Process Owner* atas penerapan inisiatif-inisiatif TIK *back-end*.
- Memastikan terwujudnya transformasi solusi TIK *back-end* ke aktivitas operasional *Business Process Owner* melalui proses manajemen perubahan.

4. ASM Pelayanan & Operasi Teknologi Informasi dan Komunikasi, bertanggung jawab untuk:

- Memastikan adanya pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja seluruh sumber daya yang mendukung jalannya operasional dan pelayanan TIK Perseroan secara berkesinambungan.
- Memastikan adanya pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh aktivitas operasional dan pelayanan TIK, sekaligus memastikan adanya langkah-langkah strategis untuk perbaikan dan pengembangan kualitas pelayanan berdasarkan standar dan target kerja Perseroan.
- Memastikan ketersediaan, kapasitas, keamanan, dan keandalan layanan TIK.
- Memastikan terlaksananya operasional infrastruktur jaringan dan *data center* dengan optimal sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku.

- Ensuring the realization of front-end ICT solution transformation into the business operations of the Business Process Owner through a change management process.

3. VP of Back-End ICT Development and Solutions, who is responsible for:

- Ensuring the alignment and sustainability in the new development and/or improvement process of backend ICT solutions to the business needs of related functional units based on cost analysis and benefits achievement.
- Ensuring that the planning, acquisition, and development process of back-end ICT solutions match business needs.
- Ensuring that the research and development of backend ICT are considering the technology trends in the port industry to provide innovative solutions for the business.
- Ensuring that back-end ICT investments are balanced in accordance with the strategic values provided for the Company.
- Ensuring *Business Process Owner* support and involvement in the implementation of back-end ICT initiatives.
- Ensuring the realization of back-end ICT solution transformation into the business operations of the Business Process Owner through a change management process.

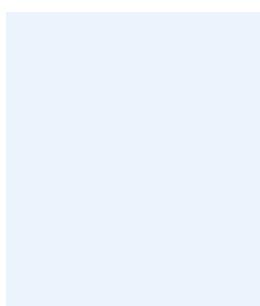
4. VP of ICT Services and Operations, who is responsible for:

- Ensuring the supervision and evaluation of the performance of all resources which continuously support the ICT operations and services of the Company.
- Ensuring the supervision and evaluation of all ICT operational activities and services while ensuring strategic steps to improve and develop service quality based on the Company's standards and targets.
- Ensuring ICT services availability, capacity, security, and reliability.
- Ensuring the optimal operations of network infrastructure and data center in accordance with the applicable standards and procedures.



- Memastikan beroperasinya *help desk* dalam memenuhi kebutuhan dan menjawab keluhan pengguna sesuai dengan SLA yang telah disepakati.
- Melakukan investigasi, analisis, dan menyelesaikan permasalahan pada layanan TIK dan kegagalan komponennya.
- Memastikan penyelesaian permintaan perubahan/ penyempurnaan layanan TIK dilakukan dengan tepat waktu, terkendali, dan terdokumentasikan sesuai aturan yang berlaku.
- Ensuring the help desk operations in meeting the Company's needs and answering user complaints in accordance with the agreed SLA.
- Investigating, analyzing, and solving ICT service issues as well as its component failures.
- Ensuring that the completion of ICT service change/ improvement demands is timely, controlled, and documented in accordance with the applicable rules.

PROFIL PEJABAT SUBDIREKTORAT TIK ICT SUB-DIRECTORATE OFFICIAL PROFILE



Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir : ...
Tahun Aktif : ...

Dasar Hukum Pengangkatan

...

Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) dari Universitas pada tahun
- Magister (S2) dari Universitas pada tahun

....
**Senior Manager Teknologi Informasi
dan Komunikasi**

Riwayat Jabatan

- (... - ...)
- (... - ...)
- (... - ...)
- (... - ...)

....
**ASM Tata Kelola & Perencanaan
Strategis TIK**

Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir : ...
Tahun Aktif : ...

Dasar Hukum Pengangkatan

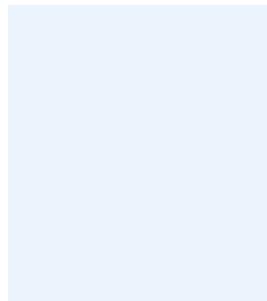
...

Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) dari Universitas pada tahun
- Magister (S2) dari Universitas pada tahun

Riwayat Jabatan

- (... - ...)
- (... - ...)
- (... - ...)
- (... - ...)



Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir : ...
Tahun Aktif : ...

Dasar Hukum Pengangkatan

...

Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) dari Universitas pada tahun
- Magister (S2) dari Universitas pada tahun

Riwayat Jabatan

- (... - ...)
- (... - ...)
- (... - ...)
- (... - ...)

....
ASM Pengembangan dan Solusi TIK
Front-End

....
ASM Pengembangan dan Solusi TIK
Front-End

....
ASM Pelayanan dan Operasi TIK

Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir : ...
Tahun Aktif : ...

Dasar Hukum Pengangkatan

...

Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) dari Universitas pada tahun
- Magister (S2) dari Universitas pada tahun

Riwayat Jabatan

- (... - ...)
- (... - ...)
- (... - ...)
- (... - ...)

Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat, Tanggal Lahir : ...
Tahun Aktif : ...

Dasar Hukum Pengangkatan

...

Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) dari Universitas pada tahun
- Magister (S2) dari Universitas pada tahun

Riwayat Jabatan

- (... - ...)
- (... - ...)
- (... - ...)
- (... - ...)



TATA KELOLA TIK

Pemanfaatan TIK yang mendukung efektivitas dan efisiensi aktivitas serta proses bisnis Perseroan senantiasa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan yang berlaku di internal Perseroan, dengan tujuan untuk menjamin terwujudnya praktik terbaik serta memenuhi kemanfaatan yang dituju. Pengelolaan dan pengembangan TIK di lingkungan Perseroan mengacu pada peraturan dan ketentuan sebagai berikut:

Regulasi Eksternal

- Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*);
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi BUMN.

Ketentuan Internal

- Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. PER.0019/HK.01.06/HOFC-2019 tentang Kebijakan Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pelindo III.
- Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. PER.60/OS/0102/P.III-2017 tentang Kebijakan Keamanan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pelindo III.
- Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. PER-61/OS/0102/P.III-2017 tentang Kebijakan Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pelindo III.

ICT GOVERNANCE

The use of ICT that supports the effectiveness and efficiency of the Company's activities and business processes always refers to the applicable laws and regulations as well as the provisions that apply to the Company internally, with the aim of ensuring the realization of best practices and meeting the intended benefits. The management and development of ICT within the Company refers to the following rules and regulations:

External Regulation

- Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions;
- Law No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure;
- Regulation of the Minister of SOE No. PER-09/MBU/2012 on Amendment to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 on Implementation of Good Corporate Governance; and
- Regulation of the Minister of SOE No. PER-02/MBU/2018 on Amendment to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-02/MBU/2013 on Information Technology Management Guidelines in SOE.

Internal Regulation

- Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. PER.0019/HK.01.06/HOFC-2019 on the Operational Policy of Information and Communication Technology in Pelindo III.
- Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. PER.60/OS/0102/P.III-2017 on the Security System Policy of Information and Communication Technology in Pelindo III.
- Regulation of Board of Directors PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. PER.61/OS/0102/P.III-2017 on the Strategic Policy of Information and Communication Technology in Pelindo III.



ASPIRASI PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP TIK PERSEROAN

STAKEHOLDER ASPIRATION FOR ICT

APLIKASI APPLICATION

- Aplikasi yang terintegrasi dan menyeluruh
- *Data analytics, real-time dashboard, dan pelaporan terkonsolidasi*
- Penerapan teknologi digital dan *mobile*
- Integrated and thorough applications.
- Data analytics, real-time dashboard, and consolidated report.
- Digital and mobile technology implementation.

TEKNOLOGI TECHNOLOGY

- Jaringan data yang andal dengan cakupan luas
- Sistem informasi yang responsif dan tersedia
- *Single sign-on* dan provisi terintegrasi
- Reliable data network with wide coverage.
- Highly responsive and available information system.
- Single sign-on and integrated provision.

SDM DAN ORGANISASI HUMAN CAPITAL AND ORGANISATION

- Struktur organisasi yang selaras dengan kebutuhan bisnis
- Sumber daya manusia cekatan serta tingkat layanan bersama yang responsif, efektif, dan *extended*
- The organisational structure in line with business necessities.
- Agile human capital as well as responsive, effective, and extended shared services.

TATA KELOLA GOVERNANCE

- Tata kelola TIK dan *cyber security* yang baik dan bijak
- Penerapan dan penetapan kebijakan proses bisnis secara konsisten
- Good and wise ICT and cybersecurity governance.
- Consistent business process policy establishment and implementation.

DATA DATA

- Tata kelola data yang baik
- Kualitas data yang optimal
- Good data governance.
- Optimal data quality.

IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN DAN PROGRAM KERJA TIK TAHUN 2020

Subdirektorat TIK menetapkan rencana-rencana pengembangan dan pengelolaan TIK sesuai dengan *Master Plan TI* yang telah disusun. Rencana-rencana tersebut kemudian diturunkan menjadi program kerja, yang disesuaikan dengan rencana pengembangan usaha Perseroan dan bersifat fleksibel terhadap perubahan situasi yang terjadi di lingkup internal dan eksternal Perseroan.

IMPLEMENTATION OF ICT DEVELOPMENT AND WORK PROGRAMS IN 2020

The ICT Sub-directorate determines ICT development and management plans in accordance with the IT Master Plan that has been prepared. These plans are then derived into work programs, which are tailored to the Company's business development plans and are flexible to changes in situations that occur in the internal and external scope of the Company.



Program kerja yang direalisasikan sepanjang tahun 2020 sesuai dengan *Master Plan* TI yaitu sebagai berikut:

1. Pengadaan infrastruktur untuk penerapan *Big Data Analysis* untuk pekerjaan pembangunan *dashboard* dan *data analytical*.
2. Pengembangan *Smart Equipment & Smart Terminal* berupa implementasi *Smart Visual Zonning Area*.
3. Pengembangan program teknologi informasi
 - Digitalisasi laporan *market share* Bongkar Muat Komoditi Petikemas dan Non Petikemas.
 - Implementasi *Job Order* dan *Delivery Order Online* untuk petikemas domestik di lingkungan Perseroan serta evaluasi kesiapan sarana dan prasarana pendukung implementasi *Job Order* dan *Delivery Order Online*.
 - Identifikasi dan evaluasi *improvement TOS* pelayanan non petikemas.
 - Pengembangan *Web-Based* Aplikasi HSSE Korporat.
 - Penyusunan Sistem Audit Berbasis Data.

The work programs realized throughout 2020 in accordance with the IT Master Plan are as follows:

1. Procurement of infrastructure for the implementation of Big Data Analysis for dashboard construction and data analytical work.
2. Smart Equipment & Smart Terminal development in the form of Smart Visual Zoning Area implementation.
3. Development of information technology programs
 - Digitization of the report on the loading and unloading of container and non-container market share.
 - Implementation of Job Order and Online Delivery Order for domestic containers in the Company as well as evaluating the readiness of supporting facilities and infrastructure for the implementation of Job Order and Online Delivery Order.
 - Identification and evaluation of improvements to the TOS of non-container services.
 - Web-Based Development of Corporate HSSE Applications.
 - Development of a Data-Based Audit System.

PENGEMBANGAN SDM DI BIDANG TIK

Pengembangan aspek TIK yang sesuai dengan arah perkembangan teknologi informasi yang ada serta kebutuhan pengembangan usaha Perseroan diseimbangkan dengan pengembangan kompetensi SDM di bidang TIK. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan SDM yang kompeten dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilannya.

Selama tahun 2020, Perseroan telah melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM di bidang TIK dengan rincian sebagai berikut:

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN THE ICT SECTOR

The development of ICT aspects in accordance with the direction of development of existing information technology and the needs of the Company's business development is balanced with the development of HR competencies in the field of ICT. This is intended to prepare human resources who are competent and able to adapt to technological developments, both in terms of knowledge and skills.

During 2020, the Company has conducted training and competency development of HR in the field of ICT with the following details:

Pengembangan Kompetensi SDM di Bidang TIK
Competence Development for ITC HC

Judul Pelatihan	Tanggal Pelatihan	Jumlah Personil TI
....
....
....
....
....
....



SERTIFIKASI DI BIDANG TIK

Upaya Perseroan dalam meningkatkan standar pengelolaan dan aktivitas di bidang TIK dibuktikan dengan perolehan sertifikasi, antara lain:

1. ISO 27001:2013 (*Information Security Management*) dengan ruang lingkup aplikasi e-procurement dan fisik *data center*.
2. Surat Pencatatan Ciptaan atas 6 aplikasi:
 - Spiner
 - Monic
 - Homer Terminal System
 - Gen-C
 - My Pelindo
 - Vasa
3. ISO 20000:2011 (*IT Service Management*) dengan ruang lingkup aplikasi IBS.

EVALUASI PROGRAM KERJA TIK TAHUN 2020

Master Plan TI telah menetapkan program kerja TIK sebanyak 84 usulan inisiatif, yang terdiri dari 36 inisiatif terkait pengembangan aplikasi, 3 inisiatif tentang pengelolaan data, 31 inisiatif terkait pengembangan teknologi, 11 inisiatif terkait *IT Service Management & Governance*, dan 3 inisiatif terkait *IT Operating Model*. Dari 26 inisiatif tersebut, beberapa diantaranya telah dimulai pada tahun 2020, antara lain:

1. Penerapan Sistem ERP di Anak dan Cucu Perusahaan (Modul FI, HCM, dan MM);
2. Penyempurnaan Aplikasi Layanan Non Peti Kemas (Cargo);
3. Penyempurnaan Aplikasi Layanan Properti;
4. Penyempurnaan fitur aplikasi dan peningkatan integrasi *back office*;
5. Implementasi ISO Aplikasi Korporat;
6. Implementasi DevOps Engineering;
7. Penetapan Organisasi *Data Management* dan *Analytics Office*;
8. Penyusunan Prinsip *Data Ownership*;
9. Penyusunan Model Operasi CDE dan *Data Taxonomy*;
10. Penyusunan model operasi *Metadata Management*;
11. Pengembangan tata kelola akuisisi dan integrasi data;
12. Implementasi *Self-Service Dashboard Data Analytics*.

ICT CERTIFICATIONS

The Company's effort to improve the management and activity standards of ICT is proven by acquired certifications, namely:

1. ISO 27001:2013 (Information Security Management) in the scope of work e-procurement application and physical data center.
2. Copyright Letter for six apps, namely:
 - Spiner
 - Monic
 - Home Terminal System
 - Gen-C
 - My Pelindo
 - Vasa
3. ISO 20000:2011 (IT Service Management) in the scope of IBS app.

EVALUATION OF THE 2020 ICT WORK PROGRAM

The IT Master Plan has established 84 ICT work programs, consisting of 36 initiatives related to application development, 3 initiatives regarding data management, 31 initiatives related to technology development, 11 initiatives related to IT Service Management & Governance, and 3 initiatives related to the IT Operating Model. Of the 26 initiatives, some of which have started in 2020, including:

1. Implementation of ERP systems in subsidiaries and second-tier subsidiary (FI, HCM, and MM Modules);
2. Improving the Non-Container Service Application (Cargo);
3. Improving the Property Service Application;
4. Improving application features and improving back office integration;
5. Implementation of ISO for Corporate Applications;
6. Implementation of Engineering DevOps;
7. Organization of Data Management and Analytics Office;
8. Formulation of Data Ownership Principles;
9. Preparation of CDE Operation Model and Taxonomy Data;
10. Development of the Metadata Management operation model;
11. Development of data integration and acquisition governance;
12. Implementation of Data Analytics Self-Service Dashboard.



Rincian mengenai realisasi program-program tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Details regarding the realization of these programs are presented in the following table:

Pelaksanaan Program Kerja TIK Tahun 2020
Implementation of ICT Work Program in 2020

Kode Inisiatif	Nama Pekerjaan	Nama Inisiatif Master Plan TI	Status
....	Telah Terealisasi/Dalam Proses/Tertunda
....	Telah Terealisasi/Dalam Proses/Tertunda
....	Telah Terealisasi/Dalam Proses/Tertunda
....	Telah Terealisasi/Dalam Proses/Tertunda
....	Telah Terealisasi/Dalam Proses/Tertunda
....	Telah Terealisasi/Dalam Proses/Tertunda
....	Telah Terealisasi/Dalam Proses/Tertunda
....	Telah Terealisasi/Dalam Proses/Tertunda

PENCAPAIAN TIK TAHUN 2020

Hasil pencapaian aspek TIK sebagai salah satu elemen pengembangan bisnis Perseroan tercermin dari perolehan hasil penilaian *Key Performace Indicator* (KPI) pada tahun 2020, yang mana salah satu indikatornya yaitu Kepemimpinan Teknologi memperoleh skor 6,60.

RENCANA PENGEMBANGAN TIK TAHUN 2021

Mengacu pada *Master Plan TI* 2020 – 2024 yang telah disusun, Perseroan akan terus mengembangkan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional Perseroan secara proaktif dan responsif dengan disertai tata kelola TIK yang baik. Adapun rencana pengembangan TIK yang akan direalisasikan di tahun 2021, antara lain:

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...

ICT ACHIEVEMENTS IN 2020

The achievement of the ICT aspect as one of the elements of the Company's business development are reflected in the results of the Key Performance Indicator (KPI) assessment in 2020, in which one of the indicators is Technology Leadership, which earned a score of 6.60.

ICT DEVELOPMENT PLAN FOR 2021

Referring to the 2020-2024 IT Master Plan that has been prepared, the Company will continue to develop and improve the effectiveness and efficiency of the Company's operations in a proactive and responsive manner, accompanied by good ICT governance. The ICT development plans that will be realized in 2021 include:

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...



ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS







ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Sebagai penyedia fasilitas jasa kepelabuhanan terpenting di Indonesia, Pelindo III memiliki peranan kunci untuk menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut. Dengan tersedianya prasarana transportasi laut yang memadai, Perusahaan mampu memberikan stimulasi positif terhadap kegiatan ekonomi nasional dan masyarakat pada umumnya.

As a prominent port services provider in Indonesia, Pelindo III has a key role to ensure the continuity and sound operations of sea transportation. With the availability of adequate sea transportation infrastructure, the Company is able to mobilise and stimulate the economic activities of the state and society.



TINJAUAN UMUM

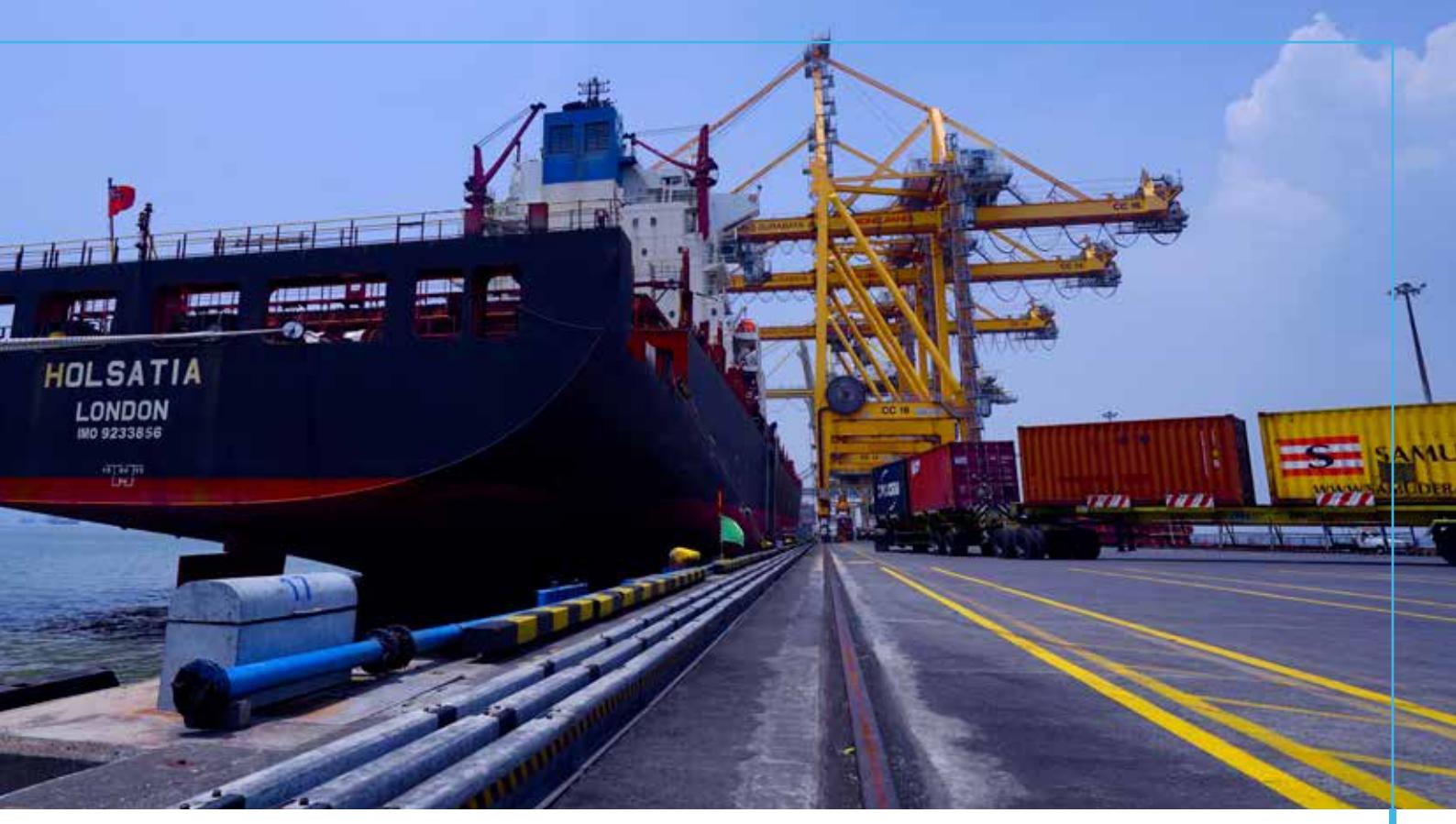
Tinjauan Ekonomi Global

Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi global mengalami penurunan di tahun 2020. Berdasarkan data yang dihimpun oleh *International Monetary Fund (IMF)* dalam laporannya yang berjudul *World Economic Outlook Update Januari 2021*, pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020 terkontraksi sebesar minus 3,5%, kontras dengan pertumbuhan positif pada tahun 2019 sebesar 2,8%.

GENERAL OVERVIEW

Global Economic Review

Overall, the global economic growth experienced a decline in 2020. Based on the data compiled by the International Monetary Fund (IMF) in its report titled "World Economic Outlook Update January 2021", the global economic growth in 2020 contracted by minus 3.5%, in contrast to the positive growth in 2019 at 2.8%.



Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun 2019 - 2021 /
Projection of Global Economic Growth in 2019-2021

(dalam satuan % / in %)

	2019	2020
Global / Global	2,8	-3,5
Negara Maju / Developed Countries	1,6	-4,9
Negara Berkembang / Developing Countries	3,6	-2,4

Sumber: *World Economic Outlook Update*, IMF, Januari 2021 / Source: *World Economic Outlook Update*, IMF, January 2021

Kontraksi pertumbuhan ekonomi global dialami oleh kelompok negara maju dan berkembang yang mencatatkan penurunan pertumbuhan masing-masing sebesar minus 4,9% dan minus 2,4%. Memburuknya kondisi perekonomian global pada tahun 2020 merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan karantina wilayah pada berbagai negara untuk memperlambat laju penyebaran virus tersebut.

Both developed and developing countries experienced a contraction in global economic growth, which recorded a decline in growth of minus 4.9% and minus 2.4%, respectively. The worsening of global economic conditions in 2020 was the impact of the Covid-19 pandemic, which caused regional lockdowns in various countries to slow the spread of the virus.



Penurunan aktivitas ekonomi secara global dapat dilihat dari kontraksi pertumbuhan volume perdagangan dunia yang tercatat sebesar minus 9,6% dan diikuti dengan penurunan harga komoditas terutama minyak bumi yang turun cukup dalam yaitu sebesar minus 32,7%.

Dampak ekonomi dan sosial pandemi Covid-19 telah berusaha ditangani oleh berbagai negara melalui bauran kebijakan fiskal dan moneter yang bersifat akomodatif. Stimulus fiskal dikucurkan untuk mengatasi masalah kesehatan, kemanusiaan dan pelemahan ekonomi. Sepanjang tahun 2020, jumlah stimulus fiskal yang dikucurkan oleh berbagai negara mencapai 11,7 triliun dolar AS atau hampir mencapai 12% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia.

Selain melalui dukungan kebijakan fiskal yang akomodatif, perekonomian global di tahun 2020 juga ditumpu oleh kebijakan moneter yang ekspansif. Penerapan kebijakan moneter tersebut dapat dilihat dari penurunan suku bunga dan penambahan likuiditas untuk mengatasi tekanan pasar keuangan dan mendukung penyaluran kredit. Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, telah menurunkan suku bunga acuan Fed Fund Rate (FFR) hingga mencapai kisaran 0%- 0,25% guna menstimulasi pertumbuhan ekonomi.

Tinjauan Ekonomi Nasional

Perekonomian nasional tidak luput dari ancaman pandemi Covid-19 yang telah dimulai sejak awal tahun 2020. Sebagai langkah pencegahan penyebaran virus Covid-19, pemerintah telah menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas ekonomi secara menyeluruhan yang pada akhirnya menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi di tahun tersebut.

The decline in global economic activity could be observed from the contraction in world trade volume growth, which was recorded at minus 9.6% followed by a sharp decline in commodity prices, especially petroleum, which fell by minus 32.7%.

Many countries have attempted to overcome the economic and social impacts of the Covid-19 pandemic through a mix of accommodative fiscal and monetary policies. The fiscal stimulus was disbursed to address health, humanitarian and economic problems. Throughout 2020, the amount of fiscal stimulus disbursed by various countries reached USD11.7 trillion or nearly 12% of the world's Gross Domestic Product (GDP).

In addition to accommodative fiscal policies, the global economy in 2020 was also supported by expansionary monetary policy. The implementation of this monetary policy could be seen from the reduction in interest rates and the addition of liquidity to overcome financial market pressures and support lending. The Central Bank of the United States (US), The Fed, has lowered the Fed Funds Rate (FFR) reference rate to the range of 0% - 0.25% in order to stimulate economic growth.

National Economic Review

The national economy did not escape the threat of the Covid-19 pandemic which began in early 2020. As a measure to prevent the spread of the Covid-19 virus, the government implemented a policy to limit economic activity as a whole which ultimately led to a decline in economic growth that year.

**Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Tahun 2014 – 2020 /
Gross Domestic Product (GDP) Growth in 2014-2020**

Tahun / Year	Pertumbuhan PDB / GDP Growth
2020	-2,07%
2019	5,02%
2018	5,17%
2017	5,07%
2016	5,03%
2015	4,88%
2014	5,01%

(Sumber: Badan Pusat Statistik / Source: Statistics Indonesia)



Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2020 terkontraksi sebesar minus 2,07%, kontras dengan pertumbuhan positif pada tahun 2019 sebesar 5,02%. Perekonomian Indonesia di tahun 2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp56,9 juta atau USD3.911,7.

Walaupun pertumbuhan ekonomi nasional menurun di tahun 2020, namun angka kontraksi tersebut tidak sedalam negara-negara mitra dagang utama Indonesia, terutama Uni Eropa sebesar minus 6,4%, Hong Kong sebesar minus 6,1% dan Singapura sebesar minus 5,8%.

Pada tahun 2020, 63,66% PDB berasal dari Lapangan Usaha Industri, Pertanian, Perdagangan, Konstruksi dan Pertambangan. Penurunan PDB dari sisi produksi terutama berasal dari Transportasi dan Pergudangan yang turun sebesar minus 15,04%, diikuti oleh kontraksi pertumbuhan Akomodasi & Makan Minum yang tercatat sebesar minus 10,22%. Menurunnya pertumbuhan Akomodasi & Makan Minum disebabkan oleh turunnya Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel, berkurangnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan tutupnya sejumlah hotel dan restoran selama masa pandemi Covid-19.

BPS mencatatkan 89,40% PDB 2020 menurut Pengeluaran berasal dari Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi. Penurunan PDB terdalam berdasarkan Pengeluaran di tahun 2020 berasal dari Impor dan Ekspor yang masing-masing terkontraksi sebesar minus 14,71% dan minus 7,70%. Selain itu, penjualan semen domestik dan volume penjualan kendaraan yang turun di tahun 2020 juga menyebabkan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Investasi untuk terkontraksi sebesar minus 4,95%.

Struktur perekonomian indonesia secara geografis pada tahun 2020 didominasi oleh kelompok provinsi Pulau Jawa dengan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 58,75%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,36% dan Pulau Kalimantan sebesar 7,94%. Kontraksi pertumbuhan ekonomi terdalam pada tahun 2020 dialami oleh Pulau

Based on the data compiled by Statistics Indonesia (BPS), the national economic growth in 2020 contracted by minus 2.07%, in contrast to positive growth in 2019 of 5.02%. The Indonesian economy in 2020 as measured by Gross Domestic Product (GDP) at current prices reached Rp15,434.2 trillion and GDP per capita reached Rp56.9 million or USD3,911.7.

Although national economic growth declined in 2020, the contraction rate was not as deep as Indonesia's main trading partner countries, especially the European Union at minus 6.4%, Hong Kong at minus 6.1% and Singapore at minus 5.8%.

In 2020, 63.66% of GDP came from Industrial, Agriculture, Trade, Construction and Mining Fields. The decline in GDP from the production side mainly came from Transportation and Warehousing, which fell by minus 15.04%, followed by a contraction in the growth of accommodation & food and drink, which was recorded at minus 10.22%. The decline in accommodation & food and drink growth was caused by a decrease in the Hotel Room Occupancy Rate (TPK), a decrease in the number of foreign tourist visits and the closure of a number of hotels and restaurants during the Covid-19 pandemic.

BPS recorded 89.40% of GDP in 2020 according to expenditure coming from household consumption and investment. The deepest decline in GDP based on expenditure in 2020 came from Imports and Exports, which contracted by minus 14.71% and minus 7.70%, respectively. In addition, the decline in domestic cement sales and vehicle sales volume in 2020 also caused the Gross Fixed Capital Formation (PMTB) component to contract by minus 4.95%.

Geographically, Indonesia's economic structure in 2020 was dominated by the Java Island provinces with a contribution to national GDP of 58.75%, followed by Sumatra Island at 21.36% and Kalimantan Island at 7.94%. The deepest contraction in economic growth in 2020 was experienced by the Islands of Bali & Nusa Tenggara at



Bali & Nusa Tenggara sebesar minus 5,01%, Pulau Kalimantan sebesar minus 2,27% dan Pulau Jawa sebesar minus 2,51%.

Sejalan dengan menurunnya aktivitas ekonomi, daya beli masyarakat juga melemah. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi tingkat inflasi sepanjang tahun 2020 yang tercatat sebesar 1,68%, turun bila dibandingkan tahun 2019 dan tidak mencapai target inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) di kisaran $3,0\% \pm 1\%$.

Guna memitigasi risiko pelemahan ekonomi, BI telah menurunkan BI7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 125 bps menjadi 3,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 3,00% dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,50%. Selain itu, pemerintah juga membentuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak sosial dan ekonomi pandemi Covid-19.

TINJAUAN INDUSTRI PELABUHAN

Industri nasional di tahun 2020 mengalami tekanan yang cukup dalam akibat dari pandemi Covid-19, termasuk industri pelabuhan. Gambaran industri transportasi laut nasional dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menghimpun informasi mengenai aktivitas transportasi laut di 5 (lima) pelabuhan utama di Indonesia, yaitu Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Balikpapan, dan Pelabuhan Makassar.

Di tahun 2020, BPS mencatatkan jumlah penumpang angkutan laut dalam negeri mencapai 14,2 juta orang atau turun 40,66% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan jumlah penumpang terjadi di seluruh pelabuhan utama yang diamati, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok sebesar minus 76,51%, Belawan sebesar minus 73,89%, Makassar sebesar minus 67,22%, Balikpapan sebesar minus 66,74% dan Tanjung Perak sebesar minus 57,22%.

Adapun jumlah barang yang diangkut selama bulan Januari hingga Desember 2020 mencapai 302,6 juta ton atau naik 1,61% dibandingkan periode yang sama tahun 2019. BPS menjelaskan bahwa peningkatan jumlah barang yang diangkut tersebut tidak berasal

minus 5.01%, Kalimantan Island at minus 2.27% and Java Island at minus 2.51%.

In line with the decline in economic activity, people's purchasing power has also weakened. This could be seen from the realization of the inflation rate throughout 2020 which was recorded at 1.68%, decreased compared to 2019 and did not reach the inflation target set by Bank Indonesia (BI) in the range of $3.0\% \pm 1\%$.

In order to mitigate the risk of economic downturn, BI lowered the BI7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) by 125 bps to 3.75%, the Deposit Facility rate by 3.00% and the Lending Facility rate by 4.50%. In addition, the government also established a National Economic Recovery (PEN) program, which aimed to help communities affected by the social and economic impacts of the Covid-19 pandemic.

PORT INDUSTRY OVERVIEW

The national industry in 2020 was under considerable pressure as a result of the Covid-19 pandemic, including the port industry. The description of the national marine transportation industry can be seen from data from Statistics Indonesia (BPS), which collected information on marine transportation activities in 5 (five) main ports in Indonesia, namely Belawan Port, Tanjung Priok Port, Tanjung Perak Port, Balikpapan Port, and Makassar Port.

In 2020, BPS recorded that the number of domestic sea transport passengers reached 14.2 million people or decreased by 40.66% compared to the same period in the previous year. The decrease in the number of passengers occurred in all major ports observed, namely Tanjung Priok Port by minus 76.51%, Belawan Port by minus 73.89%, Makassar Port at minus 67.22%, Balikpapan Port at minus 66.74% and Tanjung Perak Port at minus 57.22%.

The number of goods transported in January to December 2020 reached 302.6 million tons, an increase of 1.61% compared to the same period in 2019. BPS explained that the increase in the number of goods transported did not originate from the main ports observed. BPS recorded



dari pelabuhan utama yang diamati. BPS mencatatkan penurunan jumlah yang diangkut pada Pelabuhan Tanjung Priok sebesar minus 18,67%, Makassar sebesar minus 15,43%, Panjang sebesar minus 12,33%, Tanjung Perak sebesar minus 11,74% dan Balikpapan sebesar minus 2,56%.

Industri pelabuhan nasional memiliki keterbatasan kapasitas dan konektivitas. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Industri pelabuhan nasional Kementerian Perhubungan (Kemenhub), sampai dengan akhir tahun 2020, Indonesia baru memiliki 636 pelabuhan. Rincinya yaitu 28 pelabuhan utama, 164 pelabuhan pengumpulan, 166 pelabuhan pengumpulan regional antar provisi, dan 278 pelabuhan pengumpulan lokal. Sedangkan jumlah pelabuhan dengan skala besar atau *main port* yang dapat disandari oleh kapal kargo besar masih sangat terbatas. Sampai dengan akhir tahun 2020 hanya ada 4 (empat) pelabuhan yang mampu menampung kapal kargo besar, yaitu pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar dan Belawan di Medan.

Pemerintah mendorong pembangunan pelabuhan yang didukung kawasan industri agar meringankan biaya logistik dan meningkatkan konektivitas. Untuk mencapai hal tersebut, integrasi pengembangan kawasan pelabuhan dengan infrastruktur yang memadai akan terus direalisasikan. Kemenhub telah menetapkan 1.321 rencana lokasi pembangunan pelabuhan baru hingga tahun 2037 yang akan diintegrasikan dengan kawasan industri. Pembangunan ribuan pelabuhan ini sudah tertuang dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang telah ditetapkan sejak tahun 2017 dan tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kemenhub dan Ditjen Perhubungan Laut (Hubla), trayek atau rute Tol Laut terus bertambah. Di tahun 2020, jumlah penambahan trayek yang tercatat adalah sebesar 26 trayek, meningkat dibandingkan pembangunan trayek pada tahun 2019 yang terealisasi sebesar 20 trayek. Dengan semakin bertambahnya jumlah trayek yang dibangun, distribusi barang dan pengembangan ekonomi di daerah terpencil dan belum berkembang diharapkan dapat tercapai.

a decrease in the amount of goods transported to the Tanjung Priok Port by minus 18.67%, Makassar Port by minus 15.43%, Panjang Port by minus 12.33%, Tanjung Perak Port by minus 11.74% and Balikpapan Port by minus 2.56%.

The national port industry has limited capacity and connectivity. Based on the information compiled by the national port industry of the Ministry of Transportation (Kemenhub), until the end of 2020, Indonesia only had 636 ports. The details were 28 main ports, 164 feeder ports, 166 inter-province regional feeder ports, and 278 local feeder ports. Meanwhile, the number of ports on a large scale or main ports where large cargo ships can berth was still very limited. Until the end of 2020, there were only 4 (four) ports capable of accommodating large cargo ships, namely Tanjung Priok Port in Jakarta, Tanjung Perak Port in Surabaya, Soekarno Hatta Port in Makassar and Belawan Port in Medan.

The government encouraged ports construction supported by industrial estates in order to reduce logistics costs and improve connectivity. To achieve this, the integration of port area development with adequate infrastructure should be realized. The Ministry of Transportation determined 1,321 plans for new port development locations by 2037 which will be integrated with industrial estates. The construction of these thousands of ports has been stated in the National Port Master Plan, which was established since 2017 and contained in the Decree of the Minister of Transportation No. KP 432 of 2017.

Based on data compiled by the Ministry of Transportation and the Directorate General of Sea Transportation (Hubla), Sea Toll routes continued to grow. In 2020, the number of additional routes recorded was 26 routes, an increase compared to route development in 2019, which was as many as 20 routes. With the increasing number of routes being built, the Company hoped to realize the distribution of goods and economic development in remote and underdeveloped areas.



TINJAUAN KINERJA OPERASIONAL

Sebagai penyedia fasilitas jasa kepelabuhanan terpenting di Indonesia, Pelindo III memiliki peranan kunci untuk menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut. Dengan tersedianya prasarana transportasi laut yang memadai, Perusahaan mampu memberikan stimulasi positif terhadap kegiatan ekonomi nasional dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Perusahaan bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran, penyelenggaraan pelabuhan, angkutan perairan, dan lingkungan maritim. Status Pelindo III yang bukan lagi sebagai regulator melainkan operator secara otomatis mengubah bisnis Perusahaan dari *port operator* menjadi *terminal operator*.

Perusahaan melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Bidang usaha kepelabuhanan yang saat ini diselenggarakan oleh Pelindo III antara lain:

1. Bidang Usaha Pelayanan Kapal, yang meliputi:

- a. Pelayanan **Labuh**, yaitu pelayanan penyediaan kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat-tempat berlabuhnya kapal;
- b. Pelayanan **Pemanduan**, yaitu kegiatan pelayanan membantu Nakhoda kapal agar navigasi dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar;
- c. Pelayanan **Penundaan**, yaitu kegiatan pelayanan menarik mendorong atau menggandeng kapal yang berolah gerak untuk tambat ke atau untuk melepas dari dermaga, jetty, trestel, pier, pelampung, dolphin, kapal, dan fasilitas tambat lainnya menggunakan kapal tunda;
- d. Pelayanan **Penambatan**, yaitu kegiatan pelayanan kapal melakukan ikat tali di tambatan/dermaga untuk melakukan bongkar muat barang atau kegiatan lainnya.

OPERATIONAL PERFORMANCE OVERVIEW

As a prominent port services provider in Indonesia, Pelindo III has a key role to ensure the continuity and sound operations of sea transportation. With the availability of adequate sea transportation infrastructure, the Company is able to mobilise and stimulate the economic activities of the state and society.

According to Law No. 17 of 2008 on Shipping, the Company is responsible for the safety of shipping, port operations, water transportation, and maritime environment. The status of the Company as an operator, after previously serving only as of the regulator, automatically changes the business nature of Pelindo III from port operator to terminal operator.

The Company conducts business in the field of port services operations and exploitation, as well as optimisation of the utilisation of resources owned by to produce high-quality goods and/or services with strong competitiveness to gain/pursue profits to increase the Company's value by applying the principles of Limited Liability Company.

Port business segments that Pelindo III are engaged in includes, among others:

1. Ship Service, which consists of:

- a. **Anchoring Services**, namely the service of providing port and water pools for traffic and the berths of ships;
- b. **Pilotage Services**, i.e. service activities to help the ship's captain to navigate safely, orderly and smoothly;
- c. **Tugboat Service**, which is a push-and-pull service activity or holding a motion-driven vessel for mooring to or to remove from the wharf, jetty, trestle, pier, buoy, dolphin, ship and other mooring facilities using tugboats;
- d. **Berthing Service**, i.e. ship service activities to tie the ropes at tethers/docks to perform loading and unloading of goods or other activities.



- e. Pelayanan **Alur**, yaitu pelayanan penyediaan perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman bagi keluar masuknya kapal di pelabuhan; dan
 - f. Pelayanan **Kepil**, yaitu pelayanan untuk menarik dan mengikat tali kapal ke bolder yang ada di tambatan/ dermaga.
2. **Bidang Usaha Pelayanan Peti Kemas**, yang meliputi:
- a. Pelayanan **Operasi Kapal**, yaitu pelayanan pembongkaran atau pemuatan peti kemas dari atau ke kapal;
 - b. Pelayanan **Operasi Lapangan**, yaitu pelayanan penumpukan sementara muatan setelah dibongkar atau akan dimuat dari atau ke kapal pada lapangan penumpukan terbuka;
 - c. Pelayanan **CFS**, yaitu pelayanan penimbunan sementara muatan setelah dibongkar atau dimuat dari atau ke kapal pada ruangan tertutup;
 - d. Pelayanan **Peti Kemas Transhipment**, yaitu pelayanan membongkar peti kemas dari kapal pengangkut pertama, disusun dan ditumpuk di lapangan penumpukan dan mengapalkannya ke kapal pengangkut kedua; dan
 - e. Pelayanan **Peti Kemas Lainnya**, yaitu pelayanan yang diberikan kepada para pengguna jasa berupa behandle, tempat pemeriksaan terpadu, fumigasi, batal muat, pindah kapal/alih kapal, closing, batal dokumen, *labelling*, dan *overbrengan*.
3. **Bidang usaha Pelayanan Nonpeti Kemas**, yang meliputi:
- a. Pelayanan Nonpeti Kemas **General Cargo**, yaitu memberikan pelayanan nonpeti kemas untuk barang kemasan *general cargo* termasuk *bag cargo* dan *unitised/pallet* berupa fasilitas dermaga, gudang dan lapangan penumpukan, serta pelayanan bongkar muat dari dan ke kapal;
 - b. Pelayanan Nonpeti Kemas **Curah Kering**, yaitu memberikan pelayanan nonpeti kemas untuk barang kemasan curah kering berupa fasilitas dermaga, gudang, lapangan penumpukan dan silo penyimpanan, serta pelayanan bongkar muat dari dan ke kapal;
 - e. **Navigation Services**, i.e. provision of waters that is safe and free in terms of depth, width, and free of obstruction, thus ensuring safety for vessels moving from and to ports; and
 - f. **Mooring Services**, i.e. activities to pull or tie the vessel ropes to bolder tethered at the wharf.
2. **Container Service**, which includes:
- a. **Ship Operation** Service, i.e. loading or unloading service from or to the ship;
 - b. **Field Operation** Services, i.e. temporary hoarding services after loading or loading from or to vessels in enclosed spaces;
 - c. **CFS Service**, which is a temporary conglomeration service after loading or loading from or to the vessel in an open container yard;
 - d. **Container Transhipment** Service, which is a service of unloading the container from the first carrier vessel, to be further arranged and stacked in the container yard and shipped it to the second carrier vessel;
 - e. **Other Container** Service, which is services provided to users of services such as behandle, integrated checkpoint, fumigation, void load, transhipment, closing, document cancellation, labelling, and overbrengan.
3. **Non-Container Service**, which includes:
- a. **General Cargo** Non-Container Service, which provides general cargo non-container service, including bag cargo and unitised/pallet in the form of dock facilities, warehouses and container yard as well as loading and unloading services from and to the vessel;
 - b. **Dry Bulk** Non-Container Service, which provides non-container services for dry bulk cargo in the form of dock facilities, warehouses, container yard and storage silos and loading and unloading services from and to vessels;



- c. Pelayanan Nonpeti Kemas **Curah Cair**, yaitu memberikan pelayanan nonpeti kemas untuk barang kemasan curah cair berupa fasilitas dermaga, fasilitas penyimpanan (*Storage Tank*), serta pelayanan bongkar muat dari dan ke kapal;
 - d. Pelayanan Nonpeti Kemas **Gas**, yaitu memberikan pelayanan nonpeti kemas gas berupa fasilitas dermaga, fasilitas penyimpanan (*Pipa*), serta pelayanan bongkar muat dari dan ke kapal;
 - e. Pelayanan Nonpeti Kemas **Car Terminal**, yaitu memberikan pelayanan nonpeti kemas untuk segmen *car terminal* berupa fasilitas dermaga, fasilitas lapangan penumpukan, serta pelayanan bongkar muat dari dan ke kapal; dan
 - f. Pelayanan Nonpeti Kemas Hewan, yaitu memberikan pelayanan nonpeti kemas hewan berupa fasilitas dermaga, fasilitas lapangan penumpukan, serta pelayanan bongkar muat dari dan ke kapal.
4. **Bidang usaha Penunjang**, yang meliputi:
- a. **Pelayanan Konsolidasi dan Distribusi Barang**, yaitu pelayanan yang diberikan berupa area khusus di luar terminal yang dapat digunakan oleh pengguna jasa untuk melakukan kegiatan pelayanan barang baik peti kemas maupun nonpeti kemas, yang meliputi kegiatan *receiving/delivery*, *stuffing/stripping*, *unitasi/ paletisasi*, *packing*, *labeling*, sortasi, serta kegiatan penumpukan peti kemas maupun barang nonpeti kemas dan kegiatan fumigasi;
 - b. **Pelayanan Pelra**, yaitu pelayanan yang diberikan bagi kapal-kapal pelayaran rakyat yang akan melakukan kegiatan di Pelabuhan berupa fasilitas penambatan, kepil, dermaga, gudang, lapangan penumpukan, dan bongkar muat barang;
 - c. **Pengusahaan Alat**, yaitu kegiatan pelayanan pengusahaan alat-alat penunjang kegiatan kepelabuhanan baik berupa alat angkat, alat angkut, alat bantu bongkar muat serta alat apung;
 - d. **Pengusahaan Properti**, terdapat 24.061,005 m² tanah yang tersebar di seluruh wilayah operasi Perusahaan. Lahan HPL tersebut diusahakan dengan diklasifikasikan sebagai usaha jasa kepelabuhanan, usaha industri, usaha konsolidasi
 - c. **Liquid Bulk Non-Container Service**, which provides non-container services for liquid bulk cargo in the form of dock facilities, Storage Tank, as well as loading and unloading services from and to the vessel;
 - d. **Gas Non-Container Service**, which provides non-container services for gas cargo in the form of dock facilities, storage facilities (Pipes) and loading and unloading services from and to vessels;
 - e. **Car Terminal Non-Container Service**, which provides non-container services for car terminal segment in the form of dock facilities, container yard facilities, as well as loading and unloading services from and to vessels;
 - f. **Animal Non-Container Service**, which provides non-container service for animals in the form of dock facilities, container yard, as well as loading and unloading services from and to the vessel.

4. **Supporting Service**, covering:

- a. **Consolidation and Distribution of Goods Service**, namely services delivered by providing designated area outside the Terminal that can be used by service users to perform their goods service, either container or non-container services, among others, receiving/delivery, stuffing/stripping, unitisation/palletization, packing, labelling, sorting, as well as the container or non-container stacking, and fumigation activities;
- b. **Pelra (People's Shipping) Service**, namely services provided for people's sailing vessels who will perform activities at the Port, by providing berthing facilities, mooring, docks, warehouses, container yard, as well as loading and unloading facility;
- c. **Equipment Rentals**, namely providing equipment to support port operations, such as lifting equipment, transport equipment, loading and unloading (B/M) support equipment, and floating equipment.
- d. **Property Business**, there are 24,061,005 m² of land spread throughout the Company operational area. The HPL land is utilised as a business with the following classification; namely as a port services business, industrial business,



dan distribusi, usaha pariwisata, industri perkapalan, usaha perkantoran dan pusat bisnis, dan nonusaha (misal instansi pemerintahan, rumah tangga, dan tempat ibadah). Selain pengelolaan lahan, Perusahaan juga melakukan pengusahaan bangunan, yang pengelolaannya dilakukan di masing-masing Cabang Pelabuhan. Sebagai langkah untuk mengoptimalkan lahan milik Perusahaan, maka dibentuk anak perusahaan PT Pelindo Properti Indonesia (PT PPI) yang bergerak dalam usaha marina pelabuhan;

- e. **Pengusahaan Air dan Listrik**, dalam memberikan kemudahan kepada pengguna jasa dan penduduk di lingkungan pelabuhan, Pelindo III bekerja sama dengan PDAM menyediakan air bersih bagi kapalkapal laut yang sedang berlabuh dan bertambat di perairan pelabuhan, serta berkerja sama dengan PLN menyediakan suplai listrik untuk perkantoran dan rumah tangga di lingkungan sekitar pelabuhan;
- f. **Pelayanan Terminal Penumpang dan Usaha Lainnya**, yaitu pelayanan yang diberikan kepada penumpang angkutan laut untuk debarkasi/embarkasi termasuk pelayanan pas terminal penumpang serta pelayanan pas masuk pelabuhan;
- g. **Pelayanan Forwarding**, yaitu kerja sama dengan pihak ketiga terkait penyediaan fasilitas untuk kegiatan pengangkutan barang dari lapangan penumpukan ke depo Kereta Api ataupun ke area penumpukan lainnya (transit);
- h. **Pelayanan TUKS**, yaitu pelayanan kapal dan barang yang diberikan oleh Pelindo III di area TUKS (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri) meliputi pelayanan pemanduan dan penundaan serta kerjasama pelayanan bongkar muat barang dari dan ke kapal; dan
- i. **Marine Services**, dalam upaya meningkatkan kelancaran kinerja pemanduan dan penundaan, Perusahaan membentuk anak perusahaan PT Pelindo Marine Service (PMS). Selain bergerak dalam usaha penyediaan SBPP (Sarana Bantu Pelayanan Pemanduan) untuk mendukung kelancaran pelayanan jasa pelayanan pemanduan dan penundaan, PMS juga bergerak dalam usaha pelayanan wisata bahari, perbaikan kapal, penyewaan kapal, dan penyediaan tenaga Anak Buah Kapal.

consolidation and distribution business, tourism business, shipping industry, office and business centre, and non business (e.g. government agencies, households, and places of worship). In addition to land management, the Company also carries out building concession, which is managed in each Port Branch. To optimise land assets, the Company formed a subsidiary called PT Pelindo Properti Indonesia (PPI) engaging in marine port business;

- e. **Clean Water and Electricity Business**, in facilitating service users and residents around the harbour environment, in cooperation with PDAM, Pelindo III provides clean water for vessels that are docked and tethered in port basins, and in cooperation with PLN, to provide electricity supply for offices and households in the vicinity of the harbour;
- f. **Passenger Terminal and Other Business Services**, namely service provided to seafaring passengers for disembarkation/embarkation, including passenger terminal pass service and port entry pass service;
- g. **Forwarding Service**, namely cooperation with third parties related to the provision of facilities for goods transport from container yard to the Train depot or to other container yards (transit);
- h. **TUKS (Special Terminal) Service**, a ship and goods services provided by the Company in TUKS (Terminal for Own Interest) areas, which include pilotage and tugboat service as well as the cooperation of loading and unloading of cargo services to and from the vessel; and
- i. **Marine Services**. In an effort to improve the Pilotage and Tugs performance, the Company forms a Subsidiary called PT Pelindo Marine Service (PMS) which, in addition to operating in SBPP (Pilotage Service Support Facility) provision business to support the operations of pilotage and tug services, PMS also engages in marine tourism services, ship repair, boat rental, and labour supply of Ship Crew.



TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

Segmen Usaha Pelayanan Kapal

Segmen usaha pelayanan kapal terbagi menjadi beberapa bidang usaha, antara lain:

1. Pelayanan Labuh,
2. Pelayanan Pemanduan,
3. Pelayanan Penundaan,
4. Pelayanan Penambatan,
5. Pelayanan Alur, dan
6. Pelayanan Kepil.

Berikut adalah penjelasan mengenai tingkat produksi dan pendapatan segmen usaha Pelayanan Kapal pada tahun 2020.

PRODUKSI PELAYANAN KAPAL TAHUN 2020

OPERATIONAL OVERVIEW PER BUSINESS SEGMENT

Ship Service Business Segment

Ship Service business segment is divided into several business lines, among others:

1. Anchorage Service,
2. Pilotage Service,
3. Tugboat Service,
4. Berthing Service,
5. Navigation Service, and
6. Mooring Service.

The following is an explanation on the level of production and revenue of Ship Service segment in 2020.

SHIP SERVICE PRODUCTION IN 2020

Produksi Pelayanan Kapal Tahun 2019-2020 /
Ship Service Production in 2019-2020

Uraian / Description	Satuan / Unit			Pertumbuhan / Growth	
		2020	2019	Nominal / Nominal	%
Pelayanan Labuh / Anchorage Service	GT Masa / GT Mass	-	-	-	-
Pelayanan Pemanduan / Pilotage Service	Kpl.Grk / Ship. Movement	103.989	116.251	(12.262)	-10,55%
	GT.Kpl.Grk / GT.Ship.Movement	600.074.968	638.978.418	(38.903.450)	-6,09%
Pelayanan Penundaan / Tugboat Service	Kpl.Jam / Ship.Hour	81.299	87.718	(6.419)	-7,32%
	GT.Kpl.Jam / GT.Ship.Hour	686.846.387	699.132.023	(12.285.636)	-1,76%
Pelayanan Penambatan / Berthing Service	GT.Etm / GT.Etm	331.398.329	329.208.083	2.190.246	0,67%
Pelayanan Alur / Navigation Service	GT	-	-	-	-
	ton / tonnes	22.712.428	24.932.281	(2.219.853)	-8,90%
Pelayanan Kepil / Mooring Service	M ³	-	-	-	-
	Box	2.079.846	2.160.953	81.107)	-3,75%
Pelayanan Kepil / Mooring Service	Grk / Movement	32.654	26.168	6.486	24,79%
	GT	211.424.146	17.155.062	194.269.084	1132,43%

a. Pelayanan Pemanduan

Pada tahun 2020, produksi Pelayanan Pemanduan terealisasi dalam satuan unit Kpl.Grk tercatat sebesar 103.989 Kpl.Grk, turun 12.262 Kpl.Grk atau 10,55% dibandingkan tahun 2019 sebesar 115.251 Kpl.Grk. Sedangkan realisasi produksi dalam satuan unit

a. Pilotage Service

In 2020, Pilotage Service production in Ship. Movement unit was recorded at 103,989 Ship. Movement, a decrease of 12,262 Ship.Movement or 10,55% compared to 2019 of 115,251 Ship.Movement. Meanwhile, the actual production in units of GT.Ship.



GT.Kpl.GrK di tahun 2020 tercatat sebesar 600.074.968 GT.Kpl.GrK, turun 38.903.450 GT.Kpl.GrK atau 6,09% dibandingkan tahun 2019 sebesar 638.978.418 GT.Kpl.GrK. Penurunan tersebut disebabkan oleh...

b. Pelayanan Penundaan

Produksi Pelayanan Penundaan pada tahun 2020 dalam satuan unit Kpl.Jam tercatat sebesar 81.299 Kpl.Jam, turun 6.419 Kpl.Jam atau 7,32% dibandingkan tahun 2019 sebesar 87.718 Kpl.Jam. Sedangkan realisasi produksi dalam satuan unit GT.Kpl.Jam di tahun 2020 terealisasi sebesar 686.846.387 GT.Kpl.Jam, turun 12.285.636 GT.Kpl.Jam atau 1,76% dibandingkan tahun 2019 sebesar 699.132.023 GT.Kpl.Jam. Penurunan tersebut disebabkan oleh...

c. Pelayanan Penambatan

Produksi Pelayanan Penambatan pada tahun 2020 terealisasi sebesar 331.398.329 GT.Etm, naik 2.190.246 GT.Etm atau 0,67% dibandingkan tahun 2019 sebesar 329.208.083 GT.Etm. Peningkatan tersebut disebabkan oleh...

d. Pelayanan Alur

Produksi Pelayanan Alur pada tahun 2020 terealisasi sebesar 22.712.428 ton, turun 2.219.853 ton atau 8,90% dibandingkan tahun 2019 sebesar 24.932.281 ton. Sedangkan realisasi produksi dalam satuan unit box di tahun 2020 tercatat sebesar 2.079.846 box, turun 81.107 box atau 3,75% dibandingkan tahun 2019 sebesar 2.160.953 box. Penurunan tersebut disebabkan oleh...

e. Pelayanan Kepil

Produksi Pelayanan Kepil pada tahun 2020 terealisasi sebesar 32.654 Grk, naik 6.486 Grk atau 24,79% dibandingkan tahun 2019 sebesar 26.168 Grk. Sedangkan realisasi produksi dalam unit GT di tahun 2020 tercatat sebesar 211.424.146 GT, naik 194.269.084 GT atau 1132,43% dibandingkan tahun 2019 sebesar 17.155.062 GT. Peningkatan tersebut disebabkan oleh...

Movement in 2020 was recorded at 600,074,968 GT.Ship.Movement, decreasing by 38,903,450 GT.Ship.Movement or 6.09% compared to 2019 which amounted to 638,978,418 GT.Ship.Movement. The decrease was caused by ...

b. Tugboat Service

Tugboat Service production in 2020 in Ship.Hour was recorded at 81,299 Ship.Hour, a decrease of 6,419 Ship.Hour or 7.32% compared to 2019 which amounted to 87,718 Ship.Hour. Meanwhile, the production realization in GT.Ship.Hour in 2020 amounted to 686,846,387 GT.Ship.Hour, a decrease of 12,285,636 GT.Ship.Hour or 1.76% compared to 2019 which amounted to 699,132,023 GT.Ship.Hour. The decrease was caused by ...

c. Berthing Service

Berthing Service production in 2020 was realized at 331,398,329 GT.Etm, an increase of 2,190,246 GT.Etm or 0.67% compared to 2019 of 329,208,083 GT.Etm. The increase was caused by ...

d. Navigation Service

Navigation Service production in 2020 was realized at 22,712,428 tonnes, a decrease of 2,219,853 tonnes or 8.90% compared to 2019 which amounted to 24,932,281 tonnes. Meanwhile, the production realization in box unit in 2020 was recorded at 2,079,846 boxes, a decrease of 81,107 boxes or 3.75% compared to 2019 which amounted to 2,160,953 boxes. The decrease was caused by ...

e. Mooring Service

Mooring Service production in 2020 was realized at 32,654 Movement, an increase of 6,486 Movement or 24.79% compared to 2019 of 26,168 Movement. Meanwhile, the realization of production in GT units in 2020 was recorded at 211,424,146 GT, an increase of 194,269,084 GT or 1132.43% compared to 2019 which amounted to 17,155,062 GT. The increase was caused by ...



PENDAPATAN PELAYANAN KAPAL TAHUN 2020

SHIP SERVICE REVENUE IN 2020

**Pendapatan Pelayanan Kapal Tahun 2019-2020 /
Ship Service Revenue in 2019-2020**

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Pendapatan Labuh / Anchorage Revenue	-	-	-	-
Pendapatan Pemanduan / Navigation Revenue	148.993	171.602	(22.609)	-13,18%
Pendapatan Penundaan / Tugboat Revenue	397.631	428.074	(30.443)	-7,11%
Pendapatan Penambatan / Berthing Revenue	211.114	221.598	(10.484)	-4,73%
Pendapatan Jasa Alur / Navigation Service Revenue	259.500	276.276	(16.776)	-6,07%
Pendapatan Jasa Kepil / Mooring Service Revenue	4.576	4.858	(283)	-5,82%
Jumlah / Total	1.021.814	1.102.407	(80.594)	-7,31%

Di tahun 2020, Pendapatan Pelayanan Kapal tercatat sebesar Rp1.021,81 miliar, turun Rp80,59 miliar atau 7,31% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1.102,41 miliar. Penurunan terjadi pada seluruh komponen Pelayanan Kapal, khususnya Pendapatan Penundaan yang turun sebesar Rp30,44 miliar atau 7,11%. Berikut adalah uraian mengenai kinerja Pendapatan Pelayanan Kapal di tahun 2020.

a. Pendapatan Pemanduan

Pendapatan Pemanduan di tahun 2020 tercatat sebesar Rp148,99 miliar, turun Rp22,61 miliar atau 13,18% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp171,60 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh...

b. Pendapatan Penundaan

Pendapatan Penundaan di tahun 2020 tercatat sebesar Rp397,63 miliar, turun Rp30,44 miliar atau 7,11% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp428,07 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh...

c. Pendapatan Penambatan

Pendapatan Penambatan di tahun 2020 tercatat sebesar Rp211,11 miliar, turun Rp10,48 miliar atau 4,73% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp211,60 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh...

In 2020, Ship Service Revenue was recorded at Rp1,021.81 billion, a decrease by Rp80.59 billion or 7.31% compared to 2019 amounted to Rp1,102.41 billion. The decrease occurred in all Ship Service components, especially Tugboat Revenue, which decreased by Rp30.44 billion or 7.11%. The following is a description of the performance of Ship Service Revenues in 2020.

a. Navigation Revenue

Navigation Revenue in 2020 was recorded at Rp148.99 billion, a decrease of Rp22.61 billion or 13.18% compared to 2019 amounted to Rp171.60 billion. The decrease was caused by ...

b. Tugboat Revenue

Tugboat Revenue in 2020 was recorded at Rp397.63 billion, decreased by Rp30.44 billion or 7.11% compared to 2019 of Rp428.07 billion. The decrease was caused by ...

c. Berthing Revenue

Berthing Revenue in 2020 was recorded at Rp211.11 billion, decreased by Rp10.48 billion or 4.73% compared to 2019 amounted to Rp211.60 billion. The decrease was caused by ...

**d. Pendapatan Jasa Alur**

Pendapatan Jasa Alur di tahun 2020 tercatat sebesar Rp259,50 miliar, turun Rp16,78 miliar atau 6,07% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp276,28 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh...

e. Pendapatan Jasa Kepil

Pendapatan Jasa Kepil di tahun 2020 tercatat sebesar Rp4,58 miliar, turun Rp283 juta atau 5,82% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp4,86 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh...

Segmen Usaha Pelayanan Peti Kemas

Segmen usaha Pelayanan Peti Kemas terbagi menjadi beberapa bidang usaha, antara lain:

1. Pelayanan Operasi Kapal,
2. Pelayanan Operasi Lapangan,
3. Pelayanan CFS,
4. Pelayanan Peti Kemas Transhipment, dan
5. Pelayanan Peti Kemas Lainnya.

Dalam menjalankan kegiatan operasinya, Perusahaan membagi segmen usaha Pelayanan Peti Kemas menjadi 2 bagian, yaitu Pelayanan Peti Kemas Internasional dan Pelayanan Peti Kemas Domestik. Berikut adalah penjelasan mengenai tingkat produksi dan pendapatan Pelayanan Peti Kemas tersebut pada tahun 2020.

PRODUKSI PELAYANAN PETI KEMAS TAHUN 2020**Produksi Pelayanan Peti Kemas Internasional****d. Navigation Service Revenue**

Navigation Service Revenue in 2020 was recorded at Rp259.50 billion, decreased by Rp16.78 billion or 6.07% compared to 2019 which amounted to Rp276.28 billion. The decrease was caused by ...

e. Mooring Service Revenue

Mooring Service Revenue in 2020 was recorded at Rp4.58 billion, a decrease of Rp283 million or 5.82% compared to 2019 amounted to Rp4.86 billion. The decrease was caused by ...

Container Service Business Segment

Container Service business segment is divided into several business lines, including:

1. Ship Operations Service,
2. Field Operations Service,
3. CFS Service,
4. Transhipment Container Service, and
5. Other Container Service.

In conducting its operational activities, the Company divides the Container Business segment into two parts, namely International Container Service and Domestic Container Service. The following is an explanation of the production and revenue of the Container Service segment in 2020.

CONTAINER SERVICE PRODUCTION IN 2020**International Container Service Production**

**Produksi Pelayanan Peti Kemas Internasional Tahun 2019-2020 /
International Container Service Production in 2019-2020**

Uraian / Description	Satuan / Unit			Pertumbuhan / Growth	
		2020	2019	Nominal / Nominal	%
Dermaga / Wharf	Box	1.169.204	1.534.356	(365.152)	-23,80%
Penumpukan Peti Kemas / Container Yard	Box.Hari / Box.Day	8.413.711	12.632.922	(4.219.211)	-33,40%
Bongkar Muat / Loading and Unloading	Box	1.398.603	1.518.976	(120.373)	-7,92%

- Produksi Dermaga Peti Kemas Internasional di tahun 2020 terealisasi sebesar 1.169.204 box, turun 365.152 box atau 23,80% dibandingkan tahun 2019 sebesar 1.534.356 box. Penurunan tersebut disebabkan oleh...

- The production of International Container Wharf in 2020 was realized by 1,169,204 boxes, a decrease of 365,152 boxes or 23.80% compared to 2019 at 1,534,356 boxes. The decrease was caused by ...



- Produksi Penumpukan Peti Kemas Internasional di tahun 2020 terealisasi sebesar 8.413.711 Box.Hari, turun 4.219.211 Box.Hari atau 33,40% dibandingkan tahun 2019 sebesar 12.632.922 Box.Hari. Penurunan tersebut disebabkan oleh...
- Produksi Bongkar Muat Peti Kemas Internasional di tahun 2020 terealisasi sebesar 1.398.603 box, turun 120.373 box atau 7,92% dibandingkan tahun 2019 sebesar 1.518.976 box. Penurunan tersebut disebabkan oleh...

Produksi Pelayanan Peti Kemas Domestik

- The International Container Yard production in 2020 amounted to 8,413,711 Boxes per day, down by 4,219,211 boxes per day or 33.40% compared to 2019 amounted to 12,632,922 boxes per day. The decrease was caused by ...
- The International Container Loading and Unloading production in 2020 amounted to 1,398,603 boxes, a decrease of 120,373 boxes or 7.92% compared to 2019 of 1,518,976 boxes. The decrease was caused by ...

Domestic Container Service

**Produksi Pelayanan Peti Kemas Domestik Tahun 2019-2020 /
Domestic Container Service Production in 2019-2020**

Uraian / Description	Satuan / Unit	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
				Nominal / Nominal	%
Dermaga / Wharf	Box	2.518.161	2.836.337	(318.176)	-11,22%
Penumpukan Peti Kemas / Container Yard	Box.Hari / Box.Day	3.498.311	4.125.450	(627.139)	-15,20%
Bongkar Muat / Loading and Unloading	Box	2.544.207	2.714.628	(170.421)	-6,28%

- Produksi Dermaga Peti Kemas Domestik di tahun 2020 terealisasi sebesar 2.518.161 box, turun 318.176 box atau 11,22% dibandingkan tahun 2019 sebesar 2.836.337 box. Penurunan tersebut disebabkan oleh....
- Produksi Penumpukan Peti Kemas Domestik di tahun 2020 terealisasi sebesar 3.498.311 Box.Hari, turun 627.139 Box.Hari atau 15,20% dibandingkan tahun 2019 sebesar 4.125.450 Box.Hari. Penurunan tersebut disebabkan oleh...
- Produksi Bongkar Muat Peti Kemas Domestik di tahun 2020 terealisasi sebesar 2.544.207 box, turun 170.421 box atau 6,28% dibandingkan tahun 2019 sebesar 2.714.628 box. Penurunan tersebut disebabkan oleh...

- The production of Domestic Container Wharf in 2020 reached 2,518,161 boxes, a decrease of 318,176 boxes or 11.22% compared to 2019 of 2,836,337 boxes. The decrease was caused by ...
- The Domestic Container Yard production in 2020 was realized at 3,498,311 Box.Day, a decrease of 627,139 Box.Day or 15.20% compared to 2019 at 4,125,450 Box.Day. The decrease was caused by ...
- The Domestic Container Loading and Unloading production in 2020 was realized at 2,544,207 boxes, a decrease of 170,421 boxes or 6.28% compared to 2019 of 2,714,628 boxes. The decrease was caused by ...

**PENDAPATAN PELAYANAN PETI KEMAS TAHUN 2020****CONTAINER SERVICE REVENUE IN 2020**

**Pendapatan Pelayanan Peti Kemas Tahun 2019-2020 /
Container Service Revenue in 2019-2020**

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Pendapatan Pelayanan Peti Kemas Internasional / International Container Service Revenue	3.528.152	3.528.152	-	-
Pendapatan Pelayanan Peti Kemas Domestik / Domestic Container Service Revenue	2.015.925	2.023.050	(7.125)	-0,35%
Jumlah / Total	5.544.077	5.551.202	(7.125)	-0,13%

Pendapatan Pelayanan Peti Kemas di tahun 2020 tercatat sebesar Rp5.544,08 miliar, turun Rp7,13 miliar atau 0,13% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp5.551,20 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya Pendapatan Pelayanan Peti Kemas Domestik. Berikut adalah uraian mengenai kinerja Pendapatan Pelayanan Peti Kemas di tahun 2020.

- Pendapatan Pelayanan Peti Kemas Internasional di tahun 2019 dan 2020 tercatat sebesar Rp3.528,15 miliar. Tidak adanya penurunan maupun peningkatan pada jumlah pendapatan tersebut disebabkan oleh...
- Pendapatan Pelayanan Peti Kemas Domestik di tahun 2020 tercatat sebesar Rp2.015,93 miliar, turun Rp7,13 miliar atau 0,35% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp2.023,05 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh...

Segmen Usaha Pelayanan Nonpeti Kemas

Segmen usaha Pelayanan Nonpeti Kemas terbagi menjadi beberapa bidang usaha, antara lain:

1. Pelayanan General Cargo,
2. Pelayanan Curah Kering,
3. Pelayanan Curah Cair,
4. Pelayanan Gas,
5. Pelayanan Car Terminal, dan
6. Pelayanan Hewan.

Berikut adalah penjelasan mengenai tingkat produksi, pendapatan, dan laba dari segmen Pelayanan Nonpeti Kemas tersebut pada tahun 2020.

The Container Service Revenue in 2020 was recorded at Rp5,544.08 billion, decreased by Rp7.13 billion or 0.13% compared to 2019 amounted to Rp5,551.20 billion. The decrease was caused by a decline in Domestic Container Service Revenue. The following is a description of the performance of Container Service Revenue in 2020.

- International Container Service Revenues in 2019 and 2020 were recorded at Rp3,528.15 billion. There was neither a decrease nor an increase in the revenue amount due to ...
- The Domestic Container Service Revenue in 2020 was recorded at Rp2,015.93 billion, a decrease of Rp7.13 billion or 0.35% compared to 2019 amounted to Rp2,023.05 billion. The decrease was caused by ...

Non-Container Service Business Segment

Non-Container Service business segment is divided into several business lines, including:

1. General Cargo Service,
2. Dry Bulk Services,
3. Liquid Bulk Service,
4. Gas Service,
5. Car Terminal Service, and
6. Animal Service.

The following is an explanation of the production, revenue, and profit of Non-Container Service segment in 2020.



PRODUKSI PELAYANAN NONPETI KEMAS TAHUN 2020

Produksi Pelayanan Nonpeti Kemas General Cargo

NON-CONTAINER SERVICE PRODUCTION IN 2020

General Cargo Non-Container Service

**Produksi Pelayanan Nonpeti Kemas General Cargo Tahun 2019-2020 /
General Cargo Non-Container Service Production in 2019-2020**

Uraian / Description	Satuan / Unit	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
		Nominal / Nominal	%		
Dermaga / Wharf	ton / tonnes	6.726.988	8.086.463	(1.359.475)	-16,81%
	M ³	2.235.480	2.710.830	(475.350)	-17,54%
Gudang Penumpukan / Stacking Warehouse	Ton.Hari / Tonnes.Day	389.112	253.975	135.137	53,21%
	M ³ .Hari / M3.Day	113.363	202.138	(88.775)	-43,92%
Lapangan Penumpukan / Open Storage	Ton.Hari / Tonnes.Day	5.579.769	3.497.286	2.082.483	59,55%
	M ³ .Hari / M3.Day	2.373.917	3.119.231	(745.314)	-23,89%
Bongkar Muat / Loading and Unloading	ton / tonnes	1.369.732	1.474.239	(104.507)	-7,09%
	M ³	978.591	1.171.940	(193.349)	-16,50%

- Produksi Dermaga Nonpeti Kemas General Cargo di tahun 2020 untuk satuan ton tercatat sebesar 6.726.988 ton, turun 1.359.475 ton atau 16,81% dibandingkan tahun 2019 sebesar 8.086.463 ton. Sedangkan untuk satuan M³ di tahun 2020 terealisasi sebesar 2.235.480 M³, turun 475.350 M³ atau 17,54% dibandingkan tahun 2019 sebesar 2.710.830 M³. Penurunan tersebut disebabkan oleh...
- Produksi Gudang Penumpukan Nonpeti Kemas General Cargo di tahun 2020 untuk satuan Ton.Hari tercatat sebesar 389.112 Ton.Hari, naik 135.137 Ton. Hari atau 53,21% dibandingkan tahun 2019 sebesar 253.975 Ton.Hari. Peningkatan tersebut disebabkan oleh.... Sedangkan Produksi Gudang Penumpukan Nonpeti Kemas General Cargo di tahun 2020 untuk satuan M³.Hari tercatat sebesar 113.363 M³.Hari, turun 88.775 M³.Hari atau 43,92% dibandingkan tahun 2019 sebesar 202.138 M³.Hari. Penurunan tersebut disebabkan oleh...
- Produksi Lapangan Penumpukan Nonpetikemas General Cargo di tahun 2020 untuk satuan Ton.Hari tercatat sebesar 5.579.759 Ton.Hari, naik 2.082.483 atau 59,55% dibandingkan tahun 2019 sebesar 3.497.286 Ton.Hari. Peningkatan tersebut disebabkan oleh.... Sedangkan Produksi Lapangan Penumpukan Nonpeti Kemas General Cargo di tahun 2020 untuk satuan M³.Hari tercatat sebesar 2.373.917 M³.Hari.
- General Cargo Non-Container Wharf production in 2020 in tonnes was recorded at 6,726,988 tonnes, a decrease of 1,359,475 tonnes or 16.81% compared to 2019 at 8,086,463 tonnes. Meanwhile, the M³ unit in 2020 amounted to 2,235,480 M³, a decrease of 475,350 M³ or 17.54% compared to 2019 of 2,710,830 M³. The decrease was caused by ...
- General Cargo Non-Container Stacking Warehouse production in 2020 in Tonnes.Day was recorded at 389,112 Tonnes.Day, an increase of 135,137 Tonnes. Day or 53.21% compared to 2019 which amounted to 253,975 Tonnes.Day. The increase was caused by Meanwhile, the production of General Cargo Non-Container Stacking Warehouse in 2020 in M³.Day was recorded at 113,363 M³. Day, decreased by 88,775 M³.Day or 43.92% compared to 2019 amounting to 202,138 M³.Day. The decrease was caused by ...
- General Cargo Non-Container Open Storage production in 2020 in Tonnes.Day was recorded at 5,579,759 Tonnes.Day, an increase of 2,082,483 or 59.55% compared to 2019 at 3,497,286 Tonnes. Day. The increase was caused by Meanwhile, the production of General Cargo Non-Container Open Storage in 2020 in M³.Day was recorded at 2,373,917 M³.Day, a decrease of 745,315 M³.Day or 23.89%



turun 745.315 M³.Hari atau 23,89% dibandingkan tahun 2019 sebesar 3.119.231 M³.Hari. Penurunan tersebut disebabkan oleh...

- Produksi Bongkar Muat Nonpeti Kemas General Cargo di tahun 2020 untuk satuan ton tercatat sebesar 1.369.732 ton, turun 104.507 ton atau 7,09% dibandingkan tahun 2019 sebesar 1.474.239 ton. Sedangkan untuk satuan M³ di tahun 2020 tercatat sebesar 978.591 M³, turun 193.349 M³ atau 16,50% dibandingkan tahun 2019 sebesar 1.171.940 M³. Penurunan tersebut disebabkan oleh...

compared to 2019 at 3,119,231 M³.Day. The decrease was caused by ...

- General Cargo Non-Container Loading and Unloading production in 2020 in tonnes was recorded at 1,369,732 tonnes, a decrease of 104,507 tonnes or 7.09% compared to 2019 at 1,474,239 tonnes. Meanwhile, the M³ unit in 2020 was recorded at 978,591 M³, a decrease of 193,349 M³ or 16.50% compared to 2019 at 1,171,940 M³. The decrease was caused by ...

Produksi Pelayanan Nonpeti Kemas Curah Kering

Dry Bulk Non-Container Service Production

**Produksi Pelayanan Nonpeti Kemas Curah Kering Tahun 2019-2020 /
Dry Bulk Non-Container Service Production in 2019-2020**

Uraian / Description	Satuan / Unit	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
				Nominal / Nominal	%
Dermaga / Wharf	ton / tonnes	19.536.369	19.006.016	530.353	2,79%
Lapangan Penumpukan Diusahakan / Open Storage	Ton.Hari / Tonnes.Day	6.703	283.885	(277.182)	-97,64%
Bongkar Muat / Loading and Unloading	ton / tonnes	19.437.295	19.690.622	(253.327)	-1,29%

- Produksi Dermaga Nonpeti Kemas Curah Kering pada tahun 2020 terealisasi sebesar 19.536.369 ton, naik 530.353 ton atau 2,79% dibandingkan tahun 2019 sebesar 19.006.016 ton. Peningkatan tersebut disebabkan oleh...
- Produksi Lapangan Penumpukan Diusahakan Nonpeti Kemas Curah Kering pada tahun 2020 terealisasi sebesar 6.703 Ton.Hari, turun 277.182 Ton.Hari atau 97,64% dibandingkan tahun 2019 sebesar 283.885 Ton.Hari. Penurunan tersebut disebabkan oleh...
- Produksi Bongkar Muat Nonpeti Kemas Curah Kering pada tahun 2020 terealisasi sebesar 19.437.295 ton, turun 253.327 ton atau 1,29% dibandingkan tahun 2019 sebesar 19.690.622 ton. Penurunan tersebut disebabkan oleh...

- The production of Dry Bulk Non-Container Wharf in 2020 was realized at 19,536,369 tonnes, an increase of 530,353 tonnes or 2.79% compared to 2019 at 19,006,016 tonnes. The increase was caused by ...
- The production of Dry Bulk Non-Container Open Storage in 2020 was realized at 6,703 Tonnes.Day, a decrease of 277,182 Tonnes.Day or 97.64% compared to 2019 at 283,885 Tonnes.Day. The decrease was caused by ...
- The production of Dry Bulk Non-Container Loading and Unloading in 2020 was realized at 19,437,295 tonnes, a decrease of 253,327 tonnes or 1.29% compared to 2019 at 19,690,622 tonnes. The decrease was caused by ...



Produksi Pelayanan Nonpeti Kemas Curah Cair

Liquid Bulk Non-Container Service Production

**Produksi Pelayanan Nonpeti Kemas Curah Cair Tahun 2019-2020 /
Liquid Bulk Non-Container Service Production in 2019-2020**

Uraian / Description	Satuan / Unit	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
				Nominal / Nominal	%
Dermaga / Wharf	ton / tonnes	11.388.934	12.733.251	(1.344.317)	-10,56%
Bongkar Muat / Loading and Unloading	ton / tonnes	10.471.706	10.195.550	276.156	2,71%

- Produksi Dermaga Nonpeti Kemas Curah Cair pada tahun 2020 terealisasi sebesar 11.388.934 ton, turun 1.344.317 ton atau 10,56% dibandingkan tahun 2019 sebesar 12.733.251 ton. Penurunan tersebut disebabkan oleh...
- Produksi Bongkar Muat Nonpeti Kemas Curah Cair pada tahun 2020 terealisasi sebesar 10.471.706 ton, naik 276.156 ton atau 2,71% dibandingkan tahun 2019 sebesar 10.195.550 ton. Peningkatan tersebut disebabkan oleh...

- The production of Liquid Bulk Non-Container in 2020 was realized at 11,388,934 tonnes, a decrease of 1,344,317 tonnes or 10.56% compared to 2019 which amounted to 12,733,251 tonnes. The decrease was caused by ...
- The production of Liquid Bulk Non-Container Loading and Unloading reached 10,471,706 tonnes, an increase of 276,156 tonnes or 2.71% compared to 2019 at 10,195,550 tonnes. The increase was caused by ...

Produksi Pelayanan Nonpeti Kemas Gas

Gas Non-Container Service Production

**Produksi Pelayanan Nonpeti Kemas Gas Tahun 2019-2020 /
Gas Non-Container Service Production in 2019-2020**

Uraian / Description	Satuan / Unit	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
				Nominal / Nominal	%
Stevedoring	MMBTU	11.520.303	11.592.133	(71.830)	-0,62%

Produksi Stevedoring Nonpeti Kemas Gas pada tahun 2020 terealisasi sebesar 11.520.303 MMTU, turun 71.830 MMBTU atau 0,62% dibandingkan tahun 2019 sebesar 11.592.133 MMBTU. Penurunan tersebut disebabkan oleh...

The production of Gas Non-Container Stevedoring in 2020 was realized at 11,520,303 MMTU, a decrease of 71,830 MMBTU or 0.62% compared to 2019 of 11,592,133 MMBTU. The decrease was caused by ...

**Produksi Pelayanan Nonpeti Kemas Hewan****Animal Non-Container Service Production**

**Produksi Pelayanan Nonpeti Kemas Hewan Tahun 2019-2020 /
Animal Non-Container Service Production in 2019-2020**

Uraian / Description	Satuan / Unit	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
				Nominal / Nominal	%
Dermaga / Wharf	ekor / animal	77.840	121.663	(43.823)	-36,02%
Lapangan Penumpukan Diusahakan / Open Storage	Ekor.Hari / Animal.Day	738	11.012	(10.274)	-93,30%
<i>Stevedoring</i>	ekor / animal	41.905	40.693	1.212	2,98%
Kerjasama Pelayanan B/M / Cooperation in Loading and Unloading Service	ekor / animal	23.750	70.133	(46.383)	-66,14%

- Produksi Dermaga Nonpeti Kemas Hewan pada tahun 2020 terealisasi sebesar 77.840 ekor, turun 43.823 ekor atau 36,02% dibandingkan tahun 2019 sebesar 121.663 ekor. Penurunan tersebut disebabkan oleh...
- Produksi Lapangan Penumpukan Diusahakan Nonpetikemas Hewan pada tahun 2020 terealisasi sebesar 738 Ekor.Hari, turun 10.274 Ekor.Hari atau 93,30% dibandingkan tahun 2019 sebesar 11.012 Ekor.Hari. Penurunan tersebut disebabkan oleh...
- Produksi *Stevedoring* Nonpetikemas Hewan pada tahun 2020 terealisasi sebesar 41.905 ekor, naik 1.212 ekor atau 2,98% dibandingkan tahun 2019 sebesar 40.693 ekor. Peningkatan tersebut disebabkan oleh...
- Produksi Kerjasama Pelayanan B/M pada tahun 2020 terealisasi sebesar 23.750 ekor, turun 46.383 ekor atau 66,14% dibandingkan tahun 2019 sebesar 70.133 ekor. Penurunan tersebut disebabkan oleh...

- The production of Animal Non-Container Wharf in 2020 was 77,840 animals, a decrease of 43,823 animals or 36.02% compared to 2019, which was 121,663 animals. The decrease was caused by ...
- The production of Animal Non-Container Open Storage in 2020 was realized as many as 738 Animal. Day, a decrease of 10,274 Animal.Day or 93.30% compared to 2019 amounted to 11,012 Animal.Day. The decrease was caused by ...
- The production of non-packaged animal stevedoring in 2020 was realized at 41,905 heads, an increase of 1,212 heads or 2.98% compared to 2019 which amounted to 40,693 heads. The increase was caused by ...
- The production of Animal Non-Container Loading and Unloading in 2020 was realized at 23,750 animals, a decrease of 46,383 animals or 66.14% compared to 2019 which amounted to 70,133 animals. The decrease was caused by ...



PENDAPATAN PELAYANAN NONPETI KEMAS TAHUN 2020

REVENUE OF NON-CONTAINER SERVICE IN 2020

**Pendapatan Pelayanan Nonpeti Kemas Tahun 2019-2020 /
Revenue of Non-Container Service in 2019 - 2020**

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Pendapatan Nonpeti Kemas General Cargo / General Cargo Non-Container Revenue	223.873	235.894	(12.020)	-5,10%
Pendapatan Nonpeti Kemas Curah Kering / Dry Bulk Non-Container Revenue	474.512	582.558	(108.046)	-18,55%
Pendapatan Nonpeti Kemas Curah Cair / Liquid Bulk Non-Container Revenue	211.696	214.210	(2.514)	-1,17%
Pendapatan Nonpeti Kemas Hewan / Animal Non-Container Revenue	1.830	1.959	(130)	-6,63%
Jumlah / Total	911.911	1.034.622	(122.710)	-11,86%

Pendapatan Pelayanan Nonpeti Kemas di tahun 2020 terealisasi sebesar Rp911,91 miliar, turun Rp122,71 miliar atau 11,86% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1.034,62 miliar. Penurunan tersebut berasal dari seluruh komponen pendapatan, khususnya Pendapatan Nonpeti Kemas Curah Kering. Berikut adalah uraian mengenai kinerja Pendapatan Pelayanan Nonpeti Kemas di tahun 2020.

- Pendapatan Nonpeti Kemas General Cargo di tahun 2020 tercatat sebesar Rp223,87 miliar, turun Rp12,02 miliar atau 5,10% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp235,89 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh...
- Pendapatan Nonpeti Kemas Curah Kering di tahun 2020 tercatat sebesar Rp474,51 miliar, turun Rp108,05 miliar atau 18,55% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp582,56 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh...
- Pendapatan Nonpeti Kemas Curah Cair di tahun 2020 tercatat sebesar Rp211,70 miliar, turun Rp2,51 miliar atau 1,17% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp214,21 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh...
- Pendapatan Nonpeti Kemas Hewan di tahun 2020 tercatat sebesar Rp1,83 miliar, turun Rp130 juta atau 6,63% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1,96 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh...

Non-Container Service Revenue in 2020 amounted to Rp911.91 billion, a decrease of Rp122.71 billion or 11.86% compared to 2019 amounted to Rp1,034.62 billion. The decrease came from all revenue components, especially Dry Bulk Non-Container Revenue. The following is the description of the performance of Non-Container Service Revenue in 2020.

- General Cargo Non-Container Revenue in 2020 was recorded at Rp223.87 billion, decreased by Rp12.02 billion or 5.10% compared to 2019 which amounted to Rp235.89 billion. The decrease was caused by ...
- Dry Bulk Non-Container Revenue in 2020 was recorded at Rp474.51 billion, decreased by Rp108.05 billion or 18.55% compared to 2019 amounted to Rp582.56 billion. The decrease was caused by ...
- Liquid Bulk Non-Container Revenue in 2020 was recorded at Rp211.70 billion, a decrease of Rp2.51 billion or 1.17% compared to 2019 amounted to Rp214.21 billion. The decrease was caused by ...
- Animal Non-Container Revenue in 2020 was recorded at Rp1.83 billion, a decrease of Rp130 million or 6.63% compared to 2019 amounted to Rp1.96 billion. The decrease was caused by ...



Bidang Usaha Penunjang

Bidang usaha penunjang terbagi menjadi beberapa bidang usaha, antara lain:

1. Pelayanan Konsolidasi dan Distribusi Barang,
2. Pelayanan Pelra,
3. Pengusahaan Alat,
4. Pengusahaan Properti,
5. Pengusahaan Air dan Listrik,
6. Pelayanan Rupa-Rupa Usaha
7. Pelayanan *Forwarding*
8. Pelayanan Terminal UKS

Berikut merupakan informasi mengenai produksi dan pendapatan dari Bidang Usaha Penunjang di tahun 2020.

PRODUKSI BIDANG USAHA PENUNJANG TAHUN 2020

Produksi Pelayanan Konsolidasi dan Distribusi Barang

Supporting Business Line

Supporting business is divided into several lines, namely:

1. Consolidation and Goods Distribution Service,
2. Pelra (People's Shipping) Service,
3. Equipment Rentals,
4. Property Business,
5. Clean Water and Electricity Business,
6. Passenger Terminal and Other Business Services,
7. Forwarding Service,
8. TUKS (Special Terminal) and Marine Service.

The following is an explanation of the production and revenue in 2020.

SUPPORTING BUSINESS LINE PRODUCTION IN 2020

Consolidation and Goods Distribution Service Production

**Produksi Pelayanan Konsolidasi dan Distribusi Barang Tahun 2019-2020 /
Consolidation and Goods Distribution Service Production in 2019-2020**

Uraian / Description	Satuan / Unit	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
				Nominal / Nominal	%
Receiving/Delivery (Barang) / (Goods) Receiving/Delivery	Box	462.841	401.066	61.775	15,40%
Stuffing/Stripping	Box	121.077	155.478	(34.401)	-22,13%
Sortasi / Sorting	Unit	1.546	1.524	22	1,44%
Penumpukan Petikemas / Container Stacking	Box.Hari / Box.Day	885.467	904.243	(18.776)	-2,08%
Gerakan Ekstra / Extra Movement	Box	86.114	223.061	(136.947)	-61,39%
Repairing/Cleaning Container / Container Repairing/Clearing	Box.Shift	60.604	1.470	59.134	4022,72%

- Produksi *Receiving/Delivery* di tahun 2020 terealisasi sebesar 462.841 box, naik 61.775 box atau 15,40% dibandingkan tahun 2019 sebesar 401.066 box. Peningkatan tersebut disebabkan oleh...
- Produksi *Stuffing/Stripping* di tahun 2020 terealisasi sebesar 121.077 box, turun 34.401 box atau 22,13% dibandingkan tahun 2019 sebesar 155.478 box. Penurunan tersebut disebabkan oleh...
- Produksi Sortasi di tahun 2020 terealisasi sebesar 1.546 unit, naik 22 unit atau 1,44% dibandingkan tahun 2019 sebesar 1.524 unit. Peningkatan tersebut disebabkan oleh...
- Receiving/Delivery production in 2020 was realized by 462,841 boxes, an increase of 61,775 boxes or 15.40% compared to 2019 of 401,066 boxes. The increase was caused by ...
- Stuffing/Stripping production in 2020 was realized at 121,077 boxes, a decrease of 34,401 boxes or 22.13% compared to 2019 of 155,478 boxes. The decrease was caused by ...
- Sorting production in 2020 was realized by 1,546 units, an increase of 22 units or 1.44% compared to 2019 of 1,524 units. The increase was caused by ...



- Produksi Penumpukan Petikemas di tahun 2020 terealisasi sebesar 885.467 Box.Hari, turun 18.776 Box.Hari atau 2,08% dibandingkan tahun 2019 sebesar 904.243 Box.Hari. Penurunan tersebut disebabkan oleh...
- Produksi Gerakan Sewa di tahun 2020 terealisasi sebesar 86.114 box, turun 136.947 box atau 61,39% dibandingkan tahun 2019 sebesar 223.061 box. Penurunan tersebut disebabkan oleh...
- Produksi *Repairing/Cleaning Container* di tahun 2020 terealisasi sebesar 60.604 Box.Shift, naik 59.134 Box.Shift atau 4022,72% dibandingkan tahun 2019 sebesar 1.470 Box.Shift. Peningkatan tersebut disebabkan oleh...
- Container Stacking production in 2020 was realized at 885,467 boxes per day, a decrease of 18,776 boxes per day or 2.08% compared to 2019 at 904,243 boxes per day. The decrease was caused by ...
- Rental Movement production in 2020 was realized by 86,114 boxes, a decrease of 136,947 boxes or 61.39% compared to 2019 of 223,061 boxes. The decrease was caused by ...
- Container Repairing/Cleaning production in 2020 was realized at 60,604 Box.Shift, an increase of 59,134 Box.Shift or 4022.72% compared to 2019 amounted to 1,470 Box.Shift. The increase was caused by ...

Produksi Pelayanan Pelra

Pelra (People's Shipping) Service Production

**Produksi Pelayanan Pelra Tahun 2019-2020 /
Pelra Service Production in 2019-2020**

Uraian / Description	Satuan / Unit			Pertumbuhan / Growth	
		2020	2019	Nominal / Nominal	%
Pelayanan Paket / Package Service	Unit	5.908	2.140	3.768	176,07%
Pelayanan Non Paket / Non-Package Service					
Penambatan / Berthing	GT.Etmal	2.455.507	7.752.978	(5.297.471)	-68,33%
	Ton / Tonnes	789.311	795.487	(6.176)	-0,78%
Dermaga / Wharf	M ³	420.288	443.364	(23.076)	-5,20%
	Ekor / Animal	23.339	5.536	17.803	321,59%

- Produksi Pelayanan Paket di tahun 2020 terealisasi sebesar 5.908 unit, naik 3.768 unit atau 176,07% dibandingkan tahun 2019 sebesar 2.140 unit. Peningkatan tersebut disebabkan oleh...
- Produksi Penampatan Pelayanan Non Paket di tahun 2020 terealisasi sebesar 2.455.507 GT.Etmal, turun 5.297.471 GT.Etmal atau 68,33% dibandingkan tahun 2019 sebesar 7.752.978 GT.Etmal. Penurunan tersebut disebabkan oleh...
- Produksi Dermaga Pelayanan Non Paket di tahun 2020 dalam satuan ton terealisasi sebesar 789.311 ton, turun 6.176 ton atau 0,78% dibandingkan tahun 2019. Penurunan juga terlihat pada satuan unit M³ yang tercatat sebesar 420.288 M³, turun 23.076 M³ atau 5,20% dibandingkan tahun 2019 sebesar 443.364 M³. Penurunan tersebut disebabkan oleh.... Sedangkan Produksi Dermaga Pelayanan Non
- Package Service production in 2020 was realized by 5,908 units, an increase of 3,768 units or 176.07% compared to 2019 of 2,140 units. The increase was caused by ...
- Berthing Non-Package Services production in 2020 was realized at 2,455,507 GT.Etmal, down 5,297,471 GT.Etmal or 68.33% compared to 2019 which amounted to 7,752,978 GT.Etmal. The decrease was caused by ...
- Wharf Non-Package Service production in 2020 in tonnes was realized at 789,311 tonnes, a decrease of 6,176 tonnes or 0.78% compared to 2019. The decline also happened in M3 unit, which was recorded at 420,288 M³, a decrease of 23,076 M³ or 5.20% compared to in 2019 amounted to 443,364 M³. The decline was caused by Meanwhile, Wharf Non-Package Service production wharves in animal unit



Paket dalam satuan ekor di tahun 2020 tercatat sebesar 23.339 ekor, naik 17.803 ekor atau 321,59% dibandingkan tahun 2019 sebesar 5.536 ekor. Penurunan tersebut disebabkan oleh...

in 2020 was recorded at 23,339 animals, an increase of 17,803 animals or 321.59% compared to 2019 which amounted to 5,536 animals. The decrease was caused by ...

Produksi Pengusahaan Alat

Equipment Rentals Production

**Produksi Pengusahaan Alat Tahun 2019-2020 /
Equipment Rentals Production in 2019-2020**

Uraian / Description	Satuan / Unit	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
				Nominal / Nominal	%
Produksi Alat Angkat Diusahakan / Lifting Equipment Rental Production					
Container Crane	Box	558.131	582.722	(24.591)	-4,22%
HMC	Ton / Tonnes	1.328.110	1.274.086	54.024	4,24%
Forklift	Ton / Tonnes	7.275.407	5.313.368	1.962.039	36,93%
Fixed Crane	Ton / Tonnes	2.787.182	2.882.102	(94.920)	-3,29%
Mobile Crane	Ton / Tonnes	1.202	22.920	(21.718)	-94,76%
Reach Stacker	Box	373.278	382.447	(9.169)	-2,40%
Wheel Loader	Ton / Tonnes	6.681.233	4.806.957	1.874.276	38,99%
Luffing Crane	Ton / Tonnes	20.677	3.698	16.979	459,14%
Side Loader	Box	60.857	82.599	(21.742)	-26,32%
Excavator	Ton / Tonnes	411.368	321.301	90.067	28,03%
Automatic Stacking Crane	Box	768.529	907.190	(138.661)	-15,28%
Produksi Alat Angkut Diusahakan / Transportation Equipment Rental Production					
Conveyor	Ton / Tonnes	2.787.182	2.882.102	(94.920)	-3,29%
Straddle Carrier	Box	240.176	268.268	(28.092)	-10,47%
Produksi Alat Bantu B/M Diusahakan / Loading and Unloading (B/M) Support Equipment Rental Production					
Timbangan / Scales	Ton / Tonnes	11.617.103	7.056.589	4.560.514	64,63%
Grab	Ton / Tonnes	10.640.330	8.364.782	2.275.548	27,20%
Hopper	Ton / Tonnes	11.015.798	8.436.395	2.579.403	30,57%
Pemadam Kebakaran / Fire Extinguisher	MEI	5.541	7.870	(2.329)	-29,59%
Bucket	Ton / Tonnes	1.043.202	509.343	533.859	104,81%
Ramp Door	Ton / Tonnes	508.006	661.015	(153.009)	-23,15%
Spreader	Box	558.131	582.722	(24.591)	-4,22%

Produksi Alat Angkat Diusahakan

- Produksi Container Crane di tahun 2020 terealisasi sebesar 558.131 box, turun 24.592 box atau 4,22% dibandingkan tahun 2019 sebesar 582.722 box. Penurunan tersebut disebabkan oleh...
- Produksi HMC di tahun 2020 terealisasi sebesar 1.328.110 ton, naik 54.024 ton atau 4,24% dibandingkan tahun 2019 sebesar 1.274.086 ton. Peningkatan tersebut disebabkan oleh...

Lifting Equipment Rental Production

- Container Crane production in 2020 was realized by 558,131 boxes, a decrease of 24,592 boxes or 4.22% compared to 2019 of 582,722 boxes. The decrease was caused by ...
- HMC production in 2020 was realized at 1,328,110 tons, an increase of 54,024 tonnes or 4.24% compared to 2019 of 1,274,086 tonnes. The increase was caused by ...



- Produksi *Forlift* di tahun 2020 terealisasi sebesar 7.275.407 ton, naik 1.962.039 ton atau 36,93% dibandingkan tahun 2019 sebesar 5.313.368 ton. Peningkatan tersebut disebabkan oleh...
• Produksi *Fixed Crane* di tahun 2020 terealisasi sebesar 2.787.182 ton, turun 94.920 ton atau 3,29% dibandingkan tahun 2019 sebesar 2.882.102 ton. Penurunan tersebut disebabkan oleh...
• Produksi *Mobile Crane* di tahun 2020 terealisasi sebesar 1.202 ton, turun 21.718 ton atau 94,76% dibandingkan tahun 2019 sebesar 22.920 ton. Penurunan tersebut disebabkan oleh...
• Produksi *Reach Stacker* di tahun 2020 terealisasi sebesar 373.278 box, turun 9.169 box atau 2,40% dibandingkan tahun 2019 sebesar 382.447 box. Penurunan tersebut disebabkan oleh...
• Produksi *Wheel Loader* di tahun 2020 terealisasi sebesar 6.681.233 ton, naik 1.874.276 ton atau 38,99% dibandingkan tahun 2019 sebesar 4.806.957 ton. Peningkatan tersebut disebabkan oleh...
• Produksi *Luffing Crane* di tahun 2020 tercatat sebesar 20.677 ton, naik 16.979 ton atau 459,14% dibandingkan tahun 2019 sebesar 3.698 ton. Peningkatan tersebut disebabkan oleh...
• Produksi *Side Loader* di tahun 2020 tercatat sebesar 60.857 box, turun 21.742 box atau 26,32% dibandingkan tahun 2020 sebesar 82.599 box. Penurunan tersebut disebabkan oleh...
• Produksi *Excavator* di tahun 2020 tercatat sebesar 411.368 ton, naik 90.067 ton atau 28,03% dibandingkan tahun 2019 sebesar 321.301 ton. Peningkatan tersebut disebabkan oleh...
• Produksi *Automatic Stacking Crane* di tahun 2020 tercatat sebesar 768.529 box, turun 138.661 box atau 15,28% dibandingkan tahun 2019 sebesar 907.190 box. Penurunan tersebut disebabkan oleh...
- Forklift production in 2020 was realized at 7,275,407 tonnes, an increase of 1,962,039 tonnes or 36.93% compared to 2019 of 5,313,368 tonnes. The increase was caused by ...
• Fixed Crane production in 2020 was realized at 2,787,182 tonnes, a decrease of 94,920 tonnes or 3.29% compared to 2019 of 2,882,102 tons. The decrease was caused by ...
• Mobile Crane production in 2020 was realized at 1,202 tonnes, a decrease of 21,718 tonnes or 94.76% compared to 2019 amounted to 22,920 tonnes. The decrease was caused by ...
• Reach Stacker production in 2020 was realized at 373,278 boxes, a decrease of 9,169 boxes or 2.40% compared to 2019 of 382,447 boxes. The decrease was caused by ...
• Wheel Loader production in 2020 was realized at 6,681,233 tonnes, an increase of 1,874,276 tonnes or 38.99% compared to 2019 of 4,806,957 tonnes. The increase was caused by ...
• Luffing Crane production in 2020 was recorded at 20,677 tonnes, an increase of 16,979 tonnes or 459.14% compared to 2019 of 3,698 tonnes. The increase was caused by ...
• Side Loader production in 2020 was recorded at 60,857 boxes, down 21,742 boxes or 26.32% compared to 2020 of 82,599 boxes. The decrease was caused by ...
• Excavator production in 2020 was recorded at 411,368 tonnes, an increase of 90,067 tons or 28.03% compared to 2019 of 321,301 tonnes. The increase was caused by ...
• Automatic Stacking Crane production in 2020 was recorded at 768,529 boxes, a decrease of 138,661 boxes or 15.28% compared to 2019 of 907,190 boxes. The decrease was caused by ...

Produksi Alat Angkut Diusahakan

- Produksi *Conveyor* di tahun 2020 terealisasi sebesar 2.787.182 ton, turun 94.920 ton atau 3,29% dibandingkan tahun 2019 sebesar 2.882.102 ton. Penurunan tersebut disebabkan oleh...
• Produksi *Straddle Carrier* di tahun 2020 terealisasi sebesar 240.176 box, turun 28.092 box atau 10,47% dibandingkan tahun 2019 sebesar 268.268 box. Penurunan tersebut disebabkan oleh...

Transportation Equipment Rental Production

- Conveyor production in 2020 was realized at 2,787,182 tonnes, a decrease of 94,920 tonnes or 3.29% compared to 2019 of 2,882,102 tonnes. The decrease was caused by ...
• Straddle Carrier production in 2020 was realized at 240,176 boxes, a decrease of 28,092 boxes or 10.47% compared to 2019 of 268,268 boxes. The decrease was caused by ...



Produksi Alat Bantu B/M Diusahakan

- Produksi Timbangan di tahun 2020 terealisasi sebesar 11.617.103 ton, naik 4.560.514 ton atau 64,63% dibandingkan tahun 2019 sebesar 7.056.589 ton. Peningkatan tersebut disebabkan oleh...
- Produksi Grab di tahun 2020 terealisasi sebesar 10.640.330 ton, naik 2.275.548 ton atau 27,20% dibandingkan tahun 2019 sebesar 8.364.782 ton. Peningkatan tersebut disebabkan oleh...
- Produksi Hopper di tahun 2020 terealisasi sebesar 11.015.798 ton, naik 2.579.403 ton atau 30,57% dibandingkan tahun 2019 sebesar 8.436.395 ton. Peningkatan tersebut disebabkan oleh...
- Produksi Pemadam Kebakaran di tahun 2020 terealisasi sebesar 5.541 MEI, turun 2.329 MEI atau 29,59% dibandingkan tahun 2019 sebesar 7.870 MEI. Penurunan tersebut disebabkan oleh...
- Produksi Bucket di tahun 2020 terealisasi sebesar 1.043.202 ton, naik 533.859 ton atau 104,81% dibandingkan tahun 2019 sebesar 509.343 ton. Peningkatan tersebut disebabkan oleh...
- Produksi Ramp Door di tahun 2020 terealisasi sebesar 508.006 ton, turun 153.009 ton atau 23,15% dibandingkan tahun 2019 sebesar 661.015 ton. Penurunan tersebut disebabkan oleh...
- Produksi Spreader di tahun 2020 terealisasi sebesar 558.131 box, turun 24.591 box atau 4,22% dibandingkan tahun 2019 sebesar 582.722 box. Penurunan tersebut disebabkan oleh...

Loading and Unloading (B/M) Equipment Rental Production

- Scales production in 2020 was realized at 11,617,103 tonnes, an increase of 4,560,514 tonnes or 64.63% compared to 2019 of 7,056,589 tonnes. The increase was caused by ...
- Grab production in 2020 was realized at 10,640,330 tonnes, an increase of 2,275,548 tonnes or 27.20% compared to 2019 of 8,364,782 tonnes. The increase was caused by ...
- Hopper production in 2020 was realized at 11,015,798 tonnes, an increase of 2,579,403 tonnes or 30.57% compared to 2019 of 8,436,395 tonnes. The increase was caused by ...
- Fire Extinguisher production in 2020 was realized by 5,541 MEI, a decrease of 2,329 MEI or 29.59% compared to 2019 amounted to 7,870 MEI. The decrease was caused by ...
- Bucket production in 2020 was realized at 1,043,202 tonnes, an increase of 533,859 tonnes or 104.81% compared to 2019 of 509,343 tonnes. The increase was caused by ...
- Ramp Door production in 2020 was realized at 508,006 tonnes, a decrease of 153,009 tonnes or 23.15% compared to 2019 amounted to 661,015 tonnes. The decrease was caused by ...
- Spreader production in 2020 was realized by 558,131 boxes, a decrease of 24,591 boxes or 4.22% compared to 2019 of 582,722 boxes. The decrease was caused by ...



Produksi Pengusahaan Properti

Property Business Production

**Produksi Pengusahaan Properti Tahun 2019-2020 /
Property Business Production in 2019-2020**

Uraian / Description	Satuan / Unit	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
				Nominal / Nominal	%
Pengusahaan Lahan / Land Concession					
Sewa / Rental	M ²	9.782.042	9.894.169	(112.127)	-1,13%
Kontribusi / Contribution	Ton / Tonnes	3.474.643	2.256.969	1.217.674	53,95%
	unit	84	23	61	265,22%
Pengusahaan Perairan / Aquatic Concession	M ²	381.858	381.858	-	0,00%
Pengusahaan Bangunan / Building Concession	M ²	72.828	191.576	(118.748)	-61,98%
	M ³	-	2.000	(2.000)	-100,00%
Konsolidasi dan Distribusi Barang / Consolidation and Goods Distribution	Paket / Package	275.537	469.724	(194.187)	-41,34%

- Produksi Sewa Pengusahaan Properti di tahun 2020 terealisasi sebesar 9.782.042 M², turun 112.127 M² atau 1,13% dibandingkan tahun 2019 sebesar 9.894.169 M². Penurunan tersebut disebabkan oleh...
- Produksi Kontribusi Pengusahaan Properti di tahun 2020 dalam satuan unit ton terealisasi sebesar 3.474.643 ton, naik 1.217.674 ton atau 53,95% dibandingkan tahun 2019 sebesar 2.256.969 ton. Sedangkan produksi dalam satuan unit di tahun 2020 tercatat sebesar 84 unit, naik 61 unit atau 265,22% dibandingkan tahun 2019 sebesar 23 unit. Peningkatan tersebut disebabkan oleh...
- Produksi Pengusahaan Perairan di tahun 2019 dan 2020 terealisasi sebesar 381.858 M².
- Produksi Pengusahaan Bangunan di tahun 2020 dalam satuan M² terealisasi sebesar 72.828 M², turun 118.748 M² atau 61,98% dibandingkan tahun 2019 sebesar 191.576 M². Sedangkan produksi dalam satuan M³ di tahun 2020 tercatat nihil, turun 100% dibandingkan tahun 2019 sebesar 2.000 M³. Penurunan tersebut disebabkan oleh...
- Produksi Konsolidasi dan Distribusi Barang Pengusahaan Properti di tahun 2020 terealisasi sebesar 275.537 paket, turun 194.187 paket atau 41,34% dibandingkan tahun 2019 sebesar 469.724 paket. Penurunan tersebut disebabkan oleh...

- The realized Rental Property Business production in 2020 amounted to 9,782,042 M², a decrease of 112,127 M² or 1.13% compared to 2019 amounting to 9,894,169 M². The decrease was caused by ...
- The realized Property Business Contribution production in 2020 in tonnes was 3,474,643 tonnes, an increase of 1,217,674 tonnes or 53.95% compared to 2019 of 2,256,969 tonnes. Meanwhile, the production in unit in 2020 was recorded at 84 units, an increase of 61 units or 265.22% compared to 2019 of 23 units. The increase was caused by ...
- The realized Aquatic Concession production in 2019 and 2020 was 381,858 M².
- The realized Building Concession production in 2020 in M² units amounted to 72,828 M², a decrease of 118,748 M² or 61.98% compared to 2019 amounted to 191,576 M². Meanwhile, production in M³ unit in 2020 was recorded at zero, down by 100% compared to 2019 of 2,000 M³. The decrease was caused by ...
- The realized Consolidation and Goods Distribution for Property Business in 2020 amounted to 275,537 packages, a decrease of 194,187 packages or 41.34% compared to 2019 which amounted to 469,724 packages. The decrease was caused by ...

**Produksi Pengusahaan Air dan Listrik****Clean Water and Electricity Business****Produksi Pengusahaan Air dan Listrik Tahun 2019-2020 /
Clean Water and Electricity Business in 2019-2020**

Uraian / Description	Satuan / Unit	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
				Nominal / Nominal	%
Pengusahaan Air / Clean Water Business	Ton / Tonnes	1.463.591	1.707.765	(244.174)	-14,30%
Pengusahaan Listrik / Electricity Business	KWh	22.874.828	60.966.648	(38.091.820)	-62,48%

- Produksi Pengusahaan Air di tahun 2020 terealisasi sebesar 1.463.591 ton, turun 244.174 ton atau 14,30% dibandingkan tahun 2019 sebesar 1.707.765 ton. Penurunan tersebut disebabkan oleh...
- Produksi Pengusahaan Listrik di tahun 2020 terealisasi sebesar 22.874.828 KWh, turun 38.091.820 KWh atau 62,48% dibandingkan tahun 2019 sebesar 60.966.648 KWh. Penurunan tersebut disebabkan oleh...
- Water Business production in 2020 amounted to 1,463,591 tonnes, a decrease of 244,174 tonnes or 14.30% compared to 2019 of 1,707,765 tonnes. The decrease was caused by ...
- Electricity Business production in 2020 was realized at 22,874,828 KWh, a decrease of 38,091,820 KWh or 62.48% compared to 2019 of 60,966,648 KWh. The decrease was caused by ...

Produksi Pelayanan Rupa-rupa Usaha**Miscellaneous Service Production****Produksi Pengusahaan Rupa-rupa Usaha Tahun 2019-2020 /
Miscellaneous Service Production in 2019-2020**

Uraian / Description	Satuan / Unit	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
				Nominal / Nominal	%
Pas Terminal Penumpang / Passenger Terminal Pass	Lembar / Sheet	854.448	1.957.085	(1.102.637)	-56,34%
Pas Pelabuhan (Orang) / Port Entry Pass (Person)	Lembar / Sheet	660.559	1.920.734	(1.260.175)	-65,61%
Pas Pelabuhan (Kendaraan) / Port Entry Pass (Vehicle)	Lembar / Sheet	4.206.193	6.707.825	(2.501.632)	-37,29%
Produksi Kerjasama / Cooperation Production					
Kerjasama Alat / Equipment Cooperation	Ton / Tonnes	2.526.739	3.443.987	(917.248)	-26,63%
Kerjasama Pelabuhan / Port Cooperation	Ton / Tonnes	4.765.561	2.745.049	2.020.512	73,61%
Kerjasama Jasa Air Kapal / Water Service For Ships Cooperation	Ton / Tonnes	147	8	139	1737,50%
Kerjasama Bunker BBM / Fuel Bunker Cooperation	Ton.Liter / Tonnes.Liter	52.820.253	28.033.984	24.786.269	88,42%



- Produksi Pas Terminal Penumpang di tahun 2020 terealisasi sebesar 854.448 lembar, turun 1.102.637 lembar atau 56,34% dibandingkan tahun 2019 sebesar 1.957.085 lembar. Penurunan tersebut disebabkan oleh....
- Produksi Pas Pelabuhan (Orang) di tahun 2020 terealisasi sebesar 660.559 lembar, turun 1.260.175 lembar atau 65,61% dibandingkan tahun 2019 sebesar 1.920.734 lembar. Penurunan tersebut disebabkan oleh...
- Produksi Pas Pelabuhan (Kendaraan) di tahun 2020 terealisasi sebesar 4.206.193 lembar, turun 2.501.632 lembar atau 37,29% dibandingkan tahun 2019 sebesar 6.707.825 lembar. Penurunan tersebut disebabkan oleh...
- Produksi Kerjasama Alat di tahun 2020 terealisasi sebesar 2.526.739 ton, turun 917.248 ton atau 26,63% dibandingkan tahun 2019 sebesar 3.443.987 ton. Penurunan tersebut disebabkan oleh...
- Produksi Kerjasama Pelabuhan di tahun 2020 terealisasi sebesar 4.765.561 ton, naik 2.020.512 ton atau 73,61% dibandingkan tahun 2019 sebesar 2.745.049 ton. Peningkatan tersebut disebabkan oleh...
- Produksi Kerjasama Jasa Air Kapal di tahun 2020 terealisasi sebesar 147 ton, naik 139 ton atau 1737,50% dibandingkan tahun 2019 sebesar 8 ton. Peningkatan tersebut disebabkan oleh...
- Produksi Kerjasama Bunker BBM di tahun 2020 terealisasi sebesar 52.820.253 Ton.Liter, naik 24.786.269 Ton.Liter atau 88,42% dibandingkan tahun 2019 sebesar 28.033.984 Ton.Liter. Peningkatan tersebut disebabkan oleh...
- Passenger Terminal Pass production in 2020 was realized by 854,448 sheets, a decrease of 1,102,637 sheets or 56.34% compared to 2019 which amounted to 1,957,085 sheets. The decrease was caused by ...
- Port Entry Pass (Person) production in 2020 amounted to 660,559 sheets, decreased by 1,260,175 sheets or 65.61% compared to 2019 which amounted to 1,920,734 sheets. The decrease was caused by ...
- Port Entry Pass (Vehicle) production in 2020 was realized by 4,206,193 sheets, decreased by 2,501,632 sheets or 37.29% compared to 2019 which amounted to 6,707,825 sheets. The decrease was caused by ...
- Equipment Cooperation production in 2020 was realized at 2,526,739 tonnes, a decrease of 917,248 tonnes or 26.63% compared to 2019 of 3,443,987 tonnes. The decrease was caused by ...
- Port Cooperation production in 2020 amounted to 4,765,561 tonnes, an increase of 2,020,512 tonnes or 73.61% compared to 2019 which amounted to 2,745,049 tonnes. The increase was caused by ...
- Water Service For Ships Cooperation production in 2020 was realized at 147 tonnes, an increase of 139 tonnes or 1737.50% compared to 2019 of 8 tonnes. The increase was caused by ...
- BBM Bunker Cooperation production in 2020 was realized at 52,820,253 Tonnes.Liter, an increase of 24,786,269 Tonnes.Liter, or 88.42% compared to 2019, which amounted to 28,033,984 Tonnes.Liter. The increase was caused by ...

Produksi Pelayanan Forwarding

Forwarding Service Production

Produksi Pelayanan Forwarding Tahun 2019-2020 /
Forwarding Service Production in 2019-2020

Uraian / Description	Satuan / Unit	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
				Nominal / Nominal	%
Trucking	Box	286.123	347.398	(61.275)	-17,64%



Produksi *Trucking Pelayanan Forwarding* di tahun 2020 terealisasi sebesar 286.123 box, turun 61.275 box atau 17,64% dibandingkan tahun 2019 sebesar 347.398 box. Penurunan tersebut disebabkan oleh...

Trucking Forwarding Service production in 2020 was realized by 286,123 boxes, a decrease of 61,275 boxes or 17.64% compared to 2019 of 347,398 boxes. The decrease was caused by ...

Produksi Pelayanan Terminal UKS

UKS Terminal Service Production

**Produksi Pelayanan Terminal UKS Tahun 2019-2020 /
UKS Terminal Service Production in 2019-2020**

Uraian / Description	Satuan / Unit	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
		Nominal / Nominal	%		
Pemanduan / Pilotage	Kpl.Grk / Ship.Movement	22.579	21.066	1.513	7,18%
	GT.Kpl.Grk / GT.Ship. Movement	138.014.721	146.688.075	(8.673.354)	-5,91%
Penundaan / Tugboat	Kpl.Jam / Ship.Hour	48.967	45.606	3.361	7,37%
	GT.Kpl.Jam / GT.Ship.Hour	340.627.587	368.979.789	(28.352.202)	-7,68%
Penambatan / Berthing	GT.Etm	5.874.513	6.020.022	(145.509)	-2,42%
Dermaga / Wharf	Ton / Tonnes	2.489.817	2.618.148	(128.331)	-4,90%
Kerjasama Pelayanan Bongkar Muat / Loading and Unloading Cooperation Service	Ton / Tonnes	3.006.682	3.372.834	(366.152)	-10,86%

- Produksi Pemanduan Pelayanan Terminal UKS dalam satuan Kpl.Grk di tahun 2020 terealisasi sebesar 22.579 Kpl.Grk, naik 1.513 Kpl.Grk atau 7,18% dibandingkan tahun 2019 sebesar 21.066 Kpl.Grk. Peningkatan tersebut disebabkan oleh.... Sedangkan realisasi produksi Pemanduan dalam satuan GT.Kpl. Grk di tahun 2020 tercatat sebesar 138.014.721 GT.Kpl.Grk, turun 8.673.354 GT.Kpl.Grk atau 5,91% dibandingkan tahun 2019 sebesar 146.688.075 GT.Kpl.Grk. Penurunan tersebut disebabkan oleh...
- Produksi Penundaan Pelayanan Terminal UKS dalam satuan Kpl.Jam di tahun 2020 terealisasi sebesar 48.967 Kpl.Jam, naik 3.361 Kpl.Jam atau 7,37% dibandingkan tahun 2019 sebesar 45.606 Kpl.Jam. Peningkatan tersebut disebabkan oleh... Sedangkan realisasi produksi Penundaan dalam satuan GT.Kpl. Jam di tahun 2020 tercatat sebesar 340.627.587 GT.Kpl.Jam, turun 28.352.202 GT.Kpl.Jam atau 7,68% dibandingkan tahun 2019 sebesar 368.979.789 GT.Kpl.Jam. Penurunan tersebut disebabkan oleh...
- The UKS Terminal Pilotage Service production in Ship. Movement unit in 2020 was realized at 22,579 Ship. Movement, an increase of 1,513 Ship.Movement or 7.18% compared to 2019 at 21,066 Ship.Movement. The increase was caused by The realization of Pilotage production in GT.Ship.Movement in 2020 was recorded at 138,014,721 GT.Ship.Movement, a decrease of 8,673,354 GT.Ship.Movement or 5.91% compared to 2019 at 146,688,075 GT.Ship. Movememt. The decrease was caused by ...
- The UKS Terminal Tugboat Service production in Ship.Hour in 2020 was realized at 48,967 Ship.Hour, an increase of 3,361 Ship.Hour or 7.37% compared to 2019 at 45,606 Ship.Hour. The increase was caused by ... The realization of Tugboat production in GT.Ship.Hour in 2020 was 340,627,587 GT.Ship. Hour, a decrease of 28,352,202 GT.Ship.Hour or 7.68% compared to 2019 at 368,979,789 GT.Ship.Hour. The decrease was caused by ...



- Produksi Penambatan Pelayanan Terminal UKS di tahun 2020 tercatat sebesar 5.874.513 GT.Etm, turun 145.509 GT.Etm atau 2,42% dibandingkan tahun 2019 sebesar 6.020.022 GT.Etm. Penurunan tersebut disebabkan oleh...
- Produksi Dermaga Pelayanan Terminal UKS di tahun 2020 tercatat sebesar 2.489.817 ton, turun 128.331 ton atau 4,90% dibandingkan tahun 2019 sebesar 2.618.148 ton. Penurunan tersebut disebabkan oleh...
- Produksi Kerjasama Pelayanan Bongkar Muat Pelayanan Terminal UKS di tahun 2020 tercatat sebesar 3.006.682 ton, turun 366.152 ton atau 10,86% dibandingkan tahun 2019 sebesar 3.372.834 ton. Penurunan tersebut disebabkan oleh...
- The UKS Terminal Berthing Service production in 2020 was recorded at 5,874,513 GT.Etm, a decrease of 145,509 GT.Etm or 2.42% compared to 2019 of 6,020,022 GT.Etm. The decrease was caused by ...
- The UKS Terminal Wharf Service production in 2020 was recorded at 2,489,817 tonnes, a decrease of 128,331 tonnes or 4.90% compared to 2019 of 2,618,148 tonnes. The decrease was caused by ...
- The UKS Terminal Loading and Unloading Cooperation Service production in 2020 was recorded at 3,006,682 tonnes, a decrease of 366,152 tonnes or 10.86% compared to 2019 of 3,372,834 tonnes. The decrease was caused by ...

PENDAPATAN BIDANG USAHA PENUNJANG TAHUN 2020

SUPPORTING BUSINESS LINES REVENUES IN 2020

**Pendapatan Bidang Usaha Penunjang Tahun 2019-2020 /
Supporting Business Lines Revenues in 2019-2020**

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Pendapatan Konsolidasi dan Distribusi Barang / Consolidation and Goods Distribution Revenue	114.955	116.357	(1.402)	-1,21%
Pendapatan Pelayanan Pelra / Pelra (People's Service) Revenue	8.841	8.810	30	0,34%
Pendapatan Pengusahaan Alat / Equipment Rental Revenue	123.495	115.447	8.049	6,97%
Pendapatan Pengusahaan Properti / Property Business Revenue	334.258	374.137	(39.880)	-10,66%
Pendapatan Pengusahaan Air dan Listrik / Clean Water and Electricity Business Revenue	171.818	89.239	82.580	92,54%
Pendapatan Rupa-rupa Usaha / Miscellaneous Revenue	238.356	172.588	65.768	38,11%
Pendapatan Pelayanan Forwarding / Forwarding Service Revenue	1.134	357	777	217,89%
Pendapatan Pelayanan Terminal UKS / UKS Terminal Service Revenue	26.067	276.411	(250.343)	-90,57%
Jumlah / Total	1.018.923	1.153.345	(134.422)	-11,65%

Di tahun 2020, Pendapatan Bidang Usaha Penunjang tercatat sebesar Rp1.018,92 miliar, turun Rp134,42 miliar atau 11,56% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1.153,35 miliar. Penurunan tersebut terutama berasal dari berkurangnya Pendapatan Pelayanan Terminal UKS, Pengusahaan Properti dan Konsolidasi dan Distribusi Barang. Berikut adalah uraian mengenai kinerja Pendapatan Bidang Usaha Penunjang di tahun 2020.

In 2020, Supporting Business Lines Revenues were recorded at Rp1,018.92 billion, decreased by Rp134.42 billion or 11.56% compared to 2019 which amounted to Rp1,153.35 billion. The decrease was mainly due to reduced revenue from UKS Terminal Service, Property Business and Consolidation and Goods Distribution. The following is a description of the performance of Supporting Business Lines Revenues in 2020.



- Pendapatan Konsolidasi dan Distribusi Barang di tahun 2020 tercatat sebesar Rp114,96 miliar, turun Rp1,40 miliar atau 1,21% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp116,36 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh...
- Pendapatan Pelayanan Pelra di tahun 2020 tercatat sebesar Rp8,84 miliar, naik Rp30 juta atau 0,34% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp8,81 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh...
- Pendapatan Pengusahaan Alat di tahun 2020 tercatat sebesar Rp123,50 miliar, naik Rp8,05 miliar atau 6,97% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp115,45 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh...
- Pendapatan Pengusahaan Properti di tahun 2020 tercatat sebesar Rp334,26 miliar, turun Rp39,88 miliar atau 10,66% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp374,14 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh...
- Pendapatan Pengusahaan Air dan Listrik di tahun 2020 tercatat sebesar Rp171,82 miliar, naik Rp82,58 miliar atau 92,54% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp89,24 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh...
- Pendapatan Rupa-rupa Usaha di tahun 2020 tercatat sebesar Rp238,36 miliar, naik Rp65,77 miliar atau 38,11% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp172,59 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh...
- Pendapatan Pelayanan *Forwarding* di tahun 2020 tercatat sebesar Rp1,13 miliar, naik Rp777 juta atau 217,89% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp357 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh...
- Pendapatan Pelayanan Terminal UKS di tahun 2020 tercatat sebesar Rp26,07 miliar, turun Rp250,34 miliar atau 90,57% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp276,41 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh...
- Consolidation and Goods Distribution Revenue in 2020 was recorded at Rp114.96 billion, decreased by Rp1.40 billion or 1.21% compared to 2019 amounted to Rp116.36 billion. The decrease was caused by ...
- Pelra Service Revenue in 2020 was recorded at Rp8.84 billion, an increase of Rp30 million or 0.34% compared to 2019 amounted to Rp8.81 billion. The increase was caused by ...
- Equipment Rental Revenue in 2020 was recorded at Rp123.50 billion, an increase of Rp8.05 billion or 6.97% compared to 2019 amounted to Rp115.45 billion. The increase was caused by ...
- Property Business Revenue in 2020 was recorded at Rp334.26 billion, decreased by Rp39.88 billion or 10.66% compared to 2019 amounted to Rp374.14 billion. The decrease was caused by ...
- Clean Water and Electricity Business Revenue in 2020 was recorded at Rp171.82 billion, an increase of Rp82.58 billion or 92.54% compared to 2019 which amounted to Rp89.24 billion. The increase was caused by ...
- Miscellaneous Business Revenue in 2020 was recorded at Rp238.36 billion, an increase of Rp65.77 billion or 38.11% compared to 2019 amounted to Rp172.59 billion. The increase was caused by ...
- Forwarding Service Revenue in 2020 was recorded at Rp1.13 billion, an increase of Rp777 million or 217.89% compared to 2019 which amounted to Rp357 million. The increase was caused by ...
- UKS Terminal Service Revenue in 2020 was recorded at Rp26.07 billion, a decrease of Rp250.34 billion or 90.57% compared to 2019 of Rp276.41 billion. The decrease was caused by ...



PERBANDINGAN PENDAPATAN PER SEGMENT

COMPARISON OF SEGMENT REVENUE

**Perbandingan Profitabilitas per Segmen Tahun 2019-2020 /
Comparison of Segment Profitability in 2019-2020**

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Pelayanan Kapal	1.021.814	1.102.407	(80.594)	-7,31%
Pelayanan Peti Kemas	5.544.077	5.551.202	(7.125)	-0,13%
Pelayanan Nonpeti Kemas	911.911	1.034.622	(122.710)	-11,86%
Bidang Usaha Penunjang	1.018.923	1.153.345	(134.422)	-11,65%
Jumlah	8.496.725	8.841.575	(344.850)	-3,90%

Kontribusi Pendapatan terbesar di tahun 2020 berasal dari Segmen Pelayanan Peti Kemas yang menghasilkan keuntungan sebesar Rp5.544,08 miliar atau 65,25% dari jumlah keseluruhan Pendapatan. Di tahun 2020, keuntungan seluruh segmen usaha mengalami penurunan yang disebabkan oleh...

The largest Revenue contribution in 2020 came from the Container Service Segment which generated a profit of Rp5,544.08 billion or 65.25% of the total Revenues. In 2020, profits from all business segments declined due to ...

KINERJA ENTITAS ANAK

Pelindo III memiliki 5 (lima) Anak Perusahaan yang bergerak di berbagai bidang. Kinerja Anak Perusahaan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA

Dengan berpegang pada nilai Perusahaan *Service Excellence*, PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) mengoperasikan Terminal di bagian barat Tanjung Perak dan menyediakan pelayanan terminal pelabuhan untuk kapal-kapal Internasional dan domestik. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1999 bekerja sama dengan P&O Dover, yang pada 2006 diakuisisi oleh Dubai Port World.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar perusahaan, maksud dan tujuan TPS ialah berusaha di bidang jasa terminal peti kemas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, TPS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

PERFORMANCE OF SUBSIDIARIES

Pelindo III has 5 (five) Subsidiaries engaged in various sectors. The Subsidiaries' performance in 2020 is as follows:

PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA

Holding onto the corporate value of Service Excellence, PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) operates the Terminal on west Tanjung Perak and provides port terminal services for international and domestic ships. This company was established in 1999, cooperating with P&O Dover, which was acquired by Dubai Port World in 2006.

According to Article 3 of the company's Articles of Association, the purpose and objective of TPS are to engage in the business of container terminal services. To achieve the purpose and objective above, TPS carries out the following business:



- a. Penyediaan dan pelaksanaan pengusahaan jasa pelayanan operasi kapal, operasi lapangan dan operasi gudang, serta penyediaan dan pengusahaan jasa tambat, dermaga, penumpukan peti kemas, dan air bagi kapal-kapal peti kemas yang bertambat di terminal peti kemas.
- b. Perencanaan dan pengembangan, pelaksanaan pengelolaan, pengusahaan dan pemasaran usaha jasa baru, rupa-rupa usaha (penyewaan gudang, pas, dan parkir), serta usaha jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan terminal peti kemas.
- c. Pelaksanaan penyediaan, pengoperasian, serta pemeliharaan fasilitas dan peralatan bongkar muat peti kemas.
- d. Perencanaan dan pengelolaan keuangan logistik untuk terminal peti kemas.
- e. Pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kegiatan terminal peti kemas.

Aktivitas Usaha PT TPS Tahun 2020

Pada tahun 2020, PT TPS berhasil menjalankan beberapa inovasi dalam bisnisnya antara lain *Gate Automation* serta pemberlakuan *Batch Number System* untuk truk sehingga mempercepat pelayanan. Komitmen PT TPS untuk memberikan pelayanan terbaik tercermin pula dengan adanya *Joint Inspection* antara Karantina Pelabuhan & Bea Cukai, adanya *upsizing* kapal TPI Service dari Wan Hai Lines serta adanya *New service CS-2* yang dioperasikan oleh konsorsium yang terdiri dari Wanhi Lines, CNC (Group CMA CGM) dan ONE dengan rata-rata Bongkar Muat mencapai 1.000 TEUs setiap sandar. TPS pun meraih beberapa penghargaan atas upaya yang dilakukan selama 2020 antara lain: penghargaan *K3 Zero Accident*, Kategori terbaik operator terminal berdasarkan kinerja pelayanan operasional bersama dan Terbaik Kedua Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Pelabuhan Tanjung Perak dari Otoritas Pelabuhan, serta Penghargaan *Gold Winner* dan *Bronze winner* ajang PRIA 2020. Dan dalam upaya penerapan GCG, PT TPS meraih Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)-ISO 37001:2016.

- a. Provision and services of ship operations, yard and warehouse operations, as well as the provision and services of mooring, docking, container stacking, and freshwater for container ships docking at the container terminal.
- b. Planning and development, management, enterprising and marketing new services, miscellaneous businesses (building and parking space rental), and other services related to container terminals.
- c. Provision, operations, and maintenance of facilities and equipment for container loading and unloading.
- d. Financial and logistics planning and management for container terminals.
- e. Education and training related to container terminal operations.

Business Activities of PT TPS in 2020

In 2020, PT TPS successfully created several innovations in its business, i.e. Gate Automation as well as the implementation of Batch Number System for trucks to expedite service. The commitment of PT TPS to provide the best service is also reflected on the Joint Inspection between Port Quarantine & Customs, the upsizing of TPI Service ships from Wan Hai Lines as well as the New CS-2 service which is operated by a consortium consisting of Wanhi Lines, CNC (CMA CGM Group) and ONE with average Loading and unloading capacity that reaches 1,000 TEUs per berth. TPS also won several awards for their efforts carried out during 2020, among others: OHS award on Zero Accident, best terminal operator category based on performance of joint operational services and Second Best Environmental Management Performance of Port of Tanjung Perak from the Port Authority, as well as Gold Winner Award and Bronze winner at PRIA event 2020. Furthermore, in term of GCG implementation, PT TPS received Anti-Bribery Management System Certificate (SMAP)-ISO 37001:2016.



Kinerja PT TPS Tahun 2020

Performance of PT TPS in 2020

Kinerja PT Terminal Petikemas Surabaya Tahun 2019 - 2020 / Performance of PT Terminal Petikemas Surabaya in 2019-2020

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Pendapatan Usaha / Revenues	2.369.984	2.382.154	(12.170)	-0,51%
Beban Usaha / Operating Expenses	1.372.211	1.143.875	228.336	19,96%
Laba Usaha / Operating Profit	997.773	1.238.280	(240.507)	-19,42%
Beban Pajak / Tax Expenses	238.657	318.011	(79.354)	-24,95%
Laba Bersih / Net Profit	778.229	938.623	(160.394)	-17,09%
Jumlah Aset / Total Assets	2.043.354	1.762.801	280.553	15,92%
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	425.237	285.417	139.820	48,99%
Jumlah Ekuitas / Total Equity	1.618.116	1.477.385	140.731	9,53%

Pada tahun 2020, PT TPS mencatatkan Pendapatan Usaha sebesar Rp2.369,98 miliar, naik Rp12,17 miliar atau 0,51% bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp2.382,15 miliar. Penurunan pada Pendapatan tersebut menyebabkan Laba Bersih PT TPS pada tahun 2020 menurun sebesar Rp160,39 miliar atau 17,09%, menjadi Rp778,23 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp938,62 miliar. Perubahan pada Laba Bersih terutama disebabkan oleh perubahan skema pembagian pendapatan. Sedangkan Jumlah Aset PT TPS tahun 2020 tercatat sebesar Rp2.043,35 miliar, Jumlah Liabilitas sebesar Rp425,24 miliar dan Jumlah Ekuitas sebesar Rp1.618,12 miliar.

In 2020, PT TPS recorded Revenues of Rp2,369.98 billion, an increase of Rp12.17 billion or 0.51% compared to 2019 amounted to Rp2,382.15 billion. This Revenues decrease caused PT TPS's Net Profit in 2020 to decrease by Rp160.39 billion, thus becoming Rp778.23 billion compared to 2019 amounted to Rp938.62 billion. The decrease in Net profit was attributed to changes in revenue sharing scheme. Meanwhile, Total Assets of PT TPS in 2020 was recorded at Rp2,043.35 billion, Total Liabilities at Rp425.24 billion, and Total Equity at Rp1,618.12 billion.

Dividen yang Diberikan

Provided Dividends

Dividen yang Diberikan PT Terminal Petikemas Surabaya Tahun 2019 - 2020 / Dividends Provided by PT Terminal Petikemas Surabaya in 2019-2020

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Laba Bersih / Net Profit	778.229	938.623	(160.394)	-17,09%
Dividen / Dividend	658.187	466.965	191.222	40,95%
Payout Ratio	84,58%	49,75%	34,83%	70,01%

Jumlah dividen yang diperoleh Pelindo III dari PT TPS pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp658,19 miliar atau 84,58% dari jumlah laba bersih PT TPS tahun 2020.

Total dividends obtained by Pelindo III from PT TPS in 2020 were recorded at Rp658.19 billion or 84.58% of total net profit of PT TPS in 2020. The payout ratio



Payout Ratio tersebut mengalami peningkatan sebesar 34,83% bila dibandingkan dengan tahun 2019. Hal tersebut merupakan kebijakan para pemegang saham untuk menetapkan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas pengelola sebesar 85%.

PT BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI) adalah salah satu Anak Perusahaan dari Pelindo III yang didirikan pada tanggal 9 Januari 2002. Fokus utama BJTI pada saat ini adalah menangani kegiatan jasa kepelabuhanan, khususnya pada kegiatan bongkar muat peti kemas domestik dan kegiatan penunjang lainnya yang berhubungan dengan jasa kepelabuhanan di Terminal Berlian Tanjung Perak Surabaya. Selain itu, BJTI juga melayani kapal batu bara di Kalimantan dan mengembangkan kawasan *Java Integrated Industrial and Port Estate* (JIJPE) di Gresik, Jawa Timur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar BJTI, maksud dan tujuan BJTI ialah:

- a. Pengembangan usaha dalam bidang pelayanan jasa terminal bongkar muat barang dan peti kemas serta kegiatan yang berhubungan dengan konsolidasi dan distribusi barang, untuk menunjang kelancaran arus barang di pelabuhan serta mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
- b. Pengembangan usaha dalam bidang pelayanan jasa pengoperasian dan pemeliharaan alat bongkar muat peti kemas dan pengembangan kegiatan terminal lainnya untuk menunjang kelancaran arus barang di pelabuhan serta mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BJTI dapat menyediakan fasilitas serta melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Jasa terminal bongkar muat barang (curah cair, curah kering, dan general cargo) dan peti kemas;
- b. Konsolidasi, distribusi, dan pengangkutan barang (*truckling*), serta transportasi multimoda;
- c. Jasa terminal kapal roll on-roll off (Ro-Ro);
- d. Jasa terminal bahan bakar minyak kapal dan suplai bahan bakar minyak kapal; dan
- e. Jasa terminal kapal ikan dan kegiatan pendukungnya.

increased by 34.83% compared to 2019. This reflected the shareholders' policy to determine the appropriation of attributable net profit to management entity of 85%.

PT BERLIAN JASA TERMINAL INDONESIA

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI) is one of Pelindo III Subsidiaries established on January 9, 2002. Currently, BJTI's main focus is handling port service activities, especially domestic container loading and unloading as well as other supporting activities related to port services at Terminal Berlian Tanjung Perak Surabaya. Moreover, BJTI serves coal ships in Kalimantan and develops the Java Integrated Industrial and Port Estate (JIJPE) in Gresik, East Java.

Based on Article 3 of BJTI's Articles of Association, BJTI's purpose and objectives are:

- a. Business development in terminal services for loading and unloading goods and container as well as activities related to goods consolidation and distribution to support the seamless goods flows at its ports and to gain profits to increase the company's value by implementing Limited Liabilities principles.
 - b. Business development in the operational and maintenance services of container loading unloading equipment as well as the development of other terminal activities to support goods flows at its port and to gain profits to increase the company's value.
- To achieve the purpose and objective above, BJTI can provide and carry out the following businesses:
- a. Loading-unloading terminal services for cargo (liquid bulk, dry bulk, and general cargo) as well as containers;
 - b. Consolidation, goods distribution and transporting (*truckling*), and multimodal transportation;
 - c. Roll-on-roll-off (Ro-Ro) ship terminal;
 - d. Ship fuel terminal and supply; and
 - e. Fishing ship terminal and supporting services.



Selain kegiatan usaha utama tersebut di atas BJTI dapat melakukan kegiatan usaha lain yang menunjang tercapainya tujuan Perusahaan antara lain:

- a. Penyediaan dan/atau pelayanan gudang-gudang dan lapangan penumpukan dan tempat penimbunan barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar-muat, serta peralatan pelabuhan;
- b. Penyediaan dan pengelolaan jasa konsultansi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan manajemen operasi terminal dan/atau kepelabuhanan;
- c. Pengusahaan dan penyelenggaraan depo peti kemas dan perbaikan, cleaning, fumigasi, serta pelayanan logistik;
- d. Jasa timbangan;
- e. Jasa kegiatan pemeliharaan dan perbaikan alat bongkar muat peti kemas; dan
- f. Usaha-usaha penunjang untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan.

Aktivitas Usaha PT BJTI Tahun 2020

Sebagai salah satu Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), PT Berlian Jasa Terminal Indonesia terus berinovasi dan bertransformasi untuk meningkatkan layanan jasa kepelabuhanan dan menangani kegiatan bongkar muat khususnya di Terminal Berlian Tanjung Perak Surabaya.

Salah satu transformasi yang dilakukan pada tahun 2020 yaitu dengan penerapan budaya perusahaan AKHLAK yang di adopsi dari budaya perusahaan BUMN dan diatur melalui Keputusan Direksi No. KEP.006-00/XII/BJTI-2020 tentang tata kelola penerapan budaya perusahaan di lingkungan PT Berlian Jasa Terminal Indonesia.

Selain penerapan budaya perusahaan yang baru, peningkatan kinerja dan perluasan area usaha juga dilakukan dengan penambahan dan pengoperasian pelayanan jasa bongkar muat petikemas domestik di Terminal Mirah Tanjung Perak dengan luasan lapangan penumpukan sebesar 97.844 M² yang dapat menambah kapasitas lapangan penumpukan sebesar 125.638 TEUs. Optimalisasi jasa penunjang kegiatan kepelabuhanan lainnya juga terus ditingkatkan melalui penambahan 140 reefer plug portable di Depo Unggul dari jumlah awal 340 plug sehingga saat ini jumlahnya menjadi 480 plug.

Besides the main activities stated above, BJTI can also carry out other business supporting the achievement of the company's objectives, namely:

- a. Provision and/or services of warehouses, stacking fields, tankers, port transportation, loading-unloading equipment, and port equipment;
- b. Provision and management of consolidation, education, and training related to terminal and/or port operation management;
- c. The business and operations of container depots and repair, cleaning, fumigation, and logistics service;
- d. Weighing services;
- e. Maintenance and repair for container loading unloading equipment; and
- f. Supporting businesses to achieve the company's goals and objectives.

Business Activities of PT BJTI in 2020

As a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), PT Berlian Jasa Terminal Indonesia continues to innovate and transform to improve port services and handle loading and unloading activities especially at Berlian Tanjung Perak Terminal, Surabaya.

One of the transformations made in 2020 was implementing corporate culture of AKHLAK adopted from the corporate culture of SOE and regulated through the Decree of Board of Directors No. KEP.006-00/XII/BJTI-2020 about the governance of the implementation of corporate culture in PT Berlian Jasa Terminal Indonesia environment.

In addition to implementing new corporate culture, performance improvement and business area expansion was also conducted by adding and operating domestic container loading and unloading services in Mirah Tanjung Perak Terminal with staking yard area of 97,844 M² which can increase storage capacity of 125,638 TEUs. Optimization of other port activities supporting services is also continuously improved through the addition of 140 reefer portable plugs at Flagship Depot from originally 340 plugs to 480 plugs.



Di tahun 2020 ini pula PT Berlian Jasa terminal Indonesia berhasil meraih sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berdasar SNI ISO 37001:2016 oleh PT British Standards Institution Group Indonesia (BSI Group Indonesia), penghargaan dari Kementerian Perhubungan sebagai operator terminal terbaik berdasarkan kinerja pelayanan operasional Pelabuhan Tanjung Perak pada peringatan Hari Perhubungan Nasional 2020 dan penghargaan zero accident award dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Kinerja PT BJTI Tahun 2020

In 2020, PT Berlian Jasa Terminal Indonesia also successfully achieved the Anti Bribery Management System certification (SMAP) based on SNI ISO 37001:2016 by PT British Standards Institution Group Indonesia (BSI Group Indonesia), an award from the Ministry of Transportation as the best terminal operator based on Tanjung Perak Port operational services performance in the celebration of National Transportation Day 2020 and zero accident award from the Ministry of Manpower of RI.

Performance of PT BJTI in 2020

**Kinerja PT Berlian Jasa Terminal Indonesia Tahun 2019 - 2020 /
Performance of PT Berlian Jasa Terminal Indonesia in 2019-2020**

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Pendapatan Usaha / Revenues	1.211.819	1.138.025	73.794	6,48%
Beban Usaha / Operating Expenses	965.250	900.823	64.427	7,15%
Laba Usaha / Operating Profit	246.568	237.202	9.366	3,95%
Beban Pajak / Tax Expenses	42.645	72.784	(30.139)	-41,41%
Laba Bersih / Net Profit	178.798	101.400	77.398	76,33%
Jumlah Aset / Total Assets	3.993.372	3.701.456	291.916	7,89%
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	1.642.375	1.434.941	207.434	14,46%
Jumlah Ekuitas / Total Equity	2.350.997	2.266.515	84.482	3,73%

Pada tahun 2020, PT BJTI mencatatkan Pendapatan Usaha sebesar Rp1.211,82 miliar, naik Rp73,79 miliar atau 6,48% bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp1.138,03 miliar. Peningkatan pada Pendapatan tersebut menyebabkan Laba Bersih PT BJTI pada tahun 2020 meningkat sebesar Rp77,40 miliar atau 76,33%, menjadi Rp178,80 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp101,40 miliar. Perubahan pada Laba Bersih sejalan dengan peningkatan produksi petikemas, serta adanya kontribusi realisasi capaian pendapatan Anak Perusahaan PT BJTI antara lain PT Berkah Industri Mesin Angkat (BIMA) dan PT Pelindo Properti Indonesia. Sedangkan Jumlah Aset PT BJTI tahun 2020 tercatat sebesar Rp3.993,37 miliar, Jumlah Liabilitas sebesar Rp1.642,38 miliar dan Jumlah Ekuitas sebesar Rp2.351,00 miliar.

In 2020, PT BJTI recorded Revenues of Rp1,211.82 billion, up Rp73.79 billion or 6.48% compared to 2019 of Rp1,138.03 billion. The increase in Revenues caused Net Profit of PT BJTI in 2020 to increase by Rp77.40 billion or 76.33% to Rp178.80 billion compared to 2019 that amounted to Rp101.40 billion. The increase in Net Profit was in line with the increase in container production, as well as contribution to the realization of revenue achievement of PT BJTI's subsidiaries, namely PT Berkah Industri Mesin Angkat (BIMA) and PT Pelindo Properti Indonesia. Meanwhile, Total Assets of PT BJTI in 2020 was recorded at Rp3,993.37 billion, Total Liabilities at Rp1,642.38 billion and Total Equity at Rp2,351.00 billion.



Dividen yang Diberikan

Provided Dividends

Dividen yang Diberikan PT Berlian Jasa Terminal Indonesia Tahun 2019 - 2020 / Dividends Provided by PT Berlian Jasa Terminal Indonesia in 2019-2020

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Laba Bersih / Net Profit	178.798	101.400	77.398	76,33%
Dividen / Dividend	34.164	35.719	(1.555)	-4,35%
Payout Ratio	19,11%	35,23%	-16,12%	-45,76%

Jumlah dividen yang diperoleh Pelindo III dari PT BJTI pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp34,16 miliar atau 19,11% dari jumlah laba bersih PT BJTI tahun 2020. *Payout Ratio* tersebut mengalami penurunan sebesar 16,12% bila dibandingkan dengan tahun 2019. Hal tersebut karena mempertimbangkan kebutuhan pendanaan untuk aktivitas operasional serta investasi PT BJTI dan entitas grupnya pada tahun 2021.

The dividends Pelindo III received from PT BJTI in 2020 were Rp34.16 billion or 19.11% from its net profit in 2020. Payout Ratio decreased by 16.12% compared to 2019, considering funding needs for operational and investing activities of PT BJTI and its group entities in 2021.

PT PELINDO MARINE SERVICE

Dengan jenis produk jasa yang beragam, PT Pelindo Marine Service (PMS) merupakan salah satu penyedia jasa perkapalan terbaik. Mulai 2016, PMS melalui culu perusahaan PT Pelindo Energi Logistik yang berbasis di Bali, juga menyediakan layanan distribusi gas dan minyak, terutama ke wilayah Indonesia bagian timur.

PT PELINDO MARINE SERVICE

With various types of service products, PT Pelindo Marine Service (PMS) is one of the best ship service provider. Since 2016, through its Bali-based subsidiary PT Pelindo Energi Logistik, PMS provides oil and gas distribution services, especially to the eastern parts of Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar PMS, maksud dan tujuan PMS adalah melakukan usaha di bidang pelayanan jasa perkapalan terhadap para pengguna jasa kemaritiman, baik nasional maupun internasional, dengan memberikan pelayanan prima yang mengedepankan prinsip-prinsip GCG dan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Based on Article 3 of PMS's Articles of Association, PMS's purpose and objectives are to carry out the business of ship services for maritime service users, both national and international, by providing excellent services and prioritising GCG principles and applying Limited Liabilities principles.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PMS dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

To achieve the purpose and objectives above, PMS can carry out main businesses as follows:

- Jasa angkutan di perairan;
- Penyediaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa pemanduan dan/atau jasa penundaan kapal;
- Penyediaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa mendorong dan/atau menarik kapal;

- Water transportation services;
- Facility provision and/or services of ship pilotage and/or tugging;
- Facility provision and/or services of ship tugging and/or towing;



- d. Penyediaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa berbagai jenis kapal dan tongkang untuk kegiatan spesifik;
- e. Penyediaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa galangan untuk pemeliharaan dan/atau perbaikan kapal;
- f. Penyediaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa pemenuhan kebutuhan logistik kapal dan/atau kru kapal; dan
- g. Penyediaan kru kapal; dan
- h. Penyediaan fasilitas dan/atau pelayanan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengoperasian kapal.

Selain kegiatan utama tersebut di atas, PMS dapat melakukan kegiatan usaha lain yang menunjang tercapainya tujuan PMS, antara lain:

- a. Penyediaan pengelolaan jasa konsultasi, surveyor, serta pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan manajemen operasi perkapalan;
- b. Penyediaan peralatan dan/atau perawatan peralatan di bidang perkapalan; dan
- c. Jasa penyelamatan dan penyelaman (*salvage*).

Aktivitas Usaha PT PMS Tahun 2020

Pada tahun 2020, PT PMS dan entitas grupnya telah menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. PT PMS telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Johor Port Berhad dan mendapatkan kepercayaan untuk memberikan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di Selat Malaka, Selat Phillip, dan Selat Singapura. Selain itu, PT PMS bersama dengan entitas Anak Perusahaan PT Pelindo Energi Logistik (PEL) – juga melakukan perjanjian layanan keagenan kapal, serta kerja sama pengangkutan dan penyaluran Fatty Acid Methyl Ester (FAME) bekerja sama dengan PT Pertamina Trans Kontinental dan PT USDA. Anak Perusahaan PT PMS yang bergerak dalam bidang multimoda - PT Berkah Multi Cargo - menyepakati Nota Kesepahaman dengan PT Multi Terminal Indonesia terkait sinergi sumber daya dan kerja sama di wilayah kerja Pelindo III dan IPC. PT PEL sepanjang 2020 telah berhasil melaksanakan 82 pengapalan LNG dan 19 layanan midstream LNG untuk menjaga pasokan listrik ramah lingkungan di Bali melalui pemanfaatan LNG untuk PLTDG, dengan status *zero accident*. Anak Perusahaan PT PMS yang bergerak

- d. Facility provision and/or services of various ship types and barge for specific activities;
- e. Facility provision and/or services of shipyards for ship maintenance and/or repair;
- f. Facility provision and/or services of ship logistic supplies and/or ship crew;
- g. Provision or ship crew; and
- h. Other facility provision and/or services related to vessel management and operations.

Besides the main activities above, PMS can also carry out other businesses supporting the achievement of its objectives, namely:

- a. Provision and management of consulting services, surveyor, education and training related to vessel operation management;
- b. Provision and/or maintenance of ship-related equipment; and
- c. Rescue and submersion (salvage) services.

Business Activities of PT PMS in 2020

In 2020, PT PMS and its group entities carried out their business activities properly. PT PMS signed a Memorandum of Understanding with Johor Port Berhad and gained trust to provide vessel pilotage and towage in the Malacca Strait, Phillip Strait, and Singapore Strait. In addition, PT PMS together with other subsidiary, namely PT Pelindo Energi Logistik (PEL) – also entered into ship agency service agreements, as well as cooperation in the transportation and distribution of Fatty Acid Methyl Ester (FAME) in cooperation with PT Pertamina Trans Kontinental and PT USDA. Subsidiary of PT PMS which is engaged in multimodal sector - PT Berkah Multi Cargo - signed a Memorandum of Understanding with PT Multi Terminal Indonesia regarding resource synergy and cooperation in the working area of Pelindo III and IPC. Throughout 2020, PT PEL has successfully implemented 82 LNG shipments and 19 LNG midstream services to maintain an environmentally friendly electricity supply in Bali through the utilization of LNG for PLTDG, achieving zero accident result. Subsidiary of PT PMS engaged in the dredging sector, namely PT Alur Pelayaran Barat



di bidang pengeringan, yaitu PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) menerapkan teknik pengeringan baru Metode Suction Dredger di Terminal Petikemas Surabaya, berupa teknik pengeringan buang darat yang efisien dan ekonomis serta mendapatkan kepercayaan jenis pekerjaan baru, proyek pertama land preparation untuk anak usaha PT Petrokimia Gresik.

Dari segi kepatuhan hukum, PTPMS berhasil mendapatkan Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (*Document of Compliance*) atas International Safety Management Code dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, untuk PT Pelindo Marine Service sebagai operator kapal.

PT PMS berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan ISO 45001:2018 tentang Occupational Health and Safety Management System serta PT PEL berhasil mendapatkan Sertifikasi dari Lloyd Register untuk ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018, ISO 9001: 2015 atas Provision of STS (Ship to Ship), Storage, Regasification and Distribution of LNG. Selain sertifikasi bisnis, PT PMS juga mendapatkan beberapa penghargaan antara lain: *Top GRC Award 2020* oleh *Top Bussines* dan PT Madani Solusi Internasional untuk PT PMS sebagai Pemenang Kategori TOP GRC 2020 #4 Stars dan *The Most Committed GRC Leader 2020* serta penghargaan sebagai salah satu pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Terbaik di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Penghargaan diberikan pada Peringatan Hari Perhubungan Nasional 2020 atas kepatuhan Pelindo Marines dalam pengurusan perizinan dan pelaporan kinerja operasional, serta kooperatif dalam memenuhi arahan dalam menjalankan operasional fasharkan kapal.

Kinerja PT PMS Tahun 2020

Pada tahun 2020, PT PMS mencatatkan Pendapatan Usaha sebesar Rp1.530,38 miliar, turun Rp16,14 miliar atau 1,04% bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp1.546,52 miliar. Penurunan pada Pendapatan tersebut menyebabkan Laba Bersih PT PMS pada tahun 2020 menurun sebesar Rp6,53 miliar atau 2,35%, menjadi Rp271,19 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp277,72 miliar. Perubahan pada Laba Bersih terutama disebabkan oleh pendapatan yang lebih kecil

Surabaya (APBS), applied a new dredging technique of Suction Dredger Method at Surabaya Container Terminal, i.e. efficient and economical overland dredging techniques, and gained the trust of executing new type of work, namely land preparation project for a subsidiary of PT Petrokimia Gresik.

In view of legal compliance, PT PMS managed to obtain Safety Management Adjustment Document (*Document of Compliance*) on International Safety Management Code from the Director General of Sea Transportation, Ministry of Transportation, for PT Pelindo Marine Service as a ship operator.

PT PMS successfully obtained ISO 37001:2016 certification about Anti-Bribery Management System and ISO 45001:2018 on Occupational Health and Safety Management System and PT PEL succeeded in obtaining Certification from Lloyd Register for ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 9001:2015 on Provision of STS (Ship to Ship), Storage, Regasification and Distribution of LNG. In addition to business certification, PT PMS also received several awards, namely: Top GRC Award 2020 by Top Bussines and PT Madani Solusi Internasional for PT PMS as Winner of TOP GRC Category 2020 #4 Stars and The Most Committed GRC Leader 2020 as well as an award as one of the managers of The Best Terminal for Own Interest (TUKS) at Port of Tanjung Perak, Surabaya. The award was given on the Celebration of National Transportation Day 2020 for Pelindo Marines compliance in the handling of licensing and operational performance reporting, and for being cooperative in fulfilling directions in carrying out ship operations.

Performance of PT BJTI in 2020

In 2020, PT PMS achieved a Revenues of Rp1,530.38 billion, a decrease of Rp16.14 billion or 1.04% compared to 2019 amounted to Rp1,546.52 billion. This Revenues decrease caused PT PMS's Net Profit in 2020 to decrease by Rp6.53 billion or 2.35%, thus becoming Rp271.19 billion compared to 2019 amounted to Rp277.72 billion. Changes in Net Profit were mainly due to a decrease in revenues compared to last year due to Covid-19 pandemic. Meanwhile, the Total Assets of PT PMS in 2020 were



dibanding tahun lalu karena dampak dari pandemi Covid-19. Sedangkan Jumlah Aset PT PMS tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.845,67 miliar, Jumlah Liabilitas sebesar Rp823,09 miliar dan Jumlah Ekuitas sebesar Rp1.022,57 miliar.

Rp1,845.67 billion, Total Liabilities of Rp823.09 billion and Total Equity of Rp1,022.57 billion.

**Kinerja PT Pelindo Marine Service Tahun 2019 - 2020 /
Performance of PT Pelindo Marine Service in 2019-2020**

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Pendapatan Usaha / Revenues	1.530.383	1.546.521	(16.138)	-1,04%
Beban Usaha / Operating Expenses	1.181.505	1.183.121	(1.616)	-0,14%
Laba Usaha / Operating Profit	348.878	363.400	(14.522)	-4,00%
Beban Pajak / Tax Expenses	11.648	8.897	2.751	30,92%
Laba Bersih / Net Profit	271.187	277.715	(6.528)	-2,35%
Jumlah Aset / Total Assets	1.845.665	1.641.154	204.511	12,46%
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	823.094	739.225	83.869	11,35%
Jumlah Ekuitas / Total Equity	1.022.571	901.930	120.641	13,38%

Dividen yang Diberikan

Provided Dividends

**Dividen yang Diberikan PT Pelindo Marine Service Tahun 2019 - 2020 /
Dividends Provided by PT Pelindo Marine Service in 2019-2020**

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Laba Bersih / Net Profit	271.187	277.715	(6.528)	-2,35%
Dividen / Dividend	76.226	104.696	(28.470)	-27,19%
<i>Payout Ratio</i>	28,11%	37,70%	-9,59%	-25,44%

Jumlah dividen yang diperoleh Pelindo III dari PT PMS pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp76,23 miliar atau 28,11% dari jumlah laba bersih PT PMS tahun 2020. Jumlah *Payout Ratio* tersebut mengalami penurunan sebesar 9,59% bila dibandingkan dengan tahun 2019. Hal tersebut ditetapkan karena mempertimbangkan kebutuhan pendanaan operasi dan investasi PMS Grup untuk tahun 2021.

The dividends Pelindo III received from PT PMS in 2020 were Rp76.23 billion or 28.11% from its net profit in 2020. The Payout Ratio experienced a decrease of 9.59% compared to 2019, considering funding needs for operation and investment of PMS Group in 2021.



PT TERMINAL TELUK LAMONG

Multi-Purpose Terminal di Teluk Lamong dibangun dengan kade sedalam 13 LWS dan dilengkapi peralatan-peralatan canggih yang mendukung modernisasi dan otomatisasi pelayanan jasa kepelabuhanan. Terminal yang pada 2015 lalu diresmikan oleh Presiden Joko Widodo ini mengusung konsep *Go Green* dengan menggunakan bahan bakar gas dan meminimalkan emisi dari keseluruhan proses bisnisnya. Hal ini merupakan bentuk kontribusi Pelindo III Group terhadap keberlangsungan lingkungan hidup.

PT Terminal Teluk Lamong (TTL) telah menginisiasi modernisasi operasi kepelabuhanan dalam rangka mengurangi tingkat emisi dan mengefisiensikan biaya operasional melalui otomatisasi fasilitas pelabuhan yang diharapkan dapat mendatangkan manfaat baik bagi bisnis dan lingkungan.

TTL menggunakan teknologi informasi dalam sebagian besar proses bisnisnya, dimana pelayanan jasa di TTL menggunakan *online platform* sebagai medianya. Pengguna jasa pun dimudahkan dengan proses yang paperless, cepat, dan mudah. Metode ini sekaligus yang pertama kali diadakan di lingkungan maritim Indonesia.

Berdasarkan Akta Notaris Yatiningsih, S.H., M.H., No. 309 tanggal 30 Desember 2013 pasal 3, maksud dan tujuan TTL adalah melakukan usaha dalam bidang jasa usaha kepelabuhanan yang mengedepankan prinsip-prinsip GCG dan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, TTL dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Penyediaan dan/atau pelayanan kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas dan tempat-tempat berlabuhnya kapal;
- b. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (*pilotage*) dan penundaan kapal;
- c. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa-jasa pelaksanaan pengusahaan jasa-jasa operasi kapal (bongkar muat), operasi lapangan dan operasi gudang, serta penyediaan dan pengusahaan jasa tambat, dermaga, penumpukan peti kemas, barang curah, general cargo (termasuk hewan), dan

PT TERMINAL TELUK LAMONG

The Multipurpose Terminal in Teluk Lamong was built with a 13 LWS dock equipped with sophisticated tools to support the modernisation and automation of port services. Inaugurated by President Joko Widodo in 2015, the terminal embraces the concept of Go Green, using gas as fuel and minimising emission from the entire business process. This is Pelindo III Group's contribution to environmental sustainability.

PT Terminal Teluk Lamong (TTL) has initiated the modernisation of port operations for emission reduction and operational cost efficiency through port facility automation, which is expected to benefit the business and the environment.

TTL uses information technology in most of its business process, where its services use online platforms as a media. The service users are also facilitated with a paperless, quick, and easy process. This method is the first in the maritime sector in Indonesia.

Based on the Notarial Deed of Yatiningsih, S.H., M.H., No. 309 dated 30 December 2013 article 3, the purpose and objective of TTL are to engage in port businesses that prioritise GCG principles and apply Limited Liabilities principles. To achieve the purpose and objective above, TTL can carry out the following business activities:

- a. Provision and/or services of port pools and waters for ship traffic and berthing;
- b. Provision and/or services related to ship pilotage and tugging;
- c. Provision and/or services for ship operations (loading-unloading), field and warehouse operations, as well as the provision and services of mooring, docking, container stacking, bulk goods, general cargo (including animals), and vehicles (ro-ro), bulk and multipurpose goods, as well as passenger loading and unloading;



- kendaraan (ro-ro), barang curah dan *multipurpose*, serta fasilitas naik turunnya penumpang;
- d. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa peti kemas, barang curah, *multi-purpose*, penumpang, dan ro-ro;
 - e. Penyediaan dan/atau pelayanan gudang-gudang dan lapangan penumpukan dan tangki/tempat penimbunan barang-barang termasuk curah, angkutan bandar, alat bongkar-muat, peralatan pelabuhan, serta peralatan penunjang lainnya;
 - f. Penyediaan dan/atau pelayanan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan, industri, dan gedung-gedung/bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan multimoda;
 - g. Penyediaan dan/atau pelayanan utilitas pelabuhan termasuk tetapi tidak terbatas pada telekomunikasi, listrik, air minum/air kapal, instalasi limbah, serta pengelolaan sampah;
 - h. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa pengisian bahan bakar minyak (BBM) untuk kapal dan kendaraan di lingkungan Pelabuhan;
 - i. Penyediaan dan/atau pelayanan kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan serta pelayanan logistik;
 - j. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa konsultasi, pendidikan, dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhanan;
 - k. Pengusahaan dan penyelenggaraan depo peti kemas dan perbaikan, cleaning fumigasi;
 - l. Pengusahaan kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara;
 - m. Perencanaan dan pengembangan, pelaksanaan pengelolaan, pengusahaan dan pemasaran usaha jasa baru, rupa-rupa usaha (penyewaan gedung, pas, dan parkir), serta jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan terminal peti kemas, barang curah, dan *multi-purpose*;
 - n. Pelaksanaan penyediaan, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas dan peralatan bongkar muat peti kemas, barang curah, dan *multi-purpose*; dan
 - o. Perencanaan dan pengelolaan keuangan dan logistik untuk terminal peti kemas, barang curah, dan *multipurpose*.
 - d. Provision and/or services of containers, bulk goods, *multipurpose*, passengers, and ro-ro;
 - e. Provision and/or services of warehouses, stacking fields, and tanker including bulks, port transportation, loading-unloading equipment, port equipment, and other supporting equipment;
 - f. Land provision and/or services for many buildings and fields, industries, and buildings related to the seamless multimodal transportation;
 - g. Port utility provision and/or services including but not limited to telecommunication, electricity, drinking water/ship water, waste facility installation, and waste management.
 - h. Provision and/or services of fuel filling for ships and vehicles in the port areas;
 - i. Provision and/or services of goods consolidation and distribution including animal and logistics;
 - j. Provision and/or services of port-related consulting, education, and training;
 - k. The business and operations of container depots and repair as well as cleaning and fumigation;
 - l. The business of customs area and temporary stacking field;
 - m. Planning and development, management, enterprising and marketing new services, miscellaneous businesses (building and parking space rental), and other services related to container terminals, bulk goods, and *multipurpose*;
 - n. Provision, operations, and maintenance of facilities and equipment for container loading and unloading, bulk goods, and *multipurpose*; and
 - o. Financial and logistics planning and management for container terminals, bulk goods, and *multipurpose*.



Aktivitas Usaha PT TTL Tahun 2020

Pada tahun 2020, PT TTL meluncurkan layanan baru yakni Sistem Pelayanan Karantina Online untuk mempermudah pengguna jasa sekaligus mempercepat proses pelayanan kepelabuhan di Terminal Teluk Lamong. Evaluasi kinerja bersama dengan Asosiasi Pengguna Jasa juga kerap dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan pelayanan. Inovasi Integrasi LMS dan MTOS sehingga mempermudah layanan bagi pengguna jasa dalam 1 sistem serta Pembukaan 1 Ha area tunggu bagi armada truk curah kering membuat antrian dapat berjalan lebih tertib dan termonitor.

Tidak hanya itu, PT TTL juga meresmikan layanan *Extended CY Area*, fasilitas area tunggu petikemas sebelum kapal datang yang ada di dalam area terminal. Dalam hal pelayanan pelanggan, PT TTL juga meluncurkan Aplikasi FL@SH PT Terminal Teluk Lamong yang mempermudah pengguna jasa dalam berinteraksi dengan Terminal Teluk Lamong dan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan pelanggan.

Upaya pengembangan ini disambut baik oleh pengguna jasa dan selama tahun 2020, PT TTL berhasil meraih pencapaian kinerja antara lain: Pelayanan Perdana Pelayaran OOCL dimana Terminal Teluk Lamong menjadi pelabuhan pertama di Surabaya yang disinggahi oleh kapal CIP-OOCL. MV Ludwig Schulte, kapal rute Cina - Indonesia - Piliphine (CIP) sandar di Terminal Teluk Lamong untuk memperkuat rantai pelayaran dari Cina ke Asia Tenggara; Pelayanan Kapal dengan Draft Terdalam yaitu Kapal MV Julius Oldendorff dengan draft terdalam yakni sebesar -13 mLws. Kapal ini membawa muatan sebesar 60 ribu Ton dan dibongkar seluruhnya di Terminal Teluk Lamong; Pelayanan Kapal Curah Kering dengan Muatan Terbesar yaitu Pelayanan Kapal MV Great Glen yang merupakan kapal curah kering dengan panjang 229 meter asal Hongkong dengan Jumlah total muatan soybean meal (bungkil kedelai) yang dibongkar sebesar 71.582 ton. Total muatan kapal ini merupakan muatan terbesar yang pernah dibongkar di wilayah pelabuhan Tanjung Perak.

Selama tahun 2020, PT TTL meraih beberapa penghargaan yaitu penghargaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pelabuhan Tanjung Perak dari kantor otoritas pelabuhan utama Tanjung Perak, Best 1 on Compensation & Benefit,

Business Activities of PT TTL in 2020

In 2020, PT TTL launched a new service, namely the Online Quarantine Service System to facilitate service users while expediting port service process at Teluk Lamong Terminal. Performance evaluation together with the Service User Association is also often carried out as a form of commitment to improve services. The innovation of LMS and MTOS integration to facilitate service for service users in 1 system and the opening of 1 Ha waiting bay for dry bulk truck fleets resulted in more orderly and well-monitored queue.

Not only that, PT TTL also inaugurated the Extended CY Area service, a container waiting bay facility before the ship arrives in the terminal area. In terms of customer service, PT TTL also launched FL@SH Application of PT Terminal Teluk Lamong which makes it easier for service users to interact with Teluk Lamong Terminal and can accelerate the fulfillment of customer needs.

This development effort was welcomed by service users and during 2020, PT TTL managed to record several performance achievements, among others: Initial OOCL Shipping Service where Teluk Lamong Terminal became the first port in Surabaya to be visited by CIP-OOCL ships. MV Ludwig Schulte, a ship on the China - Indonesia - Philippines (CIP) route that docks at Teluk Lamong Terminal to strengthen the shipping chain from China to Southeast Asia; Ship Service with the deepest draft, namely the MV Julius Oldendorff Ship with the deepest draft of -13 mLws. This ship carries a cargo of 60 thousand tons and is completely unloaded at Teluk Lamong Terminal; Dry Bulk Ship Service with the Largest Load, namely MV Great Glen Ship Service, which is a dry bulk ship with a length of 229 meters from Hong Kong with a total cargo of soybean meal that was unloaded at 71,582 tons. The total cargo of this ship is the largest cargo ever unloaded in the Port of Tanjung Perak area.

During 2020, PT TTL won several awards, namely Environmental Management of Port of Tanjung Perak award from the Tanjung Perak main port authority, Best 1 on Compensation & Benefit, Best for Retention Strategy,



Best for Retention Strategy, dan Best for Training Freedom pada ajang *Human Capital Achievement Award 2020*, dan *Zero Accident* tingkat provinsi dan nasional.

Kinerja PT TTL Tahun 2020

and *Best for Training Freedom at the Human Capital Achievement Award 2020 event, and Zero Accident at the provincial and national levels.*

Performance of PT BJTI in 2020

**Kinerja PT Terminal Teluk Lamong Tahun 2019 - 2020 /
Performance of PT Terminal Teluk Lamong in 2019-2020**

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Pendapatan Usaha / Revenues	777.497	772.568	4.929	0,64%
Beban Usaha / Operating Expenses	580.458	493.064	87.394	17,72%
Laba Usaha / Operating Profit	197.040	279.504	(82.464)	-29,50%
Beban Pajak / Tax Expenses	43.971	71.241	(27.270)	-38,28%
Laba Bersih / Net Profit	155.808	218.641	(62.833)	-28,74%
Jumlah Aset / Total Assets	717.612	665.022	52.590	7,91%
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	196.633	191.385	5.248	2,74%
Jumlah Ekuitas / Total Equity	520.979	473.637	47.342	10,00%

Pada tahun 2020, PT TTL mencatatkan Pendapatan Usaha sebesar Rp777,50 miliar, naik Rp4,93 miliar atau 0,64% bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp772,57 miliar. Di tahun 2020, PT TTL membukukan peningkatan Beban Usaha sebesar Rp87,39 miliar atau 17,72% sehingga menyebabkan Laba Bersih PT TTL pada tahun 2020 menurun sebesar Rp62,83 miliar atau 28,74%, menjadi Rp155,81 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp218,64 miliar. Perubahan pada Laba Bersih terutama disebabkan oleh meningkatnya beban usaha utamanya pada perubahan skema *revenue sharing*. Sedangkan Jumlah Aset PT TTL tahun 2020 tercatat sebesar Rp717,61 miliar, Jumlah Liabilitas sebesar Rp196,63 miliar dan Jumlah Ekuitas sebesar Rp520,98 miliar.

In 2020, PT TTL recorded Revenues of Rp777.50 billion, an increase of Rp4.93 billion or 0.64% compared to 2019 of Rp772.57 billion. In 2020, PT TTL posted an increase in Operating Expenses by Rp87.39 billion or 17.72%, causing PT TTL's Net Profit in 2020 to decrease by Rp62.83 billion or 28.74% to Rp155.81 billion compared to the previous year of 2019 that amounted to Rp218.64 billion. The decrease in Net Profit was mainly due to the increase in operating expenses, mainly due to changes in the revenue sharing scheme. While the Total Assets of PT TTL in 2020 was recorded at Rp717.61 billion, Total Liabilities at Rp196.63 billion and Total Equity at Rp520.98 billion.

Dividen yang Diberikan

Provided Dividends

**Dividen yang Diberikan PT Terminal Teluk Lamong Tahun 2019 - 2020 /
Dividends Provided by PT Terminal Teluk Lamong in 2019-2020**

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Laba Bersih / Net Profit	155.808	218.641	(62.833)	-28,74%
Dividen / Dividend	108.383	86.981	21.402	24,61%
<i>Payout Ratio</i>	69,56%	39,78%	29,78%	74,86%



Jumlah dividen yang diperoleh Pelindo III dari PT TTL pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp108,38 miliar atau 69,56% dari jumlah laba bersih PT TTL tahun 2020. *Payout Ratio* tersebut mengalami peningkatan sebesar 29,78% bila dibandingkan dengan tahun 2019. Hal tersebut merupakan kebijakan para pemegang saham untuk menetapkan penggunaan Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas pengelola sebesar 70,00%.

PT PELINDO JAYA SEJAHTERA

PT Pelindo Daya Sejahtera (PDS) merupakan Anak Perusahaan yang menaungi tenaga kerja alih daya di lingkungan Perusahaan. PDS didirikan atas dasar komitmen Perusahaan untuk menjamin kesejahteraan pegawainya baik organik maupun alih daya. Melalui PDS, Pelindo III Group berkomitmen untuk menjamin kesejahteraan tenaga kerja alih daya di lingkungan Pelindo III Group.

Fokus utama PDS adalah memberikan layanan kepada industri kepelabuhanan dan industri pelayaran. Secara bertahap, cakupan dan jenis layanan dikembangkan ke Perusahaan atau institusi bisnis lain. PDS aktif mengadakan pelatihan dan pengembangan dan saat ini telah mendirikan anak perusahaan yang khusus menyediakan tenaga kerja *tally* di Semarang dengan nama PT Tanjung Emas Daya Sejahtera.

Saat ini, PDS tidak hanya menyediakan tenaga alih daya yang menangani kegiatan industri kepelabuhanan tetapi juga *noncore* yang meliputi tetapi tidak terbatas pada *tally*, sekretaris, tenaga keamanan, tenaga kebersihan, operator alat hingga ke *entry data services*. Sebagai penyedia tenaga alih daya, PDS aktif mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM PDS sehingga dapat mendukung kinerja Perusahaan secara keseluruhan.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, PDS bergerak dalam jasa penyediaan tenaga kerja. Untuk mencapai hal tersebut Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang jasa kebersihan;
- b. Menjalankan usaha dalam bidang jasa ekspedisi, pengepakan, dan pergudangan;
- c. Menjalankan usaha dalam bidang jasa keamanan;

The dividends Pelindo III received from PT TTL in 2020 were Rp108.38 billion or 69.56% from net profit of PT TTL in 2020. The Payout Ratio experienced an increase of 29.78% compared to 2019. This reflected shareholders' policy of determining the appropriation of Net Profit attributable to management entity of 70.00%.

PT PELINDO JAYA SEJAHTERA

PT Pelindo Daya Sejahtera (PDS) is a Subsidiary providing outsourced employees in the Company's environment. PDS is established through the Company's commitment to guaranteeing the well being of its employees, both organic and outsourcing. Through PDS, Pelindo III Group is committed to guaranteeing the well-being of outsourced employees in the environment of Pelindo III Group.

PDS's main focus is to provide service for the port and shipping industries. The service scope and types are gradually developed for the Company or other business institutions. PDS actively conduct training and development, and currently, it has established a subsidiary specifically providing tally employees in Semarang under the name of PT Tanjung Emas Daya Sejahtera.

Currently, PDS provides outsourced employees handling not only port industry activities but also non-core activities, including but not limited to tallying, secretary, security, cleaning service, equipment operator, and entry data services. As a provider for outsourced employees, PDS actively carries out training to increase its HR competence and abilities to support the entire performance of the Company.

Based on Article 3 of the Articles of Association, PDS engages in employee provision. To achieve that, the Company carries out the following business activities:

- a. Carrying out cleaning service business;
- b. Carrying out business in expeditions, packing, and warehousing services;
- c. Carrying out business in security services;



- d. Menjalankan usaha dalam bidang jasa penerimaan dan penyaluran tenaga kerja;
 - e. Menjalankan usaha dalam bidang jasa penjahitan pakaian;
 - f. Menjalankan usaha dalam bidang jasa fotokopi;
 - g. Menjalankan usaha dalam bidang jasa penjualan tiket dan tur;
 - h. Menjalankan usaha dalam bidang jasa penyewaan kendaraan roda empat; and
 - i. Menjalankan jasa pendidikan dan pelatihan.
- d. Carrying out business in employee admission and distribution services;
 - e. Carrying out business in clothes tailoring services;
 - f. Carrying out business in photocopy services;
 - g. Carrying out business in ticketing and tour services;
 - h. Carrying out business in four-wheel vehicle rent; and
 - i. Carrying out education and training services.

Aktivitas Usaha PT PDS Tahun 2020

Pada tahun 2020, PT PDS telah berhasil menjalankan kegiatan usahanya dengan baik, antara lain kontrak kerjasama pengadaan tenaga pengamanan di Terminal Nilam Utara dan POP! Hotel Banjarmasin serta penyediaan tenaga alih daya di Bank Kalimantan Selatan. Selama tahun 2020, PT PDS juga menerima beberapa penghargaan Zero Accident Award dari Disnakertrans Jawa Timur dan perhargaan CSR dari Pemkot Surabaya; dan berhasil mendapatkan sertifikasi SMK3 dari Kemenakertrans, ISO 37001:2016 tentang Manajemen Anti Penyuapan, dan ISO 9001:2015 tentang Manajemen Mutu. Untuk mengembangkan kompetensi tenaga kerja-nya, PDS melaksanakan beberapa pelatihan seperti *Excellent Service Training* dan *refreshment training* untuk *cleaning service* dan sertifikasi BNSP.

Business Activities of PT PDS in 2020

In 2020, PT PDS succeeded in carrying out its business activities well, i.e. the cooperation contract for the procurement of security personnel at North Nilam Terminal and POP! Hotel Banjarmasin and the provision of outsourcing at Bank Kalimantan Selatan. During 2020, PT PDS also received several Zero Accident Awards from the East Java Manpower and Transmigration Office and CSR awards from the Surabaya City Government; and succeeded in obtaining SMK3 certification from the Ministry of Manpower and Transmigration, ISO 37001:2016 on Anti-Bribery Management, and ISO 9001:2015 on Quality Management. To develop the competence of its employees, PDS carries out several trainings such as Excellent Service Training and refreshment training for cleaning services and BNSP certification.

Kinerja PT PDS Tahun 2020

Performance of PT PDS in 2020

**Kinerja PT Pelindo Daya Sejahtera Tahun 2019 - 2020 /
Performance of PT Pelindo Daya Sejahtera in 2019-2020**

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Pendapatan Usaha / Revenues	535.275	458.582	76.693	16,72%
Beban Usaha / Operating Expenses	488.199	429.973	58.226	13,54%
Laba Usaha / Operating Profit	47.076	28.609	18.467	64,55%
Beban Pajak / Tax Expenses	12.858	7.637	5.221	68,36%
Laba Bersih / Net Profit	35.244	21.932	13.312	60,70%
Jumlah Aset / Total Assets	202.338	167.484	34.854	20,81%
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	100.244	97.720	2.524	2,58%
Jumlah Ekuitas / Total Equity	102.094	69.764	32.330	46,34%



Pada tahun 2020, PT PDS mencatatkan Pendapatan Usaha sebesar Rp535,28 miliar, naik Rp76,69 miliar atau 16,72% bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp458,58 miliar. Peningkatan pada Pendapatan tersebut menyebabkan Laba Bersih PT PDS pada tahun 2020 meningkat sebesar Rp13,31 miliar atau 60,70%, menjadi Rp35,24 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp21,93 miliar. Perubahan pada Laba Bersih terutama disebabkan oleh adanya beberapa penambahan kontrak pekerjaan baru. Sedangkan Jumlah Aset PT PDS tahun 2020 tercatat sebesar Rp202,34 miliar, Jumlah Liabilitas sebesar Rp100,24 miliar dan Jumlah Ekuitas sebesar Rp102,09 miliar.

Dividen yang Diberikan

In 2020, PT PDS recorded Revenues of Rp535.28 billion, an increase of Rp76.69 billion or 16.72% compared to 2019 of Rp458.58 billion. The increase in Revenue caused PT PDS' Net Profit in 2020 to increase by Rp13.31 billion or 60.70% to Rp35.24 billion compared to 2019 of Rp21.93 billion. The increase in Net Profit was mainly due to the addition of several new work contracts. While the Total Assets of PT PDS in 2020 was recorded at Rp202.34 billion, Total Liabilities at Rp100.24 billion and Total Equity at Rp102.09 billion.

Provided Dividends

**Dividen yang Diberikan PT Pelindo Daya Sejahtera Tahun 2019 - 2020 /
Dividends Provided by PT Pelindo Daya Sejahtera in 2019-2020**

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Laba Bersih / Net Profit	35.244	21.932	13.312	60,70%
Dividen / Dividend	-	3.940	(3.940)	-100,00%
Payout Ratio	0,00%	17,96%	-17,96%	-100,00%

Jumlah dividen yang diperoleh Pelindo III dari PT PDS pada tahun 2020 tercatat nihil atau tidak ada pembagian dividen atas laba bersih PT PDS tahun 2020. Jumlah tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan dividen tahun 2019. Pemegang Saham menetapkan penggunaan Laba Bersih setelah Pajak PT PDS sebesar 100% sebagai cadangan modal di tahun 2020.

Total dividends that Pelindo III received from PT PDS in 2020 was recorded to be zero or there was no dividend distribution on PT PDS's net profit in 2020. This amount decreased by compared to the dividends in 2019. Shareholders determined the use of 100% of Net Profit after Tax of PT PDS for capital reserve in 2020.



TINJAUAN KEUANGAN

Tinjauan kinerja keuangan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Pelindo III yang disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku umum di Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*) dengan opini wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan konsolidasian Pelindo III dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Bahasan kinerja keuangan Perusahaan disampaikan dengan memperhatikan penjelasan pada catatan Laporan Keuangan Konsolidasi dari pihak auditor eksternal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian per 31 Desember 2019-2020 / Consolidated Financial Position Report as of December 31, 2019-2020

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Aset / Assets	32.195.205	30.755.915	1.439.290	4,68%
Aset Lancar / Current Assets	5.532.616	5.407.567	125.049	2,31%
Aset Tidak Lancar / Non-Current Assets	26.662.589	25.348.348	1.314.241	5,18%
Liabilitas / Liabilities	21.153.548	19.709.051	1.444.497	7,33%
Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities	3.292.217	3.265.197	27.020	0,83%
Liabilitas Jangka Panjang / Non-Current Liabilities	17.861.332	16.443.854	1.417.477	8,62%
Ekuitas / Equity	11.041.657	11.046.864	(5.207)	-0,05%

Sampai dengan akhir tahun 2020, Perusahaan mencatatkan kenaikan Aset sebesar Rp1.439,29 miliar atau 4,68% menjadi Rp32.195,21 miliar. Liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp21.153,55 miliar, naik Rp1.444,50 miliar atau 7,33% bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp19.709,05 miliar. Nilai

FINANCIAL OVERVIEW

This financial performance description is prepared based on the Consolidated Financial Statement of Pelindo III presented in accordance with Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) generally accepted in Indonesia for the year ended on December 31, 2020. The financial statements have been audited by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro, & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) with an unqualified opinion. The consolidated financial position of Pelindo III and its Subsidiaries as of December 31, 2020, as well as financial performance and consolidated cash flows for the year ended on the date, are in accordance with the Financial Accounting Standard in Indonesia.

Discussion of the Company's financial performance is submitted by taking into account the explanation on notes to the Consolidated Financial Statements from the external auditor as an inseparable part of this Annual Report.

Consolidated Statements of Financial Position

As of the end of 2020, the Company recorded an increase in Assets of Rp1,439.29 billion or 4.68% to Rp32,195.21 billion. Liabilities as of December 31, 2020 were recorded at Rp21,153.55 billion, an increase of Rp1,444.50 billion or 7.33% when compared to 2019 which amounted to Rp19,709.05 billion. Equity value as of December 31,



Ekuitas per tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp11.041,66 miliar, menurun sebesar Rp5,21 miliar atau 0,05% bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp11.046,86 miliar.

2020 was recorded at Rp11,041.66 billion, decreased by Rp5.21 billion or 0.05% when compared to 2019 which amounted to Rp11,046.86 billion.

Aset

Pada akhir tahun 2020, nilai Aset Perusahaan tercatat sebesar Rp32.195,21 miliar, meningkat sebesar Rp1.439,29 miliar atau 4,68% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp30.755,92 miliar. Peningkatan Aset tersebut terutama berasal dari Aset Tidak Lancar yang naik sebesar Rp1.314,21 miliar atau 5,18% dan diikuti dengan kenaikan Aset Lancar sebesar Rp125,05 miliar atau 2,31% bila dibandingkan dengan akhir tahun 2019. Peningkatan Aset tersebut memberikan dampak penguatan terhadap kemampuan Perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek dan panjangnya.

Assets

At the end of 2020, the value of the Company's Assets was recorded at Rp32,195.21 billion, an increase of Rp1,439.29 billion or 4.68% compared to 2019 which amounted to Rp30,755.92 billion. The increase in Assets mainly came from Non-Current Assets which increased by Rp1,314.21 billion or 5.18%, followed by an increase in Current Assets of Rp125.05 billion or 2.31% compared to the end of 2019. The increase in these assets provided the strengthening on the Company's ability to pay off its short and long term obligations.

Aset Lancar

Current Assets

**Aset Lancar per 31 Desember 2019-2020 /
Current Assets as of December 31, 2019-2020**

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalents	3.856.327	3.644.611	211.716	5,81%
Investasi Jangka Pendek / Short-Term Investment	3.000	27.940	(24.940)	-89,26%
Piutang Usaha -- Neto / Trade Receivables - Net	779.282	823.075	(43.793)	-5,32%
Piutang Lain-lain -- Neto / Other Receivables - Net	311.440	310.675	765	0,25%
Pendapatan Masih akan Diterima / Accrued Revenues	200.343	217.281	(16.938)	-7,80%
Persediaan -- Neto / Inventories - Net	90.995	84.546	6.450	7,63%
Pajak Dibayar Dimuka / Prepaid Taxes	118.412	173.776	(55.364)	-31,86%
Beban Dibayar Dimuka / Prepaid Expenses	40.225	85.023	(44.798)	-52,69%
Aset Lancar Lainnya / Other Current Assets	132.592	40.640	91.952	226,26%
Jumlah / Total	5.532.616	5.407.567	125.049	2,31%

Per 31 Desember 2020, Perusahaan mencatatkan jumlah Aset Lancar sebesar Rp5.532,62 miliar, naik Rp125,05 miliar atau 2,31% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.407,57 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Kas dan Setara Kas sebesar Rp211,72 miliar atau 5,81% dan kenaikan Aset Lancar Lainnya sebesar Rp91,95 miliar atau 226,26%.

As of December 31, 2020, the Company recorded a total Current Assets of Rp5,532.62 billion, an increase of Rp125.05 billion or 2.31% compared to the value as of December 31, 2019 of Rp5,407.57 billion. The increase was mainly due to an increase in Cash and Cash Equivalents by Rp211.72 billion or 5.81% and an increase in Other Current Assets by Rp91.95 billion or 226.26%. In



Selain itu, Piutang Lain-lain – Neto dan Persediaan – Neto juga turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan atas nilai Aset Lancar di tahun 2020. Peningkatan Aset Lancar tersebut memberikan dampak yang positif terhadap kemampuan Perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya.

Kas dan Setara Kas

addition, Other Receivables - Net and Inventories - Net also contributed to the increase in the value of Current Assets in 2020. The increase in Current Assets had a positive impact on the Company's ability to settle its current liabilities.

Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2019-2020

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Kas / Cash	95.733	14.989	80.743	538,67%
Bank / Bank	669.353	478.299	191.054	39,94%
Deposito Berjangka / Time Deposits	3.091.241	3.151.323	(60.081)	-1,91%
Jumlah / Total	3.856.327	3.644.611	211.716	5,81%

Kas dan Setara Kas sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp3.856,33 miliar, naik Rp211,72 miliar atau 5,81% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.644,61 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada penempatan Deposito sebesar Rp191,05 miliar atau 39,94% dan kenaikan pada nilai Kas sebesar Rp80,74 miliar atau 538,67%.

Cash and Cash Equivalents as of December 31, 2020 were recorded at Rp3,856.33 billion, an increase of Rp211.72 billion or 5.81% compared to the value as of December 31, 2019 of Rp3,644.61 billion. This increase was mainly due to an increase in time deposits placement of Rp191.05 billion or 39.94% and an increase in cash values of Rp80.74 billion or 538.67%.

Investasi Jangka Pendek

Short-Term Investment

Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2019-2020 / Short-Term Investment as of December 31, 2019-2020

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Deposito / Deposits	3.000	14.000	(11.000)	-78,57%
Surat Berharga Komersial (SBK) / Securities (SBK)	-	13.940	(13.940)	-100,00%
Jumlah / Total	3.000	27.940	(24.940)	-89,26%

Investasi Jangka Pendek merupakan Deposito Berjangka dan Surat Berharga yang jatuh tempo lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun serta tidak dijadikanjaminan. Investasi Jangka Pendek sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp3,00 miliar, turun Rp24,94 miliar atau 89,26% bila dibandingkan nilai per

Short-term investments are Time Deposits and Securities with maturities of more than 3 months but not more than 1 year and are not pledged as collateral. Short-term investment until December 31, 2020 was recorded at Rp3.00 billion, a decrease of Rp24.94 billion or 89.26% compared to the value as of December 31, 2019 of



31 Desember 2019 sebesar Rp27,94 miliar. Penurunan Investasi Jangka Pendek di tahun 2020 terutama disebabkan oleh penurunan dari nilai Surat Berharga Komersial (SBK) sebesar Rp13,94 miliar atau 100,00% berupa SBK I PT Pengelola Aset (Persero) 2019 yang telah jatuh tempo. Selain itu, Investasi Jangka Pendek berupa Deposito juga mencatatkan penurunan di tahun 2020 sebesar Rp11,00 miliar atau 78,57% dibandingkan tahun sebelumnya berupa Deposito pada PT Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dan PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Piutang Usaha – Neto

Rp27.94 billion. The decline in short-term investments in 2020 was mainly due to a decrease in the value of Securities (SBK) of Rp13.94 billion or 100.00% in the form of SBK I PT Pengelola Aset (Persero) 2019 which has matured. In addition, Short-term Investments in the form of Time Deposits also declined in 2020 of Rp11.00 billion or 78.57% compared to the previous year in the form of deposits at PT Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah and PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Trade Receivables - Net

Piutang Usaha - Neto per 31 Desember 2019-2020

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Pihak Ketiga / Third Parties	676.005	586.234	89.771	15,31%
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai / Allowances for Impairment Loss	(100.759)	(72.115)	(28.644)	39,72%
Jumlah Piutang Usaha Pihak Ketiga -- Neto / Total Trade Receivables from Third Parties - Net	575.246	514.119	61.127	11,89%
Pihak Berelasi / Related Parties	444.490	468.791	(24.301)	-5,18%
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai / Allowances for Impairment Loss	(240.454)	(159.836)	(80.619)	50,44%
Jumlah Piutang Usaha Pihak Berelasi -- Neto / Total Trade Receivables from Related Parties - Net	204.036	308.956	(104.920)	-33,96%
Jumlah / Total	779.282	823.075	(43.793)	-5,32%

Piutang Usaha – Neto sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp779,28 miliar, turun Rp43,79 miliar atau 5,32% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp823,08 miliar. Penurunan tersebut berasal dari berkurangnya Piutang Usaha dari Pihak Berelasi sebesar Rp24,30 miliar atau 5,18% di tahun 2020 dan diikuti dengan kenaikan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai di tahun 2020 sebesar Rp80,62 miliar atau 50,44% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, Perusahaan juga meningkatkan nilai Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai dari Piutang Usaha dari Pihak Ketiga sebesar Rp28,64 miliar atau 39,72%. Berdasarkan hasil penelaahan keadaan piutang masing-masing pelanggan pada akhir periode pelaporan, Manajemen berkeyakinan

Trade Receivables - Net as of December 31, 2020 was recorded at Rp779.28 billion, decreased by Rp. 43.79 billion or 5.32% when compared to the value as of December 31, 2019 of Rp823.08 billion. This decrease originated from a decrease in Trade Receivable from Related Parties by Rp24.30 billion or 5.18% in 2020, followed by an increase in Allowances for Impairment Loss in 2020 which amounted to Rp80.62 billion or 50.44% compared to the previous year. In addition, the Company also increased the Allowances for Impairment Loss on Trade Receivable from Third Parties by Rp28.64 billion or 39.72%. Based on a review of the status of the individual receivables at the end of the reporting period, the management believed that the allowances for impairment loss was adequate to



bawa penyisihan penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 Piutang Usaha tidak dijaminkan.

cover possible losses on uncollectible trade receivables. As of December 31, 2019 and 2020, Trade Receivables were not collateralized.

Piutang Lain-lain – Neto

Other Receivables - Net

Piutang Lain-lain - Neto per 31 Desember 2019-2020

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Pihak Ketiga / Third Parties	47.087	46.565	522	1,12%
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai / Allowances for Impairment Loss	(6.956)	(5.787)	(1.168)	20,19%
Jumlah Piutang Usaha Pihak Ketiga -- Neto / Total Trade Receivables from Third Parties - Net	40.131	40.777	(646)	-1,58%
Pihak Berelasi / Related Parties	344.654	367.713	(23.059)	-6,27%
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai / Allowances for Impairment Loss	(73.345)	(97.815)	24.469	-25,02%
Jumlah Piutang Usaha Pihak Berelasi -- Neto / Total Trade Receivables from Related Parties - Net	271.309	269.898	1.411	0,52%
Jumlah / Total	311.440	310.675	765	0,25%

Piutang Lain-lain – Neto sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp311,44 miliar, naik Rp765 juta atau 0,25% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp310,68 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari berkurangnya Penyisihan Kerugian Penurunan dari atas Piutang Lain-lain dari Pihak Berelasi sebesar Rp24,47 miliar atau 25,02%. Hal tersebut sejalan dengan berkurangnya nilai Piutang Lain-lain dari Pihak Berelasi di tahun 2020. Berdasarkan hasil penelaahan keadaan masing-masing piutang pada akhir periode pelaporan, Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang lain-lain. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 Piutang Lain-lain tidak dijaminkan.

Other Receivables - Net as of December 31, 2020, was recorded at Rp311.44 billion, an increase of Rp765 million or 0.25% compared to the value as of December 31, 2019 of Rp310.68 billion. The increase was derived from the reduction in Allowances for Impairment Loss on Other Receivables from Related Parties by Rp24.47 billion or 25.02%. This was in line with the decrease in the value of Other Receivables from Related Parties in 2020. Based on a review of the status of each receivable at the end of the reporting period, the Management believed that the allowances for impairment loss was adequate to cover possible losses on other uncollectible receivables. As of December 31, 2019 and 2020, Other Receivables were not collateralized.

**Pendapatan Masih akan Diterima****Accrued Revenues****Pendapatan Masih akan Diterima per 31 Desember 2019-2020**

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Pihak Ketiga / Third Parties	149.481	140.453	9.029	6,43%
Pihak Berelasi / Related Parties	50.862	76.828	(25.967)	-33,80%
Jumlah / Total	200.343	217.281	(16.938)	-7,80%

Pendapatan Masih akan Diterima merupakan pendapatan yang belum difakturkan. Pendapatan Masih akan Diterima sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp200,34 miliar, turun Rp16,94 miliar atau 7,80% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp217,28 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya Pendapatan Masih akan Diterima sebesar Rp25,97 miliar atau 33,80% di tahun 2020 bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Accrued Revenues are revenues that have not been factored in. The Accrued Revenues until December 31, 2020, was recorded at Rp200.34 billion, a decrease of Rp16.94 billion or 7.80% compared to the value as of December 31, 2019, which amounted to Rp217.28 billion. This decrease was mainly due to a reduction in Accrued Revenues by Rp25.97 billion or 33.80% in 2020 compared to the same period in the previous year.

Persediaan – Neto**Inventories - Net****Persediaan per 31 Desember 2019-2020**

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Suku Cadang / Spare Parts	83.127	73.305	9.822	13,40%
Bahan Bakar dan Pelumas / Fuel and Lubricants	9.789	5.589	4.200	75,15%
Obat Medis / Medicines	-	4.739	(4.739)	-100,00%
Lain-lain / Others	1.055	1.820	(765)	-42,05%
	93.970	85.453	8.518	9,97%
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / Reduced By: Allowances for Impairment Loss	(2.975)	(907)	(2.068)	227,99%
	90.995	84.546	6.450	7,63%

Persediaan – Neto sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp91,00 miliar, naik Rp6,45 miliar atau 7,63% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp84,55 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Persediaan Suku Cadang sebesar Rp9,82 miliar atau 13,40% dan kenaikan Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp4,20 miliar atau 75,15% sampai dengan akhir tahun 2020.

Inventories - Net as of December 31, 2020 was recorded at Rp91.00 billion, an increase of Rp6.45 billion or 7.63% compared to the value as of December 31, 2019 of Rp84.55 billion. This increase was mainly due to an increase in Spare Parts Inventory by Rp9.82 billion or 13.40% and an increase in Fuel and Lubricant Inventory by Rp4.20 billion or 75.15% at the end of 2020. Based on a review of the condition and level of inventory turnover,



Berdasarkan penelaahan atas kondisi dan tingkat perputaran persediaan, Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai persediaan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari penurunan nilai. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 tidak ada Persediaan yang dijaminkan.

the Management believed that the allowances for impairment loss on inventories was adequate to cover possible losses from impairments. As of December 31, 2019 and 2020, there were no guaranteed inventories.

Pajak Dibayar di Muka

Prepaid Taxes

Pajak Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019-2020 /
Prepaid Taxes as of December 31, 2019-2020

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Perusahaan / The Company				
PPN - Masukan / VAT - In	208	4.667	(4.458)	-95,54%
PPh Pasal 23 / Income Tax Article 23	-	27	(27)	-100,00%
Entitas Anak / Subsidiaries				
PPN - Masukan / VAT - In	114.281	163.093	(48.812)	-29,93%
PPh Pasal 23/26 / Income Tax Article 23/26	3.667	5.569	(1.903)	-34,16%
PPh Pasal 28A / Income Tax Article 28A	256	320	(63)	-19,86%
PPh Final / Final Income Tax	-	100	(100)	-100,00%
Jumlah / Total	118.412	173.776	(55.364)	-31,86%

Pajak Dibayar Dimuka sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp118,41 miliar, turun Rp55,36 miliar atau 31,86% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp173,78 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Pajak Dibayar Dimuka oleh Entitas Anak berupa PPN Masukan yang turun sebesar Rp48,81 miliar atau 29,93%. Secara keseluruhan, seluruh komponen Pajak Dibayar Dimuka mencatatkan penurunan di tahun 2020.

Prepaid Taxes as of December 31, 2020 were recorded at Rp118.41 billion, a decrease of Rp55.36 billion or 31.86% compared to the value as of December 31, 2019 of Rp. 173.78 billion. The decrease was mainly due to the Subsidiaries' Prepaid Taxes in the form of VAT - In, which decreased by Rp48.81 billion or 29.93%. Overall, all components of Prepaid Taxes decreased in 2020.



Beban Dibayar Dimuka

Prepaid Expenses

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019-2020 / Prepaid Expenses as of December 31, 2019-2020

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Beban Dibayar Dimuka - Pemindahan Tempat Penimbunan Petikemas / Prepaid Expenses – Container Yard Relocation	369	43.751	(43.382)	-99,16%
Beban Dibayar Dimuka -- Asuransi / Prepaid Expenses - Insurance	14.376	15.551	(1.175)	-7,55%
Beban Dibayar Dimuka -- Pegawai / Prepaid Expenses - Personnel	15.758	17.783	(2.025)	-11,39%
Beban Dibayar Dimuka -- Lainnya / Prepaid Expenses – Others	9.722	7.938	1.784	22,47%
Jumlah / Total	40.225	85.023	(44.798)	-52,69%

Beban Dibayar Dimuka sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp40,23 miliar, turun Rp44,80 miliar atau 52,69% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp85,02 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya Beban Dibayar Dimuka – Pemindahan Tempat Penimbunan Petikemas sebesar Rp43,38 miliar atau 99,16% sampai dengan akhir tahun 2020. Selain itu, Beban Dibayar Dimuka – Asuransi dan Beban Dibayar Dimuka – Pegawai juga turut mencatatkan penurunan di tahun 2020.

Prepaid Expenses as of December 31, 2020 were recorded at Rp40.23 billion, a decrease of Rp44.80 billion or 52.69% compared to the value as of December 31, 2019, which amounted to Rp85.02 billion. The decrease was mainly due to a decrease in Prepaid Expenses – Container Yard Relocation by Rp43.38 billion or 99.16% by the end of 2020. In addition, Prepaid Expenses - Insurance and Prepaid Expenses - Personnel also decreased in 2020.

Aset Lancar Lainnya

Aset Lancar Lainnya sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp132,59 miliar, naik Rp91,95 miliar atau 226,26% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp40,64 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh...

Other Current Assets

Other Current Assets as of December 31, 2020 were recorded at Rp132.59 billion, an increase of Rp91.95 billion or 226.26% compared to the value as of December 31, 2019 of Rp40.64 billion. The increase was mainly due to...

**Aset Tidak Lancar****Non-Current Assets****Aset Tidak Lancar per 31 Desember 2019-2020 /
Non-Current Assets as of December 31, 2019-2020**

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Investasi Jangka Panjang / Long-Term Investment	1.477.661	1.156.556	321.106	27,76%
Properti Investasi -- Neto / Investment Properties - Net	98.181	101.880	(3.699)	-3,63%
Aset Tetap -- Neto / Fixed Assets – Net	16.949.416	16.791.363	158.053	0,94%
Aset Hak Guna / Right-of-Use Assets	73.173	-	73.173	-
Aset Pajak Tangguhan / Deferred Tax Assets	619.933	437.436	182.496	41,72%
Aset Tak Berwujud -- Neto / Intangible Assets - Net	6.857.211	6.056.750	800.461	13,22%
Estimasi Tagihan Pajak / Estimated Claims for Tax Refunds	260.464	215.985	44.479	20,59%
Aset Tidak Lancar Lainnya / Other Non-Current Assets	326.550	588.377	(261.828)	-44,50%
Jumlah / Total	26.662.589	25.348.348	1.314.241	5,18%

Per 31 Desember 2020, Perusahaan mencatatkan jumlah Aset Tidak Lancar sebesar Rp26.662,59 miliar, naik Rp1.314,24 miliar atau 5,18% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp25.348,35 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Aset Tak Berwujud – Neto yang naik sebesar Rp800,46 miliar atau 13,22% dan diiringi dengan kenaikan pada Investasi Jangka Panjang sebesar Rp321,11 miliar atau 27,76%. Disamping itu, kenaikan Aset Tetap – Neto, Aset Hak Guna, Aset Pajak Tangguhan dan Estimasi Tagihan Pajak turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai Aset Tidak Lancar di tahun 2020. Peningkatan Aset Tidak Lancar tersebut memberikan dampak penguatan terhadap likuiditas Perusahaan terutama dalam kemampuannya untuk melunasi seluruh kewajibannya.

As of December 31, 2020, the Company recorded the number of Non-Current Assets of Rp26,662.59 billion, an increase of Rp1,314.24 billion or 5.18% compared to the value as of December 31, 2019 of Rp25,348.35 billion. This increase was mainly due to the increase in Intangible Assets - Net by Rp800.46 billion or 13.22% and was accompanied by an increase in Long-term Investments of Rp321.11 billion or 27.76%. In addition, the increase in Fixed Assets - Net, Right-of-Use Assets, Deferred Tax Assets and Estimated Claims for Tax Refunds also contributed to the increase in Non-Current Assets' value in 2020. The increase in Non-Current Assets had a strengthening impact on the Company's liquidity, especially in its ability to pay off all obligation.



Investasi Jangka Panjang

Long-Term Investment

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2019-2020 / Long-Term Investment as of December 31, 2019-2020

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Penyertaan Saham pada Entitas Asosiasi / Investment in Shares of Associates	1.285.161	1.156.556	128.606	11,12%
Penyertaan Saham Lainnya / Other Share Investment	192.500	-	192.500	-
Jumlah / Total	1.477.661	1.156.556	321.106	27,76%

Investasi Jangka Panjang sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp1.477,66 miliar, naik Rp321,11 miliar atau 27,76% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.156,56 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pencatatan baru atas Penyertaan Saham Lainnya pada PT PBM IHC sebesar Rp192,50 miliar di tahun 2020. Selain itu, Perusahaan juga mencatatkan peningkatan Penyertaan Saham pada Entitas Asosiasi di tahun 2020 sebesar Rp128,61 miliar atau 11,12% pada PT BKMS, PT JBT, PT TPI, PT Ambapers, PT LNG, PT PHC, dan PT PCN.

Long-Term Investment until December 31, 2020 was recorded at Rp1,477.66 billion, an increase of Rp321.11 billion or 27.76% compared to the value as of December 31, 2019 of Rp1,156.56 billion. This increase was mainly due to the new listing of Other Shares Investment in PT PBM IHC which amounted to Rp192.50 billion in 2020. In addition, the Company also recorded an increase in Investment in Shares of Associates in 2020 which amounted to Rp128.61 billion or 11.12% in PT BKMS, PT JBT, PT TPI, PT Ambapers, PT LNG, PT PHC, and PT PCN.

Properti Investasi – Neto

Properti Investasi – Neto sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp98,18 miliar, turun Rp3,70 miliar atau 3,63% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp101,88 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya Properti Investasi berupa Bangunan Sebesar Rp3,02 miliar dan adanya penambahan akumulasi penyusutan Bangunan sebesar Rp1,08 miliar di tahun 2020.

Investment Properties – Net

Investment Properties - Net as of December 31, 2020 was recorded at Rp98.18 billion, a decrease of Rp3.70 billion or 3.63% compared to the value as of December 31, 2019 of Rp101.88 billion. The decrease was mainly due to a reduction in Investment Properties in the form of Buildings by Rp3.02 billion and an increase in accumulated depreciation of Buildings by Rp1.08 billion in 2020.

Aset Tetap – Neto

Aset Tetap – Neto sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp16.949,42 miliar, naik Rp158,05 miliar atau 0,94% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp16.791,36 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari reklasifikasi Aset Tetap berupa Tanah, Bangunan Fasilitas Pelabuhan, Kapal, Alat-alat Fasilitas Pelabuhan, Instalasi Fasilitas Pelabuhan, Jalan dan Bangunan, Peralatan dan Emplasemen.

Fixed Assets – Net

Fixed Assets - Net as of December 31, 2020 was recorded at Rp16,949.42 billion, an increase of Rp158.05 billion or 0.94% compared to the value as of December 31, 2019 of Rp16,791.36 billion. The increase was mainly derived from the reclassification of Fixed Assets in the form of Land, Port Facility Buildings, Ships, Port Facilities, Port Facilities Installation, Roads and Buildings, Equipment and Emplacement.

**Aset Hak Guna**

Aset Hak Guna sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp73,17 miliar, sedangkan nilai per 31 Desember 2019 tercatat nihil. Pencatatan tersebut berupa Aset Hak Guna berupa Bangunan, Kendaraan, dan Peralatan.

Right-Of-Use Assets

Right- Of-Use Assets as of December 31, 2020 were recorded at Rp73.17 billion, while the value as of December 31, 2019 was recorded at zero. The recording was in the form of Right-of-Use Assets in the form of Buildings, Vehicles and Equipment.

Aset Pajak Tangguhan

Aset Pajak Tangguhan sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp619,93 miliar, naik Rp182,50 miliar atau 41,72% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp437,44 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh...

Deferred Tax Assets

Deferred Tax Assets as of December 31, 2020 were recorded at Rp619.93 billion, an increase of Rp182.50 billion or 41.72% compared to the value as of December 31, 2019 of Rp437.44 billion. The increase was mainly due to...

Aset Tak Berwujud – Neto

Aset Tak Berwujud – Neto sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp6.857,21 miliar, naik Rp800,46 miliar atau 13,22% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.056,75 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan Aset Hak Konsesi dan Piranti Lunak sebesar Rp555,78 miliar dan adanya penambahan dari reklassifikasi berupa Aset Hak Konsesi sebesar Rp399,85 miliar di tahun 2020.

Intangible Assets – Net

Intangible Assets - Net as of December 2020 was recorded at Rp6,857.21 billion, an increase of Rp800.46 billion or 13.22% compared to the value as of December 31, 2019 of Rp6,056.75 billion. The increase was mainly due to the addition of Concession Rights Assets and Software Assets amounting to Rp555.78 billion and the addition of reclassification in the form of Concession Rights Assets amounting to Rp399.85 billion in 2020.

Estimasi Tagihan Pajak

Estimasi Tagihan Pajak sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp260,46 miliar, naik Rp44,48 miliar atau 20,59% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp215,99 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Estimasi Pajak Penghasilan dari Perusahaan pada tahun 2019 dan 2020 berupa Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, Entitas Anak juga turut mencatatkan kenaikan Estimasi Tagihan Pajak berupa Pajak Penghasilan dari PT BJTI, PT TPS dan PT TTL di tahun 2020.

Estimated Claims for Tax Refund

The Estimated Claims for Tax Refund as of December 31, 2020 were recorded at Rp260.46 billion, an increase of Rp44.48 billion or 20.59% compared to the value as of December 31, 2019 of Rp215.99 billion. This increase was mainly due to the increase in the Company's Estimated Claims for Tax Refund in 2019 and 2020 in the form of Income Tax and Value-Added Tax. In addition, the Subsidiaries also recorded an increase in the Estimated Claims for Tax Refund in the form of Income Tax from PT BJTI, PT TPS and PT TTL in 2020.

Aset Tidak Lancar Lainnya**Other Non-Current Assets****Aset Tidak Lancar Lainnya per 31 Desember 2019-2020 /
Other Non-Current Assets as of December 31, 2019-2020**

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Uang Muka Pembelian Aset Tetap / Advance for Purchase Fixed Assets	172.468	406.371	(233.904)	-57,56%
Aset Lain-lain -- Neto / Other Assets – Net	154.082	182.006	(27.924)	-15,34%
Jumlah / Total	326.550	588.377	(261.828)	-44,50%



Aset Tidak Lancar Lainnya sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp326,55 miliar, turun Rp261,83 miliar atau 44,50% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp588,38 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya Uang Muka Pembelian Aset Tetap sebesar Rp233,90 miliar atau 57,56% dan diiringi dengan penurunan pada Aset Lain-lain – Neto sebesar Rp27,92 miliar atau 15,34% sampai dengan akhir tahun 2020.

Other Non-Current Assets as of December 31, 2020 were recorded at Rp326.55 billion, decreased by Rp261.83 billion or 44.50% compared to the value as of December 31, 2019 of Rp588.38 billion. The decrease was mainly due to a decrease in Advances for Purchase Fixed Assets by Rp233.90 billion or 57.56% and accompanied by a decrease in Other Assets - Net by Rp27.92 billion or 15.34% by the end of 2020.

Liabilitas

Pada akhir tahun 2020, nilai Liabilitas Perusahaan tercatat sebesar Rp21.153,55 miliar, meningkat sebesar Rp1.444,50 miliar atau 7,33% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp19.709,05 miliar. Peningkatan Liabilitas tersebut terutama berasal dari Liabilitas Jangka Panjang yang naik sebesar Rp1.417,48 miliar atau 8,62% dan diikuti dengan kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp27,02 miliar atau 0,83% di tahun 2020. Peningkatan Liabilitas tersebut memberikan dampak....

Liabilities

At the end of 2020, the value of the Company's Liabilities was Rp21,153.55 billion, an increase of Rp1,444.50 billion or 7.33% compared to 2019 of Rp19,709.05 billion. The increase in Liabilities mainly came from Non-Current Liabilities which increased by Rp1,417.48 billion or 8.62%, followed by an increase in Current Liabilities of Rp27.02 billion or 0.83% in 2020. The increase in Liabilities had an impact on ...

Liabilitas Jangka Pendek

Current Liabilities

**Liabilitas Jangka Pendek per 31 Desember 2019-2020 /
Current Liabilities as of December 31, 2019-2020**

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Utang Usaha / Trade Payables	542.984	630.349	(87.365)	-13,86%
Utang Lain-lain / Other Payables	740.491	789.967	(49.476)	-6,26%
Utang Pajak / Tax Payables	184.297	164.854	19.443	11,79%
Beban Akrual / Accrued Expenses	1.229.673	1.110.512	119.160	10,73%
Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Pendek / Short-Term Unearned Revenues	344.094	292.260	51.834	17,74%
Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang / Current Maturity of Long-Term Liabilities	92.740	162.163	(69.424)	-42,81%
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya / Other Current Liabilities	157.938	115.092	42.846	37,23%
Jumlah / Total	3.292.217	3.265.197	27.020	0,83%

Per 31 Desember 2020, Perusahaan mencatatkan jumlah Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp3.292,22 miliar, naik Rp27,02 miliar atau 0,83% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.265,20 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Beban Akrual yang naik sebesar Rp119,16 miliar atau 10,73%. Selain itu,

As of December 31, 2020, the Company recorded a total Current Liabilities of Rp3,292.22 billion, an increase of Rp27.02 billion or 0.83% compared to the value as of December 31, 2019 of Rp3,265.20 billion. The increase was mainly due to Accrued Expenses, which increased by Rp119.16 billion or 10.73%. In addition, the increase in



kenaikan Utang Pajak, Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Pendek dan Liabilitas Jangka Pendek Lainnya juga turut memberikan kontribusi peningkatan pada nilai Liabilitas Jangka Pendek di tahun 2020. Peningkatan Liabilitas Jangka Pendek tersebut digunakan untuk mendukung kinerja operasional Perusahaan sehingga memberikan kontribusi positif terhadap Pendapatan.

Tax Payables, Short-Term Unearned Revenues and Other Current Liabilities also contributed to an increase in the value of Current Liabilities in 2020. The increase in Current Liabilities was used to support the Company's operational performance so as to make a positive contribution to its Revenues.

Utang Usaha

Trade Payables

**Utang Usaha per 31 Desember 2019-2020 /
Trade Payables as of December 31, 2019-2020**

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Pihak Ketiga / Third Parties	505.321	568.634	(63.313)	-11,13%
Pihak Berelasi / Related Parties	37.663	61.715	(24.052)	-38,97%
Jumlah / Total	542.984	630.349	(87.365)	-13,86%

Utang Usaha sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp542,98 miliar, turun Rp87,37 miliar atau 13,86% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp630,35 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya Utang usaha dari Pihak Ketiga sebesar Rp63,31 miliar atau 11,13% dan diikuti dengan penurunan Utang Usaha dari Pihak Berelasi sebesar Rp24,05 miliar atau 38,97% sampai dengan akhir tahun 2020.

Trade Payable as of December 31, 2020 was recorded at Rp542.98 billion, a decrease of Rp87.37 billion or 13.86% compared to the value as of December 31, 2019 of Rp630.35 billion. This decrease was mainly due to a decrease in Trade Payable from Third Parties of Rp63.31 billion or 11.13%, followed by a decrease in Trade Payables from Related Parties of Rp24.05 billion or 38.97% by the end of 2020.

Utang Lain-lain

Other Payables

**Utang Lain-lain per 31 Desember 2019-2020 /
Other Payables as of December 31, 2019-2020**

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Pihak Ketiga / Third Parties	184.599	404.349	(219.750)	-54,35%
Pihak Berelasi / Related Parties	555.892	385.618	170.274	44,16%
Jumlah / Total	740.491	789.967	(49.476)	-6,26%



Utang Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp740,49 miliar, turun Rp49,48 miliar atau 6,26% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp789,97 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya Utang Lain-lain dari Pihak Ketiga sebesar Rp219,75 miliar atau 54,35%.

Other Payables as of December 31, 2020 was recorded at Rp740.49 billion, decreased by Rp49.48 billion or 6.26% compared to the value as of December 31, 2019 of Rp789.97 billion. The decrease was caused by a decrease in Other Payables from Third Parties by Rp219.75 billion or 54.35%.

Utang Pajak

Tax Payables

Utang Pajak per 31 Desember 2019-2020 / Tax Payables as of December 31, 2019-2020

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Perusahaan / Company	95.102	95.893	(791)	-0,83%
Entitas Anak / Subsidiaries	89.195	68.961	20.235	29,34%
Jumlah / Total	184.297	164.854	19.443	11,79%

Utang Pajak sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp184,30 miliar, naik Rp19,44 miliar atau 11,79% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp164,85 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari Utang Pajak Entitas Anak yang naik sebesar Rp20,24 miliar atau 29,34% di tahun 2020 berupa Utang Pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 29.

Tax Payables as of December 31, 2020 was Rp184.30 billion, an increase of Rp19.44 billion or 11.79% compared to the value as of December 31, 2019, which amounted to Rp164.85 billion. The increase came from the Subsidiaries' Tax Payables which increased by Rp20.24 billion or 29.34% in 2020 in the form of VAT Tax Payables of Article 21, VAT Article 22, VAT Article 25, and VAT Article 29.

Beban Akrual

Accrued Expenses

Beban Akrual per 31 Desember 2019-2020 / Accrued Expenses as of December 31, 2019-2020

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Pegawai / Employees	532.470	440.290	92.180	20,94%
Kerjasama Mitra Usaha / Partnership	207.133	175.213	31.920	18,22%
Bunga / Interest	173.870	173.877	(7)	0,00%
Umum / General	151.413	134.264	17.149	12,77%
Pemeliharaan / Maintenance	66.603	59.170	7.432	12,56%
Lain-lain / Others	98.184	127.698	(29.514)	-23,11%
Jumlah / Total	1.229.673	1.110.512	119.160	10,73%



Beban Akrual sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp1.229,67 miliar, naik Rp119,16 miliar atau 10,73% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.110,51 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Beban Akrual – Pegawai sebesar Rp92,18 miliar atau 20,94% dan diikuti kenaikan Beban Akrual – Kerjasama Mitra Usaha sebesar Rp31,92 miliar atau 18,22%. Selain itu, Beban Akrual – Umum dan Pemeliharaan juga mencatatkan kenaikan di tahun 2020.

Accrued Expenses as of December 31, 2020 were recorded at Rp1,229.67 billion, an increase of Rp119.16 billion or 10.73% compared to the value as of December 31, 2019, which amounted to Rp1,110.51 billion. The increase was mainly due to an increase in Accrued Expenses - Employees by Rp92.18 billion or 20.94%, followed by an increase in Accrued Expenses – Partnership by Rp31.92 billion or 18.22%. In addition, Accrued Expenses - General and Maintenance also recorded an increase in 2020.

Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Pendek

Short-Term Unearned Revenue

Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Pendek per 31 Desember 2019-2020 / Short-Term Unearned Revenue as of December 31, 2019-2020

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Uang untuk Diperhitungkan / Advances From Customers	224.842	189.986	34.856	18,35%
Pelayanan Jasa Pengusahaan Tanah, Bangunan Air dan Listrik / Land, Building, Water and Electricity Service	38.803	39.038	(234)	-0,60%
Bagian Lancar Pendapatan Diterima di Muka Jangka Panjang / Current Portion of Long-Term Unearned Revenue	80.449	63.237	17.213	27,22%
Jumlah / Total	344.094	292.260	51.834	17,74%

Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Pendek sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp344,09 miliar, naik Rp51,83 miliar atau 17,74% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp292,26 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada Uang untuk Diperhitungkan sebesar Rp34,86 miliar atau 18,35% dan kenaikan atas Bagian Lancar Pendapatan Diterima di Muka Jangka Panjang sebesar Rp17,21 miliar atau 27,22%.

Short-Term Unearned Revenue as of December 31, 2020 was Rp344.09 billion, an increase of Rp51.83 billion or 17.74% compared to the value as of December 31, 2019 of Rp292.26 billion. The increase was mainly due to an increase in Advances From Customers by Rp34.86 billion or 18.35% and an increase in the Current Portion of Long-Term Unearned Revenue by Rp17.21 billion or 27.22%.

**Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang****Current Portion of Non-Current Liabilities****Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang per 31 Desember 2019-2020 /
Current Portion of Non-Current Liabilities as of December 31, 2019-2020**

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Utang Bank / Bank Loans	82.022	162.163	(80.141)	-49,42%
Liabilitas Sewa / Lease Liability	10.718	-	10.718	-
Jumlah / Total	92.740	162.163	(69.424)	-42,81%

Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp92,74 miliar, turun Rp69,42 miliar atau 42,81% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp162,16 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya Utang Bank sebesar Rp80,14 miliar atau 49,42% di tahun 2020.

The Current Portion of Non-Current Liabilities as of December 31, 2020 was Rp92.74 billion, a decrease of Rp69.42 billion or 42.81% compared to the value as of December 31, 2019 at Rp162.16 billion. This decrease was mainly due to a decrease in Bank Loans by Rp80.14 billion or 49.42% in 2020.

Liabilitas Jangka Pendek Lainnya

Liabilitas Jangka Pendek Lainnya sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp157,94 miliar, naik Rp42,85 miliar atau 37,23% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp115,09 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh...

Other Current Liabilities

Other Current Liabilities as of December 31, 2020 was at Rp157.94 billion, an increase of Rp42.85 billion or 37.23% compared to the value as of December 31, 2019 of Rp115.09 billion. The increase was mainly due to...

Liabilitas Jangka Panjang**Non-Current Liabilities****Liabilitas Jangka Panjang per 31 Desember 2019-2020 /
Non-Current Liabilities as of December 31, 2019-2020**

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Liabilitas Pajak Tangguhan / Deferred Tax Liabilities	69.000	59.926	9.074	15,14%
Liabilitas Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Lancar / Long-Term Liabilities – Net of Current Maturities	24.995	81.764	(56.769)	-69,43%
Surat Berharga yang Diterbitkan / Securities Issued	14.019.687	13.784.415	235.272	1,71%
Liabilitas Imbalan Kerja / Employee Benefits Liabilities	3.405.024	2.161.034	1.243.990	57,56%
Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang / Long-Term Unearned Revenue	340.373	354.991	(14.618)	-4,12%
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya / Other Non-Current Liabilities	2.252	1.724	529	30,68%
Jumlah / Total	17.861.332	16.443.854	1.417.477	8,62%



Per 31 Desember 2020, Perusahaan mencatatkan jumlah Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp17.861,33 miliar, naik Rp1.417,48 miliar atau 8,62% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp16.443,85 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada Liabilitas Imbalan Kerja sebesar Rp1.243,99 miliar atau 57,56%. Selain itu, kenaikan Surat Berharga yang Diterbitkan, Liabilitas Pajak Tangguhan dan Liabilitas Jangka Panjang Lainnya turut memberikan kontribusi atas peningkatan nilai Liabilitas Jangka Panjang. Peningkatan Liabilitas Jangka Panjang tersebut memberikan dampak....

As of December 31, 2020, the Company recorded a total of Non-Current Liabilities of Rp17,861.33 billion, an increase of Rp1,417.48 billion or 8.62% compared to the value as of December 31, 2019 of Rp16,443.85 billion. The increase was mainly due to an increase in Employee Benefits Liabilities of Rp1,243.99 billion or 57.56%. In addition, the increase in Securities Issued, Deferred Tax Liabilities and Other Non-Current Liabilities also contributed to the increase in the value of Non-Current Liabilities. The increase in Non-Current Liabilities had an impact on

Liabilitas Pajak Tangguhan

Liabilitas Pajak Tangguhan sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp69,00 miliar, naik Rp9,07 miliar atau 15,14% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp59,93 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh...

Deferred Tax Liabilities

Deferred Tax Liabilities as of December 31, 2020 was Rp69.00 billion, an increase of Rp9.07 billion or 15.14% compared to the value as of December 31, 2019 of Rp59.93 billion. The increase was mainly due to...

Liabilitas Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian Lancar

Liabilitas Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian Lancar sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp25,00 miliar, turun Rp56,77 miliar atau 69,43% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp81,76 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pembayaran Liabilitas Sewa sebesar Rp71,88 miliar untuk bagian lancar dan tidak lancar di tahun 2020.

Long-Term Liabilities – Net of Current Maturities

Long-term Liabilities – Net of Current Maturities as of December 31, 2020, it was recorded at Rp25.00 billion, decreased by Rp56.77 billion or 69.43% compared to the value as of December 31, 2019 of Rp81.76 billion. This decrease was mainly due to the payment of Lease Liabilities amounting to Rp71.88 billion for current and non-current portions in 2020.

Surat Berharga yang Diterbitkan

Securities Issued

Surat Berharga yang Diterbitkan per 31 Desember 2019-2020 / Securities Issued as of December 31, 2019-2020

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Senior Notes penerbitan tahun 2014 USD500.000.000 / Senior Notes issued in 2014 USD500.000.000	7.052.500	6.950.500	102.000	1,47%
Senior Notes penerbitan tahun 2018 USD500.000.000 / Senior Notes issued in 2018 USD500.000.000	7.052.500	6.950.500	102.000	1,47%
Diskonto dan Biaya Penerbitan / Discount and Issuance Cost	114.848	83.576	31.272	37,42%
Dikurangi: / Less:				
Diskonto dan Biaya Penerbitan yang Belum Diamortisasi / Unamortized of Discount and Issuance Lost	(200.161)	(200.161)	-	0,00%
Jumlah / Total	14.019.687	13.784.415	235.272	1,71%



Surat Berharga yang Diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp14.019,69 miliar, naik Rp235,27 miliar atau 1,71% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp13.784,42 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan nilai Senior Notes yang diterbitkan tahun 2014 dan 2018 masing-masing sebesar Rp102,00 miliar atau 1,47% di tahun 2020. Selain itu, nilai Diskonto dan Biaya Penerbitan juga mencatatkan kenaikan sebesar Rp31,27 miliar atau 37,42%.

Securities Issued as of December 31, 2020 was recorded at Rp14,019.69 billion, an increase of Rp235.27 billion or 1.71% compared to the value as of December 31, 2019 of Rp13,784.42 billion. The increase was mainly due to the increase in the value of Senior Notes issued in 2014 and 2018 by Rp102.00 billion or 1.47% respectively in 2020. In addition, the value of Discounts and Issuance Cost also increased of Rp31.27 billion or 37.42%.

Liabilitas Imbalan Kerja

Employee Benefits Liabilities

Liabilitas Imbalan Kerja per 31 Desember 2019-2020 / Employee Benefits Liabilities as of December 31, 2019-2020

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Perusahaan / Company				
Program Pensiu / Pension Program	439.583	450.546	(10.963)	-2,43%
Program Kesehatan Pensiu / Pension Healthcare Program	2.805.433	1.559.050	1.246.383	79,95%
Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya / Other Long-Term Employee Benefits	48.896	32.270	16.626	51,52%
Subjumlah / Subtotal	3.293.912	2.041.866	1.252.046	61,32%
Entitas Anak / Subsidiaries				
Program Pensiu dan Imbalan Pascakerja Lainnya / Pension Program and Other Post-Benefits Program	111.112	119.168	(8.057)	-6,76%
Jumlah / Total	3.405.024	2.161.034	1.243.990	57,56%

Liabilitas Imbalan Kerja sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp3.405,02 miliar, naik Rp1.243,99 miliar atau 57,56% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.161,03 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada Program Kesehatan Pensiu sebesar Rp1.246,38 miliar atau 29,95% dan diiringi dengan kenaikan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp16,63 miliar atau 51,52% yang berasal dari Perusahaan.

Employee Benefits Liabilities as of December 31, 2020 was recorded at Rp3,405.02 billion, an increase of Rp1,243.99 billion or 57.56% compared to the value as of December 31, 2019 of Rp2,161.03 billion. This increase was mainly due to an increase in the Pension Healthcare Program of Rp.1,246.38 billion or 29.95% and was accompanied by an increase in Other Long-Term Employee Benefits of Rp16.63 billion or 51.52% which came from the Company.

Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang

Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp340,37 miliar, turun Rp14,62 miliar atau 4,12% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp354,99 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh...

Long-Term Unearned Revenue

Long-Term Unearned Revenue as of December 31, 2020 was recorded at Rp340.37 billion, decreased by Rp14.62 billion or 4.12% compared to the value as of December 31, 2019 of Rp354.99 billion. The decrease was mainly due to...

**Liabilitas Jangka Panjang Lainnya**

Liabilitas Jangka Panjang Lainnya sampai dengan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp2,25 miliar, naik Rp529 juta atau 30,68% bila dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp1,72 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh...

Other Non-Current Liabilities

Other Non-Current Liabilities as of December 31, 2020 was recorded at Rp2.25 billion, an increase of Rp529 million or 30.68% compared to the value as of December 31, 2019 of Rp.1.72 billion. The increase was mainly due to...

Ekuitas**Equity**

Ekuitas per 31 Desember 2019-2020 /
Equity as of December 31, 2019-2020

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk / Equity Attributable to Owner of the Parent Entity				
Modal Saham / Share Capital	1.018.953	1.018.953	-	0,00%
Selisih atas Perubahan Ekuitas Entitas anak dan Dampak Transaksi dengan Kepentingan Non Pengendali / Difference from Changes in Equity in Subsidiaries and Effects of Transaction with Non-Controlling Interest	(236.213)	(476.073)	239.860	-50,38%
Saldo Laba: / Retained Earnings:				
Ditentukan Penggunaannya / Appropriated	9.054.950	7.580.565	1.474.384	19,45%
Belum Ditentukan Penggunaannya / Unappropriated	366.873	877.166	(510.293)	-58,18%
Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income	322.372	1.151.483	(829.111)	-72,00%
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk / Total Equity Attributable to Owner of the Parent Entity	10.526.934	10.152.095	374.840	3,69%
Kepentingan Non Pengendali / Non-Controlling Interest	514.722	894.769	(380.046)	-42,47%
Jumlah / Total	11.041.657	11.046.864	(5.207)	-0,05%

Pada akhir tahun 2020, nilai Ekuitas Perusahaan tercatat sebesar Rp11.041,66 miliar, menurun sebesar Rp5,21 miliar atau 0,05% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp11.046,86 miliar. Berikut adalah uraian mengenai faktor-faktor penurunan nilai Ekuitas di tahun 2020:

- Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp366,87 miliar, turun Rp510,29 miliar atau 58,18% dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp877,17 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh...
- Penghasilan Komprehensif Lain per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp322,37 miliar, turun Rp829,11 miliar atau 72,00% dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.151,48 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh...

At the end of 2020, the Company's Equity was recorded at Rp11,041.66 billion, a decrease of Rp5.21 billion or 0.05% compared to 2019 of Rp11,046.86 billion. The following is a description of the factors for the decline in Equity in 2020:

- Unappropriated Retained Earnings as of December 31, 2020 was recorded at Rp366.87 billion, a decrease of Rp510.29 billion or 58.18% compared to the value as of December 31, 2019 of Rp877.17 billion. It was caused by...
- Other Comprehensive Income as of December 31, 2020 was recorded at Rp322.37 billion, a decrease of Rp829.11 billion or 72.00% compared to the value as of December 31, 2019 of Rp1,151.48 billion. It was caused by...



- Kepentingan Non Pengendali per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp514,72 miliar, turun Rp380,05 miliar atau 42,47% dibandingkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp894,77 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh...

Penurunan Ekuitas sampai dengan akhir tahun 2020 tersebut memberikan dampak perubahan pada struktur modal Perusahaan yang memiliki komposisi Liabilitas lebih besar dibandingkan Ekuitas dibandingkan dengan nilai pada akhir tahun 2019.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

- Non-Controlling Interest as of December 31, 2020 was recorded at Rp514.72 billion, decreased by Rp380.05 billion or 42.47% compared to the value as of December 31, 2019 of Rp894.77 billion. It was caused by...

The decrease in Equity until the end of 2020 had the impact of changes in the Company's capital structure, which had a composition of Liability greater than Equity compared to the value at the end of 2019.

Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Tahun 2019-2020 / Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income in 2019-2020

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Pendapatan Operasi / Operating Revenue	9.320.310	9.775.808	(455.499)	-4,66%
Pendapatan Konstruksi / Construction Revenues	951.403	871.355	80.048	9,19%
Beban Operasi / Operating Expenses	(6.856.681)	(7.034.624)	177.943	-2,53%
Beban Konstruksi / Construction Expenses	(951.403)	(871.355)	(80.048)	9,19%
Pendapatan (Beban) Operasi Lainnya -- Neto / Other Operating Income (Expenses) - Net	(150.082)	480.677	(630.759)	-131,22%
Laba Usaha / Income From Operations	2.313.546	3.221.861	(908.314)	-28,19%
Pendapatan Keuangan / Finance Income	123.447	147.618	(24.170)	-16,37%
Beban Keuangan / Finance Costs	(747.492)	(714.939)	(32.553)	4,55%
Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi / Equity in Income (Loss) of Associates	57.267	5.081	52.186	1026,99%
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Badan / Income Before Final Tax and Corporate Income Tax	1.746.768	2.659.620	(912.852)	-34,32%
Beban Pajak Final / Final Tax Expense	(38.636)	(65.001)	26.365	-40,56%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan / Income Before Corporate Income Tax	1.708.133	2.594.620	(886.487)	-34,17%
Beban Pajak Penghasilan Badan / Corporate Income Tax Expense	(469.142)	(465.606)	(3.536)	0,76%
Laba Tahun Berjalan / Income for the Year	1.238.990	2.129.013	(890.023)	-41,80%
Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income				
Pos-pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi: / Items That Will Not Be Reclassified to Profit or Loss				
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti / Remeasurements of Defined Benefit Plans	(1.065.071)	(456.845)	(608.226)	133,14%
Efek Pajak Tangguhan - Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti / Deferred Tax Effect – Remeasurement of Defined Benefit Plans	234.313	114.211	120.102	105,16%



**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Tahun 2019-2020 /
Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income in 2019-2020**

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Perubahan Cadangan Aset Revaluasi / Changes in Asset Revaluation Reserves	11.496	66.892	(55.396)	-82,81%
Efek Pajak Tangguhan - Perubahan Cadangan Aset Revaluasi / Deferred Tax Effect – Changes in Asset Revaluation Reserves	(2.529)	(16.723)	14.194	-84,88%
Total Penghasilan Komprehensif Lain / Total Other Comprehensive Income	(821.791)	(292.465)	(529.326)	180,99%
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan / Total Comprehensive Income for the Year	417.199	1.836.549	(1.419.349)	-77,28%

Kinerja Perusahaan pada tahun 2020 dapat dilihat dari nilai Pendapatan Operasi dan Pendapatan Konstruksi yang masing-masing tercatat sebesar Rp9.320,31 miliar dan Rp951,40 miliar. Pendapatan Operasi mengalami penurunan di tahun 2020 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp9.775,81 miliar, sedangkan jumlah Pendapatan Konstruksi di tahun 2020 meningkat bila dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp871,36 miliar.

Secara keseluruhan, Laba Tahun Berjalan 2020 menunjukkan penurunan sebesar Rp890,02 miliar atau 41,80% menjadi Rp1.238,99 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp2.129,01 miliar. Hal tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya Pendapatan Operasi dan adanya pencatatan Beban Operasi Lainnya – Neto di tahun 2020. Sedangkan Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan 2020 tercatat sebesar Rp417,20 miliar, turun Rp1.419,35 miliar atau 77,28% bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp1.836,55 miliar.

The Company's performance in 2020 could be seen from the value of Operating Revenue and Construction Revenues, which were recorded at Rp9,320.31 billion and Rp951.40 billion, respectively. Operating Revenue decreased in 2020 compared to the realization in 2019 of Rp9,775.81 billion, while the total Construction Revenue in 2020 increased compared to the realization in 2019 of Rp871.36 billion.

Overall, the Income for the Year in 2020 showed a decrease of Rp890.02 billion or 41.80% to Rp1,238.99 billion compared to 2019 of Rp2,129.01 billion. This was mainly due to a decrease in Operating Revenue and the recording of Other Operating Expenses - Net in 2020. Meanwhile, the Total Comprehensive Income for the Year in 2020 was recorded at Rp417.20 billion, decreased by Rp1,419.35 billion or 77.28% compared to 2019 which amounted to Rp1,836.55 billion.



Pendapatan Operasi

Pendapatan Operasi

Pendapatan Operasi per 31 Desember 2019-2020

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Pelayanan Terminal Petikemas / Container Services	5.536.726	5.729.238	(192.512)	-3,36%
Pelayanan Jasa Kapal / Vessel Services	1.373.685	1.522.760	(149.075)	-9,79%
Pelayanan Jasa Terminal / Terminal Services	991.748	1.031.189	(39.442)	-3,82%
Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik / Land, Building, Water and Electricity Services	502.494	467.491	35.003	7,49%
Pelayanan Jasa Barang / Cargo Services	115.567	116.357	(790)	-0,68%
Lain-lain / Others	800.090	908.773	(108.683)	-11,96%
Jumlah / Total	9.320.310	9.775.808	(455.499)	-4,66%

Pada tahun 2020, Pendapatan Operasi tercatat sebesar Rp9.320,31 miliar, turun sebesar Rp455,50 miliar atau 4,66% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp9.775,81 miliar. Penurunan Pendapatan Operasi di tahun 2020 berasal dari seluruh komponen, terkecuali komponen Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan aktivitas pelabuhan secara keseluruhan di tahun 2020. Realisasi Pendapatan Operasi di tahun 2020 memberikan dampak penurunan pada jumlah Laba Usaha yang dibukukan oleh Perusahaan pada tahun tersebut. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing komponen Pendapatan Operasi di tahun 2020:

- Pendapatan Operasi dari Pelayanan Terminal Petimas di tahun 2020 tercatat sebesar Rp5.536,73 miliar, turun Rp192,51 miliar atau 3,36% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp5.729,24 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh...
- Pendapatan Operasi dari Pelayanan Jasa Kapal di tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.373,69 miliar, turun Rp149,08 miliar atau 9,79% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1.522,76 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh...
- Pendapatan Operasi dari Pelayanan Jasa Terminal di tahun 2020 tercatat sebesar Rp991,75 miliar, turun Rp39,44 miliar atau 3,82% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1.031,19 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh...

In 2020, Operating Revenue was recorded at Rp9,320.31 billion, a decrease of Rp455.50 billion or 4.66% compared to 2019 of Rp9,775.81 billion. The decrease in Operating Revenue in 2020 came from all components, except for the components of Land, Building, Water and Electricity Services. This was due to the Covid-19 pandemic which caused a decrease in overall port activity in 2020. The realization of Operating Revenue in 2020 had a decreasing impact on the amount of Operating Revenue recorded by the Company in that year. The following is an explanation of each component of Operating Revenue in 2020:

- Operating Revenue from Container Services in 2020 was recorded at Rp5,536.73 billion, decreased by Rp192.51 billion or 3.36% compared to 2019 of Rp5,729.24 billion. It was caused by...
- Operating Revenue from Vessel Services in 2020 was recorded at Rp1,373.69 billion, a decrease of Rp149.08 billion or 9.79% compared to 2019 of Rp1,522.76 billion. It was caused by...
- Operating Revenue from Terminal Services in 2020 was recorded at Rp991.75 billion, decreased by Rp39.44 billion or 3.82% compared to 2019 of Rp1,031.19 billion. It was caused by...



- Pendapatan Operasi dari Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik di tahun 2020 tercatat sebesar Rp502,49 miliar, naik Rp35,00 miliar atau 7,49% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp467,49 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh...
- Pendapatan Operasi dari Pelayanan Jasa Barang di tahun 2020 tercatat sebesar Rp115,57 miliar, turun Rp790 juta atau 0,68% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp116,36 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh...
- Pendapatan Operasi Lain-lain di tahun 2020 tercatat sebesar Rp800,09 miliar, turun Rp108,68 miliar atau 11,96% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp908,77 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh...
- Operating Revenue from Land, Building, Water and Electricity Services in 2020 was recorded at Rp502.49 billion, an increase of Rp35.00 billion or 7.49% compared to 2019 of Rp467.49 billion. It was caused by...
- Operating Revenue from Cargo Service in 2020 was recorded at Rp115.57 billion, a decrease of Rp790 million or 0.68% compared to 2019 of Rp116.36 billion. It was caused by...
- Other Operating Revenue in 2020 was recorded at Rp800.09 billion, decreased by Rp108.68 billion or 11.96% compared to 2019 of Rp908.77 billion. It was caused by...

Pendapatan dan Beban Konstruksi

Pendapatan Konstruksi merupakan jasa kompensasi yang diakui oleh Perusahaan dalam pembangunan TPMG, APBS dan TMTL. Pendapatan Konstruksi dinilai dengan menggunakan metode biaya, yang mana seluruh biaya dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset.

Pada tahun 2020, Pendapatan Konstruksi tercatat sebesar Rp951,40 miliar, meningkat sebesar Rp80,05 miliar atau 9,19% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp871,36 miliar. Sejalan dengan kenaikan Pendapatan Konstruksi, Beban Konstruksi di tahun 2020 tercatat sebesar Rp951,40 miliar, naik Rp80,05 miliar atau 9,19% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp871,36 miliar. Perubahan Pendapatan dan Beban Konstruksi di tahun 2020 tiba memberikan dampak apapun dikarenakan jumlahnya netonya yang nihil pada tahun 2019 dan 2020.

Construction Revenues and Expenses

Construction Revenue is a compensation service recognized by the Company in the construction of TPMG, APBS and TMTL. Construction Revenue is valued using the cost method, in which all costs are directly attributable to the cost of assets.

In 2020, the Construction Revenues was recorded at Rp951.40 billion, an increase of Rp80.05 billion or 9.19% compared to 2019 of Rp871.36 billion. In line with the increase in Construction Revenues and Expenses in 2020 was recorded at Rp951.40 billion, an increase of Rp80.05 billion or 9.19% compared to 2019 of Rp871.36 billion. The changes in Construction Revenue and Expenses in 2020 had an impact due to the zero net amount in 2019 and 2020.



Beban Operasi

Operating Expenses

**Beban Operasi per 31 Desember 2019-2020 /
Operating Expenses as of December 31, 2019-2020**

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Umum / General	4.188.275	3.645.960	542.315	14,87%
Penyusutan dan Amortisasi / Depreciation and Amortization	1.377.483	1.294.492	82.991	6,41%
Kerja Sama Mitra Usaha / Partnership	767.651	1.572.143	(804.492)	-51,17%
Pemeliharaan / Maintenance	318.806	404.371	(85.564)	-21,16%
Asuransi / Insurance	183.191	93.376	89.815	96,19%
Administrasi Kantor / Office Administration	21.274	24.282	(3.008)	-12,39%
Jumlah / Total	6.856.681	7.034.624	(177.943)	-2,53%

Pada tahun 2020, Beban Operasi tercatat sebesar Rp6.856,68 miliar, turun sebesar Rp177,94 miliar atau 2,53% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp7.034,62 miliar. Penurunan Beban Operasi tersebut terutama berasal dari Beban Operasi Kerja Sama Mitra Usaha yang turun sebesar Rp804,49 miliar atau 51,17% yang merupakan beban pembagian pendapatan yang timbul dari perjanjian dengan mitra terseleksi seperti perusahaan-perusahaan operator fasilitas pelabuhan yang menyediakan kegiatan pelayanan jasa bongkar muat, pemindahan lapangan penumpukan dan *lift on* dan *lift off* di pelabuhan serta beban pegawai non organik.

Selain itu, Beban Operasi Pemeliharaan turut mencatatkan penurunan sebesar Rp85,56 miliar atau 21,16% dan diikuti dengan penurunan pada Beban Operasi Administrasi Kantor sebesar Rp3,01 miliar atau 12,39%. Penurunan Beban Operasi di tahun 2020 sejalan dengan berkurangnya Pendapatan Operasi sehingga memberikan dampak efisiensi biaya operasi untuk mendukung kinerja Laba Tahun Berjalan Perusahaan di tahun tersebut.

In 2020, Operating Expenses was recorded at Rp6,856.68 billion, decreased by Rp177.94 billion or 2.53% compared to 2019 which was Rp7,034.62 billion. The decrease in Operating Expenses mainly came from Operational Expenses from Partnership, which decreased by Rp.804.49 billion or 51.17%, which was a revenue sharing expense arising from agreements with selected partners, such as port facility operator companies that provide loading and unloading service activities, cargodoring and lift-on and lift-off facilities at ports as well as non-organic employee expenses.

In addition, Maintenance Operating Expenses also recorded a decrease of Rp85.56 billion or 21.16% and was followed by a decrease in Office Administration Operating Expenses by Rp3.01 billion or 12.39%. The decrease in Operating Expenses in 2020 was in line with the reduction in Operating Revenues, thus providing an impact on operating cost efficiency to support the Company's Profit for the Year during the year.

**Pendapatan (Beban) Operasi Lainnya- Neto****Other Operating Income (Expenses) - Net**

**Pendapatan (Beban) Operasi Lainnya - Neto per 31 Desember 2019-2020 /
Other Operating Income (Expenses) - Net as of December 31, 2019-2020**

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Laba (Rugi) Selisih Kurs -- Neto / Profit (Loss) of Foreign Exchange	(219.514)	506.719	(726.233)	-143,32%
Lain-lain -- Neto / Others – Net	69.432	(26.042)	95.474	-366,62%
Jumlah / Total	(150.082)	480.677	(630.759)	-131,22%

Pada tahun 2020, Beban Operasi Lainnya - Neto tercatat sebesar Rp150,08 miliar, sedangkan Perusahaan mencatatkan Pendapatan Operasi Lainnya – Neto di tahun 2019 sebesar Rp480,68 miliar. Pencatatan Beban Operasi Lainnya - Neto tersebut berasal dari pencatatan Rugi Selisih Kurs – Neto sebesar Rp219,51 miliar sehingga memberikan dampak pada realisasi pencatatan beban di tahun 2020.

Laba Usaha

Pada tahun 2020, Laba Usaha tercatat sebesar Rp2.313,55 miliar, turun sebesar Rp908,31 miliar atau 28,19% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp3.221,86 miliar. Penurunan Laba Usaha tersebut terutama berasal dari pencatatan Beban Operasi Lainnya – Neto dan penurunan Pendapatan Operasi. Penurunan Laba Usaha tersebut memberikan dampak pada berkurangnya jumlah Laba Tahun Berjalan di tahun 2020.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan

Pada tahun 2020, Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan tercatat sebesar Rp1.708,13 miliar, turun sebesar Rp886,49 miliar atau 34,17% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp2.594,62 miliar. Penurunan Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan tersebut terutama berasal dari beberapa faktor, antara lain penurunan Laba Usaha sebesar Rp908,31 miliar atau 28,19%, penurunan Pendapatan Keuangan sebesar Rp24,17 miliar atau 16,37% dan peningkatan Beban Keuangan sebesar Rp32,55 miliar atau 4,55%. Penurunan Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan tersebut memberikan dampak pada penurunan tingkat profitabilitas Perusahaan di tahun 2020.

In 2020, Other Operating Expenses – Net was recorded at Rp150.08 billion, while the Company recorded Other Operating Income – Net in 2019 amounting to Rp480.68 billion. The recording of Other Operating Expenses - Net came from the recording of Loss on Foreign Exchange - Net of Rp219.51 billion so that it had an impact on the realization of expenses recording in 2020.

Operating Income

In 2020, Operating Income was recorded at Rp2,313.55 billion, a decrease of Rp908.31 billion or 28.19% compared to 2019 of Rp3,221.86 billion. The decrease in Operating Income was mainly due to the recording of Other Operating Expenses – Net and a decrease in Operating Income. The decrease in Operating Income had an impact on the reduction in the amount of Profit for the Year in 2020.

Profit Before Corporate Income Tax

In 2020, Profit Before Corporate Income Tax was recorded at Rp1,708.13 billion, a decrease of Rp886.49 billion or 34.17% compared to 2019 of Rp2,594.62 billion. The decrease in Profit Before Corporate Income Tax mainly came from several factors, including a decrease in Operating Profit by Rp908.31 billion or 28.19%, a decrease in Financial Income by Rp24.17 billion or 16.37% and an increase in Finance Costs by Rp32.55 billion or 4.55%. The decrease in Profit Before Corporate Income Tax has an impact on the decline in the Company's profitability in 2020.



Laba Tahun Berjalan

Laba Tahun Berjalan tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.238,99 miliar, turun sebesar Rp890,02 miliar atau 41,80% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp2.129,01 miliar. Penurunan Laba Tahun Berjalan tersebut terutama berasal dari kekurangnya nilai Laba Usaha yang diiringi dengan penurunan Pendapatan Keuangan dan peningkatan Beban Keuangan. Penurunan Laba Tahun Berjalan tersebut memberikan dampak terhadap perubahan komposisi struktur modal Perusahaan, terutama pada komponen Saldo Laba.

Total Penghasilan Komprehensif Lain

Total Penghasilan Komprehensif Lain tahun 2020 tercatat sebesar minus Rp821,79 miliar, menurun sebesar Rp529,33 miliar atau 180,99% dibandingkan tahun 2019 sebesar minus Rp292,47 miliar. Penurunan Penghasilan Komprehensif Lain tersebut terutama berasal dari kerugian atas Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti yang tercatat sebesar Rp1.065,07 miliar di tahun 2020, naik Rp608,23 miliar atau 133,14% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp456,85 miliar. Selain itu, terjadi penurunan pada keuntungan yang didapatkan dari Perubahan Cadangan Aset Revaluasi sebesar Rp55,40 miliar atau 82,81% sehingga memberikan dampak pada berkurangnya Total Penghasilan Komprehensif Lain di tahun 2020. Penurunan Penghasilan Komprehensif Lain tersebut memberikan dampak pada berkurangnya nilai Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan 2020.

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan tahun 2020 tercatat sebesar Rp417,20 miliar, menurun sebesar Rp1.419,35 miliar atau 77,28% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1.836,55 miliar. Penurunan Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan tersebut terutama berasal dari berkurangnya nilai Laba Tahun Berjalan 2020 dan peningkatan kerugian atas Total Penghasilan Komprehensif Lain di tahun tersebut. Penurunan Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan tersebut memberikan dampak pada perubahan komposisi struktur modal Perusahaan yang bersifat sementara.

Income for the Year

Profit for the Year in 2020 was recorded at Rp1,238.99 billion, decreased by Rp890.02 billion or 41.80% compared to 2019 which was Rp2,129.01 billion. The decrease in Profit for the Year was mainly due to a decrease in the value of Operating Income accompanied by a decrease in Finance Income and an increase in Finance Costs. The decrease in Profit for the Year had an impact on changes in the composition of the Company's capital structure, especially in the Retained Earnings component.

Total Other Comprehensive Income

Total Other Comprehensive Income in 2020 was recorded at minus Rp821.79 billion, decreased by Rp529.33 billion or 180.99% compared to 2019 of minus Rp292.47 billion. The decrease in Other Comprehensive Income mainly came from losses on the Remeasurement of the Defined Benefit Plans which was recorded at Rp1,065.07 billion in 2020, an increase of Rp608.23 billion or 133.14% compared to 2019 of Rp456.85 billion. In addition, there was a decrease in the profit obtained from Changes in Assets Revaluation Reserves of Rp55.40 billion or 82.81% so that it had an impact on the reduction of Total Other Comprehensive Income in 2020. The decrease in Other Comprehensive Income had an impact on the reduced value of Total Comprehensive Income of the Year 2020.

Total Comprehensive Income for the Year

Total Comprehensive Profit for the Year in 2020 was recorded at Rp417.20 billion, a decrease of Rp1,419.35 billion or 77.28% compared to 2019 of Rp1,836.55 billion. The decrease in Total Comprehensive Income for the Year mainly came from the decrease in the value of Profit for the Year for the Year 2020 and an increase in the loss on Total Other Comprehensive Income for the year. The decrease in Total Comprehensive Profit for the Year had an impact on the temporary change in the composition of the Company's capital structure.

**Laporan Arus Kas Konsolidasian****Consolidated Statement of Cash Flows**

**Laporan Arus Kas Konsolidasian per 31 Desember 2019-2020 /
Consolidated Statement of Cash Flows as of December 31, 2019-2020**

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi / Net Cash Provided By Operating Activities	3.674.426	4.041.642	(367.216)	-9,09%
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi / Net Cash Used in Investing Activities	(1.937.139)	(3.181.706)	1.244.567	-39,12%
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan / Net Cash Used in Financing Activities	(1.531.979)	(1.710.475)	178.496	-10,44%
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas / Net Increase (Decrease) of Cash and Cash Equivalents	205.307	(850.539)	1.055.846	-124,14%
Dampak Perubahan Selisih Kurs Terhadap Kas dan Setara Kas / Effect of Exchange Rate Changes on Cash and Cash Equivalents	32.032	(116.897)	148.929	-127,40%
Entitas Anak yang Tidak Dikonsolidasi / Non-Consolidated Subsidiary	(25.624)	-	(25.624)	-
Kas dan Setara Kas Awal Tahun / Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	3.644.611	4.612.047	(967.436)	-20,98%
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun / Cash and Cash Equivalents at End of Year	3.856.327	3.644.611	211.716	5,81%

Nilai Kas dan Setara Kas pada akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp3.856,33 miliar, naik sebesar Rp211,72 miliar atau 5,81% dibandingkan dengan akhir tahun 2019 sebesar Rp3.644,61 miliar. Peningkatan Kas dan Setara Kas tersebut terutama berasal dari penurunan Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi sebesar Rp1.244,57 miliar atau 39,12% dan diiringi dengan penurunan Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan sebesar Rp178,50 miliar atau 10,44% sampai dengan akhir tahun 2020. Peningkatan Arus Kas di tahun 2020 memberikan dampak yang positif terhadap likuiditas Perusahaan.

The value of Cash and Cash Equivalents at the end of 2020 was recorded at Rp3,856.33 billion, an increase of Rp211.72 billion or 5.81% compared to the end of 2019 of Rp3,644.61 billion. The increase in Cash and Cash Equivalents mainly came from a decrease in Net Cash Used in Investing Activities by Rp1,244.57 billion or 39.12%, accompanied by a decrease in Net Cash Used in Financing Activities by Rp178.50 billion or 10.44% to by the end of 2020. The increase in Cash Flow in 2020 had a positive impact on the Company's liquidity.



Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Cash Flows from Operating Activities

**Arus Kas dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2019-2020 /
Cash Flows from Operating Activities as of December 31, 2019-2020**

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Penerimaan Kas dari Pelanggan dan Non Pelanggan / Cash Received from Customers and Non-Customers	9.390.775	10.355.596	(964.820)	-9,32%
Pembayaran kepada Kontraktor, Pemasok dan Lainnya / Payment to Contractors, Suppliers and Others	(3.385.309)	(4.388.247)	1.002.938	-22,86%
Pembayaran kepada Karyawan / Payment to Employees	(2.027.433)	(1.636.168)	(391.265)	23,91%
Pembayaran Pajak Penghasilan / Payment for Income Taxes	(427.055)	(437.156)	10.101	-2,31%
Penghasilan Bunga / Interest Received	123.447	147.618	(24.170)	-16,37%
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi / Net Cash From Operating Activities	3.674.426	4.041.642	(367.216)	-9,09%

Arus Kas dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp3.674,43 miliar, menurun sebesar Rp367,22 miliar atau 9,09% dibandingkan dengan akhir tahun 2019 sebesar Rp4.041,64 miliar. Penurunan Arus Kas dari Aktivitas Operasi tersebut terutama berasal dari berkurangnya Penerimaan Kas dari Pelanggan dan Non Pelanggan sebesar Rp964,82 miliar atau 9,32%. Selain itu, di tahun 2020 terjadi kenaikan Pembayaran kepada Karyawan sebesar Rp391,27 miliar atau 23,91% dan diikuti dengan Penghasilan Bunga yang tercatat turun sebesar Rp24,17 miliar atau 16,37%. Penurunan Arus Kas dari Aktivitas Operasi memberikan dampak yang tidak signifikan terhadap perubahan Arus Kas secara keseluruhan.

Cash Flows from Operating Activities as of December 31, 2020 was recorded at Rp3,674.43 billion, a decrease of Rp367.22 billion or 9.09% compared to the end of 2019 of Rp4,041.64 billion. The decrease in Cash Flows from Operating Activities was mainly due to a decrease in Cash Received from Customers and Non-Customers by Rp964.82 billion or 9.32%. In addition, in 2020 there was an increase in Payments to Employees by Rp391.27 billion or 23.91% and followed by Interest Received which was recorded to decrease by Rp24.17 billion or 16.37%. The decline in Cash Flows from Operating Activities had an insignificant impact on changes in overall Cash Flows.

**Arus Kas Untuk Aktivitas Investasi****Cash Flows Used in Investing Activities**

**Arus Kas untuk Aktivitas Investasi per 31 Desember 2019-2020 /
Cash Flows Used in Investing Activities as of December 31, 2019-2020**

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Penerimaan Dividen / Receipt of Dividend	9.827	9.649	178	1,84%
Perolehan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud / Acquisition of Fixed Assets and Intangible Assets	(1.942.123)	(2.576.818)	634.695	-24,63%
Penempatan Investasi Jangka Pendek / Placement of Short-Term Investments	24.940	29.980	(5.040)	-16,81%
Pemberian Pinjaman kepada Entitas Asosiasi / Associates Loans	(150.000)	-	(150.000)	-
Pengembalian Setoran Modal Pemegang Saham Pihak Minoritas / Return of Paid-Up Capital of a Minority Shareholder	(24.952)	-	(24.952)	-
Penerimaan atas Penjualan Aset Tetap / Proceed from Sales of Fixed Assets	2.670	4.009	(1.340)	-33,42%
Investasi pada Penyertaan Saham / Investment in Shares of Stock	142.500	(648.527)	791.027	-121,97%
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi / Net Cash Used in Investing Activities	(1.937.139)	(3.181.706)	1.244.567	-39,12%

Arus Kas untuk Aktivitas Investasi per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp1.937,14 miliar, menurun sebesar Rp1.244,57 miliar atau 39,12% dibandingkan dengan akhir tahun 2019 sebesar Rp3.181,71 miliar. Penurunan Arus Kas untuk Aktivitas Investasi tersebut terutama berasal dari pencatatan Investasi pada Penyertaan Saham sebesar Rp142,50 miliar dan diiringi dengan berkurangnya arus kas yang digunakan untuk Perolehan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud sebesar Rp634,70 miliar atau 24,63%. Penurunan Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan Arus Kas Perusahaan di tahun 2020.

Cash Flows Used in Investing Activities as of December 31, 2020 was recorded at Rp1,937.14 billion, a decrease of Rp1,244.57 billion or 39.12% compared to the end of 2019 of Rp3,181.71 billion. The decrease in Cash Flows Used in Investing Activities mainly came from the recording of Investment in Shares of Stock of Rp142.50 billion, accompanied by a decrease in cash flows used in Acquisition of Fixed Assets and Intangible Assets of Rp634.70 billion or 24.63%. The decrease in Net Cash Used in Investing Activities had a positive impact on increasing the Company's Cash Flows in 2020.

**Arus Kas Untuk Aktivitas Pendanaan****Cash Flows Used in Financing Activities**

**Arus Kas untuk Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2019-2020 /
Cash Flows Used in Financing Activities as of December 31, 2019-2020**

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019	Pertumbuhan / Growth	
			Nominal / Nominal	%
Penerimaan Pinjaman / Receipts of Loans	-	500.000	(500.000)	-100,00%
Pembayaran Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya / Payment of Bank Loans and Other Financial Institution	(172.635)	(853.296)	680.661	-79,77%
Pembayaran Beban Bunga / Payment of Interest	(747.499)	(761.086)	13.587	-1,79%
Pembayaran Utang Sewa Pembiayaan / Payment of Obligation Under Finance Lease	(71.885)	(62.813)	(9.072)	14,44%
Pembayaran Dividen / Payment of Dividend	(539.960)	(533.280)	(6.680)	1,25%
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan / Net Cash Used in Financing Activities	(1.531.979)	(1.710.475)	178.496	-10,44%

Arus Kas untuk Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp1.531,98 miliar, menurun sebesar Rp178,50 miliar atau 10,44% dibandingkan dengan akhir tahun 2019 sebesar Rp1.710,48 miliar. Penurunan Arus Kas untuk Aktivitas Pendanaan tersebut terutama berasal dari berkurangnya Pembayaran Pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya sebesar Rp680,66 miliar atau 79,77% yang memberikan dampak penambahan pada saldo Arus Kas di tahun 2020.

ANALISIS KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG, KOLEKTIBILITAS PIUTANG DAN RASIO KEUANGAN LAINNYA

Kemampuan membayar utang pada Pelindo III secara umum dapat ditinjau melalui laporan rasio keuangan Perusahaan. Laporan rasio keuangan Pelindo III tersaji melalui tabel berikut:

Cash Flows Used in Financing Activities as of December 31, 2020 was recorded at Rp1,531.98 billion, a decrease of Rp178.50 billion or 10.44% compared to the end of 2019 of Rp1,710.48 billion. The decrease in Cash Flows Used in Financing Activities mainly came from the decrease in Payment of Bank Loans and Other Financial Institutions by Rp680.66 billion or 79.77% which had an additional impact on the balance of Cash Flows in 2020.

ANALYSIS ON SOLVENCY, COLLECTABILITY AND OTHER FINANCIAL RATIOS

The solvency of Pelindo III in general can be reviewed through the Company's financial ratio. Pelindo III's financial ratio is presented through the following table:

**Rasio Keuangan Tahun 2019-2020 /
Financial Ratios in 2019-2020**

Uraian / Description	2020	2019
Rasio Laba terhadap Ekuitas (ROE) / Return on Equity (ROE)	11,22%	19,27%
Rasio Laba terhadap Aset (ROA) / Return on Assets (ROA)	3,85%	6,92%
Rasio Laba terhadap Investasi (ROI) / Return on Investment (ROI)
Rasio Laba terhadap Modal Kerja (ROCE) / Return on Capital Employed (ROCE)



Rasio Keuangan Tahun 2019-2020 /
Financial Ratios in 2019-2020

Uraian / Description	2020	2019
Margin Laba Bersih (NPM) / Net Profit Margin (NPM)	13,29%	21,78%
Rasio Lancar / Current Ratio	168,05%	165,61%
Rasio Cepat / Quick Ratio	165,29%	163,02%
Rasio Kas / Cash Ratio	117,13%	111,62%
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset / Debt to Assets Ratio	65,70%	64,08%
Rasio Liabilitas terhadap jumlah Ekuitas / Debts to Equity Ratio	191,58%	178,41%
Periode Pengumpulan Piutang (hari) / Collection Period (day)
Perputaran Persediaan (hari) / Inventory Turnover (day)
Rasio Perputaran Total Aset (TATO) / Total Asset Turn Over (TATO)
Rasio Ekuitas terhadap Aset / Equity to Assets Ratio	34,30%	35,92%
EBITDA (Rp1000)
EBITDA Margin / Margin EBITDA
Rasio Utang Neto terhadap EBITDA / Net Debt to EBITDA
Rasio Utang Bruto terhadap EBITDA / Gross Debt to EBITDA

RASIO RENTABILITAS

Kemampuan Perusahaan dalam mencetak laba dapat diukur dari besaran rasio rentabilitasnya. Rasio profitabilitas adalah perbandingan yang dihitung untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari pendapatan terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu.

Rasio laba terhadap ekuitas (ROE) tercatat sebesar 11,22%, lebih rendah dibandingkan tahun 2019 sebesar 19,27%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan ekuitas yang tersedia telah menurun di tahun 2020.

Rasio laba terhadap aset (ROA) tercatat sebesar 3,85%, lebih rendah dibandingkan tahun 2019 sebesar 6,92%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan aktiva yang tersedia telah menurun di tahun 2020.

Margin laba bersih (NPM) tercatat sebesar 13,29%, lebih rendah dibandingkan tahun 2019 sebesar 21,78%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Perusahaan untuk menghasilkan keuntungan terhadap pendapatan yang dihasilkan telah berkurang di tahun 2020.

RENTABILITY RATIO

The ability of the Company to make a profit can be measured from the amount of rentability ratio. A profitability ratio is a ratio calculated to determine a company's ability to make a profit from revenues related to sales, assets, and equity on the basis of certain measurements.

Return on Equity (ROE) was recorded at 11.22%, lower than 2019 at 19.27%. This showed that the Company's ability to generate profits using available equity has declined in 2020.

Return on Assets (ROA) was recorded at 3.85%, lower than 2019 at 6.92%. This showed that the Company's ability to generate profits using available assets has decreased in 2020.

Net Profit Margin (NPM) was recorded at 13.29%, lower than in 2019 of 21.78%. This showed that the Company's ability to generate profits against the revenues generated has decreased in 2020.



RASIO LIKUIDITAS

Dalam mengukur kemampuan Perusahaan untuk membayar utang usahanya, Perusahaan menggunakan rasio likuiditas yang terdiri dari rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Besaran rasio likuiditas dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya.

Pada tahun 2020, rasio lancar tercatat sebesar 168,05%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 sebesar 165,61%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang tersedia telah meningkat di tahun 2020.

Pada tahun 2020, rasio cepat tercatat sebesar 165,29%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 sebesar 163,02%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang lancarnya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki telah meningkat di tahun 2020 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020, rasio kas tercatat sebesar 117,13%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 sebesar 111,62%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan kas dan setara kas yang tersedia telah meningkat di tahun 2020.

RASIO SOLVABILITAS

Perusahaan juga memakai rasio solvabilitas untuk mengukur besarnya jumlah aset Perusahaan yang dibiayai oleh utang. Rasio solvabilitas yang dipakai Perusahaan adalah rasio liabilitas terhadap ekuitas (DER) dan rasio liabilitas terhadap jumlah aset (DAR).

Rasio Liabilitas terhadap jumlah Aset (DAR) di tahun 2020 tercatat sebesar 65,70%, naik dibandingkan tahun 2019 sebesar 64,08%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada jumlah aset Perusahaan yang dibiayai oleh utang di tahun 2020.

LIQUIDITY RATIO

In measuring the Company's solvency, the Company uses a liquidity ratio consisting of current ratio, quick ratio, and cash ratio. The liquidity ratio can be used to measure a company's ability to meet its obligations or pay its short-term debt.

In 2020, the current ratio was recorded at 168.05%, higher than in 2019 at 165.61%. This showed that the Company's capability in meeting its short-term obligation by using available current assets improved during this year.

In 2020, the quick ratio was recorded at 165.29%, higher than in 2019 at 163.02%. This showed that the Company's ability to meet its current obligations or debts by using its current assets has increased in 2020 compared to the previous year.

In 2020, the cash ratio was recorded at 117.13%, higher than in 2019 at 111.62%. This shows that the Company's ability to meet its short-term obligations using available cash and cash equivalents has increased in 2020.

SOLVENCY RATIO

The Company also uses solvency ratio to measure the amount of the Company's assets financed by debt. The solvency ratio used by the Company are Debt to Equity Ratio (DER) and Debt to Assets Ratio (DAR).

Debt to Assets Ratio (DAR) in 2020 was recorded at 65.70%, an increase compared to 2019 of 64.08%. This showed that there was an increase in the Company's total assets financed by debts in 2020.



Rasio Liabilitas terhadap jumlah Ekuitas (DER) di tahun 2020 tercatat sebesar 191,58%, naik dibandingkan tahun 2019 sebesar 178,41%. Hal tersebut menunjukkan bahwa komposisi struktur modal yang dibiayai oleh utang telah meningkat di tahun 2020.

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Tingkat kolektibilita piutang Perusahaan di tahun 2020 adalah ... hari dan kolektibilitas piutang usaha tahun 2019 adalah sebesar ... hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa ...

Sepanjang tahun 2020, Perusahaan menerapkan beberapa strategi untuk mengoptimalkan tingkat kolektibilitas piutang, antara lain: ...

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Debt to Equity Ratio (DER) in 2020 was recorded at 191.58%, an increase compared to 2019 of 178.41%. This showed that the composition of the capital structure financed by debts has increased in 2020.

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

The Company's receivables collectability rate in 2020 was ... days and its trade receivables collectability in 2019 was ... days. It showed that...

Throughout 2020, the Company implemented several strategies to optimize its receivables collectability, including: ...

CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

**Struktur Modal Tahun 2019 - 2020 /
Capital Structure in 2019-2020**

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020		2019		Perubahan / Growth	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Liabilitas / Liabilities	21.153.548	65,70%	19.709.051	64,08%	1.444.497	7,33%
Ekuitas / Equity	11.041.657	34,30%	11.046.864	35,92%	(5.207)	-0,05%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas / Total Liabilities and Equity	32.195.205	100,00%	30.755.915	100,00%	1.439.290	4,68%
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas / Liabilities to Equity Ratio	191,58%		178,41%			

STRUKTUR MODAL

Sampai dengan akhir tahun 2020, Struktur Modal Perusahaan terdiri dari 65,70% Liabilitas dan 64,08% Ekuitas. Komposisi tersebut mengalami perubahan dibandingkan Struktur Modal sampai dengan akhir tahun 2019 yang terdiri dari 64,08% Liabilitas dan 35,92% Ekuitas. Struktur Modal Perusahaan di tahun 2020 yang berupa Liabilitas meningkat, sedangkan komposisi Ekuitas pada Struktur Modal menurun di tahun 2020.

Secara keseluruhan, Struktur Modal Perusahaan di tahun 2020 telah/belum sesuai dengan kebijakan Manajemen atas Struktur Modal. Selain itu, Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas di tahun 2020 tercatat sebesar 191,58%, naik

STRUKTUR MODAL

As of the end of 2020, the Company's Capital Structure consisted of 65.70% Liabilities and 64.08% Equity. The composition has changed compared to the Capital Structure until the end of 2019, which consisted of 64.08% Liabilities and 35.92% Equity. The Company's Capital Structure in 2020 in the form of Liabilities increased, while the composition of Equity in the Capital Structure decreased during the year.

Overall, the Company's Capital Structure in 2020 was/was not in accordance with the Management's policy on Capital Structure. In addition, the Liabilities to Equity Ratio in 2020 was recorded at 191.58%, an increase compared



dibandingkan tahun 2019 sebesar 178,41%. Manajemen menilai bahwa Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas pada tahun 2019 dan 2020 telah sesuai dengan kebijakan atas Struktur Modal yang menentukan batas maksimum atas rasio tersebut sebesar ...%.

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Perusahaan mengelola risiko permodalan untuk memastikan Perusahaan mampu melanjutkan kelangsungan usaha sehingga memaksimalkan imbal hasil pada pemegang saham dan pemangku kepentingan serta memelihara optimalisasi saldo utang dan ekuitas.

Struktur permodalan Grup seluruhnya berasal dari ekuitas dan pinjaman bank, obligasi dan pemasok. Direksi Grup secara berkala melakukan reviu struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian reviu, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko terkait.

INFORMASI IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

...

INFORMASI REALISASI INVESTASI BARANG MODAL TAHUN 2020

JENIS DAN TUJUAN INVESTASI BARANG MODAL

Pelindo III melakukan investasi barang modal berupa bangunan fasilitas pelabuhan, kapal, alat-alat fasilitas pelabuhan, instalasi fasilitas pelabuhan, tanah, jalan dan bangunan, peralatan, alat transportasi, emplasemen, investasi penyertaan anak, serta aktiva tidak berwujud. Tujuan investasi tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas produksi, meningkatkan optimalisasi kuantitas dan kualitas hasil produksi, serta untuk keberlanjutan Perusahaan.

to 2019 of 178.41%. The management considered that the Liabilities to Equity Ratio in 2019 and 2020 was in accordance with the Capital Structure policy which determined the maximum limit for the ratio at ...%.

MANAGEMENT'S POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

The Company manages capital risk to ensure that the Company is able to continue its business to maximize returns to shareholders and stakeholders as well as maintain the optimization of debt and equity balances.

The Group's capital structure is entirely derived from equity and bank loans, bonds and suppliers. The Group's Board of Directors regularly reviews the Company's capital structure. As part of the review, the Board of Directors considers the cost of capital and related risks.

INFORMATION ON MATERIAL COMMITMENT FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT

INFORMATION ON REALIZATION OF CAPITAL GOODS INVESTMENT IN 2020

TYPES AND PURPOSE OF CAPITAL GOODS INVESTMENT

Pelindo III invests in capital goods in the form of port facility buildings, ships, port facility equipment, installation of port facilities, land, roads and buildings, equipment, transportation equipment, emplacements, investment in investment in subsidiaries, and intangible assets. The purpose of the investment is to increase the effectiveness of production, increase the optimization of the quantity and quality of production, as well as for the sustainability of the Company.

**NILAI INVESTASI BARANG MODAL****CAPITAL GOODS INVESTMENT VALUE****Investasi Barang Modal tahun 2020 /
Capital Goods Investment in 2020**

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	Nilai / Value
Bangunan Fasilitas Pelabuhan / Port Facility Buildings	1.167
Alat-alat Fasilitas Pelabuhan / Port Facility Equipment	1.582
Instalasi Fasilitas Pelabuhan / Port Facility Installation	5.709
Jalan dan Bangunan / Building and Roads	1.641
Peralatan / Equipment	7.197
Kendaraan / Vehicles	32
Sub Jumlah / Subtotal	17.328
Aset Dalam Penyelesaian / Construction In Progress	1.592.795
Jumlah / Total	1.610.123

Di tahun 2020, Perusahaan mencatatkan nilai Investasi Barang Modal sebesar Rp1.610,12 miliar berupa Bangunan Fasilitas Pelabuhan, Alat-alat Fasilitas Pelabuhan, Instalasi Fasilitas Pelabuhan, Jalan dan Bangunan, Peralatan dan Kendaraan senilai Rp17,33 miliar dan Investasi Barang Modal berupa Aset Dalam Penyelesaian sebesar Rp1.592,80 miliar

In 2020, the Company recorded a Capital Goods Investment of Rp1,610.12 billion in the form of Port Facility Buildings, Port Facility Equipment, Port Facility Installation, Buildings and Roads, Equipment and Vehicles worth Rp17.33 billion and Capital Goods Investments in Construction In Progress of Rp1,592.80 billion.

**INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG
TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN
AKUNTANSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. SK-80/MBU/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama dan Direktur Teknik PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), Pemegang Saham setuju untuk memberhentikan dengan hormat Sdr. U. Saefudin Noer sebagai Direktur Utama. Selanjutnya, mengangkat Sdr. Boy Robyanto sebagai Direktur Utama, Sdr. Kokok Susanto yang menggantikan sebagai Direktur Teknik, dan mengangkat Sd. Yon Irawan sebagai Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

**INFORMATION AND MATERIAL FACTS AFTER
BALANCE SHEET DATE**

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises in lieu of the Company's General Meeting of Shareholders No. SK-80/MBU/03/2021 dated March 15, 2021 concerning the Dismissal and Appointment of the President Director and Technical Director of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), the Shareholders agreed to honorably dismiss Mr. U.Saefudin Noer as President Director. Next, the Company appointed Mr. Boy Robyanto as President Director, Mr. Kokok Susanto who replaced as Technical Director, and Mr. Yon Irawan as Director of Business Transformation and Development of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).



Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 – Undang-Undang Cipta Kerja

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengundangkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya.

PP 35/2021 mengatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu (karyawan tidak tetap), alih daya, waktu kerja, waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja, yang dapat mempengaruhi manfaat imbalan minimum yang harus diberikan kepada karyawan.

Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian diotorisasi, Perusahaan masih mengevaluasi dampak potensial penerapan peraturan pelaksana PP 35/2021, termasuk dampaknya pada laporan keuangan konsolidasian Perusahaan untuk periode pelaporan selanjutnya.

Government Regulation No. 31 of 2021 – Job Creation Act

On February 2, 2021, the Government will promulgate and enforce Government Regulation No.35 of 2021 (PP 35/2021) to implement the provisions of Article 81 and Article 185 (b) of Law No. 11/2020 concerning Job Creation which aims to create the widest possible employment opportunities.

PP 35/2021 regulates employment agreements for a certain time (temporary employees), outsourcing, working time, rest periods and termination of employment, which may affect the minimum benefit benefits that must be provided to employees.

As of the authorization date of the consolidated financial statements, the Company is still evaluating the potential impact of implementing the implementing regulations of PP 35/2021, including the impact on the Company's consolidated financial statements for the next reporting period.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI TAHUN 2020

ASPEK KEUANGAN

COMPARISON OF TARGETS AND REALIZATION IN 2020

FINANCIAL ASPECT

**Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Tahun 2020 /
Comparison of Targets and Realization in 2020 Financial Performance**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian / Description	RKAP 2020	Realisasi 2020 / Realization in 2020	Pencapaian / Achievement (%)
Laporan Laba Rugi Konsolidasian / Statements of Consolidated Profit or Loss			
Pendapatan Usaha / Revenues	9.496.939	10.271.712	108,16%
Beban Usaha / Operating Expenses	(6.691.404)	(7.958.166)	118,93%
Laba (Rugi) Usaha / Operating Profit (Loss)	2.805.535	2.313.546	82,46%
Pendapatan dan Beban Diluar Usaha / Revenues and Expenses Outside of Operation	(1.366.417)	123.447	-9,03%
Bagian Laba Entitas Asosiasi / Equity in Income of Associates	73.425	57.267	77,99%
Beban Bunga Pinjaman / Loans Interest Expenses	(749.421)	(747.492)	99,74%
Laba Sebelum Pajak / Profit Before Tax	763.122	1.746.768	228,90%
PPh Badan / Corporate Income Tax	(153.006)	(507.778)	331,87%
Laba Tahun Berjalan / Profit for the Year	610.116	1.238.990	203,07%



**Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Tahun 2020 /
Comparison of Targets and Realization in 2020 Financial Performance**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian / Description	RKAP 2020	Realisasi 2020 / Realization in 2020	Pencapaian / Achievement (%)
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian / Statements of Consolidated Financial Position			
Aset / Assets	32.311.822	32.195.205	99,64%
Aset Lancar / Current Assets	5.192.101	5.532.616	106,56%
Aset Tidak Lancar / Non-Current Assets	27.119.721	26.662.589	98,31%
Liabilitas / Liabilities	20.630.279	21.153.548	102,54%
Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities	3.018.106	3.292.217	109,08%
Liabilitas Jangka Panjang / Non-Current Liabilities	17.612.173	17.861.332	101,41%
Ekuitas / Equity	11.681.543	11.041.657	94,52%
Laporan Arus Kas Konsolidasian / Statements of Consolidated Cash Flows			
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi / Net Cash From Operating Activities	3.613.796	3.674.426	101,68%
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi / Net Cash Used in Investing Activities	(3.001.850)	(1.937.139)	64,53%
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan / Net Cash From (Used in) Financing Activities	(955.054)	(1.531.979)	160,41%
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas / Net Increase (Decrease) of Cash and Cash Equivalents	(343.107)	205.307	-59,84%
Kas dan Setara Kas Awal Tahun / Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year	3.644.611	3.644.611	100,00%
Pengaruh Selisih Kurs -- Bersih / Effect of Exchange Rate – Net	288.794	32.032	11,09%
Entitas Anak yang Tidak Dikonsolidasi / Non-Consolidated Subsidiaries	-	(25.624)	-
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun / Cash and Cash Equivalents at End of Year	3.590.298	3.856.327	107,41%

Laporan Laba Rugi Konsolidasian

Laba Tahun Berjalan 2020 terealisasi sebesar Rp1.238,99 miliar atau mencapai 203,07% dari RKAP 2020 sebesar Rp610,12 miliar. Hal tersebut terutama disebabkan oleh:

1. Pendapatan

Pendapatan Usaha terealisasi sebesar Rp10.271,71 miliar atau mencapai 108,16% dari RKAP 2020 sebesar Rp9.496,94 miliar. Ketercapaian Pendapatan tersebut dikarenakan adanya kenaikan arus kapal dan barang dengan mulainya tren pemulihan perekonomian yang semakin membaik di kuartal III dan IV tahun 2020.

2. Beban Usaha

Beban Usaha terealisasi sebesar Rp7.958,17 miliar atau mencapai 118,93% dari RKAP 2020 sebesar Rp6.691,40 yang merupakan hasil dari program efisiensi biaya yang telah diterapkan Manajemen pada tahun 2020.

Statements of Consolidated Profit or Loss

Profit for the Year in 2020 was realized at Rp1,238.99 billion or 203.07% of the 2020 RKAP of Rp610.12 billion. This was mainly due to:

1. Revenues

The realized Revenues amounted to Rp10,271.71 billion or reached 108.16% of the 2020 RKAP of Rp9,496.94 billion. This revenue achievement was due to an increase in the flow of ships and goods with the start of the trend of improving economic recovery in the third and fourth quarters of 2020.

2. Operating Expenses:

The realized Operating Expenses amounted to Rp7,958.17 billion or 118.93% of the 2020 RKAP of Rp6,691.40 which was the result of the cost efficiency program implemented by the Management in 2020.



3. Beban Bunga Pinjaman

Beban Bunga Pinjaman terealisasi sebesar Rp747,49 miliar atau mencapai 99,74% dari RKAP 2020 sebesar Rp749,42 miliar yang merupakan pembayaran beban pinjaman ECA dan kupon atas *global bond*.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

- Jumlah Aset terealisasi sebesar Rp32.195,21 miliar atau mencapai 99,64% dari RKAP 2020 sebesar Rp32.311,82 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh....
- Jumlah Liabilitas terealisasi sebesar Rp21.153,55 miliar atau mencapai 102,54% dari RKAP 2020 sebesar Rp20.630,28 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh...
- Jumlah Ekuitas terealisasi sebesar Rp11.041,66 miliar atau mencapai 94,52% dari RKAP 2020 sebesar Rp11.681,54 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh...

Laporan Arus Kas Konsolidasian

Realisasi Arus Kas pada akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp3.856,33 miliar atau mencapai 107,41% dari RKAP 2020 sebesar Rp3.590,30 miliar. Secara garis besar kondisi kas Perusahaan tetap dapat dijaga dengan baik dimana aktivitas operasi masih dapat menghasilkan surplus.

ASPEK PRODUKSI

3. Loans Interest Expenses

Loans Interest Expenses was realized at Rp747.49 billion or reached 99.74% of the 2020 RKAP of Rp749.42 billion, which was the payment for ECA loan expenses and coupons for global bonds.

Statements of Consolidated Financial Position

- The realized Total Assets amounted to Rp32,195.21 billion or reached 99.64% of the 2020 RKAP of Rp32,311.82 billion. This was caused by....
- The realized Total Liabilities amounted to Rp21,153.55 billion or reached 102.54% of the 2020 RKAP of Rp20,630.28 billion. It was caused by....
- The realized Total Equity was Rp11,041.66 billion or 94.52% of the 2020 RKAP of Rp11,681.54 billion. It was caused by...

Statements of Consolidated Cash Flows

The realization of Cash Flows at the end of 2020 was recorded at Rp3,856.33 billion or reached 107.41% of the 2020 RKAP of Rp3,590.30 billion. In general, the Company's cash condition was maintained properly where operating activities could still generate a surplus.

PRODUCTION ASPECT

Perbandingan antara Target dan Realisasi Produksi Trafik Tahun 2020
Comparison between Target and Realization of Traffic Production in 2020

Uraian / Description	Satuan / Unit	RKAP 2020	Realisasi 2020 / Realization 2020	Pencapaian (%) / Achievement (%)
Arus Kapal / Ship Traffic	Unit	73.576	70.873	96,33%
	GT	291.310.976	284.050.723	97,51%
	Ton	68.736.059	65.239.293	94,91%
Arus Barang / Cargo Traffic	M ³	2.371.812	2.779.240	117,18%
	MMBTU	11.348.885	11.520.303	101,51%
Arus Petikemas / Container Traffic	Unit	351.618	444.904	126,53%
	Box	3.970.208	4.048.422	101,97%
Arus Penumpang / Passenger Traffic	TEUs	4.955.489	5.080.686	102,53%
	Orang / Person	1.274.035	1.607.916	126,21%
Arus Hewan / Animal Traffic	Ekor / Animal	80.030	101.683	127,06%



a. Arus Kapal

Arus Kapal terealisasi sebesar 70.873 unit atau 284.050.723 unit masing-masing mencapai 96,33% dan 97,51% dari RKAP 2020, hal tersebut dipengaruhi oleh belum pulihnya arus kapal barang yang mengangkut batubara dan kapal curah cair terutama di pelabuhan wilayah Kalimantan.

b. Arus Barang

- Arus Barang dalam satuan Ton terealisasi sebesar 65.239.293 ton atau mencapai 94,91% dari RKAP 2020. Hal tersebut disebabkan penurunan kegiatan ekspor maupun impor *general cargo* di Terminal Jamrud, turunnya realisasi kegiatan bongkar batubara di Terminal Curah Kering Pelabuhan Gresik, turunnya kegiatan impor komoditi raw sugar Soya Bean Meal di Pelabuhan Tanjung Emas, turunnya kegiatan impor *raw sugar* dan *gympsum* di Pelabuhan Tanjung Intan dan menurunnya kegiatan bongkar muat batubara dan jenis muatan turunan sawit di wilayah Kalimantan.
- Arus Barang dalam satuan M³ terealisasi sebesar 2.779.240 M³ atau mencapai 117,18% dari RKAP 2020. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh kenaikan kegiatan bongkar kayu *log* maupun *heavy cargo* di Pelabuhan Tanjung Emas dan Pelabuhan Jamrud.
- Arus Barang dalam satuan MMBTU terealisasi sebesar 11.520.303 MMBTU atau mencapai 101,51% dari RKAP 2020 dikarenakan perhitungan realisasi yang berdasarkan minimum *throughput* sebagaimana perjanjian berlaku.
- Arus Barang dalam satua Unit terealisasi sebesar 444.904 unit atau mencapai 126,53% dari RKAP 2020. Hal tersebut pengaruh oleh peningkatan pengiriman barang melalui Truk menggunakan Kapal Ro-Ro terutama rute wilayah timur.

c. Arus Petikemas

Arus Petikemas di tahun 2020 terealisasi sebesar 4.048.422 dalam satuan boks dan 5.080.686 dalam satuan TEUs masing-masing mencapai 101,97% dan 102,53% dari RKAP 2020. Hal tersebut dikarenakan mulai semester II tahun 2020 arus petikemas internasional dan domestik mengalami tren pemulihan akibat adanya pandemi Covid-19.

a. Ship Traffic

Ship Traffic was realised at 70,873 units or 284,050,723 units reaching 96.33% and 97.51% respectively of the 2020 RKAP, this was influenced by the declining traffic of cargo ship carrying coal and liquid bulk vessels, particularly in ports in Kalimantan.

b. Cargo Traffic

- Cargo Traffic in Ton was realised at 65,239,293 tons or 94.91% of the 2020 RKAP. This was due to a decrease in general cargo export and import activities at Jamrud Terminal, a decrease in the realisation of coal unloading activities at the Dry Bulk Terminal of Port of Gresik, and a decrease in import activities of Soya Bean Meal raw sugar at Port of Tanjung Emas, a decrease in imports of raw sugar and gympsum at the Port of Tanjung Intan and a decrease in loading and unloading activities for coal and other types of cargo derived from palm oil in the Kalimantan region.
- Cargo Traffic in M³ unit was realised at 2,779,240 M³ or reached 117.18% of the 2020 RKAP. This achievement was influenced by the increase in loading and unloading of logs and heavy cargo at Port of Tanjung Emas and Port of Jamrud.
- Cargo Traffic in MMBTU unit was realised at 11,520,303 MMBTU or reached 101.51% of the 2020 RKAP due to the realisation calculation that is based on the minimum throughput as stated in the applicable agreement.
- Cargo Traffic in one Unit was realised at 444,904 units or reached 126.53% of the 2020 RKAP. This was influenced by the increase in the shipment of goods via trucks using Ro-Ro ships, especially the eastern route.

c. Container Traffic

Container traffic in 2020 was realised at 4,048,422 in boxes and 5,080,686 in TEUs reaching 101.97% and 102.53% respectively of RKAP 2020. This was because starting in the second semester of 2020, international and domestic container traffic experienced a recovery trend due to the Covid-19 pandemic.



d. Arus Penumpang

Arus Penumpang di tahun 2020 terealisasi sebanyak 1.607.916 orang atau mencapai 126,21% dari RKAP 2020. Capaian arus penumpang dipengaruhi karena mulai pulihnya arus transportasi untuk kapal penumpang dalam negeri pada semester II tahun 2020 sejak adanya pelonggaran terhadap kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) namun belum ada kunjungan Kapal Cruise dan penumpang Luar Negeri sejak pandemi Covid-19 di bulan Maret 2020.

e. Arus Hewan

Arus Hewan sampai dengan tahun 2020 terealisasi sebanyak 101.683 ekor atau mencapai 127,06% dari RKAP 2020. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya kenaikan pengiriman impor sapi sejak mulai tren pemulihan perekonomian di akhir tahun 2020.

ASPEK INVESTASI

**Perbandingan antara Target dan Realisasi Investasi Tahun 2020 /
Comparison between Target and Realisation of Investment in 2020**

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian / Description	RKAP 2020	Realisasi 2020 / Realization 2020	Pencapaian (%) / Achievement (%)
Investasi / Investment	2.457.461	1.610.123	65,52%

Realisasi Investasi di tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.610,12 miliar atau mencapai 65,52% dari RKAP 2020 sebesar Rp2.457,46 miliar. Penyerapan terealisasi di bawah anggaran dikarenakan adanya skala prioritas penyesuaian terhadap rencana investasi sebagai antisipasi dampak penerimaan Cash Flow di masa pandemi Covid-19.

PROYEKSI TAHUN 2021

Menuju tahun 2021, Pelindo III telah menetapkan target finansial, produksi dan investasi yang diharapkan dapat tercapai di tahun yang akan datang seperti yang tertuang dalam RKAP 2021. Penetapan target tersebut dibuat berdasarkan berbagai asumsi makroekonomi sebagai berikut:

d. Passenger Traffic

Passenger Traffic in 2020 was realised at 1,607,916 people or reaching 126.21% of the 2020 RKAP. The achievement of passenger traffic was influenced by the improving transportation traffic for domestic passenger ships in the second semester of 2020 since the easing of the Large-Scale Social Restrictions policy (PSBB), yet there were no cruise ship visits and overseas passengers since the Covid-19 pandemic in March 2020.

e. Animal Traffic

Animal traffic up to 2020 was realised at 101,683 animals or reached 127.06% of the 2020 RKAP. This was influenced by an increase in cattle import shipping since the trend of economic recovery began at the end of 2020.

INVESTMENT ASPECT

Investment realisation in 2020 was recorded at Rp1,610.12 billion or 65.52% of the 2020 RKAP of Rp2,457.46 billion. The absorption was realised below the budget due to the priority scale of adjustments to the investment plan in anticipation of the impact of Cash Flow receipt during the Covid-19 pandemic.

PROJECTION FOR 2021

In preparing for 2021, Pelindo III has set financial, production and investment targets that are expected to be achieved in the coming year as stated in the 2021 RKAP. The target determination is based on various macroeconomic assumptions as follows:

**Tabel Asumsi Makroekonomi Tahun 2021 / Table of Macroeconomic Assumption in 2021**

(dalam jutaan Rupiah)

Indikator / Indicator	Asumsi Makroekonomi 2021 / Macroeconomic Assumptions in 2021
Pertumbuhan Ekonomi / Economic Growth	5,0%
Tingkat Inflasi / Inflation Rate	3,0%
Kurs Rupiah per USD / Rupiah Exchange Rate per USD	14.600
Tingkat Bunga SBN 10 Tahun / 10-Year Government Securities Interest Rates	7,29%
Harga Minyak Mentah / Crude Oil Prices	USD45/barel / USD45/barrel

Sumber / Source: APBN 2021

Berikut adalah target yang telah ditetapkan dalam RKAP 2021 yang meliputi Aspek Keuangan, Aspek Produksi dan Aspek Investasi yang ingin dicapai pada tahun yang akan datang.

The following are the targets that have been set in the 2021 RKAP which include the Financial Aspect, Production Aspect and Investment Aspect to be achieved in the upcoming year.

ASPEK KEUANGAN**FINANCIAL ASPECT****Proyeksi Kinerja Keuangan Tahun 2021 / Financial Performance Projection in 2021**

Uraian / Description	Proyeksi 2021 / 2021 Projection
Laporan Laba Rugi Konsolidasian / Consolidated Income Statements	
Pendapatan Usaha / Revenues	...
Beban Usaha / Operating Revenues	...
Laba (Rugi) Usaha / Operating Profit (Loss)	
Pendapatan dan Beban Diluar Usaha / Revenues and Expenses Outside of Operations	...
Bagian Laba Entitas Asosiasi / Income of Associates	...
Beban Bunga Pinjaman / Debt Interest Expenses	...
Laba Sebelum Pajak / Income Before Tax	...
PPh Badan / Corporate Income Tax	...
Laba Tahun Berjalan / Profit for the Year	...
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian / Consolidated Financial Position Statements	
Aset / Assets	
Aset Lancar / Current Assets	...
Aset Tidak Lancar / Non-Current Assets	...
Liabilitas / Liabilities	
Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities	...
Liabilitas Jangka Panjang / Non-Current Liabilities	...
Ekuitas / Equity	...
Laporan Arus Kas Konsolidasian / Consolidated Cash Flow Statements	
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi / Net Cash Provided By Operating Activities	...
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi / Net Cash Used for Investing Activities	...
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan / Net Cash Provided By (Used for) Financing Activities	...

**Proyeksi Kinerja Keuangan Tahun 2021 / Financial Performance Projection in 2021**

Uraian / Description	Proyeksi 2021 / 2021 Projection
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas / Net Increase (Decrease) of Cash and Cash Equivalent	
Kas dan Setara Kas Awal Tahun / Cash and Cash Equivalent at Beginning of Year	...
Pengaruh Selisih Kurs – Bersih / Effect of Exchange Rate Difference - Net	...
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun / Cash and Cash Equivalent at End of Year	...

ASPEK PRODUKSI**PRODUCTION ASPECT****Proyeksi Produksi Trafik Tahun 2021 / Projection of Traffic Production in 2021**

Uraian / Description	Satuan / Unit	Proyeksi 2021 / 2021 Projection
Arus Kapal / Ship Traffic	Unit	...
	GT	...
	Ton	...
Arus Barang / Cargo Traffic	M ³	...
	MMBTU	...
	Unit	...
Arus Petikemas / Container Traffic	Boks / Boxes	...
	TEUs	...
Arus Penumpang / Passenger Traffic	Orang / Person	...
Arus Hewan / Animal Traffic	Ekor / Animal	...

ASPEK INVESTASI**INVESTMENT ASPECT****Proyeksi Investasi Tahun 2021 / Investment Projection in 2021**

Uraian / Description	Proyeksi 2021 / 2021 Projection
Investasi / Investment	...

PROSPEK USAHA

Manajemen optimis bahwa prospek usaha Perusahaan masih terjaga dengan baik di masa yang akan datang. Analisa tersebut dibuat berdasarkan prospek pertumbuhan ekonomi global, nasional dan industri pelabuhan yang menunjukkan tren pemulihan di tahun 2021.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh *International Monetary Fund* (IMF), pertumbuhan ekonomi global di tahun 2021 diproyeksikan dapat mencapai level 5,5%. Pertumbuhan yang berada di zona positif tersebut juga diestimasikan dapat terealisasi pada kelompok negara

BUSINESS OUTLOOK

The management is optimistic that the Company's business prospects continue to remain good in the future. The analysis is based on the prospects of the growth of global, national, and port industry which show a recovery trend in 2021.

Based on data compiled by the International Monetary Fund (IMF), global economic growth in 2021 is projected to reach the level of 5.5%. This positive growth is also estimated to be realised in the developed and developing countries by 4.3% and 6.3% respectively in 2021. Along



maju dan berkembang masing-masing sebesar 4,3% dan 6,3% di tahun 2021. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, volume perdagangan dunia turut diproyeksikan menguat sebesar 8,1%, naik bila dibandingkan dengan kontraksi pertumbuhan di tahun 2020 sebesar minus 9,6%. Harga minyak bumi juga diproyeksikan meningkat ke level 21,2% di tahun 2020 setelah sempat mengalami penurunan harga di tahun 2020 sebesar minus 32,7%.

Proyeksi pertumbuhan yang cerah tersebut didasari oleh implementasi vaksinasi Covid-19 di berbagai negara serta didukung oleh keberlanjutan stimulus kebijakan fiskal dan moneter. Pertumbuhan ekonomi global terutama akan ditopang oleh China, Amerika Serikat (AS), negara Uni Eropa, Jepang, India dan ASEAN.

Sejalan dengan pulihnya perekonomian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga diharapkan dapat kembali ke zona positif pada tahun 2021. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2021 ditargetkan dapat mencapai kisaran 5% dengan tingkat inflasi terjaga pada kisaran $3\% \pm 1\%$.

Kebijakan fiskal yang ekspansi akan terus berlanjut di tahun 2021 sebagaimana tercermin dalam defisit APBN 2021 yang mencapai 5,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kebijakan APBN 2021 difokuskan pada belanja pada bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, dan teknologi informasi. Sementara itu, kesinambungan stimulus Pemerintah tetap terjaga melalui anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menjaga kesinambungan penanganan pandemi dan pascapandemi, menjaga daya beli masyarakat, serta pemulihuan dunia usaha.

Anggaran Belanja Negara tahun 2021 tercatat sebesar Rp2.750 triliun yang akan dialokasikan untuk Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.954,5 triliun dan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp795,5 triliun. Sedangkan jumlah Pendapatan Negara ditargetkan dapat mencapai Rp1.743,6 triliun yang berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.444,5 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp298,2 triliun dan Hibah sebesar Rp0,9 triliun.

with the increasing economic growth, the volume of world trade is also projected to strengthen by 8.1 %, up compared to the growth contraction in 2020 of minus 9.6%. Oil prices are also projected to increase to a level of 21.2% in 2020 after experiencing a price decline in 2020 of minus 32.7%.

This bright growth projection is based on the implementation of Covid-19 vaccinations in various countries and is supported by the continued fiscal and monetary policy stimulus. Global economic growth will be mainly supported by China, the United States (US), European Union countries, Japan, India and ASEAN.

In line with the recovery of global economy, Indonesia's economic growth is also expected to be on the positive trend in 2021. Based on the 2021 State Budget (APBN), national economic growth in 2021 is targeted to reach the range of 5% with inflation rate maintained at around $3\% \pm 1\%$.

Expansive fiscal policy will continue in 2021 as reflected on the 2021 State Budget deficit which reaches 5.7% of Gross Domestic Product (GDP). The 2021 APBN policy is focused on expenditure on education, health, social protection, infrastructure, food security, tourism, and information technology. Meanwhile, the continuity of the Government's stimulus is maintained through the National Economic Recovery Programme (PEN) budget to maintain the continuity of handling of the pandemic and post-pandemic, to maintain people's purchasing power, and to recover business world.

The 2021 State Expenditure Budget is recorded at Rp2,750 trillion, which will be allocated for Central Government Expenditures of Rp1,954.5 trillion and for Transfers to Regions and Village Funds of Rp795.5 trillion. Meanwhile, total State Revenue is targeted to reach Rp1,743.6 trillion, which comes from Tax Revenues of Rp1,444.5 trillion, Non-Tax State Revenues of Rp298.2 trillion and grants of Rp0.9 trillion.



BI telah mempersiapkan Kondisi Prasyarat dan 5 (lima) Respons Kebijakan. Kondisi Prasyarat yang telah ditentukan adalah Vaksinasi dan Disiplin Protokol Covid-19 yang didukung dengan 5 (lima) Respons Kebijakan, antara lain: Pembukaan Sektor Produktif dan Aman, Percepatan Stimulus Fiskal (realisasi anggaran), Peningkatan Kredit dari Sisi Permintaan dan Penawaran, Stimulus Moneter dan Kebijakan Makroprudensial, Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan, khususnya UMKM.

Prospek bisnis kepelabuhanannya khususnya di Pelindo III akan tumbuh semakin pesat. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang salah satunya Pemerintah Indonesia semakin memprioritaskan pemerataan ekonomi khususnya di wilayah Indonesia Timur di mana pelabuhan-pelabuhan di wilayah Pelindo III menjadi pintu gerbang bagi logistik di kawasan tersebut.

Salah satu program peningkatan konektivitas jalur laut yang diprioritaskan pemerintah adalah program Tol Laut yang pada prinsipnya adalah pelayaran secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke timur Indonesia untuk memperkuat jalur pelayaran dan logistik. Penyelenggaraan Tol Laut kian ditingkatkan dari tahun ke tahun agar dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat melalui penurunan biaya logistik dan menekan angka disparitas harga barang.

Untuk tahun 2021, Kemenhub dan Ditjen Perhubungan Laut (Hubla) menargetkan pembangunan 6 trayek baru sehingga menjadi 32 trayek secara keseluruhan yang akan melibatkan 106 pelabuhan. Tanjung Perak menjadi pelabuhan pangkal yang melayani trayek terbanyak. Selain itu, ada 15 trayek Tol Laut yang berawal dan berakhir di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di tahun 2021 dan disertai dengan komitmen pemerintah dalam memajukan industri pelabuhan, Manajemen yakin bahwa prospek usaha Perusahaan masih terjaga dengan baik.

BI has prepared Prerequisite Conditions and 5 (five) Policy Responses. Prerequisite conditions that have been determined are Vaccination and Discipline of the Covid-19 Protocol which are supported by 5 (five) Policy Responses, i.e.: Opening of Productive and Safe Sectors, Acceleration of Fiscal Stimulus (budget realisation), Increase of Credit in respect of Demand and Supply Factor, Monetary Stimulus and Macroprudential Policy, Digitalization of Economy and Finance, especially MSMEs.

Port business prospect, particularly in Pelindo III, will grow more rapidly. This is supported by several factors, one of which is the increasing priority of economic equity by the Indonesian Government, especially in the Eastern Indonesia region where ports in the Pelindo III region are the gateway for logistics in the region.

One of the programmes to increase sea route connectivity that is prioritized by the government is the Sea Toll programme, which essentially refers to routine and scheduled shipping from west to east Indonesia to strengthen shipping routes and logistics. The implementation of the Sea Toll Road is increasingly being improved from year to year so that the impact can be felt by the community through reduction of logistics costs and disparity in goods prices.

For 2021, the Ministry of Transportation and the Directorate General of Sea Transportation (Hubla) are targeting the construction of 6 new routes so that there are 32 routes in total which will involve 106 ports. Tanjung Perak is the base port that serves most of the routes. In addition, there are 15 sea highway routes that start and end in Surabaya, East Java.

In line with the improving economic activity in 2021 and accompanied by the government's commitment to advance the port industry, the Management believes that the Company's business prospects are still well maintained.



ASPEK PEMASARAN

STRATEGI PEMASARAN

Pelindo III menyadari bahwa pelanggan merupakan salah satu aset Perusahaan yang penting. Untuk itu, upaya perbaikan berkelanjutan dilakukan oleh Perusahaan untuk memenuhi keinginan pelanggan yang antara lain:

1. Kesiapan dan ketersediaan fasilitas pelabuhan yang andal;
2. Ketepatan waktu pelayanan, sistem informasi yang *real time*, dan tarif jasa pelabuhan yang kompetitif; dan
3. Berkualitas dalam memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan melebihi standar yang ditetapkan.

Terkait dengan strategi pemasaran, Pelindo III memiliki 3 pilihan strategi yang dapat diterapkan, yaitu:

1. **Market Penetration**

Strategi Perusahaan untuk meningkatkan pangsa pasar terhadap produk atau jasa pada pasar yang dimiliki selama ini melalui usaha-usaha pemasaran yang lebih agresif.

2. **Market Development**

Market Development adalah strategi Perusahaan dalam memperkenalkan produk barang atau jasa pada lingkungan pasar yang baru.

3. **Product Development**

Product Development adalah strategi Perusahaan untuk meningkatkan penjualan melalui pengembangan produk barang atau jasa yang sudah ada atau pengembangan produk-produk baru.

Di tahun 2020, Perusahaan telah menerapkan strategi pemasaran sebagai berikut:

1. Penyesuaian tarif pelayanan jasa kepelabuhan secara bertahap

Penyesuaian tarif pelayanan kapal & barang, Pas Pelabuhan, Pas Penumpang dan Tarif Non Kepelabuhan telah dilaksanakan sampai dengan konsultasi ke Menteri Perhubungan sesuai dengan Surat Direktur Utama No. PB.03.02/1/HOFC-2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Konsultansi Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa Barang di Lingkupan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Regional Banyuwangi Bali Nusa Tenggara Pelabuhan Maumere.

MARKETING ASPECT

MARKETING STRATEGY

The Company is aware that customers are one of its important assets. To that end, continuous improvement efforts are carried out by the Company to fulfil customers' interest, which includes:

1. Readiness and availability of reliable port facilities;
2. Timeliness of services, real-time information systems, and competitive port service rates; and
3. Quality services in terms of providing port services beyond the set standards.

In relation with marketing strategy, Pelindo III has three choices of strategy to be adopted in its business, namely:

1. **Market Penetration**

The Company's strategy to increase its market share of products or services in the existing market share through more aggressive marketing programmes.

2. **Market Development**

Market Development is a corporate strategy in introducing products or services to a new market environment.

3. **Product Development**

Product Development is a company strategy to increase sales through the development of existing products or services or the development of new products.

In 2020, the Company implemented the following marketing strategies:

1. Gradual adjustment of port service rates

The adjustment of tariffs for ship & goods services, Port Pass, Passenger Pass and Non-Port Tariffs has been carried out and consulted with the Minister of Transportation in accordance with Letter of President Director No. PB.03.02/1/HOFC-2020 dated 10 January 2020 regarding Consultancy on Adjustment of Tariffs for Goods Services in the Scope of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) for Banyuwangi Bali Nusa Tenggara Region of Port of Maumere.



2. Optimalisasi kinerja pemasaran

Pembuatan Sarana Promosi untuk dukungan publikasi service/jasa yang ditawarkan telah dilaksanakan hingga tahap penyusunan usulan Konsep Sarana Promosi sedangkan implementasinya ditunda karena adanya efisiensi anggaran akibat pandemi Covid-19.

2. Optimisation of marketing performance

The creation of Promotional Facilities to support the publication of services offered has been carried out up to the stage of preparing the Promotional Facilities Concept proposal, whereas its implementation is postponed due to budget efficiency on the back of the Covid-19 pandemic.

PANGSA PASAR

Pangsa pasar Pelindo III dibedakan berdasarkan komoditasnya, yaitu yaitu peti kemas, curah kering, curah cair, dan *general cargo*. Pada laporan ini Perusahaan melaporkan gambaran pangsa pasar Perusahaan dalam bentuk persentase. Perhitungan persentase tersebut didapat dari perbandingan jumlah produksi bongkar muat barang dengan arus operasional yang melalui dermaga.

MARKET SHARE

Market share of the Company is distinguished based on its commodities, namely containers, dry bulk, liquid bulk, and general cargo. In this report, the Company reports the description of the Company's market share in percentage. The percentage is calculated from the ratio of the total production of loading and unloading of goods to operational traffic at the wharf.

Perbandingan Pangsa Pasar Berdasarkan Komoditas Tahun 2018-2020
Comparison of Market Share by Commodity in 2018-2020

Jenis Cargo / Cargo Type	2018	2019	2020
Peti Kemas / Container	98,43%	99,57%	...
Curah Kering / Dry Bulk	77,00%	75,33%	...
Curah Cair / Liquid Bulk	90,00%	90,26%	...
<i>General Cargo</i>	25,01%*	20,88%	...
<i>Bag Cargo</i>	-	0,56%	...

* Pada tahun 2018, pelaporan General Cargo dan Bag Cargo dijadikan dalam satu tipe kargo, yaitu General Cargo. / In 2018, the reporting of General Cargo and Bag Cargo was made into one type of cargo, namely General Cargo

Untuk komoditas peti kemas, persentase pangsa pasar yang tercatat oleh Perusahaan di tahun 2020 adalah sebesar ...%, naik/turun dibandingkan tahun 2019 sebesar ...%. Untuk komoditas curah kering, penguasaan pangsa pasar yang diperoleh Perusahaan di tahun 2020 mengalami peningkatan/penurunan menjadi ...%. Untuk komoditas curah cair, pangsa pasar yang diperoleh Perusahaan di tahun 2020 adalah sebesar ...%, meningkat/menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar ...%. Penguasaan pangsa pasar Perusahaan untuk *general cargo* dan *bag cargo* di tahun 2020 masing-masing tercatat sebesar ...% dan ...%, naik/turun dibandingkan tahun 2019.

For container commodities, the percentage of market share recorded by the Company in 2020 was ...%, up/down compared to 2019 of ...%. For dry bulk commodity, the market share gained by the Company in 2020 increased/decreased to ...%. For liquid bulk commodity, the market share gained by the Company in 2020 was ...%, an increase/decrease compared to 2019 of ...%. The Company's market share domination for general cargo and bag cargo in 2020 was recorded at ...% and ...%, respectively, up/down compared to 2019.

**KEBIJAKAN DAN PEMBAGIAN DIVIDEN****DIVIDEND POLICY AND DISTRIBUTION**

Pembagian Dividen Tahun Buku 2018 dan 2019
Dividend Distribution of 2018 and 2019 Fiscal Year

Uraian / Description	Tahun Buku 2019 / 2019 Fiscal Year	Tahun Buku 2018 / 2018 Fiscal Year
Laba Bersih Tahun Berjalan Konsolidasian (Rp) / Consolidated Net Income for the Year (Rp)	2.096.571.306	759.639.040
Dividen Kas yang Dibagikan (Rp) / Cash Dividend Distributed (Rp)	524.815.825	227.891.712
Jumlah Saham Beredar (lembar) / Outstanding Shares (share)	1.018.953	1.018.953
Dividen per Lembar Saham (Rp) / Dividend per Share (Rp)	515	224
Rasio Pembagian Dividen Terhadap Laba Bersih / Ratio of Dividend Distribution to Net Profit	25,03%	30,00%
Tanggal Pengumuman / Date of Announcement	15 Juli 2020	29 April 2019 / 29 April 2019
Tanggal Pembayaran / Date of Payment	4 Agustus, 4 September, 5 Oktober, dan 5 November 2020 / 15 July 2020, 4 August, 4 September, 5 October, and 5 November 2020	29 Mei 2019 / 29 May 2019

Tahun Buku 2019

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 Perusahaan No. 6 tanggal 15 Juli 2020 dari Notaris Fessy Farizqoh Alwi, SH., M.KN telah ditetapkan penggunaan laba bersih konsolidasian tahun buku 2019 sebesar Rp2.096.571.306 sebagai berikut:

- Sebesar 25,03% dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau Rp524.815.825 ditetapkan sebagai dividen.
- Sebesar 74,97% dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp1.571.755.480 ditetapkan sebagai cadangan.

Tahun Buku 2018

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 Perusahaan No. 29 tanggal 29 April 2019 dari Notaris Emy Susilowati, SH., telah ditetapkan penggunaan laba bersih konsolidasian tahun buku 2018 sebesar Rp759.639.040 sebagai berikut:

- Sebesar 30% dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau Rp227.891.712 ditetapkan sebagai dividen.

2019 Fiscal Year

Based on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) on Approval of the Company's 2019 Fiscal Year Annual Report No. 6 dated 15 July 2020 from Fessy Farizqoh Alwi, SH., M.KN, Notary, the use of consolidated net income for the 2019 fiscal year of Rp2,096,571,306 has been determined as follows:

- 25.03% of net profit attributable to owners of parent entity or Rp524,815,825 is determined as dividend.
- 74.97% of net profit attributable to owners of parent entity amounting to Rp1,571,755,480 is determined as reserves.

2018 Fiscal Year

Based on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) on Approval of the Company's 2018 Fiscal Year Annual Report No. 29 April 2019 from Emy Susilowati, SH., Notary, the use of consolidated net income for the 2018 fiscal year of Rp759,639,040 has been determined as follows:

- 30% of net profit attributable to owners of parent entity or Rp227,891,712 is determined as dividends.



- b. Sebesar 70% dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp531.747.328 ditetapkan sebagai cadangan.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

Sesuai dengan karakteristik Pelindo III yang dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah, maka tidak ada program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen (ESOP/MSOP) di Perusahaan. Dengan demikian, Perusahaan tidak menyajikan informasi yang terkait program tersebut seperti jumlah saham ESOP/MSOP, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak dan harga exercise.

REALISASI DANA HASIL PENAWARAN UMUM

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU DENGAN PIHAK AFILIASI/BERELASI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7 mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi." Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- (1) Orang atau anggota keluarga terdekatnya dikatakan memiliki relasi dengan perusahaan jika orang tersebut:
- (i) memiliki pengendalian ataupun pengendalian bersama terhadap perusahaan,
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan, atau
 - (iii) merupakan personil manajemen kunci dari perusahaan ataupun entitas induk.

(2) Sedangkan suatu entitas dikatakan memiliki relasi dengan perusahaan jika memenuhi salah satu dari hal berikut ini:

- (i) entitas tersebut dan perusahaan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama, merupakan entitas asosiasi atau ventura bersama dari perusahaan (atau entitas asosiasi atau ventura

- b. 70% of net profit attributable to owners of parent entity amounting to Rp531,747,328 is determined as reserve.

EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP AND/OR MANAGEMENT PROGRAMME (ESOP/MSOP)

Since the Company is originally and fully owned by the Government, there is no employee and/or management stock ownership (ESOP/MSOP) programme in the Company. Thus, the Company does not provide information related to the programme, such as the number of shares of ESOP/MSOP, the term, the conditions of the eligible employee and/or management and exercise price.

REALISATION OF USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTION CONTAINING CONFLICT OF INTEREST AND/OR TRANSACTION WITH AFFILIATED PARTIES

In carrying out its business activities, the Company conducts transactions with related parties as defined in PSAK No. 7 regarding "Related Party Disclosures." A related party is a person or entity that is related to the reporting entity:

- (1) The person or immediate family member has a relationship with the reporting entity if the person:
- (i) having joint control or control over the reporting entity;
 - (ii) having significant influence over the reporting entity, or
 - (iii) is key management personnel of the reporting entity or parent entity of the reporting entity.

(2) One entity is related to the reporting entity if it meets one of the following:

- (i) the reporting entity and entity are members of the same business group, an entity is an associate or joint venture of another entity (or an associate or joint venture entity that is a member of a business



bersama tersebut merupakan anggota suatu kelompok usaha di mana perusahaan adalah anggota dari kelompok usaha tersebut),

- (ii) entitas tersebut dan perusahaan adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama,
- (iii) satu entitas yang merupakan ventura bersama dari perusahaan dan entitas lain yang merupakan entitas asosiasi dari Perusahaan,
- (iv) merupakan suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari perusahaan atau entitas yang terkait dengan perusahaan. Jika Perusahaan adalah penyelenggara program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan Perusahaan,
- (v) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (i) di atas,
- (vi) orang yang diidentifikasi dalam angka (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau personil manajemen kunci dari entitas tersebut (atau entitas induk dari entitas).
- (vii) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Nama Pihak, Sifat Hubungan dan Jenis Transaksi, serta Nilai Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Entitas dianggap berelasi jika entitas tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mengendalikan atau mengendalikan bersama, atau memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasional. Entitas juga dianggap berelasi jika entitas tersebut sepengendalian dengan Perusahaan.

Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham Perusahaan. Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta entitas di mana Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan merupakan pihak berelasi.

group, of which the other entity is a member),

- (ii) both entities are joint ventures of the same third party,
- (iii) an entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity,
- (iv) the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of one of the reporting entities or entities associated with the reporting entity. If the Entity is a provider of the programme, then the sponsor entity is also related to the Entity,
- (v) entities controlled or jointly controlled by persons identified in letter (a); or
- (vi) persons identified in (a) have significant influence over the entity or key management personnel of the entity (or parent entity of the entity).
- (vii) An entity or member of a group in which the entity is a part of that group provides the services of key management personnel to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Name of Party, Nature of Relationship and Type of Transaction, and Value of Transaction with Related Parties

In the normal course of business, the Company conducts transactions with related parties. An entity is considered related if the entity, either directly or indirectly, can control or jointly control, or has significant influence over the Company in making financial and operational decisions. Entities are also considered related if they are under common control with the Company.

The Government of the Republic of Indonesia is the shareholder of the Company. All entities owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia and entities over which the Government of the Republic of Indonesia have significant influence are related parties.



Berikut adalah penjelasan mengenai pihak, sifat hubungan dan jenis transaksi dengan pihak Berelasi sampai dengan 31 Desember 2020:

The following is a description of the parties, nature of relationship and type of transactions with related parties as of 31 December 2020:

**Pihak, Sifat Hubungan dan Jenis Transaksi dengan Pihak Berelasi Tahun 2020 /
Party, Nature of Relationship and Type of Transaction with Related Parties in 2020**

Nama Pihak Berelasi / Name of Related Parties	Sifat Hubungan Berelasi / Nature of Relationship	Jenis Transaksi / Type of Transaction
Negara Republik Indonesia	Pemegang Saham / Shareholders	Jasa Konsesi / Concession Services
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / Government- Related Entity	Jasa Perbankan dan Pinjaman / Banking services and Loans
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk		
PT Bank Syariah Mandiri		
PT Bank BNI Syariah		
PT Pertamina Trans Kontinental (Persero) Tbk	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / Government- Related Entity	Penjualan Jasa dan Kegiatan Operasional / Sales and Operational Activities
Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / Government- Related Entity	Pinjaman Dana dan Biaya Penggerakan / Loan Funds and Dredging Costs
PT Pertamina (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / Government- Related Entity	Penjualan Jasa dan Kegiatan Operasional / Sales and Operational Activities
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / Government- Related Entity	Penjualan Jasa dan Kegiatan Operasional / Sales and Operational Activities
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk		
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero) Tbk		
PT Adhi Karya (Persero) Tbk		
PT Virama Karya (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / Government- Related Entity	Jasa Pembangunan / Construction Services
PT Hutama Karya (Persero)		
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk		
PT Nindya Karya (Persero)		
PT Brantas Abipraya (Persero)		
PT Penggerakan Indonesia (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / Government- Related Entity	Pinjaman Dana dan Biaya Penggerakan / Loan Funds and Dredging Costs
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)		
PT Bahtera Adhiguna		
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / Government- Related Entity	Penjualan Jasa / Sales
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)		
PT Petrokimia Gresik		
PT Perikanan Nusantara (Persero)		
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)		



Pihak, Sifat Hubungan dan Jenis Transaksi dengan Pihak Berelasi Tahun 2020 /
Party, Nature of Relationship and Type of Transaction with Related Parties in 2020

Nama Pihak Berelasi / Name of Related Parties	Sifat Hubungan Berelasi / Nature of Relationship	Jenis Transaksi / Type of Transaction
PT Indonesia Power (Persero)		
PT Perkebunan Nusantara XII	Entitas Berelasi dengan Pemerintah / Government-Related Entity	
BPJS Kesehatan		Penjualan Jasa / Sales
PT Pembangkit Jawa Bali (PJB)		
PT Krakatau Engineering		
PT Portek Indonesia		Jasa Pemeliharaan Alat Fasilitas Pelabuhan / Port Facilities Equipment Maintenance Service
PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera		Investasi Saham dan Pemberian Pinjaman Dana / Investment in Stock and Lending Fund
PT Ambang Barito Nusapersada		Pemberian Pinjaman Dana / Provision of Loans
PT Jasa Marga Bali Tol	Entitas Asosiasi / Associates	Investasi Saham dan Pemberian Pinjaman Dana / Investment in Stock and Lending Fund
PT Terminal Nilam Utara		Investasi Saham dan Sewa Lahan / Investment in Stock and Land Lease
PT Energi Manyar Sejahtera		Investasi Saham / Lending Fund
PT Terminal Petikemas Indonesia		Investasi Saham / Lending Fund
PT Pelindo Husada Citra		Investasi Saham, Jasa Kesehatan / Lending Fund, Healthcare Services
Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia	Memiliki Manajemen Kunci yang Sama / Have the Same Key Management	Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat / Handling Services



Rincian realisasi nilai transaksi dengan pihak Berelasi sampai dengan akhir tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

a. Kas dan Setara Kas

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Details of realisation of transaction values with Related Parties up to the end of 2020 and 2019 are as follows:

a. Cash and Cash Equivalent

Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalent	31 Desember / 31 December	
	2020	2019
Bank		
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	272.493	145.244
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	236.290	214.719
PT Bank Syariah Mandiri	3.918	188
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.253	24.022
PT Bank Tabungan Negara Tbk	264	1.006
Jumlah / Total	515.218	385.179
% Terhadap Aset / % to Assets	1,60%	1,25%
Dolar AS / US Dollar		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	43.364	1.869
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.749	37
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.175	1.873
Jumlah / Total	51.288	3.780
% Terhadap Aset / % to Assets	0,16%	0,01%
Deposito		
Rupiah		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	143.070	222.250
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	361.800	94.200
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	111.695	150.500
PT Bank BNI Syariah	10.000	20.000
PT Bank Syariah Mandiri	10.000	10.000
PT Bank Tabungan Negara Tbk	3.000	34.000
Jumlah / Total	639.565	530.950
% Terhadap Aset / % to Assets	1,99%	1,73%
Dolar AS / US Dollar		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.002.910	1.398.600
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	169.260	797.523
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10.579	24.327
Jumlah / Total	2.182.749	2.220.450
% Terhadap Aset / % to Assets	6,78%	7,22%



b. Piutang Usaha

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Piutang Usaha / Trade Receivables	31 Desember / 31 December	
	2020	2019
PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB)	81.055	91.145
PT Pertamina (Persero)	80.141	44.933
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	75.702	86.568
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	43.476	43.611
PT Petrokimia Gresik	31.724	35.996
PT Pertamina Trans Kontinental (Persero)	30.316	45
Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS)	-	39.971
PT Bahtera Adhiguna	10.865	11.163
PT Perikanan Nusantara (Persero)	8.105	9.374
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	7.818	9.315
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp5 miliar)	75.289	96.670
Sub Jumlah / Sub Total	444.490	468.791
Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai / Less: Allowance for Value Impairment	(240.454)	(159.836)
Jumlah / Total	204.036	308.956
% Terhadap Aset / % to Assets	0,63%	1,00%

c. Piutang Lain-lain

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Piutang Lain-lain / Other Receivables	31 Desember / 31 December	
	2020	2019
PT BKMS	241.873	227.363
Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut / Ministry of Transportation Directorate of Sea Transportation	52.268	52.268
PT Pengerkuan Indonesia (Persero)	18.671	26.577
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp5 miliar) / Others (each below Rp5 billion)	31.843	61.505
Sub Jumlah / Sub Total	344.654	367.713
Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai / Less: Allowance for Value Impairment	(73.345)	(97.815)
Jumlah / Total	271.309	269.898
% Terhadap Aset / % to Assets	0,84%	0,88%

b. Trade Receivables



d. Pendapatan Masih akan Diterima

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

d. Accrued Revenues

Piutang Lain-lain / Accrued Revenues	31 Desember / 31 December	
	2020	2019
BPJS Kesehatan	-	40.299
PT Pertamina (Persero)	5.944	4.269
PT Indonesia Power	2.477	1.779
PT Perkebunan Nusantara XII	2.393	1.719
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar) / Others (each below Rp1 billion)	40.047	28.762
Jumlah / Total	50.862	76.828
% Terhadap Aset / % to Assets	0,16%	0,25%

e. Utang Usaha

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

e. Trade Payables

Utang Usaha / Trade Payables	31 Desember / 31 December	
	2020	2019
Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) / Employee Cooperative of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	12.091	17.512
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	3.863	7.085
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	3.122	3.178
Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut / Ministry of Transportation Directorate of Sea Transportation	-	15.206
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp3 miliar) / Others (each below Rp3 billion)	18.587	18.733
Jumlah / Total	37.663	61.715
% Terhadap Liabilitas / % to Liabilities	0,18%	0,31%

Transaksi Utang Usaha dengan pihak berelasi merupakan utang sewa kendaraan operasional, utang pemakaian listrik, utang jasa pengklasifikasian kapal niaga yang dimiliki oleh Perusahaan.

Accounts Payable transactions with related parties represent debt for vehicle rent, debt for electricity use, debt for the classification of commercial vessels owned by the Company.

f. Utang Lain-lain

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

f. Other Payables

Utang Lain-lain / Other Payables	31 Desember / 31 December	
	2020	2019
PT Pelindo Husada Citra	93.757	-
PT Hutama Karya (Persero)	91.432	-
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	78.298	-
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	76.999	170.169
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	72.025	14.637
PT Krakatau Engineering - Amarta Karya (Persero)	62.067	-
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	27.237	63.429
PT Nindya Karya (Persero)	17.794	79.575



(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

Utang Lain-lain / Other Payables	31 Desember / 31 December	
	2020	2019
PT Brantas Abipraya (Persero)	16.187	40.884
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp5 miliar) / Others (each below Rp5 billion)	20.098	16.924
Jumlah / Total	555.892	385.618
% Terhadap Liabilitas / % to Liabilities	2,63%	1,96%

Transaksi Utang Lain-lain dengan pihak berelasi merupakan utang terkait pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Perusahaan.

Other Payables Transactions with related parties represent debt related to construction work carried out by the Company.

g. Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Pendek

(dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah)

g. Short-Term Unearned Revenues

Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Pendek / Short-Term Unearned Revenues	31 Desember / 31 December	
	2020	2019
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	30.242	1.054
PT Pertamina (Persero)	16.115	18.926
PT Bahtera Adhiguna (Persero)	2.171	467
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2 miliar)	10.638	19.712
Jumlah / Total	59.167	40.159
% Terhadap Liabilitas / % to Liabilities	0,28%	0,20%

h. Remunerasi Personel Manajemen Kunci

Total gaji dan imbalan kerja jangka pendek lainnya yang dibayar dan diajukan untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebesar Rp29.481.119 ribu dan Rp27.611.659 ribu masing-masing untuk tahun 2020 dan 2019.

h. Key Management Personnel Remuneration

Total salary and other short-term benefits paid and accrued for the Company's Board of Commissioners and Directors amounted to Rp29,481,119 thousand and Rp27,611,659 thousand for 2020 and 2019, respectively.

Kebijakan Mekanisme Review atas Transaksi dan Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Perusahaan memiliki kebijakan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak berelasi. Transaksi material diputuskan oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan pemenuhan peraturan dan ketentuan yang terkait, yaitu PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi" dalam laporan keuangan Perusahaan tahun 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*) dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

Policy on Review Mechanism for Transactions and Compliance with Relevant Rules and Conditions

The Company has a policy regarding transactions that contain conflicts of interest and/or transactions with related parties. Material transactions are decided by the Board of Commissioners and the Audit Committee based on prudence principles by taking into account compliance with relevant regulations and provisions, namely PSAK 7 concerning "Related Party Disclosures" in the Company's 2020 financial statements which have been audited by Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*) with fair opinion in all material respects.

During 2020, there were no violations of regulations



Selama tahun 2020, tidak terdapat pelanggaran atas peraturan terkait dengan transaksi dengan pihak berelasi, serta tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Kewajaran dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan Perusahaan pada tahun 2020 dilakukan secara wajar (*arm's length*) dan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum. Dewan Komisaris dan Komite Audit memiliki peran yang proaktif dalam memastikan transaksi-transaksi yang dilakukan Perusahaan dengan pihak berelasi/afiliasi merupakan transaksi yang wajar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajaran dengan pihak berelasi atau mengandung benturan kepentingan seluruhnya dilakukan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku atas dasar alasan kebutuhan usaha Perusahaan dan bebas dari konflik kepentingan.

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi/afiliasi dilakukan Perusahaan dilakukan dengan tujuan pengembangan usaha.

INFORMASI MATERIAL TERKAIT INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI DAN RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

...

PEMBAYARAN PAJAK

Perusahaan berkomitmen dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak melalui pembayaran pajak yang tepat waktu. Berikut adalah rincian pembayaran pajak yang dibayarkan oleh Perusahaan kepada negara sepanjang tahun 2020.

Pembayaran Pajak Tahun 2019-2020 Tax Payment in 2019-2020

(dalam satuan Rupiah / in million Rupiah)

Uraian / Description	2020	2019
Jumlah / Total		

related to transactions with related parties, and there were no transactions containing conflicts of interest.

Fairness and Reasons of the Transaction

All transactions with related parties conducted by the Company in 2020 were carried out in an arm's length basis and in accordance with generally accepted business practices. The Board of Commissioners and the Audit Committee have a proactive role in ensuring that transactions conducted by the Company with related/affiliated parties are fair transactions and in accordance with applicable regulations.

Fairness with related parties or transaction containing conflicts of interest is entirely carried out fairly in accordance with the applicable Financial Accounting Standards (SAK) on the basis of reasons for the Company's business needs and free from conflicts of interest.

All transactions with related/affiliated parties are carried out by the Company for the purpose of business development.

MATERIAL INFORMATION RELATED TO INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, BUSINESS MERGER/CONSOLIDATION, ACQUISITION AND DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

...

PAYMENT OF TAXES

The company is committed to carrying out its rights and obligations as a taxpayer through timely tax payments. The following is a breakdown of tax payments paid by the Company to the country throughout 2020.



Di tahun 2020, Perusahaan melakukan pembayaran pajak sebesar Rp... miliar, naik/turun Rp... miliar atau ...% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp... miliar. Di tahun 2019 dan 2020, Perusahaan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya.

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG BERSIFAT LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

...

PERUBAHAN PERATURAN YANG SIGNIFIKAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN

Perubahan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2020 Changes in Laws and Regulations in 2020

Nama Peraturan / Regulation	Perihal / Subject	Dampak terhadap Perusahaan / Impact on the Company

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Perusahaan melakukan penerapan pertama kali atas seluruh standar baru dan revisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2020, termasuk standar baru berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Perusahaan:

- **PSAK 71: Instrumen Keuangan**

PSAK 71: menggantikan PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, yang menggabungkan ketiga aspek akuntansi untuk instrumen keuangan: klasifikasi dan pengukuran; penurunan nilai; dan akuntansi lindung nilai.

Penilaian model bisnis dan apakah aset keuangan memenuhi persyaratan pembayaran pokok dan Bunga ("SPPB") dilakukan pada tanggal 1 Januari 2020.

In 2020, the Company made tax payments of Rp... billion, an increase/decrease of Rp... billion or ...% compared to 2019 of Rp... billion. In 2019 and 2020, the Company paid all of its tax obligations.

FINANCIAL INFORMATION CONTAINING EXTRAORDINARY AND RARE EVENTS

...

SIGNIFICANT CHANGES IN REGULATION AND THEIR IMPACT ON THE COMPANY

Perubahan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2020 Changes in Laws and Regulations in 2020

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

The Company implements for the first time all new and revised standards that are effective for the period starting on 1 January 2020, including the following new standards that affect the Company's consolidated financial statements:

- **PSAK 71: Financial Instruments**

PSAK 71 replaces PSAK 55: Financial Instruments: Recognition and Measurement for annual periods beginning on or after 1 January 2020, bringing together all three aspects of the accounting for financial instruments: classification and measurement; impairment; and hedge accounting.

The assessment of the business model and whether the financial assets meet solely payments for principal and interests ("SPPI") requirements was made as of 1 January 2020.



Dampak terhadap klasifikasi aset keuangan Perusahaan pada pos-pos dalam laporan keuangan konsolidasian atas penerapan pertama kali PSAK 71 adalah sebagai berikut:

dalam ribuan Rupiah / in thousand Rupiah

PSAK 55	PSAK 71		
	Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("NWLR") / Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")	Biaya Perolehan Diamortisasi / Amortised Cost	Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain ("NWPKL") / Fair Value Through Other Comprehensive Income ("FVOCI")
Pinjaman yang Diberikan dan Piutang / Loans and receivables:			
Piutang Usaha / Trade Receivables	-	823.074.780	-
Piutang Lain-lain / Other Receivables	-	310.675.212	-
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya / Other Non-Current Financial Assets	-	588.377.362	-

PSAK 71 mengharuskan Perusahaan untuk mencatat kerugian kredit ekspektasian ("KKE") pada semua aset keuangannya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau NWPKL dan jaminan keuangan. Kelompok usaha sebelumnya mencatat penurunan nilai berdasarkan model kerugian yang terjadi ketika terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Setelah penerapan PSAK 71, Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan menggunakan matriks pencadangan dengan menyertakan informasi masa depan (*forward looking information*) yang relevan untuk menilai KKE atas semua piutang usaha dan piutang lain-lain yang tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan.

- **PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan**
PSAK 72 menggantikan PSAK 34: Kontrak Konstruksi, PSAK 44: Akuntansi Aktivitas Pengembangan *Real Estate*, PSAK 23: Pendapatan dan Interpretasi terkait dan berlaku, dengan pengecualian terbatas, untuk semua pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggannya.

The impact to classification of the Group's financial assets in the consolidated financial statements line items upon the first time adoption of the PSAK 71 are as follows:

PSAK 71 requires the Group to record expected credit losses ("ECL") on all of its financial assets measured at amortised cost or FVOCI and financial guarantees. The Group previously recorded impairment based on the incurred loss model when there is objective evidence that financial asset is impaired.

Upon adoption of PSAK 71, the Group applies the simplified approach using provision matrix with relevant forward-looking information to assess the ECL on trade and other receivables which do not have significant financing component.

- **PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers**
PSAK 72 supersedes PSAK 34: Construction Contracts, PSAK 44: Accounting for Real Estate Development Activity, PSAK 23: Revenue and related Interpretations and it applies, with limited exceptions, to all revenue arising from contracts with its customers.



PSAK 72 menetapkan model lima langkah untuk memperhitungkan pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Berdasarkan PSAK 72, pendapatan diakui pada jumlah yang mencerminkan imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran dengan barang atau jasa yang diserahkan kepada pelanggan.

PSAK 72 mengharuskan Perusahaan untuk melakukan pertimbangan, dengan menyertakan semua fakta dan keadaan yang relevan ketika menerapkan setiap langkah dari model pada kontrak dengan pelanggan mereka. Selain itu, standar ini mensyaratkan pengungkapan yang luas atas pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.

Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan atas penerapan PSAK 72 terhadap laporan keuangan konsolidasian.

- **PSAK 73: Sewa**

PSAK 73 menggantikan PSAK 30: Sewa, ISAK 8: Penentuan apakah suatu Perjanjian mengandung suatu Sewa, ISAK 23: Sewa Operasi-Insentif dan ISAK 24: Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Bentuk Legal Sewa. Standar tersebut menetapkan prinsip-prinsip untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sewa dan mengharuskan penyewa untuk mengakui sebagian besar sewa pada laporan posisi keuangan.

Akuntansi pesewa berdasarkan PSAK 73 secara substansial tidak berubah dari PSAK 30. Pesewa akan tetap menetapkan klasifikasi sewa sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan dengan menggunakan prinsip yang sama seperti dalam PSAK 30. Oleh karena itu, PSAK 73 tidak berdampak pada pengaturan sewa dimana Perusahaan adalah pesewa.

Perusahaan menerapkan PSAK 73 menggunakan cara praktis pada awal menerapkan standar pada tanggal penerapan awal, 1 Januari 2020.

PSAK 72 establishes a five-step model to account for revenue arising from contracts with customers. Under PSAK 72, revenue is recognised at an amount that reflects the consideration which an entity expects to be entitled in exchange for transferring goods or services to a customer.

PSAK 72 requires the Group to exercise judgement, taking into consideration all of the relevant facts and circumstances when applying each step of the model to contracts with their customers. In addition, the standard requires extensive disclosures about revenue from contracts with customers.

The Group believes that apart from there is no significant effect of the adoption of PSAK 72 to the consolidated financial statements.

- **PSAK 73: Leases**

PSAK 73 supersedes PSAK 30: Leases, ISAK 8: Determining whether an Arrangement contains a Lease, ISAK 23: Operating Leases-Incentives and ISAK 24: Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease. The standard sets out the principles for the recognition, measurement, presentation and disclosure of leases and requires lessees to recognise most leases on the statement of financial position.

Lessor accounting under PSAK 73 is substantially unchanged from PSAK 30. Lessors will continue to classify leases as either operating or finance leases using similar principles as in PSAK 30. Therefore, PSAK 73 did not have an impact for leases where the Group is the lessor.

The Group adopted PSAK 73 using practical method of initially applying the standard at the date of initial application, January 1, 2020.



Perubahan dalam definisi sewa terutama terkait dengan konsep kendali. PSAK 73 menentukan apakah suatu kontrak mengandung sewa berdasarkan apakah pelanggan (penyewa) memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi untuk periode waktu tertentu. Perusahaan juga menggunakan cara praktis yang tersedia dalam aturan transisi untuk menerapkan tingkat diskonto tunggal pada portofolio sewa dengan karakteristik yang serupa.

Pada penerapan PSAK 73, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa sebesar Rp107.597.259 untuk sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Saat mengukur liabilitas sewa, Perusahaan mendiskontokan pembayaran sewa masa depan menggunakan suku bunga fasilitas pinjaman inkremental pada tanggal dimulainya sewa yang telah ditentukan sebesar 7,14%-9,87%.

Standar berikut ini juga berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020, tetapi tidak mempengaruhi pelaporan keuangan konsolidasian Perusahaan:

- ISAK 36: Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa
- ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba
- Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan – Judul Laporan Keuangan
- Amandemen PSAK 1 dan PSAK 25: Definisi Material
- Amandemen PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama – Kepentingan Jangka Panjang
- Amandemen PSAK 50, PSAK 66 dan PSAK 71: Reformasi Acuan Suku Bunga (Tahap 1)
- Amandemen PSAK 62: Kontrak Asuransi – Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62
- Amandemen PSAK 73: Sewa – Konsesi Sewa Terkait Covid-19.

The change in definition of a lease mainly relates to the concept of control. PSAK 73 determines whether a contract contains a lease on the basis of whether the customer (lessee) has the right to control the use of an identified asset for a period of time. The Group also made use of the practical expedient available on transition rule to apply a single discount rate to a portfolio of leases with reasonably similar characteristics.

On the adoption of PSAK 73, the Group recognised right-of-use assets and lease liabilities of Rp107,597,259 for its leases previously classified as operating leases.

When measuring lease liabilities, the Group discounted the future lease payments using its incremental loan facility borrowing rate at the lease commencement date which was determined to be 7.14% - 9.87%.

The following standards were also effective for the period beginning on January 1, 2020, but did not affect the consolidated financial reporting of the Group:

- ISAK 36: Interpretation of the Interaction between Provisions regarding Land Rights, in PSAK 16: Fixed Assets and PSAK 73: Leases
- ISAK 35: Presentation of Financial Statements for Non-Profit Oriented Entities.
- Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial Statements - the title of financial statements.
- Amendments to PSAK 1 and 25: Definition of Material
- Amendments to PSAK 15: Investments in Associates and Joint Ventures - Long-term Interests
- Amendments to PSAK 50, PSAK 66 and PSAK 71: Interest Rate Benchmark Reform (Phase 1).
- Amendments to PSAK 62: Insurance Contract - Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62.
- Amendments to PSAK 73: Lease - Covid-19 Related Rent Concessions.



INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha dan Assessment Manajemen atas Hal-hal yang Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan di tahun Buku 2020

Sampai dengan akhir tahun 2020, Perusahaan tidak memiliki hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usahanya. Perusahaan telah menjalankan inisiatif strategis Manajemen dengan menerapkan manajemen risiko yang terjaga dalam mengambil keputusan. Manajemen secara berkala melakukan assessment terkait hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usahanya. Berdasarkan hasil assessment tersebut, Manajemen berkeyakinan bahwa Perusahaan tidak memiliki hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usahanya.

Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan Assessment

Asumsi yang digunakan Manajemen atas kekuatan kelangsungan usaha dibuat berdasarkan analisis SWOT yang merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Berikut adalah uraian mengenai analisis SWOT Perusahaan tahun 2020.

...

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

...

RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN
Sebagai salah satu entitas bisnis di sektor kepelabuhanan, PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola 43 terminal yang tersebar di 7 (tujuh) provinsi di Indonesia. Peningkatan aktivitas ekonomi di era globalisasi membawa tantangan besar dalam pengelolaan pelabuhan di masa depan. Agar daya saing perusahaan tetap kuat, salah satu pengembangan yang dilakukan adalah dengan melakukan inovasi dan sinergi usaha sebagai upaya efisiensi untuk menekan biaya logistik nasional.

INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY

Matters with Potential Significant Effects on Business Continuity and Management's Assessment on Matters with Significant Effects on the Company's Business Continuity in 2020 Fiscal Year

As of the end of 2020, the Company does not have matters that have the potential to significantly affect its business continuity. The Company has carried out Management's strategic initiatives by implementing controlled risk management in making decisions. The Management periodically conducts assessments related to matters that have a significant impact on the continuity of its business. Based on the assessment results, the Management believes that the Company does not have matters that have a significant effect on its business continuity.

Assumptions Used by the Management in Conducting Assessment

The assumptions used by the Management on the strength of business continuity is prepared based on a SWOT analysis which is a strategic planning technique that is useful for evaluating strengths, weaknesses, opportunities and threats. The following is a description of the Company's SWOT analysis in 2020.

.....

COMPANY HEALTH LEVEL

...

COMPANY LONG TERM PLAN

As a business entity in the port sector, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) or Pelindo III has a great responsibility in managing 43 terminals spread over 7 (seven) provinces in Indonesia. The increase in economic activity in the globalisation era brings great challenges to port management in the future. To maintain the Company's strong competitiveness, one of the developments carried out is by innovating and synergising business as an efficiency effort to reduce national logistics costs.



Arah pengembangan perusahaan secara umum merupakan tujuan yang hendak dicapai sebagai hasil dari aktivitas usaha secara totalitas dan berkesinambungan dengan berlandaskan pada kebijakan makro nasional, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kecenderungan lingkungan bisnis yang ada. Guna mendukung terlaksana dan terwujudnya misi dan visi perusahaan, maka arah pengembangan perusahaan untuk 5 tahun ke depan ditujukan untuk:

1. Mewujudkan daya saing perusahaan yang kuat melalui inovasi dan sinergi usaha dalam rangka efisiensi untuk menekan biaya logistik nasional;
2. Mengedepankan digitalisasi dan otomatisasi dalam mengintegrasikan sistem sebagai standarisasi proses bisnis kepelabuhanan dalam meningkatkan layanan kepada pengguna jasa;
3. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan perusahaan untuk mewujudkan profesionalisme kerja; dan
4. Menerapkan budaya kerja yang sehat, meningkatkan kepedulian dan wawasan terhadap lingkungan hidup dan mengedepankan sosial masyarakat dengan berperan aktif dalam pembinaan kepada koperasi, usaha kecil dan menengah sehingga memantapkan peran dan citra perusahaan sebagai pelaku pembangunan nasional.

Dalam rangka memberikan gambaran strategi perusahaan ke depan, perlu diketahui terlebih dahulu posisi perusahaan Pelindo III saat ini. Berdasarkan analisis posisi perusahaan diperoleh hasil bahwa strategi indikatif yang bisa dilakukan Pelindo III pada tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Integrasi dengan pelanggan dan pesaing melalui sinergi BUMN;
2. Pengembangan layanan logistik terintegrasi;
3. Penetrasi pasar khususnya di layanan non-peti kemas;
4. Peningkatan daya saing khususnya di layanan petikemas untuk mempertahankan posisi *market leader*;
5. Diversifikasi produk layanan kepelabuhanan dengan layanan related-business. Khususnya untuk SBU Sektor Alat Apung dan Energi;
6. Pengembangan pasar untuk layanan SDM dan kesehatan;

Overall, direction of the company's development is the goal to be achieved as a result of total and sustainable business activities based on national macro policies, prevailing laws and regulations and taking into account the trends of the existing business environment. In order to support the implementation and realisation of the company's mission and vision, the company's development direction for the next 5 years is aimed at:

1. Realising strong company competitiveness through innovation and business synergy to create efficiency to reduce national logistics costs;
2. Prioritising digitalisation and automation in integrating systems as a standardisation of port business processes in improving services to service users;
3. Upholding Good Corporate Governance (GCG) principles in company management to realise work professionalism; and
4. Implementing a healthy work culture, increasing awareness and insight into the environment and promoting social community by playing an active role in fostering cooperatives, small and medium enterprises so as to strengthen the role and image of the company as a national development actor.

In order to provide an overview of the company's strategy going forward, it is necessary to identify current position of Pelindo III. Based on the analysis of the company's position, the results show that the indicative strategies that can be carried out by Pelindo III in 2020-2024 are as follows:

1. Integration with customers and competitors through SOE synergy;
2. Development of integrated logistics services;
3. Market penetration, especially in non-container services;
4. Increase in competitiveness, particularly in container services to maintain market leader position;
5. Diversification of port service products with business-related services. Particularly for SBUs in the Floating Device and Energy Sector;
6. Market development for HC and healthcare services;

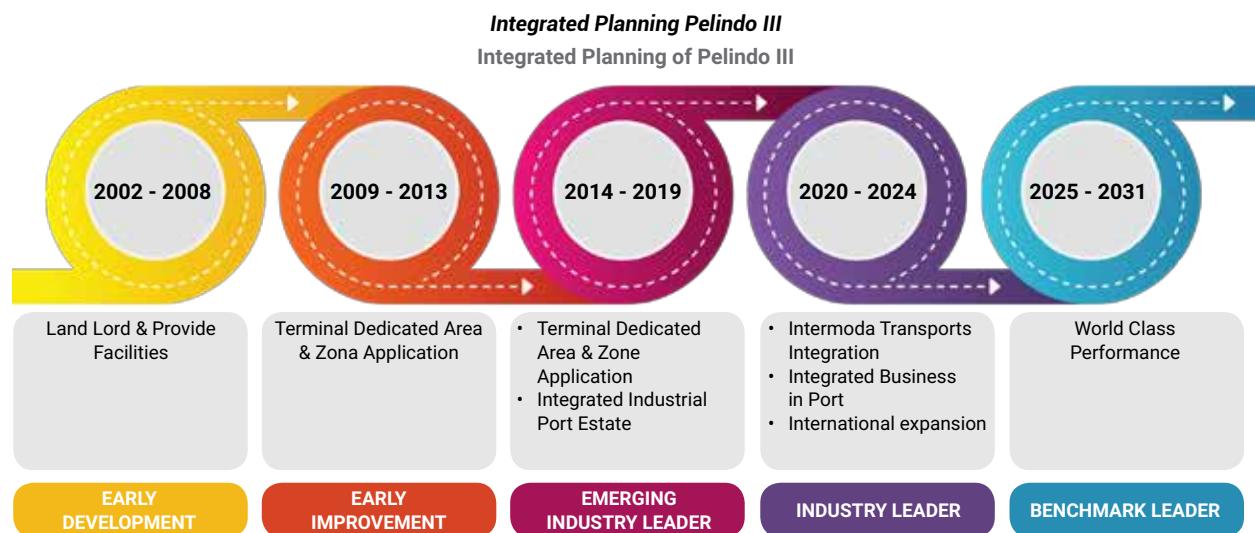


7. Pengembangan produk dan penetrasi pasar untuk layanan properti; dan
8. Pengembangan pasar sebagai penyedia layanan kepelabuhanan di luar wilayah Pelindo III.

Untuk menuju tujuan akhir yaitu pelabuhan sebagai *World Class Performance*, telah disusun *Masterplan Pengembangan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)* yang berorientasi kepada konsep integrated planning menuju *operational and excellence service*. Penyusunan Masterplan Pengembangan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) mengadopsi *Malcolm Baldrige* yang disesuaikan dengan bisnis di lingkungan Pelindo III. Dengan prioritas perusahaan pada tahun 2020-2024 sebagai "*Industry Leader*", pencapaian perusahaan sebagai *World Class Performance* akan dilakukan secara bertahap sesuai *Master plan pengembangan* yang telah disusun sebagai berikut:

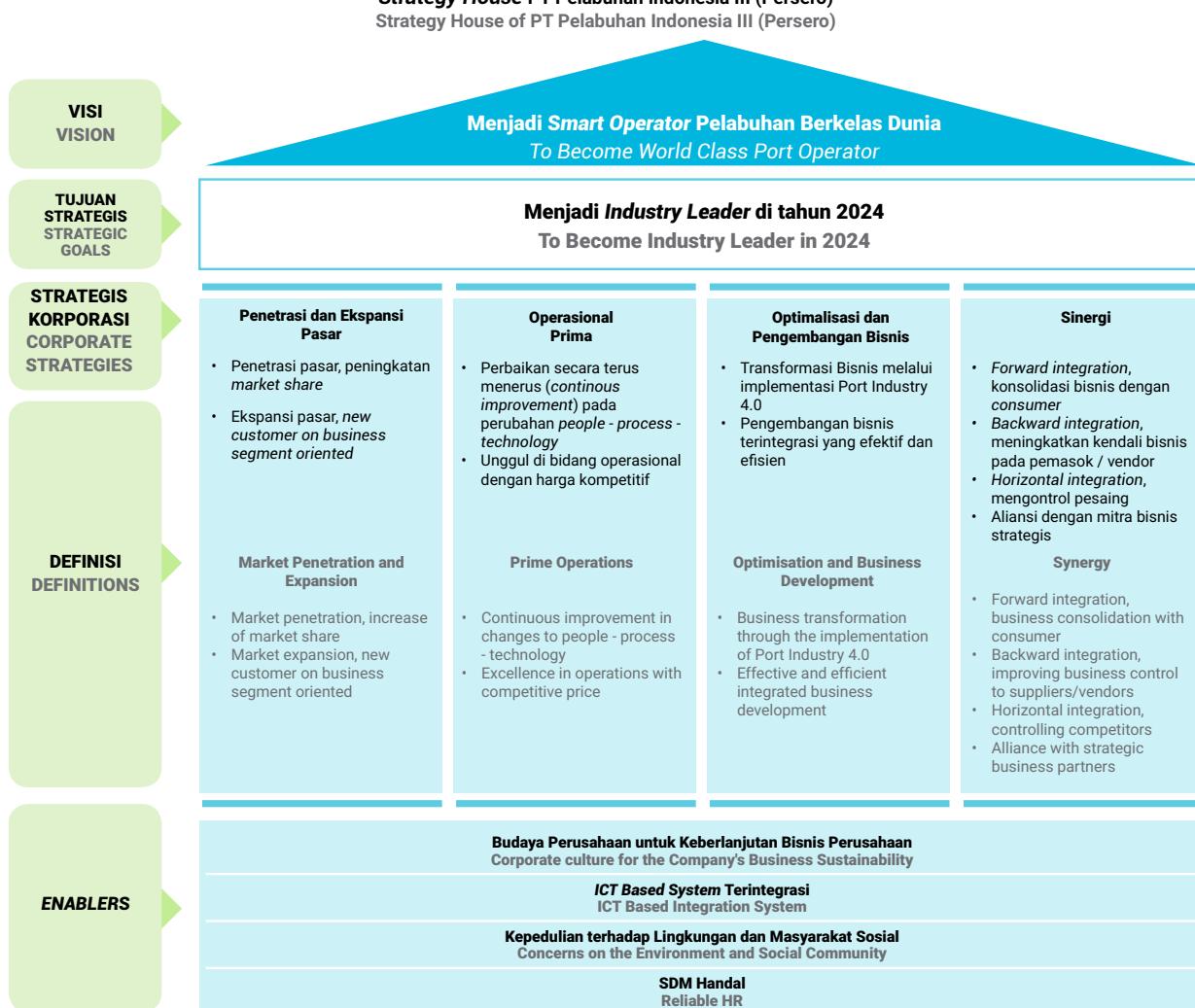
7. Product development and market penetration for property services; and
8. Market development as a port service provider outside the Pelindo III area.

To reach its ultimate goal, namely the port as a World Class Performance, a Master Plan for the Development of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) which is oriented to the integrated planning concept towards operational and service excellence. The preparation of the Masterplan for the Development of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) adopted Malcolm Baldrige concept which was adapted to the business environment of Pelindo III. With the company's priority in 2020-2024 as "Industry Leader", the company's achievement as World Class Performance will be carried out in stages according to the Master plan development that has been prepared as follows:



Rencana Jangka Panjang Perusahaan tahun 2020 – 2024 dijabarkan melalui Visi dan Misi perusahaan. Guna menjamin agar Visi perusahaan tersebut tercapai, maka visi tersebut dijabarkan melalui 3 (tiga) Misi perusahaan, dan untuk memastikan pencapaian Misi perusahaan, maka disusunlah strategi perusahaan. Strategi merupakan pola tindakan dan rancangan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan.

The Company's Long Term Plan for 2020 – 2024 is described through the company's Vision and Mission. In order to ensure that the company's vision is achieved, the vision is described through 3 (three) company Missions, and to ensure the achievement of the company's mission, a company strategy is prepared. Strategy is a pattern of action and resource allocation plan to achieve company goals.



Karakteristik industri jasa kepelabuhanan adalah bersifat derived demand (permintaan turunan) yang mengandung pengertian bahwa munculnya permintaan jasa pelabuhan karena adanya permintaan pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kapal. Oleh karena yang menjadi pelanggan jasa kepelabuhanan adalah pelayaran (kapal), sedangkan bisnis industri pelayaran bersifat sebagai jaringan (*network*), maka sudah sewajarnya jika strategi pengembangan pelabuhan dilakukan dengan pola pikir pelabuhan sebagai sebuah jaringan (*port as a network*). Dengan pola pikir pengembangan pelabuhan sebagai sebuah jaringan, diharapkan upaya untuk menurunkan total biaya logistik dapat lebih mudah dilakukan.

Port service industry is characterised by derived demand which implies that the emergence of demand for port services is due to the demand for shipping goods from one place to another by ship. Because the customers of port services are shipping (ships), while the shipping industry business serves as a network, then it is undeniably reasonable that port development strategy is prepared with the mindset of port as a network. With the mindset of developing port as a network, it is expected that efforts to reduce total logistics costs can be more easily carried out.



Strategi pengembangan pelabuhan dengan menggunakan pola pikir pelabuhan sebagai sebuah jaringan harus sudah mempertimbangkan rantai pasok distribusi barang (*supply chain*) dimana transportasi multimoda menjadi kunci utama. Pelabuhan sebagai titik perpindahan antar moda transportasi menjadi salah satu titik krusial dalam upaya penurunan biaya logistik secara keseluruhan.

Strategi perusahaan terbagi menjadi 3 (tiga) level yaitu strategi korporat, strategi bisnis dan strategi fungsional; serta diiringi dengan rangkaian inisiatif strategis.

Strategi Korporat

Strategi korporat mengidentifikasi serangkaian bisnis, pasar atau industri dimana perusahaan bersaing dan distribusi sumber daya diantara bisnis-bisnis tersebut. Berdasarkan analisis strategi formulasi yang telah dijelaskan pada Buku-II, maka terdapat 4 (empat) strategi korporat yang dapat diterapkan dalam bisnis perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Ke-4 strategi korporat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penetrasi dan Ekspansi Pasar

Penetrasi dan ekspansi pasar adalah merupakan strategi perusahaan dalam rangka meningkatkan pangsa pasar baik pada sektor bisnis yang telah dimiliki oleh perusahaan maupun sektor bisnis baru yang dinilai menguntungkan dengan orientasi tidak saja pada wilayah kerja Pelindo III melainkan di luar wilayah Pelindo III bahkan hingga luar negeri.

2. Operasional Prima

Operasional prima adalah strategi perusahaan dalam melakukan perbaikan secara berkelanjutan (continuous improvement) secara konsisten pada inisiatif organisasi yang menekankan pada perubahan people-process-technology. Strategi ini juga merupakan strategi korporat pada RJPP periode sebelumnya. Oleh karena strategi ini bersifat berkelanjutan, maka strategi dapat dipertahankan sebagai strategi korporat pada RJPP periode 2020 – 2024.

Port development strategy using port mindset as a network must consider the supply chain of goods distribution where multimodal transportation is the main key. The port as a transfer point between transportation modes is one of the crucial points in an effort to reduce overall logistics costs.

The company's strategy is divided into 3 (three) levels, namely corporate strategy, business strategy and functional strategy; and accompanied by a series of strategic initiatives.

Corporate Strategy

Corporate strategy identifies a series of businesses, markets or industries in which the company competes and the distribution of resources among those businesses. Based on the analysis of the formulation strategy described in Book-II, there are 4 (four) corporate strategies that can be applied in the company's business to achieve the company's predetermined goals. The 4 corporate strategies are as follows:

1. Market Penetration and Expansion

Market penetration and expansion is the Company's strategy to increase market share both in existing business sectors and new sectors considered to be beneficial, directed to not only within Pelindo III's work area but also outside, and even abroad.

2. Excellent Operations

Excellent operations are the Company's strategy to consistently carry out continuous improvement in several aspects of organisational initiatives that emphasise transformation on people-process-technology. This strategy is also a corporate strategy in the previous RJPP period. As this strategy is a continuation of the previous year's strategy, this strategy is still deemed as a corporate strategy in RJPP period of 2020-2024.



3. Optimalisasi dan Pengembangan Bisnis

Optimalisasi dan pengembangan bisnis adalah merupakan strategi perusahaan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasionalisasi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya melalui optimalisasi bisnis yang telah ada dan pengembangan bisnis yang terintegrasi serta penerapan transformasi bisnis melalui implementasi *Port Industry 4.0*.

4. Sinergi

Sinergi adalah merupakan strategi perusahaan dalam upaya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan pangsa pasar melalui kerja sama dan hubungan serta koordinasi yang baik antar regional, mitra bisnis dan pemerintah.

Strategi Bisnis

Strategi bisnis perusahaan menentukan tindakan utama dalam mencapai tujuan perusahaan. Strategi bisnis perusahaan dalam 5 (lima) tahun mendatang meliputi:

1. Kewajiban pelayanan publik;
2. Diversifikasi Produk;
3. *Investment Grade Company*;
4. *Lean Organisation*;
5. Peningkatan Kapasitas Pelabuhan dan Pembelajaran Berkelanjutan;
6. Inovasi proaktif;
7. Integrasi horizontal dan vertikal; dan
8. *Best-Value Focus*.

Strategi Fungsional

Strategi fungsional adalah strategi yang diimplementasikan oleh setiap area fungsional untuk mendukung strategi bisnis perusahaan. Berikut strategi Fungsional masingmasing direktorat dari Pelindo III adalah sebagai berikut:

1. Transformasi dan Pengembangan Bisnis

- a. Restructuring culture and organization;
- b. Integrated Internal Control;
- c. Kerjasama dengan perusahaan pelayaran;
- d. Kerjasama dengan cargo owner;
- e. Kerjasama pemanfaatan fasilitas APBN yang ada di wilayah DLKr dan DLKp;
- f. Kerja sama pemanfaatan fasilitas APBN (Pelabuhan UPP);

3. Business Optimisation and Development

Business optimisation and development are the Company's strategy to improve its operational effectiveness and efficiency in performing its business through optimisation of existing business and integrated business development as well as implementation of business transformation through Port Industry 4.0.

4. Synergy

Synergy is the Company's strategy to improve customer satisfaction, which in time will increase market share through good cooperations, relations, and coordinations among regions, with partners, and with the Government.

Business Strategy

The company's business strategy determines the main actions in achieving the company's goals. The company's business strategy in the next 5 (five) years is as follows:

1. Public service obligations;
2. Product Diversification;
3. Investment Grade Company;
4. Lean Organisations;
5. Port Capacity Building and Continuous Learning;
6. Proactive innovation;
7. Horizontal and vertical integration; and
8. Best-Value Focus.

Functional Strategy

Functional strategy is a strategy that is implemented by each functional area to support the company's business strategy. The following are the functional strategies of each directorate of Pelindo III:

1. Business Transformation and Development

- a. Restructuring culture and organisation;
- b. Integrated Internal Control;
- c. Cooperation with shipping companies;
- d. Cooperation with cargo owner;
- e. Cooperation in the utilisation of existing State Budget facilities in the DLKr and DLKp areas;
- f. Cooperation in the utilisation of State Budget facilities (UPP Port);



- g. Kerja sama pengembangan pelabuhan dengan Pemerintah Daerah;
- h. Penyediaan fasilitas *dry port*;
- i. Transportasi multimoda;
- j. Kerja sama operasi TUKS;
- k. Kerja sama dengan penyedia logistics center;
- l. Kerja sama pembangunan pelabuhan;
- m. Pelindo Incorporated;
- n. Menjadi operator pelabuhan di luar negeri;
- o. Pengembangan bisnis energi;
- p. Bisnis rantai logistik terintegrasi;
- q. Pengembangan pelabuhan marina dan fasilitas pendukungnya; dan
- r. Pembangunan Business Continuity Management System (BCMS).

2. Operasional dan Komersial

- a. Digitalisasi perencanaan dan pengembangan bisnis;
- b. Penyediaan layanan kepelabuhanan yang terintegrasi;
- c. Peningkatan kinerja pemasaran;
- d. Pengembangan fasilitas intermoda transportasi;
- e. Windows Connectivity System;
- f. Kerjasama operasi TUKS;
- g. Kerjasama dengan penyedia logistics center;
- h. Menjadi operator TUKS (minerba, semen dan migas);
- i. Menjadi operator pelabuhan di luar wilayah Pelindo III;
- j. Menjadi operator pelabuhan di luar negeri;
- k. Penyediaan layanan internasional towage, pilotage dan shipping agent; dan
- l. Peningkatan pelayanan terminal penumpang.

3. Teknik

- a. Penambahan dan modernisasi fasilitas untuk petikemas (*smart port* dan *smart terminal system*);
- b. Penambahan dan modernisasi fasilitas untuk non-petikemas;
- c. Peningkatan dan pemeliharaan (*Plan Maintenance System*) fasilitas eksisting yang optimal; dan
- d. Peningkatan pelayanan terminal penumpang.

- g. Port development cooperation with the Regional Government;
- h. Provision of dry port facilities;
- i. Multimodal transportation;
- J. Joint operation of TUKS;
- K. Cooperation with logistics center providers;
- I. Cooperation in port development;
- m. Pelindo Incorporated;
- n. Become a port operator abroad;
- o. Energy business development;
- p. Integrated logistics chain business;
- q. Development of the marine port and its supporting facilities; and
- r. Development of Business Continuity Management System (BCMS).

2. Operational and Commercial

- a. Digitalisation of business planning and development;
- b. Provision of integrated port services;
- c. Improved marketing performance;
- d. Development of intermodal transportation facilities;
- e. Windows Connectivity System;
- f. Joint operation of TUKS;
- g. Cooperation with logistics center providers;
- h. Become a TUKS operator (mineral and coal, cement and oil and gas);
- i. Become a port operator outside the Pelindo III area;
- j. Become a port operator abroad;
- k. Provision of international towage, pilotage and shipping agent services; and
- l. Improved passenger terminal services.

3. Technical

- a. Addition and modernisation of facilities for containers (*smart port* and *smart terminal system*);
- b. Addition and modernisation of facilities for non-containers;
- c. Optimal improvement and maintenance (*Plan Maintenance System*) of existing facilities; and
- d. Improved passenger terminal services.



4. Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Restructuring culture and organization;
- b. Maintaining a skilled and productive workforce; and
- c. Optimalisasi aset

5. Keuangan

Terkait dengan korporat Pelindo III

- a. Pertukaran saham dengan partner strategis;
- b. Kerja sama pembangunan pelabuhan;
- c. Pemberian CSR yang mendukung program strategis perusahaan; and
- d. Pendanaan yang optimal.

Terkait dengan pengembangan bisnis Anak Perusahaan

- a. Optimalisasi aset;
- b. Penyediaan fasilitas *dry port*;
- c. Transportasi multimoda;
- d. Kerja sama dengan penyedia *logistics center*;
- e. Penyediaan layanan internasional *towage, pilotage* dan *shipping agent*;
- f. Pengembangan bisnis energi;
- g. Bisnis rantai logistik terintegrasi;
- h. Pengembangan pelabuhan marina dan fasilitas pendukungnya;
- i. Pengembangan bisnis *marine service*;
- j. Ekspansi pasar bisnis SDM dan rumah sakit; and
- k. *Initial Public Offering (IPO)* Anak Perusahaan.

Inisiatif Strategis

Berdasarkan pada analisis posisi perusahaan pada tahun 2019 berada pada kuadran I, dan ditargetkan tetap di kuadran I dengan memperkuat peluang dan posisi perusahaan pada tahun 2024. Oleh karena itu untuk dapat menangkap peluang dan meningkatkan posisi perusahaan disusun inisiatif strategis perusahaan dalam 5 tahun kedepan sebagai berikut:

1. Transformasi budaya dan organisasi yang selaras dengan perbaikan proses bisnis secara berkelanjutan;

Transformasi budaya dan organisasi adalah perubahan budaya perusahaan sehingga setiap individu di perusahaan mempunyai budaya yang lebih baik. Budaya yang melayani pelanggan dengan baik dan budaya yang tidak mengutamakan kepentingan

4. Human Capital

- a. Restructuring culture and organisation;
- b. Maintaining skilled and productive workforce; and
- c. Asset optimisation

5. Finance

Related to Pelindo III

- a. Exchange of shares with strategic partners;
- b. Cooperation in port development;
- c. Providing CSR that supports the company's strategic programmes; and
- d. Optimal funding.

Related to Subsidiary's business development

- a. Asset optimisation;
- b. Provision of dry port facilities;
- c. Multimodal transportation;
- d. Cooperation with logistics center providers;
- e. Provision of international towage, pilotage and shipping agent services;
- f. Energy business development;
- g. Integrated logistics chain business;
- h. Development of the marine port and its supporting facilities;
- i. Development of marine service business;
- j. Expansion of HR and hospital business market; and
- k. Initial Public Offering (IPO) of Subsidiaries.

Strategic Initiatives

Based on the analysis of the company's position in 2019, the Company is in quadrant I, and is targeted to remain in quadrant I by strengthening opportunities and the company's position in 2024. Therefore, to be able to capture opportunities and improve the company's position, the company's strategic initiatives for the next 5 year are prepared as follows :

1. Cultural and organisational transformation in line with continuous improvement of business processes;

Cultural and organisational transformation is a change in corporate culture so that every individual in the company has a better culture. A culture that serves customers well and a culture that does not put its own interests first. Thus, the programme that



sendiri. Sehingga program yang perlu dilakukan adalah dengan menerapkan layanan prima ke pelanggan, penerapan change management, pembentukan organisasi yang ramping (lean).

2. Menciptakan SDM dengan multi kompetensi;

SDM adalah sumber daya paling penting di Pelindo III. Kompetensi adalah kombinasi dari knowledge, skill dan job behaviour. Semua strategi yang direncanakan akan menjadi percuma jika tidak adanya SDM yang kompeten. Menciptakan SDM dengan multi kompetensi melalui penerapan:

- a. Mapping Kompetensi dan Learning Design
- b. Knowledge Management System
- c. Implementasi Talent Management

3. Pengembangan early warning system;

Pengembangan early warning system adalah turunan dari pengembangan bisnis berbasis risiko. Ke depan sebelum ada pengembangan bisnis perlu adanya *what if scenario* agar bisa memberi peringatan dini ketika adanya potensi kesalahan yang muncul dalam pengembangan bisnis termasuk investasi.

4. Digitalisasi Port 4.0

Digitalisasi telah men-disrupt banyak bisnis di dunia. Industri kepelabuhanan telah mulai mengimplementasi digitalisasi di layanan kepelabuhanan. Pelindo III tidak boleh terlambat dalam mengimplementasi Digitalisasi 4.0. Lini layanan terminal operator dapat mengimplementasi digitalisasi 4.0 yang tetap ramah pengguna. Dengan implementasi digitalisasi port 4.0 akan dapat mengakuratkan informasi yang diberikan. Mengefisiensikan biaya baik bagi Pelindo III maupun perusahaan pelayaran dan meningkatkan layanan kepelabuhanan.

5. Pengembangan konsep "Smart Terminal";

Implementasi smart terminal akan memberikan efisiensi biaya operasional. Selain itu smart terminal akan memberikan layanan ke pelanggan dengan maksimal. Sehingga dengan adanya smart terminal layanan menjadi prima, pelanggan menjadi puas dan biaya operasional menjadi rendah. Terminal Teluk Lamong, Terminal Petikemas Surabaya, Terminal

needs to be done is to implement excellent service to customers, change management, as well as form a lean organisation.

2. Creating human capital with multiple competencies;

HC is the most important resource in Pelindo III. Competence is a combination of knowledge, skills and job behavior. All planned strategies will be in vain if there is no competent human resources. Creating human resources with multiple competencies is done through the implementation of:

- a. Competency Mapping and Learning Design
- b. Knowledge Management System
- c. Talent Management Implementation

3. Development of an early warning system;

The development of an early warning system is a derivative of the risk-based business development. Going forward, before there is business development, it is necessary to have a what-if-scenario so that it can provide early warning when there are potential errors that arise in business development, including investment.

4. Digitalising Port 4.0

Digitalisation has disrupted many businesses around the world. Port industry has begun to implement digitalisation in port services. Pelindo III must not be late in implementing Digitalisation 4.0. The operator's terminal service line can implement digitalisation 4.0 which remains user-friendly. With the implementation of port 4.0 digitalisation, the information provided will be accurate, creating cost efficiency for both Pelindo III and shipping companies while improving port services.

5. Development of "Smart Terminal" concept;

Smart terminal implementation will provide operational cost efficiency. In addition, smart terminal will provide maximum service to customers. Smart terminal will result in prime services, bringing customer satisfaction and low operational costs. Teluk Lamong Terminal, Surabaya Container Terminal, Semarang Container Terminal will become smart



Petikemas Semarang akan menjadi smart terminal sehingga mampu memberikan layanan terbaik bagi pelanggan.

6. Meningkatkan keunggulan operasional dengan penambahan kapasitas dan perbaikan layanan;

Operator Pelabuhan adalah bisnis inti dari Pelindo III. Meningkatkan keunggulan operasional dan penambahan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan terhadap industri pelayaran menjadi salah satu strategi inisiatif yang utama. Keberhasilan Terminal Operator Pelabuhan besar seperti PSA adalah dengan menerapkan strategi ini. Kebutuhan perusahaan pelayaran dipenuhi sebaik mungkin sehingga kapal-kapal akan melakukan kegiatan di pelabuhan Pelindo III bukan di Pelabuhan kompetitor.

7. Program Relaksasi Perusahaan dalam Mengantisipasi Covid-19;

Program relaksasi yang dapat diterapkan adalah kebijakan penekanan biaya logistik dalam rangka peningkatan kegiatan ekspor. Dengan adanya stimulus keringanan biaya tersebut diharapkan dapat mendorong para pelaku usaha ekspor untuk dapat meningkatkan produksinya. Selain itu, perusahaan juga akan menerapkan Single Submission (SSm) – joint inspection. Untuk selanjutnya, Perusahaan akan menerapkan kebijakan integrasi jaringan logistik antar pelabuhan. Sehingga dapat semakin mempermudah pelanggan untuk dapat melakukan aktivitasnya di pelabuhan.

8. Menciptakan integrasi layanan dengan Pelabuhan Pemerintah;

Menciptakan integrasi layanan dengan Pelabuhan dan Dermaga Pemerintah yang dilakukan dengan melakukan kerja sama pemanfaatan pelabuhan-pelabuhan umum yang telah dan akan beroperasi khususnya di wilayah kerja Pelindo III. Rencana KSP pelabuhan pemerintah berada pada regional Bali Nusra. Rencana integrasi layanan dengan Pemerintah Daerah Sumbawa untuk membangun dan mengoperasikan Pelabuhan Tanjung Santong merupakan program yang dilakukan dimasa mendatang.

terminals so that they can provide the best service for customers.

6. Improving operational excellence by increasing capacity and improving services;

Port Operator is the core business of Pelindo III. Increasing operational excellence and increasing capacity to meet the needs of the shipping industry is one of the Company's main strategic initiatives. The success of a large Port Operator Terminal such as PSA is to implement this strategy. The needs of shipping companies shall be fulfilled as well as possible so that ships prefer to carry out their activities at Pelindo III ports instead of competitors' ports.

7. Corporate Relaxation Programme in Anticipating Covid-19;

The relaxation programme that can be implemented is a policy of reducing logistics costs in order to increase export activities. With the cost reduction stimulus, it is expected that it will encourage export business actors to increase their production. In addition, the Company will also implement Single Submission (SSm) – joint inspection. In the future, the Company will implement a policy of integrating logistics network between ports in order to make it easier for the customers to be able to carry out their activities at the port.

8. Creating service integration with Government Ports;

Creating service integration with Government Ports and Docks which is carried out by conducting partnership on the utilization of public ports that have been and will operate, especially in the working area of Pelindo III. The government's port KSP plan is in Bali-Nusra region. The plan to integrate services with the Sumbawa Regional Government to build and operate Port of Tanjung Santong is a that will be carried out in the future.



9. Sinergi pemanfaatan aset dan pengembangan zona logistik;

Sinergi pemanfaatan aset khususnya aset idle dapat dilakukan untuk mengembangkan bisnis Pelindo III. Besarnya potensi sektor pertambangan dan perkebunan di Kalimantan, potensi kerjasama sangat terbuka. Pelindo III dapat mengoptimalkan aset yang *idle*, rekanan bisa meningkatkan bisnis. Bahkan dengan kerja sama yang dibangun tersebut, dapat dimanfaatkan untuk menunjang bisnis kepelabuhanan di Regional Kalimantan. Pelindo III berencana bekerja sama dengan PT KAI menyediakan fasilitas dry port. Studi telah dilakukan dan menunjukkan layak dibangun di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ke depan akan dibangun *dry port* yang langsung terhubung dengan pelabuhan Pelindo III yang dapat “mengunci” pasar (barang) tetap menggunakan pelabuhan Pelindo III.

Pemanfaatan zona logistik yang dikerjasamakan dengan pemilik barang akan dapat menurunkan biaya logistik secara signifikan. Rekanan mempunyai kapasitas lebih dalam layanan pergudangan yang dekat dengan Pelabuhan.

10. Menciptakan dan meningkatkan kerjasama strategis;

Menciptakan kerja sama strategis perlu dilakukan untuk memberikan layanan prima bagi pelanggan layanan pelabuhan. Dengan adanya *Windows Connectivity* di seluruh Pelabuhan Pelindo I – IV dapat meningkatkan layanan petikemas menjadi lebih baik. Kerja sama pengoperasian TUKS bisa dilaksanakan untuk menyikapi banyaknya perusahaan lebih memilih TUKS daripada menggunakan pelabuhan umum ketika cargo yang dimiliki sudah besar.

11. Sinergi BUMN;

Sinergi BUMN perlu dilakukan salah satunya dengan holding incorporated. Prinsip pembentukan holding Pelindo Incorporated adalah collective value creation dan sinergi dari IPC, Pelindo I, III, dan IV. Pelindo Incorporated diharapkan dapat membuat lingkup bisnis anak usaha lebih besar. Holding BUMN dilakukan sehingga proses kegiatan Pelindo III menjadi efisien. Bentuk efisiensi yang dapat dilakukan adalah dengan pengadaan bersama, saling bertukar

9. Synergy in asset utilisation and development of logistics zones;

Synergy in the use of assets, especially idle assets, can be carried out to develop Pelindo III's business. The large potential of the mining and plantation sectors in Kalimantan opens up cooperation opportunity. Pelindo III can optimise idle assets, and its partners can improve their business. Even such cooperation can support port business in the Kalimantan Region. Pelindo III plans to cooperate with PT KAI to provide dry port facilities. Studies have been conducted and show that it is feasible to build port facilities in East Java and Central Java. Going forward, the Company plans to build a dry port directly connected to Pelindo III port which can “lock” (goods) market to continuously use the Pelindo III port.

Utilisation of logistics zones in partnership with goods owners will be able to significantly reduce logistics costs. Partners have more capacity in warehousing services close to the Port.

10. Creating and enhancing strategic cooperation;

Creating strategic cooperation needs to be done to provide excellent service for port service customers. With Windows Connectivity across Pelindo I - IV Ports, the Company can better improve container services. Cooperation in the operation of TUKS can be carried out to address many companies that prefer TUKS to using public ports when they have large cargos.

11. SOE Synergy;

The synergy of SOEs needs to be carried out, one of which is through holding incorporated. The forming of the holding of Pelindo Incorporated is principally to seek collective value creation and synergy from IPC, Pelindo I, III, and IV. Pelindo Incorporated is expected to enlarge business scope of subsidiaries. SOE Holding is carried out to make efficient process of Pelindo III's activities. Efficiency can be made through joint procurement, exchanging expertise to



keahlian untuk memenuhi kebutuhan masing-masing anggota holding sehingga akan menciptakan volume bisnis baru pula. Subholding petikemas mengintegrasikan Terminal Petikemas dari Pelindo I – IV sehingga ke depan subholding ini mampu ekspansi mengoperasikan pelabuhan internasional.

Sinergi BUMN yang bisa dilakukan dengan BUMN pemilik barang seperti PT Semen Indonesia, PT Pupuk Indonesia dan PT PLN. Kerja sama dengan PT PGN dalam menyediakan layanan kepelabuhanan untuk bongkar dan muat LNG. Kegiatan kepelabuhanan dari BUMN tersebut bisa disediakan oleh Pelindo III yang mempunyai kompetensi sebagai operator pelabuhan. Sehingga kegiatan kepelabuhanan BUMN tersebut menjadi lebih efisien dan mempunyai kinerja tinggi.

12. Menjadi operator di luar wilayah Pelindo III;

Dalam rangka meningkatkan bisnis kepelabuhanan Pelindo III mempunyai peluang besar dalam melakukan pengembangan bisnis di luar wilayah Pelindo III dengan menjadi operator pelabuhan maupun menjadi operator untuk terminal khusus seperti terminal batubara, semen, migas dan minerba.

13. Pengembangan bisnis pelabuhan di skala global;

Salah satu cara Pelindo III melakukan pengembangan bisnisnya di skala global, salah satunya dengan menjadi port operator di luar wilayah Pelindo III, khususnya menjadi operator bidang Minerba. Hal ini perlu dilakukan karena potensi minerba khususnya di Indonesia sangatlah besar. Selain menjadi port operator di luar wilayah Pelindo III. Layanan International towage diberikan ke wilayah seperti Selat Malaka.

14. Peningkatan kapasitas pelayanan publik;

Pelayanan publik yang diberikan Pelindo III melalui layanan kepelabuhanannya adalah Terminal penumpang, layanan kapal perintis dan Tol Laut. Pengembang terminal penumpang di regional Bali Nusra adalah bentuk layanan yang diberikan Pelindo III terhadap publik. Pengoptimalan layanan kapal perintis di Pelabuhan III untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat dan mendukung program pemerintah saat ini.

meet the needs of each holding member so that it can create new business volume as well. The container subholding integrates Container Terminal from Pelindo I – IV so that in the future this subholding will be able to expand to operate international ports.

SOE synergy can be done with SOE goods owners, such as PT Semen Indonesia, PT Pupuk Indonesia and PT PLN. Cooperation with PT PGN can be made by providing port services for loading and unloading LNG. Port activities needed by the said SOE can be provided by Pelindo III which has competence as a port operator. To that end, SOE port activities can become more efficient and have high performance.

12. Become an operator outside the Pelindo III area;

In order to improve port business, Pelindo III has a great opportunity to develop business outside the Pelindo III area by becoming a port operator as well as being an operator for special terminals such as coal, cement, oil and gas and mineral and coal terminals.

13. Development of port business on a global scale;

One of the ways for Pelindo III to develop its business on a global scale is by becoming a port operator outside the Pelindo III area, in particular being an operator in the Mineral and coal sector. This needs to be done because of enormous potential of mineral and coal, especially in Indonesia. In addition to being a port operator outside the Pelindo III area. International towage services are provided to areas such as the Malacca Strait.

14. Capacity building for public services;

The public services provided by Pelindo III through its port services are passenger terminals, pioneer ship services, and sea highways. The passenger terminal developer in the Bali Nusra region is a form of service provided by Pelindo III to the public. Optimisation of pioneer ship services at Port III is to provide excellent service to the community and support current government programmes.

**15. Kepedulian sosial dan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan;**

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebuah kewajiban yang dibebankan pada Perseroan Terbatas melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. CSR yang baik tidak hanya bersifat filantropy, namun CSR tersebut harus dapat meningkatkan kualitas masyarakat sekitar sehingga mampu meningkatkan dukungan terhadap Pelindo III. Jenis dukungan tersebut dapat berupa kenyamanan dan penciptaan suasana yang kondusif dalam kegiatan kepelabuhanan.

16. Pengembangan non-core business;

Berdasarkan analisis di Buku-II, pengembangan bisnis *non-core* dapat meningkatkan kapasitas bisnis dari Pelindo III. PHC dapat mengembangkan pasar dengan pengoperasian layanan kesehatan di terminal – terminal Pelindo yang lain. PT. PEL bisa dikembangkan dengan bisnis energi dengan menjual gas yang dapat men-supply pembangkit listrik tenaga uap. BJTI dapat mengembangkan layanan kawasan industri melalui anak perusahaannya yaitu PT BKMS. PT PDS dapat mengembangkan pasar tidak hanya untuk kebutuhan tenaga *outsources* Pelindo III melainkan ke perusahaan non Pelindo III. PT. PPI dapat mengembangkan bisnis pariwisata dan wisata maritim di beberapa wilayah Pelindo. Pengembangan bisnis *non-core* ini akan menjadikan Pelindo III menjadi *beyond port*.

17. Pengembangan value-based management;

Value-based management ini digunakan untuk bisa mengukur kegiatan di Pelindo III berdasarkan target nilai yang diinginkan. *Value-based management* sangat bermanfaat bagi Pelindo III khususnya dalam hal investasi. Investasi yang dilakukan akan fokus pada nilai yang diberikan perusahaan ke *stakeholder*.

15. Social and environmental concern as a form of corporate responsibility;

Corporate Social Responsibility (CSR) is an obligation imposed on Limited Liability Companies through Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Good CSR is not only philanthropic, but it must be able to improve the quality of the surrounding community so as to increase support for Pelindo III. This type of support can be in the form of comfort and the creation of a conducive atmosphere in port activities.

16. Development of non-core business;

Based on the analysis in Book-II, non-core business development can increase business capacity of Pelindo III. PHC can develop market by operating healthcare services at other Pelindo terminals. PT. PEL can be developed with the energy business by selling gas that can supply steam power plants. BJTI can develop industrial estate services through its subsidiary, namely PT BKMS. PT PDS can develop market not only for the needs of Pelindo III outsourced personnel but also for non-Pelindo III companies. PT. PPI can develop tourism business and maritime tourism in several Pelindo areas. The development of this non-core business will make Pelindo III pursue its aspiration of beyond port.

17. Development of value-based management;

This value-based management is used to measure activities in Pelindo III based on the desired target value. Value-based management is very useful for Pelindo III, especially in terms of investment. The investments made will focus on the value that the company provides to stakeholders.



Inisiatif strategis Perusahaan diarahkan untuk memenuhi inisiatif strategis BUMN yang telah ditetapkan. Berikut adalah matriks yang menggambarkan misi, sasaran strategis, strategi korporat, sasaran bisnis, strategi bisnis, inisiatif strategis BUMN, inisiatif strategis Pelindo III dan program strategis yang akan menjadi *roadmap* bagi Perusahaan untuk periode 2020-2024.

The Company's strategic initiatives are directed to fulfill the SOE's strategic initiatives that have been determined. The following is a matrix that describes the mission, strategic objectives, corporate strategy, business objectives, business strategy, SPE strategic initiatives, Pelindo III strategic initiatives and strategic programmes that will become roadmap for the Company for the 2020-2024 period.

MATRIK KETERKAITAN RJPP PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) PERIODE 2020 - 2024 DENGAN INISIATIF STRATEGIS BUMN
LINKAGE MATRIX OF RJPP OF PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) FOR PERIOD 2020 – 2024 WITH SOE STRATEGIC INITIATIVES

MISI MISSION	SASARAN STRATEGIS STRATEGIC TARGET	STRATEGI KORPORAT CORPORATE STRATEGY	SASARAN BISNIS BUSINESS TARGETS	STRATEGI BISNIS BUSINESS STRATEGIES	INISIATIF STRATEGIS BUMN SOE STRATEGIC INITIATIVES	INISIATIF STRATEGIS PELINDO 3 PELINDO 3 STRATEGIC INITIATIVES	PROGRAM STRATEGIS STRATEGIC PROGRAMMES
SMART OPERATOR							
MISI 1 Menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan untuk peningkatan kepuasan <i>stakeholder</i>	Pemenuhan standar yang ditetapkan oleh lembaga rating / Fulfillment of standard set by rating agency	Optimalisasi dan Pengembangan Bisnis / Optimisation and Business Development	Memberikan nilai tambah bagi stakeholder untuk bisnis kepelabuhan dan lainnya / Providing added value for stakeholder for port business and others	Kewajiban Pelayanan Publik / Public Service Obligation	Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia / Economic and Social Value for Indonesia	Peningkatan Kapasitas pelayanan Publik / Public service capacity building	Peningkatan pelayanan terminal penumpang / Passenger terminal service improvement
MISSION 1 Creating sustainable added value to increase stakeholder satisfaction					Kepedulian sosial dan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan / Social and environmental concerns as a form of corporate responsibility	Pemberian CSR yang mendukung program strategis perusahaan / Provision CSR that supports corporate strategic programme	
					Pengembangan <i>value-based management</i> / Value-based management development	Pendanaan yang optimal / Optimum funding	
					IPO Anak Perusahaan / IPO of Subsidiary		
					Pembangunan BCMS (<i>Business Continuity Management System</i>) / BCMS (<i>Business Continuity Management System</i>) Development		
					Kebijakan relaksasi penanganan dampak Covid-19 / Covid-19 impact handling relaxation policy	<i>Open Stack</i> <i>Transhipment</i> Antar Terminal / Inter Terminal Transhipment	
						<i>Term of Payment</i> (TOP)	
						<i>Empty Impor</i>	
						SSm dan <i>Joint Inspection</i> / SSm and Joint Inspection	



MATRIK KETERKAITAN RJPP PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) PERIODE 2020 - 2024 DENGAN INISIATIF STRATEGIS BUMN
 LINKAGE MATRIX OF RJPP OF PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) FOR PERIOD 2020 – 2024 WITH SOE STRATEGIC INITIATIVES

MISI MISSION	SASARAN STRATEGIS STRATEGIC TARGET	STRATEGI KORPORAT CORPORATE STRATEGY	SASARAN BISNIS BUSINESS TARGETS	STRATEGI BISNIS BUSINESS STRATEGIES	INISIATIF STRATEGIS BUMN SOE STRATEGIC INITIATIVES	INISIATIF STRATEGIS PELINDO 3 PELINDO 3 STRATEGIC INITIATIVES	PROGRAM STRATEGIS STRATEGIC PROGRAMMES
MISI 3 Menciptakan solusi bisnis yang cerdas melalui integrasi dan kerja sama yang saling menguntungkan dengan mitra strategis MISSION 3 Creating smart business solution through integration and mutually beneficial cooperation with strategic partners	Sinergi dengan mitras strategis dan kerjasama dengan pemerintah / Synergy with strategic partners and cooperation with the government	Sinergi / Synergy	Integrasi supply chain bisnis kepelabuhanan / Integration of port business supply chain	Inovasi Proaktif / Proactive Innovation	Inovasi Model Bisnis / Business Model Innovation	Sinergi bisnis dengan perusahaan customer / Business synergy with customer company	Pengembangan fasilitas intermoda transportasi / Transportation intermodal facility development
						Menciptakan integrasi layanan dengan Pelabuhan Pemerintah / Creating service integration with Government Port	Kerjasama dengan perusahaan pelayaran / Cooperation with shipping company
							Kerjasama dengan cargo owner / Cooperation with cargo owner
							Kerjasama dengan perusahaan customer / Business synergy with customer company
							Kerjasama pemanfaatan fasilitas APBN (Pelabuhan UPP) / State Budget facility utilisation cooperation (UPP Port)
							Kerjasama pengembangan pelabuhan dengan pemerintah daerah / Port development cooperation with regional government
			Integrasi Horisontal dan Vertikal / Horizontal and Vertical Integration			Menciptakan dan meningkatkan sinergi bisnis dengan konsep strategic partnership / Creating and improving business synergy with strategic partnership concept	Windows Connectivity System
							Pertukaran saham dengan partner strategis / Share exchange with strategic partners
							Kerjasama operasi TUKS / Cooperation of TUKS operation
							Optimalisasi aset / Asset optimisation
							Penyediaan fasilitas dry port / Dry port facility provision
							Transportasi multimoda / Multimodal transportation
							Sinergi BUMN / SOE Synergy
							Kerjasama dengan penyedia logistics center / Cooperation with logistics center provider
							Kerjasama pembangunan pelabuhan / Port development cooperation
							Pelindo Incorporated



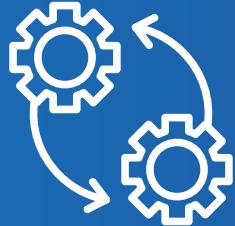
MATRIK KETERKAITAN RJPP PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) PERIODE 2020 - 2024 DENGAN INISIATIF STRATEGIS BUMN
LINKAGE MATRIX OF RJPP OF PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) FOR PERIOD 2020 – 2024 WITH SOE STRATEGIC INITIATIVES

MISI MISSION	SASARAN STRATEGIS STRATEGIC TARGET	STRATEGI KORPORAT CORPORATE STRATEGY	SASARAN BISNIS BUSINESS TARGETS	STRATEGI BISNIS BUSINESS STRATEGIES	INISIATIF STRATEGIS BUMN SOE STRATEGIC INITIATIVES	INISIATIF STRATEGIS PELINDO 3 PELINDO 3 STRATEGIC INITIATIVES	PROGRAM STRATEGIS STRATEGIC PROGRAMMES
MISI 4 Membangun dan memperluas jaringan bisnis domestik dan internasional MISSION 4 Building and expanding domestic and international business network	Penguasaan pasar baru pelabuhan di luar wilayah Pelindo III / Domination of new port market outside of Pelindo III area	Penetrasi & Ekspansi Pasar / Market penetration & expansion	Manfaatkan peluang bisnis baru untuk meningkatkan pendapatan / Utilising new business opportunity to increase revenues	Best-value focus		Menjadi operator di luar wilayah Pelindo III / Become operator outside of Pelindo III area	Menjadi operator TUKS (minerba, semen, migas) / Become TUKS operator (mineral and coal, cement, oil and gas)
BERSKALA DUNIA / WORLD CLASS							
MISI 1 Menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan untuk peningkatan kepuasan stakeholder MISSION 1 Creating sustainable added value to increase stakeholder satisfaction	Pemenuhan standar yang ditetapkan oleh lembaga rating / Fulfillment of standard set by rating agency	Optimalisasi dan Pengembangan Bisnis / Optimisation and Business Development	Memberikan nilai tambah bagi stakeholder untuk bisnis kepelabuhan dan lainnya / Providing added value for stakeholder for port business and others	Diversifikasi Produk / Product diversification		Pengembangan Related Business / Related Business Development	Pengembangan bisnis energi / Energy business development
							Bisnis rantai logistik terintegrasi / Integrated logistic business chain
							Pengembangan pelabuhan marina dan fasilitas pendukungnya / Marine port development and its supporting facilities
							Pengembangan bisnis marine service / Marine service business development
							Ekspansi pasar bisnis SDM dan Rumah Sakit / HC and Hospital business market expansion



MATRIK KETERKAITAN RJPP PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) PERIODE 2020 - 2024 DENGAN INISIATIF STRATEGIS BUMN
 LINKAGE MATRIX OF RJPP OF PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) FOR PERIOD 2020 – 2024 WITH SOE STRATEGIC INITIATIVES

MISI MISSION	SASARAN STRATEGIS STRATEGIC TARGET	STRATEGI KORPORAT CORPORATE STRATEGY	SASARAN BISNIS BUSINESS TARGETS	STRATEGI BISNIS BUSINESS STRATEGIES	INISIATIF STRATEGIS BUMN SOE STRATEGIC INITIATIVES	INISIATIF STRATEGIS PELINDO 3 PELINDO 3 STRATEGIC INITIATIVES	PROGRAM STRATEGIS STRATEGIC PROGRAMMES
MISI 2 Memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna jasa layanan bisnis di pelabuhan melalui digitalisasi dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (<i>Good Corporate Governance</i>) MISSION 2 Providing convenience and easiness for business service users at port through digitalization with good corporate governance	Menciptakan kinerja pelayanan yang unggul berbasis GCG / Creating GCG-based excellent service performance	Operasional Prima / Excellent Operations	Pemahaman nilai budaya perubahan untuk mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien / Understanding of changes cultural value to create effective and efficient organisation	<i>Lean Organisation</i>	Kepimpinan Teknologi / Technology Leadership	<i>Early Warning System</i>	<i>Integrated Internal Control</i>
				Peningkatan kapasitas pelabuhan dan pembelajaran berkelanjutan / Port capacity building and continuous learning		Digitalisasi 4.0 / Digitalisation 4.0	Digitalisasi perencanaan dan pengembangan bisnis / Digitalisation of business planning and development
						Pengembangan konsep "Smart Terminal" / "Smart Terminal" concept development	Penyediaan layanan kepelabuhanan yang terintegrasi / Provision of integrated port services
	Menciptakan kinerja pelayanan yang unggul berbasis GCG / Creating GCG-based excellent service performance	Operasional Prima / Excellent Operations	Pemahaman nilai budaya perubahan untuk mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien / Understanding of changes cultural value to create effective and efficient organisation	Peningkatan kapasitas pelabuhan dan pembelajaran berkelanjutan / Port capacity building and continuous learning	Peningkatan Investasi / Investment growth	Meningkatkan keunggulan operasional dengan penambahan kapasitas dan perbaikan layanan / Improving operational excellence by increasing capacity and improving services	Penambahan dan modernisasi fasilitas untuk petikemas / Addition and modernisation of facilities for container
							Penambahan dan modernisasi fasilitas untuk non-petikemas / Addition and modernisation of facilities for non-container
							Peningkatan kinerja pemasaran / Improvement of marketing performance
							Peningkatan dan pemeliharaan fasilitas eksisting / Improvement and maintenance of existing facilities
				<i>Lean Organisation</i>	Pengembangan Talenta / Talent Development	Transformasi budaya dan organisasi yang selaras dengan perbaikan proses bisnis secara berkelanjutan / Cultural and organisational transformation that is aligned with sustainable business process	<i>Restructuring Culture and Organisation</i>
						Menciptakan SDM dengan multi kompetensi / Creating HC with multicompetencies	<i>Maintaining a skilled and productive workforce</i>



TATA KELOLA PERUSAHAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE







TATA KELOLA PERUSAHAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Bagi Perseroan, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan pilar utama yang mendukung kelangsungan usaha yang berkelanjutan, menjamin terpenuhinya hak seluruh pemangku kepentingan, serta menunjang tingkat kesehatan Perseroan. Dilatarbelakangi tujuan tersebut, Perseroan berkomitmen penuh dalam menerapkan kaidah dan prinsip serta memenuhi *best practices* GCG di seluruh lini bisnis yang dijalankan oleh seluruh organ Perseroan.

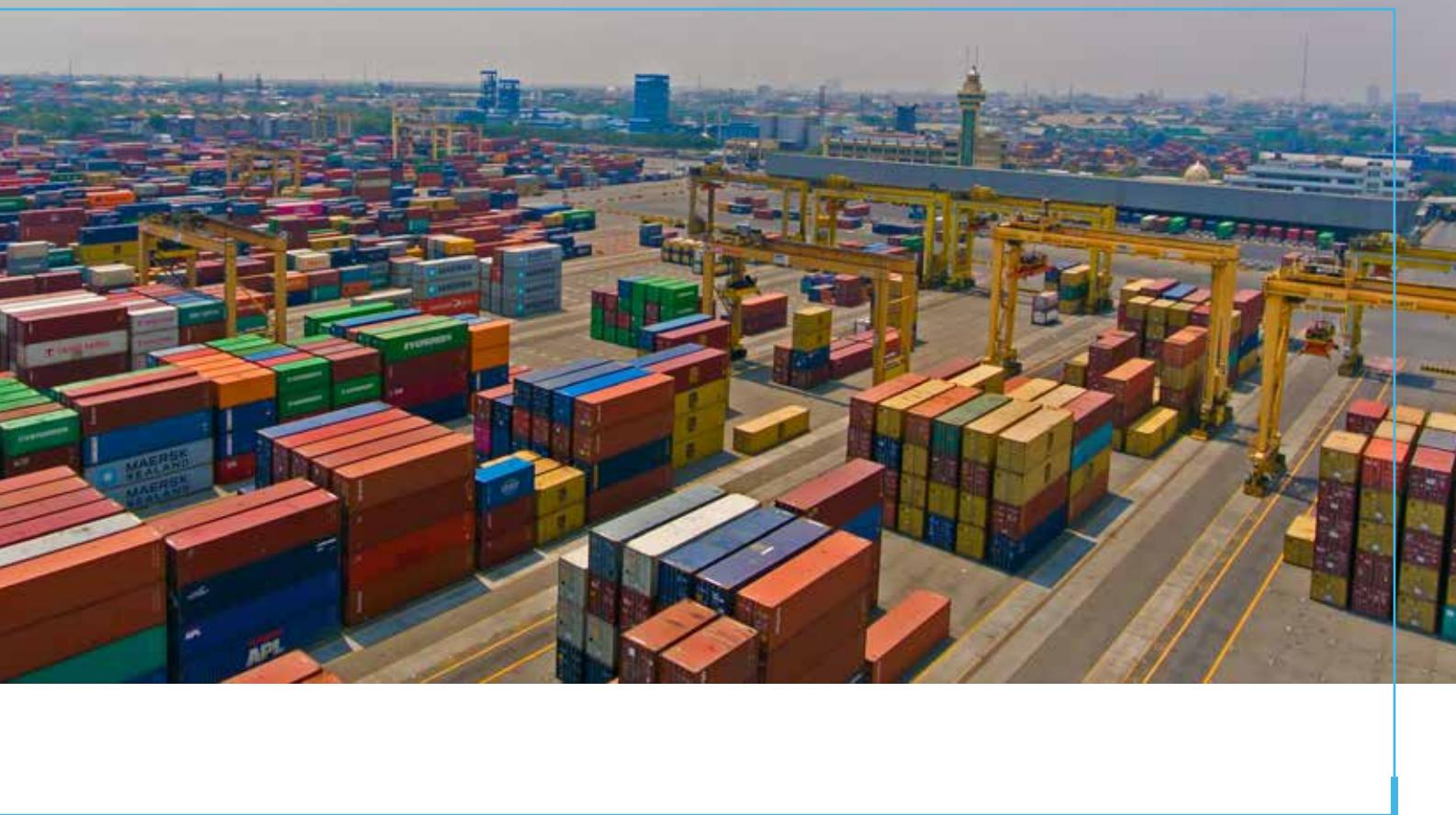
Pelindo III considers the implementation of Good Corporate Governance (GCG) as the main pillar that supports a sustainable business continuity, ensures the fulfillment of the rights of all stakeholders, and supports the health level of the Company. Thus, the Company is fully committed to implementing the values and principles as well as fulfilling GCG best practices in all business lines carried out by all Company organs.



Perjalanan Pelindo III dalam meraih kelangsungan dan keberhasilan bisnis jangka panjang tak lepas dari komitmen penuh terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai fondasi yang menjamin terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif, mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat, menjamin pemenuhan hak dan nilai tambah bagi pemangku kepentingan, dan menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Dalam penerapannya, Perseroan senantiasa memenuhi prinsip-prinsip dan mewujudkan *best practices* GCG guna menciptakan pengelolaan entitas usaha yang transparan, akuntabel, bertanggungjawab, mandiri, serta wajar dan setara.

Pelindo III's journey in achieving long-term business continuity and success cannot be separated from its full commitment to the implementation of Good Corporate Governance (GCG) as the foundation that ensures the creation of a conducive business and investment climate, encourages the creation of healthy business competition, guarantees the fulfillment of rights and added value for stakeholders, and support sustainable economic growth and stability. In its implementation, the Company always fulfills the principles and embodies GCG best practices in order to create a transparent, accountable, responsible, independent, and fair and equal management of business entities.





Implementasi GCG di Perseroan dilatarbelakangi oleh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran individu Perseroan dalam menjalankan praktik bisnis yang berprinsip pada keberlangsungan usaha perusahaan jangka panjang. Dengan perkembangan lingkungan bisnis yang dinamis serta persaingan yang kian meningkat, Perseroan memaknai penguatan penerapan GCG sebagai mekanisme yang mampu mempertahankan stabilitas dan akuntabilitas Perseroan melalui pengawasan dan pengendalian yang memadai, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, mendukung integritas dalam pelaporan keuangan, pengendalian risiko yang efektif, serta menjunjung hubungan yang etis dengan Pemangku Kepentingan. Oleh karena itu, Perseroan memastikan terwujudnya prinsip dan praktik GCG secara komprehensif pada setiap aktivitas usaha oleh setiap insan Pelindo III.

The implementation of GCG in the Company is motivated by compliance with applicable laws and regulations as well as the awareness of the Company's individual in carrying out business practices based on the principle of long-term business sustainability. With the development of a dynamic business environment and increasing competition, the Company interprets strengthening the implementation of GCG as a mechanism capable of maintaining the stability and accountability of the Company through adequate supervision and control, responsible decision making, supporting integrity in financial reporting, effective risk control, as well as upholding ethical relationships with Stakeholders. Therefore, the Company ensures the realization of comprehensive GCG principles and practices in every business activity by every personnel of Pelindo III.



KOMITMEN PENERAPAN GCG

Bagi Pelindo III, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan pilar utama yang mendukung kelangsungan usaha yang berkelanjutan, menjamin terpenuhinya hak seluruh pemangku kepentingan, serta menunjang tingkat kesehatan Perseroan. Dilatarbelakangi tujuan tersebut, Perseroan berkomitmen penuh dalam menerapkan kaidah dan prinsip serta memenuhi *best practices* GCG di seluruh lini bisnis yang dijalankan oleh seluruh organ Perseroan. Bersamaan dengan ini, Perseroan senantiasa meninjau kecukupan kebijakan dan perangkat kebijakan melalui evaluasi dan pemutakhiran secara berkala yang disesuaikan dengan perkembangan usaha serta perkembangan regulasi.

Sebagai bagian dari mekanisme perbaikan dan penyempurnaan implementasi GCG secara berkesinambungan, Perseroan melakukan penilaian (*assessment*) penerapan GCG dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku bagi BUMN maupun bagi entitas usaha secara umum. Rekomendasi penilaian GCG akan menjadi acuan dan bahan penyempurnaan penerapan GCG di masa mendatang.

Komitmen Perseroan terhadap pemenuhan implementasi GCG secara komprehensif telah tertuang dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018 tentang Reviu dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual* dan *Code of Corporate Governance*) yang menjadi pedoman bersama serta mempertegas komitmen manajemen dalam mengupayakan praktik terbaik GCG di lingkungan Perseroan.

TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN GCG

Penerapan prinsip dan praktik terbaik (*best practices*) Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) melandasi setiap aktivitas dan proses bisnis yang dijalankan oleh seluruh insan Perseroan. Perseroan meyakini bahwa implementasi GCG menjadi fondasi yang mampu menopang ketahanan dan kelangsungan bisnis berlandaskan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus

COMMITMENT TO GCG IMPLEMENTATION

Pelindo III considers the implementation of Good Corporate Governance (GCG) as the main pillar that supports a sustainable business continuity, ensures the fulfillment of the rights of all stakeholders, and supports the health level of the Company. Thus, the Company is fully committed to implementing the values and principles as well as fulfilling GCG best practices in all business lines carried out by all Company organs. The Company also constantly reviews the adequacy of policies and policy instruments through periodic evaluation and updating in line with business developments and regulatory developments.

As part of the mechanism for continuous improvement and refinement of GCG implementation, the Company conducts an assessment of the implementation of GCG based on the provisions that apply to SOE and for business entities in general. GCG assessment recommendations will serve as a reference and material for improving GCG implementation in the future.

The Company's commitment to fulfilling GCG implementation in a comprehensive manner has been stated in the Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. HK.150 /09/KEP/DK.P.III/2018 concerning Review and Revision of Corporate Governance Guidelines (*Board Manual* and *Code of Corporate Governance*) which serve as joint guidelines and reinforce management's commitment to striving for best practice GCG within the Company.

OBJECTIVES AND BENEFITS OF GCG IMPLEMENTATION

The implementation of the principles and best practices of Good Corporate Governance (GCG) underlies every activity and business process carried out by all Company personnel. The Company believes that the implementation of GCG is a foundation capable of supporting business resilience and continuity based on compliance with applicable laws and regulations, while ensuring the fulfillment of rights and obligations between the Company



menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban antara Perseroan dan seluruh pemangku kepentingan. Informasi lebih rinci mengenai tujuan dan sasaran implementasi GCG tersaji dalam tabel sebagai berikut:

and all stakeholders. More detailed information regarding the goals and objectives of GCG implementation is presented in the following table:

Tujuan Penerapan GCG bagi Perusahaan		Objectives of GCG Implementation
No.	Tujuan / Objective	Sasaran Tujuan / Target
1	Mendorong tercapainya kesinambungan Perseroan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan;	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemenuhan <i>best practice</i> GCG pada organ-organ Perseroan termasuk organ utama. Pemenuhan standar-standar yang berlaku pada proses bisnis Perseroan. Pemenuhan hak-hak Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meminimalkan penyimpangan dalam kegiatan usaha. Pengambilan keputusan yang mandiri berlandaskan penelaahan yang komprehensif.
	Encouraging the achievement of Company continuity through management that is based on transparency, accountability, responsibility, independence, as well as fairness and equality principles	<ul style="list-style-type: none"> To fulfil the best practices of GCG on Company's organs, including its main organ. To meet the prevailing standards in the Company's business process. To meet the rights of stakeholders based on the prevailing provisions. To minimise deviation in business activities. To encourage independent decision-making process that is based on comprehensive reviews.
2	Membangun mekanisme <i>Check and Balances</i> antar organ Perusahaan serta Pemangku Kepentingan lainnya, sehingga mampu mendorong peningkatan kinerja Perseroan dan komunikasi antar organ Perseroan dan Pemangku Kepentingan lainnya;	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan <i>assessment</i> dan/atau <i>assessment</i> mandiri implementasi penerapan GCG pada Perseroan. Tindak lanjut <i>area of improvement</i> atas hasil <i>assessment</i> dan/atau <i>assessment</i> mandiri yang telah dilaksanakan.
	Developing Check-and-Balances mechanism between the Company's organs and other Stakeholders to be able to encourage improvement to Company performance and communication between the Company's organs and other Stakeholders.	<ul style="list-style-type: none"> Implementation of assessment and/or self-assessment on GCG implementation in the Company. Follow-up on the area of improvement resulting from the implementation of assessment/self-assessment.
3	Meningkatkan kepercayaan Pemangku Kepentingan serta citra dan reputasi Perseroan, sehingga mampu mendorong peningkatan hubungan bisnis dan kinerja Perseroan;	<ul style="list-style-type: none"> Tercapainya target skor implementasi GCG pada Perseroan. Mendapatkan penghargaan khususnya dalam bidang implementasi GCG. Publikasi informasi publik tepat waktu guna memenuhi prinsip transparansi.
	Improving Stakeholders' trust as well as the image and reputation of the Company, to be able to leverage business relations and performance of the Company.	<ul style="list-style-type: none"> The achievement of GCG Implementation score target at the Company. To obtain awards, especially in GCG implementation. Timely disclosure of public information to fulfil the transparency principle.
4	Memaksimalkan nilai Perseroan dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar Perseroan memiliki daya saing yang kuat;	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam penguasaan GCG pada Perseroan.
	Optimising Company's values by improving the principles of transparency, accountability, reliability, responsibility, and fairness to reinforce the Company's competitiveness.	To improve Human Capital competencies in GCG aspect in the Company.



No.	Tujuan / Objective	Sasaran Tujuan / Target
5	Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perseroan; Encouraging a professional, transparent and efficient management of the Company, empowering the Company's functions and improving the independence of the Company's organs.	Pelaksanaan review terhadap sistem operasi dan prosedur yang dimiliki oleh Perseroan guna mengikuti perkembangan jaman dan menyesuaikan pada perubahan regulasi yang ada. To review the operation and procedure systems of the Company to follow the current development and adjust with the changes in regulations.
6	Mendorong agar organ Perseroan dapat membuat keputusan dan menjalankan tindakan yang dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan khususnya di sekitar Perseroan. Encouraging the decision-making process of the Company's organs and carrying out activities that are based on high moral value and compliance with the prevailing laws and regulations, as well as encouraging awareness of social responsibility of the Company to the Stakeholders as well as the preservation of the surrounding environment of the Company.	<ul style="list-style-type: none"> Penandatanganan pakta integritas sebagai bagian dari komitmen insan Pelindo III dalam implementasi GCG. Penandatanganan surat benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa dan pengambilan keputusan strategis Perusahaan. <ul style="list-style-type: none"> Signing of integrity pact as part of the commitment of Pelindo III Personnel in GCG implementation. The signing of conflict of interest statement in the procurement of goods and services and strategic decision-making processes of the Company

Komitmen kuat Pelindo III dalam mengimplementasikan prinsip dan nilai GCG senantiasa sejalan dengan tujuan keberadaan Perseroan sebagai entitas BUMN. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2003, pendirian BUMN haruslah memiliki tujuan dalam mendorong pengembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara; mengejar keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi; menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; serta turut aktif dalam memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Hal ini tentunya sesuai dengan dimensi penerapan GCG yang berlaku umum yang terakomodasi dalam aspek *People, Profit, and Planet*.

DASAR HUKUM PENERAPAN GCG

Fungsi penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai wujud kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku direalisasikan Perseroan melalui pemenuhan aspek legal-formal dan pengadopsian aturan yang berlaku di dunia usaha secara umum, regulasi yang berlaku bagi BUMN, maupun regulasi lainnya yang berlaku bagi sektor perhubungan dan kemaritiman.

The Company's strong commitment to implementing principles and values contained in GCG is certainly in line with the purposes and objectives of the Company as an SOE business entity. As stipulated in the Law No. 19 of 2003, the establishment of SOE shall have objectives such as providing a contribution to national economic development and state income, seeking for profit, benefitting the public by providing high-quality goods and services, pioneering business activities that have yet to be carried out by private sectors and cooperatives and actively providing guidance and support to underprivileged entrepreneurs, cooperatives and the public in general. Such objectives are in line with the dimension of GCG implementation that is applicable in general and accommodated within the People, Profit, and Planet aspects.

LEGAL BASIS FOR GCG IMPLEMENTATION

The function of implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG) as a form of the Company's compliance with the prevailing laws and regulations is realized through the fulfillment of legal-formal aspects and the adoption of rules that apply in the business world in general, regulations that apply to SOE, as well as other regulations that apply to the transportation and maritime sector.



Sebagai entitas BUMN yang menjunjung tinggi kepatuhan, Perseroan berupaya memenuhi ketentuan dan peraturan yang melebihi kewajiban. Dengan memperhatikan perkembangan regulasi yang berlaku, Perseroan juga melakukan beberapa penyesuaian dan penyempurnaan ketentuan yang berlaku internal demi memperkuat kualitas implementasi GCG secara berkesinambungan. Dari regulasi yang berlaku, Perseroan kemudian melakukan penafsiran dan internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan yang berlaku ke dalam kebijakan dan peraturan yang berlaku di lingkup internal.

Adapun beberapa aturan yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan usaha dan tata kelola Perusahaan antara lain:

Undang-Undang Republik Indonesia

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Pasal 5 ayat 3);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Pemerintah

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;

As a SOE entity that upholds compliance, the Company strives to comply with provisions and regulations that exceed its obligations. By taking into account the development of applicable regulations, the Company has also made several adjustments and improvements to the applicable internal regulations in order to strengthen the quality of GCG implementation on an ongoing basis. From the prevailing regulations, the Company then interprets and internalizes the values contained in the applicable regulations into policies and regulations that apply internally.

There are several rules that serve as a guideline for the implementation of business activities and corporate governance, including:

Laws of the republic Indonesia

- Law of the Republic of Indonesia No. 14 of 2008 on Information Disclosure.
- Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 on SOE (Article 5 paragraph 3).
- Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Company.
- Law of the Republic of Indonesia No. 5 of 1999 on Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.
- Law of the Republic of Indonesia No. 17 of 2008 on Shipping
- Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering;
- Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption;
- Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.

Government Regulations

- Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 45 of 2005 concerning the Establishment, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises;



- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 No. 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 No. 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5208).

Keputusan Menteri

- Keputusan Menteri BUMN No. Kep-102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);
- Keputusan Menteri BUMN No. Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
- Keputusan Menteri BUMN No. Kep-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN;
- Keputusan Menteri Perhubungan No. PM 146 tahun 2016 tentang Keputusan Menteri Perhubungan No. PM 51 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.

Peraturan Menteri

- Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN;
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN;
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN;

- Government Regulation No. 61 of 2009 on Port Business.
- Presidential Regulation No. 35 of 2011 on Amendment to the Presidential Regulation No. 54 of 2010 on Goods/ Services Procurement by the Government.
- Government Regulation No. 20 of 2010 on Water Transport (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2010 No. 26, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 5108) as amended to Government Regulation No. 22 of 2011 (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2010 No. 43, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 5208).

Ministerial Resolutions

- Decree of the Minister of SOE No. Kep-102/MBU/2002 on RJPP Drafting.
- Decree of the Minister of SOE No. Kep-101/MBU/2002 on RKAP Drafting.
- Decree of the Minister of SOE No. Kep-100/MBU/2002 on Assessment of SOE Soundness Level.
- Decree of the Minister of Transportation No. PM 146 of 2016 concerning Decree of the Minister of Transportation No. PM 51 of 2015 concerning the Implementation of Sea Ports.

Ministerial Regulations

- Regulation of the Minister of SOE No. PER-04/MBU/2014 which has been amended several times, lastly by the Regulation of the Minister of SOE No. PER-12/MBU/11/2020 dated November 25, 2020 on Guidelines to Determine Income for the BOD, BOC, and Supervisory Board of SOE.
- Regulation of the Minister of SOE No. PER-10/MBU/10/2020 on Amendment to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and Supervisory Board of SOE;
- Regulation of the Minister of SOE No. PER-02/MBU/02/2015 on Requirements and Procedures to Appoint and Dismiss the Members of the BOC and Supervisory Board of SOE.



- Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN;
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/09/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara kepada BUMN dan Perseroan Terbatas;
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara kepada BUMN dan Perseroan Terbatas;
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/12/2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa BUMN;
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit bagi BUMN;
- Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;
- Regulation of the Minister of SOE No. PER-03/MBU/02/2015 on Requirements and Procedures to Appoint and Dismiss the Members of BOD of SOE.
- Regulation of the Minister of SOE No. PER-11/MBU/09/2015 on Amendment to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-08/MBU/06/2015 on Guidelines to Report the Realisation of the Use of Funds from State Capital Investment in SOE and Limited Liability Companies.
- Regulation of the Minister of SOE No. PER-08/MBU/06/2015 on Guidelines to Report the Realisation of the Use of Funds from State Capital Investment in SOE and Limited Liability Companies.
- Regulation of the Minister of SOE No. PER-12/MBU/2012 on Supporting Organs of the BOC/Supervisory Board of SOE.
- Regulation of the Minister of SOE No. PER-08/MBU/12/2019 on Procurement of Goods and Services for SOE.
- Regulation of the Minister of SOE No. PER-05/MBU/2006 on Audit Committee for SOE.
- Decree of the Secretary to the Ministry of SOE No. SK16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012, on Assessment and Evaluation Indicators/Parameters on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOEs

Peraturan Lainnya

- Keputusan Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. HK.150/09/KEP/DK.P.III; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tanggal 3 September 2018 tentang Reviu dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual* dan *Code of Corporate Governance*);
- Keputusan Bersama Dewan Komisaris, Direksi, dan Serikat Pekerja PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. HK.202/09/DK.P.III/2017; HK.03/14/P.III-2017; 36/DP.SPPI/IX-2017 tanggal 25 September 2017 tentang Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) di Lingkungan Pelindo III;
- Pedoman Umum GCG oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 2006;
- Anggaran Dasar Pelindo III;
- Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tercantum dalam risalah RUPS;

Other Regulations

- Joint Decree of the BOC and BOD No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 dated September 3, 2018 on the Review and Revision of GCG (Board Manual and Code of Corporate Governance).
- Joint Decision of the BOC, BOD, and Pelabuhan Indonesia III Labor Union No. HK.202/09/DK.P.III/2017; HK.03/14/P.III-2017; 36/DP.SPPI/IX-2017 dated September 25, 2017, on the Code of Conduct within Pelindo III.
- The 2006 General GCG Guidelines by the National Governance Policy Committee (KNKG).
- Articles of Association of Pelindo III.
- Resolutions of General Meeting of Shareholders (GMS) contained in the minutes of GMS.



- Pedoman Audit Berbasis Risiko PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);
- Pedoman Teknis Manajemen Risiko Korporat PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);
- Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);
- Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);
- Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);
- Guidelines for Risk Based Audit of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);
- Technical Guidelines for Corporate Risk Management of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);
- General Guidelines for PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Internal Control System;
- Guidelines for Gratification Control of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);
- Guidelines for the Whistleblowing System of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);

PRINSIP PENERAPAN GCG

Dasar penerapan dan pengembangan struktur, infrastruktur, serta perangkat kebijakan GCG sepenuhnya memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku demi memastikan bahwa *best practices* GCG telah terpenuhi dengan baik. Mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BUMN, penerapan GCG berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

PRINCIPLES OF GCG IMPLEMENTATION

The basis for implementing and developing the structure, infrastructure, and instruments of GCG policies is fully concerned with compliance with the prevailing rules and regulations in order to ensure that GCG best practices are properly fulfilled. Referring to the Regulation of the Minister of State for SOEs No. PER-09/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Governance in SOE, the implementation of GCG adheres to the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

Prinsip GCG / GCG Principles	Definisi / Definition	Bentuk Implementasi / Implementation
Transparansi	Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Publikasi berbagai informasi, baik informasi keuangan serta informasi lainnya yang relevan serta bersifat material bagi stakeholders melalui website Pelindo III (www.pelindo.co.id). • Penerbitan beberapa laporan secara berkala baik dalam bentuk fisik, digital, atau siaran pers.
Transparency	Disclosure in the implementation of the decision-making process and openness in providing material and relevant information on a company;	<ul style="list-style-type: none"> • Publication of information sharing, both financial information and other relevant and material information for stakeholders through the Pelindo III website (www.pelindo.co.id). • Periodic publication of several reports whether in physical, digital form, or press releases.
Akuntabilitas	Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.	Setiap organ Perseroan telah memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas serta pembagian fungsi, hak, kewajiban, dan wewenang dengan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kebutuhan organisasi.
Accountability	Clarity of function, implementation and responsibility of organs so that a company's management may run effectively;	Every organ of the Company has a clear division of duties and responsibilities as well as a fair division of functions, rights, obligations and authorities in accordance with applicable regulations and organizational needs.



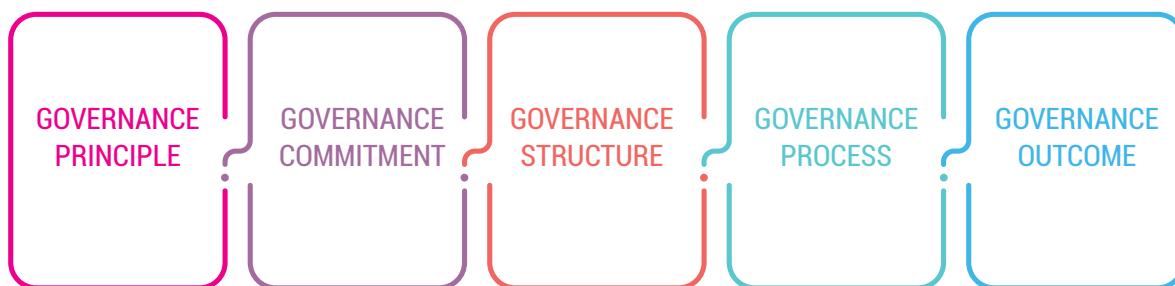
Prinsip GCG / GCG Principles	Definisi / Definition	Bentuk Implementasi / Implementation
Pertanggungjawaban	Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.	<ul style="list-style-type: none"> Mengikuti perkembangan regulasi yang berlaku, baik nasional, industri, maupun BUMN. Melaksanakan kewajiban pembayaran pajak dan menerapkan regulasi ketenagakerjaan. Menjunjung prinsip korporasi yang bersih melalui pelaporan LHKPN secara tepat waktu dan berkala, penerapan kebijakan anti korupsi dan anti gratifikasi, serta pengelolaan benturan kepentingan.
Responsibility	Conformity in the management of a company to the laws and regulations as well as sound corporate principles;	<ul style="list-style-type: none"> Stay updated with the development of applicable regulations, both national, industrial and State-Owned Enterprises. Perform tax payment obligations and implement labor regulations. Upholding clean corporate principles through timely and periodic LHKPN reporting, implementation of anti-corruption and anti-gratification policies, and management of conflicts of interest.
Independensi	Keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.	Perseroan telah menerapkan kebijakan pengelolaan benturan kepentingan serta independensi, khususnya bagi jajaran <i>top management</i> , guna memastikan pengambilan keputusan yang independen dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak mana pun.
Independency	Condition in which a company is managed professionally without any conflict of interest with and influence/pressure from other parties that are not based on the laws and regulations as well as sound corporate principles; and	The Company has implemented a policy of managing conflicts of interest and independence, especially for top management, to ensure that decision making is independent and free from influence/pressure from any party.
Kewajaran	Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> Menerapkan pengelolaan aset dengan baik dan penuh kehati-hatian sehingga memberikan perlindungan hak bagi pemangku kepentingan. Memberikan perlakuan yang adil dan menjunjung kesetaraan tanpa diskriminasi kepada seluruh insan Perseroan. Implement good and prudent asset management so as to protect the rights of stakeholders. Providing fair treatment and upholding equality without discrimination to all Company personnel.
Fairness	Fairness and equality in meeting the rights of Stakeholders arising from agreements and laws and regulations.	



KERANGKA GCG

GCG FRAMEWORK

GOVERNANCE FRAMEWORK



Governance Principle

Governance Principle merupakan prinsip-prinsip yang melandasi penerapan dan penegakan tata kelola Perseroan. Dalam hal ini, Perseroan berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, serta kewajaran berikut kepatuhannya terhadap regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Governance Commitment

Merupakan komitmen penuh yang terbangun oleh Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh insan Perseroan dalam menerapkan dan menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang menjunjung *best practices*. Penegakan komitmen ini didukung oleh infrastruktur tata kelola yang memadai, meliputi visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, rencana strategis dalam RJPP dan RKAP, kode etik, hingga pedoman perilaku.

Governance Structure

Mencakup struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang menjalankan tata kelola secara terpadu demi menghasilkan *outcome* atau hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Struktur utama GCG meliputi Dewan Komisaris, Direksi, komite-komite dan satuan kerja. Adapun infrastruktur tata kelola meliputi *soft structure*, kebijakan, dan pedoman tata kelola Perusahaan.

Governance Principle

Governance Principles are the principles underlying the implementation and enforcement of corporate governance. In this case, the Company adheres to the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness along with compliance with the prevailing laws and regulations.

Governance Commitment

It is a full commitment built by the Board of Commissioners, Board of Directors, and all Company personnel in implementing and enforcing Good Corporate Governance that upholds best practices. The enforcement of this commitment is supported by an adequate governance infrastructure, covering the vision, mission, corporate values, strategic plans in the RJPP and RKAP, a code of conduct, and a code of conduct.

Governance Structure

Includes corporate governance structures and infrastructure that carry out integrated governance in order to produce outcomes that are in line with stakeholder expectations. The main structure of GCG includes the Board of Commissioners, Directors, committees and work units. The governance infrastructure includes soft structure, policies and corporate governance guidelines.



Governance Process

Serangkaian standar dan prosedur yang digunakan oleh organ Perseroan dalam menjalankan penerapan dan penegakan tata kelola secara terencana, patuh terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta berkelanjutan. Proses tata kelola yang dijalankan antara lain melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pelaksanaan rencana kegiatan usaha dan langkah strategis, pengelolaan SDM dan IT, dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Governance Outcome

Hasil atau perwujudan dari penerapan dan penegakan tata kelola perusahaan, yang tercermin dari perolehan kinerja, kecukupan transparansi laporan, terjaganya kredibilitas Perseroan, terpeliharanya kepercayaan pemangku kepentingan, serta terhindarnya pelanggaran atau kecurangan (*fraud*). *Governance outcome* yang berhasil diraih Perseroan pada tahun buku 2020, antara lain tercermin melalui perolehan skor GCG sebesar 91,770 dan diraihnya sejumlah penghargaan eksternal di tahun 2020, yakni TOP GRC 2020 #4 Star, TOP GRC 2020 *The Most Committed GRC Leader 2020*, TOP GRC 2020 *The High Performing Board of Commissioner on GRC 2020* dan TOP GRC 2020 *The High Performing Corporate Secretary on GRC 2020*.

ROADMAP GCG

Perseroan telah membentuk *roadmap* pengembangan GCG sebagai penetapan arah implementasi GCG sekaligus acuan bagi seluruh insan Perseroan dalam menjalankan prinsip dan praktik GCG dalam setiap aktivitas bisnis yang dijalankan. Sasaran akhir *roadmap* GCG adalah terwujudnya Perseroan sebagai *Most Trusted Company*. Apabila sasaran tersebut dapat terealisasi, Perseroan optimis pertumbuhan dan perkembangan kinerja Perseroan dapat meningkat secara berkesinambungan.

Governance Process

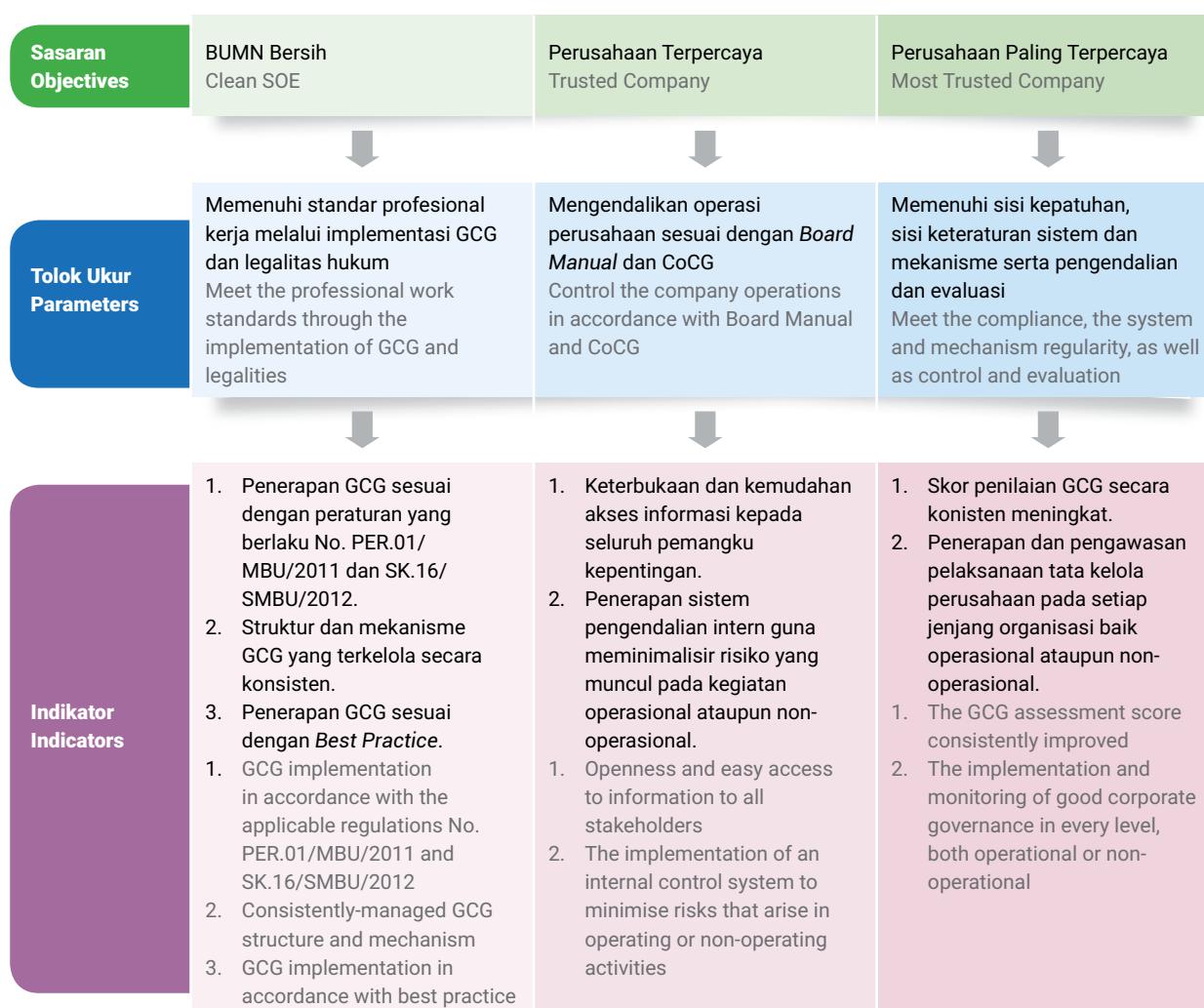
A series of standards and procedures used by the Company's organs in implementing and enforcing governance in a planned manner, complying with applicable rules and regulations, and in a sustainable manner. The governance processes that are carried out include the mechanism of the General Meeting of Shareholders (GMS), implementation of business activity plans and strategic steps, HR and IT management, and implementation of social and environmental responsibility.

Governance Outcome

The result or manifestation of the implementation and enforcement of corporate governance, which is reflected in the achievement of performance, adequacy of report transparency, maintained credibility of the Company, maintained stakeholder trust, and avoidance of violations or fraud. The governance outcome that was achieved by the Company in the 2020 fiscal year was reflected, among others, through the acquisition of a GCG score of 91,770 and a number of external awards in 2020, namely TOP GRC 2020 # 4 Star, TOP GRC 2020 The Most Committed GRC Leader 2020, TOP GRC 2020 The High Performing Board of Commissioner on GRC 2020 and TOP GRC 2020 The High Performing Corporate Secretary on GRC 2020.

GCG ROADMAP

The Company has established a GCG development roadmap to determine the direction of GCG implementation as well as a reference for all Company personnel in implementing GCG principles and practices in every business activity carried out. The ultimate goal of the GCG roadmap is the realization of the Company as the Most Trusted Company. If these targets can be realized, the Company is optimistic that the growth and development of the Company's performance can increase continuously.

**Roadmap Penerapan GCG****Roadmap of GCG Implementation****PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (CODE OF CORPORATE GOVERNANCE)**

Sebagai wujud komitmen Perseroan terhadap pemenuhan dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), Perseroan telah membentuk pedoman tata kelola Perusahaan atau *Code of Corporate Governance* (CoCG) yang berfungsi sebagai pedoman atau manual bagi seluruh insan Pelindo III dalam menjalankan perannya masing-masing dalam mewujudkan prinsip dan praktik terbaik GCG.

CODE OF CORPORATE GOVERNANCE

As a manifestation of the Company's commitment to the fulfillment and implementation of Good Corporate Governance, the Company has established a Code of Corporate Governance (CoCG) which serves as a guideline or manual for all Pelindo III personnel in carrying out their respective roles in realizing the principles and best practices of GCG.



Pembentukan CoCG ini dilatarbelakangi pemahaman bahwa pelaksanaan GCG harus dioptimalkan pada seluruh aktivitas dan proses bisnis yang dijalankan dengan berpegang penuh pada kaidah, norma, dan pedoman korporasi yang komprehensif dan terpadu bagi seluruh insan Perseroan.

Dengan adanya CoCG, diharapkan dapat tercipta suatu pola kerja tata kelola Perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Ketetapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (CoCG) telah disahkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018 dan No. PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tentang Reviu dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual* dan *Code of Corporate Governance*).

Kedudukan dan Sifat Pengembangan COCG

Mengingat CoCG merupakan penjabaran lebih lanjut dari Anggaran Dasar, maka dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu dan senantiasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan keputusan RUPS sebagai ketentuan yang lebih tinggi. Berbagai ketentuan detail yang terdapat dalam Anggaran Dasar, arahan Pemegang Saham yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan berbagai ketentuan hukum lainnya tetap mengikat walaupun tidak secara spesifik diuraikan.

Dengan karakteristik CoCG yang bersifat dinamis dan selalu berkembang, penyempurnaannya sangat tergantung pada perubahan yang terjadi di Perseroan. Untuk itu, secara berkala Perseroan melakukan penyesuaian yang dibutuhkan agar pelaksanaan CoCG Perseroan relevan dengan kondisi Perseroan dan mampu beradaptasi dengan dinamika yang terjadi dunia bisnis secara umum dan sektor jasa kepelabuhanan secara khusus.

The establishment of the CoCG was motivated by the understanding that the implementation of GCG must be optimized in all business activities and processes carried out in full adherence to comprehensive and integrated corporate rules, norms and guidelines for all Company personnel.

The establishment of the CoCG is hoped to be able to create a corporate governance work pattern in accordance with these principles. The provisions of the Code of Good Corporate Governance (CoCG) have been ratified through a Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018 and No. PER.0050/HK.01/HOFC-2018 concerning Review and Revision of Corporate Governance Guidelines (Board Manual and Code of Corporate Governance).

Position and Nature of COCG Development

Considering that CoCG is a further elaboration of Articles of Association, its implementation shall always refer to the laws and regulations as well as GMS resolutions as the higher provisions. Various detail regulations contained in the Articles of Association, directives from the Shareholders determined in the General Meeting of Shareholders, and other legal provisions remain binding despite them being nonspecifically described.

With its dynamic and continuously developing characteristics, improvement of CoCG highly depends on the changes occurred in the Company. Hence, the Company periodically adjusts the CoCG to ensure that it remains relevant to the condition of the Company and can adapt to the dynamics of the business industry in general and port service sector in particular.



Muatan CoCG Perusahaan

Dalam buku pedoman GCG Perseroan, terangkum beberapa aspek pembahasan dan petunjuk teknis pelaksanaan yang terbagi dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Pendahuluan

Pada bagian ini, diterangkan mengenai apa yang menjadi latar belakang dibentuknya pedoman GCG (CoCG) di Perseroan, maksud dan tujuan dikeluarkannya pedoman tersebut, serta ruang lingkup dan sistematika pengkajian pedoman.

2. Pokok-Pokok GCG

Dalam pembahasan pokok-pokok GCG, termuat informasi mengenai *soft structure* dalam penerapan GCG seperti tujuan penerapan GCG, prinsip-prinsip GCG, Visi dan Misi Perusahaan, dan Tata Nilai.

3. Struktur Tata Kelola Perusahaan

Setelah memuat informasi mengenai *soft structure*, pembahasan selanjutnya adalah perangkat pelaksana (infrastruktur) GCG di lingkungan Perseroan, seperti organ utama pelaksana GCG, organ pendukung, serta struktur tata kelola dengan pihak eksternal.

4. Proses-Proses GCG

Muatan proses GCG menerangkan petunjuk teknis atas ruang lingkup implementasi GCG pada organ utama, organ pendukung, dan struktur GCG lainnya seperti pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris, penetapan kontrak manajemen (KPI), pendelegasian wewenang, penetapan anggaran dan kerja Perusahaan, mekanisme rapat, dan lain sebagainya.

5. Pengelolaan Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

Pada bab ini memuat pembahasan mengenai dimensi serta pola hubungan antara Perseroan dengan berbagai pemangku kepentingan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG yang ada.

PENILAIAN PENERAPAN GCG (GCG ASSESSMENT)

Mekanisme penilaian penerapan GCG (GCG assessment) menjadi salah satu bagian tak terpisahkan dalam menjamin tata kelola perusahaan yang berkelanjutan dan menciptakan kredibilitas dan akuntabilitas di mata Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan. Penilaian penerapan GCG menjadi wujud komitmen dan upaya Perseroan dalam menyempurnakan implementasi GCG

Contents of COCG

The Company's CoCG guideline contains various discussion and guidelines of technical implementation and is divided into several parts, namely:

1. Introduction

This part describes the background for the establishment CoCG within the Company, intents and objectives of the guidelines, as well as scope and systematics of guideline presentation.

2. Principles of GCG

This part contains information on soft-structure of GCG implementation, such as objectives of GCG implementation, GCG principles, Vision and Mission, as well as Corporate Values.

3. Corporate Governance Structure

Following the information on soft-structure, this part describes the GCG infrastructures within the Company, such as the main organs of GCG implementation, supporting organs, as well as governance structure with external parties.

4. GCG Process

This part describes technical directions on the scope of GCG implementation in the main organs, supporting organs and other GCG structures such as the appointment and dismissal of the BOC, determination of management contract (KPI), delegation of authority, determination of Company's plan and budget, meeting mechanisms, and so on.

5. Management of Stakeholders Engagement

This chapter contains the relationship dimension and pattern between the Company and various related stakeholders based on the existing GCG principles.

ASSESSMENT ON GCG IMPLEMENTATION

The GCG implementation assessment mechanism is an integral part of ensuring sustainable corporate governance and creating credibility and accountability in the eyes of Shareholders and Stakeholders. The assessment of GCG implementation is a manifestation of the Company's commitment and efforts to improve GCG implementation based on the applicable criteria and provisions as well as



dengan mendasarkan pada kriteria dan ketentuan yang berlaku serta rekomendasi perbaikan di masa mendatang.

Standar Penilaian GCG

Dalam melakukan penilaian dan evaluasi penerapan GCG, Perseroan sebagai entitas BUMN mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN. Adapun ketetapan standar penilaian yang digunakan berpedoman pada Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG pada BUMN.

Indikator penilaian terdiri dari 6 Faktor/Aspek Penerapan GCG, 43 Indikator, 153 Parameter, serta 568 Faktor Uji Kesesuaian (FUK). Keenam Faktor/Aspek Penerapan GCG yang dinilai meliputi:

1. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan;
2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal;
3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
4. Direksi;
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi; dan
6. Aspek Lainnya.

Tipologi Penilaian GCG

Perbedaan jenis assessment GCG terletak pada pihak yang melakukan kegiatan tersebut. Terdapat 2 (dua) jenis assessment GCG yang dilakukan, di antaranya kegiatan assessment yang melibatkan pihak, institusi, atau lembaga di luar Perseroan (eksternal) dan kegiatan assessment yang melibatkan pihak internal Perseroan (*self-assessment*). Dalam melakukan kegiatan assessment, Perseroan bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan periode assessment dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.

recommendations for future improvements.

GCG Assessment Standards

In assessing and evaluating the implementation of GCG, the Company as a SOE entity refers to the Regulation of the Minister of State for SOEs Number PER-09/MBU/2012 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State for SOEs Number PER-01/MBU/2011 regarding Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises issued by the Ministry of BUMN. The assessment standards used are based on the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of GCG in BUMN.

The assessment indicators consist of 6 Factors/Aspects of GCG Implementation, 43 Indicators, 153 Parameters, and 568 Conformity Test Factors (FUK). The six factors/aspects of GCG implementation that are assessed include:

1. Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance;
2. Shareholders and GMS/Owners of Capital;
3. Board of Commissioners/Supervisory Board;
4. Directors;
5. Information Disclosure and Transparency; and
6. Other Aspects.

Typology of GCG Assessment

The difference in the types of GCG assessments lies with the parties that carry out these activities. There are 2 (two) types of GCG assessments carried out, including assessment activities involving parties, institutions, or institutions outside the Company (external) and assessment activities involving internal parties of the Company (self-assessment). In conducting assessment activities, the Company cooperates with Finance Supervisory and Development Board (BPKP), with an assessment period carried out every 2 (two) years.



Jenis-jenis Metode Assessment GCG di Pelindo III

Types of GCG Assessment Methods in Pelindo III

Self-Assessment (Asesmen Mandiri)	Assessment Eksternal
Menggunakan Standar Assessment Keputusan No. SK-16/S. MBU/2012 / utilises Assessment Standard according to the Decree No. SK16/S.MBU/2012	Menggunakan Standar Assessment Keputusan No. SK-16/S. MBU/2012 / Utilises Assessment Standard according to the Decree No. SK-16/S. MBU/2012
Tim penilai dilakukan oleh fungsi yang dibentuk khusus. / Assessor team is composed of a specifically-established function.	Tim penilai dilakukan oleh profesional dari masing-masing lembaga yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan assessment di Perseroan. / Assessor team is composed of professionals from each institution appointed to assess the Company.
Dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. / Conducted once every two years	Dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. / Conducted once every two years

Tahapan Pelaksanaan Assessment GCG Tahun 2020

Penilaian (assessment) GCG tahun 2020 dilaksanakan dengan menggunakan metode *self-assessment*. Adapun rincian mengenai tahapan pelaksanaan assessment GCG tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan / Activities	Tanggal Pelaksanaan / Date of Implementation
1	Pembentukan Tim Internal / Formation of Internal Team	14 Agustus 2020 / August 14, 2020
2	Entry Meeting	7 Agustus 2020 / August 7, 2020
3	Penelaahan Dokumen / Document Review	7 Agustus 2020 s.d 22 September 2020 / August 7, 2020 - September 22, 2020
4	Pembahasan Hasil Assessment / Discussion of Assessment Result	7 Agustus 2020 s.d 22 September 2020 / August 7, 2020 - September 22, 2020
5	Exit Meeting	22 September 2020 / September 22, 2020
6	Pengumuman Skor dan Hasil Assessment / Announcement of Assessment Score and Result	22 September 2020 / September 22, 2020

Hasil Assessment GCG Tahun 2020

Hasil penilaian GCG tahun 2020 yang dilakukan menggunakan metode *self-assessment* berhasil menunjukkan kemajuan yang cukup berarti dengan perolehan skor 91,770 dengan predikat "Sangat Baik". Hal ini menunjukkan bahwa penerapan, sosialisasi, serta internalisasi GCG telah dijalankan oleh seluruh lini organisasi dengan baik sesuai dengan kaidah, prinsip, serta praktik GCG yang berlaku. Informasi lebih rinci mengenai hasil assessment GCG tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut:

2020 GCG Assessment Stages

The 2020 GCG assessment was carried out using the self-assessment method. The details regarding the implementation stages of the 2020 GCG assessment are as follows:

2020 GCG Assessment Results

The results of the 2020 GCG assessment which was carried out using the self-assessment method succeeded in showing significant progress by obtaining a score of 91.770 with the predicate "Excellent". This shows that the implementation, socialization and internalization of GCG have been carried out by all lines of the organization properly in accordance with the prevailing GCG principles, principles and practices. More detailed information regarding the results of the 2020 GCG assessment is presented in the following table:

**Hasil Penilaian GCG Tahun 2020****Results of GCG Assessment in 2020**

No.	Indikator / Indicator	Bobot / Weight	Capaian / Achievement		
			2019	2018	
1	Komitmen terhadap penerapan tata kelola berkelanjutan / Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7,00	6,119	5,929	5,922
2	Pemegang Saham atau RUPS / Shareholders or GMS	9,00	8,150	8,092	8,222
3	Dewan Komisaris / Board of Commissioners	35,00	31,927	31,798	32,524
4	Direksi / Board of Directors	35,00	32,489	32,385	32,652
5	Pengungkapan informasi dan transparansi / Information Disclosure and Transparency	9,00	8,085	7,903	8,268
6	Aspek lainnya / Other Aspects	5,00	5	5	5
Jumlah / Total		100,00	91,770	91,107	92,587
Assessor			Self-Assessment	BPKP	Self-Assessment

Berdasarkan hasil assessment, penerapan GCG Pelindo III pada tahun 2020 memperoleh skor sebesar 91,770 dengan predikat "Sangat Baik". Jika dibandingkan dengan hasil assessment yang dilakukan pada tahun 2019, di mana assessment dilakukan oleh assessor eksternal yaitu BPKP, Perseroan memperoleh skor 91,107 dengan predikat "Sangat Baik" atau mengalami kenaikan sebesar 0,670 poin atau 1,00%.

Rekapitulasi pencapaian hasil penilaian GCG Pelindo III dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Based on the assessment results, Pelindo III's implementation of GCG in 2020 received a score of 91.770 with the predicate "Excellent". When compared with the results of the assessment carried out in 2018, where the assessment was carried out by an external assessor, namely BPKP, the Company obtained a score of 91.107 with the predicate "Excellent" or experienced an increase of 0.670 points or 1.00%.

The recapitulation of the achievement of Pelindo III's GCG assessment results in the last 5 (five) years is as follows:

Skor Penilaian GCG dalam 5 Tahun Terakhir**GCG Assessment Score in the Last 5 Years**

Tahun / Year	Skor / Score	Assessor
2020	91,770	Self-Assessment (Internal)
2019	91,107	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Perwakilan Provinsi Jawa Timur / Finance Supervisory and Development Board (BPKP), East Java Representative
2018	92,587	Self-Assessment (Internal)
2017	88,946	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Perwakilan Provinsi Jawa Timur / Finance Supervisory and Development Board (BPKP), East Java Representative
2016	84,831	Self-Assessment (Internal)



Hasil Penilaian GCG Berdasarkan Indikator dalam 5 Tahun Terakhir

Results of GCG Assessment Based on Indicators in the Last 5 Years

Assessor	Tahun / Years	Skor / Score					
		Komitmen terhadap Penerapan GCG / Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	Pemegang Saham dan RUPS / Shareholders and GMS	Dewan Komisaris / Board of Commissioners	Direksi / Board of Directors	Pengungkapan Informasi dan Transparansi / Information Disclosure and Transparency	Aspek Lainnya / Other Aspects
Self-Assessment (Internal)	2020	6,119	8,150	31,927	32,489	8,085	5
BPKP	2019	5,929	8,092	31,798	32,385	7,903	5
Self-Assessment	2018	5,922	8,222	32,524	32,652	8,268	5
BPKP	2017	5,725	8,222	32,524	32,652	8,268	1,750
Self-Assessment	2016	5,566	7,430	31,064	32,508	8,262	0

Rekomendasi dan Tindak Lanjut GCG

Penilaian GCG yang dilakukan menghasilkan sejumlah rekomendasi yang selanjutnya dijadikan bahan perbaikan kualitas GCG di tahun berikutnya. Adapun rekomendasi yang diidentifikasi dari penilaian GCG tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

GCG Recommendations and Follow-Up

The GCG assessment that was carried out resulted in a number of recommendations which were then used as material for improving the quality of GCG in the following year. The recommendations identified from the 2020 GCG assessment include the following:

No.	Rekomendasi / Recommendation	Tindak Lanjut / Follow-up	Penjelasan/Alasan / Explanation/Reason
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan / Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance			
1	Direksi agar memperbarui penandatanganan atas kepatuhan terhadap Pedoman perilaku setiap tahunnya dan menginstruksikan karyawan PT Pelindo III (Persero) untuk menandatangi pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku setiap tahunnya. / The BOD should renew the signing of compliance with the code of conduct annually and instructs PT Pelindo III employees to sign the compliance to the Code of Conduct annually.	Dalam Proses / In Process	Tindak lanjut atas rekomendasi ini dilakukan Direksi dengan menerbitkan instruksi memorandum untuk mengingatkan insan perusahaan akan kewajiban memperbarui penandatanganan atas kepatuhan terhadap Pedoman perilaku setiap tahunnya serta melaksanakan dokumentasi atas pelaksanaan penandatangan dokumen kepatuhan pada tahun 2020. / Follow up on this recommendation was carried out by the Board of Directors by issuing a memorandum of instruction to remind the Company's personnel of the obligation to renew the signing of compliance with the Code of Conduct every year and carry out documentation on the implementation of the compliance document signing in 2020.



No.	Rekomendasi / Recommendation	Tindak Lanjut / Follow-up	Penjelasan/Alasan / Explanation/Reason
2	Direksi agar menginstruksikan Penanggung jawab LHKPN Perusahaan untuk memantau dan memastikan tidak ada keterlambatan penyampaian LHKPN serta melaporkan hasilnya kepada Direksi. / The BOD instructs the Person in Charge of LHKPN to monitor and ensures that there is no delay in LHKPN submission and reports the results to the BOD	Dalam Proses / In Process	Tindak lanjut atas rekomendasi ini dilakukan Direksi dengan menerbitkan instruksi kepada Penanggung jawab LHKPN Perusahaan untuk memantau dan memastikan tidak ada keterlambatan penyampaian LHKPN serta melaporkan hasilnya kepada Direksi. / Follow-up on this recommendation was carried out by the Board of Directors by issuing instructions to the person in charge of the Company's LHKPN to monitor and ensure that there is no delay in submitting the LHKPN and reporting the results to the Board of Directors.
3	Direksi agar memberikan sanksi yang tegas kepada wajib lapor LHKPN yang tidak melaporkan harta kekayaannya. / The BOD imposes strict sanctions to LHKPN compulsory reporter who does not report their wealth.	Dalam Proses / In Process	Tindak lanjut atas rekomendasi ini dilakukan Direksi dengan menginstruksikan penanggung jawab LHKPN untuk menyusun draft perubahan regulasi LHKPN yang mengatur mengenai sanksi bagi insan perusahaan yang terlambat menyampaikan LHKPN. / Follow up on this recommendation was carried out by the Board of Directors by instructing the person in charge of LHKPN to prepare a draft of LHKPN regulatory changes that regulate sanctions for company personnel who are late in submitting LHKPN.
4	Direksi agar menyusun Program/Rencana Sosialisasi Pengaturan Gratifikasi dalam Program Kerja Tahunan Perusahaan. / The BOD arranges a Programme/Plan for Disseminating Gratification Control in the Company Annual Work Programme.	Dalam Proses / In Process	Tindak lanjut atas rekomendasi ini dilakukan Direksi dengan menginstruksikan bagian perencanaan untuk menyusun Program/Rencana Sosialisasi Pengaturan Gratifikasi dalam Program Kerja Tahunan Perusahaan tahun berikutnya. / The Board of Directors follows up on this recommendation by instructing the planning department to prepare a Gratification Control Dissemination Program/Plan in the Company's Annual Work Program for the following year.
5	Direksi agar menginstruksikan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi, untuk membuat rencana dan program kerja pengendalian gratifikasi. / The BOD instructs the Gratification Control Unit to make a plan and work programme for gratification control.	Dalam Proses / In Process	Tindak lanjut atas rekomendasi ini dilakukan Direksi dengan menginstruksikan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi, untuk membuat rencana dan program kerja pengendalian gratifikasi. / The Board of Directors follows up on this recommendation by instructing the Gratification Control Unit Team to make a plan and work program for gratification control.
6	Direksi dan Dewan Komisaris agar mengesahkan Pedoman Sistem Pengaduan Pelanggaran (WBS) di Lingkungan Pelindo III dalam suatu Keputusan Bersama. / The BOD and BOC ratify the Whistleblowing System (WBS) guideline in Pelindo III Vicinity in a Joint Decision.	Dalam Proses / In Process	Tindak lanjut atas rekomendasi ini dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris dengan membuat komitmen untuk mengesahkan Pedoman Sistem Pengaduan Pelanggaran (WBS) di Lingkungan Pelindo III dalam suatu Keputusan Bersama. / The Board of Directors and the Board of Commissioners follows up on this recommendation by making a commitment to ratify the Whistleblowing System Guidelines (WBS) within Pelindo III in a Joint Decree.



No.	Rekomendasi / Recommendation	Tindak Lanjut / Follow-up	Penjelasan/Alasan / Explanation/Reason
7	Direksi agar menyusun program kerja sosialisasi WBS dalam Program kerja tahunan Perusahaan dan menginstruksikan sekretaris perusahaan untuk mempublikasikan kebijakan dan kegiatan WBS dalam majalah perusahaan. / The BOD arranges a WBS socialisation work programme in the Company Annual Work Programme and instructs the Corporate Secretary to publish the WBS policy and activity in the Company magazine.	TUNTAS	Tindak lanjut atas rekomendasi ini dilakukan Direksi dengan menginstruksikan penanggung jawab WBS untuk menyusun program kerja sosialisasi WBS dalam Program kerja tahunan Perusahaan dan menginstruksikan sekretaris perusahaan untuk mempublikasikan kebijakan dan kegiatan WBS dalam majalah perusahaan. / The follow-up to this recommendation was carried out by the Board of Directors by instructing the person in charge of WBS to prepare a WBS dissemination work program in the Company's annual work program and instructing the company secretary to publish WBS policies and activities in company magazines.
8	Direksi agar menginstruksikan tim UNit pelaksana WBS untuk membuat Laporan atas pelaksanaan program kerja unit/ aktivitas WBS dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem WBS yang mencakup perangkat pendukung, sosialisasi yang telah dilakukan maupun asesmen terhadap efektifitas unit pelaksana dan media pendukungnya. / The BOD instructs the WBS Executing Unit to make a report on the implementation of work unit programme/WBS activity and conduct an evaluation on WBS system implementation which includes the supporting tools, conducted socialisations, and assessment on the effectiveness of the executing unit and their supporting media.	TUNTAS	Tindak lanjut atas rekomendasi ini dilakukan Direksi dengan menginstruksikan tim UNit pelaksana WBS untuk membuat Laporan atas pelaksanaan program kerja unit/aktivitas WBS dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem WBS yang mencakup perangkat pendukung, sosialisasi yang telah dilakukan maupun asesmen terhadap efektifitas unit pelaksana dan media pendukungnya. / The follow-up to this recommendation was carried out by the Board of Directors by instructing the WBS implementation unit team to prepare a report on the implementation of the WBS unit/activity work program and evaluate the implementation of the WBS system which includes supporting tools, outreach that has been carried out and assessment of the effectiveness of the implementing unit and its supporting media.

Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal / Shareholders and GMS/Capital Owners

1	Pemegang Saham agar menetapkan anggota Direksi baru yang definitif selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir. / The Shareholders appoint a new definitive BOD member at least 30 days since the term of office ends.	Dalam Proses / In Process	Tindak lanjut atas rekomendasi ini dilakukan Pemegang Saham dengan komitmen pada saat terjadi pergantian direksi dengan menetapkan anggota Direksi baru yang definitif selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir. / The shareholders follow up on this recommendation with a commitment at the time of a change of directors by assigning a new definitive member of the Board of Directors no later than 30 (thirty) days from the end of the term of office.
2	Pemegang saham agar mendokumentasikan Berita Acara Pelantikan Anggota Dewan Komisaris. / The Shareholders document the Minutes of BOC Members Appointment.	Dalam Proses / In Process	Tindak lanjut atas rekomendasi ini dilakukan Pemegang Saham dengan mendokumentasikan Berita Acara Pelantikan Anggota Dewan Komisaris pada saat terjadi pergantian Anggota Dewan Komisaris. / Follow-up on this recommendation was carried out by the Shareholders by documenting the Minutes of Inauguration of Members of the Board of Commissioners when there is a change of Members of the Board of Commissioners.



No.	Rekomendasi / Recommendation	Tindak Lanjut / Follow-up	Penjelasan/Alasan / Explanation/Reason
3	Pemegang Saham agar menyebutkan alasan pemberhentian anggota komisaris secara tertulis dalam keputusan RUPS mengenai pemberhentian anggota Dekom. / The Shareholders state the reasons for BOC member dismissal in writing in a GMS resolution on a BOC member dismissal.	Dalam Proses / In Process	Tindak lanjut atas rekomendasi ini dilakukan Pemegang Saham dengan menyebutkan alasan pemberhentian anggota komisaris secara tertulis dalam keputusan RUPS mengenai pemberhentian anggota Dekom. / Follow-up on this recommendation was carried out by the Shareholders by stating the reasons for the dismissal of the commissioners in writing in the GMS decision regarding the dismissal of members of the Board of Commissioners.
4	Pemegang Saham agar melakukan pembahasan RJPP 2020-2024 bersama dengan direksi dan dekom, meliputi presentasi RJPP oleh direksi dan rekomendasi Dekom dalam pembahasan tersebut serta mengeahkannya melalui keputusan RUPS tanpa menggunakan mekanisme pelampauan 60 hari dalam regulasi. / The Shareholders conduct a joint discussion regarding 2020-2024 RJPP with the BOD and BOC, including RJPP presentation by the BOD and BOC recommendation in the discussion. The results of the discussion shall be ratified through a GMS resolution without the 60-days overriding mechanism in the regulation.	Dalam Proses / In Process	Tindak lanjut atas rekomendasi ini dilakukan Pemegang Saham dengan komitmen melakukan pembahasan RJPP 2020-2024 bersama dengan direksi dan dekom, meliputi presentasi RJPP oleh direksi dan rekomendasi Dekom dalam pembahasan tersebut serta mengeahkannya melalui keputusan RUPS tanpa menggunakan mekanisme pelampauan 60 hari dalam regulasi. / Follow-up on this recommendation was carried out by the shareholders with a commitment to discuss the 2020-2024 RJPP together with the board of directors and the board of directors, including the presentation of RJPP by the board of directors and the recommendation of the Board of Commissioners in the discussion and to enforce it through a resolution of the GMS without using the 60-day exceeding mechanism in the regulation.
5	Pemegang saham agar memberikan persetujuan pelepasan aset secara tepat waktu sesuai ketentuan (tidak melebihi durasi 7 hari). / The Shareholders approve the asset disposal on time according to the provisions (not exceeding seven days).	Dalam Proses / In Process	Tindak lanjut atas rekomendasi ini dilakukan Pemegang Saham dengan komitmen memberikan persetujuan pelepasan aset secara tepat waktu sesuai ketentuan (tidak melebihi durasi 7 hari). / Follow-up on this recommendation was carried out by the shareholders with a commitment to provide approval for the disposal of assets in a timely manner according to the provisions (not to exceed 7 days).
6	Pemegang saham agar membuat ketentuan mengenai penilaian kinerja direksi secara individu dan pedoman penyusunan kontrak manajemen direksi secara individual. / The Shareholders make provisions regarding individual BOD performance assessment and the preparation guideline for individual BOD management contract.	Dalam Proses / In Process	Tindak lanjut atas rekomendasi ini dilakukan Pemegang Saham dengan komitmen akan membuat ketentuan mengenai penilaian kinerja direksi secara individu dan pedoman penyusunan kontrak manajemen direksi secara individual. / Follow-up on this recommendation was carried out by the shareholders with the commitment to make provisions regarding the performance appraisal of individual directors and guidelines for the preparation of individual directors' management contracts.
7	Pemegang saham agar menetapkan pedoman penyusunan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. / The Shareholders stipulate the preparation guideline for BOC supervisory duty report.	Dalam Proses / In Process	Tindak lanjut atas rekomendasi ini dilakukan Pemegang Saham dengan komitmen untuk menetapkan pedoman penyusunan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. / Follow-up on this recommendation was carried out by the shareholders with a commitment to establish guidelines for the preparation of reports on the supervisory duties of the Board of Commissioners.



No.	Rekomendasi / Recommendation	Tindak Lanjut / Follow-up	Penjelasan/Alasan / Explanation/Reason
8	Pemegang Saham agar menindaklanjuti area of improvement yang dihasilkan dari hasil assessment GCG 2018 dan sebelumnya. / The Shareholders follow up on the area of improvement from the previous GCG assessment results in 2018.	Tuntas / Completed	Tindak lanjut atas rekomendasi ini dilakukan Pemegang Saham dengan memberikan arahan dalam RUPS Pertanggungjawaban Laporan tahunan untuk menindaklanjuti area of improvement yang dihasilkan dari hasil assessment GCG 2018 dan sebelumnya. / Follow-up on this recommendation was carried out by the shareholders by providing direction in the Annual Report Accountability GMS to follow up on areas of improvement resulting from the results of the 2018 and previous GCG assessments.
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas / Board of Commissioners/Supervisory Board			
1	Dewan Komisaris agar merealisasikan kegiatan pengembangan kompetensi sesuai rencana yang dianggarkan. / The BOC shall realize the competency development activity according to the allocated budget	Dalam Proses / In Process	Tindak lanjut atas rekomendasi ini dilakukan Dewan Komisaris dengan menginstruksikan sekretaris dekom berkoordinasi sekretaris perusahaan untuk merealisasikan kegiatan pengembangan kompetensi sesuai rencana yang dianggarkan pada tahun mendatang. / Follow up on this recommendation was carried out by the Board of Commissioners by instructing the BOC secretary to coordinate with the company secretary to realize competency development activities according to the plan budgeted for in the coming year.
2	Dewan Komisaris agar melengkapi kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris dengan materi whistleblowing system. / The BOC Shall complete the BOC supervision and provision of advice policy with Whistleblowing System material	Dalam Proses / In Process	Tindak lanjut atas rekomendasi ini dilakukan Dewan Komisaris dengan menginstruksikan Komite Audit agar melengkapi kebijakan pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris dengan materi whistleblowing system. / Follow up on this recommendation was carried out by the Board of Commissioners by instructing the Audit Committee to complete the supervisory policy and providing advice to the board of commissioners with the whistleblowing system material.
3	Dewan Komisaris agar memberikan arahan tentang kebijakan pengelolaan anak perusahaan. / The BOC shall provide directives on Subsidiary management policy.	Dalam Proses / In Process	Tindak lanjut atas rekomendasi ini dilakukan Dewan Komisaris dengan memberikan arahan tentang kebijakan pengelolaan anak perusahaan dalam tugas-tugas pengawasan dekom. / Follow up on this recommendation was carried out by the Board of Commissioners by providing direction on the policies for managing the subsidiary in the supervisory duties of the Board of Commissioners.
4	Dewan Komisaris agar melakukan penilaian kinerja direksi secara individual. / The BOC shall assess the individual BOC performance.	Dalam Proses / In Process	Tindak lanjut atas rekomendasi ini dilakukan Dewan Komisaris dengan menginstruksikan Sekretaris Dekom untuk berkoordinasi dengan Pemegang Saham memohon arahan dalam melakukan penilaian kinerja direksi secara individual. / Follow up on this recommendation was carried out by the Board of Commissioners by instructing the Secretary of the Board of Commissioners to coordinate with the Shareholders to request directions in assessing the performance of the directors individually.



No.	Rekomendasi / Recommendation	Tindak Lanjut / Follow-up	Penjelasan/Alasan / Explanation/Reason
5	Dewan Komisaris agar melakukan telaah terhadap usulan remunerasi direksi sebelum mengusulkan penetapannya kepada pemegang saham. / The BOC shall conduct a review on the BOD remuneration proposal before proposing the stipulation to the Shareholders.	Dalam Proses / In Process	Tindak lanjut atas rekomendasi ini dilakukan Dewan Komisaris dengan menginstruksikan Komite Audit untuk melakukan telaah terhadap usulan remunerasi direksi sebelum mengusulkan penetapannya kepada pemegang saham. / Follow up on this recommendation was carried out by the Board of Commissioners by instructing the Audit Committee to review the proposed remuneration for the directors before proposing its determination to shareholders.
6	Dewan Komisaris agar menginstruksikan sekretaris Dekom untuk menambahkan dalam pedoman tata tertib rapat dengan materi tentang pengaturan pelaksanaan evaluasi hasil tindak lanjut rapat sebelumnya dan telaah atas usulan direksi dan persetujuan RUPS atas usulan direksi. / The Board of Commissioners instructs the secretary of the Board of Commissioners to add to the meeting guidelines with material on the evaluation of the follow-up results to the previous meeting and a review of the recommendation of the Board of Directors and the approval of the GMS on the proposal of the Board of Directors.	TUNTAS	Tindak lanjut atas rekomendasi ini dilakukan Dean Komisaris dengan menginstruksikan sekretaris Dekom untuk menambahkan dalam pedoman tata tertib rapat dengan materi tentang pengaturan pelaksanaan evaluasi hasil tindak lanjut rapat sebelumnya dan telaah atas usulan direksi dan persetujuan RUPS atas usulan direksi. / Follow up on this recommendation was carried out by the Board of Commissioners by instructing the Secretary of the Commission to add to the guidelines for meeting rules with material regarding the implementation of the evaluation of the results of the follow-up to the previous meeting and review of the recommendations of the directors and the approval of the GMS on the recommendations of the directors.
7	Dewan Komisaris agar menginstruksikan Sekretaris Dekom untuk menambahkan materi tindak lanjut atas hasil rapat sebelumnya pada risalah rapat Dekom. / The BOC shall instruct BOC Secretary to add follow-up material on the results of previous BOC minutes of meetings.	Dalam Proses / In Process	Tindak lanjut atas rekomendasi ini dilakukan Dewan Komisaris dengan menginstruksikan Sekretaris Dekom untuk menambahkan materi tindak lanjut atas hasil rapat sebelumnya pada risalah rapat Dekom. / Follow up on this recommendation was carried out by the Board of Commissioners by instructing the Secretary of the Board of Commissioners to add follow-up material on the results of the previous meeting to the minutes of the Board of Commissioners' meetings.
8	Dewan Komisaris agar menginstruksikan Komite audit untuk melakukan pembaharuan atas piagam komite audit. / The BOC shall instruct the Audit Committee to update the Audit Committee Charter	Dalam Proses / In Process	Tindak lanjut atas rekomendasi ini dilakukan Dewan Komisaris dengan menginstruksikan Komite audit untuk melakukan pembaharuan atas piagam komite audit. / Follow up on this recommendation was carried out by the Board of Commissioners by instructing the Audit Committee to update the audit committee charter.
9	Dewan Komisaris agar menginstruksikan Komite Dekom menyusun laporan triwulan dengan rekomendasi serta mengirimkannya kepada Dewan Komisaris. / The BOC shall instruct the BOC Committee to prepare quarterly report including the recommendations and deliver the report to the BOC.	Dalam Proses / In Process	Tindak lanjut atas rekomendasi ini dilakukan Dewan Komisaris dengan menginstruksikan Komite Dekom menyusun laporan triwulan dengan rekomendasi serta mengirimkannya kepada Dewan Komisaris. / Follow up on this recommendation was carried out by the Board of Commissioners by instructing the Board of Commissioners' Committee to prepare a quarterly report with recommendations and send them to the Board of Commissioners.



No.	Rekomendasi / Recommendation	Tindak Lanjut / Follow-up	Penjelasan/Alasan / Explanation/Reason
Direksi / Board of Directors			
1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program diklat bagi direksi dan anggaran yang terpisah dengan pelaksanaan diklat karyawan. / Prepares a training programme for the BOC with a separate budget from the employee training implementation budget. 2. Merealisasikan diklat bagi direksi sesuai program/rencana yang telah dianggarkan. / Implementing the training for the BOD according to the budgeted programme/plan. 	Dalam Proses / In Process	Tindak lanjut atas rekomendasi ini dilakukan oleh direksi dengan menyusun dan merealisasikan program diklat bagi direksi dan anggaran yang terpisah dengan pelaksanaan diklat karyawan. / Follow-up to this recommendation was carried out by the Board of Directors by compiling and implementing a training program for the Board of Directors and a separate budget from the implementation of employee training.
2	Melakukan langkah-langkah guna mencegah terjadinya pelanggaran SOP, misalnya dengan melakukan reviu dan kajian terhadap SOP-SOP yang dilanggar. / Taking the measures to prevent SOP violation, e.g. through a review and study on the violated SOP.	Dalam Proses / In Process	Tindak lanjut atas rekomendasi ini dilakukan direksi dengan menginstruksikan SPI untuk melakukan reviu terhadap SOP-SOP yang dilanggar. / Follow-up to this recommendation was carried out by the Board of Directors by instructing SPI to conduct a review of the SOP-SOPs that were violated.
3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan rancangan RJPP 2020-2024 kepada Dewan Komisaris sebelum tanggal 30 September 2019 untuk ditelaah. / Submits the 2020-2024 RJPP draft to the BOC before 30 September 2019 to be reviewed. 2. Menyampaikan rancangan RJPP 2020-2024 kepada Pemegang Saham selambatnya pada tanggal 31 Oktober 2019. / Submits the 2020-2024 RJPP draft to the Shareholders no later than 31 October 2019. 	Dalam Proses / In Process	Tindak lanjut atas rekomendasi ini dilakukan Direksi dengan komitmen melakukan pembahasan RJPP 2020-2024 bersama dengan PS dan dekom, meliputi presentasi RJPP oleh direksi dan rekomendasi Dekom dalam pembahasan tersebut serta mengeahkannya melalui keputusan RUPS tanpa menggunakan mekanisme pelampauan 60 hari dalam regulasi. / Follow-up to this recommendation was carried out by the Board of Directors with a commitment to discussing the 2020-2024 RJPP together with the PS and the Board of Commissioners, including the presentation of RJPP by the board of directors and the recommendation of the Board of Commissioners in the discussion and enforcing it through a resolution of the GMS without using the 60-day exceeding mechanism in the regulation.
4	Bersama-sama dengan Pemegang Saham untuk menetapkan target kinerja individu direksi. / Stipulates the BOD individual performance target with the Shareholders.	Dalam Proses / In Process	Tindak lanjut atas rekomendasi ini dilakukan Direksi dengan menginstruksikan Sekretaris Dekom untuk berkoordinasi dengan Pemegang Saham memohon arahan dalam melakukan penilaian kinerja direksi secara individual. / Follow-up to this recommendation was carried out by the Board of Directors by instructing the Secretary of the Board of Commissioners to coordinate with the Shareholders to request directions in assessing the performance of the directors individually.
5	Menyampaikan usulan insentif kinerja Direksi kepada Pemegang Saham setelah mendapatkan telaah dan persetujuan Dewan Komisaris. / Submits the BOD performance incentive proposal to the Shareholders after obtaining a review and approval from the BOC.	Dalam Proses / In Process	Tindak lanjut atas rekomendasi ini dilakukan Direksi dengan menginstruksikan Sekretaris Dekom untuk berkoordinasi dengan Dewan Komisaris setelah menyusun usulan insentif kinerja Direksi. / Follow-up to this recommendation was carried out by the Board of Directors by instructing the Secretary of the Board of Commissioners to coordinate with the Board of Commissioners after compiling a proposal for performance incentives for the Board of Directors.



No.	Rekomendasi / Recommendation	Tindak Lanjut / Follow-up	Penjelasan/Alasan / Explanation/Reason
6	Meningkatkan program-program K3 untuk menekan tingkat kecelakaan kerja. / Improves K3 programmes to reduce occupational accident rates.	Dalam Proses / In Process	Tindak lanjut atas rekomendasi ini dilakukan Direksi dengan meningkatkan kegiatan-kegiatan preventif, promotif dan implementatif program K3 untuk menekan tingkat kecelakaan kerja. / Follow-up to this recommendation was carried out by the Board of Directors by increasing preventive, promotive and implementative activities of the K3 program to reduce the level of work accidents.
7	Agar laporan asesmen kinerja pemasok/vendor memuat rekomendasi hasil asesmen, serta melakukan tindaklanjut hasil asesmen tersebut. / Supplier/vendor performance assessment report includes the recommendation from the result and conducting a follow-up to the assessment results.	Dalam Proses / In Process	Tindak lanjut atas rekomendasi ini dilakukan Dewan Komisaris dengan menginstruksikan Tim Penyusun Laporan asesmen kinerja pemasok/vendor untuk memuat rekomendasi hasil asesmen, serta melakukan tindaklanjut hasil asesmen tersebut. / Follow-up to this recommendation was carried out by the Board of Directors by instructing the Supplier/Vendor performance assessment Report Preparation Team to include recommendations on the results of the assessment, as well as to follow up on the results of the assessment.
8	Meningkatkan nilai pemegang saham melalui peningkatan <i>Earning Per Share</i> secara konsisten. / Increasing the Shareholders value through a consistent increase in Earning per Share.	Dalam Proses / In Process	Dalam Setiap Rapat maupun kegiatan Direksi selalu menekankan kepada jajarannya untuk peningkatan kinerja perusahaan. / In every meeting and activity the Board of Directors always emphasizes on the staff to improve company performance.
9	Agar rencana rapat direksi tahunan memuat agenda rapat yang akan dibahas. / The annual BOD meeting plan shall include the meeting agenda to be discussed.	Dalam Proses / In Process	Tindak lanjut atas rekomendasi ini dilakukan Direksi dengan menginstruksikan Sekretaris Perusahaan untuk menyusun rencana rapat direksi dengan memuat agenda rapat yang akan dibahas. / Follow-up to this recommendation was carried out by the Board of Directors by instructing the Corporate Secretary to prepare a plan for the board of directors' meeting to include an agenda for the meeting to be discussed.
10	Dalam Notulen Rapat Gabungan (BOD-BOC) agar menjelaskan alasan ketidakhadiran Direksi dan/atau Komisaris. / States the reason for BOD and/or BOC absence in the Minutes of Joint Meeting.	Dalam Proses / In Process	Tindak lanjut atas rekomendasi ini dilakukan Direksi dengan menginstruksikan Sekretaris Perusahaan untuk menginfirmasikan alasan ketidakhadiran Direksi dan/atau Komisaris dalam Notulen Rapat Gabungan. / Follow-up to this recommendation was carried out by the Board of Directors by instructing the Corporate Secretary to confirm the reasons for the absence of the Board of Directors and / or Commissioners in the Joint Meeting Minutes.
11	Agar melakukan asesmen atas kepatuhan SPI terhadap IAC dan pedoman-pedoman pelaksanaan pengawasan yang dimiliki SPI. (<i>self assessment</i> tahunan dan independent assessment setiap 5 tahun) / Assesses the SPI compliance to IAC and guidelines of supervision implementation by SPI (annual self-assessment and independent assessment every five years).	Dalam Proses / In Process	Tindak lanjut atas rekomendasi ini dilakukan Direksi dengan menginstruksikan Kepala SPI untuk melakukan asesmen atas kepatuhan SPI terhadap IAC dan pedoman-pedoman pelaksanaan pengawasan yang dimiliki SPI. (<i>self assessment</i> tahunan dan independent assessment setiap 5 tahun) / Follow-up to this recommendation was carried out by the Board of Directors by instructing the Head of SPI to conduct an assessment of SPI's compliance with IAC and the guidelines for implementing the supervision that is owned by SPI. (annual self-assessment and independent assessment every 5 years)



No.	Rekomendasi / Recommendation	Tindak Lanjut / Follow-up	Penjelasan/Alasan / Explanation/Reason
12	Menyelenggarakan RUPS RJPP 2020-2024 secara tepat waktu. (selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari setelah diterimanya Rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum periode RJPP berjalan) / Holds the 2020-2024 RJPP GMS on time (at least 60 days after RJPP draft has been fully received or before RJPP period commenced).	Dalam Proses / In Process	Tindak lanjut atas rekomendasi ini dilakukan Sekretaris Perusahaan dengan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN terkait penyelenggaraan RUPS RJPP 2020-2024 / Follow-up to this recommendation was carried out by the Corporate Secretary by coordinating with the Ministry of BUMN regarding the holding of the 2020-2024 RJPP GMS.

Pengungkapan Informasi dan Transparansi / Information Disclosure and Transparency

1	Agar dalam Laporan Tahunan pada Bab Profil Perusahaan menginformasikan / In the Company Profile chapter of the Annual Report should also inform : <ol style="list-style-type: none"> Kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris dan atau keluarganya pada perusahaan lain. / BOD and BOC share ownership or their families' in other companies. Adanya atau tidak adanya tindakan perusahaan yang menyebabkan jumlah efek lainnya. / Any other existing Corporate action that causes some other securities. Perubahan jumlah efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku / Changes in the number of other securities from the beginning of registration to the end of the fiscal year. Nama Bursa dimana efek lainnya perusahaan dicatatkan / Name of the Exchange where the Company's other securities are listed. Alamat anak perusahaan / Subsidiary addresses. 	Dalam Proses / In Process	Tindak lanjut atas rekomendasi ini dilakukan Sekretaris Perusahaan dengan menginstruksikan Tim Penyusun Laporan Tahunan untuk menginformasikan hal-hal tersebut dalam laporan tahunan / Follow-up to this recommendation was carried out by the Corporate Secretary by instructing the Annual Report Preparation Team to inform these matters in the annual report.
2	Agar dalam Laporan Tahunan pada Bab Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan, memuat / The Management Analysis and Discussion chapter of the Annual Report should also include : <ol style="list-style-type: none"> Uraian produksi dan pendapatan secara lengkap. / A complete description of production and revenue. Uraian tentang komponen-komponen substansi dari pendapatan dan beban lainnya untuk dapat mengetahui hasil usaha perusahaan. / The description of substantial components of the revenue and other expenses to know the company's operating results. Dampak perubahan harga terhadap penjualan atau pendapatan bersih perusahaan dan laba usaha selama dua tahun. / The impacts of price changes to Company sales or net revenue and operating profit for two years. 	Dalam Proses / In Process	Tindak lanjut atas rekomendasi ini dilakukan Sekretaris Perusahaan dengan menginstruksikan Tim Penyusun Laporan Tahunan untuk menginformasikan hal-hal tersebut dalam laporan tahunan. / Follow-up to this recommendation was carried out by the Corporate Secretary by instructing the Annual Report Preparation Team to inform these matters in the annual report.



No.	Rekomendasi / Recommendation	Tindak Lanjut / Follow-up	Penjelasan/Alasan / Explanation/Reason
	4. Informasi material mengenai, ekspansi, divestasi, akuisisi, dan restrukturisasi hutang/modal / Material information on expansion, divestment, acquisition, and debt/capital structuring.		
3	<p>Agar dalam Laporan Tahunan pada Bab Praktek Tata Kelola Perusahaan Yang Baik memuat / The Good Corporate Governance chapter of the Annual Report should also include :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Besarnya remunerasi anggota Direksi yang meliputi gaji, fasilitas dan atau tunjangan lain yang diterima dari anak perusahaan/perusahaan asosiasi perusahaan yang bersangkutan. / Amount of BOD remuneration which includes salary, facilities, and/or other benefits received from related subsidiaries/ associate companies. 2. Uraian pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan secara lengkap. / A complete description of Corporate Secretary duties implementation. 3. Uraian hasil evaluasi tahunan oleh Satuan Pengawasan Intern atas pengendalian perusahaan. / Description of annual evaluation results by the Internal Audit on company control. 4. Program peningkatan layanan kepada pelanggan dan biaya yang telah dikeluarkan atas program peningkatan layanan kepada langganan. / Service improvement programme for customers and the costs of the service improvement programme. 5. Pokok perkara nomor 15/KPPU-L/2018 tentang dugaan adanya praktik monopoli jasa bongkar muat (kebijakan wajib stack/penumpukan kontainer 100%) di Pelabuhan L Say Maumere. / Case No. 15/KPPUL/2018 on the alleged loading-unloading monopoly practice (mandatory stack policy/100% container stacking) in Port of L-Say Maumere. 	Dalam Proses / In Process	Tindak lanjut atas rekomendasi ini dilakukan Sekretaris Perusahaan dengan menginstruksikan Tim Penyusun Laporan Tahunan untuk menginformasikan hal-hal tersebut dalam laporan tahunan. / Follow-up to this recommendation was carried out by the Corporate Secretary by instructing the Annual Report Preparation Team to inform these matters in the annual report.
4	Agar berupaya untuk berpartisipasi dalam <i>Sustainability Reporting Award</i> dan sejenisnya / Participates in a Sustainability Reporting Award and the like.	Dalam Proses / In Process	Tindak lanjut atas rekomendasi ini dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan dengan menerbitkan memo dinas untuk mengikuti CSR Award / Follow-up to this recommendation was carried out by the Corporate Secretary by issuing an official memo to participate in the CSR Award



Perbandingan antara Target dan Realisasi Penilaian GCG

Komitmen peningkatan *best practice* GCG tertuang dalam RKAP dan KPI Perseroan di mana target perolehan skor *assessment* GCG yang ditetapkan di tahun 2020 adalah sebesar 91,770, tumbuh 1,00% dari perolehan skor penilaian GCG tahun 2019 sebesar 91,107. Pencapaian tersebut mencerminkan komitmen nyata Perseroan dalam meningkatkan implementasi seluruh prinsip-prinsip GCG dalam aktivitas usaha yang dijalankan.

Pada dasarnya, dalam hal penetapan target skor *assessment* GCG, Perseroan tidak hanya menitikberatkan pada kuantitas nilai yang diperoleh, tetapi juga mempertimbangkan kajian strategis dengan berbagai pihak internal Perseroan, yang mana dalam hal ini yaitu Internal Audit, *Management System and Risk Management*, dan *Strategic Planning and Corporate Performance Bureau* untuk mengukur sejauh mana kapabilitas Perseroan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG serta memenuhi kaidah dan ketentuan yang dipersyaratkan dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik.

Indikator yang dipertimbangkan dalam menentukan dan menetapkan target skor GCG setiap tahun, antara lain:

- Skor GCG di tahun sebelumnya (*self-assessment* dan/atau *assessment* dengan pihak eksternal);
- Tingkat pemenuhan dan tindak lanjut atas rekomendasi GCG di tahun sebelumnya;
- Implementasi atas *area of improvement* GCG; dan
- Aspirasi Pemegang Saham.

Selain melihat beberapa indikator yang ada, Perseroan juga melakukan verifikasi implementasi GCG untuk melakukan penilaian apakah aspek keterpenuhan infrastruktur dan *soft structure* GCG di Perusahaan terkorelasi dengan praktik-praktik yang ada, seperti tingkat pemenuhan kepatuhan, laporan pelanggaran, teguran dan sanksi administrasi, laporan tingkat penyimpangan, laporan pelanggaran kode etik, serta laporan dari WBS sepanjang tahun buku.

Berdasarkan hasil penelaahan atas indikator serta verifikasi atas kondisi aktivitas tata kelola Perusahaan yang disebutkan sebelumnya, disimpulkan bahwa pengelolaan Perseroan telah mengacu dan sesuai

Comparison Between Target and Realisation

Commitment to improving the GCG best practices is contained in the RKAP and KPI of the Company where the stipulated target of GCG assessment score for 2020 is 91,770, growing 1.00% from the 2019 GCG assessment score of 91,107. Concerning the comparison and its realisation, the Company has demonstrated a real commitment to improving the implementation of all GCG principles in its daily business activities.

Essentially, in determining the target of GCG assessment score, the Company does not merely focus on the quantity of obtained score but also conducts strategic review with various internal parties, such as Internal Audit, Management System and Risk Management, as well as Strategic Planning and Corporate Performance Bureau, to measure the extent of Company's capability to implement GCG principles as well as fulfilling various aspects required to support the application of good and sound business governance.

The indicators that are considered in determining and determining the target GCG score each year include:

- GCG score in the previous year (*self-assessment* and/or *assessment* with external parties);
- The level of fulfillment and follow-up on GCG recommendations in the previous year;
- Implementation of the area of improvement GCG; and
- Shareholders Aspirations.

In addition to observing the existing indicators, the Company verifies its GCG implementation to understand whether it has fulfilled the aspect of infrastructure and soft-structure of GCG and whether they have been well-correlated with the existing practices in the Company, such as the level of compliance, violation report, administrative sanction, violation level report, code of conduct violation report, and WBS report throughout the fiscal year.

Based on the result of the review on indicators as well as verification of Company's governance activity condition previously mentioned, it can be concluded that the Company's management has referred to and been



dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham.

SOSIALISASI, INTERNALISASI, DAN EVALUASI GCG

Dalam menjamin efektivitas penerapan GCG dalam setiap aktivitas usaha serta pengambilan keputusan, diperlukan kesadaran serta keterlibatan seluruh insan Perseroan di berbagai lini organisasi perusahaan. Untuk mewujudkannya, Perseroan telah membentuk kebijakan dan sarana sosialisasi dan internalisasi prinsip dan kaidah GCG guna menjamin kesamaan persepsi di antara insan Perseroan dalam mengimplementasikan prinsip dan praktik GCG.

Setelah terbangun kesamaan persepsi tersebut, peningkatan efektivitas implementasi GCG diperkuat dengan mekanisme evaluasi GCG melalui *assessment* secara berkala, baik yang dilakukan secara *self-assessment* atau pun melalui *assessment* oleh pihak eksternal. Pengukuran dan evaluasi penerapan GCG akan menghasilkan rekomendasi perbaikan yang akan menyempurnakan implementasi GCG secara berkelanjutan.

Sosialisasi

Kesamaan persepsi atas implementasi GCG bagi seluruh insan Pelindo III di setiap jenjang harus senantiasa tercipta. Hal ini berguna untuk menciptakan efektivitas pengelolaan serta menempatkan seluruh organ menuju pada satu visi yang sama terkait pemenuhan prinsip-prinsip yang ada. Untuk itu, diperlukan sarana yang tepat berupa sosialisasi atas implementasi GCG.

Kegiatan sosialisasi GCG ditujukan untuk memberikan pemahaman secara mendalam mengenai perkembangan aturan yang berlaku serta manfaat yang diciptakan terkait pemenuhan *best practice* GCG di lingkungan Perseroan. Pemahaman tersebut harus disosialisasikan dengan baik terhadap subjek-subjek pelaksananya, khususnya dalam lingkup internal Perseroan/internalisasi. Hal tersebut disebabkan penerapan GCG banyak menitikberatkan pada kegiatan operasional Perseroan yang banyak melibatkan pihak-pihak terkait di dalamnya.

based on the regulations of the Ministry of SOE as the Shareholder.

DISSEMINATION, INTERNALIZATION AND EVALUATION OF GCG

In ensuring the effectiveness of the implementation of GCG in every business activity and decision making, it requires awareness and involvement of all Company personnel in various lines of the company's organization. To make this happen, the Company has established policies and means of socializing and internalizing the principles and principles of GCG to ensure a common perception among the Company's personnel in implementing GCG principles and practices.

After this common perception has been established, the increase in the effectiveness of GCG implementation is strengthened by the GCG evaluation mechanism through periodic assessments, either through self-assessment or through assessments by external parties. Measurement and evaluation of GCG implementation will produce recommendations for improvements that will enhance GCG implementation in a sustainable manner.

Dissemination

Common perception of the implementation of GCG for all Pelindo III personnel at every level must always be established. This is useful for creating management effectiveness and placing all organs towards the same vision regarding the fulfillment of existing principles. Therefore, an appropriate method of dissemination on the implementation of GCG is needed.

The GCG dissemination activities are aimed at providing an in-depth understanding of the development of applicable regulations and the benefits created related to fulfilling GCG best practices within the Company. This understanding must be well-circulated to the implementing subjects, especially within the Company's internal. This is because the implementation of GCG heavily focuses on the Company's operational activities which involve a lot of related parties in it.



Salah satu bentuk dilaksanakannya kegiatan sosialisasi penerapan GCG adalah kegiatan publikasi internal Perseroan terkait kerangka kerja dan petunjuk implementasi GCG yang tertuang dalam *Code of Conduct* Perseroan. Publikasi atas *Code of Conduct* dilakukan kepada organ utama Perseroan, organ pendukung dan pihak-pihak terkait lainnya. Di tahun 2020, Perseroan telah melaksanakan sosialisasi GCG selain sosialisasi terhadap CoCG Perseroan yaitu penandatanganan pakta integritas bagi Insan Pelindo III.

Internalisasi

Salah satu bentuk kegiatan internalisasi GCG di Pelindo III adalah dengan diterbitkannya pedoman pelaksanaan GCG (*Code of Conduct*) yang telah disahkan melalui keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. *Code of Conduct* Pelaksanaan GCG yang tertuang dalam buku pedoman CoCG Perseroan menjadi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis atas implementasi GCG di Perseroan.

Evaluasi

Untuk memberikan gambaran serta evaluasi atas efektivitas pelaksanaan GCG di Perseroan, setiap tahunnya, Perseroan melakukan kegiatan evaluasi dan pengukuran penerapan GCG melalui kegiatan *assessment* dan/atau *assessment mandiri (self-assessment)*. Pelaksanaan *assessment* GCG yang dilakukan oleh Perseroan dilaksanakan dengan menggandeng pihak eksternal. Hasil dari pengukuran GCG menjadi masukan atas pengembangan GCG di Perseroan (*area of improvement*) untuk ditindaklanjuti agar implementasi GCG yang diterapkan berkembang secara berkelanjutan.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011, struktur umum tata kelola perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi yang berkedudukan sebagai organ utama dalam melakukan tugas-tugas pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha. Keseluruhan organ utama tersebut berperan dalam melaksanakan proses *check and balances* kegiatan usaha dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan secara adil sesuai dengan peraturan yang berlaku.

One form of the implementation of GCG implementation dissemination activities is the Company's internal publication activities related to the GCG implementation framework and guidelines set forth in the Company's Code of Conduct. Publication of the Code of Conduct is carried out to the main organs of the Company, supporting organs and other related parties. In 2020, the Company has carried out GCG socialization in addition to the socialization of the Company's CoCG, namely signing of the integrity pact for Pelindo III personnel.

Internalization

One form of GCG internalization activities at Pelindo III is the issuance of GCG implementation guidelines (Code of Conduct) which have been endorsed by a joint decision of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors. The Code of Conduct for GCG implementation contained in the Company's CoCG guidebook serves as the implementation manual and technical guidance for the implementation of GCG in the Company.

Evaluation

To provide an overview and evaluation of the effectiveness of GCG implementation in the Company, every year, the Company conducts evaluation and measurement of GCG implementation through assessment and/or self-assessment activities. The implementation of GCG assessments conducted by the Company is carried out in collaboration with external parties. The results of GCG assessment serve as recommendations for the development of GCG in the Company (area of improvement) to be followed up so that the implementation of GCG develops in a sustainable manner.

STRUCTURE OF CORPORATE GOVERNANCE

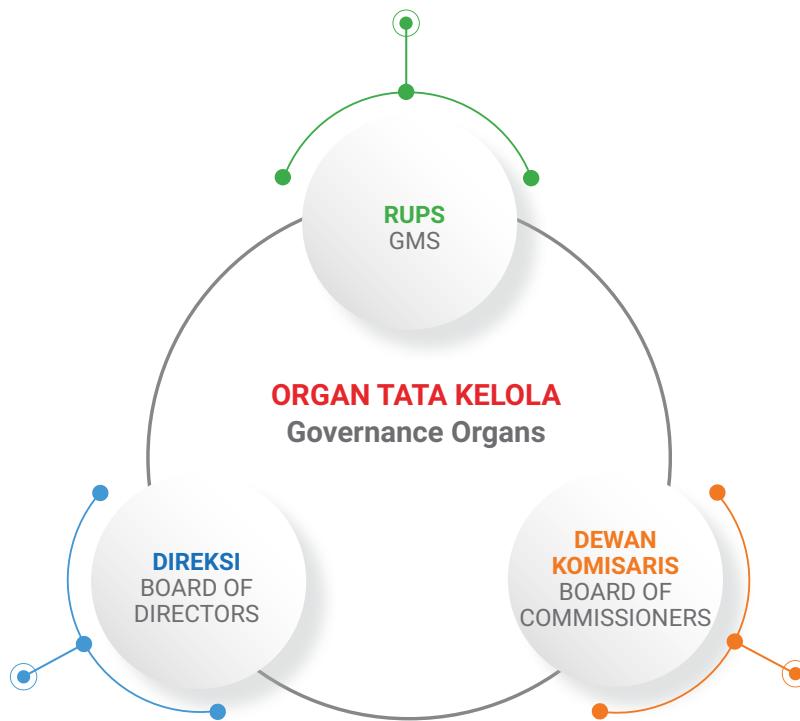
Referring to the Law of Limited Liability Company No. 40 of 2007 and Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011, the general governance structure of a company consists of the GMS, BOC, and BOD which hold the position as the main organs whose duties are to control and supervise business activities. These primary organs play a role in implementing the checks-and-balances process on business activities so that the Company can be managed and held accountable in a fair and proper manner in accordance with the applicable regulations.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Bab I Mengenai Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 2 dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011, organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.

- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/ atau Anggaran Dasar.
- Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat, arahan, maupun rekomendasi kepada Direksi.
- Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

In line with Law No. 40 of 2007, Chapter I on General Provisions, Article 1 No. 2 as well as the Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011, the Company's Organs consist of the GMS, BOC, and BOD.

- GMS is the organ of the Company having the authority that cannot be granted to the BOD and BOC within the limits set in the Law and/or Articles of Association.
- BOC is an organ of the Company with a duty to supervise in a general and/or specific manner based on the Articles of Association and to advise the BOD.
- BOD is an organ of the Company who has the authority and full responsibility on the management of the Company, for the interest of the Company in accordance with objectives and purposes of the Company, as well as to represent the Company, both inside and outside the court, in accordance with the Articles of Association.





Organ utama Perseroan tersebut memainkan peran kunci dalam keberhasilan pelaksanaan GCG. Organ Perseroan menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan, dan ketentuan lainnya atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunya independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perseroan. RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi saling menghormati tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Direktur Sumber Daya Manusia ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di Perseroan berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP-385/KP.07.03/HOFC-2019 yang melaksanakan penerapan dan pemantauan terhadap tata kelola perusahaan yang sesuai dengan *Good Corporate Governance* (GCG).

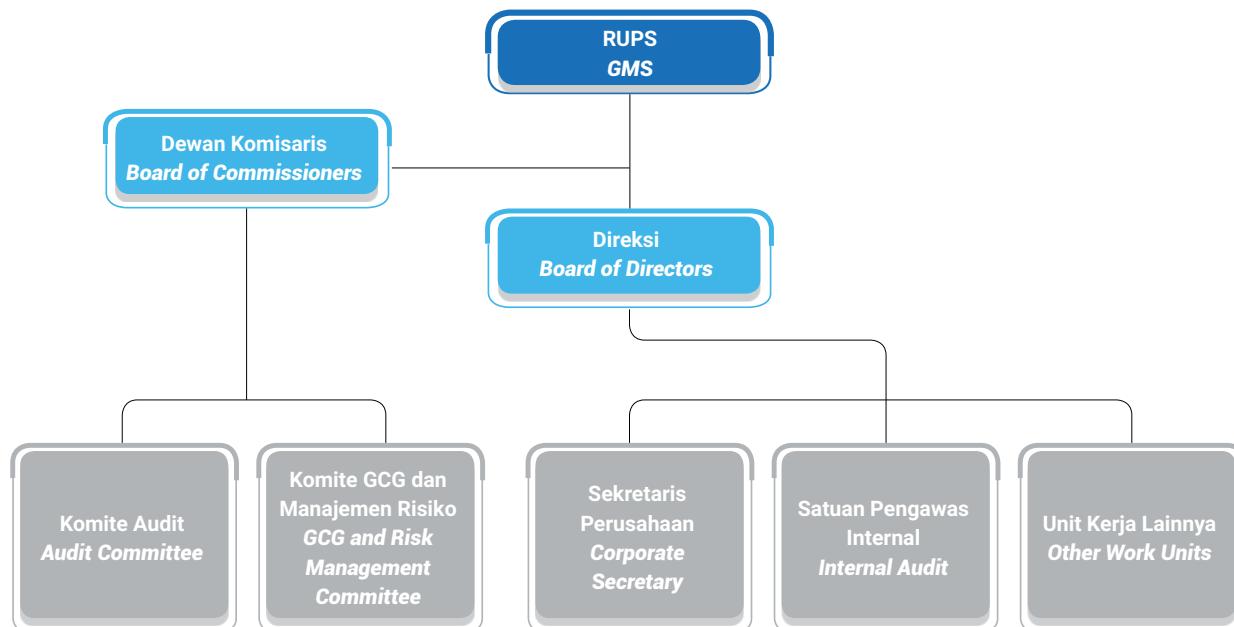
Sementara itu, koordinator pelaksana tata kelola Perusahaan di lingkungan Pelindo III adalah Sekretaris Perusahaan, khususnya pada sub-unit *Investor Relation and Corporate Governance*, sesuai Peraturan Direksi No. PER.0029/OS.01/HOFC-2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Kantor Pusat.

These key organs play a key role in achieving the successful GCG implementation and perform their function in accordance with the laws and regulations, Articles of Association, and other provisions on the basis that each organ has their independence in implementing the duties, functions, and responsibilities for the interest of the Company. GMS, BOC, and BOD respect each other's duties, responsibilities, and authority in line with the laws and regulations as well as the Articles of Association.

The Human Capital Director has been appointed as the person in charge of the implementation and monitoring of GCG in the Company based on the Decision of the BOD No KEP-385/KP.07.03/HOFC-2019 with the function to implement and monitor the Company's governance to be in line with the best practices of GCG.

Meanwhile, the coordinator of corporate governance in Pelindo III is the Corporate Secretary, particularly in the Division of Investor Relation and Corporate Governance, following the Regulation of BOD No. PER.0029/OS.01/HOFC-2019 dated June 28, 2019 on the Organizational Structure and Work Procedure of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Head Office.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE





INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

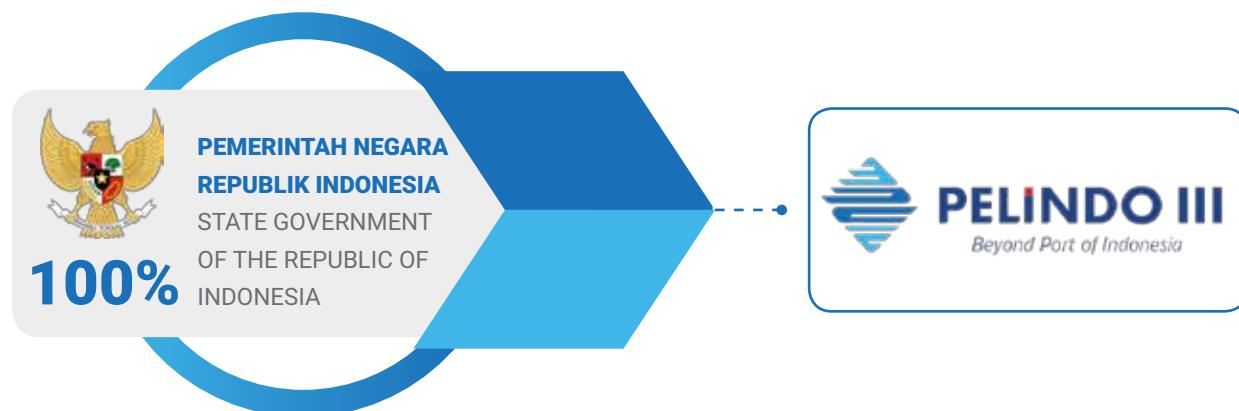
Pemegang Saham yang bertindak sebagai Pemegang Saham Utama dan Pengendali adalah Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebesar 100% atau mewakili sebanyak 3.200.000 lembar saham dalam bentuk Seri A Dwiwarna. Berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 pasal 14 ayat 1 tentang BUMN, Menteri BUMN bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara.

INFORMATION ON KEY AND CONTROLLING SHAREHOLDERS

The Majority and Controlling Shareholder of the Company are the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of SOE which holds 100% shares of the Company or representing 3200,000 shares of Dwiwarna (Golden Share) Series A. According to Law No. 19 of 2003 article 14 paragraph 1 on SOE, the Ministry of SOE acts as the GMS since all shares are owned by the Government.

Pemegang Saham Utama dan Pengendali Pelindo III

Major and Controlling Shareholders of Pelindo III



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tata kelola perusahaan tertinggi sebagai medium pengambilan keputusan antara Pemegang Saham dengan Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS memiliki wewenang yang tidak dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. RUPS dan/atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The General Meeting of Shareholders (GMS) is a Corporate governance organ that functions as a medium for the decision-making process for the Shareholders, BOC, and BOD in determining the Company management foundation throughout a fiscal year, by taking into account the Articles of Association as well as prevailing laws and regulation. GMS is also the Company organ with the highest authority which cannot be granted to the BOD or BOC and both the GMS and/or Shareholders cannot intervene with the duties, function, and authority of the BOC and BOD.



Jenis RUPS

Jenis RUPS Pelindo III terdiri dari:

1. RUPS Tahunan untuk mengesahkan RKAP yang diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode tahun yang baru dimulai.
2. RUPS Tahunan untuk mengesahkan Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan yang diselenggarakan paling lambat dalam 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
3. RUPS Luar Biasa yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Pemegang Saham atau atas usulan Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Wewenang RUPS

Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Perseroan terbatas No. 40 tahun 2007, RUPS memiliki kewenangan selain dari pada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan anggaran dasar kepada Direksi dan Komisaris. Pada BUMN, berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, RUPS diwakili oleh Menteri. Berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintahan. Karena aset/kekayaan BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan maka kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan.

Namun, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri BUMN. Kewenangan Menteri Keuangan Bidang Pembinaan dan Pengawasan BUMN sebagian dilimpahkan kepada Menteri BUMN. Menteri BUMN berkewajiban untuk melaporkan kepada hal-hal berikut kepada Menteri Keuangan:

1. Menyetujui atau menolak RJPP dan RKAP.
2. Menetapkan perhitungan alokasi laba Perseroan antara lain untuk:
 - a. Dividen kepada Pemegang Saham;
 - b. Cadangan;
 - c. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Types of GMS

Types of GMS in Pelindo III are:

1. Annual GMS to approve the RKAP, which is convened in no later than one month after the beginning of a new fiscal year.
2. Annual GMS to approve the Annual Report and Annual Account, which is convened in no later than six months after the end of a fiscal year.
3. Extraordinary GMS, which can be convened at any given time if required by the Shareholders or on the request of the BOC and/or BOD.

GMS Authority

According to article 75 of the Law of Limited Liability Company No. 40 of 2007, GMS has authority other than authority granted by the law and articles of association to the BOD and BOC. In SOEs, according to Article 14 of the Law No. 19 of 2003 on SOEs, GMS is represented by a Minister. According to Article 6 Verse 1 and 2 of the Law No. 17 of 2003 on State Financial affairs, the President, as the Head of Government, holds the power to manage the financial affairs of the State as part of Government's power. Since SOE assets are the state's separated assets, the power is granted to the Minister of Finance.

However, based on Government Regulation no. 41 of 2003 concerning the Delegation of the Position, Duties and Authority of the Minister of Finance to Limited Liability Companies (Persero), Public Companies (Perum) and Service Companies (Perjan) to the Minister of BUMN. Part of the authority of the Minister of Finance for the Development and Supervision of BUMN is delegated to the Minister of BUMN. The Minister of BUMN is obliged to report to the following matters to the Minister of Finance:

1. Approving or rejecting RJPP and RKAP.
2. Establishing calculation of the Company's profit gains allocation, among others, for:
 - a. Dividend to Shareholders.
 - b. Reserves.
 - c. Partnership and Community Development Programs.



3. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Menetapkan target kinerja masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Melakukan penilaian kinerja secara kolektif maupun individu atas Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Menetapkan auditor eksternal untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan.
7. Menetapkan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.
8. Menetapkan kebijakan mengenai kemungkinan adanya konflik kepentingan yang terkait dengan Dewan Komisaris.
9. Menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dirangkap oleh seorang Dewan Komisaris.
10. Menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dirangkap oleh Direksi pada Anak Perusahaan.
11. Mendelegasikan tentang pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi kepada Dewan Komisaris.
12. Membubarkan atau melikuidasi Perseroan.
13. Mengalihkan kepemilikan saham Perseroan.
3. Appointing and dismissing the BOD and BOC.
4. Establishing performance targets for each member of BOD and BOC.
5. Evaluating the collective and individual performances of members of BOD and BOC.
6. Determining external auditors to perform audit activity on the Company's financial statements.
7. Establishing remuneration for the BOD and BOC.
8. Establishing policy on potential conflicts of interest related to the BOC.
9. Establishing the maximum amount of BOC position that may be concurrently served by a Commissioner.
10. Establishing the maximum amount of position of BOC that may be concurrently served by a Director in Subsidiaries.
11. Delegating the function of distributing the duties and authority of BOD to the BOC.
12. Dissolving or liquidating the Company.
13. Diverting the Company's share ownership.

Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham dalam RUPS

Ruang lingkup hak dan tanggung jawab Pemegang Saham Perseroan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN meliputi:

1. Menghadiri RUPS dan memberikan suara pada RUPS.
2. Memperoleh informasi material (termasuk hak bertanya) baik dari Dewan Komisaris maupun Direksi mengenai keuangan atau hal-hal lain yang menyangkut Perseroan.
3. Memperoleh pembagian laba Perseroan (dividen).
4. Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi dan/ atau Dewan Komisaris lalai menyelenggarakan RUPS Tahunan dan sewaktu-waktu meminta penyelenggaraan RUPS Luar Biasa bila dipandang perlu sesuai dengan Anggaran Dasar.
5. Mengalihkan kepemilikan saham Perseroan.

Rights and Responsibilities of Shareholders in GMS

The scope of rights and responsibilities of Shareholders of the Company is stipulated in the Law No. 19 of 2003 on SOE, namely:

1. Attending GMS and casting a vote in the GMS.
2. Obtaining material information (including the right to pose a question) either from the BOC or BOD on financial matters or other issues concerning the Company.
3. Earning profit distribution of the Company (dividend).
4. Convening GMS in the event of the negligence of the BOD and/or BOC to convene Annual GMS and to request to convene Extraordinary GMS at any given time deemed necessary, in accordance with the Articles of Association.
5. Transferring ownership of the Company's shares.



Kesetaraan di antara Pemegang Saham

Dengan status Perusahaan sebagai BUMN yang kepemilikan saham 100% dipegang oleh Pemerintah melalui Kementerian BUMN, cakupan atas pemenuhan aspek kesetaraan (*fairness*) Pemegang Saham di lingkungan Perusahaan tidak terlalu luas seperti pada perusahaan publik. Hal tersebut dikarenakan pertanggungjawaban Perusahaan serta pemenuhan atas hak pemegang saham hanya dilakukan kepada Pemerintah Republik Indonesia dengan mengikuti standar pelaporan yang berlaku di bawah Kementerian BUMN. Meski demikian, sebagai bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas terutama bagi masyarakat yang memegang obligasi Perusahaan, Perusahaan tetap memublikasikan beberapa informasi dalam bentuk Laporan Keuangan (triwulan, semesteran, dan tahunan, baik yang belum dilakukan audit maupun yang telah diaudit), Laporan Tahunan Perusahaan, Laporan Manajemen, Laporan PKBL, dan bentuk-bentuk pengungkapan lainnya yang dibenarkan dari segi regulasi yang berlaku.

Akses Informasi RUPS kepada Pemegang Saham

Perseroan senantiasa menyediakan saluran informasi, khususnya sebelum penyelenggaraan RUPS dilaksanakan dengan melakukan persiapan dan pemanggilan/undangan kepada Pemegang Saham. Sehubungan dengan kepemilikan tunggal saham Perseroan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN, Perseroan senantiasa memenuhi ketentuan pemberian akses informasi melalui ketentuan yang berlaku di Kementerian BUMN. Selain itu, Perseroan juga memberikan akses informasi kepada masyarakat pemilik obligasi Perseroan dengan materi-materi informasi sebagaimana diatur dalam peraturan dan regulasi yang berlaku.

Akses informasi yang disediakan Perseroan kepada Pemegang Saham disampaikan melalui *announcement*/pengumuman, paparan publik, pertemuan dengan analis, *press release*, Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, serta Laporan Penelitian yang terkait dengan kinerja Perseroan. Selain itu, Perseroan juga memberikan informasi sewaktu-waktu atas permintaan data langsung oleh Pemegang Saham.

Equality Among Shareholders

Due to the Company's status as an SOE with 100% of its shares owned by the Government, i.e. the Ministry of SOE, the scope of the fulfilment of fairness and equality aspect to the Shareholders are not as broad as that of public companies. The reason for such issue is related to the Company's responsibility as well as the fulfilment of shareholder rights by the Government of the Republic of Indonesia, and by following the reporting standards prevailing in the Ministry of SOE. Nevertheless, as a form of commitment to the transparency and accountability aspects, particularly to the public who hold the Company's bonds, the Company continues to publish information in the form of Financial Statements (unaudited and audited quarterly, semester, and annual statements), Annual Report, management report, PKBL report, and other forms of disclosure that are justified by the prevailing regulations.

Access to GMS Information for Shareholders

The Company always provides an information channel, especially prior to the implementation of GMS by making preparations and invitations to Shareholders. In connection with the sole ownership of the Company's shares by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of BUMN, the Company always complies with the provisions of providing access to information through the provisions applicable in the Ministry of BUMN. In addition, the Company also provides access to information to the public who owns the Company's bonds with information materials as stipulated in the prevailing rules and regulations.

Access to information provided by the Company to Shareholders is delivered through announcement, public exposures, meetings with analysts, press releases, Annual Reports, Sustainability Reports, and Research Reports related to the Company's performance. In addition, the Company also provides information from time to time upon direct requests for data by Shareholders.



Beberapa pun kepada masyarakat pemilik obligasi dan efek lainnya, Perseroan memberikan akses informasi terkait kinerja Perseroan melalui *announcement/pengumuman*, paparan publik, pertemuan dengan analis, *press release*, Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, serta Laporan Penelitian yang terkait dengan kinerja Perseroan.

Mekanisme Penyelenggaraan RUPS

1. Persiapan Rapat

- a. Pemanggilan untuk RUPS Tahunan disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 14 hari kerja sebelum acara RUPS dilaksanakan. Surat atau media pemanggilan harus mencakup informasi mengenai:
 - Agenda RUPS;
 - Materi usulan dan penjelasan lain yang berkaitan dengan agenda acara RUPS;
 - Hari, tanggal, dan jam dijadikannya RUPS;
 - Tempat pelaksanaan RUPS.
- b. Tempat pelaksanaan RUPS adalah di lokasi tempat beroperasinya Perseroan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia.
- c. Tidak perlu dilakukan pemanggilan tertulis untuk RUPS Luar Biasa jika semua peserta RUPSLB sudah mengetahui, menyetujui, dan menyatakan dapat hadir.

2. Pelaksanaan Rapat

- a. RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham atau yang diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemegang Saham.
- b. RUPS diawali dengan pembacaan tata tertib RUPS.
- c. RUPS membahas masalah yang telah ditetapkan dalam agenda RUPS.
- d. Agenda tambahan RUPS dapat dibahas jika disetujui oleh RUPS.

3. Pengambilan Keputusan

- a. Pengambilan keputusan dalam RUPS dilaksanakan melalui prosedur yang transparan dan adil.
- b. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang sah.

The Company also provides to the public who owns bonds and other securities, access to information related to the Company's performance through announcements, public exposures, meetings with analysts, press releases, Annual Reports, Sustainability Reports, and Research Reports related to the Company's performance.

Mechanisms to Convene GMS

1. Meeting Preparations

- a. Summons for Annual GMS is delivered to the Shareholders in no later than fourteen workdays before the convention of GMS. Invitation letter or other media shall include the following information:
 - GMS Agenda.
 - Proposed materials and other exposition related to the GMS agenda.
 - Day, date, and time of GMS convention.
 - Location of GMS convention.
- b. The location for convening GMS is the location on which the Company operates, or at any other place within the Indonesian territory;
- c. Written summons for Extraordinary GMS is not required if all attendees of EGMS have understood, approved, and stated that they will be present in the meeting.

2. Meeting Convention

- a. GMS shall be chaired by a Shareholder or a party authorised with the right of substitution by the Shareholders.
- b. GMS shall be started by reading the GMS rules and regulations.
- c. GMS shall discuss matters that have been stated in the GMS agenda.
- d. Additional GMS agenda may be discussed after being approved by the GMS.

3. Decision-Making

- a. Decision-making in the GMS is carried out through a transparent and fair procedure.
- b. GMS resolutions are made based on consensus according to the prevailing laws and regulations.
- c. If the consensus is not achieved, resolutions can be made based on the valid majority vote.



4. Pendokumentasian Hasil RUPS

- a. Sekretaris Perusahaan atau Notaris membuat risalah RUPS dalam setiap penyelenggaraan RUPS.
- b. Risalah RUPS harus ditandatangani Ketua Rapat dan Pemegang Saham.
- c. Penandatanganan risalah RUPS tidak diperlukan apabila risalah tersebut dibuat dengan berita acara notaris.
- d. Risalah RUPS harus didokumentasikan dan disimpan oleh Sekretaris Perusahaan.
- e. Pemegang Saham berhak memperoleh risalah RUPS.

5. RUPS Sirkuler

- a. Pemegang Saham dapat melaksanakan RUPS secara sirkuler.
- b. Syarat dan ketentuan pelaksanaan RUPS sirkuler ditetapkan oleh Pemegang Saham.

Publikasi RUPS kepada Pemegang Saham

Sebelum Perusahaan melaksanakan kegiatan RUPS, baik RKAP maupun Laporan Tahunan bersama Pemegang Saham, Perusahaan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Saham untuk kemudian disepakati dan diagendakan pelaksanaan kegiatan tersebut. Proses Penyampaian Informasi RUPS kepada Pemegang Saham melalui mekanisme surat menyurat sebagaimana diatur dalam *Code of Corporate Governance* (CoCG).

Ketentuan Kuorum dan Kehadiran Dewan Komisaris serta Direksi dalam RUPS

Dikarenakan status Perseroan sebagai BUMN yang bertanggung jawab kepada Pemegang Saham, ketentuan kuorum dalam pelaksanaan agenda kegiatan RUPS adalah sebagai berikut:

1. RUPS dapat dilangsungkan jika dihadiri paling sedikit 51% dari jumlah seluruh saham.
2. Dalam hal kuorum tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Kedua.
3. Dalam pemanggilan kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.

4. Documentation of GMS Resolutions

- a. The Corporate Secretary or a Notary shall prepare Minutes of GMS at every GMS convention.
- b. Minutes of GMS shall be signed by the Chairman of Meeting and Shareholders.
- c. The signing of GMS Minutes is not required if the minutes are prepared along with the Minutes of a Notarial Deed.
- d. Minutes of GMS must be documented and archived by the Corporate Secretary.
- e. Shareholders are entitled to obtain the Minutes of GMS.

5. Circular GMS

- a. Shareholders may convene a Circular GMS.
- b. Requirements and provisions to convene circular GMS shall be determined by the Shareholders.

GMS Publication to Shareholders

Prior to convening GMS, both for RKAP and Annual Report with the Shareholders, the Company shall notify the Shareholders about the to be approved and scheduled by the Shareholders. The process of GMS information delivery to the Shareholders is through correspondence mechanism as regulated in the *Code of Corporate Governance* (CoCG).

Quorum and Attendance of The Board of Directors in GMS

As an SOE with the responsibility to its Shareholders, the Company has established provisions regarding quorum in the GMS as follows:

1. The GMS shall be convened if attended by 51% of the total shares, at the very least.
2. Should the quorum is not reached, the second summons to the meeting shall be conducted.
3. In the second summons, it shall be stated that the first GMS has been convened but the quorum has not been reached.



4. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri paling sedikit 50% dari jumlah seluruh saham.
5. Jika pada RUPS kedua masih belum tercapai kuorum, maka Perseroan melakukan permohonan ke Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk ditetapkan kuorum RUPS ketiga.
6. Dalam pemanggilan RUPS ketiga, harus disebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
7. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sebelum RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan.
8. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah tanggal RUPS yang mendahulunya dilangsungkan.
4. The second GMS is valid and entitles to make resolutions if it is attended by 50% of the total shares, at the very least.
5. Should the quorum have not been reached in the second GMS, the Company may submit a proposal to the Head of Local District Court to determine the quorum for the third GMS.
6. In the third summons, it shall be stated that the second GMS has been convened but the quorum has not been reached.
7. The second and third summons for GMS shall be conducted in no later than seven days before the convention of second and third GMS.
8. The second and third GMS shall be convened in ten days, at the earliest, and in 21 days, at the latest, after the preceding date of GMS convention.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat dan Pemungutan Suara

Pengambilan keputusan dalam RUPS dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat, dikarenakan kepemilikan saham Perseroan dipegang penuh oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Kementerian BUMN.

Pelaksanaan dan Agenda Keputusan RUPS Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, Pelindo III telah melaksanakan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2019, RUPS Pengesahan RKAP tahun 2020, dan RUPS Sirkuler tahun 2020.

RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019

Mekanisme Penyelenggaraan RUPS Tahunan Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019

Decision-Making and Voting Mechanisms

Resolutions of GMS shall be made by consensus as the shareholding of the Company is fully owned by the Government of Indonesia, represented by the Ministry of SOE.

Implementation and Agenda for 2020 GMS Resolutions

Throughout 2020, Pelindo III has held GMS for the 2019 Fiscal Year, GMS for RKAP Ratification in 2020, and Circular GMS 2020.

GMS Ratification of the 2019 Annual Report

Mechanism for Organizing the Annual GMS Ratification of the 2019 Annual Report

Pengumuman / Announcement	Pemanggilan / Invitation	Pelaksanaan / Implementation	Publikasi dan Pelaporan Hasil Keputusan RUPS / Publication and Reporting of GMS Resolutions
Melakukan pengumuman rencana dan agenda RUPS Tahunan Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 pada tanggal 30 Juni 2020 / Announce the plan and agenda for the Annual General Meeting of Shareholders Ratification of the 2019 Annual Report on June 30, 2020	Melakukan pemanggilan kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat yang disampaikan pada tanggal 3 Juli 2020 / Summons Shareholders to attend the Meeting announced on July 3, 2020	Rapat diselenggarakan pada 6 Juli 2020 bertempat di Virtual Meeting. / The meeting was held on July 6, 2020 at the Virtual Meeting.	Risalah RUPS Tahunan Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019 dipublikasikan pada tanggal 15 Juli 2020 / Minutes of the Annual GMS Ratification of the 2019 Annual Report was published on July 15, 2020



Agenda, Keputusan, dan Realisasi RUPS Tahunan Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019

Agenda, Resolution, and Realization of the Annual GMS Ratification of the 2019 Annual Report

No.	Tanggal dan Tempat Penyelenggaraan RUPS / Date and Venue of GMS	Nama dan Akta Pelaksanaan RUPS / GMS Name and Deed of Implementation	Agenda dan Keputusan RUPS / GMS Agenda and Resolution	Status Realisasi / Realization Status
1	Waktu 6 Juli 2020	RUPS Laporan Tahunan 2019	<ol style="list-style-type: none"> Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2019. Penetapan Gaji /Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 serta Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2019; Penetapan Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020. 	Telah diambil keputusan seluruhnya terhadap agenda RUPS Laporan Tahunan 2019.
	Tempat Virtual Meeting	Berita Acara RUPS Tahunan No. 06 Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019		
	Date July 6, 2020	2019 Annual Report GMS	<ol style="list-style-type: none"> Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidation for 2019 Fiscal Year as well as Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners for 2019 Fiscal Year. Approval and Ratification of the Financial Statements of the Company's Partnership and Community Development Program for the 2019 Fiscal Year. Determination of the Use of the Company's Consolidated Net Income for the 2019 Fiscal Year. Determination of Salary/Honorarium along with other facilities and allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2020 Fiscal Year as well as Tantiem for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the Performance of the 2019 Fiscal Year; Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of the Partnership and Community Development Program Implementation for 2020 Fiscal Year. 	The decision has been made on the overall agenda of the 2019 Annual Report GMS
	Venue Virtual Meeting	Minutes of Annual GMS No. 06 Approval of the 2019 Fiscal Year Annual Report		



**Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir dalam RUPS
Tahunan Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku
2019**

Attendance of the Board of Commissioners and Board
of Directors in the Annual GMS Ratification of the 2019
Annual Report

Nama / Name	Jabatan / Position	Kehadiran / Attendance	
		Hadir / Present	Tidak Hadir / Absent
Dewan Komisaris / Board of Commissioners			
Marsetio	Komisaris Utama / President Commissioner	✓	x
Heru Sukanto	Komisaris / Commissioner	✓	x
Otto Ardianto	Komisaris / Commissioner	✓	x
Ridwan Djamaruddin	Komisaris / Commissioner	✓	x
Ali Mochtar Ngabalin	Komisaris / Commissioner	✓	x
Dedi Syarif Usman	Komisaris / Commissioner	✓	x
Direksi / Board of Directors			
U. Saefudin Noer	Direktur Utama / President Director	✓	x
Putut Sri Muljanto	Direktur Operasi dan Komersial / Operations and Commercial Director	✓	x
Boy Robyanto	Direktur Teknik / Engineering Director	✓	x
Edi Priyanto	Direktur Sumber Daya Manusia / Human Capital Director	✓	x
Endot Endrardono	Direktur Keuangan / Financial Director	✓	x
Kokok Susanto	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis / Business Transformation and Development Director	✓	x

RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2020

GMS Ratification of the 2020 RKAP

**Mekanisme Penyelenggaraan RUPS Tahunan
Pengesahan RKAP Tahun 2020**

Mechanism for Organizing the Annual GMS for
Ratification of the 2020 RKAP

Pengumuman / Announcement	Pemanggilan / Invitation	Pelaksanaan / Implementation	Publikasi dan Pelaporan Hasil Keputusan RUPS / Publication and Reporting of GMS Resolutions
Melakukan pengumuman rencana dan agenda RUPS Tahunan Pengesahan RKAP tahun 2020 pada tanggal 17 Januari 2020 / Announce the plan and agenda for the Annual GMS for Ratification of the 2020 RKAP on January 17, 2020	Melakukan pemanggilan kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat yang disampaikan pada tanggal 21 Januari 2020 / Summons Shareholders to attend the Meeting announced on January 21, 2020	Rapat diselenggarakan pada tanggal 24 Januari 2020 bertempat di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat / The meeting was held on January 24, 2020 at the Ministry of SEO Office, Central Jakarta	Risalah RUPS Tahunan Pengesahan RKAP tahun 2020 dipublikasikan pada tanggal 24 Januari 2020 / The minutes of the Annual GMS for the 2020 RKAP Ratification were published on January 24, 2020



Agenda, Keputusan, dan Realisasi RUPS Tahunan Pengesahan RKAP Tahun 2020

Agenda, Resolution, and Realization of the Annual GMS for Ratification of the 2020 RKAP

Tanggal dan Tempat Penyelenggaraan RUPS / Date and Venue of GMS	Nama dan Akta Pelaksanaan RUPS / GMS Name and Deed of Implementation	Agenda dan Keputusan RUPS / GMS Agenda and Resolution	Status Realisasi / Realization Status
Waktu 24 Januari 2020,	RUPS RKAP	1. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020 PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) 2. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL) Tahun 2020 PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) 3. Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen (Key Performance Indicators) Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2020. 4. Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen (Key Performance Indicators) Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tahun 2020. 5. Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Perhitungan Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2020. 6. Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat Tindakan yang mengakibatkan Perubahan Alokasi Anggaran Investasi Tahun 2020 dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari total investasi. 7. Persetujuan <i>Initial Public Offering (IPO)</i> Anak Perusahaan Pelindo III : PT Terminal Petikemas Suravaya (PT TPS); 8. Persetujuan terhadap pembangunan terminal <i>multi purpose</i> Labuan Bajo, dengan mekanisme, KPBU melalui penyerahan lahan seluas 3,6 Ha yang perolehnya menggunakan cadangan pembagian laba perusahaan Tahun 2019 kepada Negara CQ Kementerian Perhubungan.	Telah diambil keputusan seluruhnya terhadap agenda RUPS RKAP Tahun 2020.
Date January 24, 2020	RKAP GMS	1. Ratification of the 2020 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) 2. Ratification of the Work Plan and Budget for the 2020 Partnership and Community Development Program (RKA PKBL) PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) 3. Approval and Ratification of Management Contracts (Key Performance Indicators) of the Board of Directors and Board of Commissioners with Shareholders in 2020. 4. Approval and Ratification of Management Contracts (Key Performance Indicators) of the Board of Commissioners with Shareholders in 2020. 5. Determination of Operational Aspect Indicators for Calculation of Company Soundness Level in 2020. 6. Delegation of Authority to the Board of Commissioners to give approval in case of actions that result in Changes in the 2020 Investment Budget Allocation with a maximum value of 10% (ten percent) of the total investment. 7. Initial Public Offering (IPO) approval for Pelindo III Subsidiaries : PT Terminal Petikemas Suravaya (PT TPS); 8. Approval for the construction of the Labuan Bajo multi-purpose terminal, with the KPBU mechanism through the handover of a 3.6 Ha land area, the acquisition of which uses the company's 2019 profit-sharing reserves to the State CQ Ministry of Transportation.	The decision has been made on the overall agenda of the 2019 RKAP GMS
Venue Office of the Ministry of SOE, Central Jakarta	Minutes of RKAP GMS No. 02 Approval of the 2019 Fiscal Year RKAP		



**Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir dalam RUPS
Tahunan Pengesahan RKAP Tahun 2020**

**Attendance of the Board of Commissioners and Board
of Directors in the Annual GMS Ratification of the 2020
RKAP**

Nama / Name	Jabatan / Position	Kehadiran / Attendance	
		Hadir / Present	Tidak Hadir / Absent
Dewan Komisaris / Board of Commissioners			
Ahmad Bambang	Komisaris Utama / President Commissioner	✓	x
Wahyu Satrio Utomo	Komisaris / Commissioner	✓	x
Heddy Lugito	Komisaris / Commissioner	✓	x
Zainal Abidin	Komisaris / Commissioner	✓	x
Dedi Syarif Usman	Komisaris / Commissioner	✓	x
Direksi / Board of Directors			
Doso Agung	Direktur Utama / President Director	✓	x
Putut Sri Muljanto	Direktur Operasi dan Komersial / Operations and Commercial Director	✓	x
Joko Nerhudha	Direktur Teknik / Engineering Director	✓	x
Toto Heliyanto	Direktur Sumber Daya Manusia / Human Capital Director	x	✓
Irvandi Gustari	Direktur Keuangan / Financial Director	✓	x
Toto Nugroho	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis / Business Transformation and Development Director	✓	x

*Kehadiran Toto Heliyanto dikuasakan kepada Doso Agung / Toto Heliyanto was represented by Doso Agung

RUPS berupa Surat Keputusan Tahun 2020

**Mekanisme Penyelenggaraan RUPS berupa Surat
Keputusan Tahun 2020**

2020 Extraordinary GMS in the form of a Decree

Mechanism for Implementing 2020 Extraordinary GMS

Pengumuman / Announcement	Publikasi dan Pelaporan Hasil Keputusan RUPS / Publication and Reporting of GMS Resolutions
Rapat diselenggarakan pada 3 April 2020 bertempat di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat / The meeting was held on April 3, 2020 at Ministry of SOE, Central Jakarta	Risalah RUPS berupa Surat Keputusan tahun 2020 dipublikasikan pada tanggal 9 April 2020. / The minutes of the 2020 Extraordinary GMS were published on April 9, 2020
Rapat diselenggarakan pada 18 Juni 2020 bertempat di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat / The meeting was held on June 18, 2020 at Ministry of SOE, Central Jakarta	Risalah RUPS berupa Surat Keputusan tahun 2020 dipublikasikan pada tanggal 22 Juni 2020. / The minutes of the 2020 Extraordinary GMS were published on June 2, 2020

**Agenda, Keputusan, dan Realisasi RUPS berupa Surat****Keputusan Tahun 2020****Agenda, Resolutions, and Realization of 2020****Extraordinary GMS**

No.	Tanggal dan Tempat Penyelenggaraan RUPS / Date and Venue of GMS	Nama dan Akta Pelaksanaan RUPS / GMS Name and Deed of Implementation	Agenda dan Keputusan RUPS / GMS Agenda and Resolution	Status Realisasi / Realization Status
1	Waktu 3 April 2020	RUPS berupa Surat Keputusan	Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III.	
	Tempat Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat	Surat Keputusan No. SK-107/MBU/04/2020		
	Date April 3, 2020	GMS in the form of a Decree	Decree of the Minister of SOEs as the GMS of the Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III.	
	Venue Office of the Ministry of SOE, Central Jakarta	Decree No. SK-107/MBU/04/2020		
2	Waktu 18 Juni 2020	RUPS berupa Surat Keputusan	Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III.	
	Tempat Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat	Surat Keputusan No. SK-209/MBU/06/2020		
	Date June 18, 2020	GMS in the form of a Decree	Decree of the Minister of SOEs as the GMS of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of the Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III.	
	Venue Office of the Ministry of SOE, Central Jakarta	Decree No. SK-209/MBU/06/2020		

Dewan Komisaris dan Direksi yang Hadir dalam RUPS berupa Surat Keputusan Tahun 2020**Attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors in the 2020 Extraordinary GMS**

Nama / Name	Jabatan / Position	Kehadiran / Attendance	
		Hadir / Present	Tidak Hadir / Absent
Dewan Komisaris / Board of Commissioners			
Marsetio	Komisaris Utama / President Commissioner	✓	x
Heru Sukanto	Komisaris / Commissioner	✓	x
Otto Ardianto	Komisaris / Commissioner	✓	x
Ridwan Djamaruddin	Komisaris / Commissioner	✓	x
Ali Mochtar Ngabalin	Komisaris / Commissioner	✓	x
Dedi Syarif Usman	Komisaris / Commissioner	✓	x



Nama / Name	Jabatan / Position	Kehadiran / Attendance	
		Hadir / Present	Tidak Hadir / Absent
Direksi / Board of Directors			
U. Saefudin Noer	Direktur Utama / President Director	✓	x
Putut Sri Muljanto	Direktur Operasi dan Komersial / Operations and Commercial Director	✓	x
Boy Robyanto	Direktur Teknik / Engineering Director	✓	x
Edi Priyanto	Direktur Sumber Daya Manusia / Human Capital Director	✓	x
Endot Endrardono	Direktur Keuangan / Financial Director	✓	x
Kokok Susanto	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis / Business Transformation and Development Director	✓	x

Pelaksanaan dan Realisasi Keputusan RUPS 1 (Satu) Tahun Sebelumnya

Sepanjang tahun 2019, Pelindo III telah melaksanakan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2018, Laporan Pengesahan RKAP tahun 2019, serta RUPS berupa Surat Keputusan.

Implementation and Realization of Resolutions of the Previous 1 (one) Year GMS

Throughout 2019, Pelindo III has carried out Annual Report GMS for the 2018 Fiscal Year, a 2019 RKAP Ratification Report, and a GMS in the form of a Decree.

RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2019

Agenda, Keputusan, dan Realisasi RUPS Tahunan Pengesahan RKAP Tahun 2019

GMS Ratification of the 2019 RKAP

Agenda, Resolution, and Realization of the Annual GMS for Ratification of the 2019 RKAP

Tanggal dan Tempat Penyelenggaraan RUPS / Date and Venue of GMS	Nama dan Akta Pelaksanaan RUPS / GMS Name and Deed of Implementation	Agenda dan Keputusan RUPS / GMS Agenda and Resolution	Status Realisasi / Realization Status
Waktu 4 Januari 2019	RUPS RKAP	1. Persetujuan/Pengesahan RKAP serta Rencana Kerja dan Anggaran PKBL Tahun 2019.	Telah diambil keputusan seluruhnya terhadap agenda RUPS RKAP Tahun 2019
Tempat Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat	Berita Acara RUPS RKAP No. 02 Pengesahan RKAP Tahun Buku 2019	2. Penetapan Key Performance Indicator (KPI) Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019. 3. Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Perhitungan Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2019.	
Date January 4, 2019	RKAP GMS	1. The Approval/Ratification of RKAP as well as Work Plan and Budget for the 2019 PKBL.	Full resolution has been made on the agenda of the 2019 RKAP GMS.
Venue Office of the Ministry of SOE, Central Jakarta	Minutes of RKAP GMS No. 02 on the Approval to RKAP for the 2019 Fiscal Year	2. The Approval and Ratification of the 2019 Key Performance Indicator of the BOD and the BOC. 3. The Determination of Operational Aspect indicators for Calculating the Company's Soundness Level in 2019.	



RUPS Persetujuan Laporan Tahunan 2018

Agenda, Keputusan, dan Realisasi RUPS Tahunan Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018

GMS for Approval of the 2018 Annual Report

Agenda, Decision, and Realization of Annual General Meeting of Shareholders for Approval of the 2018 Annual Report

Tanggal dan Tempat Penyelenggaraan RUPS / Date and Venue of GMS	Nama dan Akta Pelaksanaan RUPS / GMS Name and Deed of Implementation	Agenda dan Keputusan RUPS / GMS Agenda and Resolution	Status Realisasi / Realization Status
Waktu 29 April 2019	RUPS Laporan Tahunan 2018	<ol style="list-style-type: none"> Persetujuan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, penyajian kembali Laporan Keuangan Konsolidasian tahun 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya. Persetujuan Laporan Keuangan PKBL untuk tahun buku 2018 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk tahun buku 2018. Penetapan dan pengesahan penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik tahun buku 2018 untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk tahun buku 2019 serta Laporan Keuangan PKBL tahun buku 2019. Persetujuan Tantiem dan remunerasi kinerja tahun 2018 dan persetujuan gaji, honorarium dan tunjangan, serta fasilitas lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019. 	Telah diambil keputusan seluruhnya terhadap agenda RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2018
Tempat Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat	Berita Acara RUPS RKAP No. 29 Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2018		
Date April 29, 2019	The 2018 Annual Report GMS Minutes of Annual GMS No. 29 on the Approval on the Annual Report for the 2018 Fiscal Year	<ol style="list-style-type: none"> Approval on the Consolidated Financial Statement for the year ending on 31 December 018, the restatement of the Consolidated Financial Statement of 31 December 2017 and on the year ending on the date, the 2018 Report for the Supervisory Duty of the BOC, as well as granting of full repayment and full discharge of responsibility. Approval on the 2018 PKBL Financial Statement for the 2018 fiscal year as well as granting of full repayment and full discharge of responsibility. Stipulation for Net Profit Utilisation of the 2018 Fiscal Year. Stipulation and validation for the reappointment of Public Accounting Firm for the 2018 fiscal year to check the 2019 consolidated Financial Statement of the Company for the 2019 fiscal year as well as the PKBL Financial Statement for the 2019 fiscal year. The stipulation of Tantiem and 2018 performance remuneration as well as the validation on the salary, honorarium and allowances, as well as other facilities for the BOD and BOC in the 2019 fiscal year. 	Full resolution has been made on the agenda of the 2018 Annual Report GMS.
Venue Office of the Ministry of SOE, Central Jakarta			

**RUPS berupa Surat Keputusan****Agenda, Keputusan, dan Realisasi RUPS berupa Surat Keputusan****GMS in a form of Decree****Agenda, Resolutions, and Realization of GMS in a form of Decree**

Tanggal dan Tempat Penyelenggaraan RUPS / Date and Venue of GMS	Nama dan Akta Pelaksanaan RUPS / GMS Name and Deed of Implementation	Agenda dan Keputusan RUPS / GMS Agenda and Resolution	Status Realisasi / Realization Status
Waktu / Date 14 Mei 2019 / May 14, 2019	RUPS berupa Surat Keputusan / GMS in a form of Decree	Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III. / The stipulation from the Minister of SOE as the GMS of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) on the Dismissal and Appointment of the BOD Members of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).	
Tempat / Venue Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat / Office of the Ministry of SOE, Central Jakarta	Surat Keputusan No. SK-94/ MBU/05/2019 / Decree No. SK-94/MBU/05/2019		
Waktu / Date 13 September 2019 / September 13, 2019	RUPS berupa Surat Keputusan / GMS in a form of Decree	Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III. / The stipulation from the Minister of SOE as the GMS of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) on the Dismissal and Appointment of the President Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).	
Tempat / Venue Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat / Office of the Ministry of SOE, Central Jakarta	Surat Keputusan No. SK-206/ MBU/09/2019 / Decree No. SK-206/MBU/09/2019		
Waktu / Date 16 Oktober 2019 / October 16, 2019	RUPS berupa Surat Keputusan / GMS in a form of Decree	Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III. / The stipulation from the Minister of SOE as the GMS of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) on the Dismissal and Appointment of the BOD Members of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).	
Tempat / Venue Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat / Office of the Ministry of SOE, Central Jakarta	Surat Keputusan No. SK-219/ MBU/10/2019 / Decree No. SK-219/MBU/10/2019		

RUPS Luar Biasa Tahun 2019

Sepanjang tahun 2019, Perseroan tidak menyelenggarakan RUPSLB, baik dalam bentuk agenda kegiatan maupun pengambilan keputusan yang bersifat sirkuler.

2019 Extraordinary GMS

Throughout 2019, the Company did not convene any EGMS either in the form of agenda or circular decision-making.



DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang menjalankan fungsi pengawasan secara umum dan khusus sesuai Anggaran Dasar serta pemberian nasihat dan rekomendasi atas pengelolaan perusahaan yang dijalankan Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dijalankan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu. Dalam fungsi pengawasan yang dijalankan, Dewan Komisaris memenuhi dan melaksanakan prinsip serta praktik GCG melalui mekanisme *check and balances* bersama dengan manajemen Perseroan. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko dan GCG dalam mendukung pelaksanaan pengawasan Perseroan secara komprehensif.

BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is an organ of the Company that carries out general and specific supervisory functions in accordance with the Articles of Association and provides advice and recommendations on the management of the company that is carried out by the Board of Directors. Supervision and provision of advice are carried out for the benefit of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company, and are not intended for the benefit of certain parties or groups. In its supervisory function, the Board of Commissioners fulfills and implements the principles and practices of GCG through a check and balance mechanism together with the Company's management. The Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee and the Risk Management and GCG Committee in supporting the implementation of comprehensive supervision of the Company.

Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Meski pemilihan dan pengangkatan Dewan Komisaris merupakan wewenang Pemegang Saham, namun anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi kriteria yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kriteria Dewan Komisaris antara lain:

1. Memenuhi persyaratan formal sebagai anggota Dewan Komisaris, yaitu:
 - a. Orang perseorangan;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 - d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan; dan
 - e. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.
2. Memenuhi persyaratan materiil sebagai anggota Dewan Komisaris, yaitu:
 - a. Memiliki integritas dan dedikasi yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi pengawasan;

Criteria for Members of the Board of Commissioners

Despite the selection and appointment of the Board of Commissioners is within the authority of the Shareholders, members of the Board of Commissioners must meet the criteria set out in the Articles of Association and the prevailing laws and regulations. The criteria for the Board of Commissioners include:

1. Fulfils the formal requirements as a member of the Board of Commissioners, namely:
 - a. Individual person;
 - b. Able to take legal actions;
 - c. Has never been declared bankrupt within 5 (five) years prior to nomination;
 - d. Never been a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a Company to go bankrupt within 5 (five) years prior to nomination; and
 - e. Never been convicted of committing a crime that caused losses to state finances and/or related to the financial sector within 5 (five) years prior to nomination.
2. Fulfils the material requirements as a member of the Board of Commissioners, namely:
 - a. Have the integrity and dedication needed in carrying out a supervisory function;



- b. Memahami masalah-masalah manajemen Perseroan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- c. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan;
- d. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- 3. Bukan merupakan pengurus Partai Politik dan/ atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif;
- 4. Bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah;
- 5. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris);
- 6. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan anggota Direksi Perseroan sampai dengan derajat ketiga, baik hubungan secara vertikal maupun horizontal.
- b. Understand the Company's management issues related to a management function;
- c. Possess adequate knowledge in the Company's line of business;
- d. Provide sufficient time to carry out their duties.
- 3. Is not an administrator of a political party and/or a candidate for legislative members and/or legislative members;
- 4. Not a candidate for Head/Deputy Regional Head and/or Head/Deputy Regional Head;
- 5. Physically and mentally healthy (not suffering from a disease that could hinder the performance of his duties as a member of the Board of Commissioners);
- 6. Has no family relationship with other members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company up to the third degree, either vertically or horizontally.

Prosedur Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemilihan Ulang Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan pengangkatan, pemberhentian, dan pemilihan ulang Dewan Komisaris, pedoman pelaksanaannya mengikuti petunjuk yang tercantum dalam CoCG Perseroan. Dalam hal pedoman petunjuk teknis, Perseroan menggunakan rujukan beberapa kebijakan terkait di antaranya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, Peraturan Menteri BUMN No. Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Usaha yang Baik (GCG) pada BUMN serta Anggaran Dasar Pelindo III. Selain itu, Perseroan juga merujuk pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

Dengan status Pelindo III sebagai entitas BUMN, maka pengangkatan, pemberhentian, dan pemilihan ulang Dewan Komisaris menjadi wewenang Pemegang Saham, yang diwakili oleh Kementerian BUMN. Kebijakan suksesi Dewan Komisaris bertujuan untuk menciptakan regenerasi, menjaga independensi dan kredibilitas fungsi pengawasan perusahaan, serta membuka perspektif baru dalam manajemen Perseroan melalui profesional-

Procedures to Appoint, Dismiss, and Re-Nomination of Board of Commissioners

In conducting appointment, dismissal, and re-nomination of the BOC, the Company refers to the provisions stipulated in the CoCG of the Company. In terms of a technical guideline, the Company refers to several related policies, such as Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, Law No. 19 of 2003 on SOEs, Regulation of Minister of SOE No. Per-01/MBU/2011 on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) at SOEs as well as Articles of Association of Pelindo III. Moreover, the Company also refers to the Regulation of Minister of SOE No. PER-02/MBU/02/2015 on Requirements and Procedures to Appoint and Dismiss Members of the BOC and Supervisory Board of SOEs.

With Pelindo III's status as a SOE entity, the appointment, dismissal and re-election of the Board of Commissioners is the authority of the Shareholders, represented by the Ministry of SOE. The succession policy of the Board of Commissioners aims to create regeneration, maintain the independence and credibility of the company's supervisory function, and open new perspectives in the Company's management through the best professionals,



profesional terbaik, terutama di sektor jasa kepelabuhanan, agar Perseroan dapat memperkaya keunggulan dalam kelangsungan usaha yang dipertahankan.

Terkait dengan menempatkan konsep *right man on the right place* dalam struktur Dewan Komisaris Perseroan, kecakapan dan kemampuan Dewan Komisaris dibutuhkan Perseroan dalam setiap pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan strategis. Melalui kompetensi yang dimiliki, Perseroan dapat memperoleh pandangan profesional maupun pertimbangan dari setiap anggota Dewan Komisaris dari sudut pandang yang beragam agar kebijakan yang dirumuskan oleh Perseroan jauh lebih efektif, tepat, dan tentunya mengedepankan aspek-aspek independensi. Dengan begitu, jalannya operasional Perseroan diharapkan sesuai dengan visi maupun target yang telah dicanangkan.

Mekanisme Pengangkatan

1. Sumber Bakal Calon

Pengajuan nama-nama calon Dewan Komisaris didasarkan pada sumber-sumber bakal calon yang terdiri dari mantan Direksi BUMN, Dewan Komisaris, pejabat struktural dan fungsional pemerintah dari sumber lain.

2. Penjaringan

Penjaringan nama-nama Dewan Komisaris dilakukan oleh Menteri BUMN, Sekretaris, Deputi Teknis, dan/ atau Deputi mencari bakal calon dari berbagai sumber. Semua bakal calon diadministrasikan oleh Deputi.

3. Penilaian

Merujuk pada PER-02/MBU/02/2015, secara umum penilaian yang dilakukan terhadap calon meliputi pemenuhan persyaratan baik formal dan material dan evaluasi terhadap persyaratan, untuk kemudian diajukan dengan memberikan rekomendasi "Disarankan".

4. Usulan Pengangkatan

Bagi calon yang telah mendapatkan rekomendasi "Disarankan" oleh tim penilai dapat diangkat menjadi Dewan Komisaris Perseroan. Adapun penetapannya dilakukan melalui Keputusan Menteri.

especially in the port services sector, so that the Company can enrich its excellence in sustained business continuity.

Concerning the concept of right man on the right place in the Company's BOC structure, BOC skills and capabilities are highly required by the Company in each decision-making process or formulation of strategic policies. Through the competence, the Company may obtain professional opinion and consideration from various viewpoints so the policies formulated by the Company will be more effective, accurate, and prioritize the independence aspect. Hence, the Company's operational activity is expected to align with the vision and targets set by the Company.

Appointment Mechanism

1. Source of Potential Candidates

Proposal for BOC candidates is based on the sources of potential candidates which consist of ex-members of the BOD of SOEs, the BOC, structural and functional officials of the government and other sources.

2. Selection

The selection for members of the BOC is conducted by the Minister of SOE, Secretary, Technical Deputy, and/or Deputy to search potential candidates from various sources. All potential candidates are administrated by the Deputy.

3. Assessment

Referring to PER-02/MBU/02/2015, assessment conducted on the candidates, in general, shall encompass the fulfilment of formal, material, and other requirements; evaluation on the requirements; and proposing the candidates with "Recommended" stamp.

4. Proposal for Appointment

Candidates obtaining "Recommended" stamp from the assessment team may be appointed as the members of the BOC. The determination, shall be conducted through a Minister Resolution.



Mekanisme Pemberhentian

Ketentuan mengenai mekanisme pemberhentian sebagaimana tercantum dalam PER-02/MBU/02/2015 yaitu:

1. Alasan Pemberhentian

Alasan pemberhentian Dewan Komisaris meliputi ketidakmampuan Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan perundang-undangan, terlibat tindakan merugikan bagi Perusahaan dan negara, melakukan tindakan yang melanggar etika, dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan serta mengundurkan diri.

2. Tata Cara Pemberhentian

Tata cara pemberhentian dilakukan dengan evaluasi oleh Deputi kepada Dewan Komisaris yang bersangkutan dilanjutkan dengan mengajukan usulan untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri BUMN. Sebelum ditetapkan dan dievaluasi, Perseroan terlebih dahulu memberikan informasi kepada Dewan Komisaris yang bersangkutan agar Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat memberikan pembelaan diri dengan ketentuan pembelaan diri disampaikan dalam bentuk tertulis dan lisan (untuk lisan dibuatkan berita acara penyampaian pembelaan) maksimal disampaikan 14 hari terhitung setelah Dewan Komisaris yang bersangkutan memperoleh informasi pemberhentian kepada Deputi. Setelah disampaikan pembelaan diri, notulen pembelaan diajukan ke dalam RUPS untuk kemudian diambil keputusan. Proses pemberhentian Dewan Komisaris dilakukan bersamaan dengan pengangkatan Dewan Komisaris pengganti dan pemberhentian berlaku efektif sejak ditetapkan dalam Keputusan Menteri atau RUPS.

3. Pemilihan Ulang

Prosedur pemilihan ulang Dewan Komisaris mengikuti prosedur pengangkatan di mana usulan yang diajukan akan dievaluasi oleh Menteri, Sekretaris Menteri, atau Deputi. Apabila calon yang bersangkutan memenuhi persyaratan, maka akan diberikan kriteria "Disarankan" dan diajukan untuk ditetapkan dalam RUPS ataupun Keputusan Menteri BUMN yang bersifat sirkuler.

Dismissal Mechanism

Provisions regarding dismissal mechanism as stipulated in PER-02/MBU/02/2015 are as follows:

1. Reason for Dismissal

Reasons for dismissing members of the BOC including the incapability of the BOC in conducting their duties, violation of Articles of Association and laws and regulations, involvement in actions that cause loss to the Company and the nation and actions that violate code of conduct, a guilty statement based on court order and resignation.

2. Dismissal Procedure

Dismissal procedures began with evaluation by a Deputy on the concerned BOC, followed by submitting a proposal to be determined by the Minister of SOE. Before the determination and evaluation, the Company shall inform the concerned members of the BOC so they can prepare a defence provided that such defence is delivered in written and spoken forms to the Deputy (for the spoken form, minutes of defence deliverance shall be prepared) in no later than 14 days since the concerned members of the BOC received information of dismissal. After the defence is stated, minutes of defence shall be submitted to the GMS to be resolved. The dismissal process is carried out simultaneously with the appointment of the succeeding members of the BOC. The dismissal shall take into effect since the determination through a Minister or GMS Resolution.

3. Renomination

Procedures for the re-nomination of the BOC follow the appointment procedure in which the proposal shall be evaluated by the Minister, Secretary to the Minister, or a Deputy. If the concerned candidates meet the requirements, the "Recommended" title shall be given and they shall be proposed to be determined in the GMS or through Circular Decision of Minister of SOE.



Dengan statusnya sebagai BUMN yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah, Perseroan senantiasa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 dalam hal pengangkatan, pemilihan ulang, dan pemberhentian Dewan Komisaris. Karena hal-hal tersebut bersifat ketetapan yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN selaku Wakil Pemerintah di dalam Perseroan, maka fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan ditidakan.

Susunan Dewan Komisaris

Susunan dan perubahan komposisi Dewan Komisaris Perseroan sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Susunan Dewan Komisaris I

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment
1	Ahmad Bambang	Komisaris Utama / President Commissioner	Surat Keputusan No. SK-206/MBU/09/2019 tanggal 13 September 2019 / Decree No. SK-206/MBU/09/2019 dated September 13, 2019
2	Wahju Satrio Utomo	Komisaris / Commissioner	Surat Keputusan No. SK-30/MBU/02/2016 tanggal 9 Februari 2016 / Decree No. SK-30/MBU/02/2016 dated February 9, 2016
3	Heddy Lugito	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Surat Keputusan No. SK-241/MBU/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016 / Decree No. SK-241/MBU/10/2016 dated October 19, 2016
4	Zainal Abidin	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Surat Keputusan No. SK-198/MBU/09/2017 tanggal 14 September 2017 / Decree No. SK-198/MBU/09/2017 dated September 14, 2017
5	Dedi Syarif Usman	Komisaris / Commissioner	Surat Keputusan No. SK-207/MBU/07/2018 tanggal 12 Juli 2018 / Decree No. SK-207/MBU/07/2018 dated July 12, 2018

Berdasarkan Surat Keputusan No. SK-107/MBU/04/2020 tanggal 3 April 2020 telah disetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris baru sehingga sampai dengan 31 Desember 2020, susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Susunan Dewan Komisaris II

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment
1	Marsetio	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen / President Commissioner concurrently Independent Commissioner	Surat Keputusan No. SK-107/MBU/04/2020 tanggal 3 April 2020 / Decree No. SK-107/MBU/04/2020 dated April 3, 2020
2	Heru Sukanto	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Surat Keputusan No. SK-107/MBU/04/2020 tanggal 3 April 2020 / Decree No. SK-107/MBU/04/2020 dated April 3, 2020
3	Otto Ardianto	Komisaris / Commissioner	Surat Keputusan No. SK-107/MBU/04/2020 tanggal 3 April 2020 / Decree No. SK-107/MBU/04/2020 dated April 3, 2020

As an SOE whose shares are fully owned by the government, the Company always adheres to the procedures that have been determined in line with the Regulation of Minister of SOE No. PER-02/MBU/02/2015 regarding appointment, renomination and dismissal of the BOC. Since the abovementioned matters are established as a provision issued by the Minister of SOE as a representative of the Government in the Company, the Nomination and Remuneration function in the Company is hence removed.

Composition of the Board of Commissioners

The composition and changes of the Company's Board of Commissioners in 2020 are as follows:

Composition of the Board of Commissioners I

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment
1	Ahmad Bambang	Komisaris Utama / President Commissioner	Surat Keputusan No. SK-206/MBU/09/2019 tanggal 13 September 2019 / Decree No. SK-206/MBU/09/2019 dated September 13, 2019
2	Wahju Satrio Utomo	Komisaris / Commissioner	Surat Keputusan No. SK-30/MBU/02/2016 tanggal 9 Februari 2016 / Decree No. SK-30/MBU/02/2016 dated February 9, 2016
3	Heddy Lugito	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Surat Keputusan No. SK-241/MBU/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016 / Decree No. SK-241/MBU/10/2016 dated October 19, 2016
4	Zainal Abidin	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Surat Keputusan No. SK-198/MBU/09/2017 tanggal 14 September 2017 / Decree No. SK-198/MBU/09/2017 dated September 14, 2017
5	Dedi Syarif Usman	Komisaris / Commissioner	Surat Keputusan No. SK-207/MBU/07/2018 tanggal 12 Juli 2018 / Decree No. SK-207/MBU/07/2018 dated July 12, 2018

Based on the Decree No. SK-107/MBU/04/2020 dated April 3, 2020, the appointment of new members of the Board of Commissioners has been approved, thus, as of December 31, 2020, the composition of the Board of Commissioners is as follows:

Composition of the Board of Commissioners II

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment
1	Marsetio	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen / President Commissioner concurrently Independent Commissioner	Surat Keputusan No. SK-107/MBU/04/2020 tanggal 3 April 2020 / Decree No. SK-107/MBU/04/2020 dated April 3, 2020
2	Heru Sukanto	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Surat Keputusan No. SK-107/MBU/04/2020 tanggal 3 April 2020 / Decree No. SK-107/MBU/04/2020 dated April 3, 2020
3	Otto Ardianto	Komisaris / Commissioner	Surat Keputusan No. SK-107/MBU/04/2020 tanggal 3 April 2020 / Decree No. SK-107/MBU/04/2020 dated April 3, 2020



No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment
4	Ridwan Djamiluddin	Komisaris / Commissioner	Surat Keputusan No. SK-107/MBU/04/2020 tanggal 3 April 2020 / Decree No. SK-107/MBU/04/2020 dated April 3, 2020
5	Ali Mochtar Ngabalin	Komisaris / Commissioner	Surat Keputusan No. SK-107/MBU/04/2020 tanggal 3 April 2020 / Decree No. SK-107/MBU/04/2020 dated April 3, 2020
6	Dedi Syarif Usman	Komisaris / Commissioner	Surat Keputusan No. SK-207/MBU/07/2018 tanggal 12 Juli 2018 / Decree No. SK-207/MBU/07/2018 dated July 12, 2018

*Pengangkatan Marsetio, Heru Sukanto, Otto Ardianto, Otto Ardianto, Ridwan Djamiluddin dan Ali Mochtar Ngabalin berdasarkan SK No. SK-107/MBU/04/2020 tanggal 3 April 2020 menggantikan Ahmad Bambang, Wahju Satrio Utomo, Heddy Lugito dan Zainal Abidin. / Appointment of Marsetio, Heru Sukanto, Otto Ardianto, Otto Ardianto, Ridwan Djamiluddin and Ali Mochtar Ngabalin based on Decree No. SK-107/MBU/04/2020 dated April 3, 2020 replacing Ahmad Bambang, Wahju Satrio Utomo, Heddy Lugito and Zainal Abidin.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Masa jabatan Dewan Komisaris adalah terhitung sejak tanggal RUPS penetapannya sampai dengan RUPS ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya. Namun demikian, tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatan Dewan Komisaris yang bersangkutan berakhir dengan alasan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Term of Office of the Board of Commissioners

The term of office of the Board of Commissioners shall be effective from the date of the GMS of its determination to the fifth (fifth) GMS after the date of the appointment. However, this does not diminish the right of the GMS to dismiss a member of the Board of Commissioners at any time before the term of office of the Board of Commissioners in question ends for the reasons stipulated in the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam menjalankan Tugas dan Tanggung Jawabnya, Dewan Komisaris berpedoman pada beberapa dasar aturan yaitu Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perusahaan, *Code of Conduct* pelaksanaan GCG di lingkungan Perusahaan yang tertuang dalam *Code of Corporate Governance* untuk kemudian diuraikan dalam secara lengkap dalam *Board Manual* sesuai Keputusan Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tanggal 3 September 2018 tentang Reviu dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual* dan *Code of Corporate Governance*). Dengan mengacu pada dasar aturan tersebut, Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perusahaan yang dilaksanakan oleh Direksi dengan prinsip-prinsip:

1. Selalu mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan pengawasan pengelolaan Perseroan oleh Direksi;

Duties and Responsibilities of Board of Commissioners

In performing their duties and responsibilities, the BOC refers to several regulations, namely the Law No. 19 of 2003 on SOE, Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, Articles of Association of the Company, Code of Conduct of GCG implementation in the Company is stipulated in the Code of Corporate Governance which is detailed comprehensively in a Joint Decision of the BOC and BOD of Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 dated 3 September 2018 on the Review and Revision of GCG (Board Manual and Code of Corporate Governance). Through the regulations, the BOC shall be responsible for conducting supervisory function on the Company's management policy and process carried out by the BOD with the following principles:

1. Always complies with the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.
2. Supervises the Company's management conducted by the BOD.



3. Pengawasan serta pemberian nasihat dan arahan yang diberikan Dewan Komisaris dilaksanakan dalam forum resmi dan diberikan secara tertulis;
4. Dewan Komisaris bertindak sebagai majelis (bersifat kolegial) dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri;
5. Pengawasan tidak boleh berubah menjadi pelaksanaan tugas eksekutif, kecuali dalam hal Perseroan tidak memiliki Direksi;
6. Pengawasan dilakukan tidak hanya dengan sekedar menyetujui dan tidak menyetujui terhadap tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, tetapi pengawasan dilakukan secara proaktif, mencakup semua aspek bisnis;
7. Dapat menggunakan jasa profesional yang mandiri dan/atau membentuk komite untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Secara umum, tugas Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja dan target kinerja Dewan Komisaris secara periodik serta menyusun pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing anggota Dewan Komisaris;
2. Melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi atas kebijakan pengurusan Perseroan yang dilaksanakan Direksi, termasuk pelaksanaan rencana pengembangan Perseroan, RJPP, dan RKAP serta perubahannya;
3. Menandatangani Laporan Tahunan, dan apabila dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan, maka harus disebutkan alasannya;
4. Menandatangani Laporan Manajemen Triwulan dan Laporan Manajemen Tahunan;
5. Memantau kepatuhan Direksi atas peraturan perundungan yang berlaku;
6. Mengawasi efektivitas pelaksanaan manajemen risiko dan pengendalian intern;
7. Mengkaji pemanfaatan teknologi informasi;
8. Memantau dan mengevaluasi kinerja Perseroan;
9. Mengadakan rapat secara berkala membahas hasil pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan Direksi;

3. Delivers the supervisory, advice, and directive to the BOD through an official forum in a written form.
4. Acts as a council (collectively) and may not act independently to represent the BOC.
5. May not perform executive duties instead of a supervisory function, unless the Company has no BOD.
6. In conducting supervision, the BOC does not merely approve and reject actions requiring BOC's approval but also carries out proactive supervision that encompasses all business aspects.
7. May employ an independent professional service and/or establish committees that assist the implementation of BOC duties.

In general, the BOC has the following duties:

1. To periodically draft work plan and performance target of the BOC and draft distribution of duties among members of BOC in line with the expertise and experience of each BOC member.
2. To supervise and advise the BOD on the Company's management policies carried out by the BOD, including the implementation of the Company's development plans, RJPP, and RKAP as well as its changes.
3. To sign the Annual Report, and if a BOC member does not sign the Annual Report, the reason must be stated.
4. To sign Quarterly Management Reports and Annual Management Reports.
5. To monitor BOD compliance with applicable laws and regulations.
6. To supervise the effectiveness of risk management and internal control implementation.
7. To assess the use of information technology.
8. To monitor and evaluate the performance of the Company.
9. To hold meetings regularly to discuss the results of the implementation of supervision of the management of the company carried out by the BOD.



10. Jika oleh sebab apapun juga Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris berkewajiban menjalankan pekerjaan Direksi, kemudian dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari meminta diadakannya RUPS Luar Biasa guna mengisi kekosongan Direksi tersebut;
11. Selama menjabat anggota Direksi kosong dan RUPS belum mengangkat anggota Direksi baru, Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi lainnya sebagai pelaksana tugas anggota Direksi dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama dengan anggota Direksi yang kosong;
12. Melaksanakan kepentingan perusahaan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham;
13. Mengusulkan Auditor Eksternal untuk disahkan dalam RUPS dan memantau pelaksanaan penugasan Auditor Eksternal;
14. Menginformasikan kepada RUPS perihal kepemilikan saham dan/atau keluarganya pada Perseroan dan perusahaan lain untuk dicantumkan dalam Laporan Tahunan;
15. Memantau efektivitas praktik GCG yang diterapkan Perseroan, antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala dengan Direksi untuk membahas, merencanakan, dan melaksanakan evaluasi atas implementasi GCG;
16. Mengkaji komposisi jabatan Direksi dan Dewan Komisaris, proses nominasi Direksi serta kebijakan evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris;
17. Mengkaji kebijakan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris serta kesesuaian remunerasi dengan kinerja Direksi dan Dewan Komisaris;
18. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.
10. If for any reason the Company does not have a BOD, for the time being, the BOC is obliged to carry out the work of the BOD, then within 30 days of requesting an Extraordinary GMS to fill the vacancy of the BOD.
11. As long as the positions as a BOD member is vacant and the GMS has not appointed a new BOD member, the BOC appoints one other member of the BOD to carry out the duties of the BOD with the same duties, authorities, and obligations as the vacant members of the BOD.
12. To implement the interests of the company by considering the interests of the Shareholders.
13. To propose an External Auditor to be ratified at the GMS and monitor the implementation of the External Auditor's assignment.
14. To inform the GMS regarding share ownership and/or his family to the Company and other companies to be included in the Annual Report.
15. To monitor the effectiveness of GCG practices implemented by the Company, among others by holding regular meetings with the BOD to discuss, plan, and implement evaluations of GCG implementation.
16. To review the composition of the BOD and BOC, the process of nominating the BOD as well as the performance evaluation policies of the BOD and BOC.
17. To review the remuneration policies of the BOD and BOC as well as the suitability of remuneration with the performance of the BOD and BOC.
18. To take responsibility for carrying out their duties to the GMS.

Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

Hak Dewan Komisaris

Hak Dewan Komisaris meliputi:

1. Memperoleh akses atas informasi Perseroan secara akurat, lengkap, dan tepat waktu;
2. Meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas biaya Perseroan, atau membentuk komite-komite sesuai kebutuhan;

Rights and Authority of Board of Commissioners

Rights of Board of Commissioners

The following describes the rights of BOC:

1. To obtain access to the Company's information in an accurate, comprehensive and timely manner.
2. To employ the service of experts to assist their duties for a limited period at the expense of the Company, or to establish committees according to necessity.



3. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dapat membentuk Sekretariat Dewan Komisaris atas biaya Perseroan;
4. Menerima gaji dan tunjangan lain termasuk santunan purna jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS;
5. Mendapatkan fasilitas Perseroan sesuai dengan hasil penetapan RUPS;
6. Menerima insentif atas prestasi kinerjanya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS apabila Perseroan mencapai tingkat keuntungan;
7. Melakukan perjalanan dinas sesuai ketentuan berlaku.

3. To assist their duties, the BOC may establish a BOC Secretariat on the expense of the Company.
4. To receive a salary and other allowances, including postemployment benefits, according to the prevailing regulations with the amount stipulated by the GMS.
5. To obtain Company's facilities based on the GMS stipulation.
6. To receive incentives for their work achievement with the amount stipulated by the GMS, should the Company reach a certain profit level.
7. To conduct work travel based on the prevailing provisions.

Kewenangan Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris berwenang untuk menyetujui atau menolak secara tertulis rencana Direksi dalam hal:
 - a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;
 - b. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer* – BOT), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer* – BowT), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate* – BTO), dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS;
 - c. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan Perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada Anak Perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
 - d. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
 - e. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - f. Menetapkan struktur organisasi sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
2. Memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak

Authority of Board of Commissioners

1. The BOC is authorised to approve or reject the plans of the BOD in a written form in terms of:
 - a. To collateralize fixed assets for short-term credit withdrawal.
 - b. To cooperate with business entities or other parties in the form of license cooperation, management contract, asset leasing, Joint Operations, Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BOWT), Build Transfer Operate (BTO) and other forms of cooperation with certain value or period as determined by the GMS.
 - c. To receive or give medium/long-term loans, except loans (debts or receivables) from business transactions, and loans given to Company subsidiaries provided that the loans are reported to the BOC.
 - d. To remove non-performing receivables and nonproductive asset inventory from bookkeeping.
 - e. To release fixed productive assets with economic maturity that is normally valid in the industry in general, i.e. five years.
 - f. To determine organisation structure up until one level below the BOD.
2. To enter the buildings and yards or other places used or controlled by the Company and the right to examine books, letters, evidence, inventories, to examine



memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;

3. Mengajukan usulan calon Direksi yang baru kepada RUPS;
4. Dengan suara terbanyak, memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, jika Direksi bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Menunjuk anggota Direksi yang adan untuk menjalankan tugas anggota Direksi yang lowong dengan kekuasaan dan wewenang yang sama, di samping tetap menjalankan tugas utamanya;
6. Meminta penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan;
7. Menjalankan kewenangan lain yang diberikan oleh Pemegang saham melalui RUPS;
8. Mengadakan pengawasan atas pengurusan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan.

Pendelegasian Wewenang

Ketentuan terkait pendelegasian wewenang Dewan Komisaris di Perseroan yaitu Keputusan Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tanggal 3 September 2018 tentang Reviu dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual* dan *Code of Corporate Governance*).

Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Selain itu, untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian Perseroan secara maksimal, Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas kepada masing-masing anggota. Pembagian tugas bagi tiap-tiap anggota Dewan Komisaris diputuskan dalam Surat Keputusan Komisaris Utama Pelindo III No. KEP.01/05/CMSR-2020 tentang Penetapan Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris Pelindo III yang ditetapkan tanggal 11 Mei 2020.

and match the condition of Company's cash for verification needs and other securities, and to know all actions taken by the BOD.

3. To propose the prospective candidates for BOD member(s) to the GMS.
4. To temporarily dismiss one or more member of the BOD, upon gaining majority votes, should the BOD violate the Articles of Association or neglect their obligations, or if there is another urgent reason for the Company to dismiss the member(s) of the BOD based on the prevailing provisions.
5. To appoint the existing Director(s) to carry out the duties of other Director(s) who left their position, with the same power and authority, in addition to carrying out their main duties.
6. To request for explanation on all inquired matters to the BOD, and the BOD is obliged to provide the explanations.
7. To carry out other authority granted by the Shareholders to the GMS.
8. To supervise the management of Subsidiaries and Joint Ventures.

Delegation of Authority

Provisions related to the delegation of authority of the BOC at the Company refer to the Joint Decree of the BOC and BOD of Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 dated 3 September 2018 on Review and Revision of GCG (Board Manual dan Code of Corporate Governance).

Distribution of Duties of the Board of Commissioners

The duty of President Commissioner as *primus inter pares* is to coordinate the activities of the BOC. Furthermore, to perform supervisory and advisory duties optimally, the BOC distributes duties to each Commissioner as stipulated in the Decree of President Commissioner of Pelindo III No. KEP.01/05/CMSR-2020 on Stipulation of Duties and Responsibilities Distribution for Members of the BOC of Pelindo III dated May 11, 2020.



Penjelasan pembagian tugas mengacu pada regulasi tersebut disampaikan dalam tabel berikut:

The following table describes the duties of each Commissioner of the Company in reference to the regulation:

Nama / Name	Jabatan / Position	Ruang Lingkup Tugas / Scope of Duties	
Marsetio	Komisaris Utama / President Commissioner	Mengkoordinasikan semua bidang tugas Dewan Komisaris.	Coordinating the duties of the Board of Commissioners
Heru Sukanto	Komisaris / Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> • Audit; • Pembinaan anak perusahaan; • Organisasi, umum, remunerasi dan nominasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Audit; • Fostering subsidiaries • Organization, general, remuneration and nomination.
Otto Ardianto	Komisaris / Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> • GCG dan Manajemen Risiko; • Pengadaan Barang dan Jasa dan optimalisasi aset; • Sistem pelaporan. 	<ul style="list-style-type: none"> • GCG and Risk Management • Procurement of Goods and Services and assets optimization • Reporting system
Ridwan Djamaluddin	Komisaris / Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan strategis; • Teknik, kinerja operasional dan restrukturisasi; • Perencanaan dan pengembangan usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> • Strategic planning • Engineering, operational performance and restructuration • Business planning and development
Ali Mochtar Ngabalin	Komisaris / Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum dan litigasi; • Teknologi informasi dan komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Legal and litigation • Information and communication technology
Dedi Syarif Usman	Komisaris / Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan jangka pendek Perseroan • Akuntansi, Keuangan, PKBL, dan Perpajakan • Investasi dan Sumber Pendanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Short-term plans of the Company • Accounting, Finance, PKBL, and Tax • Investment and Funding Source

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Pedoman dan Ruang Lingkup

Dalam rangka menginternalisasikan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan aktivitas pengawasan di Perusahaan, pada tanggal 3 September 2018 Pelindo III menetapkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tentang Reviu dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual* dan *Code of Corporate Governance*), menggantikan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 253/XII/KEP/DK.P.III/2015 dan KEP.745.1/HK.04/P.III-2015 mengenai review dan revisi panduan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) Pelindo III sebagai acuan bagi tata laksana kerja bagi organ Dewan Komisaris Perusahaan yang meliputi:

- Persyaratan, keanggotaan dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris;
- Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
- Tugas Dewan Komisaris;

Board Manual of the Board of Commissioners

Guidelines and Scope

To internalise GCG principles in carrying out supervisory activities in the Company, on 3 September 2018 Pelindo III stipulates a Joint Decree of the BOC and BOD of Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 on Review and Revision of Corporate Governance Guidelines (Board Manual and Code of Corporate Governance), replacing Joint Decree of the BOC and BOD No. 253/XII/KEP/DK.P.III/2015 and KEP.745.1/HK.04/P.III-2015 on the review and revision of the guideline for the BOC and BOD (Board Manual) of Pelindo III as a reference for work procedures for the BOC which includes:

- Requirements, membership, and term of office of members of the BOC
- Responsibility of the BOC
- Duties of the BOC



- Kewenangan Dewan Komisaris;
- Hak Dewan Komisaris;
- Hubungan Kerja dengan Direksi;
- Mekanisme Pengawasan Dewan Komisaris;
- Cakupan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris;
- Komite-Komite Dewan Komisaris;
- Sekretariat Dewan Komisaris;
- Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

- Authority of the BOC
- Rights of the BOC
- Work Relationship with the BOD
- Supervisory Mechanism of the BOC
- Scope of BOC Supervisory implementation
- Committees of the BOC
- BOC Secretariat
- Performance Assessment for the BOC

Dasar Hukum Penyusunan *Board Manual*

Tata aturan kerja Dewan Komisaris dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman Kerja Dewan Komisaris (*Board Manual*) yang berisi teknis tugas pengawasan dan pemberian saran atas pengelolaan perusahaan kepada Direksi. *Board Manual* merupakan hasil kodifikasi dari berbagai peraturan yang berlaku bagi perusahaan dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) prinsip-prinsip GCG, prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan dari pemegang saham, serta ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan yang mengatur tata kerja Dewan Komisaris. *Board Manual* berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami, dan dapat dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan, sehingga diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Peraturan perundangan yang menjadi landasan penyusunan dan pemberlakuan *Board Manual* ini adalah:

1. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN;
2. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
4. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN;
5. Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
6. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan GCG pada BUMN;

Legal Basis for the Establishment of Board Manual

Work procedure of the BOC is implemented by referring to the BOC work guideline (*Board Manual*) containing the technical matters on supervisory and advisory actions on the Company's management carried out by the BOD. The Board Manual is the codification of various regulations applicable in the Company and the best practices of GCG principles, prevailing laws and regulations, directive from shareholders, as well as provisions contained in the Articles of Association which regulate the work procedures of BOC. The Board Manual contains directions for work procedures of the BOC and the BOD and explains stages of activity in a structured, systematic, and comprehensible manner which can be implemented consistently and serve as a reference for the BOC and the BOD in implementing their duties to achieve the Company's vision and mission; thus, it is expected that high work standards can be achieved in line with GCG principles.

The laws and regulations which become the foundation for the drafting and enforcing of Board Manual are:

1. Law No. 19 of 2003 on SOE.
2. Law No. 40 of 2007 on limited liability companies.
3. Law No. 17 of 2008 on shipping.
4. Government Regulation No. 45 of 2005 on the establishment, management, monitoring, and dissolution of SOEs.
5. Government Regulation No. 61 of 2009 on port services.
6. Regulation of Minister of SOE No. Per-01/MBU/2011 on GCG implementation in SOEs.



7. Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan BUMN;
8. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan GCG pada BUMN;
9. Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
10. Peraturan Menteri BUMN No. PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/0215 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN;
11. Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN;
12. Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-01/MBU/2009 tentang Pengaturan Cuti bagi Direksi serta Pengaturan Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Direksi dan Dewan Komisaris;
13. Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-08/MBU/12/2015 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
14. Surat Menteri Negara BUMN No. S-375/MBU.Wk/2011 perihal Kebijakan Menteri Negara BUMN dalam Pengurusan dan Pengawasan BUMN;
15. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;
16. Anggaran Dasar Pelindo III.
7. Regulation of Minister of SOE No. PER-04/MBU/06/2020 on the amendment to the Regulation of Minister of SOE No. Per-03/MBU/2012 on guidelines to appoint Members of the BOD and the BOC of SOE Subsidiaries.
8. Regulation of Minister of SOE No. Per-09/MBU/2012 on the amendment to the Regulation of Minister of SOE No. Per-01/MBU/2011 on implementation of GCG in SOEs.
9. Regulation of Minister of SOE No. Per-12/MBU/2012 on supporting organs of the BOC/Supervisory Board of SOEs.
10. Regulation of Minister of SOE No. PER-04/MBU/06/2020 on the amendment to the Regulation of Minister of SOE No. Per-02/MBU/02/2015 on requirements and procedures to appoint and dismiss Members of the BOC and Supervisory Board of SOEs.
11. Regulation of Minister of SOE No. Per-03/MBU/02/2015 on requirements and procedures to appoint and dismiss Members of the BOD of SOE.
12. Circular Letter of Minister of SOE No. SE-01/MBU/2009 on Proposal for Leave for the BOD and Regulation for Work Travel Abroad for the BOD and BOC.
13. Circular Letter of Minister of SOE No. SE-04/MBU/6/2015 on Work Travel Abroad for the BOD and BOC/Supervisory Board of SOEs.
14. Letter of Minister of SOE No. S-375/MBU.Wk/2011 on the Policy of Minister of SOE in Management and Supervision of SOE.
15. Decree of Secretary of the Ministry of SOE No. SK-16/S.MBU/2012 on Indicators/Parameters to Assess and Evaluate the Implementation of Good Corporate Governance (GC) at SOEs.
16. Articles of Association of Pelindo III.

Tujuan Pembentukan *Board Manual*

Board Manual menjelaskan tentang tanggung jawab, tugas kewenangan, dan hak organ utama Perseroan, terutama Dewan Komisaris dan Direksi, untuk mewujudkan sistem pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan, dan efisien. Maksud penyusunan dan pelaksanaan *Board Manual* adalah wujud nyata pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di Perseroan.

Objectives of *Board Manual*

The *Board Manual* describes the responsibilities, duties, authority and rights of the main organs of the Company, particularly the BOC and BOD, to embody professional, transparent, and efficient company management system. *Board Manual* is drafted and implemented as the manifestation of GCG principles implementation in the Company.



Tujuan penyusunan dan pelaksanaan *Board Manual* adalah menguraikan dan menjabarkan tanggung jawab, tugas, kewenangan, serta hak Dewan Komisaris dan Direksi untuk mendukung berjalannya proses atau hubungan kerja di antara kedua organ utama Perusahaan tersebut, serta untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi.

Program Orientasi Dewan Komisaris

Program orientasi bagi Dewan Komisaris dilaksanakan dengan tujuan untuk memberi pemahaman serta gambaran atas aktivitas bisnis, rencana usaha ke depan, panduan kerja (*Board Manual*), dan lainnya yang menjadi ruang lingkup tanggung jawab Dewan Komisaris. Program pengenalan disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan dengan melakukan kajian dokumen Agenda dan Publikasi Rencana Rapat Dewan Komisaris yang terdiri dari dokumen Laporan Tahunan, RKAP, RJPP, Anggaran Dasar Perusahaan, CoCG, Pedoman Etika dan Perilaku (CoC), Program Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundungan yang terkait dengan proses bisnis Perusahaan.

Pada tahun 2020, Kementerian BUMN mengangkat 5 (lima) anggota Dewan Komisaris baru di Pelindo III. Program orientasi atau pengenalan perusahaan terhadap Dewan Komisaris yang baru diangkat berada di bawah tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN, untuk kemudian diturunkan menjadi CoCG. Program orientasi anggota Dewan Komisaris baru dilaksanakan pada tanggal 3 April 2020 kepada Marsetio, Heru Sukanto, Otto Ardianto, Ridwan Djamaluddin, dan Ali Mochtar Ngabalin.

The Board Manual aims to describe and elaborate the responsibilities, duties, authorities, and rights of the BOC and BOD to support the work process or relationship between the two main organs, and to support the implementation of BOC and BOD duties.

Orientation Program for the Board of Commissioners

Orientation program for the BOC is implemented to provide understanding and description of the Company's business activities, plans, Board Manual, and so on, which become the scope of the duty of the BOC. The program is prepared by the Corporate Secretary by conducting a review on the Agenda and Publication of Meeting Plan of the BOC, consisting of Annual Report, RKAP, RJPP, Articles of Association, CoCG, Code of Conduct, Work Programs of Board of Commissioners and Supporting Committees of the BOC, as well as laws and regulations related to the Company's business process.

In 2020, the Ministry of SOE dismissed and appointed 5 (five) members of the BOC of Pelindo III. Hence, the Company carried out an orientation program for the newly-appointed Commissioner. The program is under the responsibility of the Corporate Secretary as stipulated in the Regulation of Minister of SOE No. Per-01/MBU/2011 dated 1 August 2011 on GCG Implementation in SOEs from which the CoCG of the Company is derived. The program was implemented on April 3, 2020 for Marsetio, Heru Sukanto, Otto Ardianto, Ridwan Djamaluddin, and Ali Mochtar Ngabalin.



Materi Program Orientasi Dewan Komisaris

Material of Orientation Program for the Board of Commissioners

Aspek Tata Kelola Perusahaan / Corporate Governance Aspect	Realisasi Materi / Material Realization	Keterangan / Description
Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan berbagai masalah strategis lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> Sejarah Perseroan Wilayah kerja Perseroan Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Laporan Keuangan Perseroan Rencana Jangka Pendek dan Panjang Perusahaan <ul style="list-style-type: none"> Company History Company work area Corporate Vision, Mission and Culture Financial statements of the Company Short-term and long-term plans of the Company 	Terpenuhi
Description of the Company concerning the objectives, nature, scope of activity, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive positions, risks, and other strategic issues.		Fulfilled
Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan	Tata kelola Perusahaan	Terpenuhi
Implementation of GCG principles by the Company.	Corporate governance	Fulfilled
Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian intern, serta tugas dan peran Komite Audit dan komite-komite lain yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Struktur organisasi Perseroan, SDM dan entitas Anak Perusahaan	Terpenuhi
Explanation related to the delegated authority, internal and external audit activities, internal control system and policy, as well as duties and roles of the Audit Committee and other committees established by the BOC.	The Company's organisational structure, Human Capital, and Subsidiaries.	Fulfilled
Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi		Terpenuhi
Description of duties and responsibilities of the BOC and BOD.		Fulfilled
Program pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perseroan atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perseroan di mana program tersebut dilaksanakan.	Kunjungan ke fasilitas pelabuhan, Anak Perusahaan, dan afiliasi dilakukan secara bertahap setelah presentasi pengenalan Perseroan oleh <i>Corporate Secretary</i> .	Terpenuhi
An orientation programme can be given in the form of presentation, meeting or visit the Company's facilities, or any other programme deemed appropriate with the Company's condition where it is implemented.	Visit port facilities, Subsidiaries, and affiliations were conducted in stages after the company orientation presentation by the Corporate Secretary	Fulfilled

Ringkasan Pelaksanaan Program Orientasi Tahun 2020

Summary of Orientation Program in 2020

Peserta / Participants	Topik / Topics	Penyelenggara / Organizer	Waktu dan Tempat / Date and Venue	Durasi / Duration	Biaya / Cost
<ul style="list-style-type: none"> • Marsetio • Heru Sukanto • Otto Ardianto • Ridwan Djamaluddin • Ali Mochtar Ngabalin 	Pengenalan Perusahaan dan <i>core business</i> Anak dan Cucu Perusahaan / Introduction to the Company and core business of Subsidiaries	Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary	3 April 2020, Virtual Meeting	2 jam / hours	-



Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*)

Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah menyelesaikan dan lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit & proper test*) sebagaimana diatur dalam prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (*fit & proper test*) bertujuan untuk menilai dan mengukuhkan integritas, kualifikasi, kompetensi, dan kelayakan anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan kaidah dan prinsip GCG yang berlaku.

Fit & Proper Test of the Board of Commissioners

All members of the Board of Commissioners have completed and passed the fit & proper test as stipulated in the principles of good corporate governance and prevailing laws and regulations. The implementation of the fit & proper test aims to assess and confirm the integrity, qualifications, competence and worthiness of members of the Board of Commissioners in carrying out their functions and responsibilities in accordance with the applicable GCG rules and principles.

Nama / Name	Jabatan / Position	Periode Jabatan / Term of Office	Penyelenggara Uji Kelayakan dan Kepatutan / Organizer
Marsetio	Komisaris Utama / President Commissioner	Pertama / First	Kementerian BUMN / Minister of SOE
Heru Sukanto	Komisaris / Commissioner	Pertama / First	Kementerian BUMN / Minister of SOE
Otto Ardianto	Komisaris / Commissioner	Pertama / First	Kementerian BUMN / Minister of SOE
Ridwan Djamaluddin	Komisaris / Commissioner	Pertama / First	Kementerian BUMN / Minister of SOE
Ali Mochtar Ngabalin	Komisaris / Commissioner	Pertama / First	Kementerian BUMN / Minister of SOE
Dedi Syarif Usman	Komisaris / Commissioner	Pertama / First	Kementerian BUMN / Minister of SOE

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mengadakan rapat dan pertemuan, baik rapat internal Dewan Komisaris maupun rapat bersama Direksi serta Komite. Rapat Dewan Komisaris umumnya diagendakan secara berkala dalam satu tahun buku untuk menindaklanjuti berbagai keperluan pengawasan dan pemberian saran atas aktivitas operasional yang dijalankan Direksi beserta jajarannya. Rapat Dewan Komisaris juga dapat diselenggarakan di luar agenda yang telah ditetapkan jika terdapat hal-hal yang mendesak yang membutuhkan peran dan tugas-tugas Dewan Komisaris di dalamnya.

Secara umum, agenda rapat yang diselenggarakan Dewan Komisaris membahas mengenai:

- Evaluasi kinerja Perseroan;
- Penyusunan RJPP dan RKAP;
- Tindak lanjut temuan SPI;
- Pembahasan tindak lanjut temuan BPK-RI;
- Koordinasi dengan komite-komite di bawah Dewan Komisaris;
- Agenda lainnya yang menjadi kewenangan Dewan Komisaris

Meeting Frequency and Attendance of the Board of Commissioners

The BOC holds both internal and joint meetings with the BOD and Committee. The BOC meetings are regularly scheduled throughout one fiscal year to follow-up various supervisory and advisory needs on the operational activities conducted by the BOD and the management. BOC meetings may also be held outside of the set agenda should other urgent matters require the roles and duties of the BOC.

In general, the agenda of the BOC meeting discuss:

- Evaluation to Company performance,
- RJPP and RKAP drafting,
- Follow-up on Internal Audit findings,
- Further discussion to follow-up on BPK RI findings,
- Coordination with committees under the BOC, and
- Other agenda under the jurisdiction of the BOC.



Publikasi Rapat Dewan Komisaris dan Agenda Rapat

Selain agenda umum yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana yang tercantum dalam *Board Manual*, Dewan Komisaris juga melaksanakan penyusunan rencana pembahasan dalam rapat (internal, internal melibatkan komite, maupun rapat gabungan) dengan agenda khusus. Rencana awal pelaksanaan rapat Dewan Komisaris yang tertuang dalam Jadwal Tahunan Perusahaan (*calendar event*).

Informasi rencana pelaksanaan rapat juga telah didistribusikan secara luas kepada pihak-pihak terkait seperti Sekretaris Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, serta organ-organ lainnya seperti Internal Audit dan Divisi-Divisi yang ada. Informasi mengenai rencana pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dilakukan selambat-lambatnya 7 hari sebelum jadwal pelaksanaan. Dalam publikasi tersebut, diinformasikan mengenai tanggal dan waktu pelaksanaan rapat, lokasi rapat, agenda rapat, dan pihak-pihak yang menjadi peserta rapat.

Dalam hal terjadi usulan rapat yang bersifat insidental, publikasi dapat dilakukan dengan seefektif dan seefisien mungkin namun tetap mengikuti prosedur pendokumentasian yang berlaku (membuat berita acara). Kegiatan tersebut telah tertuang dalam Keputusan Dewan Komisaris No. 36.1/III/SK/DK.P.III/2015 tanggal 9 Maret 2015 tentang Tata Kelola, Prosedur, dan Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Pelindo III.

Dokumentasi Hasil Rapat

Dalam menjamin terlaksananya prinsip transparansi dan akuntabilitas, risalah pelaksanaan rapat (dalam hal ini rapat Dewan Komisaris) didokumentasikan secara baik yang memuat pembahasan-pembahasan atas agenda rapat, perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), serta keputusan yang ditetapkan. Dokumentasi rapat kemudian ditandatangani oleh pimpinan dan seluruh peserta rapat yang hadir serta didistribusikan sesuai peruntukannya.

Publication of the Board of Commissioners Meeting and Meeting Agenda

Other than the general agenda of duties and responsibilities of the BOC as stipulated in Board Manual, the BOC also prepares discussion plan in the meetings (internal, internal with committees, and joint meetings) with special agenda. The initial plan for BOC meetings is stipulated in the Calendar Event of the Company.

Information on meeting plan has been widely distributed to other related parties such as the Secretary to the BOC, Corporate Secretary, and other organs including Internal Audit and other existing Divisions. Information on the BOC meeting plan is distributed no later than seven days before the meeting date. In the publication, date and time of the meeting, location, agenda, and participants of the meeting are informed.

If there is an incidental agenda in the meeting, a publication of meeting information is carried out as effectively and efficiently as possible but remains in conformity with the documentation procedure (preparing minutes of the meeting). Such activities have been stipulated in the Decree of the BOC No. 36.1/III/SK/DK.P.III/2015 dated 9 March 2015 regarding Governance, Procedures, and Meeting Implementation of the BOC of Pelindo III.

Documentation of the Results of the Meeting

In ensuring the implementation of transparency and accountability principles, minutes of meeting implementation (in this case, for BOC meeting) is documented well to contain the discussion of meeting agenda, dissenting opinions, as well as the stipulated decisions. The meeting documentation is signed by the chairman and all meeting participants attending and shall be distributed accordingly.



Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris

Mengacu pada mekanisme rapat yang tertera dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris, ketentuan pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- Semua keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
- Apabila melalui musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- Untuk menjaga independensi dan objektivitas, setiap anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan diharuskan untuk tidak ikut serta dalam pemberian suara untuk pengambilan keputusan. Kenyataan tersebut harus dicatat dalam risalah rapat.
- Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang akan ditentukan dengan voting secara tertutup.
- Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan satu suara ditambah satu suara anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya.
- Suara blangko dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat.
- Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
- Keputusan-keputusan yang mengikat dapat pula diambil tanpa diadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa keputusan itu disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
- Keputusan-keputusan yang menyangkut aspek-aspek strategis harus dilakukan melalui mekanisme Rapat Dewan Komisaris atau dalam bentuk keputusan yang disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Aspek-aspek strategis tersebut antara lain meliputi semua perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan RUPS setelah mendapatkan rekomendasi tertulis Dewan Komisaris serta semua perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris.

Decision-Making Mechanisms in Board of Commissioners Meetings

The Board Manual of the BOC stipulates the following meeting mechanisms which serve as references for the decision-making process:

- All decisions of the meeting of the BOC are made by consensus.
- If consensus is not achieved, decisions are made by voting.
- To maintain independence and objectivity, every BOC member with a conflict of interest is not eligible to cast their vote in decision-making. Such a fact has to be stated in the minutes of the meeting.
- If the number of 'agree' votes is equal to the number of 'disagree' votes, the concerned proposal is considered to be rejected, unless the concerning an individual, closed voting shall be conducted.
- Each member of the BOC is entitled to cast one vote plus one vote of the represented Commissioner.
- A blank vote shall be considered to agree with the proposal submitted in the meeting.
- Invalid votes shall be considered absent and shall not be counted in determining the total votes cast in the meeting.
- Binding resolutions can be made without having to hold the BOC meetings, provided that the resolutions are approved in writing and signed by all members of the BOC.
- Decisions related to strategic aspects shall be made through the BOC Meeting mechanism or in the form of decisions that are approved in writing and signed by all members of the BOC. Such strategic aspects include, among others, all BOD actions requiring GMS approval after obtaining a written recommendation from the BOC, and all BOD actions shall obtain written approval from the BOC.



Rekapitulasi Rapat Dewan Komisaris Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris mengadakan 15 (lima belas) kali rapat internal dengan uraian sebagai berikut:

Minutes of Meetings of the Board of Commissioners

Throughout 2020, the Board of Commissioners held 15 (fifteen) internal meetings with the following descriptions:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Number of Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	% Kehadiran / Attendance %
Ahmad Bambang	Komisaris Utama / President Commissioner	2	2	100%
Marsetio	Komisaris Utama / President Commissioner	13	13	100%
Wahju Satrio Utomo	Komisaris / Commissioner	2	2	100%
Heru Sukanto	Komisaris / Commissioner	13	13	100%
Heddy Lugito	Komisaris / Commissioner	2	2	100%
Otto Ardianto	Komisaris / Commissioner	13	13	100%
Zainal Abidin	Komisaris / Commissioner	2	2	100%
Ridwan Djamiluddin	Komisaris / Commissioner	13	7	54%
Ali Mochtar Ngabalin	Komisaris / Commissioner	13	8	61%
Dedi Syarif Usman	Komisaris / Commissioner	13	15	100%

Risalah Rapat Dewan Komisaris Tahun 2020

Minutes of the 2020 Board of Commissioners Meeting

1	Tanggal / Date
	27 Februari 2020
Agenda Rapat / Meeting Agenda	
1.	Laporan Kinerja Manajemen dan Capaian Investasi sampai Januari 2020
2.	Pembahasan Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2019
3.	Pembahasan Kebijakan Capex Strategis dan Berisiko Tinggi Tahun 2020
4.	Tindak Lanjut Rapat BOC BOD Bulan Januari 2020
5.	Rincian Target Bulanan dan Cascading Kontrak Manajemen
6.	Hasil Koordinasi rencana IPO TPS dengan RPU Kementerian BUMN
1.	Report on Management Performance and Investment Achievement until January 2020
2.	Discussion on Audited Financial Statements for Fiscal Year 2019
3.	Discussion on Strategic and High-Risk Capital Expenditure Policy in 2020
4.	Follow-up to the January 2020 BOC BOD Meeting
5.	Details of Monthly Targets and Cascading Management Contracts
6.	Result of Coordination of TPS IPO plan with RPU Ministry of SOEs
Kehadiran / Attendance	
1.	Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (Persero):
a.	Ahmad Bambang : Komisaris Utama / President Commissioner
b.	Wahju Satrio U : Komisaris / Commissioner
c.	Zainal Abidin : Komisaris / Commissioner
d.	Heddy Lugito : Komisaris / Commissioner
e.	Dedi Syarif Usman : Komisaris / Commissioner
2.	Sekretaris Dewan Komisaris dan Anggota Komite PT Pelabuhan Indonesia III (Persero):
a.	Weny Maulatsih : Sekretaris Dewan Komisaris / Secretary to the Board of Commissioners
b.	Tubagus Arief Fahmi : Anggota Komite GCG dan MR / Members of the GCG and MR Committee
c.	Mohammad Rizqa : Anggota Komite GCG dan MR / Members of the GCG and MR Committee
d.	Andi Sudhana : Anggota Komite Audit / Audit Committee Member
e.	Darmansyah : Anggota Komite Audit / Audit Committee Member
f.	Gatot : Staf Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat Staff
g.	Lis Syukralillah : Staf Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat Staff



2	Tanggal / Date
	30 Maret 2020
Agenda Rapat / Meeting Agenda	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja Manajemen sampai Februari 2020 2. Pembahasan Usulan KSO Pembangunan dan Pengoperasian Pusat Logistik di Benoa 3. <i>Business Continuity Plan (BCP) PT Pelindo III (Persero)</i> akibat/dampak Pandemi Covid-19 4. Tindak Lanjut Rapat BOC-BOD Bulan Februari 2020. 5. Lain-lain agenda tentang: <ol style="list-style-type: none"> a. Progres rencana Kerjasama antara PT Pelindo III (Persero) dan PT Adaro di Mekarputih b. Penyelesaian sengketa tanah di Batulicin
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Management Performance Report until February 2020 2. Discussion on the KSO Proposal for the Development and Operation of a Logistics Center in Benoa 3. PT Pelindo III (Persero) Business Continuity Plan (BCP) due to/impact of the COVID-19 Pandemic 4. Follow-up to the February 2020 BOC-BOD Meeting. 5. Other agenda about: <ol style="list-style-type: none"> a. Progress of the Cooperation plan between PT Pelindo III (Persero) and PT Adaro in Mekarputih b. Land dispute resolution in Batulicin
Kehadiran / Attendance	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (Persero): <ol style="list-style-type: none"> 1. Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero): a. Ahmad Bambang : Komisaris Utama / President Commissioner b. Wahju Satrio U : Komisaris / Commissioner c. Zainal Abidin : Komisaris / Commissioner d. Heddy Lugito : Komisaris / Commissioner e. Dedi Syarif Usman : Komisaris / Commissioner 2. Sekretaris Dewan Komisaris dan Anggota Komite PT Pelabuhan Indonesia III (Persero): <ol style="list-style-type: none"> 2. Secretary to the Board of Commissioners and Committee Members of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero): a. Weny Maulatsih : Sekretaris Dewan Komisaris / Secretary to the Board of Commissioners b. Tubagus Arief Fahmi : Anggota Komite GCG dan MR / Members of the GCG and MR Committee c. Mohammad Rizqa : Anggota Komite GCG dan MR / Members of the GCG and MR Committee d. Andi Sudhana : Anggota Komite Audit / Audit Committee Member e. Darmansyah : Anggota Komite Audit / Audit Committee Member f. Gatot : Staf Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat Staff g. Lis Syukraillah : Staf Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat Staff
3	Tanggal / Date
	14 April 2021
Agenda Rapat / Meeting Agenda	
	<p>Pembukaan oleh Komisaris Utama</p> <p>Penyampaian Hasil Sosialisasi <i>Human Capital Management System/HCMS</i> antara Wakil Menteri BUMN II dengan Komisaris Utama dan Direktur SDM PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)</p>
	<p>Opening by the President Commissioner</p> <p>Submission of the Outreach of the Human Capital Management System/HCMS between the Deputy Minister of SOEs II with the President Commissioner and HR Director of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)</p>
Kehadiran / Attendance	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (Persero): <ol style="list-style-type: none"> 1. Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero): <ol style="list-style-type: none"> a. Marsetio : Komisaris Utama / President Commissioner b. Dedi Syarif Usman : Komisaris / Commissioner c. Heru Sukanto : Komisaris / Commissioner d. Otto Ardianto : Komisaris / Commissioner e. Ridwan Djamaruddin : Komisaris / Commissioner f. Ali Mochtar Ngabalin : Komisaris / Commissioner 2. Sekretaris Dewan Komisaris dan Anggota Komite PT Pelabuhan Indonesia III (Persero): <ol style="list-style-type: none"> 2. Secretary to the Board of Commissioners and Committee Members of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero): <ol style="list-style-type: none"> a. Weny Maulatsih : Sekretaris Dewan Komisaris / Secretary to the Board of Commissioners b. Tubagus Arief Fahmi : Anggota Komite GCG dan MR / Members of the GCG and MR Committee c. Mohammad Rizqa* : Anggota Komite GCG dan MR / Members of the GCG and MR Committee d. Andi Sudhana : Anggota Komite Audit / Audit Committee Member e. Darmansyah : Anggota Komite Audit / Audit Committee Member f. Lis Syukraillah : Staf Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat Staff
	* berhalangan hadir karena menjalani penugasan di tempat lain / Unable to attend due to assignment elsewhere.



4	Tanggal / Date
	21 April 2020
Agenda Rapat / Meeting Agenda	
Pembukaan oleh Komisaris Utama	Opening by the President Commissioner
Perkenalan Anggota Komite-Komite Baru	Introduction of New Committee Members
Kehadiran / Attendance	
1. Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (Persero):	1. Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero):
a. Marsetio : Komisaris Utama / President Commissioner	
b. Dedi Syarif Usman : Komisaris / Commissioner	
c. Heru Sukanto : Komisaris / Commissioner	
d. Otto Ardianto : Komisaris / Commissioner	
e. Ridwan Djamaruddin : Komisaris / Commissioner	
f. Ali Mochtar Ngabalin : Komisaris / Commissioner	
2. Sekretaris Dewan Komisaris dan Anggota Komite PT Pelabuhan Indonesia III (Persero):	2. Secretary to the Board of Commissioners and Committee Members of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero):
a. Agus Setianto : Anggota Komite Audit / Audit Committee Member	
b. Yusmar Anggadinata : Anggota Komite Audit / Audit Committee Member	
c. Tubagus Arief Fahmi : Anggota Komite GCG dan MR / Members of the GCG and MR Committee	
d. Albertus Giartono : Anggota Komite GCG dan MR / Members of the GCG and MR Committee	
e. Tri Prasodjo : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member	
f. Agus Pambagio : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member	
g. Weny Maultasih : Sekretaris Dewan Komisaris / Secretary to the Board of Commissioners	
h. Lis Syukralillah : Staf Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat Staff	
i. Anwar Siregar : Staf Dewan Komisaris – Komite NR / Board of Commissioners Staff – NR Committee	
j. Ramadi I : Staf Dewan Komisaris – Komite GCG & MR / Staff of the Board of Commissioners – GCG & MR Committee	
k. Dimaz Yuliono : Staf Dewan Komisaris – Komite Audit / Staff of the Board of Commissioners – Audit Committee	
5	Tanggal / Date
	11 Mei 2020
Agenda Rapat / Meeting Agenda	
1. Pembukaan oleh Komisaris Utama.	1. Opening by the President Commissioner.
2. Pembagian tugas Anggota Dewan Komisaris	2. Division of duties for members of the Board of Commissioners
3. Laporan Manajemen PT Pelindo III Bulan Maret 2020 dan Triwulan I Tahun 2020	3. PT Pelindo III Management Report March 2020 and First Quarter 2020
4. Revisi Rencana Investasi 2020 dan Timeline Pelaksanaan	4. Revised 2020 Investment Plan and Implementation Timeline
Kehadiran / Attendance	
1. Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (Persero):	1. Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero):
a. Marsetio : Komisaris Utama / President Commissioner	
b. Dedi Syarif Usman : Komisaris / Commissioner	
c. Heru Sukanto : Komisaris / Commissioner	
d. Otto Ardianto : Komisaris / Commissioner	
e. Ridwan Djamaruddin : Komisaris / Commissioner	
f. Ali Mochtar Ngabalin : Komisaris / Commissioner	



2. Sekretaris Dewan Komisaris dan Anggota Komite PT Pelabuhan Indonesia III (Persero):	2. Secretary to the Board of Commissioners and Committee Members of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero):
a. Agus Setianto	: Anggota Komite Audit / Audit Committee Member
b. Yusmar Anggadinata	: Anggota Komite Audit / Audit Committee Member
c. Tubagus Arief Fahmi	: Anggota Komite GCG dan MR / Members of the GCG and MR Committee
d. Albertus Giartono	: Anggota Komite GCG dan MR / Members of the GCG and MR Committee
e. Tri Prasodjo	: Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member
f. Agus Pambagio	: Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member
g. Weny Maultasih	: Sekretaris Dewan Komisaris / Secretary to the Board of Commissioners
h. Lis Syukralillah	: Staf Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat Staff
i. Anwar Siregar	: Staf Dewan Komisaris – Komite NR / Board of Commissioners Staff – NR Committee
j. Ramadi I	: Staf Dewan Komisaris – Komite GCG & MR / Staff of the Board of Commissioners – GCG & MR Committee
k. Dimaz Yuliono	: Staf Dewan Komisaris – Komite Audit / Staff of the Board of Commissioners – Audit Committee
l. Deni Christianto	: Kepala Kantor Perwakilan / Head of Representative Office

6 Tanggal / Date
28 Mei 2020

Agenda Rapat / Meeting Agenda

- | | |
|---|---|
| 1. Pembukaan oleh Komisaris Utama. | 1. Opening by the President Commissioner. |
| 2. Kinerja Perusahaan sampai dengan April 2020 | 2. Company Performance up to April 2020 |
| 3. Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (Khususnya terkait penggunaan produk dalam negeri) | 3. Policy on the Procurement of Goods and Services (Specifically related to the use of domestic products) |

Kehadiran / Attendance

1. Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (Persero):	1. Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero):
a. Marsetio	: Komisaris Utama / President Commissioner
b. Dedi Syarif Usman	: Komisaris / Commissioner
c. Heru Sukanto	: Komisaris / Commissioner
d. Otto Ardianto	: Komisaris / Commissioner
e. Ridwan Djamaruddin	: Komisaris / Commissioner
f. Ali Mochtar Ngabalin	: Komisaris / Commissioner
2. Sekretaris Dewan Komisaris dan Anggota Komite PT Pelabuhan Indonesia III (Persero):	2. Secretary to the Board of Commissioners and Committee Members of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero):
a. Agus Setianto	: Anggota Komite Audit / Audit Committee Member
b. Yusmar Anggadinata	: Anggota Komite Audit / Audit Committee Member
c. Tubagus Arief Fahmi	: Anggota Komite GCG dan MR / Members of the GCG and MR Committee
d. Albertus Giartono	: Anggota Komite GCG dan MR / Members of the GCG and MR Committee
e. Tri Prasodjo	: Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member
f. Agus Pambagio	: Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member
g. Weny Maultasih	: Sekretaris Dewan Komisaris / Secretary to the Board of Commissioners
h. Lis Syukralillah	: Staf Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat Staff
i. Anwar Siregar	: Staf Dewan Komisaris – Komite NR / Board of Commissioners Staff – NR Committee
j. Ramadi I	: Staf Dewan Komisaris – Komite GCG & MR / Staff of the Board of Commissioners – GCG & MR Committee
k. Dimaz Yuliono	: Staf Dewan Komisaris – Komite Audit / Staff of the Board of Commissioners – Audit Committee



7 Tanggal / Date	
08 Juni 2020	08 June 2020
Agenda Rapat / Meeting Agenda	
1. Pembukaan oleh Komisaris Utama. 2. Laporan Hasil Kunjungan Kerja ke PT Pelindo II (Persero) Tanjung Priok 3. Laporan Hasil Kunjungan Kerja ke PT Pelindo III (Persero) (Surabaya dan Semarang)	1. Opening by the President Commissioner. 2. Report on the Results of a Working Visit to PT Pelindo II (Persero) Tanjung Priok 3. Report on the Results of Working Visits to PT Pelindo III (Persero) (Surabaya and Semarang)
Kehadiran / Attendance	
1. Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (Persero): a. Marsetio : Komisaris Utama / President Commissioner b. Dedi Syarif Usman : Komisaris / Commissioner c. Heru Sukanto : Komisaris / Commissioner d. Otto Ardianto : Komisaris / Commissioner e. Ridwan Djamaruddin : Komisaris / Commissioner f. Ali Mochtar Ngabalin* : Komisaris / Commissioner *tidak dapat hadir karena terdapat rapat lain. / could not attend due to other meeting.	1. Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero): a. Marsetio : Komisaris Utama / President Commissioner b. Dedi Syarif Usman : Komisaris / Commissioner c. Heru Sukanto : Komisaris / Commissioner d. Otto Ardianto : Komisaris / Commissioner e. Ridwan Djamaruddin : Komisaris / Commissioner f. Ali Mochtar Ngabalin* : Komisaris / Commissioner *tidak dapat hadir karena terdapat rapat lain. / could not attend due to other meeting.
2. Sekretaris Dewan Komisaris dan Anggota Komite PT Pelabuhan Indonesia III (Persero): a. Agus Setianto : Anggota Komite Audit / Audit Committee Member b. Yusmar Anggadinata : Anggota Komite Audit / Audit Committee Member c. Tubagus Arief Fahmi : Anggota Komite GCG dan MR / Members of the GCG and MR Committee d. Albertus Giartono : Anggota Komite GCG dan MR / Members of the GCG and MR Committee e. Tri Prasodjo : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member f. Agus Pambagio : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member g. Weny Maultasih : Sekretaris Dewan Komisaris / Secretary to the Board of Commissioners h. Lis Syukralillah : Staf Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat Staff i. Anwar Siregar : Staf Dewan Komisaris – Komite NR / Board of Commissioners Staff – NR Committee j. Ramadi I : Staf Dewan Komisaris – Komite GCG & MR / Staff of the Board of Commissioners – GCG & MR Committee k. Dimaz Yuliono : Staf Dewan Komisaris – Komite Audit / Staff of the Board of Commissioners – Audit Committee	2. Secretary to the Board of Commissioners and Committee Members of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero): a. Agus Setianto : Anggota Komite Audit / Audit Committee Member b. Yusmar Anggadinata : Anggota Komite Audit / Audit Committee Member c. Tubagus Arief Fahmi : Anggota Komite GCG dan MR / Members of the GCG and MR Committee d. Albertus Giartono : Anggota Komite GCG dan MR / Members of the GCG and MR Committee e. Tri Prasodjo : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member f. Agus Pambagio : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member g. Weny Maultasih : Sekretaris Dewan Komisaris / Secretary to the Board of Commissioners h. Lis Syukralillah : Staf Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat Staff i. Anwar Siregar : Staf Dewan Komisaris – Komite NR / Board of Commissioners Staff – NR Committee j. Ramadi I : Staf Dewan Komisaris – Komite GCG & MR / Staff of the Board of Commissioners – GCG & MR Committee k. Dimaz Yuliono : Staf Dewan Komisaris – Komite Audit / Staff of the Board of Commissioners – Audit Committee
3. Bpk Deni Christianto – Kepala Kantor Perwakilan	3. Bpk Deni Christianto – Head of Representative Office
8 Tanggal / Date	
09 Juli 2020	09 July 2020
Agenda Rapat / Meeting Agenda	
1. Kinerja Perusahaan Bulan Mei 2020 (telaah oleh Komite Audit) 2. Pengisian jabatan struktural di lingkungan Pelindo III Grup (telaah oleh Komite Nominasi dan Remunerasi) 3. Dukungan program pendanaan kreatif Kementerian Perhubungan (telaah oleh Komite GCG dan MR) 4. Progres investasi PT Khrisna di Benoa (telaah oleh Komite GCG dan MR) 5. Lain-lain: Hasil kunjungan kerja dan benchmarking Tanjung Priok, Surabaya, Semarang, dan Benoa	1. Company Performance in May 2020 (reviewed by the Audit Committee) 2. Filling structural positions within the Pelindo III Group (reviewed by the Nomination and Remuneration Committee) 3. Ministry of Transportation creative funding program support (reviewed by the GCG and MR Committee) 4. PT Khrisna's investment progress in Benoa (reviewed by the GCG and MR Committee) 5. Others: Results of working visits and benchmarking of Tanjung Priok, Surabaya, Semarang, and Benoa

**Kehadiran / Attendance**

- | | |
|---|--|
| <p>1. Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (Persero):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Marsetio : Komisaris Utama / President Commissioner b. Dedi Syarif Usman : Komisaris / Commissioner c. Heru Sukanto : Komisaris / Commissioner d. Otto Ardianto : Komisaris / Commissioner e. Ridwan Djamaruddin* : Komisaris / Commissioner f. Ali Mochtar Ngabalin* : Komisaris / Commissioner <p>*tidak dapat hadir karena terdapat penugasan lain. / could not attend due to other assignments.</p> | <p>1. Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Marsetio : Komisaris Utama / President Commissioner b. Dedi Syarif Usman : Komisaris / Commissioner c. Heru Sukanto : Komisaris / Commissioner d. Otto Ardianto : Komisaris / Commissioner e. Ridwan Djamaruddin* : Komisaris / Commissioner f. Ali Mochtar Ngabalin* : Komisaris / Commissioner |
| <p>2. Sekretaris Dewan Komisaris dan Anggota Komite PT Pelabuhan Indonesia III (Persero):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Agus Setianto : Anggota Komite Audit / Audit Committee Member b. Yusmar Anggadinata : Anggota Komite Audit / Audit Committee Member c. Tubagus Arief Fahmi : Anggota Komite GCG dan MR / Members of the GCG and MR Committee d. Albertus Giartono : Anggota Komite GCG dan MR / Members of the GCG and MR Committee e. Tri Prasodjo : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member f. Agus Pambagio : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member g. Weny Maultasih : Sekretaris Dewan Komisaris / Secretary to the Board of Commissioners h. Lis Syukralillah : Staf Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat Staff i. Anwar Siregar : Staf Dewan Komisaris – Komite NR / Board of Commissioners Staff – NR Committee j. Ramadi I : Staf Dewan Komisaris – Komite GCG & MR / Staff of the Board of Commissioners – GCG & MR Committee k. Dimaz Yuliono : Staf Dewan Komisaris – Komite Audit / Staff of the Board of Commissioners – Audit Committee | <p>2. Secretary to the Board of Commissioners and Committee Members of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Agus Setianto : Anggota Komite Audit / Audit Committee Member b. Yusmar Anggadinata : Anggota Komite Audit / Audit Committee Member c. Tubagus Arief Fahmi : Anggota Komite GCG dan MR / Members of the GCG and MR Committee d. Albertus Giartono : Anggota Komite GCG dan MR / Members of the GCG and MR Committee e. Tri Prasodjo : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member f. Agus Pambagio : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member g. Weny Maultasih : Sekretaris Dewan Komisaris / Secretary to the Board of Commissioners h. Lis Syukralillah : Staf Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat Staff i. Anwar Siregar : Staf Dewan Komisaris – Komite NR / Board of Commissioners Staff – NR Committee j. Ramadi I : Staf Dewan Komisaris – Komite GCG & MR / Staff of the Board of Commissioners – GCG & MR Committee k. Dimaz Yuliono : Staf Dewan Komisaris – Komite Audit / Staff of the Board of Commissioners – Audit Committee |

9 Tanggal / Date

24 Juli 2020

24 July 2020

Agenda Rapat / Meeting Agenda

- | | |
|---|--|
| <p>1. Pembukaan oleh Komisaris Utama</p> <p>2. Pembahasan Revisi RKAP Tahun 2020 (Telaah oleh Komite Audit)</p> | <p>1. Opening by the President Commissioner</p> <p>2. Discussion on the 2020 RKAP Revision (Reviewed by the Audit Committee)</p> |
|---|--|

Kehadiran / Attendance

- | | |
|--|---|
| <p>1. Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (Persero):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Marsetio : Komisaris Utama / President Commissioner b. Dedi Syarif Usman : Komisaris / Commissioner c. Heru Sukanto : Komisaris / Commissioner d. Otto Ardianto : Komisaris / Commissioner e. Ridwan Djamaruddin* : Komisaris / Commissioner f. Ali Mochtar Ngabalin : Komisaris / Commissioner <p>*tidak dapat hadir karena terdapat penugasan lain. / could not attend due to other assignments.</p> | <p>1. Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Marsetio : Komisaris Utama / President Commissioner b. Dedi Syarif Usman : Komisaris / Commissioner c. Heru Sukanto : Komisaris / Commissioner d. Otto Ardianto : Komisaris / Commissioner e. Ridwan Djamaruddin* : Komisaris / Commissioner f. Ali Mochtar Ngabalin : Komisaris / Commissioner |
| <p>2. Sekretaris Dewan Komisaris dan Anggota Komite PT Pelabuhan Indonesia III (Persero):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Agus Setianto : Anggota Komite Audit / Audit Committee Member b. Yusmar Anggadinata : Anggota Komite Audit / Audit Committee Member c. Tubagus Arief Fahmi : Anggota Komite GCG dan MR / Members of the GCG and MR Committee d. Albertus Giartono : Anggota Komite GCG dan MR / Members of the GCG and MR Committee e. Tri Prasodjo : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member f. Agus Pambagio : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member g. Weny Maultasih : Sekretaris Dewan Komisaris / Secretary to the Board of Commissioners | <p>2. Secretary to the Board of Commissioners and Committee Members of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Agus Setianto : Anggota Komite Audit / Audit Committee Member b. Yusmar Anggadinata : Anggota Komite Audit / Audit Committee Member c. Tubagus Arief Fahmi : Anggota Komite GCG dan MR / Members of the GCG and MR Committee d. Albertus Giartono : Anggota Komite GCG dan MR / Members of the GCG and MR Committee e. Tri Prasodjo : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member f. Agus Pambagio : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member g. Weny Maultasih : Sekretaris Dewan Komisaris / Secretary to the Board of Commissioners |



h. Lis Syukralillah	: Staf Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat Staff
i. Anwar Siregar	: Staf Dewan Komisaris – Komite NR / Board of Commissioners Staff – NR Committee
j. Ramadi I	: Staf Dewan Komisaris – Komite GCG & MR / Staff of the Board of Commissioners – GCG & MR Committee
k. Dimaz Yuliono	: Staf Dewan Komisaris – Komite Audit / Staff of the Board of Commissioners – Audit Committee
l. Ramli Afifi	: Staf Dewan Komisaris / Staff of the Board of Commissioners

10 Tanggal / Date

11 Agustus 2020

11 August 2020

Agenda Rapat / Meeting Agenda

- | | |
|---|---|
| 1. Pembahasan Kinerja Perusahaan Semester I Tahun 2020 dan Bulan Juli 2020 | 1. Discussion on Company Performance in Semester I of 2020 and July 2020 |
| 2. Pembahasan Hasil Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke JIIPe, yaitu: | 2. Discussion on the results of the Board of Commissioners' Working Visit to JIIPe, namely: |
| a. Kelangsungan investasi PT Freeport Indonesia di BKMS dan BMS | a. PT Freeport Indonesia's continued investment in BKMS and BMS |
| b. Izin pengalihan lahan Kalimati dalam upaya revitalisasi sebagai fungsi retensi Banjir dari Ditjen SDA Kementerian PUPR | b. Kalimati land transfer permit in an effort to revitalize as a flood retention function from the Directorate General of Natural Resources, Ministry of PUPR |
| c. Posisi pipa gas melintang di Pelabuhan (BMS) yang menghambat pengembangan JIIPe | c. The position of the transverse gas pipeline at the Port (BMS) which hinders the development of JIIPe |
| 3. Laporan Komite-Komite Atas Hasil Kunjungan Kerja Benoa dalam rencana kerjasama investasi dengan PT Krisna Group | 3. Reports of the Committees on the Results of Benoa's Working Visit in the investment cooperation plan with PT Krisna Group |
| 4. Pembahasan Surat-Surat Masuk Dewan Komisaris | 4. Discussion of Incoming Letters to the Board of Commissioners |

Kehadiran / Attendance

- | | |
|--|--|
| 1. Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (Persero): | 1. Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero): |
| a. Marsetio | : Komisaris Utama / President Commissioner |
| b. Dedi Syarif Usman | : Komisaris / Commissioner |
| c. Heru Sukanto | : Komisaris / Commissioner |
| d. Otto Ardianto | : Komisaris / Commissioner |
| e. Ridwan Djamiluddin* | : Komisaris / Commissioner |
| f. Ali Mochtar Ngabalin* | : Komisaris / Commissioner |
- *tidak dapat hadir karena terdapat penugasan lain. / could not attend due to other assignments.
- | | |
|--|---|
| 2. Sekretaris Dewan Komisaris dan Anggota Komite PT Pelabuhan Indonesia III (Persero): | 2. Secretary to the Board of Commissioners and Committee Members of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero): |
| a. Agus Setianto | : Anggota Komite Audit / Audit Committee Member |
| b. Yusmar Anggadinata | : Anggota Komite Audit / Audit Committee Member |
| c. Tubagus Arief Fahmi | : Anggota Komite GCG dan MR / Members of the GCG and MR Committee |
| d. Albertus Giartono | : Anggota Komite GCG dan MR / Members of the GCG and MR Committee |
| e. Tri Prasodjo | : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member |
| f. Agus Pambagio | : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member |
| g. Weny Maultasih | : Sekretaris Dewan Komisaris / Secretary to the Board of Commissioners |
| h. Lis Syukralillah | : Staf Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat Staff |
| i. Anwar Siregar | : Staf Dewan Komisaris – Komite NR / Board of Commissioners Staff – NR Committee |
| j. Ramadi I | : Staf Dewan Komisaris – Komite GCG & MR / Staff of the Board of Commissioners – GCG & MR Committee |
| k. Dimaz Yuliono | : Staf Dewan Komisaris – Komite Audit / Staff of the Board of Commissioners – Audit Committee |
| l. Ramli Afifi | : Staf Dewan Komisaris / Staff of the Board of Commissioners |



11	Tanggal / Date
	14 September 2020
Agenda Rapat / Meeting Agenda	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Perusahaan bulan Agustus 2020 dan Simulasi Keuangan s.d. Akhir Tahun 2020 2. Penjelasan Proyek Smelter di JIipe berdasarkan Hasil Kunjungan Kerja Menteri ESDM 3. Saran dan Masukan Komite-Komite terkait Pengembangan Pelabuhan Tg. Intan Cilacap sebagai Hub Ekonomi Maritim Selatan Jawa 4. Pembahasan Struktur Organisasi 5. Pembahasan Issue PT TLMI di Banjarmasin 6. Program Kerja Dewan Komisaris dan Komite Tahun 2021
Kehadiran / Attendance	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (Persero): <ol style="list-style-type: none"> a. Marsetio : Komisaris Utama / President Commissioner b. Dedi Syarif Usman : Komisaris / Commissioner c. Heru Sukanto : Komisaris / Commissioner d. Otto Ardianto : Komisaris / Commissioner e. Ridwan Djamaruddin* : Komisaris / Commissioner f. Ali Mochtar Ngabalin : Komisaris / Commissioner 2. Sekretaris Dewan Komisaris dan Anggota Komite PT Pelabuhan Indonesia III (Persero): <ol style="list-style-type: none"> a. Agus Setianto : Anggota Komite Audit / Audit Committee Member b. Yusmar Anggadinata : Anggota Komite Audit / Audit Committee Member c. Tubagus Arief Fahmi : Anggota Komite GCG dan MR / Members of the GCG and MR Committee d. Albertus Giartono : Anggota Komite GCG dan MR / Members of the GCG and MR Committee e. Tri Prasodo : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member f. Agus Pambagio : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member g. Weny Maultasih : Sekretaris Dewan Komisaris / Secretary to the Board of Commissioners h. Lis Syukralillah : Staf Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat Staff i. Anwar Siregar : Staf Dewan Komisaris – Komite NR / Board of Commissioners Staff – NR Committee j. Ramadi I : Staf Dewan Komisaris – Komite GCG & MR / Staff of the Board of Commissioners – GCG & MR Committee k. Dimaz Yuliono : Staf Dewan Komisaris – Komite Audit / Staff of the Board of Commissioners – Audit Committee l. Ramli Afifi : Staf Dewan Komisaris / Staff of the Board of Commissioners <p>*tidak dapat hadir karena terdapat penugasan lain. / could not attend due to other assignments.</p>
12	Tanggal / Date
	7 Oktober 2020
Agenda Rapat / Meeting Agenda	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan oleh Komisaris Utama 2. Pembahasan Laporan Kinerja Perusahaan Bulan September 2020* 3. Pembahasan Progres Investasi PT Pelabuhan Indonesia III di Banyuwangi International Yacht Club 4. Pembahasan Rencana Holding Pelabuhan Indonesia 5. Agenda Lain-lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan SDM Perusahaan Terkait Pengangkatan Pejabat Pada 2 Level Di Bawah Direksi; b. Kemajuan Proyek Strategis Nasional di JIipe; Dan c. Kemajuan Proyek Strategis Nasional di Terminal Multipurpose Labuan Bajo

* Tentatif- bila data kinerja telah tersedia

*Tentative- when performance data is available



Kehadiran / Attendance

- | | |
|--|---|
| <p>1. Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (Persero):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Marsetio : Komisaris Utama / President Commissioner b. Dedi Syarif Usman : Komisaris / Commissioner c. Heru Sukanto : Komisaris / Commissioner d. Otto Ardianto : Komisaris / Commissioner e. Ridwan Djamaruddin* : Komisaris / Commissioner f. Ali Mochtar Ngabalin* : Komisaris / Commissioner <p>*tidak dapat hadir karena terdapat penugasan lain. / could not attend due to other assignments.</p> | <p>1. Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Marsetio : Komisaris Utama / President Commissioner b. Dedi Syarif Usman : Komisaris / Commissioner c. Heru Sukanto : Komisaris / Commissioner d. Otto Ardianto : Komisaris / Commissioner e. Ridwan Djamaruddin* : Komisaris / Commissioner f. Ali Mochtar Ngabalin* : Komisaris / Commissioner <p>*tidak dapat hadir karena terdapat penugasan lain. / could not attend due to other assignments.</p> |
| <p>2. Sekretaris Dewan Komisaris dan Anggota Komite PT Pelabuhan Indonesia III (Persero):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Agus Setianto : Anggota Komite Audit / Audit Committee Member b. Yusmar Anggadinata : Anggota Komite Audit / Audit Committee Member c. Tubagus Arief Fahmi : Anggota Komite GCG dan MR / Members of the GCG and MR Committee d. Albertus Giartono : Anggota Komite GCG dan MR / Members of the GCG and MR Committee e. Tri Prasodjo : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member f. Agus Pambagio : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member g. Weny Maultasih : Sekretaris Dewan Komisaris / Secretary to the Board of Commissioners h. Lis Syukralillah : Staf Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat Staff i. Anwar Siregar : Staf Dewan Komisaris – Komite NR / Board of Commissioners Staff – NR Committee j. Ramadi I : Staf Dewan Komisaris – Komite GCG & MR / Staff of the Board of Commissioners – GCG & MR Committee k. Dimaz Yuliono : Staf Dewan Komisaris – Komite Audit / Staff of the Board of Commissioners – Audit Committee l. Ramli Afifi : Staf Dewan Komisaris / Staff of the Board of Commissioners | <p>2. Secretary to the Board of Commissioners and Committee Members of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Agus Setianto : Anggota Komite Audit / Audit Committee Member b. Yusmar Anggadinata : Anggota Komite Audit / Audit Committee Member c. Tubagus Arief Fahmi : Anggota Komite GCG dan MR / Members of the GCG and MR Committee d. Albertus Giartono : Anggota Komite GCG dan MR / Members of the GCG and MR Committee e. Tri Prasodjo : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member f. Agus Pambagio : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member g. Weny Maultasih : Sekretaris Dewan Komisaris / Secretary to the Board of Commissioners h. Lis Syukralillah : Staf Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat Staff i. Anwar Siregar : Staf Dewan Komisaris – Komite NR / Board of Commissioners Staff – NR Committee j. Ramadi I : Staf Dewan Komisaris – Komite GCG & MR / Staff of the Board of Commissioners – GCG & MR Committee k. Dimaz Yuliono : Staf Dewan Komisaris – Komite Audit / Staff of the Board of Commissioners – Audit Committee l. Ramli Afifi : Staf Dewan Komisaris / Staff of the Board of Commissioners |

13 Tanggal / Date

3 November 2020 3 November 2020

Agenda Rapat / Meeting Agenda

- | | |
|---|--|
| <p>1. Pembukaan oleh Komisaris Utama</p> <p>2. Pembahasan Agenda kegiatan Dewan Komisaris dan Komite bulan November 2020</p> <p>3. Lain-lain: Pembahasan isu-isu strategis Perusahaan</p> | <p>1. Opening by the President Commissioner</p> <p>2. Discussion of the agenda for the activities of the Board of Commissioners and the Committee for November 2020</p> <p>3. Others: Discussion of the Company's strategic issues</p> |
|---|--|

Kehadiran / Attendance

- | | |
|---|--|
| <p>1. Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (Persero):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Marsetio : Komisaris Utama / President Commissioner b. Dedi Syarif Usman : Komisaris / Commissioner c. Heru Sukanto : Komisaris / Commissioner d. Otto Ardianto : Komisaris / Commissioner e. Ridwan Djamaruddin : Komisaris / Commissioner f. Ali Mochtar Ngabalin : Komisaris / Commissioner <p>2. Sekretaris Dewan Komisaris dan Anggota Komite PT Pelabuhan Indonesia III (Persero):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Agus Setianto : Anggota Komite Audit / Audit Committee Member b. Yusmar Anggadinata : Anggota Komite Audit / Audit Committee Member c. Tubagus Arief Fahmi : Anggota Komite GCG dan MR / Members of the GCG and MR Committee d. Albertus Giartono : Anggota Komite GCG dan MR / Members of the GCG and MR Committee e. Tri Prasodjo : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member f. Agus Pambagio : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member g. Weny Maultasih : Sekretaris Dewan Komisaris / Secretary to the Board of Commissioners | <p>1. Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Marsetio : Komisaris Utama / President Commissioner b. Dedi Syarif Usman : Komisaris / Commissioner c. Heru Sukanto : Komisaris / Commissioner d. Otto Ardianto : Komisaris / Commissioner e. Ridwan Djamaruddin : Komisaris / Commissioner f. Ali Mochtar Ngabalin : Komisaris / Commissioner <p>2. Secretary to the Board of Commissioners and Committee Members of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Agus Setianto : Anggota Komite Audit / Audit Committee Member b. Yusmar Anggadinata : Anggota Komite Audit / Audit Committee Member c. Tubagus Arief Fahmi : Anggota Komite GCG dan MR / Members of the GCG and MR Committee d. Albertus Giartono : Anggota Komite GCG dan MR / Members of the GCG and MR Committee e. Tri Prasodjo : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member f. Agus Pambagio : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member g. Weny Maultasih : Sekretaris Dewan Komisaris / Secretary to the Board of Commissioners |
|---|--|



h.	Lis Syukralillah	: Staf Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat Staff
i.	Anwar Siregar	: Staf Dewan Komisaris – Komite NR / Board of Commissioners Staff – NR Committee
j.	Ramadi I	: Staf Dewan Komisaris – Komite GCG & MR / Staff of the Board of Commissioners – GCG & MR Committee
k.	Dimaz Yuliono	: Staf Dewan Komisaris – Komite Audit / Staff of the Board of Commissioners – Audit Committee
l.	Ramli Afifi	: Staf Dewan Komisaris / Staff of the Board of Commissioners

14	Tanggal / Date	
	17 November 2020	17 November 2020
Agenda Rapat / Meeting Agenda		
	1. Pembukaan Oleh Komisaris Utama 2. Kinerja Keuangan bulan Oktober 2020 termasuk Progress Audit LK Tahun 2020 oleh KAP EY 3. Potensi Investasi Swasta di berbagai Pelabuhan di Pelindo III (i.e Teluk Lamong, Badas, dan Shore Connection) 4. Pembahasan Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Perusahaan (focal point pada elemen TKDN pada persyaratan lelang) 5. Persiapan Kunjungan Kerja Labuan Bajo 6. Agenda lain-lain sesuai update dinamika dan kegiatan Perusahaan	1. Opening by the President Commissioner 2. Financial Performance for October 2020 including the 2020 LK Audit Progress by KAP EY 3. Private Investment Potential in various Ports in Pelindo III (i.e Teluk Lamong, Badas, and Shore Connection) 4. Discussion of the Company's Goods and Services Procurement Policy (focal point on the TKDN element in the auction requirements) 5. Preparation for Labuan Bajo Working Visit 6. Other agendas according to the Company's dynamics and activities updates
Kehadiran / Attendance		
	1. Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (Persero): a. Marsetio b. Dedi Syarif Usman c. Heru Sukanto d. Otto Ardianto e. Ridwan Djamaruddin* f. Ali Mochtar Ngabalin*: Komisaris / Commissioner *tidak dapat hadir karena terdapat penugasan lain. / could not attend due to other assignments.	1. Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero): a. Komisaris Utama / President Commissioner b. Komisaris / Commissioner c. Komisaris / Commissioner d. Komisaris / Commissioner e. Komisaris / Commissioner f. Komisaris / Commissioner 2. Sekretaris Dewan Komisaris dan Anggota Komite PT Pelabuhan Indonesia III (Persero): a. Agus Setianto b. Yusmar Anggadinata c. Tubagus Arief Fahmi d. Albertus Giartono e. Tri Prasodjo f. Agus Pambagio g. Weny Maultasih h. Lis Syukralillah i. Anwar Siregar j. Ramadi I k. Dimaz Yuliono l. Ramli Afifi



15 Tanggal / Date	
21 Desember 2020	21 December 2020
Agenda Rapat / Meeting Agenda	
1. Pembukaan oleh Komisaris Utama 2. Kinerja Perusahaan s.d bulan November 2020 3. Pembahasan Rencana Penggabungan BUMN Pelabuhan 4. Pembahasan Usulan RPP Cipta Kerja 5. Pembahasan Hasil Audit Interim KAP EY atas Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2020 6. Agenda lain-lain: Hasil Kunjungan Kerja Pelabuhan Banyuwangi/GJT	1. Opening by the President Commissioner 2. Company Performance up to November 2020 3. Discussion on the Plan for the Merger of Port SOEs 4. Discussion on the Proposed RPP for Job Creation 5. Discussion of the Interim Audit Results of KAP EY on the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2020 6. Other agendas: Results of Banyuwangi/GJT Port Working Visits
Kehadiran / Attendance	
1. Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (Persero): a. Maretio : Komisaris Utama / President Commissioner b. Dedi Syarif Usman : Komisaris / Commissioner c. Heru Sukanto : Komisaris / Commissioner d. Otto Ardianto : Komisaris / Commissioner e. Ridwan Djamiluddin* : Komisaris / Commissioner f. Ali Mochtar Ngabalin : Komisaris / Commissioner <small>*tidak dapat hadir karena terdapat penugasan lain. / could not attend due to other assignments.</small>	1. Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero): a. Agus Setianto : Anggota Komite Audit / Audit Committee Member b. Yusmar Anggadina : Anggota Komite Audit / Audit Committee Member c. Tubagus Arief Fahmi : Anggota Komite GCG dan MR / Members of the GCG and MR Committee d. Albertus Giartono : Anggota Komite GCG dan MR / Members of the GCG and MR Committee e. Tri Prasodjo : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member f. Agus Pambagio : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member g. Weny Maultasih : Sekretaris Dewan Komisaris / Secretary to the Board of Commissioners h. Lis Syukralillah : Staf Sekretariat Dewan Komisaris / Board of Commissioners Secretariat Staff i. Anwar Siregar : Staf Dewan Komisaris – Komite NR / Board of Commissioners Staff – NR Committee j. Ramadi I : Staf Dewan Komisaris – Komite GCG & MR / Staff of the Board of Commissioners – GCG & MR Committee k. Dimaz Yuliono : Staf Dewan Komisaris – Komite Audit / Staff of the Board of Commissioners – Audit Committee l. Ramli Afifi : Staf Dewan Komisaris / Staff of the Board of Commissioners

Independensi Dewan Komisaris

Independensi dari Aspek Kepemilikan Saham

Hingga akhir tahun buku 2020, saham Pelindo III dimiliki oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Kementerian BUMN sebesar 100%. Dengan demikian, Dewan Komisaris Perusahaan tidak memiliki saham di Pelindo III.

Independency of the Board of Commissioners

Independency in Shareholding Aspect

Until the end of the 2020 fiscal year, Pelindo III's shares are 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia, represented by the Ministry of SOE. Thus, the Company's Board of Commissioners does not own shares in Pelindo III.



Independensi dari Aspek Komposisi dan Benturan Kepentingan

Komposisi Dewan Komisaris Perusahaan harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan putusan yang efektif, tepat, dan cepat. Selain itu, Dewan Komisaris juga dituntut untuk dapat bertindak secara independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Direksi. Agar tujuan tersebut tercapai, maka diperlukan anggota Dewan Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris Independen adalah paling sedikit 20% dari anggota Komisaris.

Kebijakan mengena benturan kepentingan juga telah diatur dalam *Code of Conduct* yang memuat antara lain:

- a. Insan Pelindo III dilarang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang terkait.
- b. Insan Pelindo III wajib menghindari setiap aktivitas di luar kedinasan yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap independensi dan objektivitas pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Independensi Dewan Komisaris dari Aspek Rangkap Jabatan

Informasi mengenai rangkap jabatan telah disajikan dalam bagian profil perusahaan pada pembahasan Profil Dewan Komisaris. Berdasarkan informasi tersebut, Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki jabatan lain di luar Perseroan namun memiliki jabatan lain di dalam struktur Perusahaan yaitu Ketua Komite-Komite yang ada di Perseroan.

Dengan demikian, Dewan Komisaris Perusahaan dapat dinyatakan independen dan bebas dari benturan kepentingan terkait adanya faktor rangkap jabatan dengan tidak adanya jabatan lain yang diemban di luar Perseroan.

Independency in Composition and Conflict of Interest Aspects

The composition of the BOC of the Company shall be designed in such a way that enables an effective, accurate, and fast decision-making process. Furthermore, the BOC is required to act independently, meaning that the BOC shall have no conflict of interest that may affect them in conducting their duties independently and critically, both in the relationship among members of the BOC and with the BOD. To that end, Independent Commissioner is required with the number of Independent Commissioner shall be 20% at the very least of total BOC members.

Policies regarding conflict of interest have been stipulated in the Code of Conduct which includes, among others:

- a. Personnel of Pelindo III are prohibited from taking advantage of their position for personal interests or the interests of other related individuals or parties.
- b. Personnel of Pelindo III are obliged to avoid any activity outside of official duties that may impact negatively on their independence and objectivity in the decision-making process.

Independency in Concurrent Position Aspect

Information on the concurrent position of the BOC has been presented in Profile of the Board of Commissioners. Based on the information, the BOC has no other positions outside of the Company, but holds other positions in the Company's structure, namely as the Head of Committees in the Company.

In conclusion, due to no other position held by the BOC outside the Company, the BOC of the Company is independent of and free from any conflict of interest related to concurrent position factor.



Komisaris Independen

Dalam memastikan pengawasan Perseroan yang bebas dari benturan kepentingan, Perseroan telah memiliki Komisaris Independen dalam susunan Dewan Komisaris. Ketentuan mengenai Komisaris Independen telah tertuang dalam *Board Manual* yaitu Pedoman Tata Kerja Kegiatan Dewan Komisaris yang ditetapkan bersama Direksi melalui Surat Keputusan Bersama No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018 dan PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tentang Reviu dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual* dan *Code of Corporate Governance*). Keberadaan Komisaris Independen di Perseroan juga telah memenuhi ketentuan mengenai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan GCG pada BUMN yang mengharuskan 20% komposisi Dewan Komisaris berasal dari independen.

Sampai dengan 31 Desember 2020, Perseroan memiliki 2 (dua) Komisaris Independen, yaitu Marsetio dan Heru Sukanto.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), persyaratan dan kriteria pemilihan Komisaris Independen meliputi persyaratan formal dan material serta kriteria independensi sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur dan/ atau anggota Dewan Komisaris lain di perusahaan yang bersangkutan.
2. Tidak menjabat sebagai Direksi di perusahaan lain yang terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan.
3. Tidak bekerja pada Pemerintah termasuk kementerian, lembaga, dan kemiliteran dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.
4. Tidak bekerja di perusahaan yang bersangkutan atau afiliasinya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.
5. Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan yang bersangkutan atau perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produk kepada perusahaan yang bersangkutan dan afiliasinya.

Independent Commissioner

In ensuring that the Company's supervision is free from conflicts of interest, the Company has an Independent Commissioner in the composition of the Board of Commissioners. The provisions regarding Independent Commissioners have been stated in the Board Manual, namely the Guidelines for the Work Procedure for the Activities of the Board of Commissioners which are established with the Board of Directors through a Joint Decree No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018 and PER.0050/HK.01/HOFC-2018 concerning Review and Revision of Corporate Governance Guidelines (Board Manual and Code of Corporate Governance). The existence of an Independent Commissioner in the Company has also met the provisions concerning the Regulation of the Minister of State for SOEs No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of GCG in SOE which requires 20% of the composition of the Board of Commissioners to be independent.

As of December 31, 2020, the Company has 2 (two) Independent Commissioners, namely Marsetio and Heru Sukanto.

Determination Criteria for Independent Commissioners

In accordance with the Decree of the Minister of BUMN No. KEP-117/MBU/2002 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises (BUMN), the requirements and criteria for selecting an Independent Commissioner include formal and material requirements as well as independence criteria as follows:

1. Not affiliated with the BOD and/or other members of the BOC in the concerned company.
2. Not serving as BOD in another company affiliated with the concerned company.
3. Not working for the Government including ministries, institutions, and the military within the last three years.
4. Not working in the concerned company or its affiliates within the last three years.
5. Does not have a financial relationship, both directly and indirectly with the concerned company or other companies that provide services and products to the concerned company and their affiliates.



6. Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup perusahaan.
7. Memiliki kompetensi dalam bidang audit, keuangan, dan akuntansi.
6. Free from interests and business activities or other relationships that can hinder or interfere with the ability of the BOC to act or think freely in the company's scope.
7. Having competency in audit, finance, and accounting.

Komposisi Komisaris Independen Perseroan

Sampai dengan 31 Desember 2020, susunan dan komposisi Komisaris Independen Perseroan adalah sebagai berikut:

Composition of the Company's Independent Commissioners

As of December 31, 2020, the structure and composition of the Company's Independent Commissioners are as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment
Marselio	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen / President Commissioner concurrently Independent Commissioner	Surat Keputusan No. SK-107/MBU/04/2020 tanggal 3 April 2020 / Decree No. SK-107/MBU/04/2020 dated April 3, 2020
Heru Sukanto	Komisaris Independen / Independent Commissioner	Surat Keputusan No. SK-107/MBU/04/2020 tanggal 3 April 2020 / Decree No. SK-107/MBU/04/2020 dated April 3, 2020

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Dewan Komisaris memiliki independensi dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dalam melakukan pengawasan Perusahaan. Setiap anggota Dewan Komisaris dipastikan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun ikatan perkawinan dengan satu sama lain hingga derajat ketiga baik secara vertikal maupun horizontal.

Statement of Independence of the Independent Commissioners

The BOC has independence in carrying out its duties, responsibilities, and authority in conducting the supervision of the Company. Each member of the BOC is certain not to have family ties or marital ties with each other to the third degree both vertically and horizontally.

Dewan Komisaris Independen tidak memiliki benturan kepentingan secara pribadi terhadap hal-hal yang termaktub dalam RKAP 2018 dan Dewan Komisaris Independen berkomitmen tidak akan memanfaatkan Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi sebagaimana yang termaktub dalam Pakta Integritas, Surat Pernyataan tidak Memiliki Benturan Kepentingan dan Surat Pernyataan Independensi Komisaris Independen, serta Board Manual dan CoCG sesuai dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018 dan PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tentang Reviu dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Board Manual and Code of Corporate Governance).

The Independent Commissioners do not have a personal conflict of interest regarding the matters in the 2018 RKAP and the Independent Commissioners are committed not to use the Company either directly or indirectly for personal interests as contained in the Integrity Pact, Statement of Conflict of Interest and Independence Statement of the Independent Commissioner, and Board Manual and CoCG under the Joint Decision of the BOC and BOD of Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018 and PER.0050/HK.01/HOFC-2018 on the Review and Revision of Corporate Governance Guidelines (Board Manual and Code of Corporate Governance).



Hubungan Kerja dan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Hubungan Kerja dengan Direksi

Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi yang baik merupakan salah satu hal yang sangat penting agar masing-masing organ Perusahaan dapat bekerja sesuai fungsinya dengan efektif dan efisien. Untuk itu, dalam menjaga hubungan kerja yang baik antara Komisaris dengan Direksi, Perseroan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris menghormati tanggung jawab dan wewenang Direksi dalam mengelola Perseroan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar Perusahaan.
- b. Direksi menghormati tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan.
- c. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal kelembagaan, dalam arti senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Direksi bertanggungjawab atas akurasi, kelengkapan, dan ketepatan waktu penyampaian informasi Perseroan kepada Dewan Komisaris.
- e. Hubungan kerja antara organ-organ pendukung Dewan Komisaris dengan organ-organ pendukung Direksi harus disepakati terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Check and Balances

Sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki komitmen yang tinggi untuk secara bersama-sama:

1. Merealisasikan tujuan Perseroan berupa tercapainya kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang yang tercermin pada:
 - a. Tercapainya nilai Perusahaan (*value of the firm*) sebagaimana diharapkan oleh Pemegang Saham;
 - b. Terlaksananya dengan baik pengendalian intern dan manajemen risiko;
 - c. Tercapainya imbal hasil (*return*) yang wajar bagi Pemegang Saham;
 - d. Terlindunginya kepentingan Pemangku Kepentingan secara wajar;

Work Relationship and Report on Duties of the Board of Commissioners

Work Relationship with the Board of Directors

The proper work relationship between the BOC and BOD is essential to support each organ to work according to their function effectively and efficiently. To that end, the Company implements the following principles to maintain such work relations:

- a. The BOC shall respect the responsibilities and authority of the BOD in managing the Company as regulated in the prevailing laws and regulations, as well as Articles of Association of the Company.
- b. The BOD shall respect the responsibilities and authority of the BOC to supervise and provide advice on the management policies of the Company.
- c. The working relationship between the BOC and BOD is a formal institutional relationship, meaning that such relationship shall always be based on a formal mechanism and correspondence that can be held accountable.
- d. The BOD shall be responsible for the accuracy, completeness, and timely Company's information submitted to the BOC.
- e. The working relationship between BOC supporting organs and BOD supporting organs shall be approved beforehand by the BOC and BOD.

Check and Balances

In accordance with their respective responsibilities, the Board of Commissioners and the Board of Directors have a strong commitment to jointly:

1. Realise the Company's objectives through the achievement of long-term business sustainability of the Company which is reflected on:
 - a. The achievement of the value of the firm as expected by the Shareholders.
 - b. Proper implementation of internal control and risk management.
 - c. A fair return for Shareholders.
 - d. Fair protection of stakeholders' interests.



- e. Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan kontinuitas manajemen di seluruh jajaran organisasi Perseroan;
 - f. Terpenuhinya pelaksanaan GCG.
2. Menyepakati hal-hal di bawah ini untuk mendukung pencapaian visi dan misi serta strategi Perseroan:
- a. Sasaran usaha, strategi, rencana jangka panjang, maupun rencana kerja dan anggaran tahunan.
 - b. Kebijakan dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.
 - c. Kebijakan dan metode penilaian kinerja Perseroan, unit-unit dalam organisasi Perseroan, dan pegawai.
 - d. Struktur organisasi Perseroan di tingkat eksekutif yang mampu mendukung tercapainya sasaran usaha Perseroan.
 - e. Implementation of leadership succession and management continuity across all organisation levels in the Company.
 - f. Fulfilment of GCG implementation.
2. Agree with the following matters to support the achievement of the Company's vision and mission as well as the strategies:
- a. Business targets, strategies, long-term plan, as well as annual work and budget plan.
 - b. Policies in fulfilling provisions contained in laws and regulations and the Company's Articles of Association.
 - c. Performance assessment policies and methods for the Company's, work units in the organisation, and employee.
 - d. The organisation structure of the Company at the executive level which can support the achievement of the Company's business targets.

Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Pelindo III Tahun 2020 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan yang tertuang dalam Akta Notaris Imaas Fatimah, S.H. No. 5 tanggal 1 Desember 1992, sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Notaris Heni Yuniantin, S.H., M.Kn. No. 3 tanggal 23 Oktober 2019 dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 juncto PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN serta sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Pelindo III.

Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan Dewan Komisaris

- a. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang BUMN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 70, Tambahan Lembaran Negara RI No. 106);
- b. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 106);

Report of the Board of Commissioners Duties

Supervisory Report of the BOC of Pelindo III in 2020 was prepared to comply with the Articles of Association stated in the Notarial Deed of Imaas Fatimah, SH, Notary, No. 5 dated December 1, 1992, as amended several times with the latest amendment through the Notarial Deed of Heni Yuniantin, S.H., M.Kn. No. 3 dated 23 October 2019, and Regulation of Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 dated 1 August 2011 juncto PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 on Changes in Implementation of Good Corporate Governance at State-Owned Enterprises, and as the responsibility of implementation of supervisory duties and functions of the BOC of Pelindo III.

Legal Basis of the Implementation of the Board of Commissioners Activities

- a. Law No. 19 of 2003 dated June 19, 2003 on SOE (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2003 No. 70, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia No. 106);
- b. Law No. 40 of 2007 dated August 16, 2008 on Limited Liability Companies (2007 State Gazette of the Republic of Indonesia No. 106);



- c. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 *juncto* PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;
- d. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
- e. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-21/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas Keuangan BUMN;
- f. Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-101/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penyusunan RKAP BUMN;
- g. Keputusan Bersama Dewan Komisaris, Direksi, dan Serikat Pekerja PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dengan surat Dewan Komisaris Pelindo III No. HK.202/09/DK.P.III/2017, surat Direksi Pelindo III No. HK.03/14/P.III/2017, dan surat Serikat Pekerja Pelindo III, No. 36/DP.SPPI/IX-2017 tanggal 25 September 2017 tentang Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) di lingkungan Pelindo III;
- h. Surat Keputusan Komisaris Utama Pelindo III No. KEP.01/05/CMSR-2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab anggota Dewan Komisaris; dan
- i. *Board Manual* Pelindo III Tahun 2018.

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Pengawasan oleh Dewan Komisaris Tahun 2020 adalah sebagai pelaporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris Pelindo III pada tahun 2020 sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris Pelindo III yang telah disetujui oleh Pemegang Saham.

Tujuan laporan pengawasan ini untuk memenuhi kewajiban Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 *juncto* PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

- c. Regulation of Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 *juncto* PER-09/MBU/2012 dated 6 July 2012 on Changes in Implementation of Good Corporate Governance in SOEs;
- d. Regulation of Minister of SOE No. PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 on Supporting Instruments of the BOC/Supervisory Board of SOEs;
- e. Regulation of Minister of SOE No. PER-21/MBU/2012 dated December 27, 2012 on Guidelines for the Implementation of Financial Accountability of SOEs;
- f. Resolution of Minister of SOE No. KEP101/MBU/2002 dated June 4, 2002 on RKAP Drafting in SOEs;
- g. Joint Decision of the BOC, BOD, and Labour Union of Pelabuhan Indonesia III (Persero), through the letter of the BOC of Pelindo III No. HK.202/09/DK.P.III/2017, letter of the BOD of Pelindo III No. HK.03/14/P.III/2017, and letter of Labour Union of Pelindo III No. 36/DP.SPPI/IX-2017 dated September 25, 2017 on the Code of Conduct applicable within Pelindo III;
- h. Decree of the President Commissioner of Pelindo III No. KEP.01/05/CMSR-2020 dated May 11, 2020 on Distribution of Duties and Responsibilities of the Members of the BOC; and
- i. The 2018 Board Manual of Pelindo III.

Purposes and Objectives

The purpose of preparation of Supervisory Report by the BOC in 2020 is to serve as a report on the implementation of supervisory duties of the BOC of Pelindo III in 2020 according to work and budget plan of the BOC of Pelindo III that has been approved by the Shareholder.

The objective of this supervisory report is to fulfil the obligation of the BOC based on the Regulation of Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 *juncto* PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 on Amendment in Implementation of Good Corporate Governance



Rekomendasi dan Keputusan Dewan Komisaris Tahun 2020

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah menerbitkan 42 surat keputusan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Recommendations and Decisions of the Board of Commissioners for 2020

During 2020, the Board of Commissioners has issued 42 decision letters of the Board of Commissioners as follows:

No.	Nomor SK / SK Number	Perihal / Subject
1	UM.57/ DK.P.III/04/2020	Tanggapan atas kelengkapan dokumen pendukung rencana kerjasama pembangunan dan pengoperasian pusat logistik di Benoa.
2	UM.59/ DK.P.III/04/2020	Tanggapan atas strategi dan usulan aksi korporasi perusahaan dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 27 April 2020.
3	UM.60/ DK.P.III/04/2020	Rekomendasi Dewan Komisaris atas rencana kerjasama pembangunan dan pengoperasian pusat logistik di Benoa.
4	UM.61/ DK.P.III/04/2020	Tanggapan Dewan Komisaris atas laporan manajemen PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) triwulan I tahun 2020.
5	UM.62/ DK.P.III/04/2020	Usulan <i>top talent</i> BOD dan BOD-1 PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).
6	UM.02/05/CMSR- 2020	Rekomendasi Dewan Komisaris atas rencana kerjasama pembangunan dan pengoperasian pusat logistik di Benoa atas dasar Surat Direksi perihal penyampaian kelengkapan dokumen pendukung rencana kerjasama dimaksud.
7	UM.03/05/CMSR- 2020	Permintaan penjelasan atas investasi 2020.
8	UM.04/05/CMSR- 2020	Tanggapan Atas Laporan Keuangan dan PKBL Setelah Audit PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tahun Buku 2019.
9	UM.05/05/CMSR- 2020	Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tahun 2019.
10	UM.09/05/CMSR- 2020	Permintaan pembahasan pengisian Direktur anak perusahaan.
11	UM.01/06/CMSR- 2020	Rekomendasi Dewan Komisaris atas permohonan rekomendasi pendanaan eksternal jangka panjang Tahun 2020.
12	UM.02/06/CMSR- 2020	Skenario <i>The New Normal</i> PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).
13	UM.06/06/CMSR- 2020	Tanggapan dan saran Dewan Komisaris atas kinerja manajemen triwulan I tahun buku 2020.
14	UM.07/06/CMSR- 2020	Usulan kantor akuntan publik pelaksana audit laporan keuangan konsolidasian dan PKBL Tahun 2020.
15	UM.08/06/CMSR- 2020	Usulan materi rapat umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tahun buku 2019.



No.	Nomor SK / SK Number	Perihal / Subject
16	UM.27/07/CMSR-2020	Tanggapan atas usulan revisi RKAP Tahun 2020. Responses to the proposed revision of the 2020 RKAP.
17	UM.28/07/CMSR-2020	Rekomendasi Dewan Komisaris atas pelepasan saham dan perpanjangan waktu penggunaan bagian tanah HPL dalam rencana holding RS BUMN. Recommendations from the Board of Commissioners on the divestment of shares and the extension of the use of the HPL land in the SOE Hospital holding plan.
18	UM.29/07/CMSR-2020	Rekomendasi tertulis atas usulan calon anggota Direksi anak perusahaan. Written recommendation on the proposal of a candidate for a member of the Board of Directors of a subsidiary.
19	UM.38/08/CMSR-2020	Penetapan KAP untuk General Audit laporan keuangan Perseroan, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2020. Determination of KAP for the General Audit of the Company's financial statements, Partnership and Community Development Program for 2020 fiscal year.
20	UM.39/08/CMSR-2020	Tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris atas rencana kerjasama pembangunan dan pengoperasian pusat logistik di Benoa. Follow-up on the recommendations of the Board of Commissioners on the cooperation plan for the development and operation of a logistics center in Benoa.
21	UM.42/08/CMSR-2020	Rekomendasi tertulis atas jabatan Komisaris Utama dan calon anggota Dewan Komisaris anak perusahaan. Written recommendation for the position of President Commissioner and candidate members of the Board of Commissioners of subsidiaries.
22	UM.48/08/CMSR-2020	Tanggapan atas laporan keuangan dan perusahaan serta kemitraan dan bina lingkungan semester I tahun 2020. Responses to financial and company reports as well as partnerships and community development in the first semester of 2020.
23	UM.49/08/CMSR-2020	Rekomendasi atas penghapusbukuan aset periode tahun 2020. Recommendations on asset write-offs for the year 2020.
24	UM.50/08/CMSR-2020	Saran dan masukan atas kunjungan kerja ke Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap. Suggestions and input on a working visit to Tanjung Intan Port, Cilacap.
25	UM.11/09/CMSR-2020	Rekomendasi tertulis atas penyesuaian struktur organisasi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). Written recommendation on the adjustment of the organizational structure of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).
26	UM.02/10/CMSR-2020	Penetapan imbal jasa KAP untuk pekerjaan general audit laporan keuangan Perseroan, program kemitraan dan bina lingkungan tahun buku 2020. Determination of KAP fees for general audit work of the Company's financial statements, partnership and community development programs for the 2020 fiscal year.
27	UM.08/10/CMSR-2020	Tanggapan Dewan Komisaris atas keikutsertaan TPS dalam konsorsium tentang pengadaan badan usaha pelaksana proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Pelabuhan Patimban provinsi Jawa Barat. The response of the Board of Commissioners to the participation of TPS in the consortium regarding the procurement of business entities implementing the Government Cooperation with Business Entities (PPP) project at Patimban Port, West Java province.
28	UM.14/10/CMSR-2020	Pembaharuan rekomendasi tertulis atas rencana pembubaran Perseroan PT Lamin Aspalindo Tiga (PT LAT) dan PT Portek Indonesia (PT PI). Renewal of written recommendations on the plan to dissolve PT Lamin Aspalindo Tiga (PT LAT) and PT Portek Indonesia (PT PI).
29	UM.15/10/CMSR-2020	Rekomendasi tertulis atas jabatan Direktur Utama dan Direktur anak perusahaan PT Pelindo Marine Service (PMS). Written recommendation for the positions of President Director and Director of a subsidiary, PT Pelindo Marine Service (PMS).
30	UM.16/10/CMSR-2020	Persetujuan dan rekomendasi penghapusbukuan aset tetap tahun 2019 dan aset tetap di Terminal Petikemas Semarang. Approval and recommendation for write-off of fixed assets in 2019 and fixed assets at Semarang Container Terminal.
31	UM.19/10/CMSR-2020	Penyampaian rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris PT Pelindo III (Persero) tahun 2021. Submission of the work plan and budget of the Board of Commissioners of PT Pelindo III (Persero) in 2021.
32	UM.07/11/CMSR-2020	Rekomendasi Dewan Komisaris atas Rencana Kerjasama Usaha (KSU) pemanfaatan lahan HPL Oleh PT FKS Multi Agro Tbk di Pelabuhan Tj. Intan. Recommendations from the Board of Commissioners on the Business Cooperation Plan (KSU) for the use of HPL land by PT FKS Multi Agro Tbk at Tj. Berlian.



No.	Nomor SK / SK Number	Perihal / Subject
33	UM.15/11/CMSR-2020	Rekomendasi kebijakan pengadaan barang dan/ atau jasa perusahaan.
34	UM.17/11/CMSR-2020	Rekomendasi perpanjangan jangka waktu kerjasama dan penggunaan bagian tanah HPL Pelabuhan Tanjung Emas a.n. Tirta Podo Moro.
35	UM.18/11/CMSR-2020	Tanggapan atas laporan manajemen risiko korporat konsolidasi triwulan III tahun 2020.
36	UM.19/11/CMSR-2020	Penyampaian realisasi KPI Dewan Komisaris s.d. triwulan III tahun 2020.
37	UM.20/11/CMSR-2020	Tanggapan laporan keuangan Manajemen dan PKBL triwulan III tahun 2020.
38	UM.21/11/CMSR-2020	Saran dan masukan atas kunjungan kerja ke Terminal Multipurpose Labuan Bajo dan Pelabuhan Celukan Bawang.
39	UM.02/12/CMSR-2020	Saran dan masukan atas kunjungan kerja ke Terminal Gresik Jasatama.
40	UM.09/12/CMSR-2020	Dukungan usulan RPP Cipta Kerja.
41	UM.10/12/CMSR-2020	Tanggapan atas rencana penggabungan BUMN Pelabuhan.
42	UM.11/12/CMSR-2020	Tanggapan atas hasil audit interim laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan PKBL Tahun 2020.

Adapun Surat Keputusan Dewan Komisaris yang diterbitkan selama tahun 2020 adalah sebanyak 12 (dua belas) Keputusan dengan rincian sebagai berikut:

There are 12 (twelve) Decisions issued by the Board of Commissioners during 2020 with details as follows:

No.	Nomor SK / SK Number	Perihal / Subject
1	SK-46/KEP/DK.P.III/04/2020	Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
2	SK-47/KEP/DK.P.III/04/2020	Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite GCG dan Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
3	SK-48/KEP/DK.P.III/04/2020	Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Sekretariat Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
4	SK-49/KEP/DK.P.III/04/2020	Pengangkatan Staf Sekretariat Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
5	SK-53/KEP/DK.P.III/04/2020	Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Ketua dan Anggota Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
6	SK-54/KEP/DK.P.III/04/2020	Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Ketua dan Anggota Komite GCG dan Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)



7	SK-55/KEP/DK.P.III/04/2020	Pembentukan dan Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Establishment and Appointment of the Chairman, Secretary and Members of the Nomination and Remuneration Committee of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
8	SK-56/KEP/DK.P.III/04/2020	Tatacara dan Kesegeraan Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris Secara Sirkuler dan Virtual Di Luar Kehadiran Rapat Fisik	Procedures and Immediate Decision Making of the Board of Commissioners in a Circular and Virtual Outside of Physical Meeting Attendance
9	KEP.01/05/CMSR-2020	Penetapan Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Determination of the Division of Duties and Responsibilities of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
10	KEP.01/07/CMSR-2020	Pengalihan Tugas Anggota Komite Audit dan Anggota Komite GCG dan Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Transfer of Duties of Audit Committee Members and GCG and Risk Management Committee Members of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
11	KEP.01/10/CMSR-2020	Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Staf Sekretariat Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Decision of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Regarding the Extension of Term of Office of the Secretariat Staff of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
12	KEP.01/12/CMSR-2020	Reviu dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (<i>Board Manual</i> dan <i>Code Of Corporate Governance</i>) Dewan Komisaris Dan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Review and Revision of Corporate Governance Guidelines (<i>Board Manual</i> and <i>Code Of Corporate Governance</i>) Board of Commissioners and Directors of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

Kegiatan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris

Pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris turut diperkuat melalui kunjungan kerja ke lapangan secara berkala. Kegiatan kunjungan kerja Dewan Komisaris yang dilakukan sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Board of Commissioners Work Visit Activities

The implementation of the supervisory functions and responsibilities of the Board of Commissioners is also strengthened through regular field visits. The activities of the Board of Commissioners' working visits carried out throughout 2020 are as follows:

No.	Tanggal Kunjungan / Date of Visit	Lokasi Kunjungan Kerja / Work Visit Locations
1	30 -31 Januari 2020 / January 30-31, 2020	Regional Bali Nusra Pelabuhan Tanjung Wangi dan Marina Boom Banyuwangi
2	20-21 Februari 2020 / February 20-21, 2020	Regional Jawa Tengah Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap
3	11 - 13 Maret 2020 / March 11-13, 2020	Regional Kalimantan Pelabuhan Batulicin dan Kotabaru
4	2-4 Juni 2020 / June 2-4, June	Regional Jawa Timur dan Jawa Tengah, anak perusahaan PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI), PT Terminal Teluk Lamong (TTL), PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) dan PT Terminal Petikemas Semarang (TPKS)
5	21 -23 Juni 2020 / June 21-23, 2020	Regional Jawa Timur, Kantor Pusat Surabaya
6	25 -26 Juni 2020 / June 25-26, 2020	Regional Bali Nusra dan Regional Jawa Tengah, Pelabuhan Tanjung Wangi, Pelabuhan Benoa dan Pelabuhan Tanjung Emas
7	22 -24 Juli 2020 / July 22-24, 2020	Regional Jawa Timur, Kantor Pusat Surabaya



No.	Tanggal Kunjungan / Date of Visit	Lokasi Kunjungan Kerja / Work Visit Locations	
8	23 -25 Juli 2020 / July 23-25, 2020	Regional Bali Nusra, Pelabuhan Wae Kelambu Labuan Bajo	Bali Nusra Region, Wae Kelambu Port, Labuan Bajo
9	30 Juli 2020 / July 30, 2020	Regional Jawa Timur, Pelabuhan Tanjung Perak	East Java Region, Tanjung Perak Port
10	5- 7 Agustus 2020 / August 5-7, 2020	Regional Bali Nusra, Pelabuhan Benoa Bali	Bali Nusra Region, Benoa Port, Bali
11	5-27 Agustus 2020 / August 5-27, 2020	Regional Jawa Tengah, Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap	Central Java Region, Tanjung Intan Port, Cilacap
12	19-21 Agustus 2020 / August 19-21, 2020	Regional Bali Nusra, Pelabuhan Tenau Kupang	Bali Nusra Region, Tenau Port, Kupang
13	11 - 12 September 2020 / September 11-12, 2020	Regional Jawa Timur, Kantor Pusat Surabaya	East Java Region, Surabaya Head Office
14	23 September 2020 / September 23, 2020	Regional Jawa Timur, Kantor Pusat Surabaya	East Java Region, Surabaya Head Office
15	1 - 3 Oktober 2020 / October 1-3, 2020	Regional Kalimantan, Pelabuhan Trisakti Banjarmasin	Kalimantan Region, Trisakti Port, Banjarmasin
16	11 - 14 Oktober 2020 / October 11-14, 2020	Regional Jawa Timur, Kantor Pusat Surabaya	East Java Region, Surabaya Head Office
17	5 - 7 November 2020 / November 5-7, 2020	Regional Jawa Timur, Kantor Pusat Surabaya	East Java Region, Surabaya Head Office
18	19 - 20 November 2020 / November 19-20, 2020	Regional Bali Nusra, pelabuhan Celukan Bawang dan Terminal Multipurpose Labuan Bajo	Bali Nusra Region, Celukan Bawang port and Labuan Bajo Multipurpose Terminal
19	3 - 4 Desember 2020 / December 3-4, 2020	Regional Jawa Timur, Pelabuhan Gresik	Regional Jawa Timur, Pelabuhan Gresik / East Java Region, Gresik Port

Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Dalam rangka meningkatkan wawasan dan memperbarui kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, Dewan Komisaris dibekali dengan program pelatihan dan pengembangan kompetensi, baik yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal. Informasi lebih lanjut mengenai program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Dewan Komisaris telah tersaji dalam Laporan Tahunan ini, bab Profil Perusahaan, bagian Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Intern.

Competency Development for the Board of Commissioners

In order to enhance knowledge and update their capabilities and knowledge, the Board of Commissioners is provided with training and competency development programs, both internally and externally. Further information regarding the competency development program participated in by the Board of Commissioners is presented in this Annual Report, specifically in the Company Profile chapter, the Competency Development section of the Board of Commissioners, Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit.



Penilaian Kinerja Organ Penunjang Dewan Komisaris

Dalam mendukung kecukupan pengawasan Perseroan, Dewan Komisaris dibantu oleh organ penunjang, yaitu Komite Audit, Komite GCG dan Manajemen Risiko, serta Sekretaris Dewan Komisaris. Dewan Komisaris melakukan penilaian dan evaluasi kinerja terhadap organ-organ penunjang Dewan Komisaris dengan menimbang capaian kinerja dan tugas pengawasan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris tahun 2020, Piagam Komite, kualitas rekomendasi yang diberikan, serta tingkat kehadiran dalam rapat gabungan bersama Dewan Komisaris.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, pelaksanaan tugas pengawasan secara umum telah terealisasi sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan. Selama tahun 2020, Komite Audit telah memberikan rekomendasi terkait penelaahan informasi keuangan, efektivitas Sistem Pengendalian Internal, dan tinjauan terhadap hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen. Komite GCG dan Manajemen Risiko juga telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pengawasan implementasi GCG serta kecukupan pengendalian risiko Perseroan secara menyeluruh. Secara rerata, capaian kinerja komite penunjang Dewan Komisaris terlihat dari perolehan skor KPI pada indikator rapat Komite bersama Dewan Komisaris yang terealisasi sebesar 100%.

Performance Assessment of the Supporting Organs of the Board of Commissioners

In supporting the adequacy of the Company's supervision, the Board of Commissioners is assisted by supporting organs, namely the Audit Committee, the GCG and Risk Management Committee, and the Secretary of the Board of Commissioners. The Board of Commissioners assesses and evaluates the performance of the supporting organs of the Board of Commissioners by considering the performance achievements and supervisory duties in accordance with the 2020 Work Plan and Budget of the Board of Commissioners, the Committee Charter, the quality of the recommendations given, and the level of attendance at joint meetings with the Board of Commissioners.

Based on the results of the evaluation that has been carried out, the implementation of supervisory duties has generally been realized in accordance with the set plans and targets. During 2020, the Audit Committee has provided recommendations regarding the review of financial information, the effectiveness of the Internal Control System, and a review of the results of audits conducted by independent auditors. The GCG and Risk Management Committee has also provided recommendations to the Board of Commissioners regarding the supervision of GCG implementation and the adequacy of the Company's overall risk control. On average, the performance achievements of the supporting committees of the Board of Commissioners can be seen from the achievement of KPI scores on the indicators of the meeting of the Committee with the Board of Commissioners which were realized at 100%.



DIREKSI

Direksi adalah organ tata kelola Perusahaan yang bertanggungjawab secara kolegial atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan, bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Komposisi Direksi disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan dengan ketentuan paling sedikit 2 orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:

1. Cakap melakukan perbuatan hukum;
2. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan tidak pernah:
 - a) Dinyatakan pailit;
 - b) Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit;
 - c) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
3. Memenuhi persyaratan materiil, yaitu kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, kemampuan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
4. Memenuhi persyaratan tambahan yaitu:
 - a) Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif;
 - b) Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah;
 - c) Tidak menjabat sebagai Direksi pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
 - d) Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya; dan
 - e) Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Direksi BUMN), yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter.

BOARD OF DIRECTORS

The BOD is a Company governance organ that is collectively responsible for the management of the Company for the interest and objective of the Company, acts as the leader in the Company's management, and represents the Company both inside and outside the court. The composition of the BOD is adjusted to the needs of the Company, with a provision that the BOD shall be composed of, at the very least, two members and one of whom shall serve as the President Director, by taking the prevailing laws and regulations into account.

Criteria for members of the Board of Directors

All members of the Board of Directors meet the criteria stipulated in the prevailing laws and regulations, which include:

1. Able to perform legal actions;
2. In the 5 (five) years prior to the appointment, never:
 - a) Declared bankrupt;
 - b) Become a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners/Board of Supervisors who was found guilty of causing a BUMN and/or company to be declared bankrupt;
 - c) Convicted of committing a crime that caused losses to the finances of the state, BUMN, companies and/or related to the financial sector.
3. Meet the material requirements, namely the criteria of expertise, integrity, leadership, ability, experience, honesty, good behavior, and high dedication to advancing and developing the company;
4. Meet additional requirements, namely:
 - a) Not administrators of political parties and/or candidates for legislative members and/or legislative members;
 - b) Not a candidate for head/deputy regional head and / or head/deputy regional head;
 - c) Has not served as the Board of Directors of the SOE concerned for 2 (two) consecutive terms;
 - d) Be dedicated and devote the utmost time to do his job; and
 - e) Physically and mentally healthy (not currently suffering from a disease that can hinder the implementation of duties as a BUMN Board of Directors), as evidenced by a certificate from a doctor.



5. Dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*).

5. Has passed the Fit & Proper Test.

Prosedur Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemilihan Ulang Direksi

Sebagai entitas usaha berstatus BUMN, Pelindo III memiliki mekanisme pengangkatan, pemberhentian, dan pemilihan ulang Direksi sebagaimana yang menjadi kewenangan Pemegang Saham. Mekanisme ini hadir sebagai bentuk pemenuhan atas prinsip keadilan (*fairness*) dalam GCG bagi individu-individu yang berkompeten baik bagi pegawai Perusahaan atau para profesional yang memenuhi persyaratan untuk diberikan kepercayaan dalam melakukan pengelolaan usaha Perusahaan. Regenerasi perlu dilakukan pada tataran manajemen terutama di jajaran Direksi mengingat Perusahaan memiliki mekanisme penetapan batas masa jabatan Direksi hanya selama 5 tahun untuk kemudian digantikan oleh kandidat lain atau diangkat kembali melalui pertimbangan dan keputusan Pemegang Saham.

Terkait mekanisme pengangkatan, pemberhentian dan pengangkatan ulang Direksi, Perusahaan telah memuat petunjuk pelaksanaan dan teknis yang tercantum dalam Pedoman CoCG Perusahaan. Pedoman tersebut dibuat dengan mengacu pada regulasi terkait seperti:

- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN (pasal 5);
- Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkaan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.

Procedures to Appoint, Dismiss, and Re-Nomination of the Board of Directors

As an SOE, Pelindo III has a mechanism of appointment, dismissal, and re-nomination of the BOD which authority of the Shareholders. This mechanism exists as a form of compliance with the fairness principle of GCG for competent individuals, i.e. employees of the Company or qualified professionals to be given the trust and mandate in managing the Company's business. Regeneration is necessary at the management level, especially in the BOD level, considering that the Company has a mechanism for determining the term of office of the BOD for only five years which is then succeeded by another candidate or re-appointed through the consideration and decision of the Shareholders.

Concerning the mechanism of appointment, dismissal, and re-appointment of the BOD, the Company has provided the implementation and technical guidelines contained in the CoCG Guidelines. Such guidelines are made by referring to the following related regulations:

- Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies
- Law No. 19 of 2003 on SOEs
- Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 on Implementation of Good Corporate Governance in SOEs (article 5)
- Regulation of the Minister of SOE No. PER-03/MBU/02/2015 on Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the BOD of SOEs



Mekanisme Suksesi Direksi

Dalam pedoman yang berlaku, dinyatakan bahwa mekanisme pengangkatan, pemberhentian, dan pengangkatan ulang Direksi terdiri dari:

Sumber Bakal Calon

Pengajuan nama-nama calon Direksi didasarkan pada sumber-sumber bakal calon yang terdiri dari mantan Direksi BUMN, Dewan Komisaris, Talenta BUMN, Talenta Kementerian BUMN, dan sumber lain.

Penjaringan

Penjaringan nama-nama Direksi dilakukan oleh Menteri BUMN, Sekretaris, Deputi Teknis, dan/atau Deputi mencari bakal calon dari berbagai sumber. Semua bakal calon diadministrasikan oleh Deputi.

Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)

Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Direksi adalah seseorang yang telah dinyatakan memenuhi Persyaratan Formal dan Persyaratan lain dan lulus UKK. UKK terhadap bakal calon dilakukan oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh Menteri.

Usulan Pengangkatan

Bagi calon yang telah mendapatkan rekomendasi "Disarankan" oleh tim penilai dapat diangkat menjadi Direksi Perseroan. Untuk penetapan, karena status Perusahaan sebagai BUMN yang kepemilikan seluruh saham dimiliki negara maka penetapan dilakukan melalui Keputusan Menteri. Kebijakan tata kelola Perusahaan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi adalah:

1. Persyaratan, susunan, dan masa jabatan anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Pengangkatan anggota Direksi sepenuhnya merupakan kewenangan Pemegang Saham. Kewenangan tersebut mencakup:
 - a. Menentukan kriteria penilaian umum calon anggota Direksi;
 - b. Membentuk tim seleksi calon anggota Direksi; dan

Board of Directors Succession Mechanism

In the applicable guidelines, it is stated that the mechanism of appointment, dismissal, and reappointment of the BOD consists of:

Candidate Source

The nomination of names of candidates for the BOD shall be based on sources of prospective candidates comprising former BOD SOE, BOC, Talents from SOE, Talents from the Ministry of SOE, and other sources.

Selection

The selection for members of the BOC is conducted by the Minister of SOE, Secretary, Technical Deputy, and/or Deputy to search potential candidates from various sources. All potential candidates are administrated by the Deputy.

Fit-And-Proper Test (UKK)

Prospective candidates who will be appointed as a BOD member are individuals who have been declared to fulfil the Formal Requirements and other Requirements, as well as passing the UKK. UKK for the prospective candidates shall be conducted by professional institutions appointed by the Minister.

Proposed Appointment

Candidates obtaining "Recommended" stamp from the assessment team may be appointed as the members of the BOC. As for the determination, considering the Company's status as an SOE whose shares are wholly owned by the state, it shall be conducted through a Minister Resolution. The Company's governance policies on the appointment of members of the BOD are as follows:

1. Requirements, composition, and term of office of members of the BOD are stipulated in the Articles of Association.
2. The appointment of members of the BOD is under the full authority of the Shareholders. Such authority includes:
 - a. To determine general assessment criteria for candidates for members of the BOD;
 - b. To establish a selection team of candidates for members of the BOD;



- c. Mengangkat anggota Direksi, termasuk mengangkat Direktur Utama.
 3. Pemilihan calon anggota Direksi dilakukan melalui proses seleksi dan nominasi yang transparan dengan mempertimbangkan keahlian, integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman, perilaku dan dedikasi, serta kecukupan waktunya untuk mengelola Perseroan.
 4. Calon-calon anggota Direksi merupakan pejabat internal Perseroan dapat diusulkan oleh Dewan Komisaris.
 5. Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Calon-calon yang lulus wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
 6. Anggota Direksi diangkat melalui RUPS dengan menyebutkan mulai saat berlakunya pengangkatan.
 7. Pengangkatan calon anggota Direksi dilakukan dengan keputusan Menteri.
 8. Pengangkatan anggota Direksi mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal pelantikan atau tanggal yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri.
 9. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan.
 10. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka masa jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya yang telah ada.
- c. To appoint members of the BOD, including appointing the President Director;
 3. Selection of the candidates for members of the BOD shall be conducted through a transparent selection and nomination processed by taking into account the expertise, integrity, honesty, leadership, experience, conduct and dedication, and time availability of the candidates to manage the Company.
 4. Candidates for members of the BOD from internal Company's officials can be proposed by the BOC.
 5. Appointment of members of the BOD shall be conducted through a fit and proper test mechanism. Candidates who pass the test must sign a management contract before being appointed as a member of the BOD.
 6. Members of the BOD shall be appointed through GMS by stating the effective date of appointment.
 7. Appointment of candidates for members of the BOD shall be conducted by a Ministerial resolution.
 8. Appointment of members of the BOD shall be effective as of the date of inauguration or the date stipulated in the Ministerial Resolution.
 9. The term of office of the BOD' members shall be five years and thereafter they may be reappointed for another term.
 10. If there is an addition to the BOD, the term of office of the new member of the BOD will end with the term of office of the existing members of the BOD.

Pemberhentian

Ketentuan mengenai mekanisme pemberhentian sebagaimana tercantum dalam PER-03/MBU/02/2015 yaitu:

1. Alasan Pemberhentian

Alasan pemberhentian Direksi meliputi ketidakmampuan Direksi dalam menjalankan tugasnya, melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan perundang-undangan, terlibat tindakan merugikan bagi Perusahaan dan negara, melakukan tindakan yang melanggar etika, dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan, serta mengundurkan diri.

2. Tata Cara Pemberhentian

Tata cara pemberhentian dilakukan dengan evaluasi oleh Deputi kepada Direksi yang bersangkutan dilanjutkan dengan mengajukan usulan untuk

Dismissal

Provisions concerning the dismissal mechanism as stated in PER-03/MBU/02/2015 are as follows:

1. Reason for Dismissal

The reasons for BOD dismissal include the inability of the BOD to perform their duties, violation of the Articles of Association as well as laws and regulations, involvement in actions that cause a loss for the Company and the country, involvement in ethical offences, and being declared guilty by the court decision, as well as resignation.

2. Procedures of Dismissal

Dismissal procedures began with evaluation by a Deputy on the concerned BOD, followed by submitting a proposal to be determined by the Minister of



kemudian ditetapkan oleh Menteri BUMN. Sebelum ditetapkan dan dievaluasi, Perusahaan terlebih dahulu memberikan informasi kepada Direksi yang bersangkutan agar yang bersangkutan dapat memberikan pembelaan diri dengan ketentuan pembelaan diri disampaikan dalam bentuk tertulis dan lisan (untuk lisan dibuatkan berita cara penyampaian pembelaan) maksimal disampaikan 14 hari terhitung setelah Direksi yang bersangkutan memperoleh informasi pemberhentian kepada Deputi. Setelah disampaikan pembelaan diri, notulen pembelaan diajukan ke dalam RUPS untuk kemudian diambil keputusan.

Proses pemberhentian Direksi dilakukan bersamaan dengan pengangkatan Direksi penganti dan pemberhentian berlaku efektif sejak ditetapkan dalam Keputusan Menteri atau RUPS.

Kebijakan tata kelola Perusahaan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi adalah:

1. Persyaratan pemberhentian anggota Direksi dari jabatan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu, dengan prosedur:
 - a. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, jika mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan.
 - b. Pemberhentian sementara sebagaimana dalam butir (a) harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.
 - c. Dalam waktu 30 hari setelah pemberhentian sementara, Dewan Komisaris diwajibkan untuk meminta diadakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara untuk hadir dan membela diri.

SOE. Before the determination and evaluation, the Company shall inform the concerned members of the BOD so they can prepare a defence provided that such defence is delivered in written and spoken forms to the Deputy (for the spoken form, minutes of defence deliverance shall be prepared) in no later than 14 days since the concerned members of the BOD received information of dismissal. After the defence is stated, minutes of defence shall be submitted to the GMS to be resolved.

The dismissal process is carried out simultaneously with the appointment of the succeeding members of the BOD. The dismissal shall take into effect since the determination through a Minister or GMS Resolution.

The Company's governance policies concerning the appointment of BOD members are as follows:

1. The requirements for dismissal for members of the BOD from their positions are stipulated in the Articles of Association.
2. Members of the BOD may be dismissed temporarily through the following procedures:
 - a. The BOC with the most votes shall at all times be entitled to temporarily dismiss one or more members of the BOD, if they act contrary to the Articles of Association or if they neglect their obligations or if there is an urgent reason for the Company.
 - b. A temporary dismissal referred to in point (a) shall be notified in writing to the concerned members of the BOD with the reasons for dismissal.
 - c. Within 30 days after the dismissal, the BOC is required to request an Extraordinary GMS to be convened to decide whether the concerned members of the BOD shall be dismissed entirely or returned to their position, by first providing an opportunity to the temporarily dismissed members of the BOD for attending the meeting and defend themselves.



- d. Jika RUPS Luar Biasa tidak diadakan dalam jangka waktu 30 hari setelah pemberhentian sementara, maka pemberhentian sementara tersebut dinyatakan batal demi hukum.
3. Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatan, dengan pertimbangan:
- Anggota Direksi yang bersangkutan bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan, atau melalaikan kewajibannya.
 - Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen.
 - Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik.
 - Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar.
 - Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara.
 - Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/ atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi BUMN.
 - Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Rencana pemberhentian anggota Direksi sebelum berakhir masa jabatannya, diberitahukan terlebih dahulu kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri Negara BUMN atau Deputi Teknis Kementerian BUMN.
5. Keputusan pemberhentian anggota Direksi sebelum masa jabatan berakhir diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
6. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pemegang Saham dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Pemberhentian anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa jabatan harus dilakukan oleh RUPS dengan menyebutkan alasannya.
8. Anggota Direksi diberhentikan oleh RUPS dengan menyebutkan mulai saat berlakunya pemberhentian.
- d. If the Extraordinary GMS is not convened within 30 days after the dismissal, the dismissal shall be declared null and void in law.
3. Members of the BOD may be dismissed before the end of their term of office, with the following considerations:
- The concerned members of the BOD act contrary to the Company's Articles of Association and/ or the prevailing laws and regulations, are found guilty due to a court decision or are found to be neglecting their obligations.
 - Not capable of fulfilling their obligations as agreed in the management contract.
 - Not capable of performing their duties properly.
 - Do not comply with the provisions of the laws and regulations and/or provisions of the Articles of Association.
 - Engaged in actions that cause loss to the Company and/or the country.
 - Conducted unethical and/or improper actions that should be respected instead as members of the BOD of an SOE.
 - Found guilty due to a court decision which has a fixed legal power.
4. The plan to dismiss the members of the BOD before the end of their term of office shall be notified in advance to the concerned members of the BOD in oral or writing forms by the Minister of SOE or the Technical Deputy of Ministry of SOE.
5. The decision of dismissal of the members of the BOD before the end of their term of office is made after the concerned members are allowed to defend themselves.
6. A member of the BOD is entitled to resign from their position by submitting notification in writing form of their intention to the Shareholders with a copy to the BOC and BOD in, at the very least, 30 days before the date of their resignation.
7. Dismissal of members of the BOD at any time before the end of their term of office shall be carried out by the GMS by stating the reasons.
8. Members of the BOD are dismissed by the GMS by stating the effective date of dismissal.



9. Anggota Direksi yang mengundurkan diri tetap dimintakan pertanggungjawaban dalam RUPS, atas pelaksanaan tugasnya sejak tanggal pengangkatan sampai tanggal penetapan pengunduran diri.
10. Apabila seorang anggota Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikan.
11. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu.
12. Selama jabatan anggota Direksi lowong dan penggantinya belum ada, maka salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong dengan kekuasaan dan wewenang yang sama, di samping tetap menjalankan tugas utamanya.
13. Jika oleh suatu sebab Perusahaan tidak mempunyai Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris berkewajiban menjalankan pekerjaan Direksi, dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah terjadi lowongan, Dewan Komisaris berkewajiban untuk meminta diadakannya RUPS Luar Biasa guna mengisi lowongan tersebut.
9. A resigning member of the BOD shall be held accountable at the GMS for their performance regarding their duties from the date of their appointment until the date of their resignation.
10. If a member of the BOD resigns or is dismissed before the end of their term of office, the term of office of their replacement shall be the remaining term of the replaced member of the BOD.
11. If by any reason the position of the BOD is vacant, then, within no later than 30 days after the vacancy, a GMS shall be convened to fill the vacancy.
12. As long as the position of the BOD is vacant and their successor has yet existed, one of the other members of the BOD appointed by the BOC shall perform the duties of the vacant position of the BOD with the same powers and authority, in addition to continuing to carry out their main duties.
13. If for any reason the Company does not have a BOD, the BOC is temporarily obliged to carry out the duties of the BOD. Within no later than 30 days after the vacancy, the BOC is obliged to request an Extraordinary GMS to be convened to fill the vacancy.

Pemilihan Ulang

Pengangkatan kembali anggota Direksi pada posisi jabatan yang sama dalam satu BUMN dapat dilakukan tanpa UKK apabila dinilai mampu melaksanakan tugasnya dengan baik selama masa jabatannya yang antara lain didasarkan pada pencapaian target kinerja Perusahaan, kekompakkan Tim, Integritas, dan rekam jejak. Penyajian hasil penilaian dapat dilakukan dalam bentuk narasi kualitatif.

Dengan statusnya sebagai BUMN yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah, Perseroan senantiasa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 dalam hal pengangkatan, pemilihan ulang, dan pemberhentian Direksi. Karena hal-hal tersebut bersifat ketetapan yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN selaku wakil Pemerintah di dalam Perseroan, maka Fungsi Nominasi dan Remunerasi pada Perseroan dijadikan.

Re-Nomination

The reappointment of BOD members in the same position in an SOE can be conducted without holding UKK if they are considered capable of performing their duties well during their term of office. This is based on the achievement of company performance targets, teamwork, integrity, and track record. The presentation of assessment results can be done in the form of qualitative narrative.

As an SOE whose shares are fully owned by the government, the Company always adheres to the procedures that have been determined in line with the Regulation of Minister of SOE No. PER-02/MBU/02/2015 regarding appointment, renomination and dismissal of the BOD. Since the abovementioned matters are established as a provision issued by the Minister of SOE as a representative of the Government in the Company, the Nomination and Remuneration function in the Company is hence removed.



Pemenuhan Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Pengangkatan

Pada tahun 2020, Perseroan mengalami pergantian Direksi. Proses pengangkatan Direksi Perseroan telah sesuai dengan RUPS, sebagaimana tabel di bawah ini:

Kesesuaian Pengangkatan Direksi dengan RUPS

Fulfillment of the Appointment and Dismissal Mechanisms

Appointment

In 2020, the Company changed the composition of its BOD. The appointment mechanism has conformed with the GMS as follows:

Conformity of the Board of Directors Appointment With the GMS

Ketentuan / Provisions	Pemenuhan / Fulfillment	Keterangan / Information
Kewenangan Pemegang Saham dalam Pengangkatan Direksi / Shareholders Authority in the Appointment of the Board of Directors		
Menentukan kriteria penilaian umum calon anggota Direksi. / To determine general assessment criteria for candidate members of the BOD	Terpenuhi / Fulfilled	
Membentuk tim seleksi calon anggota Direksi. / To establish a selection team of candidate members of the BOD.	Terpenuhi / Fulfilled	
Mengangkat anggota Direksi, termasuk mengangkat Direktur Utama. / To appoint members of the BOD, including appointing the President Director.	Terpenuhi / Fulfilled	
Pemilihan calon anggota Direksi dilakukan melalui proses seleksi dan nominasi yang transparan dengan mempertimbangkan keahlian, integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman, perilaku dan dedikasi, serta kecukupan waktunya untuk mengelola Perseroan. / Selection of the candidate members of the BOD shall be conducted through a transparent selection and nomination processed by taking into account the expertise, integrity, honesty, leadership, experience, conduct and dedication, and time availability of the candidates to manage the Company.	Terpenuhi / Fulfilled	Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan asesmen terhadap calon Direksi. / Ministry of SOE as the Shareholder cooperates with a third party to conduct an assessment on candidates members of the BOD.
Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Calon-calon yang lulus wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum diangkat sebagai anggota Direksi. / Appointment of members of the BOD shall be conducted through a fit and proper test mechanism. Candidates who pass the test must sign a management contract before being appointed as a member of the BOD.	Terpenuhi / Fulfilled	
Anggota Direksi diangkat melalui RUPS dengan menyebutkan mulai saat berlakunya pengangkatan. / Members of the BOD shall be appointed through GMS by stating the effective date of appointment.	Terpenuhi / Fulfilled	
Pengangkatan calon anggota Direksi dilakukan dengan Keputusan Menteri. / Appointment of candidate members of the BOD shall be conducted by a Ministerial Decision.	Terpenuhi / Fulfilled	Pengangkatan Direktur Keuangan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-210/MBU/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019. / Appointment of the Finance Director is based on the Decree of Ministry of SOE No. SK-219/MBU/10/2019 dated October 16, 2019.



Pemberhentian

Pada tahun 2020, Perseroan mengalami pergantian Direksi. Proses pemberhentian Direksi Perseroan telah sesuai dengan RUPS, sebagaimana tabel di bawah ini:

Kesesuaian Pemberhentian Direksi dengan RUPS

Ketentuan / Provisions	Pemenuhan / Fulfillment	Keterangan / Information
Pemberhentian anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa jabatan harus dilakukan oleh RUPS dengan menyebutkan alasannya. / Dismissal of members of the BOD at any time before the end of their term of office shall be carried out by the GMS by stating the reasons.	Terpenuhi / Fulfilled	
Apabila seorang anggota Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikan. / If a member of the BOD resigns or is dismissed before the end of their term of office, then the term of office of their replacement shall be the remaining term of the replaced member of the BOD.	Terpenuhi / Fulfilled	
Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. / If by any reason the position of the BOD is vacant, then, within no later than 30 days after the vacancy, a GMS shall be convened to fill the vacancy.	Terpenuhi / Fulfilled	

Susunan Direksi

Direksi Pelindo III diangkat oleh Pemegang Saham melalui RUPS. Susunan Direksi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Susunan Direksi I

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment
1	Doso Agung	Direktur Utama / President Director	Surat Keputusan No. SK-244/MBU/09/2018 tanggal 19 September 2018 / Decree No. SK-244/MBU/09/2018 dated 19 September 2018
2	Putut Sri Muljanto	Direktur Operasi dan Komersial / Operations and Commercial Director	Surat Keputusan No. SK-289/MBU/11/2018 tanggal 5 November 2018 / Decree No. SK-289/MBU/11/2018 dated 5 November 2018
3	Joko Noerhudha	Direktur Teknik / Engineering Director	Surat Keputusan No. SK-244/MBU/09/2018 tanggal 19 September 2018 / Decree No. SK-244/MBU/09/2018 dated 19 September 2018
4	Toto Heliyanto	Direktur SDM / Human Capital Director	Surat Keputusan No. SK.103/MBU/2014 tanggal 12 Mei 2014 jo. SK-94/MBU/05/2019 tanggal 14 Mei 2019 / Decree No. SK.103/MBU/2014 dated 12 May 2014 jo. SK-94/MBU/05/209 dated 14 May 2019
5	Irvandi Gustari	Direktur Keuangan / Finance Director	Surat Keputusan No. SK-219/MBU/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019 / Decree No. SK-219/MBU/10/2019 dated 16 October 2019
6	Toto Nugroho	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis / Business Transformation and Development Director	Surat Keputusan No. SK-289/MBU/11/2018 tanggal 5 November 2018 / Decree No. SK-289/MBU/11/2018 dated 5 November 2018

Dismissal

In 2019, the Company changed the composition of its BOD. The dismissal mechanism has conformed with the GMS as follows:

Conformity of the Board of Directors Dismissal With the GMS

Ketentuan / Provisions	Pemenuhan / Fulfillment	Keterangan / Information
Pemberhentian anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa jabatan harus dilakukan oleh RUPS dengan menyebutkan alasannya. / Dismissal of members of the BOD at any time before the end of their term of office shall be carried out by the GMS by stating the reasons.	Terpenuhi / Fulfilled	
Apabila seorang anggota Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikan. / If a member of the BOD resigns or is dismissed before the end of their term of office, then the term of office of their replacement shall be the remaining term of the replaced member of the BOD.	Terpenuhi / Fulfilled	
Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. / If by any reason the position of the BOD is vacant, then, within no later than 30 days after the vacancy, a GMS shall be convened to fill the vacancy.	Terpenuhi / Fulfilled	

Composition of the Board of Directors

The BOD of Pelindo III is appointed by the Shareholders through GMS. As of 2020, the composition of Company's BOD is as follows:

Composition of the Board of Directors I

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment

Surat Keputusan No. SK-244/MBU/09/2018 tanggal 19 September 2018 / Decree No. SK-244/MBU/09/2018 dated 19 September 2018

Surat Keputusan No. SK-289/MBU/11/2018 tanggal 5 November 2018 / Decree No. SK-289/MBU/11/2018 dated 5 November 2018

Surat Keputusan No. SK-244/MBU/09/2018 tanggal 19 September 2018 / Decree No. SK-244/MBU/09/2018 dated 19 September 2018

Surat Keputusan No. SK.103/MBU/2014 tanggal 12 Mei 2014 jo. SK-94/MBU/05/2019 tanggal 14 Mei 2019 / Decree No. SK.103/MBU/2014 dated 12 May 2014 jo. SK-94/MBU/05/209 dated 14 May 2019

Surat Keputusan No. SK-219/MBU/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019 / Decree No. SK-219/MBU/10/2019 dated 16 October 2019

Surat Keputusan No. SK-289/MBU/11/2018 tanggal 5 November 2018 / Decree No. SK-289/MBU/11/2018 dated 5 November 2018



Berdasarkan Surat Keputusan No. SK-209/MBU/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 telah disetujui pengangkatan anggota Direksi baru sehingga sampai dengan 31 Desember 2020, susunan Direksi adalah sebagai berikut:

The Decree No. SK-209/MBU/06/2020 dated June 18, 2020 has approved the appointment of a new member of the Board of Directors, therefore, as of December 31, 2020, the composition of the Board of Directors is as follows:

Susunan Direksi II

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment
1	U. Saefudin Noer	Direktur Utama / President Director	Surat Keputusan No. SK-209/MBU/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 / Decree No. SK-209/MBU/06/2020 dated 18 June 2020
2	Putut Sri Muljanto	Direktur Operasi dan Komersial / Operations and Commercial Director	Surat Keputusan No. SK-289/MBU/11/2018 tanggal 5 November 2018 / Decree No. SK-289/MBU/11/2018 dated 5 November 2018
3	Boy Robyanto	Direktur Teknik / Engineering Director	
4	Edi Priyanto	Direktur SDM / Human Capital Director	
5	Endot Endrardono	Direktur Keuangan / Finance Director	Surat Keputusan No. SK-209/MBU/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 / Decree No. SK-209/MBU/06/2020 dated 18 June 2020
6	Kokok Susanto	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis / Business Transformation and Development Director	

*) Pengangkatan U. Saefudin Noer, Boy Robyanto, Edi Priyanto, Endot Endrardono dan Kokok Susanto berdasarkan SK No. SK-209/MBU/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 menggantikan Doso Agung, Joko Noerhudha, Toto Heliyanto, Irvandi Gustari dan Toto Nugroho / Appointment of U. Saefudin Noer, Boy Robyanto, Edi Priyanto, Endot Endrardono and Kokok Susanto based on Decree No. SK-209/MBU/06/2020 dated June 18, 2020 replacing Doso Agung, Joko Noerhudha, Toto Heliyanto, Irvandi Gustari and Toto Nugroho.

Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan Direksi adalah terhitung sejak tanggal RUPS penetapannya sampai dengan RUPS ke-5 (kelima) setelah tanggal pengangkatannya. Namun demikian, tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum masa jabatan Direksi yang bersangkutan berakhir dengan alasan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Term of Office of the Board of Directors

The term of office of the Board of Directors shall be effective from the date of the GMS of its determination to the fifth (fifth) GMS after the date of his appointment. However, this does not reduce the right of the GMS to dismiss a member of the Board of Directors at any time before the term of office of the relevant Board of Directors ends for the reasons stipulated in the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Perusahaan senantiasa mengacu pada sumber hukum yang berlaku antara lain Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perusahaan, *Code of Conduct* Perusahaan yang tercantum dalam CoCG Perusahaan untuk kemudian dijabarkan secara lengkap dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tanggal 3 September 2018 tentang Reviu dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual* dan *Code of Corporate*

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

The Company continuously refers to the prevailing legal sources, among others, Law No. 19 of 2003 on SOEs, Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, the Company's Articles of Association, the Code of Conduct stipulated in the CoCG to be further elaborated in Joint Decree of the BOC and BOD of Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 dated 3 September 2018 in Review and Revision of GCG (Board Manual and Code of Corporate Governance) which replaced the Joint Decree of the BOD of Pelindo III No. 253/XII/KEP/DK.P.III/2015 and KEP.745.1/HK.04/P. III-



Governance) yang menggantikan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Pelindo III No. 253/XII/KEP/DK.P.III/2015 dan KEP.745.1/HK.04/P.III-2015 tentang Review dan revisi Panduan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) Perusahaan tanggal 16 Desember 2015. Dalam keputusan tersebut, ruang lingkup tugas, tanggung jawab, hak dan wewenang Direksi adalah:

Tanggung Jawab

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, serta bertanggung jawab atas pencapaian tujuan dan target kinerja Perseroan. Sifat dari tanggung jawab tersebut adalah tanggung renteng hingga harta pribadi Direksi yang bersangkutan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas untuk kepentingan Perseroan.

Tugas

Penetapan pembagian tugas anggota Direksi merupakan kewenangan RUPS. Secara umum, tugas Direksi adalah sebagai berikut:

1. Mematuhi ketentuan-ketentuan serta memastikan seluruh aktivitas Perseroan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS;
2. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
3. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan;
4. Melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai kepengurusan maupun pemilikan serta mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan Perusahaan, dengan pembatasan tertentu;
5. Menyiapkan susunan struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan;
6. Menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Memberikan informasi dan penjelasan tentang segala hal yang diperlukan Dewan Komisaris; dan
8. Menerapkan GCG secara konsisten.

2015 on Review and Revision for Board Manual of the BOC and BOD of the Company dated December 16, 2015. In the decree, the BOD scope of duties, responsibilities, rights and authority are as follows:

Responsibilities

The BOD is fully responsible for the management of the Company, for the interests and objectives of the Company, and is fully responsible for the achievement of the Company's objectives and performance targets. The nature of this responsibility is collective and encompass the personal wealth of the BOD' members to the extent the concerned members are found guilty or negligent in carrying out their duties for the interests of the Company.

Duties

The GMS is authorised to determine the distribution of the BOD' duties. In general, the duties of the BOD are as follows:

1. Complying with the provisions and ensuring that all Company activities have been in line with the prevailing laws and regulations, Articles of Association, and GMS resolutions;
2. Leading and managing the Company based on the objectives and purposes of the Company as well as striving to improve the Company's efficiency and effectiveness;
3. Controlling, maintaining, and managing the Company's assets;
4. Conducting all actions and activities regarding the Company's management and ownership as well as binding the Company with other parties and/or other parties with the Company with certain limitations;
5. Formulating organisational structure and work procedures of the Company;
6. Organising and keeping Special Register based on the laws and regulations;
7. Providing information and description on all matters required by the BOC;
8. Implementing GCG consistently.



Adapun tugas-tugas Direksi secara rinci mencakup:

1. Tugas terkait dengan RUPS

- a. Wajib menyelenggarakan dan menyimpan dokumen-dokumen terkait dengan RUPS sesuai ketentuan perundang-undangan.
- b. Menandatangani Laporan Tahunan, dan apabila dalam hal anggota Direksi tidak menandatangani Laporan Tahunan, maka harus disebutkan alasannya.
- c. Menandatangani Laporan Manajemen Triwulanan dan Laporan Manajemen Tahunan.
- d. Memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa.
- e. Menyediakan bahan RUPS kepada Pemegang Saham.
- f. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa laporan kegiatan Perseroan, termasuk Laporan Keuangan, baik dalam bentuk Laporan Tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang ditentukan kepada RUPS.
- g. Meminta persetujuan RUPS jika akan dilakukan perubahan Anggaran Dasar.
- h. Memberikan Risalah RUPS jika diminta oleh Pemegang Saham.

2. Tugas terkait dengan Strategi dan Rencana Perusahaan

- a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
- b. Menyiapkan RJPP dan RKAP termasuk rencana-rencana lain yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perseroan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham guna mendapatkan pencegahan dalam RUPS.
- c. Melaksanakan rencana bisnis secara efektif dalam pengelolaan Perseroan.

3. Tugas yang Terkait dengan Penyusunan RJPP

- a. Menyusun RJPP yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Evaluasi pelaksanaan RJPP sebelumnya;
 - 2) Posisi Perseroan saat ini;

The details of the BOD duties are as follows:

1. Duties Related to GMS

- a. Obligated to carry out and store documents related to the GMS based on the provisions of the legislation.
- b. Signing the Annual Report, and if a member of the BOD does not sign the Annual Report, the reason must be stated.
- c. Signing Quarterly Management Reports and Annual Management Reports.
- d. Summoning and convening Annual GMS and/or Extraordinary GMS.
- e. Providing GMS materials to the Shareholders.
- f. Providing accountability and all information about the condition and execution of the Company in the form of reports on Company activities including Financial Statements in the form of Annual Reports or in the form of other periodic reports in the manner and time specified to the GMS.
- g. Requesting approval from the GMS if changes to the Articles of Association will be made.
- h. Providing Minutes of GMS if requested by the Shareholders.

2. Duties Related to Corporate Strategies and Plans

- a. Engaging and ensuring the Company's business and activities to be in line with the Company's purposes and objectives.
- b. Preparing RJPP and RKAP as well as other plans related to the implementation of the Company's business activities to be submitted to the BOC and Shareholders to obtain approval in the GMS.
- c. Executing business plans effectively in managing the Company.

3. Duties Related to JPP Drafting

- a. Preparing RJPP which includes, at the very least:
 - 1) Evaluation of the previous RJPP implementation.
 - 2) The current Company position.



- 3) Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP.
- b. Penetapan Visi, Misi, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program Kerja Rencana Jangka Panjang.
- c. Bersama dengan Dewan Komisaris menandatangani RJPP yang telah disepakati dan menyampaikannya kepada Pemegang Saham.
- d. Dalam hal terjadi perubahan faktor internal dan eksternal Perseroan dikarenakan terdapat perubahan material yang berada di luar kendali Direksi, Direksi melakukan kajian terhadap kemungkinan revisi RJPP yang berlaku.
- e. Dalam hal diperlukan revisi RJPP, maka Direksi harus menyampaikan RJPP hasil revisi kepada Dewan Komisaris guna mendapatkan tanggapan dan persetujuan untuk diajukan kepada RUPS.
- 4. Tugas yang Terkait dengan Penyusunan RKAP**
- a. Direksi menyusun RKAP yang sekurang-kurangnya memuat:
- 1) Kinerja Perseroan tahun berjalan;
 - 2) Rencana kerja Perseroan;
 - 3) Anggaran Perusahaan;
 - 4) Proyeksi keuangan Perseroan;
 - 5) Proyek keuangan anak Perusahaan;
 - 6) Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.
- b. Direksi menyerahkan RKAP kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan tanggapan sebelum diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- 5. Tugas yang Terkait dengan Laporan Tahunan**
- a. Menyusun Laporan Tahunan Perusahaan dan bersama dengan Dewan Komisaris menandatangani Laporan Tahunan Perusahaan dimaksud.
- b. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Pemegang Saham.
- 6. Tugas yang Terkait dengan Pengelolaan Manajemen Risiko**
- Mengembangkan sistem manajemen risiko dan melaksanakannya secara konsisten, dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Identifikasi Risiko, yaitu proses untuk mengenali jenis-jenis risiko yang relevan dan berpotensi terjadi.
- 3) Assumptions used in preparing the RJPP.
- b. Determining the Vision, Mission, Targets, Strategies, Policies, and Long-Term Work Programmes.
- c. Together with the BOC, signing the approved RJPP and deliver it to the Shareholders.
- d. In the event of a change to the Company's internal and external factors due to material changes that are outside of the Company's control, the BOD shall review the possibilities to revise the prevailing RJPP.
- e. Should the RJPP needs to be revised, the BOD shall submit the revised RJPP to the BOC to be reviewed and approved so it can be submitted to the GMS.
- 4. Duties Related to RKAP Drafting**
- a. Preparing RKAP which includes, at the very least:
- 1) Company's performance in the current year.
 - 2) Company's work plan.
 - 3) Company's budget.
 - 4) Company's financial projection.
 - 5) Subsidiaries' financial projections.
 - 6) Other matters requiring GMS' resolutions.
- b. The BOD shall submit the RKAP to the BOC to be reviewed and approved before submitting it to the GMS to obtain approval.
- 5. Duties Related to the Preparation of Annual Report**
- a. Preparing the Annual Report and, together with the BOC, signing the concerned Annual Report of the Company.
- b. Delivering the Annual Report to the Shareholders.
- 6. Duties Related to Risk Management**
- Developing a risk management system and implement it consistently through the following stages:
- a. Risk Identification, i.e. a process to identify the relevant risks with a potential to occur.



- b. Pengukuran Risiko, yaitu proses untuk mengukur besaran dampak dan probabilitas untuk setiap risiko yang telah teridentifikasi.
- c. Evaluasi Risiko, yaitu proses kajian terhadap kecukupan keseluruhan aktivitas manajemen risiko yang dilakukan di dalam Perseroan.
- d. Penanganan Risiko, yaitu proses untuk menetapkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menangani risiko potensial.
- e. Pemantauan Risiko, yaitu proses untuk melakukan pemantauan terhadap berbagai faktor yang diduga dapat mengerakkan kemunculan risiko.
- f. Pelaporan dan Pengungkapan, yaitu proses untuk melaporkan sistem manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Perseroan beserta pengungkapannya pada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Tugas yang Terkait dengan Pengendalian Intern

- a. Menetapkan kebijakan tentang sistem pengendalian intern yang efektif untuk memastikan tercapainya tujuan Perseroan.
- b. Sistem pengendalian internal mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Lingkungan pengendalian internal;
 - 2) Penetapan rencana kerja dan target-target perusahaan;
 - 3) Identifikasi risiko;
 - 4) Penilaian risiko;
 - 5) Mitigasi risiko;
 - 6) Aktivitas pengendalian;
 - 7) Informasi dan komunikasi;
 - 8) Monitoring.

Keterbukaan Informasi

- a. Mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan kepada pihak terkait sesuai peraturan perundungan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas, dan objektif.
- b. Mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan namun juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan.
- c. Direksi harus aktif mengungkapkan pelaksanaan prinsip GCG dan masalah material yang dihadapi Perseroan.

- b. Risk Measurement, i.e. a process to measure the size of impact and probability of the result of risk identification.
- c. Risk Evaluation, i.e. a review process on the availability of the entire risk management activity conducted in the Company.
- d. Risk Handling, i.e. a process to determine the efforts to be conducted to handle potential risks.
- e. Risk Monitoring, i.e. a process to monitor various factors that allegedly lead to the emergence of risks.
- f. Reporting and Disclosure, i.e. a process to report the risk management system implemented by the Company as well as the disclosure to the related parties based on the prevailing provisions.

7. Duties Related to Internal Control

- a. Stipulating policies on the effective internal control system to ensure the achievement of the Company's objectives.
- b. The internal control system shall cover the following matters:
 - 1) Internal control environment.
 - 2) Determination of company's work plans and targets.
 - 3) Risk identification.
 - 4) Risk evaluation.
 - 5) Risk mitigation.
 - 6) Controlling activities.
 - 7) Information and communication.
 - 8) Monitoring.

Information Disclosure

- a. Disclosing important information in the Annual Report and Financial Statements to the related parties according to the prevailing laws and regulations in a timely, accurate, clear and objective manner.
- b. Taking the initiative to disclose not only the issues required by the laws and regulations but also matters deemed significant for decision making by the stakeholders.
- c. Actively disclosing the implementation of GCG principles and material issues faced by the Company.



Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

- a. Menghormati hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pemangku kepentingan.
- b. Memastikan Perseroan melakukan tanggung jawab sosial.
- c. Memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perseroan lainnya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja.
- d. Dalam memperkerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karier, serta menentukan persyaratan kerja lainnya untuk pegawai. Perseroan tidak melakukan diskriminasi karena latar belakang etnik seseorang, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dimiliki seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundangan.
- e. Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan.

Tugas dan Kewajiban Lain

Menjalankan kewajiban-kewajiban lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan Direksi

Kewenangan Umum

- a. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;
- b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
- c. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
- d. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan

Relation with Stakeholders

- a. Respecting the rights of stakeholders arising from the prevailing laws and regulations or agreements made between the Company and the stakeholders.
- b. Ensuring that the Company carries out social responsibility.
- c. Ensuring that the assets and business locations, as well as other facilities of the Company, have complied with the prevailing laws and regulations on environmental preservation, and occupational health and safety.
- d. In employment, the establishment of the amount of salary, provision of training activities, and determination of career path and other work requirements, the BOD and the Company shall not discriminate the employees based on their ethnicity, religion, gender, age, disability, or any other special conditions as in line with the provisions contained in the laws and regulations.
- e. The BOD shall prepare a work environment that is free from all manners of pressure.

Other Duties and Obligations

Fulfilling other obligations in line with the provisions stipulated in the Articles of Association and determined by the GMS based on the applicable laws and regulations.

Authority of the Board of Directors

General Authority

- a. Determining the Company's management policies;
- b. Organising the delegation of the BOD' power to a Director or several Directors to make a decision on behalf of the BOD or to represent the Company both inside and outside of the court;
- c. Organising the delegation of the BOD' power to an employee or several employees, both individually and jointly, or to other persons, to represent the Company both inside and outside of the court;
- d. Administrating provisions regarding the Company's employment, including the determination of salary, pension plan, and other income for the employees based on the prevailing laws and regulations, provided that the determination of salary, pension plan and



gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pegawai yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS;

- e. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan berdasarkan kebijakan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan Kepala Satuan Pengawas Intern; dan
- g. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Tertulis Dewan Komisaris

- a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;
- b. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer-BOT*), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer-BOWT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate-BTO*), dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS;
- c. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada Anak Perusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada Anak Perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
- d. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
- e. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 tahun; dan
- f. Menetapkan struktur organisasi sampai dengan 1 tingkat di bawah Direksi.

other income for the employees that exceed the obligation as required by the laws and regulations must obtain prior approval from the GMS;

- e. Appointing and dismissing the employees based on the Company's employment policy as well as the prevailing laws and regulations;
- f. Appointing and dismissing Corporate Secretary and Chairman of the Internal Audit Unit;
- g. Conducting all actions and other activities regarding the management and ownership of the Company's assets, binding the Company with other company and/or vice versa, and representing the Company both inside and outside the court on all matters and events, with limitations as stipulated in the laws and regulations, Articles of Association and/or GMS Resolution.

Authority of Board of Directors Requiring Written Approval of the Board of Commissioners

- a. Guaranteeing fixed assets of the Company for short-term credit withdrawal;
- b. Cooperating with other business entities or other parties in the form of license cooperation, management contract, asset leasing, Joint Operations (KSO), Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BOWT), Build Transfer Operate (BTO), and other forms of cooperation with certain value or time as determined by the GMS;
- c. Receiving or giving medium/long-term loans, except loans (debts or receivables) from business transactions, and loans given to Company subsidiaries provided that the loans are reported to the BOC;
- d. Removing non-performing receivables and non-productive asset inventory from bookkeeping;
- e. Disposing of fixed productive assets with economic maturity that is normally valid in the industry in general, i.e. five years; and
- f. Determining organisation structure up until one level below the BOD.



Kewenangan Direksi yang Harus Mendapat Persetujuan dari RUPS dan Persetujuan Tersebut Diberikan Setelah Mendapat Tanggapan Tertulis dari Dewan Komisaris

1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang;
2. Melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain;
3. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
4. Melepaskan penyertaan modal pada Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan;
5. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
6. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*);
7. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah ((*Build Operate Transfer*-BOT), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer*-BOWT), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate*-BTO), dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS;
8. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan;
9. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan, kecuali aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 tahun;
10. Menetapkan *blueprint* organisasi Perseroan;
11. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;
12. Melakukan tindakan-tindakan lain yang belum ditetapkan dalam RKAP;
13. Membentuk yayasan, organisasi. Dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang dapat berdampak bagi Perseroan;
14. Pembebanan biaya Perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan, organisasi, dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan;
15. Pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS.

Authority of the Board of Directors Requiring Approval of the General Meeting of Shareholders after Obtaining Written Approval from the Board of Commissioners

1. Guaranteeing fixed assets of the Company for medium/long-term credit withdrawal;
2. Carrying out capital investment in other companies;
3. Establishing subsidiaries and/or joint ventures;
4. Removing capital investment in Subsidiaries and/or Joint Ventures;
5. Conducting consolidation, merger, acquisition, segregation, and dissolution of subsidiaries and/or joint ventures;
6. Binding the Company as a guarantor (*borg* or *avalist*);
7. Cooperating with other business entities or other parties in the form of license cooperation, management contract, asset leasing, Joint Operations, Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BOWT), Build Transfer Operate (BTO), and other forms of cooperation with the value or time exceeding the stipulations resolved by the GMS;
8. Not collecting non-performing loans that have been removed from bookkeeping;
9. Disposing and eliminating Company's fixed productive assets except for fixed productive assets with economic maturity of five years that are generally valid in the industry;
10. Stipulating the Company's organisation blueprint;
11. Stipulating and changing the Company's logo;
12. Conducting other actions which have not been established in RKAP;
13. Establishing foundations, organisations and/or groups, either directly or indirectly related to the Company, that may give an impact on the Company;
14. Imposing fixed and regular expenses of the Company for the activities of the foundation, organisation and/or group that either directly or indirectly related to the Company; and
15. Recommending representatives of the Company to become the candidates for members of the BOD and BOC of joint ventures and/or subsidiaries that give a significant contribution to the Company and/or have strategic values as determined in the GMS.



Hak-Hak Direksi

- a. Menerima gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya, termasuk santunan purnajabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.
- b. Menerima insentif atas prestasi kerjanya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS apabila Perseroan mencapai tingkat keuntungan.

Prinsip Penetapan Kebijakan Pengelolaan Perusahaan oleh Direksi

Umum

- a. Setiap kebijakan pengelolaan Perusahaan harus ditetapkan dalam suatu kebijakan tertulis.
- b. Kebijakan tertulis tersebut ditetapkan oleh Direksi, baik dengan keputusan Direksi atau keputusan Direktur terkait.

Prinsip-Prinsip Kebijakan Pengelolaan Perusahaan

Dalam rangka menggunakan dan menjalankan hak serta kewajiban pengelolaan Perseroan sehari-hari, Direksi wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Dalam hal kebijakan yang ditetapkan oleh Direksi secara kolegial merupakan sesuatu yang akan memengaruhi kinerja Perusahaan, maka kebijakan tersebut harus mendapat persetujuan rapat Direksi.
- b. Apabila anggota Direksi tidak mencapai kuorum untuk mengadakan rapat Direksi, namun harus mengambil keputusan yang akan memengaruhi kinerja Perusahaan, dapat ditetapkan sebuah kebijakan yang bersifat sementara sampai diputuskan dalam rapat Direksi selanjutnya.
- c. Dalam menetapkan kebijakan terhadap suatu permasalahan, setiap anggota Direksi wajib mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - 1) Itikad baik;
 - 2) Pertimbangan rasional dan informasi yang cukup;
 - 3) Pendalaman terhadap permasalahan serta berbagai kemungkinan perpecahan;
 - 4) Dibuat berdasarkan pertimbangan semata-mata untuk kepentingan Perseroan;
 - 5) Dalam menjalankan kewajiban sehari-hari, Direksi senantiasa mempertimbangkan kesesuaian tindakan dengan rencana dan tujuan Perseroan;
 - 6) Pendelegasian wewenang anggota Direksi kepada karyawan atau pihak lain untuk melakukan

Rights of the Board of Directors

- a. Receiving salaries including facilities and/or other allowances, including post-employment benefits of which the amount shall be determined by the GMS.
- b. Receiving incentives for their work achievement of which the amount shall be determined by the GMS if the Company achieve a certain level of profitability.

General Principles to Determine the Company Management Policies

General

- a. Each policy regarding the Company's management shall be determined in a written form.
- b. Such written policy shall be determined by the BOD through either BOD resolution or the resolution of the concerned Director.

Principles of Company Management Policies

To use and implement the rights and obligations to manage the Company routinely, the BOD is required to meet the following principles:

- a. In terms of policies set collectively by the BOD that will have the power to affect the Company's performance, the policies need to obtain approval through the meeting of the BOD.
- b. If the meeting of the BOD does not reach the quorum but decisions that may affect the Company's performance is required, the BOD may determine a temporary policy regarding the matter to be discussed until the matter is resolved in the following meeting of the BOD.
- c. In determining policies regarding an issue, each member of the BOD is required to consider the following principles:
 - 1) Goodwill.
 - 2) Rational consideration and adequate information.
 - 3) Investigation on the issue as well as various resolutions that can be taken.
 - 4) The resolution shall be made based on thorough consideration for the sake of the Company's interests.
 - 5) In conducting daily obligations, the BOD shall always consider the appropriateness of their actions to the Company's plans and objectives.
 - 6) Delegation of the authority of members of the BOD to the employees of the Company or other



perbuatan hukum atas nama Perseroan wajib dinyatakan dalam bentuk dokumen tertulis dan disetujui oleh Direktur Utama;

- 7) Bentuk-bentuk kebijakan pengurusan perusahaan seperti surat keputusan dan lain-lain, diatur dalam dokumen Perseroan sendiri.

Pembidangan Tugas Direksi

Direksi bertugas secara kolegial, namun agar lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas, dilakukan pembidangan tugas di antara anggota Direksi. Pembidangan tugas di antara Direksi tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi secara kolegial dalam pengurusan Perusahaan. Pembidangan tugas Direksi ditetapkan oleh RUPS. Penjabaran lebih rinci dari pembidangan tugas tersebut ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui persetujuan penetapan dan penyesuaian struktur organisasi.

Nomenklatur penamaan Direksi yang digunakan mengacu pada Keputusan Menteri BUMN No. SK-244/MBU/09/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Pelindo III; Keputusan Menteri BUMN No. SK-289/MBU/11/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Pelindo III; dan Keputusan Menteri BUMN No. SK-219/MBU/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III. Informasi atas tugas masing-masing Direksi berdasarkan nomenklatur penamaan Direktur Perusahaan adalah sebagai berikut:

parties to carry out legal action on behalf of the Company shall be stated in a written document and approved by the President Director.

- 7) Forms of Company's management policies, such as decrees and so on, are regulated in a separate document of the Company.

Scope of Duties Of The Board Of Directors

The BOD has a collegial duty; however, to create effectiveness and efficiency within the BOD, the duties are divided among the members of the BOD of the Company as determined by the GMS. Distribution of scope of duties of each member does not eliminate the collegial responsibility of the BOD in managing the Company. Detailed descriptions on the duties are determined by the BOC through approval for the determination and adjustment of organisation structure.

The Company adjusted its nomenclature of the BOD which was approved through the Decree of the Minister of SOE No. SK-244/MBU/09/2018 dated September 19, 2018 on Dismissal, Changes in Position Nomenclature, Reassignment, and Appointment of the BOD Members of Pelindo III; the Decree of Minister of SOE No. SK-289/MBU/11/2018 dated November 5, 2018 on the Changes in Position Nomenclature, Reassignment, and Appointment of the BOD of Pelindo III; and the Decree of the Minister of SOE No. SK-219/MBU/10/2019 dated October 16, 2019 on the Dismissal and Appointment of Company BOD Members in PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). Information on the duties of each Director as well as changes on the nomenclature is described in the following table.

Nama / Name	Jabatan / Position	Tugas / Duty	Bidang yang Dibawahi / Directorate
U. Saefudin Noer	Direktur Utama	Pembuat kebijakan umum Perseroan, pengambil keputusan strategi Perseroan, dan sebagai koordinator Direksi.	<ul style="list-style-type: none"> • Satuan Pengawasan Intern • Sekretaris Perusahaan
	President Director	The Company's general policymaker, strategic decision-maker, and the BOD coordinator.	<ul style="list-style-type: none"> • Internal Audit • Corporate Secretary
Putut Sri Muljanto	Direktur Operasi dan Komersial	Melaksanakan pembinaan dalam kegiatan pelayanan jasa kapal, barang, terminal, <i>miscellaneous service</i> ; manajemen risiko dan mutu, kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan, <i>International Ship and Port Security</i> (ISPS) Code, peningkatan dan kerja sama usaha, serta manajemen properti.	<ul style="list-style-type: none"> • Subdit Pemasaran • Subdit Teknologi Informasi dan Komunikasi • Subdit Operasi • Subdit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko



Nama / Name	Jabatan / Position	Tugas / Duty	Bidang yang Dibawahi / Directorate
	Operations and Commercial Director	Guiding the ship service, goods service, terminal service, miscellaneous service; risk and quality management, occupational health and safety and environment, International Ship and Port Security (ISPS) Code, business improvement and cooperation, as well as property management.	<ul style="list-style-type: none"> Marketing Sub-Directorate Information and Communication Technology Sub-Directorate Operations Sub-Directorate Risk Management and Management Systems Sub-Directorate
Boy Robyanto	Direktur Teknik	Melaksanakan pembinaan dalam kegiatan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas kolam pelabuhan, investasi, studi kelayakan, bangunan pelabuhan, serta bangunan sipil.	<ul style="list-style-type: none"> Subdit Peralatan Pelabuhan Subdit Fasilitas Pelabuhan Subdit Supervisi Investasi Teknik
	Engineering Director	Guiding provision and maintenance of port facilities and pools, investments, feasibility studies, port buildings, and civil buildings.	<ul style="list-style-type: none"> Port Equipment Sub-Directorate Port Facility Sub-Directorate Engineering Investment Supervision Sub-Directorate
Edi Priyanto	Direktur Sumber Daya Manusia	Melaksanakan pembinaan dalam kegiatan perencanaan dan pengembangan SDM, sistem kepegawaian dan organisasi, kesejahteraan, administrasi kepegawaian, penilaian kinerja pegawai, proses pengadaan barang dan jasa, bidang umum dan rumah tangga, serta pengelolaan Kantor Pusat.	<ul style="list-style-type: none"> Subdit Strategi dan Kesiapan SDM Subdit Pelayanan SDM dan HSSE Subdit Umum/Kepala Kantor Pusat Subdit Pengadaan Barang dan Jasa Subdit Hukum
	Human Capital Director	Guiding Human Capital planning and development, staffing and organisation system, welfare, employee administration, employee performance assessment, goods and services procurement, general affairs and householding, as well as Head Office management.	<ul style="list-style-type: none"> Human Capital Strategy and System Sub-Directorate Human Capital and HSSE Services Sub-Directorate General Sub-Directorate/Head of Head Office Procurement of Goods and Services Sub-Directorate Legal Sub-Directorate
Endot Endrardono	Direktur Keuangan	Melaksanakan pembinaan dalam kegiatan keuangan Perusahaan, meliputi akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, utang piutang, aset Perusahaan, dan pembinaan Anak Perusahaan.	<ul style="list-style-type: none"> Subdit Akuntansi dan Anggaran Subdit Keuangan Korporat, Tresuri, dan Perpajakan Subdit Shared Service Center Subdit Pembinaan Anak Perusahaan
	Finance Director	Guiding the Company's financial activities, covering management and financial accounting, accounts payable, Company assets, and Subsidiaries guidance.	<ul style="list-style-type: none"> Accounting and Budget Sub-Directorate Corporate, Treasury, and Taxation Finance Sub-Directorate Shared Service Centre Sub-Directorate Subsidiary Development Sub-Directorate
Kokok Susanto	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis	Melaksanakan pembinaan dalam kegiatan pengembangan bisnis Perseroan; mulai dari perencanaan, pelaksanaan kerja sama, pemantauan kerja sama, manajemen perubahan dan perencanaan strategis, dan kinerja perusahaan.	<ul style="list-style-type: none"> Subdit Pengembangan Bisnis Subdit Manajemen Perubahan Subdit Perencanaan Strategis dan Kinerja Perusahaan
	Business Transformation and Development Director	Guiding the Company's business development; starting from planning, implementing cooperation, monitoring cooperation, change management and strategic planning, and company performance.	<ul style="list-style-type: none"> Business Development Sub-Directorate Change Management Sub-Directorate Strategic Planning and Company Performance Sub-Directorate



Pedoman Kerja Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan perusahaan, Direksi Perseroan berpedoman kepada Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik (*best practices*) GCG.

Perseroan memiliki pedoman GCG yang disahkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tanggal 3 September 2018 tentang Reviu dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual* dan *Code of Corporate Governance*). Secara rinci, pedoman kerja Direksi diatur dalam Bab 3 *Board Manual* yang secara garis besar mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Persyaratan, keanggotaan, dan masa jabatan Direksi
- Tanggung jawab Direksi
- Tugas Direksi
- Rincian tugas Direksi
- Kewenangan Direksi
- Hak-hak Direksi
- Prinsip penetapan kebijakan pengelolaan Perusahaan oleh Direksi
- Pembidangan tugas Direksi
- Organ pendukung Direksi dalam implementasi GCG
- Penilaian kinerja Direksi

Program Orientasi Direksi

Perseroan memberlakukan program orientasi bagi anggota Direksi baru guna mengintegrasikan pemahaman, perkembangan terkini, dan latar belakang mengenai Perseroan dalam pelaksanaan tugas Direksi. Dalam hal ini, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab mengadakan program orientasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN, untuk kemudian diturunkan menjadi CoCG.

Board Manual of the Board of Directors

In carrying out the duties and responsibilities regarding the Company's management, the BOD refers to the Board Manual of the BOC and BOD formulated based on the principles of corporate laws, Articles of Association, prevailing laws and regulations, directives from the Shareholders as well as GCG best practices.

The Company has also established a GCG guideline through the Joint Decree of the BOC and BOD of Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 dated September 3, 2018 on Review and Revision of GCG (Board Manual dan Code of Corporate Governance). In detail, the work guideline of the BOD is stipulated in Chapter 3 of Board Manual which generally covers the following:

- Requirement, membership, and term of office of the BOD
- Responsibilities of the BOD
- Duties of the BOD
- Details of the BOD's duties
- Authority of the BOD
- Rights of the BOD
- Principles to determine the Company's management policies by the BOD
- Division of duties of the BOD
- Supporting organs of the BOD in the implementation of GCG
- Assessment of the BOD performance

Board of Directors Orientation Program

The Company implements an orientation program for new members of the Board of Directors to integrate the understanding, latest developments, and background regarding the Company in the implementation of the duties of the Board of Directors. In this case, the Corporate Secretary is responsible for organizing an orientation program as stipulated in the Regulation of the Minister of BUMN No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in BUMN, which was later derived to CoCG.



Program orientasi dan pengenalan bagi Direksi baru meliputi materi-materi sebagai berikut:

1. Sejarah Perusahaan
2. Wilayah kerja Perusahaan
3. Struktur organisasi Perseroan, SDM, dan entitas Anak Perusahaan
4. Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan
5. Laporan keuangan Perusahaan
6. Tata kelola Perusahaan
7. Rencana jangka pendek dan panjang Perusahaan

Program orientasi anggota Direksi baru dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2020 kepada U. Saefudin Noer, Boy Robyanto, Edi Priyanto, Endot Endrardono, dan Kokok Susanto.

The orientation and introduction program for the new Directors includes the following materials:

1. Company History
2. Company work area
3. The Company's organisational structure, Human Capital, and Subsidiaries
4. Corporate Vision, Mission and Culture
5. Financial statements of the Company
6. Corporate Governance
7. Short-term and long-term plans of the Company

The orientation program for new members of the Board of Directors was held on June 23, 2020 for U. Saefudin Noer, Boy Robyanto, Edi Priyanto, Endot Endrardono, and Kokok Susanto.

Materi Program Orientasi Direksi

Board of Directors Orientation Program Material

Aspek Tata Kelola Perusahaan / Governance Aspects	Realisasi Materi / Material Realization	Keterangan / Information
Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan berbagai masalah strategis lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Sejarah Perseroan • Wilayah kerja Perseroan • Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan • Laporan Keuangan Perseroan • Rencana Jangka Pendek dan Panjang Perusahaan 	Terpenuhi
Description of the Company concerning the objectives, nature, scope of activity, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive positions, risks, and other strategic issues.	<ul style="list-style-type: none"> • Company History • Company work area • Corporate Vision, Mission and Culture • Financial statements of the Company • Short-term and long-term plans of the Company 	Fulfilled
Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan Implementation of GCG principles by the Company	Tata kelola Perusahaan Corporate governance	Terpenuhi Fulfilled
Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian intern, serta tugas dan peran Komite Audit dan komite-komite lain yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Struktur organisasi Perseroan, SDM dan entitas Anak Perusahaan	Terpenuhi
Explanation related to the delegated authority, internal and external audit activities, internal control system and policy, as well as duties and roles of the Audit Committee and other committees established by the BOC.	The Company's organisational structure, Human Capital, and Subsidiaries	Fulfilled
Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Description of duties and responsibilities of the BOC and BOD.		Terpenuhi Fulfilled
Program pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perseroan atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perseroan di mana program tersebut dilaksanakan. An orientation programme can be given in the form of presentation, meeting or visit the Company's facilities, or any other programme deemed appropriate with the Company's condition where it is implemented.	Direksi mendapatkan pengenalan Perseroan di Kantor Pusat dan juga melakukan kunjungan ke Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan. The Directors get an introduction to the Company at the Head Office and also visits Port Branches and Subsidiaries.	Terpenuhi Fulfilled

**Ringkasan Pelaksanaan Program Orientasi Tahun 2020****Summary of Implementation of the 2020 Orientation Program**

Peserta / Participant	Topik / Topics	Penyelenggara / Organizer	Waktu dan Tempat / Date and Venue	Durasi / Duration	Biaya / Cost
<ul style="list-style-type: none"> • U. Saefudin Noer • Edi Priyanto • Boy Robyanto • Endot Endrardono • Kokok Susanto 	Pengenalan Perusahaan, Anak Perusahaan dan Evaluasi Kinerja s.d Mei 2020 / Introduction of the Company, Subsidiaries and Performance Evaluation up to May 2020	Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary	23 Juni 2020 dan Virtual Meeting June 23, 2020 and Virtual Meeting	2 jam / hours	-

Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) Direksi

Seluruh anggota Direksi telah menyelesaikan dan lulus uji kelayakan dan kepatutan (*fit & proper test*) sebagaimana diatur dalam prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (*fit & proper test*) bertujuan untuk menilai dan mengukuhkan integritas, kualifikasi, kompetensi, dan kelayakan anggota Direksi dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan kaidah dan prinsip GCG yang berlaku.

Fit & Proper Test for the Board of Directors

All members of the Board of Directors have completed and passed the fit & proper test as stipulated in the principles of good corporate governance and applicable laws and regulations. The implementation of the fit & proper test aims to assess and confirm the integrity, qualifications, competence and worthiness of members of the Board of Directors in carrying out their functions and responsibilities in accordance with the applicable GCG rules and principles.

Nama/ Name	Jabatan / Position	Periode Jabatan / Term of Office	Penyelenggara Uji Kelayakan dan Kepatutan / Organizer
U. Saefudin Noer	Direktur Utama / President Director	Pertama / First	Kementerian BUMN / Ministry of SOE
Putut Sri Muljanto	Direktur Operasi dan Komersial / Operations and Commercial Director	Pertama / First	Kementerian BUMN / Ministry of SOE
Boy Robyanto	Direktur Teknik / Engineering Director	Pertama / First	Kementerian BUMN / Ministry of SOE
Edi Priyanto	Direktur Sumber Daya Manusia / Human Capital Director	Pertama / First	Kementerian BUMN / Ministry of SOE
Endot Endrardono	Direktur Keuangan / Finance Director	Pertama / First	Kementerian BUMN / Ministry of SOE
Kokok Susanto	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis / Business Transformation and Development Director	Pertama / First	Kementerian BUMN / Ministry of SOE

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Direksi

Direksi mengadakan rapat dan pertemuan, baik rapat internal Direksi maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris serta Komite-Komite. Rapat Direksi umumnya diagendakan secara berkala dalam 1 tahun buku untuk menindaklanjuti berbagai keperluan operasional yang dijalankan Direksi. Sementara itu, rapat gabungan ditujukan untuk memberikan laporan dan penerimaan masukan kepada Dewan Komisaris dalam mendukung

Frequency and Attendance Rate Of The Board Directors in Meetings

The BOD holds both internal and joint meetings with the BOC and Committee. The BOD meetings are regularly scheduled throughout one fiscal year to follow-up various supervisory and advisory needs on the operational activities conducted by the BOD and the management. Meanwhile, joint meetings aim to provide the report and obtain opinions from the BOC in supporting the supervision on the Company's operational activity. BOD



aktivitas pengawasan atas jalannya kegiatan operasional Perusahaan. Rapat Direksi juga dapat diselenggarakan di luar agenda yang telah ditetapkan jika terdapat hal-hal yang mendesak yang membutuhkan peran dan tugas-tugas Direksi di dalamnya.

Publikasi Rapat Direksi dan Agenda Rapat

Berdasarkan dokumen *Code of Corporate Governance* pada BAB VI Proses-Proses Corporate Governance, disebutkan bahwa rapat Direksi diadakan setiap kali dianggap perlu, namun sekurang-kurangnya sekali dalam 1 bulan. Kemudian, berdasarkan Surat Edaran Direksi No. SE.31/TR.0101/P.III/2017 tanggal 16 Agustus 2017, pelaksanaan Rapat Direksi dilaksanakan setiap hari Senin setiap minggunya, sedangkan rapat Manajemen/Manajemen terbatas yang melibatkan pejabat 1 tingkat di bawah Direksi, dengan rincian sebagai berikut:

meetings may also be held outside of the set agenda should other urgent matters require the roles and duties of the BOD.

Publication Of Board Of Directors Meetings

Based on the Code of Corporate Governance document in Chapter VI of Corporate Governance Processes, it is stated that the BOD meetings are held whenever deemed necessary, but at least once a month. Then, based on the BOD Circular No. SE.31/TR.0101/P.III-2017 dated August 16, 2017, Implementation of BOD Meetings is held every Monday every week, while Management/Management meetings are limited to involving officials at 1 level below the BOD, as follows:

Rapat Manajemen Terbatas Kantor Pusat / Limited Management Meetings In Head Office

Frekuensi / Frequency	Dua minggu sekali tiap bulan (minggu pertama dan minggu ketiga), maksimal 2 jam untuk 1 topik pembahasan / Once every two weeks in every month (the first and third week of every month), for 2 hours at maximum to discuss 1 topic
Hari Rapat / Meeting Days	Diutamakan, Senin – Selasa / On Monday or Tuesday (prioritised)
Pemimpin Rapat / Chairman of the Meeting	Direktur Utama Pelindo III / President Director of Pelindo III
Peserta / Participants	Direksi, Senior Vice President terkait, General Manager terkait, serta Direksi Anak Perusahaan/Cucu Perusahaan/Perusahaan Afiliasi dan Dana Pensiun terkait / The BOD, related Senior Vice Presidents, related General Managers, as well as related BOD of Subsidiaries/ Second-Tier Subsidiaries/Affiliations and Pension Funds.
Tempat / Venue	Kantor Pusat Pelindo III / Head Office of Pelindo III
Media	Pertemuan langsung dan/atau Tele/Video / Direct meeting and/or Tele/Video Conference
Notulis / Minute-Taker	Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary

Rapat Manajemen Kantor Pusat / Management Meetings in Head Office

Frekuensi / Frequency	Dua minggu sekali tiap bulan (minggu kedua dan minggu keempat), maksimal 1 jam untuk 1 topik pembahasan / Once every two weeks in every month (the second and fourth week of every month), for 1 hour at maximum to discuss 1 topic
Hari Rapat / Meeting Days	Diutamakan, Senin / Monday (prioritised)
Pemimpin Rapat / Chairman of the Meeting	Direktur Utama/Direksi Pelindo III / President Director/BOD of Pelindo III
Peserta / Participants	Direksi, Senior Vice President terkait, General Manager terkait, serta Direksi Anak Perusahaan/Cucu Perusahaan/Perusahaan Afiliasi dan Dana Pensiun terkait / The BOD, related Senior Vice Presidents, related General Managers, as well as related BOD of Subsidiaries/ Second-Tier Subsidiaries/Affiliations and Pension Funds.
Tempat / Venue	Kantor Pusat Pelindo III / Head Office of Pelindo III
Media	Pertemuan langsung dan/atau Tele/Video / Direct meeting and/or Tele/Video Conference
Notulis / Minute-Taker	Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary



Publikasi Hasil Rapat Direksi

Berdasarkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tanggal 3 September 2018 tentang Reviu dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual* dan *Code of Corporate Governance*), mekanisme publikasi rapat Direksi adalah sebagai berikut:

1. Panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 hari sebelum rapat diadakan.
2. Panggilan rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
3. Setiap anggota Direksi berhak untuk mengusulkan agenda-agenda bagi rapat yang akan dilaksanakan.
4. Panggilan rapat Direksi tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.
5. Pemanggilan untuk rapat Direksi yang dilakukan sewaktu-waktu dibuat oleh pihak yang meminta dijadikannya rapat dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja sebelum rapat dilaksanakan dan ditujukan kepada semua anggota Direksi dan Sekretaris Perusahaan dengan mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan agenda rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat Direksi

Berdasarkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tanggal 3 September 2018 tentang Reviu dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual* dan *Code of Corporate Governance*), mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat Direksi adalah sebagai berikut:

1. Rapat diawali dengan melakukan evaluasi atas pelaksanaan hasil rapat sebelumnya.
2. Semua keputusan dalam rapat Direksi harus berdasarkan itikad baik, pertimbangan rasional, dan telah melalui investigasi mendalam terhadap hal-hal yang relevan, informasi yang cukup dan bebas dari benturan kepentingan, serta dibuat secara independen oleh masing-masing anggota Direksi.
3. Keputusan rapat Direksi ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak.

Publication of the Board of Directors Meeting Results

Based on the Joint Decree of the BOC and BOD of Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC2018 dated 3 September 2018 on the Review and Revision of Corporate Governance Guide (Board Manual and Code of Corporate Governance), the publication mechanism of BOD meetings are as follows:

1. Summons for the BOD meeting shall be conducted in writing to the members of the BOD entitled to represent the Company, and shall be delivered in no later than five days before the meeting is held.
2. The summons for the BOD meetings shall include the agenda, date, time and location of the meeting.
3. Each member of the BOD shall have the right to propose agendas for the meetings to be held.
4. Summons for the BOD meetings shall not be required if all members of the BOD are present at the meeting.
5. The summons for the BOD meetings conducted at any time is made by a party requesting the meetings within a period of no later than three working days before the meetings are held, and is addressed to all members of the BOD and the Corporate Secretary by stating the date, time, place, and agenda of the meeting.

Decision-Making Mechanism at the Board of Directors Meeting

Based on the Joint Decree of the BOC and BOD of Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC2018 dated 3 September 2018 on the Review and Revision of Corporate Governance Guide (Board Manual and Code of Corporate Governance), the decision-making mechanism in BOD meetings are as follows:

1. The meeting begins with an evaluation of the implementation of the previous meeting.
2. All decisions made in the BOD meetings shall be in good faith and rational considerations and shall have been thoroughly investigated on relevant matters, sufficient information and free from conflict of interest, and are independently made by each member of the BOD.
3. The decision made in the BOD meetings shall be determined by consensus. If no agreement is reached, the decision shall be determined by majority vote.



4. Setiap anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1 suara dan ditambah 1 suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya.
5. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Apabila jumlah suara setuju atau tidak setuju sama, maka Pimpinan Rapat yang menentukannya dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban.
6. Suara blangko (*abstain*) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat Direksi.
7. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
8. Keputusan hasil rapat yang diambil diterima sebagai keputusan bersama (*kolegial*).
9. Jika terdapat anggota Direksi yang mempunyai pendapat yang berbeda terhadap keputusan yang dibuat, maka pendapat tersebut harus dicantumkan dalam risalah rapat sebagai bentuk dari *dissenting opinion*.
10. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai hasil keputusan yang dimaksud dan seluruh anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam rapat Direksi.
4. Each member of the BOC is entitled to cast one vote plus one vote of the represented Director.
5. If decisions based on deliberations for consensus are not reached, they shall be made by majority vote. If the number of approving votes and disapproving votes is the same, the Chairman shall determine the decisions with due regard to the provisions on accountability.
6. A blank vote shall be considered to agree with the proposal submitted in the BOD meeting.
7. Invalid votes shall be considered absent and shall not be counted in determining the total votes cast in the meeting.
8. Meeting decisions that are made are regarded as a collegial decision.
9. If any member of the BOD has a different opinion on the decision made, such opinion shall be included in the minutes of the meeting as a form of dissenting opinion.
10. The BOD may also take a valid and binding decision without holding a BOD Meeting, provided that all members of the BOD have been notified in writing of the concerned decision and that all members of the BOD give their approval for the proposal in writing and sign the agreement. Decisions made in such manner shall have the same power as the decisions made legally in the BOD meeting.



Rekapitulasi Rapat Direksi Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, Direksi mengadakan 24 (dua puluh empat) kali rapat internal dengan uraian sebagai berikut:

Recapitulation of the 2020 Board of Directors Meeting

Throughout 2020, the Board of Directors held 24 (twenty-four) internal meetings with the following descriptions:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Number of Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	% Kehadiran / Attendance %
Doso Agung	Direktur Utama / President Director	8	8	100
U. Saefudin Noer		16	16	100
Putut Sri Muljanto	Direktur Operasi dan Komersial / Operation and Commercial Director	24	24	100
Joko Noerhuda	Direktur Teknik / Engineering Director	8	8	100
Boy Robyanto		16	16	100
Toto Heli Yanto	Direktur Sumber Daya Manusia / Human Capital Director	8	8	100
Edi Priyanto		16	16	100
Irvandi Gustari	Direktur Keuangan / Finance Director	8	8	100
Endot Endrardono		16	16	100
Toto Nugroho	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis / Business Transformation and Development Director	8	8	100
Kokok Susanto		16	16	100

Risalah Rapat Direksi Tahun 2020

Minutes of Meeting of The Board of Directors

No.	Tanggal / Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Kehadiran / Attendance
1	10 Januari 2020 / January 10, 2020	1. Rencana Land Clearing Pelabuhan Multipurpose Labuan Bajo oleh RI - 1 2. Finalisasi Desain Interior Tower Poros Maritim 3. Penyusunan Strategi Transformasi Budaya oleh Konsultan DOI 4. Update Progres Rencana Pembangunan Kawasan Logistik di Pelabuhan Benoa 5. Empty Inbound Scheme and Early Stack Project	1. Land Clearing Plan for Labuan Bajo Multipurpose Port by RI – 1 2. Finalization of Tower Poros Maritim Interior Design 3. Development of a Cultural Transformation Strategy by DOI Consultants 4. Update on the Progress of the Logistics Area Development Plan at Benoa Port 5. Empty Inbound Scheme and Early Stack Project
2	13 Januari 2020 / January 13, 2020	1. Rencana FGD Benoa Integrated Maritime Tourism Hub 2. Rencana Land Clearing Terminal Multipurpose Labuan Bajo	1. Benoa Integrated Maritime Tourism Hub FGD Plan 2. Labuan Bajo Multipurpose Terminal Land Clearing Plan
3	14 Januari 2020 / January 14, 2020	Pembahasan Permasalahan DP4 dan DP3	Discussion of DP4 and DP3 Issues



No.	Tanggal / Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda		Kehadiran / Attendance
4	15 Januari 2020 / January 15, 2020	Pembahasan Persiapan RUPS	Discussion on GMS Preparation	<ul style="list-style-type: none"> • Doso Agung • Putut Sri Muljanto • Joko Noerhuda • Toto Heli Yanto • Irvandi Gustari • Toto Nugroho
5	5 Maret 2020 / March 5, 2020	1. Pembahasan Logo Tower Poros Maritim 2. Pembahasan Pemanfaatan Lahan Pelindo III 3. Pembahasan Cold Storage Terminal Teluk Lamong 4. Kinerja Keuangan Korporasi 5. Pemanfaatan Pelabuhan Semen Gresik	1. Discussion of the Tower Poros Maritim Logo 2. Discussion on Pelindo III's Land Use 3. Discussion of Teluk Lamong Terminal Cold Storage 4. Corporate Financial Performance 5. Utilization of Semen Gresik Port	<ul style="list-style-type: none"> • Doso Agung • Putut Sri Muljanto • Joko Noerhuda • Toto Heli Yanto • Irvandi Gustari • Toto Nugroho
6	18 Maret 2020 / March 18, 2020	Pembahasan tindak lanjut kinerja perusahaan menghadapi permasalahan global	Discussion of the follow-up to the Company's performance in facing global issues	<ul style="list-style-type: none"> • Doso Agung • Putut Sri Muljanto • Joko Noerhuda • Toto Heli Yanto • Irvandi Gustari • Toto Nugroho
7	22 April 2020 / April 22, 2020	Pembahasan Tindak Lanjut Pelepasan FRU Lumbung Dewata PT Pelindo Energi Logistik	Discussion on the follow-up to the release of the Lumbung Dewata FRU from PT Pelindo Energi Logistik	<ul style="list-style-type: none"> • Doso Agung • Putut Sri Muljanto • Joko Noerhuda • Toto Heli Yanto • Irvandi Gustari • Toto Nugroho
8	12 Mei 2020 / May 12, 2020	1. Pembahasan Materi BOD BOC Mei 2020 2. Pembahasan Covid-19 Dengan Menteri Perhubungan	1. BOD BOC Material Discussion May 2020 2. Discussion on Covid-19 with the Minister of Transportation	<ul style="list-style-type: none"> • Doso Agung • Putut Sri Muljanto • Joko Noerhuda • Toto Heli Yanto • Irvandi Gustari • Toto Nugroho
9	21 Juni 2020 / June 21, 2020	1. Materi Paparan BOC-BOD 2. Revisi RKAP Pelindo III 3. Proyek Prioritas & proyek strategis PT Pelindo III 4. Update klaim asuransi MV Soul of Luck	1. BOC-BOD Presentation Material 2. Revision of Pelindo III RKAP 3. Priority Projects & strategic projects of PT Pelindo III 4. Update on MV Soul of Luck insurance claim	<ul style="list-style-type: none"> • U. Saefudin Noer • Putut Sri Muljanto • Boy Robyanto • Edi Priyanto • Endot Endardono • Kokok Susanto
10	23 Juni 2020 / June 23, 2020	Perkenalan Direksi Anak Perusahaan dan Evaluasi Kinerja s.d Mei 2020	Introduction of the Directors of Subsidiaries and Performance Evaluation until May 2020	<ul style="list-style-type: none"> • U. Saefudin Noer • Putut Sri Muljanto • Boy Robyanto • Edi Priyanto • Endot Endardono • Kokok Susan to
11	2 Juli 2020 / July 2, 2020	1. Pembahasan Materi Paparan RUPS 2. Pembahasan Pending Matters di Masing-masing Direktorat 3. Lain-lain	1. Discussion of GMS Presentation Material 2. Discussion of Pending Matters in Each Directorate 3. Others	<ul style="list-style-type: none"> • U Saefudin Noer • Putut Sri Muljanto • Boy Robyanto • Edi Priyanto • Endot Endardono • Kokok Susanto



No.	Tanggal / Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Kehadiran / Attendance
12	16 Juli 2020 / July 16, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan Kreditor Penarikan Pinjaman Jangka Pendek 2. Penghapusan Aktiva Tetap PT BJTI Tahun 2020 3. Rencana MoU Surat Elektronik dengan BSSN 4. Lain-lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selection of Creditors Withdrawal of Short-Term Loans 2. Write-off of PT BJTI's Fixed Assets in 2020 3. Plan of E-mail MoU with BSSN 4. Others <ul style="list-style-type: none"> • U. Saefudin Noer • Putut Sri Muljanto • Boy Robyanto • Edi Priyanto • Endot Endrardono • Kokok Susanto
13	28 Juli 2020 / July 28, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Progres Percepatan Pembangunan Pelabuhan Labuan Bajo I Wae Kelambu 2. Pembagian Tugas Direksi Pelindo III 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Labuan Bajo I Wae Kelambu Port Acceleration Progress 2. Division of Duties of the Board of Directors of Pelindo III <ul style="list-style-type: none"> • U. Saefudin Noer • Putut Sri Muljanto • Boy Robyanto • Edi Priyanto • Endot Endrardono • Kokok Susan to
14	29 Juli 2020 / July 19, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut : BMTH, Gilimas, Office Tower, Labuan Bajo 2. Usu Ian STO Kantor Pusat dan Regional 3. Pembahasan Review Global Bond 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Follow up : BMTH, Gilimas, Office Tower, Labuan Bajo 2. Headquarters and Regional Office STO Proposal 3. Discussion of Global Bond Review <ul style="list-style-type: none"> • U. Saefudin Noer • Putut Sri Muljanto • Boy Robyanto • Edi Priyanto • Endot Endrardono • Kokok Susan to
15	05 Agustus 2020 / August 5, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Juni/Juli dan Proyeksi s.d. September 2020; 2. Progress dan Tindak Lanjut Benoa, Labuan Bajo, Gilimas, Banyuwangi, Batang, Kendal dan Semarang; 3. Progress SOM dan Covid-19, Alignment Core Values Pelindo3 dengan Internalisasi Akhlak, dll; 4. Persiapan 17 Agustus 2020; 5. Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. June/July Performance and Projection up to September 2020; 2. Progress and Follow-up of Benoa, Labuan Bajo, Gilimas, Banyuwangi, Batang, Kendal and Semarang; 3. Progress of SOM and Covid-19, Pelindo 3's Alignment Core Values with Moral Internalization, etc; 4. August 17, 2020 preparation; 5. Others. <ul style="list-style-type: none"> • U Saefudin Noer • Putut Sri Muljanto • Boy Robyanto • Edi Priyanto • Endot Endrardono • Kokok Susanto
16	12 Agustus 2020 / August 12, 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Isu Strategis Pembangunan JIPE (Agenda BOD BOC); 2. Kinerja Juli 2020 dan Proyeksi s.d. September 2020; 3. Progress dan Tindak Lanjut Benoa, Labuan Bajo, Gilimas, Banyuwangi, Batang, Kendal, Semarang; 4. Progress SOM dan Covid-19 Alignment Core Values Pelindo 3 dengan Internalisasi Akhlak dll; 5. Persiapan 17 Agustus 2020; 6. Lain-lain. <ul style="list-style-type: none"> a. Pembahasan Pembangunan Lanjutan 450 m Fly Over teluk Lamong b. Kontrak Perpanjangan dengan PT Barata c. Pembahasan Core Business Anak Cucu Pelindo III 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discussion of Strategic Issues for JIPE Development (BOD BOC Agenda); 2. July 2020 Performance and Projection tp to September 2020; 3. Progress and Follow-up of Benoa, Labuan Bajo, Gilimas, Banyuwangi, Batang, Kendal, Semarang; 4. Progress of SOM and Covid-19, Pelindo 3's Alignment Core Values with Moral Internalization, etc; 5. August 17, 2020 preparation; 6. Others. <ul style="list-style-type: none"> a. Discussion on Advanced Development 450m Flyover in Teluk Lamong b. Contract Extension with PT Barata c. Discussion of the Core Business of <ul style="list-style-type: none"> • U Saefudin Noer • Putut Sri Muljanto • Boy Robyanto • Edi Priyanto • Endot Endrardono • Kokok Susanto



No.	Tanggal / Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Kehadiran / Attendance
17	7 September 2020 / September 7, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Persiapan RDP tentang PMN Perkembangan dan Tindak Lanjut Labuhan Bajo, Benoa, Gilimas, Batang/Kendal/Tj Emas, 011 Kupang & Toi Laut Persiapan PQ Patio and Port Operator (Patimban Port) & Pengurusan BUP TPS, BJTI dan TTL (oleh masing-masing Di rut) Penyelesaian hukum dan PK MA case Semarang SOM: Covid, AKHLAK, pakaian kerja Lain-lain 	<ol style="list-style-type: none"> Preparation of RDP on PMN Development and Follow-up of Labuhan Bajo, Benoa, Gilimas, Batang/Kendal/Tj Emas, 011 Kupang & Sea Toll Preparation of PQ Patio and Port Operator (Patimban Port) & Management of BUP TPS, BJTI and TTL (by each Director) Legal settlement and judicial review of the Semarang case SOM: Covid, morals, work uniform Others <ul style="list-style-type: none"> • U Saefudin Noer • Putut Sri Muljanto • Boy Robyanto • Edi Priyanto • Endot Endrardono • Kokok Susanto
18	16 September 2020 / September 16, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Persiapan Labuan Bajo, Gilimas, Batang, Kendal, Tg Emas Persiapan Operasional Terminal Multipurpose Labuan Bajo dan Terminal Gili Mas Persiapan BOC BOD 17 September 2020 Boom Marina Banyuwangi 	<ol style="list-style-type: none"> Preparation of Labuan Bajo, Gilimas, Batang, Kendal, Tg Emas Operational Preparation of Labuan Bajo Multipurpose Terminal and Gili Mas Terminal Preparation for BOC BOD for September 17, 2020 Boom Marina Banyuwangi <ul style="list-style-type: none"> • U. Saefudin Noer • Putut Sri Muljanto • Boy Robyanto • Edi Priyanto • Endot Endrardono • Kokok Susanto
19	22 September 2020 / September 22, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Persiapan FGD Pembahasan Kebijakan strategi Pembiayaan Investasi Tahun 2021 bersama Komisi XI; Progress PSN (BMTH, Labuan Bajo, Gilimas); SDM, Covid, AKHLAK; Lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> Preparation of FGD Discussion of Investment Financing Strategy Policy in 2021 with Commission XI; PSN Progress (BMTH, Labuan Bajo, Gilimas); HR, Covid, AKHLAK; Others. <ul style="list-style-type: none"> • U Saefudin Noer • Putut Sri Muljanto • Boy Robyanto • Edi Priyanto • Endot Endrardono • Kokok Susanto
20	6 Oktober 2020 / October 6, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Persiapan BOC BOD 12 Oktober 2020 Time Schedule Proyek Prioritas Keikutsertaan TPS dalam Konsorsium Patimban Kontribusi Pelindo III dalam Ketahanan Energi Nasional Lain-lain 	<ol style="list-style-type: none"> Preparation for BOC BOD for October 12, 2020 Priority Project Time Schedule Participation of TPS in the Patimban Consortium Pelindo III's Contribution to National Energy Security Others <ul style="list-style-type: none"> • U. Saefudin Noer • Putut Sri Muljanto • Boy Robyanto • Edi Priyanto • Endot Endrardono • Kokok Susanto
21	7 Oktober 2020 / October 7, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Schedule Penyelesaian Proyek Strategis BMTH Pembangunan Flyover Terminal Teluk Lamong Penerapan Safe Guard Label Progres JIIPe Aplikasi RAPORTS 	<ol style="list-style-type: none"> BMTH Strategic Project Completion Schedule Teluk Lamong Terminal Flyover Construction Application of Safe Guard Label JIIPe Progress RAPORTS application <ul style="list-style-type: none"> • U. Saefudin Noer • Putut Sri Muljanto • Boy Robyanto • Edi Priyanto • Endot Endrardono • Kokok Susanto
22	3 November 2020 / November 3, 2020	<ol style="list-style-type: none"> RKM Direktorat Operasi dan Komersial RKM Direktorat Transformasi dan Pengembangan Bisnis RKM Direktorat Teknik RKM Direktorat SOM 	<ol style="list-style-type: none"> RKM of Directorate of Operations and Commercial RKM of Directorate of Business Transformation and Development RKM of Directorate of Engineering RKM of Directorate of SOM <ul style="list-style-type: none"> • U. Saefudin Noer • Putut Sri Muljanto • Boy Robyanto • Edi Priyanto • Endot Endrardono • Kokok Susanto



No.	Tanggal / Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Kehadiran / Attendance	
23	14 November 2020 / November 14, 2020	1. Materi RDP; 2. Progress PSN (BMTH dan Gilimas); 3. Kinerja Oktober; 4. Lain-lain.	1. RDP materials; 2. PSN Progress (BMTH and Gilimas); 3. October Performance; 4. Others.	• U Saefudin Noer • Putut Sri Muljanto • Boy Robyanto • Edi Priyanto • Endot Endrardono • Kokok Susanto
24	2 Desember 2020 / December 2, 2020	1. Inisiatif Teknologi Informasi 2. Port of Energy	1. Information Technology Initiative 2. Port of Energy	• U. Saefudin Noer • Putut Sri Muljanto • Boy Robyanto • Edi Priyanto • Endot Endrardono • Kokok Susanto

Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi

Pelaksanaan tugas Direksi selama tahun 2020 senantiasa mengacu pada RKAP dan RJPP Perseroan yang telah disusun. Fokus pengelolaan usaha Perseroan yang tercantum dalam RKAP dan RJPP yang telah direalisasikan selama tahun 2020 oleh Direksi, antara lain:

Report on the Implementation of the Board of Directors Duties

The implementation of the Board of Directors' duties during 2020 always refers to the Company's RKAP and RJPP that have been prepared. The focus of the Company's business management listed in the RKAP and RJPP which was realized during 2020 by the Board of Directors, includes:

Fokus Pengelolaan Bisnis**Business Management Focus**

Aspek / Aspects	Fokus Pengelolaan / Management Focus
Aspek Keuangan / Financial Aspect	Tugas dan tanggung jawab Direktur Keuangan adalah melaksanakan pembinaan dalam kegiatan keuangan Perseroan, meliputi manajemen, akuntansi keuangan, utang piutang, aset Perusahaan, dan pembinaan Anak Perusahaan. Duties and responsibilities of the Finance Director are to guide the Company's financial activities, covering management and financial accounting, accounts payable, Company assets, and Subsidiaries guidance
Aspek Operasi dan Komersial / Operation and Commercial Aspect	Tugas dan tanggung jawab Direktur Operasi dan Komersial adalah melaksanakan pembinaan dalam kegiatan pelayanan jasa kapal, barang, terminal, <i>miscellaneous service</i> , manajemen risiko dan mutu, kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan, ISPS Code, peningkatan dan kerja sama usaha, serta manajemen properti. The duties and responsibilities of the Director of Operations and Commercials are to carry out guidance in service activities for ships, goods, terminals, miscellaneous services, risk and quality management, occupational health and safety and the environment, ISPS Code, business enhancement and cooperation, and property management.
Aspek SDM / Human Capital Aspect	Tugas dan tanggung jawab Direktur SDM adalah melaksanakan pembinaan dalam kegiatan perencanaan dan pengembangan SDM, sistem kepegawaian dan organisasi, kesejahteraan, administrasi kepegawaian, penilaian kinerja pegawai, proses pengadaan barang dan jasa, bidang umum dan rumah tangga, serta pengelolaan Kantor Pusat. Duties and responsibilities of the Human Capital Director are to guide Human Capital planning and development, staffing and organisation system, welfare, employee administration, employee performance assessment, goods and services procurement, general affairs and householding, as well as Head Office management.
Aspek Teknik / Engineering Aspect	Tugas dan tanggung jawab Direktur Teknik adalah melaksanakan pembinaan dalam kegiatan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas kolam pelabuhan, investasi, studi kelayakan, bangunan pelabuhan, bangunan sipil, aplikasi perangkat lunak, perangkat keras, serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Duties and responsibilities of the Human Capital Director are to guide Human Capital planning and development, staffing and organisation system, welfare, employee administration, employee performance assessment, goods and services procurement, general affairs and householding, as well as Head Office management.



Aspek / Aspects	Fokus Pengelolaan / Management Focus
Aspek Transformasi dan Pengembangan Bisnis / Business Transformation and Development Aspect	Tugas dan tanggung jawab Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis adalah melakukan pengawasan dan pembinaan atas potensi pengembangan bisnis Perusahaan serta memantau dan evaluasi kerja sama yang telah dilakukan oleh Perusahaan. Selain itu, juga melakukan pembinaan atas manajemen perubahan Perusahaan Duties and responsibilities of the Business Transformation and Development are to monitor and guide the potential of the Company's business development as well as monitoring and evaluating the cooperations of the Company. It also includes guiding the Company's transformation management.

Realisasi Pelaksanaan Tugas Direksi Tahun 2020

Realization of the Implementation of the Board of Directors Duties in 2020

Uraian Tugas / Description of Duties	Status/Realisasi / Status/Realization
Terkait dengan RUPS / Related to GMS	
Wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan dokumen-dokumen terkait dengan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Daftar Pemegang Saham tersebut memuat:	Obligation to organise and keep Shareholder Register and other documents related to GMS according to the laws and regulations. The Shareholder Register contains:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan alamat Pemegang Saham; 2. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham, apabila dikeluarkan lebih dari 1 klasifikasi saham. 3. Nama dan alamat orang/perseorangan/badan hukum yang mempunyai hak gadai tersebut. 4. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Names and addresses of the Shareholders. 2. Number, serial numbers, and date of acquisition of the share certificate owned by the Shareholders, if the issued shares have more than one classification. 3. Name and address of a person/individual/legal institution having the right of pledge. 4. Particulars on the payment of shares other than in cash.
Menandatangani Laporan Tahunan, dalam hal anggota Direksi tidak menandatangani Laporan Tahunan, maka harus disebutkan alasannya.	Signing the Annual Report, and if a member of the BOD does not sign the Annual Report, the reason must be stated.
Memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa.	Summoning and convening Annual GMS and/or Extraordinary GMS.
Menyediakan bahan RUPS kepada Pemegang Saham.	Providing GMS materials to the Shareholders.
Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan berupa laporan kegiatan Perusahaan termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya, menurut cara dan waktu yang ditentukan kepada RUPS.	Providing accountability and all information about the condition and execution of the Company in the form of reports on Company activities including Financial Statements in the form of Annual Reports or in the form of other periodic reports in the manner and time specified to the GMS.
Meminta persetujuan RUPS jika akan dilakukan perubahan Anggaran Dasar.	Requesting approval from the GMS if changes to the Articles of Association will be made.
Memberikan risalah RUPS jika diminta oleh Pemegang Saham.	Providing Minutes of GMS if requested by the Shareholders.



Uraian Tugas / Description of Duties	Status/Realisasi / Status/Realization
Terkait Strategi dan Rencana Perusahaan / Related to Corporate Strategies and Plans	
Memberikan risalah RUPS jika diminta oleh Pemegang Saham.	Providing Minutes of GMS if requested by the Shareholders
Menyiapkan RJPP dan RKAP termasuk rencana-rencana lain yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perusahaan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham guna mendapatkan pengesahan dalam RUPS.	Preparing RJPP and RKAP as well as other plans related to the implementation of the Company's business activities to be submitted to the BOC and Shareholders to obtain approval in the GMS.
Melaksanakan rencana bisnis secara efektif dalam pengelolaan Perusahaan.	Executing business plans effectively in managing the Company.
Terkait dengan Penyusunan RJPP / Related to The Drafting of RJPP	
Menyusun RJPP sekurang-kurangnya memuat:	Preparing RJPP which includes, at the very least:
1. Evaluasi pelaksanaan RJPP sebelumnya; 2. Posisi Perusahaan saat ini; dan 3. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP.	1. Evaluation of the previous RJPP implementation; 2. The current Company position; and 3. Assumptions used in preparing the RJPP.
Penetapan Visi, Misi, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program Kerja Rencana Jangka Panjang	Determining the Vision, Mission, Targets, Strategies, Policies, and Long-Term Work Programmes.
Dalam hal terjadi perubahan faktor internal dan eksternal Perusahaan dikarenakan terdapat perubahan material yang berada di luar kendali Direksi, Direksi melakukan kajian terhadap kemungkinan revisi RJPP yang berlaku.	In the event of a change to the Company's internal and external factors due to material changes that are outside of the Company's control, the BOD shall review the possibilities to revise the prevailing RJPP.
Dalam hal diperlukan revisi RJPP, maka Direksi harus menyampaikan RJPP hasil revisi kepada Dewan Komisaris guna mendapatkan tanggapan dan persetujuan untuk diajukan kepada RUPS.	Should the RJPP needs to be revised, the BOD shall submit the revised RJPP to the BOC to be reviewed and approved so it can be submitted to the GMS.
Terkait dengan Penyusunan RKAP / Related to The Drafting of RKAP	
Direksi menyusun RKAP yang sekurang-kurangnya memuat:	Preparing RKAP which includes, at the very least:
1. Kinerja Perusahaan tahun berjalan; 2. Rencana kerja Perusahaan; 3. Anggaran Perusahaan; 4. Proyeksi keuangan Perusahaan; 5. Proyeksi keuangan Anak Perusahaan; dan 6. Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.	1. Company's performance in the current year. 2. Company's work plan. 3. Company's budget 4. Company's financial projection. 5. Subsidiaries' financial projections. 6. Other matters requiring GMS' resolutions.
Direksi menyerahkan RKAP kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan tanggapan sebelum diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.	The BOD shall submit the RKAP to the BOC to be reviewed and approved before submitting it to the GMS to obtain approval.
Terkait dengan Penyusunan Laporan Tahunan / Related to the Preparation of Annual Report	
Menyusun Laporan Tahunan Perusahaan dan bersama dengan Dewan Komisaris menandatangi Laporan Tahunan Perusahaan dimaksud.	Preparing the Annual Report and, together with the BOC, signing the Annual Report of the Company.
Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Pemegang Saham.	Submitting the Annual Report to the Shareholders.



Uraian Tugas / Description of Duties	Status/Realisasi / Status/Realization
Terkait Manajemen Risiko / Related to Risk Management Mengembangkan sistem manajemen risiko dan melaksanakannya secara konsisten, dengan tahapan sebagai berikut: a. Identifikasi Risiko, yaitu proses untuk mengenali jenis-jenis risiko yang relevan dan berpotensi terjadi; b. Pengukuran Risiko, yaitu proses untuk mengukur besaran dampak dan probabilitas dari hasil identifikasi risiko; c. Evaluasi, yaitu proses kajian terhadap kecukupan keseluruhan aktivitas manajemen risiko yang dilakukan di dalam Perusahaan; d. Penanganan Risiko, yaitu proses untuk menetapkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menangani risiko potensial; e. Pemantauan Risiko, yaitu proses untuk melakukan pemantauan terhadap berbagai faktor yang diduga dapat mengarahkan kemunculan risiko; dan f. Pelaporan dan Pengungkapan, yaitu proses untuk melaporkan sistem manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Perusahaan beserta pengungkapannya pada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan yang berlaku.	Developing a risk management system and implement it consistently through the following stages: a. Risk Identification, i.e. a process to identify the relevant risks with a potential to occur; b. Risk Measurement, i.e. a process to measure the size of impact and probability of the result of risk identification; c. Risk Evaluation, i.e. a review process on the availability of the entire risk management activity conducted in the Company; d. Risk Handling, i.e. a process to determine the efforts to be conducted to handle potential risks; e. Risk Monitoring, i.e. a process to monitor various factors that allegedly lead to the emergence of risks; and. f. Reporting and Disclosure, i.e. a process to report the risk management system implemented by the Company as well as the disclosure to the related parties based on the prevailing provisions
Terkait Pengendalian Intern / Related to Internal Control Menetapkan kebijakan tentang sistem pengendalian intern yang efektif untuk memastikan tercapainya tujuan Perusahaan. Sistem pengendalian internal mencakup hal-hal sebagai berikut: 1. Lingkungan pengendalian internal; 2. Penetapan rencana kerja dan target-target perusahaan; 3. Identifikasi risiko; 4. Penilaian risiko; 5. Mitigasi risiko; 6. Aktivitas pengendalian; 7. Informasi dan komunikasi; dan 8. Monitoring.	Stipulating policies on the effective internal control system to ensure the achievement of the Company's objectives. The internal control system shall cover the following matters: 1. Internal control environment. 2. Determination of company's work plans and targets. 3. Risk identification. 4. Risk evaluation. 5. Risk mitigation. 6. Controlling activities. 7. Information and communication. 8. Monitoring.
Keterbukaan Informasi / Information Disclosure Mengungkapkan informasi penting dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan kepada pihak terkait sesuai peraturan perundangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan objektif. Mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan namun juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan.	Disclosing important information in the Annual Report and Financial Statements to the related parties according to the prevailing laws and regulations in a timely, accurate, clear and objective manner. Taking the initiative to disclose not only the issues required by the laws and regulations but also matters deemed significant for decision making by the stakeholders.



Uraian Tugas / Description of Duties	Status/Realisasi / Status/Realization	
Direksi harus aktif mengungkapkan pelaksanaan prinsip GCG dan masalah material yang dihadapi.	Actively disclosing the implementation of GCG principles and material issues faced by the Company.	Terpenuhi / Fulfilled
Hubungan dengan Pemangku Kepentingan / Relation With The Stakeholders		
Menghormati hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan dengan Pemangku Kepentingan.	Respecting the rights of stakeholders arising from the prevailing laws and regulations or agreements made between the Company and the stakeholders	Terpenuhi / Fulfilled
Memastikan Perusahaan melakukan tanggung jawab sosial.	Ensuring that the Company carries out social responsibility.	Terpenuhi / Fulfilled
Memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas Perusahaan lainnya memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja.	Ensuring that the assets and business locations, as well as other facilities of the Company, have complied with the prevailing laws and regulations on environmental preservation, and occupational health and safety.	Terpenuhi / Fulfilled
Dalam mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karier, serta menentukan persyaratan kerja lainnya untuk pegawai, Perusahaan tidak melakukan diskriminasi karena latar belakang etnik seseorang, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundangan.	In employment, the establishment of the amount of salary, provision of training activities, and determination of career path and other work requirements, the BOD and the Company shall not discriminate the employees based on their ethnicity, religion, gender, age, disability, or any other special conditions as in line with the provisions contained in the laws and regulations.	Terpenuhi / Fulfilled
Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan.	The BOD shall prepare a work environment that is free from all manners of pressure	Terpenuhi / Fulfilled
Tugas dan Kewajiban Lain / Other Duties and Obligations		
Menjalankan kewajiban-kewajiban lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.	Fulfilling other obligations in line with the provisions stipulated in the Articles of Association and determined by the GMS based on the applicable laws and regulations.	Terpenuhi / Fulfilled



Realisasi Rencana Kerja Manajemen (RKM) Tahun 2020

Bersamaan dengan penyusunan RKAP pada awal tahun 2020, Perseroan turut menyusun Rencana Kerja Manajemen (RKM) yang meliputi 9 (sembilan) aspek manajemen Perseroan. Informasi mengenai perbandingan antara target dan realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Manajemen (RKM) sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Realization of Implementation of Tasks Realization of Management Work Plan (RKM) in 2020

Simultaneously with the preparation of the RKAP in early 2020, the Company also prepared a Management Work Plan (RKM) which included 9 (nine) aspects of the Company's management. Information regarding the comparison between the target and realization of the Management Work Plan (RKM) until the end of 2020 is as follows:

No.	Aspek Manajemen / Management Aspects	RKAP 2020 / 2020 RKAP	Realisasi Tahun 2020 / 2020 Realizations		
			Tidak Selesai / Not Completed	Batal / Cancelled	Selesai / Completed
1	Pemasaran dan Penjualan / Marketing and Sales	Penyesuaian tarif pelayanan jasa kepelabuhanan secara bertahap / Gradual adjustment of port service tariffs	-	-	2
		Optimalisasi kinerja pemasaran / Marketing performance optimization	-	-	4
		Pengembangan pelabuhan baru / New port development	-	-	3
		Pengembangan fasilitas pendukung operasional / Development of operational support facilities	-	-	2
		Optimalisasi utilisasi aset / Asset utilization optimization	-	-	4
		Pengembangan bisnis baru / New business development	-	-	7
		Pengembangan fasilitas logistik / Development of logistics facilities			2
2	Produk dan Kualitas Produk / Product and Product Quality	Peningkatan pelayanan pelanggan / Improved customer service	-	-	6
		Peningkatan kapasitas, fasilitas dan modernisasi pelabuhan / Port capacity increase, Improved port facilities and modernization	-	-	4
3	Teknik dan Teknologi / Engineering and Technology	Implementasi Big Data / Big Data Implementation	-	-	1
		Pengembangan Smart Equipment & Smart Terminal / Smart Equipment & Smart Terminal Development	-	-	1
		Pengembangan program teknologi informasi / Information technology program development	-	-	8
4	Keuangan dan Akuntansi / Finance and Accounting	Pembayaran kewajiban dan penghapusan piutang perusahaan / Payment of liabilities and write-off of Company receivables	-	-	2



No.	Aspek Manajemen / Management Aspects	RKAP 2020 / 2020 RKAP	Realisasi Tahun 2020 / 2020 Realizations		
			Tidak Selesai / Not Completed	Batal / Cancelled	Selesai / Completed
5	Sistem dan Organisasi / Systems and Organizations	Peningkatan nilai perusahaan / Increased company value	-	-	2
		Transformasi dan Implementasi budaya perusahaan / Transformation and Implementation of corporate culture	-	-	2
		Penerapan <i>Risk Management</i> / Application of Risk Management	-	-	5
		Implementasi SMK3L dan ISPS <i>Code</i> / Implementation of SMK3L and ISPS Code	-	-	4
6	Pengembangan SDM / Human Capital Development	Implementasi ISO pada teknologi informasi / ISO implementation on information technology	-	-	1
		Peningkatan Kompetensi SDM / HR Competency Development	-	-	4
		Program pengembangan CSR / CSR development program	-	-	3
7	Penelitian dan Pengembangan / Research and development	-	-	-	-
8	Pelestarian Lingkungan / Environmental Conservation	Penerapan <i>Green Port</i> / Application of <i>Green Port</i>	-	-	1
9	Investasi / Investation	Investasi <i>Level of Revenue</i> / Investment <i>Level of Revenue</i>	-	-	2
		Investasi <i>Level of Service</i> / Investment <i>Level of Service</i>	-	-	1
Jumlah / Total		23	0	0	71

Sepanjang tahun 2020, manajemen juga telah melaksanakan 23 program kerja dengan pencapaian realisasi sebesar 100%, meliputi:

1. Penyesuaian tarif pelayanan jasa kepelabuhanan secara bertahap;
2. Optimalisasi kinerja pemasaran;
3. Pengembangan pelabuhan baru;
4. Pengembangan fasilitas pendukung operasional;
5. Optimalisasi utilisasi aset;
6. Pengembangan bisnis baru;
7. Pengembangan fasilitas logistik;
8. Peningkatan pelayanan pelanggan;
9. Peningkatan kapasitas, fasilitas dan modernisasi pelabuhan;
10. Implementasi *Big Data*;
11. Pengembangan *Smart Equipment & Smart Terminal*;
12. Pengembangan program teknologi informasi;
13. Pembayaran kewajiban dan penghapusan piutang perusahaan;

Throughout 2020, management has also implemented 23 work programs with 100% realization, including:

1. Gradual adjustment of port service rates;
2. Optimization of marketing performance;
3. New port development;
4. Development of operational support facilities;
5. Optimizing asset utilization;
6. New business development;
7. Logistics facility development;
8. Improved customer service;
9. Capacity building, facilities and port modernization;
10. Big Data Implementation;
11. Smart Equipment & Smart Terminal Development;
12. Information technology program development;
13. Payment of obligations and write-offs of company receivables;



14. Peningkatan nilai perusahaan;
15. Transformasi dan implementasi budaya perusahaan;
16. Penerapan *risk management*;
17. Implementasi SMK3L dan ISPS Code;
18. Implementasi ISO pada teknologi informasi;
19. Peningkatan kompetensi SDM;
20. Program pengembangan CSR;
21. Penerapan *Green Port*;
22. Investasi *level of revenue*;
23. Investasi *level of service*.

14. Increase in company value;
15. Transformation and implementation of corporate culture;
16. Application of risk management;
17. Implementation of SMK3L and ISPS Code;
18. Implementation of ISO in information technology;
19. Human capital competency improvement;
20. CSR development program;
21. Green Port implementation;
22. Investment level of revenue;
23. Investment level of service.

Realisasi Arahann Dewan Komisaris

Arahann / Advice	Tindak Lanjut / Follow-Up
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Keputusan Direksi Tahun 2020

Dalam menjalankan kewenangannya, Direksi senantiasa memenuhi kecukupan kebijakan yang mendukung pengurusan Perseroan secara optimal. Untuk itu, Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan pengelolaan Perseroan dengan mempertimbangkan arahan Dewan Komisaris dan ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

Sepanjang tahun 2020, Direksi telah menerbitkan 57 (lima puluh tujuh) Surat Keputusan (SK) dengan rincian sebagai berikut:

Realization of Advices from the Board of Commissioners

Arahann / Advice	Tindak Lanjut / Follow-Up
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Decree of the Board of Directors for 2020

In exercising their authority, the Board of Directors always fulfills the adequacy of policies that support optimal management of the Company. Therefore, the Board of Directors formulates and determines the management policy of the Company by taking into account the direction of the Board of Commissioners and is determined based on deliberation to reach a consensus as regulated in the applicable regulations

Throughout 2020, the Board of Directors has issued 57 (fifty seven) Decree (SK) with the following details:

No.	Nomor SK / Decree No.	Perihal / Subject
1	PER.0004/HK.0105/ HOFC-2020	Tata Cara Kerjasama Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja Atau Borongan Procedures for Cooperation in the Division of Work to Employer or Wholesale Service Provider Companies
2	PER.0007/PB.03.02/ HOFC-2020	Tarif Masuk (Pas) Pelabuhan Dan Pelayanan Jasa Terminal Penumpang Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Regional Jawa Tengah Pelabuhan Tegal Port Entrance Fees (Pass) and Passenger Terminal Services at PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) in the Central Java Region of Tegal Port



No.	Nomor SK / Decree No.	Perihal / Subject
3	PER.0013/KP.08.02/ HOFC-2020	Pemberian Incentif Bagi Pegawai Marketing Sales Officer (MSO)
4	PER.0015/PB.01/ HOFC-2020	Biaya Promosi Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
5	PER.0016/HK.01.06/ HOFC-2020	Perubahan Atas Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor PER.58/KP.0602/P.III-2017 Tentang Pakaian Dinas Perusahaan
6	PER.0017/PB.03.01/ HOFC-2020	Tarif Pelayanan Jasa Kapal Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Regional Kalimantan Pelabuhan Batulicin
7	PER.0018/PB.03.02/ HOFC-2020	Tarif Pelayanan Jasa Barang Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Regional Kalimantan Pelabuhan Batulicin
8	PER.0019/PB.03.02/ HOFC-2020	Tarif Pelayanan Jasa Barang Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Regional Jawa Tengah Pelabuhan Tegal
9	PER.002/PB.01/ HOFC-2020	Pedoman Pemberian Intensif Marketing Bagi Pegawai Komersial Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
10	PER.0020/PB.03.02/ HOFC-2020	Tarif Pelayanan Jasa Kapal Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Regional Jawa Tengah Pelabuhan Tegal
11	PER.0023/PB.03.02/ HOFC-2020	Tarif Pelayanan Jasa Kapal Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Regional Kalimantan Pelabuhan Bumiharjo
12	PER.0023/PB.03.02/ HOFC-2020	Tarif Pelayanan Jasa Barang Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Regional Kalimantan Pelabuhan Bumiharjo
13	PER.0025/PB.03.02/ HOFC-2020	Tarif Pelayanan Jasa Kapal Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Regional Banyuwangi Bali Nusa Tenggara Pelabuhan Kalabahi
14	PER.0026/PB.03.02/ HOFC-2020	Arif Jasa Barang Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Regional Bali Nusa Tenggara Pelabuhan Kalabahi
15	PER.0027/PB.03.02/ HOFC-2020	Tarif Tanda Masuk (Pas) Pelabuhan Dan Pelayanan Jasa Terminal Penumpang Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Regional Banyuwangi Bali Nusa Tenggara Pelabuhan Kalabahi
16	PER.0028/PB.03.02/ HOFC-2020	Tarif Tanda Masuk (Pas) Pelabuhan Dan Pelayanan Jasa Terminal Penumpang Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Regional Kalimantan Pelabuhan Sampit
17	PER.0030/PB.03.02/ HOFC-2020	Tarif Pelayanan Jasa Kapal Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Regionalbanyuwangi Bali Nusa Tenggara Pelabuhan Tanjung Wangi



No.	Nomor SK / Decree No.	Perihal / Subject
18	PER.0031/PB.03.02/ HOFC-2020	Tarif Pelayanan Jasa Barang Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Regional Banyuwangi Bali Nusa Tenggara Pelabuhan Tanjung Wangi Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
19	PER.0032/PB.03.02/ HOFC-2020	Tarif Pelayanan Jasa Kapal Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Regional Kalimantan Pelabuhan Bagendang Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
20	PER.0033/PB.03.02/ HOFC-2020	Tarif Pelayanan Jasa Barang Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Regional Kalimantan Pelabuhan Bagendang
21	PER.0045/KP.0903/ HOFC-2020	Program Asuransi Purna Jabatan Bagi Direksi, Komisaris Dan Pegawai Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
22	PER.0046/ PB.HK.05.01/HOFC- 2020	Sinergi Teknologi Informasi dan Komunikasi Pelindo III Group
23	PER.0048/PJ.07.01/ HOFC-2020	Pedoman Pengelolaan Dan Pengusahaan Aset Properti Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
24	PER.0049/TR.0301/ HOFC-2020	Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor: Per.0052/Tr.03.01/Hofc-2019 Tanggal 1 November 2019 Tentang Perjalanan Dinas Pegawai
25	PER.0050/KP.0502/ HOFC-2020	Pengelolaan Perbaikan Berkelanjutan Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
26	PER.0051/05.01/ HOFC-2020	Struktur Organisasi Dan Tata Kerja PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Kantor Pusat
27	PER.0054/KP.0504/ HOFC-2020	Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor Per.65/ Kp.0504/Hofc-2019 Tentang Jam Kerja Dankerja Lembur
28	PER.0060/BJ.0101/ HOFC-2020	Tata Cara Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Di PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
29	PER.0064/KP.0801/ HOFC-2020	Cuti Dan Izin Pegawai Serta Pemberian Uang Cuti
30	PER.0065/ HK.01.06/ HOFC- 2020	Komite Talenta PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
31	PER.0066/KP.0805/ HOFC-2020	Pelayanan Kesehatan Bagi Pensiunan
32	PER.0067/ HK.01.13/HOFC- 2020	Pedoman Penyusunan Penghasilan Pegawai di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
33	PER.0068/KP.0806/ HOFC-2020	Pelayanan Kesehatan Bagi Pegawai



No.	Nomor SK / Decree No.	Perihal / Subject	
34	PER.0069/KP.06.04/ HOFC-2020	Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor: PER.0069/KP.06.04/HOFC-2020 tanggal 21 April 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor: PER.0016/KP.06.04/HOFC-2019 tentang Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan	Regulation of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Number: PER.0069/KP.06.04/HOFC-2020 dated April 21, 2020 concerning Amendments to the Regulation of the Board of Directors Number: PER.0016/KP.06.04/HOFC-2019 regarding Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of Subsidiaries
35	PER.0070/KP.0602/ HOFC-2020	perubahan kedua atas peraturan direksi nomor: PER.0023/KP.0602/HOFC-2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang Penghasilan Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	The second amendment to the Board of Directors regulation number: PER.0023/KP.0602/HOFC-2018 dated July 24, 2018 concerning Employee Income of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
36	PER.0073/ HM.03.01/HOFC- 2020	Tata Kelola Kehumasan Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Public Relations Governance in PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
37	PER.0074/HK.0106/ HOFC-2020	Prosedur Penyelesaian Keluh Kesah Dan Perselisihan Pegawai	Employee Complaints and Dispute Resolution Procedures
38	PER.0077/HK.0106/ HOFC-2020	Tata Cara Serah Terima Aset Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pendayagunaan Aset Skema Kerjasama Bangun Guna Serah Atau Kerjasama Bangun Serah Guna	Procedure for Handover of Assets in the Implementation of Cooperation in the Utilization of Assets in the Build Operate Transfer Scheme or Build Transfer Operate Cooperation
39	PER.0078/HK.0106/ HOFC-2020	Jenis Dan Hierarki Peraturan Perusahaan	Types and Hierarchy of Company Regulations
40	PER.0079/HK.0106/ HOFC-2020	Perkawinan, Perceraian dan Pembagian Penghasilan Pasca Perceraian	Marriage, Divorce and Income Distribution Post-Divorce
41	PER.0082/OS.01/ HOFC-2020	Perubahan Atas Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor: Per.0051/Os.01/Hofc-2020 Tanggal 18 Maret 2020 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Kantor Pusat	Amendment to the Regulation of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Number: Per.0051/Os.01/Hofc-2020 dated March 18, 2020 concerning the Organizational Structure and Work Procedure of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Head Office
42	PER.0083/HK.0106/ HOFC-2020	Kebijakan Lindung Nilai	Hedging Policy
43	PER.0084/HK.0106/ HOFC-2020	Standar Operasional Dan Prosedur Kegiatan Lindung Nilai	Standard Operating and Procedures for Hedging Activities
44	PER.0085/ HK.01.06/HOFC- 2020	Tunjangan Asuransi Purna Jabatan Bagi Pegawai Yang Diangkat Dalam Jabatan Anggota Direksi Atau Anggota Dewan Komisaris/Anggota Dewan Pengawas Di Lingkungan Pelindo III Grup	Post-Service Insurance Benefits for Employees Appointed in the Position of Members of the Board of Directors or Members of the Board of Commissioners/Members of the Supervisory Board in the Pelindo III Group
45	PER.0086/ML.0101/ HOFC-2020	Pedoman Pelaksanaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Guidelines for the Implementation of the Partnership and Community Development Program at PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
46	PER.0087/KP.0803/ HOFC-2020	Pemberian Uang Duka Dan Bantuan Biaya Pemakaman Bagi Pegawai Dan Pensiunan	Bereavement Money for Employees and Retirees
47	PER.0088/ HK.01.06/HOFC- 2020	Fasilitas Serikat Pekerja	Trade Union Facilities



No.	Nomor SK / Decree No.	Perihal / Subject	
48	PER.0089/BJ.01.01/ HOFC-2020	Perubahan Atas Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor: Per.0060/Bj.0101/Hofc-2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Di PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Amendment to the Regulation of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Number: Per.0060/Bj.0101/Hofc-2020 concerning Procedures for Procurement of Goods and/or Services at PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
49	PER.0090/OS.01/ HOFC-2020	Struktur Organisasi Dan Tata Kerja PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Kantor Pusat	Organizational Structure and Work Procedures of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Head Office
50	PER.0091/PB.01/ HOFC-2020	Pengelolaan Suara Pelanggan Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Customer Voice Management in PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
51	PER.0095/KP.0802/ HOFC-2020	Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Religious Holiday Allowance for Employees of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
52	PER.0096/ HK.01.06/HOFC- 2020	Pakaian Seragam Satuan Pengamanan Pelabuhan (Port Security) Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Uniforms of the Port Security Unit at PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
53	PER.0097/05.01/ HOFC-2020	Struktur Organisasi Dan Tata Kerja PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Kantor Pusat	Organizational Structure and Work Procedures of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Head Office
54	PER.0098/OS.01/ HOFC-2020	Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Regional	Regional Organizational Structure and Work Procedure
55	PER.0101/KP.0703/ HOFC-2020	Penetapan Dan Penagihan Serta Penyetoran Deviden Oleh Anak Perusahaan Atau Perusahaan Afiliasi Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Determination and Collection and Deposit of Dividends by Subsidiaries or Affiliated Companies in PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
56	PER.0108/KU.07.01/ HOFC-2020	Pedoman Pemilihan Dan Penunjukan Auditor Eksternal Untuk Audit Laporan Keuangan Anak Perusahaan Dan Dana Pensiun	Guidelines for Selection and Appointment of External Auditors for Auditing Financial Statements of Subsidiaries and Pension Funds
57	SE.0058/MP.02/ HOFC-2020	Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Di Lingkungan Grup PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Core Values of Human Resources of State-Owned Enterprises within the PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Group

Pengembangan Kompetensi Direksi

Dalam rangka meningkatkan wawasan dan memperbarui kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, Direksi dibekali dengan program pelatihan dan pengembangan kompetensi, baik yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal. Informasi lebih lanjut mengenai program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Direksi telah tersaji dalam Laporan Tahunan ini, bab Profil Perusahaan, bagian Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Intern.

Competency Development of the Board of Directors

In order to enhance insight and update their capabilities and knowledge, the Board of Directors is provided with training and competency development programs, both internally and externally. Further information regarding the competency development program participated in by the Board of Directors is presented in this Annual Report, in the Company Profile chapter, the Competency Development section of the Board of Commissioners, Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit.



Penilaian Kinerja Organ di Bawah Direksi

Kepengurusan dan pengelolaan Perseroan yang dijalankan Direksi didukung oleh organ-organ dan satuan kerja berdasarkan direktoratnya masing-masing. Kehadiran organ pendukung Direksi telah disesuaikan dengan kebutuhan bisnis serta ketentuan regulasi yang berlaku, dengan tujuan dapat tercapai efektivitas dan efisiensi operasional. Penilaian kinerja organ-organ pendukung Direksi dilakukan dengan menilai kesesuaian pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kerja serta KPI yang telah ditetapkan. Selama tahun 2020, Direksi menilai pelaksanaan kinerja organ pendukung Direksi telah dijalankan dengan baik dan memuaskan.

Performance Assessment of Organs under the Board of Directors

The management and administration of the Company, which is carried out by the Board of Directors, is supported by organs and work units based on their respective directorates. The presence of the supporting organs of the Board of Directors has been adjusted to the business needs and prevailing regulations, with the aim of achieving operational effectiveness and efficiency. Performance appraisal of the supporting organs of the Board of Directors is carried out by assessing the suitability of the implementation of duties in accordance with the work plan and the established KPIs. During 2020, the Board of Directors assessed that the performance of the supporting organs of the Board of Directors was carried out well and satisfactorily.

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sebagai bagian dari pemenuhan *check and balances* yang dijalankan, Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala melaksanakan rapat gabungan sebagai sarana bagi keduanya untuk memperkuat koordinasi, menyampaikan progres dan kinerja pengurusan Direksi, serta menyampaikan nasihat dan arahan pengawasan Dewan Komisaris. Secara umum, agenda rapat yang diselenggarakan Dewan Komisaris membahas mengenai:

1. Laporan Kinerja Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan;
2. Pembahasan dan Perumusan RKAP;
3. Rapat Koordinator Dewan Komisaris dan Direksi;
4. Pembahasan perkembangan kinerja operasional;
5. Pembahasan dan review RJPP;
6. Pembahasan terkait penetapan Kantor Akuntan Publik untuk pelaksanaan audit Laporan Tahunan;
7. Pembahasan terkait kinerja dan rencana pengembangan Anak Perusahaan.

JOINT MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

As part of fulfilling checks and balances, the Board of Directors and the Board of Commissioners regularly hold joint meetings as a means for both parties to strengthen coordination, convey progress and performance of the Board of Directors management, and provide advice and supervision direction from the Board of Commissioners. In general, the meeting agenda held by the Board of Commissioners discusses:

1. Monthly, Quarterly, Semester, and Annual Performance Report.
2. RKAP Formulation and Discussion.
3. Coordinating Meeting of the BOC and BOD.
4. Discussion on operational performance development.
5. RJPP review and discussion.
6. Discussion on the appointment of Public Accounting Firm to audit annual financial statements.
7. Discussion on performance and development plan of Subsidiaries.



Publikasi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi serta Agenda Rapat

Publikasi mengenai rencana pelaksanaan rapat gabungan Dewan Komisaris, Direksi, atau dengan Komite-komite Perseroan dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan dengan bentuk surat menyurat. Dalam publikasi tersebut memuat mengenai informasi dan materi rapat yang terdiri dari:

- Tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
- Agenda rapat;
- Nama peserta; dan
- Undangan rapat.

Dalam mendukung keteraturan dan kedisiplinan dalam pelaksanaan rapat gabungan, Perseroan telah menyusun rencana awal pelaksanaan rapat gabungan tersebut sebagaimana tertuang dalam Jadwal Tahunan Perusahaan. Informasi mengenai rencana pelaksanaan rapat juga telah didistribusikan secara luas kepada pihak-pihak terkait seperti Sekretaris Perusahaan serta organ-organ lainnya seperti Internal Audit dan Departemen-departemen yang ada. Dalam hal terjadi usulan rapat yang bersifat insidental publikasi dapat dilakukan dengan seefektif dan seefisien mungkin namun tetap mengikuti prosedur pendokumentasian yang berlaku (membuat berita acara).

Dokumentasi Hasil Rapat

Dalam menjamin terlaksananya prinsip transparansi dan akuntabilitas, risalah pelaksanaan rapat didokumentasikan secara baik yang memuat pembahasan-pembahasan atas agenda rapat, perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), serta keputusan yang ditetapkan. Dokumentasi rapat kemudian ditandatangani oleh pimpinan dan seluruh peserta rapat yang hadir serta didistribusikan sesuai peruntukannya.

Publication of Joint Meetings of Board of Commissioners and Board of Directors and Meeting Agenda

Publication on the plan to hold joint meetings of the BOC and BOD with the Committees of the Company is conducted within no later than five days before the date of the meeting through correspondence. The publication shall contain agenda and information of the meeting, consisting of:

- Date and time of the meeting;
- Meeting agenda;
- Participants; and
- Meeting Invitation

In supporting order and discipline in conducting joint meetings, he Company had drawn up a preliminary plan for the joint meetings which was contained in the Company's Annual Schedule. Information on the meeting plan was also widely distributed to related parties such as Corporate Secretary and other organs such as Internal Audit and other departments. In the event of incidental meeting proposals, the publication can be done as effectively and efficiently as possible while still adhering to the applicable documenting procedures (drafting minutes of the meeting).

Documentation of Meeting Decisions

In ensuring the implementation of transparency and accountability principles, minutes of meeting implementation (in this case, for BOC meeting) is documented well to contain the discussion of meeting agenda, dissenting opinions, as well as the stipulated decisions. The meeting documentation is signed by the chairman and all meeting participants attending and shall be distributed accordingly.

**Rekapitulasi Hasil Rapat Gabungan**

Sepanjang tahun 2020, Perseroan telah mengadakan 16 kali rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

Recapitulation of Joint Meeting Results

Throughout 2020, the Company held 16 joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors with the attendance levels of each member as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Number of Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	% Kehadiran / Attendance %
Dewan Komisaris / Board of Commissioners				
Ahmad Bambang	Komisaris Utama / Komisaris Independen / President Commissioner / Independent Commissioner	3	3	100%
Marsetio		13	13	100%
Dedi Syarif Usman	Komisaris / Commissioner	16	15	93,75%
Heru Sukanto	Komisaris Independen / Independent Commissioner	13	13	100%
Wahju Satrio U.	Komisaris / Commissioner	3	3	100%
Ali Mochtar Ngabalin		13	8	61,53%
Heddy Lugito	Komisaris / Commissioner	3	3	100%
Otto Ardianto		13	13	100%
Zainal Abidin	Komisaris / Commissioner	3	3	100%
Ridwan Djamaluddin		13	10	76,92%

Direksi / Board of Directors

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Number of Meetings	Jumlah Kehadiran / Total Attendance	% Kehadiran / Attendance %
Direksi / Board of Directors				
Doso Agung	Direktur Utama / President Director	3	3	100%
U. Saefudin Noer		13	13	100%
Putut Sri Muljanto	Direktur Operasi dan Komersial / Operation and Commercial Director	16	16	100%
Joko Noerhudha	Direktur Teknik / Engineering Director	3	3	100%
Boy Robyanto		13	13	100%
Toto Heliyanto	Direktur Sumber Daya Manusia / Human Capital Director	3	2	66,67%
Edi Priyanto		13	13	100%
Irvandi Gustari ²	Direktur Keuangan / Finance Director	3	3	100%
Endot Endrardono		13	13	100%
Toto Nugroho	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis / Business Transformation and Development Director	3	3	100%
Kokok Susanto		13	13	100%



Risalah Rapat Gabungan Tahun 2020

Berikut adalah risalah dan daftar Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam rapat gabungan yang dilaksanakan sepanjang tahun buku 2020:

Minutes of Joint Meetings

The following table details the minutes of joint meeting of the BOC and BOD held during the 2020 Fiscal Year:

No.	Tanggal / Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Dewan Komisaris yang Hadir / Attending BOC	Direksi yang Hadir / Attending BOD
1	27 Januari January 27	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja Manajemen dan Capaian Investasi sampai Desember 2019 dan Unaudited Tahun 2019 2. Kinerja Keuangan Regional, Anak Perusahaan, dan Entitas Asosiasi 3. Pengelolaan Risiko atas Dampak Tidak Tercapainya Laba Anak Perusahaan dan Entitas Asosiasi 4. Pemaparan Strategi terkait Pengelolaan dan Penyelesaian atas Pinjaman Global Bond (I dan II) 5. Laporan Progres Audit KAP atas Laporan Keuangan Tahun 2019 6. Tindak Lanjut Rapat BOC BOD bulan Desember 2019 7. Rencana Initial Public Offering (IPO) PT Terminal Petikemas Surabaya 8. Rencana Penyerahan Lahan untuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha di Labuan Bajo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Management Performance Report and Investment Achievement until December 2019 and Unaudited 2019 2. Regional, Subsidiaries and Associates Financial Performance 3. Risk Management for the Impact of Unattainable Profit of Subsidiaries and Associates 4. Explanation of Strategies related to Management and Settlement of Global Bond Loans (I and II) 5. KAP Audit Progress Report on 2019 Financial Statements 6. The follow-up to the BOC BOD Meeting in December 2019 7. PT Terminal Petikemas Surabaya's Initial Public Offering (IPO) plan 8. Plans for Land Handover for Government and Business Entity Cooperation in Labuan Bajo 	<ul style="list-style-type: none"> • Ahmad Bambang • Wahju Satrio Utomo • Heddy Lugito • Zainal Abidin <ul style="list-style-type: none"> • Doso Agung • Irvandi • Joko Noerhudha • Toto Nugroho • Putut Sri Muljanto



No.	Tanggal / Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda		Dewan Komisaris yang Hadir / Attending BOC	Direksi yang Hadir / Attending BOD
2	27 Februari February 27	1. Laporan Kinerja Manajemen Sampai Januari 2020 2. Pembahasan Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2019 3. Pembahasan Kebijakan Capex Strategis dan Berisiko Tinggi Tahun 2020 4. Tindak Lanjut Rapat BOC BOD Bulan Januari 2020 5. Lain-lain : Tindak Lanjut arahan RUPS RKAP : <ul style="list-style-type: none"> a. Rincian Target Bulanan dan Cascading dan Kontrak Manajemen kepada Jajaran Perusahaan b. Hasil Koordinasi rencana IPO TPS dengan RPU Kementerian BUMN 	1. Management Performance Report Until January 2020 2. Discussion on the Audited Financial Statements for the 2019 Fiscal Year 3. Discussion on Strategic and High-Risk Capital Expenditure Policies in 2020 4. Follow-up to the BOC BOD Meeting in January 2020 5. Others: Follow-up to the directions of the General Meeting of Shareholders of the RKAP: <ul style="list-style-type: none"> a. Details of Monthly Targets and Cascading and Management Contracts to the Management of the Company b. Results of the coordination of the TPS IPO plan with the RPU of the Ministry of SOE 	<ul style="list-style-type: none"> • Ahmad Bambang • Wahju Satrio Utomo • Heddy Lugito • Zainal Abidin • Dedi Syarif Usman 	<ul style="list-style-type: none"> • Doso Agung • Irvandi Gustari • Joko Noerhudha • Toto Heli Yanto • Toto Nugroho • Putut Sri Mulyanto
3	30 Maret March 30	1. Pembahasan Laporan Manajemen Bulan Februari 2020 2. Pembahasan Usulan KSO Pembangunan dan Pengoperasian Pusat Logistik di Benoa 3. <i>Business Continuity Plan (SCP)</i> Pelindo III akibat Dampak Pandemik COVID-19 4. Tindak Lanjut Rapat BOC BOD Bulan Februari 2020 5. Lain-lain : <ul style="list-style-type: none"> a. Progres Rencana Kerjasama antara Pelindo III dan PT Adaro di Mekarputih b. Penyelesaian Sengketa Tanah di Batulicin 	1. Discussion on Management Reports for February 2020 2. Discussion on the proposed KSO for the construction and operation of the Logistics Center in Benoa 3. Pelindo III's Business Continuity Plan (SCP) due to the impact of the COVID-19 Pandemic 4. Follow-up to the BOC BOD Meeting in February 2020 5. Others <ul style="list-style-type: none"> a. Progress of Cooperation Plans between Pelindo III and PT Adaro in Mekarputih b. Land Dispute Settlement in Batulicin: 	<ul style="list-style-type: none"> • Ahmad Bambang • Wahju Satrio Utomo • Heddy Lugito • Zainal Abidin • Dedi Syarif Usman 	<ul style="list-style-type: none"> • Doso Agung • Irvandi Gustari • Joko Noerhudha • Toto Heli Yanto • Toto Nugroho • Putut Sri Mulyanto



No.	Tanggal / Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Dewan Komisaris yang Hadir / Attending BOC	Direksi yang Hadir / Attending BOD
4	15 April April 15	<p>1. Pembukaan oleh Komisaris Utama</p> <p>2. Penyampaian Hasil Sosialisasi Human Capital Management System / HCMS antara Wakil Menteri BUMN II dengan Komisaris Utama dan Direktur SOM (Paparan oleh Direktur SOM)</p> <p>3. Pembahasan portofolio anak/cucu perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III (Paparan oleh Direktur utama), dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perkenalan Direktur Utama dan Komisaris Utama setiap anak/cucu perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero); dan b. Pemaparan core business setiap anak/cucu perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). 	<p>1. Opening by the President Commissioner</p> <p>2. Submission of the Dissemination Results of the Human Capital Management System (HCMS) between the Deputy Minister of SOE II with the President Commissioner and the Director of SOM (Presentation by the Director of SOM)</p> <p>3. Discussion on the portfolio of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)'s subsidiaries (Presentation by the President Director), with the following details:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Introduction of the President Director and President Commissioner of each of the subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero); and b. Explanation of the core business of each subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). 	<ul style="list-style-type: none"> • Marsetio • Dedi Syarif • Usman • Heru Sukanto • Otto Ardianto • Ridwan • Djamaruddin <ul style="list-style-type: none"> • Doso Agung • Irvandi • Joko • Noerhudha • Toto Heli • Yanto • Toto Nugroho • Putut Sri Muljanto
5	27 April April 27	<p>1. Pembukaan oleh Komisaris Utama</p> <p>2. Rencana Investasi 2020 dan Timeline Pelaksanaan</p> <p>3. Strategi Pendanaan Eksternal Jangka Panjang</p> <p>4. Lain-lain, dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana KSO Benoa dengan PT Khrisna Group b. Rencana Kerja Sama Pemanfaatan BMN (KSP-BMN) Terminal Multipurpose Labuan Bajo, NTT c. Tindak Lanjut Permasalahan Gresik Jasatama; dan d. Progres Implementasi Human Capital Management System (HCMS) oleh Talent Committee Pelindo III. 	<p>1. Opening by the President Commissioner</p> <p>2. 2020 Investment Plan and Implementation Timeline</p> <p>3. Long Term External Funding Strategy</p> <p>4. Others, with the following details:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Plans of KSO Benoa with PT Khrisna Group b. BMN Utilization Cooperation Plan (KSP-BMN) Multipurpose Terminal Labuan Bajo, NTT c. Follow-up to the Gresik Jasatama Disputes; and d. Progress of the implementation of the Human Capital Management System (HCMS) by the Pelindo III Talent Committee. 	<ul style="list-style-type: none"> • Marsetio • Dedi Syarif • Usman • Heru Sukanto • Otto Ardianto • Ridwan • Djamaruddin • Ali Mothar • Ngabalin <ul style="list-style-type: none"> • Doso Agung • Irvandi • Joko • Noerhudha • Toto Heli • Yanto • Toto Nugroho • Putut Sri Muljanto



No.	Tanggal / Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Dewan Komisaris yang Hadir / Attending BOC	Direksi yang Hadir / Attending BOD
6	13 Mei May 13	1. Pembukaan oleh Komisaris Utama. 2. Revisi Rencana Investasi 2020 dan Timeline Pelaksanaan 3. Laporan Manajemen PT Pelindo III Bulan Maret 2020 dan Triwulan I Tahun 2020 4. Laporan Kesiapan Pelatihan Pandu Laut Dalam untuk Traffic Separation Scheme (TSS)	1. Opening by the President Commissioner. 2. Revised 2020 Investment Plan and Implementation Timeline 3. Management Report of PT Pelindo III for March 2020 and Quarter I of 2020 4. Deep Sea Pilot Training Preparedness Report for a Traffic Separation Scheme (TSS)	<ul style="list-style-type: none"> • Marsetio • Dedi Syarif • Usman • Heru Sukanto • Otto Ardianto • Ridwan • Djamaruddin • Ali Mochtar • Ngabalin <ul style="list-style-type: none"> • Doso Agung • Irvandi • Joko • Noerhudha • Toto Heli • Yanto • Toto Nugroho • Putut Sri • Muljanto
7	2 Juni June 2	1. Pembukaan oleh Komisaris Utama 2. Kinerja Perusahaan s.d April 2020 3. Kebijakan Pengadaan Barang & Jasa (Khususnya terkait penggunaan Produk Dalam Negeri)	1. Opening by the President Commissioner 2. Company Performance until April 2020 3. Goods & Services Procurement Policy (Especially regarding the use of Domestic Products)	<ul style="list-style-type: none"> • Marsetio • Dedi Syarif • Usman • Heru Sukanto • Otto Ardianto • Ridwan • Djamaruddin • Ali Mochtar • Ngabalin <ul style="list-style-type: none"> • Doso Agung • Irvandi • Joko • Noerhudha • Toto Heli • Yanto • Toto Nugroho • Putut Sri • Muljanto
8	11 Juni June 11	Pembahasan Persiapan RUPS Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan (Audited) Tahun Buku 2019	Discussion on GMS Preparation Ratification of the Annual Financial Statements (Audited) for the 2019 Fiscal Year	<ul style="list-style-type: none"> • Marsetio • Dedi Syarif • Usman • Heru Sukanto • Otto Ardianto • Ridwan • Djamaruddin <ul style="list-style-type: none"> • Doso Agung • Irvandi • Joko • Noerhudha • Toto Heli • Yanto • Toto Nugroho • Putut Sri • Muljanto
9	22 Juni June 22	1. Pembukaan oleh Komisaris Utama 2. Perkenalan Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi Baru 3. Pembahasan Strategi Pencapaian RKAP 2020 oleh Direksi Baru 4. Pembahasan Rencana dan Strategi Investasi 2020 oleh Direksi Baru	1. Opening by the President Commissioner 2. Introduction of the New Board of Commissioners and Board of Directors 3. Discussion on the Strategy for Achieving the 2020 RKAP by the New Directors 4. Discussion on 2020 Investment Plans and Strategies by the New Directors	<ul style="list-style-type: none"> • Marsetio • Dedi Syarif • Usman • Heru Sukanto • Otto Ardianto • Ridwan • Djamaruddin • Ali Mochtar • Ngabalin <ul style="list-style-type: none"> • U. Saefudin • Noer • Putut Sri • Muljanto • Boy Royanto • Kokok • Susanto • Edi Priyanto • Endot • Endrardono



No.	Tanggal / Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Dewan Komisaris yang Hadir / Attending BOC	Direksi yang Hadir / Attending BOD
10	13 Juli July 13	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja perusahaan Bulan Mei 2020 2. Potensi Business Model dan Investasi di Pelabuhan Banyuwangi dan Benoa 3. Potensi Business Model dan Investasi di Pelabuhan Semarang 4. Laporan Kesiapan Pelatihan Pandu Laut Dalam untuk TSS 5. Revisi RKAP 2020 6. Progress Klaim Asuransi Crane 7. Lain-lain : Hasil Kunjungan Kerja dan Benchmarking Tg. Priok, Surabaya, Semarang dan Benoa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Company Performance Report for May 2020 2. Potential Business Model and Investment in Banyuwangi and Benoa Ports 3. Potential Business Model and Investment in Semarang Port 4. Deep Sea Pilot Training Preparedness Report for TSS 5. Revised RKAP 2020 6. Crane Insurance Claim Progress 7. Others: Results of Work Visits and Benchmarking Tg. Priok, Surabaya, Semarang and Benoa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Maretio • Dedi Syarif • Usman • Heru Sukanto • Otto Ardianto • Ridwan • Djamaluddin • Ali Mothar • Ngabalin <ul style="list-style-type: none"> • U. Saefudin Noer • Putut Sri Muljanto • Boy Royanto • Kokok Susanto • Edi Priyanto • Endot Endrardono
11	18 Agustus August 18	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan oleh Komisaris Utama 2. Laporan Kinerja Perusahaan Semester I dan Bulan Juli Tahun 2020 3. Pembahasan Isu Strategis Pengembangan JIipe, dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> a. Kelangsungan investasi PT Freeport Indonesia di BKMS & BMS b. Permasalahan izin pengalihan lahan Kalimati dalam upaya revitalisasi sebagai fungsi retensi Banjir dari Ditjen SDA Kementerian PUPR c. Permasalahan pipa gas melintang di Pelabuhan (BMS) yang menghambat pengembangan JIipe 4. Lain-lain: Tindak lanjut hasil rapat sebelumnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opening by the President Commissioner 2. Company Performance Report Semester I and July 2020 3. Discussion of JIPE Development Strategic Issues, in terms of: <ul style="list-style-type: none"> a. PT Freeport Indonesia's investment continuity in BKMS & BMS b. The issue of land transfer permit in Kalimati in an effort to revitalize as a flood retention function from the Directorate General of Natural Resources, Ministry of Public Works and Human Settlements c. Transverse gas pipeline issues at the Port (BMS) that hinder the development of JIPE 4. Other: Follow-up results of previous meetings 	<ul style="list-style-type: none"> • Maretio • Dedi Syarif • Usman • Heru Sukanto • Otto Ardianto • Ridwan • Djamaluddin <ul style="list-style-type: none"> • U. Saefudin Noer • Putut Sri Muljanto • Boy Royanto • Kokok Susanto • Edi Priyanto • Endot Endrardono



No.	Tanggal / Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Dewan Komisaris yang Hadir / Attending BOC	Direksi yang Hadir / Attending BOD
12	17 September September 17	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan oleh Komisaris Utama 2. Kinerja Perusahaan Bulan Agustus 2020 dan Simulasi Keuangan s.d. Akhir Tahun 2020 3. Pengembangan Pelabuhan Tj Intan Cilacap sebagai Hub Ekonomi Maritim Selatan Jawa 4. Rencana penggunaan Anggaran Infrastruktur dalam Pembiayaan investasi Pemerintah TA 2021 5. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opening by the President Commissioner 2. Company Performance in August 2020 and Financial Simulation until the End of 2020 3. Development of the Tj Intan Cilacap Port as the Maritime Economic Hub for South Java 4. Plan the use of Infrastructure Budget in Financing Government investment for FY 2021 5. Follow-up to Previous Meetings 	<ul style="list-style-type: none"> • Marsetio • Dedi Syarif • Usman • Heru Sukanto • Otto Ardianto <ul style="list-style-type: none"> • U. Saefudin Noer • Putut Sri Muljanto • Boy Royanto • Kokok Susanto • Edi Priyanto • Endot Endrardono
13	12 Oktober October 12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan oleh Komisaris Utama 2. Pembahasan Laporan Kinerja Perusahaan Bulan September 2020 3. Pembahasan Progres Investasi PT Pelindo III di Banyuwangi International Yacht Club 4. Pembahasan Rencana Holding Pelabuhan Indonesia 5. Agenda lain-lain <ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan SDM Perusahaan terkait Pengisian Pejabat di Bawah Direksi b. Kemajuan Proyek Strategis Nasional di JIIPe c. Kemajuan Proyek Strategis Nasional di Terminal Multipurpose Labuan Bajo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opening by the President Commissioner 2. Discussion on Company Performance Reports for September 2020 3. Discussion on PT Pelindo III's Investment Progress at the Banyuwangi International Yacht Club 4. Discussion on the Indonesian Port Holding Plan 5. Other agenda <ul style="list-style-type: none"> a. Company HC Policy regarding Recruitment of Officers Under the Board of Directors b. Progress of National Strategic Projects at JIIPe c. Progress of National Strategic Projects at the Labuan Bajo Multipurpose Terminal 	<ul style="list-style-type: none"> • Marsetio • Dedi Syarif • Usman • Heru Sukanto • Otto Ardianto • Ridwan Djamaruddin • Ali Mochtar Ngabalin <ul style="list-style-type: none"> • U. Saefudin Noer • Putut Sri Muljanto • Boy Royanto • Kokok Susanto • Edi Priyanto • Endot Endrardono
14	4 November November 4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan oleh Komisaris Utama 2. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tahun 2021 3. Lain-lain: Progres keikutsertaan PT TPS dalam konsorsium Patimban 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opening by the President Commissioner 2. Discussion on the 2021 Work Plan and Corporate Budget (RKAP) of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) 3. Others: Progress of PT TPS participation in the Patimban consortium 	<ul style="list-style-type: none"> • Marsetio • Dedi Syarif • Usman • Heru Sukanto • Otto Ardianto • Ali Mochtar Ngabalin <ul style="list-style-type: none"> • U. Saefudin Noer • Putut Sri Muljanto • Boy Royanto • Kokok Susanto • Edi Priyanto • Endot Endrardono



No.	Tanggal / Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda		Dewan Komisaris yang Hadir / Attending BOC	Direksi yang Hadir / Attending BOD
15	26 November November 26	<ol style="list-style-type: none"> Pembukaan oleh Komisaris Utama Kinerja Keuangan bulan Oktober 2020 dan Progres Audit LK Tahun 2020 Potensi Investasi Swasta di berbagai Pelabuhan di Pelindo III (i.e. Teluk Lamong, Badas, dan Shore Connection) Pembahasan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan (focal point pada elemen TKDN pada persyaratan lelang) Evaluasi hasil kunjungan kerja Labuan Bajo Lain-lain: Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya 	<ol style="list-style-type: none"> Opening by the President Commissioner Financial Performance in October 2020 and 2020 FS Audit Progress Potential Private Investments in Various Ports in Pelindo III (i.e. Teluk Lamong, Badas, and Shore Connection) Discussion on the Policy for the Procurement of Goods and Services for the Company (focal point on the TKDN element in the auction requirements) Evaluation of the results of the Labuan Bajo work visit Others: Follow-up on the Results of Previous Meetings 	<ul style="list-style-type: none"> Mersetio Dedi Syarif Usman Heru Sukanto Otto Ardianto Ridwan Djamaluddin 	<ul style="list-style-type: none"> U. Saefudin Noer Putut Sri Muljanto Boy Royanto Kokok Susanto Edi Priyanto Endot Endrardono
16	23 Desember December 23	<ol style="list-style-type: none"> Pembukaan oleh Komisaris Utama Pembahasan Rencana Penggabungan BUMN Pelabuhan Pembahasan Usulan RPP Cipta Kerja Pembahasan Hasil Audit Interim KAP EY atas Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2020 Lain-lain: Tindak Lanjut Hasil Rapat Sebelumnya 	<ol style="list-style-type: none"> Opening by the President Commissioner Discussion on the Planned Merger of Port SOEs Discussion on the Proposed Job Creation Bill Discussion on KAP EY's Interim Audit Results on the Company's Financial Statements for the 2020 Fiscal Year Others: Follow-up on the Results of Previous Meetings 	<ul style="list-style-type: none"> Mersetio Dedi Syarif Usman Heru Sukanto Otto Ardianto Ali Mochtar Ngabalin 	<ul style="list-style-type: none"> U. Saefudin Noer Putut Sri Muljanto Boy Royanto Kokok Susanto Edi Priyanto Endot Endrardono

Rekomendasi Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan

Rapat gabungan merupakan salah satu sarana bagi Dewan Komisaris untuk mengkomunikasikan rekomendasi dan arahan kepada Direksi. Adapun rekomendasi yang disampaikan Dewan Komisaris melalui rapat gabungan antara lain mengenai:

Recommendations from the Board of Commissioners in Joint Meetings

Joint meetings are one of the means for the Board of Commissioners to communicate recommendations and directions to the Board of Directors. The recommendations submitted by the Board of Commissioners through joint meetings include, among others:

No.	Rekomendasi Dewan Komisaris / Recommendations from the Board of Commission	Status Tindak Lanjut / Follow-up Status
1	Memberikan arahan terkait rumusan RKAP. / Provide advice regarding the formulation of the RKAP.	Telah Diterapkan / Has been Implemented
2	Memberikan arahan terkait perkembangan Temuan BPK, Audit oleh KAP dan SAP, serta Kajian Risiko Investasi 2020. / Provide advice regarding the development of BPK findings, audits by KAP and SAP, as well as the 2020 Investment Risk Assessment.	Telah Diterapkan / Has been Implemented
3	Memberikan arahan terkait persiapan RUPS Laporan Tahunan tahun buku 2019./ Provide advice regarding the preparation of the GMS for the 2019 fiscal year.	Telah Diterapkan / Has been Implemented
4	Usulan mengenai Calon Auditor KAP tahun buku 2021. / Proposals regarding Candidates for KAP Auditors for the fiscal year 2021.	Telah Diterapkan / Has been Implemented



PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dan Direksi berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawabnya yang dinilai melalui mekanisme penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi telah diatur dalam Pedoman Kerja (*Board Manual*) yang penilaiannya dilakukan dengan mempertimbangkan pencapaian indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berhasil menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya untuk dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS. Kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar maupun amanat Pemegang Saham. Hasil penilaian dan evaluasi kinerja Dewan Komisaris secara kolegial maupun individual merupakan bagian tak terpisahkan dari skema remunerasi dan kompensasi bagi anggota Dewan Komisaris serta pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Selain melalui mekanisme RUPS, penilaian kinerja Dewan Komisaris juga dilakukan bersamaan dengan penilaian (*assessment*) GCG dan penilaian pencapaian KPI.

Penilaian Dewan Komisaris berdasarkan Assessment Penerapan GCG

Perseroan secara berkala melakukan penilaian atas implementasi GCG, di mana salah satu aspek yang dievaluasi adalah aspek Dewan Komisaris sesuai dengan kerangka acuan yang dikembangkan oleh Kementerian Negara BUMN dalam Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

In carrying out their functions, duties and responsibilities, the Board of Commissioners and the Board of Directors are obliged to be accountable for their duties and responsibilities which are assessed through the performance appraisal mechanism of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The performance appraisal of the Board of Commissioners and the Board of Directors has been regulated in the Board Manual whose assessment is carried out by considering the achievement of predetermined indicators.

Performance Assessment of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners has succeeded in delivering and being accountable for their performance to be evaluated by the Shareholders at the GMS. The performance of the Board of Commissioners is determined based on the duties and obligations stated in the prevailing laws and regulations and the Articles of Association as well as the mandate of the Shareholders. The results of the assessment and evaluation of the Board of Commissioners performance both collegially and individually are an integral part of the remuneration and compensation scheme for members of the Board of Commissioners as well as consideration for Shareholders to dismiss and/or reappoint the members of the Board of Commissioners concerned.

In addition to GMS mechanism, the performance assessment of the Board of Commissioners is also carried out simultaneously with the GCG assessment and KPI achievement assessment.

The Board of Commissioners' Assessment based on the GCG Implementation Assessment

The Company periodically assesses the implementation of GCG, where one of the aspects evaluated is that of the Board of Commissioners in accordance with the terms of reference developed by the Ministry of State-Owned Enterprises in the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16 /S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.



Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris berdasarkan Assessment Penerapan GCG

Penilaian kinerja Dewan Komisaris melalui penilaian (*assessment*) penerapan GCG aspek Dewan Komisaris memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap implementasi strategi dan kebijakan yang dijalankan Direksi;
2. Pemberian rekomendasi dan arahan kepada Direksi terkait pengelolaan Perseroan;
3. Persetujuan terhadap rancangan RJPP dan RKAP yang disusun oleh Direksi;
4. Penerapan prinsip-prinsip GCG;
5. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris;
6. Pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan pengawasan yang dijalankan oleh komite-komite Dewan Komisaris;
7. Partisipasi Dewan Komisaris dalam program pengembangan kompetensi.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Pelaksanaan *assessment* GCG Perseroan tahun 2020 dilakukan secara mandiri.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Hasil *assessment* GCG aspek Dewan Komisaris tahun 2020 meraih skor sebesar 31,927 atau mencapai 91,22% dari bobot aspek Dewan Komisaris sebesar 35,00. Hasil ini meningkat dibandingkan pencapaian skor aspek Dewan Komisaris tahun 2019 sebesar 31,798 atau mencapai 90,85% dengan predikat terbilang "Sangat Baik".

Penilaian Dewan Komisaris berdasarkan Key Performance Indicator (KPI)

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris berpegang pada aturan Anggaran Dasar, Kementerian BUMN, serta Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2011, RUPS wajib menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicator*) Dewan Komisaris dalam bentuk kontrak manajemen kepada Menteri BUMN. KPI Dewan Komisaris menjadi indikator yang mengukur penilaian atas keberhasilan pelaksanaan

The Board of Commissioners Performance Assessment

Criteria based on the GCG Implementation Assessment

Assessment of the performance of the Board of Commissioners through assessment of the implementation of GCG aspects of the Board of Commissioners takes into account the following criteria:

1. Supervision of the implementation of strategies and policies implemented by the Board of Directors;
2. Providing recommendations and directions to the Board of Directors regarding the management of the Company;
3. Approval of the draft RJPP and RKAP prepared by the Board of Directors;
4. Application of GCG principles;
5. Organizing Board of Commissioners meetings;
6. Monitoring and evaluating the supervisory activities carried out by the Committees of the Board of Commissioners;
7. Participation of the Board of Commissioners in competency development programs.

Assessor

The implementation of the Company's 2020 GCG assessment was carried out independently

Results of the Performance Assessment of the Board of Commissioners

The results of the GCG assessment for the Board of Commissioners aspect in 2020 achieved a score of 31,927 or 91.22% of the Board of Commissioners aspect weight of 35.00. This result increased compared to the achievement of the 2019 Board of Commissioners aspect score of 31,798 or reached 90.85% with the predicate "Excellent".

Assessment of the Board of Commissioners based on Key Performance Indicators (KPI)

In carrying out its duties, the Board of Commissioners adheres to the rules of the Articles of Association, the Ministry of SOE, and the Guidelines for Corporate Governance. As stipulated in the Regulation of the Minister of BUMN No. PER-09/MBU/2011, the GMS is obliged to determine the Key Performance Indicator for the Board of Commissioners in the form of a management contract to the Minister of SOE. KPI of the Board of Commissioners is an indicator that measures



tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris berdasarkan KPI

Kriteria penilaian kinerja Dewan Komisaris berdasarkan KPI mencakup 10 indikator, yang terdiri dari:

1. Aspek Pengawasan dan Pengarahan, terdiri dari 6 indikator;
2. Aspek Laporan, terdiri dari 1 indikator; dan
3. Aspek Dinamis, terdiri dari 3 indikator.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris berdasarkan KPI

Berikut adalah hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris berdasarkan capaian KPI yang ditetapkan oleh RUPS:
(mohon data hasil KPI Dewan Komisaris berupa kontrak manajemen tahun 2020)

Penilaian Kinerja Direksi

Pertanggungjawaban kinerja Direksi diwujudkan melalui penilaian kinerja yang dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan target pencapaian dan KPI yang sudah disepakati bersama di awal tahun sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. Dalam menjalankan tugas operasionalnya, Direksi mengacu pada Anggaran Dasar, Pedoman Tata Kelola, peraturan yang diterbitkan Pemegang Saham, serta komitmennya terhadap KPI yang tertuang dalam kontrak manajemen.

Kinerja Direksi akan dievaluasi secara berkala oleh Dewan Komisaris secara individual maupun kolegial, dan melaporkan hasilnya kepada Pemegang Saham dan akan menjadi salah satu pertimbangan Pemegang Saham dalam keputusan RUPS Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan PKBL Pelindo III. Adapun selain melalui mekanisme RUPS, penilaian kinerja Direksi dapat diukur berdasarkan penilaian (*assessment*) GCG aspek Direksi dan pencapaian KPI.

the success of the implementation of the duties and responsibilities of supervision and provision of advice to the Board of Commissioners in accordance with applicable regulations.

Performance Assessment Criteria for the Board of Commissioners based on KPI

The criteria for evaluating the performance of the Board of Commissioners based on KPI include 10 indicators, which consist of:

1. Supervision and Directive Aspects, consisting of six Indicators;
2. Report Aspect, consisting of one indicator; and
3. Dynamic Aspects, consisting of three indicators

Results of the Board of Commissioners Performance Assessment based on KPI

Following are the results of the performance appraisal of the Board of Commissioners based on the KPI achievements determined by the GMS:

Performance Assessment of the Board of Directors

The performance accountability of the Board of Directors is manifested through performance appraisals conducted by the Board of Commissioners based on the achievement targets and KPIs that have been mutually agreed at the beginning of the year according to the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors. In carrying out its operational duties, the Board of Directors refers to the Articles of Association, Governance Guidelines, regulations issued by Shareholders, as well as their commitment to KPIs as stated in the management contract.

The performance of the Board of Directors will be periodically evaluated by the Board of Commissioners individually and collegially, and report the results to the Shareholders and will become one of the considerations of the Shareholders in the decision-making process in the GMS for the Ratification of the Annual Financial Statement and PKBL Pelindo III. As well as through the GMS mechanism, the performance assessment of the Board of Directors can be measured based on the assessment of the Board of Directors aspects of GCG and the achievement of KPI.



Penilaian Direksi berdasarkan **Assessment Penerapan GCG**

Perseroan melakukan penilaian atas implementasi GCG, di mana salah satu aspek penilaiannya adalah Direksi. Kerangka penilaian yang digunakan mengacu pada pelaksanaan assessment GCG yang dikembangkan oleh Kementerian Negara BUMN berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Pelaksanaan penilaian GCG untuk aspek Direksi dilakukan melalui beberapa tahapan, di antaranya penyampaian dokumen, pengisian kuesioner dan wawancara, pelaporan kinerja, capaian, dan rekomendasi terhadap kinerja Direksi.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi berdasarkan **Assessment Penerapan GCG**

Penilaian kinerja Direksi melalui assessment GCG aspek Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana jangka pendek dan jangka panjang perusahaan.
2. Penerapan strategi dan inisiatif pengelolaan perusahaan.
3. Pemenuhan target kinerja perusahaan.
4. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.
5. Pelaksanaan pengembangan kompetensi Direksi.
6. Pelaksanaan pengendalian internal terhadap implementasi rencana, kebijakan, program, hingga evaluasi perusahaan.
7. Pengelolaan benturan kepentingan Direksi dan satuan kerja di bawahnya.
8. Penyelenggaraan rapat Direksi.
9. Pemberian rekomendasi dan keputusan Direksi.
10. Kualitas pengawasan intern.
11. Pemenuhan pembagian hak dan kewajiban dengan RUPS dan Dewan Komisaris.
12. Keterbukaan dan penyampaian informasi kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.

The Board of Directors' Assessment Based on the GCG Implementation Assessment

The Company assesses the implementation of GCG, where one aspect of the assessment is the Board of Directors. The assessment framework used refers to the implementation of the GCG assessment developed by the State Ministry for SOEs based on the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

The implementation of GCG assessment for the aspects of the Board of Directors is carried out in several stages, including submitting documents, filling out questionnaires and interviews, reporting on performance, achievements, and recommendations on the performance of the Board of Directors.

Performance Assessment Criteria for the Board of Directors based on the GCG Implementation Assessment

The performance assessment of the Board of Directors through the GCG assessment of the Board of Directors aspects is carried out by considering the following criteria:

1. Formulation of the Company's short and long term plans.
2. Implementation of Company management strategies and initiatives.
3. Fulfillment of Company performance targets.
4. A clear division of duties and responsibilities.
5. Implementation of competency development for the Board of Directors.
6. Implementation of internal control over the implementation of plans, policies, programs, and Company evaluations.
7. Management of conflicts of interest for the Board of Directors and work units under it.
8. Organizing the Board of Directors meeting.
9. Providing recommendations and decisions of the Board of Directors.
10. Internal control quality.
11. Fulfillment of the distribution of rights and obligations with the GMS and the Board of Commissioners.
12. Disclosure and delivery of information to Shareholders and the Board of Commissioners.



Pihak yang Melakukan Penilaian

Pelaksanaan *assessment* GCG Perseroan tahun 2020 dilakukan secara mandiri.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi

Hasil *assessment* GCG aspek Direksi tahun 2020 meraih skor sebesar 32,489 atau mencapai 92,83% dari bobot aspek Direksi sebesar 35,00. Hasil ini meningkat dibandingkan pencapaian skor aspek Direksi tahun 2019 sebesar 32,385 atau mencapai 92,53% dengan predikat terbilang "Sangat Baik".

Penilaian Direksi berdasarkan *Key Performance Indicator (KPI)*

Setiap tahun, Perseroan secara berkala melakukan penilaian kinerja Direksi berdasarkan pencapaian *Key Performance Indicator (KPI)* yang telah disepakati pada awal tahun. Penilaian kinerja Direksi berdasarkan KPI dilakukan oleh Dewan Komisaris secara kolegial maupun individual untuk kemudian dilaporkan hasilnya kepada Pemegang Saham dalam RUPS Pengesahan Laporan Tahunan dan PKBL.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi berdasarkan KPI

Kriteria penilaian kinerja Direksi berdasarkan KPI mencakup 13 indikator, yang terdiri dari:

1. Aspek Keuangan, terdiri dari 8 indikator;
2. Aspek Operasional, terdiri dari 4 indikator; dan
3. Aspek Administrasi, terdiri dari 4 indikator.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi berdasarkan KPI

Informasi mengenai pencapaian kinerja Direksi terlihat dari pencapaian KPI tahun 2020 yang tercantum dalam Laporan Tahunan ini, bab Tata Kelola Perusahaan, sub bab *Key Performance Indicator (KPI)*.

Assessor

The implementation of the Company's 2020 GCG assessment was carried out independently.

Results of the Board of Directors Performance Assessment

The results of the GCG assessment for the Board of Directors aspect in 2020 achieved a score of 32.489 or 92.83% of the Board of Directors aspect weight of 35.00. This result decreased compared to the achievement of the score for the Board of Directors aspect in 2019 of 32.385 or reaching 92.53% with the predicate "Excellent".

The Board of Directors' assessment is based on the Key Performance Indicator (KPI)

Every year, the Company periodically assesses the performance of the Board of Directors based on the achievement of the Key Performance Indicator (KPI) agreed at the beginning of the year. Assessment of the performance of the Board of Directors based on KPI is carried out by the Board of Commissioners both collegially and individually to then reports the results to the Shareholders in the Annual General Meeting of Shareholders and PKBL Report.

Performance Assessment Criteria for the Board of Directors based on KPI

The criteria for evaluating the performance of the Board of Directors based on the KPI include 13 indicators, which consist of:

1. Financial Aspects, consisting of 8 indicators;
2. Operational Aspect, consisting of 4 indicators; and
3. Administrative Aspects, consisting of 4 indicators.

Results of the Board of Directors Performance Appraisal based on KPI

Information regarding the performance achievements of the Board of Directors can be seen from the 2020 KPI achievements listed in this Annual Report, in the Corporate Governance chapter, in the Key Performance Indicator (KPI) section.



KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris dan Direksi berhak untuk memperoleh remunerasi yang layak sebagai bentuk imbal jasa dan kontribusinya terhadap Perseroan. Penetapan kebijakan, skema, prosedur, hingga besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi menggunakan formula yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan berbagai faktor penentu lainnya.

Dasar Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, jo. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/06/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, jo. Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/06/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, jo. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN yang dituangkan dalam Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018 dan PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tanggal 3 September 2018 tentang Reviu dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual* dan *Code of Corporate Governance*); bahwa penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris mengacu pada hasil RUPS dengan memperhatikan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Perseroan.

REMUNERATION POLICY FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners and the Board of Directors are entitled to receive appropriate remuneration for the implementation of their duties and functions as a form of remuneration and contribution to the Company. Determination of policies, schemes, procedures, and the amount of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors using the formula stipulated in the prevailing laws and regulations, the Articles of Association, and various other determining factors.

Basis of Remuneration Policy for the Board of Commissioners and Board of Directors

According to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-04/MBU/06/2014 dated March 10, 2014 on Guidelines to Determine the Income of the BOD, BOC, and Supervisory Board of SOEs, jo. Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/06/2017 dated June 19, 2017 on the Second Amendment to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-04/MBU/06/2014 dated March 10, 2014 on Guidelines to Determine the Income of the BOD, BOC, and Supervisory Board of SOEs, jo. Regulation of the Minister of SOE No. PER-06/MBU/06/2018 dated 4 June 2018 on the Third Amendment to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-04/MBU/06/2014 on Guidelines to Determine the Income of the BOD, BOC, and Supervisory Board of SOEs, jo. Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/05/2019 dated May 31, 2019 on the Fourth Amendment to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-04/MBU/06/2014 on Guidelines to Determine the Income of the BOD, BOC, and Supervisory Board of SOEs stipulated in the Joint Decree of the BOC and BOD No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018 and PER.0050/HK.01/HOFC-2018 dated September 3, 2018 in the Review and Revision of GCG (Board Manual and Code of Corporate Governance) the determination of remuneration for the BOD and BOC refers to the resolutions of GMS and shall take into account the result of a review conducted by the Company.



Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Pemegang Saham menetapkan penyesuaian remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan pertimbangan:

- Faktor skala usaha;
- Faktor kompleksitas usaha;
- Tingkat inflasi;
- Kondisi dan kemampuan Perseroan

Selain itu, dalam melakukan kajian penetapan remunerasi tersebut, Perseroan turut memberikan rekomendasi dengan mempertimbangkan pencapaian KPI, kontrak manajemen, dan tingkat kesehatan perusahaan.

Hasil kajian tersebut kemudian akan disampaikan oleh Dewan Komisaris sebagai bahan usulan penetapan remunerasi kepada Pemegang Saham berdasarkan lampiran dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019. Rumusan untuk menghitung penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Pemegang Saham.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Formula bagi struktur dan komponen remunerasi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Indicators for Determining the Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Shareholders determine the adjustment of the remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors with the following considerations:

- Business scale
- Business complexity
- Inflation rate
- Company's condition and capability

In conducting the review, the Company considers various factors, such as business scale, business complexity, inflation rate, financial condition and capability, and Company's performance. There are also several other influential factors, namely KPI, management contract, and the Company's soundness level.

The review result is submitted to the BOC to be proposed to the Shareholders to determine remuneration according to the attachment of Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/05/2019 dated 31 May 2019. The formula to calculate the BOC and BOD remuneration is determined by the Shareholders.

Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Structure

Board of Commissioners Remuneration Structure

The remuneration structure and components of the Board of Commissioners are as follows:

No.	Jenis Penghasilan / Remuneration Type	Besaran Maksimum Sesuai Keputusan RUPS dan Peraturan Menteri BUMN / Maximum Amount According to the Resolution of GMS and Regulation of the Minister of SOE	Dasar Penetapan / Basis of Determination
1	Honorarium	<ul style="list-style-type: none">• Komisaris Utama: 45% dari gaji Direktur Utama• Anggota Dewan Komisaris: 90% dari Komisaris Utama• President Commissioner: 45% of the salary of the President Director• Commissioner: 90% of the Honorarium of the President Commissioner	PER-04/MBU/2014 jo. PER-02/MBU/06/2016 jo. PER-01/MBU/06/2017 jo. PER-06/MBU/06/2018 jo. PER-01/MBU/05/2019



No.	Jenis Penghasilan / Remuneration Type	Besaran Maksimum Sesuai Keputusan RUPS dan Peraturan Menteri BUMN / Maximum Amount According to the Resolution of GMS and Regulation of the Minister of SOE	Dasar Penetapan / Basis of Determination
2 Tunjangan / Allowances			
• Tunjangan Hari Raya / Holiday Allowance	1 kali honorarium / One honorarium	PER-04/MBU/2014 jo. PER-02/MBU/06/2016 jo. PER-01/MBU/06/2017 jo. PER-06/MBU/06/2018 jo. PER-01/MBU/05/2019	
• Tunjangan Transportasi / Transportation Allowance	20% dari honorarium per bulan / 20% of monthly honorarium	PER-04/MBU/2014 jo. PER-02/MBU/06/2016 jo. PER-01/MBU/06/2017 jo. PER-06/MBU/06/2018 jo. PER-01/MBU/05/2019	
• Asuransi Purna Jabatan / Post-Employment Insurance	Premi yang ditanggung oleh Perseroan sebesar 25% dari honorarium dalam 1 tahun / Premium at the expense of the Company amounting to 25% of honorarium in 1 year.	PER-04/MBU/2014 jo. PER-02/MBU/06/2016 jo. PER-01/MBU/06/2017 jo. PER-06/MBU/06/2018 jo. PER-01/MBU/05/2019	
3 Fasilitas / Facilities			
• Fasilitas Kesehatan / Health Facility	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (at cost) / In the form of health insurance or reimbursement of medical treatment (at cost).	PER-04/MBU/2014 jo. PER-02/MBU/06/2016 jo. PER-01/MBU/06/2017 jo. PER-06/MBU/06/2018 jo. PER-01/MBU/05/2019	
• Fasilitas Bantuan Hukum / Legal aid Facility	Sebesar pemakaian (at cost)	PER-04/MBU/2014 jo. PER-02/MBU/06/2016 jo. PER-01/MBU/06/2017 jo. PER-06/MBU/06/2018 jo. PER-01/MBU/05/2019	

Struktur Remunerasi Direksi

Formula bagi struktur dan komponen remunerasi Direksi adalah sebagai berikut:

Board of Directors Remuneration Structure

The remuneration structure and components of the Board of Directors are as follows:

No.	Jenis Penghasilan / Remuneration Type	Besaran Maksimum Sesuai Keputusan RUPS dan Peraturan Menteri BUMN / Maximum Amount According to the Resolution of GMS and Regulation of the Minister of SOE	Dasar Penetapan / Basis of Determination
1 Honorarium			
• Direktur Utama: 100%			
• Direktur yang membidangi SDM: 90% dari Direktur Utama			
• Direktur lainnya 85% dari Direktur Utama			
• President Director: 100%			
• Human Capital Director: 90% of the President Director			
• Other Directors: 85% of the President Director			
2 Tunjangan / Allowances			
• Tunjangan Hari Raya / Holiday Allowance	1 kali Gaji / 1 time salary	PER-04/MBU/2014 jo. PER-02/MBU/06/2016 jo. PER-01/MBU/06/2017 jo. PER-06/MBU/06/2018 jo. PER-01/MBU/05/2019	
• Asuransi Purna Jabatan / Post-Employment Insurance	Premi yang ditanggung oleh Perseroan sebesar 25% dari honorarium dalam 1 tahun / Premium at the expense of the Company amounting to 25% of honorarium in 1 year.	PER-04/MBU/2014 jo. PER-02/MBU/06/2016 jo. PER-01/MBU/06/2017 jo. PER-06/MBU/06/2018 jo. PER-01/MBU/05/2019	



No.	Jenis Penghasilan / Remuneration Type	Besaran Maksimum Sesuai Keputusan RUPS dan Peraturan Menteri BUMN / Maximum Amount According to the Resolution of GMS and Regulation of the Minister of SOE	Dasar Penetapan / Basis of Determination
• Tunjangan Perumahan / Housing Allowance	Rp25.000.000,00 per bulan / Rp25,000,000 per month	Sesuai PER-04/MBU/2014 jo. PER-02/ MBU/06/2016 jo. PER-01/MBU/06/2017 jo. PER-06/MBU/06/2018 jo. PER-01/ MBU/05/2019 apabila perusahaan telah menyediakan rumah jabatan maka wajib dipergunakan sampai masa jabatan Direksi berakhir dan yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan perumahan. / According to PER-04/ MBU/2014 jo. PER-02/MBU/06/2016 jo. PER- 01/MBU/06/2017 jo. PER-06/MBU/06/2018 jo. PER-01/ MBU/05/2019 if the Company has provided an office house, then it shall be used until the term of office ends and the concerned BOD shall not be given housing allowance.	

3 Fasilitas / Facilities			
• Fasilitas Kendaraan / Vehicle Facilities	1 unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan / One unit including maintenance cost and operational cost, taking into account the Company's financial conditions	Spesifikasi dan jenis kendaraan diatur oleh Dewan Komisaris dengan batas maksimal 3.500 cc / The specifications and type of the vehicle is determined by the Board of Commissioners with a limit of 3,500cc maximum	
• Fasilitas Kesehatan / Health Facilities	Dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (at cost). / In the form of health insurance or reimbursement of medical treatment (at cost).	PER-04/MBU/2014 jo. PER-02/MBU/06/2016 jo. PER-01/MBU/06/2017 jo. PER-06/ MBU/06/2018 jo. PER-01/MBU/05/2019	
• Fasilitas Bantuan Hukum / Legal Aid Facility	Sebesar pemakaian (at cost)	PER-04/MBU/2014 jo. PER-02/MBU/06/2016 jo. PER-01/MBU/06/2017 jo. PER-06/ MBU/06/2018 jo. PER-01/MBU/05/2019	

Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi**Total Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors****Rekapitulasi Jumlah Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris****Summary of the Total Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors**

(dalam Rupiah / in Rupiah)

No.	Jabatan / Position	Honorarium per Bulan / Honorarium per Month	Keterangan / Description
1	Direktur Utama / President Director	216.000.000	Perbandingan gaji Direktur Utama dengan Direktur SDM, Direktur lainnya, Komisaris Utama, dan Komisaris adalah 100%:90%:85%:45%:90% / Salary comparison between the President Director with the Human Capital Director, other Directors, President Commissioner, and Commissioners is 100%:90%:85%:45%90%
2	Direktur SDM / Human Capital Director	194.400.000	
3	Direktur lainnya / Other Directors	183.600.000	
4	Komisaris Utama / President Commisione	97.200.000	
5	Komisaris / Commissioners	87.480.000	



Rincian lebih lengkap mengenai jumlah remunerasi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris

(dalam Rupiah / in Rupiah)

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Honorarium	Tunjangan & Fasilitas / Allowances & Facilities	Take-Home Pay per Bulan / Monthly Take-Home-Pay
1	Maretio	Komisaris Utama / President Commissioners	97.200.000	19.440.000	116.640.000
2	Heru Sukanto	Komisaris / Commissioner	87.480.000	17.496.000	104.976.000
3	Otto Ardianto	Komisaris / Commissioner	87.480.000	17.496.000	104.976.000
4	Ridwan Djamaruddin	Komisaris / Commissioner	87.480.000	17.496.000	104.976.000
5	Ali Mochtar Ngabalin	Komisaris / Commissioner	87.480.000	17.496.000	104.976.000
6	Dedi Syarif Usman	Komisaris / Commissioner	87.480.000	17.496.000	104.976.000

*) Pengangkatan Maretio, Heru Sukanto, Otto Ardianto, Otto Ardianto, Ridwan Djamaruddin dan Ali Mochtar Ngabalin berdasarkan SK No. SK-107/MBU/04/2020 tanggal 3 April 2020 menggantikan Ahmad Bambang, Wahju Satrio Utomo, Hedy Lugito dan Zainal Abidin. / The appointment of Maretio, Heru Sukanto, Otto Ardianto, Otto Ardianto, Ridwan Djamaruddin and Ali Mochtar Ngabalin was based on Decree No. SK-107/MBU/04/2020 dated April 3, 2020 replacing Ahmad Bambang, Wahju Satrio Utomo, Hedy Lugito and Zainal Abidin.

Jumlah Remunerasi Direksi

(dalam Rupiah / in Rupiah)

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Honorarium	Tunjangan & Fasilitas / Allowances & Facilities	Take-Home Pay per Bulan / Monthly Take-Home-Pay
1	U. Saefudin Noer	Direktur Utama / President Director	216.000.000	25.000.000	241.000.000
2	Putut Sri Muljanto	Direktur Operasi dan Komersial / Operations and Commercial Director	183.600.000	25.000.000	208.600.000
3	Boy Robyanto	Direktur Teknik / Engineering Director	183.600.000	25.000.000	208.600.000
4	Edi Priyanto	Direktur Sumber Daya Manusia / Human Capital Director	194.400.000	25.000.000	219.400.000
5	Endot Endrardono	Direktur Keuangan / Financial Director	183.600.000	25.000.000	208.600.000
6	Kokok Susanto	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis / Business Transformation and Development Director	183.600.000	25.000.000	208.600.000

*) Pengangkatan U. Saefudin Noer, Boy Robyanto, Edi Priyanto, Endot Endrardono dan Kokok Susanto berdasarkan SK No. SK-209/MBU/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 menggantikan Doso Agung, Joko Noerhudha, Toto Heliyanto, Irvandi Gustari dan Toto Nugroho / The appointment of U. Saefudin Noer, Boy Robyanto, Edi Priyanto, Endot Endrardono and Kokok Susanto was based on Decree No. SK-209/MBU/06/2020 dated June 18, 2020 replacing Doso Agung, Joko Noerhudha, Toto Heliyanto, Irvandi Gustari and Toto Nugroho

Hence, the details of the Board of Commissioners remuneration is as follows:

Total Remuneration of the Board of Commissioners

(dalam Rupiah / in Rupiah)

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Honorarium	Tunjangan & Fasilitas / Allowances & Facilities	Take-Home Pay per Bulan / Monthly Take-Home-Pay
-----	-------------	--------------------	------------	---	---

1	Maretio	Komisaris Utama / President Commissioners	97.200.000	19.440.000	116.640.000
2	Heru Sukanto	Komisaris / Commissioner	87.480.000	17.496.000	104.976.000
3	Otto Ardianto	Komisaris / Commissioner	87.480.000	17.496.000	104.976.000
4	Ridwan Djamaruddin	Komisaris / Commissioner	87.480.000	17.496.000	104.976.000
5	Ali Mochtar Ngabalin	Komisaris / Commissioner	87.480.000	17.496.000	104.976.000
6	Dedi Syarif Usman	Komisaris / Commissioner	87.480.000	17.496.000	104.976.000

Total Remuneration of the Board of Directors

(dalam Rupiah / in Rupiah)

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Honorarium	Tunjangan & Fasilitas / Allowances & Facilities	Take-Home Pay per Bulan / Monthly Take-Home-Pay
-----	-------------	--------------------	------------	---	---

1	U. Saefudin Noer	Direktur Utama / President Director	216.000.000	25.000.000	241.000.000
2	Putut Sri Muljanto	Direktur Operasi dan Komersial / Operations and Commercial Director	183.600.000	25.000.000	208.600.000
3	Boy Robyanto	Direktur Teknik / Engineering Director	183.600.000	25.000.000	208.600.000
4	Edi Priyanto	Direktur Sumber Daya Manusia / Human Capital Director	194.400.000	25.000.000	219.400.000
5	Endot Endrardono	Direktur Keuangan / Financial Director	183.600.000	25.000.000	208.600.000

6	Kokok Susanto	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis / Business Transformation and Development Director	183.600.000	25.000.000	208.600.000
---	---------------	--	-------------	------------	-------------

**Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020****Tantiem of the Board of Directors and Board of Commissioners in 2020**

(dalam Rupiah / in Rupiah)

No.	Jabatan / Position	Tantiem	Keterangan / Description
1	Direktur Utama / President Director	Rp.4.480.732.700,-	
2	Direktur / Director	Rp.3.808.622.795,-	
3	Direktur lainnya / Other Directors	Rp.4.032.659.430,-	
4	Komisaris Utama / President Commissioner	Rp.2.016.329.715,-	Perbandingan tantiem Direktur Utama dengan Direktur, Komisaris Utama, dan Komisaris adalah 100%:90%:45%:90% / Tantiem comparison between the President Director with other Directors, President Commissioner, and other Commissioners is 100%:90%:45%:90%
5	Komisaris / Commissioners	Rp.1.814.696.744,-	

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi 2018-2020**Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2018-2020**

No.	Jabatan / Position	2018*		2019*		2020*	
		Honorarium	Tunjangan & Fasilitas** / Allowances & Facilities**	Honorarium	Tunjangan & Fasilitas** / Allowances & Facilities**	Honorarium	Tunjangan & Fasilitas** / Allowances & Facilities**
1	Direktur Utama / President Director	180.000.000	25.000.000	216.000.000	25.000.000	216.000.000	25.000.000
2	Direktur / Director	153.000.000	25.000.000	194.400.000	25.000.000	194.400.000	25.000.000
3	Direktur lainnya / Other Directors	153.000.000	25.000.000	183.600.000	25.000.000	183.600.000	25.000.000
4	Komisaris Utama / President Commissioner	65.700.000	13.140.000	97.200.000	19.440.000	97.200.000	19.440.000
5	Komisaris / Commissioners	59.130.000	11.826.000	87.480.000	17.496.000	87.480.000	17.496.000

Keterangan:

*) Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan setiap bulan. / Salary and Allowances that are paid monthly

**) Tunjangan/Fasilitas Direksi: Penjumlahan mobilitas dan perumahan, sedangkan pada tahun 2018 hanya tunjangan perumahan. Tunjangan/Fasilitas Komisaris: Tunjangan mobilitas. / Allowance/Facilities of the BOD: Sum of mobility and housing, while in 2018 is only the housing allowance. Allowance/Facilities of the Commissioners: Mobility allowance.

INFORMASI HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dalam menjaga independensi dan mencegah benturan kepentingan, Dewan Komisaris dan Direksi tidak diperkenankan memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun Direksi, baik menurut garis lurus maupun ke samping. Selain itu, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi juga tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan Pemegang Saham tentang Pelaksanaan GCG.

INFORMATION ON AFFILIATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

To uphold its independence and avoid conflict of interests, the Board of Commissioners and the Board of Directors are prohibited to have a family relationship up to second degree with fellow members of the Board of Commissioners or Board of Directors, both vertically and horizontally. In addition, all members of the BOC and BOD of the Company also have no concurrent positions that are prohibited through the regulation of Shareholders on GCG implementation.



Informasi hubungan afiliasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Information on the affiliation of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors can be seen in the table below:

Informasi Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Information on Affiliation of the Board of Commissioners

Nama / Name	Hubungan dengan Organ Pelindo III / Relationship with Pelindo III Organ						Hubungan Kepengurusan di Perusahaan Lain / Management in Other Companies					
	Dewan Komisaris / Board of Commissioners		Direksi / Board of Directors		Pemegang Saham / Shareholders		Dewan Komisaris / Board of Commissioners		Direksi / Board of Directors		Pemegang Saham / Shareholders	
	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No
Marselio	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Heru Sukanto	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Otto Ardianto	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Ridwan Djamaruddin	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Ali Mochtar Ngabalin	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Dedi Syarif Usman	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

Informasi Hubungan Afiliasi Direksi

Information on Affiliation of the Board of Directors

Nama / Name	Hubungan dengan Organ Pelindo III / Relationship with Pelindo III Organ						Hubungan Kepengurusan di Perusahaan Lain / Management in Other Companies					
	Dewan Komisaris / Board of Commissioners		Direksi / Board of Directors		Pemegang Saham / Shareholders		Dewan Komisaris / Board of Commissioners		Direksi / Board of Directors		Pemegang Saham / Shareholders	
	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No
U. Saefudin Noer	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Putut Sri Muljanto	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Boy Robyanto	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Edi Priyanto	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Endot Endrardono	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Kokok Susanto	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓



INFORMASI KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Informasi mengenai kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Informasi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Nama / Name	Jabatan / Position	Kepemilikan Saham / Share Ownership	
		Pelindo III	Perusahaan Lain / Other Companies
Marsetio	Komisaris Utama / President Commissioner	Nihil / None	Nihil / None
Heru Sukanto	Komisaris / Commissioner	Nihil / None	Nihil / None
Otto Ardianto	Komisaris / Commissioner	Nihil / None	Nihil / None
Ridwan Djamaruddin	Komisaris / Commissioner	Nihil / None	Nihil / None
Ali Mochtar Ngabalin	Komisaris / Commissioner	Nihil / None	Nihil / None
Dedi Syarif Usman	Komisaris / Commissioner	Nihil / None	Nihil / None

Informasi Kepemilikan Saham Direksi

Nama / Name	Jabatan / Position	Kepemilikan Saham / Share Ownership	
		Pelindo III	Perusahaan Lain / Other Companies
U. Saefudin Noer	Direktur Utama / President Director	Nihil / None	Nihil / None
Putut Sri Muljanto	Direktur Operasi dan Komersial / Operations and Commercial Director	Nihil / None	Nihil / None
Boy Robyanto	Direktur Teknik / Engineering Director	Nihil / None	Nihil / None
Edi Priyanto	Direktur Sumber Daya Manusia / Human Capital Director	Nihil / None	Nihil / None
Endot Endrardono	Direktur Keuangan / Financial Director	Nihil / None	Nihil / None
Kokok Susanto	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis / Business Transformation and Development Director	Nihil / None	Nihil / None

INFORMATION ON SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Information on the share ownership of the Board of Commissioners and Board of Directors can be seen in the following table:

Information on Share Ownership of the Board of Commissioners

Nama / Name	Jabatan / Position	Kepemilikan Saham / Share Ownership	
		Pelindo III	Perusahaan Lain / Other Companies
U. Saefudin Noer	Direktur Utama / President Director	Nihil / None	Nihil / None
Putut Sri Muljanto	Direktur Operasi dan Komersial / Operations and Commercial Director	Nihil / None	Nihil / None
Boy Robyanto	Direktur Teknik / Engineering Director	Nihil / None	Nihil / None
Edi Priyanto	Direktur Sumber Daya Manusia / Human Capital Director	Nihil / None	Nihil / None
Endot Endrardono	Direktur Keuangan / Financial Director	Nihil / None	Nihil / None
Kokok Susanto	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis / Business Transformation and Development Director	Nihil / None	Nihil / None



KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Perkembangan usaha yang sejalan dengan perkembangan industri yang dinamis mendorong perlunya pengelolaan Perseroan yang mampu mengakomodasi dan beradaptasi dengan perubahan yang ada. Hal ini dapat tercapai dengan kecukupan kompetensi, kualifikasi, pengalaman, dan latar belakang dari top manajemen, baik Dewan Komisaris dan Direksi, guna menghadirkan alternatif sudut pandang dan paradigma yang lebih beragam dalam pengambilan keputusan. Selain itu, keberagaman komposisi juga bertujuan untuk memenuhi prinsip GCG yang prinsip keadilan (*fairness*) yang mampu mewakili kelompok usia, latar belakang pendidikan dan keahlian, serta keberagaman pengalaman, tanpa mengorbankan implementasi kebhinekaan dan aspek-aspek lainnya yang bersifat non kepentingan.

Komposisi dan penentuan penunjukan Dewan Komisaris merupakan hak Pemegang Saham melalui RUPS, dipilih berdasarkan integritas, berdedikasi, memahami permasalahan manajemen dan memiliki pengetahuan yang memadai sesuai PER-02/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018 dan PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tanggal 3 September 2018 tentang Reviu dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual* dan *Code of Corporate Governance*).

Internalisasi atas regulasi yang mengatur tentang keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dituangkan dalam Dasar kebijakan internal Perusahaan yang tercantum dalam *Board Manual*.

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi terlihat dalam latar belakang pendidikan, keahlian, usia, dan jenis kelamin yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

DIVERSITY IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Business developments that are in line with dynamic industrial developments encourage the need for Company management that is able to accommodate and adapt to existing changes. This can be achieved with sufficient competence, qualifications, experience, and background from top management, both the Board of Commissioners and the Board of Directors, in order to present alternative perspectives and paradigms that are more diverse in decision making. In addition, the diversity of composition also aims to fulfill the GCG principles of fairness that are able to represent age groups, educational backgrounds and expertise, as well as diversity of experience, without compromising the implementation of diversity and other non-interested aspects.

The composition and determination of the BOC appointment are the rights of Shareholders exerted through GMS. The BOC is selected based on their integrity, dedication, understanding of management issues and have sufficient knowledge according to PER-02/MBU/02/2015 dated February 17, 2015 set forth in Joint Regulation of the BOC and BOD No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018 and PER.0050/HK.01/HOFC-2018 dated September 3, 2018 on Review and Revision of GCG (Board Manual and Code of Corporate Governance).

The internalisation of regulations stipulating the diversity in BOC and BOD composition is set forth in the Company's internal policy basis contained in the Board Manual.

The diversity in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors is evident by the educational background, expertise, age, and gender which can be seen in the following table:

**Tabel Keberagaman Dewan Komisaris****Table of Diversity of the Board of Commissioners**

Nama / Name	Jabatan / Position	Usia / Age	Jenis Kelamin / Gender	Latar Belakang Pendidikan / Educational Background	Keahlian / Expertise
Marsetio	Komisaris Utama / President Commissioner	63	Pria / Male	TNI AL / Navy	Pertahanan Maritim / Maritime Defense
Heru Sukanto	Komisaris / Commissioner	63	Pria / Male	Hukum dan Manajemen Pemasaran / Law and Marketing Management	Finance, Banking
Otto Ardianto	Komisaris / Commissioner	46	Pria / Male	Teknik Industri dan Bisnis / Industrial Engineering and Business	Corporate Finance/ Infrastructure Investment
Ridwan Djamaruddin	Komisaris / Commissioner	57	Pria / Male	Ilmu Geologi / Geology	SDA, Kelautan, Infrastruktur / HC, Marine, Infrastructure
Ali Mochtar Ngabalin	Komisaris / Commissioner	51	Pria / Male	Ilmu Komunikasi / Communication	Komunikasi Publik / Public Communication
Dedi Syarif Usman	Komisaris / Commissioner	55	Pria / Male	Ekonomi dan Akuntansi / Economics and Accounting	Financial Analysis & Strategic Planning

Tabel Keberagaman Direksi**Table of Diversity of the Board of Directors**

Nama / Name	Jabatan / Position	Usia / Age	Jenis Kelamin / Gender	Latar Belakang Pendidikan / Educational Background	Keahlian / Expertise
U. Saefudin Noer	Direktur Utama / President Director	55 tahun	Pria / Male	Ilmu Administrasi dan Manajemen Komunikasi / Administration and Communication Management	Finance, Strategic Planning, Port Management, Business Development, GCG
Putut Sri Muljanto	Direktur Operasi dan Komersial / Operations and Commercial Director	51 tahun	Pria / Male	Manajemen / Management	Marketing, Finance, Port Operation, Business Development
Boy Robyanto	Direktur Teknik / Engineering Director	46	Pria / Male	Teknik Sipil / Civil Engineering	Engineering and Business Development
Edi Priyanto	Direktur Sumber Daya Manusia / Human Capital Director	44	Pria / Male	Kesehatan Masyarakat dan Manajemen / Public Health and Management	Dalam Bidang Human Capital, Corporate Communication, Social Responsibility, Safety Culture and Risk Manajemen.
Endot Endrardono	Direktur Keuangan / Financial Director	50	Pria / Male	Manajemen / Management	Bidang Keuangan khususnya Business Plan Perusahaan / Finance, especially in Corporate Business Plan
Kokok Susanto	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis / Business Transformation and Development Director	44	Pria / Male	Arsitektur dan Manajemen / Architecture and Management	Engineering and Business Development



ORGAN-ORGAN DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris dibantu oleh organ-organ pendukung yang bertanggung jawab langsung terhadap Dewan Komisaris. Organ-organ di bawah Dewan Komisaris meliputi:

- Sekretaris Dewan Komisaris
- Komite Audit
- Komite GCG dan Manajemen Risiko

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris secara khusus bertugas dan bertanggung jawab sebagai penghubung Dewan Komisaris dan Direksi, menjalankan tugas kesekretariatan Dewan Komisaris, mendokumentasi surat-surat, menyusun risalah rapat Dewan Komisaris, membantu penyusunan dan pelaporan laporan manajemen Dewan Komisaris, membantu koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi, serta menjalankan tugas lain yang mendukung pemenuhan fungsi Dewan Komisaris secara optimal.

Kriteria Sekretaris Dewan Komisaris

Mengacu pada peraturan yang berlaku, Sekretaris Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan meliputi:

1. Memahami sistem pengelolaan, pengawasan dan pembinaan BUMN;
2. Memiliki integritas yang baik;
3. Memahami fungsi kesekretariatan;
4. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

ORGANS UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

The supervisory duties and responsibilities of the Board of Commissioners is assisted by the supporting organs who are directly responsible to the Board of Commissioners. The organs under the Board of Commissioners are as follows:

- Board of Commissioners Secretary
- Audit Committee
- GCG and Risk Management Committee

BOARD OF COMMISSIONERS SECRETARY

The Secretary of the Board of Commissioners specifically has duties and responsibilities as a liaison between the Board of Commissioners and the Board of Directors, carrying out secretarial duties for the Board of Commissioners, documenting letters, compiling minutes of meetings of the Board of Commissioners, assisting in the preparation and reporting of management reports for the Board of Commissioners, assisting the coordination of the Board of Commissioners and the Board of Directors, and carry out other duties that support the optimal fulfillment of the functions of the Board of Commissioners.

Criteria for Secretary of the Board of Commissioners

Referring to the applicable regulations, the Secretary to the Board of Commissioners must meet the following requirements:

1. Understanding the system of management, supervision and development of SOEs;
2. Have good integrity;
3. Understand secretarial functions;
4. Have the ability to communicate and coordinate well.

**Profil Sekretaris Dewan Komisaris****Board of Commissioners' Secretary Profile****Weny Maulatsih**

Sekretaris Dewan Komisaris /
Secretary of the Board of
Commissioners

Kewarganegaraan / Citizenship : Indonesia

Tempat, Tanggal Lahir / Place, Date of Birth : Banyumas, 24 November 1985

Usia / Age : 35 tahun / years old

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment

Surat Keputusan Dewan Komisaris No.SK.-204/10/KEP/DK.P.III/2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT Pelabuhan Indonesia III

Decree of the Board of Commissioners No.SK.-204/10/KEP/DK.P.III/2019 dated October 30, 2019 concerning the Dismissal and Appointment of the Secretary to the Board of Commissioners of the Company PT Pelabuhan Indonesia III

Latar Belakang Pendidikan / Educational Background

- Diploma di bidang Perbendaharaan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2006)
- Sarjana Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2012)
- Diploma in Treasury (2006) from Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
- Bachelor's Degree in Accounting (2012) from Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Riwayat Jabatan / Employment history

- Analis Kepegawaian Kementerian BUMN (2012-2014)
- Analis SDM Aparatur Kementerian BUMN (2014-2015)
- Analis Manajemen Kinerja Kementerian BUMN (2015-2017)
- Komite Audit Perum Jasa Tirta (2012-2017)
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Indofarma Tbk (2017-2018)
- Personnel Analyst of the Ministry of SOEs (2012-2014)
- HR Analyst of the Ministry of SOEs (2014-2015)
- Performance Management Analyst of the Ministry of SOEs (2015-2017)
- Audit Committee of Perum Jasa Tirta (2012-2017)
- Secretary to the Board of Commissioners of PT Indofarma Tbk (2017-2018)

Rangkap Jabatan / Concurrent Positions

- Kepala Subbagian Layanan SDM di Kementerian BUMN (2017-sekarang)
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (2018-sekarang)
- Head of Human Capital Services Sub-Department in the Ministry of SOE (2017-present)
- Secretary of the BOC in PT Pelayaran Nasional Indonesia (2018-present)

Fungsi dan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

- Menyediakan informasi untuk Dewan Komisaris dalam rangka pengambilan keputusan.
- Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan laporan rutin yang disampaikan Direksi Pelindo III dalam pengelolaan Perseroan.
- Menyiapkan rapat dan mengoordinasikan agenda rapat Dewan Komisaris kepada pihak-pihak yang akan menghadiri rapat.
- Menyiapkan dan menyampaikan undangan rapat Dewan Komisaris kepada pihak-pihak yang akan menghadiri rapat.
- Melakukan konfirmasi mengenai waktu, tempat, kehadiran, serta hal-hal lain yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan rapat Dewan Komisaris.

Functions and Duties of the Secretary of the Board of Commissioners

- Preparing the information for the BOC to make decisions.
- Preparing the necessary materials related to the periodic reports submitted by the BOD in Company management.
- Prepare meetings and coordinating the BOC meeting agenda to parties attending the meeting.
- Preparing and submitting the summons for BOC meeting to parties attending the meeting.
- Confirming the time, place, attendance, and other things deemed necessary for convening the BOC meeting.



6. Mempersiapkan penyelenggaraan pertemuan atau rapat Dewan Komisaris, baik rapat internal maupun rapat dengan Direksi, serta rapat dengan pihak-pihak lainnya.
7. Membuat dan mendokumentasikan Risalah Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi maupun Rapat Internal Dewan Komisaris.
8. Menyampaikan Risalah Rapat Dewan Komisaris kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
9. Mempersiapkan bahan pertimbangan, pendapat, saran, dan masukan lainnya kepada Dewan Komisaris untuk Pemegang Saham, Direksi, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pengelolaan Perseroan.
10. Menindaklanjuti keputusan dalam rapat Dewan Komisaris antara lain dengan mencatat, memantau, dan mengecek tahapan kemajuan pelaksanaan keputusan rapat Dewan Komisaris kepada penanggung jawab terkait.
11. Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan tata kelola dan kearsipan surat.
12. Melaksanakan dan mengoordinasikan kelancaran kegiatan administrasi kesekretariatan, baik untuk Dewan Komisaris maupun Organ Pendukung di lingkungan Dewan Komisaris.
13. Melakukan dan mengoordinasikan penyusunan jadwal kegiatan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, serta menyiapkan kelengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Dewan Komisaris.
14. Memimpin, mengarahkan, dan mengoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur yang ada di lingkungan kerja Sekretariat Dewan Komisaris.
15. Meminta data informasi/penjelasan yang dibutuhkan Dewan Komisaris kepada pihak-pihak terkait, baik di dalam maupun di luar Perseroan, untuk keperluan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
16. Menyampaikan usulan rencana atau program kerja Dewan Komisaris khususnya berkaitan dengan fungsi kesekretariatan Dewan Komisaris.
17. Menggunakan fasilitas kesekretariatan Dewan Komisaris untuk tugas-tugas Sekretaris Dewan Komisaris.
18. Wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan, baik dari internal maupun pihak eksternal, dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
6. Preparing any meeting or BOC meeting, both internal and joint meetings with the BOD, as well as meetings with other related parties.
7. Preparing and documenting the Minutes of BOC Meetings with the BOD and the Internal Meetings of the BOC.
8. Submitting the Minutes of BOC meeting to interested parties.
9. Preparing consideration material, opinion, suggestion, and other input to the BOC for the Shareholders, BOD, and other parties related to Company management.
10. Following up BOC meeting resolutions by taking notes, monitoring, and checking the stage of progress in the implementation of BOC meeting resolutions, as well as encouraging and coordinating the implementation of BOC meeting resolution follow-up to the related personin-charge.
11. Conducting and coordinating mail governance and archiving.
12. Conducting and coordinating the secretarial administration, both for the BOC and Supporting Organs around the BOC.
13. Conducting and coordinating the scheduling of BOC activities in conducting their duties and preparing the requirements in the implementation of BOC activities.
14. Leading, directing, and coordinating the implementation of systems and procedures within the vicinity of the BOC Secretariat work area.
15. Requesting data information/explanation required by the BOC to related parties, both within or outside the Company, for the implementation of BOC duties.
16. Submitting the proposal for the plan or work programme of the BOC, particularly those related to the BOC secretarial function of.
17. Utilising the BOC secretarial facilities to conduct the duties of the Secretary of the BOC.
18. Obligated to maintain the confidentiality of Company documents, data, and information, both from internal and external parties, and only use them for duty implementation.

**Tugas Lain**

1. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundungan serta menerapkan prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Mengoordinasikan anggota-anggota komite Dewan Komisaris, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris; dan
4. Sebagai penghubung Dewan Komisaris dengan pihak lain.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2020, Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

1. Menyediakan informasi untuk Dewan Komisaris dalam rangka pengambilan keputusan.
2. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan laporan rutin yang disampaikan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dalam pengelolaan Perusahaan.
3. Menyiapkan rapat dan mengkoordinasikan agenda rapat Dewan Komisaris kepada pihak-pihak yang akan menghadiri rapat.
4. Menyiapkan dan menyampaikan undangan rapat Dewan Komisaris kepada pihak-pihak yang akan menghadiri rapat.
5. Melakukan konfirmasi mengenai watu, tempat, kehadiran, serta hal-hal lain yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan rapat Dewan Komisaris.
6. Mempersiapkan penyelenggaraan pertemuan atau rapat Dewan Komisaris, baik rapat internal, maupun rapat dengan Direksi serta rapat dengan pihak-pihak terkait lainnya.
7. Membuat dan mendokumentasikan Risalah Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi maupun Rapat Internal Dewan Komisaris.
8. Menyampaikan Risalah rapat Dewan Komisaris kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
9. Mempersiapkan bahan pertimbangan, pendapat, saran dan masukan lainnya kepada Dewan Komisaris untuk Pemegang Saham, Direksi dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pengelolaan Perusahaan.

Other Duties

1. Ensuring that the BOC complies with the laws and regulations and implements GCG principles;
2. Periodically providing information required by the BOC and/or at any time requested by the BOC;
3. Coordinating members of the BOC' committees, if required, to ensure the flow of the BOC's duties; and
4. As a liaison of the BOC with other parties.

Implementation of the Duties of the Board of Commissioners' Secretary

Throughout 2020, the Secretary to the Board of Commissioners has carried out the following duties and responsibilities, including:

1. Preparing the information for the BOC to make decisions.
2. Preparing the necessary materials related to the periodic reports submitted by the BOD in Company management.
3. Prepare meetings and coordinating the BOC meeting agenda to parties attending the meeting.
4. Preparing and submitting the summons for BOC meeting to parties attending the meeting.
5. Confirming the time, place, attendance, and other things deemed necessary for convening the BOC meeting.
6. Preparing any meeting or BOC meeting, both internal and joint meetings with the BOD, as well as meetings with other related parties.
7. Preparing and documenting the Minutes of BOC Meetings with the BOD and the Internal Meetings of the BOC.
8. Submitting the Minutes of BOC meeting to interested parties.
9. Preparing consideration material, opinion, suggestion, and other input to the BOC for the Shareholders, BOD, and other parties related to Company management.



10. Menindaklanjuti keputusan dalam rapat Dewan Komisaris antara lain dengan mencatat, memantau dan mengecek tahapan kemajuan pelaksanaan keputusan rapat Dewan Komisaris, serta mendorong dan mengkoordinasikan pelaksanaan tindaklanjut keputusan rapat Dewan Komisaris kepada penanggungjawab yang terkait.
11. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan tata kelola dan kearsipan surat.
12. Melaksanakan dan mengkoordinasikan untuk kelancaran kegiatan administrasi kesekretariatan, baik untuk Dewan Komisaris maupun Organ Pendukung yang ada di lingkungan Dewan Komisaris.
13. Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan jadwal kegiatan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, serta menyiapkan kelengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Dewan Komisaris.
14. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur yang ada di lingkungan kerja Sekretariat Dewan Komisaris.
15. Meminta data informasi/penjelasan yang dibutuhkan Dewan Komisaris kepada pihak-pihak terkait baik di dalam maupun di luar Perusahaan untuk keperluan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
16. Menyampaikan usulan rencana atau program kerja Dewan Komisaris khususnya berkaitan dengan fungsi kesekretariatan Dewan Komisaris.
17. Menggunakan fasilitas kesekretariatan Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas-tugas Sekretaris Dewan Komisaris.
18. Wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
10. Following up BOC meeting resolutions by taking notes, monitoring, and checking the stage of progress in the implementation of BOC meeting resolutions, as well as encouraging and coordinating the implementation of BOC meeting resolution follow-up to the related personin-charge.
11. Conducting and coordinating mail governance and archiving.
12. Conducting and coordinating the secretarial administration, both for the BOC and Supporting Organs around the BOC.
13. Conducting and coordinating the scheduling of BOC activities in conducting their duties and preparing the requirements in the implementation of BOC activities.
14. Leading, directing, and coordinating the implementation of systems and procedures within the vicinity of the BOC Secretariat work area.
15. Requesting data information/explanation required by the BOC to related parties, both within or outside the Company, for the implementation of BOC duties.
16. Submitting the proposal for the plan or work programme of the BOC, particularly those related to the BOC secretarial function of.
17. Utilising the BOC secretarial facilities to conduct the duties of the Secretary of the BOC.
18. Obligated to maintain the confidentiality of Company documents, data, and information, both from internal and external parties, and only use them for duty implementation.

Penilaian Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan evaluasi kinerja Sekretaris Dewan Komisaris secara berkala. Pada tahun 2020, Dewan Komisaris menilai kinerja Sekretaris Dewan Komisaris terbilang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kesekretariatan dan penghubung Dewan Komisaris dengan manajemen Perseroan.

Performance Assessment of the Secretary of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners evaluates the performance of the Secretary of the Board of Commissioners on a regular basis. In 2020, the Board of Commissioners assessed that the performance of the Secretary of the Board of Commissioners was fairly good in carrying out secretarial duties and responsibilities and liaising with the Board of Commissioners and the management of the Company.



KOMITE AUDIT

Komite Audit merupakan organ yang berada di bawah Dewan Komisaris dan memiliki fungsi membantu Dewan Komisaris mengawasi beberapa aspek seperti informasi keuangan, Sistem Pengendalian Internal, efektivitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal, dan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembentukan dan keanggotaan Komite Audit telah mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN. Komite Audit diketuai oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Komite Audit telah diisi oleh para profesional yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan integritas di bidangnya masing-masing.

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is an organ under the BOC in the structure of the Company that has the function to assist the BOC in supervising several aspects, such as financial information, Internal Control System, audit effectiveness of external and internal auditor and the Company's compliance with the prevailing laws and regulations.

The establishment and membership of the Audit Committee has referred to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 regarding Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs. The Audit Committee is chaired by members of the Board of Commissioners and members of the Audit Committee are filled by professionals who have competence, experience, and integrity in their respective fields.

Susunan Komite Audit

Sesuai Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), maka susunan keanggotaan Komite Audit tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Composition of the Audit Committee

According to the Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), thus, the composition of the membership of the Audit Committee in 2020 is as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Penetapan / Basis of Appointment	Keahlian / Expertise	Masa Jabatan / Term of Office	Keterangan / Description
Zainal Abidin	Ketua Komite Audit / Head of Audit Committee	...	Ilmu Politik / Political Studies	2017 -2022	Anggota Dewan Komisaris / Member of the Board of Commissioners
Dedi Syarif Usman	Wakil Ketua Komite Audit / Vice Chairman of Audit Committee	...	Ekonomi / Economic	2018 – 2023	Anggota Dewan Komisaris / Member of the Board of Commissioners
Andi Sudhana	Anggota Komite Audit / Member of Audit Committee	...	Keuangan dan Kepelabuhanan / Finance and Port Sector	2017 – 2020	Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang keuangan dan kepelabuhanan
Mohammad Rizqa	Anggota Komite Audit / Member of Audit Committee	...	Keuangan dan Kepelabuhanan / Finance and Port Sector	2019 – 2022	Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang keuangan dan kepelabuhanan



Pada bulan April 2020, terjadi pergantian komposisi Komite Audit, dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris sesuai surat Nomor SK-46/KEP/DK.P.III/04/2020 tanggal 08 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit Pelindo III. Kemudian sesuai surat nomor SK-53/KEP/DK.P.III/04/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Ketua dan Anggota Komite Audit Pelindo III dan surat nomor KEP.01/07/CMSR-2020 tanggal 01 Juli 2020 tentang Pengalihan Tugas Anggota Komite Audit dan Anggota Komite GCG dan Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), komposisi Komite Audit menjadi sebagai berikut:

In April 2020 there was a change in the composition of the Audit Committee, and it was determined by the Board of Commissioners according to letter number SK-46/KEP/DK.P.III/04/2020 dated 08 April 2020 regarding the Dismissal and Appointment of the Chairman of the Pelindo III Audit Committee. Then according to letter number SK-53/KEP/DK.P.III/04/2020 dated 16 April 2020 regarding the Dismissal and Appointment of Deputy Chairmen and Members of the Pelindo III Audit Committee and letter number KEP.01/07/CMSR-2020 dated 01 July 2020 regarding the Transfer of Duties of the Audit Committee Members and GCG and Risk Management Committee Members of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), the composition of the Audit Committee is as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Penetapan / Basis of Appointment	Keahlian / Expertise	Masa Jabatan / Term of Office	Keterangan / Description
Heru Sukanto	Ketua Komite Audit / Head of Audit Committee	Surat Keputusan No.SK-46/KEP/DK.P.III/04/2020 tanggal 8 April 2020 / Decree No.SK-46/KEP/DK.P.III/04/2020 dated April 8, 2020	Finance Banking	2020-2024	Anggota Dewan Komisaris / Member of the Board of Commissioners
Agus Setianto	Anggota Komite Audit / Member of Audit Committee	Surat Keputusan No. SK-53. KEP/DK.P.III/04/2020 tanggal 16 April 2020 / Decree No. SK-53.KEP/DK.P.III/04/2020 dated April 16, 2020	Keuangan dan Kepelabuhanan / Finance and Port Sector	2017-2020	Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang keuangan dan kepelabuhanan / Independent Party with expertise in finance and port
Yusmar Anggadinata*	Anggota Komite Audit / Member of Audit Committee	2020	...
Albertus Giartono*	Anggota Komite Audit / Member of Audit Committee	Surat Keputusan No. KEP.01/07/CMSR-2020 tanggal 1 Juli 2020 / Decree No. KEP.01/07/CMSR-2020 dated July 1, 2020	Keuangan dan Kepelabuhanan / Finance and Port Sector	2020-2023	Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang keuangan dan kepelabuhanan / Independent Party with expertise in finance and port

*) Terdapat pergantian Anggota Komite Audit sesuai No. KEP.01/07/CMSR-2020 tanggal 01 Juli 2020. / There is a change of members of the Audit Committee according to No. KEP.01/07/CMSR-2020 dated 01 July 2020.



Profil Komite Audit

Heru Sukanto

Komisaris merangkap Ketua Komite Audit / Commissioner concurrently serving as the Head of Audit Committee

Profil Bapak Heru Sukanto telah tercantum pada Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Profile of Mr. Heru Sukanto is available in the Profile of the Board of Commissioners.

Agus Setianto

Anggota Komite Audit / Member of Audit Committee

Kewarganegaraan / Citizenship : Indonesia / Indonesian

Tempat Tanggal Lahir / Place, Date of Birth : Jakarta, 14 November 1959

Usia / Age : 61 tahun / years old

Domisili / Domicile : Jakarta

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment

Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor SK.53/KEP/DK.PIII/04/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Ketua dan Anggota Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). Decree the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Number SK.53/KEP/DK.PIII/04/2020 dated 16 April 2020 regarding the Dismissal and Appointment of Deputy Chairman and Members of the Audit Committee of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

Latar Belakang Pendidikan / Educational Background

- DIII dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1981)
DIII from Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1981)
- S1/D-IV dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1988)
S1/D-IV from Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1988)

Riwayat Jabatan / Employment History

- Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur (2016-2019)
Head of BPKP Representative for East Java Province (2016-2019)
- Direktur Pengawasan Produksi Dan Sumber Daya Alam (2011-2016)
Director of Production and Natural Resources Supervision (2011-2016)
- Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat (2010-2011)
Head of BPKP Representative for West Sumatra Province (2010-2011)
- Inspektor Provinsi Kepulauan Riau (2007-2010)
Inspector of Riau Islands Province (2007-2010)
- Kepala Sub Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat II (2006-2007)
Head of Sub-Directorate of Supervision of Government Institutions for People's Welfare II (2006-2007)
- Kepala Bidang Akuntan Negara (2005-2006)
Head of State Accountant Division (2005-2006)
- Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (2001-2005)
Head of Regional Government Accountability (2001-2005)
- Kepala Bidang Pengawasan Pengeluaran II (2000-2001)
Head of Expenditure Supervision II (2000-2001)
- Kepala Bidang Pengawasan BUMNBUMD (1997-2000)
Head of Supervision of SOEROE (1997-2000)
- Kepala Seksi Pengawasan Penerimaan 3 (1995-1997)
Head of Admissions Supervision Section 3 (1995-1997)

Sertifikasi / Certification

- Qualified Internal Auditor (QIA) (2014)
- Certified Forensic Auditor (CFrA) (2013)
- Certified Audit Committee Practices (CACP) (2010)
- Chartered Accountant (CA) (2002)

Rangkap Jabatan / Concurrent Positions

Tidak terdapat rangkap jabatan yang diisi oleh Bapak Agus Setianto di Pelindo III maupun perusahaan lain.

He has no concurrent positions at Pelindo III or other companies.



Albertus Giartono
Anggota Komite Audit /
Member of Audit Committee

Kewarganegaraan / Citizenship : Indonesia / Indonesian
Tempat Tanggal Lahir / Place, Date of Birth : Magelang, 20 Februari 1959 /
February 20, 1959
Usia / Age : 51 tahun / years old
Domisili / Domicile : Jakarta

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment

Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor KEP.01/07/CMSR-2020 tanggal 01 Juli 2020 tentang Pengalihan Tugas Anggota Komite Audit dan Anggota Komite GCG dan Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).
Decision of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
Number KEP.01/07/CMSR-2020 dated 1 July 2020 regarding the Transfer of Duties of Audit Committee Members and GCG and Risk Management Committee Members of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

Latar Belakang Pendidikan / Educational Background

- Diploma III Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (1990)
Diploma III in Accounting from Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (1990)
- Sarjana Ekonomi (*Finance Management*) dari Universitas Indonesia (1996)
Bachelor's Degree in Economics (Finance Management) from Universitas Indonesia (1996)
- Pascasarjana (MMUI) *Banking & Finance* dari Universitas Indonesia (2000)
Postgraduate (MMUI) in Banking & Finance from Universitas Indonesia (2000)
- Pascasarjana (MBA) *Finance* dari the University of Western Australia (UWA) Perth, Australia (2003)
Postgraduate (MBA) in Finance from The University of Western Australia (UWA) Perth, Australia (2003)

Riwayat Jabatan / Employment History

- SAMUDRA ENERGY LIMITED-VP Finance and Commercial at Samudra Energy (2016-sekarang / 2016-present)
- SAMUDRA ENERGY LIMITED-Finance and Support Manager at Meruap KSO (a joint venture of Samudra Energy and Pertamina EP) (2014-2016)
- SAMUDRA ENERGY LIMITED-Finance Manager at Meruap TAC (a joint venture of Samudra Energy, TATA Petrodyne and Pertamina EP) (2009-2014)
- SAMUDRA ENERGY LIMITED-Controller at Samudra Energy Group (2008-2014)
- BUMI HASTA MUKTI GROUP-Finance and Accounting Manager in PAN TAC (a joint venture of BHM and Pertamina at Udang Block, Natuna) (2005-2008)
- BUMI HASTA MUKTI GROUP-Finance and Accounting Manager in PHR TAC (a joint venture of BHM and Pertamina at Haureulis Block) (2005-2008)
- ERNST & YOUNG INDONESIA-Assistant Manager at Ernst & Young Business Advisory (2004-2005)
- HERE CONSULTING GROUP-Finance, Assurance & Tax Service Manager (2003-2004)
- BPKP-Arthur Andersen Capacity Building Project Officer funded by World Bank (2000-2001)
- BPKP-Auditor in the Oil and Gas Audit Department (1990-2000)

**Sertifikasi / Certification / Profile of the Audit Committee**

- PTK 007 Procurement Certification, SKKMIGAS (2015)
- IFRS for Energy Industries, Kuala Lumpur (2011)
- The Application of Transfer Pricing Methods and Disclosure, Danny Darussalam Tax Center (2010)
- Oil & Gas Procurement Training and Certification, BPMIGAS, Jakarta (2007)
- Technical Assistance Contract Workshop, PERTAMINA, Bogor (2005)
- Entity Level Control Review, Ernst & Young, Jakarta (2005)
- Executive Leadership Program, Homita Global Electronic Co., Shanghai, China (2003)
- Certified Internal Auditor (CIA) Preparation Course, the Bina Nusantara (BINUS), Jakarta (2003)
- Information System and Risk Management Course, Andersen Consulting, St. Charles - Chicago, Illinois, USA (2001)
- Process Auditing and Risk Management Auditing Course, SGV Manila, Philippines (2001)
- Computer Data Acquisition and Analysis Workshop, Arthur Andersen, Jakarta (2001)
- Security Review Workshop, Arthur Andersen, Jakarta (2001)
- IT Audit and Control Workshop, Arthur Andersen, Jakarta (2001)
- New EDP Audit Methodology Workshop, Arthur Andersen, Jakarta (2001)
- Change Enablement Workshop, Arthur Andersen, Jakarta (2001)
- Team Building Workshop, Arthur Andersen, Jakarta (2001)
- Training the Trainer Workshop, Arthur Andersen, Jakarta (2001)
- Information System Security and Audit Course, the Singapore Cooperation Programme, Department of Software Technology (JSIST) Singapore Polytechnic, Singapore (2000)
- Operational Audit Course, BPKP Training Center, Jakarta (1997)
- Psychological Audit Course, BPKP Training Center, Jakarta (1997)
- Management Audit Course, BPKP Training Center, Jakarta (1997)
- BASIC Programming and dBase Management Course, Santa Lusia Institute, Jakarta (1990)

Rangkap Jabatan / Concurrent Positions

- Komisaris pada Dwidana Sakti Sekuritas (2017-sekarang)
Commissioner at Dwidana Sakti Sekuritas (2017-present)

*)Pengangkatan Agus Setianto dan Yusmar Anggadinata berdasarkan SK No.SK-53.KEP/DK.P.III/04/2020 tanggal 16 April 2020 menggantikan Andi Sudhana dan Mohammad Rizqa, dan Pengalihan Tugas Yusmar Anggadinata berdasarkan SK No.KEP.01/07/CMSR-2020 tanggal 1 Juli 2020 dengan Albertus Giartono / The appointment of Agus Setianto and Yusmar Anggadinata was based on Decree No.SK-53.KEP/DK.P.III/04/2020 dated April 16, 2020 replacing Andi Sudhana and Mohammad Rizqa, and Transfer of Duties of Yusmar Anggadinata based on Decree No.KEP.01/07/CMSR-2020 dated July 1, 2020 with Albertus Giartono



Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Audit

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Komisaris Perusahaan dan dilaporkan kepada RUPS. Pemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatannya dan diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Masa Jabatan Ketua Komite Audit mengikuti masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris, sedangkan masa jabatan Anggota Komite Audit sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 yang menyatakan bahwa masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Kriteria Komite Audit

Persyaratan Komite Audit telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tanggal 3 September 2018 tentang Reviu dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual* dan *Code of Corporate Governance*). Dalam ketentuan tersebut disebutkan persyaratan Komite Audit terdiri dari:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan.
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan.
3. Mampu berkomunikasi secara efektif.
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
5. Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang harus memahami industri atau bisnis Perusahaan.

Appointment and Dismissal of the Audit Committee

The appointment and dismissal of members of the Audit Committee are performed by the BOC of the Company based on the Decree of the BOC and reported to the GMS. Dismissal of the members of the Audit Committee may only be conducted if the members end their term of office and dismissed based on the resolution of the BOC due to not fulfilling the set performance standard and/or incompetent in carrying out their duties.

Term of office for the Head of Audit Committee follows their term of office as a member of the BOC, while the term of office for members of the Audit Committee is following the provision regulated in the Regulation of the Minister of SOE No. PER-12/MBU/2012 which stipulates that the term of office of members of the Audit Committee who are not members of the BOC/Supervisory Board is not longer than three years and may be extended once for two years of the term and not lessen the right of the BOC/Supervisory Board to dismiss them at any time.

Audit Committee Criteria

The requirements of the Audit Committee have been stipulated in the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 dated September 3, 2018 regarding the Review and Revision of the Corporate Governance Guidelines (*Board Manual* and *Code of Corporate Governance*). In this provision, it is stated that the requirements of the Audit Committee consist of:

1. Posses good integrity and sufficient knowledge and work experience in the field of supervision/inspection.
2. Do not have any personal interests/relationships that can have a negative impact and conflict of interest on the Company.
3. Able to communicate effectively.
4. Can provide sufficient time to complete the task.
5. One of the members of the Audit Committee must have an educational background or have expertise in accounting or finance, and one must understand the Company's industry or business.



Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, fungsi utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi fungsi pengawasannya, agar pengelolaan Perusahaan dapat berjalan efektif dan efisien. Komite Audit bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Pertanggungjawaban Komite Audit kepada Dewan Komisaris merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Sebagaimana yang tercantum dalam *Board Manual* dan Piagam Komite Audit tugas dan tanggung jawab Komite Audit terdiri atas:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk mengevaluasi efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal dan Internal Audit.
2. Membantu Dewan Komisaris dalam pemilihan dan pengusulan Auditor Eksternal untuk disahkan dalam RUPS.
3. Mengevaluasi Laporan Manajemen Triwulan, Laporan Manajemen Triwulan, Laporan Manajemen Tahunan dan Laporan Tahunan, serta laporan-laporan lainnya yang memerlukan rekomendasi Dewan Komisaris.
4. Mengevaluasi Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan.
5. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Auditor Eksternal dan Internal Audit.
6. Menyusun laporan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Auditor Eksternal pada periode sebelumnya.
7. Memberikan rekomendasi mengenai sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
8. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memadai terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan.
9. Melakukan identifikasi terhadap hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

Under the provision in the Regulation of the Minister of SOE No. PER-12/MBU/2012 dated 44 August 2012 on the Supporting Organ of the BOC/Supervisory Board of SOE, the main function of the Audit Committee is to assist the BOC in fulfilling its supervisory function to make the management of the Company effective and efficient. The Audit Committee is independent in carrying out its duties in reporting and directly responsible to the BOC. The responsibility of the Audit Committee to the BOC is the realisation of the accountability in supervision on the management of the company in the implementation of GCG principles.

As stipulated in the Board Manual and Audit Committee Charter, the duties and responsibilities of the Audit Committee consist of:

1. To assist the BOC to evaluate the effectiveness of the Internal Control System and the effectiveness of the duties of the External Auditor and Internal Audit.
2. To assist the BOC in the selection and nomination of External Auditors to be ratified at the GMS.
3. To evaluate the Quarterly Management Reports, Annual Management Reports and Annual Reports, as well as other reports that require recommendations from the BOC.
4. To evaluating Monthly, Quarterly, and Annual Financial Statements.
5. To evaluate the implementation of activities and the results of audits carried out by External Auditors and Internal Audit.
6. To compile evaluation reports on the implementation of audit services for annual historical financial information by the External Auditor in the previous period.
7. To provide recommendations regarding management control systems and their implementation.
8. To ensure that there are adequate evaluation procedures for all information released by the Company.
9. Identifying matters requiring the attention of the BOC in carrying out their duties.



10. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris.
11. Menelaah laporan keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik.
12. Melaporkan kepada Dewan Komisaris dan melakukan penelaahan atas adanya tuntutan hukum yang dihadapi Perseroan.
13. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan dan membuat Pedoman Kerja Komite Audit.
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pedoman Kerja Komite Audit

Komite Audit Perusahaan telah dilengkapi dengan Pedoman Kerja yang dituangkan dalam Komite Audit Piagam (*Audit Committee Charter*) guna mendukung pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Dokumen tersebut disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris tanggal 3 September 2018 dalam *Board Manual* Perusahaan yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018. Pedoman kerja tersebut memuat aspek-aspek seperti,

.....,,

Independensi Komite Audit

Komite Audit Perseroan terdiri dari ketua yang merupakan anggota Dewan Komisaris dan anggota lainnya yang merupakan pihak independen. Seluruh anggota Komite Audit merupakan pribadi profesional yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan guna menjaga independensi dan objektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dan menghindari benturan kepentingan. Independensi Komite Audit dijelaskan dalam tabel berikut:

10. Provide opinions to the BOC regarding reports or matters submitted by the BOD to the BOC.
11. Reviewing the financial statements that will be published publicly.
12. To report to the BOC and conduct a review of the lawsuits faced by the Company.
13. To maintain the confidentiality of Company documents, data, and information and make Audit Committee Work Guidelines.
14. To carry out other duties given by the BOC.

Audit Committee Work Guidelines

The Audit Committee of the Company has been complemented with the Audit Committee Charter to support the implementation of its functions and duties. The document is prepared based on the prevailing laws and regulations and has been stipulated by the BOC on 3 September 2018 in the Board Manual stipulated through the Joint Decision of the BOC and the BOD of Pelindo III No. HK.150/09/KEP/ DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018. The work manual contains aspects such as,,,

Audit Committee Independence

The Company's Audit Committee consists of a chairman who is a member of the Board of Commissioners and other members who are independent parties. All members of the Audit Committee are professional individuals who have no affiliation with the Company in order to maintain independence and objectivity in carrying out their duties and responsibilities and to avoid conflicts of interest. The independence of the Audit Committee is described in the following table:



Aspek Independensi / Independence Aspects	Heru Sukanto	Agus Setianto	Albertus Giartono
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. / Has no financial relationship with the BOC and the BOD.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Pelindo III, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi. / Has no management relationship in Pelindo III, subsidiaries, and affiliates.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan di Perusahaan. / Has no share ownership in the Company.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit. / Has no familial relationship with the BOC, BOD, and/or members of the Audit Committee.	✓	✓	✓

Seluruh anggota Komite Audit Pelindo III tidak memiliki hubungan keluarga dan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan sesama anggota Komite lain serta tidak memiliki hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain atau afiliasi.

All members of the Pelindo III Audit Committee do not have family and financial relationships with members of the Board of Commissioners, Directors, and other members of the Committee and do not have management and share ownership relationships in other companies or affiliates.

Peran Komite Audit dalam Pemilihan Akuntan Publik

Komite Audit bertugas dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bertugas untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan. Persetujuan pemilihan dan penunjukan KAP kemudian akan disampaikan dan disetujui oleh Pemegang Saham dalam RUPS. Pada tahun 2020, Komite Audit mengusulkan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai auditor eksternal tahun buku 2020 dan membantu proses pengadaan sesuai prosedur yang berlaku di Perseroan.

The Role of the Audit Committee in the Selection of Public Accountants

The Audit Committee is tasked with providing recommendations to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm (PAF) in charge of auditing the Company's financial statements. Approval for the election and appointment of PAF will then be submitted and approved by the Shareholders at the GMS. In 2020, the Audit Committee proposed ... PAF as an external auditor for the 2020 fiscal year and assisting the procurement process according to the procedures applicable in the Company.

Rapat Komite Audit

Mengacu pada Pedoman Kerja, Komite Audit wajib melakukan pertemuan rutin dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan serta melakukan pertemuan dengan fungsi terkait terutama fungsi keuangan dan Internal Audit dalam rangka membahas perkembangan dan aktivitas Perseroan, baik secara berkala maupun sesuai kondisi yang diperlukan. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit, dan dalam hal Ketua Komite Audit berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh anggota Komite Audit yang paling senior.

Audit Committee Meeting

Referring to the Work Guidelines, the Audit Committee is required to hold regular meetings with the Board of Commissioners at least once a month and hold meetings with related functions, especially the financial function and Internal Audit in order to discuss the development and activities of the Company, both periodically and according to the required conditions. The meeting is chaired by the Chairman of the Audit Committee, and in the event that the Chairman of the Audit Committee is unable to attend, the meeting is chaired by the most senior member of the Audit Committee.



Pengambilan keputusan dalam rapat Komite Audit wajib dihadiri oleh ...% dari jumlah anggota dengan berlandaskan metode musyawarah untuk mufakat. Hasil rapat Komite Audit dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Selama tahun 2020, Komite Audit menyelenggarakan kali rapat dengan tingkat kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut.

Frekuensi Rapat Komite Audit

Nama / Name	Jumlah Rapat / Total Meetings	Kehadiran / Attendance	Percentase Kehadiran / Attendance Percentage
Heru Sukanto%
Agus Setianto%
Albertus Giartono%

Risalah Rapat Komite Audit Tahun 2020

Agenda yang dibahas dalam rapat-rapat Komite Audit selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Decision making in the Audit Committee meeting must be attended by ...% of the total members based on the method of deliberation to reach consensus. The results of the Audit Committee meetings are recorded in the minutes of the meeting, including if there are dissenting opinions and reported to the Board of Commissioners.

During 2020, the Audit Committee held meetings with the following levels of attendance and meeting agendas.

Frequency of Audit Committee Meetings

Minutes of the 2020 Audit Committee Meeting

The agenda discussed in the Audit Committee meetings during 2020 is as follows:

No.	Tanggal / Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Komite Audit yang Hadir / Meeting Participants
1	• ... • ... • ... • ...
2	• ... • ... • ... • ...
3	• ... • ... • ... • ...
4	• ... • ... • ... • ...
5	• ... • ... • ... • ...
6	• ... • ... • ... • ...



Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Perseroan memfasilitasi dan membekali Komite Audit dengan program pengembangan kompetensi melalui pengikutsertaan dalam pelatihan dan pendidikan, baik yang diselenggarakan secara formal maupun informal. Informasi mengenai pengembangan kompetensi yang diikuti Komite Audit telah tercantum dalam Laporan Tahunan ini, bagian Profil Perusahaan, sub bagian Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Intern.

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Sepanjang tahun 2020, Komite Audit telah menjalankan dan merealisasikan program serta kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rekomendasi Komite Audit

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Komite Audit senantiasa memberikan rekomendasi yang mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris maupun kepada divisi-divisi lain yang menjadi kewenangannya. Rekomendasi yang diberikan Komite Audit pada tahun 2020, antara lain:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kebijakan Remunerasi Komite Audit

Remunerasi bagi Anggota Komite Audit diatur dalam Peraturan Menteri No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, dimana penghasilan anggota Komite Audit Perusahaan diberikan honorarium maksimal sebesar 20% dari gaji Direktur Utama atau

Audit Committee Competency Development

The Company facilitates and provides the Audit Committee with competency development programs through participation in training and education, both formally and informally. Information regarding competency development participated in by the Audit Committee has been included in this Annual Report, the Company Profile section, the Competency Development sub-section for the Board of Commissioners, the Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and the Internal Audit Unit.

Audit Committee Duties Implementation Report

Throughout 2020, the Audit Committee has carried out and realized the programs and activities that are its duties and responsibilities, including:

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...

Audit Committee Recommendations

In carrying out its functions and duties, the Audit Committee always provides recommendations that support the supervisory function of the Board of Commissioners and other divisions under its authority. Recommendations given by the Audit Committee in 2020 include:

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...

Audit Committee Remuneration Policy

Remuneration for Members of the Audit Committee is stipulated in the Minister Regulation No. PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 on the Supporting Organ of the BOC/Supervisory Board of SOE, of which the income of the members of the Audit Committee is granted through honorarium with the maximum of 20%



sebesar Rp43.200.000, dengan ketentuan pajak ditanggung perusahaan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium.

Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris.

from the salary of the President Director or amounting to Rp43,200,000 with the tax imposed upon the company, and is not allowed to receive other income other than the honorarium.

The members of the BOC that serves as the Head/Member of the Audit Committee are not granted additional income from the position other than the income from serving as Members of the BOC.

Struktur Remunerasi Komite Audit

Nama / Name	Jabatan / Position	Honorarium	Keterangan / Description
Heru Sukanto	Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Audit / Independent Commissioner concurrently Chairman of the Audit Committee	-	Anggota Dewan Komisaris (Honorarium dapat dilihat di tabel Honorarium Dewan Komisaris) / Members of the Board of Commissioners (Honorarium can be seen in the Honorarium table of the Board of Commissioners)
Agus Setianto	Anggota Komite Audit / Audit Committee Member	Rp43.200.000	
Albertus Giartono	Anggota Komite Audit / Audit Committee Member	Rp43.200.000	
Andi Sudhana	Anggota Komite Audit / Audit Committee Member	Rp43.200.000,-	

Rencana Kerja dan Realisasi di Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, Komite Audit telah melaksanakan program kerja sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Work Plan and Realization in 2020

Throughout 2020, the Audit Committee has implemented a work program in accordance with the work plan that has been set as follows:

No.	Rencana Kerja / Work Plan	Keterangan / Description
1	Pembahasan Terms of Reference Kantor Akuntan Publik (KAP)	Discussion of Term of Reference for Public Accounting Firm (PAF)
2	Pembahasan secara lebih mendalam mengenai temuan-temuan audit Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang perlu masuk dalam cakupan Laporan Keuangan Audited.	Thorough discussion regarding audit findings from the Internal Audit Unit (SPI) which needs to be included in the scope of the Audited Financial Statement.
3	Evaluasi mengenai lingkup audit yang telah dan sedang dilaksanakan, termasuk perluasan dan pendalaman audit pada beberapa objek tertentu.	Evaluation of audit scope that has been and is currently implemented, including the expansion of audit activity on certain objects.
4	Evaluasi atas hasil audit KAP.	Evaluation of PAF audit results.
5	Pembahasan hasil temuan SPI.	Discussion on SPI findings.
6	Pembahasan masukan mengenai berbagai kendala dalam pemeriksaan.	Discussion on inputs concerning obstacles in audits.
7	Pembahasan mengenai berbagai kebutuhan perluasan lingkup dan perbaikan teknik pemeriksaan.	Discussion of various needs to expand the scope and improvement technique of examination.
8	Penilaian terhadap informasi hasil audit bersama-sama KAP, SPI, dan jajaran manajemen.	Assessment of information result from a joint audit with KAP, SPI, and management board.
9	Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.	Identify issues requiring BOC attention.
10	Komite Audit melakukan pemantauan terhadap proses pelaksanaan hasil keputusan RUPS.	Monitoring on the implementation process of GMS Resolution.

Terlaksana /
Implemented



KOMITE GCG DAN MANAJEMEN RISIKO

Komite GCG dan Manajemen Risiko merupakan organ dibawah Dewan Komisaris yang memiliki fungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan penilaian atas efektivitas pelaksanaan GCG dan manajemen risiko. Pembentukan dan susunan Komite GCG dan Manajemen Risiko didasarkan pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Komite GCG dan Manajemen Risiko diketuai oleh anggota Dewan Komisaris. Anggota Komite GCG dan Manajemen Risiko diisi oleh para profesional yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan integritas di bidangnya masing-masing.

Susunan Komite GCG dan Manajemen Risiko

Sesuai Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No., maka susunan keanggotaan Komite GCG dan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

GCN AND RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The GCG and Risk Management Committee is an organ under the Board of Commissioners which has the function of assisting the Board of Commissioners in carrying out monitoring, supervision, and assessment of the effectiveness of the implementation of GCG and risk management. The formation and composition of the GCG and Risk Management Committee is based on the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 regarding Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs.

The GCG and Risk Management Committee is chaired by a member of the Board of Commissioners. Members of the GCG and Risk Management Committee are professionals who have competence, experience, and integrity in their respective fields.

Composition of the GCG and Risk Management Committee

According to the Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No., the membership composition of the GCG and Risk Management Committee is as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Penetapan / Basis of Appointment	Keahlian / Expertise	Masa Jabatan / Term of Office
Otto Ardianto	Komisaris merangkap Ketua Komite GCG dan Manajemen Risiko / Commissioner concurrently Chairman of the GCG and Risk Management Committee	Surat Keputusan No. SK.47/KEP/DK.P.III/04/2020 tanggal 8 April 2020 / Decree No. SK.47/KEP/DK.P.III/04/2020 dated April 8, 2020	Corporate Finance/ Infrastructure Investment	2016 – 2021
Tubagus Arief Fahmi	Anggota / Member	Surat Keputusan No. SK.204/11/KEP/DK.P.III/2018 tanggal 1 November 2018 / Decree No. SK.204/11/KEP/DK.P.III/2018 dated November 1, 2018	2018 – 2021
Yusmar Anggadinata	Anggota / Member	Surat Keputusan No. KEP.01/07/CMSR-2020 tanggal 1 Juli 2020 / Decree No. KEP.01/07/CMSR-2020 dated July 1, 2020	2020 – 2023

*) Pengangkatan Agus Setianto dengan Surat Keputusan No. SK.204/11/KEP/DK.P.III/2018 tanggal 1 November 2018 dan Yusmar Anggadinata berdasarkan Surat Keputusan No. SK-53.KEP/DK.P.III/04/2020 tanggal 16 April 2020 menggantikan Andi Sudhana dan Mohammad Rizqa, dan Pengalihan Tugas Albertus Giartono berdasarkan SK No. KEP.01/07/CMSR-2020 tanggal 1 Juli 2020 dengan Yusmar Anggadinata. / The appointment of Agus Setianto and Yusmar Anggadinata was based on Decree No. SK.204/11/KEP/DK.P.III/2018 dated November 1, 2018 and Decree No. SK-53.KEP/DK.P.III/04/2020 dated April 16, 2020 respectively, replacing Andi Sudhana and Mohammad Rizqa, and the Transfer of Duties for Albertus Giartono was based on SK No. KEP.01/07/CMSR-2020 dated July 1, 2020 with Yusmar Anggadinata.

**Profil Komite GCG dan Manajemen Risiko****Profile of GCG and Risk Management Committee****Otto Ardianto**

Komisaris merangkap Ketua

Komite GCG dan Manajemen Risiko

/ Commissioner concurrently

Chairman of the GCG and Risk
Management Committee

Profil Bapak Otto Ardianto telah tercantum pada Profil Dewan Komisaris dalam Laporan

Tahunan ini. / The profile of Mr. Otto Ardianto is available in the Profile of the Board of
Commissioners in this Annual Report.**Tubagus Arief Fahmi**

Anggota Komite GCG dan

Manajemen Risiko / Member of

the GCG and Risk Management
Committee

Kewarganegaraan / Citizenship : Indonesia / Indonesian

Tempat Tanggal Lahir / Place, Date of Birth : Bandung, 21 Januari 1981 / January 21, 1981

Usia / Age : 39 tahun / years old

Domisili / Domicile : Jakarta

Dasar Pengangkatan / Basis of AppointmentSurat Keputusan No. SK.204/11/KEP/DK.P.III/2018 tanggal 1 November 2018 /
Decree No. SK.204/11/KEP/DK.P.III/2018 dated November 1, 2018**Latar Belakang Pendidikan / Educational Background**

- Sarjana Science dari Universitas Padjadjaran (2005)
Bachelor's Degree in Management from Padjajaran University (2005)
- Master of Science Management dari Universitas Indonesia (2015)
Master of Management Science from University of Indonesia (2015)
- PhD Candidate dari School of Business Management ITB (2020)
PhD Candidate dari School of Business Management ITB (2020)

Riwayat Jabatan / Employment History

- Tim Asistensi Wakil Menteri BUMN I (2020-sekarang)
Assistant Team for Deputy Minister of SOE I (2020-present)
- Tim Kerja Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (2020)
National Economic Recovery Task Force (PEN) Working Team (2020)
- Project Manager di Digital Business Division PT Telkom Indonesia (2018)
Project Manager at Digital Business Division at PT Telkom Indonesia (2018)
- Tim Asistensi Deputi Menteri Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha BUMN
(2016-2017)
Assistant Team of Deputy Minister for Restructuring and Business Development of SOE
(2016-2017)

Sertifikasi / Certifications

- Certified Risk Management Professional (CRMP) (2018)
- Certifies Risk Governance Professional (CRGP) (2018)

**Yusmar Anggadinata**

Anggota Komite GCG dan
Manajemen Risiko / Member of
the GCG and Risk Management
Committee

Kewarganegaraan / Citizenship

: Indonesia / Indonesian

Tempat Tanggal Lahir / Place, Date of Birth

: Bandung, 28 Januari 1963 / January 28, 1963

Usia / Age

: 57 tahun / years old

Domisili / Domicile

: Bandung

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment

Surat Keputusan No. KEP.10/07/CSMR-2020 tanggal 1 Juli 2020

Decree No. KEP.10/07/CSMR-2020 dated July 1, 2020

Latar Belakang Pendidikan / Educational Background

- Sarjana Fisika dari Institut Teknologi Bandung (1990)
Bachelor's Degree in Physics from Institut Teknologi Bandung (1990)
- MBA Teknologi dari Institut Teknologi Bandung (1998)
MBA Technology from Institut Teknologi Bandung (1998)

Riwayat Jabatan / Employment History

- Deputi Kepala (*Deputy Chairman*) Free Trade Zone Batam (Otorita Batam) (2017-2019)
Deputy Chairman of Batam Free Trade Zone (Batam Authority) (2017-2019)
- Anggota Tim Ahli Pokja Industri Logam Dasar dan Kawasan Industri Komite Ekonomi
dan Industri Nasional (KEIN) (2016-2019)
Member of the Expert Team of the Working Group for Basic Metals and Industrial Estates
of the National Economic and Industrial Committee (KEIN) (2016-2019)
- Anggota Tim Ahli pada Proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) Indonesia – Tiongkok
Kedeputian III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Bidang Kemaritiman (2015-2017)
Member of the Expert Team on the Belt and Road Initiative (BRI) Indonesia – China
Deputy III for Infrastructure Coordination of the Coordinating Ministry for Maritime
Affairs (2015-2017)
- *Director of Human Capital and Business Development* PT Wijaya Karya Tbk (2015-2016)
Director of Human Capital and Business Development at PT Wijaya Karya Tbk (2015-
2016)
- *Director of Cargo and Business Development* PT Angkasa Pura II (2014-2015)
Director of Cargo and Business Development at PT Angkasa Pura II (2014-2015)

Rangkap Jabatan / Concurrent Positions

- Konsultan Lepas dan Peneliti Pusat Kajian Logistik dan Rantai Pasokan di Institut
Teknologi Bandung (ITB)
Konsultan Lepas dan Peneliti Pusat Kajian Logistik dan Rantai Pasokan di Institut
Teknologi Bandung (ITB)

**Pengangkatan dan Pemberhentian Komite GCG dan
Manajemen Risiko**

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite GCG dan Manajemen Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Komisaris Perusahaan dan dilaporkan kepada RUPS. Pemberhentian anggota Komite GCG dan Manajemen Risiko dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatannya dan diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

**Appointment and Dismissal of the GCG and Risk
Management Committee**

The appointment and dismissal of members of the GCG and Risk Management Committee are performed by the BOC of the Company based on the Decree of the BOC and reported to the GMS. Dismissal of the members of the GCG and Risk Management Committee may only be conducted if the members end their term of office and dismissed based on the resolution of the BOC due to not fulfilling the set performance standard and/or incompetent in carrying out their duties.



Masa jabatan Komite GCG dan Manajemen Risiko sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 yang menyatakan bahwa masa jabatan anggota Komite GCG dan Manajemen Risiko paling lama 3 tahun. Masa jabatan Komite GCG dan Manajemen Risiko dapat diperpanjang mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris, sedangkan anggota Komite GCG dan Manajemen Risiko yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris menjabat paling lama 2 tahun diangkat untuk 1 periode masa jabatan, dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali pada masa jabatan berikutnya.

Kriteria Komite GCG dan Manajemen Risiko

Kriteria Komite GCG dan Manajemen Risiko telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tanggal 3 September 2018 tentang Reviu dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual* dan *Code of Corporate Governance*). Dalam ketentuan tersebut disebutkan persyaratan Komite GCG dan Manajemen Risiko terdiri dari:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan tata kelola Perusahaan dan manajemen.
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan.
3. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
4. Mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite GCG dan Manajemen Risiko

Tugas dan kewenangan Komite GCG dan Manajemen Risiko dituangkan dalam Piagam Komite GCG dan Manajemen Risiko. Adapun tugas dan tanggung Komite GCG dan Manajemen Risiko meliputi:

1. Memantau pelaksanaan dan mengevaluasi hasil asesmen berkala atas penerapan GCG untuk memastikan efektivitas implementasi GCG yang dilaksanakan oleh organ-organ utama (RUP, Dewan Komisaris, dan Direksi) serta organ-organ pendukung

The term of office for the GCG and Risk Management Committee is under the Regulation of the Minister of SOE No. PER-12/MBU/2012 which stipulates that the term of office of members of the GCG and Risk Management Committee is not longer than three years. The term may be extended according to the BOC's term of office, while members of the GCG and Risk Management Committee who are not members of the BOC are appointed for one period for not more than two years and may be reappointed once more for the next term of office.

GCG and Risk Management Committee Criteria

The criteria for the GCG and Risk Management Committee have been determined in the Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors of Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 dated September 3, 2018 regarding the Review and Revision of the Corporate Governance Guidelines (*Board Manual* and *Code of Corporate Governance*). In this provision, it is stated that the requirements of the GCG and Risk Management Committee consist of:

1. Having good integrity and knowledge as well as adequate professional experience in supervision/audit sector.
2. Not having personal interest/connection that may cause a negative impact and any conflict of interest on the Company.
3. Having adequate knowledge in the Company's business and able to provide sufficient time to fulfil their duties.
4. Being able to cooperate and communicate effectively.

Duties and Responsibilities of the GCG and Risk Management Committee

The duties and authorities of the GCG and Risk Management Committee are set out in the GCG and Risk Management Committee Charter. The duties and responsibilities of the GCG and Risk Management Committee include:

1. Monitor the implementation and evaluation of periodic assessment results on GCG implementation to ensure the effectiveness of GCG implementation carried out by the main organs (GMS, BOC, and BOD) and



- (Komite-komite Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, dan Internal Audit).
2. Memberikan rekomendasi tentang penyempurnaan infrastruktur GCG Perusahaan serta memantau pelaksanaannya, mencakup:
 - a. Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*).
 - b. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (CoCG).
 - c. Pedoman Etika dan Perilaku (CoC).
 3. Me-review rencana kerja dan laporan tentang pelaksanaan GCG sebagai bagian dari Laporan Tahunan Perusahaan.
 4. Melaksanakan kajian tentang praktik-praktik terbaik (*best practices*) GCG untuk dapat diimplementasikan di Perusahaan.
 5. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa manajemen risiko Perseroan dijalankan secara efektif dan efisien.
 6. Memantau kebijakan pengelolaan risiko yang ditetapkan oleh Direksi untuk memastikan seluruh risiko yang dihadapi dapat dikelola dengan baik.
 7. Mengevaluasi kesesuaian realisasi capaian kinerja Perusahaan dengan rencana bisnis.
 8. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan manajemen risiko serta pelaksanaannya.
 9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan dan menyusun Pedoman Kerja Komite GCG dan Manajemen Risiko.
 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pedoman Kerja Komite GCG dan Manajemen Risiko

Komite GCG dan Manajemen Risiko Perusahaan telah dilengkapi dengan Pedoman Kerja yang dituangkan dalam bentuk *Charter* guna mendukung pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Dokumen tersebut disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris tanggal 3 September 2018 melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018. Pedoman kerja tersebut memuat aspek-aspek seperti,,,

supporting organs (Committees of the BOC, Secretary of the BOC, Corporate Secretary, and Internal Audit).

2. Provide recommendations on improving the GCG infrastructure and monitoring its implementation, including:
 - a. Guidelines for the BOC and BOD (Board Manual).
 - b. Guidelines for Corporate Governance (CoCG).
 - c. Code of Conduct (CoC).
3. Review work plans and reports on GCG implementation as part of the Company's Annual Report.
4. Carry out a study of GCG best practices to be implemented in the Company.
5. Assist the BOC to ensure that the Company's risk management is carried out effectively and efficiently.
6. Monitor risk management policies established by the BOD ensure that all risks may be managed properly.
7. Evaluate the suitability of the Company's performance achievements with the business plan.
8. Provide recommendations on improving risk management and implementation.
9. Maintain the confidentiality of Company documents, data, and information and formulate the GCG Committee and Risk Management Work Guidelines.
10. Carry out other duties given by the BOC.

GCG and Risk Management Committee Work Guidelines

The GCG and Risk Management Committee has been complemented with the GCG and Risk Management Committee Charter to support the implementation of its functions and duties. The document is prepared based on the prevailing laws and regulations and has been stipulated by the BOC on 3 September 2018 in the Board Manual stipulated through the Joint Decision of the BOC and the BOD of Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018. The work manual contains aspects such as,,,



Independensi Komite GCG dan Manajemen Risiko

Komite GCG dan Manajemen Risiko Perseroan terdiri dari ketua yang merupakan anggota Dewan Komisaris dan anggota lainnya yang merupakan pihak independen. Seluruh anggota Komite GCG dan Manajemen Risiko merupakan pribadi profesional yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan guna menjaga independensi dan objektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dan menghindari benturan kepentingan. Independensi Komite GCG dan Manajemen Risiko dijelaskan dalam tabel berikut:

Aspek Independensi / Independence Aspects	Otto Ardianto	Tubagus Arief Fahmi	Yusmar Anggadinanta
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. / Has no financial relationship with the BOC and the BOD.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Pelindo III, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi. / Has no management relationship in Pelindo III, subsidiaries, and affiliates.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan di Perusahaan. / Has no share ownership in the Company.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit. / Has no familial relationship with the BOC, BOD, and/or members of the Audit Committee.	✓	✓	✓

Rapat Komite GCG dan Manajemen Risiko

Mengacu pada Pedoman Kerja, Komite GCG dan Manajemen Risiko wajib melakukan pertemuan rutin dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan serta melakukan pertemuan dengan fungsi terkait terutama unit kerja GCG dalam rangka membahas perkembangan dan aktivitas Perusahaan, baik secara berkala maupun sesuai kondisi yang diperlukan. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite GCG dan Manajemen Risiko, dan dalam hal Ketua Komite GCG dan Manajemen Risiko berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh anggota Komite GCG dan Manajemen Risiko yang paling senior.

Pengambilan keputusan dalam rapat Komite GCG dan Manajemen Risiko wajib dihadiri oleh ...% dari jumlah anggota dengan berlandaskan metode musyawarah untuk mufakat. Hasil rapat Komite GCG dan Manajemen Risiko dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Independence of the GCG and Risk Management Committee

The Company's GCG and Risk Management Committee consists of a chairman who is a member of the Board of Commissioners and other members who are independent parties. All members of the GCG and Risk Management Committee are professional individuals who have no affiliation with the Company in order to maintain independence and objectivity in the implementation of duties and responsibilities and to avoid conflicts of interest. The independence of the GCG and Risk Management Committee is described in the following table:

GCG and Risk Management Committee Meetings

Referring to the Work Guideline, the GCG and Risk Management Committee shall hold regular meetings with the BOC for at least once a month as well as hold meetings with the related functions, particularly the GCG work unit, to discuss the development and activities of the Company, both in a periodic manner or in accordance with the required conditions. The meeting is chaired by the Chairman of the GCG and Risk Management Committee, and in the event that the Chairman of the GCG and Risk Management Committee is unable to attend, the meeting is chaired by the most senior member of the GCG and Risk Management Committee.

Decision making in the GCG and Risk Management Committee meetings must be attended by ...% of the total members based on the deliberation method for consensus. The results of the GCG and Risk Management Committee meetings are included in the minutes of the meeting, including if there are dissenting opinions and reported to the Board of Commissioners.



Selama tahun 2020, Komite GCG dan Manajemen Risiko menyelenggarakan kali rapat dengan tingkat kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut.

Frekuensi Rapat Komite GCG dan Manajemen Risiko

Nama / Name	Jumlah Rapat / Total Meetings	Frequency of GCG and Risk Management Committee Meetings	
		Kehadiran / Attendance	Persentase Kehadiran / Attendance Percentage
Otto Ardianto%
Tubagus Arief Fahmi%
Yusmar Anggadinanta%

Risalah Rapat Komite GCG dan Manajemen Risiko Tahun 2020

Agenda yang dibahas dalam rapat-rapat Komite GCG dan Manajemen Risiko selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

During 2020, the GCG and Risk Management Committee held meetings with the following levels of attendance and meeting agendas.

Frequency of GCG and Risk Management Committee Meetings

Minutes of the 2020 GCG and Risk Management Committee Meetings

The agenda discussed in the GCG and Risk Management Committee meetings during 2020 is as follows:

No.	Tanggal / Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Komite GCG dan Manajemen Risiko yang Hadir / Meeting Participants
1	• ... • ... • ...
2	• ... • ... • ... • ...
3	• ... • ... • ... • ...
4	• ... • ... • ... • ...
5	• ... • ... • ... • ...
6	• ... • ... • ... • ...
7	• ... • ... • ... • ...



Pengembangan Kompetensi Komite GCG dan Manajemen Risiko

Perseroan memfasilitasi dan membekali Komite GCG dan Manajemen Risiko dengan program pengembangan kompetensi melalui pengikutsertaan dalam pelatihan dan pendidikan, baik yang diselenggarakan secara formal maupun informal. Informasi mengenai pengembangan kompetensi yang diikuti Komite GCG dan Manajemen Risiko telah tercantum dalam Laporan Tahunan ini, bagian Profil Perusahaan, sub bagian Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Intern.

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite GCG dan Manajemen Risiko

Sepanjang tahun 2020, Komite GCG dan Manajemen Risiko telah menjalankan dan merealisasikan program serta kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rekomendasi Komite GCG dan Manajemen Risiko

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Komite GCG dan Manajemen Risiko senantiasa memberikan rekomendasi yang mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris maupun kepada divisi-divisi lain yang menjadi kewenangannya. Rekomendasi yang diberikan Komite GCG dan Manajemen Risiko pada tahun 2020, antara lain:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Competency Development of the GCG and Risk Management Committee

The Company facilitates and provides the GCG and Risk Management Committee with competency development programs through participation in training and education, both formally and informally. Information regarding competency development participated by the GCG and Risk Management Committee has been included in this Annual Report, the Company Profile section, the Competency Development sub-section of the Board of Commissioners, Directors, Committees, Corporate Secretary, and the Internal Audit Unit.

GCG and Risk Management Committee Duties Implementation Report

Throughout 2020, the GCG and Risk Management Committee has carried out and realized the programs and activities that are their duties and responsibilities, including:

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...

Recommendations of the GCG and Risk Management Committee

In carrying out its functions and duties, the GCG and Risk Management Committee always provides recommendations that support the supervisory function of the Board of Commissioners and other divisions under its authority. The recommendations given by the GCG and Risk Management Committee in 2020 include:

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...



Kebijakan Remunerasi Komite GCG dan Manajemen Risiko

Remunerasi bagi Anggota Komite GCG dan Manajemen Risiko diatur dalam Peraturan Menteri No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, dimana penghasilan anggota Komite GCG dan Manajemen Risiko Perusahaan diberikan honorarium maksimal sebesar 20% dari gaji Direktur Utama atau sebesar Rp43.200.000, dengan ketentuan pajak ditanggung perusahaan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium.

Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite GCG dan Manajemen Risiko tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris.

Struktur Remunerasi Komite GCG dan Manajemen Risiko

Nama / Name	Jabatan / Position	Honorarium	Keterangan / Description
Otto Ardianto	Komisaris merangkap Ketua Komite GCG dan Manajemen Risiko / Commissioner concurrently Chairman of the GCG and Risk Management Committee	-	Anggota Dewan Komisaris (Honorarium dapat dilihat di tabel Honorarium Dewan Komisaris) / Members of the Board of Commissioners (Honorarium can be seen in the Honorarium table of the Board of Commissioners)
Tubagus Arief Fahmi	Anggota Komite GCG dan Manajemen Risiko / Member of the GCG and Risk Management Committee	Rp43.200.000	
Yusmar Anggadinanta	Anggota Komite GCG dan Manajemen Risiko / Member of the GCG and Risk Management Committee	Rp43.200.000	

Rencana Kerja dan Realisasi di Tahun 2020

Komite GCG dan Manajemen Risiko wajib menyampaikan laporan tertulis aktivitasnya kepada Dewan Komisaris setiap 3 bulan sekali sebagaimana diamanatkan dalam *Code of Corporate Governance*. Ruang lingkup Laporan Kegiatan Komite GCG dan Manajemen Risiko mencakup tugas, tanggung jawab dan wewenang, rapat, kegiatan, program kerja dan realisasi program kerja. Berikut merupakan program kerja Komite GCG dan Manajemen Risiko di tahun 2019.

GCN and Risk Management Committee Remuneration Policy

Remuneration for Members of the GCG and Risk Management Committee is stipulated in the Minister Regulation No. PER12/MBU/2012 dated August 24, 2012 on the Supporting Organ of the BOC/Supervisory Board of SOE, of which the income of the members of the GCG and Risk Management Committee is granted through honorarium with the maximum of 20% from the salary of the President Director or amounting to Rp43,200,000 with the tax imposed upon the company, and is not allowed to receive other income other than the honorarium.

The members of the BOC that serves as the Head/Member of the GCG and Risk Management Committee are not granted additional income from the position other than the income from serving as Members of the BOC.

Remuneration Structure of the GCG and Risk Management Committee

Work Plan and Realization in 2020

The GCG and Risk Management Committee is required to submit a written report of its activities to the BOC every three months as mandated in Code of Corporate Governance. The scope of the Activity Report of the GCG and Risk Management Committee includes duties, responsibilities and authorities, meetings, activities, work programmes and their realisation. Below is the list of work programmes of the GCG and Risk Management Committee in 2019.



No.	Rencana Kerja / Work Plan	Keterangan / Description
1	Pengembangan Kapasitas	Capacity Building
2	Evaluasi Pelaksanaan RKAP 2020	Evaluation on the 2020 RKAP Implementation
3	Kunjungan Kerja ke Cabang dan Anak Perusahaan	Working Visits to Branches and Subsidiaries
4	Pemantauan Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik	Monitoring the Implementation of Good Governance Principles
5	Pembahasan Kebijakan Strategis yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris	Discussion of Strategic Policies that require the approval of the BOC
6	Penelaahan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga	Review of Cooperation with third parties
7	Penelaahan Pengaduan yang Diterima Dewan Komisaris	Review on Complaints received by the BOC
8	Penelaahan Rancangan RKAP 2021	Review on the Draft for 2021 RKAP
9	Pengawasan Kebijakan Mutu dan Pelayanan	Supervision of Quality and Service Policies
10	Pengawasan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Supervision of Human Resource Development Policy
11	Pengawasan Penerapan Manajemen Risiko	Supervision of Risk Management Implementation
12	Pengawasan Penerapan Teknologi Informasi	Supervision of Information Technology Implementation
13	Pengawasan Kinerja Operasional Kantor Pusat, Kantor Cabang, dan Anak Perusahaan	Supervision of Operational Performance of Head Office, Branch Offices, and Subsidiaries
14	Penyusunan RKA Dewan Komisaris Tahun 2020	Preparation for the 2020 BOC RKA
15	Perhitungan KPI Dewan Komisaris	Calculation of the BOC KPI

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. tanggal

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai Keputusan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No., maka susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Board of Commissioners established the Nomination and Remuneration Committee by virtue of the Decree of the Board of Commissioners No. ... date ...

Nomination and Remuneration Committee Composition

According to the Decree of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No., the composition of the Nomination and Remuneration Committee membership is as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Penetapan / Basis of Appointment	Keahlian / Expertise	Masa Jabatan / Term of Office
Marsetio	Komisaris Utama / Independen merangkap Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi / President/ Independent Commissioner cum Head of Nomination and Remuneration Committee	Surat Keputusan No. SK-55/ KEP/DK.P.III/04/2020 tanggal 16 April 2020 / Decree No. SK-55/KEP/DK.P.III/04/2020 dated April 16, 2020	2020-2025



Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Penetapan / Basis of Appointment	Keahlian / Expertise	Masa Jabatan / Term of Office
Heru Sukanto	Komisaris Independen merangkap Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi / Independent Commissioner cum Secretary of Nomination and Remuneration Committee	Surat Keputusan No. SK-55/ KEP/DK.P.III/04/2020 tanggal 16 April 2020 / Decree No. SK- 55/KEP/DK.P.III/04/2020 dated April 16, 2020	<i>Finance Banking</i>	
Tri Prasodjo	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member	Surat Keputusan No. SK-55/ KEP/DK.P.III/04/2020 tanggal 16 April 2020 / Decree No. SK- 55/KEP/DK.P.III/04/2020 dated April 16, 2020	2020 - 2023
Agus Pambagio	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member	Surat Keputusan No. SK-55/ KEP/DK.P.III/04/2020 tanggal 16 April 2020 / Decree No. SK- 55/KEP/DK.P.III/04/2020 dated April 16, 2020	2020 - 2023

Nomination and Remuneration Committee Profile**Profil Komite Nominasi dan Remunerasi**

Marsetio Komisaris Utama / Independen merangkap Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi / President/ Independent Commissioner cum Head of Nomination and Remuneration Committee	Profil Bapak Marsetio telah tercantum pada Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini. Profile of Mr. Marsetio can be viewed in the Board of Commissioners Profile on this Annual Report.
Heru Sukanto Komisaris Independen merangkap Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi / Independent Commissioner cum Secretary of Nomination and Remuneration Committee	Profil Bapak Heru Sukanto telah tercantum pada Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini. Profile of Mr. Heru Sukanto can be viewed in the Board of Commissioners Profile on this Annual Report.



Tri Prasodjo
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi /
Nomination and Remuneration Committee Member

Kewarganegaraan / Nationality : Indonesia / Indonesian
Tempat Tanggal Lahir / Place, Date of Birth : Kediri, 22 Desember 1959 / December 22, 1959
Usia / Age : 61 tahun / 61 years old
Domisili / Domicile : Bekasi

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment

Surat Keputusan No. SK-55/KEP/DK.P.III/04/2020 tanggal 16 April 2020 /
Decree No. SK-55/KEP/DK.P.III/04/2020 dated April 16, 2020

Latar Belakang Pendidikan / Education

- Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut / Naval Command and Staff College
- Akademi Angkatan Laut / Naval Academy

Riwayat Jabatan / Career History

- Kepala Departemen Logistik di KRI / Head of the Logistics Department at KRI
- Pemegang Kas Keuangan Pusat TNI AL / Indonesian Navy Central Financial Cash Holder
- Asisten Perencanaan di Lantamal III Surabaya / Planning Assistant at Lantamal III Surabaya
- Komandan Pangkalan TNI AL Banjarmasin / Commander of the Banjarmasin Navy Base
- Kepala Dinas Keuangan Koarmada Barat / Head of the Western Command Finance Office
- Inspektur Muda Bidang Keuangan Inspektorat Jendral TNI AL / Junior Inspector for Finance, Inspectorate General of the Indonesian Navy
- Paban Bidang Program dan Anggaran Asisten Perencanaan TNI AL / Head of Program and Budget Division of the Indonesian Navy Planning Assistant
- Kepala Dinas Penerangan TNI AL / Head of the Navy Information Service
- Inspektur Pembinaan Inspektorat Jendral TNI AL / Inspector of Supervision of the Indonesian Navy's Inspectorate General
- Direktur Administrasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertahanan / Director of Budget Execution Administration of the Ministry of Defense
- Kepala Pusat Keuangan TNI / Head of Indonesian Army Finance Center
- Kepala Pusat Keuangan Kementerian Pertahanan / Head of the Ministry of Defense Finance Center
- Inspektur Jendral dan Perbendaharaan TNI AL / Inspector General and Treasury of the Indonesian Navy

Sertifikasi / Certificate

- Kursus Pengawasan dan Pemeriksaan serta Teknik Auditor / Supervision and Audit Course and Auditor Technique
- Audit Forensik (CFrA) / Certified Forensic Audit (CFrA)



Agus Pambagio
Anggota Komite Nominasi
dan Remunerasi /
Nomination and
Remuneration Committee
Member

Kewarganegaraan / Nationality : Indonesia / Indonesian
Tempat Tanggal Lahir / Place, Date of Birth : Semarang, 19 Agustus 1959
Usia / Age : 61 tahun / 61 years old
Domisili / Domicile : Jakarta

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment

Surat Keputusan No. SK-55/KEP/DK.P.III/04/2020 tanggal 16 April 2020 /
Decree No. SK-55/KEP/DK.P.III/04/2020 dated April 16, 2020

Latar Belakang Pendidikan / Education

- S1 Teknologi Kimia Tekstil dari Institut Teknologi Tekstil Bandung (1984) / Bachelor's Degree in Textile Chemical Technology from Institut Teknologi Tekstil Bandung (1984)
- S2 Engineering Management dari The George Washington University, Washington, DC, USA (1990) / Master's Degree in Engineering Management from The George Washington University, Washington, DC, USA (1990)

Riwayat Jabatan / Career History

- Deputi Kepala (*Deputy Chairman*) Free Trade Zone Batam [Otorita Batam (2017-2019) / Deputy Chairman of Batam Free Trade Zone (Batam Authority) (2017-2019)]
- Anggota Tim Ahli Pokja Industri Logam Dasar dan Kawasan Industri Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) (2016-2019) / Member of the Expert Team of the Working Group for Basic Metals and Industrial Estates of the National Economic and Industrial Committee (KEIN) (2016-2019)
- Anggota Tim Ahli pada proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) Indonesia – Tiongkok Kedeputian III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Bidang Kemaritiman (2015-2017) / Member of the Expert Team on the Belt and Road Initiative (BRI) Indonesia – China Deputy III for Infrastructure Coordination of the Coordinating Ministry for Maritime Affairs (2015-2017)
- *Director of Human Capital and Business Development* PT Wijaya Karya, Tbk. (2015-2016) / Director of Human Capital and Business Development at PT Wijaya Karya, Tbk. (2015-2016)
- *Director of Cargo and Business Development* PT Angkasa Pura II (2014-2015) / Director of Cargo and Business Development at PT Angkasa Pura II (2014-2015)

Rangkap Jabatan / Concurrent Position

Konsultan Lepas dan Peneliti Pusat Kajian Logistik dan Rantai Pasokan, ITB /
Freelance Consultant and Researcher of the Center for Logistics and Supply Chain Studies, ITB

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Nominasi dan Remunerasi

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Komisaris Perusahaan dan dilaporkan kepada RUPS. Pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatannya dan diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Appointment and Dismissal of Nomination and Remuneration Committee

The appointment and dismissal of members of the Nomination and Remuneration Committee is carried out by the Board of Commissioners based on a Decree issued by the Company's Board of Commissioners and is reported to the GMS. Dismissal of a member of the Nomination and Remuneration Committee can be done if the concerned person ends his/her term of office and is dismissed based on the decision of the Board of Commissioners because he/she does not meet the predetermined performance and/or is not competent in carrying out his/her duties.



Masa jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 yang menyatakan bahwa masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi paling lama 3 tahun. Masa jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi dapat diperpanjang mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris, sedangkan anggota Nominasi dan Remunerasi yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris menjabat paling lama 2 tahun diangkat untuk 1 periode masa jabatan, dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali pada masa jabatan berikutnya.

The term of office of the Nomination and Remuneration Committee is in accordance with the provisions stipulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-12/MBU/2012 which states that the term of office of members of the Nomination and Remuneration Committee is no longer than 3 years. The term of office of the Nomination and Remuneration Committee can be extended following the term of office of the Board of Commissioners, while members of the Nomination and Remuneration who are not members of the Board of Commissioners who serve a maximum of 2 years are appointed for 1 term of office, and can be reappointed for 1 time in the next term of office.

Kriteria Komite Nominasi dan Remunerasi

Kriteria Komite Nominasi dan Remunerasi mengacu pada Keputusan Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 tanggal 3 September 2018 tentang Reviu dan Revisi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual and Code of Corporate Governance*), antara lain:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan tata kelola Perusahaan dan manajemen.
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan.
3. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
4. Mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif.

Nomination and Remuneration Committee Criteria

The criteria for the Nomination and Remuneration Committee refer to the Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors of Pelindo III No. HK.150/09/KEP/DK.P.III/2018; PER.0050/HK.01/HOFC-2018 dated September 3, 2018 regarding the Review and Revision of Board Manual and Code of Corporate Governance, including:

1. Has good integrity and sufficient knowledge and work experience related to corporate governance and management.
2. Does not have any personal interests/relationships that can have a negative impact and conflict of interest on the Company.
3. Has adequate knowledge in the Company's business field, and can provide sufficient time to complete the duties.
4. Able to work together and communicate effectively.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, tugas dan tanggung jawab utama Komite Nominasi dan Remunerasi adalah membantu Dewan Komisaris dalam penetapan kriteria pemilihan dan persiapan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi beserta sistem remunerasinya.

Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee

In accordance with the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 regarding Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs, the main duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee are to assist the Board of Commissioners in determining the criteria for selecting and preparing candidates for members of the Board of Commissioners and Board of Directors and their remuneration system.



Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan telah dilengkapi dengan Pedoman Kerja yang dituangkan dalam bentuk Charter guna mendukung pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Dokumen tersebut disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. Pedoman kerja tersebut memuat aspek-aspek seperti,,,

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan terdiri dari ketua yang merupakan anggota Dewan Komisaris dan anggota lainnya yang merupakan pihak independen. Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan pribadi profesional yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan guna menjaga independensi dan objektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dan menghindari benturan kepentingan. Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi dijelaskan dalam tabel berikut:

Nomination and Remuneration Committee Working Guidelines

The Company's Nomination and Remuneration Committee has been equipped with Work Guidelines as outlined in the Charter to support the implementation of its functions and duties. The document is prepared based on the prevailing laws and regulations and has been determined by the Board of Commissioners through the Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors No. The work manual contains aspects such as ...

Independence of the Nomination and Remuneration Committee

The Company's Nomination and Remuneration Committee consists of a chairman who is a member of the Board of Commissioners and other members who are independent parties. All members of the Nomination and Remuneration Committee are professional individuals who have no affiliation with the Company in order to maintain independence and objectivity in carrying out their duties and responsibilities and to avoid conflicts of interest. The independence of the Nomination and Remuneration Committee is described in the following table:

Aspek Independensi / Independence Aspects	Marsetio	Heru Sukanto	Tri Prasodjo	Agus Pambagio
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi. / Has no financial relationship with the BOC and the BOD.	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Pelindo III, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi. / Has no management relationship in Pelindo III, subsidiaries, and affiliates.	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan di Perusahaan. / Has no share ownership in the Company.	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit. / Has no familial relationship with the BOC, BOD, and/or members of the Audit Committee.	✓	✓	✓	✓



Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi menyelenggarakan

Nomination and Remuneration Committee Meeting

Selama tahun 2020, Komite Nominasi dan Remunerasi menyelenggarakan kali rapat dengan tingkat kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut.

Nomination and Remuneration Committee held ... meetings throughout 2020 with attendance and agenda as follows:

Frekuensi Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Frequency of Nomination and Remuneration Committee Meeting

Nama / Name	Jumlah Rapat / Total Meetings	Kehadiran / Attendance	Percentase Kehadiran / Attendance Percentage
Marsetio%
Heru Sukanto%
Tri Prasodjo%
Agus Pambagio%

Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2020

Minutes of the Nomination and Remuneration Committee Meeting in 2020

Agenda yang dibahas dalam rapat-rapat Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

The agenda discussed in the Nomination and Remuneration Committee meetings in 2020 is as follows:

No.	Tanggal / Date	Agenda Rapat / Meeting Agenda	Komite Nominasi dan Remunerasi / Meeting Participants
1	• ... • ... • ... • ...
2	• ... • ... • ... • ...
3	• ... • ... • ... • ...
4	• ... • ... • ... • ...
5	• ... • ... • ... • ...
6	• ... • ... • ... • ...
7	• ... • ... • ... • ...



Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan memfasilitasi dan membekali Komite Nominasi dan Remunerasi dengan program pengembangan kompetensi melalui pengikutsertaan dalam pelatihan dan pendidikan, baik yang diselenggarakan secara formal maupun informal. Informasi mengenai pengembangan kompetensi yang diikuti Komite Nominasi dan Remunerasi telah tercantum dalam Laporan Tahunan ini, bagian Profil Perusahaan, sub bagian Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Intern.

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi

Sepanjang tahun 2020, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan dan merealisasikan program serta kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

1.
2.
3.
4.

Kebijakan Remunerasi Komite Nominasi dan Remunerasi

Remunerasi bagi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diatur dalam Peraturan Menteri No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, dimana penghasilan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan diberikan honorarium maksimal sebesar 20% dari gaji Direktur Utama atau sebesar Rp43.200.000, dengan ketentuan pajak ditanggung perusahaan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium.

Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris.

Nomination and Remuneration Committee Competency Development

The Company facilitates and equips the Nomination and Remuneration Committee with competency development programs through training and education, both formally and informally. Information regarding competency development participated in by the Nomination and Remuneration Committee has been included in this Annual Report, the Company Profile chapter, Competency Development for the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and the Internal Audit Unit sub-chapter.

Report on the Implementation of Duties of the Nomination and Remuneration Committee

Throughout 2020, the Nomination and Remuneration Committee has carried out and realized its duties and responsibilities through programs and activities as follows:

1.
2.
3.
4.

Nomination and Remuneration Committee Remuneration Policy

Remuneration for members of the Nomination and Remuneration Committee is regulated in Ministerial Regulation No. PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs, in which the income of members of the Nomination and Remuneration Committee of the Company is given a maximum honorarium of 20% of the salary of the President Director or Rp43,200,000 provided that the tax is borne by the Company, and is not allowed to receive other income other than the honorarium.

Members of the Board of Commissioners who become Chairman/Members of the Nomination and Remuneration Committee are not given additional income from the position other than income as members of the Board of Commissioners.



Struktur Remunerasi Komite Nominasi dan Remunerasi

Remuneration Structure of the Nomination and Remuneration Committee

Nama / Name	Jabatan / Position	Honorarium	Keterangan / Description
Marsetio	Komisaris Utama / Independen merangkap Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi / Independent/ President Commissioner cum Head of the Nomination and Remuneration Committee	-	Anggota Dewan Komisaris (Honorarium dapat dilihat di tabel Honorarium Dewan Komisaris) / Board of Commissioners Member (Honorarium can be seen in Board of Commissioners Honorarium table)
Heru Sukanto	Komisaris Independen merangkap Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi / Independent Commissioner cum Secretary of the Nomination and Remuneration Committee		
Tri Prasodjo	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member	Rp43.200.000	
Agus Pambagio	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee Member	Rp43.200.000	

Rencana Kerja dan Realisasi di Tahun 2020

Ruang lingkup Laporan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi mencakup tugas, tanggung jawab dan wewenang, rapat, kegiatan, program kerja dan realisasi program kerja. Berikut merupakan program kerja Komite Nominasi dan Remunerasi di tahun 2020:

Work Plan and Realization in 2020

The scope of the Nomination and Remuneration Committee Activity Report covers duties, responsibilities and authorities, meetings, activities, work programs and realization of work programs. The following is the work program of the Nomination and Remuneration Committee in 2020:

No.	Rencana Kerja / Work Plan	Keterangan / Description
1		Terlaksana
2		Terlaksana
3		Terlaksana
4		Terlaksana
5		Terlaksana
6		Terlaksana

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Dalam mendukung fungsi kepengurusan dan pengelolaan Perseroan yang dijalankan, Direksi dibantu oleh satu unit kerja yaitu Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan mengembangkan misi untuk mendukung terciptanya citra Perseroan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui pengelolaan program komunikasi yang efektif kepada segenap pemangku kepentingan.

Fungsi-fungsi utama yang dijalankan Sekretaris Perusahaan antara lain meliputi *liaison officer (public relation/corporate communication)*, *institution relations*, *GCG implementation*, *monitoring pencapaian*

CORPORATE SECRETARY

In supporting the organization and management functions of the Company, the Board of Directors is assisted by one work unit, namely the Corporate Secretary. The Corporate Secretary has a mission to support the creation of a good corporate image consistently and continuously through the management of effective communication programs to all stakeholders.

The main functions carried out by the Corporate Secretary include, among others, liaison officer (public relations/corporate communication), institution relations, GCG implementation, monitoring of KPI achievements,



KPI, *monitoring* pelaksanaan kegiatan PKBL, serta administrasi dokumen kebijakan dan notulensi rapat Direksi.

Dasar Hukum Pengangkatan

Sekretaris Perusahaan diangkat oleh Direktur Utama setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III No. KEP.200/KP.0604/P.III-2019 tanggal 20 Juni 2019.

Profil Sekretaris Perusahaan

Ardhy Wahyu Basuki

Sekretaris Perusahaan /
Corporate Secretary

Kewarganegaraan / Citizenship

Tempat Tanggal Lahir / Place, Date of Birth : Surabaya, 11 September 1978

Usia / Age : 42 tahun / years old

Domisili / Domicile : Surabaya

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment

Diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan oleh Direktur Utama setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. KEP.200/KP.0604/P.III-2019 tanggal 20 Juni 2019. / Appointed by the President Director after obtaining approval from the Board of Commissioners based on the Decree of the Directors of PT Pelabuhan Indonesia III No. KEP.200/KP.0604/P.III-2019 dated June 20, 2019.

Latar Belakang Pendidikan / Educational Background

- Sarjana Muda Teknik Industri dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (1998) / Bachelor's Degree in Industrial Engineering from Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya (1998)

Riwayat Jabatan / Employment History

- Senior Manager Pemasaran (2018-2019)
- CEO Regional Jawa Tengah (2018-2019)
- General Manager Pelabuhan Cabang Tanjung Emas (2017-2018)
- General Manager Pelabuhan Cabang Benoa (2017)
- General Manager Pelabuhan Maumere (2015-2016)
- Senior Vice President Marketing (2018-2019)
- Regional CEO of Central Java (2018-2019)
- General Manager of Tanjung Emas Port (2017-2018)
- General Manager of Benoa Port (2017)
- General Manager of Maumere Port (2015- 2016).

monitoring the implementation of PKBL activities, as well as administration of policy documents and minutes of Board of Directors meetings.

Legal Basis of Appointment

The Corporate Secretary is appointed by the President Director after obtaining approval from the Board of Commissioners based on the Decree of the Directors of PT Pelabuhan Indonesia III No. KEP.200/KP.0604/P.III-2019 dated June 20, 2019.

Corporate Secretary Profile



Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Organ Sekretaris Perusahaan dibentuk melalui Surat Keputusan Direksi dengan No. PER.0029/OS.01/HOFC-2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelindo III. Sekretaris Perusahaan memiliki misi untuk "Memastikan Meningkatnya Citra Perusahaan dan Terimplementasinya GCG melalui Pengelolaan Kegiatan Hubungan Masyarakat, Hubungan Investor, dan Tata Kelola Perusahaan, Kemitraan dan Bina Lingkungan, serta fungsi umum lainnya".

Sekretaris Perusahaan dikepalai oleh satu orang dengan didukung oleh 34 personel dengan kualitas dan kompetensi yang telah memenuhi persyaratan dalam *Job Profile* Sekretaris Perusahaan dan terdiri dari fungsi-fungsi berikut:

- Hubungan Masyarakat
- Hubungan Investor dan Tata Kelola Perusahaan
- Kemitraan dan Bina Lingkungan
- Fungsi Umum

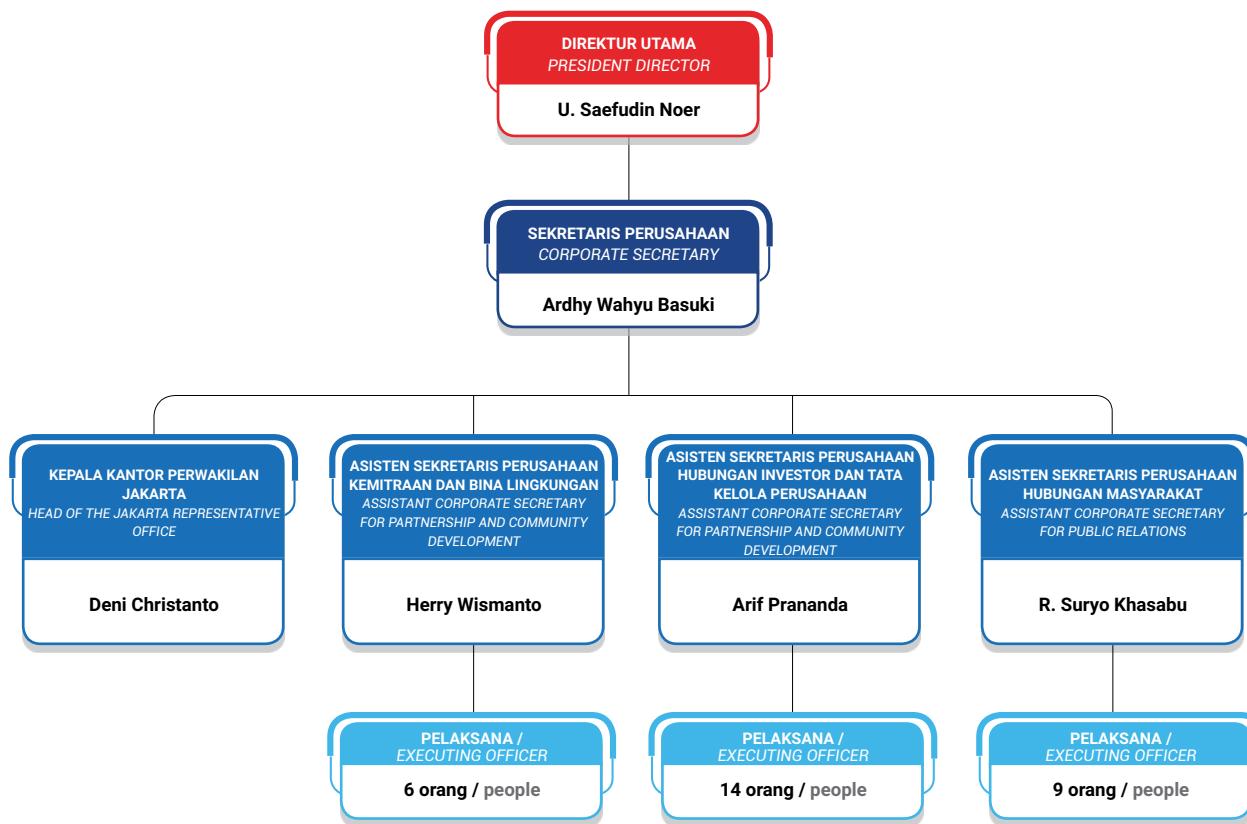
Corporate Secretary Organizational Structure

The Corporate Secretary Organ was established through the Decree of the BOD No. PER.0029/OS.01/HOFC-2019 on the Organisation Structure and Work Procedure of Pelindo III. The Corporate Secretary has the mission "To Ensure the Improvement of Corporate Image and GCG Implementation Through Management of Corporate Communication, Investor Relation and Corporate Governance, Partnership and Community Development, and other general functions".

The Corporate Secretary is headed by one person that is supported by 34 personnel with quality and competence that meets the requirements in the Job Profile of Corporate Secretary and consisting of several functions:

- Corporate Communication.
- Investor Relation and Corporate Governance.
- Partnership and Community Development.
- General Functions.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIS PERUSAHAAN CORPORATE SECRETARY ORGANIZATIONAL STRUCTURE





Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

1. Perumusan kebijakan, pembinaan penyelenggaraan, dan pengendalian Kegiatan Unit Kerja Sekretaris Perusahaan.
2. Penyusunan kegiatan dan evaluasi program fungsi Hubungan Masyarakat secara korporasi, termasuk publikasi dan pembentukan citra perusahaan antara lain melalui pengelolaan situs web, media sosial, *Company Profile*, penyelenggaraan hubungan investor, serta pembinaan administrasi kesekretariatan Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk keprotokoleran Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Penyusunan sistem dan prosedur kegiatan serta pembinaan teknis fungsi kehumasan secara korporasi termasuk publikasi dan pembentukan citra perusahaan, penerbitan laporan tahunan, penyelenggaraan hubungan investor, dan tata kelola perusahaan.
4. Penyusunan rencana kebutuhan karyawan fungsi kehumasan secara korporasi pada setiap pelabuhan di setiap wilayah kerja Perseroan termasuk rancangan pemenuhan standar kualifikasi karyawan sesuai peraturan yang berlaku untuk menunjang kegiatan Hubungan Masyarakat di wilayah kerja Perseroan.
5. Pemantauan dan pengajuan usulan kepada manajemen maupun unit-unit lain terkait pelaksanaan fungsi kehumasan, hubungan kelembagaan, dan kemitraan Bina Lingkungan di wilayah Perseroan.
6. Sebagai juru bicara Perseroan, memantau pelaksanaan *Board Manual* dan memantau kepatuhan korporat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Perseroan memfasilitasi dan membekali Sekretaris Perusahaan dengan program pengembangan kompetensi melalui pengikutsertaan dalam pelatihan dan pendidikan, baik yang diselenggarakan secara formal maupun informal. Informasi mengenai pengembangan kompetensi yang diikuti Sekretaris Perusahaan telah tercantum dalam Laporan Tahunan ini, bagian Profil Perusahaan, sub bagian Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Intern.

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

1. Policy formulation, organisation development, and control of Corporate Secretary Work Unit Activities.
2. Preparation of programme activity and evaluation of Corporate Communication function, including the publication and establishment of corporate image, e.g. through the management of the website, social media, Company Profile, investor relations, as well as secretarial administration of the BOD and the BOC, including the protocol of the BOD and the BOC.
3. Preparation of system and activity procedure as well as the technical development of corporate public relations function, including the publication and establishment of corporate image, issuance of annual reports, investor relations, and corporate governance organisation.
4. Preparation of employee needs a plan of the corporate public relations function in every Company work area, including the plan for employee qualification standard fulfilment plan under applicable regulations to support Corporate Communication activities in Company work area.
5. Monitoring and recommendation to the management or other units concerning public relations, institutional relations, as well as partnership and Community Development function in the Company work area.
6. As a spokesperson of the Company, monitoring the implementation of Board Manual and monitoring the corporate compliance to the prevailing regulations.

Corporate Secretary Competency Development

The Company facilitates and provides the Corporate Secretary with competency development programs through participation in training and education, both formally and informally. Information regarding competency development that the Corporate Secretary participates in has been included in this Annual Report, the Company Profile section, the Competency Development sub-section of the Board of Commissioners, the Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and the Internal Audit Unit.



Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Selama tahun 2020, Sekretaris Perusahaan telah melakukan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk Laporan Sekretaris Perusahaan sesuai dengan pembagian bidang dalam struktur organisasi:

Fungsi Hubungan Masyarakat

Merencanakan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penanganan dan pembinaan hubungan masyarakat (*public relation*), penanganan kegiatan yang berhubungan dengan Pemangku Kepentingan, hubungan kelembagaan, serta pencitraan Perseroan.

Fungsi Hubungan Investor dan Tata Kelola Korporasi

Merencanakan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan komunikasi khususnya kepada investor, calon investor, dan analis tentang berbagai aspek terkait dengan kinerja Perusahaan, serta memastikan proses administrasi di Perseroan sesuai dengan ketentuan GCG.

Fungsi Kemitraan dan Bina Lingkungan

1. Merencanakan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan penyusunan strategi dan program kemitraan dan bina lingkungan.
2. Analisis kelayakan untuk peminjaman kepada pihak masyarakat sekitar.
3. Penyaluran dana.
4. Memastikan pengembalian dan laporan kegiatan peminjaman tepat waktu.

Fungsi Umum

Merencanakan, mengendalikan, membina, menganalisis, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan kerumah tanggaan dan menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, serta membantu fungsi hubungan investor khusus di Kantor Perwakilan.

Komunikasi dan Hubungan Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan

Aktivitas komunikasi dan hubungan dengan para pemangku kepentingan yang dijalankan Sekretaris Perusahaan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Corporate Secretary Duties Implementation Report

During 2020, the Corporate Secretary has carried out activities and submitted reports in the form of a Corporate Secretary Report in accordance with the division of fields in the organizational structure:

Public Relations Function

Planning, controlling, fostering, analysing, as well as evaluating and reporting on the activities of handling and fostering public relations, handling activities related to Stakeholders, institutional relations, and corporate imaging.

Investor Relations and Corporate Governance Functions

Planning, controlling, fostering, analysing, and evaluating as well as reporting communication activities especially to investors, prospective investors, and analysts on various aspects related to Company performance as well as ensuring the administrative process in the Company is following the provisions of GCG.

Partnership and Community Development Function

1. Planning, controlling, fostering, analysing, and evaluating the activities of developing strategies and programmes in partnership and community development.
2. Loan feasibility analysis on the surrounding community.
3. Distribution of funds.
4. Ensuring ontime loan repayment and report.

General Function

Planning, controlling, fostering, analysing, as well as evaluating and reporting on household activities and preparing necessary needs as well as assisting the special investor relations function in the Representative Office.

Communication and Relationships Activities with Stakeholders

The communication and relationship activities with stakeholders carried out by the Corporate Secretary during 2020 are as follows:

**Aktivitas Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan****Stakeholder Communication Activities**

Aktivitas / Activities	Frekuensi Pelaksanaan / Implementation Frequency	
Press Conference	13 kali mengadakan press conference	
Media Gathering	Mengadakan Pertemuan dan Site Visit dengan Media Elektronik dan Cetak di Lingkungan Pelabuhan Regional Jawa Timur.	
Media Visit	<ul style="list-style-type: none"> • Media Visit Kunjungan Ulang Tahun Berita Jatim • Kegiatan media visit dilakukan secara virtual karena pandemi 	<ul style="list-style-type: none"> • East Java News Media Visit on the Anniversary of the Company • The activity was held virtually due to the pandemic
RUPS	<ul style="list-style-type: none"> • Satu kali RUPS RKAP • Satu kali RUPS Tahunan 	<ul style="list-style-type: none"> • One RKAP GMS • One Annual GMS
Pertemuan Serikat Pekerja	<ul style="list-style-type: none"> • Tiga bulan sekali audiensi dengan manajemen • Satu kali pembahasan tentang PKB 	<ul style="list-style-type: none"> • Audience with the management every three months. • One discussion on PKB

Akses Informasi Data Perusahaan

Fungsi komunikasi dan hubungan masyarakat, investor, dan seluruh pemangku kepentingan yang dijalankan Sekretaris Perusahaan diwujudkan penyediaan berbagai sarana informasi yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan. Hal ini sekaligus menjadi pemenuhan prinsip transparansi dalam GCG Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha yang dilakukan.

Akses informasi yang disediakan oleh Perseroan adalah melalui situs web resmi Pelindo III, yaitu www.pelindo.co.id yang memuat informasi profil Perusahaan, produk dan jasa, tata kelola perusahaan yang baik, dan informasi lainnya. Selain itu, akses informasi Perseroan juga dapat dilakukan dengan menghubungi kantor pusat Perseroan dengan alamat sebagai berikut:

Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

Jl. Perak Timur No. 610, Surabaya 60165
Indonesia

Telp : +62 31 329 8631-37

Faks : +62 31 329 5207

Situs Web : www.pelindo.co.id

Surel : humas@pelindo.co.id; info@pelindo.co.id

Access to Company Information and Data

The function of communication and public relations, investors, and all stakeholders carried out by the Corporate Secretary is realized by providing various information facilities that can be accessed by stakeholders. This is also a fulfillment of the principle of transparency in the Company's GCG in carrying out its business activities.

Access to information provided by the Company is through the official website of Pelindo III, namely www.pelindo.co.id which contains information on the Company's profile, products and services, good corporate governance, and other information. In addition, access to Company information can also be done by contacting the Company's head office at the following address:

Head Office of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

Jl. Perak Timur No. 610, Surabaya 60165
Indonesia

Phone : +62 31 329 8631-37

Fax : +62 31 329 5207

Website : www.pelindo.co.id

Email : humas@pelindo.co.id; info@pelindo.co.id



Penilaian Kinerja Sekretaris Perusahaan

Sebagai bagian dari komitmen Perseroan dalam membentuk kualitas kinerja unggul, Sekretaris Perusahaan secara berkala memperoleh evaluasi dan penilaian kinerja dengan mengukur efektivitas dan ketercapaian target kinerja. Selain KPI, Sekretaris Perusahaan juga menjadi salah satu objek dalam asesmen GCG Perusahaan. Melalui media pengukuran tersebut, kinerja Sekretaris Perusahaan senantiasa memperoleh penyempurnaan sehingga dapat tercipta kinerja keberlanjutan di masa depan.

Hasil penilaian kinerja Sekretaris Perusahaan tahun 2020 menunjukkan bahwa Sekretaris Perusahaan telah menjalankan tugas dan fungsi dengan baik.

SATUAN PENGAWASAN INTERN

Sejalan dengan perkembangan bisnis yang kian dinamis, Perseroan dibekali dengan penguatan fungsi audit internal guna memastikan bahwa seluruh proses bisnis, sistem, dan kinerja yang dijalankan Perseroan, baik organ, unit kerja, atau fungsi yang berada di dalamnya, berjalan sesuai kaidah yang berlaku dan mampu berlangsung secara berkelanjutan. Selain itu, keberadaan SPI juga berperan untuk mendukung peningkatan efektivitas Manajemen Risiko, pengendalian, dan proses tata kelola melalui evaluasi dengan mengacu pada prinsip-prinsip GCG.

SPI memiliki komitmen yang tinggi terhadap profesi, setia kepada Perusahaan, dan tidak terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum, jujur, objektif, dipercaya, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, bersikap independen, serta terus melakukan aktivitas pengawasan melalui kegiatan audit operasional yang dilakukan terhadap unit kerja di lingkungan Perusahaan. Aktivitas pengawasan meliputi proyek yang sedang dilaksanakan dengan memberikan rekomendasi perbaikan untuk tercapainya tujuan Perusahaan.

Corporate Secretary Performance Assessment

As part of the Company's commitment in establishing excellent performance quality, the Corporate Secretary periodically obtains performance evaluations and assessments by measuring the effectiveness and achievement of performance targets. In addition to KPI, the Corporate Secretary is also one of the objects in the Company's GCG assessment. Through these measurement media, the performance of the Corporate Secretary continues to obtain improvements so that sustainability performance can be created in the future.

The results of the 2020 Corporate Secretary performance assessment show that the Corporate Secretary has carried out his duties and functions well.

INTERNAL AUDIT UNIT

In line with a dynamic business development, the Company must be complemented with an Internal Audit Unit organ. The Internal Audit has the role in ensuring that all of the business process, system, and performance carried out by the Company including the organs, work units, or functions in the Company are carried out following the prevailing regulation which implies the support of business continuity of the Company. Moreover, the Internal Audit also has the role to support the increase in risk management effectiveness, internal control, and governance process through evaluations by referring to GCG principles.

The Internal Audit has a strong commitment to the profession, loyal to the Company, and does not get involved in any activities violating the law. The Internal Audit is also honest, objective, trusted, and responsible in carrying out its duties and acting independent as well as conducting supervisory activities through operational audit activities performed to the work units in the environment of the Company including projects currently implemented by providing improvement recommendation to achieve the objectives of the Company.



Fungsi, tugas, dan tanggung jawab SPI mengacu pada beberapa aturan yang berlaku, antara lain:

- Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. PER.01.01/PW.01/P.III-2011 tentang Pelaksanaan Pengawasan Intern di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);
- Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. PER.0033/HK.01/HOFC-2019 tentang *Internal Audit Charter*;
- Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. PER.0034/HK.01.13/HOFC-2019 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Kertas Kerja Audit;
- Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. PER.0035/HK.01.13/HOFC-2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Assurance dan Advisory;
- Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. PER.78/HK.03/P.III-2017 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*);
- Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. PER.76/PW.08/P.III-2014 tentang Pedoman Berbasis Risiko;
- Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. PER.30/HK.03/P.III-2015 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern.

The functions, duties, and responsibilities of SPI refer to several applicable rules, including:

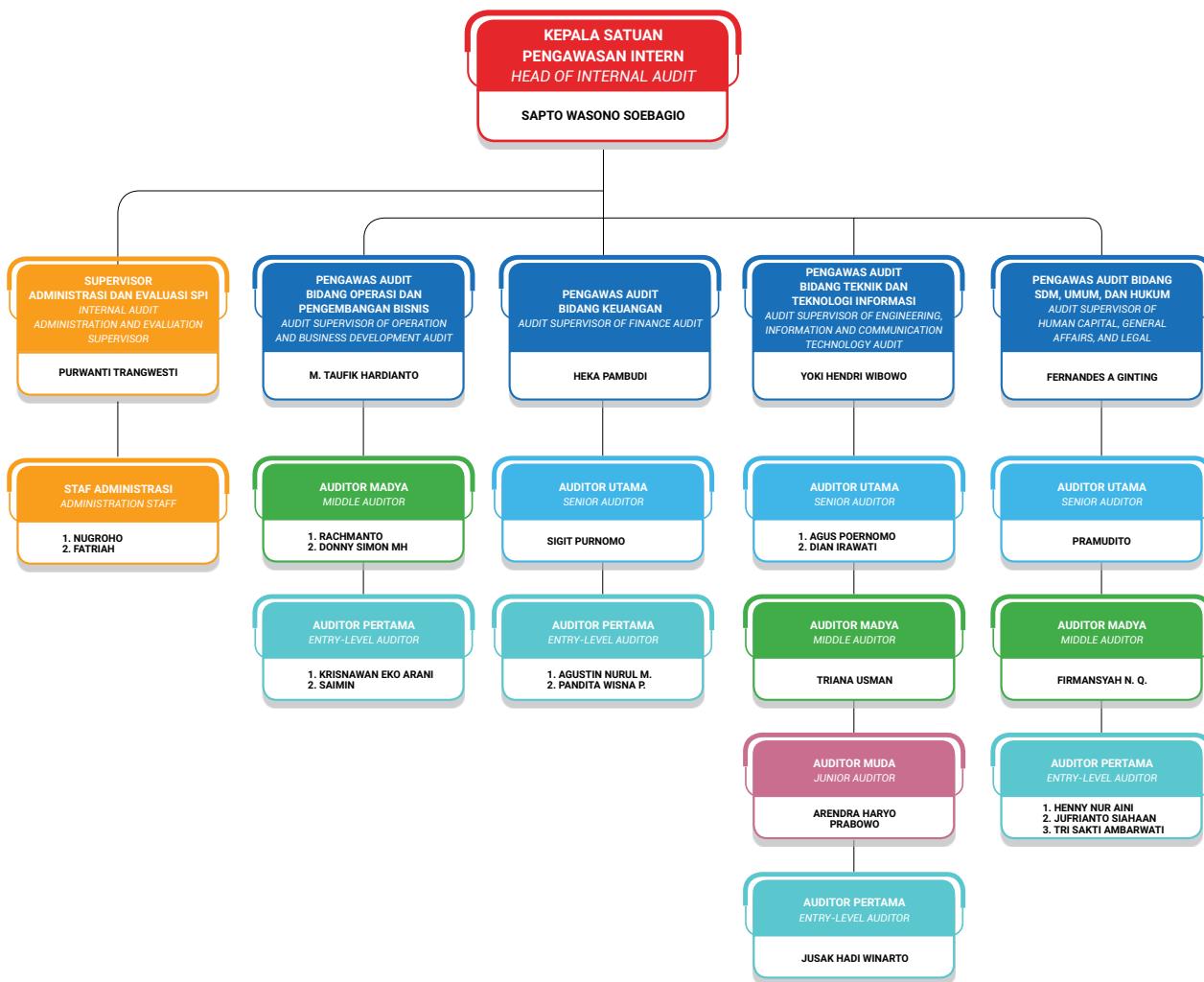
- PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Board of Directors Regulation No. PER.01.01/PW.01/P.III-2011 concerning Implementation of Internal Audit in PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);
- PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Board of Directors Regulation No. PER.0033/HK.01/HOFC-2019 concerning Internal Audit Charter;
- PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Board of Directors Regulation No. PER.0034/HK.01.13/HOFC-2019 concerning Implementation of Management of Audit Working Papers;
- PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Board of Directors Regulation No. PER.0035/HK.01.13/HOFC-2019 concerning Assurance and Advisory Implementation Guidelines;
- PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Board of Directors Regulation No. PER.78/HK.03/P.III-2017 concerning Whistleblowing System;
- PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Board of Directors Regulation No. PER.76/PW.08/P.III-2014 concerning Risk-Based Guidelines;
- PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Board of Directors Regulation No. PER.30/HK.03/P.III-2015 concerning General Guidelines for Internal Control Systems.

Struktur dan Kedudukan Satuan Pengawas Intern

Struktur SPI berada di bawah naungan Direktur Utama dan sejajar dengan Sekretaris Perusahaan. Direktur Utama memiliki kewenangan dalam mengangkat dan memberhentikan Kepala SPI. Satuan Pengawas Intern dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawas Intern yang membawahi 4 orang Pengawas Bidang Audit yang masing-masing membawahi bagian-bagian berbeda seperti Pengawas Audit Bidang SDM, Umum, dan Hukum; Pengawas Audit Bidang Teknik, Teknologi Informasi, dan Komunikasi; Pengawas Audit Bidang Operasi dan Pengembangan Bisnis; dan Pengawas Bidang Keuangan. Berikut adalah struktur organisasi dari SPI:

Structure and Position of the Internal Audit Unit

The IAU is under the President Director and is equal to the Corporate Secretary. The President Director has the authority to appoint and dismiss the Head of IAU. The Internal Audit Unit is led by a Head of Internal Audit who oversees four Field Supervisors, each oversees different parts such as Audit Supervisor of Human Capital, General Affairs, and Legal; Audit Supervisor of Engineering, Information, and Communication Technology; Audit Supervisor of Operations and Business Development; and Audit Supervisor of Finance. The following is the organizational structure of the Internal Audit:



Penunjukan dan Pemberhentian Kepala SPI

Sesuai dengan Piagam Internal Audit Perusahaan, kewenangan penunjukan Kepala Satuan Pengawas Intern dilakukan oleh Direksi Perseroan. Di tahun 2020, SPI dikepalai oleh Sapto Wasono Soebagio sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern setelah mendapatkan Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. KEP.481/KP.0604/P.III-2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

Appointment of the Head of IAU

In accordance with the Internal Audit Charter, the authority for the appointment of the Head of Internal Audit Unit is performed by the BOD. In 2020, the IAU was chaired by Sapto Wasono Soebagio as the Head of the Internal Audit Unit after obtaining the Decree of the BOD No. KEP.481/KP.0604/P.III-2019 dated December 16, 2019 on Appointment in Position in PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

**Profil Kepala Satuan Pengawas Intern****Profile of the Head of Internal Audit Unit****SAPTO WASONO SOEBAGIO**

Kepala Satuan Pengawas
Intern / Head of Internal Audit
Unit

Kewarganegaraan / Citizenship : Indonesia

Tempat Tanggal Lahir / Place and Date of Birth : Bojonegoro, 23 April 1971

Usia / Age : 49 tahun / years old

Domisili / Domicile : Surabaya

Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment

Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. KEP.481/KP.0604/P.III-2019
tanggal 16 Desember 2019.

Decree of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. KEP.481/
KP.0604/P.III-2019 dated December 16, 2019.

Latar Belakang Pendidikan / Educational Background

- Sarjana (S1) Akuntansi dari Universitas Brawijaya, Malang (1996) / Bachelor's Degree in Accounting from Brawijaya University, Malang (1996)
- Magister (S2) Manajemen dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2002) / Master (S2) in Management from Gadjah Mada University, Yogyakarta (2002)

Riwayat Jabatan

- Kepala SPI PT Pelindo III (2020-Sekarang)
- Direktur Keuangan, SDM, dan Umum PT PMS (2018-2019)
- Senior Manajer Manajemen Properti (2017)
- Direktur Utama PT Terminal Curah Semarang dan PT Terminal Nilam Utara (2015-2016)
- Senior Manager Pembinaan Anak Perusahaan (2014)
- Senior Manager Manajemen Keuangan (2014)
- Manajer Keuangan Cabang Tanjung Perak (2013)
- Pengawas Bidang II Keuangan, SDM, Sistem Informasi & Umum (2011)
- Manajer Keuangan Banjarmasin (2010)
- Manajer Keuangan Tanjung Emas (2009)
- Asisten Senior Manajer Analisa & Evaluasi (2006)
- Asisten Manajer Keuangan Lembar (2004)
- Head of Finance & Personnel Celukan Bawang (2002)
- Head of PT Pelindo III Internal Audit Unit (2020-Present)
- Director of Finance, HR, and General Affairs of PT PMS (2018-2019)
- Senior Property Management Manager (2017)
- President Director of PT Terminal Curah Semarang and PT Terminal Nilam Utara (2015-2016)
- Senior Manager of Subsidiary Development (2014)
- Senior Manager of Financial Management (2014)
- Tanjung Perak Branch Finance Manager (2013)
- Supervisor of Division II Finance, HR, Information System & General (2011)
- Banjarmasin Finance Manager (2010)
- Tanjung Emas Finance Manager (2009)
- Senior Assistant Manager Analysis & Evaluation (2006)
- Assistant Finance Manager Sheet (2004)
- Head of Finance & Personnel Celukan Bawang (2002)



Komposisi dan Sertifikasi SPI

Sampai dengan 31 Desember 2020, SPI Perseroan berjumlah 24 orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala SPI, 1 (satu) orang Pengawas Audit Bidang Operasi dan Pengembangan Bisnis, 1 (satu) orang Pengawas Audit Bidang Keuangan, 1 (satu) Pengawas Audit Bidang Teknik dan Teknologi Informasi, 1 (satu) Pengawas Audit Bidang SDM, Umum, dan Hukum, 1 (satu) Supervisor Administrasi dan Evaluasi SPI beserta staf dan auditor di bawahnya.

Informasi mengenai sertifikasi SPI diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Composition and Certification of IAU

As of December 31, 2020, the Company's IAU members are 24 people, consisting of 1 (one) Head of IAU, 1 (one) Audit Supervisor for Operations and Business Development, 1 (one) Audit Supervisor for Finance, 1 (one) Audit Supervisor for Engineering and Information Technology, 1 (one) Audit Supervisor for Human Resources, General Affairs, and Law, 1 (one) IAU Administration and Evaluation Supervisor along with staff and auditors under them.

Information regarding IAU certification is described in the following table:

Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Sertifikasi / Certification	Institusi Pemberi Sertifikasi / Issuer
Agus Poernomo	Auditor Utama Bidang Teknik / Chief Auditor for Engineering	PIA (Auditor Utama / Chief Auditor)	LSPAI
Agustin Nurul Mahmudah	Auditor Pertama Bidang Keuangan / Assistant Auditor for Finance	PIA (Auditor Madya / Associate Auditor)	LSPAI
Arendra Haryo Prabowo	Auditor Utama Bidang Teknik / Chief Auditor for Engineering	PIA (Auditor Utama / Chief Auditor)	LSPAI
Dian Irawati	Auditor Utama Bidang Teknik / Chief Auditor for Engineering	PIA (Auditor Utama / Chief Auditor)	LSPAI
Doddy Irawan	Auditor Pertama Bidang Keuangan / Assistant Auditor for Finance	PIA (Auditor Madya / Associate Auditor)	LSPAI
Donny Simon H	Auditor Madya Bidang Operasi & Pengem. Bisnis / Associate Auditor for Operations & Business Development	PIA (Auditor Utama / Chief Auditor)	LSPAI
Fernandes Anthony Ginting	Pengawas Bidang SDM / HR Supervisor	PIA (Auditor Utama / Chief Auditor)	LSPAI
Firmansyah Novie Qurniawan	Auditor Madya Bidang SDM / Associate Auditor for HR	PIA (Auditor Utama / Chief Auditor)	LSPAI
Heka Pambudi	Pengawas Bidang Keuangan / Financial Supervisor	PIA (Auditor Utama / Chief Auditor)	LSPAI
Henny Nur Aini	Auditor Madya Bidang SDM / Associate Auditor for HR	PIA (Auditor Madya / Associate Auditor)	LSPAI
Jufrianto Siahaan	Auditor Madya Bidang SDM / Associate Auditor for HR	PIA (Auditor Utama / Chief Auditor)	LSPAI
Krisnawan Eko Arani	Auditor Pertama Bid Opr & P.Bisnis / Associate Auditor for Operations & Business Development	PIA (Auditor Madya / Associate Auditor)	LSPAI
Mohammad Taufik Hardjanto	Pengawas Bidang Operasi / Operations Supervisor	PIA (Auditor Utama / Chief Auditor)	LSPAI



Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment	Sertifikasi / Certification	Institusi Pemberi Sertifikasi / Issuer
Nugroho	Staf Muda III Adm. & Evaluasi SPI / Junior Staff III for IAU Administrative & Evaluation	PIA (Auditor Muda / Junior Auditor)	LSPAI
Pandita Wisna Patria	Auditor Pertama Bidang Keuangan / Assistant Auditor for Finance	PIA (Auditor Muda / Junior Auditor)	LSPAI
Saimin	Auditor Pertama Bid Opr & P.Bisnis / Associate Auditor for Operations & Business Development	PIA (Auditor Madya / Associate Auditor)	LSPAI
Sapto Wasono Soebagio	Kepala Satuan Pengawasan Intern / Head of Internal Audit Unit	Pengelolaan Satuan Pengawas Internal / Internal Audit Unit Management	LSPAI
Tri Sakti Ambarwati	Auditor Madya Bidang SDM / Associate Auditor for HR	PIA (Auditor Muda / Junior Auditor)	LSPAI
Triana Usman	Auditor Utama Bidang TI / Chief Auditor for IT	PIA (Auditor Utama / Chief Auditor)	LSPAI
Sigit Poernomo	Auditor Utama Bidang Keuangan / Chief Auditor for Finance	Dasar-dasar Audit / Auditing Fundamentals	PPAK Malang
Yoki Hendri Wibowo	Pengawas Bidang Teknik / Engineering Supervisor	Dasar-dasar Audit / Auditing Fundamentals	PPAK Malang
Jusak Hadi Winarto	Auditor Pertama Bidang Teknik / Associate Auditor for Engineering	Dasar-dasar Audit / Auditing Fundamentals	PPAK Malang
Fatriah	Pelaksana Junior Madya II Adm. SPI / Associate Junior Executive II for IAU Administrative	Dasar-dasar Audit / Auditing Fundamentals	PPAK Malang

Pedoman Kerja Satuan Pengawas Intern

Pedoman Kerja bagi Internal Audit telah diatur dalam *Internal Audit Charter* yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Pelindo III No. PER.0033/HK.01/HOFC-2019/HK.136/07/SKB/DK.P.III/2019 tanggal 26 Juli 2019 sebagai pembaruan dari No. HK.04/18.1/P.III-2014 tanggal 8 Oktober 2014. Piagam Internal Audit berisi ketentuan-ketentuan yang dapat menjamin hasil pemeriksaan yang bermutu agar Internal Audit dapat menyelenggarakan fungsinya dengan baik. *Audit Charter* dipublikasikan ke seluruh Unit Kerja guna menjalin kerja sama yang baik dalam mewujudkan tujuan Perseroan.

Internal Audit Manual

The Work Guideline for the Internal Audit has been regulated in the Internal Audit Charter stipulated through the Joint Decision of the BOC and BOD of Pelindo III No. PER.0033/HK.01/HOFC-2019/HK.136/07/SKB/DK.P.III/2019 dated July 26, 2019 as an improvement from No. HK.04/18.1/P.III-2014 dated October 8, 2014. The Internal Audit Charter contains provisions that guarantee the quality of the audit result so that the Internal Audit can perform its functions properly. The Audit Charter is publicized to all Work Units to foster good cooperation in realizing the Company objectives.



Adapun pokok-pokok yang dimuat dalam Pedoman Kerja SPI meliputi:

1. Struktur dan kedudukan Audit Internal di PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);
2. Tujuan dan ruang lingkup Unit Audit Internal di PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);
3. Wewenang, Tanggung Jawab, dan Kode Etik bagi Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);
4. Pertanggungjawaban Unit Audit Internal; dan
5. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor dan Pelaksana yang Duduk dalam Unit Audit Internal dari Pelaksanaan Kegiatan Operasional Perusahaan baik Emiten atau Perusahaan Publik maupun Anak Perusahaannya.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pengawas Intern

Tugas dan tanggung jawab Satuan Pengawas Intern secara umum yaitu memberikan layanan jasa *Assurance* dan *Advisory*, yang meliputi:

1. *Compliance Audit*

Kegiatan *assurance* untuk menjamin setiap bagian pada Perseroan melakukan proses kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar, dan SOP yang berlaku.

2. *Performance Audit*

Audit yang berfokus pada audit atas pengelolaan operasional perusahaan yang terdiri atas audit aspek ekonomi dan efisiensi serta audit atas aspek efektivitas dengan tujuan untuk mendorong ke arah perbaikan.

Kode Etik SPI

Pelaksanaan tugas SPI menjunjung ketentuan etika dan perilaku pelaksanaan pemeriksaan yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip-prinsip kode etik SPI meliputi:

1. Memiliki integritas dan loyalitas yang tinggi dalam segala hal berkaitan fungsi dan tanggung jawab internal audit;
2. Bertindak secara obyektif dan tidak memihak untuk menghindari adanya pertentangan kepentingan;
3. Berperilaku profesional, dengan senantiasa menjaga performansi yang baik dan benar dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab internal audit;

The main points contained in the IAU Work Guidelines include:

1. Internal Audit structure and position at PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);
2. The objectives and scope of the Internal Audit Unit at PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);
3. Authorities, Responsibilities, and Code of Conduct for the Internal Audit Unit (SPI) of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero);
4. Internal Audit Unit Responsibilities; and
5. Prohibition of Concurrent Duties and Positions of Auditors and Executives in Office in the Internal Audit Unit from the Implementation of Company Operations, whether Issuers or Public Companies or Subsidiaries.

Duties and Responsibilities of the Internal Audit Unit

The duties and responsibilities of the Internal Audit Unit in general are to provide Assurance and Advisory services, including:

1. *Compliance Audit*

Assurance activity to ensure that all parts of the Company have conducted their work process under the prevailing laws, regulation, standards, and SOP.

2. *Performance Audit*

Audit which is focusing on company operational management audit consisting of economic and efficiency audit as well as effectiveness audit to encourage improvements.

IAU Code of Conduct

The implementation of IAU's duties upholds the provisions of ethics and conduct of audits that are in line with the applicable laws and regulations. The principles of the IAU code of conduct include:

1. Have high integrity and loyalty in all matters relating to internal audit functions and responsibilities;
2. Act objectively and impartially to avoid any conflict of interest;
3. Act professionally, by always maintaining good and correct performance in carrying out and completing the duties and responsibilities of internal audit;



4. Dilarang mengungkapkan tentang temuan-temuan dan metodologi kerja yang berkaitan dengan tugasnya kepada pihak lain selain pihak yang berwenang kecuali dengan persetujuan dari Direktur Utama dan Komisaris Utama;
 5. Dilarang memanfaatkan informasi yang diperoleh dari tugasnya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang tidak berhak untuk tujuan apapun;
 6. Dalam mengungkapkan suatu pendapat harus mengerahkan segenap ketelitian dan perhatian yang sepantasnya dilakukan untuk memperoleh bukti faktual yang memadai guna mendukung pendapatnya tersebut;
 7. Berusaha untuk meningkatkan kecakapan dan keefektifan dalam menjalankan pekerjaannya;
 8. Dilarang menerima setiap pemberian dalam bentuk apapun dari pihak lain yang terkait dengan pekerjaannya baik dari dalam maupun luar perusahaan;
 9. Harus mematuhi hukum dan menjunjung tinggi norma profesional Internal Auditor; dan
 10. Dilarang merangkap tugas dan jabatan dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan, anak perusahaan maupun perusahaan terafiliasi bagi auditor dan pelaksana yang duduk dalam unit internal audit.
4. Prohibited from disclosing findings and work methodologies related to their duties to parties other than the authorised party except with the approval of the President Director and President Commissioner;
 5. Prohibited to use the information obtained from their duties for personal or other parties' interests that are not entitled for any purpose;
 6. In expressing an opinion, he/she must exert all due care and attention to obtain sufficient factual evidence to support his opinion;
 7. Strive to improve skills and effectiveness in carrying out their work;
 8. Prohibited to accept any gifts in any form from other parties related to their work, both from inside and outside the company;
 9. Must comply with the law and uphold the professional norms of the Internal Auditor; and
 10. Prohibited to hold concurrent duties and positions in the implementation of the operational activities of the company, subsidiaries or affiliated companies for auditors and implementers who sit in the internal audit unit.

Pengembangan Kompetensi SPI

Perseroan memfasilitasi dan membekali Satuan Pengawas Intern dengan program pengembangan kompetensi melalui pengikutsertaan dalam pelatihan dan pendidikan, baik yang diselenggarakan secara formal maupun informal. Informasi mengenai pengembangan kompetensi yang diikuti Satuan Pengawas Intern telah tercantum dalam Laporan Tahunan ini, bagian Profil Perusahaan, sub bagian Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Intern.

IAU Competency Development

The Company facilitates and equips the Internal Supervisory Unit with competency development programs through participation in training and education, both formally and informally. Information regarding competency development that the Internal Audit Unit participates in has been included in this Annual Report, the Company Profile section, the Competency Development sub-section of the Board of Commissioners, Directors, Committees, Corporate Secretary, and the Internal Audit Unit.

Realisasi Pelaksanaan Audit Tahun 2020

Program kerja Audit Tahunan SPI Tahun 2020 meliputi:

- Audit Terpadu
- Audit Tematik
- Review
- Audit Khusus

Realization of Audit in 2020

The Annual Audit work programs of the Internal Audit in 2020 includes:

- Integrated Audit
- Thematic Audit
- Review
- Special Audit



Pada tahun 2020, SPI telah melaksanakan program Audit yang terdiri dari 5 Audit Terpadu, 2 Audit Tematik, 1 Review, dan 8 Audit Khusus, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian / Description	Rencana / Plan	Realisasi / Realization	Pencapaian / Achievement
Audit Terpadu / Integrated Audit	5	5	5
Audit Tematik / Thematic Audit	2	2	2
Review	-	1	1
Audit Khusus / Special Audit	-	8	8
Jumlah / Total	7	16	16

Laporan Temuan dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil kegiatan audit yang dilaksanakan selama tahun 2020, terdapat 122 temuan dengan 183 rekomendasi dengan rincian sebagai berikut:

Bidang Audit / Audit Field	Jumlah Rekomendasi / Total Recommendations	Tindak Lanjut / Follow-Up		
		Sudah Ditindaklanjuti / Has Been Followed-Up	Belum Ditindaklanjuti / Not Yet Followed Up	Dalam Progres / In Progress
Audit Terpadu / Integrated Audit	159	146	13	13
Audit Tematik / Thematic Audit	24	-	24	24
Review	-	-	-	-
Audit Khusus / Special Audit	-	-	-	-
Jumlah / Total	183	146	37	37

Evaluasi Mutu Audit

Mutu audit SPI secara berkala dievaluasi dengan menunjuk konsultan yang ditunjuk oleh Manajemen. Pada tahun 2020, Pelindo III telah melakukan persiapan dan pengembangan dalam rangka transformasi menuju *Integrated Governance, Risk & Compliance*.

Berdasarkan penilaian tingkat maturitas Internal Audit, Pelindo III berada di nilai 3,8 (*Defined*) dengan target peningkatan tingkat maturitas menjadi 4,6 (*Managed*). Sedangkan untuk tingkat maturitas Manajemen Risiko, Pelindo III berada di nilai 3,5 (*Defined*) dengan target peningkatan tingkat maturitas menjadi 4,6 (*Managed*).

Rencana Kerja Audit Tahun 2021

Persiapan dan penyusunan kegiatan audit yang berkelanjutan diwujudkan melalui penetapan program rencana kerja audit di tahun mendatang pada bidang keuangan, operasional, maupun sistem dengan mempertimbangkan ruang lingkup, metode audit, skala

In 2020, IAU has implemented an Audit program consisting of 5 Integrated Audit, 2 Thematic Audit, 1 Review, and 8 Special Audit, with details as follows:

Finding Reports and Follow-Up

Based on the results of audit activities carried out during 2020, there were 122 findings with 183 recommendations with the following details:

Evaluation on Audit Quality

The quality of the IAU audit is periodically evaluated by appointing a consultant appointed by the Management. In 2020, Pelindo III has made preparations and developments in the context of transformation towards *Integrated Governance, Risk & Compliance*.

Based on the assessment of the maturity level of Internal Audit, Pelindo III is rated at 3.8 (*Defined*) with a target of increasing the maturity level to 4.6 (*Managed*). As for the Risk Management maturity level, Pelindo III is rated at 3.5 (*Defined*) with a target of increasing the maturity level to 4.6 (*Managed*).

2021 Audit Work Plan

The preparation and arrangement of sustainable audit activities is realized through the establishment of an audit work plan program in the coming year in the financial, operational, and system fields by taking into account the scope, audit method, priority scale, and audit objects that



prioritas, serta objek audit yang telah ditetapkan. Adapun rencana program kerja SPI tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut:

Uraian / Description	Rencana / Plan
Audit Terpadu / Integrated Audit	5
Audit Tematik / Thematic Audit	2
Review	-
Audit Khusus / Special Audit	1
Jumlah / Total	8

AUDITOR EKSTERNAL

Dalam mendukung penerapan asas independensi dan akuntabilitas pelaksanaan audit yang sesuai dengan prinsip GCG serta peraturan perundungan yang berlaku, Perseroan melibatkan Auditor Eksternal. Auditor Eksternal merupakan pihak independen dan profesional yang melakukan audit keuangan dan audit lainnya seperti audit operasional, audit khusus, audit mutu, audit investigasi, dan audit teknologi informasi. Independensi dan akuntabilitas auditor eksternal diwujudkan melalui kriteria independensi yang meliputi:

- Bebas dari pengaruh dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan pihak yang berkepentingan di Perseroan (Pemangku Kepentingan);
- Tidak diperkenankan memberikan jasa lain di luar audit selama periode audit;
- Tidak boleh memiliki kepentingan keuangan yang material, baik langsung maupun tidak langsung, dan hubungan bisnis dengan Perseroan;
- Wajib melaporkan hasil auditnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Adapun dalam mendukung independensi dan akuntabilitas laporan keuangan, Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai pihak independen yang bertugas mengaudit laporan keuangan sesuai dengan PSAK yang berlaku. Mekanisme penentuan KAP mempertimbangkan rekomendasi Dewan Komisaris dan Komite Audit dengan mengikuti prosedur pengadaan barang dan jasa, dan kemudian ditetapkan melalui RUPS.

have been determined. The IAU work program plan for 2021 is described in the following table

EXTERNAL AUDITOR

In supporting the implementation of the principles of independence and accountability of audit implementation in accordance with GCG principles and applicable laws and regulations, the Company involves an External Auditor. External Auditors are independent and professional parties who carry out financial audits and other audits such as operational audits, special audits, quality audits, investigative audits, and information technology audits. The independence and accountability of external auditors is realized through independence criteria which include:

- Free from influence and has no conflict of interest with the Board of Commissioners, Board of Directors, and other interested parties in the Company (Stakeholders);
- Not allowed to provide other services outside the audit during the audit period;
- Must not have a material financial interest, either directly or indirectly, and a business relationship with the Company;
- Required to report the audit results to the Board of Directors and the Board of Commissioners.

As for supporting the independence and accountability of financial statements, the Company appointed a Public Accounting Firm (KAP) as an independent party in charge of auditing financial statements in accordance with the applicable PSAK. The mechanism for determining KAP takes into account the recommendations of the Board of Commissioners and the Audit Committee by following the procedures for the procurement of goods and services, and then determined through the GMS.



Mekanisme Penunjukan Kantor Akuntan Publik

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan diputuskan dalam RUPS berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris dan Komite Audit yang bertugas melaksanakan proses penunjukan KAP sesuai dengan Piagam Komite Audit dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pada tahun 2020, Ernst & Young (KAP Purwantono, Sungkoro & Surja) ditunjuk untuk melakukan audit untuk Laporan Keuangan Konsolidasian dan Audit Laporan PKBL periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Tugas yang diberikan mencakup ruang lingkup audit laporan keuangan, kepatuhan, penilaian kinerja usaha, dan PKBL, serta evaluasi status tindak lanjut atas keputusan dan arahan RUPS.

Nama Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, dan Fee dalam 5 Tahun Terakhir

Berikut adalah Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, nilai jasa (fee), dan ruang lingkup pekerjaan audit dalam 5 tahun terakhir:

Tahun / Year	2020
Kantor Akuntan Publik / Public Accounting Firm	Ernst & Young (KAP Purwantono, Sungkoro & Surja)
Akuntan Publik / Public Accountant	Muhammad Kurniawan
Nilai Jasa / Service Fee	Rp3.498.000.000
Ruang Lingkup Jasa / Scope of Service	<p>a. Melaksanakan Pemeriksaan Umum/General Audit (dengan pelaksanaan interim dan akhir tahun) atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) per 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, termasuk dan tidak terbatas pada pengujian efektivitas atas sistem pengendalian internal dan sistem teknologi informasi yang berdampak terhadap laporan keuangan</p> <p>b. Melaksanakan audit atas Laporan PKBL.</p> <p>c. Melaksanakan prosedur yang disepakati atas Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan dan Laporan Pelaksanaan KPI.</p> <p>a. Carry out general checks/General Audit (with interim and end of the year) on the Consolidated Financial Statements of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) as per December 31, 2020 and for the year ended on December 31, 2020 in accordance with the applicable Financial Accounting Standards, including and not limited to testing the effectiveness of internal control systems and information technology systems that affect financial statements.</p> <p>b. Carry out an audit on the PKBL Report.</p> <p>c. Carry out the agreed procedures of the Company's Performance Evaluation Report and KPI Assessment Report.</p>

Mechanism of Appointment of Public Accountant Firm

The appointment of a Public Accounting Firm (KAP) for the Audit of Financial Statements and Annual Reports on the Implementation of the Partnership and Community Development Program is decided at the GMS based on the recommendations of the Board of Commissioners and the Audit Committee in charge of carrying out the process of appointing KAP in accordance with the Audit Committee Charter and applicable laws and regulations.

In 2020, Ernst & Young (KAP Purwantono, Sungkoro & Surja) was appointed to conduct audits for the Consolidated Financial Statements and PKBL Report Audits for the period January 1 to December 31, 2020. The tasks assigned include the scope of auditing financial statements, compliance, business performance assessment, and PKBL, as well as evaluating the status of actions taken. further on the decisions and directions of the GMS.

Name of Public Accounting Firm, Public Accountant, and Fees in the Last 5 Years

The following are Public Accounting Firms, Public Accountants, service value (fees), and scope of audit work in the last 5 years:



	<p>d. Melaksanakan audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern.</p> <p>e. Melaksanakan penugasan prosedur yang disepakati atas pelaporan kegiatan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri sebagaimana diatur dalam PBI No. 16/22/PBI/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 18/4/PBI/2016.</p>	<p>d. Carry out an audit of compliance with laws and regulations and internal control.</p> <p>e. Carry out agreed-upon procedure assignments for reporting activities for applying the precautionary principle in managing foreign debt as stipulated in PBI No. 16/22/PBI/2014 as amended by the Regulation of Bank Indonesia No. 18/4/PBI/2016.</p>
Opini Auditor / Auditor Opinion	Wajar dalam semua hal yang material	Unqualified
Tahun / Year	2019	
Kantor Akuntan Publik / Public Accounting Firm	Ernst & Young (KAP Purwantono, Sungoro & Surja)	
Akuntan Publik / Public Accountant	Muhammad Kurniawan	
Nilai Jasa / Service Fee	Rp3.366.000.000	
Ruang Lingkup Jasa / Scope of Service	<p>a. Melaksanakan Pemeriksaan Umum/General Audit (dengan pelaksanaan interim dan akhir tahun) atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) per 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, termasuk dan tidak terbatas pada pengujian efektivitas atas sistem pengendalian internal dan sistem teknologi informasi yang berdampak terhadap laporan keuangan</p> <p>b. Melaksanakan audit atas Laporan PKBL.</p> <p>c. Melaksanakan prosedur yang disepakati atas Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan dan Laporan Pelaksanaan KPI.</p> <p>d. Melaksanakan audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern.</p> <p>e. Melaksanakan penugasan prosedur yang disepakati atas pelaporan kegiatan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri sebagaimana diatur dalam PBI No. 16/22/PBI/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 18/4/PBI/2016.</p>	
Opini Auditor / Auditor Opinion	Wajar dalam semua hal yang material	Unqualified



Tahun / Year	2018	
Kantor Akuntan Publik / Public Accounting Firm	Ernst & Young (KAP Purwantono, Sungkoro & Surja)	
Akuntan Publik / Public Accountant	Muhammad Kurniawan	
Nilai Jasa / Service Fee	Rp3.060.000.000	
Ruang Lingkup Jasa / Scope of Service	a. Melaksanakan Pemeriksaan Umum/General Audit (dengan pelaksanaan interim dan akhir tahun) atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) per 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, termasuk dan tidak terbatas pada pengujian efektivitas atas sistem pengendalian internal dan sistem teknologi informasi yang berdampak terhadap laporan keuangan b. Melaksanakan audit atas Laporan PKBL. c. Melaksanakan prosedur yang disepakati atas Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan dan Laporan Pelaksanaan KPI. d. Melaksanakan audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern. e. Melaksanakan penugasan prosedur yang disepakati atas pelaporan kegiatan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri sebagaimana diatur dalam PBI No. 16/22/PBI/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 18/4/PBI/2016.	<p>a. Carry out general checks/General Audit (with interim and end of the year) on the Consolidated Financial Statements of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) as per December 31, 2018 and for the year ended on December 31, 2018 in accordance with the applicable Financial Accounting Standards, including and not limited to testing the effectiveness of internal control systems and information technology systems that affect financial statements.</p> <p>b. Carry out an audit on the PKBL Report.</p> <p>c. Carry out the agreed procedures of the Company's Performance Evaluation Report and KPI Assessment Report.</p> <p>d. Carry out an audit of compliance with laws and regulations and internal control.</p> <p>e. Carry out agreed-upon procedure assignments for reporting activities for applying the precautionary principle in managing foreign debt as stipulated in PBI No. 16/22/PBI/2014 as amended by the Regulation of Bank Indonesia No. 18/4/PBI/2016.</p>
Opini Auditor / Auditor Opinion	Wajar dalam semua hal yang material	Unqualified
Tahun / Year	2017	
Kantor Akuntan Publik / Public Accounting Firm	RSM AAJ (Amir Abadi Jusuf)	
Akuntan Publik / Public Accountant	Benny Andria	
Nilai Jasa / Service Fee	Rp1.248.500.000	
Ruang Lingkup Jasa / Scope of Service	Audit Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan dan PKBL, serta peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Pernyataan Standar Auditing No. 62 (Seksi 801) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.	Audit of the Company's Annual Financial Statements and PKBL, as well as certain statutory regulations and internal controls based on the State Financial Inspection Standards issued by the Republic of Indonesia Supreme Audit Agency and Statement of Auditing No. No. 62 (Section 801) stipulated by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.
Opini Auditor / Auditor Opinion	Wajar dalam semua hal yang material	Unqualified



Tahun / Year	2016	
Kantor Akuntan Publik / Public Accounting Firm	RSM AAJ (Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan)	
Akuntan Publik / Public Accountant	Endang Pramuwati	
Nilai Jasa / Service Fee	Rp1.349.975.000	
Ruang Lingkup Jasa / Scope of Service	Audit Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan dan PKBL.	Audit of Annual Financial Statements and PKBL Report of the Company.
Opini Auditor / Auditor Opinion	Wajar dalam semua hal yang material	Unqualified

Jasa Lain yang Diberikan Auditor Eksternal

Selain Kantor Akuntan Publik, terdapat juga Auditor Eksternal lain yang melakukan audit sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, antara lain:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur
2. PT TUV Rheinland Indonesia
3. PT BSI Group Indonesia

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Komitmen Perseroan dalam mewujudkan proses dan kegiatan bisnis yang didukung dengan infrastruktur pengawasan dan pengendalian internal yang memadai direalisasikan melalui penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI). SPI merupakan proses yang terintegrasi dan melekat pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan Perseroan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, menjamin adanya keamanan atas pengelolaan harta Perseroan, keandalan laporan keuangan, keamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Pelindo III mengacu pada Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. PER.30/HK.03/P.III-2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pelindo III.

Other Services Provided by External Auditor

In addition to the Public Accounting Firm, there are also other External Auditors who conduct audits in connection with the Company's business activities, including:

1. The Financial and Development Supervisory Agency of East Java Province
2. PT TUV Rheinland Indonesia
3. PT BSI Group Indonesia

INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Company's commitment to realizing business processes and activities supported by adequate infrastructure for supervision and internal control is realized through the implementation of the Internal Control System (SPI). SPI is an integrated process and is attached to the actions and activities carried out continuously by the leadership and all employees to provide confidence in the achievement of the Company's goals through effective and efficient activities, ensuring the security of the management of the Company's assets, reliability of financial statements, asset security, and compliance with applicable laws and regulations.

Implementation of the Internal Control System within Pelindo III refers to Law no. 19 of 2003 concerning BUMN, Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, and Regulation of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. PER.30/HK.03/P.III-2015 dated May 26, 2015 concerning General Guidelines for Internal Control System in Pelindo III Environment.



Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Tujuan Sistem Pengendalian Intern adalah sebagai kerangka organisasi dan prosedur kerja operasi keuangan dan non keuangan yang dapat memberi jaminan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan di lingkungan perusahaan dapat:

- Menjaga dan mengamankan aset Perseroan;
- Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud;
- Menjamin pelaksanaan semua kegiatan bisnis Perseroan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyediakan informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap, dan tepat waktu;
- Meningkatkan efisiensi, efektivitas, keekonomisan dalam kegiatan operasional Perseroan; dan
- Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada Organisasi secara menyeluruh.

Kesesuaian Sistem Pengendalian Intern dengan COSO Internal Control Framework

Infrastruktur dan *soft structure* Sistem Pengendalian Intern di Perseroan telah disesuaikan pada kerangka pengendalian yang berlaku secara internasional atau mengikuti kerangka yang dipublikasikan oleh COSO (*Committee of Sponsoring Organization the Treadway Commission*). Penyesuaian ini ditujukan untuk memberikan peningkatan kualitas pengendalian di internal Perseroan serta terbentuknya pengakuan secara luas terhadap sistem pengendalian yang diterapkan Perseroan.

Sistem Pengendalian Intern yang dirancang, ditetapkan dan diterapkan pada Perseroan terdiri dari 5 unsur pengendalian yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Pembentukan lingkungan organisasi serta memberikan kesadaran tentang perlunya pengendalian intern bagi Perseroan. Pembentukan dan pengujian lingkungan pengendalian internal yang terstruktur mampu mendukung terciptanya integritas, komitmen, dan partisipasi seluruh organ Perseroan. Lingkungan pengendalian terdiri dari 5 komponen:

- a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika
- b. Independensi Dewan Komisaris
- c. Komitmen terhadap Kompetensi

Objectives of Internal Control System

The objectives of the Internal Control System as an organizational framework and financial and non-financial work operational procedure that can assure that every activity in the Company can:

- Maintain and secure the Company's assets;
- Reduce the financial/loss impact, deviation, including fraud;
- Assure that business activities implementation of the Company complies with the prevailing laws and regulations;
- Provide correct, complete, and timely financial and management information;
- Improve efficiency, effectiveness, and frugality in the operational activity of the Company;
- Comprehensively improve

Conformity of Internal Control System with COSO Internal Control Framework

Infrastructure and soft structure of Internal Control System in the Company is also adjusted to the international applicable framework or follow the framework issued by COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission). This conformity is aimed to provide the quality of internal control in the Company as well as the establishment of the wide recognition to the control system implemented by the Company.

The Internal Control System planned, established, and implemented in the Company consists of five components, namely:

1. Control Environment

Establishing an organizational environment and providing awareness about the need for internal control for the Company. The establishment and trial of a structured internal control environment is able to support the creation of integrity, commitment, and participation of all organs of the Company. The control environment consists of 5 components:

- a. Enforcement of Integrity and Ethical Values
- b. Independence of the Board of Commissioners
- c. Commitment to Competence



- d. Struktur Organisasi yang kondusif
- e. Akuntabilitas

2. Penilaian Risiko

Kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang menghambat Perseroan dalam mencapai tujuannya. Faktor-faktor yang mendukung pengujian penilaian risiko antara lain efektivitas pengendalian risiko, kemungkinan kelemahan pengendalian yang ada, upaya perbaikan, serta sejauh mana risiko tersebut memengaruhi pencapaian visi, misi, dan tujuan Perseroan. Penilaian Risiko terdiri dari 4 komponen:

- a. Penetapan Tujuan Perusahaan
- b. Identifikasi dan Analisis Risiko
- c. Penilaian Risiko Fraud
- d. Identifikasi dan Analisis Perubahan

3. Kegiatan Pengendalian

Jaminan yang diberikan oleh Perseroan berupa kebijakan dan sistem operasi dan prosedur guna meyakinkan Pemangku Kepentingan bahwa Perseroan telah menjalankan fungsi pengelolaan Perseroan sebagaimana mestinya. Kegiatan pengendalian disesuaikan dengan aktivitas pengendalian spesifik yang dijalankan. Kegiatan Pengendalian terdiri dari 3 komponen:

- a. Membangun Kegiatan Pengendalian
- b. Pengendalian Umum Teknologi Informasi
- c. Pengendalian melalui Kebijakan dan Prosedur

4. Informasi dan Komunikasi

Aspek Informasi dan Komunikasi dalam Sistem Pengendalian Internal bertujuan untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa informasi yang relevan dan dapat dipercaya telah dimiliki, dicatat, dan dikomunikasikan secara efektif kepada pimpinan entitas dan pihak lain yang memerlukan. Proses informasi dan komunikasi tersebut meliputi memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi di suatu entitas di Perseroan serta mempertahankan akuntabilitas aktiva terkait. Informasi dan Komunikasi terdiri dari 3 komponen:

- a. Penggunaan Informasi yang Relevan
- b. Komunikasi Internal
- c. Komunikasi Eksternal

- d. Conducive Organizational Structure
- e. Accountability

2. Risk Assessment

Activities carried out by the Company in identifying and analyzing risks that hinder the Company in achieving its objectives. Factors that support risk assessment testing include the effectiveness of risk control, possible weaknesses in existing controls, improvement efforts, and the extent to which these risks affect the achievement of the Company's vision, mission and objectives. The Risk Assessment consists of 4 components:

- a. Determination of Company's Objectives
- b. Risk Identification and Analysis
- c. Fraud Risk Assessment
- d. Change Identification and Analysis

3. Control Activities

The guarantee provided by the Company is in the form of policies and operating systems and procedures to assure the Stakeholders that the Company has carried out the Company's management functions properly. Control activities are adjusted to the specific control activities carried out. Control Activities consist of 3 components:

- a. Building Control Activities
- b. Information Technology General Control
- c. Control through Policies and Procedures

4. Information and Communication

Information and Communication Aspects in the Internal Control System aim to provide adequate assurance that relevant and reliable information has been owned, recorded, and communicated effectively to the management of the entity and other parties who need it. The information and communication process includes initiating, recording, processing, and reporting transactions in an entity in the Company as well as maintaining accountability for related assets. Information and Communication consists of 3 components:

- a. Use of Relevant Information
- b. Internal Communication
- c. External Communication



5. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern

Perseroan terus berupaya melakukan penilaian yang berkelanjutan dan periodik dalam pelaksanaan pengendalian internal, melakukan review dan perubahan sesuai dengan kondisi atau hasil evaluasi Sistem Pengendalian Intern yang ada, menyelesaikan permasalahan hingga tuntas, serta menjalankan upaya tanggung jawab yang jelas terhadap hal-hal yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern terdiri dari 2 komponen:

- a. Evaluasi Berkelanjutan
- b. Evaluasi dan Komunikasi Kelemahan Pengendalian Intern

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Pengelolaan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern yang berkelanjutan yang menjadi tanggung jawab manajemen wajib diiringi dengan evaluasi secara berkala yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaannya telah dilakukan secara efektif di seluruh aktivitas Perseroan. Dalam hal ini, evaluasi efektivitas Sistem Pengendalian Intern dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) setiap 2 tahun sekali atau sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan metode review berkala.

Hasil identifikasi dan penilaian efektivitas sistem pengendalian intern tahun 2020 menunjukkan bahwa manajemen telah menerapkan pengendalian internal yang memadai, baik dari aspek lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Seluruh temuan audit telah disampaikan kepada manajemen untuk selanjutnya memperoleh tindak lanjut dan pengawasan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Realisasi atas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Tahun 2020

Hasil pengawasan SPI atas proses dan aktivitas bisnis Pelindo III dituangkan ke dalam Evaluasi Tahunan SPI atas Pengendalian Perusahaan Tahun 2020 dengan pendekatan COSO dengan uraian sebagai berikut:

5. Monitoring of Internal Control System

The Company continues to strive to carry out continuous and periodic assessments in the implementation of internal control, conduct reviews and changes in accordance with the conditions or results of the evaluation of the existing Internal Control System, resolve problems thoroughly, and carry out clear responsibility efforts on matters that require attention and solution. Internal Control System Monitoring consists of 2 components:

- a. Continuous Evaluation
- b. Evaluation and Communication of Internal Control Weaknesses

Evaluation on the Effectiveness of the Internal Control System

The continuous management and implementation of the Internal Control System which is the responsibility of management must be accompanied by periodic evaluations aimed at ensuring that its implementation has been carried out effectively in all of the Company's activities. In this case, the evaluation of the effectiveness of the Internal Control System is carried out by the Internal Control Unit (SPI) every 2 years or in accordance with changes to the applicable laws and regulations using the periodic review method.

The results of the identification and assessment of the effectiveness of the internal control system in 2020 show that management has implemented adequate internal control, both in terms of the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring. All audit findings have been submitted to management for further follow-up and supervision in accordance with applicable procedures.

Realization on the Implementation of Internal Control System in 2020

The results of SPI supervision on Pelindo III's business processes and activities are included in the SPI Annual Evaluation of Company Control in 2020 with the COSO approach with the following description:



Aspek / Aspects	Realisasi / Realization	
Lingkungan Pengendalian / Control Environment	<ul style="list-style-type: none"> Membuat Pedoman Perilaku (<i>Code of Conduct</i>) yang disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Perusahaan menyusun analisis beban kerja dan analisis jabatan. 	<ul style="list-style-type: none"> Prepare a Code of Conduct which is approved by the Board of Directors and the Board of Commissioners. The Company prepares workload analysis and job analysis.
Penilaian Risiko / Risk Assessment	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan melakukan identifikasi dan penilaian risiko untuk setiap tingkatan perusahaan. Penilaian Risiko mempertimbangkan bagaimana risiko harus dikelola dan apakah harus diterima, dihindari, dikurangi, atau dibagi. 	<ul style="list-style-type: none"> The Company carries out risk identification and assessment for each level of the company. The Risk Assessment considers how risk should be managed and whether it should be accepted, avoided, reduced, or shared.
Aktivitas Pengendalian / Control Activities	<ul style="list-style-type: none"> Aktivitas pengendalian dijabarkan dalam bentuk kebijakan dan prosedur yang melekat dalam proses bisnis dan instruksi kerja yang ditetapkan sebagai panduan pegawai sehari-hari. Perusahaan me-review infrastruktur teknologi informasi perusahaan untuk menjamin kelengkapan, ketepatan, dan ketersediaan informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Control activities are described in the form of policies and procedures inherent in business processes and work instructions that are set as daily employee guidelines. The Company reviews the company's information technology infrastructure to ensure the completeness, accuracy, and availability of information.
Informasi dan Komunikasi / Information and Communication	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan memiliki prosedur untuk memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu kepada pihak eksternal. Perusahaan memiliki prosedur untuk mengolah informasi yang berasal dari luar perusahaan. 	<ul style="list-style-type: none"> The Company has procedures to provide relevant and timely information to external parties. The Company has procedures for processing information originating from outside the company.
Aktivitas Pengawasan / Monitoring Activity	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan memiliki metode evaluasi berkelanjutan dan terpisah atas pelaksanaan pengendalian intern. Proses evaluasi didokumentasikan. 	<ul style="list-style-type: none"> The Company has a separate and continuous evaluation method for the implementation of internal control. The evaluation process is documented.

MANAJEMEN RISIKO

Ketercapaian tujuan Perseroan dalam mewujudkan proses dan aktivitas bisnis yang berkelanjutan diintegrasikan dengan pemahamannya bahwa terdapat eksposur risiko yang memiliki potensi dampak terhadap Perseroan. Menyadari hal tersebut, Pelindo III telah berkomitmen untuk menerapkan infrastruktur manajemen dan pengendalian risiko sebagai bagian dari *best practices* GCG melalui kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengelolaan risiko secara komprehensif.

Pedoman Penerapan Manajemen Risiko

Pelindo III berinisiatif untuk mulai menerapkan proses manajemen risiko perusahaan sejak tahun 2007 dengan diterbitkannya Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. PER.11/PS.0503/P.III-2007 tanggal 9 Juli 2007 tentang Kebijakan dan Sistem Manajemen

RISK MANAGEMENT

The achievement of the Company's objectives in realizing sustainable business processes and activities is integrated with its understanding that there is risk exposure that has a potential impact on the Company. Therefore, Pelindo III has committed to implementing risk management and control infrastructure as part of GCG best practices through comprehensive policies, procedures, and risk management mechanisms.

Guidelines for the Implementation of Risk Management

Pelindo III has taken the initiative to implement a risk management process since 2017 through the issuance of the Regulation of the BOD No. PER.11/PS.0503/P.III-2007 dated 9 July 2017 on the Corporate Risk Management Policy and System in PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).



Risiko Korporat di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). Perseroan kemudian meningkatkan upaya implementasi dari proses manajemen risiko dengan diterbitkannya Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. PER.89/PR.02/P.III-2017 tentang Pedoman Teknis Manajemen Risiko di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

Penerapan manajemen risiko turut diperkuat dengan adanya dukungan dasar dari Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Dasar inilah yang mendorong Perseroan untuk mengembangkan manajemen risiko yang sesuai dengan perkembangan bisnis serta peraturan yang berlaku serta menciptakan nilai tambah atas pelaksanaan kegiatan dan proses bisnis Perseroan.

Kerangka dan Proses Manajemen Risiko

Penciptaan dan upaya mempertahankan budaya sadar risiko menjadi perhatian Pelindo III dalam rangka mendukung tercapainya sasaran perusahaan dengan komitmen tinggi yang didukung sepenuhnya oleh Dewan Komisaris melalui Komite GCG dan Manajemen Risiko serta dukungan Jajaran Direksi secara bertahap dan berkelanjutan dengan riwayat penetapan kebijakan dan pedoman sebagai berikut:

1. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. PER.71/PM.02/P.III-2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan, yang menggantikan kebijakan tahun 2007;
2. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. PER.89/PR.02/P.III-2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Pedoman Teknis Manajemen Risiko di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), yang menggantikan pedoman teknis tahun 2010;
3. Peraturan Direksi No. PER.0055/HK.01.06/HOFC-2019 tanggal 27 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. PER.71/PM.02/P.III-2017 tentang Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan; dan

The Company then increased efforts to implement the risk management process with the issuance of the Regulation of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. PER.89/PR.02/P.III-2017 concerning Technical Guidelines for Risk Management in PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

The implementation of risk management is also strengthened by the basic support from the Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs. This basis encourages the Company to develop risk management in accordance with business developments and applicable regulations as well as create added value for the implementation of the Company's business activities and processes.

Risk Management Framework and Process

The embodiment and measures to maintain risk-awareness culture become a concern for Pelindo III in supporting the achievement of company objectives through high commitment that is fully supported by the BOC through the GCG and Risk Management Committee as well as support from the BOD in stages and continuously with the following history on policy and guideline determination:

1. Regulation of the BOD No. PER.71/PM.02/P.III-2017 dated 13 October 2017 on the Risk Management Policy which replaced the 2017 policy;
2. Regulation of the BOD No. PER.89/PR.02/P.III-2017 dated December 12, 2017 on the Technical Guideline of Risk Management in PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) which replaced the 2010 policy;
3. Regulation of the BOD No. PER.0055/HK.01.06/HOFC2019 dated September 27, 2019 on Amendment to Regulation of the BOD of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) No. PER.71/PM.02/P.III-2017 on the Risk Management Policy; and



4. Peraturan Direksi No. PER.0078/HK.01.06/HOFC-2019 tentang Pedoman Teknis Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), yang menggantikan pedoman teknis tahun 2017.
4. Regulation of the BOD No. PER.0078/HK.01.06/HOFC-2019 on the Technical Guideline for Integrated Risk Management in PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) which replaced the 2017 technical guideline.

Penerapan manajemen risiko di Pelindo III memperhatikan perkembangan terhadap pendekatan standar yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan-perusahaan yang dapat memberikan praktik terbaik dari implementasinya. Pelindo III telah melakukan pembaruan dalam menggunakan pendekatan standar dari SNI ISO 31000:2011 Manajemen Risiko – Prinsip dan Pedoman menjadi pendekatan SNI 8615:2018 ISO 31000:2018 Manajemen Risiko – Pedoman. Pelindo III menggunakan standar SNI 8615:2018 ISO 31000:2018 dalam membangun dan memelihara kebijakan beserta proses manajemen risiko yang diterapkan di lingkungan perusahaan.

Prinsip yang harus dibudayakan oleh Manajemen Perseroan dalam rangka melindungi sasaran Perseroan dan menciptakan nilai tambah atau peluang bagi Perseroan yaitu manajemen risiko dilaksanakan secara terintegrasi, terstruktur dan komprehensif, disesuaikan (*tailor made*), inklusif, dinamis, berdasarkan informasi terbaik yang tersedia, memperhatikan faktor manusia dan budaya, serta dilakukan perbaikan berkelanjutan. Pembudayaan sadar risiko dijalankan melalui serangkaian kerangka kerja dan proses manajemen risiko yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan untuk dapat diterapkan pada seluruh bagian di lingkungan perusahaan dengan penggambaran di bawah ini.

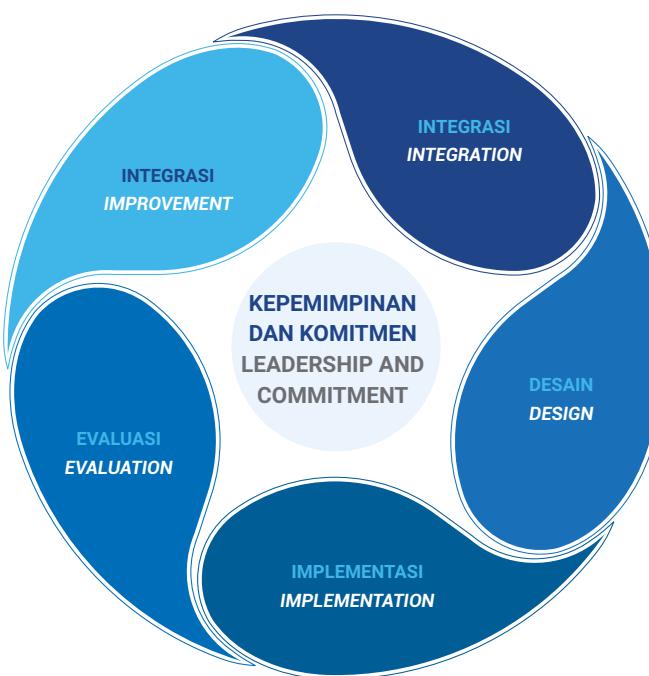
Risk management implementation in Pelindo III considers the developments in the standard approaches utilised by organisations or companies which may provide the best implementation practices. In 2019 Pelindo III has renewed the standard approaches implementation of ISO 31000:2018 Risk Management – Principles and Guideline into SNI 8615:2018 ISO 31000:2018 Risk Management – Guideline. Pelindo III adopts the SNI 8615:2018 ISO 31000:2018 standards in establishing and maintaining the policy and process of risk management implemented in the company's vicinity.

The principle that must be cultivated by the management in safeguarding Company goals and creating added value or opportunity for the Company is that risk management must be implemented in an integrated, structured and comprehensive, tailor-made, inclusive, dynamic, based on the best available information, considers human and cultural factors, as well as conducting continuous improvement. The risk awareness culture is carried out through a series of risk management framework and processes set by the BOD to be implemented in all company environment with the following illustration:



Kerangka Manajemen Risiko

Risk Management Framework



Berdasarkan kerangka kerja di atas, kepemimpinan dan komitmen berada di tengah yang menggambarkan bahwa pemimpin Perseroan memberikan teladan dan komitmen dalam mengelola risiko melalui kebijakan, wewenang, tugas, tanggung jawab, dan akuntabilitas pada tingkat organisasi yang disesuaikan dengan tujuan organisasi. Adapun komponen-komponen integrasi, desain, implementasi, evaluasi, dan perbaikan akan selalu berhubungan untuk mencapai tujuan organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepemimpinan dan Komitmen

Untuk melaksanakan Manajemen Risiko yang efektif, maka manajemen melakukan hal sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan akan pentingnya Manajemen Risiko bagi Perseroan;
- b. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. Memastikan bahwa sasaran Manajemen Risiko selaras dengan strategi dan sasaran Perseroan;
- d. Menetapkan indikator kinerja Manajemen Risiko yang selaras dengan indikator kinerja Perseroan;

Based on the above framework, leadership and commitment are at the center which illustrates that the Company's leaders set an example and commitment in managing risk through policies, authorities, duties, responsibilities, and accountability at the organizational level that are adjusted to organizational goals. The components of integration, design, implementation, evaluation, and improvement will always be related to achieving organizational goals that are tailored to the needs of the organization, which are explained as follows:

1. Leadership and Commitment

To carry out effective Risk Management, the management does the following:

- a. Disseminate the importance of Risk Management for the Company;
- b. Ensure compliance with laws and regulations;
- c. Ensure that the Risk Management objectives are aligned with the Company's strategy and objectives;
- d. Establish Risk Management performance indicators that are in line with the Company's performance indicators;



- e. Menugaskan secara jelas;
- f. Memastikan bahwa alokasi sumber daya telah tersedia dan cukup untuk penerapan Manajemen Risiko Perseroan;
- g. Mengkomunikasikan manfaat penerapan Manajemen Risiko ke seluruh stakeholder terkait;
- h. Memastikan bahwa kerangka kerja Manajemen Risiko tetap sesuai dengan perkembangan Perseroan.

2. Integrasi

Manajemen risiko menjadi bagian dan tidak terpisahkan dalam tujuan, tata kelola, kepemimpinan dan komitmen, strategi, sasaran, dan operasi organisasi.

3. Desain

Desain dalam kerangka kerja manajemen risiko mencakup pemahaman organisasi dan konteksnya; penegasan komitmen manajemen risiko; penetapan peran, kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas; alokasi sumber daya; dan penyiapan komunikasi dan konsultasi.

4. Implementasi

Implementasi atau pelaksanaan dalam kerangka kerja manajemen risiko dilaksanakan setelah desain manajemen risiko dibuat dan ditetapkan.

5. Evaluasi

Evaluasi dalam kerangka kerja manajemen risiko dilakukan untuk mengukur kerangka kerja manajemen risiko secara berkala terhadap tujuan, rencana implementasi, indikator dan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tujuan organisasi atau perusahaan.

6. Perbaikan

Perbaikan dalam kerangka kerja manajemen risiko terdiri dari adaptasi dan perbaikan berkesinambungan.

- e. Assign clearly;
- f. Ensure that the allocation of resources is available and sufficient for the implementation of the Company's Risk Management;
- g. Communicating the benefits of implementing Risk Management to all relevant stakeholders;
- h. Ensure that the Risk Management framework remains in line with the development of the Company.

2. Integration

Risk management is an integral part of the organization's goals, governance, leadership and commitment, strategy, objectives, and operations.

3. Design

Design within a risk management framework includes understanding the organization and its context; affirmation of risk management commitment; determination of roles, authorities, responsibilities and accountability; resource allocation; and preparation of communications and consultations.

4. Implementation

Implementation in the risk management framework is carried out after the risk management design is made and determined.

5. Evaluation

Evaluation in the risk management framework is carried out to measure the risk management framework on a regular basis against the objectives, implementation plans, indicators and expected behavior in accordance with the goals of the organization or company.

6. Improvement

Improvements in the risk management framework consist of adaptation and continuous improvement.



Prinsip Manajemen Risiko

Risk Management Principle



Manajemen risiko ditujukan untuk menciptakan dan melindungi nilai, baik nilai bagi Perseroan maupun nilai yang diberikan kepada Pemangku Kepentingan. Dalam mendukung terciptanya nilai tersebut, terdapat prinsip-prinsip yang memandu atau membentuk karakteristik manajemen risiko yang efisien dan efektif. Penjabaran mengenai prinsip-prinsip Manajemen Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Penciptaan dan Perlindungan Nilai

Manajemen Risiko harus dapat meningkatkan kapabilitas Perseroan dalam menyerap risiko agar Perseroan dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada di masa sekarang dan yang dapat muncul di masa depan. Manajemen Risiko juga harus dapat mengantisipasi risiko-risiko berdampak buruk yang dapat membahayakan pencapaian sasaran Perseroan.

Risk management is aimed at creating and protecting value, both for the Company and for the value provided to the Stakeholders. In supporting the creation of this value, there are principles that guide or shape the characteristics of efficient and effective risk management. The description of the Company's Risk Management principles is as follows:

1. Value Creation and Preservation

Risk Management must be able to improve the Company's capability in absorbing risk so that the Company can take advantage of opportunities that exist in the present and that may arise in the future. Risk Management must also be able to anticipate risks that have a negative impact that can jeopardize the achievement of the Company's targets.



2. Terintegrasi

Manajemen Risiko melekat pada seluruh proses Perseroan karena setiap proses Perseroan menghadapi risiko yang dapat menyebabkan sasaran proses tersebut tidak tercapai. Hal ini menyatakan bahwa Manajemen Risiko tidak hanya menjadi tanggung jawab *top management* Perseroan, tetapi juga seluruh bagian Perseroan.

3. Terstruktur dan Komprehensif

Manajemen Risiko dijalankan secara konsisten dan terintegrasi pada seluruh aspek perusahaan. Pembentukan *risk governance* yang memperjelas kewenangan, peran, dan tanggung jawab dari setiap unit Perseroan berkaitan dengan Manajemen Risiko juga diperlukan untuk mendukung efektivitas Manajemen Risiko.

4. Disesuaikan

Setiap individu, unit kerja, dan Perseroan memiliki karakteristik tersendiri dan menghadapi risiko yang berbeda-beda. Setiap pemangku risiko tidak dapat hanya mengikuti sistem Manajemen Risiko yang dibentuk unit atau perusahaan lain, tetapi harus disesuaikan dengan keadaan dan risiko yang dihadapinya.

5. Inklusif

Penerapan dan informasi mengenai Manajemen Risiko harus bersifat inklusif dan melibatkan seluruh bagian Perseroan.

6. Dinamis

Manajemen Risiko diimplementasikan secara konsisten dan berulang, serta harus dapat memfasilitas perubahan pada sisi internal dan eksternal perusahaan.

7. Informasi Terbaik yang Tersedia

Penerapan Manajemen Risiko didukung dengan informasi terbaik yang dapat diperoleh Perseroan. Informasi terbaik terdiri dari 3 aspek, yaitu relevan, terpercaya, dan tepat waktu. Untuk mendukung perolehan informasi terbaik, Perseroan dapat melakukan proses dokumentasi dan membentuk database informasi.

8. Faktor Manusia dan Budaya

Penerapan Manajemen Risiko mempertimbangkan kultur, persepsi, dan kapabilitas manusia, termasuk memperhitungkan perselisihan kepentingan antara Perseroan dengan individu di dalamnya.

2. Integrated

Risk Management is inherent in all of the Company's processes because each of the Company's processes faces risks that may cause the target of the process not to be achieved. This states that Risk Management is not only the responsibility of the Company's top management, but also all parts of the Company.

3. Structured and Comprehensive

Risk Management is carried out consistently and integrated in all aspects of the company. The establishment of risk governance that clarifies the authority, role, and responsibility of each unit of the Company in relation to Risk Management is also needed to support the effectiveness of Risk Management.

4. Tailor Made

Each individual, work unit, and Company has its own characteristics and faces different risks. Each risk stakeholder cannot only follow the Risk Management system established by other units or companies, but must be adapted to the circumstances and risks he faces.

5. Inclusive

Implementation and information regarding Risk Management must be inclusive and involve all parts of the Company.

6. Dynamic

Risk Management is implemented consistently and repeatedly, and must be able to facilitate changes on the internal and external sides of the company.

7. Best Available Information

The implementation of Risk Management is supported by the best information that can be obtained by the Company. The best information consists of 3 aspects, namely relevant, reliable, and timely. To support the acquisition of the best information, the Company can carry out the documentation process and establish an information database.

8. Human and Cultural Factors

The implementation of Risk Management takes into account the culture, perception, and human capabilities, including taking into account the conflict of interest between the Company and the individuals within it.



9. Perbaikan Berkelanjutan

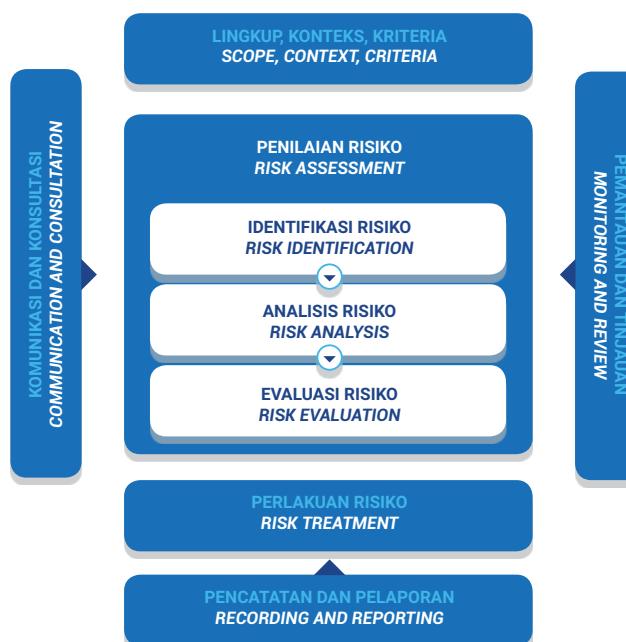
Keberadaan Manajemen Risiko diperbaiki dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan konteks internal dan eksternal perusahaan. Perbaikan berkelanjutan ini diharapkan dapat membawa perbaikan yang signifikan pada Perseroan.

9. Continuous Improvement

The existence of Risk Management is improved from time to time in accordance with the development of the company's internal and external context. This continuous improvement is expected to bring significant improvements to the Company.

Proses Manajemen Risiko

Risk Management Process



Proses Manajemen Risiko merupakan proses yang dinamis dalam mengelola risiko, baik secara rutin/berkala maupun sewaktu-waktu sehingga dapat disesuaikan dan diperbarui apabila diperlukan. Serangkaian kegiatan yang dilakukan di Perseroan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Komunikasi dan Konsultasi

Input proses dapat berupa arahan kebijakan Manajemen Risiko. Output proses dapat berupa dokumentasi komunikasi dan konsultasi (salah satunya dalam bentuk *Minute of Meeting*) dan rangkuman kendala dalam implementasi Manajemen Risiko beserta rencana tindak lanjutnya. Rincian prosedur yang dilakukan meliputi:

- Mengawasi dan memberi instruksi terkait manajemen risiko;
- Memfasilitasi dan membantu melakukan penilaian risiko hingga proses mitigasi;

The Risk Management process is a dynamic process in managing risk, either regularly/periodically or at any time so that it can be adjusted and updated if necessary. A series of activities carried out in the Company can be described as follows:

1. Communication and Consultation

Process input can be in the form of Risk Management policy directions. The output of the process can be in the form of documentation of communication and consultation (one of which is in the form of *Minute of Meeting*) and a summary of obstacles in the implementation of Risk Management along with follow-up plans. Details of the procedures carried out include:

- Supervise and give instructions regarding risk management;
- Facilitate and help carry out risk assessments to the mitigation process;



- c. Melakukan penilaian risiko;
- d. Mengungkapkan kendala proses manajemen risiko;
- e. Memberi solusi dan melaporkan kondisi terkini proses manajemen risiko;
- f. Menerima laporan dan konsultasi bila diperlukan;
- g. Memberi rekomendasi perbaikan proses manajemen risiko;
- h. Melaporkan isu-isu proses manajemen risiko;
- i. Membahas isu proses manajemen risiko.

2. Penetapan Lingkup, Konteks, Kriteria

Input proses dapat berupa Visi dan Misi Perusahaan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan dokumen analisis kondisi lingkungan. Output proses dapat berupa kriteria risiko. Rincian prosedur yang dilakukan meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
- b. Membahas usulan penetapan konteks;
- c. Menetapkan konteks;
- d. Memberi saran dan menetapkan konteks.

3. Penilaian Risiko – Identifikasi Risiko

Input proses dapat berupa data proses bisnis Perseroan, hasil observasi kondisi internal dan eksternal Perseroan, serta pertimbangan pihak eksternal (konsultan atau tenaga ahli). Output proses dapat berupa *risk register* (bagian identifikasi risiko). Rincian prosedur yang dilakukan meliputi:

- a. Mengidentifikasi semua jenis risiko;
- b. Identifikasi lanjut pada semua sumber risiko;
- c. Mengidentifikasi semua potensi penyebab risiko;
- d. Melaporkan hasil identifikasi risiko;
- e. Menyempurnakan hasil identifikasi risiko.

4. Penilaian Risiko – Analisis Risiko

Input proses dapat berupa *risk register* (hasil identifikasi risiko) dan kriteria risiko. Output proses dapat berupa *updated risk register* (bagian analisis risiko). Rincian prosedur yang dilakukan meliputi:

- a. Menganalisis konsekuensi risiko (kuantitatif dan kualitatif);
- b. Menganalisis kemungkinan risiko;

- c. Conduct a risk assessment;
- d. Disclosing the constraints of the risk management process;
- e. Provide solutions and report on the current state of the risk management process;
- f. Receive reports and consultations when needed;
- g. Provide recommendations for improvement of risk management processes;
- h. Reporting risk management process issues;
- i. Discuss risk management process issues.

2. Determination of Scope, Context, and Criteria

Process inputs can be in the form of Company Vision and Mission, Company Long Term Plan, Company Work Plan and Budget, and environmental condition analysis documents. Process output can be in the form of risk criteria. Details of the procedures carried out include:

- a. Coordinating with related parties;
- b. Discussing the proposed context setting;
- c. Establish context;
- d. Give suggestions and establish context.

3. Risk Assessment – Risk Identification

Process input can be in the form of data on the Company's business processes, the results of observations of the Company's internal and external conditions, as well as considerations from external parties (consultants or experts). The output of the process can be in the form of a risk register (risk identification section). Details of the procedures carried out include:

- a. Identify all types of risks;
- b. Further identification of all sources of risk;
- c. Identify all potential causes of risk;
- d. Report the results of risk identification;
- e. Improving the results of risk identification.

4. Risk Assessment – Risk Analysis

Process inputs can be in the form of a risk register (the result of risk identification) and risk criteria. Process output can be in the form of an updated risk register (risk analysis section). Details of the procedures carried out include:

- a. Analyze risk consequences (quantitative and qualitative);
- b. Analyze possible risks;



- c. Menganalisis *existing control*;
- d. Melaporkan hasil analisis risiko;
- e. Memvalidasi dan memberi masukan terhadap analisis risiko.

5. Penilaian Risiko – Evaluasi Risiko

Input proses dapat berupa *updated risk register* (bagian analisis risiko), dan *risk appetite* dan *risk tolerance*. Output proses dapat berupa *updated risk register* (bagian evaluasi risik) dan peta risiko. Rincian prosedur yang dilakukan meliputi:

- a. Membandingkan hasil analisis risiko dengan toleransi risiko;
- b. Membuat peta risiko masing-masing *risk owner*;
- c. Menetapkan *Key Risk Indikator*;
- d. Melaporkan hasil evaluasi risiko;
- e. Mengevaluasi peta risiko;

6. Perlakuan Risiko

Input proses dapat berupa *updated risk register* (bagian evaluasi risiko), dan peta risiko. Output proses dapat berupa *updated risk register* (bagian perlakuan risiko), dan *risk mitigation plan*. Rincian prosedur yang dilakukan meliputi:

- a. Menyusun rencana perlakuan risiko dan biaya mitigasi;
- b. Mengevaluasi rencana dan biaya perlakuan risiko;
- c. Menyetujui rencana dan biaya perlakuan risiko;
- d. Melakukan tindakan perlakuan risiko;
- e. Memonitor realisasi perlakuan dan biaya perlakuan risiko;

7. Pemantauan dan Tinjauan

Input proses dapat berupa berupa *risk register*, *risk mitigation plan*, Laporan Manajemen Risiko Unit Kerja Kantor Pusat/Cabang, serta jadwal unit kerja dan Direksi/*General Manager*. Output proses dapat berupa laporan Manajemen Risiko Korporat. Rincian Prosedur:

- a. Merencanakan rapat tinjauan tingkat cabang dan pusat;
- b. Melaksanakan rapat tinjauan tingkat cabang/direktorat pada Kantor Pusat;
- c. Menyusun laporan manajemen risiko korporat;
- d. Melaksanakan rapat tinjauan tingkat korporat;
- e. Menyampaikan laporan manajemen risiko korporat.

- c. Analyzing existing controls;
- d. Report the results of risk analysis;
- e. Validate and provide input to risk analysis.

5. Risk Assessment – Risk Evaluation

Process input can be in the form of an updated risk register (risk analysis section), and risk appetite and risk tolerance. The output of the process can be in the form of an updated risk register (risk evaluation section) and a risk map. Details of the procedures carried out include:

- a. Comparing the results of risk analysis with risk tolerance;
- b. Make a risk map for each risk owner;
- c. Establish Key Risk Indicators;
- d. Report the results of the risk evaluation;
- e. Evaluating the risk map;

6. Risk Treatment

Process inputs can be in the form of an updated risk register (risk evaluation section), and a risk map. The output of the process can be in the form of an updated risk register (risk treatment section), and a risk mitigation plan. Details of the procedures carried out include:

- a. Develop a risk treatment plan and mitigation costs;
- b. Evaluate risk treatment plans and costs;
- c. Approving risk treatment plans and costs;
- d. Carry out risk treatment actions;
- e. Monitor the realization of treatment and risk treatment costs;

7. Monitoring and Review

Process inputs can be in the form of risk registers, risk mitigation plans, Risk Management Reports for Head Office/Branch Offices, as well as work unit schedules and Directors/*General Managers*. The output of the process can be in the form of a Corporate Risk Management report. Procedure Details:

- a. Planning branch and central level review meetings;
- b. Carry out review meetings at the branch/directorate level at the Head Office;
- c. Prepare corporate risk management reports;
- d. Conducting corporate-level review meetings;
- e. Submit a corporate risk management report.



8. Pencatatan dan Pelaporan

Input proses dapat berupa laporan kronologis kejadian di lapangan, dan hasil wawancara dengan pihak terkait di lapangan. Output proses dapat berupa *Risk/Loss Event Database*. Rincian Prosedur:

- a. Mencatat kronologis kejadian dan tindak lanjutnya;
- b. Menganalisis tingkat kerugian;
- c. Melaporkan data *risk/loss event*;
- d. Melakukan kompilasi data *risk/loss event* dari seluruh unit kerja Kantor Pusat dan Kantor Cabang.

Roadmap Manajemen Risiko

Perkembangan bisnis serta perubahan kondisi internal maupun eksternal Perseroan yang dinamis menuntut adanya sistem dan struktur manajemen risiko yang berkelanjutan serta relevan dengan karakteristik risiko yang dihadapi. Untuk itu, Perseroan telah mengembangkan peta jalan (*roadmap*) pengembangan dan pelaksanaan Manajemen Risiko dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi serta peraturan perundungan yang berlaku.

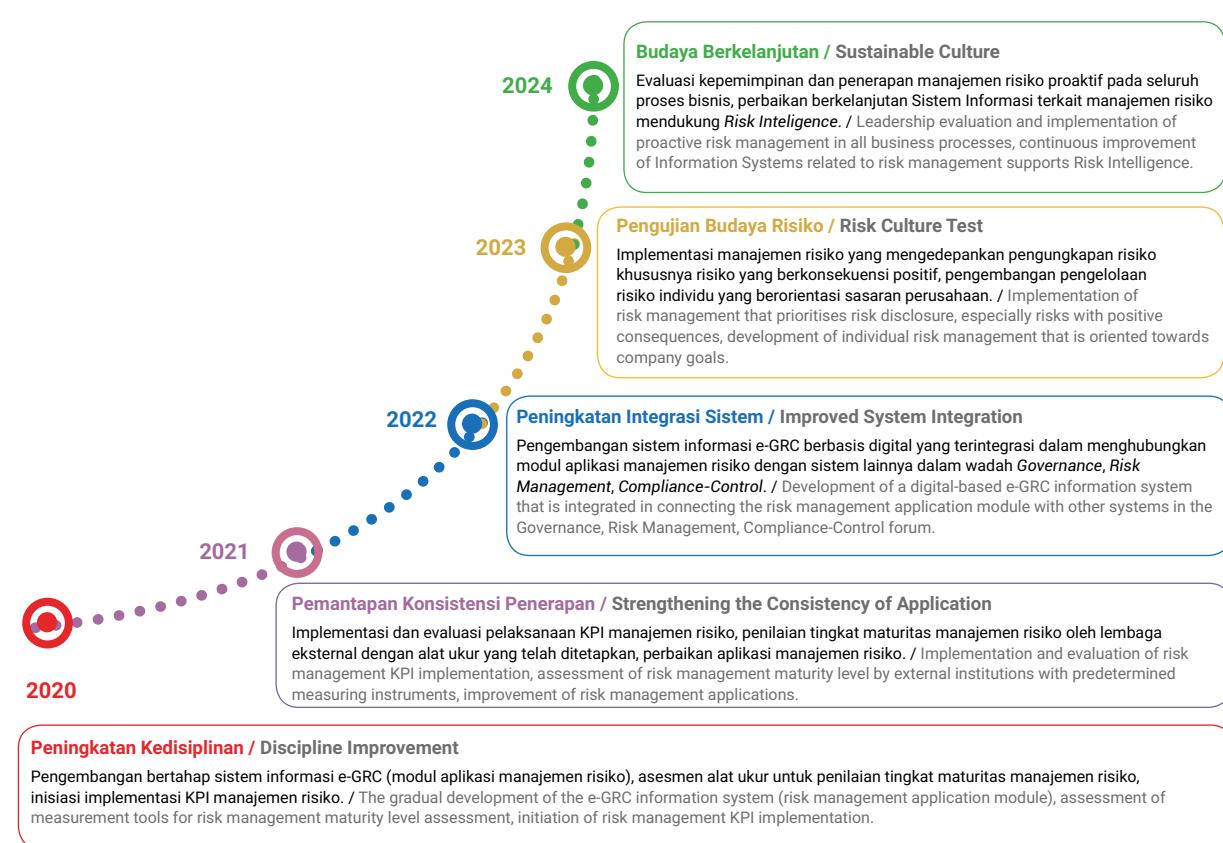
8. Recording and Reporting

Process input can be in the form of a chronological report of events in the field, and the results of interviews with related parties in the field. The output of the process can be in the form of a *Risk/Loss Event Database*. Procedure Details:

- a. Record the chronology of events and their follow-up;
- b. Analyze the level of loss;
- c. Report risk/loss event data;
- d. Compile risk/loss event data from all work units at the Head Office and Branch Offices.

Risk Management Roadmap

The dynamic business development and changes in the Company's internal and external conditions require a sustainable risk management system and structure that is relevant to the characteristics of the risks faced. To that end, the Company has developed a roadmap for the development and implementation of Risk Management by considering the influencing factors as well as the applicable laws and regulations. Roadmap update:





Mengacu pada roadmap Manajemen Risiko tahun 2020 – 2024, Perseroan pada tahun 2020 berada pada fase Peningkatan Kedisiplinan dan berfokus pada pengembangan bertahap sistem informasi e-GRC (modul aplikasi manajemen risiko), asesmen alat ukur untuk penilaian tingkat maturitas manajemen risiko, inisiasi implementasi KPI manajemen risiko.

Selera Risiko (Risk Appetite) dan Toleransi Risiko (Risk Tolerance)

Penguatan penerapan sistem manajemen risiko di Pelindo III memperhatikan selera risiko Direksi dan toleransi risiko Direksi sebagai penentu arah kebijakan dalam merencanakan dan menangani risiko-risiko yang dihadapi oleh Perseroan.

Selera Risiko Direksi Pelindo III

Pengambilan keputusan untuk menjalankan pemenuhan kinerja bisnis utama dan diversifikasi bisnis baru yang potensial sesuai target KPI dengan cara mempertimbangkan semua opsi bisnis potensial yang memberikan tingkat *reward* yang dapat diterima. Hal ini karena Perseroan telah melakukan langkah-langkah pengendalian yang tepat sesuai prosedur dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Sikap Selera Risiko (Risk Appetite) Direksi Pelindo III

Referring to the Risk Management roadmap for 2020-2024, the Company in 2020 is in the Discipline Improvement phase and focuses on the gradual development of the e-GRC information system (risk management application module), evaluation of measurement tools for risk management maturity level assessment, initiation of management KPI implementation risk.

Risk Appetite and Risk Tolerance

The strengthening of risk management system implementation in Pelindo III considers the risk appetite and risk tolerance of the BOD to determinate the policy direction in planning and handling Company risks.

Risk Appetite of Pelindo III BOD

The decision-making to carry out the fulfilment of key business performance and potential new business diversification under the KPI targets by considering all potential business options that provide an acceptable level of reward. This is because the Company has conducted appropriate control measures following the procedures and good corporate governance (GCG).

Risk Appetite Attitude of Pelindo III BOD





Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

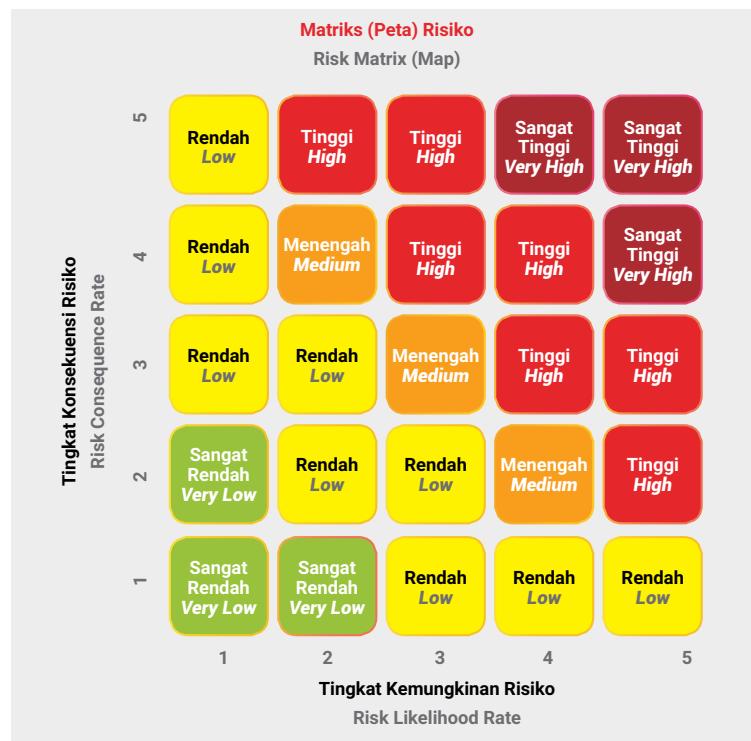
Penerimaan risiko mempertimbangkan toleransi nilai dan tingkat risiko yang berada di bawah tingkat risiko menengah dengan pengendalian *existing* yang konsisten dan dapat dipertahankan. Risiko yang belum dapat ditoleransi mempertimbangkan nilai dan tingkat risiko yang berada pada tingkat risiko menengah ke atas, sehingga diperlukan peninjauan dan perbaikan pengendalian *existing* serta penanganan lebih lanjut melalui tahapan mitigasi.

Penetapan Selera Risiko (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

Risk Tolerance

Risk acceptance considers the value tolerance and risk level under the medium risk level with consistent and maintained existing control. Risks which cannot be tolerated considers the value and risk levels in the medium-up level, hence further review and improvement on existing control and handling are necessary through the mitigation phase.

Determination of Risk Appetite and Risk Tolerance



Keterangan:

- Area di bawah dan sebelah kiri garis biru merupakan area toleransi risiko diterima dengan adanya/tanpa pengendalian *existing*.
- Area di atas dan sebelah kanan garis biru merupakan area di luar toleransi risiko sehingga memerlukan penanganan lebih lanjut.

Information:

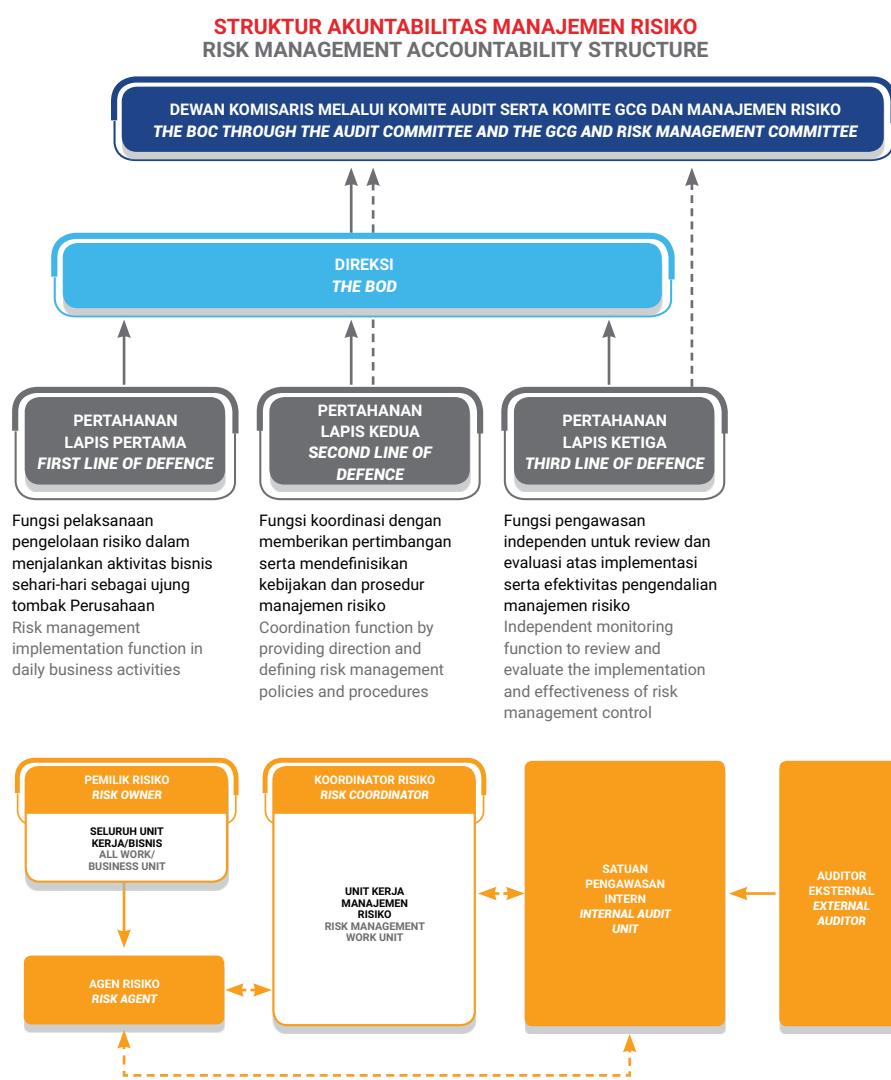
- Areas under and left side of the blue line are the accepted risk tolerance areas with/without existing control.
- Areas above and right side of the blue line are areas beyond risk tolerance and further handling is necessary.

Struktur Akuntabilitas Manajemen Risiko

Implementasi dari praktik manajemen risiko di lingkungan perusahaan secara konsisten dilaksanakan dengan akuntabilitas proses manajemen risiko yang melekat pada setiap bagian organisasi di perusahaan melalui pendekatan model pertahanan 3 (tiga) lapis (*three lines of defence*) dengan gambaran sebagai berikut:

Risk Management Accountability Structure

The implementation of risk management practices in the corporate environment is consistently carried out with the accountability of the risk management process inherent in every part of the organization in the company through a 3 (three) line of defense model approach with the following description:



Model pertahanan 3 (tiga) lapis tersebut meliputi:

1. Pertahanan lapis pertama berperan sebagai fungsi pelaksana dilaksanakan oleh setiap unit kerja di kantor pusat dan kantor cabang sebagai pemilik proses bisnis sekaligus sebagai pemilik risiko (*risk owner*) dan dibantu oleh agen risiko (*risk agent*) yang melakukan pengelolaan risiko dalam menjalankan aktivitas operasional bisnis sehari-hari;

The 3 (three) layer defense model includes:

1. The first line of defense acts as an implementing function carried out by each work unit at the head office and branch offices as the owner of the business process as well as the risk owner and assisted by risk agents who carry out risk management in carrying out daily business operational activities. day;



2. Pertahanan lapis kedua berperan sebagai fungsi koordinasi dilaksanakan oleh Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko sebagai koordinator risiko yang memberikan fungsi koordinatif dan konsultatif dengan menyusun kebijakan dan petunjuk teknis penerapan Manajemen Risiko secara menyeluruh di lingkungan Perseroan. Dalam pelaksanaan Manajemen Risiko, Unit Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko harus bersifat independen terhadap unit kerja struktural selaku pemilik risiko (*risk owner*) dan Internal Audit yang melaksanakan fungsi pengawas internal;
3. Pertahanan lapis ketiga berperan sebagai fungsi pengawas dilaksanakan oleh Internal Audit yang memberikan fungsi jaminan terhadap kontrol Manajemen Risiko serta melakukan fungsi pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko.
2. The second layer of defense acts as a coordinating function carried out by the Management System and Risk Management Unit as a risk coordinator who provides coordinating and consultative functions by formulating policies and technical guidelines for the implementation of Risk Management as a whole within the Company. In the implementation of Risk Management, the Management System and Risk Management Unit must be independent of the structural work unit as the risk owner and the Internal Audit that carries out the function of the internal supervisor;
3. The third layer of defense acts as a supervisory function carried out by Internal Audit which provides a guarantee function for Risk Management control and performs a supervisory function on the implementation of Risk Management.

Profil Risiko Perseroan

Pemetaan dan identifikasi risiko-risiko utama yang dihadapi Perseroan menjadi salah satu bagian penting dalam proses Manajemen Risiko secara komprehensif. Selain bertujuan untuk menjunjung prinsip manajemen risiko yaitu dinamis, berulang, dan responsif terhadap perubahan, pembaruan profil dan pengelolaan risiko juga bertujuan untuk mengintegrasikan pengendalian risiko yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Perseroan. Melalui pemetaan dan identifikasi risiko yang dihadapi, Perseroan menyusun strategi mitigasi dalam rangka mencapai tujuan strategis.

Uraian mengenai profil risiko serta strategi mitigasi yang dilaksanakan dimuat dalam tabel sebagai berikut:

Company Risk Profile

Mapping and identification of the main risks faced by the Company is an important part of the comprehensive Risk Management process. In addition to aiming to uphold the principles of risk management, namely dynamic, iterative, and responsive to changes, profile updates and risk management also aims to integrate risk control in line with the Company's vision, mission and objectives. Through mapping and identifying the risks faced, the Company develops mitigation strategies in order to achieve strategic objectives.

A description of the risk profile and mitigation strategies implemented is contained in the following table:

No.	Profil Risiko / Risk Profile	Pelaksanaan Mitigasi / Mitigation Measures	
1	Penurunan Pendapatan Bisnis Inti dan Bisnis Pendukung Decrease in Core Business and Supporting Business Revenues	<ol style="list-style-type: none"> Mempertahankan <i>market share</i> dengan berperan aktif untuk berkomunikasi dan berdiskusi dengan pelanggan eksisting atau baru untuk memenuhi kebutuhan yang dapat menjamin kelancaran operasional; Efisiensi terhadap penggunaan beban operasional perusahaan yang juga diikuti oleh Anak Perusahaan; Melakukan peninjauan untuk penyesuaian prioritas rencana investasi termasuk melalui pengajuan dan pengelolaan revisi RKAP; 	<ol style="list-style-type: none"> Maintaining market share by playing an active role in communicating and discussing with existing or new customers to meet the needs that can ensure smooth operations; Efficiency in the use of the company's operating expenses which is also followed by the Subsidiaries; Conduct a review for the adjustment of investment plan priorities including through the submission and management of RKAP revisions;



No.	Profil Risiko / Risk Profile	Pelaksanaan Mitigasi / Mitigation Measures	
4.	Meninjau penerapan kebijakan Direksi pada bidang operasional untuk mendukung keberlangsungan bisnis pengguna jasa seperti penyesuaian masa penumpukan petikemas kosong, pengenaan tariff flat untuk petikemas kosong, simplifikasi proses bisnis pengambilan petikemas kosong bagi eksportir, dan allowance untuk masa pembukaan untuk early stock beserta biayanya.	4. Reviewing the implementation of the Board of Directors' policies in the operational sector to support business continuity for service users, such as adjusting the stacking period for empty containers, imposition of flat tariffs for empty containers, simplification of the business process for taking empty containers for exporters, and allowances for the opening period for early stock and the costs.	
2	Insiden yang Menyebabkan Timbulnya Kerugian dan Kecelakaan Kerja Incidents That Cause Work Losses and Accidents	<ol style="list-style-type: none"> 1. Briefing dan induksi K3 yang disertai dengan <i>safety patrol</i> secara harian; 2. Peraturan Direksi yang terkait dengan Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 3. Peraturan Direksi yang terkait dengan Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Keamanan dan Lingkungan; 4. Peraturan Direksi yang terkait dengan Pelayanan Jasa Operasional; 5. Peningkatan kesiapan SDM dalam menanggapi dan menangani proses evakuasi termasuk pemulihan dengan melakukan pelatihan maupun simulasi dalam menghadapi insiden; 6. Meningkatkan faktor ketaatian terhadap aturan operasional serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan adanya <i>Key Performance Indicator (KPI)</i> yang memiliki program penghargaan dalam hal kemampuan untuk mengimplementasikan perbaikan dan peningkatan K3. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. OHS briefing and induction accompanied by daily safety patrols; 2. Board of Directors regulations related to Occupational Health and Safety Guidelines; 3. Regulations of the Board of Directors related to the Guidelines for the Implementation of Quality Management Systems, Occupational Health and Safety, Security and Environment; 4. Regulations of the Board of Directors related to Operational Services; 5. Increasing the readiness of human resources in responding to and handling the evacuation process including recovery by conducting training and simulations in dealing with incidents; 6. Increasing the factor of compliance with operational rules as well as occupational health and safety (K3) with the Key Performance Indicator (KPI) which has a reward program in terms of the ability to implement improvements and improvements to OHS.
3	Penularan Wabah Covid-19 di Lingkungan Perusahaan Transmission of the Covid-19 Outbreak in the Companys Environment	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan peralatan protokol kesehatan yang dibutuhkan seperti masker, hand sanitizer dan sarung tangan untuk pegawai; 2. Pembuatan tempat cuci tangan di seluruh area strategis untuk mencegah penyebaran dengan meningkatkan kebersihan diri bagi seluruh pegawai; 3. Melakukan pengecekan kesehatan secara berkala kepada seluruh pegawai; 4. Pemberlakuan aturan bebas Covid-19 kepada seluruh pihak yang berkepentingan yang memasuki area perusahaan; 5. Melakukan isolasi/penutupan pada ruangan dimana ybs bekerja dan memindahkan kegiatan pekerjaan di ruangan itu ke tempat alin agar tidak mengganggu kegiatan operasional; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Provision of required health protocol equipment such as masks, hand sanitizers and gloves for employees; 2. Making hand washing stations in all strategic areas to prevent spread of the virus by improving personal hygiene for all employees; 3. Conduct regular health checks for all employees; 4. Enforcement of Covid-19 free rules to all interested parties who enter the company area; 5. Perform isolation/closure in the room where the person concerned works and move work activities in that room to another place so as not to interfere with operational activities;



No.	Profil Risiko / Risk Profile	Pelaksanaan Mitigasi / Mitigation Measures	
		<ul style="list-style-type: none"> 6. Melakukan disinfektasi pada ruangan yang menjadi tempat bekerja pegawai tertular Covid-19; 7. Membuat larangan tidak menerima segala transaksi pelayanan/ nota dan lain-lain selain melalui system online; 8. Melakukan pemantauan kesehatan harian melalui aplikasi my pelindo; 9. Melakukan sosialisasi pencegahan COVID kepada seluruh pegawai by WEBINAR; 10. Pemberian sekat di meja kantin untuk mencegah adanya droplet ketika sedang makan di kantin Kantor. 	
4	Ketersediaan dan Keandalan Alat Penunjang Operasi Availability and Reliability of Operation Support Equipment	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengecekan rutin terhadap peralatan oleh petugas bagian alat / <i>daily check inspection</i>; 2. Pengecekan fasilitas oleh bagian pemeliharaan fasilitas / <i>daily check inspection</i>; 3. Koordinasi dengan petugas engineering untuk pembuatan jadwal pengecekan alat beserta checklist (<i>Daily check inspection</i>); 4. Monitoring pelaksanaan pengecekan alat agar sesuai dengan jadwal dan checklist yang dibuat; 5. Pelaksanaan <i>safety patrol</i> secara rutin; 6. Monitoring pelaksanaan perbaikan alat agar sesuai dengan target penyelesaian dan tidak menghambat kegiatan operasional serta menimbulkan insiden. 	<ul style="list-style-type: none"> 6. Disinfecting the room where employees work is infected with Covid-19; 7. Make a prohibition against accepting all service transactions/notes and others other than through the online system; 8. Carry out daily health monitoring through the my pelindo application; 9. Conducting socialization of COVID prevention to all employees by WEbinar; 10. Provision of bulkheads on the canteen table to prevent droplets when eating in the office canteen.
5	Pelanggaran Aturan dan Prosedur yang Mempengaruhi Reputasi Violation of Rules and Procedures Affecting Reputation	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan sistem manajemen pengendalian yang ada dalam setiap kebijakan maupun pedoman perusahaan yang dievaluasi secara berkala untuk meminimalkan celah dan kelalaian dalam melakukan proses bisnis perusahaan. 2. Melakukan sosialisasi kepada mitra kerja dan unit kerja internal terkait; 3. Pengawasan dan evaluasi dari manajemen; 4. Pembuatan MoU untuk setiap jenis pekerjaan dalam jangka waktu 2 tahun; 5. Evaluasi dan review peraturan aktual; 6. Penerapan sistem manajemen anti penyuapan. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Improvement of the control management system that exists in every company policy and guideline which is evaluated periodically to minimize gaps and omissions in carrying out the company's business processes. 2. Conducting dissemination to work partners and related internal work units; 3. Monitoring and evaluation from management; 4. Making an MoU for each type of work within a period of 2 years; 5. Evaluation and review of actual regulations; 6. Implementation of anti-bribery management system.



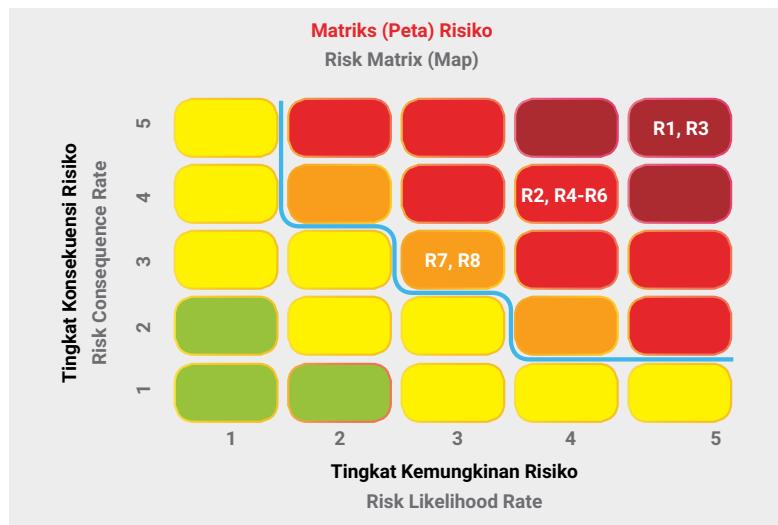
No.	Profil Risiko / Risk Profile	Pelaksanaan Mitigasi / Mitigation Measures	
6	Tingkat Persaingan Usaha yang Menyebabkan Menurunnya Market Share Level of Business Competition That Causes a Decline in Market Share	<ol style="list-style-type: none"> Customer visit untuk membina hubungan baik; Pendekatan kepada <i>customer existing</i> dan <i>new customer</i> untuk meningkatkan <i>market share</i>; Melakukan evaluasi kinerja pelayanan; Proaktif menangkap kebutuhan pengguna jasa untuk perbaikan pelayanan secara berkesinambungan. 	<ol style="list-style-type: none"> Customer visits to build good relations; Approach to existing and new customers to increase market share; Evaluating service performance; Proactively capture the needs of service users for continuous service improvement.
7	Realisasi Serapan Proyek Investasi Realization of Investment Project Absorption	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Direksi dalam lingkup Manajemen Proyek; Peraturan Direksi yang terkait dengan GCG; Penentuan kembali prioritas investasi disesuaikan dengan kondisi tertentu (dengan adanya pandemic); Memastikan pelaksanaan lelang telah memenuhi persyaratan pengadaan barang dan jasa; Menyusun rencana investasi yang dibarengi dengan kerjasama dengan mitra kerja; Menyusun risk assessment pekerjaan yang mengakomodir sosial dan lingkungan; Menyusun data pemenuhan perijinan untuk dilakukan pemenuhan sebelum proyek dijalankan. 	<ol style="list-style-type: none"> Regulation of the Board of Directors within the scope of Project Management; Board of Directors regulations related to GCG; Re-determination of investment priorities according to certain conditions (in the presence of a pandemic); Ensuring that the auction has met the requirements for the procurement of goods and services; Develop an investment plan that is accompanied by cooperation with partners; Prepare a job risk assessment that accommodates social and environmental conditions; Organize data on compliance with permits for compliance before the project is executed.
8	Gangguan Server dan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Information and Communication Technology (ICT) Server and Service Disruption	<ol style="list-style-type: none"> Pengimplementasian keamanan berlapis terhadap system; Pelaksanaan pemeliharaan terhadap infrastruktur sistem TI; Perencanaan implementasi perangkat teknologi; Peningkatan keahlian SDM pelaksana pekerjaan; Monitoring progres pada setiap tahapan proyek yang juga mencakup TIK; Penyusunan sistem prosedur secara manual yang disesuaikan dengan perubahan proses bisnis untuk backup plan. 	<ol style="list-style-type: none"> Implementation of layered security on the system; Implementation of maintenance on IT system infrastructure; Planning the implementation of technology tools; Increasing the expertise of human resources implementing the work; Monitoring progress at each stage of the project which also includes ICT; Preparation of a manual system of procedures adapted to changes in business processes for a backup plan.



Tingkat risiko dapat divisualisasikan melalui peta risiko atau matriks sebagai gambaran profil risiko dengan kisaran posisi konsekuensi dan kemungkinan kejadian dari risiko tersebut. Berikut adalah peta risiko sebelum dilakukan mitigasi:

Peta Risiko Sebelum Mitigasi

The level of risk can be visualized through a risk map or matrix as an overview of the risk profile with a range of consequences and possible occurrences of the risk. The following is a risk map before mitigation is carried out:

Risk Map Before Mitigation

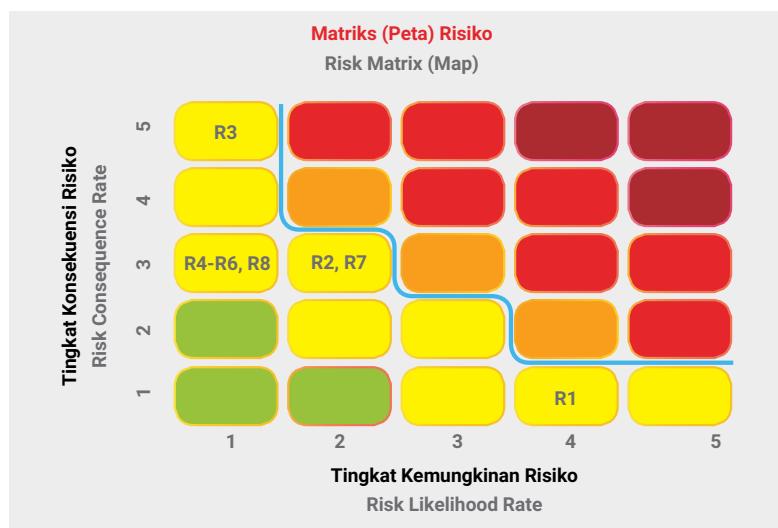
Risiko sangat tinggi / Very High Risk = 1

Risiko rendah / Low Risk = 0

Risiko tinggi / High Risk = 5

Risiko sangat rendah / Very Low Risk = 0

Risiko menengah / Middle Risk = 2

Peta Risiko Setelah Mitigasi**Risk Map After Mitigation**

Risiko sangat tinggi / Very High Risk = 0

Risiko rendah / Low Risk = 8

Risiko tinggi / High Risk = 0

Risiko sangat rendah / Very Low Risk = 0

Risiko menengah / Middle Risk = 0

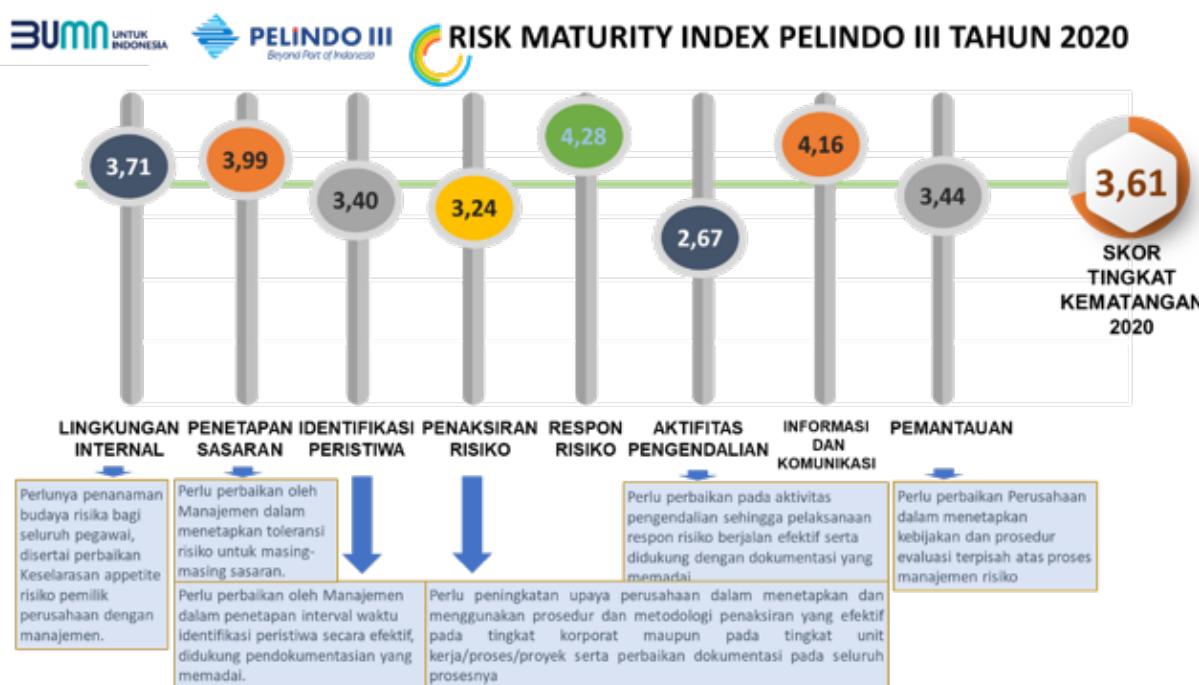


Review terhadap Sistem Manajemen Risiko

Manajemen senantiasa berupaya melakukan evaluasi dan *review* terhadap efektivitas Sistem Manajemen Risiko secara berkala dengan memperhatikan kriteria dan pertimbangan yang berlaku. Adapun penilaian dan evaluasi Sistem Manajemen Risiko di tahun 2020 dilakukan melalui mekanisme *self-assessment* dengan menggunakan *Risk Maturity Index* yang dijabarkan dalam bagan sebagai berikut:

Review of the Risk Management System

Management always strives to evaluate and review the effectiveness of the Risk Management System on a regular basis by taking into account the applicable criteria and considerations. The assessment and evaluation of the Risk Management System in 2020 is carried out through a self-assessment mechanism using the Risk Maturity Index which is described in the following chart:



Budaya Manajemen Risiko

Upaya implementasi Manajemen Risiko yang berkelanjutan, menyeluruh, dan berjalan secara komprehensif dikukuhkan dengan pengembangan kualitas pelaksanaan secara bertahap. Salah satunya adalah membangun budaya sadar risiko bagi seluruh insan Perseroan secara konsisten di lingkungan Pelindo III. Langkah tersebut turut diperkuat dengan menekankan pada pentingnya pemeliharaan peran aktif pemilik risiko dalam menjalankan proses manajemen risiko pada setiap ruang lingkup pekerjaan yang dijalankan.

Risk Management Culture

Efforts to implement Risk Management that are sustainable, comprehensive, and run comprehensively are confirmed by the gradual development of the quality of implementation. One of them is creating a risk-aware culture for all Company personnel consistently within Pelindo III. This step was also strengthened by emphasizing the importance of maintaining the active role of risk owners in carrying out the risk management process in every scope of work carried out.



Selain interaksi antara unit manajemen risiko dengan *risk owner* di lingkungan perusahaan secara rutin dalam proses manajemen risiko, terdapat upaya peningkatan utama untuk membangun budaya manajemen risiko khususnya dalam konteks penerapan RKAP berbasis risiko (*risk based budgeting*):

1. Sosialisasi *risk based budgeting* kepada manajemen perusahaan
2. Sosialisasi *risk based budgeting* kepada Direksi termasuk peninjauan selera dan toleransi risiko
3. Sosialisasi, diskusi, dan pendampingan implementasi *risk based budgeting* kepada *risk owner* berdasarkan kriteria risiko

KODE ETIK

Dasar Kebijakan

Pedoman etika dan perilaku Pelindo III sebagai Kode Etik telah disempurnakan di tahun 2017 dan telah disahkan melalui Keputusan Bersama antara Dewan Komisaris, Direksi, dan Serikat Pekerja Pelindo III No. HK.202/09/DK.P.III/2017; HK.03/14/P.III-2017; 36/DP.SPPI/IX-2017 tanggal 25 September 2017 tentang Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) di Lingkungan Pelindo III yang merupakan penyempurnaan dari pedoman etika dan perilaku sebelumnya.

Pedoman etika dan perilaku ini menjadi bentuk penjabaran dari penerapan prinsip-prinsip GCG di Perseroan (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran), yaitu:

1. Komitmen dan tata nilai Perseroan;
2. Komitmen Perseroan dan etika bisnis;
3. Perlindungan aset Perseroan, benturan kepentingan, gratifikasi, diskriminasi, *benchmark*, media sosial, korupsi, dan tindak pidana pencucian uang;
4. Kerahasiaan dan keterbukaan informasi;
5. Pelanggaran etika dan penanganannya; dan
6. Penerapan dan penegakan.

Pernyataan Pemberlakuan Kode Etik Secara Menyeluruh

Penyusunan Kode Etik Perseroan dilakukan bersama dengan Insan Pelindo III dan isi yang termuat di dalamnya menjamin penyelenggaraan aktivitas usaha terlaksana secara harmonis dan memastikan seluruh

In addition to routine interaction between the risk management unit and the risk owner within the company's risk management process, there are major improvement efforts to build a risk management culture, especially in the context of implementing risk-based budgeting:

1. Dissemination of risk-based budgeting to company management
2. Dissemination of risk-based budgeting to the Board of Directors including review of appetite and risk tolerance
3. Dissemination, discussion, and assistance in implementing risk-based budgeting to risk owners based on risk criteria

CODE OF CONDUCT

Policy Foundation

Pelindo III's Code of Conduct was improved in 2017 and has been ratified through a Joint Decree of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Pelindo III Labor Union No. HK.202/09/DK.P.III/2017; HK.03/14/P.III-2017; 36/DP.SPPI/IX-2017 dated September 25, 2017 regarding the Code of Conduct within Pelindo III which is an improvement from the previous code of conduct.

This code of conduct is an elaboration of the application of GCG principles in the Company (transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness), namely:

1. Commitment and Corporate Value.
2. Corporate commitment and business ethics.
3. Protection of the Company's assets, conflict of interest, gratification, discrimination, benchmark, social media, corruption and money laundering crime.
4. Information confidentiality and disclosure.
5. Ethics violation and its handling.
6. Implementation and enforcement.

Statement of Comprehensive Code of Conduct Enforcement

The preparation of the Company's Code of Conduct is carried out together with Pelindo III personnel and its content ensures that the implementation of business activities is carried out in harmony and ensures that



elemen yang terkait telah terpenuhi hak asasinya tanpa mengesampingkan pemenuhan aspek bisnis. *Code of Conduct* ini diberlakukan dan diterapkan secara menyeluruh, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, hingga seluruh karyawan Perseroan. Setiap insan Pelindo III tanpa terkecuali diwajibkan mematuhi dan menerapkannya dalam menjalankan fungsinya di Perseroan.

Isi dan Ruang Lingkup Kode Etik di Lingkungan Perseroan

Code of Conduct menjadi suatu standar perilaku yang dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh insan Pelindo III dengan isinya memuat kebijakan terkait nilai-nilai etika untuk dapat diterapkan. *Code of Conduct* secara garis besar berlaku untuk seluruh insan Perseroan, namun para pihak eksternal yang memiliki hubungan dengan Perseroan pun juga diwajibkan untuk mengikuti berbagai ketentuan dan kebijakan yang diatur dalam *Code of Conduct*, sehingga hubungan dapat terjalin baik dan harmonis dan menunjang tercapainya tujuan bersama. Perseroan telah menyediakan *Code of Conduct* di situs web Perseroan dan dapat diunduh oleh seluruh pihak terkait, baik oleh para Pemangku Kepentingan maupun seluruh insan Pelindo III.

Uraian terkait isi dan ruang lingkup *Code of Conduct* yang diterapkan di lingkungan Perseroan adalah sebagai berikut:

Hubungan dengan Pemegang Saham

- a. Perseroan akan memperlakukan Pemegang Saham sesuai Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.
- b. Perseroan akan memberikan kontribusi yang optimal dan berkesinambungan bagi Pemegang Saham, dan selalu berusaha agar terjadi pertumbuhan yang berkelanjutan.
- c. Penetapan dividen dilakukan oleh Pemegang Saham dalam RUPS. Pengusulan penetapan dividen oleh Perseroan didasarkan pada kepentingan Perseroan dengan melihat berbagai hal seperti kelangsungan usaha, strategi yang akan dan sedang dijalankan, serta rencana investasi.

Hubungan dengan Pengguna Jasa

Perseroan berkomitmen untuk memberikan pelayanan berkualitas dengan mutu terbaik kepada para pengguna jasa yang direalisasikan dalam program Pelayanan Prima.

all related elements have their human rights fulfilled without compromising the fulfillment of business aspects. This *Code of Conduct* is enforced and implemented comprehensively, starting from the Board of Commissioners, Board of Directors, to all employees of the Company. Every Pelindo III employee without exception, is required to comply with and implement it in carrying out their functions in the Company.

Content and Scope of the Code of Conduct within the Company

The *Code of Conduct* serves as a standard of behavior that is used as a guideline and reference for all Pelindo III personnel whose contents contain policies related to ethical values. The *Code of Conduct*, broadly speaking, applies to all employees of the Company, but external parties who have a relationship with the Company are also required to follow the various provisions and policies stipulated in the *Code of Conduct*, so that relationships can be established and harmonious and support the achievement of common goals. The Company has provided a *Code of Conduct* on the Company's website and can be downloaded by all relevant parties, both Stakeholders and all Pelindo III personnel.

The description related to the content and scope of the *Code of Conduct* applied within the Company is as follows:

Relationships with Shareholders

- a. The Company shall treat Shareholders under the prevailing Laws and Regulations.
- b. The Company shall provide an optimum and continuous contribution for Shareholders and always strive for continuous growth.
- c. Dividends is determined by the Shareholders in the GMS. Suggestion on dividend distribution by the Company is based on the interest of the Company by taking into account various matters such as business continuity, current and future strategy, as well as an investment plan.

Relationships with Customers

The Company is committed to providing quality services with the best quality to service users which is realized in the Pelayanan Prima program. In addition, the Company



Selain itu, Perseroan juga memastikan bahwa berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan melalui langkah pemeliharaan, perbaikan, serta penataan berbagai fasilitas pelabuhan yang dimiliki telah dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada skala prioritas, sehingga fasilitas maupun peralatan pelabuhan dapat terjamin ketersediaannya dan kualitasnya telah terpenuhi.

Guna memelihara dan meningkatkan pelayanannya, secara rutin Perseroan menyelenggarakan pertemuan dengan para pengguna jasa dan selanjutnya melaksanakan *monitoring* dari hasil pertemuan tersebut, sehingga Perseroan dapat mengetahui kebutuhan pengguna jasa dan Perseroan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan.

Perseroan melakukan beberapa pendekatan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan terbaik dan berkualitas kepada para pengguna jasa, antara lain seperti:

- a. Perseroan melakukan sertifikasi ISO 9001 sebagai bentuk komitmen dalam hal standarisasi mutu dan sistem pelayanan jasa kepelabuhanan.
- b. Perseroan melakukan sosialisasi kebijakan pelayanan, aturan, dan fasilitas pelabuhan bagi pengguna jasa pelabuhan.
- c. Perseroan memberikan jaminan layanan secara umum yang dinyatakan dalam *service level guarantee* di setiap unit usaha atau layanan.
- d. Perseroan memberikan jaminan pelayanan kepada pengguna jasa tertentu yang dituangkan dalam bentuk perjanjian layanan kegiatan (*service level agreement*) dengan masing-masing pengguna jasa.
- e. Perseroan menjadikan Standar Kinerja Operasional Pelabuhan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang (regulator) sebagai pedoman minimal terhadap pencapaian kinerja operasional pelabuhan.
- f. Perseroan melakukan survei kepuasan pelanggan secara periodik berkaitan dengan pelayanan jasa dan fasilitas sebagai wujud dari pelayanan prima untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pelayanan kepada pengguna jasa.
- g. Perseroan melakukan pelayanan dan menindaklanjuti setiap keluhan pengguna jasa dengan cepat, tepat, dan tanpa diskriminasi.

also ensures that various efforts to improve service quality through maintenance, repair, and arrangement of various port facilities owned have been carried out in stages with reference to the priority scale, so that the availability of port facilities and equipment and their quality has been met.

In order to maintain and improve its services, the Company regularly holds meetings with service users and subsequently carries out monitoring of the results of these meetings, so that the Company can find out the needs of service users and the Company can provide services according to their needs.

The Company takes several approaches as an effort to provide the best and quality services to service users, including:

- a. The Company performed ISO 9001 certification as a form of commitment in terms of quality standardisation and port service system.
- b. The Company conducted dissemination of port service policies, regulations, and facilities for port service users.
- c. The Company provided general service assurance stated in service level guarantee in each business unit or service.
- d. The Company provided service assurance to certain service users as stipulated in the form of service level agreement with each service user.
- e. The Company referred to Port Operational Performance Standard issued by regulators as guidelines in the minimum achievement of port operational performance.
- f. The Company periodically conducted a customer satisfaction survey concerning service and facility provision as the realisation of the first-rate service to evaluate and improve service performance to services users.
- g. The Company provided services and followed up each complaint of service users in a quickly, rapidly, and without discrimination.



- h. Perseroan melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap fasilitas pelabuhan dan fasilitas umum yang ada di pelabuhan sesuai dengan kemampuan Perseroan.
- i. Perseroan melakukan peningkatan keamanan di pelabuhan dengan mengimplementasikan ISPS Code (*International Ship and Port Facility Security*) bagi pelabuhan tertentu secara bertahap.

Hubungan dengan Pemasok

Hubungan baik dengan para pemasok menjadi bagian dari perhatian Perseroan untuk senantiasa diciptakan dan dijaga. Hal tersebut dilakukan dengan dasar keadilan dan kesetaraan dengan mengacu pada penilaian wajar yang menggunakan dasar berupa ukuran kompetensi, kualifikasi, kualitas produk, harga, manfaat, waktu pengiriman, serta pelayanan yang diberikan selama proses pengadaan maupun purna jual.

Perseroan menjalin dan memelihara hubungan baik dengan pemasok melalui pengelolaan yang diwujudkan melalui:

- a. Perseroan berkomitmen untuk senantiasa menjalankan sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan, jelas, dan objektif guna menjamin kualitas, kuantitas, maupun harga barang dan jasa yang diperoleh dari pemasok.
- b. Perseroan berkomitmen untuk senantiasa melakukan kendali terhadap independensi dari Pemangku Fungsi atau Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Perseroan sehingga dapat menjamin persaingan yang sehat dan proses pengadaan barang dan jasa yang baik tanpa intervensi.
- c. Perseroan berkomitmen untuk senantiasa membuat kontrak kerja atau perjanjian atas semua pesanan barang/pekerjaan dengan mencantumkan secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak serta sanksi untuk menghindari terjadinya konflik.
- d. Perseroan berkomitmen untuk senantiasa mempertahankan pemasok yang dapat menyediakan barang dan jasa sesuai kewajiban masing-masing sebagai mitra bisnis dan menghormati hak-hak pemasok dengan selalu berkomitmen terhadap perjanjian yang disepakati.

- h. The Company performed maintenance and repair on port facilities and public port facilities to their best ability.
- i. The Company gradually improved the security in the port through the implementation of ISPS Code (*International Ship and Port Facility Security*) for certain ports.

Relationships with Suppliers

Good relations with suppliers are part of the Company's attention that must always be upheld and maintained. This is done on the basis of fairness and equality by referring to a fair assessment that uses the basis of a measure of competence, qualifications, product quality, price, benefits, delivery time, and services provided during the procurement and after-sales process.

The Company establishes and maintains good relations with suppliers through management which is realized through:

- a. The Company is committed to always run transparent, clear, and objective goods and services procurement system to assure quality, quantity, and price of the goods and services obtained from suppliers.
- b. The Company is committed to always control the independence of the function holder or Goods and Services Procurement Committee of the Company to assure healthy competition and proper goods and services procurement without any intervention.
- c. The Company is committed to always make work contract or agreement on goods/services orders by stating the rights and obligations as well as the sanction of each order in a clear manner to avoid any conflict.
- d. The Company is committed to always maintain suppliers that can provide goods and services following the obligations of each business partner and to respect the rights of suppliers by always committed to the agreement.



Hubungan dengan Kreditor

Guna menunjang pelaksanaan aktivitas bisnisnya agar dapat berjalan secara optimal, Perseroan turut memanfaatkan sumber dana eksternal, baik oleh pihak perbankan maupun pihak sumber pembiayaan lainnya. Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen untuk senantiasa menjaga hak dan kepentingan kreditur yang bekerja sama dengan Perseroan melalui hal-hal seperti:

- a. Pemenuhan kewajiban kepada kreditur sesuai perjanjian.
- b. Pengungkapan informasi yang diperlukan secara transparan, akurat, dan tepat waktu, baik pada saat permintaan maupun penggunaan pinjaman sesuai isi perjanjian.

Hubungan dengan Aparatur Pemerintah

Seluruh upaya pengembangan dan pemeliharaan hubungan baik serta komunikasi secara efektif dengan setiap Aparatur yang berwenang pada bidang operasi Perseroan senantiasa dilakukan oleh Perseroan dengan tidak keluar dari batas toleransi yang diperbolehkan oleh hukum. Hubungan dengan setiap Aparatur Pemerintah harus dipelihara dengan baik sebagai hubungan yang memiliki sifat kemitraan.

Perseroan melarang tindakan-tindakan seperti pembayaran secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan kepada Aparatur di luar kapasitas resmi serta segala hal yang bertentangan dengan ketentuan dan hukum yang berlaku maupun yang bertentangan dengan praktik bisnis yang sehat. Pembayaran tidak langsung mencakup penggunaan sarana milik Perseroan, layanan Perseroan, maupun pemanfaatan Pekerja Perseroan. Larangan ini berlaku untuk pembayaran serta pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh pihak terkait, baik oleh Perseroan maupun agen atau wakil-wakil Perseroan yang melakukan pembayaran atas nama Perseroan. Di samping itu, Perseroan juga tidak melakukan pembiayaan terhadap keperluan pengeluaran dari Kementerian dan Instansi Pemerintah.

Hubungan dengan Pekerja dan Hubungan Industrial

Bagi Pelindo III, SDM memegang peranan penting dalam menunjang pergerakan roda bisnis Perseroan sehingga hubungan yang baik dengan para pekerja menjadi salah satu perhatian penting Perseroan. Untuk itu, Perseroan

Relationships with Creditors

In order to support the optimum implementation of its business activities, the Company also utilizes external funding sources, both by banks and other sources of financing. Therefore, the Company is committed to always safeguarding the rights and interests of creditors who cooperate with the Company through things such as:

- a. Fulfilment of obligations to creditors following the agreement.
- b. Disclosure of required information transparently, accurately, and timely, both during requesting and using the loans following the content of the agreement.

Relationships with Government Apparatus

The Company always put on their best efforts to develop and maintain good relations as well as to communicate effectively with each authorized Apparatus in the Company's field of operation without exceeding the tolerance limits allowed by law. Relationships with each Government Apparatus must be maintained properly as a relationship that has the nature of a partnership.

The Company prohibits actions such as direct or indirect payments made to the Apparatus outside of their official capacity as well as anything that is contrary to applicable laws and regulations as well as those that are contrary to sound business practices. Indirect payments include the use of the Company's facilities, the Company's services, as well as the utilization of the Company's employees. This prohibition applies to payments and expenses made by all related parties, both by the Company and agents or representatives of the Company who make payments on behalf of the Company. In addition, the Company also does not finance the expenditure needs of the Ministries and Government Agencies.

Relationships with Employees and Industrial Relations

Pelindo III considers HR to have an important role in supporting the development of the Company's business, thus, good relations with employees are one of the Company's main concerns. Therefore, the Company is



berkomitmen untuk senantiasa menjalin hubungan kemitraan yang baik dan harmonis dengan seluruh Insan Pelindo III agar dapat mencapai tujuan bersama, terutama di tengah perkembangan bisnis yang terus terjadi secara dinamis. Berangkat dari hal tersebut, Perseroan senantiasa menempatkan komitmennya untuk:

- a. Memperlakukan Pekerja secara adil dan bebas dari bias karena perbedaan suku, asal-usul, jenis kelamin, agama, dan asal kelahiran serta hal-hal yang tidak terkait dengan kinerja.
- b. Memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi Pekerja.
- c. Memberikan kesempatan yang setara/adil kepada seluruh Pekerja dalam pengembangan karier dan promosi (Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. 16/2012).
- d. Melindungi Pekerja dari segala bentuk kemungkinan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja.
- e. Memberikan hak kepada Pekerja untuk berserikat sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.
- f. Memberikan kesempatan kepada Pekerja untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, dan pengembangan lebih lanjut yang sejalan dengan kompetensi dan kebutuhan Perseroan.
- g. Mengusahakan agar skema renumerasi yang diterima pekerja, secara umum mengikuti peraturan yang berlaku.
- h. Menghargai Pekerja sebagai aset utama Perseroan.
- i. Menerapkan sistem *reward* dan *punishment* yang mendorong semangat kerja para Pekerja.
- j. Memberikan kebebasan kepada Pekerja untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi dengan tata cara yang beretika dan tidak bertentangan dengan peraturan Perseroan.

Posisi penting yang dimiliki pegawai mendorong Perseroan untuk senantiasa mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja dari setiap pegawai yang ada. Hal tersebut turut dipicu peran penting dari aspek pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja sebagai aspek pendukung keberlangsungan bisnis Perseroan.

committed to always establishing good and harmonious partnership relationships with all Pelindo III personnel in order to achieve common goals, especially in the midst of dynamic business developments. Based on this, the Company always places its commitment to:

- a. Treat Employee fairly and free from any bias due to the difference in race, origin, gender, religion, and birthplace as well other matter unrelated to performance.
- b. Provide good and safe working conditions for Employees.
- c. Provide equal/fair opportunity to all Employees in career development and promotion. (Decree of the Secretary of the Minister of SOE No.16/2012).
- d. Protect Employees from any possibility that endangers the safety and health in the workplace.
- e. Provide the right to Employees for forming a union under the prevailing Laws and Regulations.
- f. Provide opportunities to Employees to participate in education, training, and further development that are in line with the competence and needs of the Company.
- g. Manage remuneration scheme to be accepted by employees in general by following the prevailing regulations.
- h. Appreciate Employees as the main asset of the company.
- i. Apply reward and punishment system that encourages the spirit at work of Employees.
- j. Provide freedom to Employees for providing opinions and aspirations in the ethical procedure and not in violation of the regulation of the Company.

The important positions held by employees encourage the Company to always prioritize the occupational safety and health of every existing employee. This is also triggered by the important role of the management of occupational health and safety as a supporting aspect of the Company's business continuity.



Untuk itu, pengambilan langkah dan tindakan yang tepat senantiasa dilakukan oleh Perseroan guna menghindari adanya kecelakaan serta gangguan kesehatan di lingkungan kerja. Fokus Perseroan untuk memastikan terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan kondusif diwujudkan melalui upaya seperti memastikan aset serta lokasi usaha dan fasilitas yang dimiliki Perseroan seluruhnya telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku.

Guna menunjang pencapaian tujuan dari pemenuhan aspek kesehatan dan keselamatan kerja, Perseroan berkomitmen untuk:

- a. Membangun Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) sebagai landasan kepatuhan yang sejalan dengan hukum dan peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
- b. Menetapkan dan mengkaji sasaran serta melakukan penilaian dan pelaporan kinerja SMK3.
- c. Memberikan dukungan penuh terhadap penerapan SMK3 di lingkungan Perseroan dalam upaya memberikan perlindungan optimal kepada Pegawai dari gangguan dan hal-hal yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan.
- d. Memastikan pemahaman yang lebih baik oleh Pegawai dan mitra kerja mengenai masalah-masalah kesehatan dan keselamatan kerja terkait dengan aktivitas Perseroan.
- e. Mengupayakan perbaikan berkelanjutan atas berbagai aspek yang berkaitan dengan SMK3.
- f. Menempatkan SMK3 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKAP dan Laporan Tahunan.
- g. Menyertakan partisipasi Pegawai sebagai bagian dari upaya peningkatan pelaksanaan SMK3.

Hubungan dengan Pesaing

Sebagai sebuah badan usaha, Perseroan senantiasa mengedepankan iklim bisnis yang sehat dengan menjunjung tinggi hubungan yang baik dengan industri sejenis. Hal tersebut dilakukan melalui:

- a. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha (Undang-Undang No. 5/1999).

Therefore, the Company takes appropriate steps and actions to avoid accidents and health problems in the work environment. The Company's focus on ensuring the creation of a safe, healthy and conducive work environment is realized through efforts such as ensuring that all assets and business locations and facilities owned by the Company comply with the applicable laws and regulations relating to occupational health and safety.

In order to support the achievement of the objectives of fulfilling occupational health and safety aspects, the Company is committed to:

- a. Develop Occupational Health and Safety Management System (SMK3) as the basis for compliance that is in line with the laws and regulations of Occupational Health and Safety.
- b. Define and review target, conduct performance, and reporting of SMK3.
- c. Provide full support on the implementation of SMK3 within the Company in the effort to provide optimum protection to Employees from any disruption and matters that threaten life safety and health.
- d. Ensure a better understanding by Employees and business partners on occupational health and safety concerning the activities of the Company.
- e. Strive for sustainable improvement on various aspects related to SMK3.
- f. Place SMK3 as an inseparable part of RKAP and Annual Report.
- g. Include Employee participation as a part of SMK3 improvement implementation.

Relationships with Competitors

As a business entity, the Company always prioritizes a healthy business climate by upholding good relations with similar industries. This is done through:

- a. Realising conducive business climate through the arrangement of business competition to assure the equal business opportunities for all business players; (Law No.5/1999).



- b. Menghindari dan mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Undang-Undang No. 5/1999).
- c. Saling menghormati dan menghargai hubungan dengan pesaing.

Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan

Hubungan dengan masyarakat, terutama yang berada di dalam wilayah operasional senantiasa diperhatikan, dijalin, dan dipelihara dengan baik karena dengan perannya yang besar dalam keberhasilan Perseroan secara jangka panjang.

Perseroan menjaga hubungan baik dengan masyarakat melalui interaksi serta dukungan dan bantuan dalam pembangunan dan pengembangan masyarakat sekitar dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip berikut, antara lain:

- a. Saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan sejauh mungkin meminimalkan potensi konflik dengan masyarakat sekitar.
- b. Menjalin kemitraan secara efektif berdasarkan prinsip hidup saling berdampingan dan saling menguntungkan.
- c. Senantiasa mampu beradaptasi dengan perkembangan nilai-nilai budaya luhur masyarakat sekitar.
- d. Perseroan tetap berpartisipasi aktif dalam pengembangan masyarakat khususnya yang berdekatan dengan pelabuhan. Pelaksanaannya melibatkan seluruh unsur mulai dari warga masyarakat, Pemerintah, serta lembaga terkait lainnya.
- e. Perseroan senantiasa memperhitungkan masalah dan dampak lingkungan dari seluruh aktivitas Perseroan, serta melakukan pencegahan atas dampak negatif lingkungan akibat aktivitas operasional Perseroan (Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. 16/2012).
- f. Perseroan senantiasa berupaya untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai modal bagi tercapainya keberhasilan Perusahaan dalam jangka panjang.

Berlandaskan prinsip kemitraan, Perseroan didorong untuk secara aktif menjalin kerja sama dengan masyarakat sekitar, Pemerintah Pusat dan Daerah

- b. Avoiding and preventing monopoly practice and/or unhealthy business competition; (Law No.5/1999).
- c. Mutual respect and appreciation with competitors.

Relationships with the Community and Environment

Relationships with the community, especially those in the operational area, are always considered, developed, and maintained properly because of their important role in the long-term success of the Company.

The Company maintains good relations with the community through interaction as well as support and assistance in the development and development of the surrounding community based on the following principles, among others:

- a. Mutual respect to the rights and obligations of respective parties, through minimising any conflict potential with the surrounding community.
- b. Have an effective partnership based on mutual benefits and living side by side principles.
- c. Always able to adapt to the development of cultural values of the surrounding community.
- d. The Company always participates in the development of the community around the port. The implementation involves all elements, starting from the community, Government, as well as other relevant institutions.
- e. The Company always calculates issues and environmental impact from the Company's activities as well as performs prevention on environmental negative impact due to the operational activities of the Company. (Decree of the Secretary of the Minister of SOE No. 16/2012).
- f. The Company strives to maintain environmental sustainability as a capital for achieving the success of the Company in the long term.

Based on the principle of partnership, the Company is encouraged to actively cooperate with the surrounding community, the Central and Local Governments, as well



Setempat, serta berbagai pihak terkait lainnya sehingga mampu mencapai komitmen bersama yang berdasarkan sikap saling percaya dan keterbukaan satu sama lain. Kerja sama secara baik dengan organisasi serta lembaga masyarakat lain dilakukan oleh Perseroan untuk menyusun dan menerapkan kebijakan kemitraan dengan masyarakat, contohnya dilakukan dengan berpartisipasi dalam dialog dengan lembaga-lembaga tersebut sehingga diharapkan dapat memformulasikan secara baik kebijakan yang lebih rasional, efektif, dan efisien. Perseroan sangat menghargai setiap aktivitas kemitraan yang dilakukan dan berkontribusi besar bagi kehidupan masyarakat dan juga meningkatkan nilai Perusahaan bagi masyarakat.

Hubungan Atasan terhadap Bawahan

- a. Memiliki dedikasi, semangat, dan disiplin yang tinggi dalam bekerja;
- b. Menunjukkan tingkah laku dan sikap yang baik terhadap atasan;
- c. Melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh atasan secara jujur, profesional, dan bertanggung jawab;
- d. Memberikan saran dan pendapat positif kepada atasan; dan
- e. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan agar dapat menjalankan tugas dengan lebih baik.

Hubungan dengan Media

Perseroan memiliki hubungan dengan media karena adanya aktivitas publikasi kegiatan seremonial maupun operasional yang dilakukan Perseroan di media massa (cetak dan elektronik) serta media sosial yang dilakukan secara aktif. Perseroan memegang teguh prinsip penyampaian informasi bisnis usaha yang berlandaskan atas transparansi dan keterbukaan sesuai dengan kode etik jurnalistik dan peraturan yang berlaku.

Praktik penyelenggaraan penyampaian informasi tersebut berupa:

- a. Penyampaian informasi dilakukan secara relevan dan berimbang kepada media massa (cetak dan elektronik) maupun media sosial dengan memperhatikan platform yang telah ditetapkan oleh manajemen.
- b. Pemeliharaan hubungan baik dengan media massa (cetak dan elektronik) sehingga tercipta kerja sama

as various other related parties so that they are able to achieve joint commitments based on mutual trust and openness to one another. Good cooperation with other community organizations and institutions is carried out by the Company to formulate and implement partnership policies with the community, for example by participating in dialogue with these institutions so that it is expected to formulate more rational, effective, and efficient policies. The Company greatly appreciates every partnership activity that is carried out and contributes greatly to people's lives and also increases the Company's value to society.

Relationships of Supervisors with Subordinates

- a. Having high dedication, spirit and discipline in working;
- b. Demonstrating good behaviour and attitude to the superiors;
- c. Performing the duties mandated by superiors in an honest, professional, and responsible manner;
- d. Providing positive suggestion and opinion to superiors; and
- e. Developing and improving skills and knowledge to perform duties in a better manner.

Relationships with Media

The Company has a relationship with the media because of the publication of ceremonial and operational activities carried out by the Company in the mass media (print and electronic) and social media which is carried out actively. The Company adheres to the principle of delivering business ventures information based on the principles of transparency and openness in accordance with the journalistic code of conduct and applicable regulations.

The practice of delivering the information is in the form of:

- a. The information delivery is carried out in a relevant and impartial manner to mass media (printed and electronic) and social media by considering the platform set by the management.
- b. Maintaining a good relationship with mass media (printed and electronic), generating conducive and



yang kondusif dan bermanfaat bagi pembentukan citra positif Perusahaan.

- c. Penanganan keluhan dan kritik konstruktif yang disampaikan pada seluruh kanal informasi, yakni media masa (cetak dan elektronik) dan media sosial, dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek risiko dan biaya.
- d. Melibatkan jurnalis media masa (cetak dan elektronik) untuk meliput kegiatan maupun proses bisnis Perusahaan.

Hubungan dengan Serikat Pekerja

Perseroan berupaya untuk menjaga hubungan baik dengan serikat pekerja dengan menempatkan Serikat Pekerja sebagai mitra Perseroan untuk bersama mencapai tujuan guna menghadirkan hubungan industrial yang dinamis dan tetap harmonis.

Hubungan dengan Anak Perusahaan

Anak Perusahaan adalah entitas yang kepemilikan sahamnya secara mayoritas dimiliki oleh Pelindo III, sehingga hubungan dengan anak perusahaan senantiasa dijaga dengan berlandaskan pada:

- a. Peraturan yang berlaku di Perseroan, dan
- b. Dukungan dan kepercayaan terhadap Anak Perusahaan dalam menjalankan dan mengembangkan aktivitas Perseroan secara mandiri.

Hubungan dengan Pemerintah sebagai Regulator

Seluruh pelaksanaan aktivitas bisnis usaha senantiasa dilakukan dengan mengutamakan kepatuhan pada peraturan yang berlaku serta memenuhi kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh pemerintah sebagai Regulator, sehingga turut menunjang terciptanya perekonomian bangsa yang semakin baik. Hubungan dengan pemerintah tersebut dijalankan dengan berlandaskan pada prinsip kewajaran, transparan, dan profesional, baik dalam aspek penyampaian berbagai laporan terkait maupun perkembangan Perseroan dengan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip GCG.

Hubungan dengan Legislatif

Hubungan dengan legislatif terjalin dengan baik melalui penerimaan berbagai masukan hingga informasi yang berguna bagi kepentingan Perseroan maupun lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

beneficial cooperation to form a positive image of the Company.

- c. Handling of complaints and constructive criticism addressed to the entire information channels, namely mass media (printed and electronic) and social media, conducted with due regard of risk and cost aspects.
- d. Involving journalists of mass media (printed and electronic) to cover activities and business process of the Company.

Relationships with the Labour Union

The Company strives to maintain good relations with Labor Unions by placing them as partners of the Company to jointly achieve the goal of presenting dynamic and harmonious industrial relations.

Relationships with Subsidiaries

Subsidiaries are entities whose share ownership is majority owned by Pelindo III, so that the relationship with subsidiaries is always maintained based on:

- a. Regulations applied in the Company, and
- b. Support and trust to subsidiaries in performing and developing activities of the company independently.

Relationships with Government as Regulator

All business activities are always carried out by prioritizing compliance with applicable regulations and fulfilling the obligations given by the government as a regulator, so as to contribute in improving the nation's economy. The relationship with the government is carried out based on the principles of fairness, transparency, and professionalism, both in the aspect of submitting various related reports and the development of the Company by always prioritizing GCG principles.

Relationships with Legislative

Relations with the legislature are well established through receiving various inputs to information that is useful for the interests of the Company and the environment as stipulated in the applicable regulations.



Hubungan dengan Yudikatif

Perseroan senantiasa mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan di bidang hukum yang turut diwujudkan dengan menjalin kerja sama yang baik dengan pihak Penegak Hukum sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga aktivitas bisnis yang dijalankan dapat terus berjalan sesuai dengan standar operasional dan tidak keluar dari koridor hukum.

Hubungan dengan Investor dan Lembaga Keuangan

Dalam melakukannya praktik kerjasama dengan pihak investor dan lembaga keuangan, Perseroan senantiasa berfokus pada upaya pencapaian tujuan untuk membangun dan mengembangkan kualitas kinerja Perseroan. Informasi terkait kondisi Perseroan disampaikan secara terbuka kepada pihak investor dan Lembaga Keuangan yang telah diseleksi secara baik dan resmi serta sesuai dengan yang telah dijanjikan.

Hubungan baik tersebut turut dijaga oleh Perseroan dengan menjunjung itikad baik pada proses pengembalian pinjaman atau bantuan yang telah diberikan demi keuntungan bersama dari seluruh pihak tanpa terciptanya benturan kepentingan dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hubungan dengan Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi

Masa depan pendidikan Indonesia turut menjadi bagian perhatian Perseroan melalui langkah kerja dengan perguruan tinggi guna menjaga kualitas dunia pendidikan serta meningkatkan daya mutu siswa. Hal tersebut direalisasikan melalui penyampaian informasi terkini terkait perkembangan Perseroan serta memberi dukungan dan bantuan pada kegiatan-kegiatan yang menunjang pendidikan.

Hubungan dengan Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan (k3) serta Lingkungan Kerja

Posisi SDM sebagai aset penting menjadi poin penting bagi Perseroan untuk mengedepankan pemenuhan K3 sebagai prioritas Perseroan dalam seluruh aktivitas operasional yang dijalankan. Perseroan memastikan lingkungan kerja telah berada dalam kondisi yang mendukung dengan terpenuhinya aspek aman, sehat, dan bersih serta memastikan peralatan dan perlengkapan

Relationships with Judiciary

The Company always prioritizes compliance with regulations and procedures in the legal field which is also realized by establishing good cooperation with Law Enforcement parties in accordance with applicable regulations, so that business activities carried out can continue to run according to operational standards and do not go out of the legal corridor.

Relationships with Investors and Financial Institutions

In practicing cooperation with investors and financial institutions, the Company always focuses on efforts to achieve goals to build and develop the quality of the Company's performance. Information related to the condition of the Company is conveyed openly to investors and financial institutions that have been properly and officially selected and in accordance with what has been promised.

This good relationship is also maintained by the Company by upholding good faith in the process of returning loans or assistance that has been provided for the mutual benefit of all parties without creating a conflict of interest and carried out in accordance with the applicable laws and regulations.

Relationships with Research Institutions and Universities

The future of Indonesian education is also part of the Company's attention through working with universities to maintain the quality of education and improve the quality of students. This is realized through the delivery of the latest information regarding the development of the Company as well as providing support and assistance in activities that support education.

Relationships with Health, Safety and Security (HSE) and Working Environment

The position of HR as an important asset is an important point for the Company to prioritize the fulfillment of OHS as the Company's priority in all operational activities. The Company ensures that the work environment is in a supportive condition with the fulfillment of safe, healthy, and clean aspects and ensures that the equipment and work equipment used are in standard conditions. The



kerja yang digunakan berada dalam kondisi sesuai standar. Ekosistem di lingkungan sekitar Perseroan turut menjadi perhatian sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi SDM.

Hubungan dengan Debitur

Selain berfokus pada pengembangan bisnis yang dijalankan, Perseroan turut memperhatikan kemajuan dan pengembangan usaha kecil dan menengah dengan turut memberikan sumber dana kepada mitra kerja melalui:

- Bantuan Modal Usaha untuk memajukan dan mengembangkan usaha kecil dan menengah setelah proses evaluasi proposal pengajuan.
- Meminta imbal jasa (bunga) atas bantuan modal yang telah diberikan dengan besaran sesuai perjanjian.

Sanksi terhadap Pelanggaran Kode Etik

Perseroan memiliki kebijakan untuk memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran pada *Code of Conduct* sesuai dengan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada sisi internal, para pegawai dapat menyampaikan laporan terkait pelanggaran yang terjadi pada *Code of Conduct*, perjanjian kerja bersama, maupun ketentuan lain yang ditetapkan Perseroan melalui *Whistleblowing System* (WBS), sehingga kinerja SDM dapat terjaga kualitasnya.

Laporan Pelanggaran Kode Etik

Pada tahun 2020, Perseroan mencatat telah terjadi adanya 229 pelanggaran Kode Etik dengan rincian pelanggaran dan proses penindakan yang dilakukan terangkum dalam tabel sebagai berikut:

Laporan Pelanggaran Kode Etik Tahun 2020

No.	Jenis Pelanggaran / Type of Violation	Jumlah / Total	Sanksi / Sanction
1.	Teguran Lisan / Oral Warning	177	Teguran Lisan / Oral Warning
2.	Teguran Ringan / Light Warning	29	Teguran Tertulis / Written Warning
3.	Sedang / Moderate	16	Penundaan Kenaikan Periodik / Periodic Promotion Delay
4.	Berat / Serious	7	Penurunan Kelas Jabatan / Demotion

ecosystem in the environment around the Company is also a concern so as to create a conducive environment for HR.

Relationships with Debtors

In addition to focusing on developing its business, the Company also pays attention to the progress and development of small and medium-sized businesses by contributing to providing funding sources to business partners through:

- Working capital aid to developing and promoting minor and medium enterprises after the process of proposal evaluation.
- Requiring interest for the working capital granted with the amount corresponding to the agreement.

Sanctions for Violating the Code of Conduct

The Company has a policy to impose sanctions on parties who violate the Code of Conduct in accordance with the provisions and applicable laws and regulations. On the internal side, employees can submit reports related to violations that occur in the Code of Conduct, collective work agreements, or other provisions set by the Company through the Whistleblowing System (WBS), so that the quality of HR performance can be maintained.

Reports on the Violation of the Code of Conduct

In 2020, the Company recorded that there were 229 violations of the Code of Conduct with details of violations and the process of prosecution which was summarized in the table as follows:

Reports on the Violation of the Code of Conduct in 2020



PERKARA PENTING PERSEROAN DAN GRUP TAHUN 2020

Pada tahun 2020, terdapat adanya 2 perkara hukum yang dihadapi Perseroan dan grup dengan rincian sebagai berikut:

Perkara Penting Tahun 2020

No.	Pokok Perkara / Cases	Informasi Perkara / Cases Information	Status Penyelesaian / Settlement Status
1.	<p>200/G/2020/PTUN.JKT</p> <p>Bawa penggugat mengaku sebagai pemilik tanah dan bangunan di Jalan Ikan Dorang No.3, Surabaya, yang mendapatkan haknya dari warisan Alm. Abdullah Umar Alhasni. Penggugat menggugat SK Nomor 55/HPL/BPN/1997 yang memberikan HPL kepada Pemkot Surabaya. Padahal tanah tersebut merupakan HPL Pemkot Surabaya yang dahulu milik Pelindo III, yang kemudian diserahkan pengelolaannya kepada Pemkot Surabaya berdasarkan perjanjian nomor 12/JS.185/SP/1987 sehingga tidak ada dampak hukum langsung bagi Pelindo III.</p> <p>Dalam gugatannya, Penggugat menuntut agar majelis hakim membatalkan objek sengketa tersebut.</p> <p>That the plaintiff claimed to be the owner of the land and building on Jalan Ikan Dorang No. 3, Surabaya, which got its rights from the inheritance of the late Abdullah Umar Alhasni. The Plaintiff sued SK Number 55/HPL/BPN/1997 which gave HPL to the Surabaya City Government. In fact, the land is the Surabaya City Government HPL which used to belong to Pelindo III, which was later handed over to the Surabaya City Government based on agreement number 12/JS.185/SP/1987, thus there were no direct legal impact for Pelindo III.</p>	<p>Sdr. Saleh Alhasni, dkk (Penggugat) melawan Kementerian ATR/BPN (Tergugat), Pemerintah Kota Surabaya (Tergugat II Intervensi 1), Pelindo III (Tergugat 2 Intervensi II)</p>	<p>Telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan amar putusan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.</p>
2.	<p>1059/Pdt.G/2020/PN.Sby</p> <p>Bawa Penggugat mengaku sebagai pemilim sah atas tanah dan bangunan di Jalan Ikan Dorang No. 3, Surabaya. Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat 2 telah melakukan PMH karena memungut uang pemasukan di tanah milik Penggugat. Padahal tanah tersebut adalah HPL Pemkot Surabaya.</p> <p>Dalam gugatannya Penggugat menuntut agar Tergugat I dan II membayar ganti rugi materil dan immaterial.</p> <p>Whereas the Plaintiff claimed to be the legal owner of the land and building at Jalan Ikan Dorang No. 3, Surabaya. The Plaintiff argued that Defendant I and Defendant 2 had conducted PMH because they were collecting money from the Plaintiff's land. Even though the land is the HPL of the Surabaya City Government. In its lawsuit, the Plaintiff demands that Defendants I and II pay material and non-material compensation.</p>	<p>Mr. Saleh Alhasni, et al (Plaintiff) against the Ministry of ATR/BPN (Defendant), Surabaya City Government (Defendant II Intervention 1), Pelindo III (Defendant 2 Intervention II)</p>	<p>It has been decided by the Jakarta State Administrative Court with a decision to reject the Plaintiffs' claim in its entirety.</p>

LEGAL ISSUES FOR THE COMPANY AND GROUP IN 2020

In 2020, there were 2 legal cases faced by the Company and the group with details as follows:

Legal Cases in 2020



Risiko atas Perkara yang Dihadapi

Secara umum, seluruh perkara hukum yang dihadapi oleh Perseroan di tahun 2020 tidak berdampak pada keberlangsungan bisnis yang dijalankan Perseroan.

Sanksi Administrasi terhadap Dewan Komisaris, Direksi, dan Entitas

Hingga akhir tahun 2020, anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Entitas tidak memiliki permasalahan hukum, baik pidana maupun perdata, sehingga tidak terdapat adanya sanksi administratif bagi seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Entitas.

KEY PERFORMANCE INDIKATOR (KPI)

Di samping penggunaan media asesmen GCG untuk mengukur dan menilai efektivitas dari penerapan GCG di lini bisnis Perseroan, Pelindo III turut memiliki dan menggunakan media pengukuran lainnya berupa *Key Performance Indikator* (KPI). Perseroan memanfaatkan sarana KPI ini untuk menjadi indikator dalam pengukuran capaian kinerja selama tahun buku yang telah disesuaikan dengan anggaran maupun rencana kerja dalam RKAP 2020.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan target kerja yang lebih terukur kepada pihak-pihak terkait sekaligus menjadi bahan evaluasi Perseroan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Dasar yang digunakan dalam pengukuran kinerja melalui KPI ini telah disahkan Perseroan melalui RUPS dengan sebelumnya dilaporkan kepada Kementerian BUMN dan disetujui.

Metode Penyusunan KPI

Perseroan melakukan penerapan KPI dengan berbasis pada metode Malcolm-Baldridge serta mengacu pada Pedoman Penentuan KPI pada BUMN sebagaimana ditetapkan dalam Surat Kementerian BUMN No. S-08/S. MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Penyampaian Pedoman Penentuan KPI dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul pada BUMN. Penentuan indikator pengukuran dilakukan dengan berdasarkan pada aspirasi pemegang saham melalui Surat dari Kementerian BUMN No.S-574/ MBU/08/2019 tentang Aspirasi Pemegang Saham/ Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2020 dan Surat Kementerian

Risks of the Case Being Faced

In general, all legal cases faced by the Company in 2020 did not have an impact on the sustainability of the business run by the Company.

Administrative Sanctions Imposed on the Board of Commissioners, Board of Directors, and Entities

Until the end of 2020, members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and the Entities did not have legal issues, both criminal and civil, thus, there were no administrative sanctions imposed on members of the Board of Commissioners, Directors and Entities.

KEY PERFORMANCE INDIKATOR (KPI)

In addition to using GCG assessment media to measure and assess the effectiveness of GCG implementation in the Company's business lines, Pelindo III also owns and uses other measurement media in the form of Key Performance Indicators (KPI). The Company utilizes this KPI facility to become an indicator in measuring performance achievements during the financial year that has been adjusted to the budget and work plan in the 2020 RKAP.

This is done in order to create more measurable work targets for related parties as well as to become a material for the Company's evaluation to improve and improve performance in the coming years. The basis used in measuring performance through this KPI has been approved by the Company through the GMS with previously reported to the Ministry of SOEs and approved.

KPI Drafting Method

The Company's implementation of KPI is based on Malcolm-Baldridge method and refers to Guidelines of Determination of KPI on SOE pursuant to Letter of the Ministry of SOE No. S-08/S.MBU/2013 dated 16 January 2013 on Submission of Guidelines of KPI Determination and Assessment Criteria of Excellent Performance in SOEs. The determination of measurement indicators is in accordance with the aspirations of shareholders through Letter of the Ministry of SOE No. S-564/MBU/08/2018 dated 31 August 2018 on Submission of Shareholders/ Investors Aspirations for the Preparation of 2020 Company's Work Plan and Budget and Letter of Ministry of



BUMN No.S-878/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 perihal persetujuan revisi Rencana Anggaran Kerja Perusahaan (RKAP) dan KPI Tahun 2020 PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

SOE No. No. S-878/MBU/10/2020 dated October 9, 2020 concerning the revision approval for the Company's Work Plan and Budget and the 2020 KPI of PT (PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)).

Dasar Penentuan KPI Tahun 2020

Basis for Determining KPI in 2020

No.	Tahun / Year	Judul dan Nomor Dokumen / Document Title and Number	Isi Dokumen / Contents	
1.	2013	Surat Kementerian BUMN No. S-08/S.MBU/2013 tentang Pedoman Penentuan KPI dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul pada BUMN / Letter of Ministry of SOE No. S-08/S.MBU/2013 on Guidelines of KPI Determination and Assessment Criteria of Excellent Performance in SOEs	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan bahwa KPI yang digunakan oleh Perusahaan BUMN menggunakan perspektif Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) Menetapkan jumlah indikator dan bobot pada setiap perspektif 	<ul style="list-style-type: none"> Stipulating that the KPI utilised in SOE refers to the Assessment Criteria of Excellent Performance (KPKU) Stipulating the total indicator and weight of each perspective
2.	2017	Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/06/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN / Regulation of the Minister of SOE No. PER-01/MBU/06/2017 on the Second Amendment to Regulation of the Minister of SOE No. PER-04/MBU/2014 on the Income Guideline for the BOD, BOC, and Supervisory Board of SOEs	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan bahwa KPI Agen Pembangunan sebagai salah satu indikator yang menentukan pemberian tantiem Direksi Menetapkan KPI Agen Pembangunan terdiri dari: Sinergi BUMN, Hilirisasi dan Kandungan Lokal, Kemandirian dan Penciptaan Nilai Tambah, Pembangunan Ekonomi Daerah Terpadu, serta Penugasan Pemerintah Petunjuk Teknis untuk menetapkan indikator KPI Agen Pembangunan akan ditetapkan secara terpisah dari Peraturan Menteri tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> Stipulating that the Agent of Development KPI is one of the indicators to determine BOD tantiem Stipulating the Agent of Development KPI which consists of SOE Synergy, Downstream and Local Content, Independence and Creation of Added Value, Integrated Regional Economic Development, and Government Assignment Technical Instruction to stipulate the Agent of Development KPI indicator which will be stipulated separately from the Ministerial Regulation
3.	2018	Arahan Umum Menteri BUMN dalam penyusunan RKAP tahun 2019 terkait Penyaluran PKBL / General Directive from the Minister of SOE in the preparation for the 2019 RKAP related to PKBL Distribution	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan Indikator Penyaluran PKBL menjadi salah satu indikator dalam KPI Kontrak Manajemen Direksi Indikator Penyaluran PKBL terdiri dari 8 indikator dengan rumus dan bobot yang telah ditentukan 	<ul style="list-style-type: none"> Stipulating the PKBL Distribution Indicator as one of the indicators in the BOD KPI Management Contract The PKBL Distribution Indicator consists of eight indicators with the stipulated formula and weight
4.	2020	Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi BUMN / Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number PER-11/MBU/11/2020 dated November 12, 2020 concerning Management Contracts and Annual Management Contracts for SOE Directors	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan perubahan jumlah indikator dan bobot pada masing-masing perspektif Menetapkan pedoman penentuan KPI Direksi secara individu Menetapkan penilaian maksimal skor KPI 	<ul style="list-style-type: none"> Determine the change in the number of indicators and weights for each perspective Determine KPI guidelines for the Board of Directors individually Determine the maximum assessment of KPI scores



Indikator dalam Menentukan Target KPI

Penentuan target KPI dilakukan Perseroan dengan mengacu pada persyaratan yang ditetapkan dalam Pedoman Penentuan KPI pada BUMN sesuai Surat Kementerian BUMN No. S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Penyampaian Pedoman Penentuan KPI dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul pada BUMN, dokumen RKAP Perusahaan tahun 2020, serta Peraturan DJPL No. HK.103/2/18/DJPL-16 tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan pada Pelabuhan yang Diusahakan secara Komersial.

Indikator Penentuan KPI Tahun 2020

No	Indikator / Indicator	Dasar Penentuan / Determination Basis	Satuan / Unit	Bobot / Value	Target	Realisasi / Realization	Nilai Prestasi / Score	Keterangan / Information
I. Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia / Economic and Social Value for Indonesia								
1	Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	Rakortas / Limited Coordination Meeting	Kali / Times (X)	5	2,94	4,18	5,50	Tercapai / Achieved
2	Debt to Equity Ratio (DER)			6	1,39	1,27	6,57	
3	Total Debt to Ebitda			5	4,24	3,65	5,50	
4	Pangsa Pasar Pelabuhan / Port Market Share		%	6	95,00	99,60	6,29	
5	Retensi Pelanggan / Customer Retention		%	10	-4,25	-1,16	11,00	
6	Number of Ship / Customer Served		GT	6	190.288.342	190.125.518	5,99	Belum Tercapai / Not Achieved
7	PKBL		%	4	64,99	48,63	3,02	
II. Inovasi Model Bisnis / Business Model Innovation								
8	Standarisasi Performansi Pelabuhan / Port Performance Standards	Rakortas / Limited Coordination Meeting	Hari / Days	3	3,00	2,91	3,09	Tercapai / Achieved
A. Dwelling Time Terminal Petikemas / Container Terminal Dwelling Time	3			23,51	20,02	3,30		
B. Turn Round Time (TRT) Kapal / Ships Turn Round Time (TRT)	10			99,91	497,45	11,00		
9	Service Level Agreement		%	6	100,00	160,00	6,60	
10	Pemenuhan audit sertifikasi / Certification audit fulfillment		%	6	100	200	6,6	
III. Kepemimpinan Teknologi / Technology Leadership								
11	Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan / Digitization and Service Integration	Rakortas / Limited Coordination Meeting	%	6	100	200	6,6	Tercapai / Achieved
IV. Peningkatan Investasi / Increase in Investment								
12	Penyerapan Investasi (CAPEX) / Investment Absorption (CAPEX)	Rakortas / Limited Coordination Meeting	%	4	90	108,0924816	4,4	Tercapai / Achieved
13	Sinergi BUMN / SOE Synergy		Rupiah	6	50.947.650.000	142.500.000.000	6,6	
V. Pengembangan Talenta / Talents Development								
14	Pemenuhan Standar Keahlian melalui Sertifikasi / Fulfillment of Expertise Standards through Certification	Rakortas / Limited Coordination Meeting	%	8	100	772	8,8	Tercapai / Achieved
15	Produktivitas Pegawai / Employee Productivity		Rp/Orang	7	487.375.122	629.922.937	7,7	
16	Pemenuhan Talent Pool BUMN / Fulfillment of SOE Talent Pool		%	5	75	370	5,5	
Jumlah / Total				100			107,46	



Pencapaian KPI Korporat Tahun 2020

Pada tahun 2020, hasil pencapaian KPI Korporat berhasil diperoleh sebesar 107,46 atau mengalami kenaikan 105 % dari perolehan tahun 2019 yakni sebesar 101,67. Adanya peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya perubahan perhitungan indicator KPI maksimal 110% yang tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi BUMN.

Pencapaian KPI Korporat dalam 3 Tahun Terakhir

Pencapaian KPI Korporat dalam 3 (tiga) tahun terakhir terangkum dalam tabel berikut:

	2018	2019	2020
Pencapaian KPI / KPI Achievement	103,32	101,67	107,46

Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU)

Perseroan melaksanakan asesmen implementasi KPKU tahun 2020 berdasarkan:

- Tujuan Strategis PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2020-2024 dengan target menjadi *Industry Leader* dalam penilaian Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dengan capaian Skor 676 pada tahun 2024.
- Surat Forum Ekselen BUMN Nomor : FEB-068.ASS.KPKU.II.2019 Tanggal 19 Februari 2019 Perihal Ketentuan Asesmen KPKU BUMN Tahun 2019.

Perseroan menggunakan kriteria dengan mengacu pada Buku KPKU BUMN tahun 2017 yang didasarkan pada 2 dimensi penilaian, yaitu dimensi proses dan hasil.

Di tahun 2020, skor yang berhasil dicapai oleh Perseroan adalah sebesar 654 dan mendapatkan predikat "*Emerging Industry Leader*". Untuk tahun 2021, Perseroan memiliki target 660.

Faktor Penilaian Proses

Untuk menilai proses, faktor yang digunakan adalah Metode/Sistem (*Approach*), Penerapan (*Deployment*), Pembelajaran (*Learning*), dan Integrasi (*Integration*) atau disingkat ADLI.

Achievement of Corporate KPI in 2020

In 2020, the achievement of the Corporate KPI was 107.46 or an increase of 105% from 101.67 in 2019. The increase was due to a change in the calculation of the maximum 110% KPI indicator as stated in the Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia Number PER-11/MBU/11/2020 dated November 12, 2020 concerning Management Contracts and Annual Management Contracts for SOE Directors.

Achievement of Corporate KPI for the Last 3 Years

Corporate KPI achievements in the last 3 (three) years are summarized in the following table:

	2018	2019	2020
Tahun / Year			

Excellent Performance Assessment Criteria

The Company assesses the implementation of the KPKU in 2020 based on:

- The Strategic Goal of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) in the Company's Long-Term Plan for 2020-2024 with the aim of becoming an Industry Leader in the assessment of the Excellent Performance Assessment Criteria (KPKU) with an achievement score of 676 in 2024.
- Letter of SOE Excellent Forum No. FEB-068.ASS.KPKU.II.2019 dated 19 February 2019 on the Provisions for KPKU Assessment in SOEs in 2019.

The Company uses criteria that refer to the 2017 BUMN KPKU Book which is based on 2 aspects of the assessment, namely the process and outcome aspects.

In 2020, the score achieved by the Company was 654 and received the "Emerging Industry Leader" title. For 2021, the Company has a target of 660.

Process Assessment Factor

To assess the process, the factors used are Method/System (*Approach*), Application (*Deployment*), Learning, and Integration or abbreviated ADLI.



- **Metode/Sistem (Approach)** adalah metode/sistem yang didesain untuk melaksanakan pekerjaan. Penilaian mengacu pada:

1. Kesesuaian metode/sistem dengan persyaratan dalam KPKU BUMN dan lingkungan operasi Perusahaan.
2. Efektivitas dari penggunaan metode/sistem tersebut.
3. Sejauh mana metode/sistem dilakukan secara berulang (*repeatable*) dan didasarkan pada data dan informasi yang *reliable* (misalnya, terstruktur dan sistematis).

- **Penerapan (Deployment)** mengacu pada sejauh mana:

1. Metode/Sistem diterapkan sesuai dengan desainnya.
2. Metode/Sistem diterapkan secara konsisten.
3. Metode/Sistem dilaksanakan oleh seluruh fungsi/unit kerja yang terkait sesuai dengan desainnya.

- **Pembelajaran (Learning)** mengacu pada:

1. Penyempurnaan Metode/Sistem dengan cara siklus evaluasi dan perbaikan (*improvement*).
2. Inovasi Metode/Sistem untuk mendorong perubahan yang bersifat terobosan (*breakthrough*).
3. Berbagi hasil penyempurnaan dan inovasi terhadap Metode/Sistem, kepada unit-unit kerja lain dan pemilik proses lainnya yang terkait dalam Perusahaan.

- **Integrasi (Integration)** mengacu pada:

1. Keselarasan Metode/Sistem dengan kebutuhan Perusahaan yang dijelaskan pada Profil Perusahaan dan pada subkategori proses lainnya.
2. Ukuran, informasi, dan sistem perbaikan telah saling melengkapi/saling bersesuaian pada lintas unit kerja dan lintas proses.
3. Program kerja, proses, hasil, analisis, pembelajaran, dan tindakan, diharmoniskan di lintas proses dan lintas unit kerja untuk mendukung tercapainya sasaran Perusahaan.

Subkategori pada dimensi Proses yang terdiri dari ADLI tersebut, dilakukan klarifikasi, saling dihubungkan untuk menekankan bahwa deskripsi *Approach* harus selalu menunjukkan penerapan yang konsisten dengan persyaratan spesifik suatu subkategori dan Perusahaan. Seiring dengan semakin matangnya proses, maka

- The Approach is a method/system designed to conduct works. The assessment refers to:

1. Approach conformity with the requirements in the SOE KPKU and Company operation environment.
2. Effectiveness of the approach.
3. The extent of a repeatable approach and based on reliable data and information (e.g. structured and systematic)

- Deployment refers to the extent of:

1. The applied approach based on the design.
2. Consistently applied approach.
3. Approach conducted by all functions/work units in relation to the design.

- Learning refers to:

1. Enhancement of approach by evaluation and improvement cycle.
2. The innovation of approach to stimulate breakthrough.
3. Sharing of enhancement and innovation results on the approach to other work units and other process owners related to the Company.

- Integration refers to:

1. Approach alignment to the Company's needs as described in the Company Profile and in the subcategory of other processes.
2. Measurement, information, and system improvement have been complementary to each other across work units and across processes.
3. Work programme, process, result, analysis, learning, and action, are harmonised across process and work units to support the achievement of the Company's target.

The subcategories on Process dimension comprising ADLI, are verified, interconnected to emphasise that Approach description shall demonstrate an application which is consistent with specific requirements of a subcategory and Company. Along with the increasingly prepared process, the description shall also demonstrate



deskripsinya juga harus menunjukkan bagaimana siklus pembelajaran (termasuk inovasi) dan juga integrasi dengan proses kerja lainnya dan dengan unit kerja lainnya.

Faktor Penilaian Hasil

Untuk mengevaluasi hasil-hasil Perseroan, faktor yang digunakan adalah *Level*, *Trend*, *Comparison* dan *Integration* (LeTCI).

- **Level mengacu pada:** tingkat pencapaian kinerja saat ini;
- **Trend mengacu pada:**
 1. Tingkat peningkatan kinerja atau kemampuan mempertahankan kinerja yang sudah baik (yakni, kecuraman data tren) dari waktu ke waktu (minimum dalam 3 tahun terakhir).
 2. Keluasan (tingkat penerapan) dari hasil-hasil kinerja.
- **Comparison mengacu pada:**
 1. Pembandingan kinerja Perusahaan relatif terhadap pembanding yang sesuai misalnya, pesaing atau perusahaan dalam industri sejenis.
 2. Pembandingan kinerja Perusahaan relatif terhadap *benchmarks* atau pemimpin industrinya, atau dengan perusahaan kelas dunia.
- **Integration mengacu pada:**
 1. Ukuran hasil-hasil yang terkait persyaratan kinerja pelanggan, produk, pasar, proses, dan program kerja utama, yang dijelaskan dalam Profil Perusahaan dan dalam subkategori pada kategori 1 s.d. 6.
 2. Hasil-hasil yang meliputi indikator yang valid tentang kinerja mendatang.
 3. Hasil-hasil diharmoniskan secara lintas proses dan lintas unit untuk mendukung sasaran Perusahaan.

Subkategori pada dimensi hasil tersebut diklarifikasi dengan meminta data yang menunjukkan level kinerja, tren, dan pembandingan yang terkait untuk ukuran dan indikator utama kinerja Perusahaan serta terintegrasi dengan persyaratan utama Perusahaan. Subkategori pada dimensi hasil juga meminta data tentang luasnya cakupan hasil-hasil kinerja yang dilaporkan. Secara langsung hal ini terkait dengan penerapan dan pembelajaran Perusahaan; jika proses perbaikan disebarluaskan secara luas maka harusnya ada hasilnya yang sesuai.

the learning cycle (including innovation) and integration with other work processes and with other work units.

Result Assessment Factors

To evaluate the results of the Company, the factors used are Level, Trend, Comparison and Integration (LeTCI).

- Level refers to the current performance achievement level;
- Trend refers to:
 1. The performance increase rate or the capability to sustain good performance (namely, steep trend data) over time (at least in the last three years)
 2. The extent of (application level) performance results.
- The Comparison refers to:
 1. Comparison of Company relative performance to appropriate comparators, such as competitor or company in the same industry.
 2. Comparison of company relative performance to benchmarks or leader of the industry, or with a world class company;
- Integration refers to:
 1. Results measure on the requirements of performance of customer, product, market, process, and main work programme, as described in the Company Profile and in subcategories on categories 1 to 6.
 2. Results covering valid indicators on the coming performance.
 3. Results harmonised across processes and units to support the Company's target.

The subcategory on result dimension is clarified by requiring data which demonstrate related performance level, trend and comparison for the measure and main indicators of company performance and integrated with the company's main requirements. The subcategory on Result dimension also requires data on the breadth of reported performance results. Directly, this is in relation to the implementation and learning of the Company; if the improvement process is widely spread, the results have to be corresponding.



PEMENUHAN ASPEK KEPATUHAN

Kebijakan Antikorupsi

Komitmen Perseroan untuk menekan praktik tindak pidana korupsi pada proses aktivitas operasional bisnis usaha di wilayah kerja Perseroan diwujudkan melalui penerapan beberapa peraturan dan kebijakan sebagai bentuk mekanisme, antara lain:

1. Kode Etik Perusahaan yang disahkan melalui Keputusan Bersama antara Dewan Komisaris, Direksi dan Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia III No. HK.202/09/DK.P.III/2017; HK.03/14/P.III-2017; 36/DP.SPPI/IX-2017 tanggal 25 September 2017 tentang Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) di Lingkungan Pelindo III. Kebijakan tersebut memuat informasi dan ketentuan terkait Etika Kerja dan Etika Bisnis bagi seluruh insan Pelindo III untuk menjadi acuan dalam beraktivitas di lingkungan kerja sehingga dapat menghindari potensi perilaku menyimpang, terutama yang mengarah pada praktik tindak pidana korupsi.
2. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Perusahaan yang tercantum dalam Peraturan Direksi No. PER.0009/HK.03/P.III-2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) beserta Anak Perusahaan yang diterapkan untuk menunjang Perseroan menjaga pengendalian gratifikasi pada praktik bisnis untuk mencegah potensi praktik tindak pidana korupsi.
3. Mekanisme Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan Instruksi Perusahaan yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. PER.27/HK.03/P.III-2009 tanggal 9 September 2009 *juncto* Peraturan Direksi No. PER.28/HK.03/P.III-2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi No. PER.27/HK.03/P.III-2009 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pelindo III. Pemberlakuan mekanisme ini dijalankan guna mengawasi potensi risiko praktik tindak korupsi yang dapat terjadi di lingkungan para pejabat Perseroan.

FULFILMENT ON COMPLIANCE ASPECT

Anti-Corruption Policy

The Company's commitment to suppress the practice of criminal acts of corruption in the process of business operational activities in the Company's work area is realized through the implementation of several regulations and policies as a form of mechanism, including:

1. The Company's Code of Conduct which was ratified through a Joint Decree between the Board of Commissioners, the Board of Directors and the Pelabuhan Indonesia III Workers Union III No. HK.202/09/DK.P.III/2017; HK.03/14/P.III-2017; 36/DP.SPPI/IX-2017 dated September 25, 2017 regarding the Code of Conduct in Pelindo III. The policy contains information and provisions related to Work Ethics and Business Ethics for all Pelindo III personnel to serve as a reference in activities in the work environment so as to avoid potential deviant behavior, especially those that lead to the practice of criminal acts of corruption.
2. Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes and Company Regulations as stated in the Board of Directors Regulation No. PER.0009/HK.03/P.III-2018 dated March 9, 2018 regarding Gratification Control within PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and its Subsidiaries implemented to support the Company in maintaining gratification control in business practices to prevent potential corrupt practices.
3. The mechanism for the State Administrator Wealth Report (LHKPN) based on Law no. 28 of 1999 concerning the Implementation of a State that is Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism; and Company Instructions listed in the Decree of the Board of Directors No. PER.27/HK.03/P.III-2009 dated September 9, 2009 in conjunction with Board of Directors Regulation No. PER.28/HK.03/P.III-2016 dated July 15, 2016 concerning Amendments to the Regulation of the Board of Directors No. PER.27/HK.03/P.III-2009 concerning the Obligation to Submit State Administrator Wealth Reports (LHKPN) within Pelindo III. The implementation of this mechanism is carried out to monitor the potential risks of corrupt practices that may occur within the Company's officials.



Melalui pelaksanaan mekanisme-mekanisme tersebut, Perseroan di sepanjang tahun 2020 dapat menjaga praktik bisnis tetap berjalan dengan positif, sehat, dan bebas dari praktik tindak pidana korupsi yang dapat merugikan banyak pihak. Hal tersebut tercermin dari tidak adanya laporan perkara hukum Perseroan yang berkaitan dengan jenis kasus tindak pidana korupsi.

Pakta Integritas

Kinerja yang berintegritas senantiasa dijunjung tinggi oleh seluruh Insan Pelindo III yang kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan aktivitas usaha dengan mengacu pada Kode Etik Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan seluruh Insan Pelindo III memiliki komitmen yang tinggi pada pemenuhan Kode Etik, setiap tahun seluruh Insan Pelindo III diwajibkan untuk menandatangani Pakta Integritas.

Pencegahan Praktik Bad Corporate Governance

Sebagai sebuah badan usaha yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip GCG secara optimal untuk menghadirkan bisnis yang baik dan sehat, Perseroan senantiasa menjalankan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya praktik *Bad Corporate Governance* melalui pembentukan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan. Perumusan kebijakan tersebut dilakukan dengan mengangkat serta menginternalisasi beberapa regulasi terkait yang berlaku secara umum.

Komunikasi dengan Pemegang Saham dan Statement of Corporate Intent

Komitmen Perseroan untuk senantiasa mengedepankan akuntabilitas dalam pelaksanaan aktivitas usaha direalisasikan dengan menjalankan komunikasi dengan Pemegang Saham melalui pemaparan rencana dan target Perseroan di masa depan (RKAP dan publikasi *Statement of Corporate Intent*) yang di dalamnya pelaksanaannya melibatkan atau tidak melibatkan analis. Kegiatan ini diselenggarakan melalui sarana RUPS maupun melalui kesempatan lain yang dinilai sesuai dan tepat.

Pada tahun 2020, kegiatan komunikasi dengan Pemegang Saham terkait dengan analisis kinerja usaha selama tahun buku serta rencana bisnis dan publikasi *Statement of Corporate Intent* dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2020.

Through the implementation of these mechanisms, the Company throughout 2020 was able to maintain business practices that were positive, healthy, and free from the practice of criminal acts of corruption that could harm many parties. This is reflected in the absence of the Company's legal case reports related to the types of corruption cases.

Integrity Pact

Performance with integrity is always upheld by all Pelindo III personnel which is then realized through the implementation of business activities by referring to the Company's Code of Conduct and applicable laws and regulations. To ensure that all Pelindo III personnel have a high commitment to the fulfillment of the Code of Conduct, every year all Pelindo III personnel are required to sign an Integrity Pact.

Prevention of Bad Corporate Governance Practices

As a business entity that focuses on the optimal application of GCG principles to present a good and healthy business, the Company continues to make efforts to prevent the practice of Bad Corporate Governance through the formation of the required policies. The policy formulation is carried out by adopting and internalizing several related regulations that are generally applicable.

Communication with Shareholders and Statement of Corporate Intent

The Company's commitment to always prioritize accountability in the implementation of business activities is realized by communicating with Shareholders through the presentation of the Company's future plans and targets (RKAP and publication of *Statement of Corporate Intent*) in which the implementation involves or does not involve analysts. This activity is held through the GMS facility or through other opportunities deemed appropriate and suitable.

In 2020, communication activities with Shareholders related to business performance analysis during the fiscal year as well as business plans and publication of *Statement of Corporate Intent* were carried out on January 24, 2020.



Pernyataan Pemenuhan Aspek Kepatuhan Perseroan terhadap Pajak

Kepatuhan terhadap pajak turut menjadi fokus utama Perseroan terkait dengan pemenuhan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, Perseroan senantiasa memenuhi aturan yang diatur dalam perundang-undangan berkaitan dengan kontribusi pajak penghasilan atas kegiatan jasa usaha kepelabuhanan. Selain sebagai bentuk pemenuhan aspek kepatuhan, pembayaran pajak ini menjadi salah satu bentuk kontribusi dari Perseroan di dalam mendukung upaya pemerintah membangun negeri.

Peraturan yang dijadikan acuan kepatuhan Perseroan terhadap pajak adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2008 tanggal 20 Juli 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Informasi Kepatuhan Perseroan pada Pajak di Tahun 2020

Komitmen Perseroan untuk senantiasa mematuhi ketentuan terkait pajak tergambar dari tidak adanya teguran dengan sifat ketidakpatuhan Perseroan terhadap pemenuhan kewajiban pajak pada tahun 2020.

Laporan Pencemaran Lingkungan

Selain berorientasi pada hubungan dengan manusia sebagai individu, Perseroan turut memfokuskan diri pada pemeliharaan hubungan dengan lingkungan dan alam sekitar dengan senantiasa menjaga kelestarian lingkungan. Upayatersebutdilakukan dengan berpedoman pada Analisis Masalah Dampak Lingkungan (AMDAL) di dalam aktivitas operasionalnya. Sebagai pihak pemberi kerja, Perseroan senantiasa melakukan pengawasan terhadap kontaktor pelaksana yang bekerja sama dengan Perseroan untuk memastikan standar lingkungan yang berlaku telah dipatuhi guna meminimalisir aktivitas pencemaran yang merugikan.

Berkaitan dengan laporan pencemaran lingkungan, pihak yang bertanggung jawab langsung pada laporan tersebut adalah pihak kontraktor pelaksana, sehingga Perseroan tidak memiliki laporan terkait pencemaran lingkungan.

Statement of Compliance Aspects of the Company's Compliance with Taxes

Compliance with taxes is also the main focus of the Company related to compliance with applicable regulations. In this case, the Company always complies with the rules regulated in the legislation relating to income tax contributions on port business services activities. Apart from fulfilling compliance aspects, this tax payment is a form of contribution from the Company in supporting the government's efforts to develop the country.

The regulation that is used as a reference for the Company's compliance with taxes is Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 51 of 2008 dated July 20, 2008 as amended by Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 40 of 2009 concerning Income Tax on Income from Construction Services Business.

Company Compliance Information on Taxes in 2020

The Company's commitment to always comply with tax-related provisions is reflected in the absence of warnings by the nature of the Company's non-compliance with the fulfillment of tax obligations in 2020.

Environmental Pollution Report

In addition to being oriented towards relationships with humans as individuals, the Company also focuses on maintaining relationships with the environment and the natural surroundings by continuously preserving the environment. This effort is carried out based on the Environmental Impact Problem Analysis (AMDAL) in its operational activities. As the employer, the Company always supervises the implementing contractors who work closely with the Company to ensure that applicable environmental standards have been complied with in order to minimize harmful pollution activities.

In relation to the environmental pollution report, the party directly responsible for the report is the contractor, therefore, the Company does not have any reports related to environmental pollution.



Laporan Perkara Penting yang Tidak Dijabarkan

Seluruh informasi yang berkaitan dengan perkara penting Perseroan telah disajikan dalam pembahasan Perkara Penting yang tercantum dalam bab ini. Informasi yang termuat dalam pembahasan tersebut mencakup rangkuman dari seluruh perkara maupun gugatan yang dihadapi oleh Perseroan sepanjang tahun 2020.

Kasus Terkait Buruh dan Karyawan

Hingga akhir tahun 2020, tercatat tidak ada kasus yang melibatkan Perseroan dengan buruh atau karyawan Perseroan. Uraian mengenai perkara penting Perseroan yang mencakup perkara dan gugatan, baik yang dilakukan dan/atau ditujukan kepada Perseroan telah dijabarkan dalam pembahasan Perkara Penting yang ada di dalam bab ini.

Informasi Ketidaksesuaian Penyajian Laporan Tahunan

Penyusunan Laporan Tahunan Perseroan telah dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan, antara lain kriteria Annual Report Award (ARA) serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 20/ SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Kesesuaian Laporan Tahunan Bentuk Hard Copy dan Soft Copy

Perseroan memastikan bahwa informasi yang termuat dalam Laporan Tahunan bentuk *Hard Copy* dengan *Soft Copy* telah sesuai dan memiliki informasi yang sama serta tidak terdapat adanya perbedaan.

MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN JASA

Prinsip dan Kebijakan

Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) melalui Peraturan Direksi Nomor: PER.0060/BJ.01.01/HOFC-2020 tanggal 01 April 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan/atau Jasa di PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan diperbarui oleh Perubahan Nomor: PER. 0089/BJ.01.01/HOFC-2020 tanggal 01 Oktober 2020 Sub Direktorat Pengadaan Barang dan Jasa menjalankan tugasnya dengan menerapkan prinsip:

Important Undisclosed Case Report

All information relating to important cases of the Company has been presented in the discussion of Important Cases listed in this chapter. The information contained in the discussion includes a summary of all cases and lawsuits faced by the Company throughout 2020.

Cases Related to Labor and Employees

Until the end of 2020, there were no recorded cases involving the Company and the Company's workers or employees. The description of the Company's important cases which include cases and lawsuits, whether committed and/or directed to the Company has been described in the discussion of Important Cases in this chapter.

Information on Discrepancies in Annual Report Presentation

The preparation of the Company's Annual Report has been carried out with reference to the stipulated provisions, including the criteria for the Annual Report Award (ARA) and the Financial Services Authority (SEOJK) Circular Letter No. 20/SEOJK.04/2016 concerning the Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies.

Compatibility of Hard Copy and Soft Copy Annual Reports

The Company ensures that the information contained in the Annual Report in the form of Hard Copy and Soft Copy is appropriate and has the same information and there are no differences.

GOODS AND SERVICES PROCUREMENT MECHANISM

Principles and Policies

The Goods and Services Procurement Unit (UKPBJ) through the Board of Directors Regulation Number: PER.0060/BJ.01.01/HOFC-2020 dated April 01, 2020 concerning Procedures for Procurement of Goods and/or Services at PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and updated by Amendments Number: PER. 0089/BJ.01.01/HOFC-2020 dated October 1, 2020, the Sub-Directorate of Procurement of Goods and Services carries out its duties by applying the principles:



1. Efisien, menggunakan dana dan sumber daya terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya.
2. Efektif, sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat bagi Perusahaan sesuai dengan sasaran yang ditentukan.
3. Kompetitif, harus terbuka bagi penyedia yang memenuhi persyaratan dan memberikan persaingan yang sehat sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
4. Transparan, semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa termasuk syarat teknis administrasi, tata cara evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang/Jasa, sifatnya terbuka bagi penyedia serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
5. Adil dan wajar, yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat.
6. Terbuka, Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat.
7. Akuntabel, mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran tugas Perusahaan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Selain berfokus pada penerapan prinsip-prinsip di atas, Perseroan juga memberi perhatian pada prinsip kehati-hatian (asas prudensial) sebagai upaya untuk memperhitungkan dampak risiko yang terkecil bagi Perseroan yang dipastikan telah diterapkan dengan baik.

Sistem pengadaan di Perseroan telah dilakukan oleh UKPBJ secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi namun tetap mengikuti proses bisnis pengadaan barang/jasa yang berlaku dengan melalui situs eproc.pelindo.co.id.

Sistem pengadaan secara elektronik ini atau E-procurement memfasilitasi semua penyedia barang/jasa yang telah terdaftar pada database eproc. Selain itu, dengan adanya eproc, kesempatan masuk ke dalam Daftar Rekanan Perusahaan (DRP) bagi seluruh penyedia yang

1. Efficient, using limited funds and resources to achieve the goals set in the shortest possible time.
2. Effective, in accordance with the needs and providing benefits to the Company in accordance with the specified targets.
3. Competitive, must be open to providers who meet the requirements and provide fair competition in accordance with clear and transparent provisions and procedures.
4. Transparent, all provisions and information regarding the Procurement of Goods/Services including administrative technical requirements, evaluation procedures, determination of prospective Goods/Services Providers, are open to providers and to the wider community in general.
5. Fair and reasonable, namely providing equal treatment for all prospective providers of goods/services who meet the requirements.
6. Open, the procurement of goods/services can be followed by all qualified providers of goods/services.
7. Accountable, achieve targets and can be accounted for both physically, financially, as well as benefits for the smooth running of the Company's duties and public services in accordance with the principles and provisions that apply in the Procurement of Goods/Services.

In addition to focusing on the application of the principles above, the Company also pays attention to the principle of prudence as an effort to take into account the smallest risk impact for the Company which is ensured to have been implemented properly.

The procurement system in the Company has been carried out by the Sub-Directorate of Procurement of Goods and Services electronically by utilizing information technology but still following the business process for the procurement of goods/services that applies through the eproc.pelindo.co.id website.

This electronic procurement system or E-procurement facilitates all providers of goods/services that have been registered in the eproc database. In addition, with the eproc, the opportunity to enter the Company Partner List (DRP) for all providers who have not previously been



sebelumnya belum terdaftar menjadi terbuka semakin luas dengan tetap mengacu pada syarat dan ketentuan yang sama. Komitmen Perseroan untuk mengutamakan kualitas pada sistem pengadaan tercermin dari aplikasi ini yang telah lulus sertifikasi ISO 27001 sejak tahun 2018.

Prosedur dan Tata Cara

Di dalam proses pengadaan di Perseroan, Sub Direktorat Pengadaan Barang dan Jasa memiliki prosedur yang tergambar dalam bagan di bawah ini:

Registrasi Rekanan



Pengelolaan Business Partner (BP)



Penambahan Master Material dan Extended Plant/Storage Master Material



registered is becoming wider and wider while still referring to the same terms and conditions. The Company's commitment to prioritizing quality in the procurement system is reflected in this application which has passed ISO 27001 certification since 2018.

Procedures and Procedures

In the procurement process at the Company, the Sub-Directorate of Procurement of Goods and Services has a procedure which is illustrated in the chart below:

Partner Registration



Business Partner Management (BP)



Addition of Master Material and Extended Plant/Storage Master Material

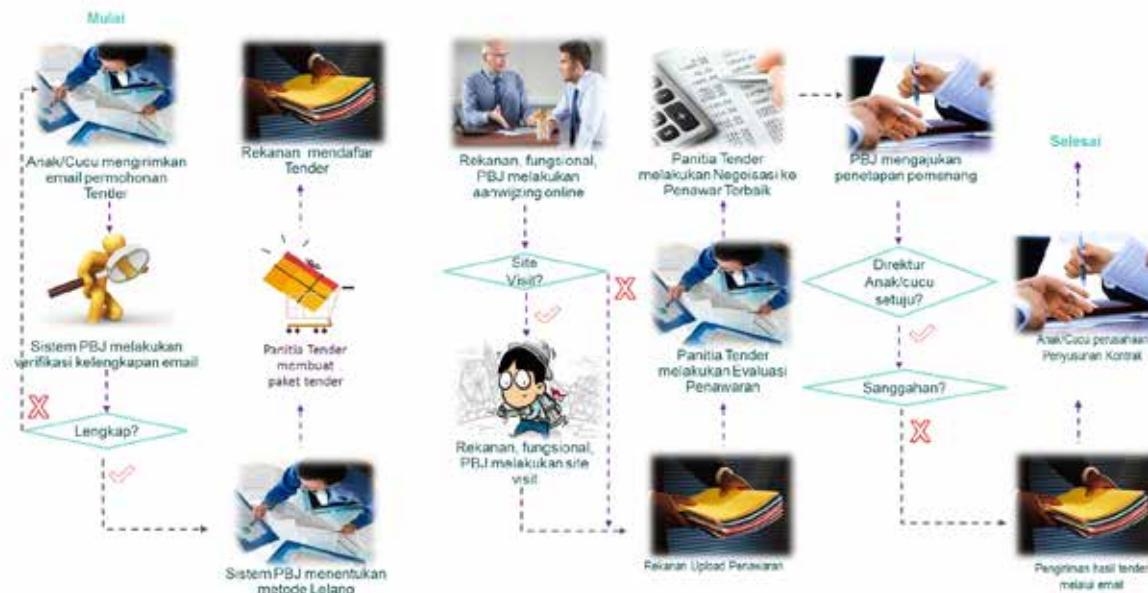


Proses Pengadaan di Induk Perusahaan



Procurement Process at Parent Company

Proses Pengadaan pada Anak/Cucu Perusahaan



Procurement Process at Subsidiaries



Proses Tender Pelindo III



Proses Pemilihan Vendor

Vendor yang diikutsertakan pada proses pelelangan harus merupakan vendor yang sebelumnya telah terdaftar dan tervalidasi di dalam aplikasi E-Procurement Perseroan yang data dan informasinya telah otomatis tersimpan dalam database. Hal tersebut untuk mempermudah Perseroan dalam menjalankan proses pemilihan vendor sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Penawaran yang diberikan vendor di dalam proses pelelangan dievaluasi dan dinegosiasi oleh Perseroan secara elektronik guna menghadirkan mekanisme yang lebih efisien dalam waktu dan biaya.

Evaluasi Pengadaan serta Rencana Pengembangan UKPBJ

Guna meningkatkan kualitas serta menyempurnakan proses pengadaan, Perseroan melakukan evaluasi pada kegiatan pengadaan yang diselenggarakan secara berkala setiap sebulan sekali. Di dalam evaluasi tersebut, dibahas mengenai hasil kinerja, tata cara, dan sispro pelelangan dengan menggunakan data pada bulan sebelumnya sebagai acuan untuk melihat tren proses pelelangan.

Pelindo III Tender Process

Vendor Selection Process

Vendors who are included in the auction process must be vendors who have previously been registered and validated in the Company's E-Procurement application whose data and information have been automatically stored in the database. This is to facilitate the Company in carrying out the vendor selection process in accordance with the required specifications. The bids provided by vendors in the auction process are evaluated and negotiated by the Company electronically in order to present a mechanism that is more efficient in time and cost.

Evaluation of Procurement and Development Plan of Sub-Directorate of Procurement of Goods and Services

In order to improve the quality and improve the procurement process, the Company evaluates procurement activities which are held regularly once a month. In the evaluation, the performance results, procedures, and methods for the auction were discussed using data from the previous month as a reference to see trends in the auction process.



Di tahun 2020, Sub Direktorat Pengadaan Barang dan Jasa telah melelangkan pekerjaan sebanyak 1852 paket dan telah melakukan efisiensi sebesar 9,31% dari anggaran atau Rp. 132.367.776.683,84 sementara pada tahun 2019, UKPBJ telah melelangkan pekerjaan sebanyak 2.350 dan telah melakukan efisiensi sebesar 11,8% dari anggaran atau Rp275.162.092.026.

Pengembangan aplikasi E-Procurement yang dilakukan pada tahun 2020 adalah :

- SAP: Penggunaan safe box untuk sharing PO, penambahan storage material, simplifikasi extend material.
- Eproc: Mandatori e-penilaian, Pakta Integritas Panitia, Penyesuaian laporan poin panitia, laporan bulanan online, cetak data validasi

Untuk ke depannya, UKPBJ berencana akan melakukan pengembangan berupa:

1. Automatic Vendor Selection
2. Excellent Service

KEBIJAKAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Perseroan berupaya untuk menghadirkan proses bisnis yang sehat dan bebas dari tindakan-tindakan yang berpotensi membawa dampak buruk bagi Perseroan, salah satunya praktik tindak korupsi. Untuk itu, Perseroan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendukung komitmen Perseroan mencegah dan memberantas praktik korupsi di Perseroan dengan menyusun pedoman Gratifikasi.

Hal tersebut diwujudkan secara nyata melalui Pengendalian Gratifikasi oleh Komisaris Utama, Direktur Utama, dan Ketua Umum SPPI III yang disaksikan oleh Direktur Gratifikasi KPK pada tanggal 12 Maret 2014 dan kemudian menjalankan tindak lanjutnya dengan menyelenggarakan workshop penyusunan aturan gratifikasi pada tanggal 19-21 November 2014 dan selanjutnya membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Pelindo III untuk mendukung komitmen Perseroan menciptakan lingkungan kerja yang sehat.

In 2020, the Sub-Directorate for the Procurement of Goods and Services has auctioned 1852 work packages and has made an efficiency of 9.31% of the budget or Rp132,367,776,683.84 while in 2019, UKPBJ has auctioned 2,350 jobs and has made an efficiency of 11.8% of the budget or Rp275,162,092,026.

The development of the E-Procurement application carried out in 2020 are:

- SAP: Use of safe box for PO sharing, addition of storage material, simplification of extending material.
- Eproc: Mandatory e-assessment, Committee Integrity Pact, Adjustment of committee point reports, online monthly reports, print validation data.

In the future, UKPBJ plans to carry out developments in the form of:

1. Automatic Vendor Selection
2. Excellent Service

GRATIFICATION POLICY AND CONTROL

The Company strives to present a sound business process and is free from actions that have the potential to have a negative impact on the Company, one of which is corruption. To that end, the Company cooperates with the Corruption Eradication Commission (KPK) to support the Company's commitment to prevent and eradicate corrupt practices in the Company by compiling guidelines for Gratification

This is manifested through Gratification Control by the President Commissioner, President Director, and General Chairperson of SPPI III witnessed by the Director of Gratification of the KPK on March 12, 2014. This was followed up by holding a workshop on the preparation of gratification rules on 19-21 November 2014 and which led to the establishment of the Pelindo III Gratification Control Unit to support the Company's commitment to creating a healthy work environment.



Guna mendukung fungsi UPG Pelindo III agar dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka disusun pedoman Peraturan Direksi No. PER.0009/HK.03/P.III-2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) beserta Anak Perusahaan.

Berdasarkan peraturan Direksi tersebut, Perseroan membentuk Tim Unit Pengendalian Gratifikasi dengan Keputusan Direksi No. PER.0009/HK.03/P.III-2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) beserta Anak Perusahaan dan menetapkan Sekretaris Perusahaan sebagai koordinator pelaksanaan pelaporan Pegawai Perusahaan yang menerima gratifikasi.

Tugas dan Tanggung Jawab dari unit kerja terkait pelaksanaan pelaporan gratifikasi adalah:

1. Menyosialisasikan dan mempublikasikan program pengendalian gratifikasi;
2. Menerima laporan gratifikasi dari Insan Pelindo III yang telah dilengkapi dengan dokumen terkait;
3. Menelaah laporan gratifikasi dan memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk penetapannya;
4. Meneruskan laporan gratifikasi yang menjadi kewenangan KPK untuk mendapat penetapan status dari penerimaan gratifikasi yang wajib dilaporkan oleh KPK;
5. Menindaklanjuti rekomendasi KPK atas penetapan status gratifikasi;
6. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK dalam memproses laporan penerimaan gratifikasi dari Insan Pelindo III;
7. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan gratifikasi; dan
8. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi efektivitas pengendalian gratifikasi dengan KPK.

In order to support the function of Pelindo III UPG so that it can run effectively and efficiently, the Board of Directors Regulation No. PER.0009/HK.03/P.III-2018 dated March 9, 2018 regarding Gratification Control within PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and its Subsidiaries.

Based on the regulation of the Board of Directors, the Company formed a Gratification Control Unit Team with the Decree of the Board of Directors No. PER.0009/HK.03/P.III-2018 dated March 9, 2018 regarding Gratification Control within PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and its Subsidiaries and appointed the Corporate Secretary as the coordinator of the implementation of reporting on Company Employees who received gratuities.

Duties and Responsibilities related to the implementation of gratification report are:

1. Disseminating and publishing the gratification control programme;
2. Receiving the gratification report from all Personnel of Pelindo III that has been completed by other related documents;
3. Reviewing the gratification report and providing recommendations to the BOD for the determination;
4. Forwarding the gratification report which is a KPK authority to obtain status determination on gratification that shall be reported by the KPK;
5. Following up recommendations from KPK on the determination of gratification status;
6. Conducting coordination and consultation with KPK to process the gratification report from all Personnel of Pelindo III; and
7. Submitting recapitulation report of handling and follow up of gratification report; and
8. Performing monitoring and evaluation of the effectiveness of gratification control with KPK.



Kategori Gratifikasi

1. Gratifikasi yang wajib dilaporkan:

Adalah penerimaan gratifikasi sehubungan dengan jabatan sebagai Insan Pelindo III dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya.

2. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan:

Adalah penerimaan gratifikasi dari pihak ketiga berdasarkan perjanjian yang sah atau karena Insan Pelindo III meraih prestasi tertentu.

3. Gratifikasi dalam Kedinasan:

Adalah penerimaan gratifikasi yang diterima Insan Pelindo III dalam pelaksanaan kedinasan yang ditugaskan kepadanya sebagai wakil Perusahaan.

Gratification Category

1. The gratification that is obliged to report:

Gratuity receipt concerning the position as a Personnel of Pelindo III is against their duties and obligations.

2. The gratification that is not obliged to report:

Gratuity receipt from third parties based on valid agreement or due to certain achievements received by the Personnel of Pelindo III.

3. Gratification in Official Duties:

Gratuity receipt by a Personnel of the Company during the official duties assigned to them as the Company's representative.

Media Pelaporan Gratifikasi

Laporan gratifikasi dapat disampaikan melalui:



UP. UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Jl. Perak Timur No.610, Surabaya, 60165

Situs Web / Website : gratifikasi.pelindo.co.id

Suret / Email : lapor.gratifikasi.pelindo.co.id

Telepon / Phone : 0811 3484 333



Penanganan Pengaduan Gratifikasi

Tim UPG menerima atau menolak laporan gratifikasi yang seluruhnya kemudian dicatat dalam laporan dan selanjutnya diserahkan kepada KPK. Sepanjang tahun 2020, Tim UPG mendapat penerimaan sebanyak 1 laporan.

Handling of Gratification Complaints

The UPG team accepts or rejects the gratification report, all of which is then recorded in the report and then submitted to the KPK. Throughout 2020, the UPG Team received 1 report receipt.

Laporan Gratifikasi Tahun 2020

Pada tahun 2020, tercatat adanya 1 pemberian gratifikasi yang diterima pegawai Perseroan, baik dalam jajaran Dewan Komisaris, Direksi, General Manager, hingga staf. Rincian mengenai laporan gratifikasi yang diterima di tahun 2020 terangkum dalam tabel sebagai berikut:

2020 Gratification Report

In 2020, it was recorded that there were 1 gratuities received by the Company's employees, both in the ranks of the Board of Commissioners, Directors, General Manager, to staff. Details regarding the gratification reports received in 2020 are summarized in the following table:

**Penerimaan Gratifikasi Tahun 2020****Gratuity Received in 2020**

Penerima / Recipient	Pemberi / Sender	Tempat dan Waktu Penerimaan / Place and Time of Receipt	Bentuk Gratifikasi / Form of Gratification	Jumlah / Amount	Nilai Gratifikasi (Estimasi) / Gratification Value (Estimation)	Keterangan / Information
Oscar Yogi Y. ASM Pengembangan SDM / HC Development	UPN Surabaya	Ruang Seminar UPN Jatim	Uang / Money 4 Maret 2020	1	Rp.2.159.895	Pemberian dalam rangka menjadi pembicara dalam acara seminar, namun terdapat kelebihan honor yang diterima sesuai aturan perusahaan. Kelebihan sudah disetorkan ke kas negara sesuai aturan dari KPK yang berlaku. / Fee was given for being a speaker at the seminar, but there was an excess of honorarium received according to company rules. The excess has been deposited into the state treasury according to the applicable regulations from the KPK.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Sebagai upaya untuk menghadirkan lingkungan kerja yang bebas dari praktik penyimpangan dan kecurangan yang dapat merugikan banyak pihak sekaligus mengoptimalkan penerapan GCG di seluruh lini, Perseroan menyusun dan menerapkan Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System-WBS*), sebuah sistem yang berfungsi untuk mengelola laporan pengaduan terkait perilaku yang dinilai melanggar hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya dengan seluruh laporan itu bersifat rahasia, anonim, serta mandiri. Di dalam Perseroan, WBS berperan penting dalam mendukung komitmen seluruh Insan Pelindo III serta pihak-pihak terkait lainnya untuk mendukung pengungkapan pelanggaran yang terjadi di lingkungan kerja Perseroan.

Pihak Pengelola Pengaduan

Untuk menjalankan WBS, Perseroan memiliki Tim Terpadu Penanganan Pengaduan (TTPP) sesuai Surat Keputusan Direksi No. PER.78/HK.03/P.III-2015 tanggal 1 Oktober 2015. Pihak pelapor dapat menyampaikan pengaduan pelanggaran melalui suatu mekanisme baku serta dikelola secara profesional oleh TTPP.

Secara umum, tugas dan wewenang TTPP mencakup:

- Melakukan investigasi berkoordinasi dengan Satuan Pengawasan Intern, Direktorat, Biro dan cabang perusahaan, serta pihak eksternal terkait;

WHISTLEBLOWING SYSTEM

In an effort to provide a work environment that is free from irregularities and fraudulent practices that can harm many parties while optimizing the implementation of GCG in all lines, the Company has developed and implemented the Whistleblowing System-WBS, a system that functions to manage complaints reports regarding behavior that is considered unlawful, unethical/improper actions with all reports being confidential, anonymous, and independent. Within the Company, WBS plays an important role in supporting the commitment of all Pelindo III personnel and other relevant parties to support the disclosure of violations that occur in the Company's work environment.

Whistleblowing System Manager

To manage the WBS, the Company has a Whistleblowing Integrated Team (TTPP) in accordance with the Decree of the Board of Directors No. PER.78/HK.03/P.III-2015 dated October 1, 2015. The reporting party can submit complaints of violations through a standard mechanism and professionally managed by the TTPP.

In general, the duties and authorities of the TTPP include:

- Conduct investigation by coordination with the Internal Audit, Directorate, Company Bureau and branch, and related external parties;



- Membuat kesimpulan, saran, dan rekomendasi atas hasil pemeriksaan/permintaan keterangan terhadap pengaduan yang disampaikan pelapor; dan
- Memberikan klarifikasi/jawaban yang diperlukan apabila terdapat pihak lain yang meminta keterangan tentang tindak lanjut pengaduan.

Susunan Keanggotaan TPPP terdiri atas:

1. Ketua merangkap anggota;
2. Wakil Ketua merangkap anggota;
3. Sekretaris merangkap anggota; dan
4. Anggota.

Ruang Lingkup Pengaduan

Ruang lingkup dari pengaduan yang dapat dilaporkan melalui WBS mencakup hal-hal seperti:

- a. Pelanggaran Peraturan Perusahaan;
- b. Pelanggaran Kode Etik Perusahaan;
- c. Penyalahgunaan kewenangan jabatan;
- d. Tindakan yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan Perusahaan;
- e. Kecurangan/penggelapan/pencurian aset-aset Perusahaan; dan
- f. Pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa.

Mekanisme Pengaduan Pelanggaran

Pengaduan pelanggaran disampaikan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Pengaduan yang disampaikan pelapor diterima melalui media sebagaimana dalam Pasal 4 dan dicatat dalam buku pengaduan oleh TPPP.
2. Dalam hal pelaporan dilakukan melalui surel atau faksimile, bukti-bukti pengaduan disampaikan setelah dinyatakan perlu ditindaklanjuti.
3. Pelaporan dilakukan dengan mencantumkan identitas Pelapor yaitu nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi untuk memudahkan tindak lanjut.
4. Pelaporan yang dilakukan tanpa identitas akan tetap diproses, namun demikian akan dipertimbangkan terlebih dahulu kesungguhan isi laporan, kredibilitas, dan bukti-bukti yang diajukan, serta kemungkinan untuk melakukan konfirmasi pelaporan.

- Make conclusions, suggestions, and recommendations based on the results of examination/request for information submitted by the whistleblower; and
- Provide the necessary clarification/answer if other parties are enquiring the information on the follow-up to the report.

TPPP Membership Composition consists of:

1. Head and member;
2. Deputy Head and member;
3. Secretary and member; and
4. Members

Scope of Reports

The scope of complaints which can be submitted through WBS covers the following:

- a. Violations of the Company's Regulations;
- b. Violations of the Code of Conduct;
- c. Misuse of office authority;
- d. Acts causing a loss or reduction of the Company's income;
- e. Fraud/embezzlement/theft of the Company's assets; and
- f. Violations of the procurement of goods and services.

Reporting Mechanism

The reporting mechanism is as follows:

1. Complaints submitted by the whistleblowers are received through media as stated in Article 4 and recorded in the complaint book by TPPP.
2. In the event that the report is made by e-mail or facsimile, evidence of the complaint is submitted after it is stated that it needs to be followed up.
3. The reporting is conducted by mentioning the Whistleblower's identity including name, address, and telephone number that can be contacted to facilitate the follow-up.
4. A report with no identity is still processed, however, the truth of content, credibility and proof submitted, as well as the possibility to confirm the report will be considered first.



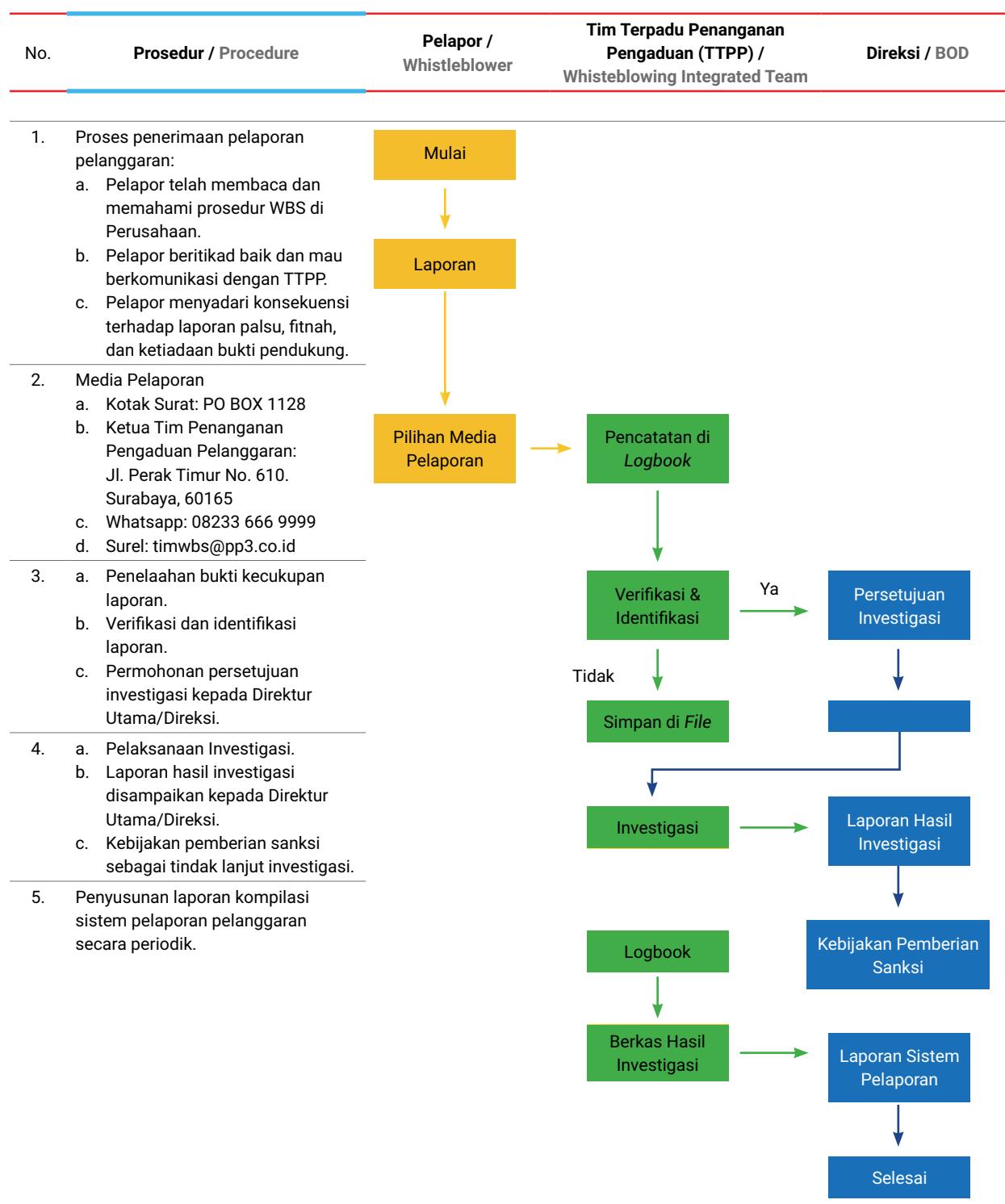
5. TPP organises the reporting documents based on classifications of type of complaint, work unit of the reported party, as well as a timeline of complaints tailored to the applicable archiving procedure.
6. TPP then conducts verification/analysis on the reports submitted by the whistleblowers to determine whether a report submitted by a whistleblower has been based on or has met the reporting requirements/criteria.
7. TPP formulates the results of verification/analysis and identifies with the following measures:
 - a) Formulating subject matter of the report;
 - b) Relating reporting materials with the applicable regulations;
 - c) Verifying document and/or information related to the received reporting materials; and
 - d) Formulating settlement plan or measures required.
8. If the report has met the requirements, TPP will report to the President Director or other Directors to obtain approval for the investigation.
9. If the report does not meet the requirements, then TPP will not follow up and the report is filed.
10. The authorised official who approves to conduct the follow up is as follows:
 - a. President Director, if the reported party is an employee/another Director/Commissioner of the Company and or the Company's employee works in a subsidiary and or affiliated company, as well as another person who works for and on behalf of Pelindo III;
 - b. Other Directors, if the reported party is the President Director.
11. About the report which has obtained approval from the President Director or other Directors, TPP will conduct follow up based on its duties and responsibilities.



12. Teknik investigasi merupakan kerahasiaan dan kewenangan tim TPP dengan prinsip-prinsip proposisional dan sebanding atas materi yang dilaporkan.
13. Selama proses investigasi terhadap dugaan pelanggaran, terlapor memiliki hak-hak yang meliputi:
- a. Mendapatkan pemberitahuan dengan jelas tentang maksud pemanggilan;
 - b. Memberikan keterangan secara bebas;
 - c. Mengajukan saksi dan bukti-bukti guna memberikan keterangan.
14. Hasil investigasi dituangkan dalam laporan hasil investigasi yang disusun secara sistematik, singkat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan serta memuat kesimpulan yang dilengkapi dengan data pendukung dan saran tindak lanjut.
15. Hasil investigasi yang telah dibahas dan disepakati bersama tim TPP disampaikan kepada Direktur Utama dan/atau Direktur lainnya untuk ditindaklanjuti sesuai hasil evaluasi investigasi.
12. Investigation technique is the confidentiality and authority of TPP team with the principles proportional to the subject reported.
13. During an investigation of the alleged violation, the reported party has the rights which cover:
- a. Obtaining clear notification about the purpose to summon;
 - b. Providing independent information;
 - c. Proposing witness and proof to provide information.
14. Results of the investigation are contained in a report on the results of the investigation which is prepared systematically, concisely, clearly, and accountable as well as conclusion along with supporting data and recommendations for the follow-up.
15. The results of the investigation being discussed and agreed with the TPP team are submitted to the President Director and or other Directors for the follow-up based on evaluation results of the investigation.

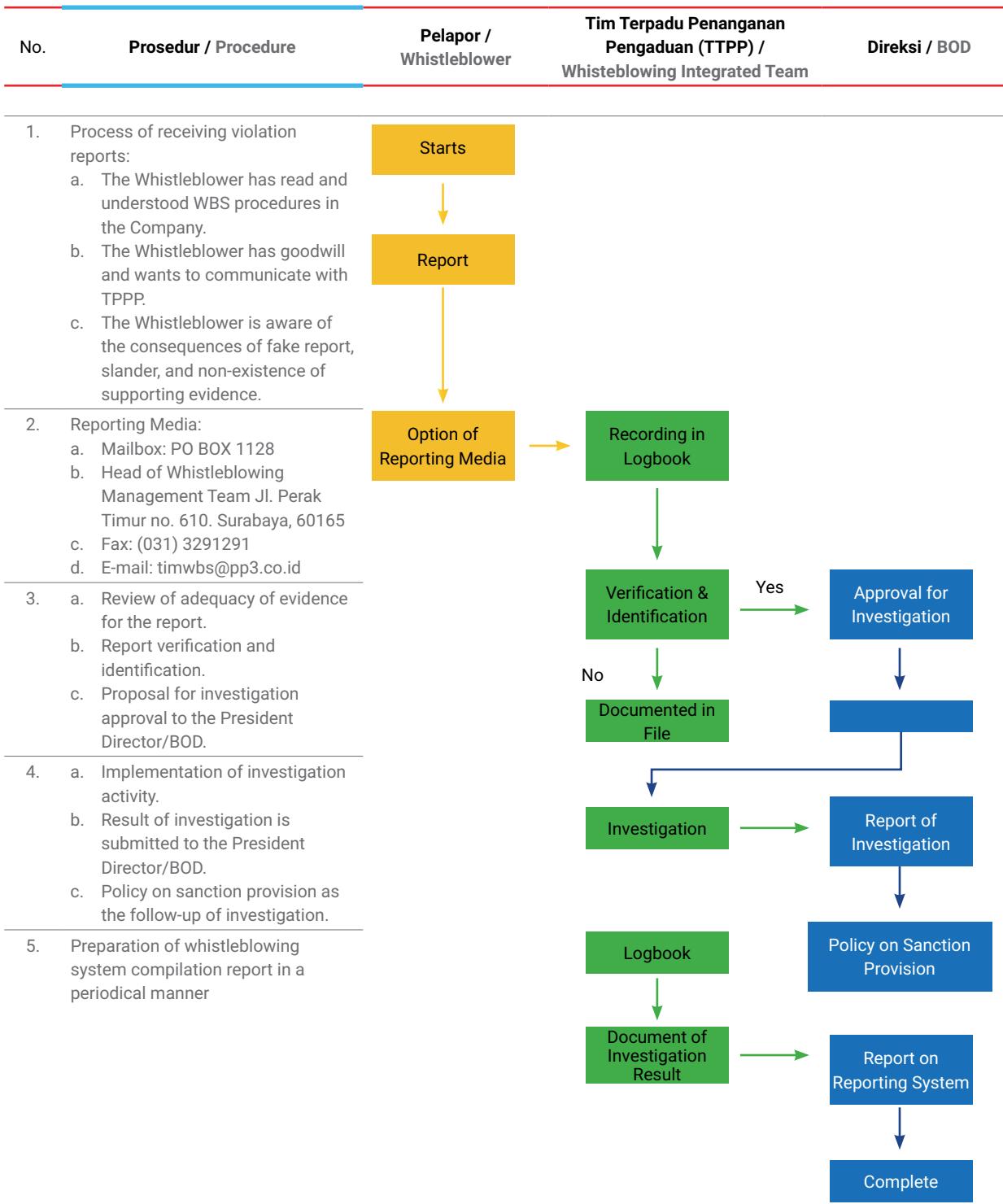
Alur Sistem Pelaporan Pelanggaran

Perseroan menjamin pelapor yang telah menyampaikan laporan pengaduan melalui WBS memperoleh perlindungan dari pihak-pihak.



Flowchart of Whistleblowing System

The Company guarantees that the whistleblower who has submitted a complaint report through WBS gets protection from the parties.





Perlindungan terhadap Pelapor

Perseroan menjamin pelapor yang telah menyampaikan laporan pengaduan melalui WBS memperoleh perlindungan dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Untuk itu, Perseroan memiliki kebijakan perlindungan terhadap pelapor, antara lain sebagai berikut:

1. Identitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan;
2. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, atau tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun; dan
3. Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan Pengaduan/Penyingkapan tersebut.

Di samping berbagai upaya perlindungan di atas, Perseroan turut menyediakan perlindungan kepada pelapor dalam bentuk perlindungan hukum. Dengan adanya berbagai upaya perlindungan ini, diharapkan dapat menjamin keselamatan dan keamanan dari Pelapor dan keluarganya sekaligus mendorong seluruh Insan Pelindo III serta pihak lainnya untuk dengan tegas dan berani menyampaikan laporan pelanggaran kepada Perseroan.

Media Penyampaian Laporan

Perseroan menyediakan berbagai saluran dan media penyampaian laporan untuk memberikan akses mudah kepada pelapor dalam melaporkan tindak pelanggaran yang terjadi. Media dan saluran tersebut terdiri dari:



Protection to Whistleblowers

The Company guarantees that whistleblowers who have submitted complaints reports through WBS receive protection from irresponsible parties. To that end, the Company has a policy of protecting whistleblowers, including the following:

1. Confidentiality of the Whistleblowers' identities is guaranteed by the Company;
2. The Company guarantees protection against the Whistleblowers from all forms of threats, intimidation or disagreeable actions of any party as long as the Whistleblowers keep the confidentiality of reporting submitted to any party; and
3. Protection against the Whistleblowers also applies for parties who carry out Investigation or parties who provide information related to such Complains/Disclosure

In addition to the various protection measures above, the Company also provides protection to the whistleblower in the form of legal protection. With these various protection measures, it is hoped that it will ensure the safety and security of the Whistleblower and his/her family while encouraging all Pelindo III personnel and other parties to firmly and boldly submit reports of violations to the Company.

Reporting Media

The Company provides various channels and media for submitting reports to provide easy access to whistleblowers in reporting violations that have occurred. The media and channels consist of:



Sosialisasi dan Evaluasi Whistleblowing System

Guna mengoptimalkan penerapan sistem WBS, Perseroan melakukan sosialisasi kepada seluruh Insan Pelindo III secara berkelanjutan. Selain itu, Perseroan turut menjalankan evaluasi secara berkala dalam rangka pemutakhiran dan penyempurnaan untuk mewujudkan WBS yang terus berjalan optimal seiring dengan perkembangan bisnis Perseroan. Sosialisasi tersebut diselenggarakan bersama dengan sosialisasi penerapan GCG, publikasi melalui intranet, dan media komunikasi lainnya.

Laporan Pelanggaran Tahun 2020 dan Tindak Lanjutnya

Hingga akhir tahun 2020, terdapat 1 (satu) laporan pelanggaran yang diterima Perseroan melalui mekanisme WBS, sehingga terdapat tindak lanjut dari pelaporan tersebut.

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN)

Perseroan turut mendukung upaya dan komitmen pemerintah dalam menjalankan program untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berwibawa melalui pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Perseroan mewajibkan pejabat hingga satu tingkat di bawah Direksi untuk menyusun dan melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Untuk mengelola dan menangani LHKPN di lingkungan Perseroan, Direktorat Sumber Daya Manusia menjadi pihak yang berperan menjalankan fungsi tersebut sebagai Koordinator Pelaksana dengan mengacu pada Keputusan Direksi No. PER.27/HK.03/P.III-2009 tanggal 9 September 2009 *juncto* Peraturan Direksi No. PER.28/HK.03/P.III-2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi No. PER.27/HK.03/P.III-2009 tentang Kewajiban Penyampaian LHKPN di lingkungan Pelindo III.

Dissemination and Evaluation of Whistleblowing System

In order to optimize the implementation of the WBS system, the Company conducts dissemination to all Pelindo III personnel on an ongoing basis. In addition, the Company also carries out regular evaluations in order to update and improve to realize a WBS that continues to run optimally in line with the Company's business development. The dissemination was held together with the dissemination of GCG implementation, publications via the intranet, and other communication media.

2020 Whistleblowing Report and Follow-up

Until the end of 2020, there was 1 (one) violation report received by the Company through the WBS mechanism, which has been followed up by the Company.

REPORT OF STATE OFFICIAL ASSETS

The Company also supports the government's efforts and commitments in carrying out programs to present a clean, integrity, and authoritative government through the implementation of the State Official Assets Report (LHKPN). In order to achieve this, the Company requires officials up to one level below the Board of Directors to compile and report their assets to the Corruption Eradication Commission (KPK) of the Republic of Indonesia.

To manage and handle LHKPN within the Company, the Directorate of Human Resources is the party that plays a role in carrying out this function as the Implementing Coordinator with reference to the Decree of the Board of Directors No. PER.27/HK.03/P.III-2009 dated September 9, 2009 in conjunction with Board of Directors Regulation No. PER.28/HK.03/P.III-2016 dated July 15, 2016 concerning Amendments to the Regulation of the Board of Directors No. PER.27/HK.03/P.III-2009 concerning Obligations to Submit LHKPN within Pelindo III.



Dasar Hukum Pengelolaan LHKPN di Perseroan

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam pengelolaan dan pengaturan LHKPN di lingkungan Pelindo III adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- b. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN.
- c. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- d. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Mekanisme Pelaporan LHKPN

Mekanisme yang digunakan dalam pelaporan LHKPN dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 28 tahun 1999 di mana penyelenggara berkewajiban untuk:

- Diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat.
- Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun.
- Mengumumkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun.
- Mengumumkan harta kekayaannya.

LHKPN Dewan Komisaris dan Direksi

Legal Basis of LHKPN Management in the Company

Basis regulation of LHKPN within Pelindo III consists of:

- a. Law No. 28 of 1999 on Clean State Administration Free of Corruption, Collusion, and Nepotism.
- b. Law No. 19 of 2003 on SOEs.
- c. Law No. 13 of 2003 on Employment.
- d. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.

Submission Mechanism

Mechanism of company official assets report submission is conducted through referring to Law No. 28 of 1999 in which officials are obliged to:

- Report asset before, during, and after tenure.
- Report assets for the first time in office, mutation, promotion, and retirement.
- Announce assets for the first time in office, mutation, promotion, and retirement.
- Announce their assets.

Board of Commissioners and Board of Directors LHKPN

Nama / Name	Jabatan / Position	Pelaporan Terakhir / Last Report	
		Periode Lapor / Reporting Period	Tanggal Kirim / Date
Dewan Komisaris / Board of Commissioners			
Marsetio	Komisaris Utama / President Commissioner	2020	29 Juli 2020 / July 29, 2020
Heru Sukanto	Komisaris / Commissioner
Otto Ardianto	Komisaris / Commissioner	2020	7 Mei 2020 / May 7, 2020
Ridwan Djamaruddin	Komisaris / Commissioner
Ali Mochtar Ngabalin	Komisaris / Commissioner
Dedi Syarif Usman	Komisaris / Commissioner	2020	25 Februari 2021 / February 25, 2021
Direksi / Board of Directors			
U. Saefudin Noer	Direktur Utama / President Director
Putut Sri Muljanto	Direktur Operasi dan Komersial / Operation and Commercial Director	2020	23 Februari 2021 / February 23, 2021
Boy Robyanto	Direktur Teknik / Engineering Director	2020	28 Maret 2021 / March 28, 2021
Edi Priyanto	Direktur Sumber Daya Manusia / Human Capital Director	2020	1 Maret 2021 / March 1, 2021
Endot Endrardono	Direktur Keuangan / Financial Director	2020	23 Maret 2021 / March 23, 2021
Kokok Susanto	Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis / Business Transformation and Development Director	2020	4 Maret 2021 / March 4, 2021



Rekapitulasi Penyampaian LHKPN dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun / Year	Wajib Lapor LHKPN / LHKPN Compulsory Reporting	Sudah Lapor / Reported	Belum Lapor / Not Reported
1.	2016	292	213	79
2.	2017	188	170	18
3.	2018	208	169	39
4.	2019	205	192	13
5.	2020	201	201	0

AKSES DAN INFORMASI PERUSAHAAN

Sebagai bentuk wujud nyata komitmen Perseroan dalam mengedepankan keterbukaan dan transparansi informasi, Perseroan menyediakan media dan saluran untuk akses informasi bagi seluruh pihak, yakni sebagai berikut:

1. Situs Web : www.pelindo.co.id
2. Twitter : @pelindo3
3. Facebook : pelindo III
4. Instagram : @pelindo3
5. YouTube : pelindo III
6. Contact Center : (+631) 329 8631-37
7. Majalah Internal : Majalah Dermaga (www.majalahdermaga.com)

PRAKTIK BAD CORPORATE GOVERNANCE

Salah satu komitmen Perseroan dalam menjalankan praktik terbaik GCG diwujudkan melalui pencegahan dan minimalisasi potensi terjadinya praktik *Bad Corporate Governance* yang mampu membawa dampak negatif terhadap keberlangsungan usaha Perseroan. Evaluasi atas keberhasilan pencegahan terjadinya praktik *Bad Corporate Governance* dijabarkan dalam uraian sebagai berikut:

Laporan atas Aktivitas Perusahaan yang Mencemari Lingkungan

Selama tahun 2020, tidak terdapat laporan terkait indikasi aktivitas kegiatan usaha Perseroan yang mencemari lingkungan sekitar.

Laporan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Selama tahun 2020, Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakan. Hal tersebut juga sejalan dengan tidak terdapatnya teguran kepada Perseroan terkait permasalahan perpajakan.

Recapitulation of Submission of LHKPN in the Last 5 Years

COMPANY ACCESS AND INFORMATION

As a tangible manifestation of the Company's commitment to promoting openness and transparency of information, the Company provides media and channels for access to information for all parties, namely as follows:

1. Website : www.pelindo.co.id
2. Twitter : @pelindo3
3. Facebook : pelindo III
4. Instagram : @pelindo3
5. YouTube : pelindo III
6. Contact Center : (+631) 329 8631-37
7. Internal Magazine : Dermaga Magazine (www.majalahdermaga.com)

BAD CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES

One of the Company's commitments in implementing GCG best practices is realized through the prevention and minimization of the potential for Bad Corporate Governance practices that can have a negative impact on the Company's business continuity. Evaluation of the success of preventing the occurrence of Bad Corporate Governance practices is described in the following description:

Report on Company Activities Polluting the Environment

During 2020, there were no reports related to indications of the Company's business activities that pollute the surrounding environment.

Tax Obligation Fulfillment Report

During 2020, the Company has fulfilled all tax obligations. This is also in line with the absence of a warning to the Company regarding tax issues.



Kasus Terkait Buruh dan Pegawai

Selama tahun 2020, tidak tercatat adanya kasus yang melibatkan Perseroan dengan buruh atau pegawai Perseroan. Rekapitulasi perkara dan gugatan baik yang dilakukan dan/atau ditujukan kepada Perseroan telah dijabarkan dalam pembahasan informasi Perkara Penting dalam Laporan Tahunan ini.

Hubungan dengan Pejabat Publik dan Pejabat Pemerintah

Perusahaan memiliki kebijakan yang mengatur hubungan dengan pejabat publik dan pejabat pemerintah melalui ketentuan hubungan kerja yang dimuat dalam Pedoman Kode Etik (*Code of Conduct*) Perusahaan.

Cases Related to Workers and Employees

During 2020, there were no recorded cases involving the Company with workers or employees of the Company. The recapitulation of cases and lawsuits either made and/or addressed to the Company has been described in the discussion of Important Case information in this Annual Report.

Relations with Public Officials and Government Officials

The company has a policy that regulates relations with public officials and government officials through the provisions for employment relations contained in the Company's Code of Conduct.





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY







TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Sebagai wujud komitmen terhadap pelaksanaan kegiatan CSR secara menyeluruh dan berkelanjutan, Perseroan melaksanaan proses identifikasi serta analisis terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihasilkan setiap aktivitas bisnis dan operasional yang dijalankan (*due diligence*), guna menyusun pemetaan skala prioritas atas isu-isu keberlanjutan secara lengkap.

As a form of commitment to the implementation of CSR activities in a comprehensive and sustainable manner, the Company identify and analyze the social, economic and environmental impacts generated by each business activity and operations (*due diligence*) to prepare a complete priority scale mapping of sustainability issues.



KOMITMEN PELAKSANAAN CSR

Perseroan meyakini bahwa pertumbuhan bisnis yang kuat dan berkelanjut, hanya dapat diwujudkan seiring pemenuhan tanggung jawab serta pemberian manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan. Hubungan yang harmonis antara Perseroan dan pemangku kepentingan merupakan faktor penting yang menyediakan dukungan bagi pelaksanaan aktivitas bisnis dan operasional Perusahaan, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Atas dasar keyakinan itu, Perusahaan memiliki komitmen yang kuat untuk senantiasa menjaga pelaksanaan serta pengelolaan pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) secara menyeluruh dan berkesinambungan.

CSR IMPLEMENTATION COMMITMENT

The Company believes that strong and sustainable business growth can only be realized along with fulfilling responsibilities and providing benefits to all stakeholders. A harmonious relationship between the Company and stakeholders is an important factor that provides support for the implementation of the Company's business activities and operations, both in the short and long term. Based on this belief, the Company has a strong commitment to always maintaining the implementation and management of the fulfillment of corporate social responsibility (CSR) in a comprehensive and sustainable manner.



Seluruh kegiatan CSR Perseroan dilaksanakan dan dikelola dengan mengacu pada prinsip *triple bottom lines*, yaitu fokus pada 3 (tiga) aspek utama secara seimbang antara pemerolehan keuntungan (*profit*), pemenuhan dan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan (*planet*), serta dukungan pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*). Melalui pemenuhan pada ketiga aspek tersebut, Pelaksanaan kegiatan CSR Perseroan diharapkan mampu terdorong secara efektif untuk menghadirkan manfaat secara seimbang kepada bermacam unsur pemangku kepentingan. Pada jangka panjang, acuan pelaksanaan pada *triple bottom lines* tersebut merupakan bagian dari upaya Perseroan untuk secara konsisten mewujudkan sasaran pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

All of the Company's CSR activities are carried out and managed by referring to the triple bottom lines principle, namely focus on 3 (three) main aspects in a balanced manner between profit, fulfillment and obligation to preserve the environment (planet), as well as support for the fulfillment of community welfare (people). Through the fulfillment of these aspects, it is hoped that the implementation of the Company's CSR activities will be able to be effectively motivated to bring benefits in a balanced manner to various elements of stakeholders. In the long term, the implementation guidelines for the triple bottom lines are part of the Company's efforts to consistently achieve the Sustainable Development Goals.

Lebih lanjut, pelaksanaan dan pengelolaan CSR Perseroan berpedoman pada standar mutu ISO 26000 *Social Responsibility* yang memuat 7 (tujuh) aspek pemenuhan tanggung jawab. Pedoman standar mutu tersebut diyakini sebagai pendekatan yang komprehensif, guna memastikan kegiatan CSR yang dijalankan dapat senantiasa menjangkau isu-isu terkait pemangku kepentingan secara menyeluruh.

Ketujuh aspek pemenuhan tanggung jawab sosial sesuai standar mutu ISO 26000 *Social Responsibility* adalah sebagai berikut:

Furthermore, the implementation and management of the Company's CSR refers to the ISO 26000 Social Responsibility quality standard that contains 7 (seven) aspects of fulfilling responsibility. The quality standard guideline is believed to be a comprehensive approach to ensure that CSR activities that are carried out can always cover issues related to stakeholders as a whole.

The seven aspects of fulfilling social responsibility according to the ISO 26000 Social Responsibility quality standard are as follows:



**1. Tata Kelola Organisasi (*Organizational Governance*)**

Merupakan fokus terkait aspek tata kelola pelaksanaan, mencakup penetapan, pengambilan, dan penerapan keputusan strategis yang menjamin prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dapat diterapkan secara efektif.

2. Hak-Hak Asasi Manusia (*Human Rights*)

Merupakan fokus pelaksanaan kegiatan CSR atas aspek pemenuhan hak dasar yang dimiliki setiap orang sebagai manusia, khususnya kepada seluruh karyawan sebagai bagian dari pemangku kepentingan, antara lain mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, serta budaya.

3. Praktik Kegenagakerjaan (*Labour Practices*)

Merupakan fokus pelaksanaan kegiatan CSR terkait pemenuhan tanggung jawab pada aspek kebijakan dan praktik pekerjaan, serta aspek ketenagakerjaan secara umum.

4. Lingkungan (*Environment*)

Merupakan fokus pelaksanaan kegiatan CSR yang menjamin terlaksananya pemenuhan tanggung jawab atas dampak lingkungan yang dihasilkan, dari proses bisnis dan operasional yang dijalankan, terhadap masyarakat khususnya yang berada di sekitar area perusahaan.

5. Operasi yang Adil (*Fair Operating Practices*)

Merupakan fokus pelaksanaan kegiatan CSR pada penerapan perilaku etis dan adil, pada interaksi serta pelaksanaan komitmen antara Perusahaan dan para pemangku kepentingan.

6. Isu Konsumen

Merupakan fokus pelaksanaan kegiatan CSR oleh perusahaan pada pemenuhan hak-hak komsumen terkait produk dan layanan yang diberikan, mencakup kejelasan informasi serta perlakuan yang adil.

7. Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat

Merupakan fokus pelaksanaan kegiatan CSR terkait hubungan dan interaksi perusahaan dengan masyarakat di lingkungan operasinya.

1. Organizational Governance

Focus related to aspects of governance, including the establishment, making, and implementation of strategic decisions that ensure the principles of social responsibility can be applied effectively.

2. Human Rights

Focus of the implementation of CSR activities on the aspects of fulfilling the basic rights that everyone as a human being, especially to all employees as part of the stakeholders, including civil, political, economic, social and cultural rights.

3. Labour Practices

Focus of implementation of CSR activities related to fulfilling responsibilities in aspects of work policies and practices, as well as aspects of employment in general.

4. Environment

Focus of the implementation of CSR activities that ensure the fulfillment of responsibility for environmental impacts generated from the business and operational processes that are carried out on the community, especially those around the Company area.

5. Fair Operating Practices

Focus of the implementation of CSR activities on the implementation of ethical and fair behavior, on the interaction and implementation of commitments between the Company and its stakeholders.

6. Consumer Issues

It is the focus of the implementation of CSR activities by companies on fulfilling the rights of consumers related to the products and services provided, including clarity of information and fair treatment.

7. Community Involvement and Development

Focus of the implementation of CSR activities related to company relationships and interactions with the community in its operating environment.



Di samping itu, pelaksanaan CSR oleh Perseroan memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai acuan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan pengelolaan, sesuai standar mutu ISO 26000. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Kepatuhan kepada hukum;
2. Menghormati instrumen/badan-badan internasional;
3. Menghormati pemangku kepentingan dan kepentingannya;
4. Akuntabilitas;
5. Transparansi;
6. Perilaku bisnis yang beretika;
7. Melakukan tindakan pencegahan; serta
8. Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia.

DASAR PELAKSANAAN CSR PERUSAHAAN

Pelaksanaan CSR Perseroan didasarkan pada sejumlah regulasi serta perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut sekaligus merupakan wujud komitmen Perseroan untuk senantiasa mengedepankan aspek pemenuhan terhadap ketentuan hukum (*compliance*), sebagai bagian dari upaya implementasi pemenuhan tanggung jawab kepada regulator sebagai bagian dari pemangku kepentingan. Dasar-dasar pelaksanaan CSR Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 Pasal 88 tentang BUMN;
3. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
4. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN;
5. Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN;
6. Peraturan Menteri BUMN No. 02/MBU/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.

In addition, the implementation of CSR by the Company has basic principles as a reference in decision making and management policies, according to the ISO 26000 quality standard. These principles are:

1. Respect for the rule of law;
2. Respect for international norms of behavior;
3. Respect for stakeholders interests;
4. Accountability;
5. Transparency;
6. Ethical behavior;
7. Take precautions; and
8. Respect for human rights.

BASIS OF CSR IMPLEMENTATION

The implementation of the Company's CSR refers to a number of applicable regulations and laws. This is also a manifestation of the Company's commitment to always prioritizing the aspect of compliance as an effort to fulfill its responsibilities to regulators as part of the stakeholders. The basis of implementing the Company's CSR are as follows:

1. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company;
2. Article 88 of Law No. 19 of 2003 on SOE;
3. Government Regulation No. 47 of 2012 on Corporate Social and Environment Responsibility of Limited Liability Companies;
4. Regulation of the Minister of SOE No. PER-09/MBU/07/2015 dated July 3, 2015 on Partnership and Community Development Program of SOEs;
5. Regulation of the Minister of SOE No. PER-03/MBU/12/2016 dated December 16, 2016 on Amendment to Regulation of the Minister of SOE No. PER-09/MBU/07/2015 on Partnership and Community Development Program of SOE;
6. Regulation of the Minister of SOE No. 02/MBU/2017 on the Second Amendment to Regulation of the Minister of SOE No. PER-09/MBU/07/2015 on Partnership and Community Development Program of SOE.



KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA CSR PERUSAHAAN

Perseroan berkomitmen untuk menjaga pelaksanaan CSR di tiap tahun buku agar dapat terlaksana secara efektif dan tepat sasaran. Sebagai wujud komitmen tersebut, Perseroan telah menyusun serta menerapkan *Roadmap* Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tahun 2007-2021. *Roadmap* tersebut merupakan pedoman serta arah kebijakan, yang disusun berdasarkan hasil pemetaan secara menyeluruh terhadap kepentingan dan harapan pemangku kepentingan, khususnya pada area pelabuhan serta sekitar lingkungan operasional Perseroan secara umum. Secara lebih lanjut, *Roadmap* PKBL Perseroan tersebut merupakan dasar acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan selama periode 1 (satu) tahun ke depan. Penjelasan secara terperinci mengenai *Roadmap* PKBL PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tahun 2007-2021 akan disajikan pada subbagian Tanggung Jawab Perusahaan terkait Bidang Sosial Kemasyarakatan pada laporan ini.

Pengelola Kegiatan CSR dan PKBL

Sesuai dengan Peraturan Direksi No. PER.0051/OS.01/HOFC-2020 pada tanggal 18 Maret 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Kantor Pusat, pelaksanaan kegiatan CSR dan PKBL Perseroan berada di bawah kewenangan Unit Kerja PKBL yang melekat pada organ Sekretaris Perusahaan, serta bertanggung jawab secara struktural kepada Direktur Sumber Daya Manusia. Per 31 Desember 2020, susunan pengelola kegiatan CSR dan PKBL Perseroan adalah sebagai berikut:

POLICY AND GOVERNANCE OF COMPANY CSR

The Company is committed to maintaining the implementation of CSR in each financial year so that it can be carried out effectively and on target. As a manifestation of this commitment, the Company has compiled and implemented the PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Roadmap for the Partnership and Community Development Program (PKBL) for 2007-2021. The roadmap is a guideline and policy direction, which is compiled based on the results of a comprehensive mapping of the interests and expectations of stakeholders, particularly in the port area and around the Company's operational environment in general. Furthermore, the Company's PKBL Roadmap is the basis of reference for the preparation of the Work Plan and Budget for the Partnership and Community Development Program for the next 1 (one) year period. A detailed explanation of the PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) PKBL Roadmap 2007-2021 will be presented in the subsection of Corporate Responsibility related to the Social and Community Sector in this report.

CSR and PKBL Manager

In accordance with the Decree of the Board of Directors No. PER.0051/OS.01/HOFC-2020 dated March 18, 2020 Concerning the Organizational Structure and Work Procedure of the Head office of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), the implementation of the Company's CSR and PKBL activities is under the authority of the PKBL Work Unit which is attached to the organs of the Corporate Secretary, and is structurally responsible to the Human Capital Director. As of December 31, 2020, the composition of the management of the Company's CSR and PKBL activities is as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position
Edi Priyanto	Direktur Sumber Daya Manusia / Human Capital Director
Ardhy Wahyu Basuki	Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary
Herry Wismanto	Asekper PKBL / PKBL Assistant Corporate Secretary
Tjatur Rachman Salfatah	Staf PKBL / PKBL Staff
Erfan Aspriandi	Staf PKBL / PKBL Staff
Diah Utari	Staf PKBL / PKBL Staff
Eka Youwerisa C	Staf PKBL / PKBL Staff
Sugeng Riadi	Staf PKBL / PKBL Staff
Luqman Firmansyah	Staf PKBL / PKBL Staff



Metode Due Diligence terhadap Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan

Sebagai wujud komitmen terhadap pelaksanaan kegiatan CSR secara menyeluruh dan berkelanjutan, Perseroan melaksanaan proses identifikasi serta analisis terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihasilkan setiap aktivitas bisnis dan operasional yang dijalankan (*due diligence*). Pelaksanaan metode *due diligence* dilaksanakan melalui keterlibatan unit-unit terkait dalam struktur tata kelola Perseroan, guna menyusun pemetaan skala prioritas atas isu-isu keberlanjutan secara lengkap. Hasil metode *due diligence* tersebut selanjutnya menjadi acuan bagi Perseroan dalam menyusun kebijakan serta rencana kerja/program yang secara khusus menyasar pada isu-isu tersebut.

Identifikasi Pemangku Kepentingan Terdampak

Perseroan telah melakukan pemetaan terhadap unsur-unsur pemangku kepentingan, baik yang memiliki keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas bisnis dan operasional Perseroan. Pemetaan tersebut dilakukan dengan mengacu pada AA1000 Stakeholder Engagement Standard tahun 2015, melalui pemenuhan atas aspek-aspek berikut ini:

1. Ketergantungan (*Dependency/D*)
2. Pertanggungjawaban (*Responsibility/R*)
3. Perhatian (*Tention/T*)
4. Kedekatan (*Proximity/P*)
5. Pengaruh (*Influence/I*)
6. Keberagaman Pandangan (*Diverse Perspective/DP*)

Berdasarkan hasil pemetaan, unsur-unsur pemangku kepentingan Perseroan secara terperinci dijabarkan sebagai berikut:

D = *Dependency*; T = *Tention*; P = *Proximity*;
R = *Responsibility*; I = *Influence*; DP = *Diverse Perspective*

Due Diligence Method on Social, Economic, and Environmental Impact

As a form of commitment to the implementation of CSR activities in a comprehensive and sustainable manner, the Company carries out a process of identification and analysis of the social, economic and environmental impacts generated by each business and operational activity carried out (*due diligence*). The due diligence method is carried out through the involvement of related units in the Company's governance structure, in order to prepare a complete mapping of priority scales of sustainability issues. The results of the due diligence method then serve as a reference for the Company in formulating policies and work plans/programs that specifically target these issues.

Identification of Impacted Stakeholders

The Company has mapped the elements of stakeholders, both those who have direct or indirect involvement with the Company's business and operational activities. The mapping was carried out by referring to the 2015 AA1000 Stakeholder Engagement Standard, through the fulfillment of the following aspects:

1. Dependency/D
2. Responsibility/R
3. Tention/T
4. Proximity/P
5. Influence/I
6. Diverse Perspective/DP

Based on the results of the mapping, the elements of the Company's stakeholders are described in detail as follows:

Pemangku Kepentingan / Stakeholder	Basis Penetapan / Basis of Determination	Topik Utama / Main Topic	Pelibatan / Engagement
Pelanggan / Customer	D, R, T, I, P	Pelayanan / Customer Pemenuhan kepuasan layanan / Fulfilling service satisfaction Pemenuhan kontrak / Contract fulfilment	Website dan <i>frontline information</i> Layanan <i>call center</i> Survei kepuasan pelanggan



D = Dependency;
R = Responsibility;

T = Tention;
I = Influence;

P = Proximity;
DP = Diverse Perspective

Pemangku Kepentingan / Stakeholder	Basis Penetapan / Basis of Determination	Topik Utama / Main Topic	Pelibatan / Engagement
Pemegang Saham / Shareholder	D, R, I, P	Dividen / Dividends	Pelaporan kinerja / Performance Reporting
		Pengembangan usaha / Business development	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) / Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)
		Tata Kelola Perusahaan / Good Corporate Governance	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) / Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)
Pemerintah / Government	D, R, T, I, DP, P	Kepatuhan Perseroan terhadap peraturan/ perundang-undangan yang berlaku / Company's compliance to the prevailing laws and regulations	Pelaporan Kinerja / Performance Reporting
		Kinerja Perusahaan / Company's Performance	
		Pembayaran pajak / Tax Payment	
Pegawai / Employee	D, R, T, I, P	Sosialisasi kebijakan dan strategi terkait kepegawaian / Dissemination regarding Policy and Strategy concerning employees	Media internal / Internal Media
		Kesetaraan/kesempatan kerja dan jenjang karier / Equality in work opportunity and career	Serikat pekerja / Workers Union
		Pengembangan kompetensi, karier, pelaksanaan program pelatihan / Competency, career development, implementation of training program	
		Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja / Occupational Health and Safety Insurance	
		Kesejahteraan pegawai / Employee's welfare	
Mitra Kerja/ Pemasok / Work Partner/Supplier	D, R, T, P	Hubungan komersial / Commercial Relationship	Kunjungan ke lokasi operasional / Visitation to operational location
		Pemenuhan kontrak yang saling memberi manfaat, transparan, serta adil / Fulfilment of mutual beneficial contract, transparent, and fair	Koordinasi operasional / Operational coordination
		Penjelasan lingkup kemitraan/hubungan kerja / Explanation regarding scope of partnership and work relationship	
Masyarakat / Community	D, R, T, I, DP, P	Optimalisasi pelaksanaan program CSR / Optimizing the implementation of CSR program	Koordinasi dan sosialisasi program CSR / Coordination and dissemination of CSR Programs
		Penggunaan tenaga kerja lokal / Empowering local workforce	Rekrutmen tenaga kerja / Employees Recruitment
		Pelaksanaan program CSR / CSR program implementation	Interaksi Perusahaan kepada masyarakat / Company's interaction with the community



Isu-Isu Penting Terkait Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan yang Berkaitan dengan Aktivitas Perusahaan

Perseroan melaksanakan proses identifikasi terhadap isu-isu penting meliputi aspek sosial, ekonomi, serta lingkungan hidup. Proses identifikasi tersebut secara khusus didasarkan pada tingkat dampak serta pengaruh signifikan oleh aktivitas bisnis dan operasional yang dijalankan PT Pelindo III (Persero). Perseroan kemudian merumuskan sasaran pada masing-masing isu yang berhasil teridentifikasi, guna menjadi dasar penentuan keterlibatan serta tindak lanjut yang akan dilakukan melalui program CSR.

Informasi secara lebih terperinci mengenai hal tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut:

Important Social, Economic and Environmental Issues Related to Company Activities

The Company carries out an identification process for important issues including social, economic and environmental aspects. The identification process is specifically based on the level of impact and significant influence on the business and operational activities carried out by PT Pelindo III (Persero). The Company then formulates targets for each of the identified issues, in order to become the basis for determining the involvement and follow-up that will be carried out through the CSR program.

Detailed information about this can be seen in the following table:

Isu Penting	Sasaran / Target	Tindak Lanjut / Follow-up	
Kinerja Ekonomi / Economic Performance	Dampak signifikan kepada pemangku kepentingan / Significant impact on stakeholders	Kinerja ekonomi yang dihasilkan memberikan dampak bagi keberlanjutan dan keberlangsungan usaha Perseroan, serta dampak pada penentuan jumlah yang disisihkan pada pembagian dividen kepada Pemegang Saham dan struktur anggaran pengembangan sosial-lingkungan. Perseroan menjalankan pengelolaan bisnis yang profesional, serta melalui mitigasi risiko yang kuat. Selain itu, Perseroan senantiasa memperhatikan kualitas layanan yang diberikan dan melakukan evaluasi secara berkala guna peningkatan kualitas di masa depan.	The resulting economic performance has an impact on the sustainability and business continuity of the Company, as well as the impact on determining the amount set aside in dividend distribution to Shareholders and the structure of the socio-environmental development budget. The Company carries out professional business management, as well as through strong risk mitigation. In addition, the Company always pays attention to the quality of provided services and conducts periodic evaluations to improve quality in the future.
Anti-Korupsi / Anti-Corruption	Dampak signifikan pada pemangku kepentingan / Significant impact on stakeholders	Tindak korupsi dapat merugikan Perseroan, khususnya pada aspek kualitas kepatuhan, reputasi, maupun terkait pengelolaan aset. Perseroan menerapkan kebijakan anti-korupsi yang disosialisasikan, diinternalisasikan, serta dievaluasi secara berkala guna menjaga pelaksanaannya tetap efektif.	Corruption may harm the Company, especially in the aspect of quality, compliance, reputation, as well as related to asset management. The Company implements an anti-corruption policy which is disseminated, internalized, and evaluated regularly in order to keep its implementation effective.
Dampak Ekonomi Tidak Langsung	Dampak signifikan pada pemangku kepentingan/ Significant impact on stakeholders	Penyaluran dana pada program pengembangan infrastruktur layanan menjadi investasi sosial jangka panjang. Perseroan melibatkan masyarakat dalam penyambilan keputusan pada proses perencanaan serta evaluasi program CSR/PKBL.	Channeling funds for service infrastructure development programs into long-term social investments. The Company involves the community in making decisions in the planning and evaluation process of the CSR/PKBL program.



Isu Penting	Sasaran / Target	Tindak Lanjut / Follow-up
Ketenagakerjaan	Pemenuhan aspek kepatuhan terhadap peraturan/perundangan yang berlaku; Dampak signifikan terhadap pegawai / Fulfillment of aspect of compliance with applicable laws/regulations; Significant impact on employees	Pemenuhan kecukupan Sumber Daya Manusia memberi dampak pada tingkat efektivitas dan efisiensi proses bisnis Perseroan. Perseroan melaksanakan rekrutmen serta menjamin skema kompensasi yang adil, meliputi skema imbalan pasca-kerja. Fulfilling the adequacy of Human Resources has an impact on the level of effectiveness and efficiency of the Company's business processes. The Company carries out recruitment and guarantees a fair compensation scheme, including a post-employment benefit scheme.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) / Occupational Health and Safety (OHS)	Dampak signifikan pada pegawai Perseroan / Significant impact on employees	Terpenuhinya peraturan mengenai K3 serta penerapan kebijakan K3 memiliki dampak pada tingkat kecelakaan kerja di lingkungan operasional Perseroan. Perseroan telah memiliki kebijakan internal serta unit khusus yang mengawasi penerapan aspek-aspek K3. Fulfillment of regulations regarding OHS and implementation of OHS policies has an impact on the level of occupational accidents in the Company's operational environment. The Company has an internal policy as well as a special unit that oversees the implementation of K3 aspects.
Pelatihan dan Pendidikan / Training and Education	Dampak signifikan pada pegawai Perseroan / Significant impact on employees	Pembekalan dan pengembangan kompetensi pegawai melalui pelaksanaan program pelatihan dan pendidikan. Pelaksanaan program tersebut diharapkan mampu memberikan dampak berupa peningkatan keterampilan serta kemampuan pegawai. Perseroan mengelola program pengembangan kompetensi pegawai, melalui struktur anggaran yang memadai. Program tersebut dijalankan secara proporsional sesuai kebutuhan jabatan serta posisi masing-masing pegawai. Equipping and developing employee competencies through the implementation of training and education programs. The implementation of the program is expected to have an impact in the form of increasing the skills and abilities of employees. The Company manages employee competency development programs, through an adequate budget structure. The program is carried out proportionally according to the needs of the position of each employee.
Masyarakat / Public	Dampak signifikan kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan / Significant impact on the community as stakeholders	Pemenuhan tanggung jawab terhadap pengembangan sosial kemasyarakatan berdampak pada kualitas reputasi Perseroan, hingga keberlangsungan pertumbuhan bisnis yang dijalankan. Perseroan melaksanakan program CSR dan PKBL sebagai wujud kontribusi terhadap masyarakat, khususnya pada area lingkungan sekitar Perseroan. Fulfilling the responsibility for social community development has an impact on the quality of the Company's reputation, and the sustainability of its business growth. The Company implements CSR and PKBL programs as a form of contribution to society, especially in the environmental areas around the Company.



RUANG LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL YANG MENJADI KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Ruang lingkup pelaksanaan program CSR dan PKBL Perseroan mengacu pada ketentuan pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-19/MBU/07/2015. Sesuai dasar pelaksanaan tersebut, Perseroan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pemberdayaan kondisi lingkungan serta sosial masyarakat, melalui pemanfaatan dana yang berasal dari laba yang diperoleh sebesar maksimal 2% atas laba bersih untuk Program Kemitraan, serta 2% atas laba bersih untuk Program Bina Lingkungan.

KEGIATAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN YANG MELEBIHI KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Dalam pelaksanaannya, program CSR dan PKBL yang dijalankan Perseroan telah mengacu pada kebijakan serta peraturan, hingga melebihi batas-batas kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait hal tersebut, standar serta Regulasi yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan program CSR dan PKBL Perseroan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Lingkup Kegiatan	Acuan Standar dan Regulasi
Tata Kelola CSR	GRI Standards 2016 dan ISO 26001 Social Responsibility / GRI Standards 2016 and ISO 26001 Social Responsibility
Lingkungan Hidup	Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan / Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management; ISO 14001: 2015 concerning Environmental Management Systems
Ketenagakerjaan	Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan / Law No. 13 of 2003 concerning Manpower
Ekonomi	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan / Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance

SCOPE OF SOCIAL RESPONSIBILITY WHICH IS THE OBLIGATION OF THE COMPANY

The scope of the implementation of the Company's CSR and PKBL programs refers to the Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (SOE) and Regulation of the Minister of SOE No. PER-03/MBU/12/2016 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-19/MBU/07/2015. In accordance with the basis of this implementation, the Company has the responsibility to carry out the empowerment of environmental and social conditions, through the use of funds derived from profits of a maximum of 2% of net profit for the Partnership Program, and 2% of net profit for the Community Development Program.

CORPORATE RESPONSIBILITY ACTIVITIES THAT EXCEED COMPANY OBLIGATIONS

CSR and PKBL programs carried out by the Company refer to policies and regulations, to the extent that they have exceeded the limits of obligations in accordance with applicable regulations. In this regard, the standards and regulations used as a reference for the implementation of the Company's CSR and PKBL programs can be seen in the table below:



Berdasarkan acuan standar dan regulasi di atas, terdapat pelaksanaan program kegiatan CSR dan PKBL Perseroan yang telah melebihi kewajiban, dengan uraian sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Desa Panglipuran

Desa Panglipuran merupakan desa wisata binaan Pelindo III sejak tahun 2015, yang merupakan area tujuan wisata turis mancanegara dari kapal pesiar di pelabuhan Perseroan. Bantuan Pelindo III disalurkan berupa sarana dan prasarana umum, meliputi pengadaan toilet umum, perbaikan gapura kampung, serta perbaikan berugak. Melalui pelaksanaan program kegiatan tersebut, Desa Panglipuran telah berkembang sebagai desa paling bersih pada skala dunia, yang secara rutin menjadi salah satu destinasi penting bagi wisatawan asing serta domestik.

2. Program Basic Safety Training Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)

Merupakan pelatihan yang diselenggarakan oleh Perseroan dan dapat diikuti secara gratis oleh TKBM yang bekerja di pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo III. Pelatihan ini dilaksanakan secara rutin sejak tahun 2018, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran para TKBM terhadap aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di pelabuhan.

SUMBER DAN REALISASI ANGGARAN DANA CSR DAN PKBL

Sampai dengan tahun 2020, Pelindo III telah merealisasikan penyaluran pinjaman kepada sejumlah 111 UMKM yang tersebar di 7 provinsi di wilayah kerja Perusahaan, dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp7,05 miliar. Di samping itu, realisasi penyaluran Program Bina Lingkungan untuk tahun 2020 adalah mencapai sebesar Rp72,93 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar 192% dibanding realisasi pada tahun 2019 yang sebesar Rp38,08 miliar. Rata-rata bantuan yang disalurkan adalah sebesar Rp163,15 juta, atau meningkat sebesar 309% dibanding nilai rata-rata bantuan pada tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp52,81 juta. Pada realisasi tersebut, Bantuan korban bencana alam dan non alam menjadi komponen dengan realisasi terbesar, yaitu senilai Rp41,31 miliar, atau meningkat dibanding realisasi komponen yang sama pada tahun 2019 yang sebesar Rp0,71 miliar. Selama tahun 2020 perusahaan fokus pada penanganan pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 baik di lingkungan perusahaan maupun masyarakat.

Based on the standard and regulatory references above, there is an implementation of the Company's CSR and PKBL activities that have exceeded its obligations as follows:

1. Desa Panglipuran Empowerment Program

Desa Panglipuran is a tourist village which has been developed by Pelindo III since 2015. The village is also a destination for international tourists disembarked from cruise ships in Pelindo III ports. Pelindo III aided in the form of public infrastructure and facilities such as public toilets, repair on kampong gates, and repair on berugak. Through this program, Desa Panglipuran developed as the cleanest village in global scale and becomes one of the destinations for foreign and domestic tourists.

2. Basic Safety Training for Loading and Unloading Workforce (TKBM)

Basic Safety Training for Loading Unloading Workforce (TKBM) is a free training provided by the Company for TKBM working in ports managed by Pelindo III. The training has been implemented since 2018 to improve TKBM awareness on K3.

SOURCE AND REALIZATION OF CSR AND PKBL BUDGET

As of 2020, Pelindo III has disbursed loans to 111 MSMEs spread across 7 provinces in the Company's working areas, with a budget realization value of Rp7.05 billion. In addition, the realization of the distribution of the Community Development Program for 2020 reached Rp72.93 billion, or an increase of 192% compared to the realization in 2019 which amounted to Rp38.08 billion. The average aid distributed was Rp163.15 million, or increased by 309% compared to the average value of social assistance in 2019 which was recorded at Rp52.81 million. In this realization, Assistance for natural and non-natural disaster victims became the component with the largest realization, which was valued at Rp41.31 billion, or increased compared to the realization of the same component in 2019 which amounted to Rp0,71 billion. Throughout 2020 the Company focused in preventing the spread of COVID-19 pandemic both in the company's and community's surroundings.



TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERKAIT HAK ASASI MANUSIA

Kebijakan CSR terkait Hak Asasi Manusia

Perseroan memiliki komitmen untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan dalam membangun hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan, melalui pemenuhan terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Pemenuhan terhadap hal tersebut berorientasi pada nilai-nilai kesetaraan serta anti-diskriminasi. Dengan demikian, Perseroan memberikan perlakuan yang sama kepada pemangku kepentingan, tanpa membedakan latar belakang identitas meliputi suku, agama, ras, gender, serta budaya.

Pada tataran pelaksanaan, pemenuhan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia berfokus pada lingkup ketenagakerjaan dengan tetap memperhatikan pemenuhan kepada masyarakat di sekitar area operasional Perseorong. Penerapan kebijakan Hak Asasi Manusia pada lingkup internal telah memiliki dasar pelaksanaan, berupa kesepakatan bersama yang secara khusus mengatur hubungan industrial antara Perseroan dengan seluruh pegawai melalui keberadaan Serikat Pekerja.

Target CSR terkait Hak Asasi Manusia

Pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait Hak Asasi Manusia memiliki target pelaksanaan, yaitu terwujudnya hubungan industrial yang berorientasi pada terjaminnya hak asasi seluruh Insan Perseroan. Pada orientasi tersebut, Perseroan menjamin ketersediaan lingkungan kerja yang kondusif, yaitu terbebas dari praktik diskriminasi dalam bentuk apa pun. Dengan demikian, Perseroan menjamin adanya kesetaraan *gender* pada pemberian kesempatan terkait pengembangan kompetensi dan jenjang karier. Selain itu, Perseroan juga menjamin tidak adanya tenaga kerja anak serta tenaga kerja paksa di lingkungan operasional.

Kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Hak Asasi Manusia

Kebebasan Berserikat

Perseroan menjamin pemenuhan hak pekerja untuk berserikat, berkumpul, serta menyampaikan pendapat. Lebih lanjut, Perseroan mendukung kegiatan pekerja dalam berserikat melalui keberadaan Serikat Pekerja

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON HUMAN RIGHTS

CSR Policy on Human Rights

The Company is committed to making the necessary efforts to build a harmonious relationship with stakeholders through the fulfillment of human rights principles. The fulfillment of these matters is oriented towards the values of equality and anti-discrimination. Thus, the Company provides equal treatment to stakeholders, regardless of identity backgrounds including ethnicity, religion, race, gender, and culture.

At the implementation level, the fulfillment of human rights principles focuses on the scope of manpower while still paying attention to fulfillment to the communities around the Company's operational areas. The implementation of Human Rights policies in the internal scope has an implementation basis, in the form of a collective agreement that specifically regulates industrial relations between the Company and all employees through the existence of a Trade Union.

CSR Target related to Human Rights

The implementation of social responsibility related to Human Rights has an implementation target, namely the realization of industrial relations that are oriented towards ensuring the human rights of all Company personnel. In this orientation, the Company guarantees the availability of a favorable work environment, which is free from discriminatory practices in any form. Thus, the Company guarantees gender equality in providing opportunities related to competency development and career paths. In addition, the Company also guarantees the absence of child labor and forced labor in the operational environment.

Corporate Responsibility Activities for Human Rights

Freedom of Association

The Company guarantees the fulfillment of workers' rights to associate, gather, and express opinions. Furthermore, the Company supports workers' activities in association through the existence of the Labor Union of Pelabuhan



Pelabuhan Indonesia III (SPPI III). **Serikat Pekerja Pelindo III telah terdaftar pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ... sesuai Nomor Bukti Pencatatan ... tanggal ...**

Terkait hal tersebut, kesepakatan bersama yang dimiliki Perseroan dan Serikat Pekerja telah memuat pemenuhan hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk terkait jika terhadap perubahan struktur organisasi, perubahan prosedur kerja, serta perubahan ketentuan operasional lainnya.

Pengelolaan SDM dengan Prinsip Kesetaraan, Keadilan, dan Anti-Diskriminatif

Perseroan menerapkan prinsip kesetaraan, keadilan, serta anti-diskriminatif dalam keseluruhan proses pengelolaan SDM, meliputi tahap rekrutmen, pengembangan kompetensi, serta terkait kesempatan pengembangan karier. Prinsip yang dimaksud terwujud melalui kesempatan kerja yang sama kepada seluruh pegawai, tanpa membedakan latar belakang identitas masing-masing. Selain itu, Perseroan menerapkan prinsip *affirmative action* yang mendukung penciptaan budaya non-diskriminatif yang menjamin pemberian perlakuan serta kesempatan kerja yang setara.

Perseroan memahami pentingnya pemenuhan prinsip keadilan kepada setiap pegawai, melalui pemberian bobot kerja serta fasilitas yang seimbang dan proporsional. Untuk itu, Perseroan tidak hanya memberikan skema kompensasi yang adil dan kompetitif, tetapi juga durasi kerja yang wajar guna mendukung pegawai untuk tetap menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional yang dimiliki.

Kebijakan terkait Izin Meninggalkan Pekerjaan

Perseroan memiliki kebijakan yang memfasilitasi pegawai untuk dapat meninggalkan pekerjaan untuk alasan tertentu, sebagai bagian dari pemenuhan tanggung jawab terkait Hak Asasi Manusia. Beberapa jenis izin meninggalkan pekerjaan yang difasilitasi oleh Perseroan, terdiri atas Cuti Tahunan, Cuti Bersalin, Cuti Sakit, serta Cuti Ibadah Keagamaan. Perincian mengenai jenis-jenis tersebut adalah sebagai berikut:

Indonesia III (SPPI III). Labor Union of Pelindo III has been registered with the Manpower and Transmigration Sub-Department ... according to the Registration Evidence No. ... dated

In this regard, the collective agreement owned by the Company and the Labor Union contains the fulfillment of the rights and obligations of both parties, including those related to changes in organizational structure, changes in work procedures, and changes in other operational conditions.

HR Management with the Principles of Equality, Fairness, and Anti-Discrimination

The Company implements the principles of equality, fairness, and anti-discrimination in the entire HC management process, including the recruitment phase, competency development, and related career development opportunities. This principle is realized through equal employment opportunities for all employees, regardless of the background of each identity. In addition, the Company implements the principle of affirmative action that supports the creation of a non-discriminatory culture that ensures equal treatment and employment opportunities.

The Company understands the importance of fulfilling the principle of fairness to every employee, through the provision of work weight and facilities that are balanced and proportionate. For this reason, the Company does not only provide a fair and competitive compensation scheme, but also a reasonable duration of work to support employees to maintain a balance between their personal and professional lives.

Policy on Permission to Leave Work

The Company has a policy that facilitates employees to be able to leave work for certain reasons, as part of fulfilling their responsibilities related to human rights. Several types of permits to leave work are facilitated by the Company, consisting of annual leave, maternity leave, sick leave, and religious worship leave. Details regarding these types are as follows:



1. Cuti Tahunan

Diberikan kepada pegawai sejumlah 14 hari kerja setiap tahun.

2. Cuti Bersalin

Pegawai perempuan memiliki hak atas cuti bersalin yang diberikan oleh Perseroan sebanyak 3 (tiga) bulan kalender, yaitu pada rentang 1,5 bulan sebelum persalinan hingga 1,5 bulan setelah persalinan.

3. Cuti Sakit

Pegawai yang sakit berhak atas cuti sakit dengan menyertakan surat keterangan dokter. Secara khusus, pegawai perempuan yang mengalami keguguran berhak atas cuti selama 1,5 bulan sejak terjadinya keguguran sesuai surat keterangan dari dokter.

4. Cuti Ibadah Keagamaan

Diberikan kepada setiap pegawai yang ingin melaksanakan ibadah keagamaan, meliputi ibadah-ibadah khusus yang dilaksanakan pada jam operasional Perseroan.

Dampak CSR terkait Hak Asasi Manusia

Penerapan tanggung jawab perusahaan pada aspek pemenuhan Hak Asasi Manusia oleh Pelindo III secara garis besar berfokus pada isu ketenagakerjaan. Dampak pelaksanaan pemenuhan tanggung jawab terkait hal tersebut dapat diukur melalui tingkat keterikatan serta produktivitas pegawai, yang secara dominan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang kondusif pada area operasional Perseroan.

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERKAIT OPERASI YANG ADIL

Kebijakan CSR terkait Operasi yang Adil

Perseroan merupakan entitas usaha yang bersinggungan dengan berbagai pihak dalam kegiatan operasional sehari-hari yang dijalankan. Atas kesadaran itu, Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa mewujudkan penerapan prinsip operasi yang adil sebagai bagian dari upaya pemenuhan tanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan. Komitmen ini terwujud salah satunya melalui kebijakan internal berupa Pedoman Etika dan Perilaku Pelindo III yang disahkan melalui Keputusan Bersama antara Dewan Komisaris, Direksi, dan Serikat Pekerja Pelindo III No. HK.202/09/DK.P.III/2017; HK.03/14/P.III-2017; 36/DP.SPPI/IX-2017 tanggal 25

1. Annual Leave

Annual Leave is given to employees for 14 days of work.

2. Maternity Leave

Female employees have the right for three-months of maternity leave from the Company, starting 1.5 months before and after childbirth.

3. Sick Leave

Sick employees have the right to sick leave by submitting a medical certificate. Female employees with miscarriage are also given 1.5 months of leave since the miscarriage per the medical certificate.

4. Religious Worship Leave

Given to all employees who wish to carry out religious worship, including certain worship that is carried out in operational hours.

CSR Impact on Human Rights

Implementation of corporate responsibility for the fulfillment of human rights in Pelindo III largely focuses on labor issues. The impact of fulfilling responsibilities in this regard can be measured through the level of engagement and productivity of employees, which are predominantly influenced by a favorable work environment in the operational areas of the Company.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON FAIR OPERATIONS

CSR Policy related to Fair Operations

The Company is a business entity that intersects with various parties in its daily operational activities. With this awareness, the Company is committed to always realizing the implementation of fair operating principles as part of the effort to fulfill its responsibilities to all stakeholders. One of the ways to achieve this commitment is through an internal policy in the form of Code of Conduct of Pelindo III which were validated by a Joint Decree between the Board of Commissioners, the Board of Directors and the Labor Union of Pelindo III No. HK.202/09/DK.P.III/2017; HK.03/14/P.III-2017; 36/DP.SPPI/IX-2017 dated September 25, 2017. Specifically, the internal



September 2017. Secara spesifik, kebijakan internal tersebut merupakan Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang berlaku dalam lingkup operasional lingkungan kerja Pelindo III, yang sekaligus merupakan penyempurnaan dari pedoman etika dan perilaku sebelumnya. Pedoman Etika dan Perilaku Pelindo III mengatur etika serta perilaku seluruh Insan Perseroan melalui nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai standar perilaku bagi seluruh karyawan Pelindo III.

Pedoman Etika dan Perilaku Pelindo III merupakan dasar penerapan kebijakan internal lain, meliputi kebijakan pengendalian gratifikasi, Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*), serta terkait mekanisme pengadaan barang dan jasa. Secara khusus, komitmen penerapan pengendalian gratifikasi oleh Perseroan diwujudkan melalui kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang salah satunya terwujud pada proses penyusunan kebijakan. Kerja sama ini ditandai oleh penandatanganan Pernyataan Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi oleh Komisaris Utama, Direktur Utama, dan Ketua Umum SPPI III yang disaksikan oleh Direktur Gratifikasi KPK pada tanggal 12 Maret 2014. Tindak lanjut dari penandatanganan komitmen tersebut meliputi penyelenggaraan lokakarya (*workshop*) penyusunan aturan gratifikasi yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan KPK, serta pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Pelindo III.

Selain itu, sebagai upaya pencegahan praktik penyimpangan dan kecurangan sekaligus sebagai langkah memperkuat penerapan GCG, Perseroan telah memiliki serta menjalankan WBS. WBS dijalankan guna mengoptimalkan peran serta Insan Perseroan dan pihak lain terkait, dalam mengungkap praktik pelanggaran atau kecurangan yang terjadi pada lingkup internal Pelindo III. Komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan sistem tersebut terwujud salah satunya melalui pembentukan Tim Terpadu Penanganan Pengaduan (TTPP) sesuai Surat Keputusan Direksi No. PER.78/HK.03/P.III-2015 tanggal 1 Oktober 2015.

Mohon informasi terbaru/pemutakhiran SK pada tahun 2020, jika tersedia

policy is a Code of Conduct that applies in the operational scope of Pelindo III's work environment, which is also an improvement of the previous code of conduct. Pelindo III's Code of Conduct regulates the ethics and behavior of all Company personnel through ethical values which are explicitly stated as the standard of behavior for all Pelindo III employees.

Pelindo III's Code of Conduct is the basis for implementing other internal policies, including gratuity control policies, Whistleblowing System (WBS), and goods and services procurement mechanisms. In particular, the commitment to implementing gratification control by the Company is manifested in cooperation with the Corruption Eradication Commission (KPK), one of which is manifested in the policy formulation process. This cooperation was marked by the signing of a Statement of Commitment to the Implementation of Gratification Control by the President Commissioner, President Director, and General Chairperson of SPPI III which was witnessed by the Director of Gratification of the Corruption Eradication Commission (KPK) on March 12, 2014. The follow-up to signing the commitment included organizing a workshop on drafting gratuity rules. which is carried out in collaboration with the KPK, as well as the establishment of the Pelindo III Gratification Control Unit.

As an effort to prevent the practice of deviation and fraud as well as a step to strengthen the implementation of GCG, the Company already owns and operates the WBS. The WBS is implemented to optimize the participation of the Company's personnel and other related parties, in exposing violations or fraud practices that occur within the internal scope of Pelindo III. The Company's commitment to implementing this system is manifested, one of which is by establishing an Integrated Complaint Handling Team (TTPP) in accordance with the Decree of the Board of Directors No. PER.78/HK.03/P.III-2015 dated October 1, 2015.

Mohon informasi terbaru/pemutakhiran SK pada tahun 2020, jika tersedia



Target CSR terkait Operasi yang Adil

Perseroan melaksanaan praktik dan aktivitas bisnis berdasar pada operasi yang adil, dengan tujuan untuk memperkuat integritas, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam menjalankan tanggung jawab yang diemban kepada pemangku kepentingan. Selain itu, pelaksanaan aspek operasi yang adil juga ditujukan sebagai pemenuhan serta peningkatan kualitas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan/perundang-undangan yang berlaku. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa mewujudkan pengelolaan bisnis yang terbebas dari praktik *fraud* atau penyimpangan lain, yang pada dasarnya akan berdampak merugikan bagi kelangsungan usaha Perseroan serta mengganggu hubungan baik dengan pemangku kepentingan.

Kegiatan CSR yang Dilakukan

Pelaksanaan Kode Etik

Mengacu pada ketentuan pada Pedoman Etika dan Perilaku Pelindo III, setiap Insan Perseroan yang diketahui serta terbukti melakukan pelanggaran kode etik akan dikenakan sanksi yang tegas sesuai ketentuan pada peraturan/perundang-undangan yang berlaku. Hingga 31 Desember 2020, terdapat sejumlah ... pelanggaran kode etik, dengan perincian pelanggaran serta proses penindakan sebagai berikut:

CSR Target related to Fair Operation

The Company carries out business practices and activities based on fair operations, with the aim of strengthening integrity, accountability, and professionalism in carrying out the responsibilities assigned to stakeholders. In addition, the implementation of fair operating aspects is also aimed at fulfilling and increasing the quality of the Company's compliance with the prevailing laws/regulations. The Company is committed to always realizing business management that is free from fraud practices or other deviation, which basically will have a detrimental impact on the Company's business continuity and disrupt good relations with stakeholders.

CSR Activities

Implementation of Code of Conduct

Referring to the Code of Conduct of Pelindo III, every Person of the Company who is known and proven to have violated the code of conduct will be subject to strict sanctions in accordance with the provisions of the applicable laws/regulations. As of December 31, 2020, there were ... violations of the code of conduct, with details of violations and the process of action as follows:

Laporan Pelanggaran Kode Etik tahun 2020
2020 Code of Conduct Violation Report

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah	Sanksi / Sanctions
1	Teguran Lisan / Oral Warning	...	Potongan bonus dengan persentase yang disesuaikan
2	Disiplin Ringan / Light Discipline	...	Teguran tertulis dan potongan bonus dengan persentase yang disesuaikan
3	Disiplin Sedang / Medium Discipline	...	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penundaan kenaikan penghasilan selama 1 (satu) tahun dan tidak dapat dipromosikan selama setengah tahun 2. Penundaan penghasilan selama 2 (dua) tahun dan tidak dapat dipromosikan selama 1 (satu) tahun 3. Penurunan penghasilan 1 (satu) periodik lebih rendah dan tidak dapat dipromosikan selama 1,5 (satu setengah) tahun 4. Penurunan penghasilan 1 (satu) periodik lebih rendah dan tidak dapat dipromosikan selama 2 (dua) tahun 5. Potongan bonus dengan persentase yang disesuaikan
			<ul style="list-style-type: none"> Bonus deduction with varying percentage Written warning and bonus deduction with varying percentage 1. Delay in income increase for 1 (one) year and cannot be promoted for half a year 2. Delay in income increase for 2 (two) years and cannot be promoted for 1 (one) year 3. Income decrease by 1 (one) year and cannot be promoted for 1.5 (one and a half) years 4. Income decrease by 1 (one) level lower and cannot be promoted for 2 (two) years 5. Bonus Deduction with varying percentage



Laporan Pelanggaran Kode Etik tahun 2020
2020 Code of Conduct Violation Report

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah	Sanksi / Sanctions
4	Disiplin Berat / Severe Discipline	...	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan kelas jabatan 1 (satu) tingkat lebih rendah dan tidak dapat dipromosikan selama 2 (dua) tahun 2. Penurunan kelas jabatan 2 (dua) tingkat lebih rendah dan tidak dapat dipromosikan selama 3 (tiga) tahun 3. Penurunan kelas jabatan 3 (tiga) tingkat lebih rendah dan tidak dapat dipromosikan selama 4 (empat) tahun 4. Pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri 5. Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri 6. Potongan bonus dengan persentase yang disesuaikan

Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi

Perseroan telah memiliki dan menjalankan peraturan internal yang mengatur pelaksanaan pengendalian gratifikasi, sesuai pedoman dalam Peraturan Direksi No. PER.0009/HK.03/P.III-2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) beserta Anak Perusahaan. Peraturan tersebut sekaligus merupakan dasar bagi pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), dengan Sekretaris Perusahaan ditetapkan sebagai koordinator pelaksanaan pelaporan gratifikasi pegawai Perseroan.

Mengacu pada pedoman internal tersebut, terdapat 3 (tiga) kategori gratifikasi yaitu gratifikasi yang wajib dilaporkan, tidak wajib dilaporkan, dan gratifikasi dalam kedinasan. Gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah penerimaan gratifikasi yang terkait dengan jabatan penerima pada Perseroan, dan hal tersebut berlawanan dengan tugas dan kewajiban yang diembannya. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan adalah penerimaan gratifikasi dari pihak ketiga, berdasarkan perjanjian yang sah atau karena penerima meraih prestasi tertentu. Terakhir, gratifikasi dalam kedinasan adalah penerimaan gratifikasi yang diterima Insan Perseroan dalam pelaksanaan kedinasan, atau dalam penugasan sebagai wakil Perseroan.

Segala bentuk penerimaan atau penolakan gratifikasi yang terjadi, akan dicatat oleh TIM UPG dalam bentuk laporan untuk diserahkan kepada Komisi Peberantasan

Gratification Control Implementation

The Company already has and operates internal regulations governing the implementation of gratuity control, according to the guidelines in the Board of Directors Regulation No. PER.0009/HK.03/P.III-2018 dated March 9, 2018 concerning Gratuity Control in the Environment of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and its Subsidiaries. This regulation is at the same time serves as the basis for the establishment of the Gratification Control Unit (UPG) Team, with the Corporate Secretary appointed as the coordinator of the implementation of the Company's employee gratuity reporting.

Based on the internal guidelines, there are 3 (three) categories of gratifications, namely gratuities that must be reported, not required to be reported, and gratuities in service. Gratification that must be reported is the receipt of gratuities related to the recipient's position in the Company, and this is contrary to his/her duties and obligations. Gratifications that are not required to be reported are the receipt of gratuities from third parties, based on a valid agreement or because the recipient has achieved certain achievements. Finally, gratification in service is the receipt of gratuities received by the Company's personnel in carrying out their duties, or in assignments as representatives of the Company.

All forms of acceptance or rejection of gratification that occur will be recorded by the TIM UPG in the form of a report to be submitted to the Corruption Eradication



Korupsi. Selama tahun 2020, tercatat sejumlah ... pemberian gratifikasi yang diterima pegawai Perseroan baik pada tingkat Dewan Komisaris, Direksi, General Manager, hingga Staf. Uraian secara lebih lanjut mengenai penerimaan gratifikasi tahun 2020 disajikan sebagai berikut:

Commission. Throughout 2020, there were a number of gratuities received by the Company's employees at the levels of the Board of Commissioners, Board of Directors, General Manager, to Staff. A further description of the acceptance of gratuities in 2020 is presented as follows:

Penerimaan Gratifikasi tahun 2020

Gratification in 2020

No.	Penerima	Pemberi	Tempat dan Waktu Penerimaan	Bentuk Gratifikasi	Jumlah	Harga Satuan (Estimasi)	Nilai Gratifikasi	Keterangan
...
...
...
...

Pelaksanaan Sistem Pengaduan Pelanggaran

Perseroan mengelola Sistem Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*/WBS) secara profesional, melalui keberadaan Tim Terpadu Penanganan Pengaduan (TTPP) Pelindo III. TTPP memiliki tugas dan kewenangan terkait pelaksanaan Sistem Pengaduan Pelanggaran, meliputi:

1. Melakukan investigasi melalui koordinasi dengan Satuan Pengawasan Intern, Direktorat, Biro dan cabang Perusahaan, serta pihak eksternal terkait;
2. Membuat kesimpulan, saran, dan rekomendasi atas hasil pemeriksaan/permintaan keterangan terhadap pengaduan yang disampaikan pelapor; dan
3. Memberikan klarifikasi/jawaban yang diperlukan apabila terhadap pihak lain yang meminta keterangan tentang tindak lanjut pengaduan.

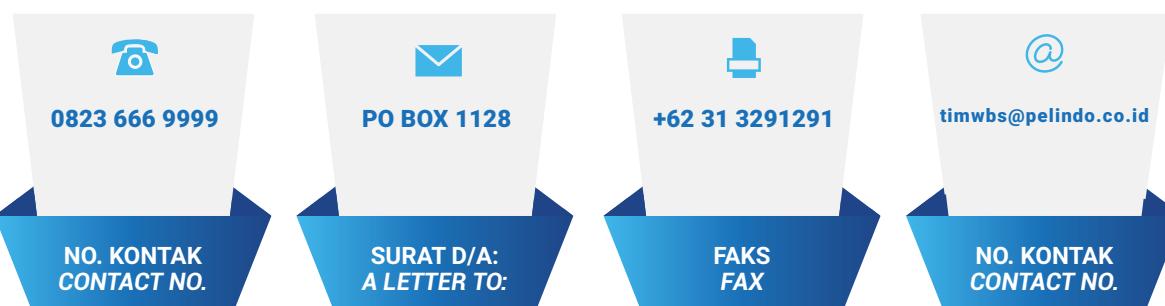
Terkait hal tersebut, pemangku kepentingan Perseroan dapat menyampaikan pengaduan melalui media-media pelaporan yang disediakan, sebagai berikut:

Whistleblowing System

The Company manages the Whistleblowing System (WBS) in a professional manner, through Pelindo III Integrated Complaint Handling Team (TTPP). Duties and authorities of the TTPP related to the implementation of the Violation Complaint System are as follows:

1. Conduct investigations through coordination with the Internal Audit Unit, Directorate, Bureau and branches of the Company, as well as related external parties;
2. Make conclusions, suggestions, and recommendations on the results of the examination/request for information on complaints submitted by the complainant; and
3. Provide the necessary clarification/response when it comes to other parties requesting information regarding the follow-up to complaints.

In this regard, the Company's stakeholders can submit complaints through the reporting media provided, as follows:





Guna menjaga efektivitas pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran, Perseroan melakukan sosialisasi WBS secara berkala kepada seluruh Insan Pelindo III. Selain itu, Perseroan juga melakukan mutakhiran dan penyempurnaan sistem secara berkala, sebagai langkah perbaikan sesuai perkembangan serta dinamika bisnis yang dihadapi Perseroan.

Pada tahun 2020, tidak terdapat laporan pelanggaran yang diterima untuk diproses oleh WBS Perseroan. Untuk itu, informasi terkait hal tersebut beserta jenis sanksi/tindak lanjut yang dilakukan, tidak tersedia.

Pelaksanaan Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa

Perseroan melaksanakan kebijakan terkait mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui keberadaan unit kerja khusus yang dimiliki Perseroan, yaitu Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pelindo III. UKPBJ Perseroan melaksanakan kebijakan terkait hal tersebut secara profesional dan akuntabel, salah satunya melalui penerapan sistem pengadaan secara elektronik sebagai bentuk pemanfaatan teknologi informasi. Informasi secara lebih lanjut serta mekanisme yang berlaku dalam sistem elektronik tersebut dapat diakses melalui bagian khusus pada situs web resmi Perseroan, yaitu eproc.pelindo.co.id.

Sistem pengadaan elektronik (*E-Procurement*) Perseroan memberikan fasilitas bagi semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada basis data e-proc. Selain itu, melalui sistem tersebut, Perseroan membuka kesempatan kepada seluruh penyedia yang belum terdaftar untuk ikut tergabung dalam basis data e-proc yang tersedia melalui Daftar Rekanan Perusahaan (DRP), dengan syarat dan ketentuan yang sama. Sebagai informasi tambahan, aplikasi e-proc yang dimiliki Perseroan telah mengikuti dan lulus uji sertifikasi ISO 27001 sejak tahun 2018.

Selain itu, Perseroan juga melakukan proses evaluasi kegiatan secara berkala setiap bulan, yang membahas antara lain hasil kinerja, tata cara, dan sispro pelelangan; dengan data pada bulan sebelumnya sebagai dasar acuan tren proses pelelangan. Mengacu pada hasil kinerja tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019, UKPBJ telah melelangkan sejumlah 2.350 pekerjaan dan berhasil melakukan efisiensi sebesar 11,8% dari anggaran, atau

To maintain the effectiveness of Whistleblowing System, the Company periodically disseminates WBS to all Pelindo III personnel. In addition, the Company also conducts periodic updates and improvements to the system, as an improvement measure in accordance with the developments and business dynamics faced by the Company.

There were no violation reports received in 2020 for processing by the Company's WBS. For this reason, information related to this and the types of sanctions/follow-up actions taken are not available.

Mechanisms for Goods and Services Procurement

The Company implements policies related to the mechanism for the procurement of goods and services through a special work unit owned by the Company, namely the Pelindo III Goods and Services Procurement Work Unit (UKPBJ). The Company's UKPBJ implements policies related to this in a professional and accountable manner, one of which is through the implementation of an electronic procurement system as a form of utilizing information technology. Further information and the mechanisms that apply to the electronic system can be accessed through a special section on the Company's official website, namely eproc.pelindo.co.id.

The Company's electronic procurement system (*E-Procurement*) provides facilities for all providers of goods/services registered in the e-proc database. Moreover, through this system, the Company opens opportunities for all providers who have not been registered to join the e-proc database available through the Company Partner List (DRP), with the same terms and conditions. As additional information, the Company's e-proc application has passed the ISO 27001 certification test since 2018.

Furthermore, the Company also evaluates activities on a monthly basis, which discusses, among others, performance results, procedures, and bidding procedures; with data from the previous month as a reference for the trend of the auction process. Referring to the results of the previous year's performance, namely 2019, UKPBJ has auctioned a total of 2,350 jobs and succeeded in achieving an efficiency of 11.8% of the budget, or



sebesar Rp275.162.092.026. Untuk tahun 2020, UKPBJ telah melelangkan sejumlah ... pekerjaan dan berhasil melakukan efisiensi sebesar ...% dari anggaran, atau sebesar Rp.... *Mohon data.*

Aplikasi *E-Procurement* yang dimiliki Perseroan telah mengalami tahap pengembangan secara berkala. Untuk tahun 2020, pengembangan terhadap sistem tersebut antara lain:

1. ...
2. ...

Mohon data.

Dampak CSR terkait Operasi yang Adil

Penerapan CSR terkait operasi yang adil oleh Perseroan telah memberikan dampak secara signifikan yang tercermin melalui tidak terdapatnya laporan pelanggaran serta penyimpangan, sebagai tolok ukur yang mengindikasikan kualitas penerapan operasi yang adil oleh Perseroan. Selain itu, penerapan tanggung jawab terkait operasi yang adil telah memberikan kontribusi berupa penguatan kepercayaan pemangku kepentingan kepada Perseroan, yang dapat dilihat melalui sejumlah penghargaan dalam bidang penerapan GCG, yaitu:

1. ...
2. ...

Mohon data penghargaan penerapan GCG, jika tersedia.

Rp275,162,092,026. For 2020, UKPBJ has auctioned a number of ... jobs and managed to achieve an efficiency of ...% of the budget, or Rp...

The E-Procurement application owned by the Company has undergone a development stage on a regular basis. For 2020, the development of the system includes:

1. ...
2. ...

Mohon data.

CSR Impact on Fair Operations

The implementation of CSR related to fair operations by the Company has had a significant impact which is reflected in the absence of reports of violations and deviations, as a benchmark that indicates the quality of the implementation of fair operations by the Company. In addition, the implementation of responsibilities related to fair operations has contributed to strengthening stakeholder trust in the Company, which can be seen through a number of awards in the field of GCG implementation, namely:

1. ...
2. ...

Mohon data penghargaan penerapan GCG, jika tersedia.

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

Dasar kebijakan CSR terkait Lingkungan Hidup

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009, Perseroan senantiasa menjalankan setiap aktivitas bisnis dan operasional seiring dengan tetap mengedepankan upaya menjaga kelangsungan serta kelestarian lingkungan hidup. Perseroan memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan pemenuhan tanggung jawab terkait lingkungan hidup, melalui berbagai upaya pengelolaan dampak lingkungan atas aktivitas operasional yang dijalankan, serta pelaksanaan program pelestarian sebagai bentuk kontribusi Perseroan terhadap lingkungan. Guna memastikan pelaksanaan pemenuhan tanggung jawab terkait lingkungan hidup senantiasa berjalan secara efektif, Perseroan menerapkan program

CORPORATE RESPONSIBILITY ON ENVIRONMENT

Basis of CSR policy on Environment

In accordance with the Law No. 32 of 2009, the Company carries out every business and operational activity by prioritizing efforts to maintain environmental preservation. The Company has a strong commitment to fulfill environmental responsibilities through various efforts to manage environmental impacts on operational activities, as well as the implementation of conservation programs as a form of the Company's contribution to the environment. To ensure that the implementation of the environmental-related responsibilities continues to run effectively, the Company implements a CSR program related to the environment by referring to applicable standards, and has compiled internal regulations that are



CSR terkait lingkungan hidup dengan mengacu pada standar yang berlaku, serta telah menyusun peraturan internal yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan.

Perseroan telah melakukan sertifikasi serta audit Sistem Manajemen Lingkungan dengan mengacu pada ISO 14001:2015, terdiri atas audit berkala setiap satu tahun yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Audit internal dijalankan oleh pihak manajemen Perseroan, sedangkan audit eksternal dilaksanakan oleh badan sertifikasi khusus sebagai pihak yang mengeluarkan sertifikasi uji ISO 14001:2015 bagi Perseroan. Selain itu, Perseroan juga telah memperoleh Sertifikat Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 sesuai SNI 19-14001-2015 melalui Surat Keputusan penetapan yang dikeluarkan Badan Standarisasi Nasional No. 54/KEP/BSN/05/2002 dan ISO 14001:2015, yang mengacu pada Surat Keputusan penetapan dari Badan Standarisasi Nasional No. 282/KEP/BSN/12/2015. Per 31 Desember 2020, ISO 14001:2015 telah diterapkan pada 9 (sembilan) cabang pelabuhan serta 1 (satu) unit kantor pusat Perseroan.

Mohon konfirmasi.

used as a reference for implementation.

The Company has certified and audited the Environmental Management System with reference to ISO 14001:2015, consisting of yearly audits which are carried out both internally and externally. The internal audit is carried out by the management of the Company, while the external audit is carried out by a special certification body as the party that issues the ISO 14001:2015 test certification for the Company. In addition, the Company has also obtained the ISO 14001:2015 Environmental Management System Implementation Certificate in accordance with SNI 19-14001-2015 through the Decree issued by the National Standardization Agency No. 54/KEP/BSN/05/2002 and ISO 14001:2015, which refers to the Decree from the National Standardization Agency No. 282/KEP/BSN/12/2015. As of December 31, 2020, ISO 14001:2015 has been applied to 9 (nine) port branches and 1 (one) unit of the Company's head office.

Mohon konfirmasi.

Sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001

ISO 14001 Environmental Management System Certificate

No.	Cabang / Branch	Versi / Version	Nomor Sertifikat / Certificate Number	Badan Sertifikasi / Certification Body	Masa Berlaku / Validity Period
1	Kantor Pusat	2015	01 104 1535145/01		
2	Tanjung Perak	2015	01 104 1535145/02		
3	Banjarmasin	2015	01 104 1535145/03		
4	Tanjung Emas	2015	01 104 1535145/04		20 Februari 2019 s.d.
5	TPKS	2015	01 104 1535145/05		
6	Tanjung Intan	2015	01 104 1535145/06		
7	Kotabaru	2015	01 104 1535145/07		
8	Gresik	2015	01 104 1535145/08		
9	Benoa	2015	01 104 1535145/09		
10	Kupang	2015	01 104 1535145/10		
				TUV Rheinland	9 Februari 2022 / February 20, 2019 to February 9, 2022



Target CSR terkait Lingkungan Hidup

Secara umum, pelaksanaan program CSR terkait lingkungan hidup yang dijalankan Perseroan memiliki orientasi pada sejumlah target, dengan perincian sebagai berikut:

1. Terlaksanannya pemantauan serta pengelolaan aspek dan dampak lingkungan, sesuai Rencana Pengelolaan Lingkungan/Rencana Pemantauan Lingkungan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta ketentuan dalam peraturan/perundang-undangan yang berlaku;
2. Hasil pengukuran lingkungan sesuai dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan/Rencana Pemantauan Lingkungan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, serta ketentuan dalam peraturan/perundang-undangan yang berlaku.

Mohon konfirmasi

Lebih lanjut, untuk tahun 2020, Perseroan telah menyusun target/rencana kegiatan CSR di bidang lingkungan, dengan perincian sebagai berikut:

1. Penanaman 200 bibit bakau di seluruh wilayah kerja Perseroan;
2. Penanaman 750 pohon di ring I Pelabuhan

Kegiatan CSR yang Dilakukan

Program Lingkungan Hidup dalam Lingkup Operasional Perusahaan

Perseroan mewujudkan komitmen CSR terkait lingkungan hidup melalui pelaksanaan berbagai program yang berlaku secara internal dalam lingkup operasional Perseroan, di antaranya pada program *paperless* serta *green port*. Program *paperless* merupakan salah satu upaya pengendalian dampak lingkungan atas kegiatan bisnis Perseroan, yang dijalankan untuk mengurangi penggunaan kertas melalui optimalisasi implementasi teknologi informasi. Di samping itu, Perseroan melaksanakan program *green port* yang mendorong penggunaan mesin serta peralatan bongkar muat yang lebih ramah lingkungan (elektrifikasi) di beberapa unit cabang pelabuhan Pelindo III.

Seiring hal tersebut, Perseroan melakukan upaya lain dengan tujuan meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan atas kegiatan operasional yang dilakukan. Perseroan secara konsisten mengupayakan pengurangan

CSR Target on Environment

In general, the implementation of CSR programs related to the environment carried out by the Company is oriented towards a number of targets, with the following details:

1. The implementation of monitoring and management of environmental aspects and impacts, in accordance with the Environmental Management Plan/Environmental Monitoring Plan, Environmental Impact Assessment (AMDAL), as well as provisions in the applicable regulations/laws;
2. The results of environmental measurements are in accordance with the Environmental Management Plan/Environmental Monitoring Plan, Environmental Impact Assessment, as well as the provisions in the applicable regulations/laws.

Mohon konfirmasi

Furthermore, the Company has prepared a target/plan for CSR activities in the environmental sector, in 2020 with the following details:

1. Planting of 200 mangrove seedlings in the entire Company's work area;
2. Planting of 750 trees in ring 1. Port

CSR Activities

Environmental Program in the Company

The Company realizes its CSR commitments related to the environment through the implementation of various programs that apply internally within the scope of the Company's operations, including the paperless and green port programs. The paperless program is one of the efforts to control the environmental impact of the Company's business activities, which is carried out to reduce paper use through optimizing the implementation of information technology. In addition, the Company implements a green port program that encourages the use of machines and loading and unloading equipment that is more environmentally friendly (electrification) in several Pelindo III port branch units.

In line with this, the Company makes other efforts with the aim of minimizing the negative impact on the environment from its operational activities. The Company consistently strives to reduce exhaust emissions from ships and other



emisi gas buang dari kapal serta peralatan apung lain yang dalam operasinya menggunakan bahan bakar fosil. Sebagai alternatif sumber daya, Perseroan menyediakan suplai listrik darat, atau yang dikenal dengan *shore plug connection* pada saat kapal *standby* di tambatan. Selain itu, melalui program bina lingkungan, Perseroan juga mewujudkan komitmennya dengan ikut berpartisipasi mengurangi dampak pemanasan global dengan melaksanakan kegiatan penghijauan di sekitar pelabuhan dan pesisir pantai.

Analisis dan Pemantauan Dampak Lingkungan

Perseroan senantiasa mempertimbangkan serta melakukan *monitoring* dampak lingkungan yang dihasilkan oleh aktivitas operasional Perseroan, terutama melalui pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Terkait hal tersebut, Perseroan melakukan proses audit terhadap setiap aktivitas operasional yang dilaksanakan guna memastikan pelaksanaannya telah sesuai dengan kriteria standar manajemen mutu lingkungan lingkungan hidup serta ketentuan pada peraturan/perundang-undangan yang berlaku.

Audit terkait pemenuhan tanggung jawab bidang lingkungan hidup dilaksanakan secara internal Perseroan serta melalui kerja sama dengan auditor eksternal. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan, Perseroan diketahui telah menerapkan prinsip operasi berwawasan lingkungan hidup, antara lain sebagai berikut:

1. Perseroan telah memenuhi kewajiban pembuatan dokumen lingkungan berupa AMDAL dan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Perseroan telah membuat Laporan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKL) dan Laporan Pemantauan Lingkungan (RPL) yang dilaporkan secara periodik kepada instansi terkait, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup. Komponen-komponen yang dipantau serta dievaluasi meliputi:
 - a. Kualitas udara dan kebisingan;
 - b. Kualitas air bersih dan air permukaan;
 - c. Limbah padat/sampah;
 - d. Pengelolaan kesehatan masyarakat;
 - e. Pengelolaan sosial ekonomi.

floating equipment which in its operations use fossil fuels. As an alternative source of power, the Company provides onshore electricity supply, known as shore plug connection when standby ships are moored. In addition, through the environmental development program, the Company also realizes its commitment by participating in reducing the impact of global warming by carrying out reforestation activities around the port and coast.

Environmental Impact Monitoring and Analysis

The Company always considers and monitors the environmental impacts generated by the Company's operational activities, especially through the implementation of Environmental Impact Assessment (AMDAL). Regarding this matter, the Company conducts an audit process on every operational activity to ensure that its implementation is in accordance with the criteria for environmental quality management standards and the provisions of the applicable regulations/laws.

Audits related to the fulfillment of environmental responsibilities are carried out internally by the Company and in cooperation with external auditors. Based on the results of the audit conducted, the Company is known to have implemented environmentally sound operating principles, including the following:

1. The Company has fulfilled the obligation to produce environmental documents in the form of AMDAL and Environmental Management and Monitoring Documents (DPPL) in accordance with the Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management;
2. The Company has made Environmental Management Reports (PKL) and Environmental Monitoring Reports (RPL) which are reported periodically to the relevant agencies, namely the Ministry of Environment. The components that are monitored and evaluated include:
 - a. Air quality and noise;
 - b. Quality of clean water and surface water;
 - c. Solid waste/garbage;
 - d. Public health management;
 - e. Socio-economic management.



3. Perseroan telah memiliki izin untuk menyimpan secara sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui surat keputusan ... tentang Izin Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
4. Perseroan melaksanakan aktivitas penghijauan dan penanaman pohon di lingkungan operasional.

Mohon konfirmasi.

Mohon data, jika tersedia.

Pemulihan dan Perlindungan Lingkungan

Sesuai kriteria yang diatur melalui Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015, Perseroan senantiasa memastikan bahwa tingkat polusi dan ambien yang dihasilkan oleh aktivitas Perseroan berada dalam batas aman, atau di bawah Nilai Ambang Batas (NAB) yang diizinkan. Kepatuhan terhadap pelaksanaan manajemen lingkungan ini sekaligus digunakan sebagai penilaian yang termuat dalam penilaian *Key Performance Indicator* (KPI), khususnya terhadap unsur Perseroan yang bekerja secara langsung di lapangan.

Guna mendukung perlindungan lingkungan serta pengelolaan tingkat polusi yang dihasilkan, Perseroan melaksanakan kegiatan konservasi lingkungan hidup berupa program penanaman pohon, khususnya bakau, di wilayah-wilayah kerja Perseroan. Untuk tahun 2020, Perseroan telah merealisasikan kegiatan penanaman sejumlah 200 bibit pohon bakau.

Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan

Guna mendukung pelaksanaan pemenuhan tanggung jawab terkait lingkungan hidup, Perseroan telah memiliki mekanisme pengaduan masalah lingkungan yang dapat digunakan secara terbuka oleh pemangku kepentingan Perseroan. Setiap pengaduan terkait masalah lingkungan yang diterima melalui mekanisme tersebut akan dicatat dalam register, untuk kemudian dipelajari serta dianalisis guna menelusuri akar permasalahan yang dilaporkan. Hasil dari analisis tersebut kemudian akan digunakan sebagai dasar tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Perseroan. Terkait hal tersebut, pelaksanaan mekanisme pengaduan masalah lingkungan dilaksanakan melalui unit kerja Humas Perusahaan.

3. The Company has a permit to temporarily store Hazardous and Toxic Waste (B3) from the DKI Jakarta Provincial Government, through decree ... concerning Temporary Permit for Hazardous and Toxic Waste (B3);
4. The Company carries out reforestation and tree planting activities in its operational environment.

Mohon konfirmasi.

Mohon data, jika tersedia.

Environmental Recovery and Protection

In accordance with the criteria set out through the ISO 14001:2015 Environmental Management System, the Company always ensures that the level of pollution and ambient produced by the Company's activities is within safe limits, or below the permissible Threshold Limit (NAV). Compliance with the implementation of environmental management is also used as an assessment contained in the Key Performance Indicator (KPI), especially for elements of the Company who work directly in the field.

To support environmental protection and management of the level of pollution produced, the Company carries out environmental conservation activities in the form of tree planting programs, especially mangroves, in the Company's working areas. For 2020, the Company planted 200 mangrove tree seedlings.

Environmental Complaint Mechanism

To support the fulfillment of responsibilities related to the environment, the Company has a complaint mechanism for environmental issues that can be used openly by the Company's stakeholders. Any complaints related to environmental issues received through this mechanism will be recorded in the register, to be reviewed and analyzed to trace the root causes of the reported issues. The results of the analysis will then be used as the basis for follow-up to be carried out by the Company. In this regard, the implementation of the complaint mechanism on environmental issues is carried out through the Company's Public Relations work unit.



Secara lebih lanjut, mekanisme pengaduan masalah lingkungan yang dimiliki Perseroan terdiri atas tahap-tahap pelaporan serta tindak lanjut sebagai berikut:

1. *User internal maupun eksternal menyampaikan aduan melalui salah satu media komunikasi yang tersedia.*
2. *User internal dan petugas gateway akan menerima dan mencatat aduan pelanggan ke dalam Customer Portal.*
3. Tim CRO melakukan klarifikasi aduan pelanggan, untuk kemudian didistribusikan kepada unit kerja terkait.
4. Unit kerja terkait segera menindaklanjuti dalam bentuk tanggapan dan/atau jawaban atas aduan pelanggan.
5. Pihak cabang Perseroan segera menindaklanjuti dalam bentuk tanggapan dan/atau jawaban atas aduan pelanggan.
6. Kantor Pusat Perseroan menindaklanjuti dalam bentuk tanggapan dan/atau jawaban atas aduan pelanggan.

Hingga 31 Desember 2020, tidak terdapat laporan maupun aduan yang masuk untuk diproses melalui mekanisme pengaduan masalah lingkungan Perseroan.

Dampak Kualitatif CSR terkait Lingkungan Hidup

Perseroan telah berhasil merealisasikan target terkait CSR di bidang lingkungan sesuai rencana kegiatan yang ditetapkan manajemen Perseroan untuk tahun 2020. Hal tersebut, terlaksana melalui realisasi beberapa program-program pelestarian lingkungan yaitu:

1. Penanaman 200 bibit bakau di seluruh wilayah kerja Perseroan;
2. Penanaman 750 pohon di ring I Pelabuhan

Furthermore, the complaint mechanism for environmental issues owned by the Company consists of the following stages of reporting and follow-up:

1. Internal and external users submit complaints through one of the available communication media.
2. Internal users and gateway officers will receive and record customer complaints into the Customer Portal.
3. The CRO team clarifies customer complaints, and then distributes them to the relevant work units.
4. The relevant work units immediately follow up in the form of responses and/or answers to customer complaints.
5. The Company's branches immediately follow up in the form of responses and/or answers to customer complaints.
6. The Company's Head Office follows up in the form of responses and/or answers to customer complaints.

There were no reports or complaints that have been submitted as of December 31, 2020 to be processed through the Company's environmental problem complaint mechanism.

The Qualitative Impact of CSR on the Environment

The Company has succeeded in realizing targets related to CSR in the environmental sector in accordance with the activity plans set by the Company's management for 2020. This has been implemented through the realization of several environmental conservation programs, namely:

1. Planting of 200 mangrove seedlings in the entire Company's work area;
2. Planting of 750 trees in ring 1. Port



Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup

Komitmen Perseroan untuk secara konsisten menjadi korporasi yang baik melalui pemenuhan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup, telah terwujud serta mendapat timbal balik berupa pemberian penghargaan di bidang lingkungan. Penghargaan di bidang lingkungan hidup yang diterima Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Awards in the Environmental Sector

The Company's commitment to consistently become a good corporation by fulfilling environmental responsibilities has been realized and has received reciprocity in the form of awards in the environmental field. The environmental awards received by the Company for the last 3 (three) years are as follows:

No.	Penghargaan / Awards	Tahun / Year
1	Penghargaan Pemerintah Kota Mojokerto atas Program CSR di Kota Mojokerto Tahun 2018	An Award from the Government of Mojokerto for the CSR Program conducted in Mojokerto in 2018
2	Penghargaan kategori Pemberdayaan Ekonomi Komunitas untuk Program Kampung Lawas Maspati dari The La Tofi School of CSR Tahun 2019	An Awards in the Community Economic Empowerment Category for Kampung Lawas Maspati Program from The La Tofi School of CSR in 2019
3	Penghargaan <i>Iconomics CSR Award</i> Tahun 2020	<i>Iconomics CSR Award</i> in 2020
4	<i>Top CSR Awards Star 4</i>	<i>Top CSR Awards Star 4</i>
5	<i>Top Leader on CSR Commitment 2020</i>	<i>Top Leader on CSR Commitment 2020</i>

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Kebijakan CSR terkait Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3)

Perseroan menjalankan seluruh aktivitas bisnis dan operasional dengan mengedepankan pemenuhan tanggung jawab terkait ketenagakerjaan, khususnya pada aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Hal tersebut merupakan wujud pemenuhan tanggung jawab Perseroan kepada seluruh karyawan sebagai bagian dari pemangku kepentingan, sekaligus pemenuhan terhadap aspek kepatuhan terhadap ketentuan pada peraturan/perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Perseroan senantiasa menjalankan pemenuhan tanggung jawab terkait hal tersebut dengan mengacu kepada standar best practices penerapan K3 yang berlaku.

CORPORATE RESPONSIBILITY ON MANPOWER, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (K3)

CSR Policies on Manpower, Occupational Health and Safety (K3)

The Company carries out all business and operational activities by prioritizing the fulfillment of responsibilities related to manpower, especially in Occupational Health and Safety (K3) aspect. This is a manifestation of the fulfillment of the Company's responsibilities to all employees as part of the stakeholders, as well as compliance with the provisions of the applicable regulations/laws. In addition, the Company always fulfills responsibilities related to this matter by referring to the applicable standards of best practices for the implementation of OHS.



Pelaksanaan tanggung jawab ketenagakerjaan khususnya pada aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dilaksanakan Perseroan mengacu pada regulasi serta standar yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 2. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 3. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 5. Keputusan Presiden No. 22 tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja, yang telah diperbarui dengan Keputusan Presiden No. 7 tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja;
 6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.02/MEN/1980 tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;
 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.03/MEN/1982 tahun 1982 tentang 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja;
 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4 tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja;
 10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban, dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan;
 12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja;
 13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 26 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 18 tahun 2016 tentang Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- The implementation of manpower responsibilities, especially in the Occupational Health and Safety aspect carried out by the Company refers to the applicable regulations and standards, as follows:
1. Law No. 1 of 1970 on Occupational Safety;
 2. Law No. 13 of 2003 on Manpower;
 3. Law No. 36 of 2009 on Health;
 4. Government Regulation No. 50 of 2012 on Implementation of Occupational Safety and Health Management System.;
 5. Presidential Decree No. 22 of 1993 on Occupational Disease, updated with the Presidential Decree No. 7 of 2019 on Occupational Disease;
 6. Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration No. PER.02/Men/1980 of 1980 on Manpower Medical Examination in the Implementation of Occupational safety;
 7. Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration No. Per.03/MEN/1982 of 1982 on Occupational Health Services;
 8. Regulation of the Minister of Manpower No. 4 of 1987 on the Occupational Health and Safety Committee;
 9. Regulation of the Minister of Manpower No. PER-04/MEN/1987 on Occupational Health and Safety Committee as well as Appointment Procedure of Occupational Safety Expert;
 10. Regulation of the Minister of Manpower No. 2 of 1992 on Procedure for Appointment, Responsibility, and Authority of Occupational Health and Safety Expert;
 11. Regulation of the Minister of Manpower No. PER-03/MEN/1998 on Procedure for Accident Reporting and Inspection.;
 12. Regulation of the Minister of Manpower No. PER.13/MEN/X/2011 on Threshold Limit Value of Physical and Chemical Factors at the Workplace;
 13. Regulation of the Minister of Manpower No. 26 of 2014 on Implementation of Occupational Health and Safety Management System Assessment;
 14. Regulation of the Minister of Manpower No. 18 of 2016 on Board of Occupational Safety and Health.



Prinsip penerapan K3 pada aktivitas operasional Perseroan adalah *Zero Tolerance For Accident*. Hal tersebut merupakan wujud komitmen Pelindo III untuk tidak memberikan toleransi atas kejadian insiden di tempat kerja, yang terlaksana melalui berbagai upaya pencegahan terjadinya kecelakaan sesuai kaidah-kaidah penerapan K3 yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga melaksanakan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh Insan Pelindo III guna menjaga serta meningkatkan kualitas penerapan K3 di unit-unit kerja terkait.

Lingkup Pelaksanaan Tanggung Jawab bidang Ketenagakerjaan

Perseroan menyadari bahwa Sumber Daya Manusia merupakan unsur fundamental dalam keseluruhan aktivitas bisnis dan operasional yang dijalankan. Atas kesadaran tersebut, Perseroan berkomitmen untuk senantiasa menjalankan pertumbuhan bisnis seiring pemenuhan tanggung jawab kepada seluruh Insan Pelindo III. Hal tersebut dilaksanakan pada lingkup serta sasaran sebagai berikut:

1. Kesetaraan dan persamaan hak, yaitu menjamin perlakuan yang sama bagi seluruh karyawan terkait kesempatan kerja;
2. Pemenuhan remunerasi/imbalan kerja dan pemenuhan kesejahteraan pegawai;
3. Penyediaan sarana dan prasarana K3, meliputi:
 - a. Implementasi Sistem Manajemen K3.
 - b. Penyediaan tempat kerja dan fasilitas kerja yang kondusif (sehat, aman, dan nyaman) bagi pegawai.
 - c. Pelaksanaan program kesehatan bagi pegawai.
4. Menjalankan program pengembangan kompetensi bagi pegawai;
5. Jaminan atas kebebasan berserikat bagi pegawai;
6. Pengelolaan tingkat perputaran (*turn over*) pegawai;
7. Peningkatan kepedulian mitra kerja pada K3 di area kerja Perseroan;
8. Kegiatan pegawai di luar jam kerja, sebagai stimulus pembentukan iklim kerja yang sehat dan kondusif.

The principle in implementing OHS in the Company's operational activities is Zero Tolerance For Accident. This is a form of Pelindo III's commitment to not tolerate incidents in the workplace, which is carried out through various accident prevention efforts in accordance with the applicable rules of OHS implementation. In addition, the Company also implements a reward and punishment system for all Pelindo III personnel in order to maintain and improve the quality of OHS implementation in related work units.

Scope of Implementation of Responsibilities in the field of Manpower

The Company is aware that Human Resources is a fundamental element in all business activities and operations. Based on this awareness, the Company is committed to developing business in line with fulfilling its responsibilities to all Pelindo III personnel. This is carried out in the following scope and targets:

1. Equality and equal rights or giving the same treatment to all employees in work opportunity;
2. Fulfilment of remuneration/employee benefit and welfare;
3. Provision of OHS facilities and infrastructure. In this sense, the Company:
 - a. Implements K3 Management System.
 - b. Provides adequate workplace and facilities (healthy, safe, and comfortable) for the employees.
 - c. Carry out health programme for employees.
4. Carry out competency development programme for employees;
5. Freedom of association for employees;
6. Management of employee turnover level;
7. Improving OHS awareness of work partners in work areas;
8. Employee activity outside the working hour as a stimulus for establishing a sportive and conducive working climate.



Pengelola K3 Perusahaan

Perseroan telah memiliki unit kerja khusus sebagai pengelola K3 sesuai persyaratan penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3), melalui keberadaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). P2K3 sekaligus merupakan wadah antara Perseroan dan pegawai untuk secara bersama-sama menerapkan K3 pada aktivitas operasional yang dijalankan. Lebih lanjut, P2K3 merupakan gugus tugas fungsional dengan tugas utama untuk memberikan saran dan pertimbangan terkait permasalahan K3 kepada manajemen Perseroan, baik saat diminta maupun tidak. Penanggung jawab penerapan SMK3 adalah pejabat dalam organisasi Perseroan, yaitu SM Umum/Kepala Kantor Pusat untuk unit Kantor Pusat serta General Manager untuk Pelabuhan Cabang/UPP.

Dalam pelaksanaannya, Perseroan telah mengintegrasikan seluruh sistem manajemen meliputi Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan kerja, serta Keamanan dan Lingkungan (Sistem Manajemen MK4L). Penerapan Sistem Manajemen MK4L di Kantor Pusat Perseroan merupakan tanggung jawab seluruh unit kerja Kantor Pusat, melalui koordinasi Unit Sistem Manajemen di bawah kewenangan koordinator *Top Management* (TM) dan P2K3 yang melekat pada jabatan SM Sistem Manajemen dan Manajemen Risiko. Pada Cabang/UPP, penerapan Sistem Manajemen MK4L merupakan tanggung jawab seluruh unit kerja terminal/pelabuhan, melalui koordinasi Unit Kesisteman di bawah kewenangan TM dan P2K3 yang melekat pada General Manager terminal/pelabuhan terkait.

OHS Management

The Company has a special work unit as OHS manager in accordance with the requirements for implementing the OHS Management System (SMK3), through the existence of the Occupational Safety and Health Committee (P2K3). P2K3 is also a forum between the Company and employees to jointly implement K3 in operational activities carried out. Furthermore, P2K3 is a functional task force with the main task of providing advice and considerations related to OHS issues to the Company's management, whether requested or not. Those in charge of implementing SMK3 are officials within the Company's organization, namely General SM/Head of Head Office for Head Office units and General Manager for Branch Ports/UPP.

In its implementation, the Company has integrated all management systems including Quality Management System, Occupational Safety and Health, as well as Security and Environment (MK4L Management System). Implementation of the MK4L Management System at the Company's Head Office is the responsibility of all Head Office work units, through coordination of the Management System Unit under the authority of the Top Management (TM) and P2K3 coordinators attached to the SM Management System and Risk Management position. At the Branch/UPP, the implementation of the MK4L Management System is the responsibility of all terminal/port work units, through the coordination of the System Unit under the authority of TM and P2K3 attached to the General Manager of the terminal/port concerned.

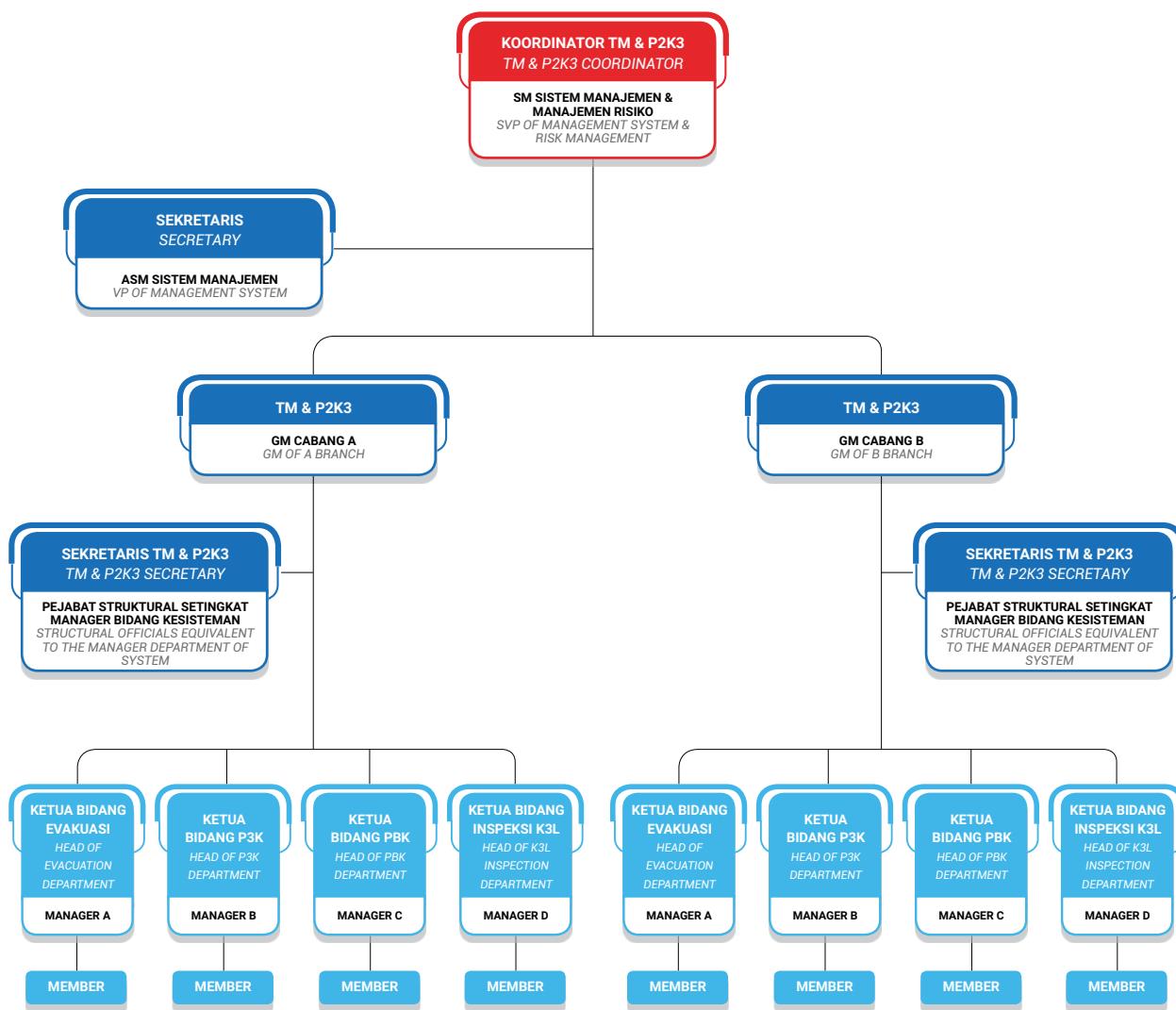


Struktur TM dan P2K3 pada Cabang Pelabuhan Perseroan adalah sebagai berikut:

The structure of TM and P2K3 at the Company's Port Branch is as follows:

STRUKTUR TM DAN P2K3 PADA CABANG PELABUHAN

TM AND P2K3 STRUCTURE IN PORT BRANCHES



Mohon data struktur TM dan P2K3 Cabang Pelabuhan tahun 2020



Target CSR terkait Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3)

Secara umum, pelaksanaan CSR terkait ketenagakerjaan serta K3 memiliki sasaran pada capaian-capaian sebagai berikut:

1. Terpenuhinya hak-hak pegawai sesuai Perjanjian Kesepakatan Bersama serta regulasi ketenagakerjaan yang berlaku;
2. Terciptanya lingkungan kerja yang kondusif, aman, dan sehat, serta iklim kerja yang adil bagi seluruh Insan Perseroan;
3. Tumbuhnya loyalitas dan produktivitas secara maksimal dari seluruh pegawai Perseroan, seiring keberadaan kebijakan ketenagakerjaan pegawai yang komprehensif;
4. Terciptanya kondisi kerja *zero accident* dan nihil penyakit akibat kerja.

Di samping itu, pencapaian tanggung jawab bidang K3 untuk tahun 2020 termuat dalam *Key Performance Indicators*, dengan uraian indikator dan bobot nilai sebagai berikut:

Indikator dan Bobot Nilai KPI K3 tahun 2020 / Indicator and Value of KPI on OHS in 2020

No.	Indikator / Indicator	Bobot Nilai / Value
1	Jumlah kecelakaan kerja berakibat meninggal dunia	...
2	Jumlah kecelakaan kerja berakibat cidera berat	
3	Jumlah kecelakaan kerja berakibat kerusakan harta benda	

Program K3 Perusahaan tahun 2020

Perseroan menjalankan program K3 sesuai rencana kerja yang telah disusun melalui pelaksanaan agenda, baik yang diselenggarakan secara rutin maupun sesuai kebutuhan. Meski demikian, Perseroan menyadari bahwa tahun 2020 merupakan tahun khusus dengan sejumlah hambatan terkait terjadinya pandemi Covid-19 pada linkup global maupun nasional. Untuk itu, Perseroan tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna mendorong optimalisasi pelaksanaan program K3 di masa pandemi, meliputi pelaksanaan kegiatan secara virtual dalam sistem daring.

CSR Target on Manpower, Occupational Health and Safety (OHS)

Objectives of the implementation of CSR related to manpower and OHS are as follows:

1. Fulfillment of employee rights in accordance with Collective Labor Agreements and applicable manpower regulations;
2. Creation of a favorable, safe, and sound work environment, as well as a fair working climate for all the Company's personnel;
3. Maximum growth of loyalty and productivity of all employees of the Company, in line with the existence of a comprehensive employment policy;
4. The creation of zero accident working conditions and zero occupational diseases.

In addition, the achievement of OHS responsibilities for 2020 is contained in the Key Performance Indicators, with a description of the indicators and values as follows:

OHS Program in 2020

The Company runs the K3 program according to the work plan that has been prepared through the implementation of the agenda, both regularly and as needed. However, the Company is aware that 2020 was a special year with a number of obstacles related to the Covid-19 pandemic on a global and national scale. For this reason, the Company continuously take the necessary steps to encourage the optimization of the implementation of the OHS program during the pandemic, including the implementation of virtual activities in the online system.



Perincian program K3 Perseroan untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan / Activities	Waktu Pelaksanaan / Time	Keterangan / Description
1	Peringatan Bulan K3 Nasional / National OHS Month Commemoration	Januari – Februari / January - February	Terminal/Pelabuhan, Regional / Terminal/Port, Regional
2	Simulasi K3 / OHS Simulation		Terminal/Pelabuhan, Regional, Kantor Pusat / Terminal/Port, Regional, Head Office
3	... Mohon data		

Praktik dan Kegiatan Ketenagakerjaan K3

Ketenagakerjaan

Hubungan Industrial

Perseroan memiliki komitmen untuk menjaga hubungan industrial yang sehat dan kondusif bagi seluruh karyawan, yang telah termuat dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris, Direksi, dan Serikat Pekerja Pelindo III No. HK.202/09.DK.P.III/2017, HK.03/14/P.III-2014, 26/DP.SPPI/IX-2017 tentang Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) di Lingkungan Pelindo III. Selain itu, komitmen Perseroan dalam membangun hubungan industrial yang sehat dan kondusif bagi karyawan diwujudkan melalui pelaksanaan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan perlakuan secara adil kepada seluruh pegawai, bebas dari bias karena perbedaan latar belakang identitas meliputi gender, agama, serta etnis, serta hal-hal lain di luar faktor profesional kerja;
2. Memberikan kesempatan yang setara/adil kepada seluruh pegawai dalam mengembangkan karier serta kesempatan mendapat promosi jabatan;
3. Menjamin hak karyawan untuk berserikat sesuai ketentuan pada peraturan/perundang-undangan yang berlaku;
4. Menerapkan sistem *reward and punishment* yang sehat, guna mendukung produktivitas karyawan;
5. Memberikan perlindungan bagi pegawai dari bermacam bentuk risiko di tempat kerja yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan;
6. Menjamin hak karyawan untuk secara bebas menyampaikan pendapat dan aspirasi, dengan cara penyampaian yang beretika serta sesuai ketentuan dalam peraturan/perundang-undangan yang berlaku.

The details of the Company's OHS program for 2020 are as follows:

OHS Practices and Activities

Manpower

Industrial Relations

The Company is committed to maintaining sound and favorable industrial relations for all employees, which has been contained in the Joint Decree of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Trade Union of Pelindo III No. HK.202/09.DK.P.III/2017, HK.03/14/P.III-2014, 26/DP.SPPI/IX-2017 concerning Code of Conduct in Pelindo III Environment. Moreover, the Company's commitment to building sound and favorable industrial relations for employees is realized through the implementation of the followings:

1. Provide fair treatment to all employees, free from bias due to differences in identity backgrounds including gender, religion, and ethnicity, as well as other things outside of work professional factors;
2. Provide equal/fair opportunities to all employees in developing careers as well as opportunities to get promotions;
3. Guarantee the right of employees to associate in accordance with the provisions of the applicable laws/regulations;
4. Implement a sound reward and punishment system to support employee productivity;
5. Provide protection for employees from various forms of risk in the workplace that may endanger safety and health;
6. Ensure the right of employees to freely express their opinions and aspirations, in an ethical manner and in accordance with the provisions of the applicable laws/regulations.



Kesempatan Kerja yang Sama

Perseroan memberikan kesempatan kerja yang sama bagi seluruh pegawai untuk mengembangkan jenjang karier, sesuai kompetensi dan bidang kerja yang dimiliki. Pola pengembangan karier pegawai Perseroan telah diatur melalui Peraturan Direksi Pelindo III No. PER.19/KP.0403/P.III-2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Penyempurnaan Peraturan Direksi No. PER.88/KP.0403/P.III-2014 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi No. PER.26/KP.0403/P.III2014 tentang Karier Pegawai dan Pengangkatan dalam Jabatan. Keberadaan kebijakan tentang pola pengembangan karier tersebut bertujuan untuk memberikan kejelasan tentang kesempatan pengembangan karier secara setara kepada setiap Insan Pelindo III. Lebih lanjut, kebijakan pola pengembangan karier tersebut menjelaskan tentang penjenjangan karier yang dapat diraih oleh pegawai Perseroan, berdasarkan pendidikan serta keahlian yang dimiliki. Peraturan tersebut juga menjelaskan tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dalam jabatan untuk kepentingan prompsi dan mutasi pegawai.

Remunerasi Pegawai

Perseroan menerapkan prinsip keadilan (*fairness*) dan persaingan yang sehat (*competitiveness*) dalam kebijakan terkait remunerasi pegawai. Kebijakan remunerasi Perseroan didasarkan pada faktor kepegawaian yang bersifat internal, meliputi bobot kerja dan jenjang jabatan, serta faktor-faktor lain meliputi besaran Upah Minimum Regional (UMR) serta besaran yang berlaku secara wajar pada industri Perseroan. Perseroan tidak menutup kemungkinan atas penambahan besaran remunerasi dan kompensasi bagi karyawan dengan prestasi tertentu serta capaian melebihi sasaran, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan penilaian *Key Performance Indicators (KPI)*.

Tingkat Perputaran Karyawan

Bagi Perseroan, perputaran karyawan dalam suatu perusahaan merupakan indikator kualitas lingkungan kerja, yang menggambarkan seberapa kondusif dan nyaman lingkungan kerja tersebut bagi karyawan. Untuk itu, Perseroan secara berkala melakukan peninjauan terhadap kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi kualitas lingkungan kerja bagi karyawan, meliputi kebijakan terkait remunerasi dan paket *benefit*. Selain itu, Perseroan juga secara terus-menerus melakukan

Equal Job Opportunity

The Company provides equal employment opportunities for all employees to develop career paths according to their competencies and fields of work. The career development pattern of the Company's employees has been regulated through Pelindo III Board of Directors Regulation No. PER.19/KP.0403/P.III-2016 dated July 1, 2016 concerning Completion of Board of Directors Regulation No. PER.88/KP.0403/P.III-2014 concerning Amendments to the Regulation of the Board of Directors No. PER.26/KP.0403/P.III2014 concerning Employee Careers and Appointments in Position. The existence of a policy regarding the pattern of career development aims to provide clarity on equal career development opportunities to every Pelindo III Personnel. Furthermore, the policy on career development patterns explains the career path that can be achieved by the Company's employees, based on their education and expertise. The regulation also explains the requirements and procedures for appointment to positions for promotion and employee transfer.

Employee Remuneration

The Company applies the principles of fairness and sound competition in policies related to employee remuneration. The Company's remuneration policy is based on internal staffing factors, including work load and position level, as well as other factors including the Regional Minimum Wage (UMR) and the amount that is reasonably applicable in the Company's industry. The Company does not rule out the possibility of increasing the amount of remuneration and compensation for employees with certain achievements exceeding targets, based on the results of performance evaluations and assessment of Key Performance Indicators (KPI).

Employee Turnover

For the Company, employee turnover in a company is an indicator of the quality of the work environment, which describes how favorable and comfortable the work environment is for employees. To that end, the Company periodically reviews policies that affect the quality of the work environment for employees, including policies related to remuneration and benefit packages. In addition, the Company also continuously makes various efforts to build a work culture that supports the creation



berbagai upaya untuk membangun budaya kerja yang mendukung penciptaan lingkungan kerja yang kondusif serta nyaman bagi karyawan.

Untuk tahun 2020, Perseroan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap ... karyawan dengan perincian ... orang pengundurkan diri, ... orang meninggal dunia, ... orang pensiun, ... orang pensiun dini, serta ... orang diberhentikan akibat melakukan pelanggaran disiplin.

Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

Perseroan menyediakan sarana pengaduan masalah ketenagakerjaan yang dapat digunakan oleh seluruh pegawai untuk menyampaikan pengaduan, saran, serta rekomendasi. Mekanisme tersebut dijalankan sesuai regulasi internal, dengan tetap mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan/perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait ketenagakerjaan. Secara lebih lanjut, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan mencakup perselisihan yang terjadi di lingkup internal Perseroan, terdiri atas alur penyelesaian sebagai berikut:

of a favorable and comfortable work environment for employees.

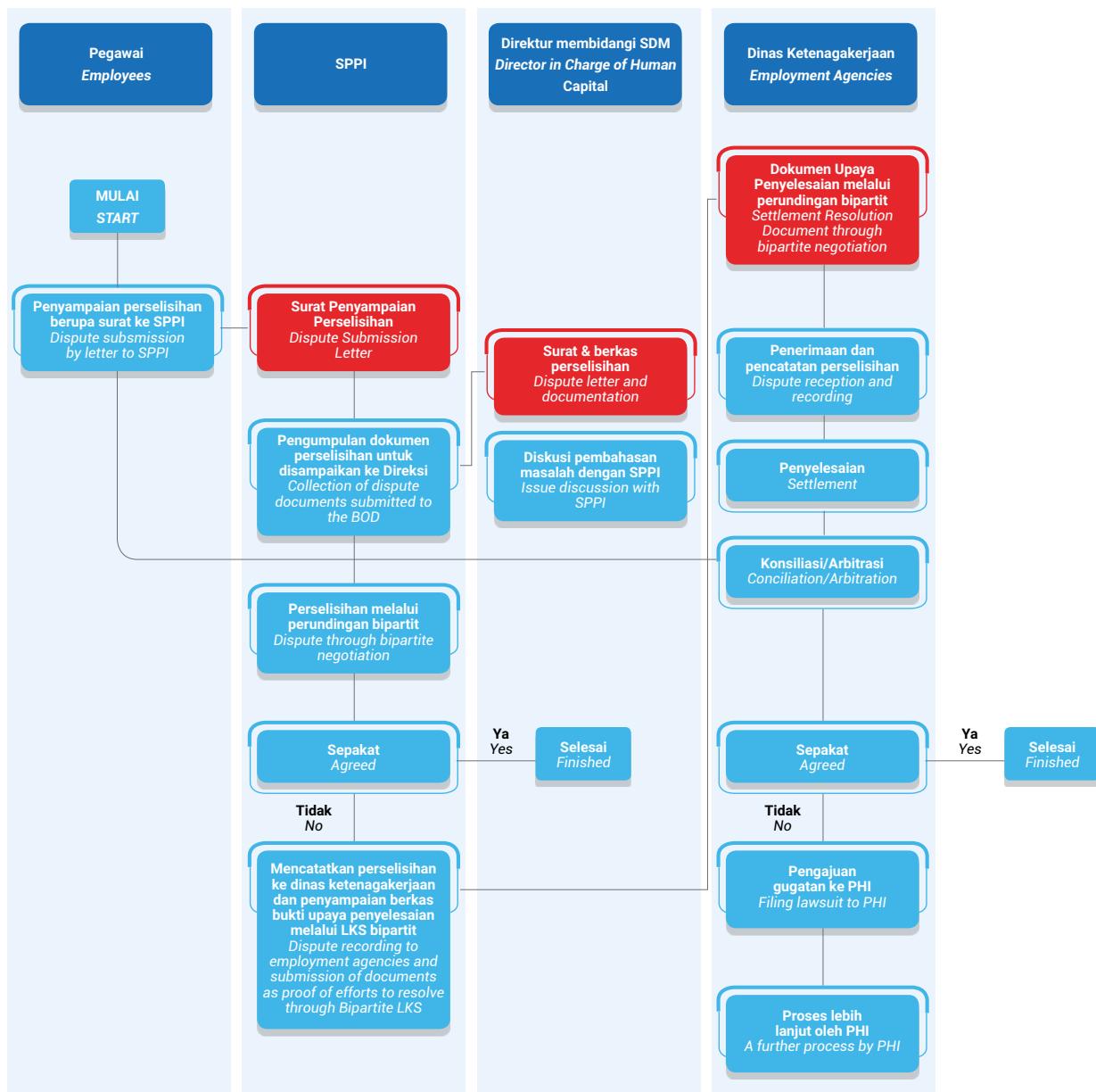
For 2020, the Company terminated ... employees with the details of ... people who resigned, ... people passed away, ... people retired, ... people retired early, and ... people were dismissed due to disciplinary violations.

Mechanisms for Complaint on Manpower Issue

The Company provides a means of complaint on labor issues that can be used by all employees to submit complaints, suggestions, and recommendations. The mechanism is carried out in accordance with internal regulations, while still taking into account the provisions of the applicable laws/regulations, especially those related to employment. Furthermore, the complaint mechanism for labor issues includes disputes that occur within the Company's internal scope, consisting of the following settlement lines:



ALUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL THE FLOW OF INDUSTRIAL DISPUTE SETTLEMENT



Karyawan Perseroan yang ingin menyampaikan aduan atau perselisihan dapat secara langsung menemui SPPI dengan membawa surat dan dokumen pendukung terkait, yang nantinya akan menjadi bahan pembahasan oleh SPPI. Hasil pembahasan internal pada tahap ini akan diteruskan menuju Direktur yang membidangi SDM untuk didiskusikan sebagai bahan pelaksanaan penyelesaian perselisihan melalui perundingan bipartit.

Employees of the Company who wish to submit complaints or disputes can directly meet SPPI by bringing related supporting letters and documents, which will later be used as material for discussion by SPPI. The results of internal discussions at this stage will be forwarded to the Director in charge of HR to be discussed as material for implementing dispute resolution through bipartite negotiations.



Setelah itu, akan dilakukan perundingan bipatrit dengan pegawai, SPPI, dan Direksi/Manajemen. Jika melalui perundingan tersebut kemudian tidak tercapai kesepakatan, maka SPPI atau kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk mencatatkan perselisihan ke instansi yang membidangi ketenagakerjaan, dengan menyertakan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa perundingan bipatrit telah dilakukan guna menyelesaikan perselisihan tersebut.

Kesehatan Kerja

Penyediaan Fasilitas Kesehatan

Perseroan menyediakan akses pada fasilitas serta pelayanan kesehatan bagi karyawan. Hal tersebut dilaksanakan sebagai wujud pemenuhan tanggung jawab Perseroan, sekaligus upaya memberikan rasa aman serta situasi yang kondusif bagi karyawan. Akses pada fasilitas dan pelayanan kesehatan bagi karyawan, di antaranya:

1. Perseroan memfasilitasi keikutsertaan karyawan dalam BPJS Kesehatan, meliputi akses terhadap fasilitas rawat inap dan rawat jalan;
2. Pemberian tunjangan, berupa pemeriksaan kesehatan secara berkala serta penggantian biaya untuk pemeriksaan, pembelian kacamata, dan alat bantu dengar;
3. Pemeriksaan kesehatan (*medical check-up*) bagi karyawan, meliputi karyawan yang telah purnatugas, sesuai Peraturan Direksi No. PER.0043/KP.0606/HOFC-2018 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Pegawai dan Pensiun;
4. Perseroan memberikan fasilitas kepada karyawan untuk mengikuti sejumlah seminar kesehatan, baik yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal.

Keselamatan Kerja

Penciptaan Budaya K3

Perseroan berupaya secara terus-menerus untuk mendorong terlaksananya penerapan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam setiap aspek kegiatan operasional yang dijalankan. Hal tersebut dilaksanakan melalui berbagai dukungan serta langkah kebijakan meliputi beberapa sektor, di antaranya:

After that, bipatriate negotiations will be held with employees, SPPI, and the Board of Directors/Management. If an agreement is not reached through these negotiations, then the SPPI or both parties have the obligation to register the dispute with the agency in charge of manpower, by attaching documents that prove that bipatriate negotiations have been carried out to resolve the dispute.

Occupational Health

Provision of Health Facilities

The Company provides access to health facilities and services for employees. This is carried out as a form of fulfilling the Company's responsibilities, as well as an effort to provide a sense of security and a favorable situation for employees. Access to health facilities and services for employees are as follows:

1. The Company facilitates employee participation in BPJS Kesehatan, including access to inpatient and outpatient facilities;
2. Provision of allowances, in the form of regular medical check-ups and reimbursement of costs for examinations, purchase of glasses, and hearing aids;
3. Medical check-up for employees, including employees who have retired, in accordance with Board of Directors Regulation No. PER.0043/KP.0606/HOFC-2018 concerning Health Services for Employees and Pensions;
4. The Company provides facilities for employees to attend a number of health seminars, both internally and externally.

Occupational Safety

OHS Culture Creation

The Company continuously strives to encourage the implementation of the Occupational Health and Safety culture in every aspect of its operational activities. This is implemented through various support and policy measures covering several sectors as follows:



1. Kegiatan yang bersifat perencanaan, yaitu:
 - a. Perancangan Budaya K3 di lingkungan kerja.
 - b. Pemberian penghargaan K3.
 - c. Konvensi/Seminar/Lokakarya/Semiloka K3.
 - d. Pembentukan tim investigasi kecelakaan kerja.
 - e. Pelaksanaan kegiatan bulan K3 dengan tema sesuai ketentuan Pemerintah setiap tahunnya.
 2. Kegiatan yang bersifat promotif, yaitu:
 - a. Pemasangan bendera, spanduk, umbul-umbul, dan baliho K3.
 - b. Pameran K3.
 - c. Sosialisasi dan publikasi K3.
 - d. Aksi sosial K3.
 - e. Kegiatan Cerdas Cermat K3.
 3. Kegiatan yang bersifat implementatif, yaitu:
 - a. Penilaian penghargaan K3.
 - b. Pembinaan dan pengujian lisensi.
 - c. Pemeriksaan dan/atau pengujian objek K3.
 - d. Penanganan kasus-kasus kecelakaan kerja.
 - e. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.
 - f. Pengukuran dan pengujian lingkungan kerja.
 - g. Operasi tertib di bidang K3.
 - h. *Silent inspection* terminal/pelabuhan.
 - i. Simulasi keadaan darurat.
 - j. *Assessment* K3 pada terminal/pelabuhan.
1. Planning activities including:
 - a. Formulation of OHS Culture in the workplace;
 - b. OHS awards;
 - c. Convention/Seminar/Workshop;
 - d. Establishment of work accident investigation team;
 - e. Performing OHS Month activity with the theme specified by the Government every year
2. Promoting activities including:
 - a. Installation of OHS flag, banner, and billboard;
 - b. OHS Exhibition;
 - c. OHS dissemination and publication;
 - d. OHS Social Action;
 - e. OHS quiz.
3. Implementation activities including:
 - a. OHS awards assessment;
 - b. License development and testing;
 - c. OHS object Examination and/or testing;
 - d. Handling of work accident cases;
 - e. Employee medical examination;
 - f. Work environment measurement and testing;
 - g. OHS orderly operation;
 - h. *Silent inspection in Terminal/Ports*;
 - i. Emergency Condition Simulation;
 - j. OHS Assessment in Terminal/Ports.

Di samping itu, dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan K3, Perseroan melaksanakan program pelatihan dan pengembangan terhadap para karyawan secara rutin setiap satu tahun. Perincian pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan terkait bidang K3 untuk tahun 2020, secara lebih lanjut dapat dilihat pada subbagian Sumber Daya Manusia.

Standar dan Sarana Keselamatan Kerja

Pelindo III senantiasa melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan yang terjadi di tempat kerja, sebagai bagian dari kebijakan Perseroan untuk secara konsisten mengusahakan setiap pekerja mendapatkan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Dalam pelaksanaannya, Perseroan secara berkala memastikan bahwa aset-aset, lokasi operasional, serta fasilitas yang ada telah memenuhi standar sesuai regulasi serta peraturan/perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Moreover, to improve the quality of OHS implementation, the Company carries out training and development programs for employees regularly every year. Details of the implementation of training and development programs related to the field of OHS for 2020, further details can be seen in the Human Resources subsection.

Occupational Safety Standards and Facilities

Pelindo III always makes the necessary efforts to prevent accidents and health problems that occur in the workplace, as part of the Company's policy to consistently strive for every worker to have a safe and sound work environment. In its implementation, the Company periodically ensures that the assets, operational locations, and existing facilities meet the standards in accordance with applicable regulations and laws, particularly regarding aspects of Occupational Health and Safety.



Perseroan memiliki komitmen untuk secara konsisten melaksanakan pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara efektif. Hal tersebut dilaksanakan melalui penerapan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerapkan SMK3 sesuai peraturan serta perundang-undangan yang berlaku;
2. Meminimalisasi terjadinya risiko penyakit akibat kerja serta kecelakaan kerja, serta pengupayakan nihilnya ancaman keamanan;
3. Memastikan terpenuhinya aspek K3 pada penggunaan alat dan peralatan operasional (alat angkat dan angkut);
4. Menumbuhkan kesadaran kerja yang mengutamakan kaidah-kaidah K3 pada karyawan;
5. Melibatkan seluruh komponen Perusahaan untuk ikut terlibat serta bertanggung jawab atas terlaksananya program K3, guna tercapainya kinerja usaha yang optimal;
6. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain dalam bidang jasa kepelabuhan, terutama terkait pemenuhan aspek K3.

Sesuai ketentuan dalam peraturan/perundang-undangan yang berlaku, Perseroan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan operasional senantiasa dilaksanakan secara aman melalui penerapan standar tertinggi terhadap aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Hal tersebut telah termuat dalam Keputusan Direksi Pelindo III No. PER.91/PM.02/P.III-2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

Lebih lanjut, Perseroan menerapkan SMK3 secara menyeluruh pada 17 cabang pelabuhan dan 1 kantor pusat Perseroan. Daftar pelabuhan Perseroan dengan penerapan SMK3 beserta nomor sertifikat dan masa berlaku, dapat dilihat melalui tabel berikut:

The Company has a commitment to consistently implement effective Occupational Health and Safety management. This is carried out by:

1. Implementing SMK3 in accordance with the prevailing laws and regulations;
2. Minimizing the occurrence of occupational diseases and preventing security threats and occupational accidents;
3. Ensuring the fulfilment of OHS aspect in operational tools and equipment (lifting and conveyance tools);
4. Growing work awareness that prioritizes OHS principles in employees;
5. Involving all components of the Company to be involved and responsible for the implementation of the OHS program, in order to achieve optimal business performance;
6. Complying with laws and regulations and other requirements in the field of port services, especially related to the fulfillment of OHS aspects.

In accordance with the applicable laws/regulations, the Company ensures that operational activities is always carried out safely through the implementation of the highest standards of Occupational Health and Safety. This has been contained in the Decree of the Board of Directors of Pelindo III No. PER.91/PM.02/P.III-2017 dated December 29, 2017 concerning Guidelines for Occupational Health and Safety in the PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) environment.

Furthermore, the Company implements SMK3 as a whole in 17 port branches and the Head Office. The list of the Company's ports with the implementation of SMK3 along with the certificate number and validity period can be seen in the following table:

**Sertifikat SMK3**

Certificate of OHS Management System

No.	Cabang Pelabuhan / Port Branch	Auditor SMK3 / OHS Management System Auditor	Nomor Sertifikat / Certificate Number	Masa Berlaku / Validity Period	Keterangan / Description
1	Kantor Pusat	TUV Rheinland	No. 33 Tahun 2019 / No. 33 of 2019	29 Maret 2019 s.d. 28 Maret 2022 / March 29, 2019 to March 28, 2022	
2	Tanjung Perak				
3	Gresik	TUV Rheinland	No. 161 Tahun 2018 / No. 161 of 2018	30 Juli 2018 s.d. 30 Juli 2021 / July 30, 2018 to July 30, 2021	Dalam Proses Pembaruan / In renewal process
4	Tanjung Tembaga	TUV Rheinland	REG. SMK3.2020.TUV. SK.2307	17 September 2020 s.d.16 September 2023 / September 17 2020 to September 16, 2023	
5	Tanjung Emas				
6	TPKS	TUV Rheinland	No. 33 Tahun 2019 / No. 33 of 2019	29 Maret 2019 s.d. 28 Maret 2022 / March 29, 2019 to March 28, 2022	
7	Tanjung Intan				
8	Banjarmasin	PT Sucofindo Indonesia	REG.SMK3.2020.TUV. SK-2271	17 September 2020 s.d.16 September 2023 / September 17 2020 to September 16, 2023	
9	Sampit	TUV Rheinland	No. 161 Tahun 2018 / No. 161 of 2018	30 Juli 2018 s.d. 19 Juli 2021 / July 30, 2018 to July 19, 2021	
10	Kotabaru		REG.SMK3.2020.TUV. SK-2272	17 September 2020 s.d.16 September 2023 / September 17 2020 to September 16, 2023	
11	Kumai		REG.SMK3.2020.TUB. SK-2326		
12	Benoa	TUV Rheinland	No. 33 Tahun 2019 / No. 33 of 2019	29 Maret 2019 s.d. 29 Maret 2022 / March 29, 2019 to March 29, 2022	
13	Tenau Kupang	TUV Rheinland			
14	Lembar	TUV Rheinland	No. 33 Tahun 2019 / No. 33 of 2019	29 Maret 2019 s.d. 28 Maret 2022 / March 29, 2019 to March 28, 2022	
15	Tanjung Wangi	TUV Rheinland			
16	Celukan Bawang	TUV Rheinland	REG.SMK3.2020.TUV. SK-2305	17 September 2020 s.d.16 September 2023 / September 17 2020 to September 16, 2023	
17	Bima	TUV Rheinland	REG.SMK3.2020.TUV. SK-2308		
18	Maumere	TUV Rheinland	REG.SMK3.2020.TUV. SK-2320		
19	Bagendang	TUV Rheinland	-	-	Sertifikat Belum Keluar / Certificate Not yet available
20	Bumiharjo	TUV Rheinland	-	-	



Sarana dan Prasarana K3 di Pelindo III / OHS Facilities and Infrastructure in Pelindo III

No.	Sarana dan Prasarana K3 / OHS Facilities and Infrastructure	Jumlah / Total	Masa Berlaku / Validity Period
1	Peralatan/Mesin/Pesawat/Instalasi Peralatan / Equipment/Machinery/Device/Equipment Installation		
a.	Instalasi Penyalur Petir Gedung A / Installation of Lightning Distributor in Building A	1 Unit	Jenis/Klasifikasi: Instalasi penyalur petir elektrostatik LPI, jumlah arde dan penerima 1, tahanan sebaran R = 0,9 Ohm / Type/Classification: Installation of LPI electrostatic lightning distributor, number of groundings and recipient: 1, spreading resistance R=0,9 Ohm. Surat Pengesahan Pemakaian No. 566/148/I/436.6.12/2012 oleh Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya. Dilakukan uji berkala setiap 2 (dua) tahun sekali. Uji berkala terakhir tanggal 29 Agustus 2019 (berlaku hingga 29 Agustus 2020). / Approval Letter of Use No. 566/148/I/436.6.12/2012 by the Manpower Department of Surabaya. Periodically tested every two years. The last periodic test is 29 August 2019 (valid until 29 August 2020).
b.	Instalasi Penyalur Petir Gedung B / Installation of Lightning Distributor in Building B	1 Unit	Jenis/Klasifikasi: Instalasi penyalur petir air terminal viking V-6, jumlah arde dan penerima 1, tahanan sebaran R = 0,65 Ohm. / Type/Classification: Installation of V-6 air terminal viking lightning, number of groundings and recipient: 1, spreading resistance=0,65 Ohm. Surat Pengesahan Pemakaian No. 566/0134/I/436.6.12/2013 oleh Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya. Dilakukan uji berkala setiap 2 (dua) tahun sekali. Uji berkala terakhir terakhir tanggal 29 Agustus 2019 (berlaku hingga 29 Agustus 2020) / Approval Letter of Use No. 566/148/I/436.6.12/2012 by the Manpower Department of Surabaya. Periodically tested every two years. The last periodic test is 29 August 2019 (valid until 29 August 2020).
c.	Instalasi Penyalur Petir Gedung C / Installation of Lightning Distributor in Building C	1 Unit	Jenis/Klasifikasi: Instalasi penyalur petir air terminal viking V-6, jumlah arde dan penerima 1, tahanan sebaran R = 0,2 Ohm. / Type/Classification: Installation of V-6 air terminal viking lightning, number of groundings and recipient: 1, spreading resistance=0,2 Ohm Surat Pengesahan Pemakaian No. 566/6721/I/436.6.12/2016 oleh Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya. Dilakukan uji berkala setiap 2 tahun sekali. Uji berkala terakhir terakhir tanggal 29 Agustus 2019 (berlaku hingga 29 Agustus 2020). / Approval Letter of Use No. 566/6721/I/436.6.12/2016 by the Manpower Department of Surabaya. Periodically tested every two years. The last periodic test is 29 August 2019 (valid until 29 August 2020).
d.	Pesawat Angkat Gedung A / Lifting Device in Building A	1 Unit	Jenis/Klasifikasi: lift penumpang hyundai elevator tahun 2010, kapasitas 900 kg, 13 penumpang, tenaga listrik AC.11 KW/380 V/21 A / Type/Classification: 2010 hyundai passenger elevator, 900 kg capacity, 13 passengers, AC.11 KW/380 V/21 A of electrical energy Surat Pengesahan Pemakaian No. 566/1031/III/436.6.12/2011 oleh Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya. Dilakukan pemeriksaan berkala setiap 1 (satu) tahun sekali. Pemeriksaan berkala terakhir 30 Agustus 2019 (berlaku hingga 30 Agustus 2020).
	Jenis/Klasifikasi: lift penumpang hyundai elevator tahun 2010, kapasitas 900 kg, 13 penumpang, tenaga listrik AC.11 KW/380 V/21 A. / Type/Classification: 2010 hyundai passenger elevator, 900 kg capacity, 13 passengers, AC.11 KW/380 V/21 A of electrical energy.	1 Unit	Surat Pengesahan Pemakaian No. 566/1033/III/436.6.12/2011 oleh Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya. Dilakukan pemeriksaan berkala setiap 1 (satu) tahun sekali. Pemeriksaan berkala terakhir 30 Agustus 2019 (berlaku hingga 30 Agustus 2020). / Approval Letter of Use No. 566/1033/III/436.6.12/2011 by the Manpower Department of Surabaya. Periodic checks are conducted every year. The last periodic check is 30 August 2019 (valid until 30 August 2020).

**Sarana dan Prasarana K3 di Pelindo III / OHS Facilities and Infrastructure in Pelindo III**

No.	Sarana dan Prasarana K3 / OHS Facilities and Infrastructure	Jumlah / Total	Masa Berlaku / Validity Period
e.	Pesawat Angkat Gedung B / Lifting Device in Building B Jenis/Klasifikasi: lift penumpang hyundai elevator tahun 2013, kapasitas 900 kg, 13 penumpang, tenaga listrik 5.5 KW/380 V. / Type/Classification: 2013 hyundai passenger elevator, 900 kg capacity, 5.5 KW/380 V of electrical energy.	2 Unit / 2 Units	Surat Pengesahan Pemakaian No. 566/1433/436.6.12/2013 oleh Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya. Dilakukan pemeriksaan berkala setiap 1 tahun sekali. Pemeriksaan berkala terakhir 30 Agustus 2019 (berlaku hingga 30 Agustus 2020). / Approval Letter of Use No. 566/1433/III/436.6.12/2013 by the Manpower Department of Surabaya. Periodic checks are conducted every year. The last periodic check is 30 August 2019 (valid until 30 August 2020).
f.	Pesawat Angkat Gedung C / Lifting Device in Building C Jenis/Klasifikasi: lift penumpang hyundai elevator tahun 2016, kapasitas 1350 kg, 18 penumpang, tenaga listrik AC 7.6 KW/380 V/21 A. / Type/Classification: 2016 hyundai passenger elevator, 1,350 kg capacity, 7.6 KW/380 V/21 A of electrical energy		Surat Pengesahan Pemakaian No. 566/6745/436.6.12/2016 oleh Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya. Dilakukan pemeriksaan berkala setiap 1 tahun sekali. Pemeriksaan berkala terakhir 30 Agustus 2019 (berlaku hingga 30 Agustus 2020). / Approval Letter of Use No. 566/6745/436.6.12/2016 by the Manpower Department of Surabaya. Periodic checks are conducted every year. The last periodic check is 30 August 2019 (valid until 30 August 2020).
g.	Motor Diesel Pembangkit Listrik / Diesel Generator Jenis/Klasifikasi: Stasioner tahun 2010, daya 1029 KVA, frekuensi 50 Hz, jenis 4 tak, jumlah silinder 12 buah. / Type/Classification: 2010 Stationer, 1029 KVA power, 50 Hz frequency, 4 tax type, 12 cylinders.	1 Unit	Surat Pengesahan Pemakaian No. 566/4551/436.6.12/2013 oleh Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya. Dilakukan pemeriksaan berkala setiap 1 (satu) tahun sekali. Pemeriksaan berkala terakhir 29 Agustus 2019 (berlaku hingga 29 Agustus 2020). / Approval Letter of Use No. 566/4551/436.6.12/2013 by the Manpower Department of Surabaya. Periodically tested every year. The last periodic test is 29 August 2019 (valid until 29 August 2020).
h.	Penanggulangan Kebakaran / Fire prevention Box Hydrant di gedung A dan gedung B. / Hydrant Boxes in building A and B.		
	Tabung APAR di gedung A dan gedung B. / APAR tubes in building A and B.		
i.	Alat pelindung diri dan perlengkapan K3 / Personel protective equipment and K3 equipment Rompi paramedik/tanggap darurat, helm paramedik/tanggap darurat. / Paramedic/emergency response vest, paramedic/emergency response helmet.		
j.	Lampu senter, alat bantu pernapasan, kotak P3K, police line, dan masker. / Flashlight, breathing apparatus, first aid kit, police line, and face masks.		

**Sarana dan Prasarana K3 di Pelindo III / OHS Facilities and Infrastructure in Pelindo III**

No.	Sarana dan Prasarana K3 / OHS Facilities and Infrastructure	Jumlah / Total	Masa Berlaku / Validity Period
2	Pelayanan Kesehatan Kerja / Occupational Health Services		
	Pemeriksaan kesehatan <i>medical check-up</i> bagi karyawan sesuai dengan Peraturan Direksi No. PER.0043/KP.0606/HOFC-2018 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Pegawai dan Pensiunan. / Medical check-up for employees per the Regulation of the BOD No. PER.0043/KP.0606/HOFC-2018 on Health Services for Employees and Retired Employees.		
3	Fasilitas Penunjang Lain (Kantin/Ruang Makan, Tempat Ibadah, Rekreasi, dan Lain-Lain) / Welfare Facilities (Canteen/Dining Room, Worship Place, Recreation, and so forth).		
a.	Fasilitas kantin/ruang makan di gedung B / Canteen/dining room is provided at building B.		
b.	Fasilitas tempat ibadah di gedung A lantai 4 / Worship place is provided at building A floor 4.		
4	Standard Operational Procedure (SOP)		
	Izin bekerja bagi mitra kerja di Kantor Pusat berkaitan dengan bekerja di ketinggian, akses tegangan tinggi, menggali membongkar, pekerjaan <i>bypass</i> sistem, dll. / Work Permit for work partners at the Head Office related to working at height, access to high voltage, excavation unloading, system bypass, etc		
5	Rambu / Signs		
	Rambu-rambu sudah dibuat dan ditempatkan baik gedung A, B, dan C. / Signs have been made and placed in building A, B, and C.		

Mohon data perubahan tahun 2020.

Tingkat Kecelakaan Kerja

Informasi mengenai tingkat kecelakaan kerja dalam aktivitas operasional Pelindo III selama tahun 2020, adalah sebagai berikut:

Occupational Accident Rate

Information regarding the level of occupational accidents in Pelindo III operational activities in 2020 is as follows:

Kecelakaan Kerja / Occupational Accident

Kategori Kecelakaan / Accident Category	Tahun / Year		Upaya Mengurangi Risiko Kecelakaan / Efforts to Reduce Accident Risk
	2020	2019	
Ringan / Minor	...	2	1. Pelatihan K3 / OHS Training 2. Teknik investigasi kecelakaan / Accident Investigation Techniques
Sedang / Moderate	...	0	3. Penilaian risiko dan perbaikan berkelanjutan / Risk Assessment and Continuous Improvement
Berat / Severe	...	0	4. Perbaikan sistem dan prosedur / System and Procedure Improvement
Fatal / Fatality	...	0	5. Audit Internal SMK3L masing-masing regional / Internal SMK3L audit in each Region



Selain itu, informasi terkait insiden K3 yang terjadi di seluruh cabang Perseroan dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

In addition, information related to OHS incidents that occurred in all of the Company's branches can be seen in the table below:

Insiden K3 Cabang Pelabuhan / OHS Accident in Company Branches

No.	Cabang / Branch	2020			2019		
		Bodily Injury	Fatality	Property Damage	Bodily Injury	Fatality	Property Damage
1	Tanjung Perak	0	0	15
2	Banjarmasin				0	0	17
3	Tanjung Emas				0	0	18
4	TPKS				0	0	29
5	Gresik				0	0	0
6	Kotabaru				1	0	2
7	Tanjung Intan				0	0	2
8	Tenau Kupang				0	0	4
9	Benoa				0	0	0
10	Sampit				1	0	8
11	Tanjung Wangi				0	0	0
12	Kumai				0	0	3
13	Lembar				0	0	3
14	Tanjung Tembaga				0	0	0
15	Bima				0	0	5
16	Celukan Bawang				0	0	0
17	Maumere				0	0	4
18	Kantor Pusat				0	0	0
Jumlah					2	0	110

Mitigasi dan Hasil Audit Kecelakaan Kerja

Perseroan telah melakukan tindak lanjut terhadap kasus kecelakaan kerja, dengan melaksanakan audit investigasi secara menyeluruh. Secara umum, temuan audit dikategorikan ke dalam faktor *unsafe action* atau faktor yang diakibatkan sikap kerja yang tidak aman, serta faktor *unsafe condition* atau faktor akibat kondisi kerja yang tidak aman. Proses audit investigasi dilakukan melalui konsep *corrective action* yaitu semata-mata ditujukan untuk menelusuri akar permasalahan guna mengungkap penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Terkait hal tersebut, Perseroan senantiasa melakukan investigasi, evaluasi, serta langkah penyempurnaan sistem kerja, guna mengurangi risiko serta tingkat kecelakaan kerja yang terjadi seiring dilaksanakannya program-program pencegahan secara berkala.

Mohon konfirmasi/data tambahan.

Occupational Accident Mitigation and Audit Results

The Company has followed up on cases of occupational accidents, by carrying out a thorough investigative audit. In general, audit findings are categorized into unsafe action factors or factors caused by unsafe work attitudes, as well as unsafe conditions or factors due to unsafe working conditions. The investigative audit process is carried out through the concept of corrective action, which is solely aimed at tracing the root cause of the problem to uncover the causes of work accidents. Related to this, the Company always conducts investigations, evaluations, and steps to improve the work system to reduce the risk and rate of work accidents that occur in line with the implementation of periodic prevention programs.

Mohon konfirmasi/data tambahan.



Pencapaian CSR terkait Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3)

Sebagai tolok ukur keberhasilan Perseroan dalam melaksanakan program CSR bidang ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perseroan memperoleh sejumlah penghargaan pada bidang K3 untuk tahun 2020. Penghargaan-penghargaan tersebut adalah:

1. ...
2. ...

Dampak Kualitatif CSR terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K3)

Ketenagakerjaan

Dampak kualitatif pelaksanaan CSR bidang Ketenagakerjaan yang dilaksanakan Perseroan, meliputi indikator tingkat perputaran karyawan (*turn over*) sebagai berikut:

Tahun / Year	Tingkat Turnover / Turnover Rate
2020	...
2019	

Kemudian, pemenuhan hak-hak serta kesejahteraan pegawai juga menghadirkan dampak kualitatif berupa perolehan tingkat *Employee Engagement Index* pada penilaian *Key Performance Index (KPI)*, yang untuk tahun 2020 Perseroan memperoleh skor ... atau meningkat/ menurun dibanding tahun 2019 yang sebesar

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Dampak kualitatif yang dihadirkan atas pemenuhan tanggung jawab Perseroan bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat diukur melalui dari besaran biaya yang direalisasikan Perseroan untuk memenuhi tunjangan kesehatan pegawai, pelatihan dan pendidikan K3 bagi pegawai, serta penyediaan alat-alat K3 di tahun buku 2020. Besaran biaya yang direalisasikan Perseroan untuk tahun 2020, dapat dilihat sebagai berikut:

No.	Uraian / Description	Biaya yang Direalisasikan / Realized Budget
1	Biaya Pemenuhan Tunjangan dan Fasilitas Kesehatan	...
2	Biaya Pelaksanaan Pelatihan dan/atau Pendidikan terkait K3	
3	Biaya Penyediaan Alat-Alat K3	

CSR Achievements related to Employment, Occupational Safety and Health (OHS)

As a measure of the Company's success in implementing CSR programs in the fields of manpower, Occupational Health and Safety, the Company received a number of awards in the field of OHS for 2020. These awards are:

1. ...
2. ...

The Qualitative Impact of CSR on Manpower, Health and Safety (OHS)

Manpower

The qualitative impact of the implementation of CSR in the field of Manpower carried out by the Company includes the following indicators of employee turnover rate:

Then, the fulfillment of the rights and welfare of employees also presents a qualitative impact in the form of obtaining the Employee Engagement Index level in the Key Performance Index (KPI) assessment, which for 2020 the Company obtained a score of ... or an increase/ decrease compared to 2019 which amounted to

Occupational Health and Safety (OHS)

The qualitative impact presented on the fulfillment of the Company's responsibilities in the field of Occupational Safety and Health can be measured from the amount of costs realized by the Company to meet employee health benefits, OHS training and education for employees, as well as the provision of OHS equipment in the 2020 fiscal year. The amount of costs realized by the Company for 2020 can be seen as follows:



Sertifikasi di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Per 31 Desember 2020, sertifikasi di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku yaitu ... dan

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERKAIT BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN

Kebijakan dan Komitmen Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi pada bidang usaha penyediaan jasa kepelabuhan. Untuk itu, Perseroan memiliki kewajiban untuk secara aktif ikut memberikan kontribusi bagi masyarakat seiring pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai bagian dari pemangku kepentingan, sesuai ketentuan pada regulasi serta perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan pada Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN. Lebih lanjut, pelaksanaan tanggung jawab Perseroan bidang sosial kemasyarakatan mencakup pelaksanaan program Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Program kemitraan dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang didorong oleh pemerintah sebagai wujud kepedulian serta pemenuhan tanggung jawab BUMN terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Melalui pelaksanaan program tersebut, UMKM penerima program kemitraan diharapkan mampu tumbuh secara kuat dan mandiri, seiring peningkatan omzet (*pro growth*) serta pembukaan lapangan kerja (*pro job*) bagi masyarakat sekitar. Pada jangka panjang, pelaksanaan program kemitraan oleh Perseroan diharapkan mampu ikut mendorong upaya pengentasan kemiskinan (*pro poor*) secara berkelanjutan. Di samping itu, Perseroan melaksanakan program bina lingkungan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial masyarakat di sekitar wilayah operasional. Pelaksanaan program bina lingkungan oleh Perseroan sekaligus diharapkan dapat memberikan timbal balik yang positif berupa pembentukan *corporate image* serta persepsi yang baik, seiring tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap eksistensi Perseroan.

Certification in Occupational Health and Safety (OHS)

As of Desember 31, 2020, sertifikasi di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku yaitu ... dan

CORPORATE RESPONSIBILITY ON SOCIAL COMMUNITY

Social and Community Development Policy and Commitment

The Company is a State-Owned Enterprise (SOE) which operates in the business sector of providing port services. For this reason, the Company has an obligation to actively contribute to the community in line with fulfilling the Company's responsibilities as part of the stakeholders, in accordance with the provisions of the applicable regulations and laws. This is carried out with reference to the provisions of Law no. 19 of 2003 concerning SOE. Furthermore, the implementation of the Company's social responsibilities includes the implementation of the Partnership and Community Development Program (PKBL).

The partnership program is defined as a series of activities that are encouraged by the government as a form of concern and fulfillment of SOEs' responsibilities towards Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Through this program, MSME recipients of the partnership program are expected to be able to grow strongly and independently, along with increasing turnover (*pro growth*) and opening up employment opportunities (*pro jobs*) for the surrounding community. In the long term, the implementation of the partnership program by the Company is expected to be able to contribute to efforts to reduce poverty (*pro poor*) in a sustainable manner. In addition, the Company carries out an environmental development program as a form of concern for the social conditions of the community around the operational area. The implementation of the environmental development program by the Company is also expected to provide positive feedback in the form of the formation of a good corporate image and perception, along with the growing public awareness of the existence of the Company.



Komitmen Perseroan dalam menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan berdasar pada sejumlah ketentuan serta regulasi yang berlaku terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan PKBL, yaitu:

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 Pasal 88 tentang BUMN;
3. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
4. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN;
5. Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN;
6. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN.

Lingkup Pelaksanaan CSR

Perseroan senantiasa melakukan hal-hal yang diperlukan guna mendorong pelaksanaan program CSR bidang sosial kemasyarakatan dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Perseroan melakukan pemetaan terhadap isu-isu sosial pada masyarakat di sekitar area operasional dengan hasil sebagai berikut:

1. Akses permodalan bagi UMKM *non-bankable*;
2. Sarana dan prasarana umum;
3. Sarana ibadah;
4. Pendidikan dan/atau pelatihan masyarakat;
5. Pelestarian alam;
6. Pengentasan kemiskinan;
7. Peningkatan kesehatan; dan
8. Bantuan korban bencana alam.

Di samping itu, lingkup pelaksanaan program CSR Perseroan dirumuskan melalui upaya *monitoring* terhadap perkembangan kepentingan serta harapan masyarakat

The Company's commitment in carrying out the Partnership and Community Development Program is based on a number of applicable provisions and regulations related to the implementation of corporate social responsibility and PKBL, namely:

1. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies;
2. Law No. 19 of 2003 Article 88 on SOEs;
3. Government Regulation No. 47 of 2012 on the Social and Environmental Responsibilities of Limited Liability Companies;
4. Regulation of the Minister of SOE No. PER-09/MBU/07/2015 dated July 3, 2015 on the Partnership and Community Development Programme in SOE;
5. Regulation of the Minister of SOE No. PER-03/MBU/12/2016 dated December 16, 2016 on Amendment to Regulation of the Minister of SOE No. PER-09/MBU/07/2015 on the Partnership and Community Development Programme in SOEs;
6. Regulation of the Minister of SOE No. PER-02/MBU/7/2017 dated July 5, 2017 on the Second Amendment to Regulation of the Minister of SOE No. PER-09/MBU/07/2015 on the Partnership and Community Development Programme in SOE.

Scope of CSR Implementation

The Company always carries out the things needed to encourage the implementation of CSR programs in the social sector to be carried out effectively and on target. As part of these efforts, the Company carried out a mapping of social issues in the community around the operational area with the following results:

1. Capital access for non-bankable UMKM;
2. Public infrastructure and facilities;
3. Religious worship infrastructure;
4. Community education and/or training;
5. Nature preservation;
6. Poverty alleviation;
7. Health improvement; and
8. Aid for natural disaster victims.

In addition, the scope of implementation of the Company's CSR programs is formulated by monitoring efforts on the development of interests and expectations



sekitar, yang diharapkan mampu menjaga kualitas pemberdayaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Hasil pemetaan serta *monitoring* terhadap isu-isu terkait masyarakat di sekitar area operasional merupakan bahan pertimbangan bagi Perseroan dalam menyusun kebijakan pelaksanaan program CSR, yang telah terlaksana secara berkesinambungan sesuai *Roadmap PKBL* PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tahun 2007-2021.

Roadmap PKBL 2007-2021

Roadmap PKBL PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tahun 2007-2021 termuat melalui uraian visi-misi berikut ini:



- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Menciptakan Kawasan Kepentingan Pelabuhan Pelindo III yang Aman, Nyaman, dan Tenram.2. Mendukung Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Pesisir di Sekitar Pelabuhan.3. Mendukung Pengembangan Pariwisata Pesisir di Sekitar Kawasan Pelabuhan.4. Mendukung Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Kawasan Kepentingan Pelabuhan Guna Menjadi Masyarakat yang Sejahtera. | <ol style="list-style-type: none">1. Creating a Safe, Comfortable, and Peaceful Pelindo III Port Interest Area.2. Supporting Coastal Development and Conservation around the Port.3. Supporting Coastal Tourism Development around the Port Area.4. Supporting Community Economic Development in Port Interest Areas to Become Prosperous Communities. |
|---|---|

Struktur Pengelola PKBL Pelindo III

Perseroan melaksanakan program PKBL melalui struktur kepengelolaan sesuai Peraturan Direksi No : PER.0051/OS.01/HOFC-2020 pada tanggal 18 Maret 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Kantor Pusat. Atas ketentuan tersebut, Unit Kerja PKBL Pelindo III bekerja di bawah kewenangan Sekretaris Perusahaan serta bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Sumber Daya Manusia Perseroan.

of the surrounding community, which is expected to be able to maintain the quality of empowerment carried out in a sustainable manner. The results of mapping and monitoring of issues related to the community around the operational area are material for consideration for the Company in formulating policies for implementing CSR programs, which have been carried out continuously according to the PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) PKBL Roadmap for 2007-2021.

PKBL Roadmap for 2007-2021

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Roadmap PKBL for 2007-2021 is contained through the following description of the vision and mission:

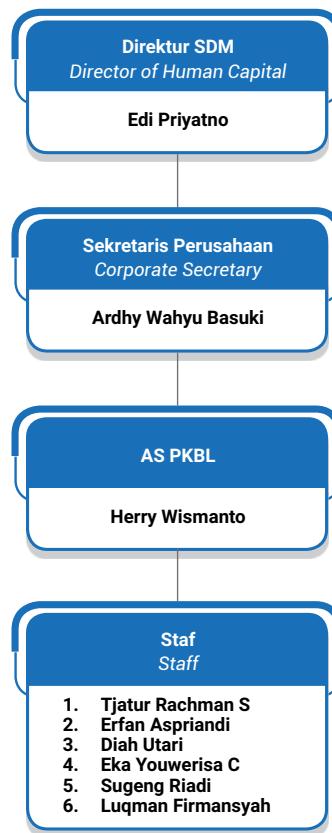
PKBL Management Structure

The Company implements the PKBL program through a management structure in accordance with the Board of Directors Regulation PER.0051/OS.01/HOFC-2020 dated March 18, 2020 regarding the Organizational Structure and Work Procedure of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Head Office. Based on these provisions, the Pelindo III PKBL Work Unit works under the authority of the Corporate Secretary and is directly responsible to the Director of Human Capital of the Company.



Lebih lanjut, struktur pengelola PKBL Pelindo III untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Furthermore, the Pelindo III PKBL management structure for 2020 is as follows



Perseroan menyalurkan Program Kemitraan melalui struktur organisasi pada setiap pelabuhan penyalur pada seluruh regional, dengan tanggung jawab pelaksanaan melekat pada bidang tugas Deputi Manager PKBL Regional. Pelabuhan penyalur Program Kemitraan terdiri atas 9 (sembilan) pelabuhan yang sekaligus berperan sebagai pembina program, yaitu:

1. Regional Jawa Timur / East Java Region
2. Regional Jawa Tengah / Central Java Region
3. Regional Kalimantan / Kalimantan Region
4. Regional Bali - Nusa Tenggara / Bali - Nusa Tenggara Region

Di samping itu, Perseroan melaksanakan program Bina Lingkungan di seluruh pelabuhan dengan mengutamakan masyarakat di sekitar wilayah kerja Perseroan.

The Company distributes the Partnership Program through an organizational structure at each port of distribution throughout the region, with the responsibility for implementation attached to the tasks of the Deputy Manager of Regional PKBL. The distribution ports of the Partnership Program consist of 9 (nine) ports which also act as program supervisors, namely:

- : Tanjung Perak
- : Tanjung Emas dan Tanjung Intan / Tanjung Emas and Tanjung Intan
- : Banjarmasin dan Sampit / Banjarmasin and Sampit
- : Benoa, Lembar, Kupang, dan Tangung Wangi / Benoa, Lembar, Kupang, and Tangung Wangi

In addition, the Company implements Community Development programs in all ports by prioritizing the community around the Company's work area.



Target CSR terkait Sosial Kemasyarakatan

Pelaksanaan program CSR bidang sosial kemasyarakatan Perseroan, mencakup pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, diarahkan sebagai upaya membangun hubungan yang harmonis dan saling memberi manfaat antara Perseroan dan masyarakat di sekitar lokasi operasional. Selain itu, pelaksanaan program yang tepat sasaran diharapkan mampu memberikan timbal balik yang positif serta berdampak secara jangka panjang dan berkelanjutan.

Program CSR yang dilaksanakan Perseroan merupakan wujud pemenuhan aspek kepatuhan terhadap peraturan/perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perlaksanaan program CSR juga merupakan bagian dari upaya Perseroan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) khususnya pada bidang pengentasan kemiskinan, serta penyediaan lapangan kerja dan pewujudan kemandirian ekonomi masyarakat.

Kegiatan CSR yang Dilakukan

Program Kemitraan

Program Kemitraan yang dijalankan Perseroan memiliki fokus pelaksanaan pada aspek pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Hal tersebut diimplementasikan melalui penyaluran pinjaman dana kemitraan, yang kemudian dapat digunakan sebagai modal kerja dan investasi. Selain itu, Perseroan juga menyalurkan bantuan berupa pelatihan manajemen usaha, bantuan pemasaran, serta bantuan pembinaan lainnya. Program Kemitraan yang dijalankan Perseroan diharapkan mampu ikut memberi kontribusi dalam upaya peningkatan kompetensi dan kapasitas UMKM, guna mendukung pertumbuhan usaha masyarakat agar tumbuh menjadi lebih tangguh dan mandiri.

Kegiatan-kegiatan dalam Program Kemitraan yang telah dijalankan Perseroan untuk tahun 2020, adalah sebagai berikut:

1. Penyaluran pinjaman ke 111 Mitra Binaan senilai Rp7,05 miliar;
2. Mengikutsertakan 2 Mitra Binaan ke 1 pameran Jatim Fair pada tanggal 22 s.d. 24 Oktober 2020;
3. Pemberian stimulus pinjaman kepada 55 Mitra Binaan terdampak pandemi dengan total pinjaman sebesar Rp3,86 miliar berupa restrukturisasi dan penundaan pinjaman.

CSR Targets related to Social Community

The implementation of the Company's CSR programs in the social sector, including the implementation of the Partnership and Community Development Program, is directed as an effort to build a harmonious and mutually beneficial relationship between the Company and the community around its operational locations. In addition, the implementation of programs that are right on target are expected to be able to provide positive feedback and have a long-term and sustainable impact.

The CSR program implemented by the Company is a form of compliance with the aspects of compliance with applicable regulations/laws. Moreover, the implementation of the CSR program is also part of the Company's efforts to support the achievement of Sustainable Development Goals, especially in the field of poverty alleviation, as well as providing employment opportunities and realizing community economic independence.

CSR Activities

Partnership Program

The Partnership Program run by the Company focuses on the aspect of economic improvement and empowerment of the surrounding community. This is implemented through the distribution of partnership fund loans, which can then be used as working capital and investment. In addition, the Company also provides assistance in the form of business management training, marketing assistance, and other coaching assistance. The Partnership Program run by the Company is expected to be able to contribute to efforts to increase the competence and capacity of MSMEs, in order to support the business growth of the community so that they grow to be more resilient and independent.

The activities in the Partnership Program that have been carried out by the Company for 2020 are as follows:

1. Allocating loans to 111 Fostered Partners in the amount of Rp7.05 billion;
2. Including 2 Fostered Partners to 1 Jatim Fair exhibition on October 22 - 24, 2020;
3. Distribution of loans stimulus to 55 Fostered Partners affected by the pandemic in the amount of Rp3.86 billion in the form of restructurization and loan delay.



Target penyaluran dana untuk Program Kemitraan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp25,3 miliar. Hingga 31 Desember 2020, penyaluran dana Program Kemitraan Perseroan telah terealisasi sebesar Rp7,05 miliar, atau mencapai 28% dari target anggaran yang ditetapkan. Uraian terperinci mengenai realisasi penyaluran dana Program Kemitraan Perseroan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

The target for disbursement of funds for the Partnership Program for 2020 was Rp25.3 billion. As of December 31, 2020, the distribution of the Company's Partnership Program funds has been realized in the amount of Rp7.05 billion, or 28% of the set budget target. A detailed description of the realization of the distribution of the Company's Partnership Program funds can be seen in the following table:

**Penyaluran Dana Program Kemitraan 2019-2020 /
2019-2020 Partnership Program Fund Distribution**

No.	Sektor Usaha Mitra Binaan / Business Sector of Fostered Partners	Realisasi Hingga 2020 / Realization as of 2020		Realisasi Hingga 2019 / Realization as of 2019	
		Jumlah Mitra Binaan / Total Partners	Jumlah Penyaluran (Rp) / Total Distribution (Rp)	Jumlah Mitra Binaan / Total Partners	Jumlah Penyaluran (Rp) / Total Distribution (Rp)
1	Industri / Industry	1.393	61.013.416.095	1.372	59.638.416.095
2	Perdagangan / Trade	3.610	119.150.082.650	3.565	116.350.082.650
3	Pertanian / Agriculture	88	20.282.500.000	84	20.062.500.000
4	Peternakan / Stockbreeding	340	11.149.000.000	332	10.589.000.000
5	Perkebunan / Plantation	27	3.925.000.000	26	3.875.000.000
6	Perikanan / Fisheries	131	3.169.500.000	127	2.889.500.000
7	Jasa / Service	1340	53.789.000.000	1.312	52.019.900.000
8	Sektor Lain-Lain / Other Sectors	31	19.910.039.408	31	19.910.039.408
Jumlah / Total		6.960	292.389.438.153	6.849	285.334.438.153

Berdasarkan data pada tabel di atas, untuk tahun 2020, sektor usaha yang paling banyak mendapat penyaluran bantuan Program Kemitraan adalah sektor perdagangan dengan jumlah akumulasi penyaluran dana hingga 31 Desember 2020 sebesar Rp119,15 miliar.

Program Kemitraan yang disalurkan Perseroan tidak semata dilaksanakan melalui pemberian dana kemitraan, tetapi juga direalisasikan melalui pelatihan dan pembinaan kepada mitra binaan. Perseroan melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembinaan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pengembangan kewirausahaan terkait. Kegiatan pelatihan dan pembinaan yang diberikan melalui Program Kemitraan merupakan wujud penyaluran modal pengetahuan (*modal capital*) sebagai upaya optimalisasi penyaluran dana yang telah dilakukan.

Based on the data in the table above, the business sector that received the most distribution of Partnership Program assistance in 2020 was the trade sector with the accumulated amount of disbursement of funds as of December 31, 2020 of Rp119.15 billion.

The Partnership Program distributed by the Company is not only implemented through the provision of partnership funds, but is also realized through training and coaching to foster partners. The Company carries out training and coaching activities in collaboration with universities and related entrepreneurship development institutions. The training and coaching activities provided through the Partnership Program are a form of distribution of knowledge capital as an effort to optimize the distribution of funds that have been carried out.



Meski demikian, Perseroan menyadari bahwa tahun 2020 merupakan tahun dengan situasi khusus berupa pandemi Covid-19 yang memberi dampak berupa keterbatasan interaksi dan mobilitas manusia, termasuk pada kegiatan penyaluran Program Kemitraan yang dijalankan Perseroan khususnya pada kegiatan pelatihan dan pembinaan mitra binaan. Atas hal tersebut, Perseroan telah melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk mendorong pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pembinaan untuk tetap dapat dilaksanakan, terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi dan sistem daring.

Program Bina Lingkungan

Program Bina Lingkungan yang dijalankan Perseroan ditujukan untuk mendorong penciptaan dampak positif secara berkelanjutan, melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tepat sasaran serta mampu secara efektif menyasar pada isu-isu sosial kemasyarakatan yang relevan. Selama tahun 2020, sesuai ketentuan dalam Keputusan Direksi No. PER-02/MBU/7/2017, Perseroan telah melaksanakan kegiatan Bina Lingkungan melalui fokus pada 7 (tujuh) sasaran, yaitu:

1. Bantuan korban bencana alam;
2. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
3. Bantuan peningkatan kesehatan;
4. Bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum;
5. Bantuan sarana ibadah;
6. Bantuan pelestarian alam;
7. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Khusus untuk tahun 2020, pelaksanaan kegiatan Bina Lingkungan juga berfokus pada penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19, meliputi bantuan kesehatan, sanitasi, serta bantuan ekonomi. Penyaluran tersebut diharapkan mampu ikut mengurangi dampak ekonomi dan kesehatan dari pandemi terhadap masyarakat di area operasional Perseroan.

Target penyaluran dana untuk Program Bina Lingkungan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp80 miliar. Hingga 31 Desember 2020, penyaluran dana Program Bina Lingkungan Perseroan telah terealisasi sebesar Rp72,93 miliar, atau mencapai 91% dari target anggaran

However, the Company is aware that 2020 was a year with a special situation in the form of the Covid-19 pandemic which has an impact in the form of limited human interaction and mobility, including the distribution of the Partnership Program carried out by the Company, especially in training and fostering partners. For this matter, the Company has made the necessary efforts to encourage the implementation of training and coaching activities to be continuously carried out, especially through the use of information technology and online systems.

Community Development Program

The Community Development Program carried out by the Company is aimed at encouraging the creation of positive impacts in a sustainable manner, through the implementation of activities that are right on target and are able to effectively target relevant social issues. Throughout 2020, in accordance with the provisions of the Decree of the Board of Directors No. PER-02/MBU/7/2017, the Company has implemented Community Development activities through a focus on 7 (seven) targets, namely:

1. Assistance to victims of natural disasters;
2. Educational and/or training assistance;
3. Health improvement assistance;
4. Assistance in developing public facilities and infrastructure;
5. Aid for religious facilities;
6. Nature conservation assistance;
7. Community social assistance in poverty alleviation.

Especially for 2020, the implementation of Community Development activities focused on distributing assistance to communities affected by the Covid-19 pandemic, including health assistance, sanitation, and economic assistance. The distribution is expected to be able to help reduce the economic and health impacts of the pandemic on the community in the Company's operational areas.

The target for distribution of funds for the Community Development Program for 2020 was Rp80 billion. As of December 31, 2020, the Company's Community Development Program funds disbursement has been realized in the amount of Rp72.98 billion, or 91% of the



yang ditetapkan. Realisasi biaya yang telah disalurkan melalui Program Bina Lingkungan hingga tahun 2020, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

set budget target. Realization of costs that have been channeled through the Community Development Program as of 2020, can be seen in the table below:

No.	Uraian / Description	Realisasi Penyaluran Dana / Realization of Fund Distribution	
		Hingga 2020 / As of 2020	Hingga 2019 / As of 2019
1	Korban Bencana Alam / Victims of Natural Disasters	47.842.922.597	6.531.821.600
2	Pendidikan dan Pelatihan / Education and Training	55.744.561.510	50.891.216.510
3	Peningkatan Kesehatan / Health Improvement	17.157.852.212	11.291.624.069
4	Sarana dan Prasarana Umum / Public Facilities and Infrastructure	62.053.442.450	54.631.811.950
5	Sarana Ibadah / Religious Facilities	65.503.193.726	56.685.315.726
6	Ketahanan Pangan / Food Security	1.199.325.525	1.199.325.525
7	Pelestarian Alam / Nature Conservation	4.602.465.700	4.213.915.700
8	Pengentasan Kemiskinan / Poverty Alleviation	56.356.613.361	52.087.805.944
9	Bantuan Pendidikan, Pelatihan Mitra Binaan / Education Aid, Training of Fostered Partners	2.302.243.267	2.302.243.267
Subtotal / Sub-total		312.762.620.348	239.835.080.291
Bina Lingkungan BUMN Peduli		11.233.348.787	11.233.348.787
Jumlah / Total		323.995.969.135	251.068.429.078

Profil Program PKBL Pelindo III

Kampoeng Lawas Maspati

Merupakan kampung wisata dengan nuansa sejarah yang telah menjadi kampung binaan Pelindo III sejak tahun 2015. Per tahun 31 Desember 2020, Perseroan telah merealisasikan penyaluran bantuan kepada Kampoeng Lawas Maspati sebesar Rp20 juta, meliputi bantuan masker serta wastafel untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Beberapa pencapaian pelaksanaan program ini dapat dilihat melalui perolehan penghargaan, meliputi penghargaan sebagai desinasi wisata andalan Kota Surabaya pada tahun 2016.

Kampung Hidroponik Simokalangan

Merupakan kampung binaan dengan konsep urban farming dan telah menjadi kampung binaan Pelindo III sejak tahun 2018. Saat ini kampung hidroponik menjadi salah satu tempat study banding pengelolaan hidroponik di Kota Surabaya. Pada tahun 2020, Perseroan memberikan pelatihan dan pendampingan senilai Rp120 juta bekerjasama dengan PDPM-DKPU ITS.

Profile of Pelindo III PKBL Program

Lawas Maspati Village

A tourist village with historical nuances that has become a target village of Pelindo III since 2015. As of December 31, 2020, the Company has distributed Rp20 million , including the provision of masks and sink to tackle the spread of COVID-19. Some of the achievements of this program can be seen through the acquisition of awards, including the award as a mainstay tourist destination in Surabaya in 2016.

Simokalangan Hydroponic Village

It is a fostered village with a urban farming concept and has been a fostered village of Pelindo III since 2018. Currently, the hydroponic village becomes one of the place for hydroponic management comparative study in Surabaya. In 2020, the Company provided training and mentoring amounted to Rp120 million by collaborating with PDPM-DKPU ITS.



Kampung Kefir

Merupakan kampung binaan Pelindo III dengan potensi pada industri susu kefir. Kampung Kefir berlokasi di Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan. Perseroan telah memberikan pelatihan pada Kampung Kefir, melalui pembentukan 5 (lima) kader warga yang dapat memproduksi susu kefir. Selain memproduksi susu kefir, masyarakat di kampung tersebut juga didorong untuk dapat peduli pada pengolahan serta pemanfaatan sampah melalui keberadaan bank sampah. Dari aktivitas tersebut, Kampung Kefir memiliki produk andalan berupa suvenir berbahan unsur limbah plastik. Penyaluran Program Bina Lingkungan oleh Perseroan mencakup penyelenggaraan pelatihan pengolahan sampah rumah tangga menjadi suvenir yang memiliki nilai jual.

Desa Panglipuran

Merupakan desa wisata binaan Pelindo III sejak tahun 2015 yang terletak di Provinsi Bali. Bantuan yang disalurkan oleh Perseroan meliputi sarana dan prasarana umum, berupa toilet, perbaikan gapura-gapura kampung, dan perbaikan berugak. Hingga 2020, Desa Panglipuran telah dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia serta menjadi salah satu destinasi wisata dengan kunjungan wisatawan asing serta domestik.

Dampak Kualitatif CSR terkait Sosial Kemasyarakatan

Melalui pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Perseroan diharapkan mampu ikut berkontribusi melalui pemberian manfaat kepada masyarakat, yang merupakan bagian dari pemangku kepentingan. Dampak-dampak kualitatif yang dapat diukur atas pelaksanaan PKBL Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Tingkat penyaluran dana Program Kemitraan, yang per 31 Desember 2020 telah terealisasi sebesar Rp7,05 miliar, dengan dampak berupa peningkatan kapasitas finansial serta ekonomi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi mitra binaan;
2. Tingkat Penyaluran dana Program Bina Lingkungan, yang per 31 Desember 2020 telah terealisasi sebesar Rp72,93 miliar, dengan dampak berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Kefir Villate

A fostered village with potential in the kefir milk industry. Kefir Village is located in Gundih Sub-district, Bubutan District. The Company has provided training to Kefir Village, through the establishment of 5 (five) cadres of residents that can produce kefir milk. In addition to producing kefir milk, the people in the village are also encouraged to care about the processing and utilization of waste through the existence of a waste bank. From these activities, Kefir Village has a mainstay product in the form of souvenirs made from plastic waste elements. The distribution of the Community Development Program by the Company includes the implementation of training in processing household waste into souvenirs that have a selling value.

Panglipuran Village

A tourist village assisted by Pelindo III since 2015 which is located in Bali Province. The assistance provided by the Company includes public facilities and infrastructure, in the form of toilets, repairing village gates, and repairing berugaks. As of 2020, Panglipuran Village has been named the cleanest village in the world and has become one of the tourist destinations with foreign and domestic tourists visiting.

Qualitative Impact of CSR related to Social Community

Through the implementation of the Partnership and Community Development Program (PKBL), the Company is expected to contribute through providing benefits to the community, which is part of the stakeholders. The qualitative impacts that can be measured on the implementation of the Company's PKBL are as follows:

1. Distribution of Partnership Program funds as of December 31, 2020 was Rp7.05 billion that increased financial and economic capacity on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) fostered by the Company;
2. Distribution of the Community Development Program funds as of December 31, 2020 was Rp72.93 billion that increased the welfare of the surrounding community.



Selain itu, dampak kualitatif dari pelaksanaan CSR bidang sosial kemasyarakatan oleh Perseroan tercermin melalui manfaat yang telah dapat dirasakan, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Akses permodalan bagi UKM binaan Pelindo III yang belum *bankable*.
2. Perluasan pangsa pasar produk-produk mitra binaan.
3. Peningkatan perekonomian masyarakat pada program kampung binaan Perusahaan.
4. Sarana dan prasarana umum yang layak.
5. Sarana dan prasarana ibadah masyarakat yang layak.
6. Tempat tinggal dan sarana sanitasi yang layak bagi warga kurang mampu.
7. Membantu Pemerintah untuk menekan harga kebutuhan pokok serta meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN KEPADА PELANGGAN

Kebijakan CSR terkait Pelanggan

Perseroan menyadari bahwa pemenuhan tanggung jawab kepada pelanggan sebagai unsur dalam pemangku kepentingan merupakan sesuatu yang penting, serta memberikan pengaruh yang signifikan dalam keseluruhan upaya peningkatan keberhasilan usaha Perseroan. Atas pemahaman tersebut, Perseroan berkomitmen untuk melakukan berbagai langkah yang diperlukan untuk menjaga kepercayaan dan loyalitas pelanggan secara berkelanjutan. Untuk menjaga pelaksanaannya, Perseroan secara berkala melaksanakan Survei Kepuasan Pelanggan terhadap produk layanan yang diberikan Perseroan. Seiring hal tersebut, sebagai pelaksanaan prinsip transparansi kepada pelanggan, Perseroan memenuhi tanggung jawab melalui penyediaan akses informasi serta data publik Perseroan.

Target CSR terkait Pelanggan

Target pelaksanaan CSR kepada pelanggan oleh Perseroan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu dan tepat sasaran, seperti yang telah disepakati dalam kontrak kerja.

Furthermore, the qualitative impact of the implementation of CSR in the social sector by the Company is reflected in the benefits as follow:

1. Capital access for Pelindo III-assisted UKM that are not yet bankable.
2. Market share expansion of development partner products.
3. Community economy improvement in the Company's assisted village programme.
4. Adequate public infrastructure and facilities.
5. Adequate community religious facilities and infrastructures.
6. Adequate housing and sanitation facilities for underprivileged residents.
7. Assisting the Government to reduce the price of basic needs and improve the living standards of the poor.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON CUSTOMERS

CSR Policy on Customers

The Company is aware that the fulfillment of responsibilities to customers as an element in the stakeholders is vital and gives a significant influence in the overall efforts to increase the success of the Company's business. Based on this understanding, the Company is committed to taking the necessary steps to maintain customer trust and loyalty on an ongoing basis. To maintain its implementation, the Company periodically conducts a Customer Satisfaction Survey on the service products provided by the Company. Along with this, as an implementation of the principle of transparency to customers, the Company fulfills its responsibilities through providing access to information and public data of the Company.

CSR Target on Customers

Targets of implementing CSR to customers by the Company include:

1. Completing work on time and on target, as agreed in the employment contract.



2. Memenuhi kesesuaian spesifikasi QHSE.
3. Memenuhi administrasi kontrak secara baik dan sesuai prosedur.
4. Menjalin hubungan kerja sama yang sinergis dan harmonis dengan pelanggan.
5. Memenuhi kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.
6. Melaksanakan pekerjaan seiring pemenuhan tanggung jawab dan kedulian terhadap aspek-aspek lain, meliputi kedulian terhadap lingkungan.

Guna mengukur target pemenuhan tanggung jawab terhadap pelanggan, Perseroan secara berkala melaksanakan survei kepuasan pelanggan melalui indikator-indikator yang telah ditetapkan. Selain itu, Perseroan juga secara berkala melakukan pengukuran tingkat kepuasan pelanggan melalui Indeks Kepuasan Pelanggan (*Customer Satisfaction Index*).

Kegiatan CSR yang Dilakukan

Pemenuhan Service Level Agreement/Service Level Guarantee

Sebagai salah satu sarana dan prasarana transportasi, pelabuhan memiliki peran strategis untuk mendukung sistem transportasi sebagai titik simpul hubungan antardaerah atau negara, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. Atas pemahaman tersebut, Perseroan menyadari bahwa peningkatan efisiensi serta akumulasi komoditas perdagangan *hinterland* bagi pelabuhan merupakan sesuatu yang penting.

Secara umum, terdapat 3 (tiga) tolok ukur utama yang digunakan dalam pemberian pelayanan di pelabuhan, yaitu:

1. *Quality of Services* (kepastian, keamanan, keselamatan, dan kelancaran);
2. *Cost* (tarif yang wajar);
3. *Delivery* (kecepatan, produktivitas).

Di samping itu, terdapat komponen lain sebagai tolok ukur yang juga penting dalam keseluruhan upaya memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna pelabuhan, yaitu penerapan *Services Level Guarantee* (SLG). SLG merupakan standar jaminan pelayanan minimal dari suatu jasa kepelabuhan pada pelabuhan tertentu, yang diungkap secara terbuka kepada seluruh

2. Meeting compliance with QHSE specifications.
3. Fulfilling contract administration properly and according to procedures.
4. Establishing a synergistic and harmonious cooperative relationship with customers.
5. Meeting the adequacy of the required resources.
6. Carrying out work in line with the fulfillment of responsibilities and concern for other aspects, including concern for the environment.

To measure the target of fulfilling responsibility to customers, the Company periodically conducts customer satisfaction surveys through predetermined indicators. Moreover, the Company also periodically measures the level of customer satisfaction through the Customer Satisfaction Index.

CSR Activities

Fulfillment of Service Level Agreement/Service Level Guarantee

As one of the transportation facilities and infrastructure, ports have a strategic role to support the transportation system as a point of connection between regions or countries, as well as a place for intra and intermodal transportation. Based on this understanding, the Company is aware that increasing efficiency and accumulation of hinterland trade commodities for ports is important.

In general, there are 3 (three) main benchmarks used in the provision of services at ports, namely:

1. *Quality of Services* (certainty, security, safety, and smoothness);
2. *Cost* (reasonable rate);
3. *Delivery* (speed, productivity).

Furthermore, there are other components as benchmarks that are also important in the overall effort to provide the best service for port users, namely the implementation of the *Services Level Guarantee* (SLG). SLG is a minimum service guarantee standard of a port service at a certain port, which is disclosed openly to all port service users. In this regard, the *Services Level Agreement* (SLA) is an



pemakai jasa kepelabuhan. Terkait hal tersebut, *Services Level Agreement* (SLA) merupakan perjanjian antara General Manager cabang tertentu dengan pengguna jasa yang berisi mengenai kondisi SLG dan kompensasi yang diberikan.

Bagi Perseroan, kepuasan pelanggan adalah fokus utama serta prioritas yang wajib terpenuhi. Penerapan SLG dan SLA merupakan sesuatu yang penting dan senantiasa menjadi perhatian Perseroan. Perseroan secara konsisten melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk terus meningkatkan kualitas layanan, biaya, serta kuantitas pengiriman guna menjaga kepuasan pelanggan setia, yang jumlahnya diharapkan terus bertambah dari tahun ke tahun. Setiap wilayah kerja cabang pelabuhan Perseroan diperkenankan untuk memiliki SLA/SLG tersendiri, mengacu pada Undang-Undang No. 17 tahun 2008.

Lebih lanjut, Perseroan melaksanakan serta menerapkan SLG/SLA dengan mengacu pada sejumlah ketentuan sebagai berikut:

1. Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentang Standar Kinerja Pelayanan Jasa Kepelabuhan;
2. RJPP Pelindo III;
3. RKAP tahun 2020;
4. Kontrak manajemen antara Direksi dan Pemegang Saham berupa KPI tahun 2020.

Perseroan melakukan penyesuaian tarif pelayanan jasa kepelabuhan secara berkala, setiap 2 (dua) tahun. Hal tersebut dilakukan melalui persetujuan yang diberikan setelah Perseroan dinyatakan memenuhi standar kinerja yang ditentukan oleh Kementerian Perhubungan. Terkait hal tersebut, perhitungan tarif kerja sama pengusahaan properti ditetapkan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), atau harga pasar yang berlaku pada setiap daerah. Setiap pengguna jasa yang membutuhkan informasi atau hendak mengajukan pertanyaan terkait tarif pelayanan Perseroan dapat menghubungi Dinas Komersial pada masing-masing pelabuhan cabang.

agreement between the General Manager of a particular branch and the service user which contains the conditions of the SLG and the provided compensation.

For the Company, customer satisfaction is the main focus and priority that must be met. The implementation of SLG and SLA is vital and is always taken into account by the Company. The Company consistently takes the necessary steps to continuously improve service quality, cost, and delivery quantity in order to maintain the satisfaction of loyal customers, whose number is expected to continue to grow from year to year. Each port branch working area of the Company is allowed to have its own SLA/SLG, referring to Law nNo. 17 of 2008.

Furthermore, the Company implements SLG/SLA with reference to a number of provisions as follows:

1. Decree of the Directorate General of Sea Transportation concerning Port Services Performance Standards;
2. Pelindo III RJPP;
3. 2020 RKAP;
4. Management contract between the Board of Directors and Shareholders, in the form of KPI 2020.

The Company adjusts port service tariffs every 2 (two) years. This is conducted through the approval given after the Company is declared to meet the performance standards determined by the Ministry of Transportation. In this regard, the calculation of the tariff for property concessions is determined based on the Tax Object Selling Value (NJOP), or the prevailing market price in each region. Every service user who needs information or wish to ask questions regarding the Company's service rates can contact the Commercial Service at each branch port.



Penyediaan Media Keluhan Pelanggan

Perseroan menyediakan sarana bagi pelanggan untuk menyampaikan respons terkait mutu produk layanan, dukungan pelanggan, serta transaksi layanan. Beberapa sarana yang dapat digunakan terkait hal tersebut adalah sebagai berikut:



	Alamat Kantor Pusat Perusahaan	Jl. Perak Timur No. 610, Surabaya 60165, Indonesia
	Situs Web	https://www.pelindo.co.id/
	Telepon	+62 31 3298631
	Faksimile	+62 31 3295207
	Email	humas@pelindo.co.id

Selain itu, respons pelanggan terhadap mutu produk layanan juga dapat disampaikan secara langsung pada kesempatan *customer gathering*, *Focus Group Discussion* (FGD), serta melalui *Customer Relationship Officer* (CRO).

Lebih lanjut, Survei Analisis Kebutuhan Pengguna Jasa Layanan, Survei Kepuasan Pelanggan, dan alur penanganan keluhan pelanggan dalam Perusahaan dilakukan melalui Surat, Kotak Saran dan Kartu Saran, Telepon dan Faksimile, Surel, dan SMS dengan langkah sebagai berikut:

1. Pelanggan mengajukan keluhan melalui media keluhan;
2. Tim keluhan pelanggan menerima dan mencatat semua keluhan pelanggan ke dalam *logbook*;
3. Tim keluhan pelanggan melakukan verifikasi keluhan pelanggan;
4. Tim keluhan pelanggan memberikan jawaban atas keluhan pelanggan apabila penyelesaiannya kurang dari 1x24 jam;
5. Apabila penyelesaian keluhan pelanggan memerlukan koordinasi dengan Kantor Pusat Perusahaan/Instansi terkait, tim keluhan pelanggan tetap memberikan tanggapan dalam waktu 1x24 jam, sebelum mengundang pelanggan untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut;

Customer Complaint Media

The Company provides a means for customers to provide feedback regarding the quality of service products, customer support, and service transactions. Some of the media that can be used in this regard are as follows:

In addition, customer responses to the quality of service products can also be delivered directly at customer gatherings, Focus Group Discussions (FGD), and through the Customer Relationship Officer (CRO).

Furthermore, Survey of Service Users' Needs Analysis, Customer Satisfaction, and the flow of customer complaint handling in the Company are conducted through Letter, Suggestion Box and Suggestion Card, Telephone and Facsimile, E-mail, and SMS are described as follows:

1. Customers file complaints through complaint media;
2. Customer complaint team receives and records all customer complaints in the logbook;
3. The customer complaint team verifies the customer complaints;
4. The customer complaint team responds to customer complaints if the completion is less than 1x24 hours;
5. If the completion of the customer complaints requires coordination with the Company Head Office/Related Institution, the customer complaint team shall remain to respond within 1x24 hours before inviting the customers for further discussions;



6. Tim keluhan pelanggan melakukan pemantauan pelaksanaan perbaikan yang tertuang dalam *logbook* keluhan sesuai dengan jadwal perbaikan yang ditetapkan;
7. Tim keluhan pelanggan melakukan pencatatan keluhan pelanggan, rekapitulasi, dan melakukan pemantauan penyelesaian keluhan pelanggan melalui aplikasi www.crm.pelindo.co.id.

Kepuasan Pelanggan

Perseroan melakukan pengukuran tingkat kepuasan pelanggan secara berkala setiap 1 (satu) tahun, yang dilakukan melalui survei terhadap jenis-jenis pelayanan pelabuhan yaitu:

1. Pelayanan jasa kapal.
2. Pelayanan barang.
3. Pelayanan bongkar muat.
4. Pelayanan terminal penumpang.
5. Vendor.

Analisis yang dilakukan terhadap Survei Kepuasan Pelanggan merupakan upaya Perseroan untuk mengetahui nilai kepuasan pelanggan, nilai loyalitas, serta mengukur tingkat keterikatan (*engagement*) pelanggan terhadap layanan Perseroan. Survei kepuasan pelanggan dilakukan atas sejumlah indikator kepuasan pelanggan, meliputi rata-rata harapan (*Importance*), ratarata pelayanan yang dirasakan pelanggan (*Performance*), nilai GAP, *Customer Satisfaction Index* (CSI), serta keterangan dari nilai CSI.

Hasil akumulatif kualitas pelayanan pada 16 cabang Perseroan, 1 Unit Pengusahaan Perusahaan (TPKS), dan kantor pusat Perseroan untuk tahun 2020, adalah sebagai berikut:

6. The Customer complaint team monitors the improvement implementation contained in the complaint logbook following the specified schedule;
7. The Customer complaint team records, recapitulates, and monitors the customer complaint settlement through the app in www.crm.pelindo.co.id.

Customer Satisfaction

The Company measures the level of customer satisfaction every year through a survey in several types of seaport service, namely:

1. Ship Services.
2. Goods Service.
3. Loading Unloading Service.
4. Passenger Terminal Services.
5. Vendor.

The analysis conducted on the Customer Satisfaction Survey is an attempt by the Company to determine the value of customer satisfaction, the value of loyalty, as well as measuring the level of customer engagement with the Company's services. The customer satisfaction survey was conducted on a number of indicators of customer satisfaction, including average expectations (*Importance*), average customer perceived service (*Performance*), GAP scores, Customer Satisfaction Index (CSI), and information of the CSI value.

The cumulative results of service quality at the Company's 16 branches, 1 Company Concession Unit (TPKS), and the Company's head office for 2020, are as follows:

Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI) / Customer Satisfaction Index (CSI)

Indikator / Indicator	Target RKAP / RKAP Target	Realisasi / Realization	Predikat / Predicate
CSI Layanan Kapal / CSI for Ship Services
CSI Layanan Barang / CSI for Goods Services			
CSI Layanan Bongkar/Muat / CSI for Loading/Unloading Services			



**Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI) /
Customer Satisfaction Index (CSI)**

Indikator / Indicator	Target RKAP / RKAP Target	Realisasi / Realization	Predikat / Predicate
CSI Layanan Penumpang / CSI for Passenger Services			
CSI Layanan Vendor / CSI for Vendor Services			
CSI Peti Kemas / CSI for Container Services			
CSI Layanan Non-Peti Kemas / CSI for Non-Container Services			
CSI Total / Total CSI			
CSI Layanan Kapal (Nakhoda) Relatif terhadap Pesaing / CSI for Ship Services (Captain) Relative to Competitors			
CSI Layanan Bongkar/Muat Peti Kemas Relatif terhadap Pesaing / CSI for Container Loading/Unloading Services Relative to Competitors			
CSI Total Pelindo III Relatif terhadap Pesaing / Total Pelindo III CSI Relative to Competitors			

Indeks Ketidakpuasan Pelanggan (CDI) / Customer Dissatisfaction Index (CDI)

Indikator / Indicator	Target RKAP / RKAP Target	Indikator / Indicator
CDI Layanan Kapal / CDI for Ship Services
CDI Layanan Barang (Non-Peti Kemas) / CDI for Goods Services (Non-Container)
CDI Layanan Bongkar/Muat Peti Kemas / CDI for Container Loading/Unloading Services
CDI Layanan Penumpang / CSI for Passenger Services
CDI Layanan Vendor / CSI for Vendor Services
CDI Total / Total CDI		

Indeks Loyalitas Pelanggan (CLI) / Customer Loyalty Index (CLI)

Indikator / Indicator	Indikator
CLI Layanan Kapal / CDI for Ship Services	...
CLI Layanan Barang (Non-Peti Kemas) / CDI for Goods Services (Non-Container)	...
CLI Layanan Bongkar/Muat / CDI for Loading/Unloading Services	...
CLI Total / Total CLI	



Indeks Keterikatan Pelanggan (CEI) / Customer Engagement Index (CEI)

Indikator / Indicator	Indikator
CEI Layanan Kapal / CEI for Ship Services	...
CEI Layanan Barang (Non-Peti Kemas) / CEI for Goods Services (Non-Container)	...
CEI Layanan Bongkar/Muat / CEI for Loading/Unloading Services	
CLI Total / Total CEI	

Realisasi Pelayanan Keluhan Pelanggan tahun 2020

Selama tahun 2020, Pelindo III telah menerima sejumlah ... keluhan dari pelanggan. Perincian mengenai hal tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Realization of Customer Complaint Services in 2020

Throughout 2020, Pelindo III received ... complaints from customers with the following details:

Insiden K3 Cabang Pelabuhan / OHS Incidents in Port Branches

No.	Cabang Pelabuhan / Port Branch	Keluhan Pelanggan / Customer Complaint			Status Tindak Lanjut / Follow-up Status	
		Diterima / Accepted	Ditolak / Rejected	Jumlah / Total	Dalam Proses / In Process	Selesai / Settled
1	Tanjung Perak		
2	Gresik					
3	Tanjung Tembaga					
4	Tanjung Emas					
5	TPKS					
6	Tanjung Intan					
7	Tegal					
8	Banjarmasin					
9	Pulang Pisau					
10	Sampit					
11	Bagendang					
12	Kumai					
13	Bumiharjo					
14	Kotabaru					
15	Batulicin					
16	Mekarputih					
17	Benoa					
18	Tanjung Wangi					
19	Lembar					
20	Celukan Bawang					
21	Maumere					
22	Bima					
23	Badas					

**Insiden K3 Cabang Pelabuhan / OHS Incidents in Port Branches**

No.	Cabang Pelabuhan / Port Branch	Keluhan Pelanggan / Customer Complaint			Status Tindak Lanjut / Follow-up Status	
		Diterima / Accepted	Ditolak / Rejected	Jumlah / Total	Dalam Proses / In Process	Selesai / Settled
24	Kupang					
25	Waingapu					
26	Ende					
27	Kalabahi					
Jumlah / Total						
Persentase Tindak Lanjut Keluhan Pelanggan / Follow-up Status of Customer Complaint						

Standar Kualitas Produk dan Pelayanan bagi Konsumen

Perseroan secara konsisten berupaya memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada pelanggan telah memenuhi standar kualitas terbaik yang berlaku. Sebagai jaminan atas hal tersebut, Perseroan telah melengkapi sertifikasi mutu layanan berdasarkan ISO 9001, ISO 14001, serta ISPS Code.

Product and Service Quality Standards for Consumers

The Company consistently strives to ensure that the services provided to customers meet the best applicable quality standards. To that end, the Company has completed service quality certifications based on ISO 9001, ISO 14001, and the ISPS Code.

Dampak Kualitatif CSR terkait Pelanggan

Pemenuhan tanggung jawab terkait pelanggan oleh Perseroan memiliki dampak secara kualitatif, yang dapat terlihat melalui perolehan pada Survei Keterikatan Pelanggan. Untuk tahun 2020, skor Survei Keterikatan Pelanggan yang diperoleh Perseroan adalah sebesar

CSR Qualitative Impact on Customer

The Company's fulfillment of its customer-related responsibilities has a qualitative impact which can be seen through the results of the Customer Engagement Survey. Score of Customer Engagement Survey for 2020 is



TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN KEPADA PEMASOK

Kebijakan CSR kepada Pemasok

Perseroan mewujudkan tanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan, mencakup pihak pemasok pada mekanisme pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Perseroan. Terkait hal tersebut, Perseroan menjalankan mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui prinsip keadilan, kejujuran, serta transparansi, sesuai standar serta peraturan/perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa acuan Perseroan dalam menyusun serta melaksanakan kebijakan pengadaan barang dan jasa antara lain:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden no. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
2. Peraturan Kepala LKPP No. 6 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Target CSR kepada Pemasok

Pelaksanaan pemenuhan tanggung jawab kepada pemasok oleh Perseroan memiliki sejumlah target, di antaranya:

1. Terciptanya proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang tertib secara administrasi maupun teknis, sesuai peraturan/perundang-undangan yang berlaku, serta perjanjian/kontrak yang telah disepakati bersama;
2. Terpenuhinya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, yaitu antara Perseroan dan pihak penyedia barang dan jasa;
3. Terjalinnya hubungan usaha yang sinergis dan harmonis antara Perseroan dan pihak penyedia barang dan jasa.

CORPORATE RESPONSIBILITY ON SUPPLIERS

CSR Policy on Suppliers

The Company is aware of its responsibilities to all stakeholders, including suppliers in the mechanism for the procurement of goods and services. In this regard, the Company operates a mechanism for the procurement of goods and services through the principles of fairness, honesty, and transparency, in accordance with applicable standards and regulations/laws.

Some of the Company's references in formulating and implementing policies for the procurement of goods and services include:

1. Regulation of the President of Republic of Indonesia No. 70 of 2012 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation No. 54 of 2010 concerning the Procurement of Goods/Services;
2. Regulation of the Head of LKPP No. 6 of 2012 concerning Technical Instructions for Presidential Regulation No. 70 of 2012 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation No. 54 of 2010 concerning Government Procurement of Goods/Services.

CSR Target to Suppliers

The Company's fulfillment of its responsibilities to suppliers has a number of targets, including:

1. The creation of processes and mechanisms for the procurement of goods and services that are administratively and technically orderly, in accordance with applicable regulations/laws, as well as mutually agreed agreements/contracts;
2. The fulfillment of rights and obligations between the two parties, namely between the Company and the suppliers of goods and services;
3. Establishing a synergistic and harmonious business relationship between the Company and the suppliers of goods and services.



Kegiatan CSR yang Dilakukan

Sebagai wujud pemenuhan tanggung jawab Perseroan kepada pihak penyedia barang dan jasa, Perseroan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberlakukan proses pemilihan penyedia barang dan jasa berdasarkan kualifikasi dan kriteria administrasi maupun teknis yang diperlukan, sesuai regulasi yang berlaku;
2. Memantau dan mengevaluasi kinerja pemasok dengan memperhatikan perjanjian yang telah disepakati bersama, baik dalam segi ketepatan waktu serta ketepatan jumlah barang/jasa;
3. Memberikan kesempatan yang adil kepada pemasok melalui pemberian undangan kepada lebih dari satu calon pemasok;
4. Menjunjung asas transparansi dengan memberikan pengumuman secara terbuka, baik di lingkup internal Perseroan maupun di lingkup eksternal, hingga sampai kepada pihak calon pemasok;
5. Mematuhi komitmen untuk menjaga kerahasiaan dokumen guna menghindari terjadinya indikasi penyimpangan, serta untuk menjaga nilai kepatuhan antara kedua belah pihak.

CSR Activities

As a form the Company's responsibilities to the suppliers of goods and services, the Company:

1. Implement the process of selecting suppliers of goods and services based on the necessary administrative and technical qualifications and criteria, in accordance with applicable regulations;
2. Monitor and evaluate the performance of suppliers by taking into account the agreements that have been mutually agreed, both in terms of timeliness and accuracy of the amount of goods/services;
3. Provide fair opportunities to suppliers by giving invitations to more than one potential supplier;
4. Uphold the principle of transparency by making announcements openly, both in the Company's internal scope and externally, to the potential suppliers;
5. Comply with the commitment to maintaining the confidentiality of documents in order to avoid indications of irregularities, as well as to maintain the value of compliance between the two parties.